

REVIVING ASSETS, MAXIMIZING POTENTIAL

REVITALISASI ASET,
MEMAKSIMALKAN POTENSI

Tentang Laporan Tahunan 2024

About the 2024 Annual Report

Selamat datang pada Laporan Tahunan PT Perusahaan Pengelola Aset Tahun Buku 2024 dengan tema “Reviving Assets, Maximizing Potential.” Tema tersebut dipilih berdasarkan analisis dan kajian yang mendalam atas data serta perkembangan bisnis Perseroan sepanjang tahun 2024, sekaligus mencerminkan komitmen untuk mengoptimalkan potensi aset dalam mendukung keberlanjutan usaha Perseroan ke depan.

Penyusunan Laporan Tahunan PT Perusahaan Pengelola Aset Tahun Buku 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, yang menjadi pedoman terbaru dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di lingkungan BUMN Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, sebagai best practice.

Laporan Tahunan ini disusun secara sistematis dan terdiri atas beberapa bagian utama, yang mencakup Ikhtisar Kinerja, Laporan Manajemen, Profil Perusahaan, Analisis dan Pembahasan Manajemen, Tata Kelola Perusahaan, serta Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

Tujuan dari penyusunan Laporan Tahunan ini adalah untuk meningkatkan keterbukaan informasi kepada Pemegang Saham dan membangun pemahaman serta kepercayaan seluruh Pemangku Kepentingan terhadap Perseroan melalui penyediaan informasi yang akurat, seimbang, dan relevan.

Laporan Tahunan PT Perusahaan Pengelola Aset disajikan dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca serta dicetak dengan kualitas yang baik. Laporan ini juga tersedia dalam versi digital yang dapat diakses dan diunduh melalui situs resmi Perseroan: www.ptppa.com.

Welcome to the PT Perusahaan Pengelola Aset Annual Report for the Fiscal Year 2024 with the theme “Reviving Assets, Maximizing Potential.” This theme was chosen based on in-depth analysis and study of the Company’s data and business developments throughout 2024, while it also reflects a commitment to optimizing asset potential for supporting the Company’s business sustainability going forward.

Preparation of the PT Perusahaan Pengelola Aset Annual Report for the 2024 Fiscal Year refers to the Minister of SOEs Regulation no. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs Enterprises, which contains the latest guidelines for applying good governance principles in the Financial Services Authority (SEOJK) No. 16/SEOJK.04/2021 Circular Letter concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies, as best practices.

This Annual Report is systematically compiled and consists of several sections, including Performance Overview, Management Report, Company Profile, Management Discussion and Analysis, Corporate Governance, and Social and Environmental Responsibility.

The purpose of preparing this Annual Report is to improve information transparency to Shareholders and build understanding and trust of all Stakeholders towards the Company through the provision of accurate, balanced, and relevant information.

The PT Perusahaan Pengelola Aset Annual Report is presented in two languages, namely Indonesian and English, using easy-to-read fonts and size of letters and printed with good quality. This report is also available in a digital version that can be accessed and downloaded through the Company’s official website: www.ptppa.com.

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Disclaimer and Limitation of Liability

Laporan Tahunan PT Perusahaan Pengelola Aset (“PPA”) Tahun Buku 2024 ini memuat informasi mengenai kondisi keuangan, hasil operasional, kebijakan, proyeksi, rencana, strategi, serta tujuan Perseroan yang tergolong sebagai pernyataan ke depan (forward-looking statements) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali jika dinyatakan secara eksplisit sebagai data historis.

Pernyataan-pernyataan ke depan tersebut mengandung risiko dan ketidakpastian yang dapat menyebabkan hasil aktual berbeda secara material dari yang diantisipasi atau dinyatakan dalam Laporan ini. Penyusunan pernyataan-pernyataan prospektif dilakukan berdasarkan berbagai asumsi atas kondisi saat ini dan ekspektasi terhadap kondisi masa depan serta lingkungan bisnis tempat PPA beroperasi. Oleh karena itu, PPA tidak memberikan jaminan bahwa hasil atau kinerja aktual akan sepenuhnya sesuai dengan yang diharapkan.

Laporan Tahunan ini menggunakan istilah “PPA” untuk merujuk pada PT Perusahaan Pengelola Aset, sebagai entitas yang menjalankan kegiatan usaha utama di bidang pengelolaan aset.

This PT Perusahaan Pengelola Aset (“PPA”) Annual Report for the 2024 Fiscal Year contains information on the financial condition, operating results, policies, projections, plans, strategies, and objectives of the Company that are classified as forward-looking statements in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, unless explicitly stated as historical data.

These forward-looking statements involve risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those anticipated or expressed in this Report. The preparation of forward-looking statements is based on assumptions regarding current conditions and expectations regarding future conditions and the business environment in which PPA operates. Therefore, PPA cannot guarantee the actual results or performance will be in accordance with expectations.

This Annual Report uses the term “PPA” to refer to PT Perusahaan Pengelola Aset, as the entity that carries out its main business in the field of asset management.

Penjelasan Tema

Theme Explanation



“Reviving Assets, Maximizing Potential”

Revitalisasi Aset, Memaksimalkan Potensi

Tahun 2024 menjadi babak penting dalam perjalanan transformasi PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA sebagai institusi strategis dalam ekosistem BUMN. Mengemban mandat untuk mengelola dan mengoptimalkan aset negara, PPA terus memperkuat perannya sebagai agen restrukturisasi dan akselerator nilai yang memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi nasional.

Melalui pendekatan yang adaptif, inovatif, dan kolaboratif, PPA tidak hanya fokus menghidupkan kembali aset-aset yang belum produktif, tetapi juga mengembangkan potensi tersembunyi dalam portofolio aset dan investasi yang dikelola. Upaya ini dijalankan dengan semangat transformasi dan visi jangka panjang, guna menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan.

Sepanjang 2024, PPA menunjukkan komitmen kuat dalam mengelola aset negara secara strategis. Dengan berfokus pada revitalisasi BUMN yang dikelola, PPA menangkap peluang-peluang baru yang relevan dengan kebutuhan pasar. Transformasi Lokananta menjadi Creative & Commercial Hub, pengembangan ToWork Coworking, serta penajakan berbagai kemitraan strategis menjadi bagian dari langkah nyata dalam menghidupkan aset sekaligus membuka jalan menuju pertumbuhan baru.

Tak hanya itu, PPA juga terus memperkuat kontribusinya melalui penanganan Non Performing Loan, serta Special Situation Fund (SSF) dan advisory dalam sektor-sektor vital seperti teknologi informasi, galangan kapal, manufaktur, transportasi, dan logistik—sektor yang menjadi penopang dan penggerak ekonomi nasional. Seluruh langkah tersebut dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), sebagai landasan dalam menciptakan efisiensi operasional dan meningkatkan daya saing aset negara secara berkelanjutan.

2024 was an important chapter in the transformation journey of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) or PPA as a strategic institution in the SOE ecosystem. By carrying out its mandate to manage and optimize state assets, PPA continues to strengthen its role as a restructuring agent and value accelerator that makes a real contribution to national economic development.

By using an adaptive, innovative, and collaborative approach, PPA not only focuses on reviving unproductive assets, but also developing hidden potential in the managed asset and investment portfolio. This is carried out with a spirit of transformation and long-term vision, in order to create sustainable added value.

Throughout 2024, PPA demonstrated a strong commitment to strategically managing state assets. By focusing on revitalizing the SOEs it manages, PPA captures new opportunities that are relevant to market needs. The transformation of Lokananta into a Creative & Commercial Hub, the development of ToWork Coworking, and the exploration of strategic partnerships were part of the real steps in revitalizing assets while opening the way up to new growth.

In addition, PPA also continued to strengthen its contribution through Non Performing Loan handling, as well as Special Situation Fund (SSF) and advisory in vital sectors such as shipyards, manufacturing, transportation, and logistics, sectors that support and drive the national economy. All these steps were carried out by upholding the good corporate governance principles, as the foundation for creating operating efficiencies, and for increasing the competitiveness of state assets in a sustainable manner.

Kesinambungan Tema

Theme Continuity



2023

Moving Forward, Optimizing Performance

Tahun 2023 menjadi tahun yang menantang bagi PPA. Sebagai langkah upaya dalam menjaga stabilitas kinerja Perseroan tetap prima, PPA bertekad untuk terus melangkah maju dalam mencapai stabilitas yang kokoh sebagai landasan utama dalam mendorong Perseroan menuju kinerja yang optimal. Upaya serta strategi yang dilakukan di antaranya melalui pendekatan inovatif, yaitu skema Special Situations Fund yang terbukti mampu menyelesaikan tantangan yang dihadapi perbankan dalam mengelola aset berkualitas rendah secara efektif dengan manajemen risiko yang terukur.

Tema “Melangkah Maju, Optimalkan Performa” menjadi refleksi dari PPA yang terus melaju di jalur yang tepat untuk mendorong kinerja Perseroan lebih optimal lagi, sekaligus menegaskan Visi Perseroan “Menjadi perusahaan investasi terkemuka dan mitra terpercaya dalam restrukturisasi korporasi”. Didukung dengan sumber daya yang mumpuni dan strategi yang tepat, semakin mengokohkan eksistensi dan peran PPA sebagai entitas yang andal dan efisien dalam pengelolaan aset nasional.

The year 2023 was a challenging year for PPA. As an effort to maintain the stability of the Company’s performance, PPA is determined to continue moving forward in achieving solid stability as the main foundation in driving the Company towards optimal performance. Efforts and strategies taken include an innovative approach, namely the Special Situations Fund scheme which has proven to be able to solve the challenges faced by banks in managing low quality assets effectively with measurable risk management.

The theme “Moving Forward, Optimizing Performance” is a reflection of PPA which continues to move on the right track to encourage the Company’s performance to be even more optimal, while affirming the Company’s Vision “To become a leading investment company and trusted partner in corporate restructuring”. Supported by qualified resources and the right strategy, further strengthens the existence and role of PPA as a reliable and efficient entity in national asset management.



2022

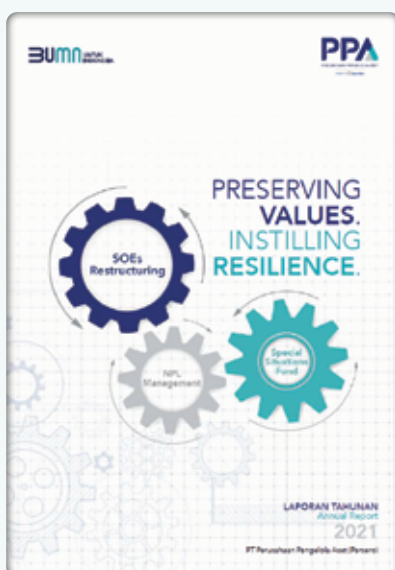
Delivering Transformative Impact for Sustainable Growth

Sejak tahun 2020, PT Perusahaan Pengelola Aset ("PPA" atau "Perusahaan") telah menyusun peta jalan untuk menjadi National Asset Management Company (NAMCO) di Indonesia. Didukung oleh tiga pilar bisnis: Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN Titip Kelola, Pengelolaan Non Performing Loan (NPL) dan Special Situations Funds (SSF), PPA berupaya mewujudkan visinya untuk menjadi perusahaan investasi terkemuka dan mitra terpercaya dalam restrukturisasi korporasi. Visi ini menunjukkan adanya peran strategis Perusahaan dalam mendorong transformasi bisnis dari mitra BUMN dan ekosistemnya, sementara di sisi lain juga mendorong transformasi internal organisasi untuk menjadi lebih adaptif dan tangkas dalam menyikapi kondisi perekonomian global yang penuh tantangan dengan lingkungan bisnis yang semakin kompetitif.

Misi PPA untuk memberikan pertumbuhan yang berkesinambungan bagi seluruh pemangku kepentingan melalui kegiatan investasi, restrukturisasi, pengelolaan aset, dan advisory telah berhasil mendorong peningkatan kinerja dari mitra BUMN dan ekosistemnya. PPA juga berhasil mencatat kinerja yang lebih kokoh di tahun 2022 dengan laba bersih melampaui target sebesar 35%. Pertumbuhan laba bersih yang solid ini merupakan hasil dari komitmen Perseroan untuk memberikan yang terbaik dan menerapkan Tata Kelola perusahaan yang baik serta menerapkan nilai inti BUMN yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif (AKHLAK). Penerapan nilai-nilai AKHLAK sangat penting untuk mendukung terciptanya transformasi bisnis secara sukses yang akan menguntungkan seluruh pemangku kepentingan.

Since 2020, PT Perusahaan Pengelola Aset ("PPA" of the "Company") has clearly set its roadmap to become the Indonesian National Asset Management Company (NAMCO). Underpinned by its three business pillars: SOEs Restructuring, NPL Management and Special Situations Funds (SSF), PPA forges ahead with its vision to be a leading investment company and be a trusted partner in corporate restructuring. This vision implies the Company's strategic role in transforming the business of its SOE partners and their ecosystem, while simultaneously pursuing transformation in its internal organization to become more agile in facing a challenging global macroeconomic condition and more competitive business environment.

PPA's mission to provide sustainable growth for all stakeholders through investment, restructuring, asset management, and advisory activities have successfully brought a higher performance of its SOE partners and their ecosystem. PPA was also able to record outstanding performance with net profit far exceeding the target by 35% in 2022. Such strong net profit growth was a result of the Company's commitment to deliver its best and implement good corporate governance as well as apply the SOE's core values: trustworthy competent, harmonious, loyal, adaptive and collaborative (AKHLAK). Embracing these core values are very important to ensure the attainment of successful business transformation which will be beneficial to all stakeholders.



2021

Preserving Values Instilling Resilience

Tahun 2021 menjadi tahun prestasi bagi PPA dalam perjalanannya mencapai visi sebagai perusahaan nasional di bidang pengelolaan aset atau National Asset Management Company (NAMCO). Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sejak tahun sebelumnya dengan fokus pada 3 (tiga) pilar bisnis (BUMN Titip Kelola, Pengelolaan NPL, serta Special Situations Fund) telah mulai membuahkan hasil. Dengan demikian, PPA membuktikan eksistensinya sebagai salah satu solusi dari berbagai tantangan yang dihadapi korporasi, memberikan nilai bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta membantu bisnis berakselerasi secara berkesinambungan.

The year 2020 is a milestone year for PPA in its journey to achieve its vision as a national company in the field of asset management or National Asset Management Company (NAMCO). Capacity building and capability improvement since the previous year with a focus on 3 (three) business pillars (SOE Restructuring, NPL Management, and Special Situations Fund) have begun to bear fruit. Thus, PPA proves its existence as one of the solutions to various challenges faced by corporations, provides value to State-Owned Enterprises (SOE), and helps businesses accelerate in a sustainable manner.

Daftar Isi

Table of Contents

2	TENTANG LAPORAN TAHUNAN 2024 ABOUT THE 2024 ANNUAL REPORT
3	SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB DISCLAIMER AND LIMITATION OF LIABILITY
4	PENJELASAN TEMA THEME EXPLANATION
6	KESINAMBUNGAN TEMA THEME CONTINUITY
8	DAFTAR ISI TABLE OF CONTENTS
10	SEKILAS TENTANG PPA PPA AT A GLANCE
11	3 PILAR BISNIS KEGIATAN PPA PPA 3 BUSINESS PILLAR ACTIVITIES
12	KOMITMEN KEBERLANJUTAN PPA: MERAWAT ASET, MEMBANGUN KEBERLANJUTAN PPA'S SUSTAINABILITY COMMITMENT CARING FOR ASSETS, BUILDING SUSTAINABILITY
14	PENCAPAIAN TERBAIK PPA PPA'S KEY ACHIEVEMENTS

IKHTISAR UTAMA MAIN HIGHLIGHTS

18	IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING SUMMARY OF KEY FINANCIAL DATA
26	IKHTISAR OPERASI DAN ORGANISASI OPERATING AND ORGANIZATION HIGHLIGHTS
27	IKHTISAR SAHAM SHARE HIGHLIGHTS
28	IKHTISAR OBLIGASI DAN SURAT UTANG LAINNYA OTHER BONDS AND DEBT SECURITIES HIGHLIGHTS
29	IKHTISAR SUMBER PENDANAAN LAINNYA OTHER FUNDING SOURCES HIGHLIGHTS
30	PERISTIWA PENTING IMPORTANT EVENTS

LAPORAN MANAJEMEN MANAGEMENT REPORT

40	LAPORAN DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS REPORT
48	LAPORAN DIREKSI BOARD OF DIRECTORS REPORT
62	SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET STATEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS REGARDING RESPONSIBILITY FOR THE ANNUAL REPORT FOR FISCAL YEAR 2024 OF PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET

PROFIL PERUSAHAAN COMPANY PROFILE

66	INFORMASI UMUM PERUSAHAAN COMPANY'S GENERAL INFORMATION
68	RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN BRIEF HISTORY OF THE COMPANY
70	JEJAK LANGKAH MILESTONES
74	IDENTITAS PERUSAHAAN CORPORATE IDENTITY
75	VISI, MISI, DAN BUDAYA PERUSAHAAN VISION, MISSION AND CORPORATE CULTURE
77	KEGIATAN USAHA BUSINESS ACTIVITIES
82	WILAYAH OPERASIONAL OPERATIONAL AREAS

84	KEANGGOTAAN DALAM ASOSIASI MEMBERSHIP IN ASSOCIATIONS
86	STRUKTUR ORGANISASI ORGANIZATION STRUCTURE
89	INFORMASI PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS INFORMATION ON CHANGES IN THE BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION
90	PROFIL DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS' PROFILE
93	INFORMASI PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI INFORMATION ON CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION
94	PROFIL DIREKSI BOARD OF DIRECTORS' PROFILES
100	PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF EXECUTIVE OFFICERS' PROFILES
102	DEMOGRAFI KARYAWAN EMPLOYEE DEMOGRAPHICS
111	STRUKTUR DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM SHAREHOLDERS STRUCTURE AND COMPOSITION
113	INFORMASI KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI SHARE OWNERSHIP BY THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS
114	INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA/PENGENDALI HINGGA ENTITAS PEMILIK AKHIR INFORMATION ABOUT MAJORITY/CONTROLLING SHAREHOLDERS UP TO THE ULTIMATE OWNER
115	DAFTAR ENTITAS ANAK, PERUSAHAAN ASOSIASI, DAN VENTURA BERSAMA LIST OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATED COMPANIES AND JOINT VENTURES
119	STRUKTUR GRUP GROUP STRUCTURE
120	KRONOLOGI PENERBITAN DAN/ATAU PENCATATAN SAHAM CHRONOLOGY OF SHARE ISSUANCE AND/OR LISTING
121	KRONOLOGI PENERBITAN OBLIGASI, SURAT UTANG DAN SUKUK CHRONOLOGY OF BONDS, DEBT SECURITIES, AND SUKUK
122	AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PUBLIC ACCOUNTS AND PUBLIC ACCOUNTING FIRMS
123	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG SEHUBUNGAN DENGAN PENERBITAN OBLIGASI II TAHUN 2022 SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONALS IN CONNECTION WITH THE ISSUANCE OF BOND II IN 2022
124	PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI AWARDS AND CERTIFICATIONS
125	INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN INFORMATION ON THE COMPANY WEBSITE

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

130	TINJAUAN UMUM GENERAL REVIEW
135	TINJAUAN KINERJA PER SEGMENT USAHA OPERATIONAL REVIEW PER BUSINESS SEGMENT
139	TINJAUAN KEUANGAN FINANCIAL REVIEW
158	KEMAMPUAN MENGHASILKAN LABA ATAU KEUNTUNGAN ABILITY TO GENERATE PROFITS OR GAINS
159	KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG ABILITY TO PAY DEBT AND RECEIVABLES COLLECTIBILITY LEVEL
162	STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL CAPITAL STRUCTURE AND MANAGEMENT POLICY ON CAPITAL STRUCTURE
164	IKATAN YANG MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL MATERIAL CAPITAL GOODS INVESTMENTS
165	REALISASI INVESTASI BARANG MODAL REALIZATION OF CAPITAL GOODS INVESTMENTS

166	INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN MATERIAL INFORMATION AND FACTS THAT OCCURED AFTER THE DATE OF THE ACCOUNTANT'S REPORT
166	INFORMASI PENINGKATAN ATAU PENURUNAN YANG MATERIAL DARI PENJUALAN ATAU PENDAPATAN MATERIAL INFORMATION ON INCREASES OR DECREASES OF SALES OR INCOME
166	DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN IMPACT OF PRICE CHANGES ON SALES
167	KONTRIBUSI KEPADA NEGARA CONTRIBUTION TO THE STATE
168	PERBANDINGAN ANTARA TARGET DENGAN REALISASI COMPARISON BETWEEN TARGET AND REALIZATION
169	PROYEKSI UNTUK 1 (SATU) TAHUN KE DEPAN PROJECTIONS FOR THE NEXT 1 (ONE) YEAR
170	KEBIJAKAN DAN PEMBAGIAN DIVIDEN DIVIDEND POLICY AND DISTRIBUTION
171	PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH MANAJEMEN DAN/ATAU PEGAWAI MANAGEMENT AND EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP PROGRAM (MESOP)
171	REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM REALIZATION OF USE OF PUBLIC OFFERING PROCEEDS
173	INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA, AKUISISI, DAN RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL MATERIAL INFORMATION REGARDING INVESTMENTS, EXPANSIONS, DIVESTMENTS, MERGERS/CONSOLIDATIONS, ACQUISITIONS, AND DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING
174	INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL, TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN, DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI DAN/ATAU BERELASI INFORMATION ON MATERIAL TRANSACTIONS, CONFLICT OF INTEREST TRANSACTIONS, AND TRANSACTIONS WITH AFFILIATED AND/OR RELATED PARTIES
184	PROSPEK USAHA BUSINESS PROSPECTS
185	ASPEK PEMASARAN MARKETING ASPECT
186	PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PERSEROAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR CHANGES TO LEGISLATION REGULATIONS IN THE LAST FISCAL YEAR AND THEIR IMPACT ON THE COMPANY
186	PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG DITERAPKAN PERSEROAN PADA TAHUN BUKU TERAKHIR CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES APPLIED BY THE COMPANY IN THE LAST FISCAL YEAR
187	TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN COMPANY HEALTH LEVEL

TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

190	KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN BERKELANJUTAN COMMITMENT TO SUSTAINABLE GCG IMPLEMENTATION
201	KERANGKA KERJA TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PPA GOOD CORPORATE GOVERNANCE FRAMEWORK IN PPA
202	STRUKTUR DAN MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE AND MECHANISM
205	RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
222	DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS
238	KOMISARIS INDEPENDEN INDEPENDENT COMMISSIONER
239	DIREKSI BOARD OF DIRECTORS
251	TRANSPARANSI INFORMASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI INFORMATION TRANSPARENCY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS
269	KEBIJAKAN KEBERAGAMAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS DIVERSITY POLICY

272	NOMINASI DAN REMUNERASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS NOMINATION AND REMUNERATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS
280	ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS BOARD OF COMMISSIONERS SUPPORTING ORGANS
281	SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS
284	KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE
298	KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG RISK AND GCG MONITORING COMMITTEE
310	KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE
324	ORGAN PENDUKUNG DIREKSI BOARD OF DIRECTORS SUPPORTING ORGANS
333	AKUNTAN PUBLIK PUBLIC ACCOUNTANT
336	SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL INTERNAL CONTROL SYSTEM
339	MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT
349	PERKARA HUKUM LEGAL MATTERS
352	SANKSI ADMINISTRASI DARI OTORITAS TERKAIT ADMINISTRATIVE SANCTIONS FROM RELATED AUTHORITIES
352	AKSES INFORMASI DAN DATA PERSEROAN ACCESS TO COMPANY INFORMATION AND DATA
354	TATA KELOLA TEKNOLOGI DAN INFORMASI TECHNOLOGY AND INFORMATION GOVERNANCE
358	KODE ETIK CODE OF ETHICS
362	FUNGSI KEPATUHAN DAN ANTI PENYUAPAN ANTI-BRIBERY COMPLIANCE FUNCTION
363	PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH PEGAWAI DAN/ATAU MANAJEMEN STOCK OWNERSHIP PROGRAM FOR EMPLOYEES AND/OR MANAGEMENT
363	KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ATAS SAHAM PERSEROAN TERBUKA BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS SHARE OWNERSHIP OF PUBLIC COMPANY SHARES
364	LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) STATE OFFICIALS' WEALTH REPORT (LHKPN)
367	KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI ANTI-CORRUPTION AND GRATIFICATION CONTROL POLICY
371	INFORMASI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN POLITIK INFORMATION ON FUNDING FOR POLITICAL ACTIVITIES
372	KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG DAN JASA GOODS AND SERVICES PROCUREMENT POLICY
373	WHISTLEBLOWING SYSTEM
377	TRANSPARANSI PRAKTIK BAD GOVERNANCE TRANSPARENCY OF BAD GOVERNANCE PRACTICES
379	PENERAPAN ATAS PEDOMAN UMUM GOVERNANSI PT PPA SESUAI PEDOMAN UMUM GOVERNANSI KORPORAT INDONESIA TAHUN 2021 IMPLEMENTATION OF PT PPA'S GENERAL GUIDELINES FOR GOVERNANCE IN ACCORDANCE WITH THE GENERAL GUIDELINES FOR INDONESIAN CORPORATE GOVERNANCE IN 2021

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL AND ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

406	KOMITMEN KEBERLANJUTAN SUSTAINABILITY COMMITMENT
412	REFERENSI SILANG SEOJK NO. 16/SEOJK.04/2021: BENTUK DAN ISI LAPORAN TAHUNAN EMITEN ATAU PERUSAHAAN PUBLIK CROSS-REFERENCE NO. 16/SEOJK.04/2021: FORMAT AND COMPLETING THE ANNUAL REPORT OF ISSUERS OR PUBLIC COMPANIES

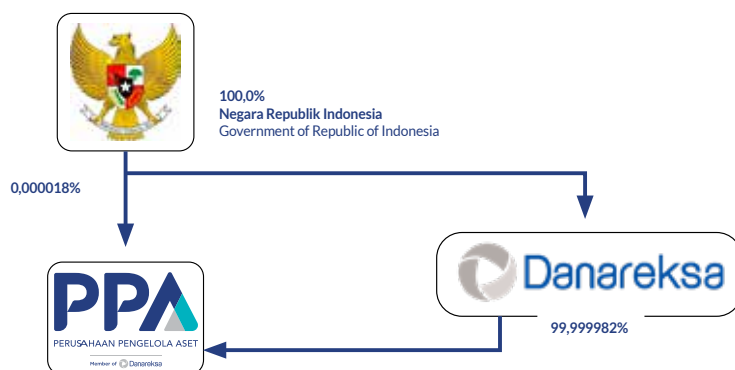
LAPORAN KEUANGAN

FINANCIAL REPORT

Sekilas Tentang PPA

PPA at a glance

Struktur Pemegang Saham | Shareholders Structure



Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-886/MBU/11/2021 menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Menetapkan perubahan jenis saham pada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) yang semula tanpa seri menjadi terdiri dari saham Seri A Dwiwarna dan saham seri B.
- Menetapkan hak-hak saham Seri A Dwiwarna yang tidak dimiliki oleh saham seri B, yaitu hak untuk melakukan:
 - Perubahan Anggaran Dasar;
 - Perubahan struktur permodalan;
 - Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - Persetujuan terkait penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran;
 - Permintaan dan pengaksesan data dan dokumen perusahaan;
 - Persetujuan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - Persetujuan pemindahtanganan aset yang berdasarkan Anggaran Dasar perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Persetujuan mengenai penyertaan dan pengurangan persentase penyertaan modal pada perusahaan lain yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Persetujuan rencana penggunaan laba yang berdasarkan anggaran dasar perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Persetujuan mengenai investasi dan pembiayaan jangka panjang sepanjang dalam anggaran dasar perlu persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Pengusulan agenda Rapat Umum Pemegang Saham;
 - Pengusulan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris.

Dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Menteri BUMN melalui Surat Kuasa Khusus No. SKK-42/MBU/06/2022 tanggal 24 Juni 2022 memberikan kuasa khusus kepada PT Danareksa Persero selaku pemegang saham seri B PPA khusus untuk melakukan tindakan-tindakan yang menjadi kewenangan dan/atau hak Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dalam klasifikasi saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yaitu:

- Hak menyetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) mengenai:
 - Pengangkatan anggota Direksi dan Dekom;
 - Perubahan Anggaran Dasar.
- Hak untuk mengusulkan:
 - Calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
 - Agenda RUPS.
- Hak untuk meminta dan mengakses data dan dokumen perusahaan.
- Hak untuk menetapkan dan menyetujui RKAP & RJPP termasuk perubahannya berikut Key Performance Indicators dan Kontrak Manajemen;
- Hak untuk mengambil keputusan dalam RUPS Tahunan Perseroan dengan agenda termasuk namun tidak terbatas antara lain sebagai berikut:
 - Pengesahan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian / Non Konsolidasian Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris.
 - Pengesahan Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
 - Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan.
 - Penetapan Gaji / Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Kinerja.
 - Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian / Non Konsolidasian Perseroan.
 - Lain-lain sesuai dengan agenda Perseroan dalam RUPS Laporan Tahunan.

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. S-886/MBU/11/2021, convey the following matters:

- Determining the change in the type of shares in PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) which was originally without series to consist of Series A Dwiwarna shares and series B shares.
- Determining the rights of Series A Dwiwarna shares that are not owned by series B shares, namely the right to do:
 - Amendments to the Articles of Association;
 - Changes in the capital structure;
 - Appointment and dismissal of members of the Board of Directors and Board of Commissioners;
 - Approval related to merger, consolidation, acquisition, separation, and dissolution;
 - Request and access to company data and documents;
 - Approval of remuneration for members of the Board of Directors and Board of Commissioners;
 - Approval of the transfer of assets, which based on the Articles of Association requires the approval of the General Meeting of Shareholders;
 - Approval of the participation and reduction of the percentage of capital participation in other companies, which based on the articles of association needs the approval of the General Meeting of Shareholders;
 - Approval of profit utilization plan which based on the articles of association needs approval from the General Meeting of Shareholders;
 - Approval of long-term investment and financing to the extent that the articles of association require the approval of the General Meeting of Shareholders;
 - Proposing the agenda of the General Meeting of Shareholders;
 - Nomination of candidates for members of the Board of Directors and candidates for members of the Board of Commissioners.

with the mechanism for exercising such rights in accordance with the provisions in the Articles of Association and laws and regulations.

In addition, the Minister of SOEs through Special Power of Attorney No. SKK-42/MBU/06/2022 dated June 24, 2022 gave special power to PT Danareksa Persero as a special PPA series B shareholder to carry out actions that become the authority and / or rights of Series A Dwiwarna Shareholders in the classification of shares as stipulated in the Company's Articles of Association, namely:

- The right to approve in the General Meeting of Shareholders (GMS) regarding:
 - Appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners;
 - Amendments to the Articles of Association.
- Right to propose:
 - Candidates for members of the Board of Directors and Board of Commissioners;
 - Agenda of the GMS.
- The right to request and access company data and documents.
- The right to determine and approve the RKAP & RJPP including its amendments along with KPI and KM;
- The right to make decisions in the Company's Annual GMS with agendas including but not limited to the following:
 - Ratification of the Company's Annual Report and Consolidated / Non-Consolidated Financial Statements as well as the Board of Commissioners Supervisory Report.
 - Ratification of the Annual Report of the Social and Environmental Responsibility Program.
 - Determination of the Use of the Company's Net Income.
 - Determination of Salary/Honorarium, Facilities and Other Benefits for Board of Directors and Board of Commissioners, and Tantiem for Board of Directors and Board of Commissioners for their performance.
 - Election of a Public Accountant Firm (KAP) to audit the Company's Consolidated / Non-Consolidated Financial Statements.
 - Others in accordance with the Company's agenda in the GMS Annual Report.

6. Hak untuk menetapkan kebijakan pada anak perusahaan agar selaras dengan kebijakan pada Pemegang Saham Seri B terbanyak Perseroan, sebagai berikut:
 - a. Bidang Akuntansi dan Keuangan;
 - b. Bidang Pengembangan dan Investasi;
 - c. Bidang Operasional (termasuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa);
 - d. Bidang Pemasaran, Produk dan Komunikasi;
 - e. Bidang Informasi dan Teknologi;
 - f. Bidang Sumber Daya Manusia dan Culture;
 - g. Bidang Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Pengawasan Internal;
 - h. Bidang Hukum;
 - i. Corporate restructuring, Monitoring, Collection dan Enforcement;
 - j. Bidang lainnya dalam rangka sinergi Perseroan dengan Pemegang Saham Seri B terbanyak.
7. Hak untuk mengambil keputusan dalam RUPS Perseroan atas tindakan-tindakan Direksi yang berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan memerlukan persetujuan Pemegang Saham yang belum diatur dalam angka 1 sampai 6.

3 Pilar Bisnis Kegiatan PPA

PPA 3 Business Pillar Activities

01

BUMN Titip Kelola

SOE Under Management

Untuk memperluas perannya dalam restrukturisasi dan revitalisasi, PPA diamanatkan untuk melakukan strategi turn around dan pertumbuhan untuk memperkuat BUMN. Melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) dari pemegang saham, yaitu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PPA mendorong BUMN yang dikelola untuk membentuk strategi operasional dan keuangannya dalam mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Dalam melakukan BUMN Titip Kelola, PPA akan merevitalisasi kompetensi inti bisnis BUMN untuk meningkatkan daya saingnya. Dengan berfokus pada bisnis inti BUMN dan peluang pasar serta perbaikan keuangan dan operasional, PPA memimpin pengembangan roadmap dan sekaligus mendorong eksekusi dan pemantauan. Hingga akhir tahun 2022 Perusahaan memperoleh mandat SKK untuk mengelola 21 BUMN dan 1 anak usaha BUMN. Melalui SKK tersebut, Menteri BUMN memberikan kewenangan dan/atau hak untuk melakukan tindakan penanganan termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan kegiatan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi.

To expand its role in restructuring and revitalization, PPA is mandated to carry out turnaround and growth strategies to strengthen SOEs. Through a Special Power of Attorney (PoA) from the shareholder, namely the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs), PPA encourages managed SOEs to develop operational and financial strategies to achieve sustainable business growth.

When carrying out SOEs Under Management, PPA revitalizes the core competencies of SOE businesses to increase their competitiveness. By focusing on SOE core businesses and market opportunities as well as financial and operational improvements, PPA leads the development of roadmaps and at the same time drives execution and monitoring. Up until the end of 2022, the Company obtained an SKK mandate to manage 21 SOEs and 1 SOE subsidiary. Through the SKK, the Minister of SOEs provides authority and/or rights to take actions including but not limited to the Restructuring and/or Revitalization activities

02

Penanganan Non Performing Loan (NPL)

Non Performing Loans (NPL) Management

Selama krisis ekonomi, portofolio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) perbankan berpotensi mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini meningkatkan risiko kelangsungan usaha bank dan pada akhirnya memunculkan risiko sistemik di sektor perbankan dan keuangan secara keseluruhan. Dalam mencegah potensi risiko tersebut terhadap perekonomian Indonesia, PPA berperan dalam penanganan dan pengelolaan aset NPL perusahaan perbankan. Upaya ini diharapkan dapat membantu Bank dalam melakukan divestasi kredit yang dapat menghambat kinerja operasional dan keuangannya.

Melalui Perjanjian Business to Business dengan Bank, PPA mengelola aset NPL dengan skema off balance sheet atau on balance sheet. Dalam mekanisme off balance sheet, PPA akan menggunakan Asset Management Company (Special Purpose Vehicle) sebagai alat dalam mengelola portofolio NPL.

During the economic crisis, bank non-performing loan (NPL) portfolios had the potential to experience a significant increase. This increases the risk of bank business continuity and ultimately creates systemic risk in the banking and financial sector as a whole. To prevent potential risks to the Indonesian economy, PPA plays a role in handling and managing NPL assets of banking companies to help the Banks in divesting loans that could hamper their operational and financial performance.

Through Business to Business Agreements with the Banks, PPA manages NPL assets with an off balance sheet or on balance sheet scheme. In the off balance sheet mechanism, PPA uses an Asset Management Company (Special Purpose Vehicle) as a tool in managing the NPL portfolio.

03

Dana Situasi Khusus

Special Situations Fund

PPA memfokuskan kembali kegiatan investasi saat ini dan melakukan rebranding menjadi Special Situations Fund (SSF). Dengan fokus utama pada BUMN Indonesia, SSF memberikan solusi investasi yang mutakhir untuk melengkapi layanan perbankan tradisional.

SSF PPA berinvestasi dalam berbagai struktur permodalan, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan persyaratan klien pada berbagai tahapan siklus usaha. Selain itu, SSF PPA juga menyediakan layanan advisory untuk melengkapi kegiatan investasi kami.

PPA refocused its current investment activities and rebranded itself as a Special Situations Fund (SSF). With a primary focus on Indonesian SOEs, SSF provides cutting-edge investment solutions to complement traditional banking services.

SSF PPA invests in capital structures, tailored to the needs and requirements of clients at different stages of the business cycle. SSF PPA also provides advisory services to complement its investment activities.

Komitmen Keberlanjutan PPA: Merawat Aset, Membangun Keberlanjutan

PPA's Sustainability Commitment Caring for Assets, Building Sustainability

Sebagai pengelola aset strategis milik negara, PT Perusahaan Pengelola Aset menjadikan keberlanjutan sebagai bagian integral dari strategi bisnis. Komitmen ini tidak hanya diwujudkan dalam bentuk penciptaan nilai ekonomi, tetapi juga melalui kontribusi nyata terhadap aspek sosial, lingkungan, serta penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Melalui pendekatan 4 (empat) pilar keberlanjutan, yaitu Ekonomi, Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola, PPA terus berupaya menjaga keseimbangan antara profitabilitas, kepedulian sosial, dan pelestarian lingkungan. Prinsip-prinsip GCG menjadi pondasi dalam setiap proses pengambilan keputusan, sementara kontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) menjadi indikator arah kebijakan jangka panjang.

As a manager of state-owned strategic assets, PT Perusahaan Pengelola Aset has placed sustainability as an integral part of its business strategy. This commitment is not only manifested in the form of creating economic value, but also through real contributions to the social and environmental aspects, as well as the implementation of good corporate governance (GCG).

Through a 4 (four) pillars of sustainability approach, namely Economic, Environmental, Social, and Governance, PPA strives to maintain a balance between profitability, social concern, and environmental conservation. The GCG principles are the foundation for the decision-making process, while contributions to the Sustainable Development Goals (SDGs) are indicators of long-term policy direction.

Pilar Keberlanjutan PPA

PPA Sustainability Pillars

1. Pilar Ekonomi

- Pengelolaan aset strategis untuk menciptakan nilai tambah
- Revitalisasi BUMN agar lebih produktif dan kompetitif
- Optimalisasi portofolio dan penciptaan sumber pertumbuhan baru
- Kontribusi terhadap pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional

1. Economic Pillar

- Strategic asset management to create added value
- Revitalization of SOEs to be more productive and competitive
- Portfolio optimization and creation of new sources of growth
- Contribution to national economic recovery and growth

2. Pilar Lingkungan (Environmental)

- Pemanfaatan aset idle dengan pendekatan ramah lingkungan
- Efisiensi energi dan dukungan terhadap circular economy
- Inisiatif pengembangan kawasan dengan prinsip green development

2. Environmental Pillar

- Utilizing idle assets with an environmentally friendly approach
- Energy efficiency and support for the circular economy
- Regional development initiatives with green development principles

3. Pilar Sosial

- Transformasi Lokananta sebagai pusat kreatif dan komersial
- Pengembangan ToWork Coworking sebagai ruang kolaborasi
- Pemberdayaan masyarakat sekitar aset melalui program sosial

3. Social Pillar

- Transforming Lokananta as a creative and commercial center
- Developing ToWork Coworking as a collaboration space
- Empowering communities around assets through social programs

4. Pilar Tata Kelola (Governance)

- Penerapan prinsip GCG secara konsisten dan transparan
- Penguatan manajemen risiko dalam pengelolaan aset
- Pengambilan keputusan berbasis integritas dan akuntabilitas

4. Governance Pillar

- Consistent and transparent application of GCG principles
- Strengthening risk management in asset management
- Integrity and accountability-based decision making



Pencapaian Terbaik PPA

PPA's Key Achievements

Kinerja Keuangan financial Performance

(dalam jutaan Rupiah)
(in million Rupiah)

Pendapatan Usaha

Pendapatan Usaha yang berhasil dibukukan
di tahun 2024 tercatat sebesar:

Operating Revenue

Operating Revenue in 2024 reached:



Jumlah Aset

Sampai akhir 31 Desember 2024,
Jumlah Aset tercatat sebesar:

Total Asset

As of the end of December 31, 2024,
Total Assets stood at:



Total Ekuitas

Di tahun 2024, Total Ekuitas
PPA tercatat sebesar:

Total Equity

PPA's Total Equity In 2024 stood at:



Laba Bersih

Pada tahun 2024, Laba Bersih
Perseroan tercatat sebesar:

Net Profit

The Company's Net Profit in 2024 reached:
Total Assets stood at:



Kinerja Per Segmen Usaha Performance per Business Segment

(dalam jutaan Rupiah)
(in million Rupiah)

Investasi

Pendapatan yang berhasil dibukukan di tahun 2024 tercatat sebesar:

Investments

Revenue recorded in 2024:

Rp1.659.948
Juta | Million

Pembiayaan

Pendapatan yang berhasil dibukukan di tahun 2024 tercatat sebesar:

Financing

Revenue recorded in 2024:

Rp15.511
Juta | Million

Aset yang dikelola Asset Management

Terdiri dari NPL Bank Muamalat Indonesia, NPL Bank KB Bukopin, NPL Bank BTN (Persero) sejumlah Rp12,1 triliun dan Total Aset BUMN Titip Kelola sebesar Rp12,7 triliun sehingga Total Aset yang dikelola per 31 Desember 2024 sebesar:

Consisting of Bank Muamalat Indonesia's NPL, Bank KB Bukopin's NPL, Bank BTN (Persero)'s NPL of Rp12.1 trillion and the Total Assets of BUMN Titip Kelola of Rp12.7 trillion so that the Total Assets under management as of December 31, 2024 amounted to:

Rp24,8
Triliun | Trillion

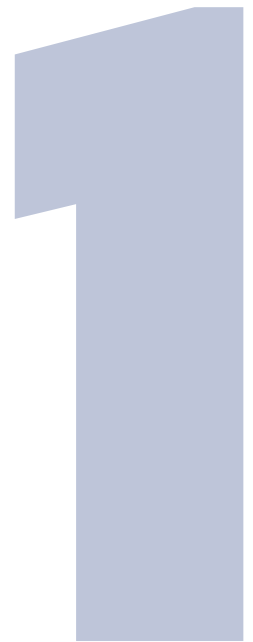
Tingkat Kesehatan Health Level

Tingkat Kesehatan Perseroan untuk tahun 2024 sebagai berikut:

The Company's Health Level for 2024 as follows:

Peringkat Berdiri Sendiri Standalone Rating	Peringkat Akhir Final Rating	Tingkat Kesehatan Health Level
idA-(sa) (Single A Minus; Standalone)	idAA/Stable (Double A; Stable Outlook)	Sehat Healthy





IKHTISAR UTAMA

MAIN HIGHLIGHTS

PPA membukukan Total Aset sebesar Rp17,47 triliun, mengalami kenaikan sebesar 0,54% dibandingkan dengan Total Aset tahun sebelumnya yang hanya Rp17,37 triliun. PPA's Total Assets stood at Rp17.47 trillion, an increase of 0.54% compared to the previous year's Rp17.37 trillion.

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Summary of Key Financial Data

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Consolidated Statement of Profit (Loss) and Other Comprehensive Income

dalam jutaan Rupiah in million Rupiah						
Uraian Description	2020	2021	2022	2023	2024	YoY 2023-2024 (%)
Pendapatan Hasil Investasi Investment Revenue	492.371	1.895.360	650.081	710.440	772.450	8,73% ↑
Pengelolaan NPL NPL Management	-	130.592	685.388	659.257	664.555	0,80% ↑
Keuntungan (Kerugian) atas Investasi pada Efek Ekuitas Gain/(Loss) on Securities Investments	55.218	(61.991)	10.795	175.429	106.357	-39,37% ↓
Pinjaman yang Diberikan Loan Receivables	184.829	117.443	101.965	70.495	95.072	34,86% ↑
Pendapatan Imbalan Jasa Konsultasi Consultation Fee Revenue	46.243	34.466	86.302	24.965	16.952	-32,10% ↓
Pendapatan Lain-Lain Other Revenue	-	-	-	14.884	2.695	-81,89% ↓
Pendapatan Trading Trading Revenue	-	-	3.854	13.826	-	- -
Pendapatan Penggantian Biaya Reimbursable Cost Revenue	2.700	4.424	36.407	3.844	4.523	17,66% ↑
Pendapatan Jasa Konstruksi Construction Services Revenue	3.496.210	4.259.315	422.813	-	-	- -
Penjualan Sales	-	-	-	-	-	- -
Pendapatan Manufaktur Manufacturing Revenue	96.549	103.462	-	-	-	- -
Pendapatan Properti Property Revenue	17.487	30.039	-	-	-	- -
Pendapatan Investasi Infrastruktur Infrastructure Investment Revenue	-	14.429	-	-	-	- -
Pendapatan Sewa Alat Lease Revenue	6.237	8.119	-	-	-	- -
Jumlah Pendapatan Usaha Total Operating Revenue	4.397.844	6.535.658	1.997.605	1.673.140	1.662.604	-0,63% ↓
Beban Usaha Operating Expenses	(4.154.610)	(6.368.336)	(1.827.145)	(1.380.488)	(1.486.782)	7,70% ↑
Laba Usaha Operating Profit	243.234	167.322	170.460	292.652	175.822	-39,92% ↓
Pendapatan Bunga Interest Income	14.419	20.518	46.056	52.562	38.230	-27,27% ↓
Keuntungan Penjualan Aset Tetap Fixed Asset Sales Profit	-	241	-	-	-	- -

dalam jutaan Rupiah
 in million Rupiah

Uraian Description	2020	2021	2022	2023	2024	YoY 2023-2024 (%)	
Beban Bunga dan Keuangan Interest and Financial Expenses	(91.805)	(79.646)	(18.523)	(10.682)	(8.516)	-20,28%	↓
Kenaikan (Penurunan) Nilai Wajar atas Properti Investasi Increase in Fair Value of Investment Properties	26.169	18.752	(5.307)	716	10.537	1.371,65%	↑
Beban Pajak Final Final Tax Expenses	(101.709)	(127.886)	(11.049)	-	-	-	-
Bagian Laba (Rugi) Bersih atas Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Share of Associated Entities and Joint Venture Profit (Loss)	87.905	152.776	9.649	(1.854)	(2.718)	46,60%	↑
Penghasilan (Beban) Lain-Lain Other Income (Expenses)	(15.200)	23.110	(19.827)	(5.283)	(2.800)	-46,99%	↓
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	163.013	175.187	171.459	328.111	210.555	-35,83%	↓
Pajak Penghasilan Income Tax	(57.244)	(10.062)	9.267	(2.470)	(5.185)	109,92%	↑
Laba Tahun Berjalan Profit for the Current Year	105.769	165.125	180.726	325.641	205.370	-36,93%	↓
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	3.450	2.588.822	(219.634)	2.476.278	419.419	-83,06%	↓
Labar Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Net Income for the Current Year Attributable to							
Pemilik Entitas Induk Owners of Parent Entity	105.341	164.468	180.730	325.653	205.370	-36,94%	↓
Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interests	428	657	(4)	(12)	-	-	-
Jumlah Total	105.769	165.125	180.726	325.641	205.370	-36,93%	↓
Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Total Comprehensive Profit (Loss) for the Current Year Attributable to							
Pemilik Entitas Induk Owners of Parent Entity	108.749	2.753.154	(38.904)	2.801.931	624.789	-77,70%	↓
Kepentingan Non Pengendali Non-Controlling Interests	470	793	(4)	(12)	-	-	-
Jumlah Total	109.219	2.753.947	(38.908)	2.801.919	624.789	-77,70%	↓
Laba per Saham Dasar (Nilai Penuh) Earnings per Share (in full amount)	35.152	32.860	30.361	53.295	33.184	-37,74%	↓

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Consolidated Financial Position

Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Financial Position Report(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2020	2021	2022	2023	2024	YoY 2023-2024 (%)
ASET LANCAR CURRENT ASSETS						
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	774.100	2.627.328	1.476.962	1.056.936	1.151.197	8,92% ↑
Pinjaman Investasi Jangka Pendek Short Term Investment Loans	1.531.707	575.119	674.997	675.114	574.466	-14,91% ↓
Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi Financial Assets at Amortized Cost	-	-	-	4.840	-	- -
Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi Financial Assets at Fair Value through Profit or Loss	-	280.522	855.788	1.098.394	1.153.646	5,03% ↑
Piutang Usaha Accounts Receivables	1.435.385	1.118.654	1.120.462	925.306	851.592	-7,97% ↓
Piutang Retensi Retention Receivables	151.012	163.022	-	-	-	- -
Piutang Ventura Bersama Konstruksi Construction Joint Venture Receivables	306.082	251.106	-	-	-	- -
Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan kepada Pihak Berelasi Loans Disbursed - Bailout Funds to Related Parties	340.087	252.304	423.393	625.144	920.037	47,17% ↑
Tagihan Bruto kepada Pemberi Kerja Gross Receivables to Employers	2.331.224	1.504.552	-	-	-	- -
Persediaan Supplies	146.770	227.777	-	-	-	- -
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka Advances and Prepaid Expenses	149.655	99.725	12.053	7.567	6.437	-14,93% ↓
Pajak Dibayar di Muka Prepaid Taxes	662.391	599.663	90.303	100.910	98.929	-1,96% ↓
Cessie Piutang Jangka Pendek Short-term Receivable Cessie	125.070	55.810	54.489	53.475	78.128	46,10% ↑
Aset Lancar Lainnya Other Current Assets	67.342	65.364	59.610	26.232	650.757	2.380,78% ↑
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	8.020.825	7.820.946	4.768.057	4.573.918	5.485.189	19,92% ↑

Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

Consolidated Financial Position Report

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2020	2021	2022	2023	2024	YoY 2023-2024 (%)
ASET TIDAK LANCAR TOTAL NON CURRENT ASSETS						
Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain Financial Assets at Fair Value through Other Comprehensive Income	38.944	5.234.999	5.661.067	7.879.550	8.317.327	5,56% ↑
Investasi pada Sukuk Sukuk Investments	-	-	-	499.100	272.494	-45,40% ↓
Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi Pihak Berelasi Loans disbursed - Restructuring and/ or Revitalization of Related Parties	536.683	402.763	412.081	535.080	530.595	-0,84% ↓
Properti Investasi Property Investments	816.998	1.005.982	447.247	455.677	466.214	2,31% ↑
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	73.457	67.254	71.166	68.198	62.813	-7,89% ↓
Investasi pada Ventura Bersama dan Entitas Asosiasi Investments in Joint Ventures and Associated Entities	344.740	433.269	83.846	81.992	75.274	-8,19% ↓
Pinjaman Investasi jangka Panjang Long term investment loans	681.689	607.338	1.668.392	1.555.236	1.218.885	-21,63% ↓
Investasi Jangka Panjang Lainnya Other Receivables	546.776	546.711	513.454	515.503	524.691	1,78% ↑
Investasi pada Efek Ekuitas Investment In Equity Securities	220.626	185.198	181.298	156.221	123.413	-21,00% ↓
Piutang Lain-Lain Other Receivables	238	238	-	-	-	- -
Aset Tetap Fixed assets	564.701	452.775	2.862	2.783	2.707	-2,73% ↓
Goodwill Goodwill		-	-	-	-	- -
Cessie Piutang Jangka Panjang Long term receivables cessie	247.441	246.430	273.956	297.504	301.749	1,43% ↑
Aset Hak Guna Right of Use Assets	11.714	46.499	32.551	38.357	69.576	81,39% ↑
Aset Keuangan dari Proyek Konsesi Financial Assets from Concession Projects		13.321	-	-	-	- -
Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non Current Assets	849.611	598.778	701.174	714.799	16.157	-97,74% ↓
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non Current Assets	4.933.618	9.841.555	10.049.094	12.800.000	11.981.895	-6,39% ↓
Jumlah Aset Total Assets	12.954.443	17.662.501	14.817.151	17.373.918	17.467.084	0,54% ↑

Tabel Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Financial Position Report(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2020	2021	2022	2023	2024	YoY 2023-2024 (%)
Liabilitas dan Ekuitas Liabilities and Equity						
Liabilitas Jangka Pendek Short Term Liabilities	6.462.255	5.170.818	2.921.339	2.549.473	3.295.202	29,25% ↑
Liabilitas Jangka Panjang Long Term Liabilities	2.834.084	3.122.872	4.204.777	4.166.121	2.938.769	-29,46% ↓
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	9.296.339	8.293.690	7.126.116	6.715.594	6.233.971	-7,17% ↓
Jumlah Ekuitas Total Equity	3.658.104	9.368.811	7.691.035	10.658.324	11.233.113	5,39% ↑
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	12.954.443	17.662.501	14.817.151	17.373.918	17.467.084	0,54% ↑

Laporan Arus Kas Konsolidasian

Consolidated Cash Flows Statement

Tabel Laporan Arus Kas Konsolidasian
Consolidated Cash Flow Statement(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2020	2021	2022	2023	2024	YoY 2023-2024 (%)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	(1.006.007)	1.917.614	398.559	206.592	245.886	19,02% ↑
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investment Activities	(636.511)	(1.564.826)	(2.650.134)	(236.285)	156.344	-166,17% ↓
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	1.326.525	1.500.422	1.401.427	(390.333)	(307.505)	-21,22% ↓
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) of Cash and Cash Equivalents	(315.993)	1.853.210	(850.148)	(420.026)	94.725	-122,55% ↓
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	1.107.636	774.116	2.627.328	1.476.962	1.056.936	-28,44% ↓
Kas dan Setara kas dari Entitas Anak yang Dikonsolidasikan Cash and Cash Equivalents from Consolidated Subsidiaries	-	-	(300.218)	-	-	- -
Keuntungan Selisih Kurs yang Belum Direalisasi Unrealized Foreign Exchange Gain	(17.527)	2	-	-	-	- -
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at the End of the Year	774.116	2.627.328	1.476.962	1.056.936	1.151.661	8,96% ↑

Tabel Laporan Arus Kas Konsolidasian Consolidated Cash Flow Statement

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2020	2021	2022	2023	2024	YoY 2023-2024 (%)
Rekonsiliasi Jumlah Kas dan Setara Kas Reconciliation of Total Cash and Cash Equivalents						
Jumlah yang Dilaporkan pada Laporan Arus Kas Total Reported on the Statement of Cash Flows	774.116	2.627.328	1.476.962	1.476.962	1.151.661	8,96% ↑
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Allowance for Impairment Losses	(16)	-	-	-	(464)	-100% ↓
Jumlah yang Dilaporkan Pada Laporan Posisi Keuangan Total Reported on the Statement of Financial Position	774.100	2.627.328	1.476.962	1.476.962	1.151.197	8,96% ↑

Rasio Keuangan dan Rasio Penting Lainnya

Financial Ratios and Other Key Ratios

Tabel Rasio Keuangan dan Rasio Penting Lainnya
Financial Ratios and Other Key Ratios

Uraian Description	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Profitabilitas dan Operasi Profitability and Operational Ratios					
Rasio Laba Bersih terhadap Aset (%) Return on Assets (%)	0,82	0,93	1,22	1,87	1,18
Rasio Laba Bersih terhadap Ekuitas (%) Return on Equity (%)	2,89	1,76	2,35	3,06	1,83
Marjin Laba Usaha (%) Operating Profit Margin (%)	5,53	2,56	8,53	17,49	10,58
Marjin Laba Bersih (%) Net Profit Margin (%)	2,41	2,53	9,05	19,46	12,35
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) (%) Operating Expenses to Operating Income (%)	94,47	97,44	91,47	82,51	89,42
Rasio Likuiditas Liquidity Ratios					
Rasio Lancar (%) Current Ratio (%)	124,12	151,25	163,21	179,41	166,46
Rasio Kas (%) Cash Ratio (%)	11,98	50,81	50,56	41,46	34,94
Rasio Utang Terhadap Ekuitas (%) Debt to Equity Ratio (%)	169,87	56,48	78,40	55,41	50,90
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (%) Liabilities to Equity Ratio (%)	254,13	88,52	92,65	63,01	55,50
Rasio Liabilitas terhadap Aset (%) Liabilities to Assets Ratio (%)	71,74	46,96	48,09	38,65	35,69
Total Modal Sendiri (Ekuitas) terhadap Aset (%) Total Equity to Assets (%)	28,23	53,04	51,91	61,35	64,31
Rasio Pertumbuhan Growth Ratio					
Pendapatan Usaha (%) Operating Income (%)	(34,06)	48,61	(69,44)	(16,24)	(0,63)

Tabel Rasio Keuangan dan Rasio Penting Lainnya
Financial Ratios and Other Key Ratios

Uraian Description	2020	2021	2022	2023	2024
Beban Usaha (%) Operating Expenses (%)	(33,95)	53,28	(71,31)	(24,45)	7,70
Laba Usaha (%) Operating Profit (%)	(35,94)	(31,21)	1,88	71,68	(39,92)
Laba Bersih (%) Net Profit (%)	(67,66)	56,12	9,45	80,18	(36,93)
Laba per Saham (%) Earnings per Share (%)	(67,58)	(6,52)	(7,60)	75,54	(37,74)
Aset (%) Assets (%)	(10,11)	36,31	(16,11)	17,26	0,54
Liabilitas (%) Liabilities (%)	3,39	(10,79)	(14,08)	(5,76)	(7,17)
Ekuitas (%) Equity (%)	(32,55)	156,11	(17,91)	38,58	5,39

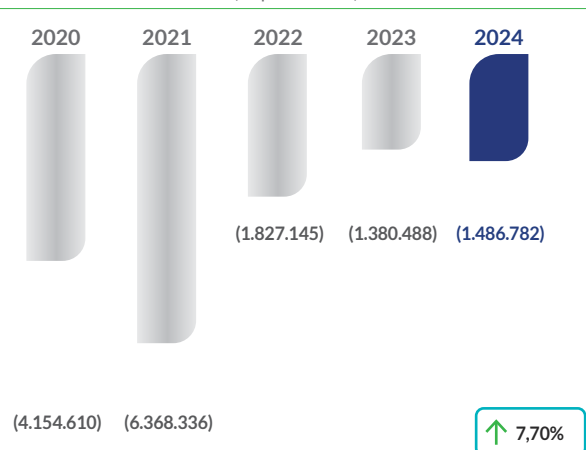
Grafik Ikhtisar Keuangan

Financial Highlights Charts

Jumlah Pendapatan Usaha
Total Operating Income
(Dalam juta rupiah)
(Rupiah million)



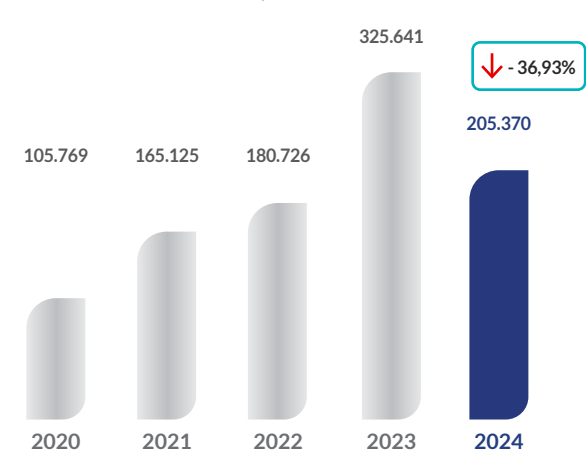
Beban Usaha
Operating Expenses
(Dalam juta rupiah)
(Rupiah million)



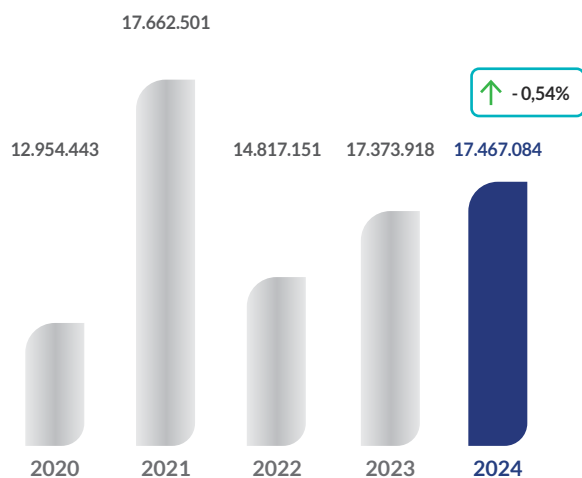
Laba Usaha
Operating Profit
(Dalam juta rupiah)
(Rupiah million)



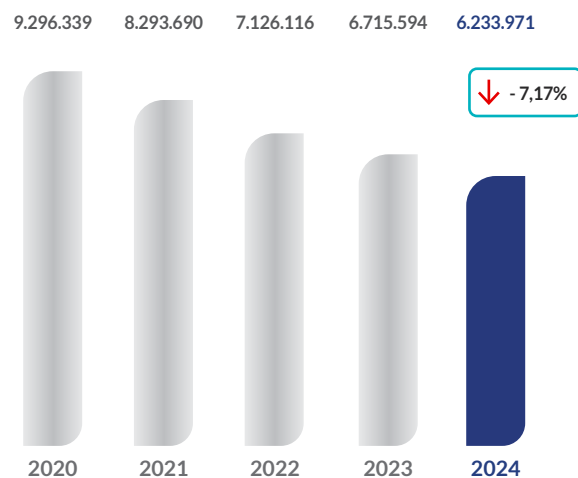
Laba Tahun Berjalan
Profit for the Current Year
(Dalam juta rupiah)
(Rupiah million)



Jumlah Aset
Total Assets
(Dalam juta rupiah)
(Rupiah million)



Jumlah Liabilitas
Total Liabilities
(Dalam juta rupiah)
(Rupiah million)



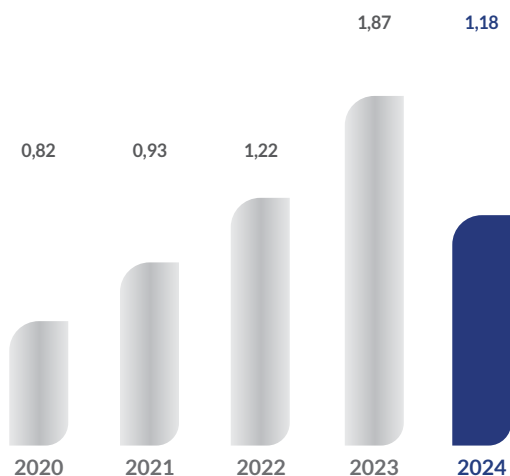
Jumlah Ekuitas
Total Equity
(Dalam juta rupiah)
(Rupiah million)



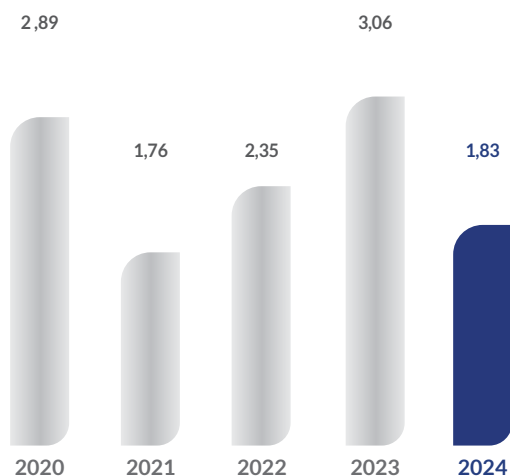
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun
Cash and Cash Equivalents at the End of the Year
(Dalam juta rupiah)
(Rupiah million)



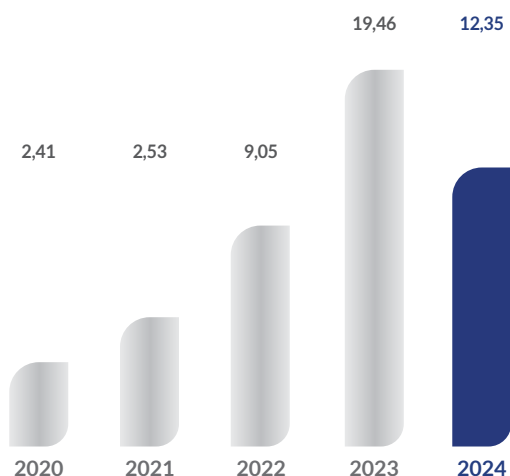
Rasio Laba Bersih terhadap Aset
Return on Assets
(%)



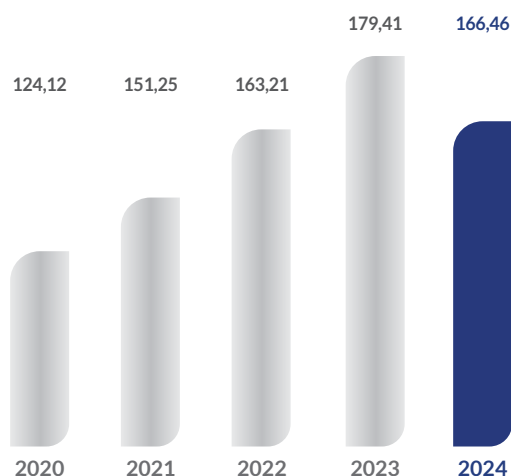
Rasio Laba Bersih terhadap Ekuitas
Return on Equity
(%)



Marjin Laba Bersih
Operating Profit Margin
(%)



Rasio Lancar
Current Ratio
(%)



Ikhtisar Operasi dan Organisasi

Operating and Organization Highlights

Uraian Description	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Karyawan (orang) Number of Employees	169	166	180	182	140
Indikator Kinerja/KPI Performance Indicators/KPI	96,62	102,51	105,70	100,41	100,20
Tingkat Kesehatan Perusahaan Company Health Level	83,25	85,50	89,50	AA/Stable	AA/Stable

Ikhtisar Saham

Share Highlights

Informasi Saham

Hingga 31 Desember 2024, PPA tidak mencatatkan sahamnya di bursa saham. Dengan demikian, tidak tersedia informasi terkait aktivitas perdagangan saham, termasuk kapitalisasi pasar berdasarkan harga di Bursa Efek, harga saham tertinggi, terendah, serta harga penutupan. Selain itu, data mengenai volume perdagangan saham, grafik pergerakan harga saham, serta volume transaksi per triwulan dalam dua tahun buku terakhir, termasuk penghentian sementara perdagangan saham (*suspension*) dan/atau penghapusan pencatatan saham (*delisting*), juga tidak dapat disajikan.

Dividen Saham

Sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2023 yang diadakan 12 Agustus 2024, para Pemegang Saham telah menetapkan penggunaan laba Perusahaan untuk tahun buku 2023 sebagai berikut:

Dividen Saham Share Dividend	2023	2024
Dividen Kas yang Dibagikan (Rp juta) Distributed Cash Dividend (Rp Million)	51.000	50.000
Dividen per Lembar Saham (Rp/lembar saham) Dividend per Share (Rp/share)	8.240	8.079
Rasio Pembayaran Dividen Dividend Payout Ratio	15,66	24,35
Tanggal Pengumuman Announcement Date	26 Juni 2023 June 26, 2023	18 November 2024 November 18, 2024
Tanggal Pembayaran Payment Date	29 Desember 2023 December 29, 2023	23 Desember 2024 December 23, 2024

AKSI KORPORASI

Hingga akhir tahun 2024, PPA tidak melakukan aksi korporasi yang berdampak pada perubahan struktur saham, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), saham bonus, serta perubahan nilai nominal saham. Oleh karena itu, tidak terdapat data mengenai tanggal pelaksanaan aksi korporasi, rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, perubahan nilai nominal saham, jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi, jumlah efek konversi yang dilaksanakan, dan harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi, yang dapat dicantumkan dalam Laporan Tahunan ini.

Share Information

Until December 31, 2024, PPA has not listed its shares on the stock exchange. Therefore, there is no information to report on stock trading, including market capitalization prices on the Stock Exchange, highest, lowest, and closing share prices, share trading volume, stock price movement graphics, and transaction volumes per quarter over the last two fiscal years, including temporary suspension of stock trading and/or delisting of shares.

Share Dividends

In accordance with the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for the 2023 fiscal year held on ...date/month... 2024, the Shareholders determined the use of the Company's profits for the 2023 fiscal year as follows:

CORPORATE ACTIONS

Until the end of 2024, PPA did not carry out any corporate actions that resulted in changes in the stock structure, such as stock splits, reverse stock, bonus shares, and changes in the nominal value of shares. Therefore, there is no data to report in this Annual Report on the date of implementation of the corporate actions, stock split ratio, reverse stock, stock dividends, bonus shares, number of convertible securities issued, changes in the nominal value of shares, number of shares outstanding before and after corporate actions, number of convertible securities carried out, and share prices before and after corporate actions.

Ikhtisar Obligasi dan Surat Utang Lainnya

Other Bonds and Debt Securities Highlights

Ikhtisar Obligasi yang Masih Beredar

Obligasi yang telah diterbitkan oleh PPA dan masih beredar meliputi Obligasi I Tahun 2020 dan Obligasi II Tahun 2022, sebagaimana tercantum di bawah ini.

Overview of Bands Issued by PPA and Still Outstanding

Bonds issued by PPA that are still outstanding include Bond I 2020 and Bond II 2022, as listed below.

Tahun Penerbitan Issuance Year	Kode Obligasi Bond Code	Nama Obligasi Bond Name	Nilai Outstanding (Rp Juta) Outstanding Value (Rp Million)	Tingkat Bunga Coupon Rate	Tanggal Penerbitan Issuing Date	Jangka Waktu (Tahun) Tenor (Years)	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Peringkat Rating		Status Status
								2024	2023	
2020	PPAP	Obligasi I Tahun 2020 Perusahaan Pengelola Aset Perusahaan Pengelola Aset 2020 Bond I								
		Seri B	345.000	10,55%	1 September 2020 September 1, 2020	5	1 September 2025 September 1, 2025	idAA	idAA	Aktif
		Seri C	197.100	11,00%	1 September 2020 September 1, 2020	7	1 September 2027 September 1, 2027	idAA	idAA	Aktif
2022	PPAP	Obligasi II Tahun 2022 Perusahaan Pengelola Aset Perusahaan Pengelola Aset 2022 Bond II								
		Seri A	890.600	7,00%	8 Juli 2022 July 8, 2022	3	8 Juli 2025 July 8, 2025	idAA	idAA	Aktif
		Seri B	791.600	7,80%	8 Juli 2022 July 8, 2022	5	8 Juli 2027 July 8, 2022	idAA	idAA	Aktif

Ikhtisar Surat Utang Lainnya

Surat utang lain yang diterbitkan oleh PPA di adalah sebagai berikut.

Other Debt Securities Overview

Other debt securities issued by PPA are as follows.

Surat Utang Lainnya Type of Debt Securities	Nilai (Rp Juta) Value (Rp Million)	Tanggal Penerbitan Issuing Date	Jangka Waktu (Tahun) Tenor (Years)	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Tingkat Bunga per Tahun Annual Interest Rate	Peringkat		Status
						2024		
Surat Berharga Komersial Berkelanjutan I Sustainable SBK I PT PAA Tahap I 2023	200.000	16 Januari 2024 January 16, 2024	1	15 Januari 2025 January 15, 2024	7,65%	idA1+ (Single A One Plus)		Aktif Active

Sukuk	Nilai (Rp Juta) Value (Rp-million)	Tanggal Penerbitan Issue Date	Jangka Waktu (Tahun) Term (Year)	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Tingkat Bagi Hasil per Tahun Revenue Sharing Rate per Year	Peringkat Rating 2024	Status Status
Sukuk PPA tahun 2022 Sukuk PPA 2022	1.117.000	28 September 2022 September 28, 2022	15	28 September 2037 September 28, 2037	6,63%	idAA(sy) (Double A Syariah)	Aktif Active
Sukuk PPA Tahun 2021 Sukuk PPA 2021	3.051.069	15 November 2021 November 15, 2021	20	15 November 2041 November 15, 2041	10%	-	Aktif Active

Ikhtisar Sumber Pendanaan Lainnya

Other Funding Sources Highlights

Penyertaan Modal Negara (PMN)

Sepanjang tahun 2024, PPA tidak menerima tambahan dana Penyertaan Modal Negara (PMN). Namun, sebelumnya Pemerintah RI telah mengalokasikan PMN tunai kepada PPA pada tahun 2008, 2009, dan 2015 dengan total nilai Rp3,5 triliun. Rincian alokasi PMN tunai tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahun 2008 sebesar Rp1,5 triliun berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2008.
2. Tahun 2009 sebesar Rp1 triliun berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2009.
3. Tahun 2015 sebesar Rp1 triliun berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2015.

Menteri BUMN melalui surat S-370/MBU/05/2021 tanggal 28 Mei 2021 menyetujui penambahan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PPA atas kepemilikan saham minoritas pada 5 (lima) perusahaan.

State Capital Participation (PMN)

Throughout 2024, PPA will not receive additional State Capital Participation (PMN) funds. However, the Government has previously allocated additional PMN cash to PPA in 2008, 2009, and 2015 with a total value of Rp3.5 trillion, PMN cash as per the following:

1. In 2008, Rp1.5 trillion in accordance with Government Regulation No. 78 of 2008.
2. In 2009, Rp1 trillion in accordance with Government Regulation No. 77 of 2009.
3. In 2015, Rp1 trillion in accordance with Government Regulation No. 72 of 2015.

The Minister of SOEs through letter S-370/MBU/05/2021 dated May 28, 2021 approved the addition of capital of the Republic of Indonesia into the share capital of PPA for minority shareholdings in 5 (five) companies.

Peristiwa Penting

Important Events

11 Januari 2024
January 11, 2024



PPA Mendukung Pelatihan Pengembangan UMKM IBK
PPA Supports IBK MSME Development Training

Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), PPA menyelenggarakan Workshop bertema "Pengembangan Potensi Mengelola Bisnis UMKM Disabilitas dan Membangun Branding Istimewa", yang diikuti oleh 30 peserta dari lima lembaga dan komunitas disabilitas. Kegiatan yang berlangsung pada Batch II ini menghadirkan dua narasumber nasional, yaitu Arto Biantoro dengan materi "Menciptakan Brand Harapan lewat Keunggulan Diri" dan Aling Nur Naluri yang membahas "Mengelola Keberlanjutan Bisnis Istimewa". Program ini bertujuan untuk menstimulasi dan memotivasi para pelaku UMKM disabilitas agar semakin berkembang dan berdaya saing.

Through the Social and Environmental Responsibility (SER) program, PPA held a Workshop themed "Developing the Potential to Manage Disabled MSME Businesses and Building Special Branding", which was attended by 30 participants from five institutions and disability communities. The Batch II activity presented by two national speakers, Arto Biantoro for "Creating Brand Hope through Personal Excellence" and Aling Nur Naluri for "Managing the Sustainability of Special Businesses". This program aims to stimulate and motivate disabled MSMEs to grow and be more competitive.

27 Februari 2024
February 27, 2024



PPA Raih "Pemenang Terbaik I" Paritrana Award Tingkat Provinsi 2 Tahun Berturut-turut

PPA Wins "Best Winner I" Paritrana Award Provincial Level for 2 Consecutive Years

PPA berhasil meraih "Pemenang Terbaik I" Paritrana Award Tahun 2023 Provinsi DKI Jakarta untuk kategori Usaha Skala Besar Sektor Keuangan, yang diserahkan oleh Kepala Disnakertrans DKI Jakarta Hari Nugroho dan Kepala BP Jamsostek Jakarta Deny Yusyulian pada 27 Februari 2024. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen PPA dalam mendukung Gerakan Nasional Perlindungan Pekerja Rentan yang dicanangkan pemerintah dengan memberikan perlindungan kepada 2.000 pekerja sektor informal yang berisiko tinggi dan berpenghasilan minim. Hal ini menunjukkan komitmen PPA terhadap perundang-undangan ketenagakerjaan dan jaminan sosial dengan berpartisipasi dalam program BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) melalui pendaftaran kepesertaan perusahaan dan karyawan dalam lima Program Jaminan Sosial, baik Ketenagakerjaan maupun Kesehatan.

PPA received the "Best Winner I" at the 2023 Paritrana Awards in DKI Jakarta Province in the category - Large-Scale Business in the Financial Sector, which was presented by the Head of the DKI Jakarta Manpower and Transmigration Office Hari Nugroho and the Head of BP Jamsostek Jakarta Deny Yusyulian on February 27, 2024. This award was to show appreciation for PPA's commitment to supporting the National Movement for the Protection of Vulnerable Workers initiated by the government by providing protection to 2,000 high-risk and low-income informal sector workers. As the winner at the provincial level, PPA will advance to represent DKI Jakarta in the 2024 Paritrana Award at the national level. PPA continues to demonstrate compliance with labor and social security laws by participating in the BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) program through registration of the Company and employee participation in five Social Security Employment and Health Programs.

27 Februari 2024
February 27, 2024



Townhall PPA Morning Coffee

PPA Townhall Morning Coffee

PPA kembali menggelar Town Hall Meeting bertajuk "PPA Morning Coffee" pada 27 Februari 2024 sebagai forum komunikasi antara Direksi dan seluruh insan PPA untuk menyelaraskan tujuan serta membangun kolaborasi dalam mencapai target Perusahaan, sekaligus membuka rangkaian perayaan 20 tahun PPA. Acara diawali dengan pembukaan oleh Komisaris PPA, Marwanto Harjowiryo, diikuti diskusi antara Direksi dan karyawan serta sesi tanya jawab oleh perwakilan insan PPA, sebelum ditutup dengan pemotongan tumpeng sebagai simbol perayaan ulang tahun PPA ke-20 di tahun 2024.

PPA again held a Town Hall Meeting entitled "PPA Morning Coffee" on February 27, 2024, as a communication forum between the Board of Directors and all PPA personnel to align the Company's goals and build collaboration in achieving the targets, as well as opening a series of PPA's 20th anniversary celebrations. The event began with an opening by PPA Commissioner, Marwanto Harjowiryo, followed by a discussion between the Board of Directors and employees and a question and answer session by representatives of PPA personnel, before being closed with the cutting of tumpeng as a symbol of PPA's 20th anniversary celebration in 2024.

27 Februari 2024
25 Maret 2024



HUT PPA Ke-20

20th Anniversary of PPA

Sepanjang 2 dasawarsa, PPA turut berperan dalam mendukung upaya peningkatan nilai dari BUMN melalui perannya sebagai instrumen strategis Pemerintah dalam melakukan restrukturisasi BUMN Titip Kelola. Selain refocusing perannya sebagai satu-satunya restructuring house di Indonesia. PPA juga senantiasa melakukan penguatan fondasi melalui penyempurnaan manajemen risiko, serta penguatan tata kelola perusahaan yang baik. Kesuksesan yang diraih adalah hasil dari sinergi dan kolaborasi seluruh Insan PPA yang memiliki komitmen membawa PPA ke level yang lebih tinggi, dengan berpegang pada nilai-nilai AKHLAK. Segenap Keluarga Besar PPA mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas ucapan dan doa yang diberikan para stakeholders. Semoga PPA dapat terus mengemban amanat dan mewujudkan visinya menjadi Perusahaan turnaround dan mitra kepercayaan di bidang restrukturisasi, pengelolaan aset dan investasi.

Throughout 2 decades, PPA has played a role in supporting efforts to increase the value of SOEs through its role as a strategic instrument of the Government in restructuring Titip Kelola SOEs. In addition to refocusing its role as the only restructuring house in Indonesia. PPA also continues to strengthen the foundation through improving risk management, as well as strengthening good corporate governance. The success achieved is the result of the synergy and collaboration of all PPA People who are committed to bringing PPA to a higher level, by adhering to the values of AKHLAK. The entire PPA Big Family would like to express our deepest gratitude for the words and prayers given by the stakeholders. Hopefully PPA can continue to carry out the mandate and realize its vision of becoming a turnaround company and a trusted partner in the field of restructuring, asset management and investments.

25 Maret 2024
March 25, 2024



Perkembangan Bisnis dan Rencana Strategis Indosat

Indosat Business Development and Strategic Plan

Pada 25 Maret 2024 di Jakarta, jajaran Direksi PPA, termasuk Direktur Utama dan Direktur Keuangan & Manajemen Risiko Tree Asih Putra Sianturi, mengunjungi kantor pusat Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) dan disambut oleh Director & Chief Strategy & Execution Officer Ahmad Zulfikar serta Chief Legal and Regulatory Officer Reski Damayanti. Kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan pembaruan mengenai perkembangan bisnis dan rencana strategis IOH, sejalan dengan komitmen PPA sebagai pemegang saham aktif dengan kepemilikan 9,61%. PPA mendukung strategi IOH dalam memperkuat posisinya sebagai operator telekomunikasi digital terdepan di Indonesia melalui investasi pada infrastruktur jaringan, pengembangan produk, serta ekspansi bisnis.

On March 25, 2024 in Jakarta, the PPA Board of Directors, including President Director Muhammad Teguh Wirahadikusumah and Director of Finance & Risk Management Tree Asih Putra Sianturi, visited the Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) head office and were welcomed by Director & Chief Strategy & Execution Officer Ahmad Zulfikar and Chief Legal and Regulatory Officer Reski Damayanti. The visit was aimed to receiving updates on IOH's business developments and strategic plans, in line with PPA's commitment as an active shareholder with 9.61% ownership. PPA supports IOH's strategy to strengthen its position as a leading digital telecommunications operator in Indonesia through investment in network infrastructure, product development, and business expansion.

31 Maret 2024
March 31, 2024



**PPA Mendukung Kegiatan Peresmian Direct Call Batam-China
“Maiden Voyage MV SITC Hakata Voy 2407N”**
PPA Supports Batam-China Direct Call Inauguration Activities
“Maiden Voyage MV SITC Hakata Voy 2407N”

PPA sebagai bagian dari Holding BUMN Danareksa, terus menjalankan mandat restrukturisasi dan revitalisasi Persero Batam, yang diwujudkan melalui kehadirannya dalam peresmian Direct Call Batam-China “Maiden Voyage MV SITC Hakata Voy 2407N” pada 31 Maret 2024 di Terminal Peti Kemas Batu Ampar, Batam. Langkah ini mendukung transformasi Pelabuhan Batu Ampar menjadi terminal peti kemas modern guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan konektivitas rantai pasok internasional. Investasi yang dilakukan mencakup pengadaan Quay Crane, Rubber-Tyred Gantries, pengembangan container yard, reklamasi, serta perluasan dermaga utara. PPA berharap kerja sama ini terus berlanjut demi pertumbuhan ekonomi nasional dan kemajuan Persero Batam.

PPA as part of the Danareksa SOE Holding, continued to carry out its mandate of restructuring and revitalizing Persero Batam, which was evidenced by its presence at the inauguration of the Batam-China Direct Call “Maiden Voyage MV SITC Hakata Voy 2407N” on March 31, 2024 at the Batu Ampar Container Terminal, Batam. This step supports the transformation of Batu Ampar Port into a modern container terminal to increase efficiency, productivity, and connectivity of the international supply chain. The investments made include the procurement of Quay Cranes, Rubber-Tyred Gantries, container yard development, reclamation, and expansion of the north pier. PPA hopes that this cooperation will continue for the sake of national economic growth and the progress of Persero Batam.

5 April 2024
April 5, 2024



Mudik Gratis Bersama BUMN
Free Homecoming (Mudik) with SOE

Pada 5 April 2024, BUMN mengadakan program mudik gratis bagi lebih dari 80 ribu masyarakat, termasuk partisipasi PPA yang memberangkatkan 90 pemudik menggunakan bus eksekutif menuju Solo dan Yogyakarta. Acara flag-off berlangsung di Silang Monas dan lingkungan Holding BUMN Danareksa sebagai bagian dari dukungan PPA dalam program Mudik Asyik bersama BUMN, memberikan fasilitas perjalanan nyaman dan aman bagi para pemudik.

On April 5, 2024, SOE held a free homecoming program for more than 80 thousand people, including 90 travelers from PPA using executive buses to Solo and Yogyakarta. The flag-off event took place at Silang Monas and the SOE Danareksa Holding environment as part of PPA's support for the Mudik Asyik program with SOE, by providing comfortable and safe travel facilities for travelers.

23 April 2024
April 23, 2024



Pimpin Forum Pengelola Aset se-Asia, PPA Bekali Anggota dengan Informasi dan Perkembangan Terkini

Leading the Asia Asset Management Forum, PPA Equips Members with the Latest Information and Developments

Pada 22-23 April 2024 di Jakarta, PPA sebagai pemimpin International Public Asset Management Company (IPAF) menyelenggarakan IPAF Training Seminar untuk meningkatkan wawasan pengelolaan aset berkualitas rendah (NPL) bagi anggota IPAF dari berbagai negara di Asia. Acara ini dihadiri 100 peserta, termasuk pembuat kebijakan, profesional, dan investor, serta menghadirkan 22 narasumber internasional dan nasional. Sebanyak 12 delegasi dari delapan negara, termasuk Indonesia, Korea, China, Vietnam, Thailand, Kazakhstan, Malaysia, dan Mongolia, turut berpartisipasi. Direktur Utama PPA, Muhammad Teguh Wirahadikusumah, menegaskan bahwa kepemimpinan PPA di IPAF mencerminkan kepercayaan global dan berharap seminar ini menghasilkan gagasan serta solusi untuk menjaga stabilitas ekonomi regional.

On April 22-23, 2024 in Jakarta, PPA as the leader of the International Public Asset Management Company (IPAF) organized the IPAF Training Seminar to enhance insights on managing low-quality assets (NPLs) for IPAF members from various countries in Asia. The event was attended by 100 participants, including policymakers, professionals, and investors, and featured 22 international and national resource persons. A total of 12 delegations from eight countries, including Indonesia, Korea, China, Vietnam, Thailand, Kazakhstan, Malaysia, and Mongolia, participated. PPA President Director Muhammad Teguh Wirahadikusumah emphasized that PPA's leadership in IPAF reflects global trust and hoped the seminar would generate ideas and solutions to maintain regional economic stability.

6 Mei 2024
May 6, 2024



PPA Dukung Pengembangan Pelabuhan Terminal Peti Kemas (TPK) Batu Ampar Menjadi Pelabuhan Transshipment Internasional

PPA Supports Development of Batu Ampar Container Terminal Port (TPK) into an International Transshipment Port

PPA mendukung pengembangan Terminal Peti Kemas (TPK) Batu Ampar di Batam sebagai pelabuhan transshipment internasional untuk meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik. Pada 6 Mei 2024, dilakukan penandatanganan proyek pembangunan Container Yard antara PT Persero Batam dan PT Waskita Precast, disaksikan oleh pejabat kementerian dan pelaku industri. Modernisasi ini mencakup pemasangan peralatan canggih, reklamasi, dan pembangunan dermaga, dengan target peningkatan kapasitas dari 600 ribu TEUs/tahun menjadi 2,1 juta TEUs/tahun pada 2028, serta potensi penghematan biaya logistik hingga Rp4,8 triliun. Berlokasi strategis di Selat Malaka dan didukung status Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas (FTZ) serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), proyek ini diharapkan mendorong pertumbuhan industri, bisnis logistik, dan ekspor-impor di Batam.

PPA supports the development of Batu Ampar Container Terminal (TPK) in Batam as an international transshipment port to improve connectivity and logistics efficiency. On May 6, 2024, a signing of the Container Yard construction project between PT Persero Batam and PT Waskita Precast was carried out, witnessed by ministry officials and industry businesses. This modernization includes installing sophisticated equipment, reclamation, and construction of a pier, with a target to increase capacity from 600 thousand TEUs/year to 2.1 million TEUs/year by 2028, as well as potential logistics cost savings of up to Rp4.8 trillion. Strategically located in the Strait of Malacca and supported by Batam's status as a Free Trade Zone (FTZ) and Special Economic Zone (KEK), this project was expected to encourage industrial growth, logistics business, and exports-imports in Batam.

20 Mei 2024
May 20, 2024



PPA dan JIEP Dukung Pengembangan Desa Pertanian dan Wisata Terintegrasi di Desa Sriharjo

PPA and JIEP Support Development of Integrated Agricultural and Tourism Village in Sriharjo Village

PPA dan PT JIEP, sebagai anggota Holding BUMN Danareksa, mendapat kepercayaan dari Kementerian BUMN untuk menyelenggarakan Program Relawan Bakti BUMN Batch V di Desa Sriharjo, Imogiri, Bantul, Yogyakarta pada 20 Mei 2024, yang berlangsung dengan melibatkan 10 peserta dari berbagai BUMN dan anak usahanya. Para relawan melaksanakan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, lingkungan, dan pengembangan UMK, termasuk pelatihan tata kelola kepariwisataan, program Relawan Mengajar, penghijauan, perbaikan fasilitas MCK wisata, serta pelatihan digital marketing dan branding produk UMK. Melalui program ini, PPA dan PT JIEP berupaya mengembangkan potensi desa dan memberdayakan masyarakat agar dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.

PPA and PT JIEP, as members of the Danareksa SOE Holding, have been entrusted by the Ministry of SOE to organize the SOE Bakti Volunteer Program Batch V in Sriharjo, Imogiri, and Bantul Villages, Yogyakarta on May 20, 2024, involving 10 participants from various SOE and their subsidiaries. The volunteers carried out community empowerment activities in the fields of education, environment, and MSE development, including tourism management training, the Teaching Volunteer program, reforestation, improvement of tourist toilet facilities, and digital marketing and branding training for MSE products. Through this program, PPA and PT JIEP look to develop village potential and empower communities so they can have a positive impact on the local economy.

20 Juni 2024
June 20, 2024



PPA bersama Holding BUMN Danareksa Menerima Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Terminal Peti Kemas (TPK) Batu Ampar di Pulau Batam

PPA together with Danareksa SOE Holding Receives Specific Working Visit from Commission VI of the Indonesian House of Representatives at the Batu Ampar Container Terminal (TPK) on Batam Island

Pada 20 Juni 2024, PPA bersama Holding BUMN Danareksa menerima kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI yang dipimpin oleh Bapak Martin Manurung di Terminal Peti Kemas (TPK) Batu Ampar, Pulau Batam, untuk menggalang dukungan parlemen terhadap pengembangan pelabuhan ini menjadi transshipment internasional. Kunjungan ini dihadiri oleh 27 anggota Komisi VI DPR RI serta jajaran pimpinan Danareksa, PPA, dan BP Batam. Sebagai penerima mandat Surat Kuasa Khusus dari Menteri BUMN, PPA berkomitmen mendukung investasi pengembangan TPK Batu Ampar guna mewujudkan visi Pemerintah yang telah dicanangkan selama 30 tahun. Transformasi TPK Batu Ampar dari terminal multi-purpose menjadi terminal peti kemas diharapkan dapat menciptakan nilai ekonomi baru dan memperkuat posisi Batam sebagai simpul utama perdagangan dunia, sekaligus membuka lebih banyak peluang pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

On June 20, 2024, PPA together with Danareksa SOE Holding received a working visit from Commission VI of the Indonesian House of Representatives led by Martin Manurung at the Batu Ampar Container Terminal (TPK), Batam Island, to garner parliamentary support for the development of this port for international transshipment. This visit was attended by 27 Commission VI members from the Indonesian House of Representatives, as well as leadership from Danareksa, PPA, and BP Batam. As the recipient of the Special Power of Attorney mandate from the Minister of SOE, PPA is committed to supporting investments for the development of the Batu Ampar TPK to realize the Government's vision that has been planned for 30 years. The transformation of Batu Ampar TPK from a multi-purpose terminal to a container terminal is expected to create new economic value and strengthen Batam's position as a major hub for world trade, while opening up more opportunities for economic growth in the region.

9 Juli 2024
July 9, 2024



Tasyakuran Gedung Baru PPA Housewarming at PPA New Building

PPA menggelar tasyakuran pada 9 Juli 2024 untuk gedung baru di Menara Danareksa Lantai 17, yang dihadiri oleh jajaran Direksi PT Danareksa (Persero), Komisaris PPA Bapak Marwanto Harjowiryo, serta jajaran direksi dan seluruh karyawan PPA. Acara dimulai dengan sambutan dari para pimpinan, dilanjutkan dengan prosesi pemotongan tumpeng, serta ditutup dengan doa bersama. Dengan perpindahan kantor ini, PPA berharap dapat meningkatkan semangat kerja dan mempererat keharmonisan di antara insan dan direksi perusahaan.

PPA held a housewarming on July 9, 2024 for its new building at Menara Danareksa, 17th Floor, which was attended by Board of Directors of PT Danareksa (Persero), PPA Commissioner Mr. Marwanto Harjowiryo, as well as the board of directors and all PPA employees. The event began with remarks from the leaders, followed by a tumpeng cutting procession, and closed with a join prayer. With this office move, PPA hopes to increase work enthusiasm and strengthen harmony among the Company's people and Directors.

18 Juli 2024
July 18, 2024



PPA Laksanakan Peresmian ToWork Coworking Space Pertama Milik PPA

PPA Holds Inauguration of PPA's First ToWork Coworking Space

PPA meresmikan ToWork Coworking yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 18 Juli 2024 sebagai langkah menambah portofolio propertinya dan menangkap peluang bisnis dari tren work-from-anywhere (WFA) serta digital nomads. Coworking space pertama milik PPA ini dibangun di atas lahan seluas 623m² dengan luas bangunan 343m², mengusung konsep minimalis, dan menyediakan 67 kursi serta 4 ruang meeting dengan berbagai fasilitas pendukung, termasuk area terbuka untuk beragam aktivitas. Dengan pengembangan ini, PPA terus mengoptimalkan asetnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan pasar, sekaligus membuka peluang inovasi properti lainnya di masa depan.

PPA inaugurated ToWork Coworking in Kebayoran Baru on July 18, 2024 as a step to add to its property portfolio and capture business opportunities from the work-from-anywhere (WFA) and digital nomad trends. PPA's first coworking space was built on 623m² of land with a building area of 343m², carries a minimalist concept, and provides 67 chairs and 4 meeting rooms with supporting facilities, including an open area for activities. Through this development, PPA continues to optimize its assets according to market potential and needs, while opening up opportunities for other property innovations in the future.

12 Agustus 2024

August 12, 2024



RUPST Tahun 2024

AGMS 2024

PPA menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 12 Agustus 2024, yang dihadiri oleh Pemegang Saham, Dewan Komisaris Direksi, dan stakeholders untuk membahas kinerja Perusahaan selama tahun 2023 serta rencana strategis ke depan. Rapat ini berlangsung dengan penuh semangat positif dan ditutup dengan harapan bahwa PPA dapat terus melangkah maju serta mencapai target yang telah ditetapkan.

PPA held its Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) on August 12, 2024, which was attended by Shareholders, Board of Commissioners, Directors, and stakeholders to discuss the Company's performance during 2023 as well as the strategic plan going forward. The meeting was full of positive spirit and closed with the hope that PPA can continue to move forward and achieve the targets that have been set.

30 September 2024

September 30, 2024



Peran PPA Mendukung Kebangkitan Industri Pariwisata dalam Penguatan BUMN Menuju Indonesia Emas

PPA's Role in Supporting the Revival of the Tourism Industry by Strengthening SOE Towards Golden Indonesia

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggelar acara "Penguatan BUMN Menuju Indonesia Emas" pada 30 September 2024 sebagai upaya mendorong pembangunan negeri dan mewujudkan berbagai kemajuan strategis. Sebagai bagian dari Holding BUMN Danareksa, PPA mendukung kebangkitan industri pariwisata melalui pembiayaan Special Situations Fund bagi Garuda dan Citilink untuk restorasi armada pesawat, pemulihan ekonomi pasca COVID-19 melalui pengelolaan NPL senilai Rp12 triliun, serta pengembangan ekosistem musik dan UMKM melalui revitalisasi Lokananta di Solo. Inisiatif ini menjadi bagian dari transformasi BUMN dalam lima tahun terakhir di bawah kepemimpinan Erick Thohir.

The Ministry of SOE held an event called "Strengthening SOE Towards Golden Indonesia" on September 30, 2024 in an effort to encourage national development and realize strategic advances. As part of Danareksa Holding, PPA supports the revival of the tourism industry through Special Situations Fund financing for Garuda and Citilink for aircraft fleet restoration, post-COVID-19 economic recovery through NPL management for Rp12 trillion, and development of the music and MSME ecosystem through revitalization of Lokananta in Solo. These initiatives are part of the transformation of SOE in the last five years under the leadership of Erick Thohir.

28 Oktober 2024

October 28, 2024



Dukung Regenerasi Ekosistem Musik, Holding BUMN Danareksa Reaktivasi Lokananta Records melalui "Bintang Muda Lokananta"

Supporting Music Ecosystem Regeneration, Danareksa SOE Holding Reactivates Lokananta Records through "Bintang Muda Lokananta"

Holding BUMN Danareksa bersama PPA berkomitmen dalam mengoptimalkan aset Lokananta sebagai creative & commercial hub bagi musisi, seniman, dan UMKM untuk memberikan dampak sosial, ekonomi, dan budaya. Sebagai bagian dari transformasi tersebut, Danareksa-PPA meluncurkan ajang pencarian bakat "Bintang Muda Lokananta" bertepatan dengan hari jadi Lokananta ke-68 pada 28 Oktober 2024, yang bertujuan menginkubasi musisi pendatang baru dari seluruh Indonesia. Para musisi terpilih akan menjalani mentoring, rekaman, perilsan single, hingga tur promosi di Yogyakarta, Jakarta, dan Surakarta. Direktur Investasi PPA menegaskan bahwa program ini tidak hanya menciptakan nilai bisnis, tetapi juga berdampak sosial dengan meningkatkan kualitas pendidikan musik dan memperkuat ekosistem industri musik di Indonesia. Sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), program ini mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, khususnya pendidikan berkualitas dan pertumbuhan ekonomi, dengan Danareksa-PPA menggandeng Yayasan Radar Budaya Kreatif untuk kurasi pelatihan dan mentoring bagi peserta.

Danareksa SOE Holding with PPA committed to optimizing Lokananta's assets as a creative & commercial hub for musicians, artists, and MSMEs to provide social, economic, and cultural impacts. As part of this transformation, Danareksa-PPA launched a talent search event "Bintang Muda Lokananta" coinciding with Lokananta's 68th anniversary on October 28, 2024, aimed at incubating new musicians from all over Indonesia. The selected musicians will undergo mentoring, recording, releasing singles, and a promotional tour in Yogyakarta, Jakarta, and Surakarta. PPA Investment Director Ridha Rid Lesmana emphasized that this program not only creates business value, but also has a social impact by improving the quality of music education and strengthening the music industry ecosystem in Indonesia. As part of Social and Environmental Responsibility (SER), this program supports the Sustainable Development Goals, especially quality education and economic growth, with Danareksa-PPA collaborating with the Radar Budaya Kreatif Foundation to curate training and mentoring for participants.

1 Desember 2024
December 1, 2024



Turut Hijaukan Bumi, PPA Libatkan Karyawan dalam Program Bagi Bibit Pohon untuk Masyarakat

Contributing to Greening the Earth, PPA Involves Employees in a Program to Share Tree Seedlings in the Community

Dalam rangka memperingati Hari Pohon Sedunia, PPA melibatkan karyawan dalam Program Bagi Bibit Pohon yang dilaksanakan pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jalan Sudirman, Jakarta Selatan, pada Minggu, 1 Desember 2024. Program ini bertujuan untuk berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim dengan membagikan 500 bibit pohon, termasuk jeruk dan sawo, kepada masyarakat. Selain mendukung kelestarian lingkungan, kegiatan ini juga sejalan dengan aspirasi pemegang saham dalam mendorong keseimbangan kerja dan kehidupan (*work-life balance*) melalui keterlibatan langsung karyawan dalam program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Tak hanya membagikan bibit pohon, karyawan juga berpartisipasi dalam gerakan reuse dengan mengumpulkan spunbond dan kantong plastik bekas layak guna sebagai pembungkus bibit. Dengan tambahan 500 bibit ini, sepanjang 2024 PPA telah menyumbangkan total 1.000 pohon yang tersebar di Medan, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Makassar. Diharapkan kontribusi ini dapat membantu penghijauan, menghasilkan oksigen, serta mengurangi emisi karbon demi kelestarian bumi.

To commemorate World Tree Day, PPA involved its employees in the Tree Seedling Distribution Program which was held on Car Free Day (CFD) on Jalan Sudirman, South Jakarta, on Sunday, December 1, 2024. This program's aim is to contribute to handling climate change by distributing 500 tree seedlings, including orange and sapodilla, to the community. In addition to supporting environmental sustainability, this activity is also in line with the shareholders' aspirations to encourage a work-life balance through direct employee involvement in the Social and Environmental Responsibility (SER) program. In addition to distributing tree seedlings, employees also participated in the reuse movement by collecting used spunbond and plastic bags that were still suitable for use as seed packaging. With the addition of these 500 seedlings, throughout 2024 PPA donated a total of 1,000 trees across Medan, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, and Makassar. It is hoped that this contribution will help reforestation, produce oxygen, and reduce carbon emissions for the sake of preserving the earth.

9 Desember 2024
December 9, 2024



Jajaki Pertemuan Business Matching, UMK Binaan PPA Raih Kesepakatan Bisnis dengan Pengusaha Negeri Jiran

Explore Business Matching Meeting, PPA-Fostered MSEs Achieve Business

PPA bersama Holding BUMN Danareksa membawa 12 UMK terpilih di bidang fashion, makanan, dan kerajinan ke Johor Bahru, Malaysia, dalam Program Lateral Thinking-Business Matching untuk mendorong inovasi, peluang bisnis, dan ekspor produk halal pada 9 Desember 2024. Dengan dukungan Rumah BUMN Batam, kegiatan meliputi business matching yang difasilitasi Konsulat Jenderal RI, kunjungan benchmarking ke workshop industri makanan halal, serta diskusi kerja sama dengan Halal Valet di Angsana Mall. Program ini membuahkan hasil bagi UMK binaan PPA, yakni Anabundo asal Padang yang menerima pesanan 500 pack coklat goreng dan Sahawood asal Surabaya yang mendapatkan permintaan kitchenware customized untuk F&B. Melalui program ini, PPA berupaya memperluas peluang ekspor dan meningkatkan daya saing UMK lokal di pasar global.

PPA together with Danareksa SOE Holding brought 12 selected MSEs in the fashion, food, and craft sectors to Johor Bahru, Malaysia, in the Lateral Thinking-Business Matching Program to encourage innovation, business opportunities, and exports of halal products on December 9, 2024. With the support of Rumah SOE Batam, activities included business matching facilitated by the Indonesian Consulate General, benchmarking visits to halal food industry workshops, and discussions on cooperation with Halal Valet at Angsana Mall. This program yielded results for fostered MSEs by PPA, namely Anabundo from Padang who received an order for 500 packs of fried chocolate, and Sahawood from Surabaya who received a request for customized kitchenware for F&B. Through this program, PPA seeks to expand export opportunities and increase the competitiveness of local MSEs in the global market.







LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT REPORT

PPA berkomitmen untuk terus meningkatkan nilai aset yang dikelola melalui pendekatan strategis yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan. Fokus utama PPA diberikan pada peningkatan nilai aset melalui restrukturisasi bisnis perusahaan yang berada dalam portofolionya, dengan mengedepankan efisiensi operasional dan inovasi dalam tata kelola.

PPA is committed to continuously increasing the assets managed through a strategic approach oriented towards sustainable growth. PPA's main focus will be given to increasing asset value through restructuring the Company's business in its portfolio, by prioritizing operational efficiency and governance innovation.

Laporan Dewan Komisaris

Board Of Commissioners Report



MARWANTO
HARJOWIRYONO

Komisaris
Commissioners

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) atau Perseroan dapat melalui tahun 2024 dengan baik. Pada tahun ini, Perseroan telah membuktikan kinerjanya dengan baik melalui pelaksanaan kegiatan 3 (tiga) pilar yang menjadi target PPA. Sebagai pemegang Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Menteri BUMN, PPA dapat memberikan nilai tambah bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikuasakan untuk dikelola oleh PPA sebagai BUMN Titip Kelola (TK).

PPA juga berupaya untuk dapat mengelola *Non Performing Loan* (NPL) milik perbankan/Lembaga keuangan sehingga dapat menghasilkan return yang optimal, dan PPA berhasil melaksanakan kegiatan *special situation fund* (SSF) yang hingga saat ini dapat memberikan margin positif bagi PPA. Selain itu yang tidak kalah penting adalah Saham Minoritas yang diserahkan kepada PPA untuk dikelola telah memberikan dividen yang hingga saat ini menjadi sumber pendapatan utama bagi PPA.

Dewan Komisaris mencermati bahwa Perseroan secara konsisten telah mengimplementasikan berbagai langkah strategis, termasuk perbaikan kondisi keuangan dan operasional, optimalisasi tata kelola perusahaan, serta pengembangan pasar yang lebih luas. Melalui strategi pertumbuhan yang terarah, Perseroan berhasil memperkuat fundamental bisnis portofolio yang dikelola, menempatkannya pada posisi yang lebih stabil dan kompetitif untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah dinamika industri yang terus berkembang.

Pandangan atas Perekonomian Nasional

Menghadapi ketidakpastian global yang masih berlanjut, perekonomian Indonesia berhasil menunjukkan daya tahan yang luar biasa. Meskipun terdapat tekanan dari kondisi geopolitik dan dinamika pasar internasional, Indonesia berhasil mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang positif. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang responsif dalam menjaga stabilitas makroekonomi, serta keberlanjutan program-program pembangunan yang mendukung sektor-sektor strategis, seperti infrastruktur, digitalisasi, dan ketahanan pangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), beberapa faktor penting yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2024 ini adalah keberlanjutan pemulihan pasca-pandemi, kondisi cuaca yang mendukung sektor pertanian, serta kebijakan fiskal dan moneter yang tetap mendukung pertumbuhan ekonomi.

Dalam laporannya, BPS menyebutkan, pada triwulan I-2024, perekonomian Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,11% (year-on-year/y-o-y). Sektor yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ini adalah lapangan usaha Administrasi Pemerintahan,

Dear Respected Shareholders and Stakeholders,

We give thanks to the presence of God Almighty who has bestowed His mercy and grace upon all of us, so that PT Perusahaan Pengelola Aset or PPA or the Company could pass through 2024 well. This year, the Company has proven its performance well through the implementation of the 3 (three) pillars that are the targets of PPA. As the holder of a Special Power of Attorney (SKK) from the Minister of SOEs, PPA provides added value to State-Owned Enterprises (SOEs) that are authorized to be managed by PPA as SOEs Under Management (TK).

PPA also endeavors to manage Non Performing Loans (NPL) owned by banks/financial institutions so they can produce optimal returns, and PPA has carried out special situation fund (SSF) activities that to date have provided a positive margin for PPA. In addition, what is no less important are the Minority Shares handed over to PPA that have provided dividends that have become the main source of income for PPA.

The Board of Commissioners has noted that the Company has consistently applied strategic steps, including improving financial and operational conditions, optimizing corporate governance, and developing a wider market. Through the targeted growth strategy, the Company has strengthened the business fundamentals of the managed portfolio, making it more stable and in a competitive position to achieve sustainable growth despite the dynamics of the ever-evolving industry.

View on the National Economy

In the face of the ongoing global uncertainty, the Indonesian economy has demonstrated remarkable resilience. Despite the pressure from geopolitical conditions and international market dynamics, Indonesia has managed to maintain a positive economic growth. This success is thanks to the Government policies for maintaining macroeconomic stability, as well as the sustainability of the development programs that support strategic sectors, such as infrastructure, digitalization, and food security. Based on data from the Central Statistics Agency (BPS), the important factors that influenced Indonesia's economic growth in 2024 included the sustainability of post-pandemic recovery, weather conditions that supported the agricultural sector, and fiscal and monetary policies that continued to support economic growth.

In its report, BPS stated that in Q1 2024, the Indonesian economy grew by 5.11% (year-on-year/y-o-y). The sectors that contributed most to this growth were the Government Administration, Defense, and Mandatory Social Security business fields that grew by 18.88%.

Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib yang tumbuh sebesar 18,88%. Pada triwulan II-2024, perekonomian Indonesia masih mencatatkan angka positif dengan pertumbuhan 5,05% (y-o-y). Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 10,17%, yang mencerminkan adanya peningkatan permintaan di sektor pariwisata dan layanan konsumen. Sementara itu, pada triwulan III-2024, pertumbuhan ekonomi Indonesia sedikit melambat menjadi 4,95% (y-o-y). Meskipun demikian, sektor Jasa Lainnya masih mencatatkan pertumbuhan tinggi sebesar 9,95%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan IV-2024 terhadap triwulan IV-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,36 persen. Sementara itu, Komponen Ekspor Barang dan Jasa pada sisi pengeluaran mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 7,63 persen. Lebih lanjut, Badan Pusat Statistik (BPS) pada tanggal 5 Februari 2025, perekonomian Indonesia pada tahun 2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp22.139,0 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp78,6 juta atau USD4.960,3. Ekonomi Indonesia tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03%, sedikit melambat dibanding tahun 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,05%.

Dewan Komisaris percaya bahwa Indonesia berada dalam posisi yang baik untuk terus tumbuh. Kebijakan ekonomi yang progresif, ditambah dengan semangat kewirausahaan yang tinggi, memberikan harapan bagi masa depan yang lebih cerah. Dewan Komisaris mendorong Perseroan untuk terus beradaptasi dengan cepat, menjajaki peluang baru yang muncul, serta tetap menjaga tata kelola yang baik dan keberlanjutan serta tetap memperhatikan risiko yang timbul dari tantangan perekonomian global, dalam setiap langkah strategis yang diambil. Ke depan, Dewan Komisaris yakin bahwa dengan sinergi yang kuat antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, Indonesia akan mampu mengatasi tantangan dan meraih potensi pertumbuhan yang lebih besar di masa yang akan datang.

Pengawasan dalam Perumusan dan Implementasi Strategi yang Disusun oleh Direksi

Sesuai dengan mandat yang diberikan, Dewan Komisaris menjalankan perannya dengan penuh tanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan arahan terhadap perumusan serta pelaksanaan strategi dan kebijakan perusahaan. Pengawasan ini dilakukan dengan berkoordinasi erat dengan Direksi, untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mendukung pencapaian visi dan misi Perseroan. Dalam prosesnya, Dewan Komisaris juga memberikan masukan dan saran yang konstruktif dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), serta meninjau dan mengevaluasi pelaksanaannya secara berkala. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Perseroan tetap berada pada jalur yang tepat dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan, bahkan di tengah kondisi pasar yang dinamis.

Dewan Komisaris juga memegang peran penting dalam memberikan pengawasan terhadap keputusan strategis yang diambil oleh Direksi. Dalam hal ini, Dewan Komisaris menyampaikan pandangan dan saran terkait kebijakan dan strategi Perseroan melalui berbagai sarana, baik dalam rapat rutin, rapat gabungan maupun pertemuan lainnya yang disediakan oleh Perseroan maupun secara tertulis. Dengan demikian, melalui proses pengawasan yang transparan,

In QII 2024, the Indonesian economy still recorded a positive growth of 5.05% (y-o-y), with the Accommodation and Food and Beverage Provision sector recorded the highest growth of 10.17%, reflecting an increase in demand in the tourism and consumer services sectors. Meanwhile, in QIII 2024, Indonesia's economic growth slowed slightly to 4.95% (y-o-y). However, the Other Services sector still recorded higher growth of 9.95%.

Indonesia's economic growth in the QIV 2024 compared to the QIV 2023 was 5.02% (y-on-y). In terms of production, the Other Services Business Field experienced the highest growth of 11.36%. While, the Export Component of Goods and Services on the expenditure side experienced the highest growth of 7.63%. Furthermore, the Central Statistics Agency (BPS) on February 5, 2025, stated that the Indonesian economy in 2024, measured by Gross Domestic Product (GDP) at current prices, reached Rp22,139.0 trillion with GDP per capita reaching Rp78.6 million or USD4,960.3. The Indonesian economy in 2024 grew by 5.03%, slightly slower than 5.05% in 2023 of.

The Board of Commissioners believes that Indonesia is well positioned to continue growing. Progressive economic policies, coupled with a high entrepreneurial spirit, provide hope for a brighter future. The Board of Commissioners would like to encourage the Company to continue to adapt quickly, explore new opportunities that arise, and maintain good governance and sustainability and continue to pay attention to the risks arising from global economic challenges, in every strategic step taken. Looking forward, the Board of Commissioners is confident that with strong synergy between the government, private sector, and society, Indonesia will overcome any challenges and achieve greater growth potential in the future.

Supervision of the Formulation and Implementation of the Board of Directors' Strategies

In line with the mandate given, the Board of Commissioners carried out its supervisory role and provided directives for the formulation and implementation of the Company's strategies and policies. This supervision was carried out in close coordination with the Board of Directors, to ensure that every decision taken supported the achievement of the Company's vision and mission. In the process, the Board of Commissioners also provided constructive input and suggestions for the preparation of the Company's Work Plan and Budget (RKAP), as well as reviewed and evaluated its implementation regularly to ensure that the Company remained on the right track to achieve the targets set, despite the dynamic market conditions.

The Board of Commissioners also plays an important role by supervising the strategic decisions taken by the Board of Directors. To do so, the Board of Commissioners conveys its views and suggestions related to the Company's policies and strategies through routine meetings, joint meetings and other meetings or in writing. Through this transparent, collaborative and good governance-based supervision process, the Board of Commissioners ensures that the

kolaboratif, dan berbasis pada prinsip tata kelola yang baik, Dewan Komisaris memastikan bahwa Perseroan dapat terus berkembang dan menghadapi tantangan dengan langkah yang tepat, menjaga kesinambungan serta menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Mekanisme dan Frekuensi Pemberian Nasihat Kepada Direksi

Sebagai organ yang memiliki fungsi pengawasan, Dewan Komisaris memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keselarasan antara operasional Perseroan dan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang bertujuan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap langkah yang diambil. Dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut, Dewan Komisaris berpegang teguh pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghormati hak dan kewenangan yang dimiliki oleh Direksi dalam pengelolaan Perseroan. Dewan Komisaris tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis bagi Direksi, dengan memberikan pandangan dan nasihat yang dapat memperkaya pengambilan keputusan manajerial. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dilakukan melalui berbagai mekanisme yang efektif, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Selain itu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dewan Komisaris memiliki wewenang penuh untuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen yang diperlukan guna memastikan bahwa kegiatan Perseroan berjalan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Proses ini juga memberikan Dewan Komisaris gambaran yang jelas mengenai kinerja keuangan dan operasional Perseroan, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang relevan bagi perbaikan dan pengembangan Perseroan ke depannya.

Sementara itu, mekanisme pengawasan langsung dilakukan melalui rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi, yang pada tahun 2024 dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) kali. Rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi menjadi sarana yang efektif untuk memperoleh informasi mengenai jalannya perusahaan serta memberikan arahan terkait kinerja Perseroan selain untuk mendiskusikan berbagai program strategis dan pengembangan yang direncanakan oleh Direksi. Forum ini memungkinkan Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa strategi yang dijalankan oleh manajemen telah melalui proses yang tepat dan mendalam, serta mendapatkan dukungan penuh dari seluruh jajaran pengurus Perseroan.

Penilaian Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Direksi atas Pengelolaan Perseroan

Dewan Komisaris memandang bahwa Direksi telah menjalankan arahan pemegang saham dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Dalam setiap langkah yang diambil, Direksi selalu mengedepankan kepentingan pemegang saham dengan mempertimbangkan kondisi pasar, kinerja keuangan Perseroan, dan perkembangan industri yang relevan. Dewan Komisaris melihat bahwa Direksi tidak hanya berfokus pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan, tetapi juga memastikan agar setiap keputusan yang diambil tetap berorientasi pada keberlanjutan dan stabilitas jangka panjang Perseroan. Dengan demikian, Dewan

Company will continue to grow and face challenges by following the right steps, maintaining continuity and creating added value for all stakeholders.

Mechanism and Frequency of Providing Advice to the Board of Directors

As a supervisory function, the Board of Commissioners plays a very important role in maintaining harmony between the Company's operations and the good governance principles to ensure transparency, accountability, and integrity in every step taken. In carrying out its supervisory function, the Board of Commissioners adheres to the prevailing laws and regulations and respects the rights and authorities of the Board of Directors in managing the Company. The Board of Commissioners not only acts as a supervisor, but also as a strategic partner for the Board of Directors, by providing views and advice that can enrich managerial decision-making. The Board of Commissioners' supervision uses several direct and indirect mechanisms.

In addition, in accordance with applicable laws and regulations, the Board of Commissioners has full authority to examine any necessary documents to ensure that the Company's activities are carried out in accordance with the prudential and good governance principles. This process also provides the Board of Commissioners with a clear picture of the Company's financial and operational performance, so that it can provide relevant recommendations for the Company's future improvement and development.

Our direct supervision mechanism is carried out through joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors, which in 2024 were held 12 (twelve) times. Joint meetings between the Board of Commissioners and the Board of Directors are an effective means of obtaining information regarding the running of the Company, and for providing directives on the Company's performance in addition to discussing strategic programs and developments planned by the Board of Directors. This forum allows the Board of Commissioners to ensure that the strategies applied by management have passed through the right and in-depth process, and have received full support from all levels of the Company's management.

Board of Commissioners' Assessment of the Board of Directors' Company Management Performance

The Board of Commissioners' view is that the Board of Directors has carried out the shareholders' directives with full responsibility and sincerity. In every step taken, the Board of Directors always prioritized the interests of shareholders by considering market conditions, the Company's financial performance, and relevant industry developments. The Board of Commissioners' view is that the Board of Directors not only focused on achieving the targets set, but also ensured that every decision taken was oriented towards the Company's long-term sustainability and stability. Thus, the Board of Commissioners is confident that the strategies applied by the Board

Komisaris yakin bahwa strategi yang dijalankan oleh Direksi tidak hanya akan mendatangkan manfaat bagi Perseroan, tetapi juga akan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Dengan membukukan laba tahun 2024 sebesar Rp205,4 miliar, Direksi mampu menghasilkan kinerja di atas RKAP yang telah ditetapkan, sekalipun sumbangan terbesar tetap berasal dari dividen saham minoritas. Selain itu Direksi juga mampu mengendalikan beban di bawah nilai yang ditetapkan pada pagu anggaran sehingga dapat dikatakan Perusahaan mampu beroperasi secara efisien pada tahun 2024. Namun Dewan Komisaris mengarahkan agar Direksi tetap dapat mengupayakan perbaikan pada kinerja Entitas Anak sehingga dapat berkontribusi dengan lebih baik pada tahun-tahun mendatang, agar dapat mendukung kinerja konsolidasian dengan lebih baik.

Lebih lanjut, Dewan Komisaris secara aktif mengikuti perkembangan pelaksanaan RKAP, melakukan pemantauan terhadap pencapaian target dan realisasi anggaran yang telah disepakati dalam RUPS, dan memberikan arahan yang diperlukan untuk memastikan bahwa jalannya operasional tetap selaras dengan tujuan strategis Perseroan. Komunikasi yang terbuka dan konstruktif antara Dewan Komisaris dan Direksi menjadi kunci dalam memastikan bahwa arahan pemegang saham dapat diimplementasikan dengan efektif, serta dalam menangani segala tantangan dan peluang yang muncul di sepanjang tahun. Dewan Komisaris akan terus berkomitmen untuk menjaga hubungan yang baik dengan pemegang saham dan memastikan bahwa Perseroan tetap berada di jalur yang tepat untuk meraih keberhasilan yang berkelanjutan.

Pandangan atas Prospek Usaha yang Disusun Direksi

Dewan Komisaris memberikan pandangan yang positif terhadap proyeksi usaha yang disusun oleh Direksi, terutama terkait dengan upaya turnaround Perseroan dalam menciptakan nilai tambah yang signifikan, serta mendukung BUMN Indonesia dalam membangun model bisnis yang berkelanjutan. Dewan Komisaris mengapresiasi strategi yang diambil oleh Direksi dalam merancang langkah-langkah transformasi yang komprehensif, dengan fokus pada tiga pilar utama yang merupakan landasan dari model bisnis PPA, yaitu BUMN Titip Kelola, Pengelolaan Non-Performing Loan (NPL) Perbankan, dan Special Situations Fund (SSF).

Dewan Komisaris menyadari bahwa upaya *turnaround* yang dilakukan oleh Perseroan bukanlah hal yang mudah, mengingat tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dan sektor BUMN secara keseluruhan. Namun, dengan dukungan penuh dari pemerintah, tim yang berpengalaman, serta jaringan kelembagaan yang kuat, Dewan Komisaris percaya bahwa Perseroan berada pada jalur yang tepat untuk mencapai transformasi yang berkelanjutan.

Dalam hal ini, Dewan Komisaris mendukung penuh penerapan strategi yang berfokus pada pengelolaan aset-aset yang kurang produktif, serta menciptakan sinergi yang optimal antara PPA dan BUMN lainnya terutama dalam rangka pengelolaan BUMN TK, guna memaksimalkan potensi yang ada dan memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Dewan Komisaris percaya bahwa melalui pendekatan holistik yang menggabungkan ketiga pilar ini, Perseroan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung BUMN Indonesia untuk mencapai model bisnis yang lebih berkelanjutan.

of Directors will not only bring benefit to the Company, but will also provide added value to the shareholders and all stakeholders.

By realizing a profit of Rp205.4 billion in 2024, the Board of Directors' performance was above the established RKAP, even though the largest contribution still came from minority share dividends. The Board of Directors also controlled expenses below the budget ceiling so that it can be said that the Company operated efficiently in 2024. However, the Board of Commissioners would like to direct the Board of Directors to continue to improve the performance of Subsidiaries so they can contribute more in the coming years, and support a better consolidated performance.

The Board of Commissioners actively follows the application of the RKAP agreed upon in the GMS, by monitoring the target achievements and budget realized, and will provide any necessary directives to ensure the operational processes remains in line with the Company's strategic objectives. Open and constructive communication between the Board of Commissioners and the Board of Directors is key to ensuring that shareholders' directives can be implemented effectively, as well as address all challenges and opportunities that arise throughout the year. The Board of Commissioners will remain committed to maintaining good relations with shareholders and ensuring that the Company remains on the right track to achieving sustainable success.

View on Business Prospects Prepared by the Board of Directors

The Board of Commissioners has a positive view of the business projections prepared by the Board of Directors, especially related to the Company's turnaround efforts for creating significant added value, as well as supporting Indonesian SOEs in building a sustainable business model. The Board of Commissioners appreciates the strategies instigated by the Board of Directors in designing comprehensive transformation steps, with a focus on three main pillars that are the foundation of the PPA business model, namely SOEs Under Management, Management of Banking Non-Performing Loans (NPLs), and Special Situations Fund (SSF).

The Board of Commissioners is aware that the turnaround efforts undertaken by the Company are not easy, considering the challenges faced by the company and the BUMN sector as a whole. However, with full support from the Government, an experienced team, and a strong institutional network, the Board of Commissioners believes that the Company is on the right track to achieve sustainable transformation.

In this regard, the Board of Commissioners fully supports the strategy that focuses on managing less productive assets, as well as creating optimal synergy between PPA and other SOEs, especially for the management of SOE Under Management to maximize existing potential and provide real contributions to national development. The Board of Commissioners believes that through a holistic approach that combines these three pillars, the Company can make a significant contribution to supporting Indonesian SOE, and so achieve a more sustainable business model.

Pandangan Dewan Komisaris atas Penerapan GCG

Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi terhadap penerapan Good Corporate Governance/GCG di Perseroan. Dewan Komisaris menilai bahwa PPA telah berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dengan sebaik-baiknya, sebagai landasan untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap aspek pengelolaan Perseroan. GCG ini tidak hanya penting untuk memenuhi regulasi yang berlaku, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh Perseroan selalu berorientasi pada kepentingan pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, mitra, dan masyarakat luas.

Dewan Komisaris melihat bahwa Perseroan telah mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat struktur dan mekanisme pengawasan yang ada, baik melalui peningkatan kinerja internal, pengembangan kebijakan yang jelas, serta penerapan prinsip transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan. Dewan Komisaris mencatat bahwa Perseroan telah mengedepankan prinsip-prinsip etika yang tinggi dalam operasionalnya, dan ini tercermin dalam perilaku yang transparan, profesional, serta berbasis pada integritas yang kuat dalam seluruh lini bisnis.

Sebagai bagian dari pengawasan yang lebih intensif, Dewan Komisaris selalu memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan strategis yang diambil oleh Direksi sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Secara keseluruhan, Dewan Komisaris menyambut baik upaya Perseroan dalam menerapkan GCG, dan Dewan Komisaris mendukung penuh langkah-langkah yang diambil oleh Direksi untuk terus meningkatkan standar GCG di Perseroan. Dewan Komisaris percaya bahwa dengan komitmen yang kuat terhadap penerapan tata kelola yang baik, Perseroan akan mampu menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, mengurangi potensi risiko, yang pada akhirnya akan mendukung pencapaian visi dan misi Perseroan dalam jangka panjang.

Selain itu, sebagai Perusahaan yang ditetapkan oleh Holding Danareksa di dalam kategori BUMN Sistemik A, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) yang diketuai oleh Dewan Komisaris PT PPA Induk dan beranggotakan Anggota Dewan Komisaris PT PPA Finance dan PT PPA Kapital. Selama tahun 2024 telah melaksanakan tugas-tugas sebagai KTKT dengan baik.

Pandangan Dewan Komisaris atas Penerapan Pengelolaan Whistleblowing System (WBS)

Perseroan telah menyediakan sarana yang efektif untuk pelaksanaan Whistleblowing System (WBS) melalui Pedoman Whistleblowing System yang komprehensif dan saluran pelaporan pelanggaran yang mudah diakses. Sistem pelaporan tersebut mencakup berbagai saluran, baik melalui aplikasi/sistem email di wbs@ptppa.com, website resmi perusahaan www.ptppa.co.id, maupun saluran pelaporan langsung yang dapat digunakan oleh seluruh karyawan maupun pihak eksternal yang terlibat. Untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan sistem ini, tim yang ditunjuk oleh manajemen secara berkala melakukan pemantauan dan tindak lanjut terhadap setiap laporan yang diterima, guna memastikan bahwa setiap pelaporan ditindaklanjuti dengan tindakan yang sesuai dan proporsional.

Board of Commissioners' View on GCG Implementation

The Board of Commissioners would like to express its appreciation for the Good Corporate Governance/GCG implementation in the Company. The Board of Commissioners' view is that PPA has rightly committed to applying the GCG principles, as the foundation for maintaining transparency, accountability, and integrity in all aspects of the Company's management. GCG is not only important for complying with applicable regulations, but also ensures that every step taken by the Company is always oriented towards the interests of stakeholders, including the shareholders, employees, partners, and the wider community.

The Board of Commissioners' view is that the Company has taken strategic steps to strengthen the existing supervisory structure and mechanism, both through improving internal performance, developing clear policies, and implementing the principle of transparency in every decision-making process. The Board of Commissioners notes that the Company has prioritized high ethical principles in its operations, and this is reflected in the transparent and professional behavior that is based on strong integrity in all business lines.

As part of more intensive supervision, the Board of Commissioners ensures that all policy and strategic decisions taken by the Board of Directors are in accordance with GCG principles. Overall, the Board of Commissioners welcomes the Company's efforts for implementing GCG, and the Board of Commissioners fully supports the steps taken by the Board of Directors to continue to improve the Company's GCG standards. The Board of Commissioners believes that with a strong commitment to the good governance, the Company will create a healthy business environment, reduce potential risks, which will ultimately support the achievement of the Company's vision and mission in the long term.

As a Company designated by Holding Danareksa in the category of Systemic A SOE, the Board of Commissioners has established an Integrated Governance Committee (KTKT) chaired by the Board of Commissioners of PT PPA, with Members from the Board of Commissioners of PT PPA Finance and PT PPA Kapital. During 2024, KTKT carried out its duties properly.

Board of Commissioners' View on the Implementation of Whistleblowing System (WBS) Management

The Company provides an effective Whistleblowing System (WBS) with comprehensive WBS Guidelines and easily accessible violation reporting channels. These channels include emails via the application/system at wbs@ptppa.com, the Company's official website www.ptppa.co.id, or via direct reporting channels that can be used by all employees and external parties involved. To ensure the system's effectiveness and sustainability, a team appointed by management periodically monitors and follows up on every report received, to ensure that each report is followed up with appropriate and proportional action.

Dewan Komisaris memiliki peran penting dalam pengawasan implementasi Whistleblowing System ini, termasuk memastikan bahwa prosedur yang ada diikuti dengan benar dan bahwa sistem ini berfungsi sebagaimana mestinya. Dewan Komisaris secara rutin melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan WBS, untuk memastikan bahwa sistem WBS tidak hanya berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi juga memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada seluruh pemangku kepentingan dalam melaporkan setiap dugaan pelanggaran tanpa adanya rasa takut akan pembalasan.

Penilaian Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki tiga organ pendukung utama, yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan GCG, serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Setiap komite ini memiliki tanggung jawab yang spesifik dan memainkan peran penting dalam membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan secara menyeluruh. Komite-komite ini bertugas untuk memberikan masukan, analisis, dan rekomendasi yang diperlukan dalam mengambil keputusan strategis yang dapat mempengaruhi arah dan perkembangan Perseroan.

Dewan Komisaris menilai bahwa komite-komite di bawah pengawasan Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan cukup efektif. Setiap komite telah bekerja sesuai dengan pedoman dan kerangka kerja yang ditetapkan, memastikan bahwa semua aspek pengawasan dan tata kelola perusahaan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Informasi Komposisi dan Susunan Dewan Komisaris

Hingga 31 Desember 2024, komposisi dan susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period
Marwanto Harjowiryo	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS No. SK-326/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 GMS Decision No. SK-326/MBU/10/2020 dated October 9, 2020	9 Oktober 2020 - 8 Oktober 2025 October 9, 2020 - October 8, 2025	Ke-Satu 1st

The Board of Commissioners has an important role in supervising this Whistleblowing System, including ensuring that existing procedures are followed correctly and that the system functions as it should. The Board of Commissioners routinely evaluates the WBS, to ensure that it not only runs in accordance with applicable provisions, but also provides a sense of security and trust to all stakeholders for reporting any alleged violations without fear of retaliation.

Performance Assessment of Committees under the Board of Commissioners

The Board of Commissioners has three main supporting organs, namely the Audit Committee, the Risk and GCG Monitoring Committee, and the Nomination and Remuneration Committee. Each of these committees has specific responsibilities and plays an important role in assisting the Board of Commissioners in carrying out its supervisory duties over the overall management of the Company. These committees' duties include providing input, analysis, and recommendations needed in making strategic decisions that can affect the direction and development of the Company.

The Board of Commissioners' view is that the committees under its supervision have carried out their duties and responsibilities properly and effectively. Each committee has worked in accordance with the established guidelines and framework, ensuring that all aspects of corporate supervision and governance run smoothly and in accordance with applicable regulations.

Information on the Board of Commissioners' Composition and Structure

As of December 31, 2024, the Board of Commissioners' composition and structure was as follows:

Apresiasi dan Penutup

Dalam kesempatan ini, Dewan Komisaris juga ingin mengapresiasi seluruh upaya yang dilakukan oleh Direksi dalam mengelola Perseroan dengan penuh tanggung jawab dan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik serta manajemen risiko yang baik. Keberhasilan dalam meraih berbagai pencapaian penting pada tahun 2024, meskipun dihadapkan pada dinamika ekonomi yang menantang, merupakan hasil kerja keras yang patut diapresiasi. Dewan Komisaris menyadari bahwa masih ada tantangan yang harus dihadapi di masa depan, namun dengan semangat kolaborasi, sinergi, dan kerja keras bersama, Dewan Komisaris yakin Perseroan akan terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional serta mendukung kemajuan BUMN Indonesia.

Appreciation and Closing

On this occasion, the Board of Commissioners would also like to express its appreciation for all the efforts made by the Board of Directors in managing the Company, with full responsibility and by considering the principles of good governance and good risk management. The success in achieving important achievements in 2024, despite the challenging economic dynamics, was the result of hard work that deserves our appreciation. The Board of Commissioners understands there are still challenges to be faced in the future, but with the spirit of collaboration, synergy, and hard work together, the Board of Commissioners is confident that the Company will continue to grow and make a positive contribution to national development and support the progress of Indonesian SOE.

Jakarta, 4 April 2025
Jakarta, April 4, 2025



Marwanto Harjowiryo
Komisaris
Commissioner

Laporan Direksi

Board of Directors Report



**MUHAMMAD
TEGUH
WIRAHADIKUSUMAH**

Direktur Utama merangkap Direktur Special Asset Management
President Director and Acting Director of Special Asset Management

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, iijinkan kami, Direksi PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA/Perusahaan), menyampaikan Laporan Tahunan untuk tahun buku 2024. Tahun ini menandai langkah penting dalam perjalanan PPA sebagai pengelola aset nasional. Dengan kapabilitasnya dalam mengelola aset PPA berperan penting dalam memastikan keberlanjutan bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta menjaga stabilitas ekosistem keuangan dan investasi nasional.

Perusahaan senantiasa beradaptasi dengan dinamika industri dan tantangan ekonomi guna memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mampu memberikan nilai tambah yang signifikan. Oleh karena itu, Direksi bersama seluruh jajaran Perusahaan, memiliki komitmen yang kuat untuk terus berupaya, bekerja keras, dan bersinergi dalam mengelola serta mengembangkan Perusahaan secara optimal.

Komitmen ini diwujudkan melalui penerapan strategi yang tepat, inovasi yang berkelanjutan, serta implementasi program kerja yang selaras dengan tujuan jangka panjang Perusahaan. Dalam menjalankan mandatnya, Perusahaan fokus pada peningkatan nilai ekosistem BUMN melalui 3 (tiga) Pilar Bisnis, yaitu Revitalisasi & Restrukturisasi BUMN Titip Kelola, Pengelolaan NPL Perbankan, serta solusi investasi/pembiayaan inovatif dan efektif melalui *Special Situations Fund* (SSF).

Tantangan Ekonomi Global di Tahun 2024

Berdasarkan laporan World Economic Outlook dari Dana Moneter Internasional (IMF) yang dirilis pada Oktober 2024, ekonomi global tumbuh sebesar 3,2% dan diperkirakan akan bertahan di level yang sama dalam lima tahun ke depan. Pertumbuhan ekonomi global masih ditopang oleh negara-negara berkembang dan emerging markets, dengan India, Tiongkok, Rusia, dan ASEAN-5 menjadi kontributor utama. Tiongkok mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,8%, sementara India tumbuh lebih tinggi di angka 7,0%. Pertumbuhan ini memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, mengingat kedua negara tersebut masih menjadi mitra dagang utama, selain Amerika Serikat.

Sementara itu, dalam aspek kebijakan moneter, The Federal Reserve (The Fed) secara bertahap menurunkan Fed Funds Rate (FFR). Pada pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) di November 2024, suku bunga diturunkan sebesar 25 basis poin, dan diperkirakan akan terus mengalami penurunan sepanjang tahun 2025. Langkah ini diambil oleh pemerintah Amerika Serikat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang stagnan serta meningkatkan lapangan kerja, sembari menjaga tingkat inflasi yang telah turun menjadi 2,44% secara tahunan (yoy) dari 2,53% pada bulan sebelumnya.

Dear Respected Shareholders and Stakeholders,

With praise and gratitude to the presence of God Almighty, allow us, the Board of Directors of PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA/ Company), to submit the Annual Report for the 2024 fiscal year. This year marked an important step in PPA's journey as a national asset manager. With its capabilities in managing assets, PPA plays an important role in ensuring the sustainability of the State-Owned Enterprises (SOE) businesses, and maintaining the stability of the national financial and investment ecosystem.

The Company continuously adapts to the dynamics of the industry and economic challenges to ensure that every step taken will provide significant added value. Therefore, the Board of Directors together with all levels of the Company, is strongly committed to continuing to strive, work hard, and synergize in managing and developing the Company optimally.

This commitment is realized through instigating the right strategies, continuous innovations, and work programs in line with the Company's Long-term goals. By carrying out its mandate, the Company focuses on increasing the value of the SOE ecosystem through 3 (three) Business Pillars, namely Restructuring & Revitalization of SOE Under Management, Management of Banking NPLs, and innovative and effective investment/financing solutions through the Special Situations Fund (SSF).

Global Economic Challenges in 2024

Based on the World Economic Outlook report from the International Monetary Fund (IMF) released in October 2024, the global economy grew by 3.2% and is expected to remain at the same level over the next five years. Global economic growth is still supported by developing countries and emerging markets, with India, China, Russia, and ASEAN-5 being the main contributors. China recorded economic growth of 4.8%, while India grew higher at 7.0%. This growth had a positive impact on the Indonesian economy, considering the two countries are still major trading partners, besides the United States.

Meanwhile, in terms of monetary policy, the Federal Reserve (The Fed) gradually lowered the Fed Funds Rate (FFR). At the Federal Open Market Committee (FOMC) meeting in November 2024, interest rates were lowered by 25 basis points, and are expected to continue to decline throughout 2025. This step was taken by the United States government to encourage stagnant economic growth and increase employment, while maintaining the inflation rate that had fallen to 2.44% annually (yoy) from 2.53% the previous month.

Kondisi Ekonomi Indonesia di Tahun 2024

Di tengah tekanan ekonomi global, Indonesia masih mampu mencatat pertumbuhan ekonomi yang solid. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,03% pada tahun 2024, sedikit lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 5,05% serta di bawah target pemerintah sebesar 5,2%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong terutama oleh konsumsi rumah tangga, yang menyumbang 54,04% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan mengalami peningkatan sebesar 4,94% dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, sektor ekspor juga tetap menunjukkan kinerja yang baik, dengan nilai ekspor mencapai USD264,70 miliar pada tahun 2024, meningkat 2,29% dibandingkan tahun 2023.

Indonesia juga berhasil mencatat surplus perdagangan sebesar USD31,04 miliar pada tahun 2024. Surplus ini berasal dari surplus perdagangan nonmigas sebesar USD51,44 miliar, meskipun masih terdapat defisit pada sektor migas sebesar USD20,40 miliar. Capaian ini memperpanjang tren surplus perdagangan Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut sejak tahun 2020.

Sementara itu, dinamika politik nasional, khususnya Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Sejak pelantikan Presiden Indonesia terpilih pada 20 Oktober 2024, nilai tukar Rupiah mengalami penguatan, mencerminkan kepercayaan pasar terhadap stabilitas politik dan prospek ekonomi nasional.

Pun demikian dengan tingkat inflasi sepanjang tahun 2024 tercatat sebesar 1,57%, tetap berada dalam kisaran target yang ditetapkan, yaitu $2,5\% \pm 1\%$. Capaian ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dan otoritas terkait dalam menjaga stabilitas ekonomi di tengah berbagai tantangan global, termasuk fluktuasi harga komoditas, dinamika ekonomi dunia, serta dampak dari kebijakan moneter internasional.

Perkembangan Perusahaan Tahun 2024

PPA telah mencatat kontribusi nyata terhadap negara dalam upaya transformasi BUMN dengan menjalankan berbagai inisiatif strategis untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan berkelanjutan. Dalam menjalankan perannya, PPA telah berhasil melakukan turnaround bagi sejumlah BUMN mitra melalui pendekatan restrukturisasi yang komprehensif, termasuk penguatan tata kelola perusahaan, optimalisasi strategi bisnis, serta efisiensi operasional. Upaya ini turut mendorong peningkatan keunggulan daya saing perusahaan, perbaikan kualitas aset, serta penciptaan peluang baru untuk pertumbuhan usaha yang lebih sehat.

Perusahaan menegaskan komitmennya dalam melakukan proses restrukturisasi terhadap 21 BUMN Titip Kelola dan 1 Anak Perusahaan BUMN sesuai Surat Kuasa Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara kepada Perusahaan. Hingga tahun 2024 telah dilakukan pembubaran atas 7 BUMN dan 1 Anak Perusahaan BUMN, 1 BUMN telah diputus pailit, sehingga per 31 Desember 2024, Perusahaan melakukan penanganan terhadap 13 BUMN. Selain itu, Perusahaan juga melakukan pengelolaan atas beberapa BUMN

Indonesia's Economic Conditions in 2024

Despite the global economic pressures, Indonesia is still recorded solid economic growth. Based on data from the Central Statistics Agency (BPS), the Indonesian economy grew by 5.03% in 2024, slightly lower than the previous year's growth of 5.05% and below the government's target of 5.2%.

Indonesia's economic growth is driven primarily by household consumption, which contributed 54.04% to Gross Domestic Product (GDP), an increase of 4.94% compared to the previous year. In addition, the export sector also continues to show good performance, with exports reaching USD264.70 billion in 2024, an increase of 2.29% compared to 2023.

Indonesia also records a trade surplus of USD31.04 billion in 2024. This surplus came from a non-oil and gas trade surplus of USD51.44 billion, although there was still a deficit in the oil and gas sector of USD20.40 billion. This achievement extends Indonesia's trade surplus trend to 5 (five) consecutive years since 2020.

The national politics, especially the simultaneous Presidential and Vice Presidential Elections (Pilpres) and Regional Head Elections (Pilkada), had a significant impact on Indonesia's economic conditions. Since the inauguration of the elected President of Indonesia on October 20, 2024, the Rupiah exchange rate has strengthened, reflecting market confidence in political stability and national economic prospects.

Likewise, the inflation rate throughout 2024 was 1.57%, remaining within the target range of $2.5\% \pm 1\%$. This achievement demonstrates the success of the government and related authorities in maintaining economic stability despite global challenges, including commodity price fluctuations, world economic dynamics, and the impact of international monetary policies.

Company Development in 2024

PPA recorded a real contribution to the country through its transformation of SOEs efforts using strategic initiatives to accelerate recovery and sustainable growth. In carrying out its role, PPA helped turnaround a number of SOEs by following a comprehensive restructuring approach, including strengthening corporate governance, optimizing business strategies, and operational efficiencies. These efforts also led to an increase in the Company's competitive advantage, improved asset quality, and created new opportunities for healthier business growth.

The Company confirmed its commitment to the restructuring process of 21 SOEs Under Management, and 1 Subsidiary SOE in accordance with the Minister of SOE based on a Special Power of Attorney (Special POA) to the Company. In 2024, 7 SOEs Under Management and 1 Subsidiary SOE were dissolved, so that as of December 31, 2024, the Company was handling 13 SOEs. In addition, the Company also manages several other SOEs based on assignments.

lainnya berdasarkan penugasan.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis Perusahaan dalam mengoptimalkan kinerja dan nilai aset BUMN, guna meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Dengan pendekatan yang sistematis dan berbasis best practice, PPA terus berupaya menghadirkan solusi yang tepat bagi setiap BUMN yang berada dalam pengelolaannya, baik melalui perbaikan struktur keuangan, optimalisasi aset, maupun peningkatan efisiensi operasional.

Hingga 31 Desember 2024 PPA telah melakukan beberapa Program Kerja untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya antara lain melalui 7 (tujuh) langkah strategis, yakni:

1. Penanganan BUMN Titip Kelola antara lain melalui pemberian pinjaman/dana talangan, Mezzanine Equity Investment, restrukturisasi penggabungan usaha dan penutupan BUMN.
2. Pengembangan pengelolaan BUMN melalui SKK non mandate.
3. NPL Management untuk memberikan nilai tambah bagi pemangku kepentingan.
4. Pengelolaan aset yang optimal melalui, namun tidak terbatas pada, program special situation fund (SSF).
5. Mengoptimalkan kapasitas pendanaan dan struktur modal.
6. Mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, serta mencerminkan budaya AKHLAK.
7. Pemberian jasa konsultasi yang meliputi namun tidak terbatas pada konsultasi bisnis dan keuangan (Business and Financial Advisory).

Selain itu, PPA juga berperan aktif dalam mendukung agenda prioritas pemerintahan baru melalui Program 100 Hari dan Asta Cita. Dalam pelaksanaannya, PPA memastikan bahwa restrukturisasi BUMN tidak hanya berfokus pada perbaikan kondisi keuangan, tetapi juga pada peningkatan daya saing dan efisiensi operasional. Melalui sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, PPA mengembangkan strategi berbasis inovasi dan tata kelola yang baik untuk menciptakan transformasi yang berkelanjutan.

Strategi dan Kebijakan Strategis Perusahaan

Pada tahun 2024, Perusahaan menetapkan strategi dan kebijakan strategis yang berorientasi pada transformasi dan optimalisasi aset BUMN, dengan tujuan menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi ekosistem BUMN dan perekonomian nasional. Strategi ini dijalankan sejalan dengan peran PPA sebagai restructuring house dalam Holding BUMN Danareksa, yang bertanggung jawab dalam restrukturisasi, revitalisasi, dan optimalisasi kinerja perusahaan-perusahaan dalam pengelolaannya.

Untuk itu, dalam melaksanakan mandat dari Menteri BUMN, PPA telah melakukan kajian yang komprehensif guna merumuskan strategi penyelesaian terbaik terhadap masing-masing BUMN Titip Kelola. Kajian ini mencakup analisis mendalam terhadap signifikansi perusahaan dalam ekosistem industri, keunggulan kompetitif yang dimiliki, persepsi pasar, serta kinerja keuangan yang menjadi indikator utama dalam menentukan arah kebijakan restrukturisasi.

Selanjutnya, proses restrukturisasi dilakukan melalui pendekatan yang menyeluruh dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk aspek hukum, sosial, bisnis, dan keuangan. Dalam pelaksanaannya, PPA mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola

This step one of the Company's strategic efforts to optimize the performance and value of SOE assets, to increase its contribution to the national economy. By using a systematic approach and based on best practices, PPA continues to present the right solutions for the SOEs under its management, either by improving their financial structure, optimizing assets, or increasing operational efficiency.

By December 31, 2024, PPA had carried out several Work Programs in its main business activities, including through 7 (seven) strategic steps, namely:

1. Handling SOE Under Management, and through providing loans/bridging funds, Mezzanine Equity Investment, restructuring of business mergers and closure of SOE.
2. Developing SOE management through non mandate POA.
3. Managing NPLs to provide added value for stakeholders.
4. Optimally managing assets through, but not limited to, the special situation fund (SSF) program.
5. Optimizing funding capacity and capital structure.
6. Developing quality, productive human capital that reflects the AKHLAK culture.
7. Providing consulting services including but are not limited to business and financial consulting (Business and Financial Advisory).

PPA also plays an active role in supporting the new government's priority agenda through the 100-Day and Asta Cita Program. For its implementation, PPA ensured that the restructuring of SOE not only focus on improving financial conditions, but also on increasing competitiveness and operational efficiency. Through synergy with its stakeholders, PPA instigated strategies based on innovation and good governance to create a sustainable transformation.

Company Strategy and Strategic Policy

In 2024, the Company instigated strategic strategies and policies oriented towards the transformation and optimization of SOE assets, with the aim of creating sustainable added value for the SOE ecosystem and the national economy. This strategy is in line with PPA's role as a restructuring house in the Danareksa SOE Holding, which is responsible for restructuring, revitalizing, and optimizing the performance of companies under their management.

For such reason, carrying out the mandate from the Minister of SOEs, PPA conducted a comprehensive study to formulate the best resolution strategy for each SOE Under Management. This study included an in-depth analysis of the company's significance in the industrial ecosystem, its competitive advantages, market perception, and financial performance, which are all key indicators in determining the direction of the restructuring policies.

Furthermore, the restructuring process is carried out through a comprehensive approach by considering various aspects, including legal, social, business, and financial aspects. In its implementation, PPA prioritizes the good corporate governance (GCG principles) to

perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG) guna memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak hanya sesuai dengan regulasi yang berlaku, tetapi juga memberikan manfaat optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.

Melalui pendekatan ini, PPA berupaya untuk menghasilkan solusi yang tepat sasaran dan berkelanjutan bagi setiap BUMN yang ditangani. Hasil penilaian yang telah dilakukan menjadi dasar pertimbangan yang kuat dalam menentukan strategi terbaik, baik dalam bentuk restrukturisasi keuangan, optimalisasi aset, pencarian mitra strategis, maupun langkah transformasi bisnis yang lebih luas. Dengan demikian, PPA memastikan bahwa setiap BUMN Titip Kelola dapat kembali menjadi entitas usaha yang sehat, kompetitif, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.

Peran Direksi Dalam Perumusan Strategi dan Kebijakan Strategis

Sebagai pengambil keputusan tertinggi dalam operasional Perusahaan, Direksi senantiasa memastikan bahwa setiap kebijakan dan langkah strategis yang diambil sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan, serta penerapan prinsip-prinsip GCG guna menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dalam seluruh aspek kegiatan usaha Perusahaan.

Selain itu, Direksi memiliki peran strategis dalam memastikan kelangsungan dan pertumbuhan Perusahaan melalui perencanaan, pengambilan keputusan, serta pengelolaan operasional yang efektif. Tugas utama Direksi mencakup penyusunan dan penetapan strategi bisnis yang selaras dengan visi dan misi Perusahaan, mengarahkan kebijakan operasional agar tetap adaptif terhadap dinamika industri, serta memastikan bahwa seluruh keputusan yang diambil berlandaskan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Direksi bertanggung jawab dalam mengkomunikasikan strategi dan kebijakan Perusahaan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, guna menciptakan keselarasan dan sinergi dalam pelaksanaan operasional bisnis. Komunikasi yang efektif ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat memahami arah dan tujuan strategis perusahaan, sehingga dapat berkontribusi secara optimal dalam pencapaian target bisnis dan operasional.

Di lingkungan internal, Direksi harus memastikan bahwa visi, misi, serta kebijakan strategis Perusahaan tersampaikan dengan jelas kepada seluruh jajaran manajemen dan karyawan. Sementara itu, dalam konteks eksternal, Direksi memiliki tanggung jawab untuk menjalin komunikasi yang konstruktif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk regulator, investor, mitra bisnis, serta masyarakat luas.

Proses yang dilakukan Direksi untuk Memastikan Implementasi Strategi

Dalam rangka memastikan keberhasilan implementasi strategi, Direksi menjalankan serangkaian proses strategis yang terstruktur, terukur, dan selaras dengan visi serta misi Perusahaan. Langkah-langkah yang dilakukan mencakup perencanaan yang matang, pengawasan berkelanjutan, serta evaluasi dan penyesuaian strategi

ensure that every step taken is not only in accordance with applicable regulations, but also provides optimal benefits for all stakeholders.

By using this approach, PPA seeks to produce targeted and sustainable solutions for each SOE it handles. The results of the assessments carried out become a strong basis for consideration and determining the best strategy, whether in the form of financial restructuring, asset optimization, finding strategic partners, or broader business transformation steps. Therefore, PPA ensures that each SOE Under Management can return to being a healthy, competitive business capable of making a positive contribution to the national economy.

The Role of the Board of Directors in Formulating Strategies and Strategic Policies

As the highest decision maker in the Company's operations, the Board of Directors ensures that every policy and strategic step taken is in line with applicable laws and regulations, the Company's Articles of Association, and the GCG principles in order to create transparent, accountable, and sustainable governance in all aspects of the Company's business activities.

In addition, the Board of Directors plays a strategic role in ensuring the continuity and growth of the Company through planning, decisionmaking, and effective operational management. The main duties of the Board of Directors include preparing and determining the business strategies are in line with the Company's vision and mission, directing operational policies to remain adaptive to industry dynamics, and ensuring that all decisions taken are based on the good corporate governance principles.

The Board of Directors is responsible for communicating the Company's strategies and policies to all stakeholders, both internal and external, to create harmony and synergy in the business operations. This effective communication aims to ensure that all parties involved understand the Company's strategic direction and objectives, so they can contribute optimally to achieving business and operational targets.

Internally, the Board of Directors must ensure that the Company's vision, mission, and strategic policies are clearly communicated to all levels of management and employees. While externally, the Board of Directors has the responsibility to establish constructive communication with stakeholders, including regulators, investors, business partners, and the wider community.

Process undertaken by the Board of Directors to Ensure Strategy Implementation

To ensure the strategies' success, the Board of Directors carried out a series of strategic processes that are structured, measurable, and aligned with the Company's vision and mission. These steps include careful planning, ongoing supervision, and periodic evaluation and adjustment of the strategy to ensure effectiveness. Based on the

secara berkala guna memastikan efektivitas. Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah disusun, Direksi berperan aktif dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program kerja untuk memastikan implementasi berjalan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Pengawasan ini dilakukan secara berkala melalui monitoring kinerja, analisis capaian strategis, serta identifikasi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan Perusahaan.

Dengan komitmen kuat, Direksi terus berupaya mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki, baik dari aspek keuangan, operasional, teknologi, maupun sumber daya manusia, guna mendukung efektivitas pelaksanaan strategi Perusahaan. Selain memastikan adanya sinergi antar unit kerja dan koordinasi yang solid untuk meningkatkan efisiensi serta mempercepat pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Direksi juga secara aktif berkoordinasi dengan Dewan Komisaris yang mencakup diskusi berkala mengenai implementasi strategi yang telah disepakati, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan tujuan jangka panjang Perusahaan dan mendukung pertumbuhan serta keberlanjutan operasional.

Pencapaian Kinerja Perusahaan

Pilar 1 - Restrukturisasi dan Revitalisasi BUMN TK

Melalui Surat Kuasa Khusus (SKK) dari Menteri BUMN, PPA diberikan mandat untuk berperan sebagai pemegang saham aktif dalam memberikan nilai tambah bagi BUMN. PPA melakukan penanganan terhadap 21 BUMN dan 1 Anak Usaha BUMN. Sampai dengan akhir tahun 2024, PPA telah melakukan penanganan BUMN Titip Kelola melalui:

1. Restrukturisasi keuangan melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk 6 BUMN;
2. Rekomendasi perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi untuk 11 BUMN;
3. Perbaikan back office, standard operating procedure dan monitoring melalui penempatan Financial Controller untuk 10 BUMN;
4. Penyesuaian dan perubahan Anggaran Dasar untuk 13 BUMN;
5. Penyaluran dana operasional, pengembangan bisnis dan dana talangan untuk 13 BUMN;
6. Sinergi pengembangan usaha yang melibatkan BUMN dalam klaster Holding BUMN Danareksa-PPA untuk 11 BUMN;
7. Sinergi: BUMN Manufaktur untuk 2 BUMN dan BUMN Galangan untuk 3 BUMN;
8. Penguatan Fokus Bisnis Utama Kepelabuhanan untuk 1 BUMN;
9. Refocusing Bisnis Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal BUMN Galangan untuk 3 BUMN;
10. Revitalisasi Aset BUMN untuk 1 BUMN;
11. Penerbitan Peraturan Pemerintah terkait Pembubaran 7 BUMN dan 1 Anak Perusahaan BUMN.

Roadmap dari penanganan BUMN Titip Kelola dengan sasaran akhir/*endgame* adalah 8 (delapan) BUMN dengan Penanganan Lebih Lanjut, 5 (lima) BUMN dengan Potensi Operasi Minimum dan 9 (sembilan) BUMN (termasuk 1 Anak Perusahaan BUMN) dengan Pembubaran. Sampai dengan 31 Desember 2024 seluruh pencairan dana pinjaman berupa sebagian besar adalah dana talangan kepada BUMN TK

strategies and policies prepared, the Board of Directors plays an active role in supervising and controlling the work programs to ensure they run according to the plans and targets set. This supervision is carried out periodically through performance monitoring, strategic achievement analysis, and identification of potential risks that could hinder the achievement of the Company's goals.

With a strong commitment, the Board of Directors continue to optimize all available resources, both in terms of finance, operations, technology, and human capital, to support the effectiveness of the Company's strategies. To ensure synergy between work units and solid coordination to improve efficiency and accelerate the achievement of targets set in the Company's Work Plan and Budget (RKAP), the Board of Directors also actively coordinates with the Board of Commissioners through regular discussions on the agreed strategies, ensuring that every step taken is in line with the Company's Long-term goals and supports growth and operational sustainability.

Company Performance Achievement

Pillar 1 - Restructuring and Revitalization of SOE Under Management

Through a Special POA from the Minister of SOEs, PPA was given a mandate to act as an active shareholder in providing added value to SOEs. PPA handles 21 SOEs and 1 SOE Subsidiary. Until the end of 2024, PPA has handled SOEs Under Management through:

1. Financial restructuring through Postponement of Debt Payment Obligations for 6 SOEs;
2. Recommending changes in the Board of Commissioners and Board of Directors composition in 11 SOEs;
3. Improving back offices, standard operating procedures and monitoring through the placement of Financial Controllers in 10 SOEs;
4. Adjustment and amendment of the Articles of Association in 13 SOEs;
5. Distributing operational funds, business development and bailout funds in 13 SOEs;
6. Synergizing business development by involving SOEs under Danareksa SOE Holding cluster PPA in 11 SOEs;
7. Synergizing Manufacturing SOE for 2 SOEs and SOE Shipyard for 3 SOEs;
8. Strengthening the Main Business Focus of Ports for 1 SOE;
9. Refocusing the SOE Shipyard Maintenance and Repair Business for 3 SOEs;
10. Revitalizing SOE Assets for 1 SOE ;
11. Issuance of Government Regulations related to the Dissolution of 7 SOEs and 1 SOE Subsidiary.

Roadmap for handling SOE Under Management where the final target/*endgame* is 8 (eight) SOEs for Further Handling, 5 (five) SOEs with Minimum Operation Potential and 9 (nine) SOEs (including 1 SOE Subsidiary) with Dissolution. By December 31, 2024, all disbursements of loan funds were mostly bailout funds to SOE Under Management amounting to Rp2.003 trillion, with the Principal

sebesar Rp2,003 Triliun, dengan *Outstanding* Pokok per 31 Desember 2024 sebesar Rp2,117 Triliun.

Pilar 2 – Pengelolaan *Non-Performing Loan* (“NPL”)

PPA merupakan satu-satunya NAMCO yang berperan penting dalam mendukung penguatan sistem perbankan nasional melalui Pengelolaan NPL perbankan baik melalui *skema off balance* (PPA mengakuisisi portfolio NPL Bank melalui AMC yang ditukar dengan instrumen keuangan jangka panjang (*Skema Asset Swap*) atau *on balance sheet* (PPA mengakuisisi portofolio NPL Bank dengan pendanaan yang berasal dari pinjaman bank).

Hingga akhir tahun 2024, PPA telah menjalin kerjasama dalam penanganan NPL Perbankan menggunakan *skema asset swap* dengan Bank Muamalat dan Bank KB Bukopin.

Pilar 3 – Pembiayaan Inovatif dan Solutif melalui *Special Situations Fund* (SSF)

PPA terus melakukan monitoring dan evaluasi atas terkait dengan kegiatan SSF, yang terbagi dalam 5 (lima) berdasarkan metode penanganannya, yaitu sebagai berikut:

1. Current Account SSF
Sampai dengan 31 Desember 2024, melakukan investasi total senilai Rp1.927.640.000.000, ke PT Garuda Indonesia (Persero), PT Citilink dan PT PT Arta Integrasi Teknologi. PPA memperoleh penerimaan imbal hasil dari bunga ataupun dividen, sebagai bentuk sinergi antar BUMN, ekosistem BUMN maupun dengan pihak swasta untuk perbaikan likuiditas dan penyehatan perusahaan.
2. Konsultasi atau Advisory
PPA adalah memberikan jasa penunjang dengan saat ini masih fokus pada pemberian jasa konsultasi kepada ekosistem BUMN. Selama tahun 2024 BUMN yang mendapatkan jasa dari PPA yaitu PT Indofarma (Persero), Tbk, PT Pos Indonesia (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), dan PT PP Properti Tbk. Selain itu, PPA telah ditunjuk oleh PT Petro Oxo Nusantara sebagai konsultan untuk menyusun financial feasibility study atas penambahan kapasitas produksi.
3. Investasi Properti
PPA melakukan Pengelolaan Aset Properti Investasi sebanyak 8 (delapan) aset properti dan 2 (dua) proyek properti dengan skema KSO yaitu Green Teksin II dan Rumah Cerdas. Dari 8 aset tersebut telah dilakukan optimalisasi atas 4 aset yaitu Aset Wolter Monginsidi dalam bentuk Sewa Resto dengan skema Revenue Share, Aset Cimanuk dalam bentuk Co-living dan Area Komersial, Aset Radio IV dalam bentuk co-working space dan Aset Tegal Pala Raya dalam bentuk Kios dan rumah sewa.
4. Special Asset Management
Portofolio Debitur On dan Off Balance Sheet kelolaan Direktorat Special Asset Management dalam bentuk saham (yang berasal dari aset investasi PT PPA Kapital) termasuk eks NPL Perbankan. Adapun strategi penanganan debitur kelolaan SAM berupa PKPU/Kepailitan, Penagihan, Refinancing, Restrukturisasi PK, dan Eksekusi Jaminan berupa penjualan aset.
5. Monitoring & Pengelolaan Investasi PPA
Melakukan monitoring kewajiban terhadap investasi PPA pada PT Pratama Persada Airborne, PT PPA Kapital dan PT Nindya Beton.

Outstanding as of December 31, 2024 amounting to Rp2.117 trillion.

Pillar 2 – Non-Performing Loan (“NPL”) Management

PPA is the only NAMCO that plays an important role in supporting the strengthening of the national banking system through the management of banking NPLs, either through an off-balance scheme (PPA acquires the Bank’s NPL portfolio through AMC, which is then exchanged for long-term financial instruments (Asset Swap Scheme)), or on-balance sheet (where PPA acquires the Bank’s NPL portfolio with funding from bank loans).

By the end of 2024, PPA had collaborated in handling Banking NPLs using an asset swap scheme with Bank Muamalat and Bank KB Bukopin.

Pillar 3 - Innovative and Solution Financing through the Special Situations Fund (SSF)

PPA continues to monitor and evaluate SSF activities, which are divided into 5 (five) based on the handling method, and include:

1. Current Account SSF
Until December 31, 2024, made a total investment of Rp1,927,640,000,000, to PT Garuda Indonesia (Persero), PT Citilink and PT Arta Integrasi Teknologi. PPA receives income from interest or dividends, as a form of synergy between SOEs, SOE ecosystems and with the private sector to improve the Company’s liquidity and health.
2. Consulting or Advisory
PPA provides supporting services with the current focus on providing consulting services to the SOE ecosystem. During 2024, SOEs that received services from PPA including PT Indofarma (Persero), Tbk, PT Pos Indonesia (Persero), PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero), and PT PP Properti Tbk. In addition, PPA was appointed by PT Petro Oxo Nusantara as a consultant to prepare a financial feasibility study for additional production capacity.
3. Property Investment
PPA manages Investment Property Assets for 8 (eight) property assets and 2 (two) property projects using KSO schemes, namely Green Teksin II and Smart Homes. Of the 8 assets, optimization has been carried out on 4 assets, namely Wolter Monginsidi Assets in the form of Restaurant Rentals through a Revenue Share scheme, Cimanuk Assets in the form of Co-living and Commercial Areas, Radio IV Assets in the form of co-working spaces and Tegal Pala Raya Assets in the form of Kiosks and rental houses.
4. Special Asset Management
The Debtor Portfolio On and Off Balance Sheet managed by the Directorate of Special Asset Management in the form of shares (derived from PT PPA Kapital’s investment assets) including former Banking NPLs. The debtor handling strategy managed by SAM is in the form of PKPU/Bankruptcy, Collection, Refinancing, PK Restructuring, and Collateral Execution in the form of asset sales.
5. PPA Investment Monitoring & Management
Monitoring obligations for PPA investments in PT Pratama Persada Airborne, PT PPA Kapital and PT Nindya Beton.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI

Sepanjang tahun 2024, PPA telah menetapkan berbagai target keuangan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Namun, dalam pelaksanaannya, realisasi kinerja menunjukkan dinamika yang berbeda dari rencana awal, baik dalam aspek pendapatan, efisiensi operasional, maupun struktur keuangan perusahaan.

Dari sisi pendapatan usaha, realisasi yang dicapai sebesar Rp1,66 triliun, atau sebesar 87,66% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1,89 triliun. Dari sisi laba usaha, PPA mencatatkan laba usaha sebesar Rp175,82 miliar, melampaui target sebesar 31,99% dari target yang ditetapkan dalam RKAP sebesar Rp133,21 miliar.

Beban usaha berhasil ditekan hingga sebesar Rp1,48 triliun, lebih rendah 15,69% dibandingkan dengan target Rp1,76 triliun. Efisiensi ini memberikan dampak positif pada profitabilitas Perusahaan, yang terlihat dari pencapaian laba bersih tahun berjalan sebesar Rp205,37 miliar, atau sebesar 122,19% target sebesar Rp168,08 miliar. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa meskipun pendapatan usaha tidak mencapai target, pengelolaan biaya yang efektif mampu mengoptimalkan keuntungan Perusahaan.

Sementara itu, total aset Perusahaan mengalami peningkatan, mencapai sebesar Rp17,46 triliun, lebih tinggi 26,58% dari target sebesar Rp13,79 triliun. Seiring dengan kenaikan aset, total liabilitas juga mengalami peningkatan hingga Rp6,23 triliun, lebih tinggi 12,52% dari target sebesar Rp5,54 triliun. Di sisi lain, total ekuitas menunjukkan kinerja yang sangat positif dengan realisasi Rp11,23 triliun, lebih tinggi 36,02% dibandingkan target sebesar Rp8,25 triliun.

COMPARISON BETWEEN TARGETS AND REALIZATION

During 2024, PPA set a number of financial targets as outlined in the Company's Work Plan and Budget (RKAP). However, for its implementation, the realization of performance shows different dynamics from the initial plan, both in terms of revenue, operational efficiency, and the Company's financial structure.

On the revenue side, the realization achieved was Rp1.66 trillion, still below the target set at Rp1.89 trillion, or a decrease of 12.34%. On the profit side, PPA recorded a profit of Rp175.82 billion, exceeding the target set in the RKAP of Rp133.21 billion, an increase of 31.99% compared to the initial target.

This was reflected in the operating expenses that were reduced to Rp1.48 trillion, 15.69% lower than the target of Rp1.76 trillion. This efficiency had a positive impact on the Company's profitability, as seen from the realized net profit for the current year of Rp205.37 billion, exceeding the target of Rp168.08 billion with a growth of 22.19%. This success shows that even though revenue did not reach its target, effective cost management was able to optimize the Company's profits.

While, the Company's total assets increased, reaching Rp17.46 trillion, 26.58% higher than the target of Rp13.79 trillion. In addition, total liabilities also increased to Rp6.23 trillion, 12.52% higher than the target of Rp5.54 trillion. Also, total equity showed a very positive performance with a realization of Rp11.23 trillion, a 36.02% jump compared to the target of Rp8.25 trillion.

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

Uraian Description	Target RKAP 2024 2024 RKAP Target	Realisasi Realization	Presentase Pencapaian Percentage Achievement
Pendapatan Usaha Operating Revenue	1.896.649	1.662.604	87,66%
Beban Usaha Operating Expenses	(1.763.445)	(1.486.782)	(15,69%)
Laba Usaha Operating Profit	133.205	175.822	131,99%
Laba Bersih Tahun Berjalan Profit for the Current Year	168.081	205.370	122,19%
Total Aset Total Asset	13.799.016	17.467.084	126,58%
Total Liabilitas Total Liabilities	5.540.378	6.233.971	112,52%

Kendala yang Dihadapi dan Strategi Penyelesaiannya

Dalam menjalankan mandatnya sebagai pengelola aset dan mitra strategis BUMN, Perusahaan menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi implementasi program kerja dan pencapaian target kinerja pada tahun 2024. Berbagai kendala ini bersumber dari faktor internal maupun eksternal, yang membutuhkan pendekatan strategis agar dapat diatasi secara efektif.

Salah satu tantangan utama adalah dinamika ekonomi global yang masih diwarnai ketidakpastian akibat perlambatan ekonomi di beberapa negara mitra dagang utama, fluktuasi harga komoditas, serta kebijakan suku bunga tinggi di pasar keuangan internasional. Kondisi ini berpengaruh terhadap iklim investasi dan strategi pengelolaan aset yang dijalankan oleh PPA.

Di tingkat domestik, tantangan juga muncul dari dinamika politik nasional yang dipengaruhi oleh penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah serentak. Perubahan kebijakan pemerintah dan penyesuaian regulasi menjadi faktor yang perlu diantisipasi dalam proses pengelolaan dan restrukturisasi aset, terutama terkait dengan dukungan kebijakan fiskal dan stimulus ekonomi.

Selain itu, sektor-sektor yang menjadi fokus restrukturisasi dan pengelolaan aset PPA, seperti industri manufaktur, properti, dan infrastruktur, menghadapi tantangan dalam pemulihan kinerja pasca-pandemi. Permintaan yang belum sepenuhnya stabil, peningkatan biaya produksi akibat inflasi, serta ketatnya persaingan pasar menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas program optimalisasi aset yang dijalankan.

Tantangan lainnya adalah percepatan digitalisasi dalam dunia bisnis yang menuntut PPA untuk mengadopsi strategi inovatif dalam pengelolaan aset dan investasi. Penerapan teknologi dalam proses restrukturisasi serta optimalisasi portofolio menjadi keharusan agar PPA dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing dalam menjalankan mandatnya.

Meskipun menghadapi berbagai kendala tersebut, PPA tetap berkomitmen untuk menjalankan perannya secara optimal melalui penguatan strategi bisnis, kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta inovasi dalam pengelolaan aset. Dengan pendekatan yang adaptif dan strategis, PPA terus berupaya mengatasi tantangan yang ada guna mencapai tujuan pengelolaan aset yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Prospek Usaha Tahun 2025

Memasuki tahun 2025, PPA menatap masa depan dengan strategi yang berfokus pada optimalisasi pengelolaan aset, restrukturisasi perusahaan, serta penguatan perannya dalam mendukung transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan proyeksi yang telah disusun, PPA berkomitmen untuk terus meningkatkan nilai aset yang dikelola melalui pendekatan strategis yang berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan.

Obstacles and Strategies for Resolving Them

When carrying out its mandate as an asset manager and strategic partner of SOE, the Company faced challenges that affected the work programs and achievement of performance targets in 2024. These obstacles originated from internal and external factors, which required a strategic approach to overcome them effectively.

One of the main challenges was the dynamics of the global economy that was still colored by uncertainty due to the economic slowdown in several major trading partner countries, fluctuations in commodity prices, and high interest rate policies in the international financial market. These conditions affected the investment climate and asset management strategy followed by PPA.

At the domestic level, challenges also arose from the dynamics of national politics influenced by the Presidential and Vice Presidential Elections and the simultaneous Regional Head Elections. Changes in government policies and regulatory adjustments were factors that needed to be anticipated in the asset management and restructuring process, especially those related to fiscal policy support and economic stimulus.

In addition, sectors that were the focus of PPA asset restructuring and management, such as the manufacturing industry, property, and infrastructure, faced challenges in post-pandemic performance recovery. Demand was not yet fully stable, production costs increasing due to inflation, and tight market competition were factors that influenced the effectiveness of the asset optimization program.

Another challenge was the acceleration of digitalization in the business world that required PPA adopt innovative strategies for asset and investment management. The application of technology in the restructuring process and portfolio optimization was a must so that PPA could increase efficiency, transparency, and competitiveness in carrying out its mandate.

Despite facing various obstacles, PPA remained committed to carrying out its role optimally by strengthening business strategies, collaborating with stakeholders, and innovating asset management. With an adaptive and strategic approach, PPA continued to overcome the existing challenges to achieve the goal of a more productive and sustainable asset management.

Business Prospects for 2025

Entering 2025, PPA looks to the future with strategies that focus on optimizing asset management, corporate restructuring, and strengthening its role in supporting the transformation SOE. Based on the prepared projections, PPA is committed to continuing to increase the value of assets managed through a strategic approach oriented towards sustainable growth.

Salah satu faktor utama yang mendukung prospek usaha PPA di tahun mendatang adalah stabilitas ekonomi nasional pasca Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta kebijakan ekonomi yang semakin terarah dalam mendukung pertumbuhan sektor riil. Dengan kondisi makroekonomi yang lebih kondusif, termasuk proyeksi pertumbuhan ekonomi yang positif dan stabilitas nilai tukar, PPA optimistis dapat menjalankan program restrukturisasi dan optimalisasi aset dengan lebih efektif.

Dalam menghadapi tantangan global dan dinamika pasar, PPA akan terus memperkuat strategi investasi dan divestasi yang lebih selektif serta berbasis analisis risiko yang matang. Fokus utama akan diberikan pada peningkatan nilai aset melalui restrukturisasi bisnis perusahaan yang berada dalam portofolionya, dengan mengedepankan efisiensi operasional dan inovasi dalam tata kelola. Selain itu, PPA akan terus menggali peluang sinergi dengan BUMN lainnya guna menciptakan nilai tambah yang lebih besar dalam pengelolaan aset negara.

Sementara itu, untuk satu tahun ke depan, Perusahaan telah menetapkan sejumlah target strategis yang ingin dicapai dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025. Penyusunan RKAP ini telah melalui proses evaluasi yang komprehensif dengan mempertimbangkan dinamika industri, kondisi ekonomi nasional dan global, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Perusahaan.

Adapun, target yang ditetapkan juga selaras dengan visi jangka panjang Perusahaan dalam meningkatkan kinerja operasional dan mengoptimalkan portofolio bisnis agar tetap kompetitif di tengah persaingan pasar yang semakin ketat. Dengan strategi yang terarah dan adaptif, Perusahaan optimis bahwa implementasi RKAP 2025 akan mampu mendukung pertumbuhan berkelanjutan serta memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

Perkembangan Penerapan GCG

Penerapan GCG oleh Perusahaan dilakukan secara sistematis dalam suatu siklus berkelanjutan yang mencakup berbagai tahapan strategis. Siklus ini dimulai dengan penetapan Standar Kualitas Implementasi GCG, yang berfungsi sebagai pedoman utama dalam memastikan bahwa seluruh kebijakan dan praktik tata kelola telah sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran. Tahap berikutnya adalah Implementasi GCG, di mana Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dalam seluruh aspek operasional dan pengambilan keputusan guna menciptakan lingkungan bisnis yang etis, profesional, dan berorientasi pada kepentingan pemangku kepentingan.

Untuk memastikan efektivitas penerapan GCG, Perusahaan melakukan Monitoring Implementasi GCG, yang bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Selanjutnya, tahap Assessment GCG dilakukan sebagai bagian dari upaya pengukuran kinerja tata kelola perusahaan secara menyeluruh, baik melalui penilaian internal maupun eksternal, guna menilai sejauh mana implementasi GCG telah mencapai standar terbaik.

One of the main factors supporting PPA's business prospects in the coming year will be the stability of the national economy after the Presidential and Vice Presidential Elections, and the economic policies that are increasingly focused on supporting the growth of the real sector. With more conducive macroeconomic conditions, including positive economic growth projections and exchange rate stability, PPA is optimistic that it can carry out asset restructuring and optimization programs more effectively.

When facing global challenges and market dynamics, PPA will continue to strengthen its more selective investment and divestment strategies based on mature risk analysis. The main focus will be given to increasing asset value through restructuring the Company's business in its portfolio, by prioritizing operational efficiency and governance innovation. In addition, PPA will continue to explore opportunities for synergy with other SOEs to create greater added value when managing state assets.

For the next year, the Company has set a number of strategic targets to be achieved in the 2025 Company Work and Budget Plan (RKAP). The RKAP preparation has gone through a comprehensive evaluation process by considering industry dynamics, national and global economic conditions, as well as challenges and opportunities faced by the Company.

The targets set are also in line with the Company's Long-term vision of improving operational performance and optimizing the business portfolio to remain competitive despite increasingly tight market competition. With a focused and adaptive strategy, the Company is optimistic that the 2025 RKAP will be support sustainable growth and provide added value for shareholders and other stakeholders.

Development of GCG Implementation

The Company's GCG implementation is carried out systematically in a continuous cycle that includes various strategic stages. The cycle begins with the establishment of the GCG Implementation Quality Standards, which serve as the main guideline for ensuring that all governance policies and practices are in accordance with the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness. The next stage is GCG Implementation, where the Company applies governance principles in all aspects of its operations and decisionmaking in order to create an ethical, professional, and stakeholder oriented business environment.

To ensure the GCG implementation effectiveness, the Company conducts GCG Implementation Monitoring, aimed at evaluating compliance with established standards, and identifying areas requiring improvement. Furthermore, the GCG Assessment stage is carried out as part of an effort to measure the corporate governance performance as a whole, through internal and external assessments, to assess the extent to which GCG implementation has achieved the best standards.

Hasil dari assessment ini menjadi dasar bagi Perusahaan dalam Peningkatan Kualitas Implementasi GCG, dengan melakukan berbagai perbaikan dan penguatan kebijakan serta mekanisme tata kelola untuk memastikan penerapan yang semakin efektif dan adaptif terhadap dinamika bisnis. Sebagai bagian dari komitmen untuk terus berkembang, Perusahaan juga melakukan Benchmarking, yaitu membandingkan praktik tata kelola perusahaan dengan standar terbaik di industri.

Melalui siklus yang berkesinambungan ini, Perusahaan memastikan bahwa tata kelola yang diterapkan selalu relevan, efektif, dan mampu mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Perusahaan meyakini bahwa penerapan GCG yang berlandaskan pada standar etika tertinggi tidak hanya menciptakan entitas yang memiliki daya saing tinggi, tetapi juga menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan yang berkelanjutan.

PPA melaksanakan asesmen penerapan GCG tahun buku 2023 yang dilakukan menggunakan parameter yang ditetapkan oleh Sekretaris Menteri BUMN melalui SK-16/S.MBU/2012. Asesmen tersebut dilakukan secara mandiri oleh Divisi Satuan Pengawasan Internal PPA dan berdasarkan Hasil Evaluasi atas Penerapan GCG Tahun Buku 2023 nomor LAP-3/PPA/DSPI-DU/1224 tanggal 31 Desember 2024 dengan skor 90,77 dan predikat Sangat Baik. Hal tersebut membuktikan bahwa PPA secara konsisten dan komprehensif terus meningkatkan kualitas penerapan prinsip GCG dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari.

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Evaluasi atas efektivitas manajemen risiko di Perusahaan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan guna memastikan bahwa setiap risiko yang berpotensi mempengaruhi operasional dan kinerja Perusahaan dapat diidentifikasi, dianalisis, dan dikelola dengan optimal. Evaluasi atas efektivitas manajemen risiko juga dilakukan melalui 4 (empat) metode evaluasi. Dengan menerapkan keempat metode evaluasi ini, Perusahaan memastikan bahwa sistem manajemen risiko yang dijalankan selalu dalam kondisi adaptif terhadap perubahan, dan mampu memberikan perlindungan yang kuat bagi keberlanjutan bisnis.

Manajemen risiko di Perusahaan telah berjalan dengan cukup efektif, mencerminkan komitmen Perusahaan dalam mengelola berbagai potensi risiko secara sistematis dan terintegrasi. Efektivitas ini tidak hanya didasarkan pada kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan, tetapi juga pada kesadaran dan partisipasi aktif seluruh elemen dalam organisasi dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko secara berkelanjutan. Keberhasilan penerapan manajemen risiko ini dapat dibuktikan melalui beberapa indikator utama yang menunjukkan bahwa sistem pengelolaan risiko telah menjadi bagian yang melekat dalam budaya kerja di seluruh unit bisnis.

Penerapan Whistle Blowing System

Sebagai bagian dari komitmen dalam menerapkan GCG, Perusahaan terus mengembangkan dan memperkuat sistem pelaporan pelanggaran atau Whistle Blowing System (WBS) yang efektif, transparan, dan terpercaya. Penerapan WBS di lingkup Perusahaan dirancang untuk memberikan saluran pelaporan yang aman bagi

The results of this assessment serve as the basis for the Company to Improve the Quality of GCG Implementation, by making improvements and strengthening policies and governance mechanisms to ensure increasingly effective and adaptive implementation to business dynamics. As part of its commitment to continue growing, the Company also conducts Benchmarking, by comparing corporate governance practices with the best standards in the industry.

Through this continuous cycle, the Company ensures that the governance implemented is always relevant, effective, and supports sustainable business growth and provides added value to all stakeholders. The Company believes that GCG implementation based on the highest ethical standards not only creates a highly competitive entity, but also becomes the foundation for sustainable growth.

PPA conducted a GCG implementation assessment for the 2023 fiscal year using parameters set by the Secretary of the Minister of SOEs through SK-16/S.MBU/2012. The assessment was conducted independently by the PPA Internal Supervisory Unit Division, and was based on the GCG Implementation Evaluation Results for the 2023 Fiscal Year No. LAP-3/PPA/DSPI-DU/1224 dated December 31, 2024, which returned a score of 90.77 with a Very Good predicate. This proves that PPA consistently and comprehensively continues to improve the quality of the GCG implementation principles when carrying out its daily business activities

Evaluation of the Company's Risk Management System Effectiveness

Evaluation of the Company's risk management effectiveness is carried out systematically and continuously to ensure that every risk that has the potential to affect the Company's operations and performance can be identified, analyzed, and managed optimally. The risk management effectiveness evaluation is also carried out using 4 (four) evaluation methods. By implementing these four evaluation methods, the Company ensures that the risk management system is always in an adaptive condition to change, and can provide strong protection for business sustainability.

The Company's Risk management has been running quite effectively, reflecting the Company's commitment to managing potential risks systematically in an integrated manner. This effectiveness is not only based on the policies and procedures implemented, but also on the awareness and active participation of all parts of the organization in identifying, assessing, and controlling risks on an ongoing basis. The success of implementing risk management can be seen through several key indicators that show that the risk management system has become an inherent part of the work culture in all business units.

Whistle Blowing System Implementation

As part of its commitment to GCG implementation, the Company continues to develop and strengthen an effective, transparent, and reliable Whistle Blowing System (WBS). The Company's WBS is designed to provide a safe reporting channel for all employees and stakeholders to report alleged violations, whether related to

seluruh karyawan dan pemangku kepentingan dalam melaporkan dugaan pelanggaran, baik yang berkaitan dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), penyalahgunaan wewenang, benturan kepentingan, maupun pelanggaran etika lainnya yang berpotensi merugikan Perusahaan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penerapan WBS, PPA secara berkala melakukan evaluasi dan penyempurnaan sistem, termasuk melalui peningkatan kapabilitas tim pengelola WBS, sosialisasi kepada seluruh karyawan dan pemangku kepentingan. Pada tahun 2024 Perusahaan telah memperbarui kebijakan pelaporan pelanggaran dan penanganannya, sebagaimana ditetapkan berdasarkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi nomor SK-08/KEP/KOM/PPA/XI/2024 ; SK-136/PPA/1124 tanggal 28 November 2024 tentang Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System-WBS).

Dengan penerapan WBS yang semakin terstruktur, PPA berupaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih etis, profesional, dan bebas dari praktik yang dapat merugikan Perusahaan serta pemangku kepentingan. Melalui komitmen yang kuat dalam pengelolaan WBS, PPA memastikan bahwa setiap pelanggaran dapat ditangani dengan tepat, sehingga mampu memperkuat fondasi tata kelola perusahaan yang lebih bersih, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Komposisi dan Susunan Direksi

Di sepanjang tahun 2024, tidak terdapat perubahan susunan dan komposisi Direksi Perusahaan. Hingga akhir tahun 2024, komposisi Direksi PPA terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur.

corruption, collusion, and nepotism (KKN), abuse of authority, conflict of interest, or other ethical violations that have the potential to harm the Company.

To improve the effectiveness of WBS, PPA periodically evaluates and improves the system, including improving the capabilities of the WBS management team, and socializing WBS to all employees and stakeholders. In 2024, the Company updated the policy on reporting violations and their handling, as stipulated in the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors No. SK-08/KEP/KOM/PPA/XI/2024; SK-136/PPA/1124 dated November 28, 2024 concerning the Whistleblowing System (WBS) Policy.

With the application of a more structured WBS, PPA is looking to create a more ethical, professional, and working environment free from practices that could harm the Company and stakeholders. With a strong commitment to WBS management, PPA ensures that any violations are handled appropriately, thereby strengthening the foundation for a cleaner, more competitive, and more sustainable corporate governance.

Board of Directors Composition and Structure

Throughout 2024, there were no changes to the composition and structure of the Company's Board of Directors. Until the end of 2024, the composition of the PPA Board of Directors consists of 3 (three) people, namely 1 (one) President Director and 2 (two) Directors.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi
Board of Directors Composition and Basis for Appointment

per 31 Desember 2024
as of December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis for Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Muhammad Teguh Wirahadikusumah	Direktur Utama merangkap Plt Direktur Special Asset Management President Director concurrently Acting Director of Special Asset Management	Sebagai Direktur Utama: Surat Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Nomor SK-367/MBU/12/2023 pada 15 Desember 2023. Sebagai Plt. Direktur Special Asset Management: Keputusan Dewan Komisaris nomor 04/KEP.KOM/PPA/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 As President Director: Minister of SOE Decree and President Director of PT Danareksa (Persero) No. SK-367/MBU/12/2023 dated December 15, 2023. Concurrently Acting Director of Special Asset Management: Board of Commissioners Decree No. 04/KEP.KOM/PPA/I/2024 dated January 19, 2024	Sebagai Direktur Utama: 15 Desember 2023 Sebagai Plt. Direktur Special Asset Management: 19 Januari 2024 As President Director: December 15, 2023 Concurrently Acting Director of Special Asset Management: January 19, 2024

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Direksi
Board of Directors Composition and Basis for Appointment

per 31 Desember 2024
as of December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis for Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Ridha Farid Lesmana	Direktur Investasi Director of Investments	Surat Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Danareksa (Persero) dengan Nomor SK-367/MBU/12/2023 pada 15 Desember 2023 Minister of SOE and President Director of PT Danareksa (Persero) with Decree No. SK-367/MBU/12/2023 dated December 15, 2023	15 Desember 2023 December 15, 2023
Tree Asih Putra Sianturi	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Surat Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Danareksa (Persero) dengan Nomor SK-367/MBU/12/2023 pada 15 Desember 2023 Minister of SOE and President Director of PT Danareksa (Persero) with Decree No. SK-367/MBU/12/2023 dated December 15, 2023	15 Desember 2023 December 15, 2023

Apresiasi dan Penutup

Mengakhiri laporan ini, Direksi PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku kepentingan atas dukungan, kerja sama, dan kepercayaan yang telah diberikan sepanjang tahun 2024. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas arahan dan pengawasan yang konstruktif, serta kepada para pemegang saham dan regulator yang terus memberikan kepercayaan dan dukungan bagi pertumbuhan Perusahaan.

Melangkah ke tahun yang akan datang, Perusahaan akan terus berupaya meningkatkan kinerja, memperkuat strategi bisnis, dan mengoptimalkan potensi yang dimiliki guna menghadapi dinamika industri serta menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dengan semangat keberlanjutan dan tata kelola yang baik, kami yakin bahwa PPA dapat mencapai visi jangka panjang Perusahaan.

Appreciation and Closing

To close this report, the Board of Directors of PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) would like to express its highest appreciation to all our stakeholders for their support, cooperation, and trust given throughout 2024. We would like to thank the Board of Commissioners for their constructive direction and supervision, as well as the shareholders and regulators who continued to provide trust and support for the Company's growth.

Moving forward into the coming year, the Company will continue improve its performance, strengthen its business strategies, and optimize its potential to face industry dynamics and create sustainable growth. With a spirit of sustainability and good governance, we are confident that PPA will achieve the Company's Long-term vision.

Jakarta, 4 April 2025
Jakarta, April 4, 2025



Muhammad Teguh Wirahadikusumah
Direktur Utama merangkap Plt Direktur Special Asset Management
President Director concurrently Acting Director of Special Asset Management



Ridha Farid Lesmana

Direktur Investasi
Director of Investment

Tree Asih Putra Sianturi

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Director of Finance and Risk Management

Muhammad Teguh Wirahadikusumah

Direktur Utama
merangkap Direktur Special Asset Management
President Director and concurrently
Director of Special Asset Management

Marwanto Harjowiryo

Komisaris
Commissioner

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN TAHUN BUKU 2024 PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET

Statement of the Board of Commissioners and the Board of Directors Regarding
Responsibility for the Annual Report for Fiscal Year 2024 of
PT Perusahaan Pengelola Aset

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Perusahaan Pengelola Aset Tahun Buku 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, hereby declare that all information in the 2024 Annual Report of PT Perusahaan Pengelola Aset has been fully disclosed and we assume full responsibility for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 4 April 2025
Jakarta, April 4, 2025

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners



Marwanto Harjowiryo
Komisaris
Commissioner

DIREKSI
Board of Directors



Muhammad Teguh Wirahadikusumah
Direktur Utama merangkap Pelaksana Tugas Direktur Special Asset Management
President Director concurrently Acting Director of Special Asset Management



Ridha Farid Lesmana
Direktur Investasi
Director of Investment



Tree Asih Putra Sianturi
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
Director of Finance and Risk Management







PROFIL PERUSAHAAN

COMPANY PROFILE

Di tahun 2024, PPA menambah portofolio propertinya, dengan diresmikannya ToWork Coworking yang merupakan salah satu inovasi untuk menangkap peluang bisnis.

In 2024, PPA added to its property portfolio, with the inauguration of ToWork Coworking, an innovation to capture business opportunities.

INFORMASI UMUM PERUSAHAAN

Company's General Information

Nama Perusahaan Company Name	PT Perusahaan Pengelola Aset
Nama Panggilan Short Name	PPA
Informasi Perubahan Nama Information on Changes to the Company's Name	Perubahan nama dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) menjadi PT Perusahaan Pengelola Aset pada tahun 2022 sesuai Akta No. 47 tanggal 26 Juli 2022. The Company changed its name from Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) to PT Perusahaan Pengelola Aset in 2022 according to Deed No. 47 dated July 26, 2022.
Bidang Usaha Line of Business	Pengelolaan Aset Asset Management
Status dan Badan Hukum Status and Legal Entity	Perseroan Terbatas (PT) / Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Limited Liability Company (PT) / State Owned Enterprise (BUMN)
Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment	- Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset, tanggal 27 Februari 2004. - Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset, tanggal 4 September 2008. - Government Regulation No. 10 of 2004 concerning the Establishment of a Company (Persero) in Asset Management Sector, dated February 27, 2004. - Government Regulation No. 61 of 2008, as Amendment to Government Regulation No. 10 of 2004 concerning The Establishment of a Company (Persero) in Asset Management Sector, dated September 4, 2008
Tanggal Pendirian Date of Establishment	27 Februari 2004 February 27, 2004
Maksud dan Tujuan Pendirian Purposes and Objectives of Establishment	Pengelolaan Aset eks. BPPN, Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi (R/R) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kegiatan investasi, serta kegiatan pengelolaan aset BUMN Ex-IBRA Asset Management, Restructuring and/or Revitalization (R/R) of State-Owned Enterprises (SOEs), investment activities, and Asset Management activities of SOEs
Kepemilikan Saham Share Ownership	Negara Republik Indonesia sebanyak 1 saham seri A Dwiwarna PT Danareksa (Persero) sebanyak 6.188.834 saham Seri B Republic of Indonesia Government owns 1 Series A Dwiwarna share, PT Danareksa (Persero) owns 6,188,834 saham Series B shares
Modal Dasar Authorized Capital	Rp20.152.089.000.000 Rp20,152,089,000,000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid Up Capital	Rp5.668.996.699.336 Rp5,668,996,699,336
Rating Perusahaan Company Rating	Pefindo: idAA Pefindo: idAA
Obligasi Bonds	Obligasi I Tahun 2020 Perusahaan Pengelola Aset Seri B dan Seri C, Obligasi II Tahun 2022 Perusahaan Pengelola Aset Seri A, dan Seri B; kode obligasi: PPAP peringkat: idAA dari PEFINDO Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Jangka Panjang Yang Dilakukan Tanpa Melalui Penawaran Umum I PT Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2022 Peringkat: idAA(sy) dari PEFINDO Asset Management Company 2020 Bonds I Series B and Series C Asset Management Company 2022 Bonds II Series A, and Series B; Bond code: PPAP Rating: idAA from PEFINDO Long-Term Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Carried Out Without Public Offering I PT Perusahaan Pengelola Aset 2022 Rating: idAA(sy) from PEFINDO
Jumlah Karyawan Total Employees	140 orang (2024) 140 people (2024)
Jaringan Usaha Business Network	Perusahaan beroperasi di wilayah Negara Republik Indonesia. The Company operates within the territory of the Republic of Indonesia.

AKSES TERHADAP PERUSAHAAN TERMASUK KANTOR CABANG DAN/ATAU PERWAKILAN ACCESS TO THE COMPANY INCLUDING BRANCHES AND/OR REPRESENTATIVE OFFICES

Jaringan Kantor Office Network	Alamat Address
Kantor Pusat Head Office	Menara Danareksa Lantai 17 Jl. Medan Merdeka Selatan Kavling 14 Jakarta Pusat 10110, DKI Jakarta Indonesia Telepon: +61 21 5798 2222 Faksimili: +61 21 577 2443 Surel: corpsec@ptppa.com Menara Mandiri II Lantai 7-9 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Pusat 12190, DKI Jakarta Indonesia Telephone: +61 21 5798 2222 Fax: +61 21 577 2443 Email: corpsec@ptppa.com
Situs Web Website	www.ptppa.com
Kontak Perusahaan Company Contact	Sekretaris Perusahaan Swasti Kartikaningtyas Telp: 021-57982222 Fax: 021-57982150 Email : corpsec@ptppa.com Media Sosial Instagram : @ptppaofficial Twitter : @ptppaofficial Youtube : PT PPA Official LinkedIn : PT Perusahaan Pengelola Aset Facebook : PT Perusahaan Pengelola Aset Corporate Secretary Swasti Kartikaningtyas Telephone: 021-57982222 Fax: 021-57982150 Email : corpsec@ptppa.com Social Media Instagram : @ptppaofficial Twitter : @ptppaofficial Youtube : PT PPA Official LinkedIn : PT Perusahaan Pengelola Aset Facebook : PT Perusahaan Pengelola Aset
Entitas Anak Subsidiaries	
PT PPA Finance PT PPA Kapital	Menara Mandiri II Lantai 9 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Pusat 12190, DKI Jakarta Indonesia Menara Mandiri II Lantai 8 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 54-55 Jakarta Pusat 12190, DKI Jakarta Indonesia



RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

BRIEF HISTORY OF THE COMPANY

PT Perusahaan Pengelola Aset (“PPA” atau “Perusahaan”) berdiri pada 27 Februari 2004 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset dan diaktakan melalui Akta Pendirian No. 7 tanggal 27 Februari 2004 serta mendapat persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C-05780 HT.01.01.TH.2004 tanggal 9 Maret 2004.

Sesuai dengan akta pendiriannya, PPA awalnya beroperasi untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). PPA mengemban mandat utama sebagai pelaksana pengelolaan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang tidak dalam perkara hukum. Untuk melaksanakan tugas ini, pada 24 Maret 2004, PPA menandatangani perjanjian dengan Menteri Keuangan terkait pengelolaan aset eks BPPN.

Berkat kemampuan PPA dalam mengelola aset eks BPPN, Pemegang Saham kemudian mendelegasikan tugas, yakni membantu pemerintah dalam menyalurkan BUMN yang mengalami permasalahan. Penugasan tersebut menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk meninjau kembali strategi dan merumuskan ulang maksud dan tujuan Perseroan.

PT Perusahaan Pengelola Aset (or “PPA” or the “Company”) was established on February 27, 2004 based on Government Regulation No. 10 of 2004 dated February 27, 2004 concerning the Establishment of a Limited Liability Company (Persero) in the Asset Management Sector, and obtained approval from the Ministry of Law and Human Rights No. C-05780 HT.01.01.TH.2004 dated March 9, 2004.

Based on its deed of establishment, PPA would initially operate for a period of 5 (five) years, which could be extended based on approval from the General Meeting of Shareholders (GMS). PPA's main mandate was to manage the assets of the former Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) that were not involved in legal cases. To carry out this task, on March 24, 2004, PPA signed an agreement with the Minister of Finance concerning the management of ex-IBRA assets.

Due to PPA's ability to manage former IBRA assets, the Shareholders then delegated it with the task of assisting the Government in improving the health of SOEs that were experiencing problems. This assignment became a consideration for the Government to review the strategy and reformulate the Company's aims and objectives.

Pada tahun 2008, ruang lingkup usaha PPA bertambah. Melalui Peraturan Pemerintah No. 61 tanggal 4 September 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset, maksud dan tujuan PPA menjadi pengelolaan aset Negara eks BPPN; Restrukturisasi dan/atau revitalisasi (R/R) BUMN; Kegiatan investasi; serta kegiatan pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara.

Sebagai tindak lanjut dari regulasi tersebut, pada 10 September 2008, Pemegang Saham menerbitkan Keputusan Pemegang Saham di luar RUPS yang menetapkan perubahan masa tugas Perusahaan dari lima tahun menjadi waktu yang tidak terbatas (*going concern*).

Seiring perkembangan usaha Perseroan, Menteri BUMN selaku kuasa pemegang saham kembali melakukan perubahan struktur permodalan dan Anggaran Dasar Perseroan pada tanggal 26 Juli 2022 sesuai Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset dan telah mendapat surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Kemenkumham sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0052667.AH.01.02 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara RI No. 70 tanggal 2 September 2022.

Para Pemegang Saham Perseroan kembali melakukan perubahan struktur permodalan dan Anggaran Dasar pada tanggal 10 Maret 2023. Hal tersebut sesuai Pernyataan Keputusan di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset dan telah mendapat surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Kemenkumham sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor No. AHU-AH.01.03-0041646 tanggal 17 Maret 2023 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 48, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 17146.

Informasi Perubahan Nama

Hingga akhir tahun 2024, Perseroan tidak melakukan perubahan nama. PPA mengalami perubahan nama pada 26 Juli 2022, dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) menjadi PT Perusahaan Pengelola Aset sesuai Akta No. 47 tanggal 26 Juli 2022. Perubahan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Menteri BUMN Nomor S-385/MBU/06/2022 tanggal 24 Juni 2022 mengenai Persetujuan Pengalihan Saham.

In 2008, PPA's business scope increased. Through Government Regulation No. 61 dated September 4, 2008 as an Amendment to Government Regulation No. 10 of 2004 concerning the Establishment of a Limited Liability Company (Persero) in the Asset Management Sector, the aims and objectives of PPA became the management of former IBRA State assets; Restructuring and/or revitalization (R/R) of SOEs; Investment activities; and asset management activities of State-Owned Enterprises.

As a follow-up to the regulation, on September 10, 2008, the Shareholders issued a Shareholders' Resolution outside the GMS that stipulated a change in the Company's term of office from five years to an unlimited period (*going concern*).

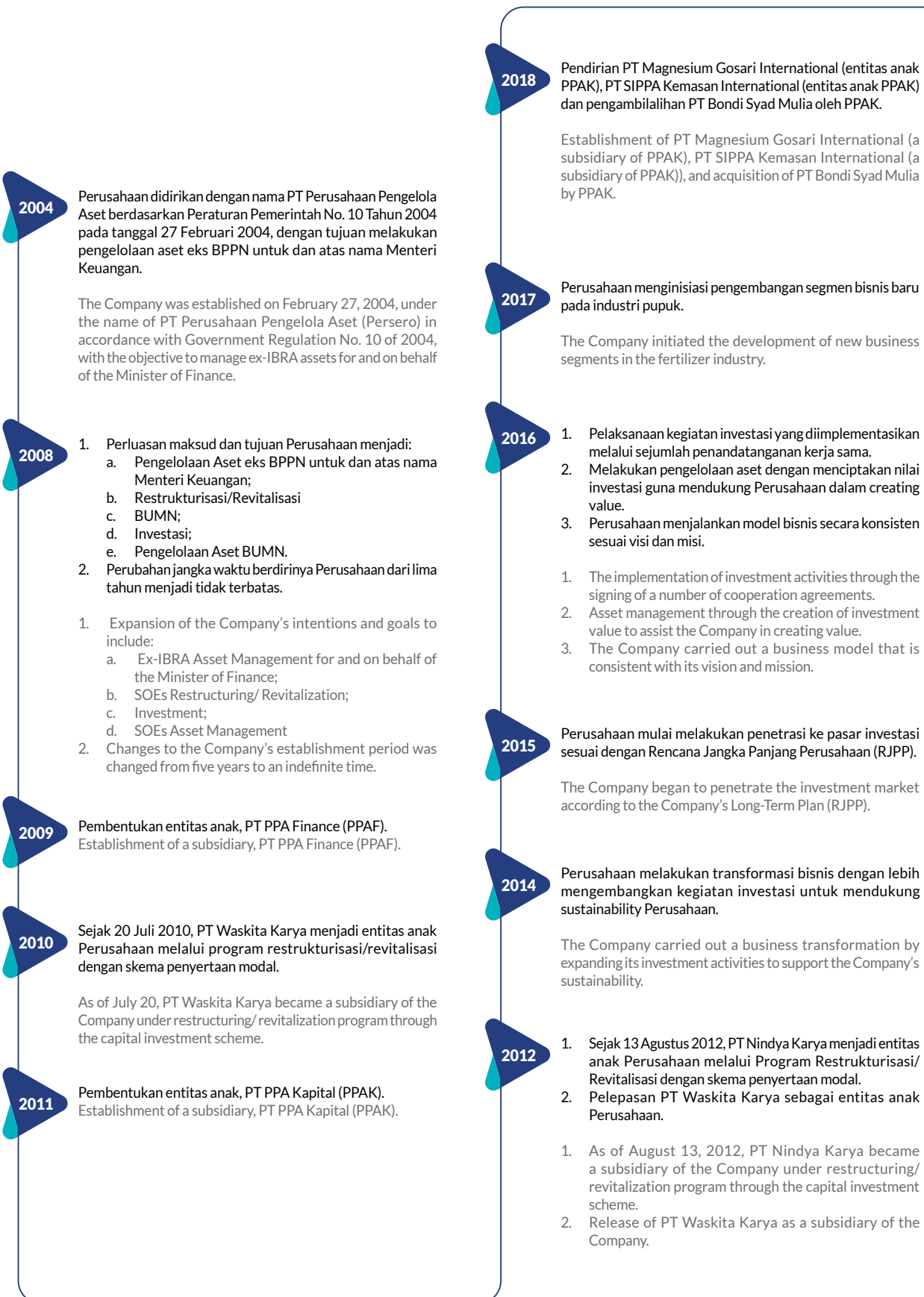
In line with the Company's business development, the Minister of BUMN as the shareholder's attorney again made changes to the capital structure and Articles of Association of the Company on July 26, 2022 in accordance with the Decision Statement outside the PT Perusahaan Pengelola Aset General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) that received a letter of acceptance of notification of the changes The Articles of Association from the Ministry of Law and Human Rights that they were in accordance with the Republic of Indonesia Minister of Law and Human Rights Decree No. AHU-0052667.AH.01.02 of 2022 concerning Approval of Amendments to the Articles of Association of Limited Liability Companies in Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 70 dated September 2, 2022.

On March 10 2023, the Company's Shareholders made further changes to the Company's capital structure and Articles of Association. This was in accordance with the Decision Statement outside the PT Perusahaan Pengelola Aset General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) that received a letter of acceptance of the changes to the Articles of Association from the Ministry of Law and Human Rights in accordance with the Republic of Indonesia Minister of Law and Human Rights Decree No. AHU-AH.01.03-0041646 dated March 17, 2023, as published in the Republic of Indonesia State Gazette No. 48, Supplement to the Republic of Indonesia State Gazette No. 17146.

Information on Name Changes

During 2024, the Company did not make any name changes. PPA changed its name on July 26, 2022, from Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) to PT Perusahaan Pengelola Aset in accordance with Deed No. 47 dated July 26, 2022. The change was a follow-up to the Minister of SOEs Letter No. S-385/MBU/06/2022 dated June 24, 2022 concerning Approval Share Transfers.

JEJAK LANGKAH MILESTONES



2019

1. Perusahaan melakukan perbaikan struktur pendanaan dengan menerbitkan Medium Term Notes (MTN) dan Surat Berharga Komersial (SBK). Perusahaan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa barat untuk mengembangkan dan merevitalisasi BUMD di Jawa barat dengan dukungan dari Bank BJB. Perusahaan menjalin kerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dalam pengelolaan Non Performing Loan.
 2. Perusahaan merintis kerja sama dengan Korea Asset Management Corporation (KAMCO). Kerja sama meliputi pertukaran informasi, pengembangan kompetensi karyawan dan penajakan peluang investasi pada Non Performing Loan (NPL) perbankan antara kedua belah pihak.
 3. Perusahaan bergabung dalam keanggotaan International Public AMC Forum (IPAF) dalam rangka memperkuat jaringan internasional di bidang pengelolaan aset.
1. The Company improved its funding structure by issuing Medium Term Notes (MTN) and Commercial Paper. With the support from Bank BJB, the Company collaborated with the West Java Provincial Government to develop and revitalize the Regional- owned enterprise (BUMD) in West Java. In managing Non-Performing Loans, the Company collaborated with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI).
 2. The Company initiated a cooperation with Korea Asset Management Corporation (KAMCO). The cooperation includes information exchange, employee competency development, and the exploration of investment opportunities in Non-Performing Loan (NPL) banking between the two parties.
 3. The Company joined the membership of the international public AMC Forum (IPAF) to strengthen.

2020

1. Untuk memperkuat struktur pendanaannya, pada tanggal 19 Agustus 2020, PT PPA menerbitkan Obligasi I Tahun 2020 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) senilai Rp642,10 miliar yang terbagi 3 (tiga) seri, yaitu Seri A, B dan C.
 2. Melalui Surat Kuasa Khusus ("SKK") Menteri BUMN kepada PPA pada tanggal 30 September 2020, peran Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN yang dilakukan PPA semakin diperluas. PPA diberikan kewenangan dan/atau Hak Pemegang Saham terhadap 23 BUMN Titip Kelola, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan kegiatan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi.
1. To strengthen its funding structure, PT PPA issued Bonds I of 2020 PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) worth Rp642.10 billion on August 19, 2020, divided into three (three) series, namely Series A, B, and C.
 2. The PPA's role in SOE restructuring and/or revitalization is becoming increasingly broad as a result of the Special Power of Attorney ("SKK") granted by the Minister of SOEs to the PPA on September 30, 2020. PPA has been granted authority and/or shareholder rights over 23 SOEs restructuring, including but not limited to Restructuring and/ or Revitalization activities.

2021

1. Progres signifikan dalam Restrukturisasi BUMN Titip Kelola PPA telah berhasil membantu restrukturisasi PT Barata Indonesia (Persero) melalui proses PKPU. Selain itu, PPA juga telah membantu Penyelesaian pembayaran pesangon 429 eks karyawan PT Industri Gelas (Persero). Dari sisi mobilitas karyawan, PPA berhasil menginisiasi pengalihan sejumlah karyawan PT Istaka Karya (Persero) yang memiliki keterampilan pada bidangnya untuk tetap dapat mengembangkan potensi yang dimiliki ke PT Nindya Karya (Persero).
 2. Kesuksesan Pengelolaan Aset Berkualitas Rendah Bank Muamalat PPA berhasil menerapkan skema inovatif pengelolaan aset berkualitas rendah di Bank Muamalat senilai Rp10 triliun melalui penukaran aset berkualitas rendah dengan aset produktif (aset swap). Skema ini menjadi kunci dalam upaya turnaround dan penguatan permodalan di Bank Muamalat. Transaksi ini meraih 2 penghargaan internasional dari Islamic Finance News (IFN), yaitu "Restructuring Deal of the Year 2021" dan "Indonesia Deal of the Year 2021."
 3. Reposisi Solusi Inovatif dan Efektif Special Situations Fund (SSF) PPA melakukan rebranding lini bisnis investasi menjadi 'Special Situations Fund (SSF)' dengan berfokus pada investasi yang terstruktur dan terukur serta manajemen risiko yang prudent. SSF menawarkan solusi pembiayaan alternatif yang tidak tersedia di perbankan konvensional atau produk pasar modal dan juga memberikan layanan advisory.
1. Significant progress in SOEs Restructuring (BUMN Titip Kelola) PPA has succeeded in assisting the restructuring of PT Barata Indonesia (Persero) through the Postponement of Debt Settlement Obligation (PKPU) process. In addition, PPA has also assisted in settlement of severance payments for 429 former employees of PT Industri Gelas (Persero). Furthermore, in talent mobility, PPA has initiated the transfer of PT Istaka Karya (Persero), skilled employees, to PT Nindya Karya (Persero) to keep them growing their skills and reaching potential.
 2. Bank Muamalat's Low-Quality Asset Management Success PPA has successfully implemented an innovative scheme at Bank Muamalat, worth Rp10 trillion, for managing low-quality assets through exchanging low-quality assets with productive assets (asset swap). This scheme is critical to Bank Muamalat's turnaround and capital strengthening efforts. As a result, this transaction was recognized by Islamic Finance News (IFN) with two international awards, including "Restructuring Deal of the Year 2021" and "Indonesia Deal of the Year 2021."
 3. Repositioning of the Special Situations Fund (SSF) for Innovative and Effective Solutions. PPA rebranded its investment business line as "Special Situations Fund (SSF)," emphasizing structured and quantifiable investments and prudent risk management. SSF provides alternative financing solutions that are not available through traditional banking or capital market products as well as provides advisory services..

2022

1. Kementerian BUMN melalui PPA yang merupakan anggota Holding BUMN Danareksa bersama Pemerintah Kota Surakarta, berkomitmen membangkitkan kembali studio rekaman pertama di Indonesia melalui revitalisasi dan pengembangan Lokananta. Lokananta adalah "Titik Nol" industri musik Indonesia, studio rekaman pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 1956. Ke depan, Lokananta akan menjadi sentra kreativitas dan komersial (creative & commercial hub) bagi para musisi, seniman, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), sekaligus menjadi destinasi wisata edukatif bagi masyarakat.
2. PPA bersama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ("Garuda Indonesia") Menandatangani komitmen kerja sama dalam mendukung optimalisasi program restorasi armada yang nantinya akan diutilisasikan untuk meningkatkan frekuensi penerbangan. Sebagai instrumen strategis pemerintah dalam mengoptimalkan nilai ekosistem BUMN, PPA mendukung rencana ekspansi Garuda Indonesia untuk pemenuhan kecukupan armadanya. PPA optimistis terhadap prospek usaha Garuda Indonesia seiring dengan tingginya permintaan pasar domestik pasca pandemi.
3. PPA mendorong PT Barata Indonesia (Persero) ("Barata Indonesia") untuk dapat menjadi bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan komponen industri transportasi berbasis listrik (electric vehicle/ EV). Dukungan tersebut dilandasi kiprah Barata Indonesia yang telah menjadi bagian dari rantai pasok global dengan jangkauan ekspor komponen kendaraan ke lebih dari 20 negara di dunia.
1. Through PPA as a member of the Danareksa SOEs Holding, the Ministry of SOEs altogether with the Surakarta City Government, committed to revive the first recording studio in Indonesia through the revitalization and development of Lokananta. Lokananta is the "Zero Point" of the Indonesian music industry, the first recording studio in Indonesia which was established in 1956. Going forward, Lokananta will become a creative & commercial hub for the musicians, artists, as well as micro, small and medium businesses (MSMEs), as well as an educational tourism destination for the society.
2. Collaborated with PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ("Garuda Indonesia"), PPA signed a cooperation commitment in supporting the optimization of the fleet restoration program which will later be utilized to add flight frequency. As the government's strategic instrument in optimizing the value of the SOEs ecosystem, PPA supports Garuda Indonesia's expansion plans to fulfill its fleet adequacy. PPA is optimistic about Garuda Indonesia's business prospects in line with the high post- pandemic domestic market demand.
3. PPA supports PT Barata Indonesia (Persero) ("Barata Indonesia") to become an important part of meeting the needs of the electric vehicle (EV)-based transportation industry components. This support considers the progress of Barata Indonesia, which has become part of the global supply chain with a reach of exporting vehicle components to more than 20 countries worldwide.

2023

1. PPA kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kebangkitan pariwisata Indonesia. Setelah sukses mendukung Garuda Indonesia dalam merestorasi armada pada tahun lalu, PPA kali ini memberikan dukungan kepada ekosistem BUMN lain, Citilink, untuk merestorasi armadanya melalui pinjaman berbasis bagi hasil. Dukungan pembiayaan kepada Citilink tersebut diharapkan dapat memenuhi kecukupan armadanya seiring tingginya permintaan pasar domestik pasca pandemi serta dapat memberikan dampak bagi akselerasi bisnis Citilink dan kemajuan pariwisata di Indonesia
2. Grand Launching dan Festival Lokananta. PPA berhasil merevitalisasi aset Lokananta yang memiliki luas 2,1 hektar di pusat Kota Surakarta. Pengembangan Lokananta dilakukan dengan proses bisnis dan uji tuntas yang komprehensif dengan mengedepankan tata kelola yang baik, sehingga diharapkan Lokananta menjadi entitas bisnis yang berkelanjutan. Lokananta baru akan menjadi sentra kreativitas dan komersial (Creative & Commercial Hub) bagi para musisi, seniman, dan UMKM dapat memberikan dampak sosial, kemajuan ekonomi, dan pelestarian sehingga budaya Indonesia.
3. PPA meraih penghargaan sebagai pemimpin forum perusahaan pengelola aset internasional atau International Public Asset Management Company (IPAF). PPA menyelenggarakan perhelatan IPAF Annual Summit & International Conference di Bali pada tanggal 20-22 September 2023 di Nusa Dua, Bali. Rangkaian kegiatan IPAF Annual Summit & International Conference ini menjadi forum untuk membahas isu-isu strategis mengenai kondisi ekonomi di Kawasan Asia dan langkah nyata IPAF untuk turut menjaga stabilitas keuangan melalui solusi pengelolaan aset berkualitas rendah atau non performing loan (NPL).
1. PPA again demonstrated its commitment to supporting the Indonesian tourism revival. After successfully supporting Garuda Indonesia in restoring its fleet last year, PPA this time provided support to another BUMN ecosystem, Citilink, to restore its fleet through profit-sharing based loans. It is hoped that this financing support for Citilink will enable them to meet the adequacy of its fleet in line with the high demand in the domestic market after the pandemic, and can have an impact on the acceleration of Citilink's business and the progress of tourism in Indonesia.
2. Grand Launching and Lokananta Festival. PPA succeeded in revitalizing its Lokananta asset that covers an area of 2.1 hectares in the center of Surakarta. Lokananta's development was carried out using comprehensive business processes and due diligence by prioritizing good governance, so that Lokananta will become a sustainable business entity. The new Lokananta will become a creative and commercial center (Creative & Commercial Hub) for musicians, artists and MSMEs to provide a social impact, economic progress, and preservation of Indonesian culture.
3. PPA received an award as a leader in international asset management company forum or International Public Asset Management Company (IPAF). PPA held the IPAF Annual Summit & International Conference in Bali on September 20-22, 2023 in Nusa Dua, Bali. The series of IPAF Annual Summit & International Conference activities was a forum to discuss strategic issues regarding economic conditions in the Asian region and IPAF's concrete steps to help maintain financial stability through solutions for managing low quality assets or non-performing loans (NPL).

2024

1. Sebagai pemimpin forum perusahaan pengelola aset internasional atau International Public Asset Management Company (IPAF), PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) menyelenggarakan IPAF Training Seminar yang diadakan pada 22-23 April 2024 di Jakarta. Kegiatan ini merupakan komitmen PPA untuk mendukung peningkatan wawasan dan kapasitas mengenai pengelolaan aset berkualitas rendah atau non performing loan (NPL) kepada seluruh anggota yang berasal dari berbagai negara di Asia.

IPAF Training Seminar dihadiri oleh 100 peserta yang terdiri dari para anggota IPAF, pembuat kebijakan, perbankan, profesional, dan investor dari berbagai negara di dunia, serta menghadirkan 22 narasumber internasional maupun Indonesia yang berpengalaman dan kompeten di bidangnya.

2. Sejak didirikan tahun 2004, PPA telah berperan strategis sebagai Agen Restrukturisasi BUMN dimana terhadap 21 BUMN Titip Kelola, PPA telah menyalurkan Rp1,18 triliun dalam bentuk dana talangan, biaya restrukturisasi, serta modal kerja untuk pengembangan usaha maupun stabilisasi keuangan.
1. As the leader of the International Public Asset Management Company (IPAF) forum, PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) held the IPAF Training Seminar on April 22-23, 2024 in Jakarta. This activity is PPA's commitment to supporting increased insight and capacity regarding the management of low-quality assets or non-performing loans (NPL) for all members from other countries in Asia.

The IPAF Training Seminar was attended by 100 participants consisting of IPAF members, policy makers, banks, professionals, and investors from other countries in the world, and presented 22 international and Indonesian speakers who were experienced and competent in their fields.

2. Since its establishment in 2004, PPA has played a strategic role as an SOE Restructuring Agent where for 21 Titip Kelola SOEs, PPA has disbursed Rp1.18 trillion in the form of bailout funds, restructuring costs, and working capital for business development and financial stabilization.



IDENTITAS PERUSAHAAN

CORPORATE IDENTITY



PERUSAHAAN PENGELOLA ASET

Member of  Danareksa

Logo PPA yang cukup tegas namun ramah pada huruf A mencerminkan karakter PPA yang “dekat” dan dapat diandalkan, namun tegas dalam pendirian karena senantiasa menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap pengambilan keputusan. Di dalam huruf A terdapat segitiga dalam bentuk kecil hingga besar, yang menggambarkan bahwa PPA memiliki pondasi yang kuat sehingga dapat tumbuh berkelanjutan dalam mencapai visi dan misinya.

Penggunaan warna biru dengan penambahan aksen warna abu-abu mencerminkan karakter PPA yang profesional, menerapkan prinsip kehati-hatian dalam bisnis (*prudent*), penuh integritas, bertanggung jawab (*accountable*), dapat dipercaya, dan dapat diandalkan. Sedangkan warna toska mencerminkan PPA sebagai perusahaan yang modern, kreatif, dan inovatif dalam menghadirkan layanan yang berkualitas sehingga dapat terus tumbuh/berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan mampu bertransformasi menjadi *National Asset Management Company* (NAMCO) yang memberikan nilai dan kebermanfaatan bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia (*purposeful*).

The firm yet friendly letter A on the PPA logo reflects the character of PPA, which is “close” and reliable, but firm in its stance, as it always applies the principles of Good Corporate Governance in all decision making. Inside the letter A there are triangles from small to large size that symbolizes that PPA has a strong foundation, enabling it to grow in a sustainable manner to achieve its vision and mission.

The use of the color blue with an addition of gray accents reflects the characters of PPA, namely professional, applying the prudent principle in conducting business, full of integrity, accountable, trustworthy, and reliable. Furthermore, the color toska reflects PPA as a modern, creative, and innovative company in providing high-quality services, which allows it to continue to grow/develop along with the development of times, as well as able to transform itself into a National Asset Management Company (NAMCO) that generates values and benefits for the economic growth of Indonesia (*purposeful*).

VISI, MISI, DAN BUDAYA PERUSAHAAN

VISION, MISSION AND CORPORATE CULTURE



Visi Vision

"Menjadi perusahaan investasi terkemuka dan mitra terpercaya dalam restrukturisasi korporasi."
"To become a leading investment company and trusted partner in corporate restructuring."



Misi Mission

- Memberikan pertumbuhan yang berkesinambungan bagi seluruh pemangku kepentingan melalui kegiatan investasi, restrukturisasi, pengelolaan aset dan advisory.
- Menciptakan sumber daya manusia yang unggul, profesional dan memiliki integritas tinggi.
- Menerapkan manajemen yang terbuka sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi.
- Memberikan kontribusi kepada pembangunan lingkungan dan masyarakat.
- Providing sustainable growth for all stakeholders through investment, restructuring, asset management and advisory activities.
- Creating superior, professional and high integrity human resources.
- Implementing open management in line with the principles of integrated governance, risk management and compliance.
- Contributing to environmental and community development.

Review Visi dan Misi oleh Manajemen

Visi dan Misi Perseroan ditetapkan dan ditinjau secara berkala dengan melibatkan Dewan Komisaris, Direksi dan jajaran manajemen lainnya untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan lingkungan bisnis Perseroan. Pernyataan terkait Visi dan Misi Perseroan telah disetujui dan ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran PT PPA tahun 2025.

Management Review of the Vision and Mission

The Company's Vision and Mission periodically determined and reviewed by the Board of Commissioners, Board of Directors and other management levels to ensure their relevance to developments in the Company's business. A statement on the Company's Vision and Mission was approved and signed by the Board of Commissioners and Board of Directors in the PT PPA 2025 Work Plan and Budget.



BUDAYA PERUSAHAAN

CORPORATE CULTURE

Menyadari pentingnya penerapan budaya perusahaan untuk sebagai fondasi dan panduan dari setiap insan Perseroan dalam melakukan pekerjaan untuk mendorong tercapainya tujuan Perseroan. PPA senantiasa memastikan bahwa budaya kerja Perseroan tetap relevan dengan lingkungan eksternal dan ekosistem bisnis yang dinamis dan berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Budaya Perusahaan harus dapat memotivasi insan Perseroan guna mencapai tujuan sebagaimana tercermin dalam Visi dan Misi Perusahaan.

Recognizing the importance of corporate culture as a foundation and guide for every Company employee when carrying out work to encourage the achievement of the Company's goals. PPA ensures that the Company's work culture remains relevant to the dynamic external environment and business ecosystem that changes with developments in time and technology. Company culture must be able to motivate Company personnel to achieve the goals in the Company's Vision and Mission.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PPA telah menerapkan Budaya/Tata Nilai "AKHLAK" yang secara berurutan merupakan akronim dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif serta diikuti dengan penjelasan panduan perilaku AKHLAK sebagai fondasi dari budaya perusahaan PPA. Dengan adanya pemahaman yang sama di antara manajemen dan karyawan, diharapkan akan membentuk budaya kerja Perusahaan yang kondusif dan inovatif serta dapat mendorong kinerja Perseroan secara signifikan.

As a State-Owned Enterprise (BUMN), PPA follows the "AKHLAK" Culture/Values, an acronym for Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif and Kolaboratif, and the explanation of the AKHLAK behavioral guidelines as the foundation of PPA's corporate culture. With the same understanding between management and employees, it is hoped that a conducive and innovative Company work culture will be established and will significantly boost the Company's performance.

AKHLAK

Amanah
Trustworthy

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
Upholding the trust given

Kompeten
Competent

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
Continuously learning and developing capabilities

Harmonis
Harmonious

Saling peduli dan menghargai perbedaan.
Caring of each other and respecting diversity

Loyal
Loyal

Berdedikasi dan mengutamakan Kepentingan Bangsa dan Negara
Being dedicated and prioritizing the interest of the Nation and the country

Adaptif
Adaptive

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
Continuously innovating and being eager to drive or overcome change

Kolaboratif
Collaborative

Membangun kerja sama yang sinergis.
Building synergistic collaboration

Sosialisasi dan Internalisasi Budaya Perusahaan

PPA senantiasa melaksanakan program sosialisasi dan internalisasi Nilai Inti Perusahaan dalam rangka memberikan pengetahuan (knowing) dan menanamkan serta meningkatkan pemahaman (understanding) seluruh insan Perseroan mengenai Nilai Inti Perusahaan dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Socialization and Internalization of the Corporate Culture

PPA carries out socialization and internalization programs for the Company's Core Values so as to provide knowledge, and to instill and increase an understanding in all Company personnel on the Company's Core Values in their daily business activities.

KEGIATAN USAHA

BUSINESS ACTIVITIES

Kegiatan Usaha Menurut Anggaran Dasar Terakhir dan yang Dijalankan pada Tahun Buku

Business Activities Based on the Latest Articles of Association and Carried Out During the Fiscal Year

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir diubah dan disahkan melalui Akta No. 54 tanggal 10 Maret 2023, yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum, Notaris di Jakarta, maksud dan tujuan PPA adalah melakukan usaha di bidang pengelolaan aset Negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) untuk dan atas nama Menteri Keuangan, restrukturisasi dan revitalisasi BUMN, investasi, pengelolaan aset BUMN sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan yang tertera pada Anggaran Dasar Perseroan tersebut, kegiatan usaha yang dilakukan Perseroan pada tahun 2024 antara lain adalah:

As stated in Article 3 of the Company's Articles of Association, which was last amended and ratified through Deed No. 54 dated March 10, 2023, made before Desman, S.H., M.Hum, , Notary in Jakarta, the purpose and objective of PPA is to carry out business in the field of managing State assets originating from the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) for and on behalf of the Minister of Finance, restructuring and revitalization of BUMN, investments, management of BUMN assets in accordance with applicable laws and regulations and supporting business activities that support its main business activities as long as they do not conflict with laws and regulations.

To achieve the aims and objectives stated in the Company's Articles of Association, the business activities carried out by the Company in 2024 included:

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activities Based on the Articles of Association	Keterangan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pada Tahun 2024 Business Activities in 2024	
	Sudah Implemented	Belum Not Implemented
Kegiatan Usaha Utama Core Business Activities		
Pengelolaan Aset Negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN); Management of State Assets originating from the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA);	√	
Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN; Restructuring and/or Revitalization of SOE;	√	
Kegiatan Investasi; Investment Activities;	√	
Kegiatan pengelolaan aset BUMN. SOE asset management activities.	√	
Kegiatan Usaha Penunjang Supporting Business Activities		
Jasa Konsultasi Advisory services	√	
Pengelolaan aset milik Negara selain aset Negara yang berasal dari BPPN, Pemerintah Daerah, badan hukum yang dimiliki dan/atau didirikan oleh Negara selain BUMN, BUMD dan Swasta, termasuk anak perusahaan BUMN dan perusahaan patungan. Management of State-owned assets other than State assets originating from IBRA, Regional Government, legal entities owned and/or established by the State other than SOE, ROE and the private sector, including SOE subsidiaries and joint venture companies.	√	
Kegiatan Usaha dalam rangka Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Perusahaan Business Activities in the Context of Optimizing the Utilization of Company Resources		
Jasa Konsultasi, meliputi : • Bisnis dan Manajemen; • Penjualan dan/atau Pengembangan Aset. Consulting Services, including: • Business and management; • Asset Sales and/or Development.	√	

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar Business Activities Based on the Articles of Association	Keterangan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pada Tahun 2024 Business Activities in 2024	
	Sudah Implemented	Belum Not Implemented
Pengelolaan aset milik Negara selain aset Negara, meliputi : • Penjualan aset; • Penyewaan aset; • Restrukturisasi piutang; • Restrukturisasi perusahaan; • Pengembangan dan pendayagunaan aset. Management of State-owned assets other than State assets, including: • Asset sales; • Asset rental; • Restructuring of receivables; • Company restructuring; • Development and utilization of assets.	√	

Produk dan/atau Jasa yang Dihasilkan

Berdasarkan kegiatan usaha yang telah dipaparkan, produk dan jasa yang dijalankan PPA, yaitu:

1. Melakukan pengelolaan aset negara yang berasal dari badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), antara lain: Penjualan aset properti, saham dan piutang, penyewaan aset properti, penagihan piutang, melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka peningkatan nilai aset, melakukan restrukturisasi atas aset properti, saham dan piutang guna meningkatkan nilainya.
2. Melakukan restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN, antara lain restrukturisasi perusahaan untuk meningkatkan kinerja BUMN, revitalisasi perusahaan untuk meningkatkan kinerja BUMN.
3. Melakukan kegiatan investasi, antara lain pemberian pinjaman untuk pembiayaan proyek dan/atau kegiatan usaha lainnya, penempatan dana pada suatu proyek dan/atau kegiatan usaha lainnya, penempatan dana pada suatu proyek dan/atau kegiatan usaha lainnya, pembelian, pengembangan, dan/atau penjualan/ penyewaan aset, melakukan penyertaan (dalam rangka pendirian, pembelian saham yang telah dikeluarkan atau saham dalam simpanan) pada perusahaan yang bersifat sementara dalam rangka peningkatan nilai untuk dijual kembali, investasi pada instrumen Surat Berharga berupa pembelian surat utang termasuk kuasi ekuitas yang tercatat di bursa efek atau yang tidak tercatat di bursa efek, pembelian saham, warrant dan produk derivatif lainnya melalui bursa efek.
4. Melakukan pengelolaan aset BUMN, antara lain pengembangan dan pendayagunaan aset untuk meningkatkan nilainya, pengembangan dan pendayagunaan aset dengan bekerja sama dengan pihak lain, jasa pengelolaan aset.

Products and/or Services Offered

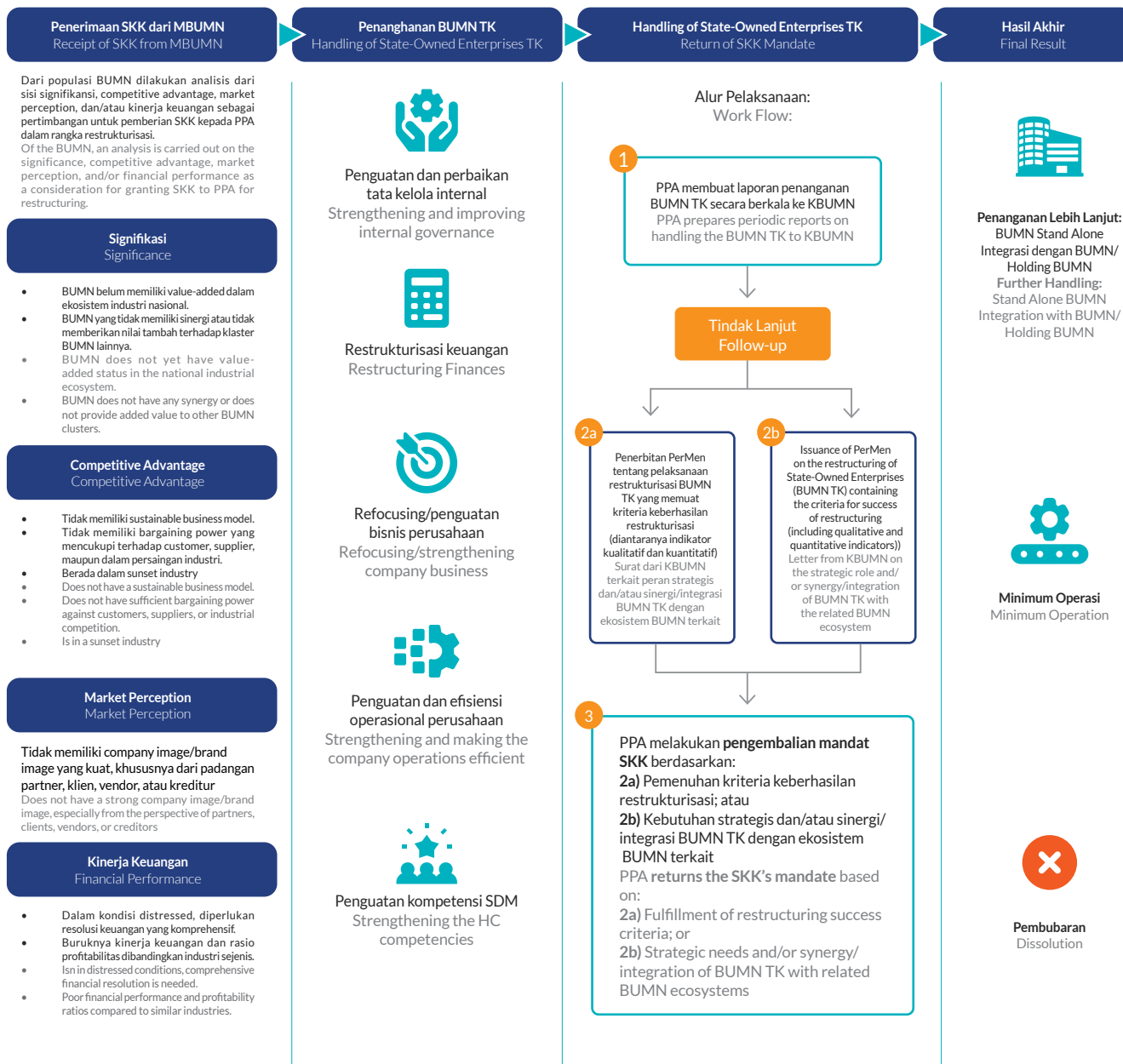
Based on the above business activities, the PPA products and services include:

1. Managing state assets acquired from the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA), including: Sale of property assets, shares, receivables, leases of property assets, collection of receivables, collaboration with other parties to increase asset value, restructuring property assets, shares, and receivables to increase value.
2. Restructuring and/or revitalizing SOEs, including corporate restructuring and Company revitalization to improve SOE performance.
3. Carrying out investment activities, including providing loans for project financing and/or other business activities, placing funds in a project and/or other business activities, placing funds for projects and/or other business activities, purchasing, developing, and/or selling/leasing assets, making investments (in terms of establishing, purchasing shares that have been issued or shares in savings) in companies that are temporary in nature to enhance their resale value, investing in Marketable Securities by purchasing debt securities including quasi-equity listed or not listed on the stock exchange, purchasing shares, warrants and other derivative products through the stock exchange.
4. Managing State-Owned Enterprises' assets, including development and utilization of assets to increase their value, development and utilization of assets in collaboration with other parties, and asset management services.

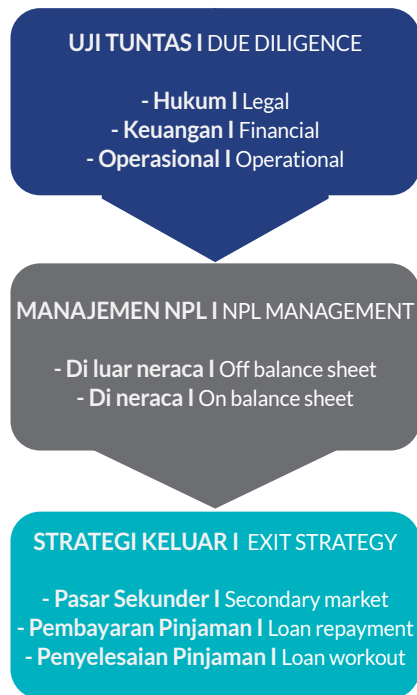
Pengembangan Produk dan Jasa

Products and Services Development

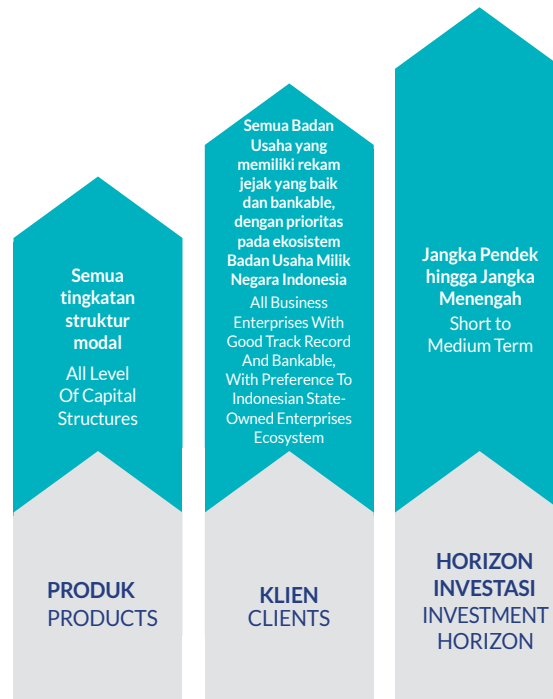
BUMN Titip Kelola BUMN Under Management



Penanganan Non-Performing Loan
Management of Non- Performing Loan



Special Situations Fund
Special Situations Fund



Inisiasi Strategis

Per 31 Desember 2024 Perusahaan melakukan penanganan terhadap 13 BUMN Titip Kelola yang telah dimandatkan oleh Kementerian BUMN melalui Surat Kuasa Khusus ("SKK"). BUMN Titip Kelola Selain itu, Perusahaan juga melakukan pengelolaan atas beberapa BUMN lainnya berdasarkan penugasan.

Strategic Initiatives

As of December 31, 2024, the Company handled 13 BUMN Under Management, as mandated by the Ministry of BUMN through a Special Power of Attorney ("SKK"). In addition to BUMN Under Management, the Company also manages other BUMN based on assignments.



WILAYAH OPERASIONAL OPERATIONAL AREAS

Perseroan beroperasi di wilayah Negara Republik Indonesia dengan memberikan layanan kepada korporasi di Indonesia, baik BUMN maupun swasta. Perseroan berkantor di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dan tidak memiliki kantor cabang baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

The Company operates in the territory of the Republic of Indonesia by providing services to corporations in Indonesia, both state-owned and private. The Company is headquartered in South Jakarta, DKI Jakarta, and does not have any branch offices either domestically or abroad.





**Peta Wilayah Operasional Perseroan
Per 31 Desember 2024**
Map of the Company's Operational Areas
As of December 31, 2024

Pulau Sumatera	Sumatra Island
Pulau Jawa	Java Island
Pulau Kalimantan	Kalimantan Island
Pulau Sulawesi	Sulawesi Island
Nusa Tenggara Timur	East Nusa Tenggara

KEANGGOTAAN DALAM ASOSIASI

MEMBERSHIP IN ASSOCIATIONS

Dalam rangka memperluas jaringan bisnis yang bergerak di bidang Pengelolaan Aset, PPA menjalin komunikasi yang lebih luas dengan berpartisipasi secara aktif sebagai anggota asosiasi dan organisasi, yang juga diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas Perseroan di industri sejenis. Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024, PPA telah terdaftar sebagai anggota pada asosiasi atau organisasi dengan perincian sebagai berikut:

To expand the business network engaged in Asset Management, PPA establishes wider communication by actively participating as a member of associations and organizations, which is also expected to increase the Company's credibility in similar industries. During the period ending December 31, 2024, PPA was registered as a member of the following associations or organizations:

Nama Organisasi/Asosiasi Name of Organization/Association	Ruang Lingkup Coverage	Posisi Keikutsertaan Participation Position	Status Keanggotaan Membership Status
Nasional National			
Forum Humas BUMN SOE Public Relations Forum	Nasional National	Anggota Member	Aktif Active
Forum IT BUMN SOE IT Forum	Nasional National	Anggota Member	Aktif Active
Member Of International Public AMC Forum (IPAF)	Nasional National	Anggota Member	Aktif Active

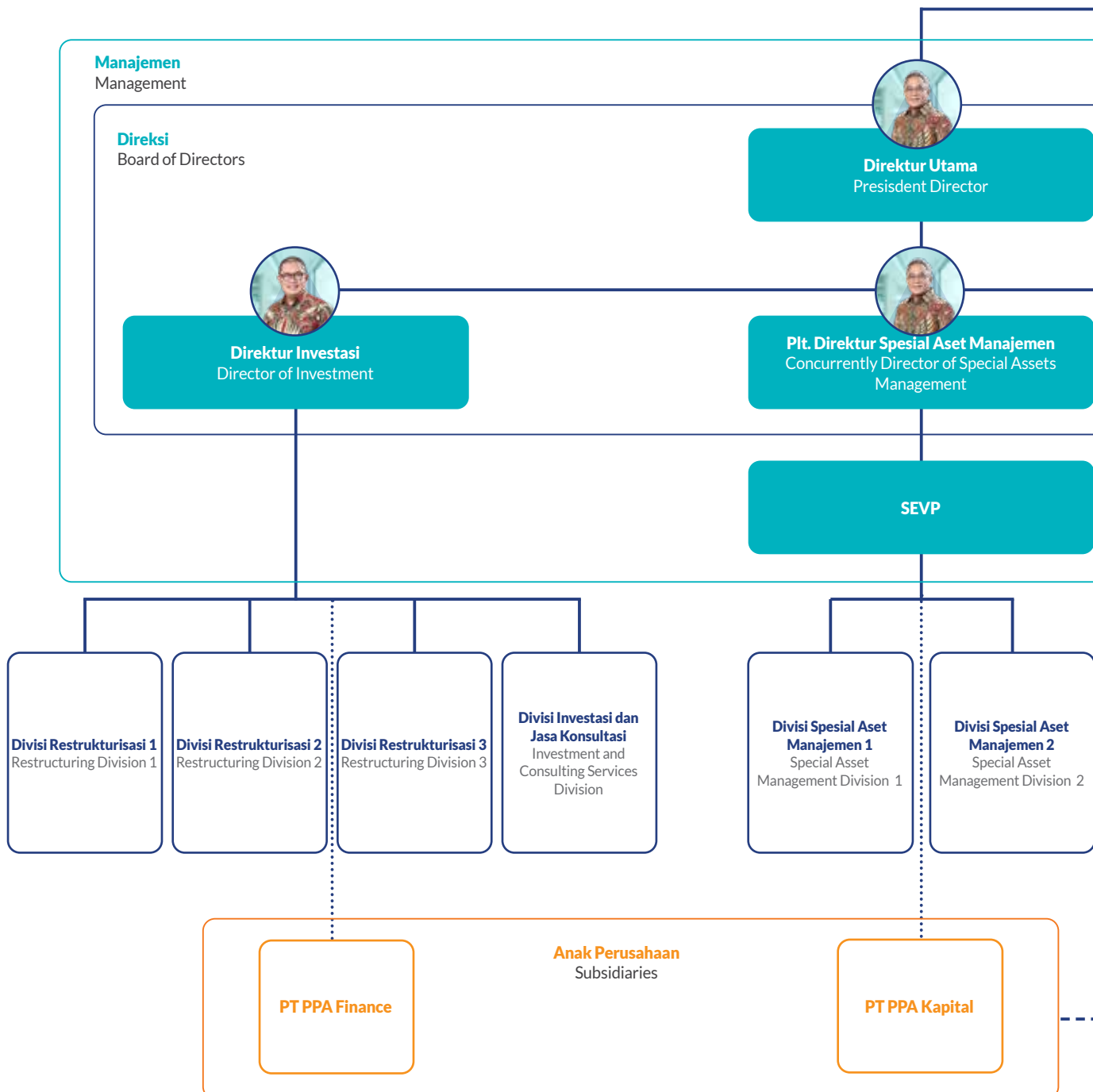


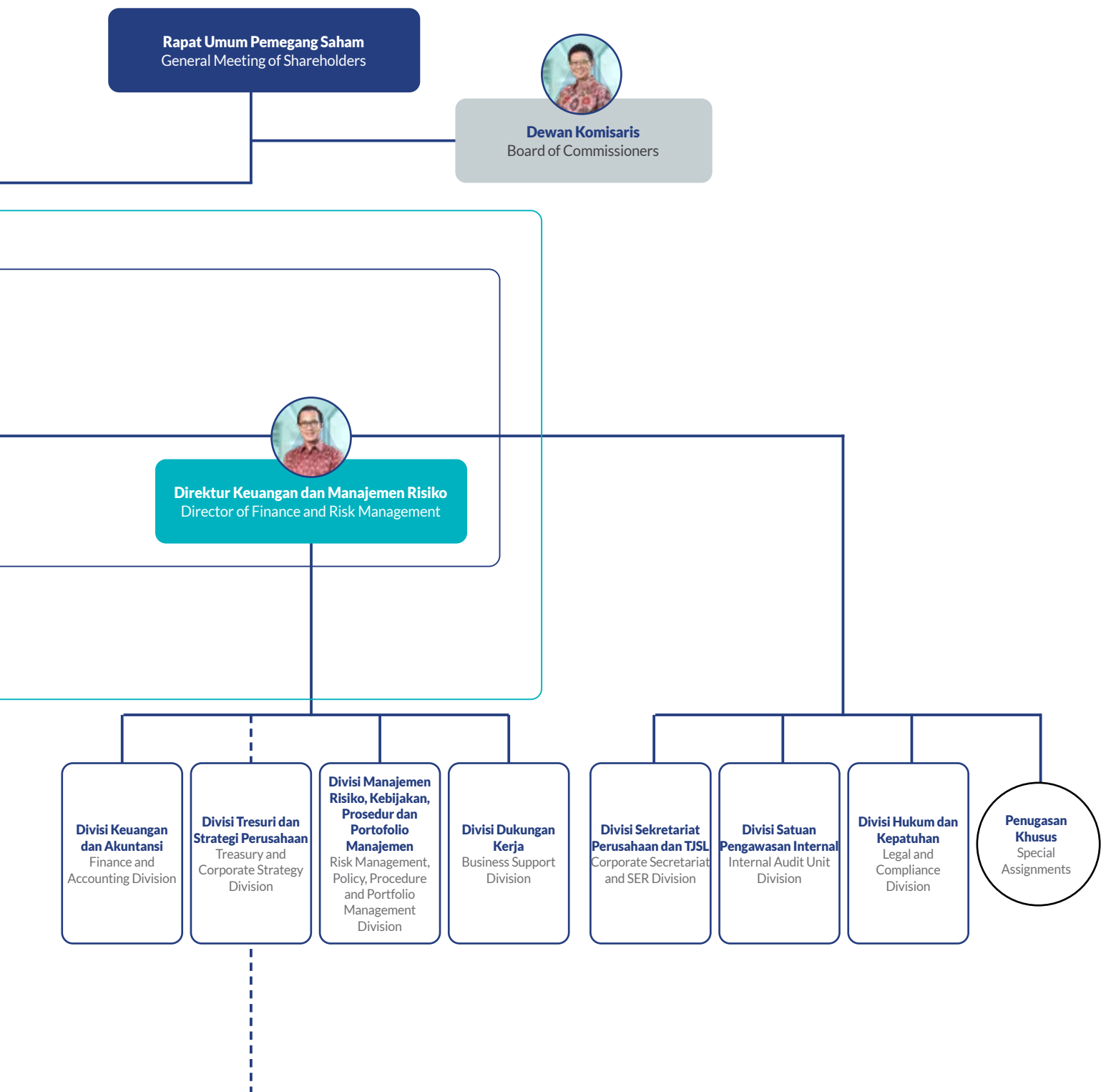
STRUKTUR ORGANISASI ORGANIZATION STRUCTURE

Sesuai Keputusan Direksi PT Perusahaan Pengelola Aset Nomor: SK-76/PPA/0824 tanggal 28 Agustus 2024 tentang Struktur Organisasi PT Perusahaan Pengelola Aset, struktur organisasi Perusahaan adalah sebagai berikut.

In accordance with the PT Perusahaan Pengelola Aset Board of Directors Decree No. SK-76/PPA/0824 dated August 28, 2024 concerning the Organizational Structure of PT Perusahaan Pengelola Aset, the Company's organizational structure is as follows.

Struktur Organisasi PT Perusahaan Pengelola Aset per 31 Desember 2024
PT Perusahaan Pengelola Aset Organization Structure as of December 31, 2024







INFORMASI PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

INFORMATION ON CHANGES IN THE BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris Tahun 2024

Pada tahun 2024, komposisi Dewan Komisaris PPA tidak mengalami perubahan. Hingga akhir tahun 2024, Dewan Komisaris PPA terdiri dari 1 (satu) orang. Kebijakan tentang jumlah dan komposisi Dewan Komisaris PPA merupakan wewenang dari Pemegang Saham.

Changes in the Board of Commissioners Composition in 2024

In 2024, the PPA Board of Commissioners composition did not change. At the end of 2024, the PPA Board of Commissioners consisted of 1 (one) person. The policy on the number and composition of the PPA Board of Commissioners is the authority of the Shareholders.

Tabel Komposisi dan Dasar Pengangkatan Dewan Komisaris per 31 Desember 2024

Board of Commissioners Composition and Basis for Appointment as of December 31, 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis for Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Marwanto Harjowiryo	Komisaris Commissioner	Sebagai Komisaris: Keputusan RUPS No. SK-326/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) As Commissioner: GMS Decision No. SK-326/MBU/10/2020 dated October 9, 2020 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	Sebagai Komisaris: 9 Oktober 2020 As Commissioner: October 9, 2020

Adapun Profil Dewan Komisaris PPA per 31 Desember 2024, sebagai berikut:

The PPA Board of Commissioners Profile as of December 31, 2024, is as follows:

PROFIL DEWAN KOMISARIS

BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE





Marwanto Harjowiryo

Komisaris
Commissioner

Periode Jabatan: 9 Oktober 2020 - RUPST 2025, Periode Pertama
Term of Office: October 9, 2020 - October 8, 2025, First Period

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 65 tahun per 31 Desember 2024

Domisili

Kota Tangerang, Banten, Indonesia

Dasar Hukum Penunjukan

Pertama kali menjabat sebagai Komisaris berdasarkan Keputusan RUPS No. SK-326/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

Penugasan di Lingkup Dewan Komisaris

Melakukan koordinasi terhadap: Konsultasi Bisnis, Aset Manajemen, Organisasi dan Corporate Strategic Planning and Monitoring, fungsi Keuangan, fungsi Investasi, Unit Internal Auditor/SPI, Unit Risk Management, serta Unit Legal, Dukungan Kerja, Corporate Secretary.

Riwayat Pendidikan

- Doktor (S3) bidang Konsentrasi Ekonomi Pembangunan dan Kebijakan Fiskal dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2009)
- Master (S2) of Arts (M.A.) bidang Economic Development and Fiscal Policy dari Vanderbilt University, Amerika Serikat (1991)
- Sarjana (S1) Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1983)

Keahlian

Memiliki keahlian di bidang audit dan keuangan

Riwayat Pekerjaan

- Wakil Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG PPA (2022)
- Komisaris PT Pelni (Persero) (2020)
- Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2016 – 2020)
- Komisaris PT BTN (Persero) (2019)
- Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI (2013 – 2019)
- Komisaris PT Sucofindo (Persero) (2003 – 2018)
- Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (2014 – 2017)
- Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance (2011 – 2017)
- Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI (2011 – 2013)
- Direktur Eksekutif Asian Development Bank (ADB) (2009 – 2012)
- Ketua Komite Etik Asian Development Bank (ADB) (2009 – 2012)
- Anggota Panitia Penelaah Anggaran Asian Development Bank (ADB) (2009 – 2011)
- Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) (2008-2011)
- Ketua Pelaksana Reformasi birokrasi Kementerian Keuangan RI (2007 – 2009)
- Senior Advisor Menteri Keuangan RI (2006 – 2009)
- Direktur Hubungan Anggota The National Social Security Council (2006 – 2008)
- Masyarakat Kementerian Keuangan RI (2004 – 2006)
- Direktur Kerja sama Internasional (2003 – 2005)
- Komisaris PT Perkebunan Nusantara XIII (1999 – 2003)
- Direktur Anggaran Kementerian Keuangan RI (1998 – 2003)

Rangkap Jabatan

- Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia (2023-sekarang)
- Ketua Komite Audit (2022-sekarang)
- Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi (2022-sekarang)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya.

Kepemilikan Saham PPA

Perusahaan tidak memperdagangkan sahamnya kepada masyarakat, dan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen.

Personal Data

Indonesian citizen
Age 65 years as of December 31, 2024

Domicile

Tangerang City, Banten, Indonesia

Legal Basis of Appointment

First served as Commissioner of PT Perusahaan Pengelola Aset based on GMS Decree No. SK-326 MBU/10/2020 dated October 9, 2020 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)

Assignment within the scope of the Board of Commissioners

Coordinating: Business Consulting, Asset Management, Organization and Corporate Strategic Planning and Monitoring, Finance function, Investment function, Internal Auditor/SPI Unit, Risk Management Unit, as well as Legal Unit, Work Support, Corporate Secretary.

Education History

- Doctorate (S3) in Development Economics and Fiscal Policy concentration from Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2009)
- Master (S2) of Arts (M.A.) degree in Economic Development and Fiscal Policy from Vanderbilt University, United States (1991)
- Bachelor's degree (S1) in Economics from Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1983)

Expertise

Has expertise in audit and finance

Employment History

- Deputy Chair of the PPA Risk and GCG Monitoring Committee (2022)
- Commissioner of PT Pelni (Persero) (2020)
- Commissioner of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2016 – 2020)
- Commissioner of PT BTN (Persero) (2019)
- Director General of Treasury, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2013 – 2019)
- Commissioner of PT Sucofindo (Persero) (2003 – 2018)
- Commissioner of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (2014 – 2017)
- Commissioner of PT Indonesia Infrastructure Finance (2011 – 2017)
- Director General of Financial Balancing, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2011 – 2013)
- Executive Director of the Asian Development Bank (ADB) (2009 – 2012)
- Chair of the Asian Development Bank (ADB) Ethics Committee (2009 – 2012)
- Member of the Asian Development Bank (ADB) Budget Review Committee (2009 – 2011)
- Member of the National Social Security Council (DJSN) (2008-2011)
- Chief Executive of Bureaucratic Reform at the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2007 – 2009)
- Senior Advisor to the Minister of Finance of the Republic of Indonesia (2006 – 2009)
- Director of Member Relations of the National Social Security Council (2006 – 2008)
- Indonesian Ministry of Finance Society (2004 – 2006)
- Director of International Cooperation (2003 – 2005)
- Commissioner of PT Perkebunan Nusantara XIII (1999 – 2003)
- Director of Budget, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (1998 – 2003)

Concurrent Positions

- Member of Bank Indonesia Supervisory Board (2023-present)
- Chair of the Audit Committee (2022-present)
- Chair of the Nomination and Remuneration Committee (2022-present)

Affiliated Relationships

Has no affiliation with other members of the Board of Commissioners or Board of Directors.

PPA Share Ownership

The Company does not trade its shares to the public, and does not have a Management Share Ownership Program.



INFORMASI PERUBAHAN KOMPOSISI DIREKSI

INFORMATION ON CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

Di sepanjang tahun 2024, tidak terdapat perubahan susunan dan komposisi Direksi Perseroan. Hingga akhir tahun 2024, komposisi Direksi PPA terdiri dari 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) orang Direktur Utama dan 2 (dua) orang Direktur.

In 2024, there were no changes in the Company's Board of Directors composition. At the end of 2024, the PPA Board of Directors composition consisted of 3 (three) people, namely 1 (one) President Director and 2 (two) Directors.

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis for Appointment	Tanggal Efektif Effective Date
Muhammad Teguh Wirahadikusumah	Direktur Utama merangkap Direktur Special Asset Management President Director and concurrently Director of Special Asset Management	Sebagai Direktur Utama: Surat Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Nomor SK-367/MBU/12/2023 pada 15 Desember 2023.	Sebagai Direktur Utama: 15 Desember 2023
		Sebagai Plt. Direktur Special Asset Management: Keputusan Dewan Komisaris nomor 04/ KEP.KOM/PPA/I/2024 tanggal 19 Januari 2024	Sebagai Plt. Direktur Special Asset Management: 19 Januari 2024
		As President Director: Decree of the Minister of SOEs and President Director of PT Danareksa (Persero) No. SK-367/MBU/12/2023 dated December 15, 2023.	As President Director: December 15, 2023
		Concurrently Director of Special Asset Management: Decree of the Board of Commissioners No. 04/KEPKOM/PPA/I/2024 dated January 19, 2024	Concurrently Director of Special Asset Management: January 19, 2024
Ridha Farid Lesmana	Direktur Investasi Director of Investment	Surat Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Danareksa (Persero) dengan Nomor SK-367/MBU/12/2023 pada 15 Desember 2023 Decree of the Minister of SOEs and the President Director of PT Danareksa (Persero) No. SK-367/MBU/12/2023 dated December 15, 2023	15 Desember 2023 December 15, 2023
Tree Asih Putra Sianturi	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Surat Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Danareksa (Persero) dengan Nomor SK-367/MBU/12/2023 pada 15 Desember 2023 Decree of the Minister of SOEs and the President Director of PT Danareksa (Persero) No. SK-367/MBU/12/2023 dated December 15, 2023	15 Desember 2023 December 15, 2023

PROFIL DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS' PROFILES





Muhammad Teguh Wirahadikusumah

Direktur Utama merangkap Direktur Special Asset Management
President Director and concurrently Director of Special Asset Management

Periode Jabatan:

Sebagai Direktur Utama: 15 Desember 2023 - RUPST 2028, Periode Pertama

Sebagai Direktur Special Asset Management: 19 Januari 2024

Term of Office:

As President Director: December 15, 2023 - AGMS 2028, First Period

As Director of Special Asset Management: January 19, 2024

Data Pribadi

Warga negara Indonesia

Usia 59 tahun per 31 Desember 2024

Domisili

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Penunjukan

Diangkat sebagai Direktur Utama PPA melalui Surat Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Nomor SK-367/MBU/12/2023 dan Nomor KPPS-47/037/DNRK tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Perusahaan Pengelola Aset tanggal 15 Desember 2023.

Riwayat Pendidikan

- Master (S2) of Business Administration di Warwick Business School, The University of Warwick, Coventry, Inggris (1996)
- Sarjana (S1) Arsitektur dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung (1990)

Keahlian

Memiliki keahlian di bidang keuangan, investasi, manajemen bisnis

Riwayat Pekerjaan

- Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Danareksa (Persero) (2020-2023)
- Direktur Keuangan dan Penunjang Kerja PT Perusahaan Pengelola Aset (2019-2020)
- Senior Executive Director–Head of Investment Banking PT Mandiri Sekuritas (2018-2020)
- Executive Director–Head of Structured Finance & Investment Banking PT Mandiri Sekuritas (2012-2018)
- Executive Vice President–Head of Asset Recovery (2009-2011)
- Founding Partner PT Triventure Investments Group (2007-2009)
- Senior Vice President–Investment Banking PT Namalatu Cakrawala Securities (2003-2007)
- Direktur Investment Banking PT Danareksa Sekuritas (1998-2002)
- Senior Associate–Fixed Income Research PT Danareksa Sekuritas (1997-1998)
- Assistant Manager–Equity Research PT Inter Pacific Securities (1994-1995)
- Assistant Manager–International Banking Division PT Bank Niaga Tbk (1992-1994)

Rangkap Jabatan

Komisaris pada PT Jalin Pembayaran Nusantara (2020-sekarang)

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya.

Kepemilikan Saham PPA

Perusahaan tidak memperdagangkan sahamnya kepada masyarakat, dan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen.

Personal Data

Indonesian citizen

Age 59 years as of December 31, 2024

Domicile

South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Legal Basis of Appointment

Appointed as President Director of PPA through Minister of SOE and President Director of PT Danareksa (Persero) Decrees No. SK-367/MBU/12/2023 and No. KPPS-47/037/DNRK dated December 15, 2023 concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Perusahaan Pengelola Aset.

Education History

- Master (S2) of Business Administration degree from Warwick Business School, The University of Warwick, Coventry, England (1996)
- Bachelor's degree (S1) in Architecture from Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Bandung (1990)

Expertise

Expertise in finance, investment, business management

Employment History

- Director of Finance and Risk Management, PT Danareksa (Persero) (2020-2023)
- Director of Finance and Work Support, PT Perusahaan Pengelola Aset (2019-2020)
- Senior Executive Director–Head of Investment Banking, PT Mandiri Sekuritas (2018-2020)
- Executive Director–Head of Structured Finance & Investment Banking, PT Mandiri Sekuritas (2012-2018)
- Executive Vice President–Head of Asset Recovery (2009-2011)
- Founding Partner, PT Triventure Investments Group (2007-2009)
- Senior Vice President – Investment Banking, PT Namalatu Cakrawala Securities (2003-2007)
- Director of Investment Banking, PT Danareksa Sekuritas (1998-2002)
- Senior Associate–Fixed Income Research, PT Danareksa Sekuritas (1997-1998)
- Assistant Manager–Equity Research, PT Inter Pacific Securities (1994-1995)
- Assistant Manager – International Banking Division, PT Bank Niaga Tbk (1992-1994)

Concurrent Positions

Commissioner at PT Jalin Pembayaran Nusantara (2020-present)

Affiliated Relationships

Has no affiliation with other members of the Board of Directors or Board of Commissioners.

PPA Share Ownership

The Company does not trade its shares to the public, and does not have a Management Share Ownership Program.

PROFIL DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS' PROFILES





Ridha Farid Lesmana

Direktur Investasi
Director of Investment

Periode Jabatan: 15 Desember 2023 - RUPST 2028, Periode Pertama
Term of Office: December 15, 2023 - 2028 AGMS, First Period

Data Pribadi

Warga negara Indonesia
Usia 47 tahun per 31 Desember 2024

Domisili

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Penunjukan

Diangkat sebagai Direktur Investasi PPA melalui Surat Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Danareksa (Persero) dengan Nomor SK-367/MBU/12/2023 dan Nomor KPPS-47/037/DNRK tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Perusahaan Pengelola Aset tanggal 15 Desember 2023.

Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung (2000)

Keahlian

Memiliki keahlian di bidang keuangan, investasi, manajemen bisnis

Riwayat Pekerjaan

- Kepala Divisi Restrukturisasi dan Revitalisasi 2 PPA (2022-2023)
- Kepala Corporate Banking & Business Development di Indonesia Eximbank (2016-2022)
- Head of Department, Corporate Banking di Indonesia Eximbank (2010-2016)
- Relationship Manager di Bank Ekspor Indonesia (2006-2010)

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya.

Kepemilikan Saham PPA

Perusahaan tidak memperdagangkan sahamnya kepada masyarakat, dan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen.

Personal Data

Indonesian citizen
Age 47 years as of December 31, 2024

Domicile

South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Legal Basis of Appointment

Appointed as PPA Investment Director through the Minister of SOE and President Director of PT Danareksa (Persero) Decrees No. SK-367/MBU/12/2023 and No. KPPS-47/037/DNRK dated December 15, 2023 concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature, and Appointment of Board of Directors Members of PT Perusahaan Pengelola Aset.

Education History

Bachelor's Degree (S1) in Civil Engineering from Institut Teknologi Bandung (2000)

Expertise

Expertise in finance, investment, business management

Employment History

- Head of Restructuring and Revitalization Division 2, PPA (2022-2023)
- Head of Corporate Banking & Business Development, Indonesia Eximbank (2016-2022)
- Head of Department, Corporate Banking, Indonesia Eximbank (2010-2016)
- Relationship Manager, Indonesian Ekspor Bank (2006-2010)

Concurrent Positions

Does not hold any concurrent positions

Affiliated Relationships

Has no affiliation with other members of the Board of Directors or Board of Commissioners.

PPA Share Ownership

The Company does not trade its shares to the public, and does not have a Management Share Ownership Program.

PROFIL DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS' PROFILES





Tree Asih Putra Sianturi

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

Director of Finance and Risk Management

Periode Jabatan: 15 Desember 2023 - RUPST 2028, Periode Pertama

Term of Office: December 15, 2023 - 2028 AGMS, First Period

Data Pribadi

Warga negara Indonesia

Usia 41 tahun per 31 Desember 2024

Domisili

Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Penunjukan

Diangkat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PPA melalui Surat Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Danareksa (Persero) dengan Nomor SK-367/MBU/12/2023 dan Nomor KPPS-47/037/DNRK tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Perusahaan Pengelola Aset tanggal 15 Desember 2023.

Riwayat Pendidikan

Sarjana (S1) Ekonomi dari Universitas Indonesia (2004)

Keahlian

Memiliki keahlian di bidang keuangan, investasi, manajemen risiko

Riwayat Pekerjaan

- Senior Executive Vice President 1 PPA (2021-2023)
- Senior Vice President Bank DBS Indonesia (2016-2021)
- Associate Director ANZ Banking Group (2012-2016)

Rangkap Jabatan

Tidak memiliki rangkap jabatan

Hubungan Afiliasi

Tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris maupun Direksi lainnya.

Kepemilikan Saham PPA

Perusahaan tidak memperdagangkan sahamnya kepada masyarakat, dan tidak memiliki Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen.

Personal Data

Indonesian citizen

Age 41 years as of December 31, 2024

Domicile

Central Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Legal Basis of Appointment

Appointed as Director of Finance and Risk Management of PPA through the Minister of SOE and President Director of PT Danareksa (Persero) Decrees No. SK-367/MBU/12/2023 and No. KPPS-47/037/DNRK dated December 15, 2023 concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature, and Appointment of Board of Directors Members of PT Perusahaan Pengelola Aset.

Education History

Bachelor's degree (S1) in Economics from Universitas Indonesia (2004)

Expertise

Expertise in finance, investment, risk management

Employment History

- Senior Executive Vice President 1, PPA (2021-2023)
- Senior Vice President, Bank DBS Indonesia (2016-2021)
- Associate Director, ANZ Banking Group (2012-2016).

Concurrent Positions

Does not hold any concurrent positions

Affiliated Relationships

Has no affiliation with other members of the Board of Directors or Board of Commissioners.

PPA Share Ownership

The Company does not trade its shares to the public, and does not have a Management Share Ownership Program.

PROFIL PEJABAT EKSEKUTIF

EXECUTIVE OFFICERS' PROFILES



Samsul Hadi
SEVP Special Asset Management

Menjabat sejak 21 Oktober 2024
Bergabung sejak 21 Oktober 2024
Served since October 21, 2024
Joined on October 21, 2024



Hendi Wibawa
Kepala Divisi Keuangan dan Akuntansi
Head of Finance and Accounting Division

Menjabat sejak 7 September 2023
Bergabung sejak 7 September 2023
Served since September 7, 2023
Joined on September 7, 2023



Swasti Kartikaningtyas
Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan & TJSL
merangkap sebagai Plt. Kepala Divisi Hukum
dan Kepatuhan

Head of Corporate Secretary & SER Division
concurrently serving as Head of Legal and
Compliance Division

Menjabat sejak 30 Juli 2024
Bergabung sejak 30 Juli 2024
Served since July 30, 2024
Joined on July 30, 2024



Erwin Adiyatno
Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kebijakan,
Prosedur dan Portofolio Manajemen
Head of Risk Management, Policy, Procedure
and Portfolio Management Division

Menjabat sejak 1 Agustus 2024
Bergabung sejak 15 Januari 2019
Served since August 1, 2024
Joined on January 15, 2019



Nanang Ariseno
Kepala Divisi Special Asset Management 1
Head of Special Asset Management Division 1

Menjabat sejak 1 Oktober 2019
Bergabung sejak 1 Juli 2011
Served since October 1, 2019
Joined on July 1, 2011



Ayatullah Asfaroni
Kepala Divisi Special Asset Management 2
Head of Special Asset Management Division 2

Menjabat sejak 9 Mei 2022
Bergabung sejak 1 Mei 2009
Served since May 9, 2022
Joined on May 1, 2009



Yanuar Rokhmad Madyantoro

Kepala Divisi Restrukturisasi 1
Head of Restructuring Division 1

Menjabat sejak 2 Agustus 2021
Bergabung sejak 2 Agustus 2021
Served since August 2, 2021
Joined on August 2, 2021



Sadono Iswahyudi

Kepala Divisi Restrukturisasi 2
Head of Restructuring Division 2

Menjabat sejak 2 September 2024
Bergabung sejak 1 September 2023
Served since September 2, 2024
Joined on September 1, 2023



Tengku Valmy Andali

Kepala Divisi Restrukturisasi 3
Head of Restructuring Division 3

Menjabat sejak 2 September 2024
Bergabung sejak 1 November 2021
Served since 2 September 2024
Joined on 1 November 2021



Susilo Wibowo

Kepala Divisi Dukungan Kerja
Head of Work Support Division

Menjabat sejak 28 Agustus 2024
Bergabung sejak 1 Desember 2022
Served since August 28, 2024
Joined on December 1, 2022



Lie Tjauw Hap

Kepala Divisi Tresuri dan Strategi Perusahaan
Head of Treasury and Corporate Strategy Division

Menjabat sejak 1 Mei 2020
Bergabung sejak 15 Juni 2007
Served since May 1, 2020
Joined on June 15, 2007



Muhammad Reza Maulana

Kepala Divisi Satuan Pengawasan Intern
Head of Internal Audit Division

Menjabat sejak 25 Oktober 2021
Bergabung sejak 25 Oktober 2021
Served since October 25, 2021
Joined on October 25, 2021



Rizka Ariesnawan Putranto

Penugasan Khusus
Special Assignment

Menjabat sejak 28 Agustus 2024
Bergabung sejak 25 Oktober 2021
Served since August 28, 2024
Joined on October 25, 2021



Emirio Fajar

Kepala Divisi Investasi dan Jasa Konsultasi
Head of Investment and Consulting Services Division

Menjabat sejak 1 Oktober 2024
Bergabung sejak 1 Juni 2011
Served since October 1, 2024
Joined on June 1, 2011

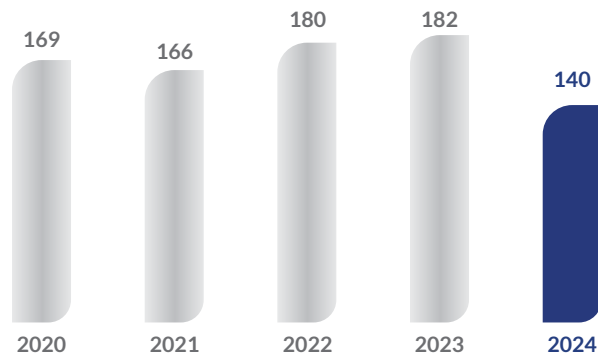
DEMOGRAFI KARYAWAN

EMPLOYEE DEMOGRAPHICS

Per 31 Desember 2024, Perseroan memiliki karyawan sejumlah 140 orang karyawan, mengalami penurunan sebesar 23% dibandingkan jumlah karyawan per 31 Desember 2023 yang berjumlah sebanyak 182 orang karyawan. Adanya penurunan ini disebabkan oleh pengalihan status sebagian karyawan PPA menjadi karyawan Holding PT Danareksa (Persero).

As of December 31, 2024, the Company had 140 employees, a decrease of 23% compared to 182 employees as of December 31, 2023. This decrease was due to the transfer of status of some PPA employees to become employees of Holding PT Danareksa (Persero).

Pergerakan Jumlah Karyawan 2020-2024 (orang)
Movement in Number of Employees 2020-2024 (people)



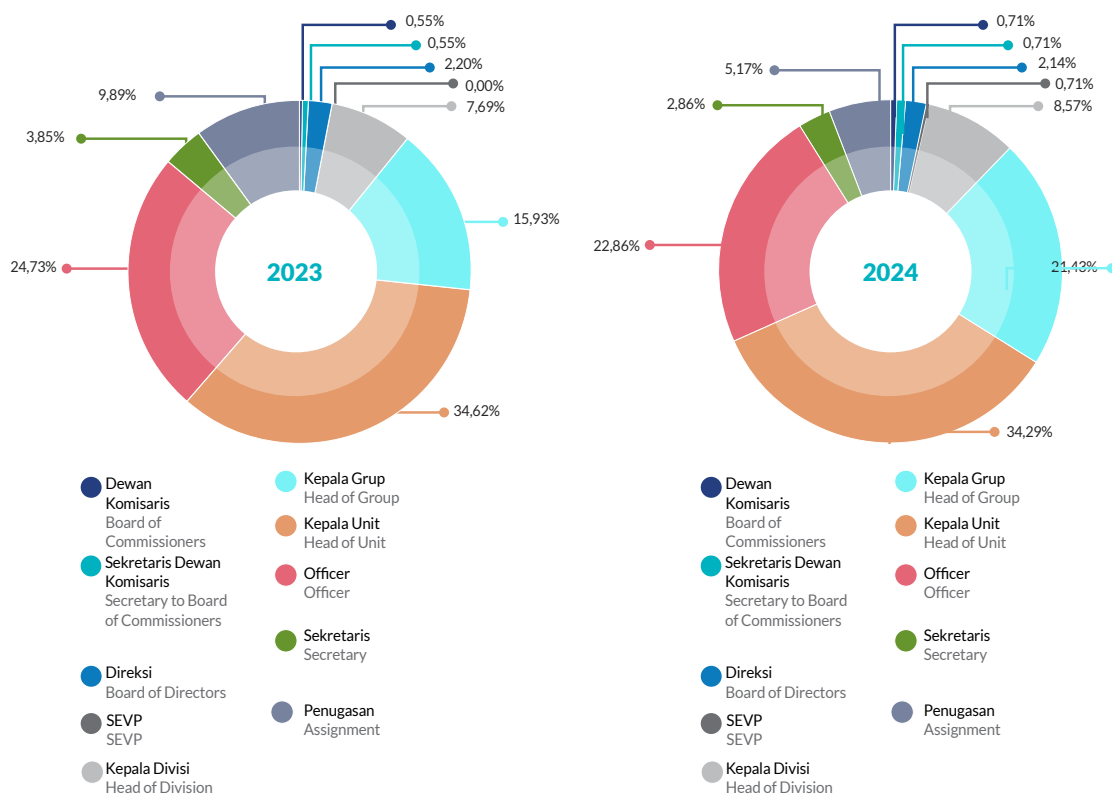
Demografi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi/Jabatan (orang)
Employee Demographics Based on Organization/Position Level (people)

Level Organisasi/ Jabatan Organization/Position Level	2024				2023				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Selisih Difference	Persentase Percentage (%)
Dewan Komisaris Board of Commissioners	1	0	1	0,71%	1	0	1	0,55%	0	0,00%
Sekretaris Dewan Komisaris Secretary to the Board of Commissioners	0	1	1	0,71%	0	1	1	0,55%	0	0,00%
Direksi Board of Directors	3	0	3	2,14%	4	0	4	2,20%	(1)	25,00%
SEVP SEVP	1	0	1	0,71%	0	0	0	0,00%	1	0,00%
Kepala Divisi Head of Division	11	1	12	8,57%	13	1	14	7,69%	(2)	-14,29%
Kepala Grup Head of Group	23	7	30	21,43%	21	8	29	15,93%	1	3,45%
Kepala Unit Head of Unit	29	19	48	34,29%	37	26	63	34,62%	(15)	-23,81%
Officer Officer	20	12	32	22,86%	27	18	45	24,73%	(13)	-28,89%
Sekretaris Secretary	0	4	4	2,86%	0	7	7	3,85%	(3)	-42,86%
Penugasan Assignment	8	0	8	5,71%	16	2	18	9,89%	(10)	-55,56%
Jumlah Total	96	44	140	100%	112	70	182	100%	-42	-23,08%

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female

Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Organisasi/Jabatan (orang)

Employee Composition Based on Organization / Position Level (people)



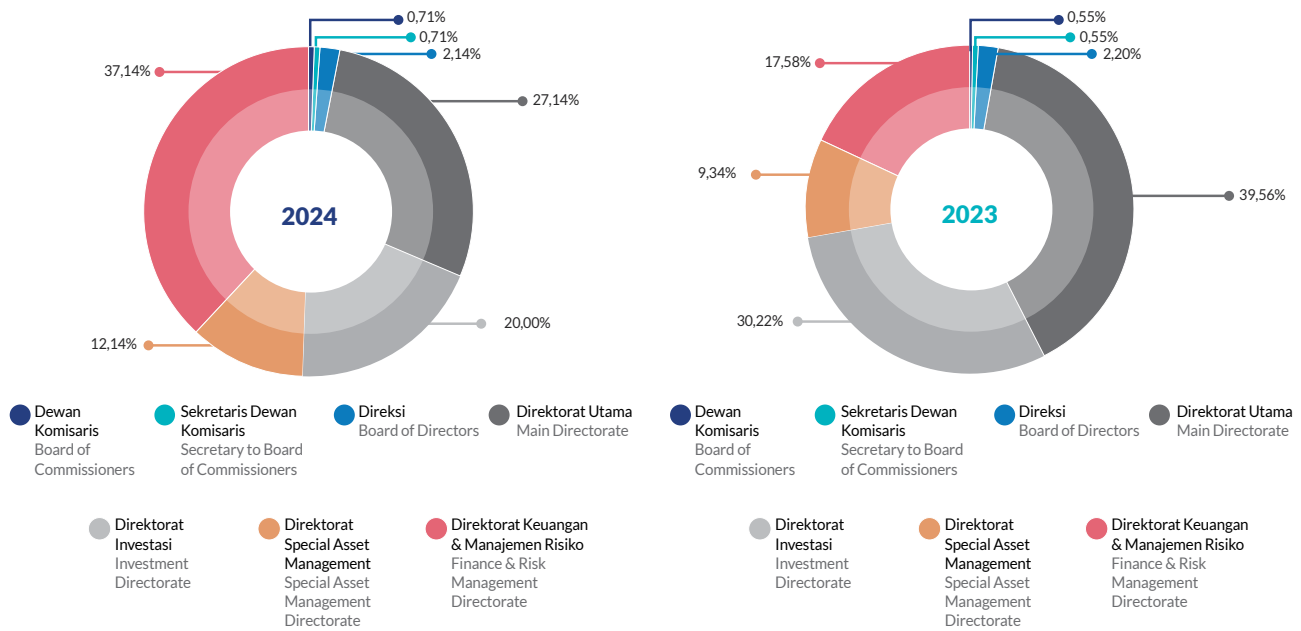
Demografi Karyawan Berdasarkan Penugasan (orang)

Employee Demographics Based on Assignment (people)

Penugasan Assignment	2024				2023				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Selisih Difference	Persentase Percentage (%)
Dewan Komisaris Board of Commissioners	1	0	1	0,71%	1	0	1	1%	0	0,00%
Sekretaris Dewan Komisaris Secretary to Board of Commissioners	0	1	1	0,71%	0	1	1	1%	0	0,00%
Direksi Board of Directors	3	0	3	2,14%	4	0	4	2%	0	0,00%
Direktorat Utama Main Directorate	28	10	38	27,14%	41	31	72	40%	0	0,00%
Direktorat Investasi Investment Directorate	23	5	28	20,00%	23	8	31	17%	(27)	-49,09%
Direktorat Special Asset Management Special Asset Management Directorate	9	8	17	12,14%	9	8	17	9%	0	0,00%
Direktorat Keuangan & Manajemen Risiko Finance & Risk Management Directorate	32	20	52	37,14%	19	13	32	18%	20	62,50%
Jumlah Total	96	44	140	100,00%	112	70	182	100%	(42)	-23,08%

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female

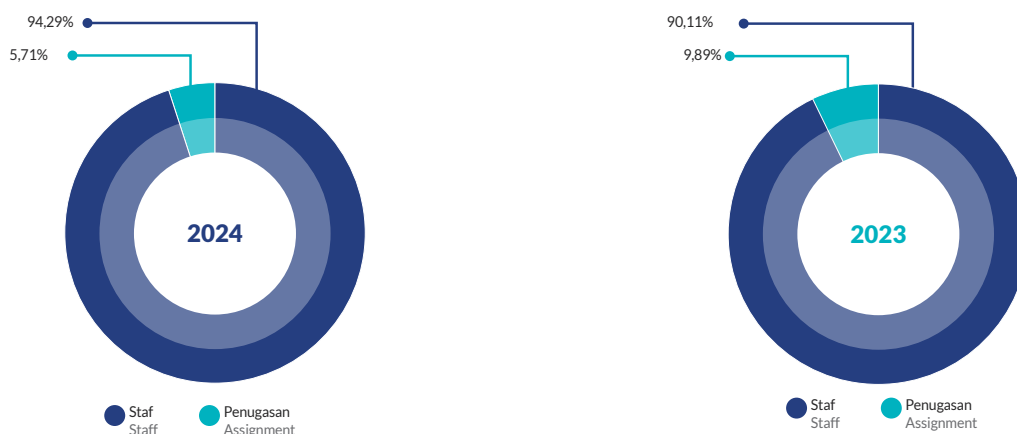
Komposisi Karyawan Berdasarkan Penugasan (orang) Employee Composition Based on Assignment (people)



Demografi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian (orang) Employee Demographics Based on Employee Status (people)

Status Status	2024				2023				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Selisih Difference	Persentase Percentage (%)
Staf Staff	88	44	132	94,29%	104	60	164	90%	(32)	19,51%
Penugasan Assignment	8	0	8	5,71%	8	10	18	10%	(10)	-55,56%
Jumlah Total	96	44	140	100,00%	110	70	182	100%	(42)	-23,08%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian (orang) Employee Composition Based on Employee Status (people)



Angka 2024 masih menggunakan angka 2023

Demografi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang)

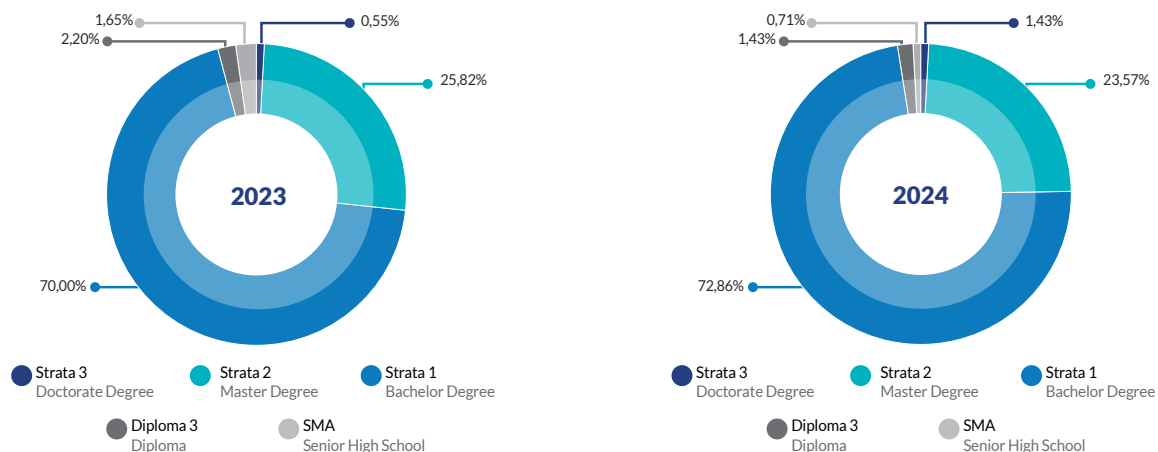
Employee Demographics Based on Education Level (people)

Tingkat Pendidikan Education Level	2024				2023				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Selisih Difference	Persentase Percentage (%)
Strata 3 Doctorate Degree	1	0	1	0,71%	1	0	1	1%	0	0,00%
Strata 2 Master Degree	27	6	33	23,57%	37	10	47	26%	(14)	-29,79%
Strata 1 Bachelor Degree	67	35	102	72,86%	72	55	127	70%	(25)	-19,69%
Diploma 3 Diploma	0	2	2	1,43%	0	4	4	2%	(2)	-50,00%
SMA Senior High School	1	1	2	1,43%	2	1	3	2%	(1)	-33,33%
Jumlah Total	96	44	140	100,00%	112	70	182	100%	(42)	-23,08%

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female

Komposisi Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan (orang)

Employee Composition Based on Education Level (people)



Demografi Karyawan Berdasarkan Usia (orang)

Employee Demographics Based on Age Range (people)

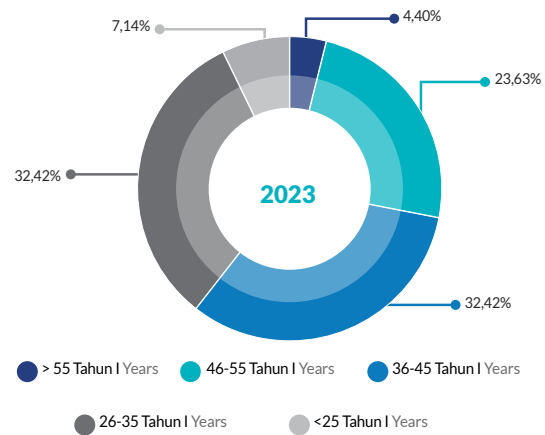
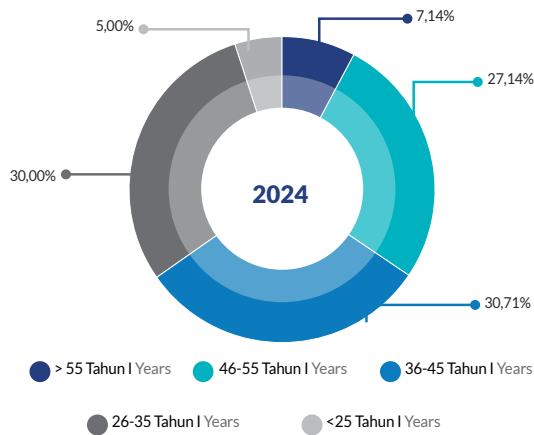
Rentang Usia Age Range	2024				2023				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Selisih Difference	Persentase Percentage (%)
> 55 Tahun > 55 Years	7	3	10	7,14%	6	2	8	4%	2	25,00%
46-55 Tahun 46-55 Years	25	13	38	27,14%	29	14	43	24%	(5)	-11,63%
36-45 Tahun 36-45 Years	31	12	43	30,71%	36	23	59	32%	(16)	-27,12%
26-35 Tahun 26-35 Years	29	13	42	30,00%	37	22	59	32%	(17)	-28,81%

Demografi Karyawan Berdasarkan Usia (orang)
Employee Demographics Based on Age Range (people)

Rentang Usia Age Range	2024				2023				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Selisih Difference	Persentase Percentage (%)
<25 Tahun <25 Years	4	3	7	5,00%	4	9	13	7%	(6)	-46,15%
Jumlah Total	96	44	140	100,00%	112	70	182	100%	(42)	-23,08%

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia (orang)
Employee Composition Based on Age Range (people)

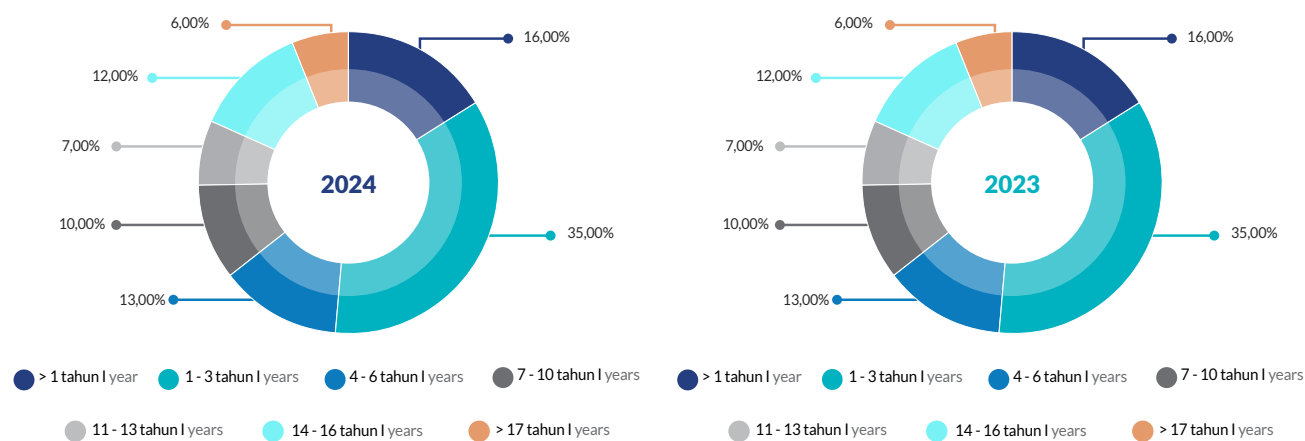


Demografi Karyawan Berdasarkan Masa Kerja (orang)
Employee Demographics Based on Service Period (people)

Masa Kerja Service Period	2024				2023				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	L M	P F	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Selisih Difference	Persentase Percentage (%)
> 1 tahun > 1 year	14	3	17	12,14%	19	11	30	16%	(13)	-43,33%
1 - 3 tahun 1 - 3 years	39	15	54	38,57%	39	25	64	35%	(10)	-15,63%
4 - 6 tahun 4 - 6 years	12	3	15	10,71%	15	8	23	13%	(8)	-34,78%
7 - 10 tahun 7 - 10 years	12	5	17	12,14%	16	3	19	10%	(2)	-10,53%
11 - 13 tahun 11 - 13 years	4	2	6	4,29%	6	7	13	7%	(7)	-53,85%
14 - 16 tahun 14 - 16 years	9	13	22	15,71%	9	13	22	12%	0	0,00%
> 17 tahun > 17 years	6	3	9	6,43%	8	3	11	6%	(2)	-18,18%
Jumlah Total	96	44	140	100,00%	112	70	182	100%	(42)	-23,08%

L = Laki-laki / P = Perempuan
M = Male / F = Female

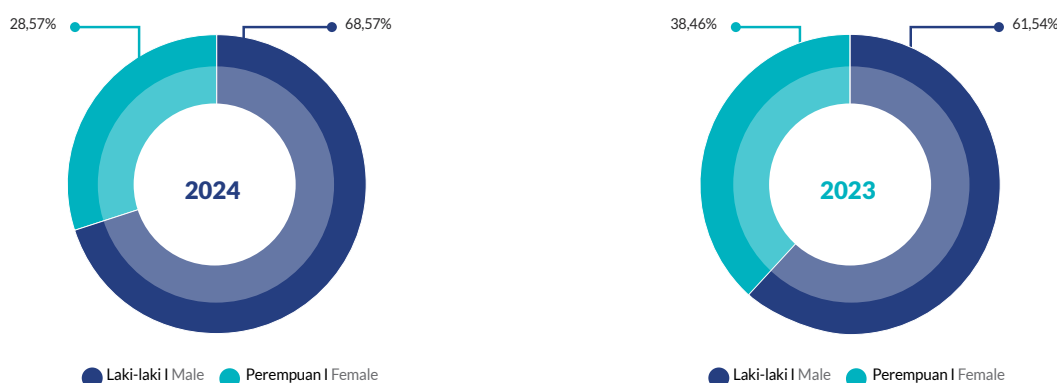
Komposisi Karyawan Berdasarkan Masa Kerja (orang) Employee Composition Based on Service Period (people)



Demografi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin (orang) Employee Demographics Based on Gender (people)

Jenis Kelamin Gender	2024		2023		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Jumlah Total	Komposisi Composition (%)	Selisih Difference	Persentase Percentage (%)
Laki-laki Male	96	68,57%	112	62%	(16)	14,29%
Perempuan Female	44	28,57%	70	38%	(30)	-42,86%
Jumlah Total	140	100,00%	182	100%	(42)	-23,08%

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin (orang) Employee Composition Based on Gender (people)



TINGKAT *TURNOVER* KARYAWAN

Tingkat perputaran atau *turnover* karyawan dapat menunjukkan produktivitas dari kinerja Perusahaan. Selain itu, tingkat *turnover* karyawan juga merupakan refleksi dari budaya dan sistem kerja Perusahaan yang dapat menjadi indikator bagi keberhasilan Perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Tingkat *turnover* dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut.

EMPLOYEE *TURNOVER* RATE

The employee turnover rate can indicate the productivity of the Company's performance, and is a reflection of the Company's culture and work system, as an indicator of the Company's success in creating a conducive work environment. The turnover rate is calculated based on the following formula.

Tingkat Turnover Karyawan Employee Turnover Rate	Jumlah Karyawan Keluar Number of Employees Leaving				
	=				
	$\frac{(\text{Jumlah Karyawan Awal Tahun} + \text{Jumlah Karyawan Akhir Tahun}) \times 1/2}{\text{Number of Employees at Beginning of Year} + \text{Number of Employees at End of Year}} \times 1/2$				

Tingkat *turnover* karyawan di tahun 2024 tercatat sebesar 38% kondisi tersebut meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 18%.

The employee turnover rate in 2023 was 38%, an increase compared to 18% the previous year.

Tingkat Turnover Pegawai Employee Turnover Rate

Perihal Subject	Satuan Unit	2024	2023	2022	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 2023-2024 Increase (Decrease) (%)
Karyawan Masuk Employees Joining					
Rekrutmen Karyawan Baru New Employees Recruited	Orang People	19	34	42	-44%
Karyawan Keluar Employees Leaving					
Karyawan Meninggal Dunia Employees who Passed Away	Orang People	1	-	-	-
Karyawan yang Memasuki Masa Pensiun Employees Entering Retirement	Orang People	3	6	7	-50%
Karyawan yang Mengundurkan Diri Employees who Resigned	Orang People	66	20	17	230%
Karyawan yang Berakhir Masa Tugas Employees whose term of service ended	Orang People	1	6	7	-83%
Jumlah Karyawan yang Keluar Total Employees Leaving	Orang People	71	32	31	91%
Perhitungan Tingkat Turnover Turnover Rate Calculation					
Jumlah Karyawan di Awal Tahun Number of Employees at the Beginning of the Year	Orang People	182	180	166	1%
Jumlah Karyawan di Akhir Tahun Number of Employees at the End of the Year	Orang People	140	182	180	-23%
Tingkat Turnover Turnover Rate	%	38	18	18	115%

SURVEI KEPUASAN KARYAWAN

Untuk memastikan pemenuhan persyaratan dan harapan utama para karyawan, Perusahaan melakukan survei kepuasan karyawan. Hasil survei tersebut memastikan seberapa baik Perusahaan memenuhi persyaratan dan harapan pekerja untuk pengembangan karier, kesejahteraan, serta keamanan dan keselamatan lingkungan pekerja.

Survei kepuasan karyawan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali. Pada tahun 2024, survei kepuasan karyawan memperoleh nilai sebesar 4,14 (skala 1-5) atau meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 3,88.

EMPLOYEE SATISFACTION SURVEY

To ensure fulfillment of the employees' key requirements and expectations, the Company conducts employee satisfaction surveys. The survey results confirm how well the Company is meeting the employee requirements and their expectations for career development, welfare, and employee environmental safety and security.

Employee satisfaction surveys are conducted once every 1 (one) year. In 2024, the employee satisfaction survey scored 4.14 (scale 1-5), an increase from 3.88 the previous year.

Perihal Subject	Satuan Unit	2024	2023	Kenaikan (Penurunan) 2023-2024 2023-2024 Increase (Decrease) (%)
Survei Kepuasan Karyawan Employee Satisfaction Survey	Skor Score	4,14	3,88	7%

PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Program pendidikan dan pelatihan merupakan bagian dari upaya pengembangan kompetensi dan pemberian motivasi bagi karyawan. Kegiatan tersebut dilaksanakan di internal maupun eksternal.

Pelatihan dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Perusahaan pada tahun 2024, yaitu sebagai berikut:

1. Pelatihan Publik, adalah pelatihan yang diikuti karyawan yang diselenggarakan oleh sumber eksternal (konsultan, lembaga pendidikan, asosiasi, perguruan tinggi, dan lain-lain).
2. Pelatihan internal, adalah pelatihan teknis maupun non teknis yang diikuti karyawan yang diselenggarakan oleh Perusahaan dengan sumber dari internal maupun dari eksternal (konsultan, lembaga pendidikan, asosiasi, perguruan tinggi, dan lain-lain).
3. *Sharing Session/Friday Afternoon* adalah sarana memberikan pengetahuan secara singkat, minimal 1 jam yang diselenggarakan oleh Perusahaan dengan sumber dari internal maupun dari eksternal (konsultan, lembaga pendidikan, asosiasi, perguruan tinggi, dan lain-lain).
4. Keanggotaan adalah penggantian biaya keanggotaan (*membership*) karyawan pada suatu lembaga yang terkait dengan pekerjaannya.
5. Karyawan menjadi narasumber, adalah di mana karyawan memberikan sharing pengetahuan atau berpartisipasi aktif menjadi pembicara/narasumber.

Berikut disampaikan rata-rata jam pelatihan setiap karyawan.

HC TRAINING AND DEVELOPMENT

Education and training programs are part of the efforts to develop competencies, and to provide motivation for employees. These activities are carried out internally and externally.

The training and development carried out by the Company in 2024 was divided into 5 (five) categories, as follows:

1. Public Training attended by employees organized by external sources (consultants, educational institutions, associations, universities, etc.).
2. Internal training, technical and non-technical training attended by employees organized by the Company using internal and external sources (consultants, educational institutions, associations, universities, etc.).
3. Short knowledge Sharing Sessions/Friday Afternoons to provide, lasting at least 1 hour, organized by the Company using internal and external sources (consultants, educational institutions, associations, universities, etc.).
4. Reimbursement of employee membership fees in institutions related to their work.
5. Using employees become resource persons, where they can share knowledge or actively participate as speakers/resource persons.

The average training hours per employee is shown below.

Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan
Average Employee Training Hours

Perihal Subject	Jumlah Karyawan yang Memperoleh Pelatihan (Orang) Number of Employees Receiving Training (people)			Jam Pelatihan (jam) Training Hours (hours)			Rata-rata Jam Pelatihan setiap Karyawan (jam/orang) Average Training Hours per Employee (hours/person)		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022	2024	2023	2022
Berdasarkan Jenis Kelamin Based on Gender									
Pria Male	60	130	106	1617	7.621	4.949	27	59	47
Wanita Female	38	80	71	735	4.359	2.568	19	55	36
Berdasarkan Kategori Level Jabatan Based on Position Level Category									
Komisaris Commissioners	1	2	3	21	62	80	21	31	27
Komite Committees	2	4	4	35	75	152	18	19	38
Direksi Directors	3	7	5	119	275	371	40	39	74
SEVP SEVP	0	1	1	0	55	20	0	55	20
Kepala Divisi Head of Division	4	21	15	147	764	574	37	36	38
Kepala Grup Group Head	19	41	24	448	2.282	1.184	24	56	49
Kepala Unit Unit Head	38	67	65	924	4.440	2.652	24	66	40
Officer/Sekretaris Officer/Secretary	27	67	60	658	4.027	2.484	24	60	41

Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan
Average Employee Training Hours

Perihal Subject	Jumlah Karyawan yang Memperoleh Pelatihan (Orang) Number of Employees Receiving Training (people)			Jam Pelatihan (jam) Training Hours (hours)			Rata-rata Jam Pelatihan setiap Karyawan (jam/orang) Average Training Hours per Employee (hours/person)		
	2024	2023	2022	2024	2023	2022	2024	2023	2022
Keseluruhan Overall									
Jumlah Keseluruhan Overall Total	98	210	177	2352	11.980	7517	23	57	42,5

Terhadap pengelolaan pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM yang dilakukan Perusahaan, di tahun 2024 Perusahaan menginvestasikan biaya sebesar Rp3.162.662.280,- mengalami penurunan 41% atau setara dengan Rp2.225.339.504,- dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp5.388.001.784,-.

The Company's training and HC competency development management costs in 2024 amounted to Rp3,162,662,280, an decrease of 41%, or Rp2,225,339,504 compared to Rp5,388,001,784 in 2023.

Investasi Pengembangan Kompetensi Karyawan
Investment in Employee Competency Development

Pengembangan Karyawan Employee Development	Satuan Unit	2024			2023			2022			Kenaikan (Penurunan) 2023- 2024 Increase (Decrease) 2023-2024 (%)
		Target Target	Realisasi Realization	%	Target Target	Realisasi Realization	%	Target Target	Realisasi Realization	%	
Investasi Pengembangan Kompetensi Karyawan Investment in Employee Competency Development	Rp-juta Rp-million	7.700	3.162	41	11.800	6.496	55,05	8.656	3.341	39	-51%

Pemenuhan Ketentuan Terkait Upah Minimum Regional Karyawan Tahun 2024
Fulfillment of Employee Minimum Wages in 2023

Wilayah Operasional Operational Area	Besaran Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi DKI Jakarta Minimum Wage (UMR) for DKI Jakarta Province (Rp)	Besaran Upah Karyawan Tetap di Tingkat Terendah Employee Wages at the Lowest Level (Rp)	Perbandingan Comparison (%)
DKI Jakarta	5.396.761	6.750.000	125

Imbalan atas jasa karyawan tetap golongan terendah Perusahaan yaitu Junior Specialist sebesar Rp6.750.000, lebih tinggi 25% dari UMR Provinsi DKI Jakarta.

Remuneration for the Company's lowest group of permanent employees, namely Junior Specialist, was Rp6,750,000, 25% higher than the UMR for DKI Jakarta.

STRUKTUR DAN KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

SHAREHOLDERS STRUCTURE AND COMPOSITION

PPA merupakan bagian dari Holding BUMN Transformasi dan Investasi yang seluruh sahamnya dimiliki Negara Republik Indonesia melalui PT Danareksa (Persero) selaku induk holding. Berikut struktur dan komposisi kepemilikan saham PPA:

PPA is part of a SOE Transformation and Investment Holding, all of whose shares are owned by the Republic of Indonesia through PT Danareksa (Persero) as the holding parent. The following shows the structure and composition of PPA's share ownership:

KOMPOSISI KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

COMPANY SHARE OWNERSHIP COMPOSITION

Kepemilikan Saham PT Perusahaan Pengelola Aset per 1 Januari 2024 PT Perusahaan Pengelola Aset Share Ownership as of January 1, 2024

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (Share)	Nilai Nominal/ Lembar Saham (Rp) Nominal Value/Shares (Rp)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid-up Capital (Rp)	Persentase Kepemilikan Percentage Ownership (%)
Negara Republik Indonesia The Republic of Indonesia	1 Saham Seri A Dwiwarna 1 Series A Dwiwarna Share	1.000.000	1.000.000	0,000018%
PT Danareksa (Persero)	6.188.834 Saham Seri B 6,188,834 Series B Shares	916.004	5.668.996.699	99,999982%

Kepemilikan Saham PT Perusahaan Pengelola Aset per 31 Desember 2024 PT Perusahaan Pengelola Aset Share Ownership as of December 31, 2024

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Number of Shares (Share)	Nilai Nominal/ Lembar Saham (Rp) Nominal Value/Shares (Rp)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid-up Capital (Rp)	Persentase Kepemilikan Percentage Ownership (%)
Negara Republik Indonesia The Republic of Indonesia	1 Saham Seri A Dwiwarna 1 Series A Dwiwarna Share	1.000.000	1.000.000	0,000018%
PT Danareksa (Persero)	6.188.834 Saham Seri A 6,188,834 Series A Shares	916.004	5.668.996.699.336	99,999982%

KOMPOSISI 20 PEMEGANG SAHAM TERBESAR

COMPOSITION OF THE 20 LARGEST SHAREHOLDERS

Sampai dengan akhir tahun 2024, Perseroan tidak melakukan Penawaran Umum Saham dan tidak pernah menerbitkan saham untuk dimiliki oleh masyarakat. Perseroan juga tidak mencatatkan saham di bursa efek mana pun, sehingga tidak terdapat informasi terkait kepemilikan saham masyarakat, baik berdasarkan klasifikasi maupun daftar 20 (dua puluh) pemegang saham terbesar selain komposisi pemegang saham seperti yang telah disampaikan di atas. Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai komposisi 20 pemegang saham terbesar.

Up until the end of 2024, the Company has never conducted a Public Offering of Shares and has never issued shares for public ownership. The Company also does not list its shares on any stock exchange, so there is no information to report on public share ownership, either based on classification and list of the 20 (twenty) largest shareholders other than the composition of shareholders as stated above. Thus, there is no information to report on the composition of the 20 largest shareholders.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM DENGAN KEPEMILIKAN 5% ATAU LEBIH

Sampai dengan akhir tahun 2024, Perseroan tidak melakukan Penawaran Umum Saham dan tidak pernah menerbitkan saham untuk dimiliki oleh masyarakat. Perseroan juga tidak mencatatkan saham di bursa efek mana pun, sehingga tidak terdapat informasi terkait kepemilikan saham masyarakat, baik berdasarkan klasifikasi maupun daftar 20 pemegang saham terbesar selain komposisi pemegang saham seperti yang telah disampaikan di atas. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait kelompok pemegang saham dengan kepemilikan 5% atau lebih.

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM MASYARAKAT DENGAN KEPEMILIKAN KURANG DARI 5%

Sampai dengan akhir tahun 2024, Perseroan tidak melakukan Penawaran Umum Saham dan tidak pernah menerbitkan saham untuk dimiliki oleh masyarakat. Perseroan juga tidak mencatatkan saham di bursa efek mana pun, sehingga tidak terdapat informasi terkait kepemilikan saham masyarakat, baik berdasarkan klasifikasi maupun daftar 20 pemegang saham terbesar selain komposisi pemegang saham seperti yang telah disampaikan di atas. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait kelompok pemegang saham masyarakat kurang dari 5%.

Klasifikasi Pemegang Saham

Sampai dengan akhir tahun 2024, Perseroan tidak melakukan Penawaran Umum Saham dan tidak pernah menerbitkan saham untuk dimiliki oleh masyarakat. Perseroan juga tidak mencatatkan saham di bursa efek mana pun, sehingga tidak terdapat informasi terkait kepemilikan saham masyarakat, baik berdasarkan klasifikasi maupun daftar 20 pemegang saham terbesar selain komposisi pemegang saham seperti yang telah disampaikan di atas. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait klasifikasi pemegang saham.

COMPOSITION OF SHAREHOLDERS WITH OWNERSHIP OF 5% OR MORE

Until the end of 2024, the Company has never conducted a Public Offering of Shares and has never issued shares for public ownership. The Company also does not list its shares on any stock exchange, so there is no information to report on public share ownership, either based on classification and list of the 20 (twenty) largest shareholders other than the composition of shareholders as stated above. Thus, there is no information to report on the shareholder groups with ownership of 5% or more.

COMPOSITION OF SHAREHOLDERS WITH OWNERSHIP LESS THAN 5%

Until the end of 2024, the Company has never conducted a Public Offering of Shares and has never issued shares for public ownership. The Company also does not list its shares on any stock exchange, so there is no information to report on public share ownership, either based on classification and list of the 20 (twenty) largest shareholders other than the composition of shareholders as stated above. Thus, there is no information to report on the shareholder groups with ownership of less than 5%.

Shareholder Classification

Until the end of 2024, the Company has never conducted a Public Offering of Shares and has never issued shares for public ownership. The Company also does not list its shares on any stock exchange, so there is no information to report on public share ownership, either based on classification and list of the 20 (twenty) largest shareholders other than the composition of shareholders as stated above. Thus, there is no information to report on shareholder classification.

INFORMASI KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN OLEH DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Share Ownership by the Board of Commissioners and the Board of Directors

Sampai dengan 31 Desember 2024, Dewan Komisaris, Direksi, dan Manajemen PPA tidak mempunyai kepemilikan saham atas PPA. Kepemilikan saham PPA dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan PT Danareksa (Persero). Dengan demikian, PPA tidak menyajikan rincian anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang memiliki saham langsung maupun tidak langsung.

As of December 31, 2024, the Board of Commissioners, Board of Directors, and Management of PPA do not have any share ownership in PPA. PPA's shares are owned by the Republic of Indonesia and PT Danareksa (Persero). Thus, PPA does not report details of members of the Board of Directors or Board of Commissioners who own shares directly or indirectly.

INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA/ PENGENDALI HINGGA ENTITAS PEMILIK AKHIR

INFORMATION ABOUT MAJORITY/CONTROLLING SHAREHOLDERS UP TO THE ULTIMATE OWNER

PEMEGANG SAHAM UTAMA

Pemegang saham utama Perseroan adalah PT Danareksa (Persero) dengan kepemilikan sebesar 99,99982%. Danareksa dibentuk didirikan oleh Pemerintah Indonesia pada tanggal 28 Desember 1976 sebagai hasil dari keputusan Sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional yang saat itu tengah berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan saham-saham perusahaan swasta melalui pasar modal. Melalui kehadiran Danareksa, Pemerintah Indonesia berharap dapat menghimpun dana masyarakat agar dapat digunakan secara produktif untuk pembiayaan pembangunan nasional.

Kegiatan usaha Danareksa adalah sebagai perusahaan holding yang mengelola anak perusahaan di bidang jasa keuangan, kawasan industri, sumber daya air, jasa konstruksi dan konsultasi konstruksi, manufaktur, media dan teknologi, serta transportasi dan logistik, mempercepat proses pengikutsertaan masyarakat dalam pemilihan saham perusahaan menuju pemerataan pendapatan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengalangan dana, melaksanakan kegiatan investasi dan konsultasi manajemen, serta melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Per 31 Desember 2024, seluruh saham PT Danareksa (Persero) atau 100% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

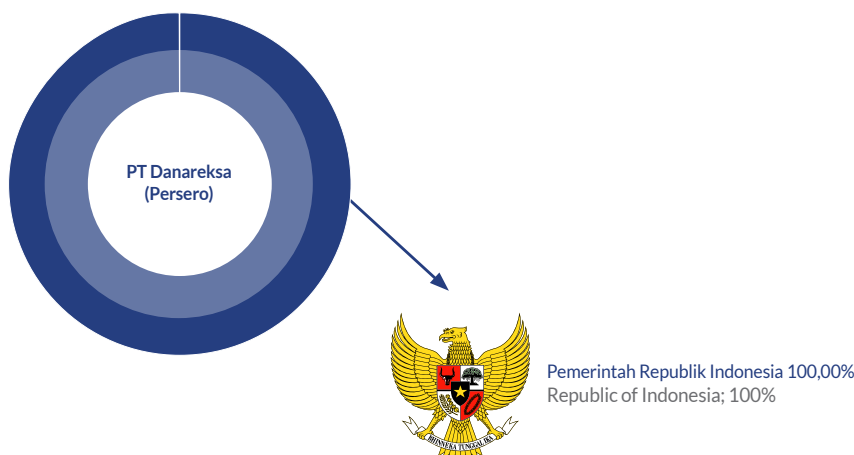
MAJORITY SHAREHOLDER

The majority shareholder of the Company is PT Danareksa (Persero) with ownership of 99.99982%. Danareksa was established by the Indonesian Government on December 28, 1976 as a result of a Sidang Dewan Stabilisasi Ekonomi Nasional decision, which at that time was trying to increase public participation in ownership of private company shares through the capital market. Through Danareksa, the Indonesian Government sought to collect public funds to be used productively to finance national development.

Danareksa's business activities are as a holding company that manages subsidiaries in the fields of financial services, industrial areas, water resources, construction services and construction consultancy, manufacturing, media and technology, as well as transportation and logistics, accelerating the process of community participation in company share ownership towards income equality, increasing community participation in mobilizing funds, carrying out investment and management consultancy activities, as well as optimizing the use of Company (Persero) resources based on the principles of good corporate governance.

As of December 31, 2024, all shares of PT Danareksa (Persero) or 100% of its shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia.

Komposisi Pemegang Saham PT Danareksa (Persero) per 31 Desember 2024
Composition of PT Danareksa (Persero) Shareholders as of December 31, 2024



Entitas Induk Tertinggi

Sampai dengan 31 Desember 2024, seluruh saham PT Danareksa (Persero) atau 100% sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui Kementerian Keuangan. Dengan demikian, entitas pemilik akhir/pemegang saham pengendali Perseroan adalah Negara Republik Indonesia yang juga sekaligus merupakan entitas induk tertinggi.

Ultimate Parent Entity

Until December 31, 2024, all shares of PT Danareksa (Persero), or 100% of its shares, are owned by the Republic of Indonesia through the Ministry of Finance. Thus, the ultimate owner/controlling shareholder of the Company is the Republic of Indonesia as the highest parent entity.

DAFTAR ENTITAS ANAK, PERUSAHAAN ASOSIASI, DAN VENTURA BERSAMA

LIST OF SUBSIDIARIES, ASSOCIATED COMPANIES AND JOINT VENTURES

	Bidang Usaha Line of Business	Domisili Domicile	Tahun Berdiri Year of Establishment	Tahun Beroperasi Komersial Year of Commercial Operations	Tahun Penyertaan Modal Year of Equity Participation	Kepemilikan Saham Shareholding (%)		Jumlah Aset (Rp-miliar) Total Assets (Rp-billion)		Status Operasi Operational Status
						2024	2023	2024	2023	
Kepemilikan Langsung Direct Ownership										
PT PPA Finance	Sewa (leasing); Anjak Piutang (Factoring); dan Pembiayaan Konsumen (Consumer Financing) Leasing; Factoring; and Consumer Financing	Jakarta	2009	2009	2009	99,99%	99,99%	365.611	260.388	Beroperasi Operating
PT PPA Kapital	Jasa pengelolaan investasi dalam bentuk pembelian dan penjualan efek (tidak dalam fungsi sebagai Manajer Investasi); jasa konsultasi manajemen; dan jasa konsultasi keuangan. Investment management services of purchasing and selling securities (not as Investment Manager); management consulting services; and financial consultancy services.	Jakarta	2012	2012	2012	99,99%	99,99%	1.756.850	2.025.668	Beroperasi Operating

PROFIL ENTITAS ANAK

PT PPA Finance atau “PT PPAF” terbentuk resmi sebagai entitas anak usaha PT Perusahaan Pengelola Aset pada 27 Mei 2009, berdasarkan persetujuan Menteri BUMN melalui surat No. S360/MBU/2009 tanggal 27 Mei 2009, yang berkedudukan di Jakarta dengan kepemilikan saham sebesar 99,999% dan sisanya sebesar 0,001% saham dimiliki oleh Koperasi Karyawan PPA. PT PPAF adalah perusahaan pembiayaan yang didirikan oleh PT PPA dan Koperasi Karyawan PPA pada tanggal 21 Desember 2009 berdasarkan Akta No. 03 dibuat di hadapan Lindawati Wiranata, S.H., Notaris di Jakarta Barat dan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-00096.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 5 Januari 2010.

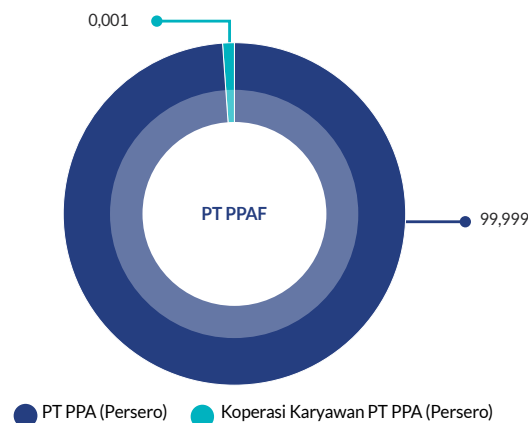
Tujuan pendirian PT PPAF adalah untuk mendukung PT PPA dalam membantu BUMN dan BUMN yang dikelola anak perusahaan dalam membiayai pembelian barang modal dengan tetap mengedepankan aspek komersial yang saling menguntungkan. Selain itu, PT PPAF juga menargetkan BUMN dan anak perusahaannya yang tidak dikelola oleh PT PPA, termasuk perusahaan swasta yang dinilai prospektif untuk dibiayai.

SUBSIDIARIES' PROFILES

PT PPA Finance or “PT PPAF” was officially established as a subsidiary of PT Perusahaan Pengelola Aset on May 27, 2009, based on the approval of the Minister of SOEs through letter No. S360/MBU/2009 dated May 27, 2009, and is based in Jakarta with share ownership of 99.999% and the remaining 0.001% of shares owned by Koperasi Karyawan PPA. PT PPAF is a financing company founded by PT PPA and Koperasi Karyawan PPA on December 21, 2009 based on Deed No. 03, made before Lindawati Wiranata, S.H., Notary in West Jakarta, and ratified by the Republic of Indonesia Minister of Justice and Human Rights in Decree No. AHU-00096.AH.01.01.Year 2010 dated January 5, 2010.

The purpose of establishing PT PPAF was to support PT PPA in assisting BUMN and BUMN managed by subsidiaries, in financing the purchase of capital goods, while still prioritizing mutually beneficial commercial aspects. In addition, PT PPAF targets BUMN and subsidiaries not managed by PT PPA, including private companies that are considered prospective for financing.

Kepemilikan Saham PT PPA Finance per 31 Desember 2024
PT PPA Finance Share Ownership as of December 31, 2024



Alamat Address

Gedung Menara Mandiri II, Lantai 9
Jl. Jend. Sudirman Kav 54-55
Jakarta 12190 - Indonesia
Telp/Phone: +62 21 57951419
Faksimili/Fax: +62 21 57951420
Surel/Email: customerservice.ppafinance@ptppa.com

Kinerja PT PPA Finance PT PPA Finance Performance	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan Increase/Decrease	
			Selisih Difference	Persentase Percentage (%)
Keuangan Finance				
Pendapatan Usaha (Rp-juta) Operating Revenue (Rp-million)	15.511	21.992	(6.481)	-41,78%
Beban Usaha (Rp-juta) Operating Expenses (Rp-million)	(26.059)	(62.360)	36.301	-58,21%

Kinerja PT PPA Finance PT PPA Finance Performance	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan Increase/Decrease	
			Selisih Difference	Persentase Percentage (%)
Laba (Rugi) Bersih (Rp-juta) Net (Loss) Profit (Rp-million)	(8.530)	9.443	(17.973)	-190,33%
Aset (Rp-juta) Assets (Rp-million)	365.611	260.388	105.224	28,78%
Liabilitas (Rp-juta) Liabilities (Rp-million)	136.425	22.807	113.618	83,28%
Ekuitas (Rp-juta) Equity (Rp-million)	229.287	237.581	(8.394)	-3,66%

Manajemen Kunci PT PPA Finance per 31 Desember 2024

PT PPA Finance Key Management as of December 31, 2024

Dewan Komisaris Board of Commissioners	
Komisaris Commissioner	Rizwan Rizal Abidin
Direksi Board of Directors	
Direktur Utama President Director	Andreas Manik
Direktur Director	Dicky Henria Nugraha
Direktur Director	Agha Surya Digantara

PT PPA Kapital ("PT PPAK")

PT PPA Kapital atau "PT PPAK" terbentuk resmi sebagai entitas anak usaha PT Perusahaan Pengelola Aset pada 22 Juni 2011, berdasarkan persetujuan Menteri Negara BUMN melalui surat No.S-372/MBU/2011 tanggal 22 Juni 2011, yang berkedudukan di Jakarta Selatan dengan kepemilikan saham sebesar 99,999% dan sisanya sebesar 0,001% saham dimiliki oleh Koperasi Karyawan PPA. PT PPAK didirikan pada tanggal 17 Desember 2011 berdasarkan Akta No. 17 dibuat di hadapan Surjadi, S.H., Notaris di Jakarta Pusat dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU-02691.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 17 Januari 2012.

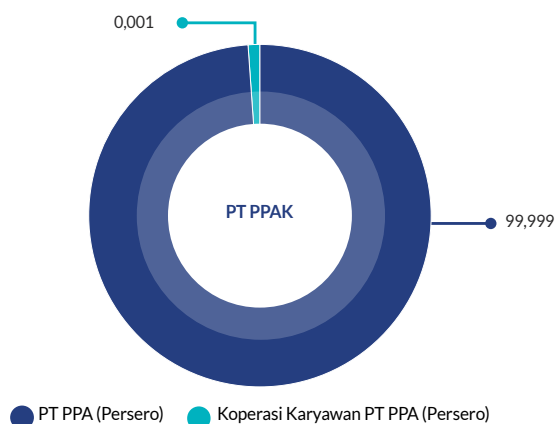
Maksud dan tujuan pendirian PT PPAK adalah berusaha dalam bidang aktivitas penunjang jasa keuangan, aktivitas konsultasi bisnis dan broker bisnis, aktivitas konsultan manajemen lainnya, serta perdagangan besar berbagai macam barang.

PT PPA Kapital ("PT PPAK")

PT PPA Kapital or "PT PPAK" was officially established as a subsidiary of PT Perusahaan Pengelola Aset on June 22, 2011, based on approval through the Minister for State-Owned Enterprises letter No.S-372/MBU/2011 dated June 22, 2011, is based in South Jakarta with share ownership of 99.999% and the remaining 0.001% shares owned by Koperasi Karyawan PPA. PT PPAK was established on December 17, 2011 based on Deed No. 17, made before Surjadi, S.H., Notary in Central Jakarta, and was ratified by the Republic of Indonesia Minister of Law and Human Rights Decree No. AHU-02691.AH.01.01.Year 2012 dated January 17, 2012.

The purpose and objective for establishing PT PPAK was to operate in the fields of financial services supporting activities, business consulting and business brokerage activities, other management consulting activities, as well as wholesale trading of different kinds of goods.

Kepemilikan Saham PT PPA Kapital per 31 Desember 2024
PT PPA Kapital Share Ownership as of December 31, 2024



Alamat
Address

Jl. Radio IV No.5
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130
Telp : +62 21 5798 2288
Faksimili : +62 21 5798 2289
Surel : oss.ppak@ptppa.com

Kinerja PT PPA Kapital PT PPA Kapital Performance	2024	2023	Kenaikan/ Penurunan Increase/Decrease	
			Selisih Difference	Persentase Percentage (%)
Keuangan Finance				
Pendapatan Usaha (Rp-juta) Operating Revenue (Rp-million)	70.819	23.997	47.462	203%
Beban Usaha (Rp-juta) Operating Expenses (Rp-million)	(54.823)	(91.848)	37.020	40%
Laba Bersih (Rp-juta) Net Profit (Rp-million)	(3.820)	(121.261)	118.018	96%
Aset (Rp-juta) Assets (Rp-million)	1.756.850	2.025.668	(268.818)	(13%)
Liabilitas (Rp-juta) Liabilities (Rp-million)	825.468	1.090.466	(264.999)	(24%)
Ekuitas (Rp-juta) Equity (Rp-million)	931.381	935.201	(3.820)	(0,40%)

Manajemen Kunci PT PPA Kapital per 31 Desember 2024
PT PPA Kapital Key Management as of December 31, 2024

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Komisaris

Commissioner

Yessy Indahwati Hadiprana

Direksi

Board of Directors

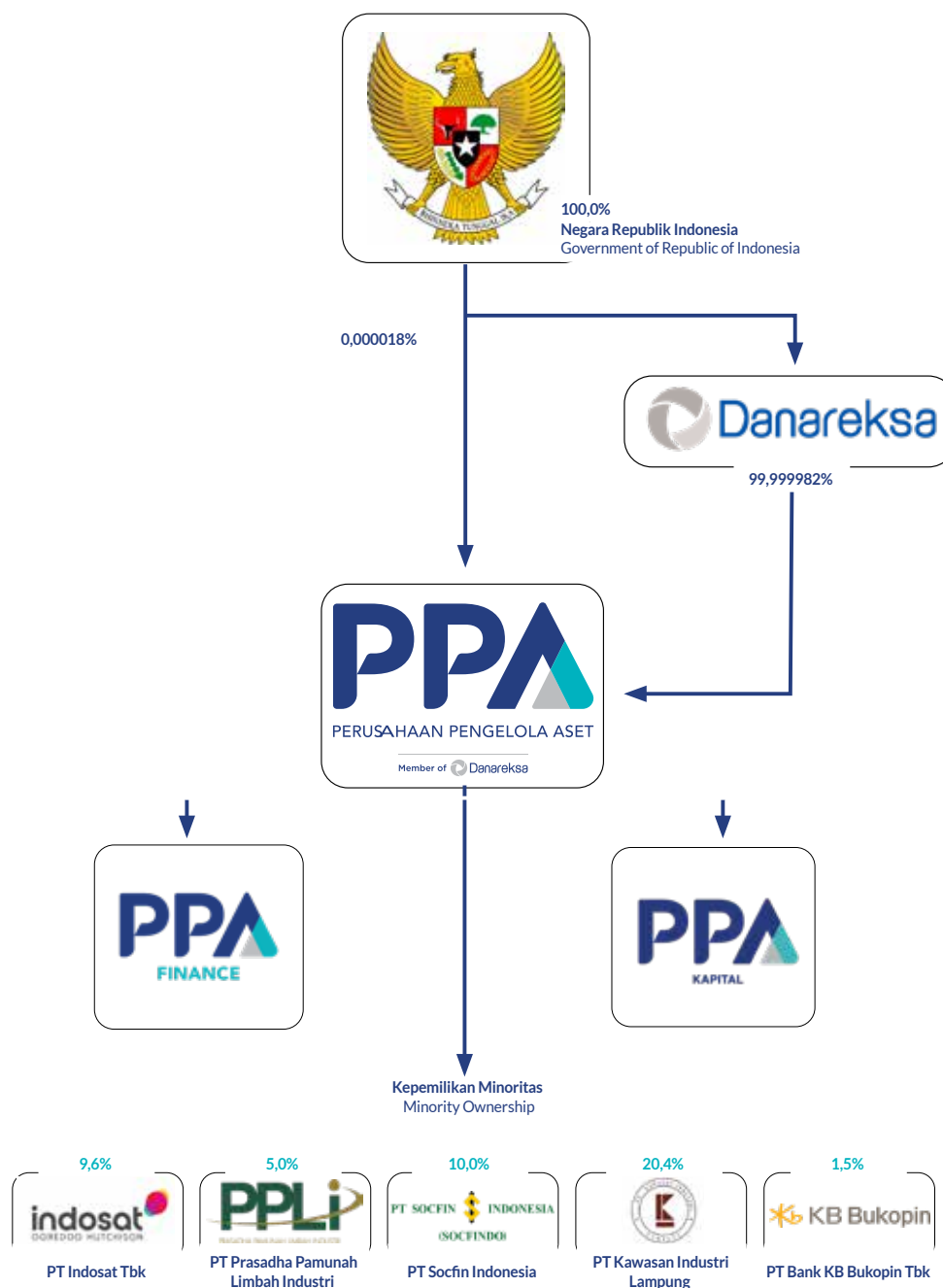
Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja

Director of Finance and Work Support

Vacant

STRUKTUR GRUP

GROUP STRUCTURE



KRONOLOGI PENERBITAN DAN/ATAU PENCATATAN SAHAM

CHRONOLOGY OF SHARE ISSUANCE AND/OR LISTING

Per 31 Desember 2024, Perseroan tidak melakukan Penawaran umum Saham dan tidak pernah menerbitkan saham untuk dimiliki oleh masyarakat. Perseroan juga tidak mencatatkan saham di bursa efek mana pun, sehingga tidak terdapat informasi terkait kronologis penerbitan dan pencatatan saham.

As of December 31, 2024, the Company has never conducted a public offering of shares and has never issued shares for public ownership. The Company also does not list its shares on any stock exchange, so there is no information to report regarding the chronology of share issuance and listing.

KRONOLOGI PENERBITAN OBLIGASI, SURAT UTANG DAN SUKUK

CHRONOLOGY OF BONDS, DEBT SECURITIES, AND SUKUK

Tahun Penerbitan Issuance Year	Kode Obligasi Bond Code	Nama Obligasi Bond Name	Nilai Emisi (Rp Juta) Issue Price (Rp million)	Tingkat Bunga per Tahun Annual Interest Rate	Tanggal Penerbitan Issuance Date	Jangka Waktu (Tahun) Tenor (Year)	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Peringkat Rating		Status Status
								2024	2023	
2020	PPAP	Obligasi I Tahun 2020 Perusahaan Pengelola Aset Perusahaan Pengelola Aset 2020 Bond I								
		Seri B Series B	345.000	10,55%	1 September 2020 September 1, 2020	5	1 September 2025 September 1, 2025	idAA	idAA	Aktif Active
		Seri C Series C	197.100	11,00%	1 September 2020 September 1, 2020	7	1 September 2027 September 1, 2027	idAA	idAA	Aktif Active
2022	PPAP	Obligasi II Tahun 2022 Perusahaan Pengelola Aset Perusahaan Pengelola Aset 2022 Bond II								
		Seri A Series A	890.600	7,00%	8 Juli 2022 July 8, 2022	3	8 Juli 2025 July 8, 2025	idAA	idAA	Aktif Active
		Seri B Series B	791.600	7,80%	8 Juli 2022 July 8, 2022	5	8 Juli 2027 July 8, 2027	idAA	idAA	Aktif Active

Surat Utang Lainnya Other Debt Securities

Surat Utang Lainnya Other Debt Securities	Nilai (Rp Juta) Value (Rp Million)	Tanggal Penerbitan Issuance Date	Jangka Waktu (Tahun) Tenor (Year)	Tanggal Jatuh Tempo Due Date	Tingkat Bunga per Tahun Annual Interest Rate	Peringkat Rating 2024	Status
Surat Berharga Komersial Berkelanjutan I Sustainable Commercial Securities I	200.000	16 Januari 2024 January 16, 2024	1 1	15 Januari 2025 January 15, 2025	7,65%	idA1+ (Single A One Plus)	Aktif Active

Daftar Sukuk yang Diterbitkan Perusahaan List of Sukuk Issued by the Company

Sukuk	Nilai (Rp Juta) Value (Rp-million)	Tanggal Penerbitan Issue Date	Jangka Waktu (Tahun) Term (Year)	Tanggal Jatuh Tempo Maturity Date	Tingkat Bagi Hasil per Tahun Revenue Sharing Rate per Year	Peringkat Rating 2024	Status
Sukuk PPA tahun 2022 Sukuk PPA 2022	1.117.000	28 September 2022 September 28, 2022	15	28 September 2037 September 28, 2037	6,63%	idAA(sy) (Double A Syariah)	Aktif Active
Sukuk PPA Tahun 2021 Sukuk PPA 2021	3.051.069	15 November 2021 November 15, 2021	20	15 November 2041 November 15, 2041	10%	-	Aktif Active

AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK

PUBLIC ACCOUNTS AND PUBLIC ACCOUNTING FIRMS

Akuntan Publik Public Accountant	Maxson Hakim Wijaya
Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accounting Firm (KAP)	KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM-AAJ)
Akuntan Publik	Maxson Hakim Wijaya
Alamat Address	Gedung Plaza ASIA, lantai 10-11, Jalan Jenderal Sudirman Kav.59 Jakarta 12190
Periode Penugasan Period of Assignment	31 Desember 2024 December 31, 2024
Jasa Audit yang Diberikan Audit Services Provided	Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian, Laporan Arus Kas Konsolidasian, Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian, Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, Audit Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun 2024. Consolidated Statement of Financial Position, Consolidated Statement of Profit and Loss and Other Comprehensive Income, Consolidated Cash Flow Statement, Consolidated Statement of Changes in Equity, Notes to Consolidated Financial Statements, Audit of Financial Reports and Implementation of Micro and Small Businesses in 2024.
Biaya Jasa Audit Audit Services Fees	Rp900.900.000,- Rp900,900,000
Jasa Non-Audit yang Diberikan Non-Audit Services Provided	Tidak Ada None
Biaya Jasa Non-Audit Non-Audit Service Fees	- -

Daftar Akuntan Publik 5 Tahun Terakhir

List of Public Accountants for the Last 5 Years

Tahun Audit Year of Audit	Kantor Akuntan Publik (KAP) Public Accounting Firm (KAP)	Akuntan Publik Public Accountant	Opini Opinion	Biaya Jasa (Rp) Service Fee (Rp)
2024	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) No. Izin: AP.0181 Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) License Number: AP.0181	Maxson Hakim Wijaya Maxson Hakim Wijaya	Wajar Tanpa Pengecualian Qualified	900.900.000
2023	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) No. Izin: AP.0181 Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) License Number: AP.0181	Maxson Hakim Wijaya No. Izin: AP.1680 Maxson Hakim Wijaya License Number: AP.1680	Wajar Dengan Pengecualian Qualified	707.625.000
2022	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) No. Izin: AP.0181 Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) License Number: AP.0181	Maxson Hakim Wijaya No. Izin: AP.1680 Maxson Hakim Wijaya License Number: AP.1680	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified	590.000.000
2021	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) No. Izin: AP.0181 Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) License Number: AP.0181	Benny Andria No. Izin: AP.0181 Benny Andria License Number: AP.0181	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified	410.000.000
2020	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) No. Izin: AP.0181 Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) License Number: AP.0181	Benny Andria No. Izin: AP.0181 Benny Andria License Number: AP.0181	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified	627.000.000
2019	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) No. Izin: AP.0181 Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) License Number: AP.0181	Benny Andria No. Izin: AP.0181 License Number: AP.0181	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified	594.000.000

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG SEHUBUNGAN DENGAN PENERBITAN OBLIGASI II TAHUN 2022

SUPPORTING INSTITUTIONS AND PROFESSIONALS IN CONNECTION WITH THE ISSUANCE OF BOND II IN 2022

Kustodian Custodian

Nama Lembaga/ Profesi Name of Institution/Professional	PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Alamat Address	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, Lt. 5 Jl. Jend. Sudirman kav. 52-53, Jakarta
Jasa yang Diberikan Services Provided	Sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran Payment Agent under a Payment Agent Agreement
Periode Penugasan Assignment Period:	2021-2023

Pemeringkat Efek Securities Rating

Nama Lembaga/ Profesi Name of Institution/Professional	PT Pemeringkat Efek Indonesia
Alamat Address	Equity Tower Lantai 30. Jl. Jenderal Sudirman Kavling 52-53 Jakarta
Jasa yang Diberikan Services Provided	Melakukan pemeringkatan atas Obligasi dalam rangka Penawaran Umum yang objektif dan independen Carrying out an objective and independent rating of Bonds in the context of a Public Offering
Periode Penugasan Assignment Period	2021-2023

Konsultan Hukum Legal Consultant

Nama Lembaga/ Profesi Name of Institution/Professional	Marsinih Martoatmodjo Iskandar Law Office
Alamat Address	Office 8, 15th Floor Suite H, SCBD Lot 28 Jl. Senopati Raya No. 8B Jakarta
Jasa yang Diberikan Services Provided	Melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu Carrying out examination and research on existing legal facts regarding the Company and other related information
Periode Penugasan Assignment Period	2021-2023

Notaris Notary

Nama Lembaga/ Profesi Name of Institution/Professional	Lenny Janis Ishak, S.H
Alamat Address	Jl. Hang Lekir 9 No. 1 RT.4/RW.6 Gunung, Kec. Kebayoran Baru Jakarta
Jasa yang Diberikan Services Provided	Membuat akta-akta dalam rangka penawaran umum obligasi antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Agen Pembayaran, dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi serta akta-akta pengubahannya Preparing for a Public Offering of Bonds including Trustee Agreement, Debt Acknowledgment, Payment Agent Agreement and Bond Underwriting Agreement, as well as deeds of amendment thereto
Periode Penugasan Assignment Period	2021-2023

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

AWARDS AND CERTIFICATIONS

Penghargaan yang Diperoleh PPA di Tahun 2024

Awards Received by PPA in 2024

Tanggal Date	Nama Penghargaan Name of Award	Jenis Penghargaan Type of Award	Diberikan Oleh Presented By
Nasional National			
27 Februari 2024 February 27, 2024	Paritrana Award Tahun 2023 Provinsi DKI Jakarta Kategori Usaha Skala Besar Sektor Keuangan Paritrana Award 2023 DKI Jakarta Province, Large Scale Business in the Financial Sector Category	Pemenang Terbaik I Best Winner I	Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta dan BP Jamsostek DKI Jakarta Manpower and Transmigration Office and BP Jamsostek

INFORMASI PADA SITUS WEB PERUSAHAAN

INFORMATION ON THE COMPANY WEBSITE



PT Perusahaan Pengelola Aset memiliki situs web resmi sebagai salah satu sarana dalam memenuhi keterbukaan terhadap publik yang menyajikan informasi secara komunikatif dan ter-*update* mengenai Perseroan sesuai dengan prinsip transparansi dan keterbukaan informasi bagi publik, melalui situs web resmi Perseroan dengan alamat www.ptppa.com. Situs web yang disajikan dengan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini merupakan portal resmi Perseroan yang dapat diakses secara terbuka, kapan saja, dan di mana saja, dengan mudah dan sederhana, dengan tujuan memberikan informasi yang komprehensif, akurat dan aktual tentang Perseroan kepada khalayak luas.

Uraian mengenai informasi-informasi yang tersedia pada situs web Perseroan adalah sebagai berikut:

PT Perusahaan Pengelola Aset has an official website as a means of fulfilling public transparency that presents communicative and updated information about the Company in accordance with the principles of transparency and openness of information to the public, through the Company's official website at www.ptppa.com. This website, which is presented in two languages, namely Indonesian and English, is the Company's official portal that can be accessed openly, anytime and anywhere, easily and simply, with the aim of providing comprehensive, accurate and current information about the Company to a wide audience.

A description of the information available on the Company's website is shown below:

Uraian Description	Ketersediaan Availability	Keterangan Information
Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu Shareholder Information up to the ultimate Owners	x	Belum tersedia di dalam website Perusahaan namun akan segera ditindaklanjuti pembaruannya Not yet available on the Company's website but updates will be followed up soon
Isi Kode Etik Code of Conduct	✓	Ditampilkan dalam menu "Tentang PPA" dilanjutkan pada sub menu "Tata Kelola Perusahaan" https://www.ptppa.com/id/tata-kelola-perusahaan/ Presented on "About PPA" menu and continued in the sub-menu "Corporate governance" https://www.ptppa.com/id/tata-kelola-perusahaan/

Uraian Description	Ketersediaan Availability	Keterangan Information
Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan The General Meetings of Shareholders (GMS) Information Section contains the minimum covering agenda for the GMS, a summary of the GMS minutes, and information about significant dates such as the GMS announcement date, the GMS invitation date, the GMS date, and the date of the GMS minutes announcement	x	Belum tersedia di dalam website Perusahaan namun akan segera ditindaklanjuti pembaruannya Not yet available on the Company's website but updates will be followed up soon
Laporan Keuangan Tahunan Terpisah (5 tahun terakhir) Separate annual financial statements (for the last five years)	√	Ditampilkan dalam menu "Hubungan Investor" dan dilanjutkan pada sub menu "Laporan Keuangan" https://www.ptppa.com/id/laporan-keuangan/ Presented on "Investor Relations" menu and continued in the sub-menu "Financial Report" https://www.ptppa.com/id/laporan-keuangan/
Profil Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors Profiles	√	Ditampilkan dalam menu "Tentang PPA" dan dilanjutkan pada sub menu "Manajemen" https://www.ptppa.com/id/dewan-komisaris/ https://www.ptppa.com/id/dewan-direksi/ Presented on "About PPA" menu and continued in the sub-menu "Management" https://www.ptppa.com/id/dewan-komisaris/ https://www.ptppa.com/id/dewan-direksi/
Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal Charters of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, and Internal Audit Unit	√	Ditampilkan dalam menu "Tentang PPA" dilanjutkan pada sub menu "Tata Kelola Perusahaan" https://www.ptppa.com/id/tata-kelola-perusahaan/ Presented on "About PPA" menu and continued in the sub-menu "Corporate Governance" https://www.ptppa.com/id/tata-kelola-perusahaan/

√ = tersedia pada situs web Perusahaan
x = belum tersedia pada situs web Perusahaan
√ = available on the Company's website
x = not yet available on the Company's website

Semua informasi yang disajikan dalam *website* PPA senantiasa diperbarui secara berkala untuk memberikan informasi *ter-update* bagi segenap pemangku kepentingan maupun masyarakat umum. PPA juga memiliki akun media sosial sebagai bagian dari keterbukaan informasi dan komunikasi kepada seluruh pemangku kepentingan, di antaranya Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, dan LinkedIn.

All information presented on the PPA website is updated regularly to provide the most up-to-date information for all stakeholders and the general public. PPA also has social media accounts as part of its information and communication transparency to all stakeholders, including Facebook, Instagram, Twitter, YouTube and LinkedIn.







ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

MANAGEMENT DISCUSSION
AND ANALYSIS

PPA mengoptimalkan aktivitas usaha dengan berkomitmen mewujudkan operasional melalui pengelompokan berdasarkan segmen usaha diantaranya Segmen Investasi, Segmen Pembiayaan, dan Segmen Eliminasi.

PPA optimizes its business activities by committing to realizing operations through groupings based on business segments including Investment Segment, Financing Segment, and Elimination Segment.

Tinjauan Umum

General Review

ANALISIS PEREKONOMIAN DAN INDUSTRI

Tahun 2024 ditandai dengan masih berlanjutnya tantangan global yang cukup kompleks, ditandai oleh perlambatan pertumbuhan ekonomi di negara maju, peningkatan tensi geopolitik, dan penyesuaian kebijakan moneter ketat di berbagai negara. Berdasarkan proyeksi Bank Indonesia dan IMF, pertumbuhan ekonomi global tahun 2024 diperkirakan melambat menjadi sekitar 3,2%, lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Inflasi global masih menjadi perhatian utama, meskipun mulai menurun seiring penurunan harga energi dan normalisasi rantai pasok. Ketidakpastian global diperparah oleh fragmentasi perdagangan dunia serta volatilitas pasar keuangan, yang turut memengaruhi arus modal dan stabilitas nilai tukar di negara berkembang.

Di tengah ketidakpastian global tersebut, perekonomian nasional Indonesia menunjukkan resiliensi yang kuat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2024 diperkirakan tetap solid di kisaran 5,0–5,1%, ditopang oleh kuatnya permintaan domestik, investasi sektor riil, serta peran aktif pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi. Inflasi nasional juga terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$, dengan kestabilan nilai tukar Rupiah yang terjaga. Hal ini mencerminkan keberhasilan sinergi bauran kebijakan fiskal dan moneter, serta kebijakan makroprudensial yang konsisten untuk menopang pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

Sektor-sektor padat modal dan padat karya menunjukkan kinerja yang membaik, meskipun masih dihadapkan pada tantangan dari sisi biaya produksi dan akses pembiayaan. Aktivitas konsumsi rumah tangga terus tumbuh dengan solid, seiring membaiknya daya beli dan kepercayaan konsumen. Di sisi lain, belanja modal pemerintah dan alokasi pembiayaan infrastruktur turut mendukung akselerasi pertumbuhan, terutama dalam kerangka pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.

Faktor domestik lain yang menjadi penopang utama adalah akselerasi digitalisasi ekonomi dan penguatan sinergi lintas kebijakan antara Bank Indonesia, pemerintah pusat, dan daerah. Program transformasi ekonomi nasional yang mencakup penguatan permintaan domestik, peningkatan kapasitas produksi, dan pendalaman sektor keuangan menjadi pondasi penting dalam menjaga pertumbuhan jangka panjang. Di tengah dinamika global yang masih menantang, bauran kebijakan yang prudent dan terkoordinasi menjadi kunci dalam menjaga daya saing serta menciptakan ruang pertumbuhan baru bagi industri strategis, termasuk sektor pengelolaan aset dan restrukturisasi korporasi.

Industri jasa keuangan, termasuk sektor pengelolaan aset dan restrukturisasi, menjadi salah satu area yang strategis dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional. Dalam konteks ini, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PT PPA memiliki peran penting sebagai National Asset Management Company (NAMCO) yang ditugaskan secara khusus oleh pemerintah untuk menangani

ECONOMIC AND INDUSTRY ANALYSIS

2024 was marked by the continuation of quite complex global challenges, marked by slowing economic growth in developed countries, increasing geopolitical tensions, and adjustments to tight monetary policies in various countries. Based on projections from Bank Indonesia and the IMF, global economic growth in 2024 is expected to slow to around 3.2%, lower than the previous period. Global inflation is still a major concern, although it is starting to decline along with falling energy prices and normalization of supply chains. Global uncertainty is compounded by the fragmentation of world trade and volatility in financial markets, which also affect capital flows and exchange rate stability in developing countries.

Amidst global uncertainty, Indonesia's national economy has shown strong resilience. Indonesia's economic growth in 2024 is estimated to remain solid in the range of 5.0–5.1%, supported by strong domestic demand, real sector investment, and the active role of the government and Bank Indonesia in maintaining macroeconomic stability. National inflation is also under control within the target of $2.5 \pm 1\%$, with the stability of the Rupiah exchange rate maintained. This reflects the success of the synergy of the fiscal and monetary policy mix, as well as consistent macroprudential policies to support sustainable economic recovery.

Capital-intensive and labor-intensive sectors showed improved performance, although they still face challenges in terms of production costs and access to financing. Household consumption activities continue to grow solidly, along with improving purchasing power and consumer confidence. On the other hand, government capital expenditure and infrastructure financing allocations also support growth acceleration, especially within the framework of long-term development towards Indonesia Emas 2045.

Other domestic factors that are the main pillars are the acceleration of economic digitalization and strengthening cross-policy synergy between Bank Indonesia, the central government, and regional governments. The national economic transformation program that includes strengthening domestic demand, increasing production capacity, and deepening the financial sector is an important foundation in maintaining long-term growth. Amidst the still challenging global dynamics, a prudent and coordinated policy mix is key to maintaining competitiveness and creating new growth space for strategic industries, including the asset management and corporate restructuring sectors.

The financial services industry, including the asset management and restructuring sector, is one of the strategic areas in driving national economic recovery. In this context, PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) or PT PPA has an important role as the National Asset Management Company (NAMCO) which is specifically assigned by the government to handle the restructuring and revitalization of

restrukturisasi dan revitalisasi BUMN. Industri pengelolaan aset diproyeksikan memiliki prospek positif seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pemulihan perusahaan-perusahaan milik negara yang terdampak pandemi dan tekanan keuangan struktural.

PPA memproyeksikan penguatan bisnis yang signifikan melalui strategi turnaround dan restrukturisasi 21 BUMN dan 1 anak usaha BUMN, baik melalui skema penggabungan, divestasi, hingga pembubaran entitas yang tidak efisien. Selain itu, pengembangan mekanisme investasi berbasis special situation fund (SSF) dan pembentukan Special Purpose Vehicle (SPV) dalam pengelolaan NPL juga memberikan kontribusi terhadap pendalaman sektor keuangan nasional. Skema ini memungkinkan pendekatan off-balance sheet yang lebih fleksibel dan efisien, yang tidak bersaing langsung dengan perbankan komersial.

Industri konsultasi bisnis dan keuangan juga menunjukkan tren peningkatan permintaan, terutama dari BUMN, BUMD, dan instansi pemerintah yang membutuhkan pendampingan dalam efisiensi operasional dan pengembangan model bisnis baru. PPA turut menangkap peluang ini dengan memperkuat lini advisory-nya, termasuk dalam kerangka integrasi dan sinergi dengan Holding Danareksa. Dalam jangka menengah, peran PPA diharapkan semakin sentral sebagai penghubung antara kepentingan pemerintah, sektor keuangan, dan pasar investasi domestik.

Sejalan dengan transformasi ekonomi nasional, digitalisasi sistem pembayaran dan pengembangan ekonomi hijau menjadi arah kebijakan utama yang mendukung perluasan aktivitas investasi dan pembiayaan. PPA juga berpotensi berperan dalam mendukung proyek-proyek hijau dan berbasis keberlanjutan yang memerlukan pendekatan manajemen aset yang komprehensif dan terukur. Selain itu, pendalaman pasar keuangan, khususnya pasar sekunder surat utang dan instrumen investasi alternatif, menjadi peluang sinergi yang strategis bagi ekspansi bisnis PPA.

Dengan prospek makroekonomi yang relatif stabil dan dukungan kebijakan yang pro-pertumbuhan, PPA optimis terhadap keberlanjutan bisnis dan ekspansi perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam menciptakan nilai ekonomi melalui pengelolaan aset negara. Sinergi antara ketahanan perekonomian nasional, transformasi BUMN, serta strategi pembiayaan inovatif menjadi fondasi utama bagi pertumbuhan industri pengelolaan aset dan restrukturisasi di Indonesia pada tahun 2024 dan tahun-tahun mendatang.

Program Kerja atau Kegiatan Perusahaan

1. Program Kerja BUMN Titip Kelola

Pada tahun 2020, Perseroan memperoleh mandat Surat Kuasa Khusus ("SKK") dari Menteri Badan Usaha Milik Negara ("MBUMN") selaku Wakil Pemerintah selaku Pemegang Saham Negara untuk mengelola 21 BUMN dan 1 anak usaha BUMN melalui skema Titip Kelola. Pada tanggal 5 Oktober 2022 Perseroan diberikan amanat SKK atas PT Varuna Tirta Prakasya (Persero). Atas SKK tersebut, Perseroan melakukan kajian untuk mendapatkan hipotesis awal penanganan BUMN tersebut dilihat dari beberapa aspek yaitu: (i) Prospek Usaha; (ii) Kemampuan Perusahaan; (iii) Kekuatan Keuangan; (iv) Persepsi Pasar; dan (v) Keunggulan Komparatif.

SOE. The asset management industry is projected to have positive prospects along with the increasing need for the recovery of state-owned companies affected by the pandemic and structural financial pressures.

PPA projects significant business strengthening through turnaround and restructuring strategies of 21 BUMN and 1 BUMN subsidiary, either through merger schemes, divestment, or dissolution of inefficient entities. In addition, the development of investment mechanisms based on special situation funds (SSF) and the establishment of Special Purpose Vehicles (SPV) in NPL management also contribute to the deepening of the national financial sector. This scheme allows for a more flexible and efficient off-balance sheet approach, which does not compete directly with commercial banking.

The business and financial consulting industry also shows an increasing trend in demand, especially from BUMN, BUMD, and government agencies that require assistance in operational efficiency and the development of new business models. PPA also captures this opportunity by strengthening its advisory line, including within the framework of integration and synergy with Holding Danareksa. In the medium term, PPA's role is expected to be increasingly central as a liaison between the interests of the government, the financial sector, and the domestic investment market.

In line with the national economic transformation, digitalization of payment systems and development of a green economy are the main policy directions that support the expansion of investment and financing activities. PPA also has the potential to play a role in supporting green and sustainability-based projects that require a comprehensive and measurable asset management approach. In addition, deepening the financial market, especially the secondary market for debt securities and alternative investment instruments, is a strategic synergy opportunity for PPA's business expansion.

With a relatively stable macroeconomic outlook and pro-growth policy support, PPA is optimistic about the sustainability of its business and the expansion of its role as a strategic partner of the government in creating economic value through state asset management. The synergy between national economic resilience, BUMN transformation, and innovative financing strategies are the main foundations for the growth of the asset management and restructuring industry in Indonesia in 2024 and the years to come.

Company Work Program or Activities

1. SOEs Under Management Program

In 2020, the Company obtained a special power of attorney ("SKK") from the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) as the representative of the Government as the State shareholder to manage 21 SOEs and 1 SOE subsidiary through the SOE Under Management scheme. On October 5, 2022 the Company received a SKK mandate for PT Varuna Tirta Prakasya (Persero). With the SKK, the Company conducted a study to obtain an initial hypothesis for the handling of SOEs through several aspects, including: (i) business prospects; (ii) company capabilities; (iii) financial strength; (iv) market perception; and (v) Comparative advantage.

2. NPL Management

Pengelolaan NPL Perbankan/Institusi lainnya akan dilakukan melalui mekanisme off-balance sheet dengan melakukan kerja sama jangka panjang dengan skema investasi pada fund, kerjasama dengan trustee atau mekanisme lainnya dimana selanjutnya pihak fund, trustee atau pihak lainnya akan melakukan pendirian Special Purpose Vehicle ("SPV") baik di dalam maupun luar negeri. Atas kegiatan ini, PT PPA diharapkan akan memperoleh pendapatan berupa fee yang bersumber dari pemulihan NPL, flipping fee, peningkatan nilai pada penyertaan fund dan pendapatan lainnya.

Dalam rangka pengelolaan NPL perbankan/institusi lainnya ini, PT PPA dapat melakukan penerbitan sukuk dan/atau pembelian sukuk yang diterbitkan oleh pihak ketiga. Di samping itu, PT PPA akan melakukan pengelolaan NPL yang dimiliki oleh beberapa perusahaan dengan imbalan berupa fee yang akan dikenakan atas dasar persentase tertentu dari total pemulihan yang diperoleh.

3. Kegiatan Investasi

Program kerja atau kegiatan yang akan dilakukan terkait dengan kegiatan investasi dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

Program Kerja terhadap klien baru:

- Menjadi point of contact untuk setiap transaksi investasi atau potensi klien PT PPA;
- Menyusun dan/atau mengkoordinasikan kajian investasi, uji tuntas, serta kegiatan pendukung lainnya untuk sebagai dasar pengambilan keputusan investasi;
- Structuring & Negotiation atas transaksi investasi;
- Memperoleh persetujuan atas rencana investasi;
- Melakukan eksekusi atas rencana investasi, termasuk melakukan koordinasi dengan profesi pendukung pelaksanaan investasi;
- Mengutamakan investasi yang mendukung sinergi dan value PPA dalam ekosistem BUMN termasuk peningkatan nilai saham pada saham minoritas.

Program Kerja terhadap pengembangan usaha aset/ perusahaan hasil akuisisi/investasi:

- Menyusun strategi pengembangan usaha aset/ perusahaan hasil akuisisi/investasi;
- Melaksanakan kajian/Highest & Best Use (HBU) analysis untuk memperoleh opsi optimalisasi aset;
- Melaksanakan eksekusi strategi pengembangan atau optimalisasi yang disepakati;
- Memperoleh persetujuan atas pengembangan usaha aset/ perusahaan hasil akuisisi/investasi;
- Melakukan monitoring pelaksanaan strategi pengembangan dan kinerja;
- Melakukan program penjualan aset properti investasi.

Program Kerja investasi lainnya:

- Melakukan penyertaan (dalam rangka pendirian, pembelian saham yang telah dikeluarkan atau saham dalam simpanan) pada perusahaan yang bersifat sementara dalam rangka peningkatan nilai untuk dijual kembali.
- Investasi pada instrumen Surat Berharga berupa pembelian Surat Utang diantaranya Kuasi Ekuitas yang tercatat atau tidak tercatat di Bursa Efek.
- Pembelian saham, warrant, dan produk derivatif lainnya melalui Bursa Efek.

2. NPL Management

NPL Management of banking/other institutions is carried out through an off-balance sheet mechanism by conducting a long-term cooperation with an investment scheme either through a fund, cooperation with trustees or other mechanisms where the Fund, Trustee or other parties will establish a Special Purpose Vehicle ("SPV") both at home and overseas. For this activity, PT PPA will receive income in the form of fees sourced from NPL recovery, flipping fees, any increase in value in fund participation and other income.

In the framework of managing this banking/other institutional NPL, PT PPA can issue sukuk and/or purchase sukuk issued by a third party. In addition, PT PPA can manage NPLs owned by several companies in return for fees that will be charged on the basis of a certain percentage of the total recovery obtained.

3. Investment activities

Work programs or activities to be carried out related to investment activities can be divided into the following:

Work Program for New Clients:

- Become a point of contact for each investment transaction or for potential PT PPA clients;
- Compile and/or coordinate investment studies, complete tests, and other supporting activities for the basis for making investment decisions;
- Structure & negotiation of investment transactions;
- Obtain approval of the investment plan;
- Execute the investment plan, including coordinating with the profession supporting the investment implementation;
- Prioritize investments that support PPA synergy and value in SOE ecosystems including an increase in the value of shares in minority shares.

Work Program for Asset/Company Development of Acquisitions/ Investments:

- Develop an asset/company business development strategy resulting from the acquisition/investment;
- Carry out a study / Highest & Best Use (HBU) Analysis to obtain an option to optimize assets;
- Carry out the execution of agreed development or optimization strategies;
- Obtain approval for the development of assets/companies resulting from acquisitions/investments;
- Monitor the application of development and performance strategies;
- Conduct investment property asset sales programs.

Other investment work programs:

- Conduct participation (in the context of establishment, purchase of shares that have been issued, or shares in deposits) in temporary companies in order to increase the value for resale.
- Investment in securities instruments in the form of purchases of debt securities including quasi equity recorded or not recorded on the stock exchange.
- Purchase shares, warrants, and other derivative products through the stock exchange.

- d. Melakukan inisiasi untuk menjalin kerja sama dengan perbankan nasional terkait penanganan Loan at Risk (LAR). Pengelolaan LAR tersebut dapat dilakukan baik melalui on-balance-sheet maupun off-balance-sheet dengan target pendapatan berbasis fee.
4. Kegiatan Konsultasi (advisory)
Program Kegiatan yang akan dilakukan oleh PT PPA terkait dengan jasa konsultasi adalah kegiatan pemberian jasa konsultasi yang meliputi namun tidak terbatas pada konsultasi bisnis & keuangan (Business & Financial Advisory), maupun penjualan dan/atau pengembangan aset kepada BUMN, Anak Perusahaan BUMN, BUMD, Pemda, Lembaga/Instansi dan Swasta diantaranya berupa jasa konsultasi berikut:
 - a. *Due diligence*;
 - b. *Business Plan*;
 - c. *Merger & Acquisition*;
 - d. *Business Valuation & Financial Modelling*;
 - e. *Feasibility Study*;
 - f. Penyusunan Standar Operasi & Prosedur ("SOP");
 - g. Restrukturisasi Utang;
 - h. *Sustainability Services*;
 - i. *Financial Arranger*.
5. Special Asset Management
Program Kerja terhadap klien lama atau existing:
 - a. Melakukan monitoring dan analisa kinerja investasi dan kondisi bisnis klien;
 - b. Melakukan penagihan atas hasil investasi;
 - c. Melakukan kunjungan ke klien secara teratur dan rutin;
 - d. Mengimplementasikan program divestasi/exit/ eksekusi jaminan yang menjadi bagian dari persetujuan Direksi;
 - e. Monitoring pemenuhan kewajiban lanjutan.
Program Kerja terhadap klien bermasalah:
 - a. Menyusun kajian penyelesaian permasalahan pada aset-aset baik produktif ataupun tidak produktif perusahaan;
 - b. Melaksanakan implementasi solusi penyelesaian atas permasalahan pada aset-aset baik produktif ataupun tidak produktif perusahaan, termasuk yang dimiliki perusahaan anak;
 - c. Memperbaiki kualitas dan kolektibilitas pinjaman/ pembiayaan yang diberikan, termasuk pinjaman restrukturisasi dan dana talangan melalui restrukturisasi, asset settlement atau debt to equity swap;
 - d. Memperketat monitoring atas klien yang telah dilakukan restrukturisasi;
 - e. Melakukan penelusuran aset personal guarantee (PG) untuk memperkuat posisi PPA, bekerja sama dengan kejaksaan atau lembaga lainnya;
 - f. Penguatan posisi PPA melalui peningkatan jaminan; Mempertahankan kepentingan PPA dalam kasus hukum berupa kepailitan/PKPU atau kasus hukum lain (bersama Divisi Hukum).
Program Kerja pemberian jasa pengelolaan NPL:
 - a. Menyusun strategi penanganan NPL berdasarkan dokumen kredit dan informasi dari PIC akun sebelumnya;
 - b. Melakukan upaya penagihan atas debitur kooperatif;
 - c. Melakukan upaya penagihan secara paksa untuk nasabah yang tidak kooperatif dalam bentuk:
 - i) Eksekusi jaminan;
 - ii) Tindakan hukum lain yang dibutuhkan untuk menjaga kepentingan debitur.
- d. Conduct initiation to establish cooperation with national banking related to handling loans at risk (lar). The lar management can be carried out either through on-balance-sheet or off-balance-sheet with fee-based income targets.
4. Consultation Activities (Advisory)
The program activities carried out by PT PPA relate to providing advisory services that include but are not limited to business & financial advisory consultation, as well as the sale and/or development of assets in SOEs, SOE subsidiaries, regional SEOs, Local governments, institutions/agencies and the private sector and include the following advisory services:
 - a. Due diligence;
 - b. Business Plan;
 - c. Merger & acquisition;
 - d. Business Valuation & Financial Modeling;
 - e. Feasibility study;
 - f. Preparation of operating & procedure standards ("SOP");
 - g. Debt restructuring;
 - h. Sustainability Services;
 - i. Financial Arranger.
5. Special Asset Management
Work programs for old or existing clients:
 - a. Monitor and analyze investment performance and client business conditions;
 - b. Billing for investment results;
 - c. Make regular and routine visits to the clients;
 - d. Implement the divestment/exit/execution program for guarantees that are approved by the Board of Directors;
 - e. Monitor the fulfillment of advanced obligations.
Work programs for problem clients:
 - a. Prepare a study for problem solving productive or unproductive assets in the Company;
 - b. Implement solutions to problems in productive or unproductive assets in the Company, including those owned by subsidiaries;
 - c. Improve the quality and collectibility of loans/ financing provided, including restructuring loans and bailout funds through restructuring, asset settlement or debt to equity swaps;
 - d. Tighten monitoring of clients that have carried out restructuring;
 - e. Search for Personal Guarantee (PG) assets to strengthen PPA's position, in collaboration with the prosecutor's office or other institutions;
 - f. Strengthen PPA's position by increasing guarantees;
 - g. Support PPA's interests in legal cases in the form of bankruptcy/PKPU or other legal cases (with the Legal Division).
Work Program for Providing NPL Management Services:
 - a. Develop a NPL handling strategy based on credit and information documents from the previous account PIC;
 - b. Conduct billing for cooperative debtors;
 - c. Conduct forcible billing for uncooperative customers in the form of:
 - i) Execution of Guarantee;
 - ii) Other legal actions needed to maintain the interests of the debtor.

Program Kerja pemberian jasa penagihan NPL:

- a. Melakukan penagihan sesuai dengan penugasan (kuasa) yang diberikan oleh pemberi kerja dengan imbalan berbasis success fee.
6. Kegiatan Pendanaan
Program kerja atau kegiatan yang akan dilakukan terkait dengan kegiatan pendanaan antara lain sebagai berikut:
 - a. Inventarisasi kebutuhan dana.
 - b. Pencarian sumber dana dari perbankan, strategic investor, penerbitan Surat Utang baik jangka pendek dan/atau jangka panjang (MTN, Obligasi, Sukuk dan/ atau Surat Utang lainnya).
 - c. Optimalisasi dana dengan hasil yang optimal.
 - d. Mencari pendanaan melalui kreditur baru, Surat Utang Baru dan/atau Obligasi, Sukuk antara lain refinancing Pendanaan yang telah ada, dan Pendanaan baru agar pendanaan yang diperoleh memiliki jangka waktu yang lebih fleksibel dan suku bunga yang lebih kompetitif.
 - e. Untuk memperoleh pinjaman melalui perbankan/ menerbitkan surat utang, Perusahaan akan menjaminkan aset (termasuk namun tidak terbatas pada kepemilikan saham PPA pada saham minoritas) yang melebihi 50% dari jumlah kekayaan bersih Perusahaan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
7. Pendirian Anak Usaha di Luar Negeri sebagai Investment Holding
Untuk mendukung kegiatan Investasi PPA yang lebih variatif serta memitigasi beberapa risiko investasi, PT PPA akan mendirikan anak usaha baru yang berupa Offshore Investment Holding yang akan mengelola beberapa investasi PPA yang memerlukan partisipasi, termasuk divestasi, dari dan kepada pihak luar negeri. Pendirian Anak Usaha Offshore Investment Holding akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan memberikan manfaat hukum dan keuangan yang terbaik untuk PT PPA. Offshore Investment Holding akan menjadi anak usaha yang dikonsolidasikan oleh PT PPA, sehingga aspek transparansi dan governance harus sesuai dengan pedoman yang berlaku di PT PPA dan BUMN pada umumnya.
8. Program Kerja atau Kegiatan Dukungan Kerja
Untuk memperlancar proses dan mendukung kesuksesan atas kebijakan strategis serta program kerja, satuan kerja PPA juga menyusun program kerja atau kegiatan baik yang bersifat rutin maupun non rutin. Fungsi yang terlibat dalam kegiatan ini di antaranya Sekretariat Perusahaan, Hukum, Keuangan dan Akuntansi, Sumber Daya Manusia dan Umum, Satuan Pengawasan Intern, Manajemen Risiko, serta Perencanaan Strategis Perusahaan dan Manajemen Kinerja.

NPL Billing Services Work Program:

- a. Billing in accordance with the assignment (power) given by the employer based on success fee.
6. Funding activities
Work programs or activities to be carried out related to funding activities including the following:
 - a. Inventory of funding needs.
 - b. Search for funding sources from banks, strategic investors, issuance of short-term and/or long-term debt securities (MTN, bonds, sukuk and/or other debt securities).
 - c. Optimize of funds with optimal results.
 - d. Find funding through new creditors, new debt securities and/ or bonds, sukuk including existing funding refinancing, and new funding so that the funding obtained has a more flexible time period and more competitive interest rates.
 - e. Obtain loans through banking/issuing debt securities, the Company can guarantee assets (including but not limited to PPA share ownership in minority shares) that exceeds 50% of the total net worth of the company in one or more transactions, whether related to each other or not.
7. Establishment of an Overseas Subsidiary as an Investment Holding
To support PPA more varied investment activities and to mitigate some investment risks, PT PPA will establish a new subsidiary through an offshore investment holding that will manage PPA investments that require participation, including divestments from and to foreign parties. The establishment of an offshore investment holding subsidiary will be carried out in accordance with applicable regulations, and will provide the best legal and financial benefits for PT PPA. The Offshore Investment Holding will be a subsidiary consolidated with PT PPA, so that the aspects of transparency and governance must be in accordance with the applicable guidelines in PT PPA and SOEs in general.
8. Work Program or Work Support Activities
To facilitate the process and support the success of strategic policies and work programs, the PPA work unit also compile work programs or activities that are routine and non routine. The functions involved in this activity include the Company's Secretariat, Legal, Finance and Accounting, Human Capital and General Affairs, Internal Audit Unit, Risk Management, and Company Strategic Planning and Performance Management.

Tinjauan Kinerja Per Segmen Usaha

Operational Review Per Business Segment

TINJAUAN OPERASIONAL

Segmen operasi PPA mencakup Investasi dan Pembiayaan. Pada tahun 2024, PPA membukukan pendapatan usaha konsolidasian sebesar Rp1.662,60 miliar, mengalami penurunan sebesar 0,63% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.673,14 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan keuntungan atas investasi pada efek ekuitas.

Per 31 Desember 2024, PPA mencatatkan jumlah aset konsolidasian sebesar Rp17.467,08 miliar, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp17.373,92 miliar. Kenaikan sebesar 0,54% ini terutama didorong oleh kenaikan aset lancar lainnya

OPERATIONAL REVIEW

PPA's operating segments include Investments and Financing. In 2024, PPA's consolidated operating revenues reached Rp1,662.60 billion, a decrease of 0.63% compared to the previous year's Rp1,673.14 billion. This was mainly due to the decreased returns on investments in equity securities.

As of December 31, 2024, PPA's consolidated assets stood at Rp17,467.08 billion, an increase compared to Rp17,373.92 billion in 2023. The increase of 0.54% was mainly due to an increase in other current assets.

Jumlah dan Kontribusi Segmen Operasi terhadap Pendapatan Usaha Konsolidasian
 Operating Segments Total and Contribution to Consolidated Operating Revenue

Segmen Segment	2024		2023		Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
	Jumlah (Rp-Juta) Total (Rp- million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-Juta) Total (Rp- million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-Juta) Total (Rp- million)	Persentase (%) Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4=1-3)	(5=4/3)	
Investasi Investment	1.659.948	99,84%	1.692.948	101,19%	(33.000)	-1,95%	↓
Pembiayaan Financing	15.511	0,93%	21.992	1,31%	(6.481)	-29,47%	↓
Eliminasi *) Elimination *)	(12.855)	-0,77%	(41.800)	-2,50%	28.945	-69,25%	↓
Jumlah Pendapatan Usaha Total Operating Revenue	1.662.604	100,00%	1.673.140	100,00%	(10.536)	-0,63%	↓

*) Seluruh transaksi, saldo, laba, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam grup dieliminasi secara penuh untuk mencerminkan posisi keuangan sebagai satu kesatuan usaha.

*) All intra-group transactions, balances, profits, expenses, and cash flows related to intra-group transactions are eliminated in full to reflect the financial position as a single business entity.

Jumlah dan Kontribusi Segmen Operasi terhadap Aset Konsolidasian
 Operating Segments Total and Contribution to Consolidated Assets

Segmen Segment	2024		2023		Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
	Jumlah (Rp-Juta) Total (Rp- million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-Juta) Total (Rp- million)	Kontribusi (%) Contribution (%)	Jumlah (Rp-Juta) Total (Rp- million)	Persentase (%) Percentage (%)	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(4=1-3)	(5=4/3)	
Investasi Investment	19.739.597	113,01%	19.532.533	112,42%	207.064	1,06%	↑
Pembiayaan Financing	365.612	2,09%	260.388	1,50%	105.224	40,41%	↑
Eliminasi *) Elimination *)	(2.638.125)	-15,10%	(2.419.003)	-13,92%	(219.122)	9,06%	↑
Jumlah Aset Total Assets	17.467.084	100,00%	17.373.918	100,00%	93.166	0,54%	↑

*) Seluruh transaksi, saldo, laba, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam grup dieliminasi secara penuh untuk mencerminkan posisi keuangan sebagai satu kesatuan usaha.

*) All intra-group transactions, balances, profits, expenses, and cash flows related to intra-group transactions are eliminated in full to reflect the financial position as a single business entity.

Investasi

Kegiatan Usaha

Segmen usaha Investasi didapatkan dari kegiatan usaha Grup yang mencakup kegiatan:

1. Investasi langsung maupun tidak langsung berupa:
 - a. Pemberian pinjaman untuk membiayai proyek dan/ atau kegiatan usaha lainnya;
 - b. Penempatan dana pada suatu proyek atau kegiatan usaha lainnya;
 - c. Pembelian, pengembangan, dan/atau penjualan/ penyewaan aset;
 - d. Melakukan penyertaan (dalam rangka pendirian, pembelian saham yang telah dikeluarkan atau saham dalam simpanan) pada perusahaan yang bersifat sementara dalam rangka peningkatan nilai untuk dijual kembali.
2. Investasi pada instrumen Surat Berharga berupa:
 - a. Pembelian Surat Utang termasuk kuasi ekuitas yang tercatat di Bursa Efek atau yang tidak tercatat di Bursa Efek; dan
 - b. Pembelian saham, *warrant* dan produk *derivative* lainnya melalui Bursa Efek.

Kinerja Keuangan dan Profitabilitas

Segmen investasi membukukan pendapatan usaha sebesar Rp1.659,95 miliar pada tahun 2024, menurun 1,95% dibandingkan capaian tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.692,95 miliar. Sementara itu, total aset segmen investasi pada akhir tahun 2024 mencapai Rp19.739,60 miliar, meningkat 1,06% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun kinerja keuangan dan profitabilitas segmen investasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Investment

Business Activities

The Investment business segment carries out the following business activities:

1. Direct and indirect investments in the form of:
 - a. Providing loans to finance projects and/or other business activities;
 - b. Placing funds in a project or other business activities;
 - c. Purchasing, developing, and/or selling/leasing assets;
 - d. Investing (for establishment, purchasing issued shares or shares in savings) in companies that are temporary in basis to increase their value for resale.
2. Investments in Securities instruments in the form of:
 - a. Purchasing Debt Securities including quasi equity listed on the Stock Exchange or not listed on the Stock Exchange; and
 - b. Purchasing shares, warrants and other derivative products through the Stock Exchange.

Financial Performance and Profitability

The investment segment's operating revenues reached Rp1,659.95 billion in 2024, a decrease of 1.95% compared to the previous year's Rp1,692.95 billion. While the investment segment's total assets at the end of 2024 stood at Rp19,739.60 billion, an increase of 1.06% compared to the previous year. The investment segment's financial performance and profitability can be seen in the following table.

Tabel Kinerja Keuangan dan Profitabilitas Segmen Investasi 2023-2024
Investment Segment Financial Performance and Profitability 2023-2024

Segmen Segmen	2024 (Rp-Juta) (Rp-Million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-Million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Nominal (Rp-Juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Profit (Loss) and Other Comprehensive Income					
Pendapatan Usaha Operating Revenues	1.659.948	1.692.948	(33.000)	-1,95%	↓
Beban Usaha Operating Expenses	(1.474.497)	(1.408.003)	(66.494)	4,72%	↑
Laba Usaha Operating Income	185.451	284.945	(99.494)	-34,92%	↓
Pendapatan Bunga Interest income	38.156	52.422	(14.266)	-27,21%	↓
Beban Bunga dan Keuangan Interest Expense and Financial Charge	(8.516)	(10.682)	2.166	-20,28%	↓
Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi Fair Value Increase of Investment Properties	10.537	716	9.821	1.371,65%	↑
Bagian Rugi Bersih atas Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama Share of Net Loss of Associated Entities and Joint Ventures	(2.718)	(1.854)	(864)	46,60%	↑

Tabel Kinerja Keuangan dan Profitabilitas Segmen Investasi 2023-2024
 Investment Segment Financial Performance and Profitability 2023-2024

Segmen Segmen	2024 (Rp-Juta) (Rp-Million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-Million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Nominal (Rp-Juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Penghasilan (Beban) Lain-Lain Other Income (Expenses)	(2.905)	(6.255)	3.350	-53,56%	↓
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Income Before Tax	220.005	319.292	(99.287)	-31,10%	↓
Pajak Penghasilan Total Income Tax	(6.105)	6.339	(12.444)	-196,31%	↓
Laba Tahun Berjalan Income for the Current Year	213.900	325.631	(111.731)	-34,31%	↓
Posisi Keuangan Financial Position					
Total Aset Total Assets	19.739.597	19.532.533	207.064	1,06%	↑
Total Liabilitas Total Liabilities	6.758.067	7.134.185	(376.118)	-5,27%	↓
Total Ekuitas Total Equity	12.981.530	12.398.348	583.182	4,70%	↑
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	19.739.597	19.532.533	207.064	1,06%	↑

Pembiayaan

Kegiatan Usaha

Segmen usaha Pembiayaan berasal dari kegiatan usaha Grup yang meliputi:

1. Sewa Pembiayaan, terutama untuk pembiayaan investasi dan modal kerja,
2. Anjak Piutang untuk pembiayaan modal kerja,
3. Pembiayaan Konsumen untuk pembiayaan konsumtif antara lain kendaraan roda empat baik untuk kendaraan operasional atau kendaraan pribadi, serta pembiayaan rumah.

Perusahaan melalui PT PPA Finance menjalankan kegiatan Sewa Pembiayaan, Anjak Piutang, dan Pembiayaan Konsumen pada tahun 2024.

Kinerja Keuangan dan Profitabilitas

Per 31 Desember 2024, pendapatan usaha segmen pembiayaan yang dicatatkan oleh Perusahaan mencapai Rp15,51 miliar, mengalami penurunan 29,47% dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023 yang sebesar Rp21,99 miliar. Di sisi lain, jumlah aset segmen pembiayaan di tahun yang sama tercatat sebesar Rp365,61 miliar, naik 40,41% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp260,39 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset pada anjak piutang.

Financing

Business Activities

The Financing business segment carries out the following Group business activities:

1. Leasing, mainly for investment financing and working capital financing,
2. Factoring for working capital financing,
3. Consumer financing for four-wheeled vehicles as operational vehicles or private vehicles, as well as home financing.

The Company, through PT PPA Finance, carries out the activities of Finance Leasing, Factoring, and Consumer Financing in 2024.

Financial Performance and Profitability

As of December 31, 2024, the Company's financing segment operating revenue reached Rp15.51 billion, a decrease of 29.47%, compared to Rp21.99 billion as of December 31, 2023. Also, the financing segment total assets in the same year stood at Rp365.61 billion, an increase of 40.41% compared to the previous year's Rp260.39 billion. This is mainly due to an increase in factoring assets..

Segmen Segment	2024 (Rp-Juta) (Rp-Million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-Million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Nominal (Rp-Juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain Profit (Loss) and Other Comprehensive Income					
Pendapatan Usaha Operating Revenues	15.511	21.992	(6.481)	-29,47%	↓
Beban Usaha Operating Expenses	(26.086)	(62.394)	36.308	-58,19%	↓
Laba/(Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	(10.575)	(40.402)	29.827	-73,83%	↓
Pendapatan Bunga Interest income	74	140	(66)	-47,14%	↓
Penghasilan (Beban) Lain-Lain Other Income (Expenses)	1.051	49.081	(48.030)	-97,86%	↓
Laba/(Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan Income/(Loss) Before Tax	(9.450)	8.819	(18.269)	-207,16%	↓
Pajak Penghasilan Income Taxes	920	(8.809)	9.729	110,44%	↑
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan Income/(Loss) for the Year	(8.530)	10	(8.540)	-85.400,00%	↓
Posisi Keuangan Financial Position					
Total Aset Total Assets	365.612	260.388	105.224	40,41%	↑
Total Liabilitas Total Liabilities	136.425	22.808	113.617	498,15%	↑
Total Ekuitas Total Equity	229.187	237.580	(8.393)	-3,53%	↓
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	365.612	260.388	105.224	40,41%	↑

Tinjauan Keuangan

Financial Review

Tinjauan keuangan dalam laporan tahunan mencakup analisis dan pembahasan terkait kinerja keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023. Laporan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material.

Laporan Keuangan Konsolidasian PT Perusahaan Pengelolaan Aset disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang mencakup Pernyataan serta Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia, serta mengikuti ketentuan pasar modal yang berlaku.

The analysis and discussion of the financial performance in the annual report refers to the Consolidated Financial Report for the years ending December 31, 2024 and December 31, 2023. These reports were audited by the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan with a fair in all material respects opinion.

PT Perusahaan Pengelolaan Aset Consolidated Financial Statements were prepared and presented in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards, namely the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK), which includes Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board ("DSAK") of the Indonesian Institute of Accountants and the applicable capital market regulations.

Posisi Keuangan Financial Position	2024 (Rp-Juta) (Rp-million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Nominal (Rp-Juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Aset Lancar Current Assets	5.485.189	4.573.918	911.271	19,92%	↑
Aset Tidak Lancar Non Current Assets	11.981.895	12.800.000	(818.105)	-6,39%	↓
Total Aset Total Assets	17.467.084	17.373.918	93.166	0,54%	↑
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	3.295.202	2.549.473	745.729	29,25%	↑
Liabilitas Jangka Panjang Non Current Liabilities	2.938.769	4.166.121	(1.227.352)	-29,46%	↓
Total Liabilitas Total Liabilities	6.233.971	6.715.594	(481.623)	-7,17%	↓
Total Ekuitas Total Equity	11.233.113	10.658.324	574.789	5,39%	↑
Total Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	17.467.084	17.373.918	93.166	0,54%	↑

Merujuk pada tabel di atas, posisi keuangan konsolidasian PPA pada tahun 2024 menunjukkan perubahan bila dibandingkan dengan tahun 2023. Total aset mengalami peningkatan sebesar 0,54%, sementara total liabilitas tercatat menurun sebesar 7,17%. Di sisi lain, total ekuitas mengalami peningkatan sebesar 5,39%.

Berikut ini disampaikan uraian mengenai laporan posisi keuangan konsolidasian PPA tahun 2024 yang dibandingkan dengan tahun 2023, disertai dengan penjabaran mengenai faktor-faktor yang memengaruhi perubahan tersebut serta implikasinya terhadap kondisi keuangan PPA.

Referring to the table above, PPA's consolidated financial position in 2024 shows changes compared to 2023. Total assets increased by 0.54%, while total liabilities decreased by 7.17%, while total equity increased by 5.39%.

The following explains PPA's consolidated financial position report for 2024 compared to 2023, together with an explanation of the factors influencing the changes and their implications on PPA's financial condition.

Aset

Pada 31 Desember 2024, total aset Perusahaan mencapai Rp17.467,08 miliar, yaitu meningkat sebesar 0,54% atau setara dengan Rp93,17 miliar bila dibandingkan dengan Rp17.373,92 miliar pada 31 Desember 2023. Hal ini didorong oleh meningkatnya aset lancar lainnya.

Berikut adalah penjelasan dan analisis lebih jauh mengenai peningkatan aset Perusahaan pada tahun 2024 yang dibandingkan dengan tahun 2023.

Aset Lancar

Aset Lancar Current Assets	2024 (Rp-Juta) (Rp-million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Nominal (Rp-Juta) (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	1.151.197	1.056.936	94.261	8,92%	↑
Pinjaman Investasi Jangka Pendek Short Term Investment Loans					
Pihak Berelasi a. Related Parties	294.766	330.994	(36.228)	-10,95%	↓
Pihak Ketiga b. Third Parties	279.700	344.120	(64.420)	-18,72%	↓
Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortasi Financial Assets at Amortized Cost	-	4.840	(4.840)	-	↑
Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi Financial Assets at Fair Value through Profit and Loss	1.153.646	1.098.394	55.252	5,03%	↑
Piutang Usaha Accounts Receivable					
Pihak Berelasi a. Related Parties	172.091	137.976	34.115	24,73%	↑
Pihak Ketiga b. Third Parties	679.501	787.330	(107.829)	-13,70%	↓
Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan Loans Receivables - Bailout Funds					
Pihak Berelasi a. Related Parties	920.037	625.144	294.893	47,17%	↑
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka Advances and Prepaid Expenses	6.437	7.567	(1.130)	-14,93%	↓
Pajak Dibayar di Muka Prepaid Taxes	98.929	100.910	(1.981)	-1,96%	↓
Cessie Piutang Jangka Pendek Short-term Cessie Receivables	78.128	53.475	24.653	46,10%	↑
Aset Lancar Lainnya Other Current Assets	650.757	26.232	624.525	2.380,78%	↑
Jumlah Aset lancar Total Current Assets	5.485.189	4.573.918	911.271	19,92%	↑

Hingga akhir 2024, total aset lancar tercatat sebesar Rp5.485,19 miliar, mengalami peningkatan sebesar 19,92% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp4.573,92 miliar. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya aset lancar lainnya.

Assets

As of December 31, 2024, the Company's total assets stood at Rp17,467.08 billion, an increase of 0.54%, or Rp93.17 billion compared to Rp17,373.92 billion as of December 31, 2023. This was mainly due to an increase in other current assets.

The following shows a further explanation and analysis regarding the increase in the Company's assets in 2024 compared to 2023.

Current Assets

At the end of 2024, total current assets stood at Rp5,485.19 billion, an increase of 19.92% compared to Rp4,573.92 billion in 2023. This was due to an increase in other current assets.

Kas dan Setara Kas

Perusahaan mencatatkan kas dan setara kas tercatat sebesar Rp1.151,20 miliar di tahun 2024, mengalami kenaikan sebesar 8,92% dibandingkan dengan nilai di tahun 2023 yang mencapai Rp1.056,94 miliar. Adapun peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya deposito berjangka.

Pinjaman Investasi Jangka Pendek

Pinjaman investasi jangka pendek PPA per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp574,47 miliar, mengalami penurunan sebesar 14,91% dibandingkan dengan Rp675,11 miliar pada tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya saldo pinjaman investasi pihak ketiga karena adanya pembayaran dari debitur.

Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Pada tahun 2024, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi tercatat nihil, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp4,84 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh penjualan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

PPA mencatatkan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sebesar Rp1.153,65 miliar per 31 Desember 2024, meningkat 5,03% dibanding nilai yang tercatat per 31 Desember 2023, yaitu sebesar Rp1.098,39 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai wajar atas kepemilikan saham PPA pada PT Arta Integrasi Teknologi.

Piutang Usaha

Piutang usaha Perusahaan tercatat sebesar Rp851,59 miliar di tahun 2024, yaitu mengalami penurunan 7,97% atau setara dengan Rp73,71 miliar bila dibandingkan tahun 2023 yang tercatat Rp925,31 miliar. Penurunan ini terjadi karena menurunnya piutang klaim kepada pihak berelasi dan piutang dividen kepada pihak ketiga.

Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan Pihak Berelasi

Per 31 Desember, pinjaman yang diberikan - dana talangan pihak berelasi sebesar Rp920,04 miliar, mengalami kenaikan sebesar Rp294,89 miliar atau 47,17% bila dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yang mencapai Rp625,14 miliar. Hal ini terutama didorong oleh meningkatnya penyaluran pinjaman yang diberikan kepada BUMN Titip Kelola.

Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka

PPA mencatatkan penurunan uang muka dan biaya dibayar di muka sebesar Rp1,13 miliar atau setara dengan 14,93% dari tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp7,57 miliar menjadi Rp6,44 miliar di tahun 2024. Hal ini terjadi karena penurunan biaya dibayar dimuka.

Pajak Dibayar di Muka

Pada tahun 2024, pajak dibayar di muka PPA tercatat sebesar Rp98,93 miliar. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar Rp1,98 miliar atau 1,96% dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp100,91 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya pajak pertambahan nilai Perusahaan.

Cash and Cash Equivalents

The Company's cash and cash equivalents reached Rp1,151.20 billion in 2024, an increase of 8.92% compared to Rp1,056.94 billion in 2023. This increase was mainly due to the increase in time deposits.

Short Term Investment Loans

PPA's short-term investment loans as of December 31, 2024 were Rp574.47 billion, a decrease of 14.91% compared to Rp675.11 billion the previous year. This decrease was due to a decrease in third-party investment loans. This decrease was due to a decrease in the balance of third party investment loans due to payments from debtors.

Financial Assets at Amortized Cost

In 2024, financial assets at amortized cost were nil, a decrease from the previous year's Rp4.84 billion. This decrease was due to the sale of financial assets at amortized cost.

Financial Assets at Fair value through Profit and Loss

As of December 31, 2024, PPA's financial assets at fair value through profit and loss were Rp1,153.65 billion, an increase of 5.03% compared to Rp1,098.39 billion as of December 31, 2023, which was. This is mainly due to an increase in the fair value of PPA's shareholding in PT Arta Integrasi Teknologi.

Account Receivables

In 2024, the Company's account receivables were Rp851.59 billion, a decrease of 7.97%, or Rp73.71 billion compared to Rp925.31 billion in 2023. This decrease was due to a decrease in claims receivables to related parties and dividend receivables to third parties.

Loans Receivables – Related Party Bailout Funds

As of December 31, Loans Receivables – Related Party Bailout Funds amounted to Rp920.04 billion, an increase of Rp294.89 billion, or 47.17% compared to Rp625.14 billion as of December 31, 2023. This was mainly due to an in loans given to BUMN Under Management.

Advances and Prepaid Expenses

PPA advances and prepaid expenses decreased by Rp1.13 billion, or 14.93% from Rp7.57 billion in 2023 to Rp6.44 billion in 2024. This was due to a decrease in prepaid expenses.

Prepaid Taxes

In 2024, PPA's prepaid taxes were Rp98.93 billion, a decrease of Rp1.98 billion, or 1.96% compared to the previous year's Rp100.91 billion. This was mainly due to a decrease in the Company's value added tax.

Cessie Piutang Jangka Pendek

Cessie piutang jangka pendek tercatat sebesar Rp78,13 miliar sepanjang tahun 2024, yaitu mengalami peningkatan sebesar Rp24,65 miliar atau 46,10% bila dibandingkan dengan nilai yang tercatat pada tahun 2023, yaitu sebesar Rp54,48 miliar. Kenaikan ini disebabkan terdapat peningkatan cessie piutang yang akan jatuh tempo dalam 1 tahun.

Aset Lancar Lainnya

Perusahaan mencatatkan kenaikan aset lancar lainnya sebesar 2.380,78% atau senilai Rp624,53 miliar menjadi Rp650,78 miliar pada tahun 2024. Adapun tahun sebelumnya PPA mencatatkan aset lancar lainnya sebesar Rp26,23 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya deposito berjangka dan obligasi yang dijamin jangka pendek.

Aset Tidak Lancar

Short Term Cessie Receivables

In 2024, Short-term cessie receivables reached Rp78.13 billion, an increase of Rp24.65 billion, or 46.10% compared to Rp54.48 billion in 2023. This increase is due to an increase in cessies receivables due with in 1 year.

Other Current Assets

The Company's other current assets increased by 2,380.78%, or Rp624.53 billion to reach Rp650.78 billion in 2024, compared to the previous year's Rp26.23 billion. This increase was mainly due to time deposits and short-term collateralized bonds.

Non-current Assets

Tabel Aset Tidak Lancar Tahun 2023-2024
Non-current Assets 2023-2024

Aset Tidak Lancar Non-current Assets	2024 (Rp-Juta) (Rp-million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Nominal (Rp-Juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lainnya Financial Assets at Fair Value Through Other Comprehensive Income	8.317.327	7.879.550	437.777	5,56%	↑
Investasi pada Sukuk Investments in Sukuk	272.494	499.100	(226.606)	-45,40%	↓
Pinjaman yang Diberikan – Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi - Pihak Berelasi Loan Receivables - Restructuring and/or Revitalization – Related Parties	530.595	535.080	(4.485)	-0,84%	↓
Properti Investasi Investment in Property	466.214	455.677	10.537	2,31%	↑
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	62.813	68.198	(5.385)	-7,90%	↓
Investasi pada Ventura Bersama dan Entitas Asosiasi Investment in Joint Ventures and Associated Entities	75.274	81.992	(6.718)	-8,19%	↓
Pinjaman Investasi Jangka Panjang Long Term investment Loans					
Pihak Berelasi a. Related Parties	1.162.006	1.499.816	(337.810)	-22,52%	↓
Pihak Ketiga b. Third Parties	56.879	55.420	1.459	2,63%	↑
Investasi Jangka Panjang Lainnya Other Long Term Investments	524.691	515.503	9.188	1,78%	↑
Investasi pada Efek Ekuitas Investments in Equity Securities	123.413	156.221	(32.808)	-21,00%	↓
Aset Tetap Fixed Assets	2.707	2.783	(76)	-2,73%	↓
Cessie Piutang Jangka Panjang Long Term Receivables Cessie					

Tabel Aset Tidak Lancar Tahun 2023-2024
 Non-current Assets 2023-2024

Aset Tidak Lancar Non-current Assets	2024 (Rp-Juta) (Rp-million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Nominal (Rp-Juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Pihak Berelasi a. Related Parties	39.344	39.344	0	0,00%	-
Pihak Ketiga b. Third Parties	262.405	258.160	4.245	1,64%	↑
Aset Hak Guna Right of Use Assets	69.576	38.357	31.219	81,39%	↑
Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non-current Assets	16.157	714.799	(698.642)	-97,74%	↓
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-current Assets	11.981.895	12.800.000	(818.105)	-6,39%	↓

Per 31 Desember 2024, jumlah aset tidak lancar yang dicatatkan oleh PPA adalah sebesar Rp11.981,90 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp818,11 miliar atau 6,39% bila dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yang mencapai Rp12.800,00 miliar. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh penurunan pinjaman investasi jangka panjang.

Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain

Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lainnya mencakup saham dan surat utang. Adapun total nilai tercatat pada tahun 2024 sebesar Rp8.317,33 miliar, meningkat sebesar Rp437,78 miliar atau 5,56% bila dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp7.879,55 miliar. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya nilai wajar investasi saham pada PT Indosat Tbk.

Investasi pada Sukuk

Per 31 Desember 2024, investasi pada sukuk tercatat sebesar Rp272,49 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp226,61 miliar atau 45,50% bila dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023 yang mencapai Rp499,10 miliar.

Pinjaman yang Diberikan – Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi – Pihak Berelasi

Perusahaan mencatatkan pinjaman yang diberikan – restrukturisasi dan/atau revitalisasi – pihak berelasi sebesar Rp530,60 miliar, turun sebesar Rp4,49 miliar atau 0,84% bila dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp535,08 miliar. Penurunan disebabkan oleh menurunnya saldo pokok dan bunga pinjaman kepada BUMN penugasan.

Properti Investasi

Per 31 Desember 2024, properti Investasi tercatat sebesar Rp466,21 miliar di tahun 2024, meningkat sebesar Rp10,54 miliar atau 2,31% bila dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp455,68 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan nilai wajar properti investasi tanah dan bangunan.

As of December 31, 2024, PPA's non-current assets reached Rp11,981.90 billion, a decrease of Rp818.11 billion, or 6.39% compared to Rp12,800.00 billion on December 31, 2023. The decrease was mainly due to a decrease in long-term investment loans.

Financial Assets at Fair Value through Other Comprehensive Income

Financial assets measured at fair value through other comprehensive income consists of shares and debt securities, which in 2024 stood at Rp8,317.33 billion, an increase of Rp437.78 billion, or 5.56% compared to Rp7,879.55 billion in 2023. This increase was mainly due to the increase in the fair value of stock investment in PT Indosat Tbk.

Investments in Sukuk

As of December 31, 2024, investments in sukuk was Rp272.49 billion, a decrease of Rp226.61 billion, or 45.50% compared to Rp499.10 billion as of December 31, 2023, which reached.

Loans Receivables – Restructuring and/or Revitalization – Related Parties

The Company's loans receivables - restructuring and/or revitalization - related parties was Rp530.60 billion, a decrease of Rp4.49 billion, or 0.84% compared to Rp535.08 billion in 2023. The decrease was due by a decrease in the principal balance and interest on loans to assigned BUMN.

Investment Property

As of December 31, 2024, Investment property was Rp466.21 billion, an increase of Rp10.54 billion, or 2.31% compared to Rp455.68 billion 2023. This increase was due to an increase in the fair value of investments in land and building properties.

Aset Pajak Tangguhan

PPA mencatatkan aset pajak tangguhan tercatat sebesar Rp62,81 miliar pada tahun 2024, mengalami penurunan Rp5,39 miliar atau sebesar 7,90% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp68,20 miliar. Hal tersebut dipengaruhi oleh menurunnya aset pajak tangguhan PPA Induk.

Investasi pada Ventura Bersama dan Entitas Asosiasi

Sepanjang tahun 2024, investasi pada ventura bersama dan entitas asosiasi PPA tercatat sebesar Rp75,27 miliar, turun sebesar Rp6,72 miliar atau 8,19% bila dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp81,99 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya nilai investasi Perusahaan pada ventura bersama.

Pinjaman Investasi Jangka Panjang

PPA mencatatkan penurunan pinjaman investasi jangka panjang di tahun 2024 sebesar Rp336,35 miliar, dari Rp1.555,24 miliar di tahun 2023 menjadi Rp1.218,89 miliar di tahun 2024. Penurunan ini terjadi karena menurunnya saldo pinjaman investasi pihak berelasi sehubungan dengan penerimaan pembayaran dari debitur.

Investasi Jangka Panjang Lainnya

Hingga akhir 2024, investasi jangka panjang lainnya tercatat sebesar Rp524,69 miliar, meningkat sebesar Rp9,19 miliar atau 1,78% bila dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp515,50 miliar per 31 Desember 2023. Hal ini terutama didorong oleh penurunan cadangan kerugian penurunan nilai atas investasi jangka panjang lainnya.

Investasi pada Efek Ekuitas

Investasi pada Efek Ekuitas Perusahaan di tahun 2024 tercatat sebesar Rp123,41 miliar, turun sebesar Rp32,81 miliar atau 21,00% bila dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp156,22 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya nilai wajar investasi pada entitas anak yang tidak dikonsolidasi.

Aset Tetap

Per 31 Desember 2024, PPA mencatatkan aset tetap sebesar Rp2,71 miliar, turun sebesar Rp0,08 miliar atau setara 2,73% bila dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp2,78 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh penambahan depresiasi aset tetap selama tahun berjalan.

Cessie Piutang Jangka Panjang

Perusahaan mencatatkan cessie piutang jangka panjang tahun 2024 sebesar Rp301,75 miliar, mengalami peningkatan Rp4,25 miliar atau sebesar 1,43% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp297,50 miliar pada tanggal 31 Desember 2023. Hal tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan saldo cessie piutang pihak kepada ketiga.

Aset Hak Guna

Pada tahun 2024, jumlah aset hak guna mencapai Rp69,58 miliar. Angka ini menunjukkan kenaikan 81,39% atau senilai Rp31,22 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp38,36 miliar. Kenaikan ini disebabkan oleh penambahan sewa bangunan perusahaan.

Deferred Tax Assets

In 2024, PPA's deferred tax assets were Rp62.81 billion, a decrease of Rp5.39 billion, or 7.90% compared to Rp68.20 billion in 2023. This was due to a decrease in deferred tax assets of the PPA Parent.

Investment in Joint Ventures and Associated Entities

During 2024, investment in joint ventures and PPA associated entities was Rp75.27 billion, a decrease of Rp6.72 billion, or 8.19% compared to Rp81.99 billion in 2023. This decrease was due to a decrease in the Company's joint venture investments.

Long Term Investment Loans

In 2024, PPA's long-term investment loans decreased by Rp336.35 billion from Rp1,555.24 billion in 2023 to Rp1,218.89 billion in 2024. This decrease was due to a decrease in the balance of related party investment loans due to the receipt of payments from debtors.

Other Long Term Investments

At the end of 2024, other long-term investments were Rp524.69 billion, an increase of Rp9.19 billion, or 1.78% compared to Rp515.50 billion as at December 31, 2023. This was mainly due to a decrease in the allowance for impairment losses on other long-term investments.

Investment in Equity Securities

In 2024, the Company's Investment in Equity Securities was Rp123.41 billion, a decrease of Rp32.81 billion, or 21.00% compared to Rp156.22 billion in 2023. This decrease was mainly due to a decrease in the fair value of investments in unconsolidated subsidiaries.

Fixed Assets

As of December 31, 2024, PPA's fixed assets stood at Rp2.71 billion, a decrease of Rp0.08 billion, or 2.73% compared to Rp2.78 billion in 2023. This was due to the increased depreciation of fixed assets during the current year.

Long Term Cessie Receivables

In 2024, the Company's long-term cessie receivables was Rp301.75 billion, an increase of Rp4.25 billion, or 1.43% compared to Rp297.50 billion on December 31, 2023. This was mainly due to the increase in the balance of third party cessie receivables.

Right of Use Assets

In 2024, total right to use assets reached Rp69.58 billion, an increase of 81.39%, or Rp31.22 billion compared to Rp38.36 billion in 2023. This increase was due to the increase in the Company's building rent.

Aset Tidak Lancar Lainnya

Perusahaan membukukan aset tidak lancar lainnya sebesar Rp16,16 miliar di tahun 2024, yaitu turun 97,74% atau setara Rp698,64 miliar bila dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp714,80 miliar. Hal ini disebabkan oleh penurunan obligasi dan deposito berjangka yang dijaminkan.

LIABILITAS

Per 31 Desember 2024, liabilitas konsolidasian tercatat sebesar Rp6.233,97 miliar di tahun 2024, menurun sebesar Rp481,62 miliar atau 7,17% bila dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp6.715,59 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya jumlah liabilitas jangka panjang.

Berikut adalah penjelasan dan analisis mengenai penurunan liabilitas konsolidasian pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023.

Liabilitas Jangka Pendek

Other Non-Current Assets

In 2024, the Company's other non-current assets stood at Rp16.16 billion, a decrease of 97.74%, or Rp698.64 billion compared to Rp714.80 billion in 2023. This was due to a decrease in bonds and time deposits that were pledged as collateral.

LIABILITIES

As of December 31, 2024, consolidated liabilities were Rp6,233.97 billion, a decrease of Rp481.62 billion, or 7.17% compared to Rp6,715.59 billion in 2023. This decrease was mainly due to a decrease in the total long-term liabilities.

The following shows an explanation and analysis of the decrease in consolidated liabilities in 2024 compared to 2023.

Current Liabilities

Tabel Liabilitas Jangka Pendek Tahun 2023-2024
Current Liabilities 2023-2024

Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	2024 (Rp-Juta) (Rp-million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Nominal (Rp-Juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Utang Usaha Accounts Payable					
Pihak Berelasi Related Parties	-	-	-	-	-
Pihak Ketiga Third Parties	11.292	10.010	1.282	12,81%	↑
Pinjaman Bank Jangka Pendek Current Bank Loans					
Pihak Berelasi Related Parties	812.557	844.284	(31.727)	-3,76%	↓
Pihak Ketiga Third Parties	566.838	902.711	(335.873)	-37,21%	↓
Utang Surat Berharga Debt Securities	199.408	-	199.408	100,00%	↑
Bagian Jangka Pendek dari Pinjaman Bank Jangka Panjang – Pihak Berelasi Short Term Portion of Long Term Bank Loans - Related Parties	-	4.000	(4.000)	-100,00%	↓
Utang Obligasi yang akan Jatuh Tempo dalam Satu Tahun Long-term Bank Loans Maturing in One Year	1.235.063	-	1.235.063	100,00%	↑
Utang Pajak Tax Payable	6.326	10.321	(3.995)	-38,71%	↓
Bagian Jangka Pendek dari Liabilitas Sewa Short Term Portion of Lease Liabilities	19.771	12.518	7.253	57,94%	↑
Beban Akrual dan Utang Lain-Lain Accrued Expenses and Other Payables	443.947	765.629	(321.682)	-42,02%	↓
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	3.295.202	2.549.473	745.729	29,25%	↑

Liabilitas jangka pendek Perusahaan per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp3.295,20 miliar, naik sebesar Rp745,73 miliar atau 29,25% bila dibandingkan posisi per 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp2.549,47 miliar. Adapun peningkatan ini disebabkan oleh adanya Utang Obligasi yang akan Jatuh Tempo dalam Satu Tahun.

As of December 31, 2024, the Company's current liabilities were stood at Rp3,295.20 billion, an increase of Rp745.73 billion, or 29.25% compared to Rp2,549.47 billion as of December 31, 2023. This increase was due to Payable that will Mature in One Year.

Utang Usaha

Utang usaha mencakup dari utang usaha pihak berelasi dan utang usaha pihak ketiga. Hingga akhir 2024, utang usaha tercatat sebesar Rp11,29 miliar, meningkat sebesar Rp1,28 miliar atau 12,81% bila dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp10,01 miliar. Hal ini dikarenakan meningkatnya utang usaha atas transaksi operasional kepada pihak ketiga.

Pinjaman Bank Jangka Pendek

Perusahaan mencatatkan pinjaman bank jangka pendek sebesar sebesar Rp1.379,40 miliar, turun sebesar Rp367,60 miliar atau 21,04% bila dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp1.747,00 miliar. Hal ini terutama didorong oleh penurunan saldo pinjaman bank pihak ketiga karena pembayaran yang dilakukan Perusahaan.

Utang Surat Berharga

Per 31 Desember 2024, utang surat berharga mengalami peningkatan dari tahun 2023 yang tercatat nihil menjadi Rp199,41 miliar di tahun 2024. Hal ini terjadi karena adanya penerbitan surat berharga komersial berkelanjutan.

Bagian Jangka Pendek dari Pinjaman Bank Jangka Panjang

Sepanjang tahun 2024, bagian jangka pendek dari pinjaman bank jangka panjang tercatat nihil, yaitu mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp4,00 miliar. Hal ini disebabkan turunnya saldo bagian jangka pendek dari pinjaman bank jangka panjang entitas anak pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Utang Obligasi yang Akan Jatuh Tempo dalam Satu Tahun

Utang obligasi yang akan jatuh tempo dalam satu tahun mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat nihil menjadi sebesar Rp1.235,06 miliar di tahun 2024. Hal ini terjadi karena adanya obligasi yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan, yaitu Obligasi I seri B dan II seri A.

Utang Pajak

PPA mencatatkan utang pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp6,33 miliar, turun sebesar Rp4,00 miliar atau 38,71% bila dibandingkan posisi per 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp10,32 miliar. Adapun penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya utang pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 23.

Beban Akrua dan Utang Lain-lain

Hingga akhir 2024, beban akrual dan utang lain-lain tercatat sebesar Rp443,95 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp321,68 miliar atau 42,02% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp765,63 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh menurunnya utang lain-lain.

Accounts Payable

Accounts payable consist of accounts payables from related parties and third parties. At the end of 2024, accounts payables reached Rp11.29 billion, an increase of Rp1.28 billion, or 12.81% compared to Rp10.01 billion in 2023. This was due to the increase in accounts payable to third parties for operational transactions.

Current Bank Loans

The Company's short-term bank loans reached Rp1,379.40 billion, a decrease of Rp367.60 billion, or 21.04% compared to Rp1,747.00 billion in 2023. This was mainly due to a decrease in total third-party bank loans following payments made by the Company.

Commercial Paper

As of December 31, 2024, commercial paper had increased from zero in 2023 to Rp199.41 billion in 2024. This was due to the issuance of sustainable commercial paper.

Current Portion of Long Term Bank Loans

During 2024, the current portion of long-term bank loans was zero, a decrease compared to Rp4.00 billion in 2023. This was due to a decrease in the balance of the short-term portion of the subsidiary's long-term bank loan at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Bonds Payable Maturing in One Year

Bonds maturing in one year increased from zero in 2023 to Rp1,235.06 billion in 2024. This was due to bonds maturing in 12 months, namely Bonds I series B and II series A.

Tax Payable

PPA's tax payable as of December 31, 2024 was Rp6.33 billion, a decrease of Rp4.00 billion or 38.71% when compared to Rp10.32 billion as of December 31, 2023. This decrease was mainly due to a decrease in income tax Article 21 and Article 23.

Accrued Expenses and Other Payables

At the end of 2024, accrued expenses and other payables were Rp443.95 billion, a decrease of Rp321.68 billion, or 42.02% compared to the previous year's Rp765.63 billion. This decrease was mainly due to a decrease in other payables.

Liabilitas Jangka Panjang

Non-Current Liabilities

Tabel Liabilitas Jangka Panjang Tahun 2023-2024
Non-Current Liabilities 2023-2024

Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	2024 (Rp-Juta) (Rp-million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Nominal (Rp-Juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan Employee Benefit Liabilities	22.157	24.151	(1.994)	-8,26%	↓
Pinjaman Bank Jangka Panjang Non-Current Bank Loans					
Pihak Berelasi a. Related Parties	349.598	345.598	4.000	1,16%	↑
Utang Obligasi Bonds Payable	987.378	2.220.911	(1.233.533)	-55,54%	↓
Liabilitas Sewa Lease Liabilities	34.535	20.358	14.177	69,64%	↑
Utang Sukuk - Neto Sukuk Payable - Net	1.512.758	1.555.103	(42.345)	-2,72%	↓
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya Other Non-Current Liabilities	32.343	-	32.343	-	↑
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	2.938.769	4.166.121	(1.227.352)	-29,46%	↓

PPA mencatatkan liabilitas jangka panjang tahun 2024 sebesar Rp2.938,77 miliar, mengalami penurunan Rp1.227,35 miliar atau sebesar 29,46% jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp4.166,12 miliar. Hal tersebut dipengaruhi oleh menurunnya utang Obligasi jangka panjang..

In 2024, PPA's long-term liabilities stood at Rp2,938.77 billion, a decrease of Rp1,227.35 billion, or 29.46% compared to Rp4,166.12 billion in 2023. This was due to a decrease in long-term Bonds Payable.

Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan

Liabilitas imbalan kerja karyawan terdiri mencakup imbalan kerja karyawan Perseroan dan entitas anak. Adapun liabilitas imbalan kerja karyawan hingga akhir 2024 sebesar Rp22,16 miliar, turun sebesar Rp1,99 miliar atau 8,26% bila dibandingkan tahun 2023 yang tercatat senilai Rp24,15 miliar. Hal ini terutama dikarenakan oleh menurunnya liabilitas imbalan kerja karyawan PPA Induk.

Employee Benefits Liabilities

Employee benefits liabilities consist of employee benefits of the Company and its subsidiaries. The employee benefits liabilities at the end of 2024 amounted to Rp22.16 billion, a decrease of Rp1.99 billion, or 8.26% compared to Rp24.15 billion in 2023. This was mainly due to the decrease in employee benefit liabilities in PPA Parent Company.

Pinjaman Bank Jangka Panjang – Pihak Berelasi

Hingga Desember 2024, pinjaman bank jangka panjang pihak berelasi tercatat sebesar Rp349,60 miliar, meningkat sebesar Rp4,00 miliar atau 1,16% bila dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yang mencapai Rp345,60 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya Obligasi Jangka Panjang, sehubungan dengan akan jatuh temponya Obligasi I seri B dan II seri A.

Long Term Bank Loans – Related Parties

By December 2024, long-term bank loans from related parties were Rp349.60 billion, an increase of Rp4.00 billion, or 1.16% compared to Rp345.60 billion on December 31, 2023. This was mainly due to an increase in the long-term bank loans of subsidiaries at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Utang Obligasi

PPA mencatatkan utang obligasi pada tahun 2024 sebesar Rp987,38 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp1.233,53 miliar atau 55,54% bila dibandingkan dengan dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp2.220,91 miliar. Penurunan ini dipengaruhi oleh adanya pelunasan Pokok Obligasi II Seri A.

Bonds Payables

PPA's bonds payables in 2024 were Rp987.38 billion, a decrease of Rp1,233.53 billion, or 55.54% compared to Rp2,220.91 billion in 2023. This decrease was due to a decrease in Long-Term Bonds, in connection with the upcoming maturity of Bonds I series B and II series A..

Liabilitas Sewa

Per 31 Desember 2024, Perusahaan mencatatkan liabilitas sewa sebesar Rp34,54 miliar, naik sebesar Rp14,18 miliar atau 69,64% bila dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yang mencapai Rp20,36 miliar. Hal ini disebabkan oleh penambahan sewa jangka panjang yang dilakukan perusahaan.

Lease Liabilities

As of December 31, 2024, the Company's lease liabilities were Rp34.54 billion, an increase of Rp14.18 billion, or 69.64% compared to Rp20.36 billion as of December 31, 2023. This was due to the addition of long-term leases made by the company.

Utang Sukuk – Neto

Perusahaan mencatatkan utang sukuk - neto sebesar Rp1.512,76 miliar, menurun sebesar Rp42,35 miliar atau 2,72% bila dibandingkan tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp1.555,10 miliar.

Sukuk Payable – Net

The Company's sukuk payable - net was Rp1,512.76 billion, a decrease of Rp42.35 billion, or 2.72% compared to Rp1,555.10 billion in 2023. This was due to the increase in other comprehensive income on financial assets.

Ekuitas

Equity

Tabel Ekuitas Tahun 2023-2024
Equity 2023-2024

Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	2024 (Rp-Juta) (Rp-million)	2023 (Rp-Juta) (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Nominal (Rp-Juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Equity Attributable to Owner of the Parent Entity					
Modal Saham Share Capital	5.668.998	5.668.998	0	0,00%	-
Tambahan Modal Disetor Additional Paid-in Capital	(1.386.916)	(1.386.916)	0	0,00%	-
Saldo Laba Retained Earnings:					
Telah Ditentukan Penggunaannya Appropriated	819.199	543.546	275.653	50,71%	↑
Belum Ditentukan Penggunaannya Unappropriated	529.329	649.612	(120.283)	-18,52%	↓
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali Difference in Value of Restructuring Transactions Between Entities Under Common Control	305.768	305.768	0	0,00%	-
Laba Belum Direalisasi dari Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lainnya Unrealized Gain on Financial Assets Measured at Fair Value through Other Comprehensive Income	5.281.655	4.862.946	418.709	8,61%	↑
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Kewajiban Imbalan Pascakerja Actuarial Gain (Loss) on Post-Employment Benefit Obligations	15.090	14.380	710	4,94%	↑
Jumlah ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Total equity attributable to the owners of the parent entity	11.233.123	10.658.334	574.789	5,39%	↑
Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling interests	(10)	(10)	0	0,00%	-
Jumlah Ekuitas Total Equity	11.233.113	10.658.324	574.789	5,39%	↑

31 Desember 2024, jumlah ekuitas konsolidasian tercatat sebesar Rp11.233,11 miliar, yaitu mengalami peningkatan sebesar 5,39% bila dibandingkan posisi per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp10.658,32 miliar. Peningkatan ekuitas pada tahun 2024 ini dijelaskan lebih lanjut dalam uraian berikut.

As of December 31, 2024, the total consolidated equity was Rp11,233.11 billion, an increase of 5.39% compared to Rp10,658.32 billion as of December 31, 2023, which was. The increase in equity in 2024 is further explained as follows.

Modal Saham

Modal saham pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp5.669,00 miliar, yaitu tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan tahun 2023.

Share Capital

Share capital in 2024 stood at IDR5,669.00 billion, unchanged compared to 2023.

Tambahan Modal Disetor

Hingga 31 Desember 2024, tambahan modal disetor PPA tercatat sebesar minus Rp1.386,92 miliar, tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023.

Saldo Laba

Saldo laba mencakup saldo laba yang telah ditetapkan penggunaannya maupun yang belum ditetapkan. Hingga 31 Desember 2024, total saldo laba tercatat sebesar Rp1.348,53 miliar, yaitu mengalami kenaikan sebesar Rp155,37 miliar atau 13,20% bila dibandingkan dengan posisi pada 31 Desember 2023 yang tercatat Rp1.193,16 miliar. Peningkatan ini terutama didorong oleh meningkatnya saldo laba telah ditentukan penggunaannya.

Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

Per 31 Desember 2024, selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali tercatat sebesar Rp305,77 miliar. Nilai tersebut tidak mengalami perubahan dari posisi yang tercatat pada 31 Desember 2023, yang juga sebesar Rp305,77 miliar.

Laba Belum Direalisasi dari Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain

Sampai dengan akhir tahun 2024, laba belum direalisasi dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain tercatat sebesar Rp5.281,66 miliar. Jumlah ini menunjukkan peningkatan sebesar 8,61% atau senilai Rp418,71 miliar bila dibandingkan dengan posisi pada akhir tahun 2023 yang mencapai Rp4.862,95 miliar. Hal ini dipengaruhi peningkatan penghasilan komprehensif lain atas aset keuangan.

Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Kewajiban Imbalan Pascakerja

PPA mencatatkan keuntungan (kerugian) aktuarial atas kewajiban imbalan pascakerja pada tahun 2024 sebesar Rp15,09 miliar, yaitu mengalami kenaikan sebesar 4,94% jika dibandingkan dengan nilai pada 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp14,38 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh penyesuaian penghasilan komprehensif lain atas kewajiban imbalan pascakerja.

Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada akhir tahun 2024 mencapai Rp11.233,12 miliar, meningkat 5,39% atau senilai Rp574,79 miliar bila dibandingkan dengan Rp10.658,33 miliar yang tercatat pada akhir tahun 2023. Pertumbuhan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba belum direalisasi dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Kepentingan Nonpengendali

Kepentingan nonpengendali yang dapat diatribusikan tercatat minus Rp10 miliar pada akhir tahun 2024, yaitu tidak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan tahun 2023.

Additional Paid-in Capital

As of December 31, 2024, PPA's additional paid-in capital stood at minus Rp1,386.92 billion, unchanged compared to the position as of December 31, 2023.

Retained Earnings

Retained earnings consist of retained earnings whose use has been determined and retained earnings whose use has not been determined. As of December 31, 2024, the total retained earnings stood at Rp1,348.53 billion, an increase of Rp155.37 billion, or 13.20% compared to Rp1,193.16 billion as of December 31, 2023. This increase was mainly due to the increase in retained earnings whose use has been determined.

Difference In The Value Of Restructuring Transactions Between Entities Under Common Control

As of December 31, 2024, the difference in the value of restructuring transactions between entities under common control was Rp305.77 billion, which was unchanged from December 31, 2023.

Unrealized gain from Securities Measured at Fair Value through Other Comprehensive Income

At the end of 2024, unrealized gain from securities measured at fair value through other comprehensive income was Rp5,281.66 billion, an increase of 8.61%, or Rp418.71 billion compared to Rp4,862.95 billion at the end of 2023. This was due to the increase in other comprehensive income on financial assets.

Actuarial Gain (Loss) on Post-Employment Benefit Obligations

PPA's actuarial gain (loss) on post-employment benefit obligations in 2024 was Rp15.09 billion, an increase of 4.94% compared to Rp14.38 billion on December 31, 2023. This increase was due to adjustments to other comprehensive income for post-employment benefit obligations.

Total Equity Attributable to the Owners of the Parent Entity

Total equity attributable to owners of the parent entity at the end of 2024 reached Rp11,233.12 billion, an increase of 5.39%, or Rp574.79 billion compared to Rp10,658.33 billion at the end of 2023. This growth was mainly due to an increase in unrealized profits from financial assets measured at fair value through other comprehensive income.

Non-controlling interests

At the end of 2024, attributable non-controlling interests stood at minus Rp10 billion, unchanged compared to 2023.

LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME

Tabel Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Tahun 2023-2024
Statement Of Profit Or Loss And Other Comprehensive Income 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Nominal (Rp-Juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Pendapatan Usaha Operating Revenues	1.662.604	1.673.140	(10.536)	-0,63%	↓
Beban Usaha Operating Expenses	(1.486.782)	(1.380.488)	(106.294)	7,70%	↑
Laba Usaha Operating Income	175.822	292.652	(116.830)	-39,92%	↓
Pendapatan Bunga Interest Income	38.230	52.562	(14.332)	-27,27%	↓
Beban Bunga dan Keuangan Interest and Finance Expenses	(8.516)	(10.682)	2.166	-20,28%	↓
Kenaikan Nilai Wajar Properti Investasi Increase in Fair Value of Investment Properties	10.537	716	9.821	1.371,65%	↑
Bagian Laba Ventura Bersama Share of Joint Venture Profit	(2.718)	(1.854)	(864)	46,60%	↑
Penghasilan (Beban) Lain-lain Other income (Expenses)	(2.800)	(5.283)	2.483	-47,00%	↓
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	210.555	328.111	(117.556)	-35,83%	↓
(Beban) Manfaat Pajak Penghasilan (Expense) Benefits of Income Tax	(5.185)	(2.470)	(2.715)	109,92%	↑
Laba Tahun Berjalan Current Year Profit	205.370	325.641	(120.271)	-36,93%	↓
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income					
Pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi Items that will not be reclassified to profit or loss					
Aset Keuangan yang diukur pada nilai wajar Financial Assets Measured at Fair Value	418.709	2.474.520	(2.055.811)	-83,08%	↓
Keuntungan (Kerugian) Aktualial atas Liabilitas Imbalan Pasti Actuarial Gain (Loss) on Defined Benefit Liabilities	910	2.256	(1.346)	-59,66%	↓
Pajak Penghasilan Terkait Related Income Taxes	(200)	(498)	298	-59,84%	↓
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Total Other Comprehensive Income	419.419	2.476.278	(2.056.859)	-83,06%	↓
Laba Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Current Year	624.789	2.801.919	(2.177.130)	-77,70%	↓
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Income for the Year Attributable to					
Pemilik Entitas Induk Owner of the Parent Entity	205.370	325.653	(120.283)	-36,94%	↓
Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling Interests	-	(12)	12	-100%	↓
Jumlah Total	205.370	325.641	(120.271)	-36,93%	↓
Laba Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Comprehensive Income for the Year Attributable to					
Pemilik Entitas Induk Owner of the Parent Entity	624.789	2.801.931	(2.177.142)	-77,7%	↓

Tabel Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Tahun 2023-2024
Statement Of Profit Or Loss And Other Comprehensive Income 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Nominal (Rp-Juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Kepentingan Non-Pengendali Non-controlling Interests	-	(12)	12	-100%	↓
Jumlah Total	624.789	2.801.919	(2.177.130)	-77,7%	↓
Total Laba per Saham (Nilai Penuh) Total Earnings Per Share (full amount)	33.184	53.295	(20.111)	-37,74%	↓

Pendapatan Usaha

Pendapatan usaha konsolidasian pada tahun 2024 mencapai Rp1.662,60 miliar, mengalami penurunan sebesar 0,63% atau senilai Rp10,54 miliar dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencatatkan Rp1.673,14 miliar. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh penurunan keuntungan atas investasi pada efek ekuitas.

Operating Revenues

Consolidated operating revenues in 2024 reached Rp1,662.60 billion, a decrease of 0.63%, or Rp10.54 billion compared to the previous year's Rp1,673.14 billion. This decrease was mainly due to a decrease in profits on investments in equity securities.

Tabel Pendapatan Usaha Tahun 2023-2024
Operating Revenues 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Nominal (Rp-Juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Pendapatan Hasil Investasi Investment Revenue	772.450	710.440	62.010	8,73%	↑
Pengelolaan NPL NPL Management	664.555	659.257	5.298	0,80%	↑
Keuntungan atas Investasi pada Efek Ekuitas Profits from Investment in Equity Securities	106.357	175.429	(69.072)	-39,37%	↓
Pinjaman yang Diberikan Loan Receivables	95.072	70.495	24.577	34,86%	↑
Pendapatan Imbalan Jasa Konsultasi Advisory Services	16.952	24.965	(8.013)	-32,10%	↓
Pendapatan Penggantian Biaya Reimbursable Cost Revenue	4.523	3.844	679	17,66%	↑
Pendapatan Lain-Lain Other Revenue	2.695	14.884	(12.189)	-81,89%	↓
Pendapatan Trading Trading Revenue	-	13.826	(13.826)	-100,00%	↓
Jumlah Total	1.662.604	1.673.140	(10.536)	-0,63%	↓

Dalam hal ini, Pendapatan Hasil Investasi menjadi penyumbang terbesar terhadap total pendapatan usaha konsolidasian, dengan kontribusi sebesar 46,46%. Dari segi pertumbuhan, Pendapatan Hasil Investasi mencatatkan kenaikan sebesar Rp62,01 miliar atau sekitar 8,73% dari Rp710,44 miliar di 2023 menjadi Rp772,45 miliar di tahun 2024.

Investment revenue became the largest contributor to the total consolidated operating revenue, with a contribution of 46.46%. In terms of growth, Investment revenue increased by Rp62.01 billion, or 8.73% from Rp710.44 billion in 2023 to Rp772.45 billion in 2024.

Beban Usaha

Beban usaha konsolidasian pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp1.486,78 miliar, meningkat 7,70% dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai Rp1.380,49 miliar. Peningkatan ini terutama dipengaruhi oleh kenaikan atas Penyisihan Penurunan Nilai.

Laba Usaha

Laba usaha konsolidasian pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp175,82 miliar, yaitu mengalami penurunan sebesar 39,92% dibandingkan perolehan tahun 2023 yang sebesar Rp292,65 miliar. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban usaha.

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga konsolidasian pada tahun 2024 mencapai Rp38,23 miliar, turun sebesar Rp14,33 miliar atau setara dengan 27,27% bila dibandingkan capaian tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp52,56 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pendapatan bunga deposito dan jasa giro.

Beban Bunga dan Keuangan

Per 31 Desember 2024, beban bunga dan keuangan konsolidasian mencapai Rp8,52 miliar, turun 20,28% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp10,68 miliar pada 2023. Penurunan tersebut utamanya disebabkan oleh penurunan beban pajak jasa giro.

Kenaikan Nilai Wajar Properti Investasi

Sepanjang tahun 2024, PPA mencatatkan peningkatan nilai wajar properti investasi sebesar Rp10,54 miliar, yaitu meningkat Rp9,82 miliar atau setara dengan 1.371,65% dari Rp0,72 miliar di tahun 2023. Hal ini didorong oleh peningkatan akumulasi perubahan nilai wajar tanah dan bangunan.

Bagian Rugi Bersih atas Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Sampai dengan 31 Desember 2024, PPA mencatatkan bagian rugi atas entitas asosiasi dan ventura bersama sebesar Rp2,72 miliar, yaitu naik sebesar Rp0,86 miliar atau setara dengan 46,60% bila dibandingkan dengan nilai di tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp1,85 miliar. Peningkatan ini dipengaruhi oleh peningkatan rugi ventura bersama ISN – LBD – PPA.

Penghasilan (Beban) Lain-lain

PPA mencatatkan beban lain-lain sebesar Rp2,8 miliar, turun 47,00% atau Rp2,49 miliar dari Rp5,28 miliar di tahun 2023. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh penurunan beban selisih kurs.

Laba Sebelum Pajak

Laba sebelum pajak diperoleh dari akumulasi berbagai komponen, termasuk laba usaha, pendapatan bunga, beban bunga dan keuangan, kenaikan nilai wajar properti investasi, beban pajak final, bagian rugi bersih atas entitas asosiasi dan ventura bersama, serta pendapatan atau beban lain-lain. Dalam hal ini, PPA mencatatkan laba sebelum

Operating expenses

Consolidated operating expenses in 2024 were Rp1,486.78 billion, an increase of 7.70% compared to Rp1,380.49 billion in 2023. This increase was mainly due to the increase in Allowances for Impairment.

Operating Profit

Consolidated operating profit in 2024 was Rp175.82 billion, a decrease of 39.92% compared to Rp292.65 billion in 2023. This was mainly due to the increase in operating expenses.

Interest income

Consolidated interest income in 2024 reached Rp38.23 billion, a decrease of Rp14.33 billion, or 27.27% compared to Rp52.56 billion in 2023. This decrease was mainly due to interest from deposits and current account services.

Interest and Finance Expenses

As of December 31, 2024, consolidated interest and finance expenses reached Rp8.52 billion, a decrease of 20.28% compared to the previous year's Rp10.68 billion. The decrease was mainly due to a decrease in the tax expense on current account services.

Increase in Fair Value of Investment Property

In 2024, PPA recorded an increase in the fair value of investment properties of Rp10.54 billion, an increase of Rp9.82 billion, or 1,371.65% compared to Rp0.72 billion in 2023. This was due to by an increase in the accumulated changes in the fair value of land and buildings.

Share of Net Losses in Associated Entities and Joint Ventures

As of December 31, 2024, PPA recorded a share of losses from associates and joint ventures of Rp2.72 billion, an increase of Rp0.86 billion, or 46.60% compared to Rp1.85 billion in 2023. This increase was due to an increase in ISN – LBD – PPA joint venture losses.

Other Revenue (Expenses)

PPA's other expenses reached Rp2.8 billion, a decrease of 47.00%, or Rp2.49 billion compared to Rp5.28 billion in 2023. This decrease was mainly due to a decrease in foreign exchange rate differences.

Profit Before Tax

Profit before tax is obtained from various components, including operating profit, interest income, interest and financial expenses, increase (decrease) in the fair value of investment properties, final tax expense, share of associated and joint ventures, and other revenue or expenses. PPA recorded a profit before tax of Rp210.56 billion,

pajak sebesar Rp210,56 miliar, turun 35,83% atau setara dengan Rp117,56 miliar bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat senilai Rp328,11 miliar.

Beban Pajak Penghasilan

PPA mencatatkan beban pajak penghasilan sebesar Rp5,19 miliar di tahun 2024, yaitu mengalami peningkatan sebesar Rp2,72 miliar atau 109,92% bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2,47 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya beban pajak penghasilan PPA Induk.

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan merupakan laba bersih yang diperoleh setelah memperhitungkan pajak penghasilan dengan laba sebelum pajak. Pada tahun 2024, Perseroan mencatatkan laba tahun berjalan sebesar Rp205,37 miliar, mengalami penurunan sebesar 36,93% atau senilai Rp120,27 miliar bila dibandingkan capaian tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp325,64 miliar. Adapun hal ini dipengaruhi oleh menurunnya laba usaha.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Laba komprehensif tahun berjalan merupakan hasil dari penjumlahan laba tahun berjalan dengan penghasilan komprehensif lainnya. Per 31 Desember 2024, Perusahaan mencatatkan laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp624,79 miliar, menurun 77,70% atau senilai Rp2.177,13 miliar bila dibandingkan posisi 31 Desember 2023 yang tercatat sebesar Rp2.801,92 miliar. Hal ini terutama dipengaruhi oleh menurunnya perubahan nilai wajar aset keuangan yang diukur nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Laba per Saham (Nilai Penuh)

Perhitungan laba per saham didasarkan pada laba tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk, dibagi dengan jumlah lembar saham dalam modal saham Perusahaan.

Sampai dengan akhir tahun 2024, laba per saham tercatat sebesar Rp33,184 (dalam rupiah penuh), menurun sebesar 37,74% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar Rp53,295 (dalam rupiah penuh).

a decrease of 35.83% or Rp117.56 billion compared to Rp328.11 billion in 2023.

Income Tax Expense

PPA's income tax expense was Rp5.19 billion in 2024, an increase of Rp2.72 billion, or 109.92% compared to the previous year's Rp2.47 billion. This increase was due to the increase in the income tax expense of the PPA Parent Company.

Profit for the Current Year

Profit for the current year is obtained after calculating income tax from profit before tax. In 2024, the Company's profit for the current year was Rp205.37 billion, a decrease of 36.93%, or Rp120.27 billion compared to Rp325.64 billion in 2023. This was due to a decline in operating profit.

Comprehensive Profit for the Current Year

Comprehensive profit for the current year is the result of adding up the revenue for the year with other comprehensive income. As of December 31, 2024, the Company's comprehensive profit for the year was Rp624.79 billion, a decrease of 77.70%, or Rp2,177.13 billion when compared to Rp2,801.92 billion on December 31, 2023. This was mainly due to the decrease in changes in the fair value of financial assets measured at fair value through other comprehensive income.

Earnings per Share (full value)

The earnings per share is calculated based on the current year's profit attributable to owners of the parent entity, divided by the number of shares in the Company's share capital.

As of the end of 2024, the earnings per share were Rp33,184 (full rupiah), a decrease of 37.74% compared to Rp53,295 (full rupiah) in 2023.

Tabel Laba per Saham (Nilai Penuh) Tahun 2023-2024
Earnings per Share (full value) 2023-2024

Uraian Description	2024	2023	% Perubahan Change %
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (Rp juta) Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent Entity (Rp million)	205.370	325.642	-36,93%
Jumlah saham (lembar) Number of Shares	6.188.835	6.110.098	1,29%
Laba per Saham (nilai penuh) Earnings per Share (full value)	33.184	53.295	-37,74%

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Arus kas mencerminkan pergerakan masuk dan keluarnya kas selama suatu periode tertentu. Arus kas meliputi kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi, kas bersih digunakan aktivitas investasi, dan kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan. Adapun gambaran kinerja arus kas Grup dapat dijabarkan sebagai berikut:

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS

Cash flows represent the movement of cash in and out over a certain period. Cash flows include net cash used for operating activities, net cash used for investing activities, and net cash obtained from financing activities. The Group's cash flow performance can be explained as follows:

Tabel Laporan Arus Kas Konsolidasian Tahun 2023-2024
Consolidated Statement of Cash Flows 2023-2024

Arus Kas Konsolidasian Consolidated Cash Flows	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Nominal (Rp-Juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	245.886	206.592	39.294	19,02%	↑
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investment Activities	156.344	(236.285)	392.629	-166,17%	↓
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	(307.505)	(390.333)	82.828	-21,22%	↓
Penurunan Bersih Kas dan Setara Kas Net Decrease of Cash and Cash Equivalents	94.725	(420.026)	514.751	122,55%	↑
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of the Year	1.056.936	1.476.962	-420.026	-28,44%	↓
Kas dan Setara kas dari Entitas Anak yang Didekonsolidasikan Cash and Cash Equivalents from Consolidated Subsidiaries	-	-	-	-	-
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and cash Equivalents at End of the Year	1.151.661	1.056.936	94.725	8,96%	↑
Rekonsiliasi Jumlah Kas dan Setara Kas Reconciliation of Cash and Cash Equivalents					
Jumlah yang Dilaporkan pada Laporan Arus Kas Total Reported on the Statement of Cash Flows	1.151.661	1.056.936	94.725	8,96%	↑
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Allowance for Impairment Losses	(464)	-	(464)	-100,00%	↓
Jumlah yang Dilaporkan Pada Laporan Posisi Keuangan Total Reported on the Statement of Financial Position	1.151.197	1.056.936	94.261	8,92%	↑

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Pada tahun 2024, kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasional tercatat sebesar Rp245,89 miliar, yaitu mengalami kenaikan sebesar 19,02% atau setara Rp39,29 miliar bila dibandingkan dengan Rp206,59 miliar di tahun 2023. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan dividen kepemilikan saham.

Cash Flows from Operating Activities

In 2024, net cash generated from operating activities was Rp245.89 billion, an increase of 19.02%, or Rp39.29 billion compared to Rp206.59 billion in 2023. This increase was mainly due to the increase in shareholding dividends.

Tabel Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023-2024
 Cash Flows from Operating Activities 2023-2024

Uraian Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Nominal (Rp-Juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Penerimaan Kas dari Pelanggan Cash Receipts from Customers	617.062	685.663	(68.601)	-10,01%	↓
Penyaluran Pembiayaan Konsumen Disbursement for Consumer Financing	(151.222)	(7.657)	(143.565)	1.874,95%	↑
Penerimaan Restitusi Pajak Cash Receipts from Tax Refunds	31.920	31.985	(65)	-0,20%	↓
Pembayaran Kepada Pemasok dan Pihak Ketiga Cash Paid to Suppliers and Third Parties	(265.825)	(366.083)	100.258	-27,39%	↓
Pembayaran Beban Bunga Payment of Interest	(421.792)	(429.884)	8.092	-1,88%	↓
Pembayaran Pajak Payment of Tax	(68.273)	(80.023)	11.750	-14,68%	↓
Penerimaan Dividen Dividends Received	395.468	285.552	109.916	38,49%	↑
Penerimaan Lainnya Other Receipts	108.548	87.039	21.509	24,71%	↑
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi Net Cash Used in Operating Activities	245.886	206.592	39.294	19,02%	↑

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Per 31 Desember 2024, kas bersih yang diperoleh untuk aktivitas investasi tercatat sebesar Rp156,34 miliar, atau naik sebesar 166,17% bila dibandingkan dengan posisi 31 Desember 2023 yang tercatat arus kas digunakan untuk aktivitas investasi sebesar Rp236,29 miliar. Hal ini terutama dipengaruhi oleh penurunan investasi dan penurunan pinjaman yang diberikan.

Cash Flows from Investing Activities

As of December 31, 2024, net cash from investment activities was Rp156.34 billion, an increase of 166.17% compared to Rp236.29 billion as of December 31, 2023. This was mainly due to a decrease in investments and a decrease in loans provided.

Tabel Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2023-2024
 Cash Flows from Investing Activities 2023-2024

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Nominal (Rp-Juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Penerimaan Investasi Proceeds from Investment	791.717	1.877.217	(1.085.500)	-57,82%	↓
Pengeluaran Investasi Disbursement from Investment	(780.645)	(1.940.435)	1.159.790	-59,77%	↓
Penerimaan Pinjaman yang Diberikan Proceeds from Investment Loans	434.934	837.164	(402.230)	-48,05%	↓
Pengeluaran Pinjaman yang Diberikan Disbursement from Investment Loans	(293.272)	(1.007.235)	713.963	-70,88%	↓
Pengurangan Investasi pada Ventura Bersama Reduction of Investments in Joint Ventures	4.000	-	4.000	100,00%	↑
Perolehan Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud Acquisition of Fixed Assets and Intangible Assets	(390)	(260)	(130)	50,00%	↑

Tabel Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2023-2024
Cash Flows from Investing Activities 2023-2024

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flows from Investing Activities	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Nominal (Rp-Juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Perolehan Properti Investasi Acquisition of Investment Property	-	(2.736)	2.736	-100,00%	↓
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi Net Cash Provided by (Used) in Investing Activities	156.344	(236.285)	392.629	166,17%	↑

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Pada tahun 2024, PPA mencatat kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp307,51 miliar. Angka ini menunjukkan peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang sebesar Rp390,33 miliar. Peningkatan ini dipengaruhi oleh adanya penerimaan penerbitan surat utang, serta penurunan pembayaran surat utang dan utang repo.

Cash Flows from Financing Activities

In 2024, PPA's net cash from financing activities reached Rp307.51 billion, an increase compared to Rp390.33 billion in 2023. This increase was due to the receipt of debt issuance, as well as a decrease in debt payments and repo debt.

Tabel Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2023-2024
Cash Flows from Financing Activities 2023-2024

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Nominal (Rp-Juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	
Penerimaan Pinjaman Bank Receipts from Bank Loans	1.113.062	1.425.313	(312.251)	-21,91%	↓
Pembayaran Pinjaman Bank Payments of Bank Loans	(1.496.121)	(1.183.472)	(312.649)	26,42%	↑
Penerimaan Penerbitan Surat Utang Proceeds from Investment Loans	185.604	-	185.604	100,00%	↑
Pembayaran Penerbitan Surat Utang Disbursement from Investment Loans	-	(540.000)	540.000	-100,00%	↓
Pembayaran Liabilitas Sewa Payment of Lease Liabilities	(29.125)	(20.242)	(8.883)	43,88%	↑
Penerimaan Pinjaman Lainnya Other Loan Receipts	-	30.925	(30.925)	-100,00%	↓
Pembayaran Pinjaman Lainnya Other Loan Payments	(30.925)	-	(30.925)	100,00%	↑
Penerimaan Setoran Modal Capital Deposit Receipts	-	216.371	(216.371)	-100,00%	↓
Pembayaran Dividen Dividend Payments	(50.000)	(51.000)	1.000	-1,96%	↓
Pembayaran Utang Repo Repo Debt Payments	-	(268.228)	268.228	-100,00%	↓
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan Net Cash used for Financing Activities	(307.505)	(390.333)	82.828	-21,22%	↓

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas

PPA mencatatkan kenaikan bersih kas dan setara kas yang dicatatkan oleh PPA di tahun 2024 adalah sebesar Rp94,73 miliar. Angka ini menunjukkan peningkatan sebesar Rp514,75 miliar atau 122,55% bila dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencatat penurunan bersih kas dan setara kas sebesar Rp420,03 miliar. Hal ini karena disebabkan oleh meningkatnya arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi.

Kas dan Setara Kas Awal Tahun

Kas dan setara kas awal tahun pada 2024 tercatat sebesar Rp1.056,94 miliar, menurun sebesar Rp420,03 miliar atau setara 28,44% bila dibandingkan tahun 2023 yang tercatat Rp1.476,96 miliar.

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun

PPA mencatatkan kas dan setara kas akhir tahun sebesar Rp1.151,66 miliar, naik Rp94,73 miliar dari tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp1.056,94 miliar. Hal ini disebabkan oleh peningkatan arus kas bersih dari aktivitas operasi.

Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents

PPA's cash and cash equivalents increased in 2024 to Rp94.73 billion, an increase of Rp514.75 billion or 122.55% compared to the net decrease in cash and cash equivalents of Rp420.03 billion in 2023. This was due to the increase in net cash flows obtained from investment activities.

Cash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year

Cash and cash equivalents at the beginning of the year in 2024 stood at Rp1,056.94 billion, a decrease of Rp420.03 billion, or 28.44% compared to Rp1,476.96 billion in 2023.

Cash and Cash Equivalents at the End of the Year

PPA's cash and cash equivalents at the end of the year stood at Rp1,151.66 billion, an increase of Rp94.73 billion compared to Rp1,056.94 billion in 2023. This was due to an increase in net cash flows from operating activities.

Kemampuan Menghasilkan Laba atau Keuntungan

Ability to Generate Profits or Gains

Kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba atau keuntungan dapat dilihat melalui analisis rasio profitabilitas, yang mencakup tingkat imbal hasil atas aset atau *return on asset* (ROA), tingkat imbal hasil atas modal atau *return on equity* (ROE), marjin laba usaha, marjin laba bersih, beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO), serta produktivitas tenaga kerja dan rasio pertumbuhan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan kinerja dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencakup aspek-aspek seperti pendapatan usaha, beban usaha, laba usaha, laba bersih, laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk, laba per saham, aset, liabilitas, dan ekuitas.

The Company's ability to generate profits or gains can be seen through the analysis of profitability ratios, which include the return on assets (ROA), the return on equity (ROE), operating profit margin, net profit margin, operating expenses to operating income (BOPO), and labor productivity, and growth ratios that illustrate the increase or decrease in performance compared to the previous year, which includes aspects such as operating income, operating expenses, operating revenues, net profit, net profit attributable to owners of the parent entity, earnings per share, assets, liabilities, and equity.

Rasio Keuangan Financial Ratio	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease
Rasio Laba Bersih terhadap aset Return on Assets	1,18%	1,87%	-0,70%
Rasio Laba Bersih terhadap ekuitas Return on Equity	1,83%	3,06%	-1,23%
Marjin Laba Usaha Operating Profit Margin	10,58%	17,49%	-6,92%
Marjin Laba Bersih Net Profit Margin	12,35%	19,46%	-7,11%
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) Operating Expenses to Operating Income	89,42%	82,51%	6,92%

Kemampuan Membayar Utang dan Tingkat Kolektibilitas Piutang

Ability to Pay Debt and Receivables Collectibility Level

Kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban utangnya, termasuk tingkat kolektibilitas, dapat diukur melalui rasio solvabilitas dan rasio likuiditas. Rasio solvabilitas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam melunasi seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sementara itu, rasio likuiditas digunakan untuk menilai kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya secara tepat waktu.

The Company's ability to meet its debt obligations, including the collectibility level, is measured through the solvency ratio and liquidity ratio. The solvency ratio reflects the Company's ability to pay off all its debts, both short-term and long-term. While, the liquidity ratio is used to measure the Company's ability to meet its short-term obligations in a timely manner.

RASIO LIKUIDITAS

LIQUIDITY RATIO

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease		
			Nominal Nominal	Persentase (%) Percentage (%)	
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	1.151.197	1.056.936	94.261	8,92%	↑
Pinjaman Investasi Jangka Pendek Short Term Investment Loans	574.466	675.114	(100.648)	-14,90%	↓
Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi - Pihak Ketiga Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss	1.153.646	1.098.394	55.252	5,03%	↑
Aset Lancar Current Assets	5.485.189	4.573.918	911.271	19,92%	↑
Liabilitas Jangka Pendek Non-current Liabilities	3.295.202	2.549.473	745.729	29,25%	↑
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio					
Rasio Lancar (%) Current Ratio (%)	166,46	179,41	(12,95)	-7,2%	↓
Rasio Kas (%) Current Ratio (%)	34,94	41,46	(6,52)	-15,7%	↓

Kemampuan membayar utang jangka pendek tercermin melalui rasio likuiditas, yang meliputi rasio lancar dan rasio kas. Pada tahun 2024, rasio lancar tercatat sebesar 166,46%, menurun dibandingkan dengan posisi tahun 2023 yang sebesar 179,40%. Di sisi lain, PPA juga mencatatkan penurunan pada rasio kas dari 41,46% di tahun 2023 menjadi sebesar 34,94% di tahun 2024.

The ability to pay short-term debt is reflected through the liquidity ratio, which includes the current ratio and cash ratio. In 2024, the current ratio was 166.46%, down from 2023's 179.40%. While, PPA's cash ratio also decreased from 41.46% in 2023 to 34.94% in 2024.

RASIO SOLVABILITAS

Uraian Description	2024 (%)	2023 (%)	Kenaikan / Penurunan Increase/Decrease		
			Nominal (%) Nominal (%)	Persentase (%) Percentage (%)	
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio					
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (Debt to Equity Ratio/DER) Debt to Equity Ratio/DER	55,50	63,01	(7,51)	-11,92%	↓
Rasio Liabilitas terhadap Aset Liabilities to Assets Ratio	35,69	38,65	(2,96)	-7,63%	↓
Total Modal Sendiri (Ekuitas) terhadap Aset Total Equity to Assets	64,31	61,35	2,96	4,83%	↑

Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (Debt to Equity Ratio/DER)

Rasio liabilitas terhadap ekuitas (Debt to Equity Ratio/DER) PPA di tahun 2024 tercatat sebesar 55,50%, menurun dibanding dengan tahun sebelumnya yang sebesar 63,01%.

Rasio Liabilitas terhadap Aset (Debt to Asset Ratio/DAR)

PPA mencatatkan rasio liabilitas terhadap aset (Debt to Asset Ratio/DAR) Perseroan sebesar 35,69%, menunjukkan penurunan bila dibanding dengan tahun 2023 sebesar 38,65%.

SOLVENCY RATIO

Debt to Equity Ratio/DER

PPA's debt to equity ratio (DER) in 2024 was 55.50%, a decrease from 63.01% the previous year.

Debt to Asset Ratio/DAR

PPA's debt to asset ratio (DAR) was 35.69%, a decrease compared to 38.65% in 2023.

TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

Perseroan melakukan pengumpulan piutang dengan menggunakan tingkat kolektabilitas piutang, yang mencerminkan kemampuan Perseroan dalam mengumpulkan piutangnya. Hal ini dapat diukur melalui perhitungan periode penagihan (*collection period*) atau jangka waktu rata-rata untuk mengumpulkan piutang. Berikut adalah tingkat kolektabilitas piutang Perseroan yang diukur berdasarkan *collection period* atau jangka waktu rata-rata pengumpulan piutang pada tahun 2024, dibandingkan dengan tahun 2023, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

RECEIVABLES COLLECTABILITY LEVEL

The Company collects receivables using the receivables collectability rate, which reflects the Company's ability to collect its receivables. This can be measured by calculating the collection period or average time period for collecting receivables. The following table shows the Company's receivables collectability rate measured based on the collection period, or the average period for collecting receivables in 2024, compared to 2023.

Tabel Tingkat Kolektibilitas Piutang 2023-2024
Receivables Collectability Level 2023-2024

Uraian Description	2024	2023	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rpmillion)	Persentase(%) Percentage (%)
Jangka Waktu Rata-Rata Pengumpulan Piutang (hari) Average Collection Period for Receivables (days)	186,95	201,86	-14,90	-0,08%

PPA mencatatkan jangka waktu rata-rata pengumpulan piutang atau tingkat kolektabilitas piutang pada tahun 2024 sebesar 186,95 hari, mengalami penurunan/peningkatan bila dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 201,86 hari. Hal ini disebabkan oleh pembayaran dari debitur selama tahun berjalan.

PPA's average collection period, or receivables collectability rate in 2024 was 186,95 days, a decrease compared to 201.86 days in 2023. This is due to payments from debtors during the current year.

Tabel Umur Piutang Usaha yang belum Diturunkan Nilainya Tahun 2023-2024
 Age of Unimpaired Accounts Receivables 2023-2024

Umur Piutang Usaha yang belum Diturunkan Nilainya Age of Unimpaired Accounts Receivables	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Belum Jatuh Tempo Not due	204.630	627.994	(423.364)	-67,42%
Lewat Jatuh Tempo Over due				
1 - 90 hari 1 - 90 days	9.648	307.905	(298.257)	-96,87%
91 - 120 hari 91 - 120 days	928	-	928	100,00%
121 - 180 hari 121 - 180 days	956	5.805	(4.849)	-83,53%
> 180 hari > 180 days	874.556	190.003	684.553	360,29%
Jumlah Total	1.090.718	1.131.707	(40.989)	-3,62%
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Allowance for Receivables Impairment Losses	(239.126)	(206.401)	(32.725)	15,86%
Jumlah Piutang Usaha Total Accounts Receivables	851.592	925.306	(73.714)	-7,97%

Berdasarkan tabel di atas, total piutang usaha Grup pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp851,59 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp73,71 miliar atau 7,97% dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp925,31 miliar. Dari jumlah tersebut, piutang usaha yang belum jatuh tempo pada tahun 2024 sebesar Rp204,63 miliar, turun Rp423,36 miliar atau 67,42% bila dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat Rp627,99 miliar.

Sementara itu, piutang usaha yang telah jatuh tempo pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp886,09 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp382,38 miliar atau 75,91% dibandingkan dengan Rp503,71 miliar di tahun 2023. Adapun penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp239,13 miliar, meningkat Rp32,73 miliar atau 15,86% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp206,40 miliar.

Based on the above table, the Group's total trade receivables in 2024 were Rp851.59 billion, a decrease of Rp73.71 billion, or 7.97% compared to Rp925.31 billion in 2023. Of the trade receivables, the amount due in 2024 was Rp204.63 billion, a decrease of Rp423.36 billion, or 67.42% compared to the previous year's Rp627.99 billion.

While, accounts receivables due in 2024 were Rp886.09 billion, an increase of Rp382.38 billion or 75.91% compared to Rp503.71 billion in 2023. The provision for impairment losses on receivables in 2024 was Rp239.13 billion, an increase of Rp32.73 billion, or 15.86% compared to the previous year's Rp206.40 billion.

Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen Atas Struktur Modal

Capital Structure and Management Policy on Capital Structure

RINCIAN STRUKTUR MODAL

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PPA menerapkan kebijakan struktur modal yang seimbang antara liabilitas bersih dan ekuitas. Adapun struktur modal yang optimal bertujuan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Strategi yang diterapkan oleh PPA beserta entitas anak adalah menjaga rasio utang terhadap modal yang disesuaikan tetap berada pada batas bawah dari kisaran 2.

Rasio ini dihitung dengan membagi utang neto terhadap total ekuitas. Utang neto merupakan total utang (sesuai dengan yang tercantum dalam laporan posisi keuangan) dikurangi dengan kas dan setara kas.

CAPITAL STRUCTURE DETAILS

In carrying out its business activities, PPA applies a balanced capital structure policy between net liabilities and equity, where the optimal capital structure aims to maximize the Company's value. PPA and its subsidiaries strategy is to maintain the adjusted debt to equity ratio at the lower limit of the range of 2.

This ratio is calculated by dividing net debt by total equity. Net debt is total debt (as stated in the statement of financial position) minus cash and cash equivalents.

Tabel Struktur Modal Tahun 2023-2024
Capital Structure 2023-2024

Struktur Modal Capital Structure	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	Komposisi % Composition (%)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Komposisi % Composition (%)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
					Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp-million)	Persentase Percentage (%)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	6.233.971	35,69%	6.715.594	38,65%	(481.623)	-7,17% ↓
Ekuitas Equity	11.233.113	64,31%	10.658.324	61,35%	574.789	5,39% ↑
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	17.467.084	100,00%	17.373.918	100,00%	93.166	0,54% ↑

Berdasarkan tabel di atas, total Liabilitas dan Ekuitas PPA pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp17.467,08 miliar, meningkat 0,54% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp17.373,92 miliar.

Based on the above table, PPA's total Liabilities and Equity in 2024 reached Rp17,467.08 billion, an increase of 0.54% compared to the previous year's Rp17,373.92 billion.

DASAR PEMILIHAN KEBIJAKAN MANAJEMEN ATAS STRUKTUR MODAL

Penetapan kebijakan manajemen atas struktur modal Perseroan dilakukan sebagai langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan usaha. Tujuan utamanya adalah melindungi stabilitas keuangan Perseroan, sekaligus memberikan imbal hasil yang optimal bagi pemegang saham serta menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

Pengelolaan struktur modal yang efisien sangat penting guna meminimalkan biaya modal secara optimal. Untuk menjaga atau menyesuaikan struktur permodalannya, Perseroan dapat mengambil langkah-langkah seperti mengatur besaran dividen yang dibayarkan, memberikan imbal hasil modal kepada pemegang saham, atau menerbitkan saham baru guna mengurangi beban pinjaman.

Struktur Modal

Komposisi struktur modal Grup, yang terdiri atas utang atau modal berbunga dan modal sendiri, ditampilkan pada tabel di atas. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa porsi kontribusi ekuitas mengalami peningkatan pada tahun 2024, yakni mencapai 64,31%, dibandingkan dengan 61,35% pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan penguatan struktur permodalan Grup di tahun berjalan.

BASIS FOR SELECTING CAPITAL STRUCTURE MANAGEMENT POLICY

Determining the Company's capital structure management policy is carried out as a strategic step to maintain business continuity. The key objective is to protect the Company's financial stability, while providing optimal returns for shareholders and creating added value for stakeholders.

Optimal capital structure management is very important to effectively minimize capital costs. To maintain or adjust its capital structure, the Company can take steps such as regulating the amount of dividends paid, providing capital returns to shareholders, or issuing new shares to reduce loans.

Capital Structure

The Group's capital structure composition, consisting of interest-bearing debt, capital and equity, is shown in the table above. Based on this data, it can be seen that the portion of equity contribution increased in 2024, reaching 64.31%, compared to 61.35% in 2023. This reflects the strengthening of the Group's capital structure in the current year.

Ikatan yang Material untuk Investasi Barang Modal

Material Capital Goods Investments

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa suatu transaksi dikategorikan sebagai transaksi material apabila nilai transaksi sama dengan 20% atau lebih dari ekuitas Perusahaan.

Sepanjang tahun 2024, PPA tidak mencatat adanya ikatan material terkait investasi barang modal. Oleh karena itu, dalam Laporan Tahunan ini tidak terdapat informasi yang dapat disampaikan mengenai ikatan material untuk investasi barang modal, termasuk keterangan mengenai pihak kedua, tujuan ikatan, sumber pendanaan, mata uang yang digunakan, maupun perlindungan terhadap risiko nilai tukar atas transaksi tersebut.

Based on the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, Article 3 paragraph (1) states that a transaction is categorized as a material transaction if the transaction value is equal to 20% or more of the Company's equity.

During 2024, PPA did not record any material commitments related to capital goods investments. Therefore, in this Annual Report there is no information to report for material commitments for capital goods investments, including information regarding the second party, the purpose of the commitment, funding sources, currencies used, or protection against exchange rate risks for the transactions.

Realisasi Investasi Barang Modal

Realization of Capital Goods Investments

Investasi Barang Modal (*Capital Expenditure*) merupakan pengeluaran yang dilakukan Perseroan untuk pembelian aset baru maupun perbaikan aset yang sudah ada, dengan tujuan memberikan nilai tambah di masa mendatang. Adapun dalam menjalankan kegiatan usahanya, investasi menjadi elemen penting yang mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis Perseroan.

Capital Expenditure is a cost incurred by the Company to purchase new assets, or to improve existing assets, with the aim of providing added value in the future. In carrying out its business activities, investment is an important element that supports the growth and sustainability of the Company's business.

JENIS DAN TUJUAN INVESTASI BARANG MODAL

Investasi barang modal dilakukan sebagai bagian dari upaya pengembangan bisnis Perseroan, khususnya pada entitas anak dan perusahaan asosiasi. Perseroan merealisasikan investasi barang modal melalui investasi penyertaan, investasi aset tetap, dan investasi untuk keperluan pengembangan usaha.

TYPES AND OBJECTIVES OF CAPITAL GOODS INVESTMENTS

Capital goods investments are made as part of the Company's business development efforts, especially in subsidiaries and associated companies. The Company realizes its capital goods investment through equity investment, fixed asset investment, and business development investment.

NILAI INVESTASI BARANG MODAL

CAPITAL GOODS INVESTMENT VALUE

Tabel Investasi Barang Modal 2023-2024
Capital Goods Investments 2023-2024

Investasi Barang Modal Capital Goods Investments	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Nominal (Rp-juta) Nominal (Rp- million)	Persentase (%) Percentage (%)
Peralatan Kantor Office Equipment	390	260	130	50,0%
Jumlah Total	390	260	130	50,0%

Saldo akhir aset tetap, yang mencerminkan akumulasi nilai investasi barang modal sejak PPA berdiri hingga tahun 2024 tercatat sebesar Rp390 juta. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 50% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp260 juta. Hal ini terutama disebabkan adanya penambahan peralatan kantor baru untuk mendukung operasional administratif, peningkatan kapasitas kerja, serta penguatan infrastruktur internal dalam rangka mendukung pertumbuhan kegiatan usaha.

The total balance of fixed assets, which reflects the accumulated value of capital goods investment since PPA was established until 2024, has reached RP390 million, an increase of 50% compared to Rp260 million as of December 31, 2023. This was mainly due to the addition of new office equipment to support administrative operations, increased work capacity, and strengthening internal infrastructure to support the growth of business activities.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan

Material Information and Facts That Occured After The Date of The Accountant's Report

Tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi antara tanggal laporan akuntan 24 Maret 2025 hingga disahkannya laporan tahunan ini tanggal 4 April 2025.

There was no material information and facts that occurred after the date of the accountant's report on March 24, 2025 until the ratification of this annual report on April 4, 2025.

Informasi Peningkatan atau Penurunan yang Material Dari Penjualan atau Pendapatan

Material Information on Increases or Decreases of Sales or Income

Sepanjang tahun 2024, tidak terjadi perubahan signifikan, baik peningkatan maupun penurunan pada penjualan atau pendapatan Perseroan. Dengan demikian, tidak ada informasi terkait perubahan material atas penjualan atau pendapatan yang dapat disampaikan dalam Laporan Tahunan ini.

In 2024, there were no significant increases or decreases in the Company's sales or revenue. Therefore, there is no information to report on material changes in sales or revenue in this Annual Report.

Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan

Impact of Price Changes On Sales

Perseroan tidak mengalami dampak signifikan akibat perubahan harga terhadap pendapatan . Oleh karena itu, tidak ada informasi terkait dampak perubahan harga terhadap pendapatan yang disajikan dalam Laporan Tahunan 2024 ini.

The Company did not experience any impact of price changes on revenue. Therefore, there is no information to report on the impact of price changes on revenue in this 2024 Annual Report.

Kontribusi Kepada Negara

Contribution to The State

PPA menjunjung tinggi kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, Perseroan telah memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak sebagai bentuk kontribusi kepada negara. Berikut adalah rincian kewajiban perpajakan Perseroan pada tahun 2024.

PPA complies with all applicable regulations, and the Company has fulfilled its obligation to pay taxes as a form of contribution to the State. The following details the Company's tax obligations in 2024.

RINCIAN PAJAK YANG DIBAYARKAN

BREAKDOWN OF TAX PAYMENTS

Deskripsi Description	2024 (Rp-juta) (Rp-million)	2023 (Rp-juta) (Rp-million)
PPh Pasal 21 - Karyawan Income Tax Article 21 - Employees	30.617	43.201
PPh Pasal 21 - Pihak Luar Income Tax Article 21 - External	327	1.566
PPh Pasal 22 Income Tax Article 22	30	182
PPh Pasal 23 Income Tax Article 23	1.243	13.438
PPh Pasal 25 Income Tax Article 25	-	-
PPh 26 Income Tax 26	177	440
PPh Pasal 4 (2) Income Tax Article 4 (2)	7.042	9.157
PPN LN Foreign VAT	157	464
Pajak Pemungut VAT Withheld	8.326	8.834
Jumlah Pajak yang Dibayarkan Total Tax Paid	47.919	77.282

Perbandingan Antara Target Dengan Realisasi

Comparison Between Target and Realization

PENCAPAIAN TARGET KEUANGAN TAHUN 2024

ACHIEVEMENT OF FINANCIAL TARGETS IN 2024

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Proyeksi Keuangan Financial Projections	Realisasi 2024 2024 Realization	Target 2024 2024 Target	Pencapaian Realisasi terhadap Target Achievement Against Target
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income			
Pendapatan Usaha Operating Revenue	1.662.604	1.896.649	87,66%
Beban Usaha Operating Expense	(1.486.782)	(1.763.445)	84,31%
Laba Usaha Operating Income	175.822	133.205	131,99%
Laba Sebelum Pajak Income before Tax	210.555	168.081	125,27%
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Income for the Current Year	205.370	168.081	122,19%
Posisi Keuangan Konsolidasian Consolidated Financial Position			
Aset Lancar Current Assets	5.485.189	3.749.576	146,29%
Aset Tidak Lancar Non Current Assets	11.981.895	9.399.197	127,48%
Total Aset Total Assets	17.467.084	13.799.016	126,58%
Liabilitas Jangka Pendek Short-term Liabilities	3.295.202	2.099.501	156,95%
Liabilitas Jangka Panjang Long term Liabilities	2.938.769	3.440.877	85,41%
Total Liabilitas Total Liabilities	6.233.971	5.540.378	112,52%
Total Ekuitas Total Equity	11.233.113	8.258.638	136,02%
Rasio Keuangan Financial ratios			
Return on Asset (%) Return on Asset (%)	1,18	1,0	118,00%
Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) (%) Operating Expenses to Operating Income (BOPO) (%)	89,42	93,0	96,15%

Proyeksi untuk 1 (Satu) Tahun Ke Depan

Projections for The Next 1 (One) Year

Dalam satu tahun ke depan, Perseroan telah menetapkan berbagai target yang ingin dicapai sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2025. Target tersebut telah disesuaikan dengan dinamika industri dan kondisi ekonomi terkini. Berikut adalah proyeksi yang telah ditetapkan untuk tahun mendatang berdasarkan RKAP Tahun 2025, dibandingkan dengan realisasi tahun buku 2024.

For the next year, the Company has set a number of targets to be achieved in the 2025 Company Work and Budget Plan (RKAP). These targets have been adjusted to the dynamics of the industry and current economic conditions. The projections set for the next year based on the 2025 RKAP, compared to the realization of the 2024 fiscal year are as follows.

Proyeksi Keuangan Financial Projections	Target 2025 2025 Target
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income	
Pendapatan Usaha Operating Revenue	1.466.634
Beban Usaha Operating Expense	(1.409.442)
Laba Usaha Operating Income	57.192
Laba Sebelum Pajak Income before Tax	88.800
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Income for the Current Year	88.800
Posisi Keuangan Konsolidasian Consolidated Financial Position	
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	1.234.528
Aset Lancar Current Assets	3.596.723
Aset Tidak Lancar Non Current Assets	13.142.038
Total Aset Total Assets	17.973.289
Liabilitas Jangka Pendek Short term Liabilities	2.055.058
Liabilitas Jangka Panjang Long term Liabilities	4.021.446
Total Liabilitas Total Liabilities	6.076.504
Total Ekuitas Total Equity	11.896.785

Kebijakan dan Pembagian Dividen

Dividend Policy and Distribution

KEBIJAKAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Undang-Undang No. 40/2007 yang berlaku sejak Agustus 2007 telah mengubah ketentuan sebelumnya dalam UU No. 1/1995 (Maret 1995), mewajibkan Perseroan Terbatas di Indonesia untuk membentuk cadangan umum dari laba bersih minimal 20% dari total modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh. Pembentukan cadangan ini tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu.

Mengenai pembagian dividen, keputusan sepenuhnya berada di tangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Perseroan. RUPS juga berwenang menetapkan jadwal serta mekanisme pembayaran dividen. Pembayaran dividen harus diberikan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan atau keputusan RUPS, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Bursa Efek tempat obligasi Perseroan tercatat.

DIVIDEN ATAS KINERJA TAHUN BUKU 2024

Berdasarkan hasil keputusan yang diambil oleh para pemegang saham, sebagaimana tertuang dalam No. KPPS-10/DR/L&C/11/2024, dan mengacu pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diselenggarakan pada 12 Agustus 2024 serta Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-594/MBU/11/2024 tanggal 18 November 2024 mengenai Persetujuan Penggunaan Laba Anak Perusahaan PT Danareksa (Persero), telah ditetapkan alokasi Laba Bersih Perusahaan tahun buku 2023 yaitu sebesar Rp50.000 dialokasikan sebagai dividen tunai dan Rp275.653 ditetapkan sebagai cadangan wajib. Pembayaran dividen telah direalisasikan pada tanggal 23 Desember 2024.

DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY

Law No. 40/2007, which became effective in August 2007, amended the previous provisions in Law No. 1/1995 (March 1995), requiring Limited Liability Companies in Indonesia to establish a general reserve from net profits of at least 20% of the total issued and fully paid capital. This reserve is not limited by a certain time period.

For the distribution of dividends, the decision is entirely in the hands of the General Meeting of Shareholders (GMS) after considering the Company's financial condition. The GMS is also authorized to determine the schedule and mechanism for dividend payments. Dividend payments must be made to shareholders registered in the Register of Shareholders, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association, or the GMS decision, as long as it does not conflict with the Stock Exchange regulations, where the Company's bonds are listed.

DIVIDENDS ON PERFORMANCE FOR THE 2024 FISCAL YEAR

Based on the shareholders' decisions, as stated in No. KPPS-10/DR/L&C/11/2024, which refers to the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) held on August 12, 2024, and the Minister of State-Owned Enterprises Letter No. S-594/MBU/11/2024 dated November 18, 2024 concerning Approval of the Use of Profits of the Subsidiary PT Danareksa (Persero), whereby the use of the Company's Net Profit for the 2023 fiscal year had been determined at Rp50,000 allocated as cash dividends, and Rp275,653 as mandatory reserves. Dividend payments were paid on December 23, 2024.

Program Kepemilikan Saham Oleh Manajemen dan/atau Pegawai

Management and Employee Share Ownership Program (Mesop)

Hingga penghujung tahun 2024, PPA belum pernah melakukan perdagangan saham kepada publik. Oleh karena itu, Perusahaan tidak memiliki kebijakan terkait program kepemilikan saham oleh karyawan Employee Stock Ownership Program (ESOP) maupun oleh manajemen (Management Stock Ownership Program (MSOP). Dengan demikian, tidak terdapat informasi yang dapat disampaikan mengenai jumlah saham yang dialokasikan untuk ESOP/MSOP, realisasi pelaksanaannya, periode program, ketentuan bagi karyawan dan/atau manajemen yang berhak, serta harga pelaksanaan (exercise price).

Up until the end of 2024, PPA has never traded shares to the public. Therefore, the Company does not have a policy related to an Employee Stock Ownership Program (ESOP), or a Management Stock Ownership Program (MSOP). Therefore, there is no information to report on the number of shares allocated for ESOP/MSOP, their realization, the program period, requirements for eligible employees and/or management and the exercise price.

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Realization of use of Public Offering Proceeds

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, PPA belum melaksanakan *Initial Public Offering* (IPO) atau Penawaran Umum Perdana Saham di bursa efek manapun. Dengan demikian, tidak terdapat informasi yang dapat disampaikan terkait realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, termasuk total dana yang diperoleh, rencana dan rincian penggunaannya, serta tanggal persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana tersebut.

1. Obligasi I PPA Tahun 2020

PPA telah menerbitkan Obligasi I Tahun 2020 senilai Rp642.100 yang efektif pada 1 September 2020. Pencatatan dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 September 2020 dengan Surat Pengumuman Bursa No. Peng-P-00217/BEI.PP3/09-2020.

Pada tahun 2024, Pefindo memberikan peringkat idAA (Double A) atas Obligasi I Seri B dan C yang berlaku sampai dengan 1 Oktober 2025.

2. Obligasi II PPA Tahun 2022

PPA telah menerbitkan Obligasi II Tahun 2022 senilai Rp1.682.200 yang efektif pada 8 Juli 2022. Pencatatan dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Juli 2022 dengan Surat Pengumuman Bursa No. Peng-P-00274/BEI.PP3/07-2022.

Pada tahun 2024, Fitch Ratings memberikan peringkat AA-(idn) atas Obligasi II Seri A dan B, sesuai Surat No. 125/DIR/RATLTR/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024.

Pada tahun 2024, Pefindo memberikan peringkat idAA (Double A) atas Obligasi II Seri A dan B, yang berlaku sampai dengan 8 Juli 2025 untuk Obligasi II Seri A dan 1 Oktober 2025 untuk Obligasi II Seri B.

INITIAL PUBLIC OFFERING OF SHARES

As of December 31 2024, PPA has never conducted an Initial Public Offering (IPO) on any Stock Exchange. Therefore, there is no information to report on the actual use of funds from the public offering in the form of total proceeds, plans for using the funds, details of the use of funds, and the date of approval by the GMS for changes to the use of funds from the public offering.

1. PPA 2020 Bond I

On September 1 2020, PPA issued 2020 Bonds I worth Rp642,100. The listing was carried out on the Indonesia Stock Exchange on September 2, 2020 through the Exchange Announcement Listing Letter No. Peng-P-00217/BEI.PP3/09-2020.

In 2024, Pefindo gave an idAA (Double A) rating to Bonds I Series B and C, which is valid until October 1, 2025.

2. PPA 2022 Bond II

On July 8, 2022, PPA issued 2022 Bonds II worth Rp1,682,200. The listing was carried out on the Indonesia Stock Exchange on July 11, 2022 through the Exchange Announcement Letter No. Peng-P-00274/BEI.PP3/07-2022.

In 2024, Fitch Ratings gave an AA-(idn) rating to Bonds II Series A and B, through Letter No. 125/DIR/RATLTR/VII/2024 dated July 4, 2024.

In 2024, Pefindo gave an idAA (Double A) rating to Bonds II Series A and B, which is valid until July 8, 2025 for Bonds II Series A and October 1, 2025 for Bonds II Series B.

Berikut disampaikan realisasi penggunaan dana hasil penerbitan Obligasi I dan II PT Perusahaan Pengelola Aset.

The following is the realization of the use of funds from the PT Perusahaan Pengelola Aset issuance of Bonds I and II.

Uraian Description	Nilai (Rp-Juta) Amount (Rp-million)
Obligasi I PPA Tahun 2020 PPA 2020 Bond I	
Pelunasan SBK SBK repayment	100.000
Pembiayaan Penerbitan Obligasi & MTN Bond & MTN Issuance Financing	2.796
Pembiayaan Investasi Investment Financing	263.880
Pembiayaan Operasional Operational Financing	275.423
Jumlah Total	642.100

Uraian Description	Nilai (Rp-Juta) Amount (Rp-million)
Obligasi II PPA Tahun 2022 PPA 2022 Bond II	
Biaya Penerbitan Obligasi Bond Issuance Expenses	6.950
Modal Kerja/Investasi Working Capital/Investment	883.650
Akuisisi Saham Share Acquisition	791.600
Jumlah Total	1.682.200

Uraian Penggunaan Description	Nilai (Rp-Juta) Amount (Rp-million)
Obligasi I PPA Tahun 2020 PPA 2020 Bond I	
Pelunasan SBK SBK repayment	100.000
Pembiayaan Penerbitan Obligasi & MTN Bond & MTN Issuance Financing	2.796
Pembiayaan Investasi Investment Financing	263.880
Pembiayaan Operasional Operational Financing	275.423
Jumlah Total	642.100

Uraian Penggunaan Description	Nilai (Rp-Juta) Amount (Rp-million)
Obligasi II PPA Tahun 2022 PPA 2022 Bond II	
Biaya Penerbitan Obligasi Bond Issuance Expenses	6.950
Modal Kerja/Investasi Working Capital/Investment	883.650
Akuisisi Saham Share Acquisition	791.600
Jumlah Total	1.682.200

Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/Modal

Material Information Regarding Investments, Expansions, Divestments, Mergers/Consolidations, Acquisitions, and Debt/Capital Restructuring

Perseroan selalu melibatkan pihak ketiga dalam menilai kewajaran transaksi terkait investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, serta restrukturisasi utang/modal, sesuai dengan regulasi yang berlaku di pasar modal. Sepanjang tahun 2024, Perseroan tidak melakukan transaksi yang memenuhi kriteria informasi material terkait kegiatan tersebut, sebagaimana penjelasan berikut ini:

INFORMASI MATERIAL MENGENAI INVESTASI

Tidak terdapat informasi material mengenai investasi yang dilakukan Perusahaan di tahun 2024.

The Company always uses third parties to assess the fairness of transactions related to investments, expansions, divestments, business mergers/consolidations, acquisitions, and debt/capital restructuring, in accordance with applicable regulations in the capital market. Throughout 2024, the Company did not conduct transactions that meet the criteria of material information related to these activities, as explained below:

MATERIAL INFORMATION REGARDING INVESTMENTS

There is no material information to report on investments made by the Company in 2024.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI EKSPANSI

Tidak terdapat informasi material mengenai ekspansi yang dilakukan Perusahaan di tahun 2024.

MATERIAL INFORMATION REGARDING EXPANSIONS

There is no material information to report on expansions made by the Company in 2024.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI DIVESTASI

Tidak terdapat informasi material mengenai divestasi yang dilakukan Perusahaan di tahun 2024.

MATERIAL INFORMATION REGARDING DIVESTMENTS

There is no material information to report on divestments made by the Company in 2024.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI PENGGABUNGAN/PELEBURAN USAHA

Tidak terdapat informasi material mengenai penggabungan/peleburan yang dilakukan Perusahaan di tahun 2024.

MATERIAL INFORMATION REGARDING MERGERS/CONSOLIDATIONS

There is no material information to report on mergers/consolidations made by the Company in 2024.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI AKUISISI

Tidak terdapat informasi material mengenai akuisisi yang dilakukan Perusahaan di tahun 2024.

MATERIAL INFORMATION REGARDING ACQUISITIONS

There is no material information to report on acquisitions made by the Company in 2024.

INFORMASI MATERIAL MENGENAI RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

Tidak terdapat informasi material mengenai restrukturisasi utang/modal yang dilakukan Perusahaan di tahun 2024.

MATERIAL INFORMATION REGARDING DEBT/CAPITAL RESTRUCTURING

There is no material information to report on debt/capital restructuring made by the Company in 2024.

Informasi Transaksi Material, Transaksi Benturan Kepentingan, dan Transaksi Dengan Pihak Afiliasi dan/ Atau Berelasi

Information on Material Transactions, Conflict of Interest Transactions, and Transactions With Affiliated and/or Related Parties

TRANSAKSI MATERIAL

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, transaksi material adalah setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali yang memenuhi batasan nilai transaksi sama dengan 20% (dua puluh persen) atau lebih dari ekuitas Perusahaan Terbuka. Dalam hal transaksi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Perusahaan Terbuka yang mempunyai ekuitas negatif, transaksi dikategorikan sebagai transaksi material apabila nilai transaksi sama dengan 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset Perusahaan Terbuka.

TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan Terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud. Adapun hingga akhir tahun 2024 tidak terdapat transaksi yang memenuhi kategori benturan kepentingan.

TRANSAKSI AFILIASI

Berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, Afiliasi adalah:

1. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
2. Hubungan antara pihak dengan Pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
3. Hubungan antara 2 (dua) Perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
4. Hubungan antara Perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
5. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
6. Hubungan antara Perusahaan dan Pemegang Saham Utama.

Transaksi Afiliasi adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka atau Perusahaan Terkendali

MATERIAL TRANSACTIONS

Based on Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities, a material transaction is any transaction carried out by a public company or controlled company that meets the transaction value limit of 20% (twenty percent) or more of the equity of the Public Company. In the event that the transaction as referred to, is carried out by a Public Company that has negative equity, the transaction is categorized as a material transaction if the transaction value is equal to 10% (ten percent) or more of the total assets of the Public Company.

CONFLICT OF INTEREST TRANSACTION

In accordance with the provisions in the Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions, a Conflict of Interest is the difference between the economic interests of a Public Company and the personal economic interests of Members of the Board of Directors, Members of the Board of Commissioners, Majority Shareholders, or Controlling parties that can harm the public company in question. As of the end of 2024, there were no transactions that met the category of conflict of interest.

AFFILIATED TRANSACTION

Based on the provisions in the Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions, Affiliated parties include:

1. Family relationship due to marriage and descent up to the second degree, both horizontally and vertically;
2. Relationship between Employees, Directors, or Commissioners of the same party;
3. Relationship between 2 (two) Companies where there is 1 (one) or more members on the same Board of Directors or Board of Commissioners;
4. Relationship between the Company and the other Party, either directly or indirectly, controlling or being controlled by the Company;
5. Relationship between 2 (two) controlled companies, either directly or indirectly, by the same party; or
6. Relationship between the Company and Majority Shareholders.

Affiliate Transactions are any activities and/or transactions conducted by a public company or a controlled company with an Affiliate of a public company or an Affiliate of a Member of the Board of Directors, Member of the Board of Commissioners, Major Shareholder, or Controller, including any activities and/or transactions conducted by a Public Company or Controlled Company for the benefit of an

untuk kepentingan Afiliasi dari Perusahaan Terbuka atau Afiliasi dari anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama, atau Pengendali.

Sampai dengan akhir tahun 2024, Perseroan tidak melakukan transaksi yang memenuhi kriteria sebagai transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Dengan demikian, tidak terdapat transaksi afiliasi yang perlu diungkapkan terkait tanggal, nilai, objek transaksi, nama pihak, sifat hubungan afiliasi, penjelasan kewajaran, maupun pemenuhan ketentuan terkait transaksi afiliasi.

Pernyataan Direksi atas Prosedur Transaksi Afiliasi

Direksi menyatakan bahwa sepanjang tahun 2024, Perseroan tidak melakukan transaksi yang memenuhi kriteria sebagai Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Meskipun demikian, Direksi memastikan bahwa dalam hal terdapat transaksi afiliasi di masa mendatang, Perseroan akan menjalankan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa setiap transaksi tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan memenuhi prinsip transaksi wajar (arm's length principle), sesuai praktik bisnis yang berlaku umum dan regulasi pasar modal yang berlaku.

Peran Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Prosedur Transaksi Afiliasi

Sepanjang tahun 2024, Perseroan tidak melakukan transaksi yang memenuhi kriteria sebagai Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Meskipun demikian, Dewan Komisaris bersama Komite Audit berkomitmen untuk menjalankan peran pengawasan yang memadai terhadap setiap potensi transaksi afiliasi di masa mendatang. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris bersama Komite Audit memainkan peran penting dalam memastikan bahwa seluruh transaksi afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan memenuhi praktik bisnis yang berlaku umum, termasuk penerapan prinsip kewajaran transaksi (arm's-length principle). Melalui penerapan prosedur yang memadai, Dewan Komisaris dan Komite Audit melakukan pengawasan serta evaluasi atas setiap tahapan transaksi guna menjamin kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun kebijakan internal Perseroan.

Penjelasan atas Transaksi Afiliasi atau Transaksi Material yang Rutin, Berulang, dan/atau Berkelanjutan

Sepanjang tahun 2024, Perseroan tidak melakukan transaksi afiliasi maupun transaksi material yang merupakan kegiatan usaha untuk menghasilkan pendapatan usaha yang dilakukan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Dengan demikian, tidak

Affiliate of a Public Company or an Affiliate of a member of the Board of Directors, Member of the Board of Commissioners, Majority or Controlling Shareholder.

Up until the end of 2024, the Company had not conducted any transactions that met the criteria as an affiliated transaction as referred to in the Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.

Therefore there were no affiliated transactions that needed to be reported regarding the date, value, object of the transaction, name of the party, nature of the affiliated relationship, explanation of fairness, or fulfillment of provisions related to affiliated transactions.

Directors' Statement on Affiliated Transaction Procedures

The Board of Directors has stated that throughout 2024, the Company did not conduct any transactions that met the criteria as an Affiliated Transactions as stipulated in the Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.

Nevertheless, the Board of Directors ensures that in the event of any future affiliated transactions, the Company will carry out adequate procedures to ensure that all such transactions are carried out based on the prudential principle and meets the principle of fair transactions (arm's length principle), in accordance with generally accepted business practices and applicable capital market regulations.

Role of the Board of Commissioners and the Audit Committee in carrying Out Affiliated Transaction Procedures

Throughout 2024, the Company did not conduct any transactions that met the criteria of an Affiliated Transactions as referred to in the Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflict of Interest Transactions.

Nevertheless, the Board of Commissioners together with the Audit Committee are committed to carrying out an adequate supervisory role for any future potential affiliated transactions when carrying out their duties, the Board of Commissioners together with the Audit Committee play an important role in ensuring that all affiliated transactions conducted by the Company comply with generally accepted business practices, including the application of the arm's-length principle. By applying adequate procedures, the Board of Commissioners and the Audit Committee supervise and evaluate each stage of the transaction to ensure its compliance with the provisions of applicable laws and regulations as well as the Company's internal policies.

Explanation of Routine, Recurring, and/or Ongoing Affiliated Transactions or Material Transactions

Throughout 2024, the Company did not carry out any routine, recurring, and/or ongoing affiliated transactions or material transactions that generated business income. Therefore, there were no transactions that required additional disclosure related to the

terdapat transaksi yang memerlukan pengungkapan tambahan terkait klasifikasi tersebut dalam laporan tahunan ini maupun dalam laporan keuangan tahunan 2024.

Pengungkapan Terkait Persetujuan Pemegang Saham Independen atas Transaksi Afiliasi

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat transaksi afiliasi maupun transaksi benturan kepentingan yang dilakukan oleh Perseroan yang memerlukan persetujuan pemegang saham independen melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang berkaitan dengan persetujuan transaksi afiliasi atau transaksi benturan kepentingan.

TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi dalam rangka mendukung kegiatan usaha, yang dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran dan ketentuan yang sebanding dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak independen. Seluruh transaksi dan saldo dengan pihak berelasi telah diungkapkan secara transparan dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun 2024, sesuai dengan ketentuan PSAK 224 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Informasi rinci mengenai transaksi dengan pihak berelasi dapat dilihat pada Catatan 40 Laporan Keuangan Konsolidasian.

Sesuai PSAK 224, pihak-pihak berelasi didefinisikan, sebagai berikut:

1. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - b. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - c. Merupakan personel manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
2. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - a. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya);
 - b. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, di mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - d. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
 - g. Orang yang diidentifikasi dalam (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personel manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);

classification in this annual report or in the 2024 annual financial statements.

Disclosure Regarding Independent Shareholder Approval of Affiliated Transactions

Throughout 2024, the Company did not carry out any affiliated transactions or conflict of interest transactions that required the approval of independent shareholders through a General Meeting of Shareholders (GMS). Therefore, there is no information to report on the date of the GMS granting the approval of affiliated transactions or conflict of interest transactions.

RELATED PARTY TRANSACTIONS

The Company conducts transactions with related parties to support its business activities, which are carried out based on the principle of fairness and provisions comparable to transactions conducted with independent parties. All transactions and balances with related parties have been transparently disclosed in the Company's 2024 Consolidated Financial Statements, in accordance with the provisions of PSAK 224 concerning Disclosure of Related Parties. Detailed information regarding transactions with related parties can be seen in Note 40 of the Consolidated Financial Statements.

In accordance with PSAK 224, related parties are defined as follows:

1. People or close family members have relationships with the reporting entity if the person:
 - a. Has control or joint control over the reporting entity;
 - b. Has significant influence over the reporting entity; or
 - c. Are key management personnel of the reporting entity or the parent entity of the Company.
2. An entity is related to the reporting entity if it meets one of the following:
 - a. The reporting entity and the entity are members of the same business group (meaning that the parent entity, subsidiaries and subsequent subsidiaries are related to other entities);
 - b. One entity is an associated or joint venture entity of another entity (or an associated or joint venture entity that is a member of a business group, where the other entity is a member);
 - c. Both entities are joint ventures of the same third party;
 - d. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate entity of a third entity;
 - e. The entity is a post-employment benefits program for employee benefits of the reporting entity or entities related to the reporting entity. If the reporting entity is the entity that organizes the program, then the sponsoring entity is also related to the reporting entity;
 - f. Entities controlled or jointly controlled by the persons identified in letter (a);
 - g. Persons identified in (a) (i) have significant influence over the entity or are key management personnel of the entity (or the parent entity of the entity); or

- h. Entitas, atau anggota dari kelompok di mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personel manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

- h. The entity, or members of a group of which the entity is part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent entity of the reporting entity.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada Pemerintah, instansi pemerintah, dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Government-related entities are entities that are controlled, jointly controlled, or influenced by the government. Government refers to the government, government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan atau dipengaruhi secara signifikan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan Pemegang Saham entitas, atau entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa Pemegang Saham.

Entities related to the Government can be entities that are controlled or significantly influenced by the Ministry of Finance that is a Shareholder of the entity, or entities controlled by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of SOEs as the shareholders' proxies.

NAMA PIHAK BERELASI YANG MELAKUKAN TRANSAKSI, SIFAT HUBUNGAN BERELASI DAN TUJUAN TRANSAKSI

NAME OF RELATED PARTY CARRYING OUT THE TRANSACTION, NATURE OF THE RELATED PARTY RELATIONSHIP AND PURPOSE OF THE TRANSACTION

Berikut tabel yang menginformasikan nama pihak yang melakukan transaksi, sifat hubungan, dan sifat transaksi yang dilakukan.

The following table provides information about the name of the party carrying out the transaction, the nature of the relationship and the nature of the transaction carried out.

Pihak Berelasi Related Parties	Hubungan Relationship	Jenis Transaksi Type of Transactions
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Kas dan Setara Kas Cash and cash equivalents
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Kas dan Setara Kas, Piutang Usaha, Pendapatan Usaha Cash and Cash Equivalents, Accounts Receivable, Operating Revenue
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Kas dan Setara Kas, Piutang Usaha, Bagian Jangka Pendek dari Pinjaman Bank Jangka Panjang, Pinjaman Bank Jangka Pendek, Pinjaman Bank Jangka Panjang, Pendapatan Usaha Cash and Cash Equivalents, Accounts Receivable, Short Term Portion of Long Term Bank Loans, Short Term Bank Loans, Long Term Bank Loans, Operating Revenue
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Kas dan Setara Kas, Piutang Usaha, Pinjaman Bank Jangka Pendek, Pendapatan Usaha Cash and Cash Equivalents, Trade Receivables, Short Term Bank Loans, Operating Revenue
Perum Jasa Tirta I	Dikendalikan oleh Pemegang Saham Controlled by the Shareholders	Pendapatan Usaha Operating Revenue
Perum Jasa Tirta II	Dikendalikan oleh Pemegang Saham Controlled by the Shareholders	Pendapatan Usaha Operating Revenue
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pendapatan Usaha Operating Revenue
PT Danareksa Capital	Dikendalikan oleh Pemegang Saham Controlled by the Shareholders	Pendapatan Usaha Operating Revenue
PT Jalin Pembayaran Nusantara	Dikendalikan oleh Pemegang Saham Controlled by the Shareholders	Pendapatan Usaha Operating Revenue
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pendapatan Usaha Operating Revenue

Pihak Berelasi Related Parties	Hubungan Relationship	Jenis Transaksi Type of Transactions
PT Kawasan Berikat Nusantara	Dikendalikan oleh Pemegang Saham Controlled by the Shareholders	Pendapatan Usaha Operating Revenue
PT Kawasan Industri Makassar	Dikendalikan oleh Pemegang Saham Controlled by the Shareholders	Pendapatan Usaha Operating Revenue
PT Kawasan Industri Medan	Dikendalikan oleh Pemegang Saham Controlled by the Shareholders	Pendapatan Usaha Operating Revenue
PT Kawasan Industri Wijayakusuma	Dikendalikan oleh Pemegang Saham Controlled by the Shareholders	Pendapatan Usaha Operating Revenue
PT Kliring Berjangka Indonesia	Dikendalikan oleh Pemegang Saham Controlled by the Shareholders	Pendapatan Usaha Operating Revenue
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pendapatan Usaha Operating Revenue
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pendapatan Usaha Operating Revenue
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pendapatan Usaha Operating Revenue
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pendapatan Usaha Operating Revenue
PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	Dikendalikan oleh Pemegang Saham Controlled by the Shareholders	Pendapatan Usaha Operating Revenue
PT Taspen (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pendapatan Usaha Operating Revenue
PT Telekomunikasi Selular	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Republik Indonesia Entity Related to the Government of the Republic of Indonesia	Pendapatan Usaha Operating Revenue
PT Wijaya Karya Realty	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Republik Indonesia Entity Related to the Government of the Republic of Indonesia	Pendapatan Usaha Operating Revenue
PT Yodya Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pendapatan Usaha Operating Revenue
PT Bondi Syad Mulia	Entitas Anak yang Tidak Dikonsolidasi Unconsolidated Subsidiary	Pinjaman Investasi Jangka Panjang, Pendapatan Usaha Long Term Investment Loans, Operating Revenue
PT Citilink Indonesia	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Republik Indonesia Entity Related to the Government of the Republic of Indonesia	Pinjaman Investasi Jangka Panjang, Pendapatan Usaha Long Term Investment Loans, Operating Revenue
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pinjaman Investasi Jangka Panjang, Pendapatan Usaha Long Term Investment Loans, Operating Revenue
PT Artha Bangun Pratama	Ventura Bersama Joint Venture	Pinjaman Investasi Jangka Pendek Long Term Investment Loans
PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pinjaman Investasi Jangka Pendek Long Term Investment Loans
Perum Perumnas	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pinjaman Investasi Jangka Pendek, Pendapatan Usaha Long Term Investment Loans, Operating Revenue
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pinjaman Investasi Jangka Pendek, Pendapatan Usaha Long Term Investment Loans, Operating Revenue

Pihak Berelasi Related Parties	Hubungan Relationship	Jenis Transaksi Type of Transactions
PT Industri Kereta Api (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan, Pendapatan Usaha Loans Disbursed - Bailout Funds, Operating Revenue
PT Indah Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan, Pendapatan Usaha Loans Disbursed - Bailout Funds, Operating Revenue
PT PDI Pulau Batam (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan, Pendapatan Usaha Loans Disbursed - Bailout Funds, Operating Revenue
PT Primissima (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan, Pendapatan Usaha Loans Disbursed - Bailout Funds, Operating Revenue
PT Dirgantara Indonesia	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Republik Indonesia Entity Related to the Government of the Republic of Indonesia	Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi Loans Distributed - Restructuring and/or Revitalization
PT PAL Indonesia	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Republik Indonesia Entity Related to the Government of the Republic of Indonesia	Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi, Pendapatan Usaha Loans Distributed - Restructuring and/or Revitalization, Operating Revenue
Kementerian Keuangan	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Republik Indonesia Entity Related to the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha Trade Receivables
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Republik Indonesia Entity Related to the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha Trade Receivables
Perum DAMRI	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha Trade Receivables
PT Asuransi Jasa Indonesia	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Republik Indonesia Entity Related to the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha Trade Receivables
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha Trade Receivables
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha Trade Receivables
PT Perkebunan Mitra Ogan	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Republik Indonesia Entity Related to the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha Trade Receivables
PT Sang Hyang Seri	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Republik Indonesia Entity Related to the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha Trade Receivables
PT Semen Kupang (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha Trade Receivables
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha Trade Receivables
Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha, Pendapatan Usaha Trade Receivables, Operating Revenue
PT BRI Danareksa Sekuritas	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha, Pendapatan Usaha Trade Receivables, Operating Revenue

Pihak Berelasi Related Parties	Hubungan Relationship	Jenis Transaksi Type of Transactions
PT Danareksa (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha, Pendapatan Usaha Trade Receivables, Operating Revenue
PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Dikendalikan oleh Pemegang Saham Controlled by the Shareholders	Piutang Usaha, Pendapatan Usaha Trade Receivables, Operating Revenue
PT Krakatau Sarana Infrastruktur	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Republik Indonesia Entity Related to the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha, Pendapatan Usaha Trade Receivables, Operating Revenue
PT Merpati Maintenance Facility	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Republik Indonesia Entity Related to the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha, Pendapatan Usaha Trade Receivables, Operating Revenue
PT Nindya Beton	Entitas Asosiasi Associated Entity	Piutang Usaha, Pendapatan Usaha Trade Receivables, Operating Revenue
PT Nindya Karya	Dikendalikan oleh Pemegang Saham Controlled by the Shareholders	Piutang Usaha, Pendapatan Usaha Trade Receivables, Operating Revenue
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha, Pendapatan Usaha Trade Receivables, Operating Revenue
PT Perikanan Indonesia	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Republik Indonesia Entity Related to the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha, Pendapatan Usaha Trade Receivables, Operating Revenue
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha, Pendapatan Usaha Trade Receivables, Operating Revenue
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha, Pendapatan Usaha Trade Receivables, Operating Revenue
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha, Pendapatan Usaha Trade Receivables, Operating Revenue
PT Matoa Kidung Bahtera	Entitas Anak yang Tidak Dikonsolidasi Unconsolidated Subsidiary	Piutang Usaha, Pinjaman Investasi Jangka Panjang, Pendapatan Usaha Trade Receivables, Long-Term Investment Loans, Operating Revenue
PT Matoa Kidung Samudera	Entitas Anak yang Tidak Dikonsolidasi Unconsolidated Subsidiary	Piutang Usaha, Pinjaman Investasi Jangka Panjang, Pendapatan Usaha Trade Receivables, Long-Term Investment Loans, Operating Revenue
PT National Utility Helicopters	Entitas Asosiasi Associated Entity	Piutang Usaha, Pinjaman Investasi Jangka Panjang, Pendapatan Usaha Trade Receivables, Long-Term Investment Loans, Operating Revenue
PT Rejeki Intilogam Jaya	Entitas Anak yang Tidak Dikonsolidasi Unconsolidated Subsidiary	Piutang Usaha, Pinjaman Investasi Jangka Panjang, Pendapatan Usaha Trade Receivables, Long-Term Investment Loans, Operating Revenue
PT Sippa Kemasan Internasional	Entitas Anak yang Tidak Dikonsolidasi Unconsolidated Subsidiary	Piutang Usaha, Pinjaman Investasi Jangka Panjang, Pendapatan Usaha Trade Receivables, Long-Term Investment Loans, Operating Revenue
PT Duta Mentari Raya	Entitas Anak yang Tidak Dikonsolidasi Unconsolidated Subsidiary	Piutang Usaha, Pinjaman Investasi Jangka Panjang, Pendapatan Usaha Trade Receivables, Long-Term Investment Loans, Operating Revenue
PT Energy Management Indonesia	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Republik Indonesia Entity Related to the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha, Pinjaman Investasi Jangka Panjang, Pendapatan Usaha Trade Receivables, Long-Term Investment Loans, Operating Revenue
PT Pratama Persada Airborne	Entitas Anak yang Tidak Dikonsolidasi Unconsolidated Subsidiary	Piutang Usaha, Pinjaman Investasi Jangka Panjang, Pendapatan Usaha Trade Receivables, Long-Term Investment Loans, Operating Revenue

Pihak Berelasi Related Parties	Hubungan Relationship	Jenis Transaksi Type of Transactions
PT Magnesium Gosari Internasional	Entitas Anak yang Tidak Dikonsolidasi Unconsolidated Subsidiary	Piutang Usaha, Pinjaman Investasi Jangka Pendek, Pinjaman Investasi Jangka Panjang, Pendapatan Usaha Trade Receivables, Short-Term Investment Loans, Long-Term Investment Loans, Operating Revenue
PT Barata Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha, Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan, Cessie Piutang Jangka Panjang, Pendapatan Usaha Trade Receivables, Loans Disbursed - Bailouts, Long Term Cessie Receivables, Operating Revenue
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha, Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan, Cessie Piutang Jangka Panjang, Pendapatan Usaha Trade Receivables, Loans Disbursed - Bailouts, Long Term Cessie Receivables, Operating Revenue
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha, Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan, Pendapatan Usaha Trade Receivables, Loans Disbursed - Bailouts, Operating Revenue
PT Boma Bisma Indra (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha, Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan, Pendapatan Usaha Trade Receivables, Loans Disbursed - Bailouts, Operating Revenue
PT Djakarta Lloyd (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha, Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan, Pendapatan Usaha Trade Receivables, Loans Disbursed - Bailouts, Operating Revenue
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha, Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan, Pendapatan Usaha Trade Receivables, Loans Disbursed - Bailouts, Operating Revenue
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha, Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan, Pinjaman Investasi Jangka Pendek, Pinjaman Investasi Jangka Panjang, Pendapatan Usaha Trade Receivables, Loans Disbursed - Bailouts, Short Term Investment Loans, Long Term Investment Loans, Operating Revenue
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha, Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi, Pinjaman Investasi Jangka Pendek, Pinjaman Investasi Jangka Panjang, Pendapatan Usaha Trade Receivables, Loans Disbursed - Restructuring and/or Revitalization, Short Term Investment Loans, Long Term Investment Loans, Operating Revenue
PT Aviari Pariwisata Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha, Utang Lain-Lain, Pendapatan Usaha Trade Receivables, Other Payables, Operating Revenue
PT Pos Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Piutang Usaha, Pendapatan Usaha Trade Receivables, Operating Revenue
PT Amarta Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan, Pendapatan Usaha Loans Disbursed - Bailouts, Operating Revenue
PT Indofarma (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pendapatan Usaha Operating Revenue
PT AMC Korea Jaya	Entitas Asosiasi Associated Entity	Pendapatan Usaha Operating Revenue
PT Telekomunikasi Indonesia	Entitas Asosiasi Associated Entity	Pendapatan Usaha Operating Revenue

PENJELASAN MENGENAI KEWAJARAN TRANSAKSI

Kewajaran seluruh transaksi yang dilakukan Perusahaan dengan Pihak-pihak Berelasi telah diungkapkan pada laporan keuangan, dan telah sesuai dengan standar PSAK 224 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi." Semua transaksi dengan pihak yang berelasi dilakukan dengan tingkat harga, persyaratan, dan kondisi normal sebagaimana yang dilakukan dengan pihak ketiga dan telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian Perusahaan.

ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Sebagaimana dalam hubungan bisnis dengan pihak ketiga, transaksi antara Grup dan Pihak Berelasi dilaksanakan berdasarkan prinsip saling membutuhkan serta untuk mendukung pengembangan operasional dan bisnis Grup.

EXPLANATION OF TRANSACTION FAIRNESS

The fairness of all transactions carried out by the Company with Related Parties has been disclosed in the financial statements, and is in accordance with PSAK 224 standards regarding "Related Party Disclosures." All transactions with related parties are carried out at normal prices, terms and conditions as those carried out with third parties and have been disclosed in the Company's consolidated financial statements.

REASONS FOR TRANSACTIONS

As in business relationships with third parties, the Group's transactions with Related Parties are carried out based on the principle of mutual need, and to support the Group's operational and business development.

Tabel Pihak Berelasi dalam Aset 2023-2024
Related Parties Assets 2023-2024

Uraian Description	2024		2023	
	Nominal (Rp - Juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	Nominal (Rp - Juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	988.741	5,66%	1.052.364	6,06%
Pinjaman Investasi Jangka Pendek Current Investment Loans	294.766	1,69%	330.994	1,91%
Piutang Usaha Accounts Receivables	172.091	0,99%	137.976	0,79%
Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan Loan Receivables - Bailout Funds	920.037	5,27%	625.144	3,60%
Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi Loan Receivables - Restructuring and/ or Revitalization	530.595	3,04%	535.080	3,08%
Pinjaman Investasi Jangka Panjang Non-Current Investments	1.162.006	6,65%	1.499.816	8,63%
Cessie Piutang Jangka Panjang Non-Current Cessie Receivables	39.344	0,23%	39.344	0,23%
Jumlah Total	4.107.580	23,52%	4.220.718	24,30%

Sebagian besar saldo aset Grup yang didapatkan dari pihak berelasi pada tahun 2024 Rp4.107,58 miliar, turun sebesar 2,68% dibandingkan tahun 2023 yang senilai Rp4.220,72 miliar. Penurunan ini utamanya disebabkan oleh menurunnya Pinjaman Investasi Jangka Panjang.

The majority of the Group's assets in 2024 came from related parties, and amounted to Rp4,107.58 billion, a decrease of 2.68% compared to Rp4,220.72 billion in 2023. This decrease was mainly due to a decrease in Long-Term Investment Loans.

Tabel Pihak Berelasi dalam Liabilitas 2023-2024
 Related Parties Liabilities 2023-2024

Uraian Description	2024		2023	
	Nominal (Rp - Juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	Nominal (Rp - Juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Pinjaman Bank Jangka Pendek Bank and Financial Institutions Loans	812.557	13,03%	844.284	12,57%
Bagian Jangka Pendek dari Pinjaman Bank Jangka Panjang Short Term Portion of Long Term Bank Loans	--	0,00%	4.000	0,06%
Beban Akrua dan Utang Lain-lain Accrued Expenses and Other Payables	--	0,00%	30.925	0,46%
Pinjaman Bank Jangka Panjang Long Term Bank Loans	349.598	5,61%	345.598	5,15%
Jumlah Total	1.162.155	18,64%	1.224.807	18,24%

Pada tahun 2024, liabilitas dari pihak berelasi tercatat sebesar Rp1.162,16 miliar terjadi penurunan sebesar 5,12% jika dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.224,81 miliar. Sebagian besar saldo liabilitas Grup yang berasal dari pihak berelasi berasal dari Pinjaman Bank Jangka Pendek dan Jangka Panjang.

In 2024, related parties liabilities amounted to Rp1,162.16 billion, a decrease of 5.12% compared to the previous year's Rp1,224.81 billion. Most of the Group's liabilities from related parties come from Short-Term and Long-Term Bank Loans.

Tabel Pihak Berelasi dalam Pendapatan Usaha 2023-2024
 Operating Revenue from Related Parties 2023-2024

Uraian Description	2024		2023	
	Nominal (Rp - Juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)	Nominal (Rp - Juta) Nominal (Rp-million)	Persentase (%) Percentage (%)
Pendapatan Usaha Operating Revenues	386.280	23,23%	337.245	20,16%
Jumlah Total	386.280	23,23%	337.245	20,16%

Pada tahun 2024, Perseroan mencatat peningkatan Pendapatan Usaha sebesar Rp49,04 miliar atau 14,54% dari Rp337,25 miliar pada tahun sebelumnya menjadi Rp386,28 miliar.

In 2024, the Company's Operating Revenue increased by Rp49.04 billion, or 14.54% to reach Rp337.25 billion, compared to the previous year's Rp386.28 billion.

Prospek Usaha Business Prospects

Memasuki tahun 2025, PPA berada pada jalur strategis yang menjanjikan, meskipun di tengah tantangan perlambatan ekonomi global dan ketidakpastian pasar. Perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh stabil di kisaran 5,0% dengan inflasi yang mulai melandai serta permintaan domestik yang tetap solid, memberikan landasan positif bagi pengembangan sektor restrukturisasi dan pengelolaan aset yang menjadi fokus utama PT PPA.

PPA sebagai National Asset Management Company (NAMCO) di bawah Holding BUMN Danareksa, memiliki peran sentral dalam restrukturisasi dan revitalisasi BUMN. Dengan mandat khusus dari Kementerian BUMN, PT PPA menangani 21 BUMN dan 1 anak perusahaan BUMN melalui mekanisme Surat Kuasa Khusus (SKK). Prospek usaha ke depan sangat didukung oleh penguatan portofolio aset melalui skema special situation fund (SSF), pembentukan Special Purpose Vehicle (SPV), dan kemitraan strategis dengan perbankan dan investor institusional.

Selain pengelolaan restrukturisasi BUMN, PPA juga melihat peluang pertumbuhan dari pengelolaan non-performing loan (NPL) institusi keuangan melalui pendekatan off-balance sheet berbasis investasi. Inisiatif ini tidak bersaing langsung dengan pembiayaan perbankan konvensional, namun justru melengkapinya dengan produk investasi yang adaptif terhadap risiko dan dinamika pasar. Di sisi lain, layanan konsultasi dan advisory kepada BUMN, BUMD, dan instansi pemerintah diproyeksikan terus meningkat seiring meningkatnya kebutuhan akan solusi manajemen keuangan, pemulihan aset, serta efisiensi struktur korporasi.

Dengan memperkuat sinergi dalam ekosistem Holding BUMN Danareksa dan mengoptimalkan peran strategisnya dalam peta investasi dan pengelolaan aset nasional, PT PPA meyakini bahwa prospek usaha tahun 2025 dan ke depan tetap menjanjikan. Hal ini ditopang oleh transformasi internal yang berkelanjutan, penguatan struktur pendanaan, serta keberpihakan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah dalam mendorong efisiensi dan kinerja BUMN secara menyeluruh.

Entering 2025, PPA is on a promising strategic path, despite the challenges of a global economic slowdown and market uncertainty. The Indonesian economy is projected to grow steadily in the range of 5.0% with inflation starting to decline and domestic demand remaining solid, providing a positive foundation for the development of the restructuring and asset management sectors that are the main focus of PT PPA.

PPA as a National Asset Management Company (NAMCO) under the Danareksa BUMN Holding, plays a central role in the restructuring and revitalization of BUMN. With a special mandate from the Ministry of BUMN, PT PPA handles 21 BUMN and 1 BUMN subsidiary through a Special Power of Attorney (SKK) mechanism. Future business prospects are strongly supported by the strengthening of the asset portfolio through the special situation fund (SSF) scheme, the formation of a Special Purpose Vehicle (SPV), and strategic partnerships with banks and institutional investors.

In addition to managing BUMN restructuring, PPA also sees growth opportunities from managing financial institutions non-performing loans (NPL) through an investment-based off-balance sheet approach. This initiative does not compete directly with its conventional banking financing, but instead complements it with investment products that are adaptive to market risks and dynamics. On the other hand, consulting and advisory services for BUMN, BUMD, and government agencies are projected to continue to increase together with the increasing need for financial management solutions, asset recovery, and corporate structure efficiencies.

By strengthening synergy in the Danareksa BUMN Holding ecosystem and optimizing its strategic role in the national investment and asset management map, PT PPA believes that the business prospects for 2025 and beyond remain promising. This is supported by ongoing internal transformation, strengthening of the funding structure, and the government's fiscal policies, and structural reform support for encouraging the efficiency and performance of BUMN as a whole.

Aspek Pemasaran

Marketing Aspect

STRATEGI PEMASARAN

Dalam rangka mewujudkan visinya sebagai perusahaan investasi terkemuka dan mitra terpercaya dalam restrukturisasi korporasi, PPA menjalankan strategi pemasaran yang berfokus pada penciptaan nilai tambah melalui pendekatan kolaboratif dan solusi berbasis investasi. PPA menempatkan diri sebagai *National Asset Management Company* (NAMCO) yang berperan dalam restrukturisasi BUMN, pengelolaan *non-performing loan* (NPL), serta optimalisasi aset melalui instrumen investasi seperti *special situation fund* (SSF). Selain itu, PPA memasarkan layanan konsultasi dan restrukturisasi kepada berbagai entitas, termasuk BUMN, anak usaha BUMN, BUMD, dan instansi pemerintah, dengan menekankan peran sebagai mitra strategis yang menyediakan solusi pembiayaan dan pengelolaan aset secara menyeluruh. Strategi ini juga diperkuat dengan kerja sama bersama perbankan, investor strategis, dan pembentukan *Special Purpose Vehicle* (SPV) untuk mendukung skema investasi jangka panjang, baik di dalam maupun luar negeri. Dalam kerangka sinergi Holding BUMN Danareksa, PT PPA memperluas jaringan dan cakupan pemasarannya, menjadikan strategi pemasaran PPA semakin adaptif dan terintegrasi dengan ekosistem BUMN yang lebih luas.

PANGSA PASAR

Sebagai institusi yang ditugaskan secara khusus oleh Kementerian BUMN, PT PPA memegang posisi strategis dalam pengelolaan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN, mencakup 21 BUMN dan 1 anak usaha BUMN melalui mekanisme Surat Kuasa Khusus (SKK). Dengan peran ini, PT PPA secara efektif menguasai pangsa pasar dominan dalam segmen restrukturisasi BUMN berbasis mandat pemerintah.

Selain itu, PT PPA juga memperluas cakupan ke pengelolaan NPL institusi keuangan dan layanan *advisory* kepada sektor publik lainnya, menjadikannya sebagai pemain utama di bidang pengelolaan aset dan investasi strategis negara. Meskipun tidak beroperasi dalam pasar terbuka secara konvensional, pangsa pasar PT PPA dalam konteks layanan berbasis mandat dan pengelolaan aset nasional sangat signifikan dan terus diperkuat melalui kemitraan dan inovasi model bisnis.

MARKETING STRATEGY

To realize its vision as a leading investment company and trusted partner in corporate restructuring, PPA applies a marketing strategy that focuses on creating added value through a collaborative approach and investment-based solutions. PPA positions itself as a National Asset Management Company (NAMCO) that plays a role in BUMN restructuring, managing non-performing loans (NPLs), and optimizing assets through investment instruments such as special situation funds (SSF). In addition, PPA markets consulting and restructuring services to a number of entities, including BUMN, BUMN subsidiaries, BUMD, and government agencies, by emphasizing its role as a strategic partner that provides comprehensive financing and asset management solutions. This strategy is also strengthened by cooperating with banks, strategic investors, and the establishment of a Special Purpose Vehicle (SPV) to support long-term domestic and overseas investment schemes. Within the framework of the Danareksa BUMN Holding synergy, PT PPA is expanding its marketing network and coverage, making PPA's marketing strategy increasingly adaptive and integrated with the wider BUMN ecosystem.

MARKET SHARE

As an institution specifically assigned by the Ministry of SOEs, PT PPA holds a strategic position in managing the restructuring and revitalization of SOEs, covering 21 SOEs and 1 SOE subsidiary through the Special Power of Attorney (SKK) mechanism. With this role, PT PPA effectively controls a dominant market share in the SOE restructuring segment based on government mandates.

PT PPA has also expanded its scope to the management of NPL financial institutions and advisory services to other public sectors, making it a major player in the field of asset management and strategic state investment. Although not operating in a conventional open market, PT PPA's market share in the context of mandate-based services and national asset management is very significant and continues to be strengthened through partnerships and business model innovation.

Perubahan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Perseroan pada Tahun Buku Terakhir

Changes to Legislation Regulations In The Last Fiscal Year and Their Impact On The Company

Tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh terhadap Perusahaan di sepanjang tahun 2024.

There were no changes in statutory regulations that influenced the Company during 2024.

Perubahan Kebijakan Akuntansi yang Diterapkan Perseroan Pada Tahun Buku Terakhir

Changes In Accounting Policies Applied by The Company In The Last Fiscal Year

Mulai dari 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK telah diubah sesuai dengan penerbitan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI").

Starting from January 1, 2024, references to each PSAK and ISAK have been changed in accordance with the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") directives.

Berikut amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, dengan penerapan dini diperkenankan, yaitu:

- Amendemen PSAK 116: Sewa tentang Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-Balik;
- Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang;
- Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan;
- Amendemen PSAK 207: Laporan Arus Kas dan amendemen PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok; dan
- Revisi PSAK 409: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dan Revisi PSAK 401: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

The following are the amendments to the standards that became effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2024, with early application permitted:

- Amendments to PSAK 116: Leases on Lease Liabilities for Sale and Leaseback;
- Amendments to PSAK 201: Presentation of Financial Statements for the Classification of Liabilities as Short-Term or Long-Term;
- Amendments to PSAK 201: Presentation of Financial Statements for Long-Term Liabilities with Covenants;
- Amendments to PSAK 207: Cash Flow Statement and amendments to PSAK 107: Financial Instruments: Disclosures on Supplier Financing Arrangements; and
- Revision of PSAK 409: Accounting for Zakat, Infak, and Sedekah and Revision of PSAK 401: Presentation of Sharia Financial Statements.

Implementasi amendemen standar tersebut tidak memiliki dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

The implementation of the amendments to the standards had no material impact on the amounts reported in the current period or the previous year.

Tingkat Kesehatan Perusahaan

Company Health Level

Perusahaan telah melakukan penilaian tingkat kesehatan Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan bagi Badan Usaha Milik Negara.

Adapun peringkat (rating) dalam penilaian tingkat kesehatan PPA untuk Tahun Buku 2024 diberikan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia di mana hasil pemeringkatan ini ditetapkan pada 26 Maret 2025 dengan rincian sebagai berikut:

1. Peringkat Berdiri Sendiri (Standalone Rating): A-
2. Peringkat Akhir (Final Rating): idAA/Stable

Dengan demikian, PPA mencapai status “SEHAT” untuk Tahun Buku 2024.

PPA carried out an assessment of the Company’s health level in accordance with the provisions of laws and regulations, in particular the Republic of Indonesia Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State- Owned Enterprises.

PPA’s health level rating for the 2024 fiscal year was carried out by PT Pemeringkat Efek Indonesia with the following rating results determined on March 26, 2025.

1. Standalone Rating: A-
2. Final Rating: idAA/Stable

Whereby, PPA achieved a “HEALTHY” status for the 2024 Fiscal Year.





5

TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PPA telah menunjukkan konsistensi, sistematika, dan berkelanjutan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG serta memberikan nilai lebih yang bermanfaat tersebut diciptakan melalui sikap dan perilaku yang sejalan dengan budaya Perseroan, memberikan jasa dan layanan yang unggul kepada pelanggan, serta inovatif, efisien dan efektif dalam memelihara keberlanjutan bisnis.

PPA has demonstrated consistency, systematicity, and sustainability when applying the GCG principles and when providing beneficial added value created through attitudes and behaviors that are in line with the Company's culture, and superior services to customers, and by being innovative, efficient, and effective to maintain the business sustainability.

Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan Berkelanjutan

COMMITMENT TO SUSTAINABLE GCG IMPLEMENTATION

Seiring dengan berjalannya waktu, PPA terus mengukuhkan komitmennya dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG. Pernyataan komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan komprehensif merupakan faktor yang sangat penting dalam pengelolaan sebuah perusahaan, mengingat risiko dan tantangan yang dihadapi semakin meningkat. Oleh karena itu, Perseroan secara konsisten dan komprehensif terus meningkatkan kualitas penerapan prinsip GCG dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari. Perseroan meyakini bahwa penerapan GCG yang berlandaskan pada standar etika tertinggi mampu menciptakan perusahaan yang berdaya saing tinggi dan tumbuh berkelanjutan, serta berimplikasi positif bagi Perseroan dalam memberikan nilai lebih yang bermanfaat kepada seluruh pemangku kepentingan.

PPA telah menunjukkan konsistensi, sistematis, dan berkelanjutan dalam menerapkan prinsip-prinsip GCG serta memberikan nilai lebih yang bermanfaat tersebut diciptakan melalui sikap dan perilaku yang sejalan dengan budaya Perseroan, memberikan jasa dan layanan yang unggul kepada pelanggan, serta inovatif, efisien dan efektif dalam menyelenggarakan pengembangan bisnis serta menyediakan sistem manajemen risiko dan pengendalian internal yang dapat menjamin akuntabilitas serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan senantiasa memelihara keberlanjutan bisnis Perseroan.

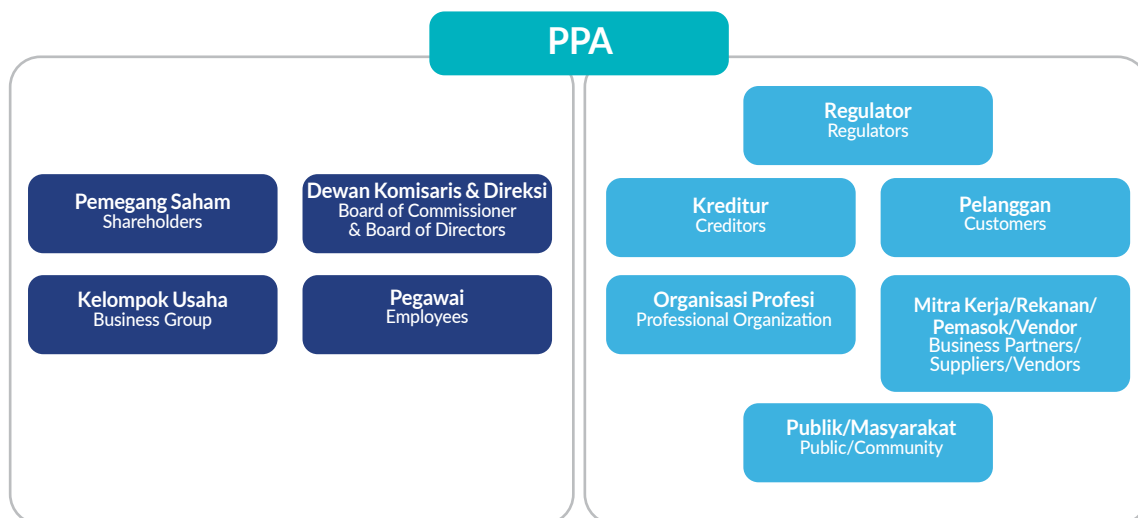
PPA mengemban tugas dalam menjalankan tata Kelola perusahaan dengan semangat yang terkandung dalam penerapan GCG di PPA adalah niat dan tekad Manajemen PPA untuk menjadikan PPA sebagai perusahaan yang terus tumbuh dan berkembang dengan kualitas jasa dan layanan serta proses kerja yang baik, serta memiliki pedoman kode etik, termasuk tanggung jawab terhadap lingkungannya.

PPA has continued to strengthen its commitment to applying the GCG implementation principles. Our commitment to consistent and comprehensive Good Corporate Governance (GCG) implementation is a very important factor in managing a Company, considering the risks and challenges faced are increasing. Therefore, the Company consistently and comprehensively continues to improve the quality of applying the GCG principles when carrying out our daily business activities. The Company believes that GCG implementation based on the highest ethical standards will create a Company that is highly competitive and has sustainable growth, and has positive implications for the Company in providing added value that is beneficial to all stakeholders.

PPA has demonstrated consistency, systematicity, and sustainability when applying the GCG principles and when providing beneficial added value created through attitudes and behaviors that are in line with the Company's culture, and superior services to customers, and by being innovative, efficient, and effective when carrying out business development, and providing a risk management system and internal control that can guarantee accountability and create a healthy business climate and always maintain the sustainability of the Company's business.

The spirit contained in the GCG implementation at PPA reflects the intention and determination of PPA Management to make PPA a Company that continues to grow and develop with quality services and good work processes, and code of ethics guidelines, including responsibility for the environment.

Ruang Lingkup Tata Kelola Perusahaan PPA Scope of PPA Corporate Governance



TUJUAN PENERAPAN GCG DI PPA

Sesuai dengan Ayat (4) Pasal 3 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, tujuan penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN adalah untuk:

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMN;
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Persero/Organ Perum;
3. Mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional; dan
5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Penerapan GCG di PPA juga memiliki tujuan, antara lain:

1. Mendorong tercapainya kesinambungan Perusahaan melalui pengelolaan yang didasarkan pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan;
2. Membangun mekanisme Check and Balances antar organ Perusahaan serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu mendorong peningkatan kinerja Perusahaan dan komunikasi antar organ Perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya;
3. Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan serta citra dan reputasi Perusahaan, sehingga mampu mendorong peningkatan hubungan bisnis dan kinerja Perseroan;
4. Memaksimalkan nilai Perseroan dengan cara meningkatkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar Perseroan memiliki daya saing yang kuat;
5. Mendorong pengelolaan Perseroan secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan;
6. Mendorong agar Organ Perusahaan dapat membuat keputusan dan menjalankan tindakan yang dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan khususnya di sekitar Perseroan;
7. Memberikan kontribusi dalam perekonomian nasional yang dapat dicapai melalui restrukturisasi dan revitalisasi BUMN, pengelolaan aset, serta kegiatan investasi; dan
8. Membantu meningkatkan iklim investasi nasional melalui program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Perseroan.

OBJECTIVES OF GCG IMPLEMENTATION IN PPA

In accordance with Paragraph (4) of Article 3 of the Republic of Indonesia Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs, the Good Corporate Governance implementation principles in SOEs aim is to:

1. Optimize the value of a SOE so it has strong competitiveness, both nationally and internationally, so that it can maintain its existence and live sustainably to achieve the goals and objectives of SOEs;
2. Encourage the SOE management to act in a professional, efficient and effective manner, as well as to empower the functions and increase the independence of Persero/ Perum Organs;
3. Encourage Persero/Perum Organs to make decisions and carry out actions based on high moral values and compliance with statutory provisions, as well as awareness of the social responsibility of SOEs towards stakeholders and environmental sustainability around the SOEs;
4. Increase the contribution of SOEs to the national economy; and
5. Increase a conducive climate for the development of national investments.

PPA GCG implementation also has the following objectives to:

1. Encourage the achievement of Company sustainability through management based on the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, as well as fairness and equality;
2. Establish a Check and Balances mechanism between Company organs and other stakeholders, to encourage improvements in Company performance and communication between Company organs and other stakeholders;
3. Increase stakeholder trust as well as the Company's image and reputation, to encourage improved business relationships and Company performance;
4. Maximize the value of the Company by increasing the principles of transparency, accountability, trustworthiness, responsibility and fairness so that the Company has strong competitiveness;
5. Encourage the management of the Company in a professional, transparent and efficient manner, as well as empower the functions and increasing the independence of the Company's Organs;
6. Encourage Company Organs to take decisions and carry out actions based on high moral values and compliance with applicable laws and regulations, as well as be aware of the Company's social responsibility towards stakeholders and environmental sustainability, especially around the Company;
7. Contribute to the national economy through restructuring and revitalization of SOEs, asset management and investment activities; and
8. Help improve the national investment climate through programs/ activities implemented by the Company.

LANDASAN HUKUM PENERAPAN GCG PPA

1. Undang-Undang Republik Indonesia, di antaranya:
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi;
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara, di antaranya:
 - a. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2006 tentang Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara;
 - c. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara;

PENINGKATAN KUALITAS PENERAPAN GCG SECARA BERKELANJUTAN DI PPA

Sebagai anak Perusahaan BUMN, penerapan GCG oleh Perseroan dilaksanakan dalam bentuk siklus yang terdiri dari beberapa rangkaian. Adapun rangkaian implementasi yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

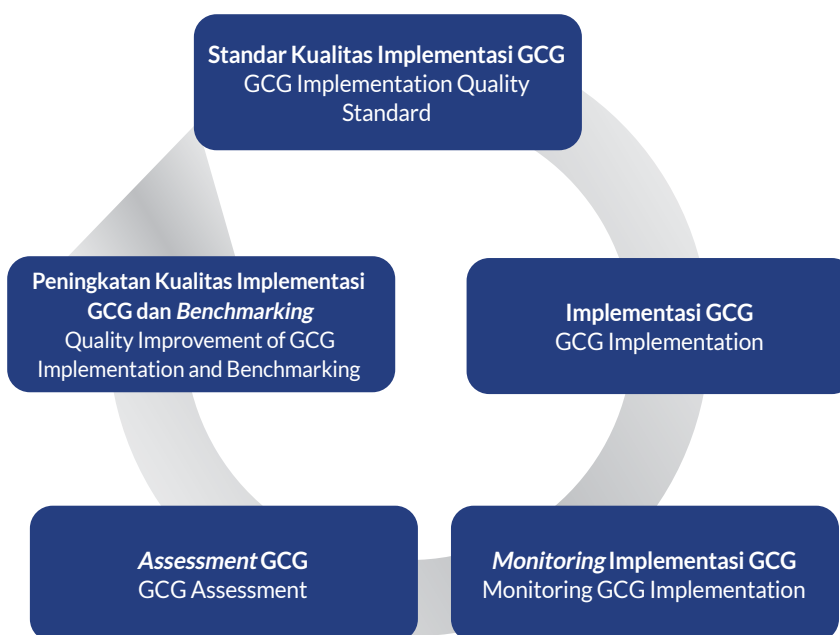
LEGAL BASIS FOR GCG IMPLEMENTATION IN PPA

1. Republic of Indonesia Laws, including:
 - a. Republic of Indonesia Law No. 20 of 2001 as amended by to Republic of Indonesia Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes;
 - b. Republic of Indonesia Law No. 15 of 2002 concerning the Crime of Money Laundering as amended by Republic of Indonesia Law No. 25 of 2003 concerning Amendments to Law No. 15 of 2002 concerning the Crime of Money Laundering;
 - c. Republic of Indonesia Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
 - d. Republic of Indonesia Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
 - e. Republic of Indonesia Law No. 14 of 2008 concerning Information Disclosure;
 - f. Republic of Indonesia Law No. 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.
2. Minister of State-Owned Enterprises Regulations, including:
 - a. Minister of SOEs Regulation No. PER-05/MBU/2006 concerning Audit Committees for State-Owned Enterprises;
 - b. Minister of SOEs Regulation No. PER-02/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners of State-Owned Enterprises;
 - c. Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises;
 - d. Minister of SOEs Regulation No. PER-03/MBU/02/2015 concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Directors of State-Owned Enterprises;

SUSTAINABLE GCG IMPLEMENTATION QUALITY IMPROVEMENT IN PPA

As a SOE subsidiary, the Company's GCG implementation is carried out by following a cycle consisting of several series, as shown below:

Siklus Peningkatan Kualitas Penerapan GCG PPA PPA GCG Implementation Quality Improvement Cycle



Penetapan Standar Kualitas Implementasi GCG PPA

PPA senantiasa memastikan bahwa GCG diterapkan secara konsisten di seluruh unit organisasi. Oleh karena itu, sebagai bagian dari salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PPA telah mengadopsi standar terbaik yang berlaku baik dalam lingkup BUMN, maupun lingkup nasional dan internasional, antara lain:

1. Peraturan perundang-undang Republik Indonesia, sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya;
2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
3. *ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecard* yang dikeluarkan oleh *ASEAN Capital Market Forum (ACMF)*;
4. Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia (PUGKI) yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) tahun 2021.
5. Parameter *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* yang dikembangkan oleh *Indonesia Institute Corporate Governance (IICG)*.

Selaras dengan upaya PPA untuk meningkatkan pencapaian usaha, PPA secara berkesinambungan memperkuat dan meningkatkan kualitas penerapan GCG di lingkungan PPA sebagai landasan dalam menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi kepentingan Pemegang Saham, masyarakat luas, dan pemangku kepentingan lainnya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Upaya tersebut antara lain:

1. Melengkapi *soft structure* atau pedoman-pedoman terkait penerapan GCG yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku dan praktik terbaik penerapan GCG dan melakukan kajian bagi penyempurnaan yang sudah ada demi meningkatkan penerapan GCG.
2. Optimalisasi pelaksanaan *Whistleblowing System* dengan meningkatkan sosialisasi dan efektivitas penanganan kasus.

Determining GCG Implementation Quality Standards in PPA

PPA ensures that GCG is implemented consistently across all organization units. Therefore, as part of a State-Owned Enterprise (SOE), PPA has adopted the best standards that apply both within the SOE scope, as well as nationally and internationally, including:

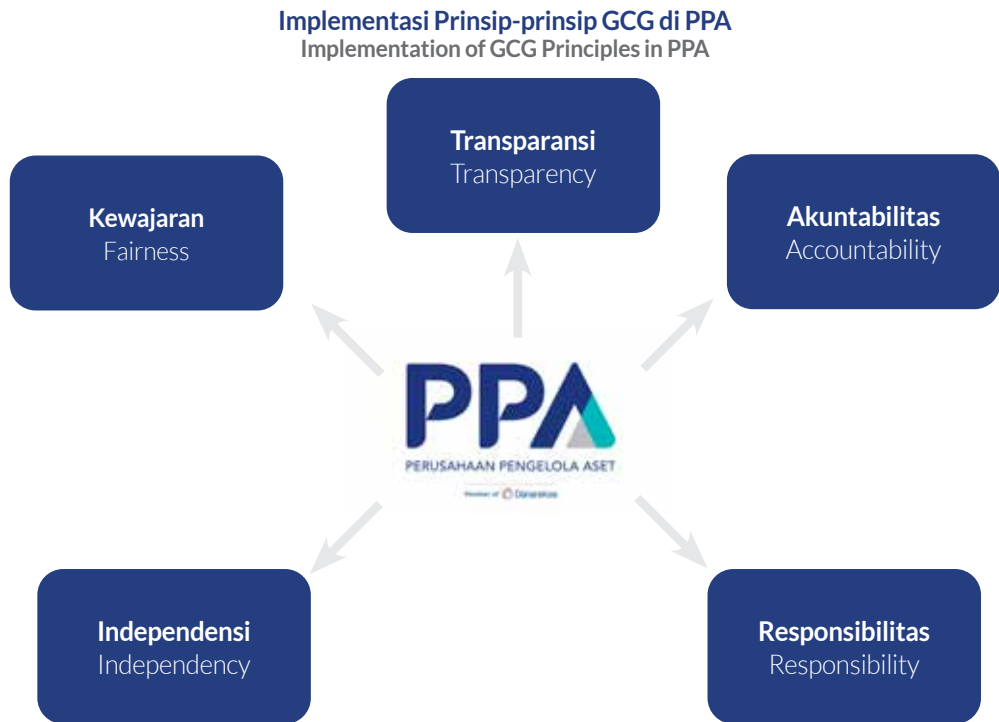
1. The Republic of Indonesia laws and regulations, as previously explained;
2. Republic of Indonesia Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs;
3. *ASEAN Corporate Governance (CG) Scorecard* issued by the *ASEAN Capital Market Forum (ACMF)*;
4. *General Guidelines for Indonesian Corporate Governance (PUGKI)* developed by the *National Committee for Governance Policy (KNKG)* in 2021.
5. *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* parameters developed by the *Indonesia Institute Corporate Governance (IICG)*.

In line with PPA's efforts to increase its business achievements, PPA continuously strengthens and improves the quality of PPA's GCG implementation as a basis for creating sustainable added value for the interests of Shareholders, the wider community and other stakeholders, both in the short and long term. These efforts include:

1. Completing the soft structure or guidelines related to GCG implementation that have been adjusted to applicable regulations and best practices for GCG implementation, and conducting studies for existing improvements in order to improve GCG implementation.
2. Optimizing the implementation of the *Whistleblowing System* by increasing socialization and the effectiveness of case handling.

3. Melakukan evaluasi/penilaian baik oleh pihak independen maupun *self assessment* atas penerapan GCG dengan parameter yang diakui secara nasional dan internasional.

3. Carrying out evaluations/assessments both by independent parties and self-assessments on the GCG implementation using nationally and internationally recognized parameters.



Penerapan atau realisasi prinsip-prinsip GCG di lingkup Perseroan dapat dilihat dari tabel berikut ini:

The application or realization of GCG principles within the Company can be seen in the following table:

Prinsip Dasar Basic Principles	Komitmen PPA PPA Commitment	Penerapan di Lingkup PPA Application in PPA
Transparansi Transparency	Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan, dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai Perusahaan. Transparency in decision-making process, and transparency in disclosing material and relevant information about the Company.	Perusahaan menyediakan informasi terkait kegiatan usahanya kepada <i>stakeholders</i> melalui penyediaan informasi Perusahaan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala antara lain melalui website Perusahaan, penerbitan Laporan Tahunan dan Laporan Triwulan serta laporan lainnya sesuai keperluan. Perusahaan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. The Company discloses information related to its business activities to stakeholders by providing relevant, adequate, and reliable Corporate information in a timely and periodical manner, through the Company's website, the publication of Annual Reports, and Quarterly Reports and other reports as needed. The Company discloses important information in the Annual Report and Financial Statements in accordance with statutory regulations.

Prinsip Dasar Basic Principles	Komitmen PPA PPA Commitment	Penerapan di Lingkup PPA Application in PPA
Akuntabilitas Accountability	Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Clarity of function, implementation and accountability of the organs to carry out the effective management of the Company.	Perusahaan memiliki mekanisme yang kuat dalam proses penerapan GCG. Mekanisme tersebut dirancang dalam bentuk kebijakan, pedoman, prosedur dan hubungan yang jelas antara Dewan Komisaris dan Direksi dalam pengambilan keputusan sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Perusahaan senantiasa mengkaji dan menyempurnakan <i>soft structure</i> GCG secara berkala guna memastikan penerapan GCG sejalan dengan kebutuhan proses bisnis maupun peraturan yang berlaku. Perusahaan telah memiliki Pedoman GCG, Pedoman Etika dan Perilaku (<i>Code of Conduct</i>), Pedoman Kerja/Piagam (<i>Charter</i>) untuk organ Perusahaan, baik Direksi maupun Dewan Komisaris serta organ-organ Penunjang Dewan Komisaris Perusahaan. Dengan demikian, penerapan prinsip GCG akan memberikan dampak yang signifikan dalam jangka panjang, jika sudah menjadi budaya yang diwujudkan dalam perilaku sehari-hari. The Company has a strong mechanism for GCG implementation. This mechanism is designed in the form of policies, guidelines, procedures and a clear relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors in making decisions in accordance with their duties, functions and responsibilities. The Company reviews and updates its GCG softstructure periodically to ensure that GCG implementation is in line with the needs of business processes and applicable regulations. The Company has GCG Guidelines, Code of Conduct, Work Guidelines/Charter for Company organs, including the Board of Directors and Board of Commissioners as well as the supporting organs for the Company's Board of Commissioners. Therefore, the application of GCG principles will have a significant impact in the long term if it becomes a culture that is manifested in daily behavior.
Responsibilitas Responsibility	Kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Conformity of the Company's management with laws and regulations and healthy corporate principles.	Perusahaan dalam memenuhi kesesuaian pengelolaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat, dilakukan melalui pelaksanaan audit terhadap kepatuhan peraturan perundang-undangan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik setiap tahunnya. The Company's efforts to fulfill conformity of the management with applicable laws and regulations and the healthy corporate principles are carried out through auditing the compliance with laws and regulations and internal control, which are conducted annually by a Public Accounting Firm.

Prinsip Dasar Basic Principles	Komitmen PPA PPA Commitment	Penerapan di Lingkup PPA Application in PPA
Independensi	Keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.	1. Penerapan Independensi Dewan Komisaris. Setiap anggota Dewan Komisaris harus bertindak secara independen. Independensi merupakan aspek yang perlu diperhatikan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya benturan kepentingan. Dewan Komisaris melaksanakan tugas semata-mata untuk kepentingan Perusahaan dan tidak terpengaruh oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda dengan kepentingan Perusahaan. Pemenuhan independensi Dewan Komisaris diukur berdasarkan kriteria antara lain bahwa anggota Dewan Komisaris: • Bukan merupakan anggota Manajemen Perusahaan; • Bebas dari hubungan usaha dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan; • Bukan Pemegang Saham mayoritas Perusahaan atau pegawai yang berhubungan langsung dengan Pemegang Saham mayoritas Perusahaan; • Bukan pegawai atau pernah bekerja sebagai eksekutif pada Perusahaan atau anggota Perusahaan afiliasi, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Dewan komisaris; • Bukan penasihat atau konsultan utama profesional yang material bagi Perusahaan atau perusahaan afiliasi, atau pegawai yang berhubungan langsung dengan penyedia jasa, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Dewan komisaris; • Bukan pemasok atau pelanggan utama dari Perusahaan atau perusahaan afiliasi atau pegawai dari/atau yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan utama. 2. Penerapan independensi Direksi dalam menjalankan segala tindakan kepengurusan Perusahaan atau hubungan dengan pihak lain harus bersifat independen tanpa campur tangan pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perusahaan yang secara material dapat mengganggu keobjektifan dan kemandirian tugas Direksi yang dijalankan semata-mata untuk kepentingan Perusahaan. Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan, antar anggota Direksi serta antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus ke atas maupun garis ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Prinsip Dasar Basic Principles	Komitmen PPA PPA Commitment	Penerapan di Lingkup PPA Application in PPA
Independency	The condition where the Company is managed professionally without any conflict of interest and influence/pressure from any parties that may violate the laws and regulations and healthy corporate principles.	1. Independency of the Board of Commissioners. Each member of the Board of Commissioners must act independently. Independence is an aspect that needs to be considered to minimize the possibility of conflicts of interest. The Board of Commissioners carries out its duties solely in the benefit of the Company and is not influenced by parties who have interests different from those of the Company. Fulfillment of the Board of Commissioners independence is measured based on criteria, including that a member of the Board of Commissioners is: • Not a member of the Company Management; • Free from business relationships and other relationships that could influence decision making; • Not a majority shareholder of the Company or an employee who has direct contact with the majority shareholder of the Company; • Not an employee or has worked as an executive at the Company or a member of an affiliated Company, at least 3 (three) years prior to becoming a member of the Board of Commissioners; • Not a primary professional advisor or consultant of the Company or affiliated companies, or an employee who has direct contact with service providers, for at least 3 (three) years prior to becoming a member of the Board of Commissioners; • Not a supplier or main customer of the Company or an affiliated company or an employee of/or who has direct or indirect contact with a supplier or main customer. 2. The Independency of the Board of Directors in carrying out all Corporate management actions or relations with other parties must be independent without interference from any party that is contrary to the laws and regulations and the Articles of Association of the Company, and can materially interfere with the objectivity and the independence of Board of Directors' duties that are performed solely for the interests of the Company. In accordance with the Company's Articles of Association, members of Board of Directors, as well as between members of Board of Directors and members of Board of Commissioners, shall not have familial relationships up to the third degree, either in a straight-up or sideways line, including relationships through marriage.
Kewajaran dan Kesetaraan Fairness and Equality	Perlakuan yang adil dan setara dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) baik pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan serta asas kesetaraan dalam menjalankan bisnis. Fair and equal treatment in fulfilling the rights of stakeholders, both shareholders and other stakeholders, which arise based on agreements and statutory regulations as well as the fairness principle in running a business.	Dalam menentukan komposisi Dewan Komisaris dan anggota Direksi, Pemegang Saham telah mempertimbangkan pemenuhan aspek keberagaman usia, pendidikan, pengalaman kerja dan jenis kelamin. Dengan keberagaman tersebut diharapkan Dewan Komisaris dan Direksi dapat melakukan tugasnya secara lebih efektif dalam mencapai target dan kinerja Perusahaan. In determining the Board of Commissioners and Board of Directors membership composition, Shareholders have considered the aspects of diversity in age, education, work experience and gender. With this diversity, it is hoped that the Board of Commissioners and Board of Directors can carry out their duties more effectively in achieving the Company's targets and performance.

Monitoring Implementasi Penerapan GCG di PPA

Dalam rangka memastikan implementasi GCG dapat berjalan secara konsisten dan komprehensif dan sesuai dengan *Roadmap* GCG yang telah dicanangkan Manajemen, maka diperlukan adanya pemantauan. Monitoring implementasi penerapan GCG di PPA dikelola oleh Divisi Sekretariat Perusahaan & TJSL dan Divisi Satuan Pengawasan Internal. Kedua organ tersebut memiliki fungsi *monitoring* prinsip-prinsip GCG di Perusahaan dan selama ini, telah diimplementasikan secara konsisten, sistematis dan berkelanjutan.

Penilaian dan Evaluasi Penerapan GCG

Perseroan terus melakukan upaya perbaikan/penyempurnaan terhadap implementasi GCG melalui penilaian dan evaluasi terhadap penerapan GCG. Penilaian dan evaluasi ini ditujukan untuk:

1. Menguji dan menilai penerapan prinsip GCG melalui elaborasi kondisi penerapan GCG dan perbandingan dengan indikator dan parameter pengujian yang telah ditentukan;
2. Memberikan gambaran hasil pengukuran melalui pemberian nilai atas penerapan prinsip GCG, berikut rekomendasi perbaikan yang diusulkan, guna mengurangi kesenjangan antara tataran praktik dengan indikator dan parameter pengujian;
3. Memantau konsistensi penerapan prinsip GCG di lingkungan organisasi Perseroan, serta untuk memperoleh masukan demi penyempurnaan dan pengembangan kebijakan GCG;
4. Mendorong pengelolaan Perusahaan yang semakin profesional, transparan, dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ Perusahaan.

Pasal 44 Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifik Badan Usaha Milik Negara, menjelaskan bahwa BUMN wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam bentuk:

1. Penilaian (*assessment*) yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BUMN melalui pengukuran dan pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BUMN yang dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun; dan
2. Evaluasi (*review*), yaitu program untuk mendeskripsikan tindak lanjut pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik di BUMN yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.

Pelaksanaan penilaian penerapan GCG pada BUMN tersebut dilakukan oleh penilai (*assessor*) independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melalui proses sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing BUMN, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya.

Sementara itu, pelaksanaan evaluasi pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh BUMN yang bersangkutan (*self assessment*) yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau meminta bantuan (asistensi) oleh penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Monitoring GCG Implementation in PPA

To ensure GCG implementation can run consistently and comprehensively and in accordance with the Management's GCG Roadmap, monitoring is required. The Company's Secretariat & SER Division and the Internal Control Unit Division monitor the GCG implementation in PPA. These two organs have the function of monitoring GCG principles in the Company which to date have been implemented consistently, systematically and sustainably.

Assessment and Evaluation of GCG Implementation

The Company continues to improve/refine GCG implementation through GCG implementation assessments and evaluations, which are intended to:

1. Test and assess the GCG implementation principles by elaborating the conditions for implementing GCG, and comparing it with predetermined indicators and test parameters;
2. Provide an overview of measurement results by scoring the GCG implementation principles, together with recommendations for proposed improvements, in order to reduce the gap between practice levels and the test indicators and parameters;
3. Monitor the consistency of GCG implementation principles within the Company's organization, as well as to gain input for improving and developing GCG policies;
4. Encourage Company management to become more professional, transparent and efficient, as well as empower functions and increase the independency of the Company's Organs.

Article 44 of the Republic of Indonesia Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs explains that SOEs are obliged to measure Good Corporate Governance implementation through:

1. Good Corporate Governance implementation Assessments in SOEs for measuring Good Corporate Governance implementation in SOEs every 2 (two) years; And
2. Evaluation (reviews) to describe the follow-up of Good Corporate Governance implementation in SOEs in the following year after the assessment referred to in number 1, which includes evaluating the results of the assessment and follow-up on recommendations for improvement.

The GCG implementation assessment in SOEs is carried out by an independent assessor appointed by the Board of Commissioners/Supervisory Board through a process in accordance with the provisions for goods and services procurement in SOEs, and if necessary, they can ask for assistance from the Board of Directors in the appointment process.

The evaluations are in principle carried out by the SOE itself through self-assessment, or they can be discussed with, or they can request assistance from an independent assessor, or can use the services of a Government Agency that is competent in the field of Good Corporate Governance.

Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada RUPS bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan.

The assessment and evaluation results are reported to the GMS at the same time as the annual report is submitted.

Penilaian Penerapan GCG Tahun Buku 2024

Berdasarkan surat PT Danareksa (Persero) sebagai induk Holding BUMN Danareksa nomor S-859/DR/DIRUT/10/2024, PPA melaksanakan asesmen penerapan GCG tahun buku 2023 yang dilakukan menggunakan parameter yang ditetapkan oleh Sekretaris Menteri BUMN melalui SK-16/S.MBU/2012. Asesmen tersebut dilakukan secara mandiri oleh Divisi Satuan Pengawasan Internal PPA dan berdasarkan Hasil Evaluasi atas Penerapan GCG Tahun Buku 2023 Nomor LAP-3/PPA/DSPI-DU/1224 tanggal 31 Desember 2024 hasil skornya sebagai berikut:

GCG Implementation Assessment for Fiscal Year 2024

Based on the letter of PT Danareksa (Persero) as the parent of Holding SOE Danareksa number S-859/DR/DIRUT/10/2024, PPA conducted an assessment of the implementation of GCG for fiscal year 2023 using the parameters set by the Secretary of the Minister of SOEs through SK-16/S.MBU/2012. The assessment was carried out independently by the PPA Internal Audit Division and based on the Evaluation Results on the Implementation of GCG for Fiscal Year 2023 Number LAP-3/PPA/DSPI-DU/1224 dated December 31, 2024 the score results are as follows:

Aspek Aspect		Bobot Weight	Skor Score	Capaian Achievement %
I.	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan Pemegang Saham dan RUPS	7,00	6,39	91,31
II.	Commitment to Sustainable Good Corporate Governance Implementation Shareholders and GMS	9,00	8,25	91,71
III.	Dewan Komisaris Board of Commissioners	35,00	34,78	99,37
IV.	Direksi Board of Directors	35,00	31,55	90,15
V.	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,00	7,30	81,06
VI.	Aspek Lain Other Aspects	5,00	2,50	50,00
Skor Keseluruhan Overall Score		100,00		90,77
Peringkat Kualitas Penerapan GCG GCG Implementation Quality Rating				SANGAT BAIK VERY GOOD

Skor 90,77 dan predikat Sangat Baik tersebut membuktikan bahwa PPA secara konsisten dan komprehensif terus meningkatkan kualitas penerapan prinsip GCG dalam menjalankan kegiatan usaha sehari-hari.

The score of 90.77 and the Very Good predicates show that PPA consistently and comprehensively continues to improve the quality of the GCG implementation principles when carrying out its daily business activities.

Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Assessment GCG di Tahun Sebelumnya

Perseroan terus menunjukkan upayanya dalam memperkuat implementasi GCG melalui berbagai langkah penyempurnaan yang berorientasi pada *best practice*. Upaya ini dilakukan dengan melibatkan seluruh elemen Perseroan dan pihak terkait untuk memastikan keberlanjutan tata kelola yang lebih efektif dan transparan.

Results of the Follow-up on the Previous Year's GCG Assessment Recommendations

The Company continues to demonstrate its efforts for strengthening the GCG implementation through improvement steps oriented towards best practice. This is carried out by involving all elements of the Company and related parties to ensure the sustainability of a more effective and transparent governance.

Sehubungan Hasil Evaluasi atas Penerapan GCG Tahun Buku 2023 baru diterbitkan pada 31 Desember 2024, maka tindak lanjut atas rekomendasi untuk perbaikan di tahun 2024 baru dilakukan di tahun 2025. Hingga Laporan Tahunan ini disusun, perkembangan tindak lanjut rekomendasi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

The Assessment Results of the GCG Implementation for Fiscal Year 2023 were only published on December 31, 2024, therefore the follow-up to the recommendations for improvements in 2024 will only be carried out in 2025. At the date this Annual Report was prepared, the progress of the follow-up to the recommendations can be seen in the table below:

No	Aspek Aspect	Jumlah Rekomendasi Number of Recommendations		
		Rekomendasi Awal Initial Recommendations	Sudah Ditindak Lanjuti Already Followed Up	Belum Ditindak Lanjuti Not Yet Followed Up
1	Komitmen terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Good Corporate Governance Implementation	4	0	4
2	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owners	3	0	3
3	Dewan Komisaris Board of Commissioners	2	0	2
4	Direksi Board of Directors	13	1	12
Total		22	1	21

Peningkatan Kualitas Implementasi Good Corporate Governance

Hasil dari evaluasi digunakan sebagai pertimbangan di dalam melakukan peningkatan kualitas implementasi GCG. Peningkatan kualitas yang ditetapkan PPA, meliputi:

1. Pengembangan kualitas GCG Perusahaan;
2. Pemenuhan kegiatan mandatori sebagai wujud *compliance* Perusahaan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Melaksanakan program yang meningkatkan komitmen pegawai terhadap penerapan tata kelola secara berkelanjutan;
4. Perusahaan melakukan upaya untuk memenuhi hak Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik modal;
5. Meningkatkan kualitas pengungkapan informasi dan transparansi.
6. Pengembangan penerapan GCG Perusahaan lainnya.

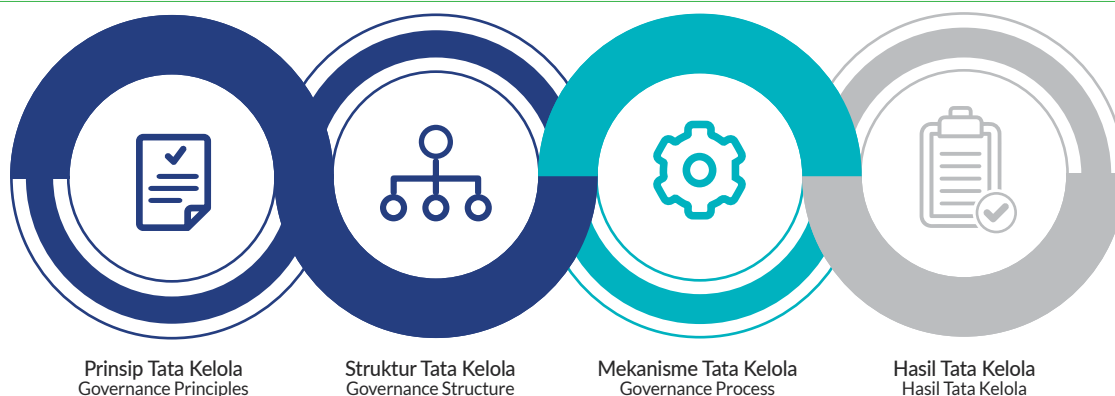
Improving the Quality of Good Corporate Governance Implementation

The evaluation results are used as considerations in improving the quality of GCG implementation. Quality improvements determined by PPA included:

1. Developing quality of GCG in the Company;
2. Fulfilling mandatory activities to show the Company's compliance with applicable laws and regulations;
3. Implementing programs that increase employee commitment to sustainable governance implementation;
4. Making efforts to fulfill the rights of Shareholders and GMS/ Capital Owners;
5. Improving the quality of information disclosure and transparency;
6. Developing other Company GCG implementations.

Kerangka Kerja Tata Kelola Perusahaan yang Baik PPA

GOOD CORPORATE GOVERNANCE FRAMEWORK IN PPA



Struktur dan Mekanisme Corporate Governance

CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE AND MECHANISM

Struktur tata kelola menentukan kerangka kerja dan hierarki keputusan, menegaskan tanggung jawab serta peran masing-masing di dalam organisasi. Kemudian, mekanisme merupakan proses yang mengatur tata kelola Perseroan. Mekanisme ini mencakup kebiasaan, aturan, dan institusi yang berdampak pada tata kelola Perseroan secara menyeluruh. Secara keseluruhan, struktur dan mekanisme GCG berfungsi untuk menciptakan lingkup kerja yang bertanggung jawab dan transparan.

Struktur Tata Kelola PPA

Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Bab I Mengenai Ketentuan Umum Pasal 1, Organ Perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan bagian dari Perseroan yang menjadi tempat untuk pemangku kepentingan mengambil keputusan dalam batas Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar;
2. Direksi adalah bagian dari Perseroan yang bertanggung jawab atas manajemen strategis Perseroan. Peran direksi adalah untuk membimbing arah strategis Perseroan, mengawasi kinerja manajemen eksekutif, dan memastikan kebijakan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
3. Dewan Komisaris adalah bagian dari Perseroan yang berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen Perseroan, kinerja direksi, dan kinerja Perseroan secara umum sesuai dengan Anggaran Dasar.

Dalam mengoptimalkan peran dan hubungan antara organ Perseroan yang mencakup RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris, penerapan GCG mendapat dukungan dari infrastruktur tambahan. Dukungan yang diberikan kepada ketiga organ tersebut berupa sistem/mekanisme (*soft structure*) serta unit kerja (*hard structure*).

Pelaksanaan tanggung jawab tata kelola Perseroan berada di bawah naungan Direksi didukung oleh Divisi Sekretariat Perusahaan dan TJSL, Satuan Pengawasan Internal, Divisi Tresuri dan Strategi Perusahaan, Fungsi Manajemen Risiko, Komite Investasi dan Manajemen Risiko, Komite Kredit serta unit kerja lainnya yang bertanggung jawab menjalankan fungsi kepengurusan Perusahaan.

Dalam menjalankan tugas pengawasan yang menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris didukung oleh Komite yang berisi 1 (satu) atau lebih anggota Dewan Komisaris dan memiliki tanggung jawab terhadap Dewan Komisaris. Adapun Komite- Komite yang telah dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk menunjang tanggung jawab adalah sebagai berikut:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko dan GCG
3. Komite Nominasi dan Remunerasi

The governance structure defines the decision framework and hierarchy, defining each individual's responsibilities and roles within the organization. The GCG structure includes monitoring policies, operations and decisions. The mechanism is the process that regulates the Company's governance, and includes habits, rules and institutions that have an impact on the Company's overall governance. Overall, the GCG structure and mechanism functions to create a responsible and transparent work environment.

PPA Governance Structure

Based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies Chapter I on General Provisions Article 1, states that the Company Organs consist of the General Meeting of Shareholders, Board of Directors and Board of Commissioners.

1. The General Meeting of Shareholders (GMS) is a part of the Company as a place for stakeholders to make decisions within the limits of the Law and/or Articles of Association;
2. The Board of Directors is the part of the Company responsible for the strategic management of the Company. The Board of Directors role is to guide the strategic direction of the Company, supervise the performance of executive management, and ensure that the Company's policies comply with the Articles of Association provisions;
3. The Board of Commissioners is the part of the Company whose function is to supervise the Company's management policies, the performance of the Board of Directors and the Company's performance in general in accordance with the Articles of Association.

To optimize the role and relationship between the Company's organs, including the GMS, Board of Directors, and Board of Commissioners, GCG implementation is supported by additional infrastructure. The support provided to these three organs is in the form of systems/mechanisms (*soft structure*) and work units (*hard structure*).

The Board of Directors' corporate governance responsibilities are supported by the Corporate Secretary and SER Division, Internal Audit Unit, Treasury and Corporate Strategy Division, Risk Management Function, Investment and Risk Management Committee, Credit Committee and other work units responsible for carrying out the Company's management functions.

The Board of Commissioners' supervisory duties are supported by Committees that contain 1 (one) or more members of the Board of Commissioners, and are responsible to the Board of Commissioners. The Committees established by the Board of Commissioners to support their responsibilities are:

1. Audit Committee
2. Risk and GCG Monitoring Committee
3. Nomination and Remuneration Committee

Struktur Tata Kelola PPA PPA Governance Structure



MEKANISME TATA KELOLA

Mekanisme GCG merupakan prosedur atau rangkaian sistematis yang jelas dan terukur sehingga memberikan garis hubungan yang jelas antara pengambil Keputusan dengan pihak yang melakukan pengawasan terhadap Keputusan yang diambil.

CORPORATE GOVERNANCE MECHANISM

The GCG mechanism is a clear and measurable procedure, or systematic series that provides a clear relationship between decision makers and those supervising the decisions taken.



Undang-undang dan Peraturan yang berlaku
Applicable Laws and Regulations



Anggaran Dasar Perusahaan
The Company's Articles of Association



Kebijakan, Aturan dan Prosedur Tetap
Policies, Rules, and Permanent Procedures

Perseroan telah menetapkan Kebijakan, Aturan, dan Prosedur tetap telah disusun dan dikaji oleh secara berkala. Mekanisme yang telah disusun adalah sebagai berikut:

The Company has established Policies, Rules, and Procedures that have been prepared and reviewed periodically. The mechanisms prepared include the following:

No	Kebijakan dan Prosedur Policy and Procedure	Penetapan Determination
1	Anggaran Dasar Perseroan Company Articles of Association	Akta Notaris Desman, S.H. Nomor 54 tanggal 10 Maret 2023 Notarial Deed No. 54 before Desman, S.H. dated March 10, 2023
2	Kebijakan GCG GCG Policies	SK-25/PPA/0621; SK-02/KEP.KOM/VI/2021 Tanggal 2 Juni 2021 SK-25/PPA/0621; SK-02/KEP.KOM/VI/2021 dated June 2, 2021
3	Kebijakan Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (<i>Board Manual</i>) Board of Commissioners and Board of Directors Work Procedures Policy (<i>Board Manual</i>)	SK-89/PPA/1022; SK-06/KEP.KOM/PPA/X/2022 Tanggal 26 Oktober 2022 SK-89/PPA/1022; SK-06/KEP. KOM/PPA/X/2022 dated October 26, 2022
4	Kode Etik Code of Ethics	SK-04/KEP.KOM/PPA/VIII/2021; SK-45/PPA/0821 Tanggal 24 Agustus 2021 SK-04/KEP.KOM/PPA/VIII/2021; SK-45/PPA/0821 dated August 24, 2022
5	Kebijakan Pengendalian Gratifikasi Gratification Control Policy	SK-05/KEP.KOM/PPA/VII/2022; SK-62/PPA/0722 tanggal 29 Juli 2022 05/KEP.KOM/PPA/VII/2022; SK-62/PPA/0722 dated July 29, 2022
6	Komite Investasi dan Manajemen Risiko Investment and Risk Management Committee	SK-94/PPA/1022 31 tanggal 31 Oktober 2022 SK-94/PPA/1022 dated October 31, 2022

No	Kebijakan dan Prosedur Policy and Procedure	Penetapan Determination
7	Komite Kredit Credit Committee	SK-55-PPA-0624 tanggal 7 Juni 2024 SK-55-PPA-0624 dated June 7, 2024
8	Kebijakan Manajemen Kinerja PPA PPA Performance Management Policy	SK-103/PPA/1122 tanggal 16 November 2022 SK-103/PPA/1122 dated November 16, 2022
9	Kebijakan Pengelolaan Aset Tidak Produktif PPA Grup PPA Group Non-Productive Asset Management Policy	SK-1A/PPA/0122; SK-1A/PPAF/0122; SK-1A/PPAK/0122 Tanggal 5 Januari 2022 SK-1A/PPA/0122; SK-1A/PPAF/0122; SK-1A/PPAK/0122 dated January 5, 2022
10	Kebijakan Panduan Penggunaan Logo dan Identitas Visual PPA PPA Logo and Visual Identity Usage Guidelines Policy	SK-23A/PPA/0322 Tanggal 15 Maret 2022 SK-23A/PPA/0322 dated March 15, 2022
11	Kebijakan Pengeluaran Dana Fund Disbursement Policy	SK-27/PPA/0422 Tanggal 7 April 2022 SK-27/PPA/0422 dated April 7, 2022
12	Kebijakan Pelimpahan Kewenangan untuk Menandatangani Dokumen Perpajakan Delegation of Authority Policy to Sign Tax Documents	SK-51/PPA/0622 13 Juni 2022 SK-51/PPA/0622 dated June 13, 2022
13	Kebijakan Penyusunan RJPP RJPP Preparation Policy	SK-78/PPA/0922 Tanggal 5 September 2022 SK-78/PPA/0922 dated September 5, 2022
14	Kebijakan Tata Kelola Proyek Project Governance Policy	SK-93/PPA/1022 2 Tanggal 5 Oktober 2022 SK-93/PPA/1022 dated October 5, 2022
15	Kebijakan Penghapusbukuan dan Penghapus tagihan Piutang Accounts Receivable Write-Off and Write-Off Policy	SK-102/PPA/1122 Tanggal 10 November 2022 SK-102/PPA/1122 dated November 10, 2022
16	Struktur Organisasi PPA PPA Organization Structure	SK-76-PPA-0824 Tanggal 28 Agustus 2024 SK-76-PPA-0824 dated August 28, 2024
17	Kebijakan Sistem Pengendalian Internal (<i>Internal Control System</i>) Internal Control System Policy	SK-137/PPA/1223 Tanggal 13 Desember 2023 SK-137/PPA/1223 dated December 13, 2023
18	Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>) Violation Reporting System Policy (<i>whistleblowing system</i>)	SK-07/KEP.KOM/PPA/X/2022; SK-88/PPA/1022 tanggal 26 Oktober 2022 SK-07/KEP.KOM/PPA/X/2022; SK-88/PPA/1022 dated October 26, 2022
19	Kebijakan Manajemen Risiko Risk Management Policy	SK-122/PPA/1124 tanggal 28 November 2024 SK-122/PPA/1124 dated November 28, 2024

Sosialisasi Tata Kelola Perusahaan di PPA

Perusahaan melakukan sosialisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai implementasi GCG di lingkup PPA, termasuk kebijakan, *whistleblowing system*, anti korupsi, suap, dan gratifikasi. Sosialisasi dilakukan melalui *website* resmi PPA dan juga sosialisasi langsung kepada seluruh pegawai PPA.

Socialization of Corporate Governance in PPA

The Company socializes Corporate Governance to provide a deeper understanding of the GCG implementation within the scope of PPA, including the policies, whistleblowing, anti-corruption, bribery, and gratification systems. Socialization is carried out through the official PPA website and also via direct socialization with all PPA employees.

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan organ penting Perseroan yang melibatkan para pemegang saham. Melalui RUPS, pemegang saham mendapat akses informasi terbaru terkait performa Perseroan, strategi manajemen, dan rencana ke depan. RUPS juga merupakan organ pemegang wewenang yang tidak dimiliki oleh Dewan Komisaris atau Direksi atas dasar Undang-Undang dan Anggaran Dasar. Keputusan yang dihasilkan dalam RUPS memiliki dampak signifikan terhadap arah dan keberlanjutan Perseroan.

Peraturan terkait RUPS diatur dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perseroan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perseroan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

Pemegang Saham

Terhitung per 31 Desember 2024, pemegang saham Perseroan terdiri dari

1. Negara Republik Indonesia sebanyak 1 saham seri A Dwiwarna;
2. PT Danareksa (Persero) sebanyak 6.188.834 saham seri B.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is an important Company organ that involves shareholders. In the GMS, shareholders gain access to the latest information on the Company's performance, management strategies and future plans. The GMS is also the organ that holds authority not granted to the Board of Commissioners or Board of Directors based on the Law and Articles of Association. The resolutions made at the GMS have a significant impact on the direction and sustainability of the Company.

The GMS is regulated in Law No. 19 of 2003 concerning SOEs, Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, and Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011 concerning Good Corporate Governance Implementation in SOEs, as amended by Minister of SOEs Regulation No. PER-09/MBU/2012 concerning amendments to Minister of SOEs Regulation No. Per-01/MBU/2011 concerning Good Corporate Governance Implementation in SOEs.

Shareholders

As of December 31, 2024, the Company's shareholders were

1. Republic of Indonesia with 1 series A Dwiwarna share;
2. PT Danareksa (Persero) with 6.188.834 series B shares.

Komposisi Pemegang Saham Per Desember 2024

Composition of Shareholders as of December 2024



100%

Pemegang saham Perusahaan terdiri dari:

1. Negara Republik Indonesia sebanyak 1 saham Seri A Dwiwarna;
2. PT Danareksa (Persero) sebanyak 6.188.834 Saham Seri B

The Company's shareholders consist of:

1. Republic of Indonesia with 1 Series A Dwiwarna share;
2. PT Danareksa (Persero) with 6,188,834 Series B shares

HAK PEMEGANG SAHAM

Pemegang Saham memiliki hak dan mengemban tanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang dan Anggaran Dasar yang berlaku. Peraturan mengenai hak dan tanggung jawab Pemegang Saham tertulis pada Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada peraturan tersebut, hak dan kewajiban yang dimiliki meliputi:

1. Mengusulkan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang saham Seri A Dwiwarna atau 1/10 (1 orang atau lebih) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan;
2. Pemegang saham Seri A Dwiwarna dapat mengusulkan agenda RUPS;
3. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
4. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan dari hasil likuidasi;
5. Menjalankan hak-hak lainnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

Akses Informasi kepada Pemegang Saham

Sebagai wujud pemenuhan terhadap regulasi yang berlaku, sebelum RUPS yang diselenggarakan, PPA melaksanakan sejumlah persiapan yang dilakukan bagi pemangku kepentingan. Proses penyampaian informasi penyelenggaraan RUPS, Perseroan memberikan akses terhadap informasi secara transparan melalui saluran informasi Perseroan seperti website <https://www.ptppa.com>. Akses tersebut diberikan oleh Perseroan agar terdapat kesetaraan dan kemudahan menjangkau informasi untuk seluruh Pemegang Saham. Informasi terkait hal tersebut meliputi:

1. Laporan Keuangan Tahunan *Audited*;
2. Laporan Tahunan Perseroan;
3. Laporan Manajemen Perseroan yang disampaikan setiap triwulan; dan
4. Publikasi laporan kegiatan Perseroan melalui media massa dan website Perseroan.

Kebijakan Hubungan dengan Pemegang Saham

PPA mengatur kebijakan terkait hubungan Perseroan dengan seluruh Pemegang Saham tercantum pada Pasal 14 Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Tata Aturannya tercantum pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.

JENIS RUPS

Perseroan menyelenggarakan RUPS berdasarkan Anggaran Dasar dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berdasarkan regulasi tersebut Perseroan membagi RUPS menjadi 2 (dua) bagian, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya.

RUPS Tahunan wajib diselenggarakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. RUPS Tahunan membahas mengenai laporan Direksi tentang perhitungan tahunan, Laporan Tahunan terkait situasi dan perjalanan Perseroan, rencana penggunaan laba dan besarnya dividen yang dibayarkan, permintaan penunjukan Akuntan Publik serta hal lainnya yang menyangkut

SHAREHOLDERS' RIGHTS

Shareholders have rights and bear responsibilities in accordance with the prevailing Laws and Regulations and the Articles of Association. Regulations regarding the Shareholders rights and responsibilities are written into Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. In these regulations, their rights and obligations include:

1. Propose the holding of a GMS by Series A Dwiwarna shareholder, or 1/10 (1 person or more) of the number of shares issued by the Company;
2. Series A Dwiwarna shareholders can propose a GMS agenda;
3. Attend and vote at the GMS;
4. Receive dividend payments and liquidated assets results;
5. Exercise other rights as stipulated in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, and the Company's Articles of Association.

Information Access for Shareholders

As a form of compliance with applicable regulations, before the GMS is held, PPA carries out a number of preparations for stakeholders. The process of delivering information on the implementation of the GMS, the Company provides access to information transparently through the Company's information channels such as the website <https://www.ptppa.com>. The Company provides this access so there is equality and ease of access to information for all Shareholders. This information includes:

1. Company Audited Annual Financial Statements;
2. Company Annual Report;
3. The Company's quarterly Management Reports; and
4. Publication of reports on the Company's activities through mass media and the Company's website.

Shareholders Relationship Policy

PPA's Shareholders relationship policy is stated in Article 14 of Law No. 19 of 2003 concerning SOEs, and as stated in the Minister of SOEs Regulation No. PER-01/MBU/2011 concerning Good Corporate Governance Implementation in SOEs.

TYPES OF GMS

The Company organizes GMS based on the Articles of Association and Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies. Based on these regulations, the Company GMS are divided into 2 (two) types, the Annual GMS and Other GMS.

The Annual GMS must be held no later than 6 (six) months after the fiscal year ends. The Annual GMS discusses the Board of Directors' report on the annual calculations, the Annual Report on the Company's condition and operations, plans for the use of profits, and the amount of dividends to be paid, requests for the appointment of a Public Accountant and other matters related to

kepentingan Perseroan. Sedangkan, RUPS Lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berhubungan dengan kebutuhan Perseroan. Pelaksanaan RUPS Lainnya dapat berbentuk RUPS Luar Biasa (RUPSLB) atau RUPS Sirkuler.

RUPS Tahunan maupun RUPS Lainnya memegang wewenang tertinggi dalam struktur GCG serta menjadi sarana utama bagi Pemegang Saham untuk menggunakan haknya terhadap Manajemen Perseroan

WEWENANG RUPS

Sebagai organ penting pada Perseroan, wewenang yang dimiliki oleh RUPS meliputi:

1. Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat dalam RUPS harus terdiri dari orang-orang yang patut dan layak (*fit and proper*) bagi Perseroan;
2. Menetapkan pembatasan kewenangan Direksi berdasarkan jumlah dan/atau jangka waktu atas kegiatan-kegiatan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
3. Berdasarkan usulan/permintaan Direksi, RUPS dapat menyetujui pengalihan lebih dari 50% kekayaan bersih Perseroan sebagai jaminan hutang;
4. Mengurangi pembatasan terhadap tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran Dasar atau menentukan pembatasan lain kepada Direksi selain yang diatur dalam Anggaran Dasar;
5. Menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi;
6. Menyetujui laporan tahunan dan penggunaan laba bersih Perseroan dalam RUPST;
7. Menyetujui RKAP serta RJPP; dan
8. Menetapkan Auditor Eksternal dengan mempertimbangkan pendapat Komite Audit yang disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Perseroan menjunjung tinggi transparansi serta keadilan pada penerapan wewenang tersebut dengan memperhatikan hal-hal yang diperlukan demi menjaga kepentingan Perseroan dalam jangka panjang.

KETENTUAN PENYELENGGARAAN RUPS

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, penyelenggaraan RUPS wajib memenuhi ketentuan yang meliputi:

1. Semua RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama yang terletak di wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS tersebut maka RUPS dapat diadakan di mana pun dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
3. RUPS dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat;
4. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa dengan didahului pemanggilan RUPS;
5. Penyelenggaraan RUPS dapat pula dilakukan atas permintaan: a) seorang atau lebih Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah; atau b) Dewan Komisaris;

the Company's interests. Other GMS can be held at any time to discuss the Company's needs, and can be held as an Extraordinary GMS (EGMS) or Circular GMS.

The Annual GMS and other GMS hold the highest authority in the GCG structure and is the forum for Shareholders to exercise their rights over the Company's Management.

GMS AUTHORITIES

As an important Company organ, the GMS is authorized:

1. To appoint and dismiss members of the Board of Directors and Board of Commissioners. Members of the Board of Commissioners and Board of Directors appointed at the GMS must be people who have passed the Company's fit and proper test;
2. To determine the limit of the Board of Directors' authority based on the number and/or time period of certain activities as stipulated in the Articles of Association;
3. To approve the transfer of more than 50% of the Company's net assets as debt collateral based on the Board of Directors' proposal/request;
4. To reduce restrictions on the Board of Directors' actions as regulated in the Articles of Association, or to determine other restrictions on the Board of Directors outside those regulated in the Articles of Association;
5. To determine the Board of Directors members' division of duties and authority;
6. To approve the annual report and use of the Company's net profit at the AGMS;
7. To approve the RKAP and RJPP; and
8. To appoint an External Auditor by considering the Audit Committee's opinion submitted to the Board of Commissioners.

The Company upholds transparency and fairness when applying these authorities by paying attention to matters necessary to safeguard the Company's long-term interests.

PROVISIONS FOR HOLDING A GMS

Based on the Company's Articles of Association, holding a GMS must comply with the following provisions:

1. All GMS to be held at the Company's domicile or where the Company carries out its main business activities within the territory of the Republic of Indonesia;
2. If at the GMS all shareholders are present and/or represented and all shareholders agree to hold the GMS, then the GMS can be held anywhere within the territory of the Republic of Indonesia;
3. The GMS can make resolutions if they are approved unanimously;
4. The Board of Directors can convene an Annual GMS and Extraordinary GMS, preceded by an invitation to the GMS;
5. A GMS can also be held at the request of: a) one or more Shareholders representing at least 1/10 of the total number of shares issued by the Company with valid voting rights; or b) Board of Commissioners;

6. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dengan alasannya;
7. Surat tercatat yang dimaksud disampaikan oleh Pemegang Saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris;
8. Alasan permintaan penyelenggaraan RUPS, antara lain namun tidak terbatas pada: a) Direksi tidak melaksanakan RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b) masa jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris akan berakhir; atau c) dalam hal Direksi berhalangan atau ada pertentangan kepentingan antara Direksi dan Perseroan;
9. Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;
10. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka: a) permintaan penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau b) Dewan Komisaris melakukan pemanggilan sendiri RUPS;
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;
12. RUPS yang diselenggarakan Direksi hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan terkait dari Direksi dan mata acara rapat lainnya yang dipandang perlu oleh Direksi;
13. RUPS yang diselenggarakan Dewan Komisaris hanya membicarakan masalah yang berkaitan dengan alasan terkait dari Dewan Komisaris;
14. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu masing-masing 15 hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS, Pemegang Saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat melakukan pemanggilan sendiri RUPS setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan;
15. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS;
16. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan melalui surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar;
17. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan;
18. Perseroan wajib memberikan salinan bahan RUPS kepada Pemegang Saham secara cuma-cuma jika diminta; dan
19. Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuan jangka waktu dan isi dalam media penyampaian yang dimaksud, dan panggilan tidak sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan, keputusan RUPS tetap sah jika semua Pemegang Saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam rapat.
6. Requests for holding a GMS are submitted to the Board of Directors by registered letter accompanied by the reasons;
7. The registered letter referred to is submitted by the Shareholders, with a copy submitted to the Board of Commissioners;
8. The reasons for requesting a GMS include, but are not limited to: a) the Board of Directors did not carry out the GMS in accordance with applicable regulations; b) the term of office of members of the Board of Directors and/ or members of the Board of Commissioners is ending; or c) in the event that the Board of Directors are absent or there is a conflict of interest between the Board of Directors and the Company;
9. The Board of Directors is obliged to call for a GMS within a period of no later than 15 days from the date the request for holding a GMS is received;
10. In the event that the Board of Directors does not call for a GMS, then: a) the request for holding a GMS by Shareholders is submitted again to the Board of Commissioners; or b) the Board of Commissioners calls the GMS themselves;
11. The Board of Commissioners is obliged to call for a GMS no later than 15 (fifteen) days from the date the request for holding a GMS is received;
12. The GMS held by the Board of Directors only discusses issues related to the relevant reasons of the Board of Directors and other meeting agenda items deemed necessary by the Board of Directors;
13. The GMS held by the Board of Commissioners only discusses issues related to reasons relevant to the Board of Commissioners;
14. In the event that the Board of Directors or Board of Commissioners does not call for a GMS within a period of 15 days from the date of the request to hold a GMS, Shareholders who request to hold a GMS can call for a GMS themselves after obtaining permission from the Chairman of the District Court whose jurisdiction includes the Company's place of domicile;
15. The GMS summons shall be made no later than 14 days before the date of the GMS, without taking into account the date of the summons and the date of the GMS;
16. The GMS summons are made by registered letter and/ or by advertisement in a newspaper;
17. The GMS summons includes the date, time, place and agenda of the meeting accompanied by notification that the materials to be discussed at the GMS are available at the Company's office from the date the GMS summons is made until the date the GMS is held;
18. The Company is obliged to provide a copy of the GMS material to Shareholders free of charge upon request; and
19. In the event that the summons does not comply with the terms and conditions in the intended delivery medium, and the summons does not comply with the required provisions, the GMS resolutions remain valid if all Shareholders with valid voting rights are present or represented in the meeting.

PENYELENGGARAAN RUPS TAHUN 2024

Selama tahun 2024, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS sebanyak 2 (dua) kali, yaitu RUPS Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 yang diselenggarakan pada tanggal 30 Januari 2024 dan RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 12 Agustus 2024.

ORGANIZING THE 2024 AGMS

In 2024, the Company held 2 (two) GMS, namely: a GMS for Approval of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2024 held on January 30, 2024 and the Annual GMS for Fiscal Year 2023 held on August 12, 2024.

Tahapan Penyelenggaraan RUPS Stages for Holding a GMS

12 Januari 2024 January 12, 2024	→	30 Januari 2024 January 30, 2014	→	30 Januari 2024 January 30, 2014
Penyampaian Undangan RUPS kepada Pemegang Saham melalui surat No. S-289/PPA/DU/0124 Submission of the GMS Invitation to Shareholders via letter No. S-289/PPA/DU/0124		Pelaksanaan RUPS Holding of the GMS		Berita Acara RUPS dimuat dalam Risalah RUPS No. 90 GMS Minutes published in the GMS Minutes No. 90

Penyelenggaraan RUPS Organizing the GMS

RUPS & RKAP Tahun 2024, Hasil Keputusan dan Tindak Lanjutnya oleh Manajemen GMS RKAP for 2024, Resolutions and Follow-Up by Management

Hari/Tanggal Day/Date	:	Selasa/30 Januari 2024 Tuesday/January 30, 2024
Waktu Time	:	11.00 WIB 11.00 WIB
Tempat Place	:	Menara Danareksa, Jakarta Pusat Danareksa Tower, Central Jakarta
Mata Acara Agenda Items	:	RUPS RKAP Tahun 2024 GMS RKAP 2024
Pihak-pihak yang Hadir Parties Present	:	Para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi Shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors
Pihak Independen yang Hadir Independent Parties Present	:	Notaris Notary
Informasi Ketidakhadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS Information on the absence of Commissioners and Directors at the GMS	:	-

Berikut hasil Keputusan RUPS dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perseroan hingga akhir tahun 2024:

The following shows the results of the GMS Resolutions and follow-up by the Company's Management until the end of 2024:

Agenda Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris Tahun 2024 Hasil keputusan Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris Tahun 2024 Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan: Telah dilaksanakan	Agenda To ratify the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2024 including the Board of Commissioners Work Plan and Budget (RKA) for 2024 Resolution Ratified the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for 2024 including the Board of Commissioners Work Plan and Budget (RKA) for 2024 Follow-up on Resolution: Already Implemented
Agenda Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2024 Hasil keputusan Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2024 Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Telah dilaksanakan	Agenda To ratify the 2024 Social and Environmental Responsibility Program Work Plan and Budget (RKA SER). Resolution Ratified the Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program (RKA SER) for 2024 Follow-up on Resolution: Already implemented

Agenda Penetapan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Direksi Tahun 2024 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2024 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Hasil keputusan Menetapkan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Direksi Tahun 2024 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2024 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Telah dilaksanakan	Agenda To determine the Key Performance Indicators (KPI) for Directors in 2024 as stated in the 2024 Management Contract between the Directors and Board of Commissioners and Shareholders. Resolution Determined the Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Directors for 2024 as stated in the 2024 Management Contract between the Directors and the Board of Commissioners and Shareholders Follow-up on Resolution: Already implemented
Agenda Penetapan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2024 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2024 antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Hasil keputusan Menetapkan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2024 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2024 antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Telah dilaksanakan	Agenda To determine the Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Commissioners for 2024 as stated in the 2024 Management Contract between the Board of Commissioners and Shareholders. Resolution Determined Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Commissioners for 2024 as stated in the 2024 Management Contract between the Board of Commissioners and Shareholders. Follow-up on Resolution: Already Implemented
Agenda Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan perubahan dan realokasi anggaran antar program/kegiatan investasi dengan nilai maksimum 10% dari total investasi tahun 2024 tanpa mengubah nilai total investasi Hasil keputusan Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan perubahan dan realokasi anggaran antar program/kegiatan investasi dengan nilai maksimum 10% dari total investasi tahun 2024 tanpa mengubah nilai total investasi Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Telah dilaksanakan	Agenda To delegate power of authority to the Board of Commissioners to make changes and to reallocate the budget between investment programs/ activities with a maximum value of 10% of the total investment in 2024 without changing the total investment value. Resolution Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to make changes and reallocate the budget between investment programs/ activities with a maximum value of 10% of the total investment in 2024 without changing the total investment value. Follow-up on Resolution: Already Implemented
Agenda Pemberian wewenang dan kuasa kepada PT Danareksa (Persero) untuk: • menyetujui perubahan dan realokasi anggaran antar program/kegiatan investasi dengan nilai lebih dari 10% dari total investasi tahun 2024 tanpa mengubah nilai total investasi; • menyetujui perubahan RKAP Tahun 2024 Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan inisiatif strategis, anggaran, dan/atau pencadangan Hasil keputusan Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada PT Danareksa (Persero) untuk: • menyetujui perubahan dan realokasi anggaran antar program/kegiatan investasi dengan nilai lebih dari 10% dari total investasi tahun 2024 tanpa mengubah nilai total investasi; • menyetujui perubahan RKAP Tahun 2024 Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan inisiatif strategis, anggaran, dan/atau pencadangan Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Telah dilaksanakan	Agenda To grant authority and power of attorney to PT Danareksa (Persero) to: • approve changes and reallocation of budget between investment programs/activities with a value of more than 10% of the total investment in 2024 without changing the total investment value; • approve changes to the Company's 2024 RKAP, including but not limited to changes to strategic initiatives, budgets, and/or reserves Resolution Granted authority and power of attorney to PT Danareksa (Persero) to: • approve changes and reallocation of budget between investment programs/activities with a value of more than 10% of the total investment in 2024 without changing the total investment value; • approve changes to the Company's 2024 RKAP, including but not limited to changes to strategic initiatives, budgets, and/or reserves Follow-up on Resolution: Already Implemented

Agenda

- Pengukuhan pemberlakuan keputusan dan Surat Edaran Direksi PT Danareksa (Persero), antara lain:
 - a. No. KD-46/045/DIR/BPP tanggal 30 Agustus 2022 tentang Kebijakan Umum Pengelolaan Dana Anggota *Holding* Danareksa;
 - b. No. SE-46/002/DIR tanggal 29 September 2022 tentang Koordinasi dan Konsultasi Rencana Investasi Kerjasama dan Transaksi Valuta Asing Anggota *Holding* Danareksa;
 - c. No. KD-47/034/DIR/BPP tanggal 13 Desember 2023 tentang Standardisasi Klausul Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa pada Anggota *Holding* Danareksa;
 - d. KD-47/028/DIR/BPP tanggal 14 Desember 2023 tentang Kebijakan Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Anggota *Holding* Danareksa;
 - e. Penyusunan atau penyesuaian *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait Keputusan Direksi pada huruf a poin (i) sampai dengan poin (iv) paling lama 1 (satu) bulan sejak RUPS ini dilaksanakan;
 - f. Pemberlakuan Keputusan Direksi serta Surat Edaran pada huruf a kepada anak perusahaan atau afiliasi terkendali dengan penyesuaian sesuai karakteristik dan kebutuhan anak perusahaan atau afiliasi terkendali tersebut

Hasil keputusan

- Mengukuhkan pemberlakuan Keputusan Direksi dan Surat Edaran Direksi PT Danareksa (Persero), antara lain (i) pengelolaan dana, (ii) koordinasi dan konsultasi rencana investasi, kerja sama dan transaksi valuta asing, (iii) standardisasi klausul perjanjian pengadaan barang/jasa, dan (iv) tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan.
- Direksi wajib menyusun atau menyesuaikan *Standard Operating Procedure* (SOP) terkait Keputusan Direksi pada huruf a poin (i) sampai dengan poin (iv) paling lama 1 (satu) bulan sejak RUPS ini dilaksanakan.
- Direksi wajib memberlakukan Keputusan Direksi serta Surat Edaran pada huruf a kepada anak perusahaan atau afiliasi terkendali dengan penyesuaian sesuai karakteristik dan kebutuhan anak perusahaan atau afiliasi terkendali tersebut

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan

Telah dilaksanakan

Agenda

- To confirm the implementation of the PT Danareksa (Persero) Board of Directors decisions and circular letters including:
 - a. No. KD-46/045/DIR/BPP dated August 30, 2022 concerning General Policy for Management of Member Funds of Danareksa Holding;
 - b. No. SE-46/002/DIR dated September 29, 2022 concerning Coordination and Consultation of Investment Plans for Cooperation and Foreign Exchange Transactions of Members of Danareksa Holding;
 - c. No. KD-47/034/DIR/BPP dated December 13, 2023 concerning Standardization of Clauses in Goods/Services Procurement Agreements for Danareksa Holding Members;
 - d. KD-47/028/DIR/BPP dated December 14, 2023 concerning Governance Policy and Significant Corporate Activities of Danareksa Holding Members;
 - e. Preparation or Standard Operating Procedures (SOP) related to the Board of Directors' decisions in letter a points (i) to point (iv) no later than 1 (one) month after this GMS is held;
 - f. Enforcement of the Board of Directors' Decision and the Circular Letter in letter a to controlled subsidiaries or affiliates with adjustments based on the characteristics and needs of the controlled subsidiaries or affiliates

Resolution

- Confirmed the implementation of the PT Danareksa (Persero) Board of Directors' Decisions and Circular Letter, including (i) fund management, (ii) coordination and consultation of investment plans, cooperation and foreign exchange transactions, (iii) standardization of goods/services procurement agreement clauses, and (iv) governance and significant corporate activities.
- The Board of Directors will prepare or adjust the Standard Operating Procedure (SOP) related to the Board of Directors' Decision in letter a points (i) to point (iv) no later than 1 (one) month since this GMS is held.
- The Board of Directors will enforce the Board of Directors' Decision and Circular Letter in letter a to subsidiaries or controlled affiliates with adjustments based on the characteristics and needs of the subsidiaries or controlled affiliates

Follow-up on Resolution:

Already Implemented

No	Arahan Pemegang Saham Shareholder Directives	Tindak Lanjut s.d. 31 Desember 2024 Follow-up as at December 31, 2024
1	RKAP Tahun 2024 yang disahkan ini merupakan pedoman bagi Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha Tahun 2024; The ratified 2024 RKAP will be the guideline for the Board of Directors when carrying out business activities in 2024;	-
2	Direksi dan Dewan Komisaris diminta berkomitmen untuk mencapai target RKAP dan KPI, serta aspirasi pemegang saham tahun 2024 dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG); The Board of Directors and Board of Commissioners are requested to commit to achieving the RKAP and KPI targets, as well as the shareholders aspirations in 2024 while still paying attention to the principles of Good Corporate Governance (GCG);	Direksi dan Dewan Komisaris berkomitmen untuk mencapai target RKAP dan KPI, serta aspirasi pemegang saham tahun 2024 dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG); The Board of Directors and Board of Commissioners committed to achieving the RKAP and KPI targets, as well as shareholder aspirations in 2024 while still adhering to the principles of Good Corporate Governance (GCG);
3	Direksi diminta untuk mengoptimalkan pencapaian target aspiratif dan menindaklanjuti arahan-arahan pada saat pelaksanaan rapat teknis dan pra RUPS; The Board of Directors is requested to optimize the achievement of aspirational targets and follow up on the directives during the technical meetings and pre-RUPS;	Direksi senantiasa berupaya mengoptimalkan pencapaian target aspiratif dan menindaklanjuti arahan-arahan pada saat pelaksanaan rapat teknis dan pra RUPS; The Board of Directors will strive to optimize the achievement of aspirational targets and follow up on directives during technical meetings and pre-RUPS;
4	Direksi berperan aktif dalam pengembangan potensi kerjasama dan sinergi antar perusahaan di dalam ekosistem <i>Holding</i> Danareksa yang berdampak pada pertumbuhan pendapatan dan efektivitas pemanfaatan biaya; The Board of Directors will play an active role in developing potential cooperation and synergy between companies within the Danareksa Holding ecosystem that have an impact on revenue growth and cost utilization effectiveness;	Direksi selalu berperan aktif dalam pengembangan potensi kerjasama dan sinergi antar perusahaan di dalam ekosistem <i>Holding</i> Danareksa yang berdampak pada pertumbuhan pendapatan dan efektivitas pemanfaatan biaya; The Board of Directors always plays an active role in developing potential cooperation and synergy between companies within the Danareksa Holding ecosystem that have an impact on revenue growth and cost utilization effectiveness;
5	Agar Perusahaan senantiasa menggunakan <i>advisory service</i> dari Danareksa untuk kegiatan yang membutuhkan jasa konsultan; Ensure the Company always uses advisory services from Danareksa for activities that require consultant services;	Perusahaan senantiasa menggunakan <i>advisory service</i> dari Danareksa untuk kegiatan yang membutuhkan jasa konsultan; The Company always uses advisory services from Danareksa for activities that require consulting services;

No	Arahan Pemegang Saham Shareholder Directives	Tindak Lanjut s.d. 31 Desember 2024 Follow-up as at December 31, 2024
6	Direksi diminta untuk melaksanakan percepatan transformasi pengelolaan SDM sesuai dengan rencana implementasi <i>Roadmap Human Capital</i>, serta mendorong pengembangan kompetensi karyawan dan internalisasi budaya diantaranya melalui Program Danareksa Learning Institute The Board of Directors is requested to accelerate the transformation of HC management in accordance with the Human Capital Roadmap implementation plan, as well as encourage the development of employee competencies and internalization of culture, including through the Danareksa Learning Institute Program	Direksi berusaha untuk melaksanakan percepatan transformasi pengelolaan SDM sesuai dengan rencana implementasi <i>Roadmap Human Capital</i>, serta mendorong pengembangan kompetensi karyawan dan internalisasi budaya diantaranya melalui Program Danareksa Learning Institute The Board of Directors strives to accelerate the transformation of HC management in accordance with the Human Capital Roadmap implementation plan, as well as encourages the development of employee competencies and internalization of culture, including through the Danareksa Learning Institute Program
7	Direksi agar melakukan implementasi back-office consolidation dengan berkoordinasi secara intensif dan memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan rencana Holding Danareksa; Direksi agar melakukan percepatan implementasi standarisasi teknologi informasi dan melakukan koordinasi untuk semua inisiatif Teknologi Informasi guna memastikan kesesuaian dengan arahan Holding Danareksa; The Board of Directors must implement back-office consolidation by coordinating intensively and ensuring that it is in accordance with the Danareksa Holding plan; The Board of Directors must accelerate the standardization of information technology and coordinate all Information Technology initiatives to ensure compliance with the Danareksa Holding directive;	Direksi senantiasa melakukan implementasi <i>back-office consolidation</i> dengan berkoordinasi secara intensif dan memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan rencana Holding Danareksa; Direksi agar melakukan percepatan implementasi standarisasi teknologi informasi dan melakukan koordinasi untuk semua inisiatif Teknologi Informasi guna memastikan kesesuaian dengan arahan Holding Danareksa; The Board of Directors continues to implement back-office consolidation by coordinating intensively and ensuring that it is in accordance with the Danareksa Holding plan; The Board of Directors must accelerate the standardization of information technology and coordinate all Information Technology initiatives to ensure compliance with the Danareksa Holding directive;
8	Direksi diminta untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan-temuan, serta rekomendasi hasil pemeriksaan oleh auditor internal maupun eksternal agar tidak menjadi temuan berulang melalui penguatan fungsi Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan manajemen risiko perusahaan dalam rangka <i>early warning system</i>. Selanjutnya, Dewan Komisaris diminta untuk melakukan evaluasi atas efektivitas peran SPI dan manajemen risiko, serta melaporkan hasilnya kepada pemegang saham; The Board of Directors is requested to follow up and resolve the findings, as well as recommendations from the results of the audits by internal and external auditors so they do not become recurring findings by strengthening the function of the Internal Audit Unit (SPI) and the Company's risk management through an early warning system. Furthermore, the Board of Commissioners is requested to evaluate the effectiveness of the role of SPI and risk management, and report the results to shareholders;	Direksi berusaha untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan-temuan, serta rekomendasi hasil pemeriksaan oleh auditor internal maupun eksternal agar tidak menjadi temuan berulang melalui penguatan fungsi Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan manajemen risiko perusahaan dalam rangka <i>early warning system</i>. Selanjutnya, Dewan Komisaris diminta untuk melakukan evaluasi atas efektivitas peran SPI dan manajemen risiko, serta melaporkan hasilnya kepada pemegang saham; The Board of Directors endeavors to follow up and resolve findings, as well as recommendations from the results of the audits by internal and external auditors so they do not become recurring findings by strengthening the function of the Internal Audit Unit (SPI) and the Company's risk management in the context of an early warning system. Furthermore, the Board of Commissioners is requested to evaluate the effectiveness of the role of SPI and risk management, and report the results to shareholders;
9	Direksi dan Dewan Komisaris agar melakukan penerapan dan pengawasan atas strategi risiko beserta satuan moneter strategi risiko yang telah ditetapkan dalam kegiatan bisnis dan operasional Perusahaan; The Board of Directors and Board of Commissioners must implement and supervise the risk strategy along with the monetary unit of the risk strategy that have been determined in the Company's business and operational activities;	Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa berupaya melakukan penerapan dan pengawasan atas strategi risiko beserta satuan moneter strategi risiko yang telah ditetapkan dalam kegiatan bisnis dan operasional Perusahaan; The Board of Directors and Board of Commissioners always endeavors to implement and supervise the risk strategy along with the monetary units of the risk strategy that have been determined in the Company's business and operational activities;
10	Dewan Komisaris agar meningkatkan pengawasan atas kinerja Direksi dalam pencapaian target RKAP Perseroan Tahun 2024 dengan melaporkan hasil pengawasan tersebut secara berkala minimal per triwulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan kepada pemegang saham; The Board of Commissioners must increase supervision of the Board of Directors performance in achieving the Company's 2024 RKAP target by reporting the results of such supervision periodically at least quarterly or at any time if needed to shareholders;	Dewan Komisaris selalu berupaya melakukan pengawasan atas kinerja Direksi dalam pencapaian target RKAP Perseroan Tahun 2024 dengan melaporkan hasil pengawasan tersebut secara berkala minimal per triwulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan kepada pemegang saham; The Board of Commissioners always endeavors to supervise the Board of Directors performance in achieving the Company's 2024 RKAP target by reporting the results of the supervision periodically at least quarterly or at any time if needed to the shareholders;
11	Dewan Komisaris agar melakukan <i>monitoring</i> terhadap komitmen pelaksanaan proses audit laporan keuangan tahun 2023 sehingga kegiatan audit dapat diselesaikan pada akhir bulan Februari 2024 The Board of Commissioners must monitor the 2023 financial statements audit process commitment so that audit activities can be completed by the end of February 2024	Dewan Komisaris senantiasa berupaya melakukan <i>monitoring</i> terhadap komitmen pelaksanaan proses audit laporan keuangan tahun 2023 sehingga kegiatan audit dapat diselesaikan pada akhir bulan Februari 2024 The Board of Commissioners strives to monitor the 2023 financial statements audit process commitment so that audit activities can be completed by the end of February 2024

No	Arahan Pemegang Saham Shareholder Directives	Tindak Lanjut s.d. 31 Desember 2024 Follow-up as at December 31, 2024
12	Direksi wajib menyusun dan melaksanakan rencana upaya tindak lanjut atas rekomendasi audit hukum dan kepatuhan yang masih merupakan temuan berulang maupun temuan baru yang memerlukan langkah-langkah penyelesaian, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan dokumen perusahaan dan kewajiban ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan selambat-lambatnya pada Triwulan I Tahun 2024 serta berkoordinasi dengan <i>Holding</i> Danareksa dalam penyusunan/pelaksanaan upaya tindak lanjut tersebut. The Board of Directors is required to prepare and implement a follow-up action plan for the legal and compliance audits recommendations that are still recurring, or new findings that require resolution, including but not limited to fulfilling Company documents and employment obligations in accordance with statutory provisions no later than the first quarter of 2024 and coordinating with the Danareksa Holding in preparing/implementing the follow-up efforts.	Direksi telah menyusun dan melaksanakan rencana upaya tindak lanjut atas rekomendasi audit hukum dan kepatuhan yang masih merupakan temuan berulang maupun temuan baru yang memerlukan langkah-langkah penyelesaian, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan dokumen perusahaan dan kewajiban ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan selambat-lambatnya pada Triwulan I Tahun 2024 serta berkoordinasi dengan <i>Holding</i> Danareksa dalam penyusunan/pelaksanaan upaya tindak lanjut tersebut. The Board of Directors has prepared and implemented a follow-up action plan for the legal and compliance audits recommendations that are still recurring, or new findings that require resolution, including but not limited to fulfilling Company documents and employment obligations in accordance with statutory provisions no later than the first quarter of 2024 and coordinating with the Danareksa Holding in preparing/implementing the follow-up efforts.

RUPS TAHUNAN TAHUN BUKU 2023, HASIL KEPUTUSAN DAN TINDAK LANJUTNYA OLEH MANAJEMEN

AGMS FOR FISCAL YEAR 2023, RESOLUTIONS AND FOLLOW-UP BY MANAGEMENT

Hari/Tanggal Day/Date	:	Senin, 12 Agustus 2024 Monday, August 12, 2024
Waktu Time	:	15.47 WIB
Tempat Place	:	Menara Danareksa, Jakarta Pusat Danareksa Tower, Central Jakarta
Mata Acara Agenda Items	:	RUPS Tahunan Tahun 2023 2023 AGMS
Pihak-pihak yang Hadir Parties Present	:	Para Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi Shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors
Pihak Independen yang Hadir Independent Parties Present	:	Notaris Notary
Informasi Ketidakhadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam RUPS Information on the absence of Commissioners and Directors at the GMS	:	-

Berikut hasil Keputusan RUPS dan tindak lanjutnya oleh Manajemen Perseroan hingga akhir tahun 2023:

The following shows the results of the GMS Resolutions and follow-up by the Company's Management until the end of 2023:

Agenda

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023, serta Pengesahan Laporan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023, sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang Telah Dijalankan Selama Tahun Buku 2023.

Hasil keputusan

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023. Mengesahkan:

- Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00771/2.1030/AU.1/10/1680-2/1/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 dengan pendapat "Wajar dengan Pengecualian" terhadap transaksi penjualan aset tidak produktif di PT PPA Kapital kepada PT Berdikari Jaya Ultima serta pembelian sukuk ijarah PT Adhi Commuter Properti Tbk oleh PT PPA Kapital;
- Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang menjadi bagian dari Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00781/2.1030/AU.2/12/1680-2/0/V/2024 tanggal 31 Mei 2024 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material".

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan:

Telah dilaksanakan

Agenda

To approve the Company's Annual Report and Ratify the Company's Consolidated Financial Statements, Approve the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report for the 2023 Fiscal Year, and Ratify the Report on the Implementation of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2023 Fiscal Year, as well as Grant Full Discharge and Release of Responsibility (*volledig acquit et de charge*) to the Board of Directors for the Company's Management Actions, and the Board of Commissioners for the Company's Supervisory Actions, Carried Out During the 2023 Fiscal Year.

Resolution

Approved the Company's Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report for the Fiscal Year ending on December 31, 2023. Ratified:

- The Company's Consolidated Financial Statements for the 2023 Fiscal Year ending on December 31, 2023, which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, as stated in their report Number: 00771/2.1030/AU.1/10/1680-2/1/V/2024 dated May 31, 2024 with a "Qualified" opinion concerning the sale transaction of non-productive assets at PT PPA Kapital to PT Berdikari Jaya Ultima and the purchase of sukuk ijarah of PT Adhi Commuter Properti Tbk by PT PPA Kapital;
- The Financial Report of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2023 Fiscal Year ending on December 31, 2023, is part of the Social and Environmental Responsibility Report that has been audited by KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, as stated in their report Number: 00781/2.1030/AU.2/12/1680-2/0/V/2024 dated May 31, 2024 with a "fair in all material respects" opinion.

Follow-up on Resolution:

Already Implemented

Agenda

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023.

Hasil keputusan

Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2023, akan ditetapkan secara tersendiri oleh PT Danareksa (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B setelah mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan

Telah dilaksanakan

Agenda

To determine the Use of the Company's Net Profit for the 2023 Fiscal Year

Resolution

Determination of the Use of the Company's Net Profit for the 2023 Fiscal Year, will be determined separately by PT Danareksa (Persero) as the Series B Shareholder after obtaining approval from the Series A Dwiwarna Shareholder.

Follow-up on Resolution:

Already Implemented

Agenda

Penetapan Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024 serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2023.

Hasil keputusan

Penetapan Gaji/Honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun Buku 2024 serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2023, akan ditetapkan secara tersendiri oleh Pemegang Saham Seri B setelah terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan

Telah dilaksanakan

Agenda

To determine the Salary/Honorarium together with other facilities and allowances for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the 2024 Fiscal Year as well as tantiem for the Board of Directors and Board of Commissioners for their performance in the 2023 Fiscal Year.

Resolution

Determination of Salary/Honorarium along with other facilities and allowances for the Company's Board of Directors and Board of Commissioners for the 2024 Fiscal Year as well as tantiem for the Board of Directors and Board of Commissioners for their performance in the 2023 Fiscal Year, will be determined separately by PT Danareksa (Persero) as the Series B Shareholder after obtaining approval from the Series A Dwiwarna Shareholder.

Follow-up on Resolution:

Already Implemented

Agenda Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024.	Agenda To appoint a Public Accounting Firm (KAP) to Audit the Company's Consolidated Financial Statements and Financial Statements for the Implementation of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2024 Fiscal Year.
Hasil keputusan Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2024 dilakukan secara tersendiri oleh Pemegang Saham Seri B selaku Pemegang Saham berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	Resolution The appointment of a Public Accounting Firm (KAP) to audit the Company's Consolidated Financial Statements and the Financial Statements for the Implementation of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2024 Fiscal Year was carried out separately by the Series B Shareholders as Shareholders based on a proposal from the Board of Commissioners.
Tindak Lanjut atas Hasil Keputusan Telah dilaksanakan	Follow-up on Resolution: Already Implemented

Arahan Pemegang Saham

Shareholder Directives

No	Arahan Pemegang Saham Shareholder Directives	Tindak Lanjut s.d. 31 Desember 2024 Follow-up as at December 31, 2024
1	Direksi agar menciptakan <i>recurring income</i> dan melakukan terobosan/inovasi/ langkah-langkah strategis untuk mengembangkan bisnis baru serta sinergi dalam ekosistem <i>Holding</i> BUMN Danareksa yang menghasilkan dampak signifikan pada kinerja Perusahaan untuk menjaga <i>sustainability</i> perusahaan The Board of Directors must create recurring income and make breakthroughs/innovations/strategic steps to develop new businesses and synergies in the Danareksa BUMN Holding ecosystem that will have a significant impact on the Company's performance to maintain the Company's sustainability	Direksi senantiasa berupaya menciptakan <i>recurring income</i> dan melakukan terobosan/inovasi/langkah-langkah strategis untuk mengembangkan bisnis baru serta sinergi dalam ekosistem <i>Holding</i> BUMN Danareksa yang menghasilkan dampak signifikan pada kinerja Perusahaan untuk menjaga <i>sustainability</i> perusahaan The Board of Directors endeavors to create recurring income and make breakthroughs/innovations/strategic steps to develop new businesses and synergies in the Danareksa BUMN Holding ecosystem that will have a significant impact on the Company's performance to maintain the company's sustainability
2	Direksi agar melakukan pengelolaan beban Perusahaan yang efektif dan efisien dalam menjalankan operasional perusahaan The Board of Directors must manage the Company's expenses effectively and efficiently when running the Company's operations	Direksi berusaha untuk melakukan pengelolaan beban Perusahaan yang efektif dan efisien dalam menjalankan operasional perusahaan The Board of Directors endeavors to manage the Company's expenses effectively and efficiently when running the Company's operations
3	Direksi agar terus mewujudkan pengelolaan perusahaan yang baik, untuk memastikan target perusahaan tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik The Board of Directors must continue to realize good corporate management, to ensure that the Company's targets are achieved in accordance with the Good Corporate Governance principles	Direksi terus berupaya mewujudkan pengelolaan perusahaan yang baik, untuk memastikan target perusahaan tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik The Board of Directors endeavors to realize good corporate management, to ensure the Company's targets are achieved in accordance with the Good Corporate Governance principles
4	Direksi diminta untuk menindaklanjuti temuan-temuan, saran-saran auditor eksternal maupun auditor internal (SPI) tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya, serta menyelesaikannya secara tuntas sehingga di masa mendatang temuan auditor atas masalah yang sama tidak terjadi lagi dan dibahas secara komprehensif dengan Dewan Komisaris. Tindak lanjut penyelesaian temuan/saran auditor eksternal agar dilaporkan secara tertulis kepada pemegang saham The Board of Directors is requested to follow up on the findings, suggestions from external auditors and internal auditors (SPI) for 2023 and previous years, and to resolve them completely to ensure in the future the auditor's findings do not relate to the same problem, and they are discussed comprehensively with the Board of Commissioners. Follow-up on the external auditor findings/suggestions resolutions must be reported in writing to shareholders	Direksi selalu mengusahakan untuk menindaklanjuti temuan-temuan, saran-saran auditor eksternal maupun auditor internal (SPI) tahun 2023 dan tahun-tahun sebelumnya, serta menyelesaikannya secara tuntas sehingga di masa mendatang temuan auditor atas masalah yang sama tidak terjadi lagi dan dibahas secara komprehensif dengan Dewan Komisaris. Tindak lanjut penyelesaian temuan/saran auditor eksternal agar dilaporkan secara tertulis kepada pemegang saham The Board of Directors endeavors to follow up on the findings, suggestions of external auditors and internal auditors (SPI) for 2023 and previous years, and resolve them completely to ensure in the future the auditor's findings do not relate to the same problem, and are discussed comprehensively with the Board of Commissioners. Follow-up on the external auditor findings/suggestions resolutions will be reported in writing to shareholders
5	Direksi dan Dewan Komisaris agar mendukung dan menjalankan kebijakan dan arahan strategis yang telah ditetapkan <i>Holding</i> BUMN Danareksa The Board of Directors and Board of Commissioners must support and implement the policies and strategic directives set by the Holding BUMN Danareksa	Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa mendukung dan menjalankan kebijakan dan arahan strategis yang telah ditetapkan <i>Holding</i> BUMN Danareksa The Board of Directors and Board of Commissioners always supports and implements the policies and strategic directives set by the Holding BUMN Danareksa
6	Dewan Komisaris agar meningkatkan pengawasan atas kinerja Direksi dengan melaporkan hasil pengawasan tersebut secara berkala minimal per triwulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan kepada pemegang saham The Board of Commissioners must increase supervision of the Board of Directors' performance by reporting the results of such supervision periodically at least quarterly or at any time if needed to the shareholders	Dewan Komisaris senantiasa berupaya untuk meningkatkan pengawasan atas kinerja Direksi dengan melaporkan hasil pengawasan tersebut secara berkala minimal per triwulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan kepada pemegang saham The Board of Commissioners endeavors to increase supervision of the Board of Directors' performance by reporting the results of such supervision periodically at least quarterly or at any time if needed to shareholders

No	Arahan Pemegang Saham Shareholder Directives	Tindak Lanjut s.d. 31 Desember 2024 Follow-up as at December 31, 2024
7	Menjalankan Program Transformasi <i>Human Capital</i> BUMN secara berkelanjutan khususnya namun tidak terbatas pada yang telah ditetapkan oleh Menteri BUMN, di antaranya terkait dengan implementasi AKHLAK <i>Culture Journey, learning & development, talent management</i> , serta <i>HC Technology & HC Data Analytic</i> Carry out the BUMN Human Capital Transformation Program sustainably, especially but not limited to areas stipulated by the Minister of BUMN, including those related to the AKHLAK Culture Journey, learning & development, talent management, and HC Technology & HC Data Analytic	Berupaya menjalankan Program Transformasi Human Capital BUMN secara berkelanjutan khususnya namun tidak terbatas pada yang telah ditetapkan oleh Menteri BUMN, di antaranya terkait dengan implementasi AKHLAK <i>Culture Journey, learning & development, talent management</i> , serta <i>HC Technology & HC Data Analytic</i> We strive to implement the BUMN Human Capital Transformation Program sustainably, especially but not limited to areas stipulated by the Minister of BUMN, including those related to the AKHLAK Culture Journey, learning & development, talent management, and HC Technology & HC Data Analytic
8	Direksi agar memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan rekomendasi Dewan Komisaris sebagaimana disampaikan melalui Surat Nomor: S-52/PPA/KOM/0624 tanggal 27 Juni 2024 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen PT Perusahaan Pengelola Aset Tahun Buku 2023 The Board of Directors must pay attention to and follow up on the Board of Commissioners' suggestions and recommendations as conveyed in Letter Number: S-52/PPA/KOM/0624 dated June 27, 2024 concerning the Board of Commissioners' Response to the PT Perusahaan Pengelola Aset Management Report for the 2023 Fiscal Year	Direksi memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan rekomendasi Dewan Komisaris sebagaimana disampaikan melalui Surat Nomor: S-52/PPA/KOM/0624 tanggal 27 Juni 2024 perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen PT Perusahaan Pengelola Aset Tahun Buku 2023 The Board of Directors will pay attention to and follow up on the Board of Commissioners' suggestions and recommendations as conveyed through Letter Number: S-52/PPA/KOM/0624 dated June 27, 2024 concerning the Board of Commissioners' Response to the PT Perusahaan Pengelola Aset Management Report for the 2023 Fiscal Year
9	Mempercepat dan memastikan pembentukan PPA sebagai <i>Pure Restructuring House</i> di tahun 2024, melalui: (i) Optimalisasi saham minoritas melalui divestasi; (ii) Pembentukan dana abadi; (iii) Divestasi atau <i>recovery asset</i> PPA yang produktif maupun non produktif Accelerate and ensure the establishment of PPA as a Pure Restructuring House in 2024, through: (i) Optimization of minority shares through divestment; (ii) Establishment of an endowment fund; (iii) Divestment or recovery of productive and non-productive PPA assets	Mempercepat dan memastikan pembentukan PPA sebagai <i>Pure Restructuring House</i> di tahun 2024, melalui: (i) Optimalisasi saham minoritas melalui divestasi; (ii) Pembentukan dana abadi; (iii) Divestasi atau <i>recovery asset</i> PPA yang produktif maupun non produktif Accelerate and ensure the establishment of PPA as a Pure Restructuring House in 2024, through: (i) Optimization of minority shares through divestment; (ii) Establishment of an endowment fund; (iii) Divestment or recovery of productive and non-productive PPA assets
10	Direksi agar memastikan penggunaan dividen yang diterima PPA dari inbreng minoritas digunakan untuk mendukung kegiatan restrukturisasi BUMN Titip Kelola yang dikelola oleh PPA The Board of Directors must ensure that the use of dividends received by PPA from minority inbreng is used to support the restructuring activities of BUMN Titip Kelola managed by PPA	Direksi telah memastikan penggunaan dividen yang diterima PPA dari inbreng minoritas digunakan untuk mendukung kegiatan restrukturisasi BUMN Titip Kelola yang dikelola oleh PPA The Board of Directors ensures that the use of dividends received by PPA from minority inbreng is used to support the restructuring activities of BUMN Titip Kelola managed by PPA
11	Direksi agar menyempurnakan SOP untuk seluruh transaksi atau aksi Korporasi perusahaan, khususnya terkait investasi dan divestasi, dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku The Board of Directors must improve the SOPs for all corporate transactions or actions in the Company, especially related to investment and divestment, while still referring to applicable regulations	Direksi telah menyempurnakan SOP untuk seluruh transaksi atau aksi Korporasi perusahaan, khususnya terkait investasi dan divestasi, dengan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku The Board of Directors has refined the SOP for all corporate transactions or actions in the Company, especially related to investment and divestment, while still referring to applicable regulations
12	Direksi agar menyusun kebijakan tata kelola benturan kepentingan (<i>Conflict of Interest/COI</i>) dengan pengaturan yang komprehensif sesuai <i>best practice</i> untuk tujuan mencegah dan mendeteksi serta memperbaiki setiap potensi terjadinya COI ataupun <i>fraud</i> The Board of Directors must prepare a Conflict of Interest (COI) comprehensive governance policy in accordance with best practices for the purpose of preventing, detecting and correcting any potential occurrence of COI or fraud	Direksi telah menyusun kebijakan tata kelola benturan kepentingan (<i>Conflict of Interest/COI</i>) dengan pengaturan yang komprehensif sesuai <i>best practice</i> untuk tujuan mencegah dan mendeteksi serta memperbaiki setiap potensi terjadinya COI ataupun <i>fraud</i> The Board of Directors has prepared a Conflict of Interest (COI) comprehensive governance policy in accordance with best practices for the purpose of preventing, detecting and correcting any potential occurrence of COI or fraud

Penyelenggaraan RUPS Tahun 2023

Selama tahun 2023, Perseroan telah menyelenggarakan RUPS sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

1. RUPS RKAP Tahun 2023 yang diselenggarakan pada tanggal 30 Januari 2023;
2. RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 26 Juni 2023.

Organizing the 2023 AGMS

In 2023, the Company held 2 (two) GMS, namely:

1. 2023 Annual RKAP approval GMS held on January 30, 2023;
2. Annual GMS for the Fiscal Year 2022 held on June 26, 2023.

Keputusan RUPS RKAP Tahun 2023 dan Realisasinya Resolution of GMS on RKAP Year 2023 and its Realization

No.	Keputusan RUPS RKAP Tahun 2023 Resolution of the GMS RKAP Year 2023	Keterangan Remarks
1	Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris Tahun 2023. Ratified the Company Work Plan and Budget (RKAP) for 2023 including the Board of Commissioners Work Plan and Budget (RKA) for 2023.	Telah dilaksanakan Already implemented

Keputusan RUPS RKAP Tahun 2023 dan Realisasinya

Resolution of GMS on RKAP Year 2023 and its Realization

No.	Keputusan RUPS RKAP Tahun 2023 Resolution of the GMS RKAP Year 2023	Keterangan Remarks
2	Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2023. To ratify the 2023 Social and Environmental Responsibility Program Work Plan and Budget (RKA SER).	Telah dilaksanakan Already implemented
3	Menetapkan Key Performance Indicators (KPI) Direksi Tahun 2023 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2023 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham. Determined the Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Directors for 2023 as stated in the 2023 Management Contract between the Directors and Board of Commissioners and Shareholders.	Telah dilaksanakan Already implemented
4	Menetapkan Key Performance Indicators (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2023 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2023 antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham. Determined Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Commissioners for 2023 as stated in the 2023 Management Contract between the Board of Commissioners and Shareholders.	Telah dilaksanakan Already implemented
5	Menetapkan Indikator Aspek Operasional untuk Pengukuran Tingkat Kesehatan Tahun 2023. Determined the Operational Aspect Indicators for Measuring the Health Level in 2023.	Telah dilaksanakan Already implemented

Arahan Pemegang Saham

Shareholder Directive

No	Arahan Pemegang Saham Shareholder Directives	Tindak Lanjut s.d. 31 Desember 2023 Follow-up as at December 31, 2023
1	RKAP 2023 yang disahkan ini merupakan pedoman bagi Direksi dalam menjalankan kegiatan usaha tahun 2023 dan target tersebut agar dirinci menjadi target per bulan dan dilakukan cascading ke seluruh jajaran perusahaan; The approved 2023 RKAP is a guideline for the Board of Directors in carrying out business activities in 2023 and these targets must be broken down into monthly targets and carried out cascading to all levels of the Company;	-
2	Direksi dan Dewan Komisaris agar berkomitmen untuk mencapai target-target RKAP Tahun 2023 dan Key Performance Indicators (KPI) Tahun 2023 dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG); The Board of Directors and Board of Commissioners are committed to achieving the 2023 RKAP targets and 2023 Key Performance Indicators (KPI) while still paying attention to the principles of Good Corporate Governance (GCG);	Direksi dan Dewan Komisaris senantiasa berkomitmen untuk mencapai target-target RKAP Tahun 2023 dan Key Performance Indicators (KPI) Tahun 2023 dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG); The Board of Directors and Board of Commissioners committed to achieving the 2023 RKAP targets and 2023 Key Performance Indicators (KPI) while still paying attention to the principles of Good Corporate Governance (GCG);
3	Target pendapatan dalam RKAP 2023 merupakan batas minimal yang harus diupayakan pencapaiannya sedangkan anggaran biaya merupakan target maksimal yang harus diupayakan seefisien mungkin pencapaiannya sehingga laba perusahaan dapat tercapai; The revenue target in the 2023 RKAP is the minimum limit that must be achieved, while the cost budget is the maximum target that must be achieved as efficiently as possible so that Company profits can be achieved;	Direksi berkomitmen untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam RKAP Tahun 2023. The Board of Directors committed to achieving the targets set in the 2023 RKAP.
4	Dalam rangka early warning system, agar dilakukan penguatan fungsi Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan Manajemen Risiko perusahaan; As an early warning system, the function of the Internal Audit Unit (SPI) and Company Risk Management should be strengthened;	Dalam rangka early warning system, Direksi terus melakukan penguatan fungsi Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan Manajemen Risiko perusahaan; As an early warning system, the Board of Directors continues to strengthen the function of the Internal Audit Unit (SPI) and the Company's Risk Management;
5	Direksi agar menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan-temuan serta rekomendasi hasil pemeriksaan oleh auditor internal maupun eksternal agar tidak menjadi temuan berulang; The Board of Directors must follow up and complete the findings and recommendations from audit results by internal and external auditors so they are not repeated;	Direksi senantiasa menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan-temuan serta rekomendasi hasil pemeriksaan oleh auditor internal maupun eksternal agar tidak menjadi temuan berulang; The Board of Directors follows up and completes findings and recommendations from audit results by internal and external auditors so they are not repeated;
6	Dalam melaksanakan kegiatan investasi, harus didukung kajian yang komprehensif dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian serta mengantisipasi potensi risiko investasi dengan melakukan mitigasi risiko yang memadai; In carrying out investment activities, comprehensive studies must be supported by taking into account the precautionary principle and anticipating potential investment risks by carrying out adequate risk mitigation;	Dalam melaksanakan kegiatan investasi, Direksi selalu melengkapi kajian yang komprehensif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian serta mengantisipasi potensi risiko investasi dengan melakukan mitigasi risiko yang memadai; When carrying out its investment activities, the Board of Directors completes a comprehensive study that pays attention to precautionary principle and anticipates potential investment risks by carrying out adequate risk mitigation;

No	Arahan Pemegang Saham Shareholder Directives	Tindak Lanjut s.d. 31 Desember 2023 Follow-up as at December 31, 2023
7	Berkenaan dengan rencana investasi/kerja sama PT PPA dengan mitra usaha lain, agar mengacu pada Surat Edaran PT Danareksa (Persero) No. SE-46/002/DIR tanggal 29 September 2022 tentang Koordinasi dan Konsultasi Rencana Investasi, Kerjasama dan Transaksi Valuta Asing Anggota Holding Danareksa, sehingga kegiatan investasi dan kerjasama anggota Holding Danareksa selaras dengan strategi jangka panjang Holding Danareksa serta mendukung terciptanya sinergi dalam ekosistem Holding Danareksa; For PT PPA's investment/cooperation plans with other business partners, please refer to PT Danareksa (Persero) Circular Letter No. SE-46/002/DIR dated September 29, 2022 concerning Coordination and Consultation on Investment Plans, Cooperation and Foreign Exchange Transactions of Danareksa Holding Members, so that investment and cooperation activities of Danareksa Holding members are in line with Danareksa Holding's long-term strategy, and support the creation of synergy within the Danareksa Holding ecosystem;	Berkenaan dengan rencana investasi/kerja sama PT PPA dengan mitra usaha lain, Direksi tetap berpedoman pada Surat Edaran PT Danareksa (Persero) No. SE-46/002/DIR tanggal 29 September 2022 tentang Koordinasi dan Konsultasi Rencana Investasi, Kerjasama dan Transaksi Valuta Asing Anggota Holding Danareksa; For PT PPA's investment/collaboration plans with other business partners, the Board of Directors remains guided by PT Danareksa (Persero) Circular Letter No. SE-46/002/DIR dated September 29, 2022 concerning Coordination and Consultation on Investment Plans, Cooperation and Foreign Exchange Transactions of Danareksa Holding Members;
8	Dalam menjalankan fungsi sebagai pengelola BUMN titip kelola, agar dilakukan monitoring secara rutin atas progres restrukturisasi yang dilakukan, dan dilaporkan kepada pemegang saham; When carrying out its function as a SOE manager, it is important to regularly monitor the progress of the restructuring carried out and report it to shareholders;	Dalam menjalankan fungsi sebagai pengelola BUMN titip kelola, Direksi senantiasa melakukan monitoring secara rutin atas progres restrukturisasi yang dilakukan, dan melaporkannya secara berkala kepada pemegang saham; When carrying out its function as a SOE manager, the Board of Directors regularly monitors the progress of the restructuring carried out, and reports it periodically to shareholders.
9	Direksi agar meningkatkan pengelolaan NPL serta monitoring NPL yang dikelola termasuk NPL PPA Group sehingga kualitas aset yang dimiliki dapat terjaga baik; The Board of Directors to improve NPL management and monitor managed NPLs including PPA Group NPL so that the quality of assets owned can be maintained properly;	Direksi selalu berupaya untuk meningkatkan pengelolaan NPL serta melakukan monitoring NPL yang dikelola termasuk NPL PPA Group agar kualitas aset yang dimiliki dapat terjaga baik; The Board of Directors strives to improve NPL management and monitor the managed NPL including the PPA Group NPL so that the quality of the assets owned can be maintained properly;
10	Terkait pengelolaan anak usaha, direksi diminta untuk mendorong peningkatan kinerja anak perusahaan dengan melakukan pengawasan dan pembinaan yang efektif agar anak dapat berkontribusi positif terhadap kinerja konsolidasi. For the management of subsidiaries, the Board of Directors is asked to encourage improvements in subsidiary performance by carrying out effective supervision and coaching so that subsidiaries can contribute positively to consolidated performance.	Terkait pengelolaan anak usaha, Direksi berupaya untuk mendorong peningkatan kinerja anak perusahaan dengan melakukan pengawasan dan pembinaan yang efektif. For the management of subsidiaries, the Board of Directors strives to encourage improvements in subsidiary performance by carrying out effective supervision and guidance.

Keputusan RUPS Tahun Buku 2022 dan Realisasinya Resolution of the GMS for Fiscal Year 2022 and its Realization

No.	Keputusan RUPS Tahun Buku 2022 Keputusan RUPS Tahun Buku 2022	Keterangan Keterangan
1	Menyetujui Laporan Tahunan Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2022, termasuk laporan penunjang lainnya yang telah diaudit oleh KAP RSM Indonesia Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor: 00518/2.1030/AU.1/10/1680-1/1/IV/2023 tanggal 28 April 2023 dengan opini "laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material" beserta laporan turunannya, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan perseroan. Approved the Annual Report for the Financial Year 2022 including the Board of Commissioners Supervisory Report for the Financial Year 2022 and ratified the Company's Consolidated Financial Statements for the Financial Year 2022, including other supporting reports audited by KAP RSM Indonesia Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan as contained in its report Number: 00518/2.1030/AU.1/10/1680-1/1/IV/2023 dated April 28, 2023 with the opinion "the attached financial statements present fairly, in all material respects" along with its derivative reports, as well as granting full release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for management and supervisory actions that have been carried out in the financial year ended on December 31, 2022, as long as such actions are not a criminal offense and are reflected in the company's report books.	Telah dilaksanakan Already implemented

Keputusan RUPS Tahun Buku 2022 dan Realisasinya

Resolution of the GMS for Fiscal Year 2022 and its Realization

No.	Keputusan RUPS Tahun Buku 2022 Keputusan RUPS Tahun Buku 2022	Keterangan Keterangan
2	Menyetujui Laporan Tahunan TJSL Tahun Buku 2022 dan mengesahkan Laporan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil PT Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2022 yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai laporannya Nomor: 00503/2.1030/AU.2/12/1680-1/0/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 dengan pendapat "wajar dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan TJSL Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut. Approved the CSR Annual Report for Fiscal Year 2022 and ratified the Report of the Micro and Small Business Funding Program of PT Perusahaan Pengelola Aset for 2022 which has been audited by KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan in accordance with their report Number: 00503/2.1030/AU.2 /12/1680-1/0/II/2023 dated February 28, 2023 with the opinion of "fair in all material respects", as well as granting release and discharge (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the management and supervision of TJSL for the Fiscal Year 2022, as long as the action is not a criminal offense and is reflected in the report.	Telah dilaksanakan Already implemented
3	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2022, akan ditetapkan secara tersendiri oleh PT Danareksa (Persero) selaku Pemegang Saham Seri B setelah mendapatkan Persetujuan dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Determination of the Use of the Company's Net Income for the Financial Year 2022, will be determined separately by PT Danareksa (Persero) as the Series B Shareholder after obtaining approval from the Series A Dwiwarna Shareholders.	Telah dilaksanakan Already implemented
4	Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri B untuk menetapkan besarnya tantiem/insentif kinerja/insentif khusus atas kinerja tahun 2022 serta menetapkan gaji/honorarium, tunjangan, dan fasilitas bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 setelah terlebih dahulu berkonsultasi kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. To authorize the Series B Shareholders to determine the amount of tantiem/performance incentive/special incentive for performance in 2022 and to determine the salary/honorarium, allowances, and facilities for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners for the financial year 2023 after prior consultation with the Series A Dwiwarna Shareholders.	Telah dilaksanakan Already implemented
5	Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas Kinerja Tahun Buku 2022 serta Gaji untuk Direksi dan Honorarium untuk Dewan Komisaris Berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2023. Determination of Tantiem for Board of Directors and Board of Commissioners for the Financial Year 2022, and Salary for Board of Directors and Honorarium for Board of Commissioners, and Other Facilities and Benefits for the Financial Year 2023.	Telah dilaksanakan Already implemented
6	- Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023; - Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2023 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; - Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut, serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut. - Re-appoint Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) as the auditor to audit the Company's Consolidated Financial Statements and Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the Financial Year 2023; - To authorize the Company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to audit the Company's Consolidated Financial Statements for other periods in Financial Year 2023 for the purposes and interests of the Company; - Delegate authority to the Company's Board of Commissioners to determine the amount of audit fees and other reasonable terms of appointment for the Public Accounting Firm, as well as appoint a replacement Public Accounting Firm in the event that the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, for any reason, is unable to complete the audit of the Company's Consolidated Financial Statements and Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the Financial Year 2023, including determining the audit fees and other terms for the replacement Public Accounting Firm.	Telah dilaksanakan Already implemented
7	- Menguukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: - PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; - PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan - PER-3/MBU/03/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara; - beserta perubahan-perubahannya di kemudian hari. - Confirming the implementation of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number: - PER-1/MBU/03/2023 dated 3 March 2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises; - PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises; and - PER-3/MBU/03/2023 dated March 20, 2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises; and its amendments in the future.	Telah dilaksanakan Already implemented

Arahan Pemegang Saham

Shareholder Directive

No	Arahan Pemegang Saham Shareholder Directives	Tindak Lanjut s.d. 31 Desember 2023 Follow-up until December 31, 2023
1	Direksi agar memprioritaskan sustainable kinerja perusahaan melalui optimalisasi recurring income eksisting dan pengelolaan beban perusahaan yang efektif dan efisien; The Board of Directors should prioritize the Company's sustainable performance by optimizing the existing recurring revenue and effective and efficient management of the Company's expenses;	Direksi senantiasa berupaya memprioritaskan sustainable kinerja perusahaan melalui optimalisasi recurring income eksisting dan pengelolaan beban perusahaan yang efektif dan efisien; The Board of Directors will endeavor to prioritize the Company's sustainable performance by optimizing the existing recurring income and effective and efficient management of the Company's expenses;
2	Direksi agar terus berupaya melakukan terobosan/inovasi/langkah-langkah strategis untuk mengembangkan bisnis baru yang memiliki dampak signifikan pada kinerja Perusahaan; The Board of Directors should continue to make breakthroughs/innovations/strategic steps to develop new businesses that will have a significant impact on the Company's performance;	Direksi akan terus berupaya melakukan terobosan/inovasi/langkah-langkah strategis untuk mengembangkan bisnis baru yang memiliki dampak signifikan pada kinerja Perusahaan; The Board of Directors will endeavor to make breakthroughs/innovations/strategic steps to develop new businesses that will have a significant impact on the Company's performance;
3	Direksi agar menerapkan strategi pengelolaan yang optimal dengan tetap menjalankan kebijakan Manajemen risiko yang sejalan dengan kebijakan holding; The Board of Directors should implement optimal management strategies while continuing to instigate the risk management policy that is in line with the holding policies;	Direksi selalu berusaha menerapkan strategi pengelolaan yang optimal dengan tetap menjalankan kebijakan Manajemen risiko yang sejalan dengan kebijakan holding; The Board of Directors will endeavor to implement optimal management strategies while continuing to instigate the risk management policies that is in line with the holding policies;
4	Direksi agar terus mewujudkan pengelolaan perusahaan yang baik, meningkatkan efektivitas pengendalian internal, dan memperkuat fungsi manajemen risiko secara berkala dan berkesinambungan untuk memastikan target perusahaan tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG); The Board of Directors should continue to realize good corporate management, improve the internal control effectiveness, and strengthen the risk management function regularly and continuously to ensure the Company's targets are achieved in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG);	Direksi terus berupaya mewujudkan pengelolaan perusahaan yang baik, meningkatkan efektivitas pengendalian internal dan memperkuat fungsi manajemen risiko secara berkala dan berkesinambungan untuk memastikan target perusahaan tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG); The Board of Directors will strive to realize good corporate management, improve the internal control effectiveness, and strengthen the risk management function regularly and continuously to ensure the Company's targets are achieved in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG);
5	Direksi diminta untuk menindaklanjuti temuan-temuan, saran-saran auditor eksternal maupun auditor internal (SPI) tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya, serta menyelesaikannya secara tuntas sehingga di masa mendatang temuan auditor atas masalah yang sama tidak terjadi lagi dan dibahas secara komprehensif dengan Dewan Komisaris. Tindak lanjut penyelesaian temuan/saran auditor eksternal agar dilaporkan secara tertulis kepada pemegang saham. The Board of Directors is requested to follow up on the external auditors and internal auditors (SPI) findings, suggestions for 2022 and previous years, and resolve them thoroughly so that in the future the auditor's findings for the same problems that have been discussed comprehensively with the Board of Commissioners do not occur again. Follow-up on the resolution of external auditor findings/suggestions should be reported in writing to the shareholders.	Direksi akan selalu menindaklanjuti temuan-temuan, saran-saran auditor eksternal maupun auditor internal (SPI) tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya, serta menyelesaikannya secara tuntas sehingga di masa mendatang temuan auditor atas masalah yang sama tidak terjadi lagi dan dibahas secara komprehensif dengan Dewan Komisaris. Tindak lanjut penyelesaian temuan/saran auditor eksternal agar dilaporkan secara tertulis kepada pemegang saham. The Board of Directors always follow up on the external auditors and internal auditors (SPI) findings, suggestions for 2022 and previous years, and will resolve them thoroughly so that in the future the auditor's findings on the same problem do not occur again and are discussed comprehensively with the Board of Commissioners. Follow-up on the resolution of external auditor findings/suggestions will be reported in writing to the shareholders.
6	Direksi diminta untuk meningkatkan monitoring, pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja anak perusahaan sehingga dapat meningkatkan kontribusi pendapatan kepada induk perusahaan dan menjamin keselarasan strategi induk dan anak Perusahaan; The Board of Directors is requested to improve the monitoring, coaching and evaluation of the subsidiaries performance so it can increase the revenue contribution for the parent company and ensure the alignment of the parent and subsidiary strategies;	Direksi berkomitmen untuk meningkatkan monitoring, pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja anak perusahaan sehingga dapat meningkatkan kontribusi pendapatan kepada induk perusahaan dan menjamin keselarasan strategi induk dan anak Perusahaan; The Board of Directors is committed to improving monitoring, coaching and evaluation of the subsidiaries performance to increase the revenue contributions for the parent company and ensure alignment of the parent and subsidiary strategies;
7	Direksi perlu memperkuat penerapan pengelolaan manajemen risiko dan prinsip KYC sesuai dengan regulasi yang berlaku, seiring dengan perkembangan teknologi, bisnis, dan perluasan profil nasabah; The Board of Directors needs to strengthen the risk management and KYC principles in accordance with applicable regulations, in line with the development of technology, business, and expansion of customer profiles;	Direksi senantiasa memperkuat penerapan pengelolaan manajemen risiko dan prinsip KYC sesuai dengan regulasi yang berlaku, seiring dengan perkembangan teknologi, bisnis, dan perluasan profil nasabah; The Board of Directors endeavors to strengthen the risk management and KYC principles in accordance with applicable regulations, in line with the development of technology, business, and expansion of customer profiles;
8	Direksi dan Dewan Komisaris agar mendukung kebijakan dan arahan strategis yang telah ditetapkan Holding Danareksa termasuk namun tidak terbatas dalam hal sinergi dengan anggota Holding lainnya; The Board of Directors and Board of Commissioners should support the policies and strategic directives set by Danareksa Holding, including but not limited to synergies with other Holding members;	Direksi dan Dewan Komisaris berkomitmen untuk mendukung kebijakan dan arahan strategis yang telah ditetapkan Holding Danareksa termasuk namun tidak terbatas dalam hal sinergi dengan anggota Holding lainnya; The Board of Directors and Board of Commissioners are committed to supporting the policies and strategic directives set by Danareksa Holding, including but not limited to synergies with other members of the Holding;

No	Arahan Pemegang Saham Shareholder Directives	Tindak Lanjut s.d. 31 Desember 2023 Follow-up until December 31, 2023
9	Dewan Komisaris agar meningkatkan pengawasan atas kinerja Direksi dengan Dewan Komisaris agar meningkatkan pengawasan atas kinerja Direksi dengan melaporkan hasil pengawasan tersebut secara berkala minimal per triwulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan kepada pemegang saham; The Board of Commissioners should increase supervision of the Board of Directors performance by reporting the supervision results periodically at least quarterly or at any time if needed by the shareholders;	Dewan Komisaris akan berusaha meningkatkan pengawasan atas kinerja Direksi dengan melaporkan hasil pengawasan tersebut secara berkala minimal per triwulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan kepada pemegang saham; The Board of Commissioners will increase supervision of the Board of Directors performance by reporting the supervision results periodically at least quarterly or at any time if needed by the shareholders;
10	Menjalankan Program Transformasi Human Capital BUMN secara berkelanjutan khususnya namun tidak terbatas pada yang telah ditetapkan oleh Menteri BUMN, di antaranya terkait dengan implementasi AKHLAK Culture Journey, learning & development, talent management, serta HC Technology & HC Data Analytic. Implement the BUMN Human Capital Transformation Program sustainably, especially but not limited to those stipulated by the Minister of BUMN, including those related to the AKHLAK Culture Journey, learning & development, talent management, and HC Technology & HC Data Analytic.	Direksi berusaha untuk menjalankan Program Transformasi Human Capital BUMN secara berkelanjutan khususnya namun tidak terbatas pada yang telah ditetapkan oleh Menteri BUMN, di antaranya terkait dengan implementasi AKHLAK Culture Journey, learning & development, talent management, serta HC Technology & HC Data Analytic. The Board of Directors strives to implement the BUMN Human Capital Transformation Program sustainably, especially but not limited to those stipulated by the Minister of BUMN, including those related to the AKHLAK Culture Journey, learning & development, talent management, and HC Technology & HC Data Analytic.
11	Terkait kegiatan TJSL, Direksi diminta untuk menindaklanjuti arahan sebagaimana Risalah Rapat Pembahasan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan TJSL Tahun Buku 2022 Nomor: RIS-57/DSI.MBU.B/6/2023 tanggal 6 Juni 2023; For SER activities, the Board of Directors is requested to follow up the directives as stated in the Minutes of the Meeting for Discussion of the Financial Reports and application of SER for the 2022 Fiscal Year No. RIS-57/DSI.MBU.B/6/2023 dated June 6, 2023;	Terkait kegiatan TJSL, Direksi berupaya untuk menindaklanjuti arahan sebagaimana Risalah Rapat Pembahasan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan TJSL Tahun Buku 2022 Nomor: RIS- 57/DSI.MBU.B/6/2023 tanggal 6 Juni 2023; For SER activities, the Board of Directors strives to follow up the directives as stated in the Minutes of the Meeting for Discussion of the Financial Reports and application of SER for the 2022 Fiscal Year No. RIS-57/DSI.MBU.B/6/2023 dated June 6, 2023;
12	Direksi agar memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan rekomendasi Dewan Komisaris sebagaimana disampaikan melalui surat Nomor S- 34/PPA/KOM/0623 tanggal 5 Juni 2023 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen PT Perusahaan Pengelola Aset Tahun Buku 2022 (audited). The Board of Directors should pay attention to and follow up on the Board of Commissioners' suggestions and recommendations as conveyed through letter No. S-34/PPA/KOM/0623 dated June 5, 2023 Concerning the Board of Commissioners' Response to the PT Perusahaan Pengelola Aset Management Report for the 2022 Fiscal Year (audited).	Direksi senantiasa memperhatikan dan menindaklanjuti saran dan rekomendasi Dewan Komisaris sebagaimana disampaikan melalui surat Nomor S-34/PPA/KOM/0623 tanggal 5 Juni 2023 Perihal Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen PT Perusahaan Pengelola Aset Tahun Buku 2022 (audited). The Board of Directors will endeavor to pay attention to and follows up on the Board of Commissioners' suggestions and recommendations as conveyed through letter No. S-34/PPA/KOM/0623 dated June 5, 2023 Concerning the Board of Commissioners' Response to the PT Perusahaan Pengelola Aset Management Report for the 2022 Fiscal Year (audited).

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi sesuai dengan Undang-Undang dan Anggaran Dasar. Tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah memberikan arahan strategis kepada Direksi. Peran yang diemban oleh Dewan Komisaris sangat penting untuk memastikan bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan dilakukan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG).

DASAR PERATURAN

Dewan Komisaris Perseroan berpedoman pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku baik ketentuan eksternal maupun internal Perusahaan, antara lain:

1. Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara pada Pasal 6 yang mewajibkan Dewan Komisaris untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi, Kewajaran dan Kesetaraan;
2. Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 108 hingga Pasal 121 yang mengatur seluruh aspek mengenai Dewan Komisaris Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
5. Anggaran Dasar Perseroan;
6. Board Manual;
7. Piagam Dewan Komisaris.

BOARD MANUAL: PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Tugas dan fungsi Dewan Komisaris diatur dalam Board Manual yang disusun berdasarkan regulasi, ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan secara rutin meninjau dan memperbarui pedoman tersebut untuk memastikan efektivitas kinerja. Board Manual mengacu pada landasan hukum yang berlaku.

Selain itu, Board Manual mengatur berbagai aspek terkait peran Dewan Komisaris, antara lain:

1. Dewan Komisaris, meliputi:
 - a. Ketentuan Umum Jabatan anggota Dewan Komisaris;
 - b. Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris;
 - c. Kewajiban Dewan Komisaris;
 - d. Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
 - e. Pembagian Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris;
 - f. Prinsip-prinsip Pengambilan keputusan Dewan Komisaris;
 - g. Etika jabatan Dewan Komisaris;
 - h. Rapat Dewan Komisaris;

The Board of Commissioners is a Company organ that plays a crucial role in supervising and managing policies, the general management of the Company and the Company's business carried out by the Board of Directors and providing advice to the Board of Directors, in accordance with the Law and Articles of Association. The primary responsibility of the Board of Commissioners is to provide strategic direction to the Board of Directors. The Board of Commissioners' role is very important to ensure that the implementation of Corporate Governance is in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG).

REGULATORY BASIS

The Company's Board of Commissioners is guided by applicable laws and regulations, and the Company's external and internal provisions including:

1. Law no. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises in Article 6 which requires the Board of Commissioners to implement GCG principles, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Fairness and Equality;
2. Law no. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies in Articles 108 to Article 121 which regulates all aspects regarding the Board of Commissioners of Limited Liability Companies;
3. Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 Concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs;
4. Minister of Regulation SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 Concerning Organs and Human Resources of SOEs;
5. The Company's Articles of Association;
6. Board Manual;
7. Board of Commissioners Charter.

BOARD MANUAL: BOARD OF COMMISSIONERS WORK GUIDELINES AND REGULATIONS

The Board of Commissioners' duties and functions are regulated in the Board Manual, which is prepared based on applicable regulations and provisions. The Company routinely reviews and updates these guidelines to ensure effective performance. The Board Manual refers to the applicable legal basis.

In addition, the Board Manual regulates the following aspects related to the role of the Board of Commissioners:

1. Board of Commissioners, including:
 - a. General Provisions for members of the Board of Commissioners Position;
 - b. Board of Commissioners Duties and Authorities;
 - c. Board of Commissioners Obligations;
 - d. Board of Commissioners Duties and Responsibilities;
 - e. Board of Commissioners Division of Duties and Authorities;
 - f. Board of Commissioners decision making principles;
 - g. Board of Commissioners Ethics;
 - h. Board of Commissioners Meetings;

- i. Organ pendukung Dewan Komisaris.
2. Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi, meliputi:
 - a. Pertemuan Formal;
 - b. Pertemuan Informal;
 - c. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Program Pengenalan Perseroan;
 - e. Pelaporan Berkala.

PROSES PENGANGKATAN DEWAN KOMISARIS

Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris dilakukan melalui RUPS. Pengangkatan dilakukan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan oleh Pemegang Saham Pengendali dengan calon anggota Dewan Komisaris wajib melalui serangkaian tahapan seleksi sebelum diusulkan dalam RUPS. Adapun ketentuan yang berlaku bagi Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan yang bersangkutan selama lebih dari 2 (dua) periode berturut-turut;
2. Sehat jasmani dan rohani, tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Dewan komisaris yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah.

KETENTUAN MASA JABATAN

Masa jabatan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Pemberhentian Dewan Komisaris dapat dilakukan oleh Pemegang Saham sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan disertai alasan yang jelas untuk pemberhentian tersebut.

JUMLAH, KOMPOSISI DAN SUSUNAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period in Office
Marwanto Harjowiryo	Komisaris Commissioner	Keputusan RUPS No. SK-326/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 GMS Decision No. SK- 326/MBU/10/2020 dated October 9, 2020	9 Oktober 2020 - 8 Oktober 2025 October 9, 2020 - October 8, 2025	Ke-Satu 1st

PENILAIAN KELAYAKAN DAN KEPATUHAN DEWAN KOMISARIS

Sebelum menjalankan tugasnya, setiap anggota Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengikuti uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan oleh Pemegang Saham. Semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun 2024 telah lulus uji kelayakan dan kepatutan. Rincian terkait hasil uji kelayakan dan kepatutan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Nama Name	Status Status	Pelaksana <i>Fit & Proper Test</i> Fit & Proper Test Implementer
Marwanto Harjowiryo	Lulus tahun 2020 Passed in 2020	Kementerian BUMN Ministry of SOEs

- i. Board of Commissioners supporting organs.
2. Working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors, including:
 - a. a. Formal Meetings;
 - b. b. Informal Meetings;
 - c. General Meeting of Shareholders Implementation;
 - d. Company Orientation Program;
 - e. Periodic Reporting.

BOARD OF COMMISSIONERS APPOINTMENT PROCESS

The appointment and dismissal of the Board of Commissioners is carried out through a GMS. The appointment is carried out using a mechanism determined by the Controlling Shareholders with prospective members of the Board of Commissioners required to go through a series of selection stages before being proposed at the GMS. The provisions that apply to the Board of Commissioners are as follows:

1. Has not served as a member of the Board of Commissioners in the Company for more than 2 (two) consecutive periods;
2. Is physically and spiritually healthy, and is not currently suffering from any illness that could hinder the performance of their duties as a member of the Board of Commissioners as proven by a health certificate from a government hospital.

TERM OF OFFICE

The Board of Commissioners term of office is 5 (five) years and they can be reappointed for 1 (one) additional term of office. Dismissal of the Board of Commissioners can be determined by the shareholders at any time based on need, by stating the reasons for the dismissal.

BOARD OF COMMISSIONERS' NUMBER, COMPOSITION, AND STRUCTURE IN 2024

BOARD OF COMMISSIONERS' FIT AND PROPER TEST

Before carrying out their duties, each member of the Board of Commissioners is required to undergo a fit and proper test conducted by the Shareholders. All members of the Board of Commissioners who serving in 2024 have passed the fit and proper test. Details regarding the fit and proper test results can be seen in the following table:

KETENTUAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar di mana - dalam Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. Ketentuan ini berlaku juga untuk Rapat Umum Pemegang Saham yang diadakan dalam rangka mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara anggota Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Pengangkatan

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS setelah memenuhi syarat materiil, syarat formal dan persyaratan lain serta memperhatikan ketentuan larangan rangkap jabatan di dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberhentian

Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan sewaktu-waktu oleh Pemegang Saham berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS dengan menyebutkan alasannya sebagai berikut:

1. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
2. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau keuangan Negara;
4. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota Dewan Komisaris;
5. Telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh pihak yang berwenang dalam tindakan yang merugikan Perusahaan dan/atau keuangan Negara; atau
6. Dinyatakan bersalah dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Di samping alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris sebagaimana alasan tersebut di atas, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan BUMN, diantaranya:

1. Dalam rangka restrukturisasi perusahaan;
2. Dalam rangka penataan susunan keanggotaan Dewan Komisaris Perusahaan; atau
3. Memasuki masa usia pensiun dari Aparatur Sipil Negara, untuk anggota Dewan Komisaris yang merupakan penerima penugasan dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain.

Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir kecuali berhenti karena meninggal dunia, maka yang bersangkutan tetap bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya yang belum diterima pertanggung-jawabannya oleh RUPS.

BOARD OF COMMISSIONERS' TERMS OF APPOINTMENT AND DISMISSAL

Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders (GMS), with due observance of the provisions in the Articles of Association where - in a General Meeting of Shareholders attended by Series A Dwiwarna Shareholders, and the decision of the meeting must be approved by Series A Dwiwarna Shareholders. This provision also applies to GMS held in order to revoke or strengthen the decision to temporarily dismiss members of the Board of Commissioners. The appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners of State-Owned Enterprises is carried out based on the principles of professionalism and good corporate governance.

Provisions regarding the requirements, procedures for the appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners of State-Owned Enterprises are stated in the Minister of SOEs Regulation Number PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.

Appointment

Members of the Board of Commissioners are appointed by the GMS after fulfilling the material, formal and other requirements and by taking into account the provisions on the prohibition of concurrent positions in the applicable provisions and laws and regulations.

Dismissal

Dismissal of members of the Board of Commissioners may be carried out at any time by Shareholders based on a decision taken at the GMS by stating the reasons as follows:

1. They are unable to carry out their duties properly;
2. They have not implemented the provisions of laws and/or the Articles of Association,
3. They have been involved in actions that are detrimental to the Company and/or the State finances;
4. They have carried out actions that violate the ethics and/or propriety that should be respected as a member of the Board of Commissioners;
5. Having been named as a suspect or defendant by the authorities for actions that are detrimental to the Company and/or State finances; or
6. They have been declared guilty by a court decision that has permanent legal force.

In addition to the above stated reasons for dismissing members of the Board of Commissioners, members of the Board of Commissioners may be dismissed by the GMS based on other reasons deemed appropriate by the GMS for the interests and objectives of the BUMN, including:

1. Company restructuring;
2. In the context of arranging the Company's Board of Commissioners composition; or
3. Entering retirement age of State Civil Apparatus, for members of the Board of Commissioners/Supervisory Board assigned from the Technical Ministry or other Government Institution.

For members of the Board of Commissioners who resign before or after their term of office ends, unless they resign due to death, then the person concerned remains responsible for their actions where the GMS has not yet accepted accountability.

Ketentuan Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris

Anggota Dewan Komisaris yang ingin mengundurkan diri harus menyampaikan surat pengunduran diri secara tertulis kepada Perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Direksi Perseroan, dengan pemberitahuan paling lambat 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.

Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari.

HUBUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

1. Dewan Komisaris menghormati tugas dan wewenang Direksi dalam mengelola Perseroan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar Perseroan;
2. Direksi menghormati tugas dan wewenang Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan pengelolaan Perseroan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun Anggaran Dasar Perseroan;
3. Setiap hubungan kerja antara Dewan Komisaris dengan Direksi merupakan hubungan yang bersifat formal kelembagaan, yang dilandasi oleh suatu mekanisme hubungan kerja yang baku atau korespondensi yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. Dewan Komisaris berhak memperoleh informasi Perseroan secara akurat, lengkap dan tepat waktu;
5. Direksi bertanggung jawab atas akurasi, kelengkapan dan ketepatan waktu penyampaian informasi Perseroan kepada Dewan Komisaris;
6. Hubungan kerja antara organ-organ di bawah Dewan Komisaris dengan organ-organ di bawah Direksi diatur berdasarkan kesepakatan antara Dewan Komisaris dan Direksi;
7. Hubungan kerja Dewan Komisaris dengan Direksi adalah hubungan *check and balances* dengan tujuan akhir untuk kemajuan dan meningkatkan kesehatan Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi memiliki komitmen bersama untuk melakukan tugas masing-masing sehingga dapat tercapai kelangsungan usaha Perseroan dalam jangka panjang, yang tercermin pada:
 - a. Terlaksananya dengan baik pengendalian internal dan manajemen risiko;
 - b. Tercapainya imbal hasil (*return*) yang optimal bagi Pemegang Saham;
 - c. Terlindunginya kepentingan *stakeholders* secara wajar;

Terms of Board of Commissioners Resignation

Members of the Board of Commissioners who wish to resign must submit a written letter of resignation to the Company with a copy to the Shareholders, other members of the Board of Commissioners, and the Board of Directors, with notification no later than 30 days before the date of resignation. If the letter of resignation states an effective date of less than 30 (thirty) days from the date the letter is received, it is deemed not to have stated the effective date of resignation.

If by the date requested by the member of the Board of Commissioners concerned, or within 30 (thirty) days from the date the letter of resignation is received in the event that the effective date of resignation is not stated, and there is no decision from the General Meeting of Shareholders, then the member of the Board of Commissioners in question will automatically resign on the requested date or upon the expiration of 30 (thirty) days.

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS WORKING RELATIONSHIP

The working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors is based on the following principles:

1. The Board of Commissioners respects the duties and authority of the Board of Directors in managing the Company as regulated in the laws and regulations and the Articles of Association;
2. The Board of Directors respects the duties and authority of the Board of Commissioners to supervise and to provide advise on the Company's managerial policies as regulated in the laws and regulations and the Articles of Association;
3. The working relationship between the Board of Commissioners and Board of Directors is a formal institutional relationship based on a standardized working relationship mechanism or through accountable correspondence;
4. Board of Commissioners has a right to acquire Company information accurately, completely, and on time;
5. The Board of Directors is responsible for the accuracy, completeness, and punctuality of the Company's information submitted to the Board of Commissioners;
6. Working relationship between organs under the Board of Commissioners and under the Board of Directors is based on an agreement between Board of Commissioners and Board of Directors;
7. The working relationship between Board of Commissioners and Board of Directors includes a checks and balances relationship to develop and improve the Company's health index. The Board of Commissioners and Board of Directors have a shared commitment to carry out all duties and to achieve the Company's long- term business sustainability as reflected in:
 - a. Good implementation of internal control and risk management;
 - b. Achieving optimal returns for Shareholders;
 - c. Fair protection of stakeholders interests;

- d. Terlaksananya suksesi kepemimpinan yang wajar demi kesinambungan manajemen di semua lini organisasi Perseroan;
- e. Terpenuhinya pelaksanaan GCG di Perseroan secara konsisten.

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dalam menjalankan tugas dimaksud, Dewan Komisaris berwenang:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;
2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;
6. Mengangkat dan memberhentikan sekretaris Dewan Komisaris, jika dianggap perlu;
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
8. Membentuk Komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan;
9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu;
10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Komisaris berkewajiban untuk :

1. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggung-jawaban, serta kewajaran;
2. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung-jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

- d. Implementation of fair leadership succession for the management's continuity in all lines of the Company's organization;
- e. Consistent Company GCG implementation.

Board of Commissioners Duties, Authorities and Responsibilities

The Board of Commissioners is tasked with supervising management policies, the general management of the Company and the Company's business carried out by the Board of Directors and providing advice to the Board of Directors including supervision of the Company's Long-Term Plan, the Company's Work Plan and Budget, provisions of the Articles of Association, and Decisions of the General Meeting of Shareholders, as well as applicable laws and regulations, for the benefit of the Company and in accordance with the intent and purpose of the Company. When carrying out the duties referred to, the Board of Commissioners has the authority to:

1. View books, letters, and other documents, check cash for verification purposes and other valuable documents and check the Company's assets;
2. Enter the yards, buildings, and offices used by the Company;
3. Request explanations from the Board of Directors and/or other officials regarding all issues concerning the management of the Company;
4. Understand all policies and actions that have been and will be implemented by the Board of Directors;
5. Request the Board of Directors and/or other officials under the Board of Directors with the knowledge of the Board of Directors attend the Board of Commissioners meeting;
6. Appoint and dismiss the secretary to the Board of Commissioners, if deemed necessary;
7. Temporarily dismiss members of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Articles of Association;
8. Form other Committees besides the Audit Committee, if deemed necessary by considering the Company's capabilities;
9. Use experts for certain matters and for a certain periods of time at the Company's expense, if deemed necessary;
10. Carry out management actions of the Company in certain circumstances for a certain period of time in accordance with the provisions of the Articles of Association;
11. Attend Board of Directors meetings and provide views on matters discussed;
12. Carry out other supervisory authority as long as it does not conflict with laws and regulations, articles of association, and/or decisions of the General Meeting of Shareholders.

When carrying out its duties and authorities, the Board of Commissioners is obliged to:

1. Comply with the Articles of Association and laws and regulations as well as the principles of professionalism, efficiency, transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness;
2. Have good intentions, be careful and responsible in carrying out the duties of supervision and providing advice to the Board of Directors for the benefit of the Company and in accordance with the intent and purpose of the Company;

3. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengelolaan Perseroan;
4. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
5. Memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
6. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
7. Melaporkan dengan segera kepada Rapat Umum Pemegang Saham apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;
8. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;
9. Memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;
10. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
11. Membentuk Komite Audit;
12. Mengusulkan Akuntan Publik kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
13. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
14. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;
15. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
16. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
17. Untuk menjaga Independensi, Anggota Dewan Komisaris harus mengungkapkan seluruh benturan kepentingan yang sedang dihadapi maupun yang berpotensi menjadi benturan kepentingan. Pengungkapan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan mengenai benturan kepentingan (*conflict of interest declarations*) yang dilakukan secara berkala.

Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perusahaan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud sebagaimana tersebut di atas.

Dalam hal Dewan Komisaris terdiri atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud di atas, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris, namun saat ini pada PT PPA hanya terdapat 1 (satu) anggota Dewan Komisaris.

Anggota Dewan Komisaris tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atas kerugian sebagaimana dimaksud di atas, apabila dapat membuktikan:

3. Provide advice to the Board of Directors in carrying out the management of the Company;
4. Examine and review and sign the Company's Long-Term Plan and the Company's Work Plan and Budget prepared by the Board of Directors, in accordance with the provisions of the Articles of Association;
5. Provide opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the Company's Long-Term Plan and the Company's Work Plan and Budget related to the reasons for the Board of Commissioners to sign the Company's Long-Term Plan and the Company's Work Plan and Budget;
6. Follow the development of the Company's activities, provide opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding any issues considered important for the management of the Company;
7. Report immediately to the General Meeting of Shareholders if there are signs of declining Company performance;
8. Examine and review periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and sign the annual reports;
9. Provide explanations, opinions and suggestions to the General Meeting of Shareholders regarding the Annual Report, if requested;
10. Prepare an annual work program and include it in the Company's Work Plan and Budget;
11. Establish an Audit Committee;
12. Propose a Public Accountant to the General Meeting of Shareholders;
13. Prepare minutes of the Board of Commissioners' meetings and keep a copy thereof;
14. Report to the Company regarding their's and/or their family's share ownership in the Company and other Companies;
15. Provide a report on the supervisory duties that have been carried out during the previous fiscal year to the General Meeting of Shareholders;
16. Carry out other obligations in the context of supervisory duties and providing advice, as long as they do not conflict with laws and regulations, articles of association, and/or decisions of the General Meeting of Shareholders;
17. To maintain Independence, Members of the Board of Commissioners must disclose all conflicts of interest that are currently being faced or that have the potential to become a conflict of interest. The disclosure to be stated in a statement letter regarding conflicts of interest (conflict of interest declaration), and is carried out periodically.

Each member of the Board of Commissioners is personally responsible for the Company's losses if the person concerned is guilty or negligent in carrying out their duties and obligations as referred to above.

In the event that the Board of Commissioners consists of 2 (two) members of the Board of Commissioners or more, the responsibilities as referred to above apply jointly and severally to each member of the Board of Commissioners, but currently at PT PPA there is only 1 (one) member of the Board of Commissioners.

Members of the Board of Commissioners cannot be held responsible for the losses as referred to above, if they can prove:

1. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
2. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
3. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

PEMBAGIAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Sesuai dengan Berita Acara Dewan Komisaris No. BA-01/PPA/KOM/1123 tanggal 18 Desember 2023, tugas-tugas Dewan Komisaris dibagi untuk memastikan pelaksanaan yang efisien dan efektif. Berikut adalah rincian tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris, antara lain:

Nama Name	Jabatan Position	Pembagian Tugas Division of Duties
Marwanto Harjowirjono	Komisaris Commissioner	Koordinasi terkait pemberian nasihat dalam melaksanakan pengurusan Perseroan baik berupa namun tidak terbatas pada: bisnis/usaha, fungsi keuangan, Aset Manajemen, fungsi Investasi, organisasi dan <i>Corporate Strategic Planning and Monitoring</i> , Internal Auditor/SPI, unit <i>Risk Management</i> , Sumber Daya Manusia (SDM), unit Hukum serta Dukungan Kerja, dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Dewan Komisaris yaitu Sdr. Marwanto Harjowirjono. Coordination related to providing advice in carrying out the Company management, including but not limited to: business/enterprise, financial function, Asset Management, Investment function, organization and Corporate Strategic Planning and Monitoring, Internal Auditor/SPI, Risk Management unit, Human Capital (HC), Legal unit and Work Support, is carried out by 1 (one) member of the Board of Commissioners, Marwanto Harjowirjono.

Sehubungan dengan Keputusan Para Pemegang Saham (KPPS) PT Perusahaan Pengelola Aset Nomor: SK-366/MBU/12/2023 dan Nomor KPPS-47/036/DNRK tanggal 15 Desember 2023 terkait pemberhentian anggota Dewan Komisaris PT Perusahaan Pengelola Aset, maka sepanjang tahun 2024, tugas dan wewenang Dewan Komisaris dijalankan oleh Sdr. Marwanto Harjowirjono.

Pembagian Tugas Pemantauan KPI

Dalam rangka memastikan pembagian tugas dengan jelas dan terukur, diterapkan *Key Performance Indicators* (KPI) sebagai alat pemantauan kinerja Dewan Komisaris. Adapun indikator-indikator yang digunakan dalam pemantauan ini adalah sebagai berikut:

1. They have carried out supervision in good faith and with caution for the benefit of the Company and in accordance with the intent and purpose of the Company;
2. They have no personal interest, either directly or indirectly, in the management actions of the Board of Directors that resulted in losses; and
3. They have provided advice to the Board of Directors to prevent the occurrence or continuation of such losses.

BOARD OF COMMISSIONERS' DIVISION OF DUTIES

Based on the Board of Commissioners Meeting Minutes No. BA-01/PPA/KOM/1123 dated December 18, 2023, the duties of the Board of Commissioners are divided to ensure efficiency and effectiveness. The following shows the responsibilities carried out by each member of the Board of Commissioners:

In connection with the PT Perusahaan Pengelola Aset Shareholders' Decree (KPPS) No. SK-366/MBU/12/2023 and No. KPPS-47/036/DNRK dated December 15, 2023 concerning the dismissal of members of the PT Perusahaan Pengelola Aset Board of Commissioners, throughout 2024, the duties and authorities of the Board of Commissioners will be carried out by Marwanto Harjowirjono.

Division of KPI Monitoring Duties

To ensure a clear and measurable division of duties, Key Performance Indicators (KPI) are used as a tool for monitoring the performance of the Board of Commissioners. The indicators used are as follows:

No	KPI Dewan Komisaris Board of Commissioners' KPI	Target Target
I Aspek Pengawasan dan Pemberian Nasihat Supervisory and Advisory Aspect		
1.	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Komisaris Tahun 2025 Prepare the Board of Commissioners Budget Plan and KPI for 2025	1 dokumen 1 document
2.	Memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap: Provide feedback/recommendation to the Shareholders on:	1 surat 1 letter
a.	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2025 Company's Work Plan and Budget for 2025	1 surat 1 letter
b.	Laporan Tahunan Perusahaan (<i>Audited</i>) Tahun 2023 Company's Annual Report (<i>Audited</i>) for 2023	1 surat 1 letter
c.	Analisis Kinerja Triwulan Perusahaan Tahun 2024 Company's Quarterly Performance Analysis for 2024	3 surat 3 letters
3.	Persetujuan/tanggapan tertulis Dewan Komisaris atas usulan aksi korporasi oleh Direksi Written Approval/Feedback from the Board of Commissioners on corporate action proposals by the Board of Directors	100% 100%
4.	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners Meetings	
a.	Jumlah rapat dan tersedianya Risalah Rapat Total number of meetings and availability of Minutes of Meetings	12 kali 12 times
b.	Kehadiran rapat Meeting attendance	100%
5.	Monitoring tindak lanjut hasil temuan audit internal/eksternal (KAP, SPI, GCG) Monitoring internal/external audit findings follow-up (KAP, SPI, GCG)	3 dokumen 3 documents
6.	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Board of Commissioners Official Visits	3 kali 3 times
II Aspek Pelaporan Reporting Aspect		
1.	Laporan pengawasan dan realisasi pelaksanaan KPI Dewan Komisaris Triwulanan Tahun 2024 Quarterly Supervisory and Realization Report of the Board of Commissioners' KPI for 2024	3 laporan 3 reports
2.	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2023 Board of Commissioners' Supervisory Report for 2023	1 laporan 1 report
3.	Evaluasi hasil kinerja KAP Tahun 2023 Evaluation of KAP Performance results for 2023	1 laporan 1 report
III Aspek Dinamis dan Lain-Lain Dynamic and Other Aspects		
	Peningkatan kompetensi melalui seminar, workshop, dll Competency development through seminars, workshops, etc.	3 kali/minimal 20 Jam Pelatihan 3 times/at least 20 hours of training

PROGRAM ORIENTASI/PENGENALAN PERSEROAN BAGI KOMISARIS BARU

Setiap anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat untuk pertama kalinya wajib mengikuti Program Pengenalan mengenai PPA, dan tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada sekretaris perusahaan atau siapapun yang menjalankan fungsi sebagai sekretaris perusahaan.

Program pengenalan meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik oleh Perusahaan;
2. Gambaran mengenai BUMN berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko, dan masalah strategis lainnya;
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, Audit Intern dan Audit Eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk komite audit; dan
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta hal yang tidak diperbolehkan.

ORIENTATION PROGRAM FOR NEW COMMISSIONERS

Every newly appointed member of the Board of Commissioners for the first time is required to attend an Introduction Program regarding PPA, and the responsibility for holding the introduction program lies with the corporate secretary or anyone who performs the function as corporate secretary.

The introduction program includes:

1. Implementation of Good Corporate Governance principles by the Company;
2. Description of BUMN related to the objectives, nature and scope of activities, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues;
3. Information relating to delegated authority, Internal Audit and External Audit, internal control systems and policies, including the audit committee; and
4. Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and matters that are not permitted.

Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke Unit Bisnis PPA dan perusahaan lain yang dikelola PPA, pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan kebutuhan untuk mengenal PPA.

Pada tahun 2024, tidak terdapat program orientasi bagi Dewan Komisaris baru karena tidak ada pengangkatan anggota Dewan Komisaris selama tahun tersebut.

Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris

Kebijakan

Agar dapat meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan atas kepengurusan dan pemberian nasihat kepada Direksi, maka anggota Dewan Komisaris harus senantiasa menambah dan memutakhirkan pengetahuannya. Dalam kerangka manajemen risiko, Dewan Komisaris termasuk sebagai Organ Pengelola Risiko yang dalam peningkatan kompetensi membutuhkan kualifikasi sebagai berikut :

1. Pelatihan:
 - a. Setiap tahun masing-masing anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas wajib mengikuti salah satu pelatihan dengan topik manajemen risiko, fraud, bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, kepatuhan, keuangan, akuntansi, dan/ atau audit.
 - b. Mengikuti pelatihan paling sedikit berjumlah 20 (dua puluh) jam pelatihan dalam satu tahun.
 - c. Pelatihan yang diikuti merupakan Program Pelatihan Berkelanjutan ("PPL") yang diselenggarakan oleh lembaga profesi, regulator, lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi, dan/atau lembaga pelatihan milik atau dikendalikan oleh BUMN.
2. Sertifikasi:
 - a. Dewan Komisaris wajib mengikuti paling sedikit 1 (satu) sertifikasi antara lain bidang bisnis, kegiatan usaha korporasi, hukum, manajemen risiko, kepatuhan, keuangan, dan akuntansi.
 - b. Sertifikasi sebagaimana tersebut di atas dipenuhi dengan ketentuan:
 - i) diterbitkan oleh dewan sertifikasi/regulator/organisasi profesi terkait yang diakui secara nasional dan/atau internasional;
 - ii) lembaga penerbit sertifikasi memiliki standar dan dewan standar profesi dan etika; dan
 - iii) sertifikasi diwajibkan berlaku selama masa jabatan.

Sepanjang tahun 2024, anggota Dewan Komisaris telah memenuhi ketentuan 20 (dua puluh) jam pelatihan dengan berpartisipasi dalam program pelatihan dan/atau pengembangan kompetensi sebanyak 61 Jam Pelatihan dengan rincian sebagai berikut:

The introduction program can be in the form of presentations, meetings, visits to PPA Business Units and other companies managed by PPA, document reviews or other programs deemed appropriate to the needs of getting to know PPA.

In 2024, there was no orientation program for the new Board of Commissioners as during the year were no new Commissioners appointed.

Board of Commissioners' Competency Development Policy

To improve the competencies of the Board of Commissioners members when carrying out supervisory and advisory duties over the Company management by the Board of Directors, the Board of Commissioners members must always increase and update their knowledge. In the risk management framework, the Board of Commissioners is included as a Risk Management Organ that for developing competencies requires the following qualifications:

1. Training:
 - a. Every year each member of the Board of Commissioners/ Supervisory Board is required to attend training on the risk management, fraud, business, corporate business activities, law, compliance, finance, accounting, and/or audit topics.
 - b. Attend at least 20 (twenty) hours of training every year.
 - c. The training attended includes the Continuous Training Program ("PPL") organized by professional institutions, regulators, training institutions accredited by accreditation institutions, and/or training institutions owned or controlled by BUMN.
2. Certification:
 - a. The Board of Commissioners must follow at least 1 (one) certification covering the business, corporate business activities, law, risk management, compliance, finance, and accounting.
 - b. The certification mentioned above is fulfilled with the following provisions:
 - i) is issued by a certification board/regulator/related professional organization recognized nationally and/ or internationally;
 - ii) The certification issuing body has standards and a professional and ethical standards board; and
 - iii) The certification is required to stay valid for the duration of the term of office.

In 2024, members of the Board of Commissioners fulfilled the requirement of 20 (twenty) hours of training by participating in training programs and/or competency development totaling 61 Training Hours with the following details:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Waktu Penyelenggaraan Date	Penyelenggara Organizer
Marwanto Harjowiryo (Komisaris) (Commissioner)	Public Training	Program Pembekalan Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi 4 Qualification Banking Risk Management Program 4	12, 13 dan 15 Februari 2024 February 12, 13 and 15, 2024	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)
	Public Training	Pengukuhan Komitmen Dewan Komisaris Anggota Holding BUMN Danareksa atas RKAP Tahun 2024 Inauguration of the commitment of the Board of Commissioners of Holding SOE Danareksa Members of the RKAP in 2024	16 Februari 2024 February 16, 2024	PT Danareksa (Persero)
	Online	Mengawal Penuntasan Pembangunan Jangka Menengah untuk Kestinambungan Pembangunan Supervise the completion of medium-term development for the continuity of development	22 Mei 2024 May 22, 2024	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
	Public Training	GRC Summit - Masterclass and Seminar 2024	22-23 Agustus 2024 August 22-23, 2024	CRMS Indonesia
	Public Training	Risk Governance dan Leadership Master Class	4 Desember 2024 December 4, 2024	Enterprise Risk Management Academy (ERMA) & IRMAPA.
	Public Training	Risk Beyond International Conference on Enterprise Risk Management 2024	5-6 Desember 2024 December 5-6, 2024	Enterprise Risk Management Academy (ERMA) & IRMAPA.
	Sertifikasi Certification	Certified Governance Oversight Professional (CGOP)	31 Januari 2024 January 31, 2024	LSP MKS & BNSP
	Sertifikasi Certification	Qualificatioin 4 Field of Bank Risk Management	17 April 2024 April 17, 2024	LSP LSPP & BNSP

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 mengenai Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara serta Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan rapat secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam sebulan. Sesuai dengan ketentuan tersebut, Dewan Komisaris Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali untuk rapat internal Dewan Komisaris dan 12 (dua belas) kali rapat Dewan Komisaris dengan Direksi sepanjang tahun 2024.

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS TAHUN 2024

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris dan Realisasinya

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris tahun 2024 telah disampaikan kepada Direksi PT Perusahaan Pengelola Aset melalui surat Nomor: S-63/PPA/KOM/0923 tanggal 29 September 2023 untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan Tahun 2024. Berikut adalah target dan realisasi dari Rencana Kerja Dewan Komisaris untuk tahun 2024, sebagai berikut:

BOARD OF COMMISSIONERS' MEETINGS

Based on the Minister of BUMN Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 Regarding Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, and the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners is required to hold regular meetings at least 1 (one) time a month. In accordance with these provisions, the Company's Board of Commissioners held 12 (twelve) internal meetings of the Board of Commissioners, and 12 (twelve) Board of Commissioners Meetings with the Board of Directors during 2024.

IMPLEMENTATION OF BOARD OF COMMISSIONERS DUTIES IN 2024

Board of Commissioners Work Plan and Budget (RKA) and Realization

The Work Plan and Budget (RKA) of the Board of Commissioners in 2024 was submitted to the PT Perusahaan Pengelola Aset Board of Directors through Letter Number: S-63/PPA/KOM/0923 dated September 29, 2023 to be included in the Company's 2024 Work Plan and Budget. The targets and realization of the Board of Commissioners' work plan for 2024 were as follows:

No	KPI Dewan Komisaris Board of Commissioners' KPI	Target Target	Realisasi Realization
I Aspek Pengawasan dan Pemberian Nasihat Supervisory and Advisory Aspect			
1.	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Komisaris Tahun 2025 Prepare the Board of Commissioners Budget Plan and KPI for 2025	1 dokumen 1 document	1 dokumen 1 document
2.	Memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap: Provide feedback/recommendations to the Shareholders on:		
a.	Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2025 Company's Budget Plan for 2025	1 surat 1 letter	
b.	Laporan Tahunan Perusahaan (<i>Audited</i>) Tahun 2023 Company's Annual Report (<i>Audited</i>) for 2023		
c.	Analisis Kinerja Triwulan Perusahaan Tahun 2024 Company's Quarterly Performance Analysis for 2024	3 surat 3 letters	3 surat 3 letters
3.	Persetujuan/tanggapan tertulis Dewan Komisaris atas usulan aksi korporasi oleh Direksi Written Approval/Feedback from the Board of Commissioners on corporate action proposals by the Board of Directors	100%	100%
4.	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners' Meetings		
a.	Jumlah rapat dan tersedianya Risalah Rapat Total number of meetings and availability of Minutes of Meetings	12 kali 12 times	12 kali 12 times
b.	Kehadiran rapat Meeting attendance	100%	100%
5.	Monitoring tindak lanjut hasil temuan audit internal/eksternal (KAP, SPI, GCG) Monitoring internal/external audit findings follow-up (KAP, SPI, GCG)	3 dokumen 3 documents	3 dokumen 3 documents
6.	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Board of Commissioners Official Visits	3 kali 3 times	3 kali 3 times
II Aspek Pelaporan Reporting Aspect			
1.	Laporan pengawasan dan realisasi pelaksanaan KPI Dewan Komisaris Triwulanan Tahun 2024 Quarterly Supervisory and Realization Report of the Board of Commissioners' KPI for 2024	3 laporan 3 reports	3 laporan 3 reports
2.	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2023 Board of Commissioners' Supervisory Report for 2023	1 laporan 1 report	1 laporan 1 report
3.	Evaluasi hasil kinerja KAP Tahun 2023 Evaluation on KAP Performance results for 2023	1 laporan 1 report	1 laporan 1 report
III Aspek Dinamis dan Lain-Lain Dynamic and Other Aspects			
1.	Peningkatan kompetensi melalui seminar, <i>workshop</i> , dll Competency development through seminars, workshops, etc.	3 kali 3 times	6 kali 6 times

KUNJUNGAN KERJA DEWAN KOMISARIS TAHUN 2024

Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris adalah melalui kunjungan kerja. Pada tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan 3 (tiga) kali kunjungan kerja. Berikut adalah rincian terkait kunjungan kerja yang dilakukan oleh Dewan Komisaris sepanjang tahun 2024, yaitu:

1. PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI), tanggal 20 Mei 2024, Bogor, Jawa Barat
2. PT Indosat Tbk, tanggal 29 Agustus 2024, Jakarta
3. PT Socfin Indonesia, tanggal 25-27 September 2024, Medan, Sumatera Utara

Selain itu, Dewan Komisaris telah memberikan keputusan dan tanggapan sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap pengelolaan usaha Perseroan sepanjang tahun 2024. Berikut adalah rincian mengenai keputusan dan tanggapan yang telah diberikan, yakni:

BOARD OF COMMISSIONERS' WORKING VISITS IN 2024

One of the Board of Commissioners supervisory functions is through working visits. In 2024, the Board of Commissioners conducted 3 (three) working visits. The following shows details of the working visits conducted by the Board of Commissioners in 2024:

1. PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI), May 20, 2024, Bogor, West Java
2. PT Indosat Tbk, August 29, 2024, Jakarta
3. PT Socfin Indonesia, September 25-27, 2024, Medan, North Sumatra

In addition, the Board of Commissioners provided decisions and responses as part of its supervisory function over the Company's business management throughout 2024. The following details of the decisions and responses given:

Keputusan Dewan Komisaris Tahun 2024 Board of Commissioners' Decisions in 2024

No	Nomor Keputusan Decision Number	Perihal Subject
1.	SK-01/KEP.KOM/PPA/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 SK-01/KEP. KOM/PPA/I/2024 dated January 2, 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Perusahaan Pengelola Aset Dismissal and Appointment of Members of PT Perusahaan Pengelola Aset Audit Committee
2.	SK-02/KEP.KOM/PPA/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 SK-02/KEP. KOM/PPA/I/2024 dated January 2, 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Perusahaan Pengelola Aset Dismissal and Appointment of PT Perusahaan Pengelola Aset Nomination and Remuneration Committee
3.	SK-03/KEP.KOM/PPA/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 SK-03/KEP. KOM/PPA/I/2024 dated January 2, 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko dan Good Corporate Governance PT Perusahaan Pengelola Aset Dismissal and Appointment of Members of PT Perusahaan Pengelola Aset Risk Monitoring and Good Corporate Governance Committee
4.	SK-04/KEP.KOM/PPA/I/2024 tanggal 19 Januari 2024 SK-04/KEP. KOM/PPA/I/2024 dated January 19, 2024	Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Special Asset Management PT Perusahaan Pengelola Aset Appointment of the PT Perusahaan Pengelola Aset Acting Director of Special Asset Management
5.	SK-05/KEP.KOM/PPA/II/2024 tanggal 13 Februari 2024 SK-05/KEP. KOM/PPA/II/2024 dated February 13, 2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Staf Sekretariat Dewan Komisaris PT Perusahaan Pengelola Aset Dismissal and appointment of PT Perusahaan Pengelola Aset Board of Commissioners Secretariat Staff
6.	SK-06/KEP.KOM/PPA/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 SK-06/KEP. KOM/PPA/II/2024 dated February 19, 2024	Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Special Asset Management PT Perusahaan Pengelola Aset Appointment of PT Perusahaan Pengelola Aset Acting Director of Special Asset Management
7.	SK-07/KEP.KOM/PPA/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 SK-07/KEP. KOM/PPA/III/2024 dated March 22, 2024	Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Perusahaan Pengelola Aset Establishment of PT Perusahaan Pengelola Aset Integrated Governance Committee
8.	SK-08/KEP.KOM/PPA/XI/2024 tanggal 28 November 2024 (SK Bersama Direksi) SK-08/KEP. KOM/PPA/XI/2024 dated November 28, 2024 (SK with the Board of Directors)	Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System) Whistle Blowing System Policy

Tanggapan Dewan Komisaris Tahun 2024
Board of Commissioners' Responses in 2024

No	Tanggal Date	Perihal Subject
1.	31 Januari 2024 January 31, 2024	Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2023 Board of Commissioners Supervisory Duties Report for 2023
2.	6 Februari 2024 February 6, 2024	Penyampaian Talenta BOD-1 dan Evaluasi terhadap Direksi Eksisting Submission of BOD-1 talent and evaluation of existing Directors
3.	15 Februari 2024 February 15, 2024	Persetujuan Pengangkatan Plt. Sekretaris Perusahaan PT Perusahaan Pengelola Aset Approval of appointment of PT Perusahaan Pengelola Aset Acting Corporate Secretary
4.	15 Februari 2024 February 15, 2024	Persetujuan Rencana Kerja Satuan Pengawasan Intern PT Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2024 Approval of PT PT Perusahaan Pengelola Aset Internal Supervisory Work Plan for 2024
5.	15 Februari 2024 February 15, 2024	Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Penerimaan Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional Borrower Co-Borrower dari PT Bank Mandiri Tbk. (Persero) sebesar Rp300.000.000.000,00 Board of Commissioners' response to the plan to receive a Borrower Co-Borrower Transactional Capital Credit Facility from PT Bank Mandiri Tbk. (Persero) amounting to Rp300,000,000,000
6.	22 Februari 2024 February 22, 2024	Implementasi Surat Edaran Menteri BUMN Nomor: SE-1/MBU/01/2024 tentang Employee Well Being Policy (EWP) di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Implementation of Minister of BUMN Circular Letter NO. SE 1/MBU/01/2024 concerning Employee Well Being Policy (EWP) in State-Owned Enterprises
7.	23 Februari 2024 February 23, 2024	Penyampaian Evaluasi terhadap Direksi Eksisting dan Validasi Talenta BOD-1 PT Perusahaan Pengelola Aset Submission of PT Perusahaan Pengelola Aset BOD-1 talent and evaluation of existing Directors
8.	27 Februari 2024 February 27, 2024	Permintaan Penjelasan atas Rencana Perubahan Struktur Organisasi Sampai Dengan 1 (satu) Tingkat Dibawah Direksi PT Perusahaan Pengelola Aset Request for explanation of the planned changes in organizational structure up to 1 (one) level below the PT Perusahaan Pengelola Aset Board of Directors
9.	22 Maret 2024 March 22, 2024	Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2024 The Board of Commissioners' Responses to the PT Perusahaan Pengelola Aset Corporate Work Plan and Budget (RKAP) for 2024
10.	22 Maret 2024 March 22, 2024	Persetujuan Piagam Audit Internal. Approval of the Internal Audit Charter.
11.	22 Maret 2024 March 22, 2024	Tanggapan atas Pemenuhan Organ Pengelola Risiko. Response to the fulfillment of risk management organs.
12.	22 Maret 2024 March 22, 2024	Penunjukan Lembaga Pemingkat Tingkat Kesehatan PT Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2023. Appointment of PT Perusahaan Pengelola Aset Health Level Rating Institution for 2023.
13.	4 April 2024 April 4, 2024	Strategi Risiko PT Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2024. Risk Strategy for PT Perusahaan Pengelola Aset in 2024.
14.	5 April 2024 April 5, 2024	Penyampaian Key Performance Indicators Direksi Individual Tahun 2024. Submission of Key Performance Indicators for Individual Directors in 2024.
15.	24 April 2024 April 24, 2024	Persetujuan Pengangkatan Plt. Kepala Divisi Satuan Pengawasan Intern dan Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan/ Sekretaris Perusahaan PT Perusahaan Pengelola Aset Approval of appointment of Acting Head of the PT Perusahaan Pengelola Aset Internal Supervisory Unit Division and Head of the Company Secretariat Division/Corporate Secretary
16.	30 April 2024 April 30, 2024	Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Triwulan I Tahun 2024. Report on the Supervision of the Board of Commissioners in Q1 2024.
17.	15 Mei 2024 May 15, 2024	Permintaan Kelengkapan Informasi atas Rencana Penerbitan Obligasi. Request for complete information on the plan to issue bonds.
18.	17 Mei 2024 May 17, 2024	Persetujuan Strategi Risiko PT Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2024. Approval of PT Perusahaan Pengelola Aset Risk Strategy for 2024.
19.	30 Mei 2024 May 30, 2024	Tindak Lanjut atas Surat-Surat Dewan Komisaris. Follow-up on the Board of Commissioners' letters.
20.	30 Mei 2024 May 30, 2024	Masukan Dewan Komisaris atas Rancangan Usulan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT Perusahaan Pengelola Aset ("PPA") Tahun 2024-2029. Board of Commissioners Input on the PT Perusahaan Pengelola Aset ("PPA") Draft Proposed Company Long-Term Plan (RJPP) for 2024-2029.
21.	30 Mei 2024 May 30, 2024	Evaluasi atas Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2024 PT Perusahaan Pengelola Aset. Evaluation of the PT Perusahaan Pengelola Aset Q1 Management Report in 2024.
22.	11 Juni 2024 June 11, 2024	Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Penerbitan Obligasi PT Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2024. Response of the Board of Commissioners to the plan to issue PT Perusahaan Pengelola Aset bonds in 2024.
23.	12 Juni 2024 June 12, 2024	Persetujuan Penambahan Biaya Imbalan Jasa KAP RSM AAJAM atas Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan TB 2023 Approval of additional fees for the APM RSM KAP service reward for the Audit of TB Financial Statements 2023
24.	21 Juni 2024 June 21, 2024	Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen PT Perusahaan Pengelola Aset Tahun Buku 2023 (audited). Response of the Board of Commissioners to the PT Perusahaan Pengelola Aset Management Report for 2023 (Audited).

Tanggapan Dewan Komisaris Tahun 2024

Board of Commissioners' Responses in 2024

No	Tanggal Date	Perihal Subject
25.	15 Juli 2024 July 15, 2024	Tindak lanjut temuan Audit Laporan Keuangan Konsolidasian PT PPA Tahun Buku 2023. Follow-up on Audit Findings of Consolidated Financial Statements of PT PPA for Fiscal Year 2023.
26.	23 Juli 2024 July 23, 2024	Penambahan Risiko pada Risk Register PT Perusahaan Pengelola Aset. Addition of Risk to the PT Perusahaan Pengelola Aset Risk Register.
27.	30 Juli 2024 July 30, 2024	Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Triwulan II Tahun 2024. Board of Commissioners Supervisory Duties Report for QII 2024.
28.	9 Agustus 2024 August 9, 2024	Tindak Lanjut Temuan Audit SPI, BPK-RI dan KAP. Follow-up Findings of SPI Audit, BPK-RI and KAP.
29.	12 Agustus 2024 August 12, 2024	Tanggapan atas Usulan Pengangkatan Wakil Perseroan untuk Menjadi Calon Anggota Dewan Komisaris pada PT Nindya Beton. Response to the proposal of the appointment of the Company's representatives to become candidates for the PT Nindya Beton Board of Commissioners.
30.	12 Agustus 2024 August 12, 2024	Persetujuan Usulan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PPA Kapital. Approval of the proposal to appoint members of the Board of Commissioners of PT PPA Kapital.
31.	16 Agustus 2024 August 16, 2024	Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi Sampai Dengan 1 (satu) Tingkat Dibawah Direksi PT Perusahaan Pengelola Aset. Approval of changes in organizational structure up to 1 (one) level below the PT Perusahaan Pengelola Aset Directors.
32.	26 Agustus 2024 August 26, 2024	Evaluasi atas Laporan Manajemen Triwulan II Tahun 2024 PT Perusahaan Pengelola Aset. Evaluation of the PT Perusahaan Pengelola Aset QII Management Report in 2024.
33.	18 September 2024 September 18, 2024	Penjelasan atas Tanggapan Laporan Manajemen Triwulan II Tahun 2024 PT Perusahaan Pengelola Aset. Explanation on the response to the PT Perusahaan Pengelola Aset QII Management Report in 2024.
34.	8 Oktober 2024 October 8, 2024	Penyampaian Key Performance Indicators (KPI) Direksi Individual Tahun 2024. Submission of Key Performance Indicators (KPI) for Individual Directors in 2024.
35.	28 Oktober 2024 October 28, 2024	Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT Perusahaan Pengelola Aset Triwulan III Tahun 2024. PT Perusahaan Pengelola Aset Triwulan Board of Commissioners Supervisory Report for QIII 2024.
36.	1 November 2024 November 1, 2024	Persetujuan Key Performance Indicator (KPI) Direksi secara Individual PT Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2024. Approval of Key Performance Indicators (KPI) for Individual PT Perusahaan Pengelola Aset Directors in 2024.
37.	1 November 2024 November 1, 2024	Persetujuan Strategi Risiko PT Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2025. Approval of PT Perusahaan Pengelola Aset Risk Strategy for 2025.
38.	4 November 2024 November 4, 2024	Tanggapan atas Teguran Pelaksanaan Audit PT PPA Tahun Buku 2023 dan Penyampaian Laporan Keuangan Audited BUMN Titip Kelola Tahun Buku 2021 sampai dengan 2023. Response to the reprimand of the PT PPA Audit in 2023, and Submission of Audited Financial Statements for BUMN Governance for Fiscal Year 2021 to 2023.
39.	13 November 2024 November 13, 2024	Tindak Lanjut Surat Pemegang Saham Seri B No. S-827. Follow-up of Series B Shareholders Letter No. S-827.
40.	15 November 2024 November 15, 2024	Evaluasi atas Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2024 PT Perusahaan Pengelola Aset. Evaluation of PT Perusahaan Pengelola Aset QIII 2024 management report.
41.	15 November 2024 November 15, 2024	Persetujuan Kebijakan Manajemen Risiko. Approval of Risk Management Policy.
42.	29 November 2024 November 29, 2024	Tanggapan Dewan Komisaris atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2025. Response to the Board of Commissioners related to PT Perusahaan Pengelola Aset Corporate Work Plan and Budget (RKAP) for 2025.
43.	11 Desember 2024 December 11, 2024	Pengangkatan Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen PT PPA Finance. The appointment of the President Commissioner concurrently the Independent Commissioner of PT PPA Finance.
44.	11 Desember 2024 December 11, 2024	Pengangkatan Anggota Direksi PT PPA Kapital. Appointment of members of the PT PPA Kapital Board of Directors.
45.	27 Desember 2024 December 27, 2024	Tindak Lanjut Temuan Penilaian Risk Maturity Indeks (MRI) Tahun 2023. Follow-up Findings of the Risk Maturity Index (MRI) assessment of 2023.
46.	30 Desember 2024 December 30, 2024	Saran dan Nasihat Dewan Komisaris atas Kebijakan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa PT Perusahaan Pengelola Aset ("PT PPA") Tahun 2024. Suggestions and advice of the Board of Commissioners for the policies and implementation of the procurement of goods and services by PT Perusahaan Pengelola Aset ("PT PPA") in 2024.
47.	30 Desember 2024 December 30, 2024	Saran dan Nasihat Dewan Komisaris atas Kebijakan dan Pelaksanaan Pengelolaan SDM PT Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2024. Suggestions and advice of the Board of Commissioners for the policies and implementation of HC management by PT Perusahaan Pengelola Aset in 2024.
48.	30 Desember 2024 December 30, 2024	Saran dan Nasihat Dewan Komisaris atas Kebijakan Mutu dan Pelayanan Pelanggan PT Perusahaan Pengelola Aset ("PT PPA") Tahun 2024. Suggestions and advice of the Board of Commissioners on the PT Perusahaan Pengelola Aset ("PT PPA") Quality and Customer Service Policy in 2024.

PENILAIAN KINERJA KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dasar dan Prosedur Penilaian

Penilaian kinerja Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan pedoman yang tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. PER-01/KOM/PPA/IX/2015 tentang Indikator Metode Evaluasi Kinerja Tahunan Komite PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

KRITERIA YANG DIGUNAKAN SEPERTI CAPAIAN KINERJA SELAMA TAHUN BUKU, KOMPETENSI DAN KEHADIRAN DALAM RAPAT

Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kinerja Komite Pendukung dengan mengacu pada pencapaian program kerja yang telah tertuang dalam RKA tahunan, saran dan rekomendasi yang diberikan oleh Komite, serta tingkat kehadiran dalam rapat. Berikut adalah hasil penilaian untuk masing-masing Komite Pendukung.

Hasil Penilaian

1. Penilaian Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris

Penilaian dilakukan melalui rekapitulasi dan penilaian terhadap kehadiran dalam rapat-rapat internal dan gabungan Dewan Komisaris, rapat-rapat kesekretariatan dan komite Dewan Komisaris, penguasaan penugasan dan penyelesaian administrasi korespondensi, keleluasaan waktu kerja, kekompakan dukungan koordinasi dengan Komite Dewan Komisaris, ketaatan/kepatuhan dan loyalitas terhadap pengembangan Perseroan, serta kontribusi kegiatan lainnya dalam rangka membantu pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris. Realisasi pencapaian Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris mencapai 100% dengan kriteria Sangat Baik.

2. Penilaian Kinerja Komite Audit

Penilaian dilakukan melalui rekapitulasi dan penilaian terhadap kehadiran dalam rapat-rapat internal dan/atau gabungan Dewan Komisaris, rapat-rapat komite dan/atau kesekretariatan Dewan Komisaris, penguasaan penugasan dan penyelesaian evaluasi audit/bisnis laporan keuangan/kajian aksi korporasi, keleluasaan waktu kerja, kekompakan dukungan koordinasi dengan Sekretaris dan Komite Dewan Komisaris, ketaatan/kepatuhan dan loyalitas terhadap pengembangan Perseroan, serta kontribusi kegiatan lainnya dalam rangka membantu pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris. Realisasi pencapaian Komite Audit Dewan Komisaris mencapai 100% dengan kriteria Sangat Baik.

3. Penilaian Kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG

Penilaian dilakukan melalui rekapitulasi dan penilaian terhadap kehadiran dalam rapat-rapat internal dan/atau gabungan Dewan Komisaris, rapat-rapat komite dan/atau kesekretariatan Dewan Komisaris, penguasaan penugasan dan penyelesaian evaluasi GCG/risiko/kepatuhan laporan manajemen/kajian aksi korporasi, keleluasaan waktu kerja, kekompakan dukungan koordinasi dengan Sekretaris dan Komite Dewan Komisaris, ketaatan/kepatuhan dan loyalitas terhadap pengembangan Perseroan,

PERFORMANCE ASSESSMENT OF SUPPORTING ORGANS AND COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

Assessment Basis and Procedure

The performance assessments for committee under the Board of Commissioners is carried out based on the guidelines listed in the Board of Commissioners Decree No. PER-01/KOM/PPA/IX/2015 concerning Indicators of the Annual Performance Evaluation Method of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Committees.

CRITERIA USED INCLUDES PERFORMANCE ACHIEVEMENTS DURING THE FISCAL YEAR, COMPETENCY AND MEETING ATTENDANCE

The Board of Commissioners performance assessment of the Supporting Committee refers to the achievement of work programs contained in the Annual RKA, suggestions and recommendations given by the committee, as well as attendance level at meetings. The following explains the assessment results for each Supporting Committee.

Assessment Result

1. Performance Assessment of the Secretary to the Board of Commissioners

The assessment was carried out through recapitulation and assessment of attendance at internal and joint meetings of the Board of Commissioners, secretariat and committee meetings of the Board of Commissioners, mastery of assignments and completion of administrative correspondence, flexibility of working time, solid coordination support with the Board of Commissioners Committee, obedience/compliance and loyalty to the development of the Company, as well as contribution to other activities to assist the Board of Commissioners in the supervision of the Company. The performance realization of the Secretary to the Board of Commissioners was 100% with a Very Good criteria.

2. Performance Assessment of the Audit Committee

The assessment was carried out through recapitulation and assessment of attendance at internal and joint meetings of the Board of Commissioners, secretariat and committee meetings of the Board of Commissioners, mastery of assignments and completion of audit evaluations/financial report business/corporate action reviews, flexibility of working time, solid coordination with the Secretary and Committees of the Board of Commissioners, obedience/compliance and loyalty towards the development of the Company, as well as contribution to other activities to assist the Board of Commissioners in the supervision of the Company. The performance realization of the Board of Commissioners' Audit Committee was 100% with a Very Good criteria.

3. Performance Assessment of the Risk Management and GCG Monitoring Committee

The assessment was carried out through recapitulation and assessment of attendance at internal and joint meetings of the Board of Commissioners, secretariat and committee meetings of the Board of Commissioners, mastery of assignments and completion of GCG/risk/monitoring evaluations of management reports/corporate action reviews, flexibility of working time, solid coordination support with the Secretary and Board of

serta kontribusi kegiatan lainnya dalam rangka membantu pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris. Realisasi pencapaian Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG Dewan Komisaris mencapai 100% dengan kriteria Sangat Baik.

4. Penilaian Kinerja Komite Nominasi dan Remunerasi

Penilaian dilakukan melalui rekapitulasi dan penilaian terhadap kehadiran dalam rapat-rapat internal dan/atau gabungan Dewan Komisaris, rapat-rapat komite dan/atau kesekretariatan Dewan Komisaris, penguasaan penugasan dan penyelesaian evaluasi GCG/risiko/kepatuhan laporan manajemen/kajian aksi korporasi, kekeluasaan waktu kerja, kekompakan dukungan koordinasi dengan Sekretaris dan Komite Dewan Komisaris, ketaatan/kepatuhan dan loyalitas terhadap pengembangan Perseroan, serta kontribusi kegiatan lainnya dalam rangka membantu pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris. Realisasi pencapaian Komite Nominasi dan Remunerasi Dewan Komisaris mencapai 100% dengan kriteria Sangat Baik.

5. Penilaian Kinerja Komite Tata Kelola Terintegrasi

Penilaian dilakukan melalui rekapitulasi dan penilaian terhadap kehadiran dalam rapat-rapat, serta kontribusi kegiatan lainnya dalam rangka membantu pengawasan entitas anak oleh seluruh Anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi. Realisasi pencapaian Komite Tata Kelola Terintegrasi mencapai 100% dengan kriteria Sangat Baik.

Commissioners Committee, obedience/compliance and loyalty to the development of the Company, as well as contribution to other activities to assist the Board of Commissioners in the supervision of the Company. The performance realization of the Board of Commissioners' Risk Management and GCG Monitoring Committee was 100% with a Very Good criteria.

4. Performance Assessment of the Nomination and Remuneration Committee

The assessment was carried out through recapitulation and assessment of attendance at internal and joint meetings of the Board of Commissioners, secretariat and committee meetings of the Board of Commissioners, mastery of assignments and completion of GCG/risk/compliance evaluations of management reports/corporate action reviews, flexibility of working time, solid coordination support with the Secretary and Committee of the Board of Commissioners, obedience/compliance and loyalty to the development of the Company, as well as contribution to other activities to assist the Board of Commissioners in the supervision of the Company. Board of Commissioners' Nomination and Remuneration Committee was 93.20% with a Very Good criteria.

5. Performance Assessment of Integrated Governance Committee

The assessment was conducted through recapitulation and assessment of attendance in meetings, as well as contribution of other activities in order to assist the supervision of subsidiaries by all members of the Integrated Governance Committee. The realization of the Integrated Governance Committee achievement reached 100% with Very Good criteria.

Komisaris Independen

INDEPENDENT COMMISSIONER

Komisaris Independen memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan integritas dalam Perseroan. Komisaris Independen tidak boleh memiliki hubungan keluarga, keuangan, kepemilikan saham, atau keterlibatan dalam kepengurusan dengan anggota Direksi, pemegang saham pengendali, atau Perseroan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen. Dengan demikian, Komisaris Independen diharapkan dapat memberikan pandangan yang objektif dan netral. Tugas utama Komisaris Independen adalah memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan Perseroan sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Selain itu, Komisaris Independen berfungsi untuk mencegah potensi konflik kepentingan yang dapat merugikan pemegang saham atau pihak lain yang terkait.

Menurut Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023, Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas wajib memiliki setidaknya 20% (dua puluh persen) anggota yang berasal dari Komisaris Independen, yang harus ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya. Namun, sepanjang tahun 2024, PT Perusahaan Pengelola Aset tidak memiliki Komisaris Independen yang berarti Perseroan belum memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Komisaris Independen per 31 Desember 2024

Sampai akhir 31 Desember 2024, Pemegang Saham Perseroan belum melakukan pengangkatan Komisaris Independen.

KRITERIA PENENTUAN DAN PEMENUHAN INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN

Dalam rangka memastikan netralitas dan efisiensi kinerja Komisaris Independen, Perseroan telah menetapkan kriteria independensi sebagai dasar penilaian. Kriteria tersebut sebagai berikut:

Kriteria Independensi Independency Criteria
Merupakan anggota Manajemen Perseroan Is a member of Company Management
Terikat dari hubungan usaha dan hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan Has business affiliation and other affiliations that may influence the decision making
Sebagai pemegang Saham mayoritas Perseroan atau pegawai yang berhubungan langsung dengan Pemegang Saham mayoritas Perseroan As the majority shareholder of the Company or an employee who is directly related to the majority shareholder of the Company
Sebagai pegawai atau pernah bekerja sebagai eksekutif pada Perseroan atau anggota perusahaan afiliasi, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Dewan Komisaris As an employee or working as an executive at the Company or a member of an affiliated Company, at least 3 (three) years prior to appointment as a Board of Commissioners member
Sebagai penasihat atau konsultan utama profesional yang material bagi Perseroan atau perusahaan afiliasi, atau pegawai yang berhubungan langsung dengan penyedia jasa, setidaknya 3 (tiga) tahun sebelum menjadi anggota Dewan Komisaris As a professional main advisor or consultant who is material for the Company or affiliated Company, or employee who is directly engaged with service providers, at least 3 (three) years prior appointed as Board of Commissioners member
Sebagai pemasok atau pelanggan utama dari Perseroan atau perusahaan afiliasi atau pegawai dari/atau yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan utama As a main supplier or customer of the Company or an affiliated Company or employee from/or directly or indirectly engaged with main suppliers or customers

Independent Commissioners play a crucial role in maintaining balance and integrity within the Company. Independent commissioners may not have familial, financial, share ownership relations, or involvement in management with members of the Board of Directors, Controlling Shareholders, or with the Company that can influence their ability to act independently so they can provide objective and neutral views. The main duties of the independent commissioners is to ensure the Company's policies comply with the principles of Good Corporate Governance (GCG), and to prevent potential conflicts of interest that could harm shareholders or other related parties.

Based on the Minister of BUMN Regulation No. Per-2/MBU/03/2023, it is regulated that at least 20% (twenty percent) of the Board of Commissioners/Supervisory Board members appointed be independent, which must be stipulated in the appointment decision. However, throughout 2024, PT Perusahaan Pengelola Aset did not have an independent commissioner. Therefore, the Company has not fulfilled the provisions in accordance with applicable regulations.

Independent Commissioners as at December 31, 2024

As of December 31, 2024, the Company's Shareholders has not yet appointed any Independent Commissioners.

CRITERIA FOR DETERMINING AND FULFILLING INDEPENDENCY OF INDEPENDENT COMMISSIONER

To ensure the neutrality and efficiency of independent commissioners' performance, the Company has established independency criteria as a basis for assessment. These criteria are as follows:

Direksi

BOARD OF DIRECTORS

Direksi adalah organ Perseroan yang memiliki tanggung jawab atas pengelolaan dan pengambilan keputusan strategis yang sesuai dengan nilai dan tujuan yang telah ditetapkan. Keputusan-keputusan yang diambil oleh Direksi berdasarkan Undang-Undang, Anggaran Dasar, serta penerapan prinsip GCG dalam setiap aspek kegiatan Perseroan.

Kinerja Direksi memiliki dampak signifikan terhadap arah dan keberlanjutan Perseroan, sehingga penting bagi mereka untuk memiliki visi yang jelas. Dengan demikian, Direksi bertanggung jawab atas penyusunan strategi dan kebijakan Perseroan, anggaran, Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), pengelolaan risiko usaha sesuai dengan tujuan Perseroan, serta memastikan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

BOARD MANUAL: TATA KERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dalam rangka memastikan bahwa pelaksanaan tugas dilakukan secara efektif dan terarah, Direksi mengacu pada *Board Manual*. Pedoman ini mencakup tata laksana kerja dan penjelasan mengenai tahapan aktivitas secara sistematis yang mudah dipahami dengan tujuan untuk menjaga konsistensi dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Board Manual Perusahaan diterbitkan melalui Surat Keputusan Bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan nomor SK-06/KEP.KOM/PPA/X/2022; SK-89/PPA/1022 tanggal 26 Oktober 2022 dan disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, arahan pemegang saham, Undang-Undang yang berlaku, Anggaran Dasar, serta praktik-praktik GCG. Penggunaan *Board Manual* bertujuan memberikan kemudahan bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk memahami peraturan yang berhubungan dengan tata kerja. Berikut adalah rincian hal-hal yang diatur dalam *Board Manual*, yaitu:

1. Ketentuan umum jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi;
3. Kewajiban Dewan Komisaris dan Direksi;
4. Pembagian tugas dan wewenang anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
5. Etika jabatan;
6. Pelaksanaan tugas pengurusan Perseroan oleh Direksi;
7. Prinsip-prinsip pengambilan keputusan Dewan Komisaris dan Direksi;
8. Rapat Dewan Komisaris dan Direksi;
9. Organ Penunjang Dewan Komisaris dan Direksi;
10. Hubungan dengan anak perusahaan;
11. Benturan kepentingan.

The Board of Directors is the Company's organ responsible for managing and making strategic decisions in accordance with established values and objectives. The Board of Directors' decisions are also made in accordance with the Laws and regulations and Articles of Association, and the application of GCG principles in all aspects of the Company's activities.

The Board of Directors performance influences the direction and sustainability of the Company, so it is important for them to have a clear vision. Therefore, the Board of Directors is responsible for preparing the Company's strategies and policies, budget and master plan, Company Long Term Plan (RJPP), Company Work Plan and Budget (RKAP), and handling business risks in accordance with the Company's objectives and ensuring the achievement of business targets and objectives.

BOARD MANUAL: GUIDELINES AND WORK PROCEDURES FOR THE BOARD OF DIRECTORS

In carry out its duties effectively and in a targeted manner, the Board of Directors refers to the Board Manual. These guidelines include work procedures and explanations regarding the activity stages in a systematic and easy to understand manner to maintain consistency in the implementation of duties in accordance with GCG principles.

The Company's Board Manual was issued through a Joint Decree between the Company's Board of Commissioners and Board of Directors No. SK-06/KEP.KOM/PPA/X/2022; SK-89/PPA/1022 dated October 26, 2022, and was prepared based on the principles of corporate law, shareholder directives, applicable laws, Articles of Association, and GCG practices. The use of the Board Manual aims to make it easier for the Board of Commissioners and Board of Directors to understand the regulations related to work procedures. The matters regulated in the Board Manual, include the following:

1. General Provision on Board of Commissioners and Board of Directors Member Positions;
2. Board of Commissioners and Board of Directors duties and authorities;
3. Board of Commissioners and Board of Directors obligations;
4. Board of Commissioners and Board of Directors members division of duties and authority;
5. Position Ethics;
6. Implementation of Company's managerial duties by the Board of Directors;
7. Board of Commissioners and Board of Directors decision making principles;
8. Board of Commissioners and Board of Directors Meetings;
9. Board of Commissioners and Board of Directors Supporting Structure;
10. Relationship with Subsidiaries;
11. Conflicts of Interest.

Pelaksanaan tugas Direksi juga merujuk pada Pedoman Kerja Direksi yang ditetapkan melalui keputusan Direksi No. SK-58/PPA/1215 pada 10 Desember 2015. Pedoman ini mencakup hal-hal berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Rapat Direksi;
3. Keputusan di Luar Rapat Direksi;
4. Komunikasi Hasil Keputusan Direksi;
5. Ketentuan Lain-lain;
6. Ketentuan Penutup.

SUKSESI: NOMINASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Proses pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilaksanakan melalui RUPS sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Anggaran Dasar, serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 yang mengatur persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian anggota Direksi pada Badan Usaha Milik Negara. Pengangkatan Direksi yang baru hanya dapat dilakukan setelah memenuhi semua persyaratan formal, materiil dan ketentuan lainnya. Penjelasan lebih lanjut mengenai suksesi Direksi dapat dilihat pada bagian Fungsi Nominasi dan Remunerasi dalam bab ini.

KETENTUAN MASA JABATAN

Anggota Direksi, sesuai dengan Anggaran Dasar yang telah ditetapkan, memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

KOMPOSISI DAN SUSUNAN DIREKSI TAHUN 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Muhamad Teguh Wirahadikusumah	Direktur Utama President Director	Diangkat sebagai Direktur Utama PPA melalui Surat Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Danareksa (Persero) nomor SK-367/MBU/12/2023 dan nomor KPPS-47/037/DNRK tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi PT Perusahaan Pengelola Aset tanggal 15 Desember 2023. Selain itu, Muhammad Teguh Wirahadikusumah juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Direktur Special Asset Management berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PPA nomor 04/KEPKOM/PPA/I/2024 tanggal 19 Januari 2024. Appointed as President Director of PPA through Decrees of the Minister of SOEs, and President Director of PT Danareksa (Persero) No. SK- 367/MBU/12/2023 and No. KPPS-47/037/DNRK concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature, and Appointment of Members of the PT Perusahaan Pengelola Aset Board of Directors dated December 15, 2023. Muhammad Teguh Wirahadikusumah also served as Acting Director of Special Asset Management based on the PPA Board of Commissioners Decree No. 04/KEPKOM/PPA/I/2024 dated January 19, 2024.	15 Desember 2023 - RUPST 2028, Periode Pertama December 15, 2023 - 2028 AGMS, First Period

The implementation of the Board of Directors' duties also refers to the Board of Directors' Work Guidelines as stipulated in the Board of Directors' Decree No. SK-58/PPA/1215 dated December 10, 2015, which includes the following matters:

1. General Provisions;
2. Board of Directors Meetings;
3. Decisions taken outside Board of Directors Meetings;
4. Communication of Board of Directors Resolutions;
5. Other Provisions;
6. Closing Provisions.

SUCCESSION: NOMINATION, APPOINTMENT, AND DISMISSAL OF BOARD OF DIRECTORS

The process of appointing and dismissing members of the Board of Directors is carried out through a GMS based on the applicable legal provisions, the Articles of Association, and the Minister of BUMN Regulation No. PER-03/MBU/02/2015 that regulates the requirements, procedures for appointing and dismissing members of the Board of Directors in SOEs. The appointment of new Directors can only be carried out after fulfilling all formal, material and other requirements. Further explanation on the succession of the Board of Directors can be seen in the Nomination and Remuneration Function section in this chapter.

TERM OF OFFICE

Based on the Articles of Association, members of the Board of Directors that have been determined, serve a term of office of 5 (five) years and they can be reappointed for 1 (one) more term of office.

BOARD OF DIRECTORS STRUCTURE AND COMPOSITION IN 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Ridha Farid Lesmana	Direktur Investasi Director of Investment	Diangkat sebagai Direktur Investasi PPA melalui Surat Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Danareksa (Persero) dengan nomor SK- 367/MBU/12/2023 dan nomor KPPS-47/037/DNRK tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi PT Perusahaan Pengelola Aset tanggal 15 Desember 2023. Appointed as Director of Investment of PPA through Decrees of the Minister of SOEs, and President Director of PT Danareksa (Persero) No. SK- 367/MBU/12/2023 and No. KPPS-47/037/DNRK concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature, and Appointment of Members of the PT Perusahaan Pengelola Aset Board of Directors dated December 15, 2023.	15 Desember 2023 - RUPST 2028, Periode Pertama December 15, 2023 - 2028 AGMS, First Period
Tree Asih Putra Sianturi	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Diangkat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PPA melalui Surat Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Danareksa (Persero) dengan nomor SK-367/MBU/12/2023 dan nomor KPPS-47/037/DNRK tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan \ Pengangkatan Anggota-anggota Direksi PT Perusahaan Pengelola Aset tanggal 15 Desember 2023. Appointed as Director of Finance and Risk Management of PPA through the Minister of BUMN Decree and the President Director of PT Danareksa (Persero) with No. SK-367/MBU/12/2023 and No. KPPS-47/037/DNRK concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature, and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Perusahaan Pengelola Aset dated December 15, 2023.	15 Desember 2023 - RUPST 2028, Periode Pertama December 15, 2023 - 2028 AGMS, First Period

PERNYATAAN INDEPENDENSI DAN POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengelola Perseroan, Direksi harus menjaga independensi dan menghindari campur tangan dari pihak manapun yang dapat membahayakan atau merugikan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar yang bertujuan untuk memastikan tercapainya kepentingan dan kebutuhan Perseroan.

Anggaran Dasar yang telah ditetapkan mengatur bahwa anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak diperbolehkan memiliki hubungan keluarga. Hubungan keluarga yang dimaksud adalah hubungan darah hingga derajat ketiga, baik melalui garis lurus ke atas maupun ke samping, serta hubungan yang timbul karena perkawinan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengambilan keputusan strategis yang sejalan dengan pedoman kerja demi kepentingan Perseroan. Selain itu, Direksi wajib memastikan bahwa operasional Perseroan mematuhi Undang-Undang yang berlaku, Anggaran Dasar, serta keputusan RUPS.

Anggota Direksi wajib menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya secara profesional, transparan, mandiri, dan efisien. Setiap kesalahan atau kelalaian yang terjadi dalam pelaksanaan tugas menjadi tanggung jawab anggota Direksi, kecuali jika anggota tersebut dapat membuktikan bahwa:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

STATEMENT OF INDEPENDENCY AND POTENTIAL CONFLICTS OF INTEREST

In carrying out their duties as the Company's manager, the Board of Directors must maintain independence and avoid interference from any party that may endanger or harm the Company. This is in accordance with the provisions stipulated in the Laws and Regulations and the Articles of Association that aim to ensure the achievement of the Company's interests and needs.

Based on the Articles of Association, it is not permitted for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners to have familial relationships to the third degree, both vertically and horizontally, including relationships by marriage.

BOARD OF DIRECTORS' DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Board of Directors is responsible for managing and making strategic decisions in accordance with the work guidelines for the benefit of the Company. In addition, the Board of Directors is required to ensure that the Company's operations comply with applicable laws, the Articles of Association, and the decisions of the GMS.

Members of the Board of Directors must carry out their obligations and responsibilities professionally, transparently, independently, and efficiently. Any errors or negligence that occur when carrying out their duties are the responsibility of the members of the Board of Directors, unless the member can prove that:

1. The loss was not due to fault or negligence;
2. They carried out management in good faith and prudence for the benefit and in accordance with the aims and objectives of the Company;

3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Tugas dan Wewenang Anggota Direksi

Tugas dan wewenang yang diberikan kepada anggota Direksi ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-77/PPA/0824 tentang Penetapan Jabatan dan Uraian Tugas serta Wewenang Anggota Direksi, sebagai berikut:

3. They had no direct or indirect conflict of interest over management actions that result in losses; and
4. They took actions to prevent the occurrence or continuation of the loss.

Board of Directors Duties and Authorities

The duties and authorities given to members of the Board of Directors are based on the Board of Directors Decree No. SK-77/PPA/0824 concerning Determination of Positions and Descriptions of Duties and Authorities of Members of the Board of Directors, as follows:

Jabatan Position	Tugas Utama Main Duties	Uraian Tugas dan Wewenang Description of Duties and Authorities
Direktur Utama President Director	1. Merencanakan, menetapkan, mengarahkan, mengkomunikasikan, mengevaluasi arah dan strategi perusahaan serta memimpin jalannya Perusahaan dalam rangka pencapaian visi dan misi Perusahaan. 2. Mewakili Perusahaan dalam pembinaan dan <i>monitoring</i> kinerja anak Perusahaan	1. Menetapkan arah dan strategi Perusahaan bersama-sama dengan Direksi untuk memastikan pencapaian visi dan misi Perusahaan. 2. Merencanakan, menetapkan dan mengevaluasi rencana jangka panjang dan jangka pendek Perusahaan sesuai dengan visi dan misi Perusahaan. 3. Menetapkan peraturan dan kebijakan Perusahaan. 4. Mengkomunikasikan rencana jangka panjang, jangka pendek, arah serta strategi Perusahaan kepada seluruh jajaran. 5. Mengkoordinasikan, mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target Perusahaan. 6. Menciptakan peluang bisnis bagi Perusahaan. 7. Mengembangkan, menetapkan dan mengevaluasi rencana jangka panjang dan jangka pendek untuk kegiatan Sekretaris Perusahaan termasuk kegiatan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan, Satuan Pengawasan Internal, Hukum dan Kepatuhan dan Penugasan Khusus sesuai dengan arah dan strategi Perusahaan yang telah ditetapkan Direksi. 8. Bertanggung jawab atas penerapan dan pemantauan tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) dengan uraian tugas diantaranya: 9. Menyusun rencana kerja penerapan GCG; 10. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku; 11. Memantau dan menjaga kepatuhan Perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Perusahaan dengan pihak ketiga. 12. Bertanggung jawab terhadap implementasi dan pemantauan penerapan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP). 13. Bertanggung jawab terhadap implementasi asesmen Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU). 14. Menyetujui dan menyampaikan laporan mengenai pencapaian target dan kinerja Perusahaan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris. 15. Memastikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan arah serta strategi Perusahaan 16. Mewakili Perusahaan dalam pembinaan dan <i>monitoring</i> kinerja anak perusahaan.

Jabatan Position	Tugas Utama Main Duties	Uraian Tugas dan Wewenang Description of Duties and Authorities
	- Planning, determining, directing, communicating, evaluating the direction and strategy of the Company and leading the Company in order to achieve the vision and mission of the Company. - Representing the Company in fostering and monitoring the performance of subsidiaries.	- Determine the direction and strategy of the Company with the Board of Directors to ensure the achievement of the Company's vision and mission. - Plan, determine and evaluate the Company's long-term and short-term plans in accordance with the Company's vision and mission. - Determine the Company's regulations and policies. - Communicate the Company's long-term, short-term plans, directions and strategies to all levels. - Coordinate, direct and supervise the activities and achievement of the Company's targets. - Create business opportunities for the Company. - Develop, determine and evaluate long-term and short-term plans for Company Secretariat activities including Partnership and Community Development Program activities, Internal Audit Unit, Company Strategic and Performance Management, Finance and Accounting, Treasury, Policies and Procedures, Risk Management, Legal, and HC and General Affairs in accordance with the Company's direction and strategy as determined by the Board of Directors. - Responsible for the implementation and monitoring of good corporate governance (GCG) with job descriptions including: - Prepare a work plan for implementing GCG; - Monitor and ensure that the Company's business activities do not deviate from applicable provisions; - Monitor and maintain the Company's compliance with all agreements and commitments made by the Company with third parties. - Responsible for implementing and monitoring the anti-bribery management system (SMAP). - Responsible for the Superior Performance Evaluation Criteria (KPKU) assessment. - Approve and submit reports on the achievement of the Company's targets and performance to Shareholders and the Board of Commissioners. - Ensure that the coaching and development of human capital is in accordance with the Company's direction and strategy. - Represent the Company in developing and monitoring the performance of subsidiaries.
Direktur Investasi Director of Investments	- Merencanakan, menetapkan, menyetujui, mengkomunikasikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan restrukturisasi dan/atau revitalisasi, Aset Manajemen dan jasa konsultasi sesuai dengan target dan strategi Perusahaan dalam rangka mencapai visi dan misi Perusahaan. - Mewakili Perusahaan dalam pembinaan kinerja anak Perusahaan	- Mengembangkan, menetapkan dan mengevaluasi rencana jangka panjang dan jangka pendek untuk kegiatan restrukturisasi dan/atau revitalisasi, Aset Manajemen dan jasa konsultasi sesuai dengan arah dan strategi Perusahaan yang telah ditetapkan Direksi. - Menyetujui dan mengusulkan kebijakan terkait dengan kegiatan restrukturisasi dan/atau revitalisasi, Aset Manajemen dan jasa konsultasi. - Mengkomunikasikan strategi pelaksanaan rencana jangka panjang dan jangka pendek yang telah ditetapkan di lingkungan Direktorat Investasi kepada seluruh jajaran. - Menciptakan dan berdasarkan persetujuan Direktur Utama mengeksekusi peluang restrukturisasi dan/atau revitalisasi, Aset Manajemen dan jasa konsultasi sesuai dengan strategi Perusahaan yang telah ditetapkan. - Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Investasi dalam rangka mendukung pencapaian target Perusahaan. - Menyetujui dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan Direktorat Investasi kepada Direktur Utama dan/atau Direksi. - Bertanggung jawab terhadap implementasi dan pemantauan penerapan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP). - Memastikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pada Direktorat Investasi sesuai dengan arah serta strategi Perusahaan. - Mewakili Perusahaan dalam pembinaan kinerja anak Perusahaan - Develop, determine and evaluate long-term and short-term plans for restructuring and/or revitalization activities, Asset Management and consulting services in accordance with the Company's direction and strategy as determined by the Board of Directors. - Approve and propose policies related to restructuring and/or revitalization activities, Asset Management and consulting services. - Communicate the strategy for long-term and short-term plans established within the Investment Directorate to all staff. - Create and, based on the approval of the President Director execute restructuring and/or revitalization opportunities, Asset Management and consulting services in accordance with the Company's established strategy. - Coordinate, direct, supervise and evaluate activities within the Investment Directorate to support the achievement of the Company's targets. - Approve and submit reports on the activities of the Investment Directorate to the President Director and/or Board of Directors. - Responsible for implementing and monitoring the application of the anti-bribery management system (SMAP). - Responsible for implementing human capital development and coaching in the Investment Directorate in accordance with the Company's direction and strategy. - Represent the Company in developing the performance of subsidiaries

Jabatan Position	Tugas Utama Main Duties	Uraian Tugas dan Wewenang Description of Duties and Authorities
Direktur Special Aset Manajemen	- Merencanakan, menetapkan, menyetujui, mengkomunikasikan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan aset-aset non produktif dan aset manajemen sesuai dengan target dan strategi Perusahaan dalam rangka mencapai visi dan misi Perusahaan. - Mewakili Perusahaan dalam pembinaan kinerja anak Perusahaan	- Mengembangkan, menetapkan dan mengevaluasi rencana jangka panjang dan jangka pendek untuk kegiatan penanganan aset-aset non produktif dan aset manajemen sesuai dengan arah dan strategi Perusahaan yang telah ditetapkan Direksi. - Menyetujui dan mengusulkan kebijakan terkait dengan kegiatan penanganan aset-aset non produktif dan aset manajemen. - Mengkomunikasikan strategi pelaksanaan rencana jangka panjang dan jangka pendek yang telah ditetapkan di lingkungan Direktorat Special Aset Manajemen kepada seluruh jajarannya. - Menciptakan dan berdasarkan persetujuan Direktur Utama mengeksekusi penanganan aset-aset non produktif dan aset manajemen sesuai dengan strategi Perusahaan yang telah ditetapkan. - Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Special Aset Manajemen - Menyetujui dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan Direktorat Special Aset Manajemen kepada Direktur Utama dan/atau Direksi. - Bertanggung jawab terhadap implementasi dan pemantauan penerapan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP). - Memastikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pada Direktorat Special Aset Manajemen sesuai dengan arah serta strategi Perusahaan. - Mewakili Perusahaan dalam pembinaan kinerja anak Perusahaan
Director of Special Asset Management	- Plan, determine, approve, communicate, direct and evaluate the implementation of non-productive assets and management assets in accordance with the Company's targets and strategies in order to achieve the Company's vision and mission. - Represent the Company in developing the performance of subsidiaries	- Develop, determine and evaluate long-term and short-term plans for handling non-productive assets and management assets in accordance with the Company's direction and strategy as determined by the Board of Directors. - Approve and propose policies related to handling non-productive assets and management assets. - Communicate the implementation strategy for long-term and short-term plans that have been determined within the Special Asset Management Directorate to all levels. - Create and based on the approval of the President Director execute the handling of non-productive assets and management assets in accordance with the Company's strategy that has been set. - Coordinate, direct, supervise and evaluate the implementation of activities in the Special Asset Management Directorate. - Approve and submit reports on the Special Asset Management Directorate activities to the President Director and/or Board of Directors. - Responsible for the implementation and monitoring of the application of the anti-bribery management system (SMAP). - Ensure the implementation of guidance and development of human capital in the Special Asset Management Directorate in accordance with the Company's direction and strategy. - Represent the Company in developing the performance of subsidiaries
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	- Merencanakan, menetapkan, menyetujui, mengkomunikasikan, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Keuangan dan Akuntansi, Tresuri dan Strategi Perusahaan, Manajemen Risiko, Kebijakan, Prosedur dan Portofolio Manajemen, SDM, Umum, Pengadaan dan Operasional Bisnis sesuai dengan target dan strategi Perusahaan dalam rangka mencapai visi dan misi Perusahaan - Mewakili Perseroan dalam pembinaan dan <i>monitoring</i> kinerja anak Perusahaan.	- Mengembangkan, menetapkan dan mengevaluasi rencana jangka panjang dan jangka pendek untuk kegiatan Keuangan dan Akuntansi, Tresuri dan Strategi Perusahaan, Manajemen Risiko, Kebijakan, Prosedur dan Portofolio Manajemen, SDM, Umum, Pengadaan dan Operasional Bisnis sesuai dengan arah dan strategi Perusahaan yang telah ditetapkan Direksi. - Menyetujui dan mengusulkan kebijakan terkait dengan kegiatan Keuangan dan Akuntansi, Tresuri dan Strategi Perusahaan, Manajemen Risiko, Kebijakan, Prosedur dan Portofolio Manajemen, SDM, Umum, Pengadaan dan Operasional Bisnis. - Mengkomunikasikan strategi pelaksanaan rencana jangka panjang dan jangka pendek yang telah ditetapkan di lingkungan Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko kepada seluruh jajarannya. - Menciptakan dan berdasarkan persetujuan Direktur Utama mengeksekusi kegiatan Keuangan dan Akuntansi, Tresuri dan Strategi Perusahaan, Manajemen Risiko, Kebijakan, Prosedur dan Portofolio Manajemen, SDM, Umum, Pengadaan dan Operasional Bisnis sesuai dengan strategi Perusahaan yang telah ditetapkan. - Mengkoordinasikan, mengarahkan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko. - Menyetujui dan menyampaikan laporan mengenai kegiatan Keuangan dan Manajemen Risiko kepada Direktur Utama dan/atau Direksi. - Bertanggung jawab terhadap implementasi dan pemantauan penerapan sistem manajemen anti penyuapan (SMAP). - Memastikan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pada Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko sesuai dengan arah serta strategi Perusahaan. - Mewakili Perusahaan dalam pembinaan kinerja anak Perusahaan

Jabatan Position	Tugas Utama Main Duties	Uraian Tugas dan Wewenang Description of Duties and Authorities
Director of Finance and Risk Management	- Plan, determine, approve, communicate, direct and evaluate the Finance and Accounting Strategy, Treasury and Corporate Strategy, Risk Management, Policy, Procedure and Portfolio Management, HC, General Affairs, Procurement and Business Operations activities in accordance with the Company's targets and strategies in order to achieve the Company's vision and mission - Represent the Company in fostering and monitoring the performance of subsidiaries.	- Develop, determine and evaluate long-term and short-term plans for Finance and Accounting, Treasury and Corporate Strategy, Risk Management, Policy, Procedure and Management Portfolio, HC, General Affairs, Procurement and Business Operations activities in accordance with the Company's targets and strategies that has been set by the Board of Directors. - Approve and propose policies related to Finance and Accounting, Treasury and Corporate Strategy, Risk Management, Policy, Procedure and Management Portfolio, HC, General Affairs, Procurement and Business Operations activities. - Communicate the implementation strategy for long-term and short-term plans set with in the Finance and Risk Management Directorate to all levels. - Create and based on the approval of the President Director execute Finance and Accounting, Treasury and Corporate Strategy, Risk Management, Policy, Procedure and Management Portfolio, HC, General Affairs, Procurement and Business Operations activities in accordance with the Company's strategy that has been set. - Coordinate, direct, supervise and evaluate the activities in the Finance and Risk Management Directorate. - Approve and submit reports on Finance and Risk Management activities to the President Director and/or Board of Directors. - Responsible for the application and monitoring of the anti-bribery management system (SMAP). - Ensure the HC development and coaching in the Finance and Risk Management Directorate is in accordance with the Company's direction and strategy. - Represent the Company in developing the performance of subsidiaries

PENDELEGASIAN WEWENANG

Dalam rangka penerapan kebijakan tata kelola Perseroan, Direktur Utama memiliki hak dan wewenang untuk bertindak atas nama Direksi dan mewakili Perseroan, kecuali jika ditentukan lain oleh Direksi. Semua keputusan yang diambil oleh Direktur Utama harus mendapat persetujuan dalam rapat Direksi.

Apabila Direktur Utama tidak dapat menjalankan tugasnya atau berhalangan dan tidak melakukan penunjukan pengganti, maka tugas dan wewenang Direktur Utama akan dilaksanakan oleh anggota Direksi yang telah menjabat paling lama. Jika ada lebih dari 1 (satu) anggota Direksi dengan masa jabatan terlama, maka keputusan akan diambil oleh anggota Direksi yang tertua dalam usia. Tindakan yang diambil tetap akan dilakukan atas nama Direksi.

Jika salah satu anggota Direksi selain Direktur Utama berhalangan untuk menjalankan tugasnya karena alasan apapun, anggota Direksi lainnya berhak menunjuk salah satu anggota Direksi untuk melaksanakan tugas yang berhalangan tersebut tanpa perlu membuktikan alasan kepada pihak ketiga.

PROGRAM ORIENTASI/ PENGENALAN PERSEROAN UNTUK ANGGOTA DIREKSI BARU

Perseroan berkomitmen untuk mendukung efektivitas dan keberhasilan kinerja seluruh anggota Direksi. Oleh karena itu, Perseroan menyelenggarakan program orientasi untuk anggota Direksi baru dengan tujuan memberikan pemahaman mengenai situasi yang ada di Perseroan, agar mereka dapat memahami dengan baik tugas dan tanggung jawab yang diemban.

Program orientasi bagi Direksi yang baru dilaksanakan oleh Sekretaris Perusahaan dan materi yang diberikan tercatat dalam Berita Acara Penyelenggaraan Pengenalan Perseroan kepada Direksi. Materi yang diberikan antara lain:

DELEGATION OF AUTHORITY

For the Company's governance policies, the President Director has the right and authority to act on behalf of the Board of Directors and represent the Company, unless otherwise determined by the Board of Directors. All decisions taken by the President Director must be approved at a Board of Directors meeting.

If the President Director is unable to carry out their duties or is prevented and does not appoint a replacement, then the duties and authorities of the President Director can be carried out by the longest serving member of the Board of Directors. If there is more than 1 (one) member of the Board of Directors with the longest term of office, then the decision will be taken by the oldest member of the Board of Directors in terms of age. Actions taken will still be carried out in the name of the Board of Directors.

If one of the members of the Board of Directors other than the President Director is prevented from carrying out their duties for any reason, the other members of the Board of Directors have the right to appoint one of the members of the Board of Directors to carry out the duties of the member who is prevented from doing so without having to prove the reason to a third party.

COMPANY ORIENTATION/INTRODUCTION PROGRAM FOR NEW DIRECTORS

The Company is committed to supporting the effectiveness and successful performance of all members of the Board of Directors. Therefore, the Company organizes an orientation program for new members of the Board of Directors with the aim of providing an understanding of the current situation in the Company, so they can master their duties and responsibilities rry.

The orientation program for new Directors is organized by the Corporate Secretary and the materials provided are recorded in the Minutes of the Company's Introduction to the Directors. The materials provided include:

1. Annual Report
2. Laporan Keuangan Audited
3. Kebijakan GCG
4. Board Manual
5. Pedoman Kerja Direksi.

Pada tahun 2024, Perseroan tidak menyelenggarakan program orientasi atau pengenalan Perseroan karena tidak ada anggota Direksi baru yang dilantik.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Kebijakan

Pengembangan dan peningkatan kompetensi Direksi dilakukan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Perseroan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. SK-06/KEP.KOM/PPA/X/2022; SK-89/PPA/1022 tanggal 26 Oktober 2022. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Perseroan untuk memastikan efektivitas serta peningkatan kapabilitas kinerja seluruh anggota Direksi. Program pengembangan kompetensi dilakukan melalui pelatihan dan pendidikan dengan pendanaan yang sepenuhnya ditanggung oleh Perseroan.

Selama tahun 2024, anggota Direksi telah mengikuti berbagai program pelatihan dan/atau pengembangan kompetensi sebagai berikut:

1. Annual Report
2. Audited Financial Reports
3. GCG Policy
4. Manual Board
5. Board of Directors' Work Guidelines.

In 2024, the Company did not hold a Company orientation or introduction program as no new members of the Board of Directors had been appointed.

BOARD OF DIRECTORS COMPETENCY DEVELOPMENT

Policy

The Board of Directors' competency development and improvement is carried out in accordance with the policies established by the Company, through a Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors No. SK-06/KEP.KOM/PPA/X/2022; SK-89/PPA/1022 dated October 26, 2022. This is a manifestation of the Company's commitment to ensuring the effectiveness and performance capabilities of all members of the Board of Directors. The competency development program is carried out through training and education with funding fully borne by the Company.

During 2024, members of the Board of Directors participated in the following training and/or competency development programs:

Nama dan Jabatan Name and Position	Tema/Judul Pelatihan Type of Education and Training	Tempat dan Tanggal Place and Time	Penyelenggara Organizer
Muhammad Teguh Wirahadikusumah	Workshop 'Strategic Approach to Risk Management towards SOE's Business Sustainability'	Bali & 19-Jan-24 Bali, January 19, 2024	Kementerian BUMN Ministry of State-Owned Enterprises
	Workshop Executive Business Continuity Management	Online & 30-Nov-24 Online, November 30, 2024	BCM
	Implementing GRC	Online & 10-Dec-24 Online, December 10, 2024	Center for Risk Management & Sustainability
Ridha Farid Lesmana	Conference dan Wisuda CRGP CRGP Conference and Graduation	Bali & 12-Dec-24 Bali, December 24, 2024	LSP-MR
	Program dan Sertifikasi CRGP CRGP Program and Certification	Jakarta & 28-Aug-24 Jakarta, August 28, 2024	DLI - RAP Indonesia & LSPMR
	Workshop Executive Business Continuity Management	Online & 31-Oct-24 Online, October 31, 2024	BCM
	Wisuda CRGP & Konferensi Nasional Manajemen Risiko X CRGP & National Risk X Management Conference Graduation	Bali & 12-Dec-24 Bali, December 12, 2024	LSPMR
Tree Asih Putra Sianturi	Workshop 'Strategic Approach to Risk Management towards SOE's Business Sustainability'	Bali & 19-Jan-24 Bali, January 19, 2024	Kementerian BUMN Ministry of State-Owned Enterprises
	GRC Summit - Masterclass and Seminar 2024	Yogyakarta & 22-Aug-24 Yogyakarta, August 22, 2024	CRMS Indonesia
	CFO School Program	Singapore & 26-Sep-24 Singapore, September 26, 2024	Kementerian BUMN Ministry of State-Owned Enterprises
	Pelatihan & Sertifikasi Certified Risk Executive Leader (CREL) Certified Risk Executive Leader (CREL) Training & Certification	Jakarta & 1-8-Oct-24 Jakarta, October 1-8, 2024	Pusdiklatwas BPKP

PELAKSANAAN TUGAS DIREKSI TAHUN 2024

Seluruh informasi terkait pelaksanaan tugas Direksi pada tahun 2024 dapat ditemukan dalam keputusan-keputusan yang telah diterbitkan. Berikut adalah rincian terkait surat keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Direksi, antara lain:

BOARD OF DIRECTORS' DUTIES IMPLEMENTATION IN 2024

Information related to the the Board of Directors' duties in 2024 can be seen in the decisions issued. The following explains the decision letters related to the implementation of the Board of Directors' duties:

Keputusan Direksi Tahun 2024 Board of Directors' Decisions in 2024

No	Nomor SK SK Number	Tanggal Date	Perihal Subject
1	SK-7A/PPA/0124	30 Januari 2024 January 30, 2024	Surat Keputusan Direksi PPA tentang Kebijakan Kerja Sama PPA Board of Directors Decree concerning Cooperation Policy
2	SK-37/PPA/0424	3 April 2024 April 03, 2024	Surat Keputusan Direksi PT PPA Tentang Piagam Audit Internal PT PPA Board of Directors Decree concerning Internal Audit Charter
3	SK-36/PPA/0424	3 April 2024 April 03, 2024	Surat Keputusan Direksi PT PPA Tentang Kebijakan Standardisasi Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa PT PPA Board of Directors Decree concerning Standardization Policy for Procurement of Goods/Services Agreements
4	SK-41A-PPA-0424	30 April 2024 April 30, 2024	Surat Keputusan Direksi Tentang Ratifikasi Kebijakan Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Board of Directors Decree concerning Ratification of Corporate Governance and Activities Policy
5	SK-55-PPA-0624	7 Juni 2024 June 07, 2024	Salinan Keputusan PT PPA tentang Komite Kredit Copy of PT PPA Decree concerning Credit Committee
6	SK-76-PPA-0824	28 Agustus 2024 August 28, 2024	Salinan Keputusan Direksi PPA Tentang Struktur Organisasi PT PPA Copy of PPA Board of Directors Decree concerning PT PPA Organizational Structure
7	SK-77-PPA-0824	28 Agustus 2024 August 28, 2024	Surat Keputusan Direksi Tentang Penetapan Jabatan dan Uraian Tugas serta Wewenang Anggota Direksi PT PPA Board of Directors Decree concerning Determination of Positions and Job Descriptions and Authorities for Members of the PT PPA Board of Directors
8	SK-78-PPA-0824	28 Agustus 2024 August 28, 2024	Surat Keputusan Direksi Tentang Penetapan Jabatan Karyawan pada Satuan Kerja Board of Directors Decree concerning Determination of Employee Positions in Work Units
9	SK-92-PPA-0924	25 September 2024 September 25, 2024	Surat Keputusan Direksi PT PPA tentang Kebijakan Penugasan Wakil Perusahaan pada Perusahaan Lain PT PPA Board of Directors Decree concerning the Policy of Assigning Company Representatives to Other Companies
10	SK-105-PPA-1024	21 Oktober 2024 October 21, 2024	Surat Keputusan Direksi tentang Kebijakan Pemberian Dana Talangan Remunerasi Direksi dan Dekom BUMN TK Board of Directors Decree concerning the Policy of Providing Advance Funds for Remuneration of BUMN TK Directors and Dekom
11	SK-108/PPA/1024	24 Oktober 2024 October 24, 2024	Surat Keputusan Direksi tentang Perubahan Lampiran 2 Keputusan Direksi Nomor SK-76/PPA/0824 tentang Struktur Organisasi PT PPA Board of Directors Decree concerning Changes to Attachment 2 of Board of Directors Decree No. SK-76/PPA/0824 concerning PT PPA Organizational Structure
12	SK-122/PPA/1124	28 November 2024 November 28, 2024	Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Manajemen Risiko Board of Directors Decree concerning Risk Management Policy
13	SK-140/PPA/1124	26 November 2024 November 26, 2024	Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Pembentukan Ketentuan Kegiatan Perusahaan Board of Directors Decree concerning the Policy for Establishing Company Activity Provisions
14	SK-136/PPA/1124	28 November 2024 November 28, 2024	Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (whistle blowing system) Board of Directors Decree concerning the Policy for the Whistleblowing System
15	SK-141/PPA/1224	23 Desember 2024 December 23, 2024	Surat Keputusan Direksi Tentang Kebijakan Penagihan Board of Directors Decree concerning the Collection Policy

KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Direksi membentuk Komite Investasi dan Manajemen Risiko (KIMR) dalam rangka memberikan saran dan rekomendasi kepada Direksi dalam rangka pengambilan keputusan investasi, termasuk pertimbangan terkait pengelolaan risiko dalam keputusan investasi yang diambil oleh Direksi. KIMR ini dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-50/PPA/0819 tanggal 27 Agustus 2019 yang sudah dilakukan perbaharuan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-94/PPA/1022 tanggal 31 Oktober 2022.

Keanggotaan Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Keanggotaan KIMR serta dasar pengangkatan anggotanya ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. SK-94/PPA/1022 tanggal 31 Oktober 2022 untuk KIMR A dan KIMR B (untuk usulan investasi Anak Usaha), sebagai berikut:

Keanggotaan KIMR A

IRMC A Members

Ketua Chair	:	Kepala Divisi Manajemen Risiko Investasi Head of Investment Risk Management Division
Anggota Members	:	Kepala Divisi Hukum; Kepala Divisi Tresuri dan Strategi Perusahaan; Kepala Divisi Pengusul Head of Legal Division; Head of Treasury and Corporate Strategy Division; Head of Proposing Division

Keanggotaan KIMR B

IRMC B Members

Ketua Chair	:	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management
Anggota Members	:	Direktur/Senior Executive Vice President Pembina; Kepala Divisi Manajemen Risiko Investasi; Kepala Divisi Hukum; Kepala Divisi Tresuri dan Strategi Perusahaan; Direktur dan/atau Kepala Divisi Pengusul di Anak Usaha Director/Senior Executive Vice President of Trustees; Head of Investment Risk Management Division; Head of Legal Division; Head of Treasury and Corporate Strategy Division; Director and/or Head of Proposing Division in Subsidiaries

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Investasi dan Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Melakukan evaluasi dan memberikan saran/rekomendasi kepada Direksi Perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan Investasi atas:

1. Usulan dan pemantauan kegiatan investasi SSF, pinjaman/ dana talangan kepada BUMN Titip Kelola, pengambilalihan & pengelolaan NPL, *investasi treasury* (selain penempatan dana pada bank dan pembelian obligasi/surat utang negara), investasi baru/tambahan pada Anak Perusahaan.
2. Usulan kegiatan Investasi SSF, pinjaman/dana talangan kepada BUMN Titip Kelola, pengambilalihan & pengelolaan NPL yang diajukan oleh Divisi pengusul, termasuk terhadap potensi deviasi dari kebijakan (apabila ada/dianggap perlu dilakukan).
3. Usulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset investasi yang diajukan oleh Direktorat/Divisi Pengelola NPL sehingga Persetujuan atas hapus buku dan/atau hapus tagih dilakukan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan.

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

Investment and Risk Management Committee

The Board of Directors established the Investment and Risk Management Committee (IRMC) to provide advice and recommendations to the Board of Directors when making investment decisions, including considerations related to risk management for investment decisions taken by the Board of Directors. The IRMC was established based on the Board of Directors Decree No. SK-50/PPA/0819 dated August 27, 2019, which has been updated by the Board of Directors Decree No. SK-94/PPA/1022 dated October 31, 2022.

Membership of the Investment and Risk Management Committee

The IRMC membership and basis for appointment of its members are stipulated in the Board of Directors Decree No. SK-94/PPA/1022 dated October 31, 2022 for IRMC A and IRMC B (for the proposed investment of Subsidiaries), as follows:

Duties and Responsibilities

The Investment and Risk Management Committee has the following duties and responsibilities:

Conducting evaluations and providing suggestions/recommendations to the Company's Board of Directors in order to make investment decisions on:

1. Proposals and monitoring of SSF investment activities, loans/ bridging funds to BUMN Under Management, takeover & management of NPL, treasury investment (other than placement of funds in banks and purchase of bonds/government bonds), new/additional investment in Subsidiaries.
2. Proposals for SSF Investment activities, loans/bridging funds to BUMN Under Management, takeover & management of NPL submitted by the proposing Division, including potential deviations from the policy (if any/deemed necessary).
3. Proposals for write-off and/or write-downs of investment assets submitted by the Directorate/NPL Management Division so that Approval for write-off and/or write-downs is carried out based on the Company's Articles of Association.

Pelaksanaan Tugas Komite Investasi dan Manajemen Risiko Tahun 2024

Pada tahun 2024, Komite Investasi dan Manajemen Risiko telah melakukan tugas sebagai berikut:

1. Komite Investasi dan Manajemen Risiko telah melakukan rapat untuk membahas rencana investasi dan hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan investasi.
2. Komite Investasi dan Manajemen Risiko telah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi (melalui Memo Evaluasi Risiko) atas memo usulan kegiatan baik usulan investasi maupun usulan atas kegiatan penanganan investasi.

Evaluasi Kinerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko

Evaluasi kinerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko dilihat dari pelaksanaan *review* dan rekomendasi (Memo Evaluasi Risiko) yang diberikan atas memo usulan kegiatan.

Penilaian Kinerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko

1. Prosedur penilaian atas realisasi kinerja KIMR dilakukan oleh Direksi dengan mengacu pada realisasi dan penyelesaian program kerja, saran, rekomendasi dan masukan yang diberikan oleh Komite Investasi dan Manajemen Risiko serta tingkat kehadiran rapat.
2. Tingkat kehadiran rapat Komite Investasi dan Manajemen Risiko pada tahun 2024 adalah 100% dari 62 kali rapat.
3. Direksi menilai bahwa kinerja Komite Investasi dan Manajemen Risiko sudah sesuai ekspektasi.

KOMITE KREDIT

Direksi membentuk Komite Kredit dalam rangka mendukung kegiatan usaha Perusahaan dan Anak Perusahaan di bidang investasi termasuk pengelolaan BUMN Titip Kelola, dan pengambilalihan dan pengelolaan *Non Performing Loan*.

Komite Kredit dibentuk melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SK-95/PPA/1022 tanggal 31 Oktober 2022 tentang Komite Kredit yang sudah dilakukan pembaharuan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK-55/PPA/0624 tanggal 7 Juni 2024.

Keanggotaan Komite Kredit

Komite Kredit A Credit Committee A

Ketua Chair	:	Direktur Utama President Director
Anggota Members	:	Seluruh Direktur lainnya All other Directors

Komite Kredit B Credit Committee B

Ketua Chair	:	Direktur Utama; atau Direktur yang membidangi manajemen risiko investasi President Director; or Director in charge of investment risk management
Anggota Members	:	• Direktur yang membidangi manajemen risiko investasi (jika Direktur Utama hadir sebagai Ketua); dan • Direktur Pengusul • Director in charge of investment risk management (if the President Director is present as Chair); and • Proposing Director

Implementation Of The Investment And Risk Management Committee Duties In 2024

In 2024, the Investment and Risk Management Committee carried out the following duties:

1. Held meetings to discuss the investment plans and matters related to the investment implementation.
2. Evaluated and provided recommendations (via Risk Evaluation Memo) on proposed activities memos, for investment proposals and proposals for investment handling activities.

Evaluation of the Investment and Risk Management Committee Performance

The Investment and Risk Management Committee performance Evaluation is reflected in the reviews and recommendations (Risk Evaluation Memos) provided for activity proposal memos.

Investment and Risk Management Committee Performance Assessment

1. The IMRC performance assessment procedure is carried out by the Board of Directors by referring to the realized and completed work programs, suggestions, recommendations and input provided by the Investment and Risk Management Committee and the level of meeting attendance.
2. The attendance level at the 62 Investment and Risk Management Committee meetings in 2024 was 100%.
3. The Board of Directors assessed the Investment and Risk Management Committee performance was in line with expectations.

CREDIT COMMITTEE

The Board of Directors established a Credit Committee to support the business activities of the Company and its Subsidiaries in the investment sector including the SEOs Under Management, and the takeover and management of Non-Performing Loans.

The Credit Committee was established through the Board of Directors Decree No. SK-95/PPA/1022 dated October 31, 2022 concerning the Credit Committee, which was renewed based through Board of Directors Decree No. SK-55/PPA/0624 dated June 7, 2024.

Credit Committee Membership

Tugas dan Tanggung Jawab

Komite Kredit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memberikan keputusan atas usulan kegiatan:
 - a. Investasi SSF;
 - b. Pinjaman/dana talangan kepada BUMN Titip Kelola dan/atau Anak Perusahaan;
 - c. Pengambilalihan & pengelolaan NPL;
 - d. Investasi *treasury* (selain penempatan dana pada bank dan pembelian obligasi/surat utang negara); dan/atau
 - e. Investasi dari Anak Perusahaan dalam hal diperlukan persetujuan Pemegang Saham Anak Perusahaan.
2. Memberikan keputusan atas pengusulan hapus buku dan/atau hapus tagih atas aset investasi yang diajukan oleh Direktorat/Divisi pengusul. Persetujuan atas hapus buku dan/atau hapus tagih dilakukan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan

Evaluasi Kinerja Komite Kredit

Evaluasi kinerja Komite Kredit dilihat dari pelaksanaan *review* dan rekomendasi yang diberikan atas memo usulan kegiatan.

Penilaian Kinerja Komite Kredit

1. Prosedur penilaian kinerja Komite Kredit Prosedur penilaian atas realisasi kinerja Komite Kredit dilakukan oleh Direksi dengan mengacu pada realisasi dan penyelesaian program kerja, saran, rekomendasi dan masukan yang diberikan oleh Komite Kredit serta tingkat kehadiran rapat.
2. Tingkat kehadiran rapat Komite Kredit pada tahun 2024 adalah 100% dari 30 kali rapat
3. Direksi menilai bahwa kinerja Komite Kredit sudah sesuai ekspektasi.

Duties and Responsibilities

The Credit Committee has the following duties and responsibilities:

1. Making decisions on proposed activities:
 - a. SSF Investment;
 - b. Loans/bridging funds to SOEs Under Management and/or Subsidiaries;
 - c. Takeover & management of NPL;
 - d. Treasury investments (other than placement of funds in banks and purchase of bonds/government debt securities); and/or
 - e. Investments from Subsidiaries in cases where approval from Subsidiary Shareholders is required.
2. Providing decisions on proposals for write-offs and/or write-downs for investment assets submitted by the proposing Directorate/Division. Approval of write-offs and/or write-downs is carried out based on the Company's Articles of Association

Credit Committee Performance Evaluation

Credit Committee performance evaluation is reflected in the reviews and recommendations given on the activity proposal memos.

Credit Committee Performance Assessment

1. Credit Committee performance assessment procedure The assessment procedure for the Credit Committee's performance is carried out by the Board of Directors by referring to the realized and completed work program, suggestions, recommendations and input provided by the Credit Committee, and the meeting attendance level.
2. The Credit Committee attendance level at 30 meetings in 2024 was 100%.
3. The Board of Directors assessed the Credit Committee performance was in line with expectations.

Transparansi Informasi Dewan Komisaris dan Direksi

Information Transparency of The Board of Commissioners and Board of Directors

RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Rapat Dewan Komisaris

Kebijakan

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, Dewan Komisaris melaksanakan rapat secara rutin, baik dalam bentuk rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi. Rapat Dewan Komisaris diadakan setidaknya 1 (satu) kali setiap bulan.

Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan secara tertulis oleh Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris lain yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. Pemberitahuan rapat tersebut disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat dilaksanakan atau dalam waktu yang lebih singkat jika situasi mendesak. Perhitungan waktu tidak mencakup tanggal panggilan dan tanggal pelaksanaan rapat.

Komisaris Utama bertindak sebagai pimpinan dalam rapat Dewan Komisaris. Apabila Komisaris Utama berhalangan hadir, rapat akan dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama. Setiap anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya melalui surat kuasa tertulis. Namun, seorang anggota Dewan Komisaris hanya boleh mewakili satu anggota lainnya.

Dalam setiap rapat Dewan Komisaris, wajib dibuat risalah rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir. Risalah rapat asli diserahkan kepada Direksi untuk disimpan dan didokumentasikan, sedangkan salinannya disimpan oleh Dewan Komisaris. Anggota Dewan Komisaris yang tidak hadir diwajibkan menandatangani surat kuasa guna memenuhi prinsip GCG, memastikan keabsahan pengambilan keputusan dalam rapat tersebut.

Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat. Rincian agenda, risalah rapat, tingkat kehadiran anggota, dan rekapitulasi kehadiran tercatat sebagai berikut:

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

Board of Commissioners Meetings

Policy

Based on the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners holds regular meetings, both internal meetings and joint meetings with the Board of Directors. Board of Commissioners meetings are held at least once a month.

Invitations for the Board of Commissioners meetings are delivered in writing by the President Commissioner or by another member of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner. The invitations the meetings are delivered no later than 3 (three) days before the meeting is held or within a shorter time if it is urgent, without taking into account the date of the summons and the date of the meeting.

The President Commissioner acts as the Head of the Board of Commissioners meeting. If the President Commissioner is unable to attend, the meeting will be led by one of the members of the Board of Commissioners appointed by the President Commissioner. A member of the Board of Commissioners may be represented at a meeting only by another member of the Board of Commissioners based on written authorization. A member of the Board of Commissioners can only represent one other member of the Board of Commissioners.

At each meeting of the Board of Commissioners, minutes of the meeting must be made and signed by the head of the meeting and all members of the Board of Commissioners present. The original minutes of the meetings are submitted to the Board of Directors to be kept and documented, while the copies are kept by the Board of Commissioners. Members of the Board of Commissioners who are not present are required to sign a power of attorney in order to fulfill the principles of GCG, and to ensure the validity of decision-making in each meeting.

Board of Commissioners Meetings

In 2024, the Board of Commissioners held 12 (twelve) meetings. The following shows the meeting agenda and minutes, attendance, as well as a recapitulation of the Board of Commissioners attendance level at the meetings.

No	Tanggal Date	Tempat Place	No. Risalah Rapat Minutes of Meetings Number	Agenda Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidak Hadiran Reason for Absence
1	19 Januari 2024 January 19, 2024	Video Conference dengan Aplikasi Zoom Video Conference with Zoom Application	RIS.INT-01/ PPA/ KOM/0124	1. Membahas Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya; 2. Membahas Kinerja Laporan Keuangan s/d Bulan Desember 2023 (<i>unaudited</i>) PT Perusahaan Pengelola Aset; 3. Membahas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT PPA Tahun 2024; 4. Lain-lain. 1. Discussion on the Follow-up to the Previous Month's Meeting; 2. Discussion on the Financial Report Performance until December 2023 (<i>unaudited</i>) of PT Perusahaan Pengelola Aset; 3. Discussion on the Company's Work Plan and Budget (RKAP) of PT PPA for 2024; 4. Other Matters.	Marwanto Harjowiryo Organ Dekom	--
2	26 Februari 2024 February 26, 2024	Video Conference dengan Aplikasi Zoom Video Conference with Zoom Application	RIS.INT-02/PPA/ KOM/0224	1. Membahas Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya; 2. Membahas Kinerja Keuangan PT PPA Bulan Januari 2024; 3. Membahas Progres Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan PT PPA Tahun Buku 2023; 4. Lain-lain. 1. Discussion on the Follow-up to the Previous Month's Meeting; 2. Discussion on PT PPA's Financial Performance in January 2024; 3. Discussion on the Progress of the Implementation of the Audit of PT PPA's Financial Report for the 2023 Fiscal Year; 4. Other Matters.	Marwanto Harjowiryo Organ Dekom	--
3	27 Maret 2024 March 27, 2024	Video Conference dengan Aplikasi Zoom Video Conference with Zoom Application	RIS.INT-03/PPA/ KOM/0324	1. Membahas Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya; 2. Membahas Kinerja Laporan Keuangan PT PPA s/d Bulan Februari 2024; 3. Lain-lain. 1. Discussion on the Follow-up to the Previous Month's Meeting; 2. Discussion on the Performance of PT PPA's Financial Report until February 2024; 3. Other Matters.	Marwanto Harjowiryo Organ Dekom	--
4	26 April 2024 April 26, 2024	Video Conference dengan Aplikasi Zoom Video Conference with Zoom Application	RIS.INT-04/PPA/ KOM/0424	1. Membahas Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya; 2. Membahas Kinerja Laporan Keuangan PT PPA s/d Bulan Maret 2024 (Triwulan I Tahun 2024); 3. Lain-lain 1. Discussion on the Follow-up to the Previous Month's Meeting; 2. Discussion on the Performance of PT PPA's Financial Report until March 2024 (Quarter I of 2024); 3. Other Matters	Marwanto Harjowiryo Organ Dekom	--

No	Tanggal Date	Tempat Place	No. Risalah Rapat Minutes of Meetings Number	Agenda Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidak Hadiran Reason for Absence
5	27 Mei 2024 May 27, 2024	Video Conference dengan Aplikasi Zoom Video Conference with Zoom Application	RIS.INT- 05/PPA/ KOM/0524	1. Membahas Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya; 2. Membahas Kinerja Laporan Keuangan PT PPA s/d Bulan April 2024; 3. Pembahasan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2024 – 2029 PT Perusahaan Pengelola Aset; 4. Lain-lain. 1. Discussion on the Follow-up to the Previous Month's Meeting; 2. Discussion on the Financial Report Performance of PT PPA until April 2024; 3. Discussion on the Company's Long-Term Plan (RJPP) for 2024 - 2029 of PT Perusahaan Pengelola Aset; 4. Other Matters.	Marwanto Harjowiryo Organ Dekom	--
6	23 Juni 2024 June 23, 2024	Video Conference dengan Aplikasi Zoom Video Conference with Zoom Application	RIS.INT- 06/PPA/ KOM/0624	1. Membahas Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya; 2. Membahas Kinerja Laporan Keuangan PT PPA s/d Bulan Mei 2024; 3. Pembahasan Persiapan RUPS Pengesahan Laporan Keuangan PT PPA TB 2023; 4. Lain-lain. 1. Discussion on the Follow-up to the Previous Month's Meeting; 2. Discussion on the Performance of PT PPA's Financial Report until May 2024; 3. Discussion on Preparation for the GMS for Ratification of PT PPA TB's Financial Report 2023; 4. Other Matters.	Marwanto Harjowiryo Organ Dekom	--
7	29 Juli 2024 July 29, 2024	Video Conference dengan Aplikasi Zoom Video Conference with Zoom Application	RIS.INT- 07/PPA/ KOM/0724	1. Membahas Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya; 2. Membahas Kinerja Laporan Keuangan PT PPA s/d Bulan Juni 2024; 3. Lain-lain. 1. Discussion on the Follow-up to the Previous Month's Meeting; 2. Discussion on the Performance of PT PPA's Financial Report until June 2024; 3. Other Matters.	Marwanto Harjowiryo Organ Dekom	--
8	26 Agustus 2024 August 26, 2024	Video Conference dengan Aplikasi Zoom Video Conference with Zoom Application	RIS.INT- 08/PPA/ KOM/0824	1. Membahas Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya; 2. Membahas Kinerja Laporan Keuangan PT PPA s/d Bulan Juli 2024; 3. Lain-lain 1. Discussion on the Follow-up to the Previous Month's Meeting; 2. Discussion on the Performance of PT PPA's Financial Report until July 2024; 3. Other Matters.	Marwanto Harjowiryo Organ Dekom	--

No	Tanggal Date	Tempat Place	No. Risalah Rapat Minutes of Meetings Number	Agenda Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidak Hadiran Reason for Absence
9	23 September 2024 September 23, 2024	Ruang Rapat Kerinci Menara Danareksa Lantai 17 Jalan Medan Merdeka Selatan No.14 Jakarta Pusat Kerinci Meeting Room Danareksa Tower 17th Floor 14 Jalan Medan Merdeka Selatan, Central Jakarta	RIS.INT- 09/PPA/ KOM/0924	1. Membahas Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya; 2. Membahas Kinerja Laporan Keuangan PT PPA s/d Bulan Agustus 2024; 3. Lain-lain 1. Discussion on the Follow-up to the Previous Month's Meeting; 2. Discussion on the Performance of PT PPA's Financial Report until August 2024; 3. Other Matters.	Marwanto Harjowiryono Organ Dekom	--
10	26 Oktober 2024 October 26, 2024	Video Conference dengan Aplikasi Zoom Video Conference with Zoom Application	RIS.INT-10/ PPA/ KOM/1024	1. Membahas Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya; 2. Membahas Kinerja Keuangan PT PPA s/d Bulan September 2024 (Triwulan III Tahun 2023); 3. Membahas surat Menteri BUMN Nomor: S-523/MBU/10/2024 tanggal 19 Oktober 2024 perihal Teguran atas Evaluasi Pelaksanaan Audit Tahun Buku 2023; 4. Membahas <i>Corporate Issues</i>; 5. Lain-lain 1. Discussion on the Follow-up to the Previous Month's Meeting; 2. Discussion on PT PPA's Financial Performance until September 2024 (Third Quarter of 2023); 3. Discussion on the letter of the Minister of SOEs Number: S-523/MBU/10/2024 dated October 19, 2024 concerning the Reprimand for the Evaluation of the Audit for the 2023 Fiscal Year; 4. Discussion on Corporate Issues; 5. Other Matters	Marwanto Harjowiryono Organ Dekom	--
11	25 November 2024 November 25, 2024	Video Conference dengan Aplikasi Zoom Video Conference with Zoom Application	RIS.INT- 11/PPA/ KOM/1124	1. Membahas Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya; 2. Membahas Kinerja Laporan Keuangan PT PPA s/d Bulan Oktober 2024; 3. Lain-lain. 1. Discussion on the Follow-up to the Previous Month's Meeting; 2. Discussion on the Performance of PT PPA's Financial Report until October 2024; 3. Other Matters.	Marwanto Harjowiryono Organ Dekom	--
12	13 Desember 2024 December 13, 2024	Video Conference dengan Aplikasi Zoom Video Conference with Zoom Application	RIS.INT- 12/PPA/ KOM/1224	1. Membahas Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya; 2. Membahas Kinerja Laporan Keuangan PT PPA s/d Bulan November 2024; 3. Lain-lain. 1. Discussion on the Follow-up to the Previous Month's Meeting; 2. Discussion on the Performance of PT PPA's Financial Report until November 2024; 3. Other Matters.	Marwanto Harjowiryono Organ Dekom	--

Rekapitulasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris dapat dilihat pada rincian berikut ini:

A recapitulation of the Board of Commissioners members attendance at the Board of Commissioners Meeting are shown below:

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioners Meetings Frequency and Board of Commissioners Attendance Level

Nama Name	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number Attended	% Kehadiran & Attended
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Marwanto Harjowiryo	12	12	100%
Rata-rata Average			100%

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Selain rapat internal yang diadakan oleh Dewan Komisaris maupun Direksi, keduanya juga menggelar rapat gabungan sesuai kebutuhan. Rapat ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dalam membahas laporan kinerja Perseroan, isu-isu penting dan strategis, serta berbagai permasalahan yang dihadapi Perseroan.

Sepanjang tahun 2024, Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat. Rincian agenda, risalah rapat, tingkat kehadiran anggota, dan rekapitulasi kehadiran tercatat sebagai berikut:

JOINT MEETINGS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS.

In addition to internal meetings, the Board of Commissioners and the Board of Directors also hold joint meetings as needed to discuss the Company's performance reports, important and strategic issues, and problems faced by the Company.

In 2024, the Board of Commissioners and Board of Directors held 12 (twelve) Joint Meeting meetings. Details of the agenda, minutes of meetings, attendance level of members, and attendance recapitulation are shown as follows:

No	Tanggal Date	Tempat Place	No. Risalah Rapat Minutes of Meetings Number	Agenda Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidak Hadiran Reason for Absence
1	24 Januari 2024 January 24, 2024	Ruang Rapat New York, Lt. 7 Menara Mandiri II Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta Selatan New York Meeting Room, 7th Floor Mandiri Tower II Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, South Jakarta	RIS-01/PPA/KOM/0124	- Membahas Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya; - Membahas Kinerja Keuangan PT PPA s/d bulan 31 Desember 2023 (<i>unaudited</i>); - Membahas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT PPA Tahun 2024; - Agenda Penting Lainnya - Discussion on the Follow-up to the Previous Month's Meeting; - Discussion on PT PPA's Financial Performance until December 31, 2023 (<i>unaudited</i>); - Discussion on PT PPA's 2024 Work Plan and Budget (RKAP); - Other Important Matters	- Marwanto Harjowiryo - Muhammad Teguh Wirahadikusumah - Ridha Farid Lesmana - Tree Asih Putra Sianturi	--

No	Tanggal Date	Tempat Place	No. Risalah Rapat Minutes of Meetings Number	Agenda Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidak Hadiran Reason for Absence
2	26 Februari 2024 February 26, 2024	Ruang Rapat London, Lt. 9 Menara Mandiri II Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta Selatan London Meeting Room, 9th Floor Mandiri Tower II Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, South Jakarta	RIS-02/PPA/ KOM/0224	1. Pembahasan Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya; 2. Pembahasan Kinerja PT PPA bulan Januari 2024; 3. Pembahasan <i>Asset Liability Management</i> (ALM) per 31 Januari 2023; 4. Pembahasan Progress Pelaksanaan Audit Lapoaran Keuangan PT PPA Tahun Buku 2023; 5. Agenda Penting Lainnya 1. Discussion on Follow-up to the Previous Month's Meeting; 2. Discussion on PT PPA's Performance in January 2024; 3. Discussion on Asset Liability Management (ALM) as of January 31, 2023; 4. Discussion on the Progress of the the Audit of PT PPA's Financial Report for the 2023 Fiscal Year; 5. Other Important Matters	Marwanto Harjowiryo Muhammad Teguh Wirahadikusumah Ridha Farid Lesmana Tree Asih Putra Sianturi	--
3	28 Maret 2024 March 28, 2024	Ruang Rapat London, Lt. 9 Menara Mandiri II Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta Selatan London Meeting Room, 9th Floor Mandiri Tower II Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, South Jakarta	RIS-03/PPA/ KOM/0324	1. Pembahasan Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya; 2. Pembahasan Kinerja PT PPA s/d bulan Februari 2024; 3. Pembahasan <i>Asset Liability Management</i> (ALM) per 28 Februari 2023; 4. Pembahasan Progress Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan PT PPA Tahun Buku 2023; 5. Agenda Penting Lainnya. 1. Discussion on Follow-up to the Previous Month's Meeting; 2. Discussion on PT PPA's Performance until February 2024; 3. Discussion on Asset Liability Management (ALM) as of February 28, 2023; 4. Discussion on the Progress of the Audit of PT PPA's Financial Report for the 2023 Fiscal Year; 5. Other Important Matters.	Marwanto Harjowiryo Muhammad Teguh Wirahadikusumah Ridha Farid Lesmana Tree Asih Putra Sianturi	--

No	Tanggal Date	Tempat Place	No. Risalah Rapat Minutes of Meetings Number	Agenda Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidak Hadiran Reason for Absence
4	29 April 2024 April 29, 2024	Ruang Rapat London, Lt. 9 Menara Mandiri II Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta Selatan London Meeting Room, 9th Floor Mandiri Tower II Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, South Jakarta	RIS-04/PPA/ KOM/0424	- Pembahasan Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya; - Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan PT PPA s/d bulan Maret 2024 (Triwulan I 2024); - Pembahasan <i>Asset Liability Management</i> (ALM) per 31 Maret 2024; - Pembahasan Progress Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan PT PPA Tahun Buku 2023; - Agenda Penting Lainnya. - Discussion on the Follow-up to the Previous Month's Meeting; - Discussion on PT PPA's Operational and Financial Performance until March 2024 (Quarter I 2024); - Discussion on Asset Liability Management (ALM) as of March 31, 2024; - Discussion on the Progress of the Audit of PT PPA's Financial Report for the 2023 Fiscal Year; - Other Important Matters.	Marwanto Harjowiryono Muhammad Teguh Wirahadikusumah Ridha Farid Lesmana Tree Asih Putra Sianturi	--
5	29 Mei 2024 May 29, 2024	Video Conference dengan Aplikasi Zoom Video Conference with Zoom Application	RIS-05/PPA/ KOM/0524	- Pembahasan Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya; - Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan PT PPA s/d bulan April 2024; - Pembahasan <i>Asset Liability Management</i> (ALM) per 30 April 2024; - Pembahasan Progress Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan PT PPA Tahun Buku 2023; - Pembahasan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2024-2029 PT Perusahaan Pengelola Aset; - Agenda Penting Lainnya. - Discussion on the Follow-up to the Previous Month's Meeting; - Discussion on PT PPA's Operational and Financial Performance until April 2024; - Discussion on Asset Liability Management (ALM) as of April 30, 2024; - Discussion on the Progress of the Audit of PT PPA's Financial Report for the 2023 Fiscal Year; - Discussion on the Company's Long-Term Plan (RJPP) for 2024-2029 of PT Perusahaan Pengelola Aset; - Other Important Matters.	Marwanto Harjowiryono Muhammad Teguh Wirahadikusumah Ridha Farid Lesmana Tree Asih Putra Sianturi	--

No	Tanggal Date	Tempat Place	No. Risalah Rapat Minutes of Meetings Number	Agenda Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidak Hadiran Reason for Absence
6	25 Juni 2024 June 25, 2024	Video Conference dengan Aplikasi Zoom Video Conference with Zoom Application	RIS-06/PPA/ KOM/0624	Pembahasan Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya; Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan PT PPA s/d bulan Mei 2024; Pembahasan <i>Asset Liability Management</i> (ALM) per 31 Mei 2024; Pembahasan Persiapan RUPS Pengesahan Laporan Keuangan PT PPA Tahun Buku 2023; Agenda Penting Lainnya. a. Discussion on the Follow-up to the Previous Month's Meeting; b. Discussion on PT PPA's Operational and Financial Performance until May 2024; c. Discussion on Asset Liability Management (ALM) as of May 31, 2024; d. Discussion on the Preparation for the GMS for Ratification of PT PPA's Financial Report for the 2023 Fiscal Year; e. Other Important Matters.	Marwanto Harjowiryo Muhammad Teguh Wirahadikusumah Ridha Farid Lesmana Tree Asih Putra Sianturi	--
7	30 Juli 2024 July 30, 2024	Menara Danareksa Lantai 17 Jalan Medan Merdeka Selatan No.14 Jakarta 10110 Danareksa Tower 17th Floor Jalan Medan Merdeka Selatan No.14 Jakarta 10110	RIS-07/PPA/ KOM/0724	1. Pembahasan Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya; 2. Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan PT PPA s/d bulan Juni 2024 (Triwulan II Tahun 2024; 3. Pembahasan <i>Asset Liability Management</i> (ALM) per 30 Juni 2024; 4. <i>Update</i> Pelaksanaan Uji Tuntas Penerbitan dan Penggunaan Surat Utang Tahun 2022 dan Project Eiffel; 5. Agenda Penting Lainnya. 1. Discussion on the Follow-up to the Previous Month's Meeting; 2. Discussion on PT PPA's Operational and Financial Performance until June 2024 (Quarter II of 2024; 3. Discussion on Asset Liability Management (ALM) as of June 30, 2024; 4. Update on the Due Diligence on the Issuance and Use of Debt Securities in 2022 and the Eiffel Project; 5. Other Important Matters.	Marwanto Harjowiryo Muhammad Teguh Wirahadikusumah Ridha Farid Lesmana Tree Asih Putra Sianturi	--

No	Tanggal Date	Tempat Place	No. Risalah Rapat Minutes of Meetings Number	Agenda Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidak Hadiran Reason for Absence
8	27 Agustus 2024 August 27, 2024	Ruang Rapat Rinjani Menara Danareksa Lantai 17 Jalan Medan Merdeka Selatan No.14 Jakarta 10110. Rinjani Meeting Room Danareksa Tower 17th Floor Jalan Medan Merdeka Selatan No.14 Jakarta 10110.	RIS-08/PPA/ KOM/0824	6. Pembahasan Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya; 7. Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan PT PPA s/d bulan Juli 2024; 8. Pembahasan <i>Asset Liability Management (ALM)</i> per 31 Juli 2024; 9. Agenda Penting Lainnya. 1. Discussion on the Follow-up to the Previous Month's Meeting; 2. Discussion on PT PPA's Operational and Financial Performance until July 2024; 3. Discussion on Asset Liability Management (ALM) as of July 31, 2024; 4. Other Important Matters.	Marwanto Harjowiryo Muhammad Teguh Wirahadikusumah Ridha Farid Lesmana Tree Asih Putra Sianturi	--
9	27 September 2024 September 27, 2024	Ruang Rapat Rinjani Menara Danareksa Lantai 17 Jalan Medan Merdeka Selatan No.14 Jakarta 10110 Rinjani Meeting Room Danareksa Tower 17th Floor Jalan Medan Merdeka Selatan No.14 Jakarta 10110.	RIS-09/PPA/ KOM/0924	1. Pembahasan Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya; 2. Pembahasan Kinerja Operasional dan Keuangan PT PPA s/d bulan Agustus 2024 dan Proyeksi s/d 31 Desember 2024; 3. Pembahasan Progres Pelaksanaan Uji Tuntas Penerbitan dan Penggunaan Surat Utang Tahun 2022 dan Project Eiffel; 4. Agenda Penting Lainnya. 1. Discussion on the Follow-up to the Previous Month's Meeting; 2. Discussion on PT PPA's Operational and Financial Performance until August 2024 and Projections until December 31, 2024; 3. Discussion on the Progress of the Due Diligence for the Issuance and Use of Debt Securities in 2022 and the Eiffel Project; 4. Other Important Matters.	Marwanto Harjowiryo Muhammad Teguh Wirahadikusumah Ridha Farid Lesmana Tree Asih Putra Sianturi	--

No	Tanggal Date	Tempat Place	No. Risalah Rapat Minutes of Meetings Number	Agenda Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidak Hadiran Reason for Absence
10	28 Oktober 2024 October 28, 2024	Ruang Rapat Rinjani Menara Danareksa Lantai 17 Jalan Medan Merdeka Selatan No.14 Jakarta 10110 Rinjani Meeting Room Danareksa Tower 17th Floor Jalan Medan Merdeka Selatan No.14 Jakarta 10110.	RIS-10/PPA/ KOM/1024	1. Membahas Usulan RKAP Tahun 2025 PT PPA; 2. Membahas Surat Menteri BUMN Nomor: S-523/MBU/10/2024 perihal Teguran atas Evaluasi Pelaksanaan Audit Tahun Buku 2023; 3. Membahas Temuan <i>Risk Maturity Indeks</i> (MRI) Tahun 2024; 4. Membahas Tindak Lanjut Rapat Sebelumnya; 5. Membahas Kinerja PT PPA s/d bulan September 2024 (Triwulan III Tahun 2023, dan Proyeksi s/d 31 Desember 2024); 6. Membahas <i>Asset Liability Management</i> (ALM) per 30 September 2024; 7. Membahas <i>Corporate Issues</i> 1. Discussion on the Proposal for the 2025 RKAP of PT PPA; 2. Discussion on the Letter of the Minister of SOEs Number: S-523/MBU/10/2024 concerning the Reprimand for the Evaluation of the 2023 Financial Year Audit; 3. Discussion on the Findings of the Risk Maturity Index (MRI) in 2024; 4. Discussion on the Follow-up to the Previous Meeting; 5. Discussion on the Performance of PT PPA until September 2024 (Third Quarter of 2023, and Projections until December 31, 2024); 6. Discussion on Asset Liability Management (ALM) as of September 30, 2024; 7. Discussion on Corporate Issues	Marwanto Harjowiryo Muhammad Teguh Wirahadikusumah Ridha Farid Lesmana Tree Asih Putra Sianturi	--
11	26 November 2024 November 26, 2024	Ruang Rapat Rinjani Menara Danareksa Lantai 17 Jalan Medan Merdeka Selatan No.14 Jakarta 10110 Rinjani Meeting Room Danareksa Tower 17th Floor Jalan Medan Merdeka Selatan No.14 Jakarta 10110.	RIS-11/PPA/ KOM/1124	1. Pembahasan Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya; 2. Membahas Kinerja PT PPA s/d bulan Oktober 2024 dan Prognosa s/d Desember 2024; 3. Membahas <i>Asset Liability Management</i> (ALM) per 31 Oktober 2024; 4. Agenda Penting Lainnya 1. Discussion on the Follow-up to the Previous Month's Meeting; 2. Discussion on PT PPA's Performance until October 2024 and Prognosis until December 2024; 3. Discussion on Asset Liability Management (ALM) as of October 31, 2024; 4. Other Important Matters	Marwanto Harjowiryo Muhammad Teguh Wirahadikusumah Ridha Farid Lesmana Tree Asih Putra Sianturi	--

No	Tanggal Date	Tempat Place	No. Risalah Rapat Minutes of Meetings Number	Agenda Agenda	Peserta Participants	Alasan Ketidak Hadiran Reason for Absence
12	13 Desember 2024 December 13, 2024	Ruang Rapat Rinjani Menara Danareksa Lantai 17 Jalan Medan Merdeka Selatan No.14 Jakarta 10110 Rinjani Meeting Room Danareksa Tower 17th Floor Jalan Medan Merdeka Selatan No.14 Jakarta 10110.	RIS-12/PPA/ KOM/1224	1. Pembahasan Tindak Lanjut Rapat Bulan Sebelumnya; 2. Membahas Kinerja PT PPA s/d November dan Prognosa s/d Desember 2024; 3. Membahas <i>Asset Liability Management</i> (ALM) per 30 November 2024; 4. Membahas Hasil Pelaksanaan Uji Tuntas Penerbitan dan Penggunaan Surat Utang Tahun 2022 dan Project Eiffel; 5. Agenda Penting Lainnya 1. Discussion on the Follow-up to the Previous Month's Meeting; 2. Discussion on PT PPA's Performance until November and Prognosis until December 2024; 3. Discussion on Asset Liability Management (ALM) as of November 30, 2024; 4. Discussion on the Results of the Due Diligence on the Issuance and Use of Debt Securities in 2022 and the Eiffel Project; 5. Other Important Matters	Marwanto Harjowiryo Muhammad Teguh Wirahadikusumah Ridha Farid Lesmana Tree Asih Putra Sianturi	--

Rekapitulasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Gabungan dapat dilihat pada rincian berikut ini:

A recapitulation of the Board of Commissioners members attendance at the Board of Commissioners Meeting are shown below:

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi pada Rapat Gabungan Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meetings Frequency and Attendance Level

Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number Attended	% Kehadiran Attended
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Marwanto Harjowiryo	12	12	100%
Direksi Board of Directors			
Muhamad Teguh Wirahadikusumah	12	12	100%
Ridha Farid Lesmana	12	12	100%
Tree Asih Putra Sianturi	12	12	100%
Rata-rata Average			100%

RAPAT DIREKSI

Kebijakan

Sesuai Keputusan Direksi No.SK-58/PPA/1215 tanggal 10 Desember 2015 tentang Pedoman Kerja Direksi, Rapat Direksi dilaksanakan dengan ketentuan antara lain:

- Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila:
 - Dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi;

BOARD OF DIRECTORS' MEETINGS

Policy

In accordance with Directors' Decree No. SK-58/PPA/1215 dated December 10, 2015 concerning Board of Directors' Work Guidelines, Board of Directors' Meetings are held with the following provisions:

- Board of Directors meetings can be held at any time if:
 - Deemed necessary by one or more members of the Board of Directors;

- b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
2. Rapat Direksi harus diselenggarakan secara berkala, yaitu sekurangnyanya sekali sebulan.

- b. Upon written request from one or more members of the Board of Commissioners; or
- c. Upon written request from 1 (one) or more shareholders who together represent 1/10 (one tenth) or more of the total number of shares with voting rights.

2. Board of Directors meetings must be held periodically, at least once a month.

PELAKSANAAN RAPAT DIREKSI

Sepanjang tahun 2024, Direksi telah melaksanakan 48 kali rapat. Rincian agenda, risalah rapat, tingkat kehadiran anggota, dan rekapitulasi kehadiran tercatat sebagai berikut:

IMPLEMENTATION OF BOARD OF DIRECTORS MEETINGS

In 2024, the Board of Directors held 48 meetings. The agenda, minutes of the meeting, attendance level of members, and attendance recapitulation are as follows:

No	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Meeting Minutes No.	Agenda Rapat Meeting Agenda	Nama Direksi Peserta Rapat Board of Directors Participating in the Meeting
1	3 Januari 2024 January 3, 2024	MOM-1/PPA/BOD/0124	1. Penentuan Kupon Final Penerbitan SBK Berkelanjutan I PT Perusahaan Pengelola Aset Tahap I Tahun 2023 1. Determination of the Final Coupon for the Issuance of Continuous SBK I PT Perusahaan Pengelola Aset Phase I 2023	1. Muhammad Teguh Wirahadikusumah 2. Tree Asih Putra Sianturi 3. Ridha Farid Lesmana
2	15 Januari 2024 January 15, 2024	MOM-2/PPA/BOD/0124	1. Update Pembahasan RKAP dan Proforma Laporan Keuangan PT PPA Tahun 2023 1. Update on Discussion of PT PPA RKAP and Proforma Financial Report for 2023	1. Muhammad Teguh Wirahadikusumah 2. Tree Asih Putra Sianturi 3. Ridha Farid Lesmana
3	23 Januari 2024 January 23, 2024	MOM-3/PPA/BOD/0124	1. Update BUMN Titip Kelola 2. Update Progress BUMN Titip Kelola 1. Update on BUMN Under Management 2. Update on BUMN Under Management Progress	1. Muhammad Teguh Wirahadikusumah 2. Tree Asih Putra Sianturi 3. Ridha Farid Lesmana
4	31 Januari 2024 January 31, 2024	MOM-4/PPA/BOD/0124	- Update Cash Flow PT PPA - Update on PT PPA Cash Flow	1. Muhammad Teguh Wirahadikusumah 2. Tree Asih Putra Sianturi 3. Ridha Farid Lesmana
5	6 Februari 2024 February 6, 2024	MOM-5/PPA/BOD/0124	- Update BUMN Titip Kelola - Update BUMN Under Management	1. Muhammad Teguh Wirahadikusumah 2. Tree Asih Putra Sianturi 3. Ridha Farid Lesmana
6	19 Februari 2024 February 19, 2024	MOM-6/PPA/BOD/0224	- MOM Treasury - MOM Treasury	1. Muhammad Teguh Wirahadikusumah 2. Tree Asih Putra Sianturi 3. Ridha Farid Lesmana

No	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Meeting Minutes No.	Agenda Rapat Meeting Agenda	Nama Direksi Peserta Rapat Board of Directors Participating in the Meeting
7	22 Februari 2024 February 22, 2024	MOM-7/PPA/BOD/0224	- Update Tindak Lanjut BUMN Titip Kelola - Update Kinerja PT PPA - Update Project Investasi - PPA Perpetual Fund - Update on Follow-up of BUMN Under Management - Update on PT PPA Performance - Update on Investment Projects - PPA Perpetual Fund	- Muhammad Teguh Wirahadikusumah - Tree Asih Putra Sianturi - Ridha Farid Lesmana
8	29 Februari 2024 February 29, 2024	MOM-8/PPA/BOD/0224	- Update Anak Perusahaan - Update Kegiatan Sekretariat Perusahaan - Update on Subsidiaries - Update on Corporate Secretariat Activities	- Muhammad Teguh Wirahadikusumah - Tree Asih Putra Sianturi - Ridha Farid Lesmana
9	15 Maret 2024 March 15, 2024	MOM-9/PPA/BOD/0324	- Tidak Melanjutkan Penerbitan Tahap Lanjutan atas Program Penerbitan SBK-B I PT PPA 2023 - Update Cash Flow PT PPA - Update Kegiatan Perusahaan - Update BUMN Titip Kelola - Not Continuing the Issuance of the Advanced Stage of the SBK-B I Issuance Program of PT PPA 2023 - Update on PT PPA Cash Flows - Update on Company Activities - Update on BUMN Under Management	- Muhammad Teguh Wirahadikusumah - Tree Asih Putra Sianturi - Ridha Farid Lesmana
10	22 Maret 2024 March 22, 2024	MOM-10/PPA/ BOD/0324	- Update Kinerja Keuangan PT PPA - Update Progress Audit - Update on PT PPA Financial Performance - Update on Audit Progress	- Muhammad Teguh Wirahadikusumah - Tree Asih Putra Sianturi - Ridha Farid Lesmana
11	22 April 2024 April 22, 2024	MOM-11/PPA/ BOD/0324	MOM Treasury MOM Treasury	- Muhammad Teguh Wirahadikusumah - Tree Asih Putra Sianturi - Ridha Farid Lesmana
12	25-Apr-24 April 25, 2024	MOM-12/PPA/ BOD/0424	- Update Kinerja Keuangan PT PPA - Permohonan Ijin Prinsip Investasi - Update Progress Penyusunan RJPP PT PPA - Update BUMN Titip Kelola - Update Special Asset Management - Update Surat Kementerian BUMN - Update Surat Roya - Update on PT PPA Financial Performance - Application for Investment Principle Permit - Update on PT PPA RJPP Preparation Progress - Update on BUMN Under Management - Update on Special Asset Management - Update on SOE Ministry Letter - Update on Roya Letter	- Muhammad Teguh Wirahadikusumah - Tree Asih Putra Sianturi - Ridha Farid Lesmana
13	7 Mei 2024 May 7, 2024	MOM-13/PPA/ BOD/0524	- Evaluasi Penempatan FC di BUMN TK - Update Penyelesaian Pengalihan ATP PPAF ke PPAK - Pembahasan Management Agreement - Evaluation of FC Placement in BUMN Under Management - Update on the Settlement of Transfer of ATP PPAF to PPAK - Discussion on Management Agreement	- Muhammad Teguh Wirahadikusumah - Tree Asih Putra Sianturi - Ridha Farid Lesmana
14	14 Mei 2024 May 14, 2024	MOM-14/PPA/ BOD/0524	- Update Kinerja Keuangan PT PPA (April 2024) - Pengelolaan Aset Investasi anak usaha - Update Management Agreement - Update on PT PPA Financial Performance (April 2024) - Subsidiary Investment Asset Management - Update on Management Agreement	- Muhammad Teguh Wirahadikusumah - Tree Asih Putra Sianturi - Ridha Farid Lesmana

No	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Meeting Minutes No.	Agenda Rapat Meeting Agenda	Nama Direksi Peserta Rapat Board of Directors Participating in the Meeting
15	28 Mei 2024 May 28, 2024	MOM-15/PPA/ BOD/0524	- Update Pengadaan Konsultan Uji Tuntas - Pembahasan RJPP - Laporan Penanganan BUMN Titip Kelola - Update on Due Diligence Consultant Procurement - Discussion on RJPP - Report on Handling BUMN Under Management	- Muhammad Teguh Wirahadikusumah - Tree Asih Putra Sianturi - Ridha Farid Lesmana
16	5 Juni 2024 June 5, 2024	MOM-16/PPA/ BOD/0624	- Update Bisnis Model Anak Perusahaan PT PPA - Update Cash Flow dan Permohonan Persetujuan Kegiatan Divisi Treasury Terkait Cashflow Management - Update Penanganan Special Asset PT PPA - Update on PT PPA Subsidiary Business Model - Update on Cash Flow and Request for Approval of Treasury Division Activities Related to Cashflow Management - Update on Handling PT PPA Special Assets	- Muhammad Teguh Wirahadikusumah - Tree Asih Putra Sianturi - Ridha Farid Lesmana
17	27 Juni 2024 June 27, 2024	MOM-17/PPA/ BOD/0624	- Update Pengadaan Konsultan - Update Progress BUMN Titip Kelola - Update on Consultant Procurement - Update on BUMN Under Management Progress	- Muhammad Teguh Wirahadikusumah - Tree Asih Putra Sianturi - Ridha Farid Lesmana
18	4 Juli 2024 July 4, 2024	MOM-18/PPA/ BOD/0724	- Update Permohonan Data - Update Rekomendasi Audit - Update Progress Penanganan BUMN Titip Kelola - Update Non Performing Loan - Update on Data Request - Update on Audit Recommendation - Update on BUMN Under Management Progress - Update on Non Performing Loan	- Muhammad Teguh Wirahadikusumah - Tree Asih Putra Sianturi - Ridha Farid Lesmana
19	11 Juli 2024 July 11, 2024	MOM-19/PPA/ BOD/0724	- Update Kinerja PT PPA - Update Cash Flow PT PPA - Update on PT PPA Performance - Update on PT PPA Cash Flow	- Muhammad Teguh Wirahadikusumah - Tree Asih Putra Sianturi - Ridha Farid Lesmana
20	25 Juli 2024 July 25, 2024	MOM-20/PPA/ BOD/0724	- Update Kebutuhan Pembiayaan - Update Project PT PPA - Update Penunjukan KAP - Update Akun Special Asset PT PPA - Update on Financing Needs - Update on PT PPA Projects - Update on KAP Appointment - Update on PT PPA Special Asset Account	- Muhammad Teguh Wirahadikusumah - Tree Asih Putra Sianturi - Ridha Farid Lesmana
21	30 Juli 2024 July 30, 2024	MOM-21/PPA/ BOD/0724	- Update Anak Perusahaan PT PPA - Update on PT PPA Subsidiaries	- Muhammad Teguh Wirahadikusumah - Tree Asih Putra Sianturi - Ridha Farid Lesmana
22	1 Agustus 2024 August 1, 2024	MOM-22/PPA/ BOD/0824	- Update Kebijakan Perpetual Fund - Permohonan Persetujuan KPI Direktorat - Update Divisi Legal PT PPA - Update Restrukturisasi BUMN Titip Kelola - Update Anak Perusahaan PT PPA - Update on Perpetual Fund Policy - Directorate KPI Approval Request - Update on PT PPA Legal Division - Update on Restructuring BUMN Under Management - Update on PT PPA Subsidiaries	- Muhammad Teguh Wirahadikusumah - Tree Asih Putra Sianturi - Ridha Farid Lesmana

No	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Meeting Minutes No.	Agenda Rapat Meeting Agenda	Nama Direksi Peserta Rapat Board of Directors Participating in the Meeting
23	8 Agustus 2024 August 8, 2024	MOM-23/PPA/ BOD/0824	- Update Advisory PT PPA - Update Advisory PT PPA - Update on PT PPA Advisory - Update on PT PPA Advisory	- Muhammad Teguh Wirahadikusumah - Tree Asih Putra Sianturi - Ridha Farid Lesmana
24	23 Agustus 2024 August 23, 2024	MOM-24/PPA/ BOD/0824	- Update Penanganan BUMN Titip Kelola - Update on Handling BUMN Under Management	- Muhammad Teguh Wirahadikusumah - Tree Asih Putra Sianturi - Ridha Farid Lesmana
25	26 Agustus 2024 August 26 2024	MOM-25/PPA/ BOD/0824	- Update Kinerja Keuangan PT PPA - Update on PT PPA Financial Performance	- Muhammad Teguh Wirahadikusumah - Tree Asih Putra Sianturi - Ridha Farid Lesmana
26	29 Agustus 2024 August 29, 2024	MOM-26/PPA/ BOD/0824	- Permohonan Ijin Prinsip Anak Perusahaan PT PPA - Application for PT PPA Subsidiary Principle Permit	- Muhammad Teguh Wirahadikusumah - Tree Asih Putra Sianturi - Ridha Farid Lesmana
27	05-Sep-24 September 5, 2024	MOM-27/PPA/ BOD/0924	- Update Surat Kepada Kementerian - BUMN Update Progress Review Pengadaan - Update Pengelolaan Non Performing Loan - Update on Letter to the Ministry of SOEs - Update on Procurement Review Progress - Update on Non Performing Loan Management	- Muhammad Teguh Wirahadikusumah - Tree Asih Putra Sianturi - Ridha Farid Lesmana
28	09-Sep-24 September 9, 2024	MOM-28/PPA/ BOD/0924	- Update KPI Direktorat - Pembahasan Laporan Manajemen - Permohonan Persetujuan Kebijakan Perusahaan PT PPA - Update Penanganan Legal - Update on KPI Directorate - Discussion on Management Report - Request for PT PPA Company Policy Approval - Update on Legal Handling	- Muhammad Teguh Wirahadikusumah - Tree Asih Putra Sianturi - Ridha Farid Lesmana
29	18-Sep-24 September 18, 2024	MOM-29/PPA/ BOD/0924	- Update Hasil Audit SPI - Update RKAP 2025 - Update on SPI Audit Result - Update on RKAP 2025	- Muhammad Teguh Wirahadikusumah - Tree Asih Putra Sianturi - Ridha Farid Lesmana
30	25-Sep-24 September 25, 2024	MOM-30/PPA/ BOD/0924	- Update Rencana Penanganan atas Biaya Namco VCC (PIC: Sadono Iswahyudi) - Update on Handling Plan for Namco VCC Costs (PIC: Sadono Iswahyudi)	- Muhammad Teguh Wirahadikusumah - Tree Asih Putra Sianturi - Ridha Farid Lesmana

No	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Meeting Minutes No.	Agenda Rapat Meeting Agenda	Nama Direksi Peserta Rapat Board of Directors Participating in the Meeting
31	01-Oct-24 October 1, 2024	MOM-31/PPA/ BOD/1024	1. Permohonan Persetujuan Kebijakan 2. Update pengalihan pinjaman BUMN TK 3. Update proyek di BUMN TK 4. Update BUMN TK 5. Update Penanganan Konsultan PKPU 1. Policy Approval Request 2. Update on transfer of BUMN Under Management loans 3. Update on projects in BUMN Under Management 4. Update on BUMN Under Management 5. Update on Handling PKPU Consultants	1. Muhammad Teguh Wirahadikusumah 2. Tree Asih Putra Sianturi 3. Ridha Farid Lesmana
32	7 Oktober 2024 October 7, 2024	MOM-32/PPA/ BOD/1024	1. Update Legal 2. Update Legal 3. Update Hasil ICOFR 4. Update Non Performing Loan 1. Legal Updates 2. Legal Updates 3. Update on ICOFR Results 4. Update on Non-Performing Loan	1. Muhammad Teguh Wirahadikusumah 2. Tree Asih Putra Sianturi 3. Ridha Farid Lesmana
33	9 Oktober 2024 October 9, 2024	MOM-33/PPA/ BOD/1024	1. Pembahasan Penyelesaian Exposure PPA 2. Update Draft RKAP 2025 1. Discussion on Settlement of PPA Exposure 2. Update on Draft RKAP 2025	1. Muhammad Teguh Wirahadikusumah 2. Tree Asih Putra Sianturi 3. Ridha Farid Lesmana
34	16 Oktober 2024 October 16, 2024	MOM-34/PPA/ BOD/1024	1. Update BUMN Titip Kelola 2. Update Penunjukan KAP 1. Update on BUMN Under Management 2. Update on Appointment of KAP	1. Muhammad Teguh Wirahadikusumah 2. Tree Asih Putra Sianturi 3. Ridha Farid Lesmana
35	21 Oktober 2024 October 21, 2024	MOM-35/PPA/ BOD/1024	1. Update Kinerja Keuangan PT PPA 2. Persetujuan Kebijakan PT PPA 3. Update Situasi terkini PT PPA 1. Update on PT PPA Financial Performance 2. Approval of PT PPA Policy 3. Update on PT PPA Current Situation	1. Muhammad Teguh Wirahadikusumah 2. Tree Asih Putra Sianturi 3. Ridha Farid Lesmana
36	23-Oct-24 October 23, 2024	MOM-36/PPA/ BOD/1024	1. Update Tanggapan atas Surat Kementerian BUMN 2. Update KPI Perusahaan 1. Update on Response to the Ministry of BUMN Letter 2. Update on Company KPI	1. Muhammad Teguh Wirahadikusumah 2. Tree Asih Putra Sianturi 3. Ridha Farid Lesmana
37	30 Oktober 2024 October 30, 2024	MOM-37/PPA/ BOD/1024	1. Update Penanganan BUMN Titip Kelola 2. Update Due Dilligence 1. Update on Handling of BUMN Under Management 2. Update on Due Diligence	1. Muhammad Teguh Wirahadikusumah 2. Tree Asih Putra Sianturi 3. Ridha Farid Lesmana
38	07-Nov-24 November 7, 2024	MOM-38/PPA/ BOD/1124	1. Persetujuan Kebijakan Perusahaan 2. Update Kebijakan dan SOP Anak Perusahaan PT PPA 3. Update Penanganan Akun Special Asset Management 4. Update Penanganan Akun Special Asset Management 1. Approval of Company Policy 2. Update on PT PPA Subsidiary Policy and SOP 3. Update on Special Asset Management Account Handling 4. Update on Special Asset Management Account Handling	1. Muhammad Teguh Wirahadikusumah 2. Tree Asih Putra Sianturi 3. Ridha Farid Lesmana

No	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Meeting Minutes No.	Agenda Rapat Meeting Agenda	Nama Direksi Peserta Rapat Board of Directors Participating in the Meeting
39	13-Nov-24 November 13, 2024	MOM-39/PPA/ BOD/1124	Addendum Perjanjian Kredit - Treasury Credit Agreement Addendum - Treasury	1. Muhammad Teguh Wirahadikusumah 2. Tree Asih Putra Sianturi 3. Ridha Farid Lesmana
40	14-Nov-24 November 14, 2024	MOM-40/PPA/ BOD/1124	- Update Surat - Update Tindak Lanjut Penanganan Akun Special Asset Management - Update Tindak Lanjut Arahan Atas Penanganan Akun Special Asset Management	1. Muhammad Teguh Wirahadikusumah 2. Tree Asih Putra Sianturi 3. Ridha Farid Lesmana
41	19-Nov-24 November 19, 2024	MOM-41/PPA/ BOD/1124	- Letter to Update - Update on Follow-up on Handling Special Asset Management Accounts - Update on Follow-up on Directions for Handling Special Asset Management Accounts	1. Muhammad Teguh Wirahadikusumah 2. Tree Asih Putra Sianturi 3. Ridha Farid Lesmana
42	21-Nov-24 November 21, 2024	MOM-42/PPA/ BOD/1124	- Permohonan Ijin Prinsip Investasi - Update Akun Special Asset Management - Update Penanganan Non Performing Loan - Update Restrukturisasi BUMN Titip Kelola	1. Muhammad Teguh Wirahadikusumah 2. Tree Asih Putra Sianturi 3. Ridha Farid Lesmana
43	23-Nov-24 November 23, 2024	MOM-43/PPA/ BOD/1124	- Application for Investment Principle Permit - Update on Special Asset Management Account - Update on Handling Non Performing Loans - Update on Restructuring BUMN Under Management	1. Muhammad Teguh Wirahadikusumah 2. Tree Asih Putra Sianturi 3. Ridha Farid Lesmana
44	2 Desember 2024 December 2, 2024	MOM-44/PPA/ BOD/1224	- Update Kinerja PT PPA 1. Update on PT PPA Performance	1. Muhammad Teguh Wirahadikusumah 2. Tree Asih Putra Sianturi 3. Ridha Farid Lesmana
45	23-Nov-24 November 23, 2024	MOM-43/PPA/ BOD/1124	Addendum Perjanjian Kredit - Treasury Credit Agreement Addendum - Treasury	1. Muhammad Teguh Wirahadikusumah 2. Tree Asih Putra Sianturi 3. Ridha Farid Lesmana
46	2 Desember 2024 December 2, 2024	MOM-44/PPA/ BOD/1224	- Persetujuan Pembatalan Konsultan - Update Property PT PPA - Update Penanganan Akun Special Asset Management	1. Muhammad Teguh Wirahadikusumah 2. Tree Asih Putra Sianturi 3. Ridha Farid Lesmana
47	9 Desember 2024 December 9, 2024	MOM-45/PPA/ BOD/1224	- Approval of Consultant Cancellation - Update on PT PPA Property - Update on Handling Special Asset Management Account	1. Muhammad Teguh Wirahadikusumah 2. Tree Asih Putra Sianturi 3. Ridha Farid Lesmana
48	9 Desember 2024 December 9, 2024	MOM-46/PPA/ BOD/1224	Addendum Perjanjian Kredit - Treasury Credit Agreement Addendum - Treasury	1. Muhammad Teguh Wirahadikusumah 2. Tree Asih Putra Sianturi 3. Ridha Farid Lesmana
49	9 Desember 2024 December 9, 2024	MOM-46/PPA/ BOD/1224	- Update Non Performing Loan - Update dan Tindak Lanjut Surat Kuasa Khusus - Update Perkembangan BUMN Titip Kelola	1. Muhammad Teguh Wirahadikusumah 2. Tree Asih Putra Sianturi 3. Ridha Farid Lesmana
50	9 Desember 2024 December 9, 2024	MOM-46/PPA/ BOD/1224	- Update on Non Performing Loans - Update and Follow-up on Special Power of Attorney - Update on BUMN Under Management Developments	1. Muhammad Teguh Wirahadikusumah 2. Tree Asih Putra Sianturi 3. Ridha Farid Lesmana

No	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Meeting Minutes No.	Agenda Rapat Meeting Agenda	Nama Direksi Peserta Rapat Board of Directors Participating in the Meeting
47	10 Desember 2024 December 10, 2024	MOM-47/PPA/ BOD/1224	1. Update Debitur PT PPA 2. Update Penanganan Non Performing Loan 3. Update Penanganan Non Performing Loan 4. Update Kinerja Keuangan PT PPA 5. Update Progress Assesment 1. Update on PT PPA Debtors 2. Update on Handling Non Performing Loans 3. Update on Handling Non Performing Loans 4. Update on PT PPA Financial Performance 5. Update on Progress Assessment	1. Muhammad Teguh Wirahadikusumah 2. Tree Asih Putra Sianturi 3. Ridha Farid Lesmana
48	10 Desember 2024 December 10, 2024	MOM-48/PPA/ BOD/1224	Update Penanganan NPL Update on Handling NPL	1. Muhammad Teguh Wirahadikusumah 2. Tree Asih Putra Sianturi 3. Ridha Farid Lesmana

Rekapitulasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam Rapat Direksi dapat dilihat pada rincian berikut ini:

Recapitulation of the Board of Directors members attendance level in the Board of Directors Meetings is as follows:

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Direksi pada Rapat Direksi
Board of Directors' Meetings Frequency and Board of Directors Attendance Level

Nama Names	Jumlah Wajib Rapat Number of Mandatory Meetings	Jumlah Kehadiran Number Attended	% Kehadiran Attended
Muhamad Teguh Wirahadikusumah	48	48	100%
Ridha Farid Lesmana	48	48	100%
Tree Asih Putra Sianturi	48	48	100%
Rata-rata Average			100%

Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Diversity Policy

Keberagaman dalam jajaran Dewan Komisaris dan Direksi merupakan aspek yang sangat positif sekaligus krusial, tercermin dari perbedaan latar belakang pendidikan, keahlian, dan pengalaman. Keberagaman ini berperan penting dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Dengan komposisi yang beragam, efektivitas Dewan Komisaris dan Direksi dapat ditingkatkan, karena mampu menghadirkan berbagai sudut pandang dan kepentingan yang berbeda dalam setiap keputusan yang dibuat oleh manajemen. Hal tersebut menjadi faktor kunci dalam memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemajuan Perseroan.

Diversity in the Board of Commissioners and Board of Directors is a very positive and crucial aspect, and is reflected in the differences in educational background, expertise, and experience. This diversity plays an important role in supporting the decision-making process. With a diverse composition, the effectiveness of the Board of Commissioners and Board of Directors can be increased, as they can provide divers perspectives and interests in all decisions made by management. This is a key factor in providing a significant contribution to the progress of the Company.

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners Composition Diversity

Nama Name	Kewarganegaraan Nationality	Latar Belakang Pendidikan Education History	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise	Usia Age	Gender Gender
Marwanto Harjowiryo (Komisaris) (Commissioner)	Indonesia Indonesian	- Sarjana Ekonomi - Master of Arts (M.A.) bidang Ekonomi Pembangunan dan Kebijakan Fiskal - Doktor bidang Studi Kebijakan - Bachelor's degree in Economics - Master of Arts (M.A.) degree in Development Economics and Fiscal Policy - Doctorate in Policy Studies	- Komisaris PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI - Komisaris PT Sucofindo (Persero) - Komisaris PT Indonesia Infrastructure Finance - Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI - Direktur Eksekutif Asian Development Bank (ADB) - Ketua Komite Etik Asian Development Bank (ADB) - Anggota Panitia Penelaah Anggaran Asian Development Bank (ADB) - Commissioner of PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - Director General of Treasury, Republic of Indonesia Ministry of Finance - Commissioner of PT Sucofindo (Persero) - Commissioner of PT Indonesia Infrastructure Finance - Commissioner of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk - Director General of Financial Balance, Republic of Indonesia Ministry of Finance - Executive Director of the Asian Development Bank (ADB) - Chairman of the Asian Development Bank (ADB) Ethics Committee - Member of the Asian Development Bank (ADB) Budget Review Committee	Ekonomi dan Kebijakan Economy and policy	64	Laki-laki Male

Nama Name	Kewarganegaraan Nationality	Latar Belakang Pendidikan Education History	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise	Usia Age	Gender Gender
Muhammad Teguh Wirahadikusumah (Direktur Utama) (President Director)	Indonesia Indonesian	• Master (S2) of Business Administration di Warwick Business School, The University of Warwick, Coventry, Inggris • Sarjana (S1) Arsitektur dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung • Master's degree (S2) in Business Administration from Warwick Business School, The University of Warwick, Coventry, England (• Bachelor's degree (S1) in Architecture from Universitas Katolik Parahyangan Bandung	• Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Danareksa (Persero) (2020-2023) • Direktur Keuangan dan Penunjang Kerja PT Perusahaan Pengelola Aset (2019-2020) • Senior Executive Director–Head of Investment Banking PT Mandiri Sekuritas (2018-2020) • Executive Director–Head of Structured Finance & Investment Banking PT Mandiri Sekuritas (2012-2018) • Executive Vice President–Head of Asset Recovery (2009-2011) • Founding Partner PT Triventure Investments Group (2007-2009) • Senior Vice President–Investment Banking PT Namalatu Cakrawala Securities (2003-2007) • Direktur Investment Banking PT Danareksa Sekuritas (1998-2002) • Senior Associate–Fixed Income Research PT Danareksa Sekuritas (1997-1998) • Assistant Manager–Equity Research PT Inter Pacific Securities (1994-1995) • Assistant Manager–International Banking Division PT Bank Niaga Tbk (1992-1994) • Director of Finance and Risk Management, PT Danareksa (Persero) (2020-2023) • Director of Finance and Work Support, PT Perusahaan Pengelola Aset (2019-2020) • Senior Executive Director–Head of Investment Banking, PT Mandiri Sekuritas (2018-2020) • Executive Director–Head of Structured Finance & Investment Banking, PT Mandiri Sekuritas (2012-2018) • Executive Vice President–Head of Asset Recovery (2009-2011) • Founding Partner, PT Triventure Investments Group (2007-2009) • Senior Vice President – Investment Banking, PT Namalatu Cakrawala Securities (2003-2007) • Director of Investment Banking, PT Danareksa Sekuritas (1998-2002) • Senior Associate–Fixed Income Research, PT Danareksa Sekuritas (1997-1998) • Assistant Manager–Equity Research, PT Inter Pacific Securities (1994-1995) • Assistant Manager – International Banking Division, PT Bank Niaga Tbk (1992-1994)	Memiliki keahlian di bidang keuangan, investasi, manajemen bisnis Finance, investment, business management	59	Laki-laki Male

Nama Name	Kewarganegaraan Nationality	Latar Belakang Pendidikan Education History	Pengalaman Kerja Work Experience	Keahlian Expertise	Usia Age	Gender
Ridha Farid Lesmana (Direktur Investasi) (Director of Investments)	Indonesia Indonesian	• Sarjana (S1) Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung • Bachelor's degree (S1) in Civil Engineering from Institut Teknologi Bandung	• Kepala Divisi Restrukturisasi dan Revitalisasi 2 PPA (2022-2023) • Kepala Corporate Banking & Business Development di Indonesia Eximbank (2016-2022) • Head of Department, Corporate Banking di Indonesia Eximbank (2010-2016) • Relationship Manager di Bank Ekspor Indonesia (2006-2010) • Head of Restructuring and Revitalization Division 2, PPA (2022-2023) • Head of Corporate Banking & Business Development, Indonesia Eximbank (2016-2022) • Head of Department, Corporate Banking, Indonesia Eximbank (2010-2016) • Relationship Manager, Indonesian Export Bank (2006-2010)	Memiliki keahlian di bidang keuangan, investasi, manajemen bisnis Finance, investment, business management	47	Laki-laki Male
Tree Asih Putra Sianturi (Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko) (Director of Finance and Risk Management)	Indonesia Indonesian	Sarjana (S1) Ekonomi dari Universitas Indonesia Bachelor's degree (S1) in Economics from Universitas Indonesia	Senior Executive Vice President 1 PPA (2021-2023) Senior Vice President Bank DBS Indonesia (2016-2021) Associate Director ANZ Banking Group (2012-2016) Senior Executive Vice President 1 PPA (2021-2023) Senior Vice President Bank DBS Indonesia (2016-2021) Associate Director ANZ Banking Group (2012-2016)	Memiliki keahlian di bidang keuangan, investasi, dan bisnis manajemen Finance, investment, business management	41	Laki-laki Male

Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris

Nomination and Remuneration for The Board of Directors and Board of Commissioners

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kebijakan Nominasi Dewan Komisaris dan Direksi

1. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dan pada pasal 27 ayat (2), dinyatakan bahwa dalam hal Menteri Badan Usaha Milik Negara bertindak selaku Rapat Umum Pemegang Saham, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Menteri.
2. Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan oleh RUPS, dan pada ayat (2) dinyatakan bahwa dalam hal Menteri Badan Usaha Milik Negara bertindak selaku Rapat Umum Pemegang Saham, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Menteri.
3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia, BAB II Syarat Anggota Direksi Dan Dewan komisaris/Dewan pengawas BUMN Dan Anak Perusahaan; BAB IV Tata Cara Pengangkatan Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN.

Prosedur Nominasi

Dewan Komisaris

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Bagian Kelima Tata Cara Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, pelaksanaan pengangkatan Anggota Dewan Komisaris meliputi:

1. Penjaringan oleh Menteri, Wakil Menteri, Sekretaris Kementerian, dan/atau Deputi yang berasal dari mantan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, pejabat struktural dan pejabat fungsional pemerintah atau sumber lain;
2. Penilaian persyaratan formal dan persyaratan lain oleh Deputi;
3. Usulan pengangkatan bagi calon yang dinyatakan memenuhi persyaratan;
4. Penetapan melalui Keputusan Menteri BUMN atau RUPS, setelah calon menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap oleh Dewan Komisaris.

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS REMUNERATION POLICY

Nomination Policy For The Board Of Commissioners And Board Of Directors

1. Based on Article 27 paragraph (1) of Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises, the appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners is determined by the GMS, where article 27 paragraph (2) states that in the case of the Minister of SOEs, the SOE acts as the General GMS, so the appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners is determined by the Minister.
2. Based on Article 15 paragraph (1) of Law No. 19 of 2003 concerning SOEs, the appointment and dismissal of members of the Board of Directors is carried out by the GMS, and in paragraph (2) it is stated that in the event the Minister of SOEs acts as the GMS, the appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners is determined by the Minister.
3. Minister of SOEs Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources, CHAPTER II Requirements for Members of the Board of Directors and Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs and Subsidiaries; CHAPTER IV Procedures for Appointing Members of the Board of Directors and Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs.

Nomination Procedure

Board of Commissioners

Based on the Minister of SOEs Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of SOEs, Part Five, the Procedures for Appointing Members of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs, the appointment of Members of the Board of Commissioners includes:

1. Recruitment by the Minister, Deputy Minister, Secretary to the Ministry, and/or Deputy who comes from former Directors, Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs, structural officials and functional officials of the government or other sources;
2. Assessment of formal requirements and other requirements by the Deputy;
3. Proposed appointment for candidates who meet the requirements;
4. Determination through the Minister of SOEs or GMS Decree, after the candidate signs a statement letter resigning from other positions that are prohibited from being held concurrently by the Board of Commissioners.

Direksi

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Bagian Keempat Tata Cara Pengangkatan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, berikut Prosedur Nominasi Direksi hingga Penetapan:

1. Manajemen Suksesi (proses pemilihan dari Talent Pool atau sumber lain).
2. Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK)
3. Bakal calon yang akan ditetapkan menjadi calon anggota Direksi, adalah seseorang yang telah dinyatakan memenuhi Persyaratan Formal dan Persyaratan lain dan lulus UKK. UKK terhadap bakal calon dilakukan oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh Menteri.
4. Usulan Pengangkatan
5. Bagi calon yang telah mendapatkan rekomendasi dari tim penilai UKK dapat diangkat menjadi Direksi Perseroan.
6. Penetapan
7. Penetapan dilakukan melalui mekanisme RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan terkait lainnya.

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/ 03/2023 Tentang Organ Dan Sumber Daya Manusia BUMN serta Surat PT Danareksa (Persero) No. S-16/DR/DIR/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 Hal: Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Perusahaan Pengelola Aset.

Board of Directors

Based on the Minister of SOEs Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of SOEs, Part Four, the Procedures for Appointing Members of the Board of Directors of SOEs, the Procedures for Nominating Directors to Determination includes:

1. Submission and Screening of Candidates as Directors Succession Management (selection process from Talent Pool or other sources).
2. Fit and Proper Test (UKK)
3. The prospective candidates chosen as a candidate member of the Board of Directors is someone who has been declared to have fulfilled the Formal Requirements and other requirements and passed the UKK. UKK for prospective candidates is carried out by a professional institution appointed by the Minister.
4. Appointment Proposals
5. Candidates who were recommended by the UKK assessment team can be appointed as Directors of the Company
6. Determination
7. Determination is made through the GMS mechanism as regulated in the Financial Services Authority Regulations and other related regulations.

Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Policy

The Board of Directors and Board of Commissioners Remuneration is guided by the Minister of SOEs Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 Concerning SOE Organs and Human Resources, and PT Danareksa (Persero) Letter No. S-16/DR/DIR/10/2024 dated October 21, 2024, Subject: Determination of PT Perusahaan Pengelola Aset Board of Directors and Board of Commissioners Remuneration.

Prosedur Pengusulan Hingga Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), Perseroan mengalokasikan anggaran untuk rencana kenaikan penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris. Penyesuaian jumlah tersebut mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk skala usaha, tingkat kompleksitas bisnis, tingkat inflasi, kondisi serta kemampuan keuangan Perseroan, pertumbuhan dan pencapaian kinerja, besarnya target yang telah ditetapkan, serta tingkat penghasilan yang umum berlaku dalam industri sejenis.

1. Berdasarkan pencapaian kinerja dan KPI tahunan, kemampuan keuangan Perseroan serta kewajaran besarnya penghasilan pada industri/perusahaan sejenis di market Direksi mengusulkan kepada Dewan Komisaris untuk mengusulkan kepada RUPS;
2. Berdasarkan usulan Direksi dan pertimbangan Dewan Komisaris selanjutnya Dewan Komisaris mengusulkan besaran penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris kepada RUPS/Menteri untuk ditetapkan dalam RUPS Laporan Tahunan;
3. RUPS/Menteri menetapkan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Jenis Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris

No	Direksi Board of Directors	Dewan Komisaris Board of Commissioners
1.	Gaji Salary	Honorarium Honorarium
2.	Tunjangan: 1. Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2. Asuransi Purna jabatan 3. Tunjangan Perumahan Allowances: 1. Religious holiday allowance 2. Post-employment insurance 3. Housing Allowance	Tunjangan: 1. Tunjangan Hari Raya Keagamaan 2. Asuransi Purna jabatan 3. Tunjangan Perumahan Allowances: 1. Religious holiday allowance 2. Post-employment insurance 3. Housing Allowance
3.	Fasilitas: 1. Fasilitas Kendaraan 2. Fasilitas Kesehatan 3. Fasilitas bantuan Hukum Facilities: 1. Vehicle Facilities 2. Medical Facilities 3. Legal Aid Facilities	Fasilitas : 1. Fasilitas Kesehatan 2. Fasilitas bantuan Hukum Facilities: 1. Medical Facilities 2. Legal Aid Facilities
4.	Tantiem/Insentif Kinerja Tantiem/Performance Incentives	Tantiem/Insentif Kinerja Tantiem/Performance Incentives

Procedures for Proposing and Determining Remuneration for the Board of Commissioners and Board of Directors

Based on the Company's Work Plan and Budget (RKAP), the Company allocates a budget for planned increases in the Board of Directors and Board of Commissioners remuneration with the amount adjusted to several factors, including business scale, level of business complexity, inflation rate, the Company's financial condition and capability, performance growth and achievements, the size of targets set, and the that generally accepted remuneration levels in similar industries.

1. Based on annual performance and KPI achievements, the Company's financial capabilities and the reasonableness of the amount of remuneration in similar industries/companies in the market, the Board of Directors submits a proposal to the Board of Commissioners to propose to the GMS;
2. Based on the Board of Directors' proposal and after the Board of Commissioners' consideration, the Board of Commissioners then proposes the amount of remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners to the GMS/Minister to be determined in the Annual Report GMS;
3. The GMS/Minister determines the remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners.

Types of Income for Board of Directors and Board of Commissioners

Realisasi Remunerasi Dewan Komisaris Tahun 2024

Realization of Board of Commissioners Remuneration in 2024

Direksi (3 orang) Board of Directors (3 persons)	Nilai (Rp) Amount	Dewan Komisaris (1 orang) Board of Commissioners (1 person)	Nilai (Rp) Amount
Gaji Salary	6.839.654.545	Honorarium	1.010.880.000
Tunjangan Perumahan Housing Allowance	1.006.250.000	Tunjangan Transport Transport Allowance	200.232.000
THR Religious Allowance	561.600.000	THR Religious Allowance	84.240.000
Tunjangan Pakaian Clothing Allowance	60.000.000	Tunjangan Pakaian Clothing Allowance	20.000.000
Asuransi Purna Jabatan Full-time insurance premium	3.304.800.000	Asuransi Purna Jabatan Full-time insurance premium	495.720.000
Kesehatan Rawat Jalan Outpatient Reimbursement	314.909.004	Kesehatan Rawat Jalan Outpatient Reimbursement	125.364.042
Asuransi Rawat Inap + BPJS Kesehatan Inpatient Insurance and BPJS Health	255.522.000	Asuransi Rawat Inap + BPJS Kesehatan Inpatient Insurance and BPJS Health	70.750.500
BPJS Ketenagakerjaan BPJS Employment	283.599.880	BPJS Ketenagakerjaan BPJS Employment	41.212.800
Uang Saku dan Transport Perjalanan Dinas Pocket Money and Transport for Business Trip	252.472.100	Uang Saku dan Transport Perjalanan Dinas Pocket Money and Transport for Business Trip	13.200.000
Operasional Kendaraan Office Car	548.863.636	Operasional Kendaraan Office Car	0
Keanggotaan Club Membership	170.180.000	Keanggotaan Club Membership	0
Insentif Khusus (Netto) Tahun Sebelumnya Incentive (Net) Previous Year	2.216.297.224	Insentif Khusus (Netto) Tahun Sebelumnya Incentive (Net) Previous Year	769.016.367
Pajak Penghasilan Income Tax	6.792.785.290	Pajak Penghasilan Income Tax	1.172.788.930
Jumlah Penghasilan Direksi Total Earning of Board of Directors	22.606.933.679	Jumlah Penghasilan Dewan Komisaris Total Earning of Board of Commissioners	4.003.404.639

Catatan:

- Untuk jumlah penghasilan Direksi termasuk proporsional 1 (satu) Anggota Direksi yang mengundurkan diri efektif 19 Januari 2024.
- Untuk jumlah penghasilan Dewan Komisaris termasuk 1 (satu) anggota Dewan Komisaris yang berakhir 15 Desember 2023 yang masih memperoleh Insentif Khusus 2023.

Note:

- The Board of Directors remuneration includes proportional 1 (one) member of the Board of Directors who resigned effective January 19, 2024.
- The Board of Commissioners remuneration includes 1 (one) member of the Board of Commissioners who ceased serving on December 15, 2023 but still received the 2023 Special Incentive.

PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

PPA melaksanakan penilaian kinerja Dewan Komisaris secara berkala sebagai bentuk dari upaya menjaga Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Prosedur ini dilakukan secara berkala, mengacu pada prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria seperti kehadiran dalam rapat serta keterlibatan aktif dalam pengawasan dan pengambilan keputusan strategis. Selain itu, Dewan Komisaris melakukan penilaian terhadap Direksi berdasarkan capaian kinerja selama tahun buku mencakup aspek kompetensi, kehadiran rapat serta pelaksanaan prinsip GCG. Pendekatan ini memastikan bahwa evaluasi kinerja dilakukan secara menyeluruh, obyektif dan mendukung tercapainya tujuan perusahaan secara berkelanjutan.

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

1. Kriteria yang digunakan, seperti capaian kinerja selama tahun buku (KPI dan *assessment* GCG aspek Direksi, kompetensi dan kehadiran dalam rapat);
Kriteria yang digunakan untuk Dewan Komisaris adalah berdasarkan kehadiran dalam rapat, sedangkan kriteria yang digunakan oleh Dewan Komisaris untuk Direksi adalah berdasarkan kinerja dan kapasitas Direksi.
2. Pihak yang melakukan penilaian.
Pihak yang melakukan penilaian untuk Dewan Komisaris, terhubung belum ada ketentuan yang mengatur maka penilaian dilakukan secara mandiri oleh Dewan Komisaris, sedangkan pihak yang melakukan penilaian untuk Direksi adalah Dewan Komisaris.

KPI Dewan Komisaris Tahun 2024

Berdasarkan Kontrak Manajemen tahun 2024 antara Pemegang Saham dan Dewan Komisaris PPA, evaluasi kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan secara independen oleh Dewan Komisaris dan kemudian disahkan oleh Pemegang Saham. Di bawah ini disajikan tabel pencapaian KPI Dewan Komisaris untuk tahun 2024 sebagai berikut:

PROCEDURE FOR CARRYING OUT THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE ASSESSMENTS

PPA carries out periodic performance assessments of the Board of Commissioners in an effort to maintain Good Corporate Governance. This procedure is carried out periodically, and refers to the principles of transparency and accountability in company management. The assessment is carried out by considering criteria such as meeting attendance and active involvement in supervision and strategic decision-making. Also, the Board of Commissioners assesses the Board of Directors based on performance achievements during the fiscal year covering the aspects of competence, meeting attendance and application of GCG principles. This approach ensures the performance assessments are carried out comprehensively, objectively and support the achievement of the Company's goals in a sustainable manner.

PERFORMANCE ASSESSMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

1. Criteria used, such as performance achievements during the fiscal year (KPI and GCG assessment of the Board of Directors, competence and attendance at meetings);
The criteria used for the Board of Commissioners is based on attendance at meetings, while the criteria used by the Board of Commissioners for the Board of Directors is based on the performance and capacity of the Board of Directors.
2. The party conducting the assessment.
The party that conducts the assessment for the Board of Commissioners, since there is no regulation that regulates it, is carried out independently by the Board of Commissioners, while the party conducting the assessment for the Board of Directors is the Board of Commissioners.

KPIs for the Board of Commissioners in 2024

Based on the 2024 Management Contract between the Shareholders and the PPA Board of Commissioners, the Board of Commissioners performance assessment is carried out independently by the Board of Commissioners and then approved by the Shareholders. The following table shows the Board of Commissioners' KPI achievements for 2024:

No	KPI KPI	Target Target		Realisasi Realization	
		Satuan Unit	Bobot Weight	Satuan Unit	Bobot Weight
A. Aspek Pengawasan dan Pemberian Nasihat					
A. Supervision and Advisory Aspects					
1	Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran serta KPI Dewan Komisaris Tahun 2025 Develop Work Plan and Budget and KPIs for the Board of Commissioners 2024	1 Dokumen 1 Document	5,00 5.00	1 Dokumen 1 Document	5,00 5.00
2	Memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap: Provide responses/recommendations to Shareholders on:				
	1. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2025 Company Work Plan and Budget 2025	1 Surat 1 Letter	5,00 5.00	1 Surat 1 Letter	5,00 5.00
	2. Laporan Tahunan Perusahaan (<i>Audited</i>) Tahun 2023 Company Annual Report (Audited) Year 2023	1 Surat 1 Letter	5,00 5.00	1 Surat 1 Letter	5,00 5.00
	3. Analisis Kinerja Triwulan Perusahaan Tahun 2024 Analysis of the Company's Quarterly Performance in 2024	3 Surat 3 Letters	15,00 15.00	3 Surat 3 Letters	15,00 15.00
3	Persetujuan/Tanggapan tertulis Dewan Komisaris atas usulan aksi korporasi oleh Direksi Written approval/response of the Board of Commissioners on the proposal of corporate action by the Board of Directors	100%	10,00 10.00	100%	10,00 10.00
4.	Rapat Dewan Komisaris: Board of Commissioners Meeting				
	1. Jumlah Rapat dan Tersedianya Risalah Rapat Number of Meetings and Availability of Minutes of Meeting	12 Kali 12 Times	5,00 5.00	12 Kali 12 Times	5,00 5.00
	2. Kehadiran Rapat Meeting Attendance	100%	5,00 5.00	100%	5,00 5.00
5	Monitoring tindak lanjut hasil temuan audit internal/eksternal (KAP, SPI, GCG) Monitoring follow-up of internal/external audit findings (KAP, SPI, GCG)	3 Dokumen 3 Documents	4,00 4.00	3 Dokumen 3 Documents	4,00 4.00
6	Kunjungan kerja Dewan Komisaris Board of Commissioners working visit	3 Kali 3 Times	6,00 6.00	3 Kali 3 Times	6,00 6.00
	Sub Total		60,00 60.00		60,00 60.00
B. Aspek Pelaporan					
B. Reporting Aspect					
1	Laporan pengawasan dan realisasi pelaksanaan KPI Dewan Komisaris Triwulanan Tahun 2024 Supervision report and realization of the implementation of the KPIs of the Board of Commissioners Quarterly Year 2024	3 Laporan 3 Reports	15,00 15.00	3 Laporan 3 Reports	15,00 15.00
2	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahun 2023 Board of Commissioners Supervisory Report 2022	1 Laporan 1 Report	10,00 10.00	1 Laporan 1 Report	10,00 10.00
3	Evaluasi hasil kinerja KAP Tahun 2023 Evaluation of KAP performance results in 2022	1 Laporan 1 Report	10,00 10.00	1 Laporan 1 Report	10,00 10.00
	Sub Total		35,00 35.00		35,00 35.00
C. Aspek Dinamis/Lain-lain					
C. Dynamic/Other Aspects					
1	Peningkatan kompetensi melalui; pelatihan, sosialisasi, seminar, <i>workshop</i> , dll Competency improvement through; training, socialization, seminars, workshops, etc.	3 kali 3 Times	5,00 5.00	6 Kali 6 Times	10,00 10.00
	Sub Total		5,00 5.00		10,00 5.00
TOTAL			100,00		105,00

KPI DIREKSI TAHUN 2024

Berdasarkan Laporan Asurans Independen atas Laporan Penilaian KPI yang diterbitkan oleh KAP RSM Indonesia tanggal 27 Maret 2025, tabel pencapaian KPI Direksi untuk tahun 2024 sebagai berikut:

KPIs FOR THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024

Based on the Independent Assurance Report on KPI Assessment Report issued by KAP RSM Indonesia dated March 27, 2025, the table of KPI achievement of the Board of Directors for 2024 is as follows:

No	KPI KPI	Satuan Unit	Target Target	ESG/E ESG/E	Polaritas Polarity	Bobot Weight	Realisasi Realization	Prestasi Achievement	Skor Score
A Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia Economic and Social Value for Indonesia						55			53,70
1	Net Profit	Rp Milliar Rp Billion	168,1	C	Max	6	205,4	110,00%	6,60
2	ROIC >= WACC	%	-2,91%	C	Max	6	-2,38%	110,00%	6,60
3	BOPO	%	92,45%	C	Min	6	87,79%	103,38%	6,32
4	Interest Bearing Debt to Invested Capital	%	33,9%	G	Min	2	32,87%	99,84%	2,06
5	Penyelesaian LK audit tahun buku 2020-2023 Completion of LK audit for fiscal year 2020-2023	Waktu Times	Triwulan III Quarter III	G	Min	4	Triwulan IV Quarter IV	57,18%	2,29
6	Operasional: Penyelesaian penanganan debitur dalam pengelolaan SAM Operational: Settlement of debtor handling in SAM management	Jumlah Total	3	C	Max	6	5	110,00%	6,60
7	Operasional: Penurunan OS Pokok debitur SAM Eksisting Operational: Reduction of OS Principal of Existing SAM Debtors	Rp Milliar Rp Billion	56,84	C	Max	6	60,01	105,58%	6,33
8	Operasional: Perolehan recovery dari NPL Management Operational: Recovery from NPL Management	Rp Milliar Rp Billion	41,95	C	Max	6	22,25	53,03%	3,18
9	Sosial: Revitalisasi/Restrukturisasi BUMN Social: Revitalization/Restructuring of BUMN	Waktu Times	Triwulan IV Quarter IV	S	Min	7	Triwulan I Quarter I	110,00%	7,70
10	Sosial: Peningkatan penggunaan PDN pada ekosistem Holding Social: Increased use of PDN in the Holding ecosystem	%	97,75%	S	Max	6	98,00%	100,26%	6,02
B Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation						9			9,40
1	Implementasi Sinergi pada Holding Danareksa Implementation of Synergy in Danareksa Holding	Jumlah Total	2	C	Max	4	3	110,00%	4,40
2	Implementasi Roadmap Perbaikan Penerapan Management Risiko Implementation of Roadmap for Improving Risk Management	%	100%	C	Max	5	100%	100%	5,00
C Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership						11			11,70
1	Integrasi ERP Anggota Holding ke ERP Danareksa Integration of Holding Members' ERP to Danareksa ERP	Waktu Times	100%	G	Min	4	Triwulan III Quarter III	100,00%	4,40
2	Implementasi keamanan cyber holding Danareksa Implementation of Danareksa holding cyber security	Waktu Times	100%	G	Min	3	Triwulan III Quarter III	110,00%	3,30
3	Pengembangan sistem Business Operation phase 2 Development of Business Operation system phase 2	Waktu Times	100%	G	Min	4	Triwulan IV Quarter IV	100,00%	4,00

No	KPI KPI	Satuan Unit	Target Target	ESG/E ESG/E	Polaritas Polarity	Bobot Weight	Realisasi Realization	Prestasi Achievement	Skor Score
D Peningkatan Investasi Investment Increase						8			7,00
1	Pelaksanaan eksekusi penyaluran dana restrukturisasi dan <i>refinancing</i> Execution of the distribution of restructuring and refinancing funds	Waktu Times	Triwulan IV Quarter IV	C	Min	4	Triwulan IV Quarter IV	100,00%	4,00
2	Pelaksanaan penyusunan RJPP 2024-2029 Preparation of the 2024-2029 RJPP	Waktu Times	Triwulan I Quarter I	C	Min	4	Triwulan III Quarter III	75,00%	3,00
E Pengembangan Talenta Talent Development						17			18,40
1	Rasio <i>Top Talent</i> Muda (<= 42 Tahun) Dalam <i>Nominated Talent</i> Ratio of Young Top Talent (<= 42 Years) in Nominated Talent	%	≥25%	S	Max	5	41,67%	110,00%	5,50
2	Rasio Perempuan dalam <i>Nominated Talent</i> Ratio of Females in Nominated Talent	%	≥8%	S	Max	5	8,33%	104,17%	5,20
3	Rasio Pemenuhan kualifikasi organ pengelola risiko Ratio of Fulfillment of Qualifications in Risk Management Organs	%	90%	G	Max	3	110%	110,00%	3,30
4	Pencapaian penyelesaian Transformasi HC Sesuai dengan <i>Roadmap</i> SDM 2024 Completion of HC Transformation in Accordance with HR Roadmap 2024	Skala Scale	4	G	Max	4	5,09%	110,00%	4,40
						100			100,20

Organ Pendukung Dewan Komisaris

Board of Commissioners Supporting Organs

Dewan Komisaris membentuk struktur pendukung untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya. Struktur ini terdiri atas Sekretaris Dewan Komisaris, Komite Audit, Komite Pemantau Risiko & GCG, serta Komite Nominasi & Remunerasi. Selain itu, Dewan Komisaris juga melibatkan fungsi remunerasi yang berkaitan dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

The Board of Commissioners established a supporting structure to support the Board of Commissioners duties and functions. This structure consists of the Secretary to the Board of Commissioners, the Audit Committee, the Risk & GCG Monitoring Committee, and the Nomination & Remuneration Committee. In addition, the Board of Commissioners also involves the remuneration function relating to members of the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Dewan Komisaris dan Organ Pendukung

Board of Commissioners and Supporting Organs



Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary to The Board of Commissioners

Amanat Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER- 12/ MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 juncto Nomor: PER-06/ MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 juncto Nomor: PER-14/ MBU/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021.

PERSYARATAN SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Sebagai bagian dari struktur pendukung Dewan Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris harus memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan, di antaranya:

1. Memahami sistem pengelolaan, pengawasan dan pembinaan Perseroan;
2. Memiliki integritas yang baik;
3. Memahami fungsi kesekretariatan;
4. Memiliki kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik.

KETENTUAN MASA JABATAN

Masa jabatan Sekretaris dan staf Sekretaris Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas ditetapkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan durasi maksimum 3 (tiga) tahun. Masa jabatan tersebut dapat diperpanjang hingga 2 (dua) tahun tambahan, tanpa mengurangi kewenangan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas untuk menghentikan masa jabatannya kapan saja jika dianggap perlu.

PROFIL SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Mandate of Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and Minister of SOEs Regulation No. PER- 12/ MBU/2012 dated August 24, 2012 in conjunction with No. PER-06/ MBU/04/2021 dated April 13, 2021 in conjunction with No. PER-14/MBU/ 10/2021 dated October 29, 2021.

REQUIREMENTS FOR SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS

As part of the supporting structure of the Board of Commissioners, the Secretary to the Board of Commissioners must meet the following requirements:

1. Understanding the Company's management, supervision and development system;
2. Having good integrity;
3. Understanding the secretarial functions;
4. Having good communication and coordination skills.

TERM OF OFFICE

The term of office for the Secretary to the Board of Commissioners / Supervisory Board and their staff is determined by the Board of Commissioners / Supervisory Board as a maximum of 3 (three) years, and they may be reappointed for up to 2 (two) additional years, without reducing the right of the Board of Commissioners/ Supervisory Board to dismiss them if deemed necessary.

SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS PROFILE



Diah Triana

Periode Jabatan: 30 November 2020 – 30 November 2025, Periode ke-2

Term of Office: November 30, 2020 – November 30, 2025, 2nd Period

Warga Negara Nationality	Indonesia Indonesian
Usia Age	57 Tahun pada tahun buku 2024 57 years old in Fiscal Year 2023
Domisili Domicile	Jakarta Timur, DKI Jakarta East Jakarta, DKI Jakarta
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 17/KEPKOM/PPA/XI/2020 tanggal 30 November 2020 dan No.12/KEPKOM/PPA/XI/2023 tanggal 30 November 2023. Board of Commissioners Decree No. 17/KEPKOM/PPA/XI/2020 dated November 30, 2020 and No.12/KEPKOM/PPA/XI/2023 dated November 30, 2023.
Pendidikan Education	Sarjana (S1) Ekonomi Manajemen Universitas Bangkalan (1990) Bachelor's degree (S1) in Management Economics, Universitas Bangkalan (1990)

Pengalaman Kerja Work Experience	- Pengendalian Sub Kelompok Keasdepan Bidang Industri Pangan dan Pupuk, Kementerian BUMN (9 Juni 2020 – April 2021) - Penata Kelola Perusahaan Negara Muda/Sub Koordinator pada Keasdepan Bidang Industri Pangan dan Pupuk, Kementerian BUMN (April 2021 – Sekarang) - Control of the Keasdepan Sub-group in the Food and Fertilizer Industry, Ministry of SOEs (June 9, 2020 – April 2021) - Young State Enterprise Governance/Sub Coordinator of the Keasdepan Food and Fertilizer Industry, Ministry of SOEs (April 2021 – Present)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	Tidak ada None
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationships	Tidak ada None

Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Waktu Penyelenggaraan Date	Penyelenggara Organizer
Online	Kick-Off Meeting Profesi Manajemen Risiko Risk Management Profession Kick-Off Meeting	15 Maret 2024 March 15, 2024	IRMAPA

Tugas dan Fungsi Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab mendukung pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris. Secara khusus, fungsi yang dijalankan oleh Sekretaris Dewan Komisaris meliputi:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan;
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
4. Menyusun Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
5. Menyusun Rancangan Laporan-Laporan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
6. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.

Selain tugas utama yang telah disebutkan, Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, sebagai pimpinan Sekretariat, menjalankan tugas tambahan lainnya sesuai kebutuhan, antara lain:

1. Memastikan bahwa Dewan Komisaris/Dewan Pengawas mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
4. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dengan pihak lain.

Secretary To The Board Of Commissioners Duties And Functions

The Secretary to the Board of Commissioners is responsible for supporting the supervisory function by the Board of Commissioners. Specifically, the Secretary to the Board of Commissioners functions include:

1. Organizing meetings, including meeting materials (briefing sheets) for the Board of Commissioners/ Supervisory Board;
2. Preparing minutes of the Board of Commissioners/ Supervisory Board meetings in accordance with the provisions in the Company's articles of association;
3. Administering Board of Commissioners/Supervisory Board documents, including incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings and other documents;
4. Preparing the Board of Commissioners/Supervisory Board Draft Work Plan and Budget;
5. Preparing the Board of Commissioners/Supervisory Board Draft Reports;
6. Carrying out other duties assigned by the Board of Commissioners/Supervisory Board.

In addition to the main duties mentioned above, the Secretary to the Board of Commissioners/Supervisory Board, as the head of the Secretariat, carries out the following:

1. Ensures the Board of Commissioners/Supervisory Board complies with the laws and regulations and applies the principles of GCG;
2. Provides information needed by the Board of Commissioners/Supervisory Board periodically and/or at any time if requested;
3. Coordinates members of the Committees, if necessary to smoothen the duties of the Board of Commissioners/Supervisory Board;
4. Acts as a liaison officer for the Board of Commissioners/Supervisory Board with other parties.

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Dewan Komisaris

Selama tahun 2024, Sekretaris Dewan Komisaris telah berpartisipasi dalam program pelatihan dan/atau pengembangan kompetensi dengan rincian sebagai berikut:

Secretary to the Board of Commissioners Competency Development

In 2024, the Secretary to the Board of Commissioners participated in the following training and/or competency development programs:

Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Waktu Penyelenggaraan Date	Penyelenggara Organizer
Online	Kick-Off Meeting Profesi Manajemen Risiko Risk Management Profession Kick-Off Meeting	15 Maret 2024 March 15, 2024	IRMAPA

Remunerasi Sekretaris Dewan Komisaris

Penetapan remunerasi bagi Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan kemampuan Perseroan sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 juncto Nomor: PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 juncto Nomor: PER-14/MBU/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN. Besaran dan jenis penghasilan yang diperoleh Sekretaris Dewan Komisaris adalah meliputi honorarium sebesar 15% dari gaji Direktur Utama, tunjangan transport maksimal 20% dari honorarium dan tunjangan komunikasi maksimal 5% dari honorarium serta diberikan fasilitas kepegawaian dan insentif kinerja tahunan. Fasilitas kepegawaian dan insentif kinerja tahunan diberikan dengan pertimbangan kemampuan Perseroan dan kewajaran anggaran.

Secretary to the Board of Commissioners Remuneration

Is stipulated by the Board of Commissioners by considering the Company's condition according to Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012, juncto No. PER-06/MBU/04/2021 dated April 13, 2021, juncto No. PER-14/MBU/10/2021 dated October 29, 2021 regarding The Supporting Organs under the Board of Commissioners/Supervisory Board in SOEs. The amount and type of remuneration for the Secretary of the Board of Commissioners include an honorarium that is 15% of the President Director's salary, transportation allowance for a maximum of 20% of honorarium, and communication allowance for a maximum of 5% of honorarium, and also receives employment facilities and the annual performance incentives. The employment facilities and the annual performance incentives are granted by considering the Company's condition and budget fairness.

PENILAIAN KINERJA SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Penilaian dilakukan melalui rekapitulasi dan penilaian terhadap kehadiran dalam rapat-rapat internal dan gabungan Dewan Komisaris, rapat-rapat kesekretariatan dan komite Dewan Komisaris, penguasaan penugasan dan penyelesaian administrasi korespondensi, keleluasaan waktu kerja, kekompakan dukungan koordinasi dengan Komite Dewan Komisaris, ketaatan/kepatuhan dan loyalitas terhadap pengembangan Perseroan, serta kontribusi kegiatan lainnya dalam rangka membantu pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris. Realisasi pencapaian Kinerja Sekretaris Dewan Komisaris mencapai 100% dengan kriteria Sangat Baik.

SECRETARY TO THE BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE OF ASSESSMENT

The assessment was carried out based on recapitulation and assessment of attendance at internal and joint meetings of the Board of Commissioners, secretariat and committee meetings of the Board of Commissioners, mastery of assignments and completion of administrative correspondence, flexibility of working hours, compactness of coordination support with the Board of Commissioners Committee, obedience/compliance and loyalty to the Company development, as well as contributions to other activities to assist in the Company's supervision by the Board of Commissioners. The realized Secretary to the Board of Commissioners Performance Assessment was 100% with the criteria of Very Good.

Komite Audit Audit Committee

Amanat Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN dan ditekankan pembentukannya berdasarkan Penjelasan Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 juncto Nomor: PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 juncto Nomor: PER-14/MBU/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021.

PEDOMAN KERJA KOMITE AUDIT

Perseroan mengacu pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang berupa Piagam Komite Audit yang dikembangkan dan disempurnakan selaras dengan perubahan peraturan yang berlaku serta dinamika Perseroan. Penyusunan Piagam Komite Audit Perseroan dilakukan berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan oleh Peraturan Dewan Komisaris Nomor: PER-05/KOM/PPA/XI/2024 tanggal 29 November 2024 tentang Piagam (Charter) Komite Audit PT Perusahaan Pengelola Aset.

Piagam Komite Audit sebagai pedoman kerja menetapkan berbagai ketentuan, termasuk struktur dan persyaratan keanggotaan, masa jabatan, tugas dan tanggung jawab, wewenang, serta pelaksanaan rapat dan kewajiban pelaporan aktivitas Komite Audit. Kode Etik Komite Audit mencakup prinsip-prinsip seperti integritas, objektivitas dan independensi, kerahasiaan, serta kompetensi.

PERSYARATAN KOMITE AUDIT

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh Komite Audit, sesuai dengan pedoman kerja, meliputi hal-hal berikut:

1. Memiliki integritas yang tinggi, akhlak dan moral yang baik, dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan/pemeriksaan, sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara optimal dan mampu berkomunikasi secara efektif.
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan.
3. Mampu bekerjasama dan berkomunikasi secara efektif baik secara lisan maupun tulisan.
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
5. Memiliki pemahaman yang baik mengenai laporan keuangan, *financial engineering*, *corporate finance*, *auditing* (audit keuangan, audit operasional, dan audit khusus), serta manajemen risiko.
6. Memiliki pemahaman yang baik mengenai Anggaran Dasar Perusahaan, serta konsep, peraturan perundang-undangan, dan praktek-praktek mengenai korporasi, pasar modal, pasar uang, keuangan negara, dan GCG, serta hal-hal yang terkait dengan kegiatan Perseroan.
7. Sekurang-kurangnya salah satu dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

The mandate of Article 70 paragraph (1) of Law No. 19 of 2003 concerning SOEs and with emphasis on its formation based on the Elucidation of Article 121 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, and the Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 juncto No. PER-06/MBU/04/2021 dated April 13, 2021 juncto No. PER-14/MBU/10/2021 dated October 29, 2021.

AUDIT COMMITTEE CHARTER

The Company's Work Guidelines and Rules take the form of an Audit Committee Charter that was prepared and refined in line with changes in applicable regulations and the dynamics of the Company. The preparation of the Company's Audit Committee Charter is carried out based on the regulations stipulated by the Board of Commissioners Regulation Number: PER-05/KOM/PPA/XI/2024 dated November 29, 2024 concerning the Audit Committee Charter of PT Perusahaan Pengelola Aset.

As a working guideline, the Audit Committee Charter stipulates various provisions, including the membership structure requirements, term of office, duties and responsibilities, authorities, and meetings and reporting obligations of the Audit Committee's activities. The Audit Committee Code of Ethics includes the integrity, objectivity and independence, confidentiality, and competence principles.

AUDIT COMMITTEE REQUIREMENTS

The requirements that must be met by the Audit Committee, in accordance with the work guidelines, include the following:

1. Having high integrity, good morals and character, and sufficient knowledge and work experience in the field of supervision/inspection, so they can carry out their functions optimally and are able to communicate effectively.
2. Has no personal interests/relationships that could have a negative impact or conflict of interest on the Company.
3. Is able to collaborate and communicate effectively both orally and in writing.
4. Can provide sufficient time to complete their duties.
5. Has a good understanding of financial reports, financial engineering, corporate finance, auditing (financial audits, operational audits and special audits), as well as risk management.
6. Has a good understanding of the Company's Articles of Association, as well as concepts, laws and regulations, and practices regarding corporations, capital markets, money markets, state finances, and GCG, as well as matters related to the Company's activities.
7. Has at least one Audit Committee member with an educational background or expertise in accounting and/or finance.

8. Anggota Komite Audit baik yang berasal dari anggota Dewan Komisaris maupun bukan, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.
9. Anggota Komite Audit baik yang merupakan maupun yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris, tidak memegang jabatan rangkap sebagai pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
10. Jika ada anggota Komite berasal dari sebuah institusi tertentu, maka institusi dimana anggota Komite berasal tidak boleh memberikan jasa pada PPA.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOMITE AUDIT

Menurut Piagam Komite Audit, pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris dan harus dilaporkan kepada RUPS. Pengangkatan anggota Komite Audit dilakukan berdasarkan penilaian yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tujuan memberikan tolak ukur agar Komite Audit dapat melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik. Ketentuan terkait proses pengangkatan Komite Audit sebagai berikut:

1. Komite Audit Perseroan memiliki kualifikasi Pendidikan dan pengalaman kerja yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas sebagai Komite Audit. Profil Anggota Komite Audit dapat dilihat dalam Bagian Profil Komite Audit;
2. Proses rekrutmen Anggota Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kompetensi, keahlian dan integritas dan kemampuan bekerja sama;
3. Dewan Komisaris melakukan wawancara untuk menggali lebih dalam calon anggota Komite Audit. Selanjutnya, Dewan Komisaris melakukan rapat untuk menentukan calon anggota Komite Audit terpilih. Selanjutnya, penetapan dan pengangkatan calon anggota Komite Audit dilakukan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris;
4. Seluruh Anggota Komite Audit Perseroan memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik;
5. Berdasarkan Piagam (*Charter*) Komite Audit Perseroan dinyatakan bahwa masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

Apabila masa jabatan anggota Komite Audit telah berakhir, Dewan Komisaris memiliki hak untuk melakukan pemberhentian. Selain itu, pemberhentian dapat dilakukan jika anggota Komite Audit tidak memenuhi kriteria kinerja yang diharapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya. Bagi anggota Dewan Komisaris yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Audit, ia dapat berhenti dengan sendirinya jika masa jabatannya sebagai anggota Dewan Komisaris berakhir.

AUDIT COMMITTEE APPOINTMENT AND DISMISSAL

In accordance with the Audit Committee Charter, the appointment and dismissal of members of the Audit Committee is the responsibility of the Board of Commissioners and must be reported to the GMS. The appointment of members of the Audit Committee is carried out based on an assessment in accordance with applicable regulations with the aim of providing a benchmark so that the Audit Committee can carry out its role and function properly. The Audit Committee appointment process provisions are as follows:

1. The Company's Audit Committee has adequate educational qualifications and work experience to support the implementation of its duties as an Audit Committee. Profiles of Audit Committee Members can be seen in the Audit Committee Profile Section;
2. The Audit Committee Members recruitment process is carried out by the Board of Commissioners by considering their competency, expertise and integrity and ability to work together;
3. The Board of Commissioners conducts interviews to further observe the members of the Audit Committee candidates. Then, the Board of Commissioners holds meetings to determine the candidates as members of the Audit Committee. Finally, the determination and appointment of candidates as members of the Audit Committee is carried out through a Board of Commissioners Decree;
4. All members of the Company's Audit Committee have integrity, competency and a good financial reputation;
5. Based on the Company's Audit Committee Charter, it states that the term of office of Audit Committee members who are not members of the Company's Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years, and they can be extended once for a 2 (two) year term of office, without prejudice on the Board of Commissioner rights to dismiss them at any time.

If the Audit Committee member's term of office has ended, the Board of Commissioners has the right to dismiss them. In addition, dismissal can be carried out if the Audit Committee member does not meet the expected performance criteria and/or is not competent in carrying out their duties. For the member of the Board of Commissioners who serves as Chair of the Audit Committee, they will resign automatically if their term of office as a member of the Board of Commissioners ends.

Ketentuan Masa Jabatan

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Piagam Komite Audit Perseroan, Dewan Komisaris telah menetapkan masa jabatan Komite Audit maksimal 5 (lima) tahun dengan periode pertama tidak lebih dari 3 (tiga) tahun. Komite Audit dapat diangkat kembali untuk periode kedua dengan durasi maksimal 2 (dua) tahun, tanpa mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan anggota Komite Audit kapan saja jika dianggap perlu.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Komite Audit Tahun 2024

Pada tahun 2024, Perseroan memiliki 2 (dua) anggota Komite Audit, yang terdiri dari 1 (satu) Ketua Komite dan 1 (satu) anggota yang berasal dari luar manajemen. Penetapan susunan Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PPA Nomor: SK-01/KEP.KOM/PPA/I/2024 tanggal 2 Januari 2024. Berikut ini susunan Komite Audit sepanjang tahun 2024, yaitu:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period Served
Marwanto Harjowiryo	Ketua Komite Audit Audit Committee Chair	Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 09/KEP.KOM/PPA/XI/2022 tanggal 25 November 2022 Board of Commissioners Decree No. 09/KEP.KOM/PPA/XI/2022 dated November 25, 2022	9 Oktober 2020 – habis masa jabatan Dewan Komisaris October 9, 2020 – the end of Board of Commissioners' term of office	Ke-1 1st
Royza Fauzy	Anggota Komite Audit/ Pihak Independen Audit Committee Member/ Independent Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor SK-01/KEP.KOM/PPA/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 Board of Commissioners Decree No. SK-01/KEP.KOM/PPA/I/2024 dated January 2, 2024	2 Januari 2024 – 1 Januari 2027 January 2, 2024 – January 1, 2027	Ke-1 1st

PROFIL KOMITE AUDIT

Term of Office

Based on the provisions stated in the Company's Audit Committee Charter, the Board of Commissioners has set the term of office of the Audit Committee at a maximum of 5 (five) years with the first period not exceeding 3 (three) years. The Audit Committee can be reappointed for a second period for a maximum duration of 2 (two) years, without reducing the right of the Board of Commissioners to dismiss members of the Audit Committee at any time if deemed necessary.

Number, Composition and Structure of the Audit Committee in 2024

In 2024, the Company's Audit Committee had 2 (two) members, consisting of 1 (one) Committee Chair and 1 (one) member from outside the management. The Audit Committee composition was based on the PT PPA Board of Commissioners Decree No. SK-01/KEP.KOM/PPA/I/2024 dated January 2, 2024. The following shows the Audit Committee composition during 2024:

AUDIT COMMITTEE PROFILES

Marwanto Harjowiryo
Ketua Komite Audit/Komisaris
Chair of the Audit Committee/Commissioner

Profil lengkap disajikan di bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.
The complete profile can be found in the Board of Commissioners profile section in the Company Profile chapter in this Annual Report.



Royza Fauzy

Anggota Komite Audit/Pihak Independen
Menjabat sejak 2 Januari 2024 - 1 Januari 2027, Periode Ke-1
 Audit Committee Member/Independent Party
 Serving from January 2, 2024 - January 1, 2027, 1st Period

Warga Negara Nationality	: Indonesia Indonesian
Usia Age	: 35 tahun pada tahun buku 2024 35 years old in Fiscal Year 2023
Domisili Domicile	: Depok, Jawa Barat. Depok, Jawa Barat.
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	: Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK-01/KEP.KOM/PPA/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 Board of Commissioners Decree No. SK-01/KEP.KOM/PPA/I/2024 dated January 2, 2024
Pendidikan Education	: S1 Akuntansi (Universitas Indonesia) Bachelor's Degree in Accounting (Universitas Indonesia)
Sertifikasi Profesi Professional Certification	: <i>Certified Risk Management Officer (CRMO)</i> – LSPMR (Agustus 2019) <i>Certified Risk Management Professional (CRMP)</i> (Juni 2022) <i>Certified Anti Fraud Officer (CAFO)</i> - GRC Management (Januari 2025) <i>Certified Risk Management Officer (CRMO)</i> – LSPMR (Agustus 2019) <i>Certified Risk Management Professional (CRMP)</i> (June 2022) <i>Certified Anti Fraud Officer (CAFO)</i> - GRC Management (Januari 2025)
Pengalaman Kerja Work Experience	: - Auditor KAP Deloitte Indonesia (2012-2014) - Anggota Komite Audit PT Perum Jasa Tirta II (Apr 2019-Jan 2021) - Anggota Komite Pemantauan Usaha dan Pemantauan Risiko PT Garuda Indonesia (Persero) (Feb 2021-Sep 2021) - Sekretaris Dewan Pengawas Perum Peruri (Okt 2021-Des 2023) - Auditor, Inspektorat Kementerian BUMN (Mar 2015-sekarang) - Auditor KAP, Deloitte Indonesia (2012-2014) - Audit Committee Member, PT Perum Jasa Tirta II (Apr 2019-Jan 2021) - Business Monitoring and Risk Monitoring Committee Member, PT Garuda Indonesia (Persero) (Feb 2021-Sep 2021) - Secretary to the Supervisory Board, Perum Peruri (Oct 2021-Dec 2023) - Auditor, Inspectorate of the Ministry of SOEs (Mar 2015-present)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	: Merangkap sebagai Auditor Ahli Muda Kementerian BUMN Concurrently a Junior Expert Auditor at the Ministry of State-Owned Enterprises
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationships	: Memiliki hubungan afiliasi dengan Pemegang Saham Utama/Pengendali Has an affiliated relationship with the Majority/Controlling Shareholder

Independensi Komite Audit

Komite Audit, yang dipimpin oleh salah satu anggota Dewan Komisaris dan didukung oleh anggota profesional lainnya, menjalankan fungsinya secara independen. Perseroan telah memenuhi persyaratan terkait jumlah, komposisi, kompetensi, kriteria, dan independensi Komite Audit sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai bukti komitmen terhadap independensi, Perseroan telah menetapkan Surat Pernyataan Independensi Komite Audit. Berikut adalah indikator-indikator independensi yang diterapkan oleh Perseroan, sebagai berikut:

Audit Committee Independency

The Audit Committee is chaired by a member of the Board of Commissioners and supported by other professional members, who carry out their functions independently. The Company has fulfilled the requirements related to the number, composition, competence, criteria, and independence of the Audit Committee in accordance with applicable regulations. The Company has established a Statement of Audit Committee Independency to ensure the independency criteria of the Audit Committee. The indicators of independency possessed by the Company are as follows:

Aspek Independensi Independency Aspect	Marwanto Harjowiryo	Royza Fauzy
Memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has financial relationships with the Board of Commissioners and Board of Directors	x	x
Memiliki hubungan kepengurusan di Perseroan, anak perusahaan maupun perusahaan afiliasi Has management relationships in the Company, subsidiaries and affiliated companies	x	x

Aspek Independensi Independency Aspect	Marwanto Harjowiryo	Royza Fauzy
Memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan Has shares in the Company	x	x
Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Audit Has a familial relationship with the Commissioners, Directors and/ or fellow members of the Audit Committee	x	x
Menjabat sebagai pengurus partai politik dan pejabat Pemerintah Daerah Serves as a political party administrator and Regional Government official	x	x
V: Memiliki Hubungan X: Tidak Memiliki Hubungan V: Has a Relationship X: Has no Relationship		

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN, Komite Audit memiliki fungsi utama untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan agar Perseroan dapat mencapai tujuannya. Komite Audit bertugas melaksanakan pengawasan secara independen dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Berikut adalah tugas dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Komite Audit, sebagai berikut:

1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian internal serta pelaksanaan tugas auditor internal dan eksternal;
2. Mengevaluasi hasil pelaksanaan audit yang dilaksanakan oleh Divisi Internal Audit dan Auditor Eksternal;
3. Memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan penyempurnaan sistem pengendalian manajemen beserta penerapannya;
4. Menganalisis, menilai, membuat rekomendasi dan menyampaikan informasi mengenai hal yang ditelaah, sesuai dengan tugas dan wewenangnya;
5. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan baik dari pihak eksternal maupun internal Perseroan;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Komite Audit kepada Dewan Komisaris;
7. Menyusun dan menyampaikan program kerja tahunan kepada Dewan Komisaris untuk kemudian disahkan sebelum tahun buku berjalan.

PEMBAGIAN TUGAS KOMITE AUDIT

Nama Name	Jabatan Position	Pembagian Tugas Division of Duties
Marwanto Harjowiryo	Ketua Komite Audit/Komisaris Audit Committee Chair/ Commissioner	Bertanggung Jawab untuk menangani bidang Umum Responsible for handling General areas
Royza Fauzy	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	Bertanggung Jawab untuk menangani bidang Teknis dan Bertanggung jawab untuk menangani bidang Administrasi dan Keuangan Responsible for handling Technical areas, and Responsible for handling Administration and Finance areas

Audit Committee Duties and Responsibilities

Referring to the Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 concerning Supporting Organs of the Board of Commissioners/ Supervisory Board of BUMN, the Audit Committee's main function is to assist the Board of Commissioners in carrying out its supervisory function so that the Company can achieve its objectives. The Audit Committee is tasked with carrying out independent supervision and is directly responsible to the Board of Commissioners. The Audit Committee's duties and responsibilities are as follows:

1. Assisting the Board of Commissioners to ensure the effectiveness of the internal control system and the duties of internal and external auditors;
2. Evaluating the results of audits carried out by the Internal Audit Division and External Auditor;
3. Providing recommendations to improve the management control system and its implementation;
4. Analyzing, evaluating, making recommendations and delivering information on the matters studied, in accordance with their duties and authority;
5. Maintaining the confidentiality of Company documents, data and information from both external and internal parties of the Company;
6. Reporting the results of the Audit Committee's duties to the Board of Commissioners;
7. Preparing and submitting an annual work program to the Board of Commissioners for approval before the current fiscal year.

AUDIT COMMITTEE DIVISION OF DUTIES

Pengembangan Kompetensi Komite Audit

Perseroan telah menetapkan kebijakan yang mengatur pengembangan dan peningkatan kompetensi Komite Audit yang diimplementasikan melalui program pelatihan dan pendidikan yang terstruktur. Pada tahun 2024, anggota Komite Audit telah berpartisipasi dalam program pelatihan dan/atau pengembangan kompetensi sebagai berikut:

Audit Committee Competency Development

The Company has established a policy that regulates the development and improvement of the Audit Committee's competency that is realized through structured training and education programs. In 2024, Audit Committee members participated in the following training and/or competency development programs:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Waktu Penyelenggaraan Date	Penyelenggara Organizer
Marwanto Harjowiryo (Ketua Komite Audit/Komisaris) (Chair of the Audit Committee/ Commissioner)	Public Training	Program Pembekalan Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi 4 Banking Risk Management Briefing Program Qualification 4	12, 13 dan 15 Februari 2024. February 12, 13 and 15, 2024.	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Indonesian Banking Development Institute (LPPI)
	Public Training	Penguatan Komitmen Dewan Komisaris Anggota Holding BUMN Danareksa atas RKAP Tahun 2024. Confirmation of the Board of Commissioners of Members of the BUMN Danareksa Holding Commitment on the 2024 RKAP.	16 Februari 2024 February 16, 2024	PT Danareksa (Persero).
	Public Training	Mengawal Penuntasan Pembangunan Jangka Menengah untuk Kesenambungan Pembangunan. Supervising the Completion of Medium-Term Development for Sustainable Development.	22 Mei 2024. May 22, 2024.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Financial and Development Supervisory Agency (BPKP).
	Public Training	GRC Summit Seminar dan Master Class 2024. GRC Summit Seminar and Master Class 2024.	22-23 Agustus 2024. August 22-23, 2024.	CRMS Indonesia.
	Public Training	Risk Governance dan Leadership Master Class. Risk Governance and Leadership Master Class.	4 Desember 2024. December 4, 2024.	Enterprise Risk Management Academy (ERMA) & IRMAPA.
	Public Training	Risk Beyond International Conference on Enterprise Risk Management 2024.	5-6 Desember 2024 December 5-6, 2024	Enterprise Risk Management Academy (ERMA) & IRMAPA.
	Sertifikasi Certification	Certified Governance Oversight Professional (CGOP)	31 Januari 2024 January 31, 2024	LSP MKS & BNSP
	Sertifikasi Certification	Qualification 4 Field of Bank Risk Management	17 April 2024 April 17, 2024	LSP LSPP & BNSP
Royza Fauzy (Anggota Komite Audit) (Audit Committee Member)	Public Training	IPAF Training Seminar	23 April 2024 April 23, 2024	IPAF
	Public Training	GRC Summit Seminar 2024	23 Agustus 2024 August 23, 2024	CRMS Indonesia
	Public Training	Business Continuity Management (BCM)	4-6 November 2024 November 4-6, 2024	Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan (PPA&K) Accounting and Finance Development Center (PPA&K)
	Public Training	Risk Beyond International Conference on Enterprise Risk Management 2024	5-6 Desember 2024 December 5-6, 2024	ERMA dan IRMAPA
	Public Training	Mengikuti Pelatihan secara online terkait Sertifikasi CAFO (Certified Anti-Fraud Officer) Attending Online Training for CAFO (Certified Anti-Fraud Officer) Certification	12-14 Desember 2024 December 12-14, 2024	GRC Management

RAPAT KOMITE AUDIT

Kebijakan

Perseroan mengadakan rapat Komite Audit secara berkala dengan mengacu pada pedoman yang tertuang dalam Piagam Komite Audit. Rapat dengan auditor eksternal dilaksanakan minimal 1 (satu) kali setiap bulan, bertepatan dengan jadwal pemeriksaan audit. Dalam setiap rapat Komite Audit, Perseroan dapat mengundang Manajemen melalui Divisi SPI untuk menyampaikan informasi yang diperlukan.

AUDIT COMMITTEE MEETINGS

Policy

The Company holds regular Audit Committee meetings that refer to the guidelines set out in the Audit Committee Charter. Meetings with external auditors are held at least once a month during the audit examination schedule. In each Audit Committee meeting, the Company may invite Management through the SPI Division to provide any necessary information.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Frequency and Attendance Level

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number Attended	Persentase Kehadiran Percentage Attended
Marwanto Harjowiryo	Ketua Komite Audit/Komisaris Chair of the Audit Committee/ Commissioner	15	15	100%
Royza Fauzy	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	19	19	100%

Risalah Rapat Minutes of Meetings

No	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Meeting Minutes Number	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants
1.	19 Januari 2024 January 19, 2024	RIS-01/PPA/KA/0124	Pembahasan Kinerja Laporan Keuangan s/d Bulan Desember 2023 (unaudited) PT Perusahaan Pengelola Aset Tahun dan Pembahas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT PPA Tahun 2024 dan Lain- lain. Discussion on the Annual Financial Report Performance until December 2023 (unaudited) of PT Perusahaan Pengelola Aset, and Discussion on the PT PPA Company Work Plan and Budget (RKAP) for 2024 and Other matters.	Marwanto Harjowiryo. Diah Triana Royza Fauzi Iko Marita Mustokoweni Jujun Rusmijati.
2.	24 Januari 2024 January 24, 2024	RIS-02/PPA/KA/0124	Pembahasan Rencana Audit Tahunan (<i>annual plan audit</i>) SPI Tahun 2024 dan Revisi Piagam Audit Internal. Discussion on the 2024 SPI Annual Audit Plan and Revision of Internal Audit Charter.	Royza Fauzi Iko Marita Mustokoweni (online) Muhammad Reza Maulana Erwin Widyatmo Elsa Andriani
3.	26 Februari 2024 February 26, 2024	RIS-03/PPA/KA/0224	Pembahasan Kinerja Keuangan PT PPA Bulan Januari 2024, Membahas Progres Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan PT PPA Tahun Buku 2023 dan Lain- lain Discussion on PT PPA's Financial Performance for January 2024, and Discussion on the Progress of PT PPA's Financial Report Audit for the 2023 Fiscal Year and Other matters.	Marwanto Harjowiryo. Diah Triana Royza Fauzi Iko Marita Mustokoweni Jujun Rusmijati.
4.	27 Maret 2024 March 27, 2024	RIS-04/PPA/KA/0324	Pembahasan Kinerja Laporan Keuangan PT PPA s/d Bulan Februari 2024 dan Lain- lain. Discussion on PT PPA's Financial Report Performance until February 2024 and Other matters.	Marwanto Harjowiryo. Diah Triana Royza Fauzi Iko Marita Mustokoweni Jujun Rusmijati.
5.	26 April 2024 April 26, 2024	RIS-05/PPA/KA/0424	Pembahasan Kinerja Laporan Keuangan PT PPA s/d Bulan Maret 2024 (Triwulan I Tahun 2024) dan Lain- lain Discussion on PT PPA's Financial Report Performance until March 2024 and Other matters.	Marwanto Harjowiryo. Diah Triana Royza Fauzi Iko Marita Mustokoweni Jujun Rusmijati.
6.	27 Mei 2024 May 27, 2024	RIS-06/PPA/KA/0524	Pembahasan Kinerja Laporan Keuangan PT PPA s/d Bulan April 2024 dan Pembahasan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2024 - 2029 PT Perusahaan Pengelola Aset. Discussion on PT PPA's Financial Report Performance until April 2024, and Discussion on PT Perusahaan Pengelola Aset's Long-Term Plan (RJPP) for 2024 - 2029.	Marwanto Harjowiryo. Diah Triana Royza Fauzi Iko Marita Mustokoweni Jujun Rusmijati.
7.	10 Juni 2024 June 10, 2024	RIS-07/PPA/KA/0624	Pembahasan Aktivitas SPI Triwulan II Tahun 2024 dan Hasil Audit KAP atas Laporan Keuangan PT PPA Tahun Buku 2023 Discussion on SPI Activities for QII 2024 and KAP Audit Results on PT PPA's Financial Report for Fiscal Year 2023	Royza Fauzy Iko Marita Mustokoweni Diah Triana Muhammad Reza Maulana Elsa Andriani

Risalah Rapat Minutes of Meetings

No	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Meeting Minutes Number	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants
8.	23 Juni 2024 June 23, 2024	RIS-08/PPA/KA/0624	Pembahasan Kinerja Laporan Keuangan PT PPA s/d Bulan Mei 2024 dan Pembahasan Persiapan RUPS Pengesahan Laporan Keuangan PT PPA TB 2023. Discussion on PT PPA's Financial Report Performance until May 2024, and Discussion on Preparation of GMS for Approval of PT PPA's TB 2023 Financial Report.	Marwanto Harjowiryono. Diah Triana Royza Fauzi Iko Marita Mustokoweni Jujun Rusmijati.
9.	22 Juli 2024 July 22, 2024	RIS-09/PPA/KA/0724	Pembahasan Tindak Lanjut Temuan Audit Eksternal & Internal per TW II Tahun 2024 dan Diskusi Audit Universe Discussion on Follow-up of External & Internal Audit Findings for Q2 2024, and Discussion on Audit Universe	Royza Fauzy Iko Marita Mustokoweni Diah Triana Muhammad Reza Maulana Fajar Setianto Dady Atma Elsa Andrani
10.	29 Juli 2024 July 29, 2024	RIS-10/PPA/KA/0724	Pembahasan Kinerja Laporan Keuangan PT PPA s/d Bulan Juni (Triwulan II Tahun 2024) dan Lain-lain. Discussion on PT PPA's Financial Report Performance until June (QII 2024) and Other matters.	Marwanto Harjowiryono. Diah Triana Royza Fauzi Iko Marita Mustokoweni Jujun Rusmijati.
11.	26 Agustus 2024 August 26, 2024	RIS-11/PPA/KA/0824	Pembahasan Kinerja Laporan Keuangan PT PPA s/d Bulan Juli 2024 dan Lain-lain Discussion on PT PPA's Financial Report Performance until July and Other matters.	Marwanto Harjowiryono. Diah Triana Royza Fauzi Iko Marita Mustokoweni Jujun Rusmijati.
12.	23 September 2024 September 23, 2024	RIS-12/PPA/KA/0924	Pembahasan Kinerja Laporan Keuangan PT PPA s/d Bulan Agustus 2024 dan Lain-lain Discussion on PT PPA's Financial Report Performance until August and Other matters.	Marwanto Harjowiryono. Diah Triana Royza Fauzi Iko Marita Mustokoweni Jujun Rusmijati.
13.	1 Oktober 2024 October 1, 2024	RIS-13/PPA/KA/1024	Pembahasan Progres Program Kerja SPI Tahun 2024, Usulan Audit Universe Tahun 2025, Progress Uji Tuntas dan Audit Laporan Keuangan Internal Discussion on SPI Work Program Progress in 2024, Proposed Audit Universe in 2025, Due Diligence Progress and Internal Financial Report Audit	Royza Fauzy Iko Marita Mustokoweni Jujun Rusmijati Diah Triana Muhammad Reza Maulana Rudiawan Alamsyah Fajar Setianto Dady Atma Priyagi
14.	26 Oktober 2024 October 26, 2024	RIS-14/PPA/KA/1024	Membahas Kinerja Keuangan PT PPA s/d Bulan September 2024 (Triwulan III Tahun 2024), Surat Menteri BUMN Nomor: S-523/MBU/10/2024 tanggal 19 Oktober 2024 perihal Teguran atas Evaluasi Pelaksanaan Audit Tahun Buku 2023 dan Corporate Issues Discussion on PT PPA's Financial Performance until September 2024 (QIII 2024), Minister of SOEs Letter No. S-523/MBU/10/2024 dated October 19, 2024 concerning Reprimand on Evaluation of Audit for Fiscal Year 2023 and Corporate Issues	Marwanto Harjowiryono. Diah Triana Royza Fauzi Iko Marita Mustokoweni Jujun Rusmijati.
15.	12 November 2024 November 12, 2024	RIS-15/PPA/KA/1124	Pembahasan Kebijakan Manajemen Risiko dan Pembahasan Kebijakan Mutu dan Pelayanan. Discussion on Risk Management Policy, and Discussion on Quality and Service Policy.	Marwanto Harjowiryono Diah Triana Royza Fauzy Iko Marita Mustokoweni Erwin Adiyatno Johnny Hasudungan Ragil Utomo Riski Hamonang Arvy Raol Agrie Pratama Prayogo Witjaksomo
16.	13 November 2024 November 13, 2024	RIS-16/PPA/KA/1124	Pembahasan Sistem Pengendalian Intern dan Lain-lain Discussion on Internal Control Systems and Other matters	Marwanto Harjowiryono Diah Triana Royza Fauzy Iko Marita Mustokoweni M. Reza Maulana Rudiawan Noor Aliamsyah Elsa Andriani Prayogo Witjaksomo

Risalah Rapat
Minutes of Meetings

No	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Meeting Minutes Number	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants
17.	13 November 2024 November 13, 2024	RIS-17/PPA/KA/1124	Pembahasan Kebijakan Pengadaan dan Pelaksanaannya dan Lain-lain Discussion on Procurement Policy and Its Implementation and Other matters	Marwanto Harjowiryono Diah Triana Iko Marita Mustokoweni Royza Fauzy Susilo Wibowo Yogi Farhan Elan Adhi Nugroho Prayogo Witjaksono
18.	25 November 2024 November 25, 2024	RIS-18/PPA/KA/1124	Pembahasan Kinerja Laporan Keuangan PT PPA s/d Bulan Oktober 2024 dan Lain-lain Discussion on PT PPA's Financial Report Performance until October 2024 and Other matters	Marwanto Harjowiryono. Diah Triana Royza Fauzi Iko Marita Mustokoweni Jujun Rusmijati.
19.	13 Desember 2024 December 13, 2024	RIS-19/PPA/KA/1224	Pembahasan Kinerja Laporan Keuangan PT PPA s/d Bulan November 2024 dan Lain-lain Discussion on PT PPA's Financial Report Performance until November 2024 and Other matters	Marwanto Harjowiryono. Diah Triana Royza Fauzi Iko Marita Mustokoweni Jujun Rusmijati.

Kebijakan Remunerasi Komite Audit

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Audit Committee Remuneration Policy

Minister of SOEs Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 dated March 24, 2023 concerning Organs and Human Resources of SOEs.

Pelaksanaan Tugas Komite Audit Tahun 2024

Berikut adalah tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh Komite Audit sepanjang tahun 2024, yaitu:

Implementation of Audit Committee Duties in 2023

The duties carried out by the Audit Committee throughout 2024 were as follows:

Sasaran Target	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
Tersedianya hasil evaluasi/kajian atas pelaksanaan tugas-tugas Divisi Satuan Pengawas Intern (SPI): Assurance, Consulting, Pendampingan, dan lainnya, pada rapat bulanan dan hasilnya dilaporkan pada rapat bulanan internal Dewan Komisaris Availability of evaluation/study results on the duties of the Internal Audit Unit (SPI) Division: Assurance, Consulting, Mentoring, and others, at monthly meetings with the results reported at the monthly internal meeting of the Board of Commissioners	Januari – Desember 2024 January – December 2024	Telah melakukan evaluasi/kajian atas pelaksanaan tugas-tugas Divisi Satuan Pengawas Intern (SPI) pada pada rapat bulanan dan hasilnya dilaporkan pada rapat bulanan internal Dewan Komisaris. Conducted an evaluation/study of the Internal Audit Unit (SPI) Division's duties at the monthly meeting and the results were reported at the Board of Commissioners internal monthly meeting.
Tersedianya hasil evaluasi/kajian atas Laporan Bulanan tentang Kinerja Keuangan Konsolidasian dan hasilnya disampaikan pada rapat bulanan internal Dewan Komisaris Availability of evaluation/study results on the Monthly Report on Consolidated Financial Performance and the results reported at the monthly internal meeting of the Board of Commissioners	Januari – Desember 2024 January – December 2024	Telah melakukan telaah/kajian Laporan Kinerja Keuangan Bulanan yang disampaikan Manajemen dan hasil kajian disampaikan pada rapat internal bulanan Komite dengan Dewan Komisaris Conducted a review/study of the Monthly Financial Performance Report submitted by Management and the results of the review presented at the monthly internal meeting of the Committee with the Board of Commissioners
Tersedianya hasil evaluasi/kajian atas Rencana Kerja SPI Tahun 2024 dan pelaksanaannya, termasuk Kebijakan Akuntansi dan kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia Availability of evaluation/study results on the 2024 SPI Work Plan and its implementation, including Accounting Policies and conformity of Financial Reports with Financial Accounting Standards generally accepted in Indonesia	Februari/Maret 2024 February/March 2024	Telah menyiapkan Telaahan atas Rencana Kerja Satuan Pengawasan Intern PT Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2024, tanggal 15 Februari 2024. Prepared a Review of the Work Plan of the 2024 Internal Audit Unit of PT Perusahaan Pengelola Aset, dated February 15, 2024.
Tersedianya hasil evaluasi/kajian atas Laporan Triwulan SPI Tahun 2024 Availability of evaluation/study results on the 2024 SPI Quarterly Report	April, Juli, Oktober 2024 April, July, October 2024	Telah melakukan evaluasi/kajian atas Laporan Triwulan SPI Tahun 2024 disampaikan pada rapat internal bulanan Komite dengan Dewan Komisaris. Conducted an evaluation/study of the 2024 SPI Quarterly Report and presented at the monthly internal meeting of the Committee with the Board of Commissioners.

Sasaran Target	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
Tersedianya hasil evaluasi/kajian atas Laporan Triwulan Manajemen Konsolidasian Tahun 2024 Availability of evaluation/study results on the 2024 Consolidated Management Quarterly Report	April, Juli, Oktober 2024 April, July, October 2024	- Telah melakukan Telaahan terhadap Laporan Manajemen Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2024 PT Perusahaan Pengelola Aset ("PT PPA"), tanggal 25 Mei 2024. - Telah melakukan Telaahan terhadap Laporan Manajemen Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 PT Perusahaan Pengelola Aset ("PT PPA"), tanggal 26 Agustus 2024. - Telah melakukan Telaahan terhadap Laporan Manajemen Sampai Dengan Triwulan III Tahun 2024 PT Perusahaan Pengelola Aset ("PT PPA"), tanggal 28 Oktober 2024. - Conducted a Review of the Management Report Up to QI 2024 of PT Perusahaan Pengelola Aset ("PT PPA"), dated May 25, 2024. - Conducted a Review of the Management Report Up to QII 2024 of PT Perusahaan Pengelola Aset ("PT PPA"), dated August 26, 2024. - Conducted a Review of the Management Report Up to QIII 2024 of PT Perusahaan Pengelola Aset ("PT PPA"), dated October 28, 2024.
Tersedianya hasil evaluasi/kajian atas Kinerja Keuangan Tahun Buku 2023 (Audited) Availability of evaluation/study results on Financial Performance for Fiscal Year 2023 (Audited)	April 2024 April 2024	Telah menyiapkan Telaahan atas Laporan Hasil Evaluasi KAP untuk Audit atas Laporan Keuangan PT PPA Tahun 2023, tanggal 24 Juni 2024. Prepared a Review of the KAP Evaluation Result Report for the Audit of PT PPA's Financial Statements for 2023, dated June 24, 2024.
Tersedianya hasil evaluasi/kajian atas permintaan tanggapan/ persetujuan dari Manajemen kepada Dewan Komisaris, jika diminta oleh Dewan Komisaris Availability of evaluation/study results for requests for response/approval from Management to the Board of Commissioners, if requested by the Board of Commissioners	Segera setelah diterimanya Surat Permintaan Immediately after receipt of the Request Letter	- Menyiapkan Telaahan atas Permohonan Tangkom tentang Penerimaan Fasilitas Kredit Transaksional Borrower Co-Borrower Dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Sebesar Rp300.000.000.000-, tanggal 10 Januari 2024 dan tanggal 13 Februari 2024. - Menyiapkan Telaahan atas Permohonan Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi Sampai Dengan 1 (satu) Tingkat Di Bawah Direksi PT Perusahaan Pengelola Aset, tanggal 25 Februari 2024. - Menyiapkan Telaahan atas Permohonan Tangkom tentang Rencana Kerja dan Anggaran ("RKAP") PT PPA Tahun 2024, tanggal 18 Maret 2024. - Menyapkan Telaahan atas Permohonan Tangkom Pemenuhan Organ Pengelola Risiko sesuai klasifikasi Risiko PT PPA, tanggal 22 Maret 2024. - Menyiapkan Telaahan atas Permohonan Persetujuan Pengangkatan Kepala Divisi Satuan Pengawasan Intern dan Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan/ Sekretaris Perusahaan, tanggal 23 April 2024. - Menyiapkan Telaahan atas Permohonan Tangkom tentang Rencana Penerbitan Obligasi PT Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2024, tanggal 8 Mei 2024 dan 10 Juni 2024. - Menyiapkan Telaahan atas Permohonan Tangkom dan Persetujuan Dewan Komisaris atas Penambahan Biaya Imbalan Jasa KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sehubungan dengan Audit Laporan Keuangan Tahun 2023, tanggal 11 Juni 2024. - Prepared a Review of Tangkom's Application regarding the Acceptance of Borrower Co-Broker Transactional Credit Facilities from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk for Rp300,000,000,000, dated January 10, 2024 and February 13, 2024. - Prepared a Review of the Application for Approval of Changes in Organizational Structure Up to 1 (one) Level Below the Board of Directors of PT Perusahaan Pengelola Aset, dated February 25, 2024. - Prepared a Review of Tangkom's Application regarding the Work Plan and Budget ("RKAP") of PT PPA for 2024, dated March 18, 2024. - Prepared a Review of Tangkom's Application for Fulfillment of Risk Management Organs based on PT PPA's Risk Classification, dated March 22, 2024. - Prepared a Review of the Application for Approval of the Appointment of the Head of the Internal Audit Unit Division and Head of Corporate Secretariat Division/ Corporate Secretary, dated April 23, 2024. - Prepared a Review of Tangkom's Application regarding the Plan for Issuance Bonds of PT Perusahaan Pengelola Aset in 2024, dated May 8, 2024 and June 10, 2024. - Prepared a Review of Tangkom's Application and the Board of Commissioners' Approval of the Additional Fee for KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan's Services in connection with the Audit of the Financial Statements in 2023, dated June 11, 2024.

Sasaran Target	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
Tersedianya hasil evaluasi/kajian atas diperlukan/ tidaknya penyesuaian Piagam Komite Audit Availability of evaluation/study results on whether or not make adjustments to the Audit Committee Charter if necessary	September 2024 September 2024	Telah dilakukan penyesuaian Piagam (<i>Charter</i>) Komite Audit pada bulan November Tahun 2024. The Audit Committee Charter was adjusted in November 2024.
Tersedianya hasil evaluasi/kajian atas Usulan RKAP PT PPA Tahun 2025 Availability of evaluation/study results on PT PPA's 2025 RKAP Proposal	September – Oktober 2024 September – October 2024	Telah menyiapkan masukan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2025 dalam Tanggapan Dewan Komisaris, tanggal 29 November 2024. Prepared input on the Draft Proposed Long-Term Company Plan (RJPP) of PT Perusahaan Pengelola Aset ("PPA") for 2024-2029 for the Board of Commissioners' Response, dated May 30, 2024.
Tersedianya hasil evaluasi/kajian atas Usulan RJPP PT PPA Availability of evaluation/study results on PT PPA's RJPP Proposal	Setelah diterimanya Usulan RJPP After receipt of the RJPP Proposal	Telah menyiapkan masukan atas Rancangan Usulan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT Perusahaan Pengelola Aset ("PPA") Tahun 2024-2029 dalam Tanggapan Dewan Komisaris, tanggal 30 Mei 2024. Prepared input on the Draft Proposed Long-Term Company Plan (RJPP) of PT Perusahaan Pengelola Aset ("PPA") for 2024-2029 for the Board of Commissioners' Response, dated May 30, 2024.
Melakukan Inisiasi dan Pemantauan atas Proses Penunjukan Auditor Eksternal (Kantor Akuntan Publik) untuk pelaksanaan audit tahun buku 2024 dan pemantauan proses penyelesaian pelaksanaan audit Initiating and Monitoring the Process of Appointing an External Auditor (Public Accounting Firm) for the audit for fiscal year 2024 and monitoring the process of completing the audit	Agustus 2024 – Maret 2025 August 2024 – March 2025	1. Telah menyiapkan konsep Surat Permohonan Persetujuan dan Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam rangka Audit Umum Laporan Keuangan Konsolidasian PT Perusahaan Pengelola Aset Tahun Buku 2024, tanggal 14 Agustus 2024. 2. Telah menyiapkan konsep Surat Permohonan Persetujuan dan Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Imbalan Jasa Audit dalam rangka Audit Umum Laporan Keuangan Konsolidasian PT Perusahaan Pengelola Aset dan Entitas Anak Tahun Buku 2024, tanggal 28 Oktober 2024. 3. Menyiapkan Telaahan atas Indikasi Imbal Jasa KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan Tahun 2024, tanggal 25 Oktober 2024. 4. Telah menyiapkan konsep Surat Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Melakukan Audit Atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Perusahaan Pengelola Aset serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Tahun Buku 2024, tanggal 8 November 2024. 5. Telah menyiapkan konsep Surat Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Penetapan Jasa Audit untuk Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian PT Perusahaan Pengelola Aset serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Tahun Buku 2024. 6. Telah mengikuti <i>Kick of Meeting</i> KAP Tahun Buku 2024 dengan Holding PT Danareksa (Persero), tanggal 9 Desember 2024. 7. Telah mengikuti <i>Kick of Meeting</i> KAP PT PPA Tahun Buku 2024, tanggal 18 Desember 2024. 1. Prepared a draft of the Application Letter for Approval and Determination of Public Accounting Firm (KAP) for the General Audit of the Consolidated Financial Statements of PT Perusahaan Pengelola Aset for the Fiscal Year 2024, dated August 14, 2024. 2. Prepared a draft of the Application Letter for Approval and Determination of Public Accounting Firm (KAP) and Audit Service Fee for the General Audit of the Consolidated Financial Statements of PT Perusahaan Pengelola Aset and Subsidiaries for the Fiscal Year 2024, dated October 28, 2024. 3. Prepared a Review of the Indication of Fees for KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar and Rekan for the Fiscal Year 2024, dated October 25, 2024. 4. Prepared a draft of the Appointment Letter of Public Accounting Firm (KAP) to Conduct an Audit of the Consolidated Financial Statements of PT Perusahaan Pengelola Aset, and the Financial Statements and Implementation of the Micro and Small Business Funding Program (UMK) for the Fiscal Year 2024, dated November 8, 2024. 5. Prepared the concept of the Letter of Appointment of Public Accounting Firm (KAP) and Determination of Audit Services for the General Audit of the Consolidated Financial Statements of PT Perusahaan Pengelola Aset and the Financial Statements and Implementation of the Micro and Small Business Funding Program (UMK) for the 2024 Fiscal Year. 6. Attended the KAP Kick of Meeting for the 2024 Fiscal Year with Holding PT Danareksa (Persero), dated December 9, 2024. 7. Attended PT PPA KAP the Kick of Meeting for the 2024 Fiscal Year, dated December 18, 2024.

Sasaran Target	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
Tercapainya kehadiran dalam rapat Internal dengan Dewan Komisaris Achieving attendance at Board of Commissioners internal meetings	Januari – Desember 2024, minimal 1 kali/bulan January – December 2024, minimum 1 time/ month	Telah mengikuti Rapat internal bulanan selama Tahun 2024 sebanyak 12 (dua belas) kali. Attended 12 (twelve) monthly internal meetings during 2024.
Tercapainya kehadiran dalam rapat Internal Organ Dewan Komisaris (Komite Audit, KPR&GCG, KNR) Achieving attendance at Board of Commissioners Internal Organ meetings (Audit Committee, KPR&GCG, KNR)	Januari – Desember 2024, minimal 1 kali/bulan January – December 2024, minimum 1 time/ month	Telah mengikuti Rapat Internal Organ Dewan Komisaris bulanan selama Tahun 2024 sebanyak 12 (dua belas) kali. Attended 12 (twelve) monthly Board of Commissioners' Internal Meetings during 2024.
Tercapainya kehadiran dalam rapat Gabungan BoD – BoC, jika diperlukan Achieving attendance at Joint BoD – BoC meetings, if necessary	Januari – Desember 2024, minimal 1 kali/bulan January – December 2024, minimum 1 time/ month	- Telah mengikuti Rapat Gabungan BoD – BoC bulanan selama Triwulan III Tahun 2024. - Telah mengikuti Rapat RUPS RKAP Tahun 2024, tanggal 30 Januari 2024. - Telah mengikuti Rapat RUPS Tahunan Tahun Buku 2023, tanggal 12 Agustus 2024. - Attended the monthly Joint BoD – BoC Meeting during QIII 2024. - Attended the 2024 RKAP GMS Meeting, dated January 30, 2024. - Attended the 2023 Fiscal Year Annual GMS Meeting, dated August 12, 2024.
Tercapainya kehadiran dalam rapat dengan Divisi SPI Achieving attendance at meetings with the SPI Division	Januari – Desember 2024, minimal 1 kali/bulan January – December 2024, minimum 1 time/ month	- Telah mengikuti Rapat dengan Divisi SPI Pembahasan Rencana Kerja Audit Tahunan (<i>annual plan audit</i>) SPI Tahun 2024 dan Revisi Piagam Audit Internal Tahun 2024, tanggal 24 Januari 2024. - Telah mengikuti Rapat dengan Divisi SPI Pembahasan Aktivitas SPI Triwulan II Tahun 2024 dan Hasil Audit KAP atas Laporan Keuangan PT PPA Tahun Buku 2023, tanggal 10 Juni 2024. - Telah mengikuti Rapat dengan Divisi SPI Pembahasan Tindak Lanjut Temuan Audit Eksternal & Internal per TW II Tahun 2024 dan Diskusi Audit Universe, tanggal 22 Juli 2024. - Telah mengikuti Rapat dengan Divisi SPI Pembahasan Progres Program Kerja SPI Tahun 2024, Usulan Audit Universe Tahun 2025, Progress Uji Tuntas dan Audit Laporan Keuangan Internal, tanggal 1 Oktober 2024. - Telah mengikuti Rapat dengan Dewan Komisaris dan Divisi SPI Pembahasan Sistem Pengendalian Internal dan Lain-lain, tanggal 13 November 2024 - Attended a meeting with the SPI Division to discuss the SPI Annual Audit Work Plan for 2024 and the Revision of the Internal Audit Charter for 2024, dated January 24, 2024. - Attended a meeting with the SPI Division to discuss SPI Activities for the QII 2024 and the KAP Audit Results of on the Financial Statements of PT PPA for the 2023 Fiscal Year, dated June 10, 2024. - Attended a meeting with the SPI Division to discuss the Follow-up to External & Internal Audit Findings for QII 2024 and the Audit Universe Discussion, dated July 22, 2024. - Attended a meeting with the SPI Division to discuss the Progress of the SPI Work Program for 2024, the Proposal for the Audit Universe for 2025, the Progress of Due Diligence and the Audit of the Intern Financial Statements, dated October 1, 2024. - Attended a meeting with the Board of Commissioners and the SPI Division to discuss the Intern Control System and Other matters, November 13, 2024

Sasaran Target	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
Tercapainya kehadiran dalam rapat dengan Sekretariat Perusahaan dan Divisi Manajemen, jika diperlukan Achieving attendance at meetings with the Company Secretariat and Management Division, if necessary	Atas permintaan dari Sekretariat Perusahaan Upon request from the Company Secretariat	1. Telah mengikuti Rapat dengan Manajemen dan KAP RSM Indonesia Pembahasan Progress Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang berakhir pada 31 Desember 2023. 2. Telah mengikuti Rapat dengan Manajemen Pembahasan Laporan Keuangan Bulan April 2024 dan Lain-lain, tanggal 28 Mei 2024. 3. Telah mengikuti Rapat dengan Manajemen Pembahasan Laporan Keuangan Konsolidasian, ALMA dan KRI per 31 Agustus 2024, tanggal 20 September 2024. 4. Telah mengikuti Rapat dengan Manajemen Pembahasan Hasil Penilaian <i>Risk Maturity Index</i> (RMI) PT PPA Tahun 2023, tanggal 2 Oktober 2024. 5. Telah mengikuti Rapat dengan Manajemen Pembahasan Pemaparan Balasan Surat Danareksa terkait Laporan Manajemen TW II Tahun 2024, Materi Kinerja keuangan TW II dan Materi Mid-Year, tanggal 8 Oktober 2024. 6. Telah mengikuti Rapat dengan Manajemen Pembahasan Preliminary Materi Ragab September 2024, tanggal 24 Oktober 2024. 7. Telah mengikuti Rapat dengan Manajemen Pembahasan Kebijakan Manajemen Risiko dan Pembahasan Kebijakan Mutu dan Pelayanan, tanggal 12 November 2024. 8. Telah mengikuti Rapat dengan Manajemen Pembahasan Kebijakan Pengadaan dan Pelaksanaannya, tanggal 13 November 2024. 9. Telah mengikuti Rapat dengan Manajemen Pembahasan Terkait Permohonan Tanggapan Dekom terkait Obligasi, tanggal 18 Desember 2024.
Pelaporan kegiatan Komite Audit (berkala) Reporting Audit Committee activity (periodic)	Januari, April, Juli, Oktober 2024 January, April, July, October 2024	1. Telah menyusun Laporan Kegiatan Komite Audit Tahun 2023, tanggal 29 Januari 2024. 2. Telah menyusun Laporan Kegiatan Komite Audit Triwulan I tahun 2024, tanggal 29 April 2024. 3. Telah menyusun Laporan Kegiatan Komite Audit Triwulan II tahun 2024, tanggal 29 Juli 2024. 4. Telah menyusun Laporan Kegiatan Komite Audit Triwulan III tahun 2024, tanggal 25 Oktober 2024

Sasaran Target	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
Peningkatan kompetensi melalui keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, sharing session terkait dengan audit Increasing competency through participation in training, seminars, sharing sessions related to audits	Minimal 3 (tiga) kali dalam setahun Minimum 3 (three) times a year	1. IPAF Training Seminar yang diselenggarakan oleh IPAF tanggal 23 April 2024. 2. GRC Summit Seminar 2024 yang diselenggarakan oleh CRMS Indonesia tanggal 23 Agustus 2024. 3. <i>Business Continuity Management</i> (BCM) yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan (PPA&K) selama 21 (dua puluh satu) jam, tanggal 4 s.d 6 November 2024. 4. <i>Risk Beyond International Conference on Enterprise Risk Management</i> 2024 yang diselenggarakan oleh ERMA dan IRMAPA selama 16 (enam belas) jam, tanggal 5 s.d 6 Desember 2024. 5. Mengikuti Pelatihan secara online terkait Sertifikasi CAFO (<i>Certified Anti-Fraud Officer</i>) yang diselenggarakan oleh GRC Management selama 21 (dua puluh satu) jam, tanggal 12 s.d 14 Desember 2024 1. IPAF Training Seminar organized by IPAF on April 23, 2024. 2. GRC Summit Seminar 2024 organized by CRMS Indonesia on August 23, 2024. 3. Business Continuity Management (BCM) organized by the Center for Accounting and Finance Development (PPA&K) for 21 (twenty one) hours, from November 4 to 6, 2024. 4. Risk Beyond International Conference on Enterprise Risk Management 2024 organized by ERMA and IRMAPA for 16 (sixteen) hours, from December 5 to 6, 2024. 5. Attended online training related to CAFO (Certified Anti-Fraud Officer) Certification organized by GRC Management for 21 (twenty one) hours, from December 12 to 14, 2024
Tercapainya pelaksanaan kunjungan kerja Working Visit Achievements	Maret, Juli, November 2024 March, July, November 2024	1. PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) tanggal 20 Mei 2024, Bogor-Jawa Barat. 2. PT Indosat Tbk tanggal 29 Agustus 2024, Jakarta. 3. PT Socfindo Indonesia, tanggal 25-27 September 2024, Medan, Sumatera Utara. 1. PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) on May 20, 2024, Bogor-West Java. 2. PT Indosat Tbk on August 29, 2024, Jakarta. 3. PT Socfindo Indonesia, from September 25-27, 2024, Medan, North Sumatra.

Komite Pemantau Risiko dan GCG

Risk and GCG Monitoring Committee

Komite Pemantau Risiko dan GCG dibentuk oleh Dewan Komisaris sesuai Peraturan Dewan Komisaris No. PER-01/KOM/PPA/VI/2011 tentang Komite Pemantau Risiko dan GCG PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) dan Peraturan Menteri BUMN Nomor:PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 juncto Nomor: PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 juncto Nomor: PER-14/MBU/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021.

PEDOMAN KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG

Komite Pemantau Risiko dan GCG Perseroan telah memiliki pedoman kerja yang tertuang dalam Piagam Komite Pemantau Risiko dan GCG, yang mengacu pada Peraturan Dewan Komisaris Nomor: PER-03/KOM/PPA/XI/2024 tanggal 29 November 2024 tentang Piagam (Charter) Komite Pemantau Risiko dan Good Corporate Governance (GCG) PT Perusahaan Pengelola Aset.

Isi piagam tersebut meliputi berbagai aspek, seperti keanggotaan, tanggung jawab dan fungsi, masa jabatan, kriteria anggota, program kerja dan alokasi anggaran, jadwal rapat komite, pelaporan, akses serta kerahasiaan informasi, evaluasi kinerja komite, dan kompensasi untuk anggota Komite Pemantauan Risiko dan GCG. Piagam Komite secara berkala ditinjau ulang untuk memastikan pedoman tersebut tetap sesuai dengan kebutuhan Perseroan, peraturan atau regulasi yang berlaku, serta relevan dengan kondisi terkini Perseroan.

PERSYARATAN KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG

Setiap anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG diwajibkan memenuhi sejumlah kriteria yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Mempunyai kemampuan profesional di bidang hukum, manajemen risiko dan Tata Kelola Perseroan;
2. Tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan Conflict of Interest ataupun dampak negatif;
3. Mampu berkomunikasi secara efektif terutama dalam hal melihat berbagai permasalahan dan dapat memberikan saran-saran yang konstruktif; dan
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.

Pengangkatan dan Pemberhentian

Berdasarkan ketentuan dalam Piagam Komite Pemantau Risiko dan GCG, proses pengangkatan maupun pemberhentian anggota komite dilakukan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Seleksi anggota komite dilaksanakan melalui proses evaluasi yang mengacu pada peraturan yang berlaku dengan tujuan memastikan anggota yang terpilih mampu menjalankan tugasnya secara optimal. Adapun kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja yang diharapkan sebagai berikut:

1. Komite Pemantau Risiko dan GCG Perseroan memiliki kualifikasi pendidikan dan pengalaman kerja yang memadai dalam

The Risk and GCG Monitoring Committee was established based on Board of Commissioners Regulation No. PER-01/ KOM/PPA/ VI/2011 concerning The Risk and GCG Monitoring Committee in PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero), and the Minister of SOEs Regulation No PER12/MBU/2012 dated August 24, 2012 juncto No PER-06/MBU/04/2021 dated April 13, 2021 juncto No: PER-14/ MBU/10/2021 dated October 29, 2021

RISK AND GCG MONITORING COMMITTEE CHARTER

The Company's Risk and GCG Monitoring Committee work guidelines are contained in the Risk and GCG Monitoring Committee Charter, which refers to the Board of Commissioners Regulation No. PER-03/KOM/PPA/XI/2024 dated November 29, 2024 concerning the Risk and GCG Monitoring Committee Charter of PT Perusahaan Pengelola Aset.

This charter covers the aspects of membership, responsibilities and functions, term of office, membership criteria, work programs and budget allocation, committee meeting schedules, reporting, access and confidentiality of information, committee performance evaluation, and remuneration for members of the Risk and GCG Monitoring Committee. The Committee Charter is regularly reviewed to ensure the guidelines remain in accordance with the Company's needs, applicable rules or regulations, and are relevant to the Company's current conditions.

RISK AND GCG MONITORING COMMITTEE REQUIREMENTS

Each member of the Risk and GCG Monitoring Committee must meet the following criteria:

1. Have professional skills in the legal, risk management and Corporate Governance fields;
2. Have no personal interests or relationships that could cause a Conflict of Interest or negative impact;
3. Have the ability to communicate effectively, especially in terms of analyzing problems, and being able to provide constructive suggestions; and
4. Can provide sufficient time to complete the duties.

Appointment and Dismissal

Based on the Risk and GCG Monitoring Committee Charter provisions, the appointment and dismissal of the committee members is carried out by the Board of Commissioners and reported to the GMS. The appointment of committee members is carried out through an evaluation process in accordance with applicable regulations to ensure selected members can carry out their duties optimally. The educational qualifications and work experience needed are as follows:

1. The Company's Risk and GCG Monitoring Committee has adequate educational qualifications and work experience to

mendukung pelaksanaan tugas sebagai Komite Pemantau Risiko dan GCG. Profil Anggota Komite dapat dilihat dalam bagian Profil Komite Pemantau Risiko dan GCG;

2. Proses rekrutmen Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan kompetensi, keahlian dan integritas dan kemampuan bekerja sama;
3. Dewan Komisaris melakukan wawancara untuk menggali lebih dalam calon anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG. Selanjutnya, Dewan Komisaris melakukan rapat untuk menentukan calon anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG terpilih. Selanjutnya, penetapan dan pengangkatan calon anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG dilakukan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris;
4. Seluruh Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG Perseroan memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik.

support the implementation of its duties. Committee Member Profiles can be found in the Risk and GCG Monitoring Committee Profile section;

2. The Risk and GCG Monitoring Committee Members recruitment process is carried out by the Board of Commissioners by considering competency, expertise and integrity and the ability to work together;
3. The Board of Commissioners conducts interviews to find out more about the Risk and GCG Monitoring Committee candidates. Then, the Board of Commissioners will hold meetings to determine the candidates for the Risk and GCG Monitoring Committee. Finally, the determination and appointment of members of the Risk and GCG Monitoring Committee is carried out through a Board of Commissioners Decree;
4. All of the Company's Risk and GCG Committee Monitoring members have integrity, competency and a good financial reputation.

KETENTUAN MASA JABATAN

Berdasarkan Piagam (*Charter*) Komite Pemantau Risiko dan GCG, masa jabatan anggota komite yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan maksimal selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk durasi tambahan selama 2 (dua) tahun. Namun, Dewan Komisaris memiliki hak untuk memberhentikan anggota komite kapan saja sesuai kebijakan.

Pemberhentian anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG dapat dilakukan saat masa jabatan telah berakhir atau melalui keputusan Dewan Komisaris, khususnya jika kinerja anggota tidak memenuhi standar yang ditetapkan dan/atau dinilai kurang mampu menjalankan tugasnya. Anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG, masa jabatannya akan berakhir secara otomatis apabila masa tugasnya sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan telah selesai.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Komite Pemantau Risiko dan GCG Tahun 2024

Pada tahun 2024, Komite Pemantau Risiko dan GCG Perseroan terdiri dari 2 (dua) anggota dengan rincian 1 (satu) Ketua Komite yang juga menjabat sebagai Komisaris Perseroan, 1 (satu) anggota lainnya yang berasal dari luar manajemen. Komposisi dan susunan Komite Pemantau Risiko dan GCG sepanjang tahun 2024 sebagai berikut:

TERM OF OFFICE

Based on the Risk and GCG Monitoring Committee Charter, the term of office for committee members who are not members of the Company's Board of Commissioners is set at a maximum of 3 (three) years, and can be extended 1 (one) time for an additional 2 (two) years. However, the Board of Commissioners has the right to dismiss committee members at any time according to policy.

Dismissal of Risk and GCG Monitoring Committee members can occur when the term of office has ended or through a Board of Commissioners decision, especially if the member's performance does not comply with the established standards and/or they are unable to carry out their duties. For the Board of Commissioners Member who serves as Chair of the Risk and GCG Monitoring Committee, their term of office will automatically end when their term of office as a member of the Company's Board of Commissioners ends.

Number, Composition, and Structure of Risk and GCG Monitoring Committee in 2024

In 2024, the Company's Risk and GCG Monitoring Committee consisted of 2 (two) members, with the Chair of the Committee also serving as a Company Commissioner, 1 (one) other member from outside management. The Risk and GCG Monitoring Committee composition and structure throughout 2024 was as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Period Served
Marwanto Harjowiryo	Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG/Komisaris Risk and GCG Monitoring Committee Chair/Commissioner	Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-326/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PPA Nomor: SK-03/KEP.KOM/PPA/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 Ministry of SOEs Decree No. SK-326/MBU/10/2020 dated October 9, 2020. PT PPA Board of Commissioners Decree No. SK-03/KEP.KOM/PPA/I/2024 dated January 2, 2024	9 Oktober 2020 – habis masa periode Jabatan Dewan Komisaris October 9, 2020 – end of the Board of Commissioners term of office	Ke-1 1st
Iko Marita Mustokoweni	Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG/Pihak Independen Risk and GCG Monitoring Committee Member/Independent Party	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 03/KEP. KOM/PPA/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 Board of Commissioners Decree No. 03/KEP. KOM/PPA/I/2024 dated January 2, 2024	2 Januari 2024 – 2 Januari 2026 January 2, 2024 – January 2, 2026	Ke-2 2nd

PROFIL KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG

MARWANTO HARJOWIRYONO

Beliau adalah Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG/Komisaris. Informasi lengkap profil disajikan di bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perseroan dalam Laporan Tahunan ini.

IKO MARITA MUSTOKOWENI

Beliau adalah anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG/Pihak Independen

RISK AND GCG MONITORING COMMITTEE PROFILES

MARWANTO HARJOWIRYONO

Is the Chair of the Risk and GCG Monitoring Committee, and a Commissioner. The complete profile can be found in the Board of Commissioners profile section in the Company Profile chapter in this Annual Report.

IKO MARITA MUSTOKOWENI

Is a member of the Risk and GCG Monitoring Committee, and an Independent Party



Iko Marita Mustokoweni

Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG/Pihak Independen

Menjabat sejak 2 Januari 2024 – 2 Januari 2026 Periode Ke-2

Member of the Risk and GCG Monitoring Committee/Independent Party

Serving from January 2, 2024 – January 2, 2026 2nd Term

Warga Negara Nationality	:	Indonesia Indonesian
Usia Age	:	58 tahun pada tahun buku 2024 58 years old in Fiscal Year 2024
Domisili Domicile	:	Bogor, Jawa Barat Bogor, West Java
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	:	Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor: 03/KEP. KOM/PPA/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 Board of Commissioners Decree No. 03/KEP. KOM/PPA/I/2024 dated January 2, 2024.
Pendidikan Education	:	Sarjana bidang Akuntansi dari Universitas Brawijaya (1989) Bachelor's degree Accountancy from Universitas Brawijaya (1989)
Sertifikasi Profesi Professional Certification	:	Sertifikasi QRGP, LSP MKS-BNSP, 2023 QRGP, LSP MKS-BNSP, 2023 Certification
Pengalaman Kerja Work Experience	:	• Anggota Komite Audit PT PPA (May 2015 – April 2020) • Senior Staf Dewan Komisaris PT PPA (Januari 2006 – April 2015) • Sekretaris Dewan Komisaris PT PPA • Anggota Tim Pemberesan BPPN (April 2004 – Januari 2006) • Wakil Kepala Sekretariat Komite Kebijakan Sektor Keuangan (2002 – Januari 2006) • Kepala Divisi Informasi Kredit PT Bank CIMB Niaga Tbk (November 1999 – Juni 2000) • Member of PT PPA Audit Committee (May 2015 – April 2020) • Senior Staff to the Board of Commissioners of PT PPA (January 2006 – April 2015) • Secretary to the Board of Commissioners of PT PPA • Member of the IBRA Clearing Team (April 2004 – Januari 2006) • Deputy Head of the Financial Sector Policy Committee Secretariat (2002 – Januari 2006) • Head of Credit Information Division of PT Bank CIMB Niaga Tbk (November 1999 – June 2000)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	:	Tidak ada None
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationships	:	Tidak ada None

Independensi Komite Pemantau Risiko dan GCG

Dalam rangka mendukung dan memastikan pelaksanaan persyaratan independensi Komite Pemantau Risiko dan GCG, Surat Pernyataan Independensi telah disusun pada saat pengangkatan anggota komite. Aspek independensi keanggotaan komite dijelaskan secara rinci dalam tabel berikut:

Aspek Independensi Independency Aspect	Marwanto Harjowiryo	Iko Marita Mustokoweni
Memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has financial relationships with the Board of Commissioners and Board of Directors	x	x
Memiliki hubungan kepengurusan di Perseroan, anak Perseroan maupun Perseroan afiliasi Has management relationships in the Company, subsidiaries and affiliated companies	x	x
Memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan Has shares in the Company	x	x
Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG Has a familial relationship with the Commissioners, Directors and/or fellow members of the Risk and GCG Monitoring Committee	x	x
Menjabat sebagai pengurus partai politik dan pejabat Pemerintah Daerah Serves as a political party administrator and Regional Government official	x	x

✓: Memiliki Hubungan
X: Tidak Memiliki Hubungan
✓: Has a Relationship
X: Has no Relationship

Risk and GCG Monitoring Committee Independency

To support and ensure the Risk and GCG Monitoring Committee independency requirements, a Statement of Independency is prepared at the time of appointment. The committee membership independency aspects are as follows:

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE PEMANTAU RISIKO DAN GCG

Mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tanggal 24 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, selain Komite Audit sebagai perangkat wajib Dewan Komisaris, BUMN juga dapat membentuk komite lain sesuai dengan kebutuhan Perseroan. Berdasarkan karakteristik usaha, Dewan Komisaris PT PPA telah membentuk Komite Pemantau Risiko dan GCG. Tugas-tugas komite ini dijabarkan dalam Piagam (*Charter*) Komite Pemantau Risiko dan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai berikut:

1. Melakukan *review* kebijakan dan penerapan Manajemen Risiko yang dijalankan perusahaan serta memberikan rekomendasi peningkatan kinerja penerapan manajemen risiko sesuai ketentuan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik kepada Dewan Komisaris.
2. Melakukan *review* kebijakan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) serta memberikan rekomendasi peningkatan kualitas penerapan GCG yang dijalankan perusahaan serta sesuai ketentuan yang berlaku dan praktik-praktik terbaik kepada Dewan Komisaris.
3. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.
4. Komite PR & GCG mengusulkan Piagam Komite kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan dan disampaikan kepada Direksi untuk didokumentasikan.
5. Tugas-tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris.

Komite Pemantau Risiko dan GCG menjalankan tugasnya secara independen dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Ketua dan Wakil Ketua Komite diangkat dari anggota Dewan Komisaris PT PPA, sedangkan anggota lainnya berasal dari luar Perseroan dengan keahlian yang sesuai untuk mendukung pelaksanaan tugas komite.

RISK AND GCG MONITORING COMMITTEE DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Referring to the Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 dated March 24, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, in addition to the Audit Committee as a mandatory part of the Board of Commissioners, SOEs can also form other committees according to the needs of the Company. Based on the business characteristics, the Board of Commissioners of PT PPA has established a Risk and GCG Monitoring Committee whose duties are stated in the Risk and GCG Monitoring Committee Charter as follows:

1. Review the Company's Risk Management policies and provide recommendations for improving the risk management performance in accordance with prevailing regulations and best practices to the Board of Commissioners.
2. Review the Good Corporate Governance (GCG) policies and provide recommendations for improving the quality of the Company's GCG implementation in accordance with prevailing regulations and best practices to the Board of Commissioners.
3. Identify areas that require the attention of the Board of Commissioners as well as other duties assigned by the Board of Commissioners.
4. Propose a Committee Charter to the Board of Commissioners to be established and submitted to the Board of Directors for documentation.
5. Other duties assigned by the Board of Commissioners.

The Risk Monitoring and GCG Committee carries out its duties independently and is directly responsible to the Board of Commissioners. The Chair and Deputy Chair of the Committee are appointed from members of the PT PPA Board of Commissioners, while other members come from outside the Company if their expertise is in accordance with the needs of carrying out the Committee's duties.

Pembagian Tugas Komite Pemantau Risiko dan GCG

Setiap anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG memiliki tanggung jawab khusus yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan tugas komite, antara lain:

Risk and GCG Monitoring Committee Division of Duties

Each member of the Risk and GCG Monitoring Committee has specific responsibilities that are determined based on the committee's needs and duties, including:

Nama Name	Pembagian Tugas Division of Duties
Marwanto Harjowiryo	Bertanggung jawab untuk menangani bidang Umum Responsible for handling General areas
Iko Marita Mustokoweni	Bertanggung jawab untuk menangani bidang Aspek Teknis, Aspek Administrasi Dan Keuangan Responsible for handling technical, administrative and financial aspects areas

Pengembangan Kompetensi Komite Pemantau Risiko dan GCG

Perseroan telah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kompetensi Komite Pemantau Risiko dan GCG melalui pelatihan dan program pendidikan. Sepanjang tahun 2024, anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG telah mengikuti berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi dengan rincian sebagai berikut:

Risk and GCG Monitoring Committee Competency Development

The Company has instigated a competency development policy to improve the Risk and GCG Monitoring Committee through training and education programs. During 2024, members of the Risk and GCG Monitoring Committee participated in the following training and competency development programs:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Waktu Penyelenggaraan Date	Penyelenggara Organizer
Marwanto Harjowiryo Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG (Chair of the Risk and GCG Monitoring Committee/ Commissioner)	Public Training	Program Pembekalan Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi 4 Banking Risk Management Briefing Program Qualification 4	12, 13 dan 15 Februari 2024. February 12, 13 and 15, 2024.	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Indonesian Banking Development Institute (LPPI)
	Public Training	Penguatan Komitmen Dewan Komisaris Anggota Holding BUMN Danareksa atas RKAP Tahun 2024. Confirmation of the Board of Commissioners of Members of the BUMN Danareksa Holding Commitment on the 2024 RKAP.	16 Februari 2024. February 16, 2024	PT Danareksa (Persero).
	Public Training	Mengawal Penuntasan Pembangunan Jangka Menengah untuk Kesenambungan Pembangunan. Supervising the Completion of Medium-Term Development for Sustainable Development.	22 Mei 2024. May 22, 2024.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Financial and Development Supervisory Agency (BPKP).
	Public Training	GRC Summit Seminar dan Master Class 2024. GRC Summit Seminar and Master Class 2024.	22-23 Agustus 2024. August 22-23, 2024.	CRMS Indonesia.
	Public Training	Risk Governance dan Leadership Master Class Risk Governance and Leadership Master Class.	4 Desember 2024. December 4, 2024.	Enterprise Risk Management Academy (ERMA) & IRMAPA.
	Public Training	Risk Beyond International Conference on Enterprise Risk Management 2024. Risk Beyond International Conference on Enterprise Risk Management 2024.	5-6 Desember 2024 December 5-6, 2024	Enterprise Risk Management Academy (ERMA) & IRMAPA.
	Sertifikasi Certification	Certified Governance Oversight Professional (CGOP)	31 Januari 2024 January 31, 2024	LSP LSPP & BNSP
	Sertifikasi Certification	Qualificaioin 4 Field of Bank Risk Management	17 April 2024 April 17, 2024	LSP LSPP & BNSP

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Waktu Penyelenggaraan Date	Penyelenggara Organizer
Iko Marita Mustokoweni Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG Risk and GCG Monitoring Committee Member	Online	Kick-Off Meeting Profesi Manajemen Risiko Risk Management Profession Kick-Off Meeting	15 Maret 2024 March 15, 2024	IRMAPA
	Public Training	GRC Summit Seminar 2024	23 Agustus 2024 August 23, 2024	CRMS Indonesia
	Public Training	Business Continuity Management (BCM)	4 s.d 6 November 2024 November 4-6, 2024	Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan (PPA&K) Accounting and Finance Development Center (PPA&K)
	Public Training	Risk Beyond International Conference on Enterprise Risk Management 2024	5 s.d 6 Desember 2024. December 5-6, 2024	ERMA dan IRMAPA

Rapat Komite Pemantau Risiko dan GCG

Komite Pemantau Risiko dan GCG mengadakan pertemuan secara rutin sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Piagam Komite Pemantau Risiko dan GCG. Dalam pelaksanaan rapat, Komite Pemantau Risiko dan GCG dapat meminta kehadiran Manajemen Perseroan melalui Divisi Manajemen Risiko untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.

Risk and GCG Monitoring Committee Meetings

The Risk and GCG Monitoring Committee holds regular meetings in accordance with the provisions in the Risk and GCG Monitoring Committee Charter. In the meetings, the Risk Monitoring and GCG Committee may invite Company Management through the Risk Management Division to provide any necessary information.

Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Meeting Frequency and Attendance

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Number Attended	Persentase Kehadiran Percentage Attended
Marwanto Harjowiryono	Ketua Komite Pemantau Risiko dan GCG/Komisaris Risk Monitoring and GCG Committee Chair/Commissioner	15	15	100%
Iko Marita Mustokoweni	Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG Risk Monitoring and GCG Committee Member	17	17	100%

Risalah Rapat Minutes of Meetings

No	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Meeting Minutes Number	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants
1.	19 Januari 2024 January 19, 2024	RIS-01/PPA/KPR&GCG/0124	Pembahasan Kinerja Laporan Keuangan s/d Bulan Desember 2023 (unaudited) PT Perusahaan Pengelola Aset Tahun dan Pembahas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT PPA Tahun 2024 dan Lain- lain. Discussion on the Annual Financial Report Performance until December 2023 (unaudited) of PT Perusahaan Pengelola Aset, and Discussion on the PT PPA Company Work Plan and Budget (RKAP) for 2024 and Other matters.	Marwanto Harjowiryono Iko Marita Mustokoweni Royza Fauzi Jujun Rusmijati. Diah Triana
2.	26 Februari 2024 February 26, 2024	RIS-02/PPA/KPR&GCG/0224	Pembahasan Kinerja Keuangan PT PPA Bulan Januari 2024, Membahas Progres Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan PT PPA Tahun Buku 2023 dan Lain- lain. Discussion on PT PPA's Financial Performance for January 2024, and Discussion on the Progress of PT PPA's Financial Report Audit for the 2023 Fiscal Year and Other matters.	Marwanto Harjowiryono. Iko Marita Mustokoweni Royza Fauzi Jujun Rusmijati. Diah Triana

Risalah Rapat
Minutes of Meetings

No	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Meeting Minutes Number	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants
3.	27 Maret 2024 March 27, 2024	RIS-03/PPA/KPR&GCG/0324	Pembahasan Kinerja Laporan Keuangan PT PPA s/d Bulan Februari 2024 dan Lain- lain. Discussion on PT PPA's Financial Report Performance until February 2024 and Other matters.	Marwanto Harjowiryono. Iko Marita Mustokoweni Royza Fauzi Jujun Rusmijati. Diah Triana
3.	22 April 2024 April 22, 2024	RIS-04/PPA/KPR&GCG/0424	Pembahasan Strategi Risiko PT PPA dan Lain-lain Discussion on PT PPA Risk Strategy and Other matters	Iko Marita Mustokoweni Diah Triana Jujun Rusmijati Susilo Wibowo Ragil Utomo Arvy Raoul Yeti Nurmayati Prayogo Witjaksono
4.	26 April 2024 April 26, 2024	RIS-05/PPA/KPR&GCG/0424	Pembahasan Kinerja Laporan Keuangan PT PPA s/d Bulan Maret 2024 (Triwulan I Tahun 2024) dan Lain- lain Discussion on PT PPA's Financial Report Performance until March 2024 and Other matters.	Marwanto Harjowiryono. Iko Marita Mustokoweni Royza Fauzi Jujun Rusmijati. Diah Triana
5.	27 Mei 2024 May 27, 2024	RIS-06/PPA/KA/0524	Pembahasan Kinerja Laporan Keuangan PT PPA s/d Bulan April 2024 dan Pembahasan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2024 – 2029 PT Perusahaan Pengelola Aset. Discussion on PT PPA's Financial Report Performance until April 2024, and Discussion on PT Perusahaan Pengelola Aset's Long-Term Plan (RJPP) for 2024 - 2029.	Marwanto Harjowiryono. Iko Marita Mustokoweni Royza Fauzi Jujun Rusmijati. Diah Triana
6.	23 Juni 2024 June 23, 2024	RIS-07/PPA/KPR&GCG/0624	Pembahasan Kinerja Laporan Keuangan PT PPA s/d Bulan Mei 2024 dan Pembahasan Persiapan RUPS Pengesahan Laporan Keuangan PT PPA TB 2023. Discussion on PT PPA's Financial Report Performance until May 2024, and Discussion on Preparation of GMS for Approval of PT PPA's TB 2023 Financial Report.	Marwanto Harjowiryono. Iko Marita Mustokoweni Royza Fauzi Jujun Rusmijati. Diah Triana
7.	29 Juli 2024 July 29, 2024	RIS-07/PPA/KPR&GCG/0724	Pembahasan Kinerja Laporan Keuangan PT PPA s/d Bulan Juni (Triwulan II Tahun 2024) dan Lain- lain. Discussion on PT PPA's Financial Report Performance until June (QII 2024) and Other matters.	Marwanto Harjowiryono. Iko Marita Mustokoweni Royza Fauzi Jujun Rusmijati. Diah Triana
8.	19 Agustus 2024 August 19, 2024	RIS-08/PPA/KPR&GCG/0824	Pembahasan Persiapan Wawancara Risk Manurity Index (RMI) PT PPA Tahun 2023 Discussion on Preparation for PT PPA Risk Maturity Index (RMI) Interview in 2023	Royza Fauzy Iko Marita Mustokoweni Jujun Rusmijati Diah Triana Erwin Adiyatno Susilo Wibowo Ragil Yeti N. Hadi Wijaya Riski H Prayogo Witjaksono
9.	26 Agustus 2024 August 26, 2024	RIS-09/PPA/KPR&GCG/0824	Pembahasan Kinerja Laporan Keuangan PT PPA s/d Bulan Juli 2024 dan Lain-lain Discussion on PT PPA's Financial Report Performance until July and Other matters.	Marwanto Harjowiryono. Iko Marita Mustokoweni Royza Fauzi Jujun Rusmijati. Diah Triana
10.	23 September 2024 September 23, 2024	RIS-10/PPA/KPR&GCG/0924	Pembahasan Kinerja Laporan Keuangan PT PPA s/d Bulan Agustus 2024 dan Lain-lain Discussion on PT PPA's Financial Report Performance until August and Other matters.	Marwanto Harjowiryono. Iko Marita Mustokoweni Royza Fauzi Jujun Rusmijati. Diah Triana
11.	2 Oktober 2024 October 2, 2024	RIS-11/PPA/KPR&GCG/1024	Pembahasan Hasil Penilaian Risk Maturity Index (RMI) PT PPA Tahun 2023 Discussion on PT PPA Risk Maturity Index (RMI) Assessment Results in 2023	Iko Marita Mustokoweni Royza Fauzy Diah Triana Erwin Adiyatno Prayogo Witjaksono

Risalah Rapat Minutes of Meetings

No	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Meeting Minutes Number	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants
12.	26 Oktober 2024 October 26, 2024	RIS-12/PPA/KPR&GCG/1024	Membahas Kinerja Keuangan PT PPA s/d Bulan September 2024 (Triwulan III Tahun 2024), Surat Menteri BUMN Nomor: S-523/MBU/10/2024 tanggal 19 Oktober 2024 perihal Teguran atas Evaluasi Pelaksanaan Audit Tahun Buku 2023 dan Corporate Issues. Discussion on PT PPA's Financial Performance until September 2024 (QIII 2024), Minister of SOEs Letter No. S-523/MBU/10/2024 dated October 19, 2024 concerning Reprimand on Evaluation of Audit for Fiscal Year 2023 and Corporate Issues	Marwanto Harjowiryono. Iko Marita Mustokoweni Royza Fauzi Jujun Rusmijati. Diah Triana
13.	12 November 2024 November 12, 2024	RIS-13/PPA/KPR&GCG/1124	Pembahasan Kebijakan Manajemen Risiko dan Pembahasan Kebijakan Mutu dan Pelayanan Discussion on Risk Management Policy, and Discussion on Quality and Service Policy.	Marwanto Harjowiryono Iko Marita Mustokoweni Royza Fauzi Diah Triana Erwin Adiyatno Johny Hasudungan Ragil Utomo Riski Hamonang Arvy Raol Agrie Pratama Prayogo Witjaksono
14.	13 November 2024 November 13, 2024	RIS-14/PPA/KPR&GCG/1124	Pembahasan Sistem Pengendalian Intern dan Lain-lain Discussion on Internal Control Systems and Other matters	Marwanto Harjowiryono Iko Marita Mustokoweni Royza Fauzi Diah Triana M. Reza Maulana Rudiwan Noor Aliamsyah Elsa Andriani Prayogo Witjaksono
15.	13 November 2024 November 13, 2024	RIS-15/PPA/KPR&GCG/1124	Pembahasan Kebijakan Pengadaan dan Pelaksanaannya dan Lain-lain Discussion on Procurement Policy and Its Implementation and Other matters	Marwanto Harjowiryono Diah Triana Iko Marita Mustokoweni Royza Fauzi Susilo Wibowo Yogi Farhan Elan Adhi Nugroho Prayogo Witjaksono
16.	25 November 2024 November 25, 2024	RIS-16/PPA/KPR&GCG/1124	Pembahasan Kinerja Laporan Keuangan PT PPA s/d Bulan Oktober 2024 dan Lain-lain Discussion on PT PPA's Financial Report Performance until October 2024 and Other matters	Marwanto Harjowiryono. Iko Marita Mustokoweni Royza Fauzi Jujun Rusmijati. Diah Triana
17.	13 Desember 2024 December 13, 2024	RIS-17/PPA/KPR&GCG/1224	Pembahasan Kinerja Laporan Keuangan PT PPA s/d Bulan November 2024 dan Lain-lain Discussion on PT PPA's Financial Report Performance until November 2024 and Other matters	Marwanto Harjowiryono. Iko Marita Mustokoweni Royza Fauzi Jujun Rusmijati. Diah Triana

Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Risiko dan GCG Tahun 2024

Berikut adalah tugas-tugas yang telah dilaksanakan oleh Komite Pemantau Risiko dan GCG sepanjang tahun 2024, yaitu:

Implementation of the Risk and GCG Monitoring Committee Duties in 2024

In 2024, the Risk and GCG Monitoring Committee carried out the following duties and activities:

Sasaran Target	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
Tersedianya hasil evaluasi atas Laporan Keuangan Konsolidasian Bulanan khusus mengenai pengelolaan risiko Availability of evaluation results on the Monthly Consolidated Financial Report specifically for risk management	Setiap Bulan selama Tahun 2024 Every Month during 2024	- Memantau perkembangan penerapan manajemen risiko PT PPA dengan melihat risiko-risiko yang bernilai tinggi (<i>top risks</i>). Hasil pemantauan tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris di dalam rapat internal Dewan Komisaris. - Melakukan evaluasi atas <i>Key Risk Indicator</i> ("KRI") yang disampaikan di dalam bahan rapat Dewan Komisaris dan menyampaikan hasilnya di dalam rapat internal Komite dengan Dewan Komisaris setiap bulan 1) Monitored the development of PT PPA's risk management by looking at top risks. The monitoring results were reported to the Board of Commissioners in the Board of Commissioners' internal meetings. 2) Evaluated the Key Risk Indicators ("KRI") presented in the Board of Commissioners' meeting materials, and presented the results in the Committee's internal meeting with the Board of Commissioners every month
Tersedianya hasil evaluasi atas Kinerja Keuangan Tahun 2023 (Audited) khusus mengenai pengelolaan risiko dan GCG Availability of evaluation results of 2023 Financial Performance (Audited) specifically for risk management and GCG	Satu tahun sekali diperkirakan bulan April 2024 Once a year, estimated will be in April 2024	Telah menyiapkan Telaahan atas Laporan Hasil Evaluasi KAP untuk Audit atas Laporan Keuangan PT PPA Tahun 2023, tanggal 24 Juni 2024. Prepared a Review of the KAP Evaluation Result Report for the Audit of PT PPA's Financial Statements for 2023, dated June 24, 2024.
Tersedianya hasil evaluasi atas Laporan Triwulanan Manajemen Konsolidasian khusus mengenai pengelolaan risiko. Availability of evaluation results on the Consolidated Management Quarterly Report specifically for risk management	April, Juli, Oktober 2024 April, July, October 2024	Telah melakukan evaluasi/kajian atas Laporan Manajemen Triwulan I, II, dan III Tahun 2024. Conducted an evaluation/study of the Management Reports for QI, II, and III in 2024.
Tersedianya hasil evaluasi atas Laporan Triwulan Monitoring dan Review Manajemen Risiko Availability of evaluation results on the Quarterly Monitoring and Risk Management Review Reports	Mei, Agustus, November 2024 May, August, November 2024	- Menjadi bagian dari telaahan atas Laporan Manajemen Triwulan I Tahun 2024, tanggal 25 Mei 2024. - Menjadi bagian dari telaahan atas Laporan Manajemen Triwulan II Tahun 2024, tanggal 26 Agustus 2024. - Menjadi bagian dari telaahan atas Laporan Manajemen Triwulan III Tahun 2024, tanggal 28 Oktober 2024 - As part of the review of the Management Reports for QI 2024, dated May 25, 2024. - As part of the review of the Management Reports for QII 2024, dated August 26, 2024. - As part of the review of the Management Reports for QIII 2024, dated October 28, 2024
Tersedianya hasil evaluasi atas Laporan Manajemen Risiko Perusahaan (tahunan). Availability of evaluation results on the Company's Risk Management Report (annual).	Maret Tahun 2024 March 2024	Menjadi bagian dari telaahan atas Laporan manajemen Tahunan. As part of the review of the Annual Management Report.
Tersedianya hasil evaluasi atas RJPP PT PPA Availability of evaluation results on PT PPA's RJPP	Segera setelah disampaikan Manajemen Immediately after being submitted by Management	Telah menyiapkan masukan atas Rancangan Usulan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT Perusahaan Pengelola Aset ("PPA") Tahun 2024-2029 dalam Tanggapan Dewan Komisaris, tanggal 30 Mei 2024 Prepared input on the Draft Proposed Long-Term Company Plan (RJPP) of PT Perusahaan Pengelola Aset ("PPA") for 2024-2029 in the Board of Commissioners Response, dated May 30, 2024
Tersedianya hasil evaluasi atas RKAP PT PPA Tahun 2025 Availability of evaluation results on PT PPA's 2025 RKAP	September - Oktober 2024 September - October 2024	Telah menyiapkan masukan atas Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2025 dalam Tanggapan Dewan Komisaris, tanggal 29 November 2024. Prepared input on the 2025 Company Work Plan and Budget (RKAP) of PT Perusahaan Pengelola Aset in the Board of Commissioners Response dated November 29, 2024.
Tersedianya hasil evaluasi atas Hasil asesmen tata kelola perusahaan yang baik/ GCG Availability of evaluation results on the results of good corporate governance/GCG assessments	Maret 2024 March 2024	Sesuai Surat Kementerian BUMN Nomor S-52/DKU.MBU/1024 tanggal 15 Oktober 2025 dan Surat Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Nomor S-859/DR/DIRUT/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 dengan menggunakan Indikator penilaian SK -16/S.MBU/2022. Laporan hasil penilaian dan evaluasi asesmen GCG disampaikan kepada RUPS selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2024, dan hasilnya telah disampaikan oleh Manajemen Kepada PT Danareksa melalui surat Nomor LAP-3/PPA/DSPI-DU/1224 tanggal 30 Desember 2024. In accordance with the Ministry of SOEs Letter No. S-52/DKU.MBU/1024 dated October 15, 2025 and the President Director of PT Danareksa (Persero) Letter No. S-859/DR/DIRUT/10/2024 dated October 28, 2024 using the Assessment Indicator SK -16/S.MBU/2022. The report on the assessment and evaluation results of the GCG assessment shall be submitted to the GMS no later than December 31, 2024, and the results were submitted by Management to PT Danareksa through letter No. LAP-3/PPA/DSPI-DU/1224 dated December 30, 2024.
Tersedianya hasil evaluasi atas Piagam Dewan Komisaris Availability of evaluation results on the Board of Commissioners Charter	September 2024 September 2024	Telah dilakukan penyesuaian Piagam (<i>Charter</i>) Dewan Komisaris bulan November Tahun 2024. The Board of Commissioners Charter was adjusted in November 2024.

Sasaran Target	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
Tersedianya hasil evaluasi atas Piagam Komite Pemantau Risiko dan GCG Availability of evaluation results on the Risk and GCG Monitoring Committee Charter	Agustus 2024 August 2024	Telah dilakukan penyesuaian Piagam (<i>Charter</i>) Komite Pemantau Risiko dan GCG bulan November Tahun 2024. The Risk Monitoring and GCG Committee Charter was adjusted in November 2024.
Tersedianya telaahan/kajian atas Kebijakan berkaitan dengan Majememen Risiko Availability of review/study of policies related to risk management	Februari 2024 February 2024	Menyiapkan Telaahan atas Permohonan Tanggapan Dewan Komisaris ("Tangkom") dan Persetujuan Dewan Komisaris atas Strategi Risiko PT PPA Tahun 2024 tanggal 2 April 2024 dan untuk tahun 2025 pada tanggal 2 Mei 2024, serta persetujuan Dewan Komisaris atas Kebijakan Manajemen Risiko melalui surat Nomor: S-27/PPA/KOM/0424 tanggal 4 April 2024, dan Nomor: S-96/PPA/KOM/1124 tanggal 1 November 2024. Prepared the Review of the Request for Response from the Board of Commissioners ("Tangkom") and the Approval of the Board of Commissioners on the Risk Strategy of PT PPA for 2024 dated April 2, 2024 and for 2025 on May 2, 2024, as well as the approval of the Board of Commissioners on the Risk Management Policy through letters No. S-27/PPA/KOM/0424 dated April 4, 2024, and No. S-96/PPA/KOM/1124 dated November 1, 2024.
Tersedianya telaahan/kajian atas Kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun oleh Direksi PT PPA serta menilai konsistensi penerapannya, termasuk yang bertalian dengan etika bisnis dan tanggungjawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) Availability of a comprehensive review/study of the GCG Policy prepared by the PT PPA Board of Directors and assessing the consistency of its implementation, including those related to business ethics and corporate social responsibility.	Maret 2024 March 2024	Menyiapkan Telaahan atas Permohonan Tangkom Pemenuhan Organ Pengelola Risiko sesuai klasifikasi Risiko PT PPA pada tanggal 22 Maret 2024. Prepared the Review of the Request for Tangkom Fulfillment of Risk Management Organs according to PT PPA's Risk Classification on March 22, 2024.
Tersedianya telaahan/kajian atas usulan aksi korporasi	Segera setelah disampaikan oleh Direksi	- Menyiapkan Telaahan atas Permohonan Tangkom tentang Penerimaan Fasilitas Kredit Transaksional Borrower Co-Borrower Dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Sebesar Rp300.000.000.000, tanggal 10 Januari 2024 dan tanggal 13 Februari 2024. - Menyiapkan Telaahan atas Permohonan Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi Sampai Dengan 1 (satu) Tingkat Di Bawah Direksi PT Perusahaan Pengelola Aset, tanggal 25 Februari 2024. - Menyiapkan Telaahan atas Permohonan Tangkom tentang Rencana Kerja dan Anggaran ("RKAP") PT PPA Tahun 2024, tanggal 18 Maret 2024. - Menyiapkan Telaahan atas Permohonan Tangkom Pemenuhan Organ Pengelola Risiko sesuai klasifikasi Risiko PT PPA, tanggal 22 Maret 2024. - Menyiapkan Telaahan atas Permohonan Persetujuan Pengangkatan Kepala Divisi Satuan Pengawasan Intern dan Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan/ Sekretaris Perusahaan, tanggal 23 April 2024. - Menyiapkan Telaahan atas Permohonan Tangkom tentang Rencana Penerbitan Obligasi PT Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2024, tanggal 8 Mei 2024 dan 10 Juni 2024. - Menyiapkan Telaahan atas Permohonan Tangkom dan Persetujuan Dewan Komisaris atas Penambahan Biaya Imbalan Jasa KAP RSM AAJAM sehubungan dengan Audit Laporan Keuangan Tahun 2023, tanggal 11 Juni 2024. - Menyiapkan Telaahan atas Permohonan Tanggapan Tertulis Dewan Komisaris atas Pengusulan Wakil Perseroan untuk Menjadi Calon Anggota Dewan Komisaris pada PT Nindya Beton, tanggal 5 Agustus 2024. - Menyiapkan Telaahan atas Permohonan Persetujuan Anggota Dewan Komisaris PT. PPA Kapital, tanggal 9 Agustus 2024. - Menyiapkan Telaahan atas Penjelasan dan Penyampaian Kembali atas Usulan Perubahan Struktur Organisasi Sampai Dengan 1 (satu) Tingkat Dibawah Direksi PT. Perusahaan Pengelola Aset, tanggal 15 Agustus 2024. - Telaahan atas Permohonan Persetujuan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT PPAF dan Direktur PT PPAK, tanggal 5 Desember 2024

Sasaran Target	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
Availability of research/studies on proposed corporate actions	Immediately after being submitted by the Board of Directors	1. Prepared a Review of Tangkom's Application regarding the Acceptance of Borrower Co-Broker Transactional Credit Facilities from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk for Rp300,000,000,000, dated January 10, 2024 and February 13, 2024. 2. Prepared a Review of the Application for Approval of Changes in Organizational Structure Up to 1 (one) Level Below the Board of Directors of PT Perusahaan Pengelola Aset, dated February 25, 2024. 3. Prepared a Review of Tangkom's Application regarding the Work Plan and Budget ("RKAP") of PT PPA for 2024, dated March 18, 2024. 4. Prepared a Review of Tangkom's Application for Fulfillment of Risk Management Organs according to PT PPA's Risk Classification, dated March 22, 2024. 5. Prepared a Review of the Application for Approval of the Appointment of the Head of the Internal Audit Unit Division and Head of Corporate Secretariat Division/ Corporate Secretary, dated April 23, 2024. 6. Prepared a Review of Tangkom's Application regarding the Plan to Issue Bonds of PT Perusahaan Pengelola Aset in 2024, dated May 8, 2024 and June 10, 2024. 7. Prepared a Review of Tangkom's Application and Board of Commissioners' Approval for the Additional Fee for KAP RSM AAJAM's Service Fee in connection with the Audit of the 2023 Financial Statements, dated June 11, 2024. 8. Prepared a Review of the Request for Written Response from the Board of Commissioners on the Proposal of the Company's Representative to Become a Candidate Member of the Board of Commissioners at PT Nindya Beton, dated August 5, 2024. 9. Prepared a Review of the Request for Approval of Members of the Board of Commissioners of PT. PPA Kapital, dated August 9, 2024. 10. Prepared a Review of the Explanation and Resubmission of the Proposed Changes to the Organizational Structure Up to 1 (one) Level Below the Board of Directors of PT. Perusahaan Pengelola Aset, dated August 15, 2024. 11. Reviewed the Application for Approval of the Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT PPAF and Director of PT PPAK, dated December 5, 2024
Terlaksananya pemantauan atas Rekomendasi hasil <i>assessment</i> (Area of Improvement / Aol) GCG Monitoring of recommendations from GCG assessment results (Area of Improvement/ Aol).	Mei, Agustus, November 2024 May, August, November 2023	Sesuai Surat Kementerian BUMN Nomor S-52/DKU.MBU/1024 tanggal 15 Oktober 2025 dan Surat Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Nomor S-859/DR/DIRUT/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 dengan menggunakan Indikator penilaian SK -16/S.MBU/2022. Laporan hasil penilaian dan evaluasi asesmen GCG disampaikan kepada RUPS selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2024. In accordance with the Ministry of SOEs Letter No. S-52/DKU.MBU/1024 dated October 15, 2025 and the President Director of PT Danareksa (Persero) Letter No. S-859/DR/DIRUT/10/2024 dated October 28, 2024 using the Assessment Indicator SK -16/S.MBU/2022. The report on the results of the GCG assessment and evaluation to be submitted to the GMS no later than December 31, 2024.
Terlaksananya pemantauan dalam rangka memastikan seluruh aktivitas PT PPA selalu berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik / GCG dan beretika bisnis yang sehat Monitoring to ensure all PT PPA activities are always based on the principles of good corporate governance / GCG and sound business ethics	Sepanjang tahun 2024 Throughout 2024	Selama Tahun 2024 Komite Pemantau Risiko & GCG telah melakukan pemantauan dalam rangka memastikan seluruh aktivitas PT PPA selalu berlandaskan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik / GCG dan beretika bisnis yang sehat dengan Telaah/ Kajian Permohonan Tanggapan Dekom. During 2024, the Risk & GCG Monitoring Committee conducted monitoring to ensure all PT PPA activities were always based on the principles of good corporate governance / GCG and healthy business ethics with a Review of the Board of Commissioners' Response Request.
Tersedianya laporan atas kegiatan Komite Pemantau Risiko dan GCG Availability of reports on the Risk and GCG Monitoring Committee activities	Januari, April, Juli, Oktober 2024 January, April, July, October 2023	1. Telah disusun Laporan Kegiatan Komite Pemantau Risiko & GCG Tahun 2023, tanggal 29 Januari 2024. 2. Telah disusun Laporan Kegiatan Komite Pemantau Risiko & GCG Triwulan I Tahun 2024, tanggal 29 April 2024. 3. Telah disusun Laporan Kegiatan Komite Pemantau Risiko & GCG Triwulan II Tahun 2024, tanggal 29 Juli 2024. 4. Telah disusun Laporan Kegiatan Komite Pemantau Risiko & GCG Triwulan III Tahun 2024, tanggal 25 Oktober 2024. 1. The Risk & GCG Monitoring Committee Activity Report for 2023 was prepared on January 29, 2024. 2. The Risk & GCG Monitoring Committee Activity Report for QI 2024 was prepared on April 29, 2024. 3. The Risk & GCG Monitoring Committee Activity Report for QII 2024 was prepared on July 29, 2024. 4. The Risk & GCG Monitoring Committee Activity Report for QIII 2024 was prepared on October 25, 2024.
Tercapainya kehadiran dalam rapat internal Dewan Komisaris Achieving attendance at internal meetings of the Board of Commissioners	Sekurang-kurangnya satu bulan sekali At least once a month	Telah mengikuti seluruh Rapat internal bulanan selama Triwulan Tahun 2024 sebanyak 12 (dua belas) kali. Attended 12 (twelve) monthly internal meetings each Quarter of 2024.

Sasaran Target	Program Kerja Work Program	Realisasi Realization
Tercapainya kehadiran dalam rapat organ Dewan Komisaris Achieving attendance at meetings of the Board of Commissioners	Sekurang-kurangnya satu bulan sekali At least once a month	Telah mengikuti Rapat Internal Organ Dewan Komisaris bulanan selama Tahun 2024 sebanyak 12 (dua belas) kali. Attended 12 (twelve) monthly Internal Meetings of the Board of Commissioners during 2024.
Tercapainya kehadiran dalam rapat berkala dengan manajemen yang membidangi manajemen risiko Achieving attendance at regular meetings with management in charge of risk management	Mei, Agustus, November 2024 May, August, November 2024	- Telah mengikuti Rapat dengan Divisi Manajemen Risiko Pembahasan Strategi Risiko PT PPA dan Lain-lain, tanggal 22 April 2024. - Telah mengikuti Rapat dengan Divisi Manajemen Risiko Pembahasan Top Risiko Perusahaan dan Lain-lain, tanggal 24 Juni 2024. - Telah mengikuti Rapat dengan Divisi Manajemen Risiko Pembahasan Terkait Wawancara Risk Maturity Index (RMI) PT PPA Tahun 2023, tanggal 19 Agustus 2024. - Telah mengikuti Rapat dengan Divisi Manajemen Risiko Pembahasan Hasil Penilaian Risk Maturity Index (RM) PT PPA Tahun 2023, tanggal 2 Oktober 2024. - Telah mengikuti Rapat dengan Dewan Komisaris dan Divisi Manajemen Risiko Pembahasan Kebijakan Manajemen Risiko dan Pembahasan Kebijakan Mutu dan Pelayanan, tanggal 12 November 2024. - Attended a Meeting with the Risk Management Division to Discuss PT PPA's Risk Strategy and Other matters, April 22, 2024. - Attended a Meeting with the Risk Management Division to Discuss the Company's Top Risks and Other matters, June 24, 2024. - Attended a Meeting with the Risk Management Division to Discuss the Risk Maturity Index (RMI) Interview of PT PPA in 2023, August 19, 2024. - Attended a Meeting with the Risk Management Division to Discuss the Results of the Risk Maturity Index (RM) Assessment of PT PPA in 2023, October 2, 2024. - Attended a Meeting with the Board of Commissioners and the Risk Management Division to Discuss the Risk Management Policy and Discuss the Quality and Service Policy, November 12, 2024.
Tercapainya kehadiran rapat berkala dengan Sekretariat Perusahaan tentang Aol GCG Achieving attendance at regular meetings with the Company Secretariat regarding GCG Aol	Februari, Mei, Agustus, November 2024 February, May, August, November 2024	Sesuai Surat Kementerian BUMN Nomor S-52/DKU.MBU/1024 tanggal 15 Oktober 2025 dan Surat Direktur Utama PT Danareksa (Persero) Nomor S-859/DR/DIRUT/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 dengan menggunakan Indikator penilaian SK -16/S.MBU/2022. Laporan hasil penilaian dan evaluasi asesmen GCG disampaikan kepada RUPS selambat-lambatnya pada tanggal 31 Desember 2024. In accordance with the Ministry of SOEs Letter No. S-52/DKU.MBU/1024 dated October 15, 2025, and the President Director of PT Danareksa (Persero) Letter No. S-859/DR/DIRUT/10/2024 dated October 28, 2024 using the Assessment Indicator SK -16/S.MBU/2022. The report on the GCG assessment and evaluation results shall be submitted to the GMS no later than December 31, 2024.
Tercapainya pelaksanaan kunjungan kerja Achievement of working visits	Maret, Juli, November 2024 March, July, November 2023	- PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI) tanggal 20 Mei 2024, Bogor-Jawa Barat. - PT Indosat Tbk tanggal 29 Agustus 2024, Jakarta. - PT Prasadha Pamunah Industrial Waste (PPLI) on May 20, 2024, Bogor-West Java. - PT Indosat Tbk on August 29, 2024, Jakarta.
Terealisasinya peningkatan kompetensi melalui keikutsertaan dalam pelatihan, seminar, sharing session Realization of increased competency through participation in training, seminars, sharing sessions	Sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun sekurang-kurangnya 20 Jam Pelatihan At least 3 (three) times in 1 (one) year	- Telah mengikuti <i>Kick-Off Meeting</i> Profesi Manajemen Risiko yang diselenggarakan oleh IRMAPA tanggal 15 Maret 2024. - GRC Summit Seminar 2024 yang diselenggarakan oleh CRMS Indonesia tanggal 23 Agustus 2024. - Business Continuity Management (BCM) yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan (PPA&K) selama 21 (dua puluh satu) jam, tanggal 4 s.d 6 November 2024. <i>Risk Beyond International Conference on Enterprise Risk Management</i> 2024 yang diselenggarakan oleh ERMA dan IRMAPA selama 16 (enam belas) jam, tanggal 5 s.d 6 Desember 2024. - Attended the Risk Management Profession Kick-Off Meeting organized by IRMAPA on March 15, 2024. - GRC Summit Seminar 2024 organized by CRMS Indonesia on August 23, 2024. - Business Continuity Management (BCM) organized by the Center for Accounting and Finance Development (PPA&K) for 21 (twenty one) hours, from November 4 to 6, 2024. - Risk Beyond International Conference on Enterprise Risk Management 2024 organized by ERMA and IRMAPA for 16 (sixteen) hours, from December 5 to 6, 2024.

Komite Nominasi dan Remunerasi

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

PPA berstatus sebagai emiten karena telah melakukan penawaran umum surat berharga di pasar modal. Oleh karena itu, pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi, sesuai Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi, begitu juga berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER- 12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 juncto Nomor: PER-06/MBU/04/2021 tanggal 13 April 2021 juncto Nomor: PER-14/MBU/10/2021 tanggal 29 Oktober 2021.

PEDOMAN KERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Pedoman kerja Komite Nominasi dan Remunerasi dibentuk melalui Surat keputusan Dewan Komisaris PT PPA No. 04/KEP.KOM/PPA/XI/2024 tanggal 29 November 2024 tentang Piagam Charter Komite Nominasi dan Remunerasi.

Persyaratan Komite Nominasi dan Remunerasi

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi, atau komite dengan nomenklatur lain yang memiliki fungsi serupa, selain Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, diwajibkan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup di bidang nominasi dan remunerasi.
2. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perseroan.
3. Mampu berkomunikasi secara efektif.
4. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya; dan
5. Persyaratan lain yang ditetapkan dalam piagam Komite Nominasi dan Remunerasi atau nomenklatur lain dengan fungsi yang sama, jika diperlukan.

Ketentuan Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite ditetapkan berdasarkan ketentuan berikut:

1. Masa jabatan anggota Komite yang berasal dari unsur Komisaris, Sekretaris Dewan Komisaris, dan pejabat manajerial di bawah Direksi akan berakhir dengan sendirinya apabila masa jabatannya berakhir.
2. Masa jabatan anggota Komite yang berasal dari pihak independen paling lama 5 (lima) tahun, dengan periode jabatan pertama 3 (tiga) tahun, dan periode jabatan kedua 2 (dua) tahun.

PPA is an issuer after conducting a public offering of securities in the capital market. Therefore, the establishment of a Nomination and Remuneration Committee is mandatory, in accordance with OJK Regulation No. 34/POJK.04/2014 concerning the Establishment of the Nomination and Remuneration Committee. Establishment of the Nomination and Remuneration Committee is also based on the Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 juncto No. PER-06/MBU/04/2021 dated April 13, 2021 juncto No. PER-14/MBU/10/2021 dated October 29, 2021.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE WORK GUIDELINES

The Nomination and Remuneration Committee work guidelines were formulated through PT PPA Board of Commissioners Decree No.04/KEP.KOM/PPA/XI/2024 dated November 29, 2024 concerning the Nomination and Remuneration Committee Charter.

Nomination and Remuneration Committee Requirements

Members of the Nomination and Remuneration Committee, or other nomenclature committees with similar functions, other than the Board of Commissioners/Supervisory Board, must fulfill the following criteria:

1. Have good integrity and sufficient knowledge and work experience in the field of nomination and remuneration.
2. Has no personal interests/relationships that could have a negative impact and conflict of interest with the Company.
3. Can communicate effectively.
4. Can provide sufficient time to complete the duties; and
5. Other requirements stipulated in the Nomination and Remuneration Committee charter or other nomenclature with the same function, if necessary.

Term of Office

The term of office of the Committee members is determined based on the following provisions:

1. The term of office of Committee members who are Commissioners, Secretaries to the Board of Commissioners, or managerial officials under the Board of Directors will automatically end when their term of office ends.
2. The term of office of Committee members from independent parties will be a maximum of 5 (five) years, with the first term of office being 3 (three) years, and the second term of office being 2 (two) years.

Pengangkatan dan Pemberhentian Komite Nominasi dan Remunerasi

Proses pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite diatur sesuai dengan ketentuan berikut:

1. Penggantian anggota Komite yang berasal dari pihak independen dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite dimaksud tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya.
2. Dewan Komisaris berhak sewaktu-waktu meninjau kembali keanggotaan Komite atau memberhentikan anggota Komite sebelum masa jabatan berakhir.

Appointment and Dismissal of the Nomination and Remuneration Committee

The Appointment and Dismissal of Committee Members is regulated as follows:

1. Replacement of Committee members from independent parties to be carried out no later than 60 (sixty) days after the Committee member in question can no longer carry out their functions.
2. The Board of Commissioners has the right at any time to review Committee membership or dismiss Committee members before their term of office ends.

Jumlah, Komposisi dan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2024 Number, Composition and Structure of the Nomination and Remuneration Committee in 2024

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office
Marwanto Harjowiryo	Ketua Chair	Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-326/MBU/10/2020 tanggal 9 Oktober 2020 SK Dewan Komisaris PPA No. 11/KEP.KOM/PPA/X/2022 tanggal 25 November 2022 Minister of SOEs Decree No. SK-326/MBU/10/2020 dated October 9, 2020 PPA Board Of Commissioners Decree No. 11/KEP.KOM/PPA/X/2022 dated November 25, 2022	13 Oktober 2020 – habis masa periode Jabatan Dewan Komisaris October 13, 2020 – term of office on the Board of Commissioners expires
Jujun Rusmijati	Anggota Member	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PPA Nomor: 02/KEP.KOM/PPAI/2024 tanggal 2 Januari 2024 PPA Board Of Commissioners Decree No. 02/KEP.KOM/PPAI/2024 dated January 2, 2024	2 Januari 2024 – 2 Januari 2027 (Periode Ke-1) January 2, 2024 – January 2, 2027 (1st Period)

PROFIL KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

MARWANTO HARJOWIRYONO MARWANTO HARJOWIRYONO

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE PROFILES

Informasi lengkap profil Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi disajikan di bagian profil Dewan Komisaris pada bab Profil Perseroan dalam Laporan Tahunan ini.

Complete information on the Chair of the Nomination and Remuneration Committee profile can be found in the Board of Commissioners profile section in the Company Profile chapter in this Annual Report.



Jujun Rusmijati

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Menjabat sejak 2 Januari 2024 – 2 Januari 2027 (Periode Ke-1)

Member of the Nomination and Remuneration Committee

Serving since January 2, 2024 – January 2, 2027 (1st Term)

Warga Negara Nationality	:	Indonesia Indonesian
Usia Age	:	52 tahun pada tahun buku 2024 52 years old in Fiscal Year 2023
Domisili Domicile	:	Cipondoh, Tangerang, Indonesia Cipondoh, Tangerang, Indonesia
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	:	Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PPA Nomor: 02/KEP.KOM/PPAI/2024 tanggal 2 Januari 2024. PT PPA Board of Commissioners Decree No. 02/KEP.KOM/PPAI/2024 dated January 2, 2024.
Pendidikan Education	:	• S1 Psikologi, Universitas Padjajaran (1996) • S2 Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia (2012) • Bachelor's degree in Psychology, Universitas Padjajaran (1996) • Master's degree in Administrative Science, Universitas Indonesia (2012)

Sertifikasi Profesi Professional Certification	:	• Certified Professional Assessor (Agustus 2022) • Organizational Development (September 2017) • Certified Professional Human Resources (Oktober 2010) • Certified Professional Assessor (August 2022) • Organizational Development (September 2017) • Certified Professional Human Resources (October 2010)
Pengalaman Kerja Work Experience	:	• Asesor Sumber Daya Manusia Biro Sumber Daya Manusia, Setjen, Kemenkeu. (Agustus 2022-Sekarang) • Kepala Bagian Analisis dan Evaluasi Jabatan, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Setjen, Kementerian Keuangan (Juli 2021-Agustus 2022) • Kepala Bagian Organisasi II, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Setjen, Kementerian Keuangan (Februari 2016-Juli 2021) • Kepala Bagian Pengembangan SDM, Biro Sumber Daya Manusia, Setjen, Kementerian Keuangan (September 2013-Februari 2016) • Kepala Subbagian Assement Center, Biro Sumber Daya Manusia, Setjen, Kementerian Keuangan (Februari 2011-September 2013) • Kepala Subbagian Mutasi Jabatan Pegawai, Biro Sumber Daya Manusia, Setjen, Kementerian Keuangan (Desember 2007-Februari 2011) • Anggota Sekretariat Tim Reformasi Birokrasi Pusat, Biro Sumber Daya Manusia, Setjen, Kementerian Keuangan (Januari 2007-Desember 2010) • Human Resources Assessor, Human Resources Bureau, Secretariat General, Ministry of Finance. (August 2022-Present) • Head of Job Analysis and Evaluation Section, Bureau of Organization and Administration, Secretariat General, Ministry of Finance (July 2021-August 2022) • Head of Organization Section II, Bureau of Organization and Administration, Secretariat General, Ministry of Finance (February 2016-July 2021) • Head of Human Resources Development Section, Bureau of Human Resources, Secretariat General, Ministry of Finance (September 2013-February 2016) • Head of Assessment Center Subsection, Bureau of Human Resources, Secretariat General, Ministry of Finance (February 2011-September 2013) • Head of Employee Job Transfer Subsection, Bureau of Human Resources, Secretariat General, Ministry of Finance (December 2007-February 2011) • Member of the Secretariat of the Central Bureaucratic Reform Team, Bureau of Human Resources, Secretariat General, Ministry of Finance (January 2007-December 2010)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	:	Merangkap Asesor Sumber Daya Manusia Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan. Human Resources Assessor, Human Resources Bureau, Secretariat General, Ministry of Finance. (August 2022-Present)
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationships	:	Tidak ada None

Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Independensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan berdasarkan sejumlah faktor yang telah dirumuskan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Independency of the Nomination and Remuneration Committee

The Statement of Independency by the Nomination and Remuneration Committee members is determined through several factors, which can be seen in the following table:

Aspek Independensi Independency Aspect	Marwanto Harjowiryo	Jujun Rusmijati
Memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris dan Direksi Has financial relationships with the Board of Commissioners and Board of Directors	x	x
Memiliki hubungan kepengurusan di Perseroan, anak Perseroan maupun Perseroan afiliasi Has management relationships in the Company, subsidiaries and affiliated companies	x	x
Memiliki hubungan kepemilikan saham di Perseroan Has shares in the Company	x	x
Memiliki hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau sesama anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG Has a familial relationship with the Commissioners, Directors and/or fellow members of the Risk and GCG Monitoring Committee	x	x
Menjabat sebagai pengurus partai politik dan pejabat Pemerintah Daerah Serves as a political party administrator and Regional Government official	x	x
√: Memiliki Hubungan X: Tidak Memiliki Hubungan V: Has a Relationship X: Has no Relationship		

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi diuraikan dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

1. KNR bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris.
2. Dalam pelaksanaan tugas maupun dalam pelaporan, KNR bersifat mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.
3. Berkaitan dengan Manajemen Talenta:
 - a. Melakukan tinjauan secara berkala atas sistem Manajemen Talenta serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya.
 - b. Melakukan evaluasi terhadap sistem dan prosedur pengklasifikasian Talenta yang dilakukan oleh Direksi Perusahaan.
 - c. Melakukan validasi dan kalibrasi atas Talenta Terseleksi (selected talent) untuk menghasilkan daftar Talenta Ternominasi (nominated talent) yang dinominasikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS.
 - d. Melakukan evaluasi terhadap calon wakil Perusahaan yang akan diusulkan sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris anak Perusahaan, sebelum diajukan kepada RUPS/Menteri.
4. Berkaitan dengan Key Performance Indicator (KPI)
 - a. Melakukan evaluasi atas usulan KPI Individu anggota Direksi Perusahaan.
 - b. Menyiapkan usulan sistem evaluasi kinerja individu bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan.
5. Berkaitan dengan Program Pengembangan

Menyiapkan usulan program pengembangan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan.
6. Berkaitan dengan Remunerasi

Melakukan evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi karyawan yang membutuhkan persetujuan/tanggapan dari Dewan Komisaris Perusahaan.
7. Berkaitan dengan Struktur Organisasi

Melakukan evaluasi atas usulan Direksi mengenai struktur organisasi Perusahaan.
8. Menyusun piagam (charter) KNR dan melakukan review sesuai kebutuhan paling kurang 2 (dua) tahun sekali untuk mendapatkan penetapan dari Dewan Komisaris.
9. Melaksanakan penugasan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pengembangan Kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah menetapkan kebijakan untuk meningkatkan kompetensi Komite Nominasi dan Remunerasi melalui pelatihan dan program pendidikan. Sepanjang tahun 2024, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengikuti berbagai program pelatihan dan pengembangan kompetensi dengan rincian sebagai berikut:

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

The Nomination and Remuneration Committee duties and responsibilities as outlined in the Nomination and Remuneration Committee Charter are as follows:

1. The NRC shall act collectively in carrying out its duties and to assist the Board of Commissioners
2. When carrying out its duties and in reporting, the NRC acts independently and is directly responsible to the Board of Commissioners.
3. Related to Talent Management:
 - a. Conducts periodic reviews of the Talent Management system and monitors and evaluates its implementation.
 - b. Conducts evaluations of the Talent classification system and procedures carried out by the Company's Board of Directors.
 - c. Validates and calibrates the Selected Talent to produce a list of Nominated Talents nominated by the Board of Commissioners to the GMS.
 - d. Prepares Committee guidelines or charter that are binding on each Committee member and submits them to the Board of Commissioners for adoption
4. Related to Key Performance Indicators (KPI)
 - a. Conducts evaluations of the proposed KPI for the Company's Board of Directors.
 - b. Prepares a proposal for an individual performance evaluation system for members of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners.
5. Related to Development Programs

Prepares development program proposals for members of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners.
6. Relating to Remuneration

Conducts evaluations of remuneration policies for employees that require approval/response from the Company's Board of Commissioners.
7. Related to Organizational Structure

Conducts evaluations of the Board of Directors' proposals regarding the Company's organizational structure.
8. Prepares the NRC charter and conducts reviews as needed at least once every 2 (two) years to obtain approval from the Board of Commissioners.
9. Carry out other assignments given by the Board of Commissioners.

Nomination and Remuneration Committee Competency Development

The Company has instigated a competency policy to improve the Nomination and Remuneration Committee through training and education programs. During 2024, members of the Nomination and Remuneration Committee participated in the following training and competency development programs:

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Type of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Waktu Penyelenggaraan Date	Penyelenggara Organizer
Marwanto Harjowiryo Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Chair of the Nomination and Remuneration Committee	Public Training	Program Pembekalan Manajemen Risiko Perbankan Kualifikasi Banking Risk Management Briefing Program Qualification 4	12, 13 dan 15 Februari 2024. February 12, 13 and 15, 2024.	Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Indonesian Banking Development Institute (LPPI)
	Public Training	Penguatan Komitmen Dewan Komisaris Anggota Holding BUMN Danareksa atas RKAP Tahun 2024 Confirmation of the Board of Commissioners of Members of the SOE Danareksa Holding Commitment on the 2024 RKAP.	16 Februari 2024. February 16, 2024	PT Danareksa (Persero).
	Public Training	Mengawal Penuntasan Pembangunan Jangka Menengah untuk Kestinambungan Pembangunan. Supervising the Completion of Medium-Term Development for Sustainable Development.	22 Mei 2024. May 22, 2024.	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Financial and Development Supervisory Agency (BPKP).
	Public Training	GRC Summit Seminar dan Master Class 2024. GRC Summit Seminar and Master Class 2024.	22-23 Agustus 2024. August 22-23, 2024.	CRMS Indonesia.
	Public Training	Risk Governance dan Leadership Master Class Risk Governance and Leadership Master Class.	4 Desember 2024. December 4, 2024.	Enterprise Risk Management Academy (ERMA) & IRMAPA.
	Public Training	Risk Beyond International Conference on Enterprise Risk Management 2024.	5-6 Desember 2024 December 5-6, 2024	Enterprise Risk Management Academy (ERMA) & IRMAPA.
	Sertifikasi Certification	Certified Governance Oversight Professional (CGOP)	31 Januari 2024 January 31, 2024	LSP MKS & BNSP
	Sertifikasi Certification	Qualification 4 Field of Bank Risk Management	31 Januari 2024 January 31, 2024	LSP LSPP & BNSP
Jujun Rusmijati	Online	Kick-off Meeting Profesi Manajemen Risiko Risk Management Profession Kick-off Meeting	15 Maret 2024 March 15, 2024	IRMIPA
Jujun Rusmijati	Public Training	GRC Summit Seminar 2024	23 Agustus 2024. August 23, 2024	CRMS Indonesia

RAPAT KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Sepanjang tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi telah mengadakan sebanyak 7 (tujuh) kali rapat. Rekapitulasi kehadiran serta risalah dari rapat-rapat tersebut disajikan dalam tabel berikut.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attended	Persentase Kehadiran Percentage Attended
Marwanto Harjowiryo	Ketua/Komisaris Chair/Commissioner	5	5	100%
Jujun Rusmijati	Anggota Member	7	7	100%

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE MEETINGS

During 2024, the Nomination and Remuneration Committee held 7 (seven) meetings. The attendance recapitulation and minutes of the meetings are shown in the following table.

FREQUENCY AND ATTENDANCE RATE

Risalah Rapat Minutes of Meetings

No	Tanggal Date	Nomor Risalah Rapat Meeting Minutes Number	Agenda Rapat Meeting Agenda	Peserta Rapat Participants
1	6 Februari 2024 February 6, 2024	RIS-01/PPA/KNR/0224	Pembahasan <i>Employee Well Being</i> (EWP) dan Talent Pool dan Lain-lain. Discussion on Employee Well Being (EWP) and Talent Pool and Other matters.	- Marwanto Harjowiryo - Diah Triana - Jujun Rusmijati - Iko Marita mustokoweni - Royza Fauzy
2	23 Februari 2024 February 23, 2024	RIS-02/PPA/KNR/0224	Evaluasi Terhadap Direksi Eksisting dan Validasi Talenta BOD-1 Tahun 2024 Evaluation of Existing Board of Directors and Validation of BOD-1 Talent in 2024	- Marwanto Harjowiryo - Diah Triana - Jujun Rusmijati - Iko Marita mustokoweni - Royza Fauzy
3	3 Juli 2024 July 3, 2024	RIS-02/PPA/KNR/0724	Pembahasan Usulan Remunerasi PT PPA dan Lain-lain Discussion on PT PPA Remuneration Proposal and Other matters	- Marwanto Harjowiryo - Diah Triana - Jujun Rusmijati
4	6 Agustus 2024 August 6, 2024	RIS-04/PPA/KNR/0824	Pembahasan Usulan Struktur Organisasi dan Usulan Anggota Komisaris PT. Nidya Beton (NB) Discussion on Proposed PT. Nidya Beton (NB) Organizational Structure and Proposed Board of Commissioners Members	- Marwanto Harjowiryo - Diah Triana - Jujun Rusmijati - Iko Marita mustokoweni - Royza Fauzy
5	9 Agustus 2024 August 9, 2024	RIS-03/PPA/KNR/0824	Pembahasan Pendalaman Usulan Struktur Organisasi PT PPA dan Lain-lain. In-depth Discussion on Proposed Organizational Structure of PT PPA and Other matters.	- Jujun Rusmijati - Iko Marita Mustokoweni - Antonius Tjatur P - Erwin Adiyatno
6	16 Agustus 2024 August 16, 2024	RIS-06/PPA/KNR/0824	Pembahasan Usulan Struktur Organisasi Discussion on Proposed Organizational Structure	- Marwanto Harjowiryo - Diah Triana - Jujun Rusmijati - Iko Marita mustokoweni - Royza Fauzy
7	23 Oktober 2024 October 23, 2024	RIS-04/PPA/KNR/1024	Pembahasan KPI Individual Direksi PT PPA Tahun 2024 dan Lain-lain. Discussion on Individual KPI of PT PPA Directors in 2024 and Other matters.	- Jujun Rusmijati - Diah Triana - Iko Marita Mustokoweni - Royza Fauzy - Lie Tjauw Hap - Novi Sutedi - Riski Permana - Prayogo Witjaksono

PROGRAM KERJA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Komite Nominasi dan Remunerasi sudah menyusun program kerja untuk sepanjang tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut.

- Berkaitan dengan fungsi nominasi, membantu Dewan Komisaris dalam:
 - Menyusun dan merekomendasikan komposisi jabatan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
 - Menyusun konsep kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Menyusun konsep kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris;
 - Menelaah dan memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.

NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE WORK PROGRAM

The Nomination and Remuneration Committee prepared a work program for 2024 with the following details.

- Related to the nomination function, assisting the Board of Commissioners in:
 - Formulating and recommending the composition of positions and the nomination process for members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners;
 - Formulating the concept of policies and criteria needed in the nomination process for candidates for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
 - Formulating the concept of policies of performance appraisal and evaluation of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
 - Compiling and giving recommendations on the capacity development program for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners; and
 - Reviewing and proposing candidates who have met the criteria for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.

2. Berkaitan dengan fungsi remunerasi, membantu Dewan Komisaris dalam:
 - a. Mengumpulkan data dan informasi terkait penentuan kebijakan remunerasi sekurang-kurangnya meliputi:
 - i) Tugas, tanggung jawab dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
 - ii) Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - iii) Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
 - b. Melakukan evaluasi atas data dan informasi dalam angka B.1. di atas, dan menyampaikan hasil evaluasi dimaksud kepada Dewan Komisaris termasuk rekomendasi perbaikan.
 3. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian dan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun dan sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan evaluasi.
 4. Berkaitan dengan Organisasi PT PPA, yakni:
 - a. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi terkait perubahan Struktur Organisasi PT PPA sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
 - b. Melakukan evaluasi atas usulan Direksi terkait *job description* masing-masing fungsi di dalam organisasi PT PPA sampai dengan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, guna memastikan bahwa seluruh tugas pokok telah sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan di dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan telah diakomodasi dengan baik, efisien dan efektif.
 5. Berkaitan dengan Rencana Jangka Panjang Perseroan ("RJPP") dan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan ("RKAP"), meliputi:
 - a. Apabila Direksi menyusun perubahan RJPP 2020 – 2024, sesuai dengan RPJMN, 2020 – 2024, KNR akan membantu Dewan Komisaris untuk melakukan evaluasi atas RJPP yang disampaikan oleh Direksi, terkait dengan aspek nominasi dan remunerasi.
 - b. KNR akan membantu menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris untuk tahun 2025, terkait dengan aspek nominasi dan remunerasi.
 - c. KNR akan meneliti dan menelaah RKAP PT PPA tahun 2024 yang diusulkan oleh Direksi dari aspek nominasi dan remunerasi. Dari hasil telaahan tersebut, KNR akan berkontribusi dalam menyusun konsep pendapat dan saran Dewan Komisaris atas RKAP PT PPA tahun 2024.
 6. Berkaitan dengan tugas-tugas PT PPA yang bersifat administratif dalam rangka pelaksanaan GCG, Komite Nominasi dan Remunerasi bekerjasama dengan Komite Audit, Komite PR & GCG akan:
 - a. Membantu Dewan Komisaris dalam batas kewenangannya untuk merespon saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari *stakeholders* (pelanggan, pemasok, kreditur) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris.
 - b. Membantu Dewan Komisaris untuk melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada tahun berjalan.
2. Related to the remuneration function, assisting the Board of Commissioners in:
 - a. Collecting data and information related to the determination of remuneration policies that at least include:
 - i) Duties, responsibilities and authorities of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners that are related to the achievement of the goals and performance of the Company;
 - ii) Target performance or performance of each member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners; and
 - iii) The balance between fixed and variable benefits.
 - b. Evaluating the data and information in point B.1 above, and submitting the results of the evaluation to the Board of Commissioners including recommendations for improvement.
 3. Assisting the Board of Commissioners in assessing and evaluating the members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners performance against the predetermined benchmarks in accordance with applicable regulations as evaluation material.
 4. Related to the PT PPA Organization:
 - a. Evaluating the recommendations of the Board of Directors regarding changes in the Organizational Structure of PT PPA up to 1 (one) level below the Board of Directors.
 - b. Evaluating the Board of Directors' proposal regarding the job descriptions of each function within the PT PPA organization up to 1 (one) level below the Board of Directors, to ensure that all main duties are in accordance with the aims and objectives in the Company's Articles of Association,, and have been accommodated properly, efficiently and effectively
 5. Related to the Company's Long Term Plan ("RJPP") and the Company's Work Plan and Budget ("RKAP"):
 - a. If the Board of Directors makes changes to the RJPP 2020 - 2024, in accordance with the RPJMN, 2020 - 2024, the NRC will assist the Board of Commissioners in evaluating the RJPP submitted by the Board of Directors in all aspects related to nomination and remuneration.
 - b. KNR will assist in preparing the Board of Commissioners' Work Plan and Budget for 2025 in all aspects related to nomination and remuneration.
 - c. KNR will research and review PT PPA's 2024 RKAP proposed by the Board of Directors from the aspect of nomination and remuneration. Based on the results, the KNR will contribute to the drafting of opinions and suggestions of the Board of Commissioners on PT PPA's RKAP 2024.
 6. Related to PT PPA's administrative duties in GCG implementation, the Nomination and Remuneration Committee in collaboration with the Audit Committee, PR & GCG Committee will:
 - a. Assist the Board of Commissioners within the limits of their authority to respond to suggestions, expectations, problems and complaints from stakeholders (customers, suppliers, creditors) that are submitted directly to the Board of Commissioners.
 - b. Assist the Board of Commissioners in carrying out supervision and providing advice on policies and implementation of procurement of goods and services in the current year.

- c. Membantu Dewan Komisaris untuk melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan tentang mutu dan pelayanan pada tahun berjalan.
 - d. Membantu Dewan Komisaris untuk melaksanakan pengawasan dan pemberian nasihat terhadap kebijakan dan pelaksanaan kepatuhan Perseroan dalam menjalankan peraturan pada tahun berjalan.
 - e. Membantu Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat mengenai kebijakan sumber daya manusia dan pelaksanaan kebijakan tersebut, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi serta pemahaman dan pelaksanaan nilai dan budaya organisasi (*core values* Perseroan).
 - f. Membantu Dewan Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan Perseroan sesuai RKAP dan/atau RJPP.
 - g. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan persetujuan dan/atau rekomendasi kepada RUPS atas usulan Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan dan ketentuan yang berlaku.
7. Berkaitan dengan kegiatan audit, Komite Nominasi dan Remunerasi membantu Dewan Komisaris untuk:
 - a. Mendukung Komite Audit dalam melakukan evaluasi secara berkala atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Audit Internal.
 - b. Mendukung Komite Audit dalam membantu Dewan Komisaris untuk memastikan audit eksternal dan internal dilaksanakan secara efektif serta membantu melakukan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan PT PPA yang diterima oleh Dewan Komisaris.
 8. Berkaitan dengan evaluasi atas kinerja Direksi: Komite Nominasi dan Remunerasi akan membantu Dewan Komisaris untuk melakukan evaluasi atas kinerja Direksi, untuk kemudian hasilnya akan disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS.
 9. Berkaitan dengan pelaporan-pelaporan, Komite Nominasi dan Remunerasi bersama dengan Komite yang lain membantu Dewan Komisaris untuk:
 - a. Menyusun laporan apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan serta saran-saran yang telah disampaikan kepada Direksi untuk memperbaiki permasalahan, agar dapat segera disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS
 - b. Menyusun tanggapan atas Laporan Berkala yang disampaikan oleh Direksi (Laporan Manajemen Triwulan I, II, dan III serta Laporan Tahunan), agar dapat segera disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS
 - c. Menyusun Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris (Triwulan I, II, dan III, serta Tahunan), agar dapat segera disampaikan oleh Dewan Komisaris kepada RUPS
 - d. Melakukan evaluasi atas laporan-laporan lain yang disampaikan Direksi
 10. Berkaitan dengan kehadiran dan penyelenggaraan rapat:
 - a. Komite Nominasi dan Remunerasi turut hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Pengesahan RKAP tahun 2024, sesuai dengan penugasan Dewan Komisaris
- c. Assist the Board of Commissioners in supervising and providing advice on the policies and implementation of quality and service in the current year.
 - d. Assist the Board of Commissioners in supervising and providing advice on the policies and implementation of company compliance in implementing regulations in the current year
 - e. Assist the Board of Commissioners in supervising and providing advice on the policies and implementation of human capital policies, particularly those relating to competency development as well as the comprehension and implementation of organizational values and culture (company core values).
 - f. Assist the Board of Commissioners in supervising and monitoring the compliance of the Board of Directors in running the Company in accordance with the RKAP and/ or RJPP.
 - g. Assist the Board of Commissioners in giving approvals and/ or recommendations to the GMS on the recommendation of the Board of Directors in accordance with the Articles of Association and applicable rules and regulations.
7. Related to audit activities, the Nomination and Remuneration Committee assist the Board of Commissioners in:
 - a. Support the Audit Committee in conducting regular evaluations of the results of the examinations conducted by the Internal Audit.
 - b. Support the Audit Committee in assisting the Board of Commissioners to ensure that external and internal audits are carried out effectively and giving assistance to reviewing complaints relating to PT PPA received by the Board of Commissioners.
 8. Related to the performance evaluation of the Board of Directors: The Nomination and Remuneration Committee will assist the Board of Commissioners in evaluating the performance of the Board of Directors whose results will be submitted by the Board of Commissioners to the GMS.
 9. Related to reporting, the Nomination and Remuneration Committee together with other committees assists the Board of Commissioners in:
 - a. Prepare reports if there are symptoms of declining performance and ensuring that all suggestions for improvement submitted to the Board of Directors are immediately submitted to the GMS
 - b. Prepare responses to the Periodic Reports submitted by the Board of Directors (QI, II, and III Management Reports and Annual Reports), so that the Board of Commissioners can immediately submit them to the GMS.
 - c. Prepare the Board of Commissioners Supervisory Duties Reports for QI, II, and III, and Yearly, so that the Board of Commissioners can immediately submit them to the GMS.
 - d. Evaluate other reports submitted by the Board of Directors.
 10. Related to attendance and holding of meetings:
 - a. The Nomination and Remuneration Committee attend the General Meeting of Shareholders for the Ratification of the 2024 RKAP, in accordance with the assignment of the Board of Commissioners.

- b. Komite Nominasi dan Remunerasi turut hadir Rapat Umum Pemegang Saham Laporan Tahunan PT PPA untuk Tahun Buku 2024, sesuai dengan penugasan Dewan Komisaris
 - c. Hadir dan berpendapat secara aktif dalam Rapat Internal Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 1 bulan)
 - d. Menyelenggarakan Rapat Internal Komite Nominasi dan Remunerasi (minimal 1 kali dalam 4 bulan)
11. Berkaitan dengan pelaksanaan kunjungan kerja: berdasarkan penugasan dari Dewan Komisaris Komite Nominasi dan Remunerasi akan mengikuti kunjungan kerja. Dewan Komisaris (untuk meninjau antara lain, aset kelolaan, BUMN yang berada dalam proses maupun telah melaksanakan kegiatan RR oleh PT PPA, proyek-proyek investasi PT PPA dan Aset Kelolaan dan Anak Perseroan dari Perseroan Anak PT PPA).
12. Berkaitan dengan Aspek Dinamis (Peningkatan Kompetensi). Peningkatan kompetensi dimaksudkan sebagai program untuk menambah wawasan dan pengetahuan Komite Nominasi dan Remunerasi dalam rangka meningkatkan kemampuan Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya. Bentuk kegiatan antara lain melalui keikutsertaan dalam *short course*, *workshop* (rapat kerja), seminar, atau sertifikasi. Keikutsertaan masing-masing anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam kegiatan tersebut sebanyak minimal satu kali dalam setahun, sesuai dengan penugasan Dewan Komisaris.

PELAKSANAAN TUGAS KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Sepanjang tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun rincian pelaksanaan tugas selama periode tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris;
- 2. Menyelenggarakan rapat Komite secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
- 3. Menyusun pedoman atau piagam Komite yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan.
- 4. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 - a. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - i) Komposisi jabatan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
 - ii) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
 - iii) Kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
 - b. Membantu Dewan Komisaris mengenai melakukan penilaian dan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;

- b. The Nomination and Remuneration Committee attend the General Meeting of Shareholders of PT PPA's Annual Report for Fiscal Year 2024, in accordance with the assignment of the Board of Commissioners.
- c. Attend and actively give opinions in the Internal Meeting of the Board of Commissioners (at least 1 time in 1 month).
- d. Organize the Nomination and Remuneration Committee Internal Meetings (at least 1 time in 4 months).

11. Related to the implementation of working visits: Based on the assignment from the Board of Commissioners, the Nomination and Remuneration Committee will attend work visits. The Board of Commissioners (to review i.e. assets under management, SOEs that are in the process of or have implemented RR activities by PT PPA, PT PPA's investment projects, and Managed Assets and Subsidiaries of PT PPA Subsidiaries).

12. Related to the Dynamic Aspect (Competency Development): Competency Development is a program intended to increase the knowledge and insight of the Nomination and Remuneration Committee and improve its ability to carry out its duties, functions and responsibilities. This activity includes participation in short courses, workshops (work meetings), seminars, or certifications. Members of the Nomination and Remuneration Committee shall participate in these activities, subject of course to assignment of the Board of Commissioners.

IMPLEMENTATION OF THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE DUTIES

Throughout 2024, the Nomination and Remuneration Committee carried out its duties and responsibilities in accordance with applicable provisions. The details of the duties during the period are as follows:

- 1. Must act independently in carrying out their duties and be responsible to the Board of Commissioners;
- 2. Hold at least 1 (one) regular Committee meeting every 4 (four) months;
- 3. Prepare committee guidelines or charters that are binding on all members of the Committee and submit them to the Board of Commissioners for stipulation.
- 4. Related to the Nomination function:
 - a. Prepare and make recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - i) Position composition and nomination process for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners
 - ii) Policies and criteria required in the nomination process for candidates as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;
 - iii) Policy for performance appraisal and evaluation for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners
 - b. Assist the Board of Commissioners in assessing and evaluating the performance of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners against the predetermined benchmarks as subjects of evaluation;

- c. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris;
 - d. Menelaah dan memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
5. Terkait dengan Fungsi Remunerasi
- a. Mengumpulkan data dan informasi terkait penentuan kebijakan remunerasi;
 - b. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: Struktur Remunerasi, Kebijakan atas Remunerasi dan Besaran Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
6. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Dewan Komisaris sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
7. Wajib menjaga kerahasiaan Perseroan.
8. Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas Komite agar diatur dan berpedoman kepada piagam dan pedoman Komite.

Komite Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Danareksa (Persero) Nomor: KD-47/031A/DIR/BPP tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Klasifikasi Risiko Anggota Holding Danareksa, PT Perusahaan Pengelola Aset ditetapkan sebagai Perusahaan yang masuk dalam klasifikasi risiko Sistemik A, dan sesuai dengan Surat Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko, Kementerian BUMN Nomor: SK-3/DKU.MBU/05/2023 tentang Petunjuk Teknis Komposisi dan Kualifikasi Organ Pengelola Risiko sebagai tindak lanjut ketentuan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023, diatur mengenai komposisi minimal Organ Pengelola Risiko pada Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Kuadran Sistemik.

Dengan pertimbangan tersebut, maka Dewan Komisaris PT Perusahaan Pengelola Aset membentuk Organ Pengelola Risiko di bawah pengawasan Dewan Komisaris yang terdiri atas Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Tata Kelola Terintegrasi secara terpisah.

Untuk membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait penerapan Tata Kelola Terintegrasi PT Perusahaan Pengelola Aset Grup, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Perusahaan Pengelola Aset Nomor: 07/KEP KOM/PPA/III/2024 tanggal 22 Maret 2024, Dewan Komisaris PT Perusahaan Pengelola Aset telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi, yaitu (ex-officio):

Ketua

- Komisaris Utama atau Dewan Komisaris yang bertindak selaku Komisaris Utama PT Perusahaan Pengelola Aset

- c. Prepare and make recommendations on capacity building programs for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners;
 - d. Review and propose candidates who have met the criteria as members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS.
5. Related to the Remuneration Function
- a. Collect data and information related to the determination of remuneration policies;
 - b. Prepare and make recommendations to the Board of Commissioners regarding: Remuneration Structure, Policy on Remuneration and Amount of Remuneration for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners, Assisting the Board of Commissioners in assessing performance in accordance with the remuneration received by each member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners
6. Carry out other duties assigned by the Board of Commissioners in accordance with applicable rules and regulations.
7. Must maintain company confidentiality.
8. Further arrangements on the implementation of the Committee's duties must be regulated and guided by the Committee's charter and guidelines.

Integrated Governance Committee

Based on the PT Danareksa (Persero) Board of Directors Decree No. KD-47/031A/DIR/BPP dated December 14, 2023 concerning Determination of Risk Classification of Danareksa Holding Members, PT Perusahaan Pengelola Aset was determined as a Company in the Sistemik A risk classification, and in accordance with the Deputy for Finance and Risk Management, Ministry of SOEs Decree No. SK-3/DKU.MBU/05/2023 concerning Technical Instructions for the Composition and Qualifications of Risk Management Organs as a follow-up to the provisions in the Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023, it is regulated that the minimum composition of Risk Management Organs in Limited Liability Companies (Persero) be based on the Systemic Quadrant.

With these considerations, the PT Perusahaan Pengelola Aset Board of Commissioners established separate Risk Management Organs under the supervision of the Board of Commissioners consisting of the Audit Committee, Risk Monitoring Committee and Integrated Governance Committee.

To assist the Board of Commissioners in carrying out their functions and duties related to the Integrated Governance in PT Perusahaan Pengelola Aset Group, based on the PT Perusahaan Pengelola Aset Board of Commissioners Decree No. 07/KEP KOM/PPA/III/2024 dated March 22, 2024, the PT Perusahaan Pengelola Aset Board of Commissioners established the following Integrated Governance Committee, (ex-officio):

Chair

- President Commissioner or Board of Commissioners acting as President Commissioner of PT Perusahaan Pengelola Aset

Anggota

- Komisaris Utama/Komisaris Independen PT PPA Finance, sebagai Anggota;
- Komisaris Utama/Komisaris PT PPA Kapital, sebagai Anggota;

Sekretaris

Sdri. Iko Marita Mustokoweni, Anggota Komite Pemantau Risiko dan GCG, Dewan Komisaris PT Perusahaan Pengelola Aset

PERSYARATAN DAN KUALIFIKASI ANGGOTA KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI

1. Memiliki integritas yang baik, akhlak dan moral yang baik, pengetahuan dan pengalaman kerja yang cukup di bidang pengawasan dan bidang-bidang lainnya yang dianggap perlu, sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara optimal, serta mampu berkomunikasi secara efektif.
2. Memiliki pengetahuan yang cukup tentang tata kelola perusahaan yang baik.
3. Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan serta laporan-laporan terkait pemantauan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
4. Tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap Perusahaan.
5. Dapat menyediakan waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugasnya.
6. Mampu bekerja sama dan berkomunikasi secara efektif.
7. Anggota KTKT tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai derajat ke tiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping ataupun hubungan yang timbul karena perkawinan dengan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.
8. Anggota KTKT tidak memegang jabatan rangkap sebagai pengurus partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau calon kepala daerah / wakil kepala daerah, dan jabatan lain sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
9. Kualifikasi Anggota KTKT:
 - a. Pelatihan:
 - 1) Setiap tahun masing-masing anggota wajib mengikuti salah satu pelatihan dengan topik tata Kelola Perusahaan;
 - 2) Dalam satu tahun wajib mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud dalam angka 1) paling sedikit berjumlah 20 (dua puluh) jam pelatihan;
 - 3) 3) Pelatihan yang diikuti merupakan Program Pelatihan Berkelanjutan ("PPL") yang diselenggarakan oleh lembaga profesi, regulator, lembaga pelatihan yang terakreditasi oleh lembaga akreditasi, dan/atau lembaga pelatihan yang dimiliki atau dikendalikan oleh BUMN.
 - b. Sertifikasi:
 - 1) Anggota KTKT wajib mengikuti sertifikasi saat menjabat pada bidang Tata Kelola Perusahaan.
 - 2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dipenuhi dengan ketentuan:
 - diterbitkan oleh dewan sertifikasi/regulator/ organisasi profesi terkait yang diakui secara nasional dan/atau internasional;

Members

- President Commissioner/Independent Commissioner of PT PPA Finance, as Member;
- President Commissioner/Commissioner of PT PPA Kapital, as Member;

Secretary

Iko Marita Mustokoweni, Member of the Risk Monitoring and GCG Committee, Board of Commissioners of PT Perusahaan Pengelola Aset

INTEGRATED GOVERNANCE COMMITTEE MEMBERS REQUIREMENTS AND QUALIFICATIONS

1. Have good integrity, good morals and ethics, sufficient knowledge and work experience in the field of supervision and other fields deemed necessary, so that they can carry out their functions optimally, and are able to communicate effectively.
2. Have sufficient knowledge of good corporate governance.
3. Have sufficient knowledge to read and understand financial reports and reports related to monitoring the risk management policies.
4. Does not have any personal interests/connections that may cause any negative impact and conflicts of interest with the Company.
5. Can provide sufficient time to complete their duties.
6. Is able to work together and communicate effectively.
7. IGC members must not have blood relations up to the third degree, either in a straight line or a sideways line or relations arising from marriage with members of the Board of Commissioners or members of the Board of Directors.
8. IGC members must not hold concurrent positions as administrators of political parties and/or legislative candidates and/or regional head/deputy regional head candidates, and other positions in accordance with the provisions and regulations of laws and regulations that may give rise to a conflict of interest.
9. Qualifications of IGC Members:
 - a. Training:
 - 1) Every year each member is required to attend training on the topic of Corporate Governance;
 - 2) Every year, it is mandatory to follow the training as referred to in number 1) for at least 20 (twenty) hours of training;
 - 3) The training attended includes the Continuous Training Program ("PPL") organized by professional institutions, regulators, training institutions accredited by accreditation institutions, and/or training institutions owned or controlled by BUMN.
 - b. Certification:
 - 1) IGC members are required to undergo certification when serving in the field of Corporate Governance.
 - 2) Certification as referred to in number 1) is fulfilled with the following provisions:
 - issued by a nationally and/or internationally recognized certification board/regulator/related professional organization;

- lembaga penerbit sertifikasi memiliki standar dan dewan standar profesi dan etika; dan
- sertifikasi diwajibkan berlaku selama masa jabatan.

- the certification issuing body has standards and a professional standards and ethics board; and
- certification is required to be valid for the duration of the term of office.

Ketentuan Masa Tugas dan Kompensasi

1. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama daripada masa jabatan Dewan Komisaris.
2. Masa tugas Sekretaris Komite anggota Dewan Komisaris paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
3. Anggota KTKT tidak memperoleh kompensasi tambahan di luar kompensasi yang diterima dalam jabatannya sebagai Dewan Komisaris baik Induk maupun Entitas Anak dalam Grup PPA.
4. Anggaran perjalanan dinas dan biaya terkait lainnya yang melekat pada masing-masing Anggota dalam rangka pelaksanaan tugas sebagai Anggota KTKT dibebankan pada anggaran Dewan Komisaris Entitas asal Anggota Komite KTKT

Terms of Service and Compensation

1. The Committee members' term of office may not be longer than the term of office of the Board of Commissioners.
2. The term of office of the Secretary to the Board of Commissioners Committees is a maximum of 3 (three) years, which can be extended once for a further 2 (two) year term of office, without reducing the right of the Board of Commissioners to dismiss at any time.
3. IGC members do not receive additional compensation outside the compensation received in their positions as Board of Commissioners of both the Parent and Subsidiary Entities in the PPA Group.
4. The travel budget and other related costs for each Member when carrying out their duties as a IGC Member is charged to the budget of the Board of Commissioners of the Entity of origin of the IGC Committee Member

Tugas dan Tanggung Jawab

KTKT bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk namun tidak terbatas pada:

1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian internal dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi:
 - a. Penilaian Kecukupan Pengendalian Internal Terintegrasi.
 - 1) Melakukan evaluasi atas Perseroan dan Anak Perusahaan terkait keberadaan sistem pengendalian internal (internal control system) terintegrasi yang baku sesuai dengan best practice yang berlaku melalui kajian atas Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang diberlakukan di Grup PPA.
 - 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas efektivitas penerapan pengendalian internal terintegrasi melalui kajian atas Laporan Berkala dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dikeluarkan Divisi Satuan Pengawas Intern (DSPI).
 - 3) Melakukan pertemuan berkala dengan DSPI untuk membahas hal-hal terkait dengan sistem pengendalian internal terintegrasi
 - 4) Melakukan pertemuan berkala dengan Divisi Manajemen Risiko untuk membahas hal-hal terkait dengan manajemen risiko terintegrasi.
 - 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan dan Anak Perusahaan atas hasil temuan DSPI, Kantor Akuntan Publik, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai kelemahan pada sistem dan pelaksanaan sistem pengendalian internal terintegrasi.
 - b. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Secara Terintegrasi:
 - 1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kepatuhan Perseroan dan Anak Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku; melalui koordinasi dengan Divisi Hukum dan Kepatuhan ("DHK").
 - 2) Mempelajari laporan berkala dan laporan hasil pemeriksaan yang terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan intern dan ekstern yang dikeluarkan oleh DHK dan auditor ekstern.

Duties and Responsibilities

IGC acts independently when carrying out its duties and responsibilities, and include:

1. Evaluating the Integrated Governance at least through an assessment of the adequacy of internal control and the application of integrated compliance functions:
 - a. Assessing the Adequacy of Integrated Internal Control.
 - 1) Conducting an evaluation of the Company and Subsidiaries regarding the standard integrated internal control system in accordance with applicable best practices by reviewing the Integrated Governance Guidelines enforced in the PPA Group.
 - 2) Conducting monitoring and evaluations of the integrated internal control effectiveness through a review of the Regular Reports and Audit Result Reports issued by the Internal Supervisory Unit Division (DSPI).
 - 3) Conducting regular meetings with DSPI to discuss matters related to the integrated internal control system
 - 4) Conducting regular meetings with the Risk Management Division to discuss matters related to integrated risk management.
 - 5) Conducting monitoring and evaluation of the follow-up actions by the Company's Board of Directors and Subsidiaries on the findings of DSPI, Public Accounting Firm, and the Audit Board of Indonesia (BPK) regarding weaknesses in the system and the integrated internal control system.
 - b. Implementation of Integrated Compliance Functions:
 - 1) Monitoring and evaluating the Company's and Subsidiaries' compliance with applicable laws and regulations; through coordination with the Legal and Compliance Division ("DHK").
 - 2) Studying periodic reports and audit reports related to compliance with internal and external regulations issued by DHK and external auditors.

- 3) Melakukan pertemuan berkala dengan DHK untuk membahas hal-hal yang terkait dengan kepatuhan Perseroan dan Anak Perusahaan terhadap peraturan intern dan ekstern.
- 4) Melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan dan Anak Perusahaan atas hasil temuan DHK, Kantor Akuntan Publik dan BPK mengenai kelemahan pada sistem dan pelaksanaan fungsi kepatuhan terintegrasi.

Dalam melakukan evaluasi, KTKT memperoleh informasi berupa hasil evaluasi atas pelaksanaan audit intern dan fungsi kepatuhan masing-masing Anak Perusahaan dari anggota Dewan Komisaris masing-masing Anak Perusahaan yang menjadi anggota pada KTKT.

2. Melaporkan hasil pemantauan dan memberi masukan kepada Dewan Komisaris PPA atas hal-hal terkait dengan kepatuhan PPA dan Entitas Anak terhadap peraturan internal dan eksternal yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris PPA.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyempurnakan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sesuai kebutuhan atau paling kurang 2 (dua) tahun sekali.
4. Menyusun Pedoman dan Tata Tertib Kerja KTKT dan melakukan reviu sesuai kebutuhan atau paling kurang 2 (dua) tahun sekali.
5. Ketua Komite bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi atas seluruh kegiatan Komite untuk memenuhi tujuan komite sesuai dengan pembentukannya, yaitu sebagai berikut:
 - a. Memimpin rapat Komite;
 - b. Dalam hal Ketua Komite dengan sebab apapun berhalangan hadir maka Ketua Komite pada rapat Komite dapat diwakilkan oleh salah satu yang hadir berdasarkan musyawarah mufakat.
6. Ketua Komite bersama dengan anggota komite bertugas dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Menentukan rencana kerja tahunan Komite;
 - b. Menentukan jadwal rapat Komite;
 - c. Menghadiri rapat Komite;
 - d. Berperan aktif dan memberikan kontribusinya dalam setiap kegiatan Komite;
 - e. Membuat laporan berkala mengenai kegiatan Komite serta hal-hal yang dirasakan perlu untuk menjadi perhatian Dewan Komisaris Grup PPA.
 - f. Dalam hal anggota Komite dengan sebab apapun berhalangan hadir maka kehadiran anggota Komite pada rapat Komite tidak dapat diwakilkan;
 - g. Melaksanakan penugasan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris PPA.
7. Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Komite sebagai berikut:
 - a. Membuat dan menyampaikan panggilan rapat kepada seluruh peserta secara tertulis, namun dalam keadaan mendesak dimungkinkan mengundang rapat secara lisan.
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rapat.
 - c. Mencatat dan mengadministrasikan risalah rapat dan menyampaikan risalah rapat kepada semua anggota Komite.

- 3) Conducting periodic meetings with DHK to discuss matters related to the Company and Subsidiaries' compliance with internal and external regulations.
- 4) Conducting monitoring and evaluation of the follow-up actions by the Company's and Subsidiaries' Board of Directors on the findings of DHK, Public Accounting Firm and BPK regarding weaknesses in the system and the integrated compliance functions.

When conducting the evaluation, the IGC obtains information in the form of internal audits and compliance functions evaluation results of each Subsidiary from members of the Board of Commissioners of each Subsidiary who are members of the IGC.

2. Reporting the monitoring results and providing input to the PPA Board of Commissioners on matters related to PPA and Subsidiary Entity compliance with internal and external regulations that need to be of concern to the PPA Board of Commissioners.
3. Providing recommendations to the Company's Board of Commissioners to improve the Integrated Governance Guidelines as needed or at least once every 2 (two) years.
4. Preparing IGC Guidelines and Work Rules and conducting reviews as needed or at least once every 2 (two) years.
5. The Committee Chair is tasked and responsible for coordinating all Committee activities to fulfill the committee's objectives in accordance with its formation, including the following:
 - a. Leading the Committee meeting;
 - b. In the event that the Committee Chair is unable to attend for any reason, the Committee Chair may be represented at the Committee meeting by one of those present based on consensus.
6. The Committee Chair together with the committee members are tasked and responsible for:
 - a. Determining the Committee's annual work plan;
 - b. Determining the Committee's meeting schedule;
 - c. Attending Committee meetings;
 - d. Playing an active role and contributing in all Committee activities;
 - e. Preparing regular reports on Committee activities and matters deemed necessary to be of concern to the PPA Group Board of Commissioners.
 - f. In the event that a Committee member is unable to attend for any reason, the Committee member's presence at the Committee meeting cannot be delegated;
 - g. Carrying out other assignments given by the PPA Board of Commissioners.
7. The Committee Secretary's duties and responsibilities are as follows:
 - a. Preparing and delivering a meeting invitation to all participants in writing, but in urgent circumstances it is possible to verbally invite to a meeting.
 - b. Preparing the facilities and infrastructure needed for the meeting.
 - c. Recording and administering the minutes of the meetings, and delivering the minutes of the meetings to all members of the Committee.

- d. Membuat catatan dan memonitor tindak lanjut risalah Rapat serta menyampaikan laporan tindak lanjut tersebut kepada Dewan Komisaris PPA.
- e. Melaporkan frekuensi kegiatan Rapat serta kehadiran masing-masing.
- f. Menjaga kerahasiaan segala informasi, dokumen dan data segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Komite.

- d. Taking notes and monitoring the follow-up of the minutes of the Meetings, and submitting a report on the follow-up to the PPA Board of Commissioners.
- e. Reporting the frequency of Meeting activities and the attendance of each.
- f. Maintaining the confidentiality of all information, documents and data on all matters related to the Committee's duties.

Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi

Pada tahun 2024, Komite Tata Kelola Terintegrasi ("KTKT") belum memiliki Rencana Kerja dan Anggaran termasuk program kerja karena baru tahun pertama didirikan. Pada tahun tersebut KTKT menyelenggarakan 2 (dua) kali rapat, sebagai berikut :

1. Pertama diselenggarakan pada tanggal 21 Juni 2024 dengan agenda Kick Off Meeting Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Perusahaan Pengelola Aset, dengan materi pembahasan :
 - a. Mengenai PPA sebagai Perusahaan dengan kategori sistemik A, PT PPA perlu menyesuaikan organ Pengelola risiko sesuai pasal 55 PER-2/MBU/03/2023;
 - b. Sesuai PER-2/MBU/03/2023 Pasal 53, klasifikasi Risiko BUMN ditentukan berdasarkan Dimensi Ukuran dan Kompleksitas BUMN;
 - c. Wewenang, tugas, dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi sesuai Pasal 61 Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
 - d. Realisasi RKAP Triwulan I untuk PT PPA Induk, PT PPA Finance dan PT PPA Kapital;
 - e. Top Risk PT PPA Tahun 2024;
 - f. Persiapan pertemuan KTKT Holding Danareksa.
2. Kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2024, dengan agenda Pembahasan Realisasi RKAP Konsolidasi, Top Risiko Perusahaan dan Progres Aksi Korporasi Semester I Tahun 2024, dengan materi pembahasan :
 - a. Realisasi RKAP Konsolidasi PT PPA Semester I beserta Realisasi RKAP PT PPA Induk, PT PPA Finance, dan PT PPA Kapital.
 - b. Realisasi Top Risk Triwulan II Tahun 2024
 - c. Progress Aksi Korporasi Semester I Tahun 2024
 - d. Rencana pembahasan pada rapat KTKT Holding Danareksa.

Implementation of Integrated Governance Committee Duties

In 2024, the Integrated Governance Committee ("IGC") did not yet have a Work Plan and Budget including a work program as it was only the first year of its establishment. In that year, IGC held 2 (two) meetings, as follows:

1. On June 21, 2024 with the agenda as the Kick Off Meeting of the PT Perusahaan Pengelola Aset Integrated Governance Committee, with the following agenda:
 - a. Regarding PPA as a Company in the sistemik A category, PT PPA needs to adjust the risk management organ in line with article 55 of PER-2/MBU/03/2023;
 - b. In accordance with PER-2/MBU/03/2023 Article 53, the classification of BUMN Risk to be determined based on the BUMN Size and Complexity;
 - c. The Integrated Governance Committee authorities, duties, and responsibilities to be in accordance with Article 61 of the Minister of BUMN Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
 - d. RKAP Realization for Q1 for PT PPA Induk, PT PPA Finance and PT PPA Kapital;
 - e. PT PPA Top Risks in 2024;
 - f. Preparation of the Danareksa Holding IGC meeting.
2. On October 10, 2024, with the agenda to Discuss the Realization of Consolidated RKAP, Company Top Risks and Progress of Corporate Actions for Semester I of 2024, with the following agenda:
 - a. Realization of Consolidated RKAP of PT PPA for Semester I with Realization of RKAP of PT PPA Induk, PT PPA Finance, and PT PPA Kapital.
 - b. Realization of Top Risk for QII of 2024
 - c. Progress of Corporate Actions for Semester I 2024
 - d. Discussion on plan for the Danareksa Holding IGC meeting.

Organ Pendukung Direksi

Board of Directors Supporting Organs

Dalam menjalankan operasional Perseroan, Direksi didukung oleh sejumlah organ pendukung yang berperan dalam fungsi bisnis serta pengawasan internal. Fungsi bisnis dilaksanakan oleh Direktur Utama, Direksi lainnya, dan berbagai divisi di bawahnya. Sementara itu, fungsi pengawasan internal mencakup peran Sekretariat Perseroan, Satuan Pengawasan Internal, Perencanaan Strategis dan Manajemen Kinerja, Manajemen Risiko, serta Komite Investasi dan Manajemen Risiko.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan berperan sebagai pendukung Direksi dalam memfasilitasi komunikasi antara organ Perseroan dan para pemangku kepentingan. Tugas utama Sekretaris Perusahaan meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, serta memastikan komunikasi yang efektif dan transparan, khususnya dalam hubungan kelembagaan, hubungan investor, serta komunikasi Perseroan secara umum. Semua tugas tersebut dilakukan dengan mengacu pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan nilai-nilai Perseroan.

Dalam struktur organisasi, Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama. Peran dan fungsi Sekretaris Perusahaan telah diatur secara rinci dalam Surat Keputusan Direksi No. SK-57/PPA/0919 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja pada PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

Tugas dan Tanggung Jawab

Secara khusus, tugas Sekretaris Perusahaan adalah menjalankan keterbukaan informasi oleh Direksi, serta memfasilitasi komunikasi dan hubungan antara Perseroan dengan pemangku kepentingan. Tugas dan tanggung jawab lainnya antara lain:

1. Memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu bila diminta;
3. Sebagai penghubung (*liaison officer*);
4. Menatausahakan serta menyimpan dokumen Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar khusus, dan risalah rapat Direksi serta risalah rapat Dewan Komisaris dan RUPS;
5. Mengkoordinasikan kegiatan PKBL

Pejabat Sekretaris Perusahaan

Perseroan telah menunjuk Swasti Kartikaningtyas sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Perusahaan atau Kepala Divisi Sekretariat Perseroan dan TJSL berdasarkan SK-68/PPA/0724 tanggal 30 Juli 2024.

When carrying out the Company's operations, the Board of Directors is assisted by supporting organs that carry out business functions and internal supervision. Business functions are carried out by the President Director, other Directors, and divisions below them. While, the internal supervision function includes the Corporate Secretariat, Internal Audit Unit, Strategic Planning and Performance Management, Risk Management, and the Investment and Risk Management Committee.

CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary is a supporter of the Board of Directors who facilitates communication between the Company's organs and stakeholders. The Corporate Secretary's main duties include formulating policies, planning, and ensuring effective and transparent communication, especially in institutional relations, investor relations, and general Company communications. All these duties are carried out with reference to the principles of Good Corporate Governance and the Company's values.

In the organizational structure, the Corporate Secretary is directly responsible to the President Director. The Corporate Secretary's role and function is regulated in detail in the Board of Directors Decree No. SK-57/PPA/0919 concerning the Main Duties and Functions of the Work Units at PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero).

Duties and Responsibilities

Specifically, the Corporate Secretary's duties are to realize information disclosure by the Board of Directors, as well as facilitate communication and relationships between the Company and stakeholders. Other duties and responsibilities include:

1. Ensuring the Company complies with the regulations on disclosure provisions in line with the implementation of GCG principles.
2. Providing information required by the Board of Directors and Board of Commissioners periodically and/or as requested.
3. Acting as a liaison officer.
4. Administering and maintaining the corporate documents, including but not limited to Shareholder Register, Special list, and Minutes of Meetings of Board of Directors, Board of Commissioners, and GMS.
5. Coordinating the partnership and community development program activities.

Acting Corporate Secretary

The Company appointed Swasti Kartikaningtyas as Acting Corporate Secretary or Head of the Corporate Secretariat and SER Division based on SK-68/PPA/0724 dated July 30, 2024.



Swasti Kartikaningtyas
Menjabat sejak 30 Juli 2024
Swasti Kartikaningtyas
Serving since July 30, 2024

Warga Negara Nationality	:	Indonesia Indonesian
Usia Age	:	42 tahun pada tahun buku 2024 42 years old in Fiscal Year 2023
Domisili Domicile	:	Depok, Jawa Barat Depok, Jawa Barat
Bergabung di Perusahaan Joined the Company	:	30 Juli 2024 July 30, 2024
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	:	SK-68/PPA/0724 tanggal 30 Juli 2024 SK-68/PPA/0724 dated July 30, 2024
Pendidikan Education	:	- Magister Hukum Commercial Law dari University of Edinburgh, Skotlandia, UK, 2010 - Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia, 2004 - Master Degree of Commercial Law from University of Edinburgh, Scotland, UK, 2010 - Bachelor Degree of Law from University of Indonesia, 2004
Sertifikasi Profesi Professional Certification	:	Tidak Ada None
Pengalaman Kerja Work Experience	:	- Head Corporate Secretary Minamas Plantation (Mei 2023-Juli 2024) - Head Corporate Secretary PT Sawit Sumbermas Sarana, Tbk (Juli 2017-Mei 2023) - Head Corporate Secretary PT CIMB Securities Indonesia (Agustus 2014-Juni 2017) - Head Corporate Secretary PT Maybank Kim Eng Securities (Mei 2013-Juni 2017) - Head Corporate Secretary, Minamas Plantation (May 2023-July 2024) - Head Corporate Secretary, PT Sawit Sumbermas Sarana, Tbk (July 2017-May 2023) - Head Corporate Secretary, PT CIMB Securities Indonesia (August 2014-June 2017) - Head Corporate Secretary, PT Maybank Kim Eng Securities (May 2013-July 2017)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	:	Tidak Ada None
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationships	:	Tidak Ada None

STRUKTUR ORGANISASI DIVISI SEKRETARIAT PERUSAHAAN DAN TJSL

Secara struktural, Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan dan TJSL berada langsung di bawah koordinasi Direktur Utama. Susunan organisasi Divisi Sekretariat Perusahaan dan TJSL telah diatur berdasarkan Surat Keputusan No. SK-76/PPA/0824 tanggal 28 Agustus 2024 tentang Struktur Organisasi PT Perusahaan Pengelola Aset.

Sampai akhir 31 Desember 2024, Divisi Sekretariat Perusahaan dan TJSL terdiri dari 10 (sepuluh) orang dengan penjabaran sebagai berikut:

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF CORPORATE SECRETARIAT AND SER DIVISION

Structurally, the Head of the Corporate Secretariat and SER Division is directly under the coordination of the President Director. The Corporate Secretariat and SER Division organizational structure is regulated based on Decree No. SK-76/PPA/0824 dated August 28, 2024 concerning the Organizational Structure of PT Perusahaan Pengelola Aset.

As of the end of December 31, 2024, the Corporate Secretariat and SER Division comprised the following 10 (ten) people:

No	Jabatan Position	Jumlah Number
1	Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan dan TJSL Head of the Corporate Secretariat and SER Division	1
2	Kepala Grup Komunikasi Perusahaan Group Head of Corporate Communications	1
3	Kepala Unit Administrasi Perusahaan Head of Corporate Administration Unit	3

No	Jabatan Position	Jumlah Number
4	Kepala Unit TJSL Head of SER Unit	1
5	Staf Staff	4
Total		10

Pengembangan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Selama tahun 2024, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti berbagai program pelatihan dan/atau pengembangan kompetensi sebagai berikut:

Corporate Secretary Competency Development

During 2024, the Corporate Secretary participated in the following training and/or competency development programs:

Nama dan Jabatan Name and Position	Tema/Judul Pelatihan Training themes	Tempat dan Tanggal Place and Date	Penyelenggara Organizer
Swasti Kartikaningtyas – Sekretaris Perusahaan Swasti Kartikaningtyas - Corporate Secretary	Hukum Kepailitan dan PKPU: Prinsip, Norma dan Praktik Peradilan Bankruptcy Law and PKPU: Principles, Norms and Judicial Practices	12 November 2024 November 12, 2024	Juanda Pangaribuan

PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIAT PERUSAHAAN TAHUN 2024

IMPLEMENTATION OF CORPORATE SECRETARIAT DUTIES IN 2024

No	Kegiatan Activity	RKAP 2024 2024 RKAP	Realisasi 2024 2024 Realization
1.	Mengorganisasikan dan mengoordinasikan Rapat Direksi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan Organizing and coordinating the Board of Directors Meetings that are held at least once a month.	12	48
2.	Mengorganisasikan dan mengkoordinasikan Rapat Dewan Komisaris & Direksi yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan Organizing and coordinating the Board of Commissioners & Board of Directors Meetings that are held at least once a month.	12	12
3.	Membuat Risalah Rapat Direksi Making Minutes of Board of Directors Meeting.	12	48
4.	Mengelola Dokumen Perusahaan: Penatausahaan dokumen setiap kali dokumen diterima Managing Company Documents: Document administration every time a document is received	Penatausahaan seluruh dokumen Perusahaan Administration of all Company documents	Penatausahaan seluruh dokumen Perusahaan Administration of all Company documents
5.	Menjalankan fungsi pelaksanaan dan pendokumentasian RUPS dan Rapat Direksi Carrying out the function of organizing and documenting the GMS and Board of Directors' Meetings	2 Keputusan RUPS dan 12 Risalah Rapat Direksi 2 GMS Resolutions and 12 Minutes of Board of Directors' Meetings	2 Keputusan RUPS dan 48 Risalah Rapat Direksi 2 GMS Resolutions and 48 Minutes of Board of Directors' Meetings
6.	Membuat Laporan Manajemen: - Triwulanan - Tahunan Preparing Management Reports: - Quarterly - Annually	- Laporan Manajemen Triwulan 1 Laporan Manajemen Tahunan - Quarterly Management Reports 1 Annual Management Report	- Laporan Manajemen Triwulan I, II, III Tahun 2024 - Laporan Manajemen Tahun 2023 - QI, II, III Management Reports 1 Annual Management Report
7.	Membuat Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Preparing Annual Report and Sustainability Report	Penyusunan Laporan Tahunan Preparation of Annual Reports	Laporan Tahunan tahun 2023 2023 Annual Report
8.	Melaksanakan Program Pengenalan Perusahaan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi baru setiap ada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Carrying out a Company Orientation Program for new members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors whenever there are new Directors and Commissioners	Setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris baru Every new member of the Board of Directors and Board of Commissioners	Tidak ada anggota Dewan Komisaris dan Direksi baru There were no new members of the Board of Commissioners and the Board of Directors

No	Kegiatan Activity	RKAP 2024 2024 RKAP	Realisasi 2024 2024 Realization
9.	Menyalurkan dana Program Kemitraan Distributing Partnership Program funds	Penyaluran diatas 80% dari dana tersedia Distribution was above 80% of available funds	Realisasi penyaluran dana PK sebesar 92,34% Realization of PK fund distribution was 92.34%
10.	Monitoring kolektibilitas Pinjaman Program kemitraan Monitoring the collectibility of Partnership Program Loans	Kolektibilitas Pinjaman diatas 80% dari dana yang disalurkan Loan collectibility was above 80% of the funds disbursed	Realisasi kolektibilitas penyaluran pinjaman sebesar 100,00% Realization of loan disbursement collectibility was 100.00%
11.	Menyalurkan dana Program Bina Lingkungan Distributing Environmental Development Program funds	Menyalurkan dana Program Bina Lingkungan di atas 80% dari dana tersedia Community Development Program funds Distribution was above 80% of available funds	Realisasi penyaluran dan Bina Lingkungan sebesar 91,68% Realization of Community Development distribution was 91.68%
12.	<i>Media Monitoring</i>	Rutin dilakukan harian Routinely done daily	Rutin dilakukan harian Routinely done daily
13.	<i>News Analysis</i>	Rutin dilakukan bulanan Routinely done monthly	Rutin dilakukan bulanan Routinely done monthly
14.	Publikasi Berita PPA PPA News Releases	Rutin dilakukan menyesuaikan dengan kegiatan Perusahaan Routinely carried out in accordance with Company activities	5 Siaran Pers 5 Press Releases
15.	Transparansi Informasi: <i>website</i> Perusahaan & Portal BUMN Information Transparency: Company website & SOE Portal	<i>Update dan Maintenance Data</i> Update and Maintenance Data	<i>Update dan Maintenance Data</i> Update and Maintenance Data
16.	Transparansi Informasi: pengelolaan email corpsec@ptppa.com Information Transparency: email management corpsec@ptppa.com	Rutin dilakukan harian Routinely done daily	Rutin dilakukan harian Routinely done daily
17.	Dukungan pada kegiatan acara peringatan hari besar nasional Support for activities to commemorate national holidays	Disesuaikan dengan program acara Pemerintah Adapted to the Government's program of events	Pelaksanaan: • Upacara HUT RI ke-79 • Upacara Kesaktian Pancasila • Upacara Hari Pahlawan Implementation: • 79th Republic of Indonesia Independence Day Ceremony • Pancasila Sanctity Ceremony • Heroes' Day Ceremony
18.	<i>Company Visit</i>	Disesuaikan dengan kegiatan Perusahaan Adapted to Company activities	
19.	Penyusunan Infrastruktur <i>Branding</i> Preparation of Branding Infrastructure	Pelaksanaan distribusi kalender 2023 Perseroan kepada <i>stakeholder</i> eksternal dan media. Distribution of the Company's 2022 calendar to external stakeholders and the media.	Selesai Completed
20.	Dukungan kegiatan Perusahaan Support for Company activities	Disesuaikan dengan kebutuhan Adapted to needs	Rutin dilakukan menyesuaikan dengan kegiatan Perusahaan Routinely carried out in accordance with Company activities
21.	Protokoler Direksi Board of Directors' Protocol	-	Dilaksanakan sesuai kebutuhan Implemented as needed

EVALUASI KINERJA SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sepanjang tahun 2024, Sekretaris Perusahaan telah melaksanakan tugas yang diberikan oleh Direksi dengan berbagai strategi serta rencana kerja terkait penyampaian informasi kepada publik. Dalam upaya internalisasi prinsip-prinsip GCG, Sekretaris Perusahaan secara konsisten menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk menanamkan budaya GCG di seluruh lingkungan Perseroan. Kinerja Sekretaris

CORPORATE SECRETARY PERFORMANCE ASSESSMENT

Throughout 2024, the Corporate Secretary carried out the duties assigned by the Board of Directors covering strategies and work plans related to the delivery of information to the public. In the internalization of GCG principles, the Corporate Secretary consistently organized activities to instill the GCG culture throughout the Company's. The Corporate Secretary's performance is measured

Perusahaan diukur melalui *Key Performance Indicator* (KPI) yang telah ditetapkan. Berdasarkan evaluasi, Direksi menilai bahwa kinerja Sekretaris Perusahaan pada tahun 2024 telah memenuhi ekspektasi dan berjalan dengan baik.

Audit Internal/Satuan Pengawasan Intern

Pendirian Satuan Pengawasan Intern (SPI) menjadi bagian integral dari sistem pengendalian internal, berperan sebagai mitra strategis yang memiliki profesionalisme dan kepercayaan tinggi bagi Perseroan. SPI bertugas melakukan pengawasan terhadap implementasi tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian dengan bantuan auditor yang kompeten dan bersifat independen. Semuanya diarahkan untuk mencapai tujuan Perseroan. SPI berfungsi sebagai entitas kerja independen yang dipimpin oleh Kepala Divisi atau *General Manager* dan langsung bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

PROFIL KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN

Perseroan menunjuk Muhammad Reza Maulana sebagai Kepala Divisi Satuan Pengawasan Intern berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.68A/PPA/1021 tanggal 25 Oktober 2021.

based on a set of key performance indicators (KPI). Based on the evaluation, the Board of Directors considers that the Corporate Secretary's performance in 2024 did meet expectations and was conducted properly.

Internal Audit/Internal Audit Unit

The Internal Audit Unit (SPI) has become an integral part of the internal control system, and acts as a highly professional and trusted strategic partner for the Company in supervising governance implementation, risk management and control with competent and independent auditors to achieve the Company's goals. SPI functions as an independent work unit led by the Division Head or General Manager who is and directly responsible to the President Director.

HEAD OF INTERNAL AUDIT UNIT PROFILE

The Company appointed Muhammad Reza Maulana as Head of the Internal Audit Division based on the Board of Directors Decree No. 68A/PPA/1021 dated October 25, 2021.



Muhammad Reza Maulana
Menjabat sejak 25 Oktober 2021
Serving since October 25, 2021

Warga Negara Nationality	:	Indonesia Indonesian
Usia Age	:	45 tahun pada tahun buku 2024 45 years old in Fiscal Year 2023
Domisili Domicile	:	Jakarta Timur East jakarta
Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	:	Surat Keputusan Direksi No.68A/PPA/1021 tanggal 25 Oktober 2021 Board of Directors Decree No. No.68A/PPA/1021 dated October 25, 2021
Pendidikan Education	:	Sarjana Akuntansi dari Universitas Brawijaya Malang (2002) Bachelor's degree in Accounting from Universitas Brawijaya Malang (2002)
Sertifikasi Profesi Professional Certification	:	• Qualified Internal Auditor (QIA) dari Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) sejak tahun 2012 • Certified Fraud Examiner (CFE) dari Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) sejak tahun 2020 • Certified Internal Audit Executive (CIAE) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sejak tahun 2022 • Chartered Accountant (CA) dari Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sejak tahun 2024

Pengalaman Kerja Work Experience	:	- Kepala Departemen Internal Audit dan Risk Management PT Astra International, Tbk (Januari 2014 – Oktober 2021) - Senior Auditor PT Astra International, Tbk (Juli 2007 – Desember 2013) - Auditor PT Bank Syariah Mandiri (Maret 2003 – Juli 2007)
Rangkap Jabatan Concurrent Positions	:	Tidak ada None
Hubungan Afiliasi Affiliated Relationships	:	Tidak ada None

Sertifikasi Profesi

Upaya meningkatkan standar dan kemampuan auditor, sertifikasi menjadi suatu kebutuhan untuk menandakan bahwa auditor memiliki kualitas yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Berikut adalah daftar karyawan SPI yang telah mengikuti program sertifikasi, antara lain:

Professional Certification

To improve the auditors' standards and capabilities, certification has become a necessity to show that auditors have adequate quality to support their duties and responsibilities. The following shows the SPI employees who have taken part in certification programs:

No	Nama Name	Nama Sertifikasi Name of Certification	Lembaga Penerbit Institution	Tahun Sertifikasi Certification year
1	Muhammad Reza Maulana	1. Qualified Internal Auditor (QIA) 2. Certified Fraud Examiner (CFE) 3. Certified Internal Audit Executive (CIAE) Chartered Accountant (CA) 4. Chartered Accountant (CA)	1. Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) 2. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) 3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 4. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)	1. 2012 2. 2020 3. 2022 4. 2024
2	Rudiawan Noor Aliamsyah	1. Qualified Internal Auditor (QIA) 2. Certified Fraud Examiner (CFE) 3. Certified Internal Audit Executive (CIAE) Chartered Accountant (CA) 4. Chartered Accountant (CA)	1. Internal Audit Education Foundation (YPIA) 2. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) 3. The Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) 4. The Indonesian Accountant Association (IAI)	2018
3	Elsa Andriani	Qualified Internal Auditor (QIA) - Lanjutan	Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) Internal Audit Education Foundation (YPIA)	2023
4	Alexander Jascha Paningotan Napitupulu	Perpajakan Brevet A, B dan C Taxation Brevet A, B and C	PT Cipta Sarana Cendekia	2019

PENGEMBANGAN KOMPETENSI AUDITOR INTERNAL

Perseroan menerapkan kebijakan terkait pengembangan dan peningkatan keterampilan Auditor Internal melalui berbagai pelatihan dan pendidikan, baik yang diselenggarakan secara internal maupun oleh lembaga eksternal. Informasi lengkap mengenai daftar kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang diikuti oleh Kepala Satuan Pengawasan Internal sepanjang tahun 2024 dapat ditemukan di bagian Profil Perseroan dalam laporan tahunan ini. Selain itu, program pengembangan kompetensi yang diikuti oleh auditor internal sepanjang tahun 2024 antara lain:

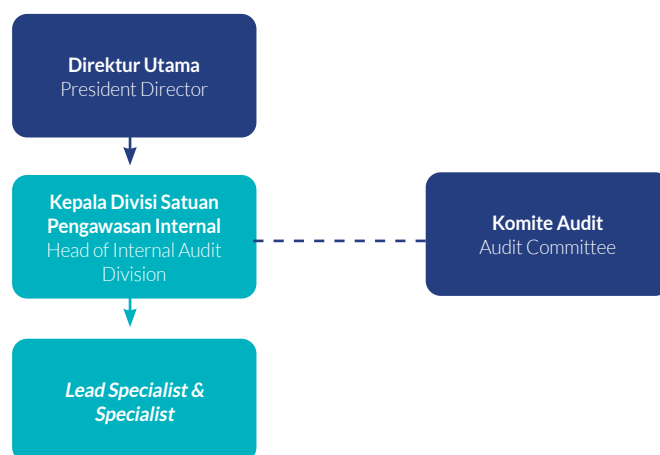
INTERNAL AUDITOR COMPETENCY DEVELOPMENT

The Company has policies related to developing and improving the skills of Internal Auditors through internal and by external training and education. Complete information on the training and competency improvement activities undertaken by the Head of the Internal Audit Unit in 2024 can be found in the Company Profile section of this annual report. In addition, the competency development programs that internal auditors participated in in 2024 included:

Name	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Material	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Muhammad Reza Maulana	Chartered Accountant (CA) GRC Summit	1. Jakarta, 18 Juli – 21 September 2024 2. Jakarta, 22 – 23 Agustus 2024	1. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 2. Perkumpulan Tata Kelola Manajemen Risiko dan Kepatuhan (Asosiasi GRC)
Rudiawan Noor Aliamsyah	1. Hukum Kepailitan dan PKPU 2. International Tax Conference 2024 (Managing Uncertainty In The Dynamic Global Tax Landscape)	1. Jakarta, 24 September 2024 2. Yogyakarta, 3 Oktober 2024	1. Indonesian Accountant Association (IAI) 2. Association of Risk Management and Compliance Management (GRC Association)
Elsa Andriani	1. Bankruptcy Law and PKPU 2. International Tax Conference 2024 (Managing Uncertainty in the Dynamic Global Tax Landscape)	1. Jakarta, September 24, 2024 2. Yogyakarta, October 3, 2024	1. Inhouse 2. Indonesian Accountant Association (IAI)
	1. <i>Governance, Risk Management & Compliance</i> 2. <i>Workshop Fraud Risk Management and Anti Fraud Programs</i>	1. Jakarta, 14 - 15 Mei 2024 2. Jakarta, 22 - 23 Juli 2024	1. Inhouse 2. YPIA
Alexander Jascha Paningotan Napitupulu	1. <i>Workshop "Memperkuat Integritas Laporan Keuangan BUMN: Implementasi Petunjuk Teknis ICoFR."</i> 2. <i>Workshop "Strengthening the integrity of BUMN Financial Statements: Implementation of ICoFR Technical Guidelines."</i>	1. Jakarta, 17 Desember 2024 2. Jakarta, December 17, 2024	1. PwC

STRUKTUR DAN KEDUDUKAN DIVISI SATUAN PENGAWASAN INTERN

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-76/PPA/0824 tentang Struktur Organisasi PT Perusahaan Pengelola Aset, struktur organisasi Divisi Satuan Pengawasan Intern per 31 Desember 2024 sebagai berikut:



Secara struktural, Kepala Divisi Satuan Pengawasan Internal berada langsung di bawah Direktur Utama. Di setiap jenjangnya, setiap Auditor mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan penugasan audit internal mengacu pada panduan profesi dan rencana kegiatan yang telah disusun.

INTERNAL AUDIT DIVISION ORGANIZATIONAL STRUCTURE AND POSITION

Based on Board of Directors Decree No. SK-76/PPA/0824 concerning the Organizational Structure of PT Perusahaan Pengelola Aset, the organizational structure of the Internal Audit Division as of December 31, 2024, was as follows:

Structurally, the Head of the Internal Audit Unit Division is directly under the President Director. At each level, each Auditor has duties, authorities and responsibilities to carry out internal audit assignments referring to professional guidelines and predetermined activity plans.

TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN DIVISI SATUAN PENGAWASAN INTERN

Divisi Satuan Pengawasan Internal berperan melaksanakan fungsi *assurance* dan konsultasi (*consulting*) yang independen dan objektif bagi manajemen sehingga dapat mendorong penciptaan nilai tambah dan memperbaiki operasional bisnis Perseroan. Tugas dan tanggung jawab Divisi SPI sesuai Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) meliputi:

1. Menyusun dan melaksanakan program kerja rencana audit internal berbasis risiko sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun;
2. Menyampaikan rencana audit internal kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk dilakukan *review* dan persetujuan;
3. Menguji, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian Perseroan sesuai dengan kebijakan Perseroan;
4. Melakukan audit/*review* serta penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, manajemen risiko, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya;
5. Melakukan audit/*review* dengan tujuan tertentu pada satuan kerja dan/atau kegiatan, sesuai dengan rencana audit internal tahunan;
6. Memberikan informasi yang objektif serta memberikan rekomendasi atau saran perbaikan yang diperlukan tentang kegiatan yang diaudit kepada *stakeholder* terkait;
7. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikannya kepada pihak terkait;
8. Memantau, menganalisis, dan melaporkan pelaksanaan rencana aksi atas rekomendasi yang telah diberikan;
9. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
10. Melakukan kegiatan konsultasi (*consulting*) atas dasar permintaan manajemen dalam rangka pencapaian tujuan Perseroan tanpa mengambil alih tanggung jawab manajemen;
11. Melakukan tugas lain yang dipandang perlu oleh Direktur Utama dan/atau Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
12. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama Perseroan dan Dewan Komisaris melalui Ketua Komite Audit.
13. Baik dalam penugasan audit maupun konsultasi, Auditor Internal hanya bertanggung jawab pada rekomendasi dan/atau masukan serta opini dan/atau kesimpulan yang dihasilkan dari prosedur yang dilakukan secara memadai dari penugasan tersebut.

PIAGAM AUDIT INTERNAL

Divisi Satuan Pengawasan Internal Perseroan memiliki Piagam Audit Internal atau Internal Audit Charter yang merupakan dokumen formal Perseroan mengenai keberadaan dan komitmen Dewan Komisaris dan Direksi atas fungsi Audit Internal. Piagam Audit Internal menjelaskan mengenai Visi, Misi, Ruang Lingkup, Struktur dan Kedudukan, Tanggung jawab, Wewenang dan Kode Etik, serta Hubungan Kerja dari Audit Internal.

Piagam Audit Internal merupakan dokumen yang bersifat dinamis sehingga perlu ditinjau secara berkala. Di tahun 2024, telah dilakukan

INTERNAL AUDIT DIVISION DUTIES, RESPONSIBILITIES, AND AUTHORITIES

The Internal Audit Division is in charge of performing the independent and objective functions of assurance and consulting to encourage the creation of added value and improve the Company's business operations. The SPI Division duties and responsibilities based on the Internal Audit Charter include:

1. Preparing and carrying out the risk-based internal audit plan work program at least once a year.
2. Submitting the Internal Audit Plan to the President Director and Board of Commissioners through the Audit Committee for further review and approval.
3. Examining, evaluating, and reporting the implementation of governance, risk management, and control of the Company in accordance with the Company's policies.
4. Performing audits/reviews and evaluating the efficiency and effectiveness in finance, accounting, operations, risk management, human capital, marketing, information technology, and other activities.
5. Performing audits/reviews with a specific purpose in the work unit, and/or activities, in accordance with the annual internal audit plan.
6. Providing objective information and recommendations for improvements as required for the activities being audited to related stakeholders.
7. Drafting audit reports and submitting them to the relevant parties.
8. Monitoring, analyzing, and reporting the implementation of corrective follow-up actions on the recommendations made.
9. Creating programs to evaluate the quality of internal audit activities conducted.
10. Conducting consulting activities based on the management's request in order to achieve Company's goals without taking over management responsibilities.
11. Performing other duties as deemed necessary by the Company's President Director and/or Board of Commissioners through the Audit Committee.
12. Submitting quarterly activity reports on the implementation of duties to the President Director and the Board of Commissioners through the Audit Committee.
13. Either in the audit or the consulting assignments, the Internal Audit Division is only responsible for the recommendations and/or input and the opinions and/or conclusions resulting from the procedure carried out adequately in the assignments.

INTERNAL AUDIT CHARTER

The Company's Internal Audit Unit has an Internal Audit Charter as a formal corporate document regarding existence and commitment of the Board of Commissioners and Board of Directors for the Internal Audit function. The Internal Audit Charter contains the Internal Audit Vision, Mission, Scope, Structure and Position, Responsibilities, Authorities and Code of Conduct, and Work Relationship.

The internal audit charter is a dynamic document that needs to be reviewed regularly. In 2024, a new internal audit charter was made,

pembaruan atas Piagam Audit Internal yang ditetapkan melalui Keputusan Direksi No. SK-37/PPA/0424 tentang Piagam Audit Internal.

Pelaksanaan Tugas Satuan Pengawasan Intern Tahun 2024

Selama tahun 2024, Divisi Satuan Pengawasan Internal melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan, antara lain:

1. Melakukan penugasan *assurance*, sebagai berikut:
 - a. Evaluasi GCG PT PPA tahun 2023.
 - b. Audit atas Kegiatan Investasi pada 3 debitur.
 - c. Audit Bersama SPI PT Nindya Karya atas PT Nindya Beton.
2. Melakukan penugasan *consulting*, sebagai berikut:
 - a. *Review* atas kegiatan investasi pada 1 debitur.
 - b. Pendampingan atas revisi Kebijakan Standarisasi Klausul Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa.
 - c. Pendampingan atas tindak lanjut pemenuhan Kewajiban Lanjutan debitur.
 - d. *Review* atas harmonisasi kebijakan *Holding*.
 - e. *Review* atas penghitungan peringkat komposit risiko Triwulan IV Tahun 2023 untuk keperluan penilaian *Risk Maturity Index* (RMI) oleh konsultan.
3. Kegiatan lainnya yang dilaksanakan Divisi SPI adalah:
 - a. Sebagai Ketua dan Sekretaris Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) serta narahubung antara PT PPA (Persero) dengan KPK-RI untuk WBS terintegrasi.
 - b. Pendamping/*Counterpart* atas Kegiatan Audit Laporan Keuangan PT PPA (Persero) Konsolidasian dan Entitas Anak Tahun Buku 2024.
 - c. Pendamping/*Counterpart* atas Kegiatan Pemutakhiran Data Entitas dan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I & Semester II 2024.
 - d. Pendamping/*Counterpart* atas kegiatan pihak eksternal lainnya.
 - e. Membantu penyediaan data/informasi atas P3DN Pengadaan Barang dan Jasa.
 - f. *Monitoring* tindak lanjut rekomendasi hasil audit yang dilakukan oleh pihak eksternal (BPK RI, Kantor Akuntan Publik), maupun tindak lanjut rekomendasi hasil audit oleh SPI.
 - g. Rapat-rapat berkala dengan Direktur Utama dan Komite Audit.

as determined through the Board of Directors Decree No. SK-37/PPA/0424 concerning the Internal Audit Charter.

Implementation of Internal Audit Unit Duties in 2024

During 2024, the Internal Audit Unit Division carried out the following duties and responsibilities in accordance with the Annual Work Plan:

1. Carried out assurance assignments, as follows:
 - a. Evaluated PT PPA GCG for 2023.
 - b. Audited investment activities for 3 debtors.
 - c. Audited SPI PT Nindya Karya Atas PT Nindya Beton.
2. Carried out consulting assignments, as follows:
 - a. Reviewed investment activities for 1 debtor.
 - b. Assisted in the revision of the Standardization Policy Clause Agreement Procurement of Goods/Services.
 - c. Assisted in the follow-up to fulfill the continued obligations of the debtor.
 - d. Reviewed the Holding policy harmonization.
 - e. Reviewed the calculation of the Risk Composite ranking for QIV 2023 for the purposes of the Risk Maturity Index (RMI) assessment by the Consultant.
3. Other activities carried out by the SPI Division included:
 - a. As Chair and Secretary of the Whistleblowing System Reporting Team and liaison between PT PPA (Persero) and the KPK-RI for integrated WBS.
 - b. Companion/Counterpart for Audit Activities of PT PPA (Persero) Consolidated Financial Statements and Subsidiaries for Fiscal Year 2024.
 - c. Companion/Counterpart for Updating Entity Data and Monitoring Follow-up Recommendations for BPK RI Inspection Results Semester I & Semester II 2024.
 - d. Companion/Counterpart for other external party activities.
 - e. Assisted in providing data/information on P3DN Procurement of Goods and Services.
 - f. Monitored the Audit Recommendations Follow-up conducted by External Parties (BPK RI, Public Accountant Firm), as well as follow-up audit results recommendations by SPI.
 - g. Attended periodic meetings with the President Director and Audit Committee.

Akuntan Publik

Public Accountant

KEBIJAKAN PENUNJUKAN AKUNTAN PUBLIK

Akuntan publik berperan sebagai pihak eksternal yang bertugas memberikan opini atas kepatuhan laporan keuangan Perseroan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Komisaris dan Komite Audit. Komite Audit, sebagai organ pendukung Dewan Komisaris, memberikan rekomendasi tersebut setelah melalui proses seleksi yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa yang berlaku. Untuk menjaga independensi dan memastikan kualitas hasil audit, auditor eksternal yang dipilih wajib bebas dari konflik kepentingan dengan Perseroan.

Opini Wajar dengan Pengecualian atas Laporan Keuangan Perseroan

Dalam Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024, Perseroan memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.

Nama dan Tahun Kantor Akuntan Publik serta Akuntan Publik yang Melakukan Audit Laporan Keuangan Tahunan Selama 5 (Lima) Tahun Terakhir

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan pada 12 Agustus 2024, Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024. Dalam rangka menjaga independensi dan kualitas hasil audit, akuntan publik yang ditunjuk harus bebas dari potensi konflik kepentingan dengan Perseroan.

PUBLIC ACCOUNTANT APPOINTMENT POLICY

Public accountants act as external parties in charge of providing opinions on the compliance of the Company's financial statements with the Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia. The appointment of a Public Accounting Firm is carried out through the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS), based on recommendations from the Board of Commissioners and the Audit Committee. The Audit Committee, as a supporting organ of the Board of Commissioners, provides the recommendation after going through a selection process carried out in accordance with the applicable goods and services procurement procedures. To ensure independence and quality of audit results, the external auditors chosen must be free from conflicts of interest with the Company.

Qualified Opinion on the Company's Financial Statements

For the consolidated financial statements for the fiscal year ended December 31, 2024, the Company received an unqualified opinion.

Names and Years Public Accounting Firms and Public Accountants Audited the Annual Financial Reports for the Last 5 (Five) Years

Based on the annual GMS decision on August 12, 2024, the Company appointed the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) to conduct an audit of the Company's financial statements for the year ended on December 31, 2024. To maintain the independence and quality of audit results, the appointed public accountant must be free from potential conflicts of interest with the Company.

Akuntan Publik Tahun 2024 Public Accountant in 2023

Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	:	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia)
Akuntan Accountant	:	Maxson Hakim Wijaya
Tahun Audit Year of Audit	:	2024
Periode Penugasan Assignment Period	:	1 Januari – 31 Maret 2025 January 1 – March 31, 2025
Jasa Services	:	- Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian; - Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Tahun Buku 2024 - Audit of Consolidated Financial Statements; - Financial Report and Implementation of Micro and Small Business Funding Program (UMK) for Fiscal Year 2024
Jasa Lainnya Other Services	:	-
Biaya Fee	:	Rp900.900.000 Rp900,900,000

Berikut informasi mengenai KAP dan Akuntan yang melakukan audit PPA selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu:

The following shows the KAPs and accountants that conducted PPA audits over the last 5 (five) years:

Daftar Akuntan Publik 2020-2024
List of Public Accountants 2020-2024

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Publik Public Accountant	Lingkup Audit Audit Scope	Opini Opinion	Biaya Fee	Izin AP Licence
2024	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia)	Maxson Hakim Wijaya	- Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian; - Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Tahun Buku 2024 - Audit of Consolidated Financial Statements; - Financial and Implementation Reports Programs Funding for Micro and Small Enterprises (MSE) Fiscal Year 2023.	Wajar tanpa pengecualian Unqualified	Rp900.900.000 Rp900.900,000	AP.1680 AP.1680
2023	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia)	Maxson Hakim Wijaya	- Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian; - Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Tahun Buku 2023. - Audit of Consolidated Financial Statements; - Financial and Implementation Reports Programs Funding for Micro and Small Enterprises (MSE) Fiscal Year 2023.	Wajar dengan pengecualian Qualified Opinion	Rp707.625.000 Rp707,625,000	AP.1680 AP.1680
2022	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia)	Maxson Hakim Wijaya	- Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian; - Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program; - Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Tahun Buku 2022. - Audit of Consolidated Financial Statements; - Financial and Implementation Reports Programs Funding for Micro and Small Enterprises (MSE) Fiscal Year 2022.	Wajar dalam semua hal yang material Fair in all material aspects	Rp388.500.000 Rp388,500,000	AP.1680 AP.1680

Daftar Akuntan Publik 2020-2024

List of Public Accountants 2020-2024

Tahun Buku Fiscal Year	Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Akuntan Publik Public Accountant	Lingkup Audit Audit Scope	Opini Opinion	Biaya Fee	Izin AP Licence
2021	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia)	Benny Andria	- Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian; - Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program; - Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) Tahun Buku 2021. - Audit of Consolidated Financial Statements; - Financial and Implementation Reports Programs - Funding for Micro and Small Enterprises (MSE) Fiscal Year 2021.	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified	Rp410.000.000 Rp410,000,000	AP.0181 AP.0181
2020	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia)	Benny Andria	- Audit atas Laporan Keuangan; - Audit Laporan Keuangan PKBL; - Audit Kepatuhan; - Audit Hasil Evaluasi Kinerja. - Audit of Financial Reports; - Audit of PKBL Financial Reports; - Compliance Audit; - Audit of Performance Evaluation Results.	Wajar Tanpa Pengecualian Unqualified	Rp682.000.000 Rp682,000,000	AP.0181 AP.0181

BESARNYA FEE UNTUK MASING-MASING JENIS JASA YANG DIBERIKAN OLEH KANTOR AKUNTAN PUBLIK PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Perseroan tidak merinci biaya jasa (*fee*) kepada Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) berdasarkan jenis layanan. Namun, *fee* tersebut diberikan secara paket untuk keseluruhan pekerjaan audit yang dilakukan.

FEE FOR EACH TYPE OF SERVICE PROVIDED BY THE PUBLIC ACCOUNTING FIRM IN THE LAST FISCAL YEAR

The Company does not provide service fees to the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia) based on the type of service, but combines the fee into a package for all audit work carried out.

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Sistem Pengendalian Internal yang efektif merupakan elemen krusial dalam pengelolaan Perseroan dan menjadi fondasi bagi kelangsungan operasional yang sehat dan aman. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara pada Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa Direksi wajib menetapkan suatu Sistem Pengendalian Intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset Perseroan.

Pembentukan Sistem Pengendalian Internal juga bertujuan untuk merealisasikan komitmen Perseroan sebagai entitas yang mematuhi prinsip-prinsip penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Inisiatif pengendalian internal ini khususnya diterapkan pada elemen-elemen krusial seperti operasional, keuangan, sumber daya manusia, dan juga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Internal yang dimiliki oleh Perseroan bertujuan untuk mengurangi potensi risiko dalam operasional dan menghindari praktik penyimpangan etika bisnis yang dapat merugikan kinerja Perseroan.

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal di Perseroan merupakan sebuah proses integral yang melibatkan seluruh karyawan, mulai dari pimpinan hingga staf, sebagai tindakan berkelanjutan. Langkah ini diambil untuk membangun komitmen yang konsisten dalam mencapai tujuan organisasi. Sistem Pengendalian Internal di Perseroan telah dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip *Internal Control-Integrated Framework* yang ditetapkan COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*).

PENGENDALIAN ATAS PELAKSANAAN OPERASIONAL DAN PELAPORAN KEUANGAN

Penerapan kendali keuangan dan operasional di Perseroan dilakukan secara bertingkat, melibatkan semua elemen yang ada di dalamnya. Dewan Komisaris, dalam mengimplementasikan Pengendalian Keuangan dan Operasional, melakukan pemantauan dan memberikan saran terkait dengan kecukupan dan kepatutan dalam penyusunan laporan keuangan serta pengelolaan risiko. Proses ini memperhatikan prinsip kehati-hatian dan diperkuat oleh peran Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan.

Di sisi lain, Direksi mengimplementasikan Sistem Pengendalian Internal melalui penerapan kebijakan dan prosedur Perseroan dengan konsistensi, memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, terutama terkait dengan aktivitas operasional Perseroan, manajemen risiko, rencana strategis, pembagian tugas, pendelegasian wewenang, dan kebijakan akuntansi yang memadai.

Direksi menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif untuk melindungi investasi dan aset Perseroan. Lingkungan pengendalian internal di Perseroan dijalankan dengan ketertiban dan struktur,

An effective Internal Control System is a crucial element in the Company's management and forms the foundation for continuing sound and safe operations. It is based on the Minister of State for SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs, where in Article 28 paragraph (1) it states that the Board of Directors is obliged to establish an effective internal control system to secure investments and Company assets.

The establishment of an Internal Control System is also intended to realize the Company's commitment as an entity that complies with the principles of implementing Good Corporate Governance. This internal control initiative is especially applied to crucial elements such as operations, finance, human capital, and compliance with laws and regulations.

The Company's Internal Control System is also intended to reduce potential risks in operations, and to avoid practices that deviate from business ethics that could harm the Company's performance.

The Company's Internal Control System is an integral process that involves all employees, from management to staff, as a continuous action. This helps to build a consistent commitment to achieving organizational goals. The Company's Internal Control System refers to the Internal Control-Integrated Framework principles established by COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*).

OPERATIONAL ACTIVITIES AND FINANCIAL REPORTING CONTROL

The implementation of financial and operational control in the Company is carried out in stages, involving all existing elements. The Board of Commissioners monitors and provides advice on the adequacy and propriety when preparing financial reports and risk management. This process takes into account the precautionary principle and is supported by the Audit Committee and the Risk and Corporate Governance Monitoring Committee.

In addition, the Board of Directors uses the Internal Control System when instigating Company's policies and procedures consistently, ensuring compliance with applicable regulations, especially those related to the Company's operational activities, risk management, strategic plans, division of duties, delegation of authority, and adequate accounting policies.

The Board of Directors has established an effective internal control system to protect the Company's investments and assets. The Company's internal control environment is carried out in an orderly

tingkat integritas yang tinggi, memegang teguh nilai etika, dan melibatkan karyawan yang memiliki kompetensi yang tinggi.

Divisi SPI merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Internal yang dibentuk untuk membantu Direktur Utama dalam memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Saham yang bertanggung jawab di dalam melaksanakan audit internal di Perseroan, Divisi SPI melakukan upaya peningkatan pengendalian internal (*internal control*) dalam pelaporan keuangan berbagai kegiatan operasional Perseroan. Pengendalian internal di lingkungan Perseroan senantiasa dievaluasi agar mampu mengikuti perkembangan usaha Perseroan.

KESESUAIAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN INTERNAL DENGAN KERANGKA COSO

PT PPA telah melakukan pembaruan Kebijakan Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*) pada tahun 2023 melalui Keputusan Direksi No. SK-137/PPA/1223 tanggal 13 Desember 2023. Kebijakan Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*) merupakan suatu proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh karyawan, untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Perseroan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*) terdiri atas unsur:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*);
2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*);
3. Kegiatan Pengendalian (*Control Activities*);
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*);
5. Pemantauan (*Monitoring*).

Penerapan unsur Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*) dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan Perseroan. Semua pihak di Perseroan bertanggung jawab atas terselenggaranya Sistem Pengendalian Internal yang andal dan efektif. SPI sesuai dengan Piagam Audit Internal memiliki tanggung jawab untuk meyakinkan seluruh proses pengendalian pada Perseroan berjalan secara efektif. SPI juga bertanggung jawab untuk melaporkan kepada Direksi serta Komite Audit atas kecukupan dan efektivitas Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan pada Perseroan, yang disertai dengan rekomendasi untuk memperbaiki proses pengendalian.

Manajemen Perseroan secara terus-menerus memberikan pemahaman mengenai Sistem Pengendalian Internal kepada seluruh karyawan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

Secara umum, sistem pengendalian internal bukanlah suatu aktivitas yang ditambahkan dalam proses manajemen, akan tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam proses tersebut. Lima komponen yang menunjang efektivitas pengendalian internal sesuai dengan kerangka COSO yang diterapkan Perseroan yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian, diterapkan melalui:
 - a. Komitmen Perseroan terhadap integritas dan nilai-nilai etika;
 - b. Dewan Komisaris yang independen terhadap manajemen

and structured manner, with a high level of integrity, upholds ethical values, and involves highly competent employees.

The SPI Division is part of the Internal Control System that was established to assist the President Director in fulfilling the obligations to Shareholders, and is responsible for carrying out internal audits in the Company. The SPI Division carries out improvements in the internal control of the Company's financial reporting for operational activities. Internal control within the Company is always evaluated to follow the Company's business developments.

CONFORMITY BETWEEN INTERNAL CONTROL POLICY WITH COSO FRAMEWORK

PT PPA updated the Internal Control System Policy in 2023 through Board of Directors Decree No. SK-137/PPA/1223 dated December 13, 2023. The Internal Control System Policy contains an integral process of actions and activities carried out continuously by the management and all employees, to provide adequate confidence in achieving organizational goals through effective and efficient activities, reliable financial reporting, security of the Company's assets and compliance with prevailing laws and regulations.

Internal Control System consists of the following elements:

1. Control Environment
2. Risk Assessment
3. Control Activities
4. Information and Communication
5. Monitoring

The Internal Control System is integrated, and has become an integral part of the Company's activities. All parties in the Company are responsible for the running a reliable and effective Internal Control System. In accordance with the Internal Audit Charter, SPI has the responsibility to ensure that all control processes in the Company run effectively. SPI is also responsible for reporting to the Board of Directors and the Audit Committee on the adequacy and effectiveness of the Company's Internal Control System, accompanied by recommendations for improving the control process.

The Company's management continuously provides an understanding of the Internal Control System to all employees to provide adequate confidence in achieving the organizational goals.

In general, the internal control system is not an additional activity in the management process, but is an inseparable part of the process. The five components that support the internal control's effectiveness based on the COSO framework applied in the Company are:

1. Control Environment, implemented through:
 - a. Company commitment to integrity and ethical values;
 - b. The Board of Commissioners is independent of management

- dan melaksanakan pengawasan terhadap pengembangan dan kinerja pengendalian internal;
- c. Manajemen yang dengan pengawasan Dewan Komisaris, menetapkan struktur, jalur pelaporan, kewenangan, dan tanggung jawab dalam mencapai tujuan;
 - d. Komitmen Perseroan untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten; dan
 - e. Komitmen Perseroan untuk mendorong Insan Perseroan mengemban akuntabilitas dan tanggung jawabnya terhadap pengendalian internal.
2. Penilaian Risiko dilakukan oleh Perseroan dengan mengidentifikasi dan menganalisis risiko/potensi risiko yang timbul dari kegiatan Perseroan untuk merumuskan mitigasi/langkah penanganan, dan memantau penerapan kontrol atas risiko/potensi risiko dimaksud;
 3. Kegiatan Pengendalian meliputi kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mengelola risiko yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan Perseroan pada setiap tingkat dan unit Perseroan;
 4. Informasi dan Komunikasi Sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh Perseroan;
 5. Pemantauan (*Monitoring*) Pemantauan adalah suatu proses penilaian terhadap kualitas Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*), termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi Perseroan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

Pemantauan Sistem Pengendalian Internal (*Internal Control System*) dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan *review* lainnya.

TINJAUAN DAN EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Perseroan terus berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas penerapan Sistem Pengendalian Internal. Evaluasi dan peninjauan berkala terhadap Sistem Pengendalian Internal dilakukan oleh manajemen. Dalam konteks ini, peran Divisi SPI menjadi krusial dalam menilai kelayakan dan efektivitas pengendalian internal yang diterapkan oleh manajemen Perseroan. Pengendalian internal merupakan elemen terintegrasi dalam sistem dan prosedur di setiap kegiatan unit kerja, sehingga bila terjadi penyimpangan, dapat terdeteksi secara dini dan unit kerja terkait dapat mengambil tindakan perbaikan.

PERNYATAAN DIREKSI DAN/ATAU DEWAN KOMISARIS ATAU KOMITE ATAS KECUKUPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Dari hasil audit terhadap efektivitas sistem pengendalian internal, Manajemen Perseroan menilai cukup memadai.

- and carries out supervision over the development and performance of internal control;
- c. Management, with the supervision of the Board of Commissioners, determines the structure, reporting lines, authority and responsibility in achieving the goals;
 - d. The Company's commitment to attracting, developing and retaining competent individuals; and
 - e. The Company's commitment to encouraging Company Personnel to assume accountability and responsibility for internal control.
2. Risk assessment is carried out by the Company by identifying and analyzing risks/potential risks arising from the Company's activities to formulate mitigation/ handling steps, and to monitor the implementation of controls over the risks/potential risks in question;
 3. Control activities include policies and procedures designed to mitigate risks that have the potential to disrupt the achievement of the Company's objectives at every level and unit of the Company;
 4. Information and Communication system, a process of presenting reports on operational, financial activities, as well as obedience and compliance with the provisions in applicable laws and regulations by the Company;
 5. Monitoring, a process of assessing the quality of the Internal Control System, including the internal audit function at each level and unit in the Company's organizational structure, so that it can be implemented optimally.

Monitoring the Internal Control System is carried out through continuous monitoring, separate evaluations, follow-up on recommendations from audit results and other reviews.

INTERNAL CONTROL SYSTEM REVIEW AND EVALUATION

The Company continues to be committed to improving the effectiveness of implementing the Internal Control System. Management carries out periodic evaluations and reviews of the Internal Control System. In this context, the role of the SPI Division is crucial in assessing the feasibility and effectiveness of internal controls implemented by the Company's management. Internal control is an integrated part in the systems and procedures in all work unit activities, so that if deviations occur, they can be detected early and the relevant work unit can take corrective action.

STATEMENT BY THE BOARD OF DIRECTORS AND/OR BOARD OF COMMISSIONERS OR COMMITTEES ON THE ADEQUACY OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM

From the results of the audit of the internal control system's effectiveness, the Company's management has assessed that the Company's internal control aspects are adequate.

Manajemen Risiko

Risk Management

Perusahaan menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan operasional dan dapat mempengaruhi hasil usaha dan kinerja Perusahaan. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang komprehensif dan sistematis merupakan salah satu aspek penting bagi Perusahaan dalam mengelola risiko secara efektif, efisien dan konsisten sebagai perwujudan dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Pelaksanaan proses manajemen risiko dijalankan secara menyeluruh di setiap aktivitas Perusahaan dalam mengambil keputusan, mengendalikan dan mengoptimalkan tingkat pengembalian terhadap risiko Perusahaan.

Perusahaan senantiasa mengevaluasi dan menyempurnakan proses bisnis, menyusun kebijakan dan/atau prosedur serta melakukan pemantauan terhadap penerapan kebijakan tersebut untuk mendukung kegiatan usaha dalam rangka mewujudkan efektivitas strategi manajemen risiko agar tetap sejalan dengan model dan perkembangan bisnis Perusahaan yang dinamis dan semakin kompleks.

PEDOMAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN

Sebagai bentuk komitmen Perusahaan dalam penerapan manajemen risiko secara luas, sistematis dan terintegrasi, Perusahaan telah menyusun Kebijakan Manajemen Risiko yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direksi yang secara berkelanjutan dievaluasi dan diperbaharui kembali dengan perubahan terakhir berdasarkan Keputusan Direksi No. SK-122/PPA/1124 tanggal 28 November 2024. Kebijakan Manajemen Risiko tersebut mengatur tentang sistem manajemen risiko di Perusahaan yang mengacu pada standar ISO 31000: 2018 "Risk Management-Principles and Guideline" serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, beserta seluruh Petunjuk Teknis yang ditetapkan melalui Keputusan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN. Kebijakan Manajemen Risiko menjadi pedoman bagi seluruh insan Perusahaan dalam melaksanakan kegiatan dan penerapan manajemen risiko.

Tujuan dari penerapan manajemen risiko bagi Perusahaan adalah:

1. Pengelolaan secara efektif terhadap kejadian yang berdampak negatif atau peluang yang berpengaruh terhadap maksud dan tujuan PPA.
2. Membantu manajemen dalam menciptakan dan melindungi nilai.
3. Meningkatkan kemampuan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi mengenai pengelolaan dampak negatif dari risiko dan mengambil keuntungan dari potensi peluang.
4. Meningkatkan proses pengelolaan perencanaan dan kinerja sehingga membuat Perseroan mampu memfokuskan pada aktivitas utama bisnis.
5. Meningkatkan kemampuan untuk mengarahkan sumber daya kepada risiko-risiko yang berdampak signifikan.
6. Menciptakan budaya organisasi yang positif dan setiap orang

The Company understands that risk is an inseparable part of operational activities and can affect the Company's business results and performance. Therefore, implementing comprehensive and systematic risk management is an important aspect for the Company to manage risks effectively, efficiently and consistently as a manifestation of good corporate governance (GCG) implementation.

The risk management process is carried out thoroughly in all Company activities when making decisions, to control and optimize the rate of return on the Company's risks.

The Company continually evaluates and perfects its business processes, develops policies and/or procedures and monitors the application of these policies to support business activities to realize the effectiveness of risk management strategies so they remain in line with the Company's dynamic and increasingly complex business model and development.

COMPANY RISK MANAGEMENT GUIDELINES AND POLICIES

As part of the Company's commitment to applying risk management in a broad, systematic and integrated manner, the Company has prepared a Risk Management Policy that was established through Board of Directors' Decree which is continuously evaluated and updated with the latest changes based on Board of Directors' Decree No. SK-122/PPA/1124 dated November 28, 2024. The Risk Management Policy regulates the Company's risk management system that refers to the ISO 31000: 2018 standard "Risk Management-Principles and Guidelines" and the Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 dated March 3, 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs, together with all Technical Instructions stipulated in the Deputy for Finance and Risk Management, Ministry of SOEs Decree. The Risk Management Policy serves as a guideline for all Company personnel when carrying out and implementing risk management activities.

The Company's risk management objectives include:

1. Effective management of events that have a negative impact or opportunity that affect the PPA's aims and objectives.
2. Assisting management in creating and protecting value.
3. Increasing the ability to make informed decisions regarding managing the negative impact of risks and taking advantage of potential opportunities.
4. Improving the planning and performance management processes so that the Company can focus on its main business activities and implement business process improvements.
5. Increasing the ability to direct resources to risks that have a significant impact.
6. Creating a positive organizational culture where everyone

memahami tentang peran mereka dalam berkontribusi untuk pencapaian tujuan.

7. Menyediakan *early warning signal* bagi pengambilan keputusan dengan pengendalian risiko yang baik.
8. Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

STRUKTUR TATA KELOLA MANAJEMEN RISIKO

Perusahaan menjalankan praktik tata kelola Manajemen Risiko yang efektif di seluruh unit kerja dengan mengacu pada struktur Three Lines Model (Pertahanan Tiga Lini) dalam menetapkan peran, kewenangan, tanggung jawab dan akuntabilitas dalam proses penerapan Manajemen Risiko.

understands their role in contributing to achieving goals.

7. Providing an early warning signal for decision making through good risk control.
8. Ensuring compliance with applicable laws and regulations.

RISK MANAGEMENT GOVERNANCE STRUCTURE

The Company applies effective Risk Management governance practices across all work units by referring to the Three Lines Model structure when determining roles, authorities, responsibilities and accountabilities in the Risk Management process.

Model Tata Kelola Risiko Three Lines Model
Risk Governance Three Lines Model



Sesuai Filosofi Manajemen Risiko dan untuk mendukung penerapan *Three Lines Model*, Manajemen Risiko bersifat melekat (*embedded*) pada setiap personil/karyawan dan Direksi Perusahaan. Secara umum peran organisasi dalam implementasi Manajemen Risiko dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris;
2. Komite Pemantau Risiko;
3. Komite Audit;
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi;
5. Direksi;
6. Direktur yang membidangi pengelolaan risiko;
7. Direktur yang membidangi pengelolaan keuangan;
8. Fungsi Pengawasan Intern (Audit Internal);
9. Fungsi Manajemen Risiko;
10. Pemilik Risiko (*Risk Owner*);
11. Komite Investasi dan Manajemen Risiko;
12. Fungsi Kepatuhan;

In accordance with the Risk Management Philosophy and to support the application of the Three Lines Model, Risk Management is embedded in every personnel/employee and the Company's Board of Directors. In general, the roles in the organization when applying Risk Management can be grouped as follows:

1. Board of Commissioners;
2. Risk Monitoring Committee;
3. Audit Committee;
4. Integrated Governance Committee;
5. Board of Directors;
6. Director in charge of risk management;
7. Director in charge of financial management;
8. Internal Audit Function;
9. Risk Management Function;
10. Risk Owner;
11. Investment and Risk Management Committee;
12. Compliance Function;

UPAYA PENINGKATAN BUDAYA RISIKO

Faktor penting untuk mendukung efektivitas implementasi manajemen risiko Perusahaan adalah adanya budaya risiko yang kuat (*strong risk culture*) di dalam suatu organisasi. Upaya-upaya dalam rangka meningkatkan budaya risiko di Perusahaan dilakukan melalui:

1. Direksi secara berkesinambungan mengkomunikasikan dan mendorong agar seluruh satuan kerja (*risk owner*) untuk terus mengembangkan budaya risiko (*risk culture*) dan meningkatkan kematangan penerapan manajemen risiko melalui penilaian *risk maturity index* secara berkala, serta kepatuhan terhadap kebijakan Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan kegiatan Perusahaan.
2. Penyusunan Kebijakan, prosedur persetujuan kegiatan (*approval procedure*) dan *Standard Operating Procedure* (SOP) didasarkan pada pertimbangan manajemen risiko.
3. Fungsi Manajemen Risiko secara aktif memberikan dukungan dan memfasilitasi penerapan manajemen risiko di Perusahaan.
4. Mengikuti *Forum Group Discussion* (FGD), pelatihan, seminar serta sertifikasi di bidang manajemen risiko dalam rangka peningkatan *risk awareness* dan kompetensi manajemen risiko.
5. Mengembangkan *knowledge management* terkait dengan penerapan manajemen risiko yang dapat diakses oleh seluruh Insan Perusahaan untuk meningkatkan pemahaman terkait dengan penerapan manajemen risiko pada Perusahaan.

PIHAK YANG MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PEJABAT PADA UNIT KERJA MANAJEMEN RISIKO

Fungsi Manajemen Risiko pada Perusahaan dilaksanakan oleh Divisi Manajemen Risiko, Kebijakan, Prosedur dan Portofolio Manajemen yang dipimpin oleh Kepala Divisi.

Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kebijakan, Prosedur, dan Portofolio Manajemen diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Direksi melalui mekanisme internal Perusahaan.

PEJABAT DIVISI MANAJEMEN RISIKO, KEBIJAKAN, PROSEDUR DAN PORTOFOLIO MANAJEMEN

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SK-69/PPA/0724 tanggal 24 Juli 2024, Perusahaan telah menunjuk Erwin Adiatno sebagai Kepala Divisi Manajemen Risiko Investasi. Mengacu pada Keputusan Direksi Nomor SK-78/PPA/0824 tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penetapan Jabatan Karyawan pada Satuan Kerja, Perusahaan telah menetapkan Jabatan Kepala Divisi Manajemen Risiko Investasi berubah menjadi Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kebijakan, Prosedur, dan Portofolio Manajemen.

EFFORTS TO IMPROVE THE RISK CULTURE

An important factor that supports the effectiveness of the Company's risk management is the existence of a strong risk culture within the organization. Efforts to improve the risk culture in the Company are carried out through:

1. The Board of Directors continuously communicates and encourages all work units (*risk owners*) to continue to develop a risk culture and improve the maturity of risk management through periodic risk maturity index assessments, as well as compliance with Company policies and applicable laws and regulations for the application of Company activities.
2. Preparation of policies, activity approval procedures, and Standard Operating Procedures (SOP) based on risk management considerations.
3. The Risk Management Function actively providing support and facilitating the implementation of risk management in the Company.
4. Participating in Forum Group Discussions (FGD), training, seminars and certification in the field of risk management to increase risk awareness and risk management competency.
5. Developing knowledge management related to risk management that can be accessed by all Company Personnel to improve their understanding related to the Company's risk management.

PARTY APPOINTING AND DISMISSING OFFICIALS IN THE RISK MANAGEMENT WORK UNITS

The Company's Risk Management Function is carried out by the Risk Management, Policy, Procedure and Management Portfolio Division led by a Head of Division.

The Head of the Risk Management, Policy, Procedure and Management Portfolio Division is appointed and dismissed based on a Board of Directors Decision through the Company's internal mechanism.

RISK MANAGEMENT, POLICY, PROCEDURE AND PORTFOLIO MANAGEMENT DIVISION OFFICER

Based on the Board of Directors Decree No. SK-69/PPA/0724 dated July 24, 2024, the Company appointed Erwin Adiatno as Head of the Investment Risk Management Division. Referring to the Board of Directors Decree No. SK-78/PPA/0824 dated August 28, 2024 concerning the Determination of Employee Positions in Work Units, the Company determined that the Head of the Investment Risk Management Division Position be changed to Head of the Risk Management, Policy, Procedure, and Portfolio Management Division.

Profil Kepala Divisi Manajemen Risiko, Kebijakan, Prosedur dan Portofolio Manajemen

Head of the Risk Management, Policy, Procedure, and Portfolio Management Division Profile



Erwin Adiyatno

Menjabat sejak 1 Agustus 2024

Sesuai SK No SK-69/PPA/0724 tanggal 24 Juli 2024

Serving since August 1, 2024

Based on Decree No. SK-69/PPA/0724 dated July 24, 2024

Warga Negara Nationality	:	Indonesia Indonesian
Usia Age	:	40 tahun pada tahun buku 2024 40 years old as at Fiscal Year 2024
Domisili Domicile	:	Tangerang Selatan South Tangerang
Bergabung di Perusahaan Joined the Company	:	15 Januari 2019 January 15, 2019
Riwayat Pendidikan Education	:	S2 – Magister Akuntansi S2 – Master's degree in Accounting
Pengalaman Kerja Work Experience	:	- PT Perusahaan Pengelola Aset (2019-2023) – Auditor Internal – Satuan Pengawasan Intern - Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP (2014-2019) – Auditor Muda – Sub Bagian Pengembangan Materi Diklat - Perwakilan BPKP Provinsi Lampung (2010-2012) – Auditor Ahli Pertama – Bidang Akuntan Negara - Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah (2006-2009) – Auditor Pelaksana – Bidang Investigasi - PT Perusahaan Pengelola Aset (2019-2023) – Internal Auditor – Internal Audit Unit - BPKP Supervision Education and Training Center (2014-2019) – Junior Auditor – Training Material Development Sub-Section - BPKP Representative of Lampung Province (2010-2012) – First Expert Auditor – State Accountant Division - BPKP Representative of Central Sulawesi Province (2006-2009) – Implementing Auditor – Investigation Division
Sertifikasi Profesi Professional Certification	:	- Chartered Accountant (CA) – Ikatan Akuntan Indonesia - Certified Internal Audit Executive (CIAE) – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) - Qualified Internal Auditor (QIA) – Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditor - Certified Management Accountant (CMA) – Institute of Certified Management Accountant (ICMA), Australia - Certified Risk Management Professional (CRMP) – Lembaga Sertifikasi Profesi Manajemen Risiko (LSMPR), Indonesia - Chartered Accountant (CA) – Indonesian Institute of Accountants - Certified Internal Audit Executive (CIAE) – Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) - Qualified Internal Auditor (QIA) – Qualified Internal Auditor Certification Board - Certified Management Accountant (CMA) – Institute of Certified Management Accountant (ICMA), Australia - Certified Risk Management Professional (CRMP) – Risk Management Professional Certification Institute (LSMPR), Indonesia

Cakupan fungsi Manajemen Risiko, serta koordinasi antar organ Perusahaan, digambarkan dalam bagan struktur organisasi fungsi Manajemen Risiko per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

The scope of the Risk Management function, as well as coordination between the Company's organs, is shown in the Risk Management function organizational structure chart as of December 31, 2024, as follows:



Hingga akhir tahun 2024, jumlah karyawan yang tergabung dalam Divisi Manajemen Risiko, Kebijakan, Prosedur, dan Portofolio Manajemen sebanyak 8 orang.

At the end of 2024, the number of employees who were members of the Investment Risk Management Division and the Policy, Procedure and Portfolio Management Division was 11 people.

Jabatan Position	Jumlah (orang) Total (people)
Kepala Divisi Head of Division	1
Spesialis (setara Kepala Grup) Specialist (equivalent to Group Head)	2
Spesialis (setara Kepala Unit) Specialist (equivalent to Unit Head)	3
Spesialis Junior Junior Specialist	2
Jumlah Total	8

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Manajemen Risiko, Kebijakan, Prosedur dan Portofolio Manajemen

Tugas dan tanggung jawab Divisi Manajemen Risiko, Kebijakan, Prosedur dan Portofolio Manajemen dalam mendorong terlaksananya pengelolaan risiko secara efektif sesuai dengan Kebijakan Manajemen Risiko adalah:

1. Membantu Direksi dalam mengkoordinasikan penerapan Manajemen Risiko di Perusahaan.
2. Merancang kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko Perusahaan untuk ditetapkan oleh Direksi.
3. Memfasilitasi penyusunan laporan Profil Risiko pada satuan kerja Pemilik Risiko (*Risk Owner*).
4. Membuat usulan, mengelola, memantau, dan melaporkan *Risk Appetite*, *Risk Tolerance*, dan KRI Perusahaan serta melakukan pemantauan sebagai bagian dari *early warning system*.
5. Melakukan pelaporan Profil Risiko PPA sebagai *early warning signal* kepada Direksi dan pihak-pihak terkait lainnya.
6. Melaksanakan *review* risiko atas usulan kegiatan Perusahaan.

Program Pengembangan

Perusahaan memiliki program pengembangan kompetensi baik secara internal maupun yang diadakan oleh lembaga eksternal. Pengembangan kompetensi pada lembaga eksternal dilakukan melalui pelatihan formal dalam bentuk kursus atau seminar/lokakarya, termasuk sertifikasi kompetensi terkait dengan penerapan manajemen risiko.

Risk Management, Policies, Procedures and Portfolio Management Division Duties and Responsibilities

The Risk Management Policies, Procedures and Portfolio Management Division duties and responsibilities encourage effective risk management in accordance with the Risk Management Policy and includes:

1. Assisting the Board of Directors in coordinating Risk Management in the Company.
2. Designing Company Risk Management policies and procedures to be determined by the Board of Directors.
3. Facilitating the preparation of Risk Profile reports for the Risk Owners.
4. Making proposals, managing, monitoring and reporting the Company's Risk Appetite, Risk Tolerance and KRI as well as carry out monitoring as part of the early warning system.
5. Reporting the PPA Risk Profile as an early warning signal to the Board of Directors and other related parties.
6. Carrying out risk reviews on proposed Company activities.

Development Program

The Company has competency development programs organized internally or by external institutions. Competency development at external institutions is carried out through formal training in the form of courses or seminars/workshops, including competency certification related to risk management.

Pelaksanaan Tugas Divisi Manajemen Risiko, Kebijakan, Prosedur dan Portofolio Manajemen Tahun 2024

Selama tahun 2024, Divisi Manajemen Risiko, Kebijakan, Prosedur, dan Portofolio Manajemen berhasil melaksanakan seluruh program kerja yang ditetapkan. Kegiatan/program kerja yang telah dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyusunan dan revisi atas Kebijakan dan Prosedur/ SOP.
2. Melakukan kajian risiko atas usulan kegiatan Perusahaan.
3. Melakukan fasilitasi penyusunan kajian risiko dan/atau memberikan masukan dan/atau pendapat terkait dengan manajemen risiko baik secara lisan, melalui diskusi/rapat maupun *e-mail* atas usulan kegiatan/rencana kegiatan Perseroan yang meliputi kegiatan operasional, usaha dan/atau bisnis utama PPA.
4. Menjadi anggota Tim Evaluasi untuk kegiatan pengadaan barang dan jasa.
5. Melakukan evaluasi (*review*) risiko dan memberikan rekomendasi atas usulan kegiatan perusahaan yang disampaikan melalui Memo Evaluasi Risiko (MER) sebagai pertimbangan bagi pejabat berwenang dalam mengambil keputusan.
6. Menjadi bagian dari anggota Komite Investasi dan Manajemen Risiko melakukan pembahasan, evaluasi dan memberikan saran/masukan serta rekomendasi kepada Direksi dalam rangka pengambilan keputusan usulan kegiatan investasi PPA dan Anak Perusahaan.
7. Memfasilitasi pelaksanaan *self-assessment* risiko secara triwulanan untuk kegiatan di seluruh Divisi yang ada di PPA dan Entitas Anak dengan metode *Risk and Control Self Assessment* (RCSA) dan menggunakan *Risk Register* sebagai kertas kerja dalam penyusunan profil risiko utama.
8. Menyusun Laporan Manajemen Risiko PPA secara Triwulanan termasuk *Key Risk Indicator* (KRI) secara bulanan yang dipaparkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
9. Penyusunan serta pemutakhiran Kebijakan dan Prosedur dengan mempertimbangkan masukan dari satuan kerja terkait *best practices*, serta peraturan dan perundang-undangan yang mengatur (jika ada).

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dalam mendukung kegiatan usaha Perusahaan, penerapan manajemen risiko dilakukan melalui strategi sebagai berikut:

1. Menyusun dan memastikan tersedianya Kebijakan dan SOP sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan dan penerapan manajemen risiko.
2. Mengintegrasikan proses manajemen risiko ke dalam proses bisnis Perusahaan, antara lain dengan cara:
 - a. Melakukan kajian risiko atas sasaran strategis Perusahaan pada saat penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
 - b. Menerapkan pelaksanaan kajian risiko atas setiap usulan investasi dan kegiatan/proyek yang akan dilakukan oleh Perusahaan;
 - c. Melakukan asesmen risiko menyeluruh secara triwulanan dan menyusun laporan profil risiko Perusahaan.
 - d. Melakukan pemantauan secara periodik terhadap kondisi portofolio, *Asset Quality*, dan *Key Risk Indicator* (KRI) Perusahaan.

Implementation of Risk Management Policies, Procedures and Portfolio Management Division Duties in 2024

During 2024, the Risk Management Policies, Procedures and Portfolio Management Division successfully implemented all established work programs. The activities/work programs implemented in 2024 included the following:

1. Prepared and revised of Policies and Procedures/SOPs.
2. Conducted risk assessments on proposed Company activities.
3. Helped prepare risk studies and/or provided input and/or opinions related to risk management, either verbally, through discussions/meetings, or via e-mail on the Company's proposed activities/activity plans covering PPA's operational activities, business and/or main business.
4. Became a member of the Evaluation Team for procurement of goods and services.
5. Conducted risk evaluation (reviews) and provided recommendations on proposed Company activities submitted through a Risk Evaluation Memo (REM) as a consideration for authorized officials in making decisions.
6. As part of the Investment and Risk Management Committee members, conducted discussions, evaluations and provided suggestions/input and recommendations to the Board of Directors when making decisions on proposed investment activities of PPA and Subsidiaries.
7. Facilitated quarterly risk self-assessments for activities in all Divisions in PPA and Subsidiaries using the Risk and Control Self Assessment (RCSA) method and using the Risk Register as a working paper for preparing key risk profiles.
8. Prepared Quarterly PPA Risk Management Reports including Key Risk Indicators (KRI) on a monthly basis to present to the Board of Directors and Board of Commissioners.
9. Prepared and updated Policies and Procedures after considering input from related work units regarding best practices, as well as governing regulations and legislation (if any).

IMPLEMENTATION OF RISK MANAGEMENT

To support the Company's business activities, risk management is implemented using the following strategy:

1. Preparing and ensuring the availability of Policies and SOPs as guidelines for implementing the Company's business activities and implementing risk management.
2. Integrating risk management processes into the Company's business processes, including by:
 - a. Conducting risk studies on the Company's strategic targets when preparing the Company's Work Plan and Budget;
 - b. Implementing risk studies for each proposed investment and activity/project to be carried out by the Company;
 - c. Conducting comprehensive risk assessments on a quarterly basis and preparing a Company risk profile report.
 - d. Conducting regular monitoring of portfolio conditions through the Company's Asset Liabilities Management (ALMA), Asset Quality and Key Risk Indicators (KRI).

3. Melakukan sosialisasi dan fasilitasi penerapan manajemen risiko secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan budaya risiko di Perusahaan.

Selain itu, Direksi mengkomunikasikan secara berkelanjutan kepada seluruh insan Perusahaan tentang pentingnya penerapan manajemen risiko yang efektif dalam rangka memastikan pencapaian tujuan Perusahaan.

SISTEM MANAJEMEN RISIKO PPA

Perusahaan mengembangkan sistem manajemen risiko yang sejalan dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Perusahaan serta sesuai dengan standar manajemen risiko yang berlaku umum.

Secara umum sistem manajemen risiko tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Prinsip Manajemen Risiko
Prinsip manajemen risiko merupakan landasan dalam pelaksanaan manajemen risiko di Perusahaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut meliputi:
 - a. Manajemen risiko merupakan bagian terpadu dari semua kegiatan organisasi.
 - b. Manajemen risiko harus dilakukan secara terstruktur dan menyeluruh sehingga memberikan hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan.
 - c. Manajemen risiko harus disesuaikan dengan penggunaannya (customized).
 - d. Manajemen risiko bersifat inklusif.
 - e. Manajemen risiko bersifat dinamis, berulang dan tanggap terhadap perubahan.
 - f. Manajemen risiko didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia.
 - g. Manajemen risiko harus mempertimbangkan faktor budaya dan manusia.
 - h. Manajemen risiko harus memfasilitasi terjadinya perbaikan secara berkelanjutan.
2. Kerangka Kerja Manajemen Risiko
 - a. Kepemimpinan dan Komitmen.
Dalam rangka melaksanakan manajemen risiko secara efektif, manajemen melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - i) Mensosialisasikan/mengkomunikasikan akan pentingnya manajemen risiko bagi Perusahaan dan menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko.
 - ii) Memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
 - iii) Memastikan bahwa sasaran manajemen risiko selaras dengan strategi dan sasaran Perusahaan.
 - iv) Memastikan bahwa tersedia alokasi sumber daya yang cukup untuk melaksanakan kegiatan manajemen risiko.
 - b. Perencanaan Kerangka Kerja Manajemen Risiko.
Hal-hal yang diperhatikan dalam merencanakan kerangka kerja manajemen risiko adalah sebagai berikut:
 - i) Menyusun dan melakukan pengkinian Kebijakan Manajemen Risiko yang secara jelas menyatakan komitmen Manajemen terhadap penerapan manajemen risiko dan sasaran yang ingin dicapai.
 - ii) Mengintegrasikan proses manajemen risiko sebagai bagian dari seluruh praktik manajemen serta proses bisnis Perusahaan. Proses Manajemen Risiko menjadi

3. Conducting socialization and facilitation of the risk management on an ongoing basis to improve the risk culture in the Company.

In addition, the Board of Directors communicates continuously to all Company personnel the importance of effective risk management to ensure the achievement of the Company's objectives.

PPA RISK MANAGEMENT SYSTEM

The Company has developed a risk management system aligned with the Company's objectives and complies with the generally accepted risk management standards.

In general, the risk management system includes the following:

1. Risk Management Principles
The risk management principles are the basis for implementing risk management in the Company, where these principles include:
 - a. Risk management is an integrated part of all organizational activities.
 - b. Risk management must be carried out in a structured and comprehensive manner so as to provide consistent and comparable results.
 - c. Risk management must be adapted to its users (customized).
 - d. Risk management is inclusive.
 - e. Risk management is dynamic, iterative and responsive to change.
 - f. Risk management is based on the best available information.
 - g. Risk management must consider cultural and human factors.
 - h. Risk management must facilitate continuous improvement.
2. Risk Management Framework
 - a. Leadership and Commitment.
In order to carry out risk management effectively, management carried out the following:
 - i) Disseminates/communicates the importance of risk management for the Company and establishes a Risk Management Policy.
 - ii) Ensures compliance with laws and regulations.
 - iii) Ensures risk management objectives are aligned with the Company's strategy and objectives.
 - iv) Ensures there is sufficient allocation of resources to carry out risk management activities.
 - b. Risk Management Framework Planning.
Matters to consider in planning a risk management framework include the following:
 - i) Developing and updating a Risk Management Policy that clearly states Management's commitment to the implementation of risk management and the goals to be achieved.
 - ii) Integrating risk management processes as part of all management practices and business processes in the Company. The Risk Management process forms part of

bagian dari proses pengembangan kebijakan bisnis, perencanaan strategi, penyusunan rencana bisnis dan proses manajemen perubahan.

- iii) Pengembangan proses Manajemen Risiko dan memastikan kecukupan tindakan pengendalian risiko.
- iv) Pemenuhan yang memadai untuk pelaksanaan manajemen risiko terkait dengan sumber daya manusia, proses dan prosedur, sistem dan sumber daya lain yang diperlukan untuk setiap tahapan penerapan manajemen risiko.
- v) Penyusunan mekanisme pelaporan dan komunikasi dalam pelaksanaan manajemen risiko.
- c. Penerapan Manajemen Risiko
Dalam menerapkan manajemen risiko, Manajemen Perusahaan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - i) Menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko dan proses manajemen risiko pada setiap kegiatan Perusahaan.
 - ii) Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - iii) Mendokumentasikan seluruh proses pengambilan keputusan.
 - iv) Melakukan komunikasi dan konsultasi dengan para stakeholder terkait.
- d. Pemantauan dan Peninjauan Ulang
Untuk memastikan bahwa manajemen risiko diterapkan secara efektif dan mendukung kinerja Perusahaan, maka manajemen:
 - i) Menetapkan ukuran kinerja.
 - ii) Melakukan review atas kesesuaian Kebijakan Manajemen Risiko dengan perkembangan kegiatan Perusahaan.
 - iii) Melakukan tindak lanjut atas hasil kaji ulang.
- e. Perbaikan Kerangka Kerja Secara Berkelanjutan

Diperlukan sebagai bagian dari proses peningkatan kerangka kerja manajemen risiko, kebijakan manajemen risiko dan implementasi manajemen risiko.

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Proses Evaluasi atas efektivitas sistem manajemen risiko dalam mendukung kinerja Perseroan, dilakukan secara periodik dengan mempertimbangkan antara lain perubahan struktur organisasi, model bisnis Perseroan terkini, ketentuan perundang-undangan baru yang terkait dengan kegiatan Perseroan, penetapan strategi baru atau perubahan strategi Perseroan. Selain itu, evaluasi atas efektivitas manajemen risiko juga dilakukan melalui:

1. Pelaksanaan penilaian risiko secara berkala atas kegiatan utama Perusahaan melalui pendekatan *Risk & Control Self Assessment* (RCSA).
2. Review atas Kebijakan dan SOP untuk memastikan bahwa Perusahaan senantiasa memiliki Kebijakan dan SOP terkini sesuai dengan perkembangan kegiatan usaha Perusahaan.
3. Rapat berkala antara Divisi Manajemen Risiko dengan Komite Pemantau Risiko dan GCG.
4. Rapat berkala Direksi dan Komisaris untuk memastikan penerapan manajemen risiko.

the process of developing business policies, strategic planning, preparation of business plans and change management processes.

- iii) Developing Risk Management processes and ensuring the adequacy of risk control measures.
- iv) Adequate compliance for the implementation of risk management related to human capital, processes and procedures, systems and other resources required for each stage of risk management.
- v) Preparing reporting and communication mechanisms for risk management.
- c. Application of Risk Management
When applying risk management, the Company's Management pays attention to the following matters:
 - i) Applying Risk Management Policy and risk management processes in all Company activities.
 - ii) Complying with all applicable laws and regulations.
 - iii) Documenting the entire decision-making process.
 - iv) Communicating and consulting with relevant stakeholders.
- d. Monitoring and Review
To ensure that risk management is implemented effectively and supports the Company's performance, the management:
 - i) Defines the performance measures.
 - ii) Reviews the suitability of the Risk Management Policy with the development of the Company's activities.
 - iii) Follows up on the results of the reviews.
- e. Continuous Improvement of the Framework

Required as part of the process of improving the risk management framework, risk management policies and risk management implementation.

Evaluation of Risk Management System Effectiveness

The evaluation process of the risk management system effectiveness in supporting the Company's performance is carried out regularly by considering changes in the organizational structure, the Company's current business model, new statutory provisions related to the Company's activities, the instigation of new strategies or changes to the Company's strategies. In addition, evaluation of the risk management effectiveness is also carried out by:

1. Carrying out regular risk assessments of the Company's main activities through the Risk & Control Self Assessment (RCSA) approach.
2. Reviewing Policies and SOPs to ensure that the Company always has the latest Policies and SOPs in accordance with developments in the Company's business activities.
3. Holding regular meetings between the Risk Management Division and the Risk Monitoring and GCG Committee
4. Holding regular meetings of the Board of Directors and Board of Commissioners to ensure the implementation of risk management.

Berdasarkan hasil pengukuran di atas, maka Sistem Manajemen Risiko di Perusahaan telah berjalan dengan cukup efektif. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Kesadaran pemilik risiko untuk melakukan asesmen risiko (*self assessment*).
2. Budaya sadar risiko cukup melekat pada pemilik risiko, hal ini ditandai dengan upaya melakukan kajian risiko dalam kegiatan operasional perusahaan.
3. Para pemangku kepentingan di bidang Manajemen Risiko dinilai cukup mampu melakukan kajian risiko secara efektif.
4. Ketersediaan sumber daya.
5. Risiko-risiko yang teridentifikasi dari seluruh unit kerja, dievaluasi dan diukur berdasarkan nilai kemungkinan dan dampak, sehingga diperoleh prioritas risiko yang harus dikendalikan.

Perusahaan menyadari bahwa penerapan manajemen risiko bersifat dinamis sesuai dengan tantangan Perusahaan ke depan, sehingga akan terus dikembangkan sesuai dengan roadmap pengembangan Manajemen Risiko.

Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau Komite Audit atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Manajemen menilai bahwa Sistem Manajemen Risiko Perusahaan cukup memadai.

PROFIL RISIKO DAN MITIGASI RISIKO

Sejalan dengan komitmen Direksi untuk mengimplementasikan manajemen risiko secara efektif dan efisien maka pada setiap jenjang organisasi Perusahaan harus menerapkan manajemen risiko dengan memperhatikan prioritas dan manfaat tiap program kerja/proyek yang akan dijalankan bagi kelangsungan Perusahaan.

Dalam rangka melindungi dan memberi nilai tambah serta menjadi bagian dari pengambilan keputusan, penerapan manajemen risiko di Perusahaan antara lain dilakukan pada aktivitas sebagai berikut:

1. Penyusunan dan persetujuan usulan investasi dan kegiatan/proyek
Dalam menyusun suatu usulan investasi/kegiatan/proyek, satuan kerja pengusul harus melakukan kajian risiko yaitu identifikasi dan analisis risiko yang dapat timbul dari kegiatan yang diusulkan serta mitigasi atas risiko tersebut. Selanjutnya Fungsi Manajemen Risiko akan melakukan *review* dan melengkapi sejumlah mitigasi tambahan yang dipandang perlu atas kecukupan kajian risiko yang dilakukan oleh satuan kerja pengusul sebagai masukan/pertimbangan bagi manajemen dalam mengambil keputusan.
2. Identifikasi dan Penilaian Risiko
Secara berkala setiap satuan kerja/*risk owner* melakukan identifikasi dan penilaian risiko dalam rangka menyusun profil risiko dari satuan kerjanya. Pelaksanaan identifikasi dan penilaian risiko oleh *risk owner* secara triwulanan difasilitasi oleh Divisi Kebijakan, Prosedur, dan Portofolio Manajemen. Dalam pelaksanaan penilaian risiko tersebut, Perseroan menggunakan pendekatan RCSA.

Identifikasi risiko untuk tahun 2024 dilakukan sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam pencapaian RKAP 2024. Berdasarkan kajian yang dilakukan selama periode tahun 2024, risiko-risiko utama yang dihadapi Perusahaan sebagai berikut:

Based on the measurement results, the Risk Management System in the Company has been running effectively. This can be proven by:

1. Awareness of risk owners to carry out risk assessments (*self-assessments*).
2. A risk awareness culture is ingrained in risk owners, as indicated by efforts to carry out risk studies in the Company's operational activities.
3. Stakeholders in Risk Management are considered capable of carrying out risk assessments effectively.
4. The availability of resources.
5. Risks identified from all work units are evaluated and measured based on likelihood and impact values, in order to obtain priority risks that must be controlled.

The Company understands that the implementation of risk management is dynamic in accordance with the Company's future challenges, so it will continue to be developed in accordance with the prepared Risk Management development roadmap.

Statement from the Board of Directors and/or Board of Commissioners or Audit Committee regarding the Adequacy of the Risk Management System

Management has assessed that the adequacy of the Company's risk management system is adequate.

RISK PROFILE AND RISK MITIGATION

In line with the Board of Directors' commitment to implementing risk management effectively and efficiently, at all levels of the Company's organization, risk management must be implemented by taking into account the priorities and benefits of each work program/project to be implemented for the continuity of the Company.

To protect and provide added value as well as being part of decision making, risk management in the Company includes the following activities:

1. Preparing and approving investment proposals and activities/projects
When preparing investment/activity/project proposals, the proposing work unit must carry out a risk assessment, namely identification and analysis of risks that may arise from the proposed activity as well as mitigation of these risks. Furthermore, the Investment Risk Management Division will review and complete a number of additional mitigations deemed necessary regarding the adequacy of the risk assessment carried out by the proposing work unit as input/consideration for management in making decisions.
2. Risk Identification and Assessment
Each work unit/*risk owner* regularly carries out risk identification and assessment in order to compile a risk profile for the work unit. The risk identification and assessment by risk owners on a quarterly basis is facilitated by the Policy, Procedure and Portfolio Management Division. When carrying out this risk assessment, the Company uses the RCSA approach.

Risk identification for 2024 was carried out in accordance with the objectives and targets in the 2024 RKAP. Based on studies carried out during the 2024 period, the key risks faced by the Company included

No	Peristiwa Risiko Risk Event	Kategori Risiko Risk Category	Penyebab Risiko Cause of Risk
1	Kegagalan penagihan dan penjualan agunan Failure of collection and sale of collateral	Risiko Operasional Operational Risk	- Kondisi aset debitur yang dijadikan agunan sulit untuk dijual di harga pasar; - Tahun 2024 tahun politik sehingga terdapat potensi <i>wait & seed</i> dari investor - Based on the condition of the debtor's assets used as collateral they are difficult to sell at market prices; 2024 was a political year so investors adopted a wait & see approach
2	Terlambatnya diadakannya/terbitnya RUPS Prinsip Pembubaran PT PANN Pembiayaan Maritim Delay in holding/issuing the GMS, Principles of Dissolution of PT PANN Maritime Financing	Risiko Strategis Strategic Risk	Kajian RUPS pembubaran terlambat disampaikan kepada Kementerian BUMN/pihak terkait The GMS dissolution study was submitted late to the Ministry of SOEs/related parties
3	Tidak terlaksananya kerja sama untuk meningkatkan industri Galangan Nasional Non cooperation to improve the National Shipyard industry	Risiko Strategis Strategic Risk	Belum terdapat kesepakatan antara DKB, IKI dan DKS terkait ruang lingkup kerja sama There has been no agreement between DKB, IKI and DKS regarding the scope of cooperation
4	Menurunnya arus kas operasi, investasi, dan pendanaan yang signifikan Significant decrease in operating, investment, and funding cash flows	Risiko Keuangan Financial Risk	- Pemindahan saham minoritas - Kinerja debitur mengalami penurunan - Transfer of minority shares - Debtor performance decreased
5	Pemenuhan kualifikasi organ pengelola risiko <90% Fulfilling qualifications for risk management organs <90%	Risiko Reputasi & Kepatuhan Reputational and Compliance	Perencanaan pemenuhan kualifikasi organ yang tidak sistematis Unsystematic organ qualification fulfillment planning
6	Laporan Keuangan audited BUMN Titip Kelola tidak disampaikan kepada otoritas sesuai batas waktu pelaporan Audited Financial Report of BUMN Titip Kelola not submitted to the authorities by the reporting deadline	Risiko Strategis Strategic Risk	Keterbatasan data di BUMN Titip Kelola Limited Data for BUMN Titip Kelola
7	Nilai PDN pengadaan barang dan jasa dibawah 97,75% PDN value of procurement of goods and services below 97.75%	Risiko Reputasi & Kepatuhan Reputational and Compliance	Pengadaan barang dan atau jasa yang masih banyak menggunakan produk <i>high technology</i> atau jasa dengan keahlian yang spesifik Procurement of goods and/or services that still use many high technology products or services with specific expertise
8	Pemenuhan target perbaikan manajemen risiko sesuai roadmap <100% Fulfilling the risk management improvement targets according to the roadmap <100%	Risiko Reputasi & Kepatuhan Reputational Risk and Compliance	Belum dilakukannya penilaian RMI RMI assessment has not been carried out
9	Terlambatnya pelaporan atas Bukti Kebijakan Leveling fungsi yang membidangi <i>Sustainability/ESG</i> Late reporting Evidence of Leveling Policy of functions in charge of Sustainability/ESG	Risiko Reputasi & Kepatuhan Reputational Risk and Compliance	Belum adanya karyawan yang memiliki keahlian di bidang ESG There are no employees with expertise in the ESG field
10	Penagihan atas ATP di PPAK belum terkelola dengan baik Collection of ATP in PPAK not managed properly	Risiko Operasional Operational Risk	- Kondisi usaha debitur tidak sesuai dengan yang diharapkan sehingga debitur mengalami kesulitan keuangan - Belum terdapat investor yang berminat untuk membeli aset jaminan - Terdapat kekosongan posisi manajemen - The debtor's business conditions were not as expected, so the debtor experiencing financial difficulties - There were no investors interested in buying collateral assets - There was a vacant management position
11	Tidak tercapainya target laba PPAF PPAF profit target not achieved	Risiko Strategis Strategic Risk	Minimnya penyaluran pembiayaan Minimal financing distribution

Perkara Hukum

Legal Matters

RINCIAN PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN

DETAILS OF LEGAL MATTERS FACING THE COMPANY

Nama Perusahaan Company Name	Pelapor/ Penggugat/ Pemohon Reporter/ Plaintiff/ Applicant	Posisi Hukum PPA Legal Position	Perkara Case	Nomor Perkara Case Number	Lawyer Lawyer	Issue Issue	Keterangan Description
Prabu Wahana Internasional, PT Prabu Wahana Internasional, PT	Prabu Wahana Internasional, PT Prabu Wahana Internasional, PT	Tergugat Defendant	Perdata Civil	1182/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel 1182/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel	NIP Lawfirm NIP Lawfirm	Gugatan Pembatalan Perjanjian Kredit antara PT PWI dan PPA Lawsuit for Cancellation of Credit Agreement between PT PWI and PPA	- Sidang putusan pada tanggal 3 Mei 2023 - Majelis Hakim memutus menerima gugatan dari penggugat sebagian, dan menyatakan utang dari PWI hanya sebesar Rp. 3.428.082.851 Kuasa Hukum PPA sedang mengajukan upaya hukum Banding - Sudah dilakukan penunjukan Kuasa Hukum PPA untuk melakukan Upaya hukum Banding dan mengajukan Memori Banding - Pihak PWI juga melakukan upaya hukum Banding dan Kuasa Hukum PPA sudah mengajukan Kontra Memori Banding - Sudah dilakukan upaya hukum Kasasi atas Banding Gugatan Perdata antara PT PPA dengan PT Prabu Wahana International Nomor 1111/PDT/2023/PT.DKI Jo. 1182/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Sel, adapun perkara banding tersebut sudah di putus oleh Majelis Hakim Banding pada tanggal 30 November 2023 dan saat ini PT PPA sudah menunjuk kuasa hukum dan sudah mengajukan memori Kasasi ke Mahkamah Agung melalui Kantor Kepaniteraan - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan - Verdict hearing on May 3, 2023 - The Panel of Judges decided to accept the plaintiff's lawsuit in part, and stated that PWI's debt was only Rp3,428,082,851. PPA's Attorney is currently filing an Appeal - PPA's Attorney has been appointed to file an Appeal and file an Appeal Memo - PWI has also filed an Appeal and PPA's Attorney has filed a Counter Appeal Memo - A Cassation appeal has been filed for the Civil Lawsuit between PT PPA and PT Prabu Wahana International No. 1111/PDT/2023/PT.DKI Jo. 1182/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Sel, the appeal case was decided by the Panel of Appeal Judges on November 30, 2023 and currently PT PPA has appointed legal counsel and has submitted a cassation memorandum to the Supreme Court through the Clerk's Office of the South Jakarta District Court

Nama Perusahaan Company Name	Pelapor/ Penggugat/ Pemohon Reporter/ Plaintiff/ Applicant	Posisi Hukum PPA PPA Legal Position	Perkara Case	Nomor Perkara Case Number	Lawyer Lawyer	Issue Issue	Keterangan Description
Curah Laju Utama, PT	Curah Laju Utama, PT	Defendant	Sharia Economic Lawsuit	1016/Pdt.G/2024/PA.JS	In House	Lawsuit for Cancellation of Credit Agreement between PT PWI and PPA	- Panggilan Pertama kepada seluruh Pihak pada Kamis 04 April 2024 - Perkara dilanjutkan secara online melalui e-court Pengadilan Agama Jakarta Selatan - PPA sudah menyampaikan jawaban atas gugatan pada tanggal 10 Juli 2024 melalui e-court - Sidang sudah memasuki tahapan pembuktian - First summons to all parties on Thursday, April 04, 2024 - The case was continued online through the e-court of the South Jakarta Religious Court - PPA has submitted an answer to the lawsuit on July 10, 2024 through e-court - The trial has entered the evidentiary stage

PERKARA PENTING

LEGAL CASES

Permasalahan Hukum Legal Cases	2024		2023	
	Perdata Civil	Pidana Criminal	Perdata Civil	Pidana Criminal
Perseroan The Company				
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Settled and has legal force	1	-	5	-
Dalam proses penyelesaian In settlement process	1	1	1	1
Jumlah Total	2	1	1	1
Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and Board of Directors				
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Settled and has legal force	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian In settlement process	-	-	-	-
Jumlah Total	-	-	-	-
Entitas Anak Subsidiaries				
Selesai dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap Settled and has legal force	1	-	2	-
Dalam proses penyelesaian In settlement process	1	2	2	-
Jumlah Total	2	2	4	2
Jumlah Keseluruhan Overall Total	4	3	10	2

PERKARA PENTING DI LUAR ASPEK HUKUM

Merujuk surat Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 1 Otoritas Jasa Keuangan tanggal 6 November 2024 tentang Konfirmasi Keterlambatan Penyampaian dan Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan 2023 (LKT), Laporan Tahunan 2023 (LT) dan Laporan Keberlanjutan (LK) periode 1 Januari s.d 31 Desember 2023, PPA menyampaikan konfirmasi keterlambatan penyampaian LKT 2023 dikarenakan proses audit atas LKT 2023 masih belum selesai. Terkait hal tersebut dan oleh karena angka-angka dalam LKT 2023 selanjutnya digunakan dalam LT dan LK 2023 khususnya pada Bab Ikhtisar Data Keuangan dan Bab Analisa Laporan Keuangan menyebabkan penyampaian LT dan LK juga mengalami keterlambatan.

NON-LEGAL IMPORTANT MATTERS

Referring to the letter from the OJK Director of Supervision of Issuers and Public Companies 1 dated November 6, 2024 regarding Confirmation of the Delay in Submission and Announcement of the 2023 Annual Financial Report (LKT), 2023 Annual Report (LT) and Sustainability Report (LK) for the period January 1 to December 31, 2023, PPA confirmed the delay in submitting the 2023 LKT was due to the non-completion of the audit process for the 2023 LKT. Due to this and because the figures in the 2023 LKT are then used in the 2023 LT and LK, especially in the Financial Data Summary Chapter and the Financial Report Analysis Chapter, the submission of the LT and LK has also been delayed.

Sanksi Administrasi dari Otoritas Terkait

Administrative Sanctions from Related Authorities

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat sanksi administratif material yang mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan juga tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada Perseroan sebagai induk, kepada entitas anak, anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris oleh Otoritas terkait.

During 2024, were no material administrative sanctions that affected the continuity of the Company's business and there were no administrative sanctions imposed on the Company as the parent, its subsidiaries, members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners by related authorities.

Akses Informasi dan Data Perseroan

Access to Company Information and Data

Ketersediaan akses terhadap informasi dan data Perseroan bagi pihak-pihak yang berkepentingan mencerminkan penerapan prinsip transparansi yang menjadi fondasi operasional Perseroan. Oleh sebab itu, Perseroan terus berupaya memfasilitasi para pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi terkini, termasuk laporan keuangan, data non-keuangan, serta informasi Perseroan lainnya yang selalu diperbarui.

Access to Company information and data by interested parties reflects the application of the transparency principle that is the foundation of the Company's operations. Therefore, the Company continues to facilitate stakeholders in accessing the latest updated information, including financial reports, non-financial data, and other Company information.

Sekretaris Perseroan bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pengelolaan media komunikasi, baik melalui media cetak maupun elektronik. Tugas ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada pemangku kepentingan tetap terjaga kredibilitas dan integritasnya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pedoman Kebijakan Perseroan.

The Corporate Secretary is responsible for coordinating the management of communication media through print and electronic media to ensure the information conveyed to stakeholders maintains its credibility and integrity, in accordance with the provisions stated in the Company's Policy Guidelines.

KOMUNIKASI EKSTERNAL

Website

Penerapan situs web sangat signifikan dalam penerapan transparansi informasi. Perseroan telah mengembangkan situs resmi dengan alamat <http://www.ptppa.com> yang disajikan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Informasi yang tersedia antara lain:

1. Struktur grup Perseroan;
2. Profil Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan;
3. Pemegang saham;
4. Informasi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan;
5. Informasi mengenai tata kelola perusahaan;
6. Informasi pelaksanaan RUPS.

Struktur Elektronik

Perseroan secara terbuka menyiapkan jalur komunikasi dengan para pemangku kepentingan melalui surat elektronik untuk mengakomodir

EXTERNAL COMMUNICATION

Website

The website is very significant for implementing information transparency. The Company has an official website at <http://www.ptppa.com> both in Indonesian and English. The information includes:

1. Corporate group structure;
2. Profiles of Board of Commissioners and Board of Directors;
3. Shareholders;
4. Information about the Annual Report and Financial Statements;
5. Information about corporate governance.
6. Information about GMS implementation

Electronic Structure

The Company has opened a communication channel with stakeholders via email to accommodate inquiries related to the Company by

berbagai pertanyaan terkait dengan Perseroan dengan menghubungi Sekretaris Perusahaan pada email: corpsec@ptppa.com.

Hubungan dengan Media Massa

Agar informasi dapat tersampaikan secara luas dan jelas, Perseroan membangun hubungan dengan berbagai media, baik di tingkat nasional maupun lokal. Perseroan terus menjaga hubungan yang harmonis dengan media massa melalui penyampaian berita terkini seputar Perseroan yang dilakukan melalui pertemuan dengan media serta berbagai kegiatan workshop.

Siaran Pers

Perseroan memposisikan media massa sebagai mitra strategis dalam menyebarkan informasi kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat luas, salah satunya melalui siaran pers. Sepanjang tahun 2024, Perseroan telah merealisasikan berbagai siaran pers meliputi:

contacting the Corporate Secretary at: corpsec@ptppa.com.

Relations with the Mass Media

So that information can be delivered widely and clearly, the Company has built relationships with media at national and local levels. The Company also maintains harmonious relationships with the mass media by delivering the latest news about the Company through meetings with the media and workshop activities.

Press Releases

The Company positions the mass media as a strategic partner for disseminating information to stakeholders and the general public, one way being through press releases. During 2024, the Company's press releases were as follows:

No	Nomor Number	Tanggal Date	Perihal Subject
1.	NO. PR-01/PPA/CS/0124	18 Januari 2024 January 18, 2024	Direstrukturisasi oleh PPA, 14 BUMN Titip Kelola Menunjukkan Perkembangan Positif Restructured by PPA, 14 SOEs Under Management Show Positive Development
2.	NO. PR-02/PPA/CS/0524	6 Mei 2024 May 6, 2024	Danareksa dan PPA Dukung Pengembangan Terminal Peti Kemas Batu Ampar menjadi Pelabuhan Transshipment Berkelas Internasional Danareksa and PPA Support Development of Batu Ampar Container Terminal into an International Class Transshipment Port
3.	NO. PR-03/PPA/CS/0323	5 Juli 2024 July 5, 2024	PPA Komitmen Selesaikan Restrukturisasi 14 BUMN Titip Kelola PPA Committed to Complete Restructuring of 14 SOEs Under Management
4.	NO. PR-04/PPA/CS/0423	24 Oktober 2024 October 24, 2024	Bertahun-tahun Rugi dan Gajinya Tersendat- Sendat, Karyawan Primisima Akhirnya Dapatkan Kejelasan After Years of Losses and Stalled Salaries, Primisima Employees Finally Receive Clarity
5.	-	29 Oktober 2024 October 29, 2024	Dukung Regenerasi Ekosistem Musik, Holding BUMN Danareksa Reaktivasi Lokananta Records melalui "Bintang Muda Lokananta" Supporting Regeneration in the Music Ecosystem, BUMN Danareksa Holding Reactivates Lokananta Records through "Bintang Muda Lokananta"

Tata Kelola Teknologi dan Informasi

Technology and Information Governance

PPA mengakui pentingnya peran teknologi informasi (TI) dalam mendukung pertumbuhan bisnis secara pesat. Oleh karena itu, kebutuhan akan TI, terutama sebagai penunjang kegiatan operasional, menjadi sangat krusial.

Penerapan TI yang tepat dianggap sebagai keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Penggunaan teknologi secara efisien, tepat waktu, dan efektif dalam penggunaan biaya dianggap dapat menghasilkan produk dan layanan yang berkualitas, handal, dan aman. Selain itu, teknologi juga dianggap sebagai sarana penunjang keberlanjutan usaha sekaligus pendukung efisiensi kegiatan operasional dan peningkatan mutu pelayanan kepada konsumen.

Perusahaan secara berkelanjutan berusaha mengembangkan sistem teknologi informasi dengan terarah dan terukur untuk mendukung strategi bisnisnya. Dalam pelaksanaannya, pemanfaatan dan pengembangan TI di perusahaan merujuk pada Master Plan Teknologi Informasi periode 2020-2024.

Landasan lain yang digunakan adalah Surat Keputusan Direksi Perusahaan No. SK-109/PPA/1220 tanggal 18 Desember 2020 tentang Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi serta Standard Operating Procedures (SOP) yang berlaku.

KEGIATAN TI UNTUK Mendukung KEGIATAN BISNIS PERSEROAN

Terkait dukungan TI terhadap kegiatan bisnis, Grup TI telah terlibat aktif dalam beberapa kegiatan, yaitu:

1. Implementasi Core System
implementasi *Core System* bertujuan untuk mengakomodir kebutuhan perkembangan bisnis PPA yang meliputi 3 (tiga) pilar utama yaitu BUMN Titip Kelola, Pengelolaan *Non-Performing Loan* ("NPL") perbankan dan Special Situations Fund ("SSF") yang terdiri dari modul *Loan Management*, *Document Management*, *Treasury Management*. Implementasi core system dilakukan dalam suatu platform yang terintegrasi untuk mendukung proses pencatatan, pemantauan dan pelaporan data bisnis Perseroan. *Core System* pada tahun 2024 sudah *live* untuk Modul *Loan Management* dan telah dilakukan *entry* transaksi *historical* sampai dengan posisi *current*, selain itu untuk modul *Document Management*, *Treasury Management* dalam tahap pengembangan.

PPA recognizes the important role of information technology (IT) in supporting rapid business growth. Therefore, the need for IT, especially to support operational activities, is very crucial.

Proper IT implementation is considered a competitive advantage by the Company. The use of efficient, timely and cost effective technology will produce quality, reliable and safe products and services. Technology is also considered a means of supporting business sustainability as well as supporting the efficiency of operational activities and improving the quality of service to consumers.

The Company strives to develop information technology systems in a targeted and measurable manner to support its business strategy. For its implementation, the use and development of IT in the Company refers to the Information Technology Master Plan for the 2020-2024 period.

Another basis used is the Company's Board of Directors Decree No. SK-109/PPA/1220 dated December 18, 2020 concerning Information Technology Governance Policies and applicable Standard Operating Procedures (SOP).

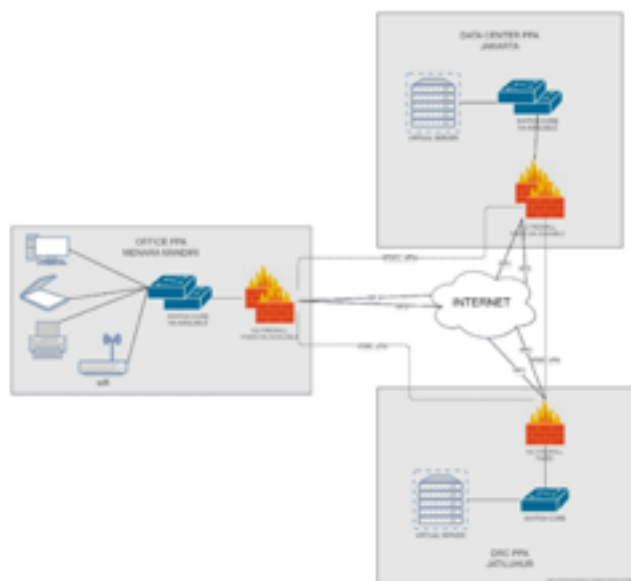
IT ACTIVITIES TO SUPPORT THE COMPANY'S BUSINESS ACTIVITIES

For IT support of its business activities, the IT Group has been actively involved in several activities, including:

1. Implementation of the New Core System
The implementation of the Core System that replaces the previous system, is aimed at accommodating the PPA business development needs, and covers the 3 (three) main pillars, namely Entrusted Management SOE, Banking Non-Performing Loan ("NPL") Management and Special Situations Fund ("SSF") that consists of the Loan Management, Document Management, Treasury Management modules. In 2024, the Core System went live for Loan Management Module and historical transaction entries have been carried out up to the current position, in addition for Document Management, the Treasury Management module is in the development stage.

2. Enterprise Resource Planning (ERP)
Implementasi ERP dengan produk SAP bertujuan untuk meningkatkan akurasi, reliabilitas, integrasi kegiatan operasional Perseroan sehingga dapat mendukung berjalannya proses bisnis. Implementasi SAP terdiri dari beberapa modul yaitu *Finance and Accounting, Budgeting, Procurement, Cash Management*. Pada tahun 2024 PPA telah menyelesaikan standarisasi COA Holding dan telah dilakukan migrasi data dari COA existing ke COA baru di SAP.
3. Implementasi Security Information Event Management (SIEM)
Implementasi SIEM melalui IT *Shared Services* dari PT Danareksa (Persero) bertujuan untuk memperkuat keamanan *cyber* di lingkungan Perseroan yang digunakan untuk mendeteksi adanya insiden dan aktifitas mencurigakan terkait keamanan *cyber*.
4. Pemenuhan Rekomendasi IT Maturity Assessment (ITMA) dan Pemenuhan Roadmap INDI 4.0
PPA telah dilakukan asesmen ITMA oleh konsultan eksternal pada tahun 2023. Pada tahun 2024 PPA telah melakukan pemenuhan rekomendasi ITMA untuk meningkatkan tingkat kematangan pengelolaan IT. Selain itu, PPA telah melakukan pemenuhan *roadmap* INDI 4.0 sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan untuk kesiapan menuju era Industri 4.0.
5. Keamanan Cyber
Sebagaimana data dan informasi merupakan aset Perseroan yang berharga, keamanan informasi (*Cyber Security*) harus terus ditingkatkan perlu. Penguatan *Cyber Security* merupakan hal penting yang harus dilakukan sebagai langkah pengamanan dan ketahanan Perseroan. Beberapa hal yang dilakukan pada tahun 2024 adalah:
 - a. Pelaksanaan asesmen *Cyber Security Maturity* (CSM) dengan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Implementasi ini sebagai bagian dari peningkatan dan evaluasi operasional berbasis IT.
 - b. Pembentukan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) PPA.
6. Implementasi Sistem E-GRC
Implementasi E-GRC merupakan sistem tata kelola terintegrasi yang terdiri dari modul Risk Management, Compliance dan Internal Audit. Pada tahun 2024 telah dilakukan *enhancement* untuk Modul *Risk Management* dan Modul *Legal & Compliance*.
7. Implementasi E-Procurement (E-Proc)
E-Procurement (E-Proc) berfungsi untuk kegiatan pengadaan dari proses inisiasi pencarian rekanan hingga sampai pengelolaan kontrak yang terintegrasi. Pada tahun 2024 telah dibangun Modul E-Proc untuk Vendor Management.
2. Enterprise Resource Planning (ERP)
The implementation of ERP with SAP products aims to improve the accuracy, reliability, and integration of the Company's operational activities so that it can support the business processes. SAP implementation consists of several modules, including Finance and Accounting, Budgeting, Procurement, Cash Management. In 2024, PPA completed the standardization of COA Holding and migrated data from the existing COA to the new COA in SAP.
3. Implementation of SIEM (Security Information Event Management)
The implementation of SIEM through IT Shared Services from PT Danareksa (Persero) aims to strengthen cyber security in the Company to detect incidents and suspicious activities related to cyber security.
4. IT Maturity Assessment (ITMA) and Fulfillment of the INDI 4.0 Roadmap
PPA's ITMA was assessed by external consultants in 2023. In 2024, PPA fulfilled the ITMA recommendations to increase the IT management maturity level. Also, PPA fulfilled the INDI 4.0 roadmap in accordance with the timeline set for readiness towards the Industrial 4.0 era.
5. Cyber Security
As data and information are valuable assets of the Company, Cyber Security must continue to be improved. Strengthening Cyber Security is important thing and must be done to secure and strengthen the Company. Some of the activities in 2024 included:
 - a. A Cyber Security Maturity (CSM) assessment in collaboration with the National Cyber and Crypto Agency (BSSN). This was part of IT-based operational improvement and evaluation.
 - b. Establishment of the PPA Computer Security Incident Response Team (CSIRT).
6. Implementation of E-GRC System
E-GRC is an integrated governance system consisting of Risk Management, Compliance and Internal Audit modules. In 2024, enhancements were made to the Risk Management Module and the Legal & Compliance Module.
7. G. Implementation of E-Procurement (E-Proc)
E-Procurement (E-Proc) functions include procurement activities from the initiation process of finding partners to integrated contract management. In 2024, an E-Proc Module for Vendor Management was developed.

ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR TIK PPA



PPA IT INFRASTRUCTURE ARCHITECTURE

PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI PPA

Pengelolaan Fungsi Information Technology ("IT") dilakukan secara Shared Service oleh Divisi IT - PT Danareksa (Persero). Saat ini fungsi IT di PPA secara struktural berada di bawah Divisi Dukungan Kerja. Shared Service yang dilakukan adalah untuk PT PPA maupun untuk anak perusahaan PPA. Layanan yang diberikan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, komprehensif, dan tepat guna untuk menjamin seluruh kegiatan bisnis dan operasional perusahaan serta pemantauan, koordinasi berjalan dengan baik.

Dalam melaksanakan tugasnya, Shared Service Center menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyediaan dan optimalisasi dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
2. Pelaksanaan penyediaan dan pengembangan sistem aplikasi serta melakukan penelitian dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi;
3. Penyediaan dan pelaksanaan pengamanan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi termasuk melalui proses pengamanan dan duplikasi (back up) data secara berkala dan penyediaan sarana untuk penanggulangan kondisi bencana (disaster recovery plan).

KEBERLANGSUNGAN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI

Kegiatan *disaster recovery* dilaksanakan untuk memastikan keberlangsungan layanan IT apabila terjadi disrupti operasional yang dapat mengganggu jalannya kegiatan bisnis perusahaan. Kecepatan pemulihan data suatu perusahaan menjadikan proses *Business Continuity Planning* (BCP) menjadi suatu keharusan bagi perusahaan yang ingin terus maju dan berkembang. Kegiatan *Disaster Recovery* dilaksanakan di Q4 tahun 2024 pada dua tempat yang berlokasi di kantor PPA dan DRC PPA. Pengujian dilakukan untuk aplikasi dan infrastruktur IT.

RESPONSIBILITY FOR PPA INFORMATION TECHNOLOGY MANAGEMENT

The management of Information Technology ("IT") Function is carried out as a Shared Service by the IT Division - PT Danareksa (Persero). Currently, the IT function at PPA is structurally under the Work Support Division. The Shared Service carried out is for PT PPA and for PPA subsidiaries, and the services provided are based on integrated, comprehensive, and appropriate information technology to ensure that all of the Company's business and operational activities as well as monitoring and coordination run smoothly.

In discharging its duties, Shared Service carries out the following functions:

1. Provides and optimizes information and communication technology infrastructure support;
2. Provides and develops application systems and conducts research and development of information and communication technology;
3. Provides and implements information and communication technology infrastructure security including periodic data security and back up processes, and provides facilities for disaster recovery plans.

CONTINUITY OF INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES

Disaster recovery activities are carried out to ensure the continuity of IT services if operational disruptions occur that could disrupt the Company's business activities. The speed of data recovery for any company makes the Business Continuity Planning (BCP) processes a must for them to continue to progress and develop. Disaster Recovery activities were carried out in QIV 2024 in two locations at the PPA and DRC PPA offices. Testing was carried out on IT applications and infrastructure.

KETAHANAN DAN KEAMANAN SIBER

Peningkatan keamanan di bidang siber merupakan agenda penting bagi PPA untuk kenyamanan proses bisnis. Langkah-langkah pengembangan yang dilakukan PPA dalam bidang *Cyber Security* di antaranya adalah

1. Melakukan *monitoring* perangkat IT baik secara fisik maupun virtual agar dapat berfungsi secara optimal
2. Memastikan setiap perangkat IT untuk karyawan sudah memiliki *endpoint security* dan dikelola secara terpusat
3. Melakukan implementasi *Security Information and Event Management* (SIEM) untuk mendeteksi dan menganalisis ancaman siber.
4. Melaksanakan *workshop* mengenai *cyber security awareness* untuk karyawan PPA.
5. Bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam pembentukan *Computer Security Incident Response Team* (CSIRT) dan asesmen *Cyber Security Maturity* (CSM).

SURVEY KEPUASAN PELANGGAN ATAS PELAKSANAAN LAYANAN IT

Pada bulan Desember 2024, telah dilakukan survey kepuasan pengguna layanan TI internal yang mencakup aspek:

1. Waktu Pelayanan
2. Response Staff
3. Kualitas Layanan
4. Layanan Komplain

Angka penilaian mulai dari Sangat Buruk (1) sampai dengan Sangat Baik (5). Angka hasil survey 2024 menunjukkan bahwa kepuasan pengguna layanan TI sebesar rata-rata 3.98 dari skala 5.

CYBER SECURITY AND RESILIENCE

Increasing security in the cyber sector is important for PPA for the benefit of its business processes. The Cyber Security development steps taken by PPA included:

1. Monitored IT devices both physically and virtually to ensure they function optimally
2. Ensured that all IT devices for employees have endpoint security and are managed centrally
3. Implemented Security Information and Event Management (SIEM) to detect and analyze cyber threats.
4. Conducted a workshop on cyber security awareness for PPA employees.
5. Cooperated with the National Cyber and Crypto Agency (BSSN) to form the Computer Security Incident Response Team (CSIRT) and Cyber Security Maturity (CSM) assessment.

CUSTOMER IT SERVICE SATISFACTION SURVEY

In December 2024 a user satisfaction survey of internal IT services was carried out covering aspects

1. Service Time
2. Staff Response
3. Quality of Service
4. Complaint Service

The ratings ranged from Very Bad (1) to Very Good (5). Overall, the 2024 survey results showed that IT service user satisfaction scored an average of 3.98 on a scale of 5.



Kode Etik

Code of Ethics

Perseroan telah merumuskan Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct/CoC*) sebagai kerangka kebijakan yang secara eksplisit menguraikan nilai-nilai etika sebagai standar perilaku yang harus diikuti oleh seluruh anggota insan Perseroan. Pedoman ini berfungsi sebagai panduan etika dalam konteks bisnis dan lingkungan kerja, baik dalam pelaksanaan kegiatan operasional maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam Pedoman Etika dan Perilaku, diatur pula norma perilaku yang harus diikuti oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan Perseroan terhadap para pemangku kepentingan, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip korporatif yang sehat dan beretika. Sebagai upaya untuk menjunjung tinggi Pedoman Etika dan Perilaku tersebut, Perseroan patuh pada berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan aktivitas bisnisnya.

Pokok-pokok Isi dan Keberlakuan *Code of Conduct* atau Kode Etik Pedoman Etika dan Perilaku Perseroan memuat sejumlah hal yang mencakup:

Bab I: Pendahuluan

1. Latar belakang;
2. Maksud, Tujuan dan Manfaat *Code of Conduct*;
3. Landasan Penyusunan *Code of Conduct*;
4. Visi dan Misi Perseroan;
5. Definisi dan Istilah

Bab II: Etika Usaha

1. Etika Perseroan dengan Karyawan;
2. Etika Perseroan dengan Pemerintah;
3. Etika Perseroan dengan Pemegang Saham;
4. Etika Perseroan dengan Pelanggan;
5. Etika Perseroan dengan Mitra Usaha;
6. Etika Perseroan dengan Pesaing;
7. Etika Perseroan dengan Kreditur/Investor;
8. Etika Perseroan dengan Penyedia Barang/Jasa;
9. Etika Perseroan dengan Masyarakat dan Lingkungan Sekitar;
10. Etika Perseroan dengan Media Massa;
11. Etika Perseroan dengan anak perusahaan.

Bab III: Komitmen, Etika Kerja dan Tata Perilaku Insan Perseroan

1. Komitmen Insan Perseroan
2. Etika Kerja Insan Perseroan
 - a. Etika Kerja Sesama Insan Perseroan;
 - b. Etika Kerja Jajaran Manajemen dan Karyawan
3. Tata Perilaku Insan Perseroan
 - a. Kepatuhan terhadap Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan Lainnya;
 - b. Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan;
 - c. Pemberian dan Penerimaan Hadiah/Cinderamata, Jamuan, Hiburan dan Donasi;
 - d. Keselamatan Kerja, Kesehatan dan Pelestarian Lingkungan;

The Company has formulated a Code of Ethics and Behavior (*Code of Conduct/CoC*) as a policy framework that explicitly outlines the ethical values as standards of behavior that must be followed by all members of the Company. This guideline functions as an ethical guide in the context of business and the work environment, when carrying out operational activities and in everyday life.

The Code of Conduct also regulates the rules of conduct that must be followed by the Board of Commissioners, Board of Directors and all employees of the Company to the stakeholders, based on sound and ethical corporate principles. In an effort to uphold the Code of Conduct, the Company complies with the laws and regulations related to its business activities.

Code of Conduct Contents and Implementation

The Company's Code of Conduct contains the following:

Chapter I: Introduction

1. Background;
2. Purpose, Objectives, and Benefit of Code of Conduct;
3. Code of Conduct Preparation Framework;
4. Company Vision and Mission;
5. Definition and Glossary.

Chapter II: Business Ethics

1. Ethics Between the Company and Employees;
2. Ethics Between the Company and Government;
3. Ethics Between the Company and Shareholders;
4. Ethics Between the Company and Customers;
5. Ethics Between the Company and Business Partners;
6. Ethics Between the Company and Competitors;
7. Ethics Between the Company and Creditors/Investors;
8. Ethics Between the Company and Goods/Services Suppliers;
9. Ethics Between the Company and the Communities and Surrounding Environment;
10. Ethics Between the Company and Mass Media;
11. Ethics Between the Company and Subsidiaries.

Chapter III: Commitment, Work Ethics and Code of Conduct for Company's People

1. Commitment of the Company's People.
2. Work Ethics of the Company's People.
 - a. Work Ethics Among the Company's People.
 - b. Work Ethics of Management and Employees.
3. Code of Conducts for the Company's People.
 - a. Compliance with Laws, Regulations and other provisions;
 - b. Conflict of Interest and Abuse of Position;
 - c. Giving and Receiving Gifts/Souvenirs, Meals, Entertainment, and Donations;
 - d. Occupational Health, Safety, and Environmental Preservation;

- e. Kesempatan yang Sama untuk mendapatkan Pekerjaan dan Promosi;
- f. Perlindungan Informasi Perseroan dan Intangible Asset;
- g. Perlindungan Harta Perseroan;
- h. Pencatatan Data Perseroan dan Penyusunan Laporan;
- i. Perilaku Asusila, Narkotika, Obat Terlarang, Perjudian dan Merokok;
- j. Aktivitas Politik

Bab IV: Penegakan Pedoman Etika dan Perilaku

1. Komitmen Penegakan *Code of Conduct*;
2. Sosialisasi dan Internalisasi;
3. Pelanggaran;
4. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran;
5. Sanksi atas Pelanggaran.

Bab V: Penutup

Lampiran Pedoman Etika dan Perilaku (*Code of Conduct*)

VISI, MISI DAN NILAI

Penetapan Pedoman Etika dan Perilaku sesuai dengan visi dan misi Perseroan bertujuan sebagai panduan perilaku bagi semua karyawan dalam berinteraksi dengan pihak internal maupun eksternal. Pedoman ini diperkenalkan ke seluruh lapisan Perseroan dan dicantumkan dalam kontrak kerja perekrutan yang harus dipahami dan ditandatangani oleh setiap karyawan.

Setiap karyawan diharapkan untuk berperilaku sejalan dengan nilai-nilai Perseroan dan mengimplementasikan kode etik dalam aktivitas harian. Perseroan secara teratur menyelenggarakan acara untuk mengingatkan dan menekankan penerapan kode etik kepada para karyawan.

VISI

Menjadi perusahaan investasi terkemuka dan mitra terpercaya dalam restrukturisasi korporasi.

MISI

1. Memberikan pertumbuhan yang berkesinambungan bagi seluruh pemangku kepentingan melalui kegiatan investasi, restrukturisasi, pengelolaan aset dan *advisory*;
2. Menciptakan sumber daya manusia yang unggul, professional dan memiliki integritas tinggi;
3. Menerapkan manajemen yang terbuka sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko dan kepatuhan secara terintegrasi;
4. Memberikan kontribusi kepada pembangunan lingkungan dan masyarakat.

- e. Equal Opportunity for Career and Promotion Opportunities;

- f. Protection of Corporate Information and Intangible Assets;
- g. Protection on Company Assets;
- h. Company Data Administration and Report Preparation;
- i. Immoral behavior, Narcotics, Illegal Drugs, Gambling and Smoking;
- j. Social and Political Activities.

Chapter IV: Code of Conduct Enforcement

1. Code of Conduct Enforcement Commitment;
2. Socialization and Internalization;
3. Violations;
4. Violation Reporting Mechanism;
5. Violation Sanctions.

Chapter V: Closing

Code of Conduct Appendix

VISION, MISSION AND VALUES

The Ethics and Behavior Guidelines were established based on the Company's vision and mission, to serve as a behavioral guide for all employees when interacting with internal and external parties. These guidelines are given at all levels of the Company, and are included in the recruitment work contract that must be understood and signed by every employee.

All employees are expected to behave in line with the Company's values and adhere to the code of ethics in their daily activities. The Company regularly holds events to remind and emphasize the code of ethics to its employees.

VISION

To be a leading investment Company and be a trusted partner in corporate restructuring.

MISSION

1. Providing sustainable growth for all stakeholders through investment, restructuring, asset management, and advisory activities.
2. Developing high quality, professional, and integrity human resources.
3. Implementing open management in accordance with the principles of good corporate governance, risk management, and compliance in an integrated manner.
4. Contributing to the growth of the environment and the community

BUDAYA DAN NILAI PERSEROAN

AMANAH

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan

KOMPETEN

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas

HARMONIS

Saling peduli dan menghargai perbedaan

LOYAL

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara

ADAPTIF

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan

KOLABORATIF

Membangun kolaborasi yang sinergis

Penetapan Kode Etik Perusahaan

Pedoman Etika dan Perilaku Perseroan ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris pada tanggal 24 Agustus 2021 melalui SK Bersama No. SK-04/KEP.KOM/PPA/VIII/2021; SK-45/PPA/0821. Kode etik tersebut menjadi pedoman dan panduan bagi:

1. Insan Perseroan;
2. Pihak Eksternal yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan;
3. Perseroan dan seluruh entitas Anak Perseroan;
4. Mitra Kerja yang bekerja sama dengan Perseroan

KOMITMEN CODE OF CONDUCT DAN PEMBERLAKUAN KODE ETIK KEPADA SELURUH LEVEL ORGANISASI

Perseroan memprioritaskan etika dalam perilaku dan interaksi dengan semua pemangku kepentingan sebagai bentuk komitmen utama dan perhatian yang serius. Bagi Perseroan, pendekatan ini dianggap sebagai sarana untuk menciptakan nilai tambah baik bagi Perseroan sendiri maupun para pemangku kepentingan. Penyusunan Pedoman Etika dan Perilaku dilakukan sesuai dengan standar yang tinggi dan memperhitungkan kepentingan serta kriteria kepuasan para pemangku kepentingan.

Perseroan secara konsisten dan berkelanjutan menerapkan pedoman tersebut melalui sikap, tindakan, komitmen, dan regulasi yang mendukung pembentukan budaya perusahaan yang mengedepankan moralitas dan integritas dalam menjalankan operasional bisnis. Pedoman Etika dan Perilaku ini berlaku bagi semua anggota Perseroan di setiap tingkatan organisasi, mulai dari pegawai hingga Direksi dan Dewan Komisaris. Seluruh anggota diwajibkan untuk menandatangani pernyataan komitmen terhadap kepatuhan terhadap Pedoman Etika dan Perilaku Perseroan.

SOSIALISASI DAN UPAYA PENEGAKAN PEDOMAN ETIKA SERTA PERILAKU

Pedoman Etika dan Perilaku disampaikan kepada seluruh Insan Perseroan melalui berbagai saluran komunikasi yang dimiliki Perseroan, termasuk melalui teknologi informasi yang dapat diakses kapan saja. Sosialisasi Pedoman Etika dan Perilaku dilakukan melalui berbagai media, seperti:

1. Website
2. Peraturan Perseroan

CORPORATE CULTURE AND VALUES

TRUSTWORTHY

Upholding the trust given

COMPETENT

Continuously learning and developing capabilities

HARMONIOUS

Caring of each other and respecting diversity

LOYAL

Being dedicated and prioritizing the interest of the Nation and the country

ADAPTIVE

Continuously innovating and being eager to drive or overcome change

COLLABORATIVE

Building synergistic collaboration

Company's Code of Conduct Establishment

The Company's Code of Conduct (CoC) was signed by Board of Directors and Board of Commissioners on August 24, 2021 through Joint Decree No. SK-04/KEP.KOM/PPA/VIII/2021; SK-45/PPA/0821. The Company's Code of Conduct serves as a guideline and reference for:

1. Company's People;
2. External Parties who acts on behalf of the Company;
3. Company and all Subsidiaries;
4. Working Partners who work together with the Company.

CODE OF CONDUCT COMMITMENT AND ENFORCEMENT AT ALL ORGANIZATIONAL LEVELS

The Company prioritizes ethics in behavior and interactions with all stakeholders as a primary commitment and serious concern. The Company sees this approach as a means of creating added value for the Company and its stakeholders. The Code of Conduct has been prepared in accordance with the highest standards and takes into account the interests and satisfaction criteria of stakeholders.

The Company consistently and continuously applies these guidelines through attitudes, actions, commitments, and regulations that support the establishment of a corporate culture that prioritizes morality and integrity in carrying when carrying out business operations. This Code of Conduct applies to all Company personnel at every level of the organization, from employees to the Board of Directors and Board of Commissioners. All members are required to sign a statement of commitment to compliance with the Company's Code of Conduct.

CODE OF CONDUCT SOCIALIZATION AND ENFORCEMENT

The Code of Conduct is delivered to all Company Personnel through the Company's communication channels, including through information technology that can be accessed at any time. The Code of Conduct socialization is carried out through the following media:

1. Website;
2. Corporate Regulations;

3. Surat Elektronik
4. Pernyataan Komitmen yang Ditandatangani Bersama
5. Iklan di Koran
6. Sosial Media

SANKSI ATAS PELANGGARAN KODE ETIK

Peraturan mengenai sanksi terkait dengan pelanggaran kode etik melibatkan:

1. Setiap Insan Perseroan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Perseroan;
2. Sanksi bagi karyawan yang melakukan pelanggaran ditetapkan oleh Direksi;
3. Dewan komisaris dan/atau Direksi memutuskan pemberian tindakan pembinaan, sanksi disiplin dan/atau tindakan lainnya serta pencegahan yang harus dilaksanakan;
4. Sanksi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang melakukan pelanggaran diputuskan oleh Pemegang Saham;
5. Sanksi bagi mitra kerja atau *stakeholders* lain yang melakukan pelanggaran adalah sesuai ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam kontrak. Apabila terkait dengan tindak pidana dapat diteruskan kepada pihak yang berwajib.

PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI

Pada tahun 2024 tidak terdapat sanksi yang dijatuhkan kepada seluruh Insan sebagai akibat pelanggaran terhadap kode etik.

LAPORAN DAN PENINDAKAN TAHUN 2024

Sanksi Sanction	2024	2023
-	-	-
Jumlah Total	-	-

3. Electronic Mail;
4. Signed Commitment Declarations;
5. Advertising in Newspapers;
6. Social Media.

SANCTIONS FOR VIOLATING THE CODE OF CONDUCT

The regulations concerning sanctions related to violations of the code of conduct include:

1. Any Company employee proven to have violated the Code of Conduct will be sanctioned in line with the prevailing rules and regulations in the Company;
2. Sanctions for employees conducting a violation will be determined by the Board of Directors;
3. The Board of Commissioners and/or Board of Directors will determine whether to impose a disciplinary sanction, training, and/or other action as well as preventative measures to be implemented;
4. Sanctions for members of Board of Directors and Board of Commissioners conducting a violation will be determined by the Shareholders;
5. If other stakeholders conduct a violation, sanctions will be imposed according to the provisions stipulated in the contract. If the violation is a criminal act, the matter shall be handed over to the authorized parties.

ENFORCEMENT OF THE CODE OF ETHICS AND SANCTIONS

In 2024 there were no sanctions imposed on any individuals related to violations of the code of conduct.

REPORT AND ACTION IN 2024

Fungsi Kepatuhan dan Anti Penyuapan

Anti-Bribery Compliance Function

PPA membangun Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) untuk mewujudkan Tata kelola Perusahaan (GCG) dengan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajiban. Seluruh pihak di PT PPA diharapkan berkomitmen untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mempromosikan iklim bisnis yang bersih dan bebas dari praktik suap. Pembentukan FKAP ini didasarkan pada Surat Keputusan Direksi No. SK-34/PPA/0520 tanggal 20 Mei 2020.

KEANGGOTAAN FUNGSI KEPATUHAN ANTI PENYUAPAN

Keanggotaan FKAP dan dasar pengangkatan FKAP ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No. SK-34/PPA/0520 tanggal 20 Mei 2020, sebagai berikut:

Ketua Satgas Head of Task Force	Kepala Divisi Manajemen Risiko Head of Risk Management Division
Anggota Member	Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan Head of Corporate Secretary Division
	Kepala Divisi SDM dan Umum Head of HC and General Affairs Division
	Kepala Divisi Hukum Head of Legal Division

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

FKAP memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memimpin, merencanakan, dan mengevaluasi secara efektif dan efisien penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
2. Menyediakan panduan dan sosialisasi kepada seluruh anggota Perseroan mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan isu-isu terkait penyuapan.
3. Memastikan penerapan sistem manajemen anti penyuapan, termasuk kebijakan dan sasaran, dilakukan dengan memadai untuk mengatasi risiko penyuapan dalam organisasi.
4. Berkala melaporkan pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan kepada Dewan Komisaris sebagai Dewan Pengarah dan Direksi PPA.
5. Bertanggung jawab atas pendokumentasian sistem dan pengendalian dokumen.

PPA established an Anti-Bribery Compliance Function (FKAP) to realize the Corporate Governance (GCG) principles of transparency, independence, accountability, responsibility and fairness. All PT PPA parties are required to commit to preventing corruption, collusion and nepotism, as well as to promoting a clean business climate free from bribery practices. The FKAP was established based on Board of Directors' Decree No. SK-34/PPA/0520 dated May 20, 2020.

MEMBERSHIP OF THE ANTI-BRIBERY COMPLIANCE FUNCTION

FKAP membership and the basis for appointing FKAP members is stipulated in the Board of Directors Decree No. SK-34/ PPA/0520 dated May 20, 2020, and is as follows:

DUTIES AND RESPONSIBILITIES

FKAP has the following duties and responsibilities:

1. Leading and planning and evaluating activities for implementing the Anti-Bribery Management System so that it runs effectively and efficiently;
2. Providing guidance and socializing to all members of the Company on the Anti-Bribery Management System and issues related to bribery.
3. Ensuring the anti-bribery management system, including policies and targets, are established adequately to overcome the risk of bribery in the organization.
4. Periodically reporting the implementation of the Anti-Bribery Management System to the Board of Commissioners as the PPA Steering Committee and the Board of Directors.
5. Responsible for system documentation and document control.

Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai dan/atau Manajemen

Stock Ownership Program for Employees and/or Management

Hingga akhir tahun 2024, Perseroan tidak pernah melaksanakan Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen dan Pegawai atau *Management Stock Option Program* (MSOP), dan Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan atau *Employees Stock Option Program* (ESOP) yang meliputi:

1. Jangka waktu pelaksanaan
2. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak
3. Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan

As of the end of 2024, the Company has never implemented a Management Stock Option Program (MSOP), or an Stock Option Program (ESOP) that includes:

- a. Implementation period
- b. Eligible employee and/or management requirements
- c. Execution price or determination of execution price

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi atas Saham Perseroan Terbuka

Board of Commissioners and Board of Directors Share Ownership of Public Company Shares

Perseroan mewajibkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya secara berkala melalui daftar khusus yang memuat informasi mengenai kepemilikan saham baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi per 31 Desember 2024:

The Company requires members of the Board of Commissioners and Board of Directors periodically disclose their share ownership through a special list containing information regarding direct and indirect share ownership.

Board of Commissioners and Board of Directors Share Ownership as of December 31, 2024

	Kepemilikan Saham Share Ownership		
	Perseroan Company	Entitas Anak dan Afiliasi Subsidiaries and Affiliated	Perusahaan Lain (Lebih dari 5%) Other Companies (More than 5%)
Dewan Komisaris Board of Commissioners			
Marwanto Harjowiryo	-	-	-
Direksi Board of Directors			
Muhammad Teguh Wirahadikusumah	-	-	-
Ridha Farid Lesmana	-	-	-
Tree Asih Putra Sianturi	-	-	-

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

STATE OFFICIALS' WEALTH REPORT (LHKPN)

PRINSIP DASAR LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

PT Perusahaan Pengelola Aset sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diwajibkan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kebijakan ini didasarkan pada tekad untuk memberantas korupsi dan mengatasi potensi penyimpangan internal.

LHKPN dituangkan dalam formulir yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan KPK No. KEP 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pemeriksaan dan Pengumuman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan wewenang KPK melaksanakan langkah atau upaya pencegahan korupsi antara lain melalui pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, mengamanatkan bahwa setiap penyelenggara wajib melaporkan dan mengumumkan harta kekayaan sebelum dan setelah memegang jabatan. Selain itu, bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat. Pasal 2 ayat (7) Undang-Undang tersebut beserta penjelasannya menguraikan bahwa pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara termasuk Dewan Komisaris, Direksi, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN dan BUMD.

Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertujuan untuk mewujudkan penyelenggara negara yang patuh terhadap prinsip-prinsip umum penyelenggara negara, yang bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perilaku tercela lainnya. Setiap penyelenggara negara diwajibkan melaporkan kekayaannya melalui formulir LHKPN yang telah disediakan oleh KPK. Laporan tersebut harus diisi dengan jujur, benar, dan lengkap agar KPK dapat menganalisis, mengevaluasi, dan menilai seluruh jumlah, jenis, dan nilai Harta Kekayaan yang dilaporkan secara benar, cepat, tepat, akurat, dan bertanggung jawab.

BASIC PRINCIPLES OF STATE OFFICIALS' WEALTH REPORT

PT Perusahaan Pengelola Aset as a State-Owned Enterprise (BUMN) is required to comply with applicable laws and regulations, including the obligation to submit State Officials' Wealth Reports (LHKPN). This policy is based on the determination to eradicate corruption and overcome potential internal irregularities.

LHKPN is a list of all assets or wealth of State Officials, as set forth in LHKPN stipulated by the Corruption Eradication Commission (KPK) as regulated in KPK Decision No. KEP 07/KPK/02/2005 concerning the Procedure for Registration, Examination, and Announcement of State Officials Wealth Report Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission confirming the authority of KPK to execute measures or efforts to prevent corruption, including through registration and examination of LHKPN.

In addition, Law No. 28 of 1999 concerning State Officials that are Clean and Free from Corruption, Collusion, and Nepotism, with a mandate that every state official shall report and announce their assets before and after taking office and be willing to be examined before and after taking office. Article 2 (7) of this Law and explains that other officials are those with strategic functions including the state administrators including Board of Commissioners, Board of Directors, and other structural executives at State-Owned Enterprises (SOEs) and Regional-Owned Enterprises (ROEs).

The examination of LHKPN submitted to KPK aims to create state administrators who comply with the general principles of state administration, and are free from the practices of corruption, collusion and nepotism, as well as other reprehensible behavior. All state administrators are required to report their wealth via the LHKPN form provided by KPK. The reports must be filled in honestly, correctly and completely so that the KPK can analyze, evaluate and assess all amounts, types and values of reported assets correctly, quickly, precisely, accurately and responsibly.

DASAR HUKUM DAN PERATURAN DALAM MENERAPKAN LHKPN DI PERSEROAN

Dalam menerapkan LHKPN, Perseroan menimbang beberapa dasar hukum dan peraturan sebagai landasan, yaitu:

1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/BUMN/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perseroan yang Baik pada BUMN, dan perubahannya;
4. Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan GCG yang baik.

KEBIJAKAN LHKPN PERSEROAN

Perseroan memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap negara dengan menyusun dan melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tujuannya adalah untuk memperkuat peran Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagai salah satu alat pencegahan korupsi. Untuk itu, PPA telah menyusun ketentuan terkait LHKPN melalui Keputusan Direksi No. SK-31/PPA/0719 tentang Penetapan Pejabat Wajib Lap, Koordinator Pengelolaan, dan Administrator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Tujuan penyusunan kebijakan ini adalah sebagai pedoman bagi seluruh pihak terkait dalam pelaksanaan pelaporan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi LHKPN secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pejabat yang wajib menyampaikan LHKPN meliputi Dewan Komisaris, Anggota Direksi, Pejabat dengan jabatan Kepala Divisi/*General Manager* dan jabatan fungsional setingkat Kepala Divisi/*General Manager*, Dewan Komisaris dan Anggota Direksi entitas anak. Pejabat yang ditunjuk sebagai Koordinator Pengelola LHKPN adalah Kepala Divisi/*General Manager Human Capital*.

LHKPN harus disampaikan kepada KPK saat pertama kali menjabat, pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun, atau berakhirnya masa jabatan atau pensiun. Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud harus dilakukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak pengangkatan pertama, pengangkatan kembali, atau berakhirnya jabatan sebagai karyawan.

LHKPN wajib disampaikan secara berkala setiap satu tahun sekali oleh Wajib LHKPN atas Harta Kekayaan yang diperoleh mulai tanggal 1 Januari hingga 31 Desember. Penyampaian ini harus dilakukan kepada KPK paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

LHKPN dapat disampaikan melalui aplikasi e-LHKPN di www.elhkn.kpk.go.id atau dengan mengisi formulir LHKPN dalam format excel. Setelah diisi, formulir tersebut dapat dikirimkan melalui e-mail elhkn@kpk.go.id atau diserahkan kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN, baik secara langsung di Kantor KPK atau melalui pos. Pastikan file excel yang disampaikan sudah disimpan dalam media penyimpanan data. Formulir LHKPN dapat diunduh melalui

LEGAL AND REGULATORY FRAMEWORK FOR APPLYING LHKPN IN THE COMPANY

When applying LHKPN, the Company considers the following laws and regulations as the basis:

1. Law No. 28 of 1999 concerning the State Officials that are Clean and Free from Corruption, Collusion and Nepotism;
2. Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission;
3. The Minister of SOEs Regulation No. PER-01/BUMN/2011 concerning Good Corporate Governance Implementation in SOEs, and its amendments;
4. The Secretary to the Minister of SOEs Decree No. SK- 16/S. MBU/2012 concerning the Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of Proper GCG Implementation.

THE COMPANY'S LHKPN POLICY

The Company is obliged and responsible to the State to compile and report its assets to the Corruption Eradication Commission (KPK). The aim is to strengthen the role of the LHKPN Report as a tool for preventing corruption. For this reason, PPA prepared provisions related to LHKPN through Board of Directors' Decree No. SK-31/PPA/0719 concerning Determination of Mandatory Reporting Officials, Management Coordinators and Administrators of State Officials' Wealth Reports. This policy was prepared as a guideline for all related parties to report their LHKPN to KPK effectively, efficiently and accountably.

Officials who are required to submit LHKPN include the Commissioners, Directors, Officials with a position as Head of Division/*General Manager*, and functional positions at the level of Head of Division/*General Manager*, and Commissioners and Directors of subsidiaries. The official appointed as LHKPN Management Coordinator is the Head of Division/*General Manager of Human Capital*.

The LHKPN must be submitted to KPK when they first start serving, after being re-appointed at the end of their term of office, or upon retirement. Submission of the LHKPN must be carried out no later than 3 (three) months from the first appointment, re-appointment or end of position as an employee.

The LHKPN must be submitted periodically once a year by the Mandatory LHKPN reporter for assets acquired between January 1 to December 31. This submission must be made to KPK no later than March 31 of the following year.

LHKPN can be submitted via the e-LHKPN application at www.elhkn.kpk.go.id or by filling in the LHKPN form in excel format. Once completed, the form can be sent via e-mail to elhkn@kpk.go.id or submitted to the LHKPN Registration and Inspection Directorate, either directly at the KPK Office or by post, ensuring that the excel file submitted has been saved on data storage media. The LHKPN form can be downloaded via www.kpk.go.id/nasional-public/lhkn.

www.kpk.go.id/layanan-publik/lhkpn.

Pengumuman LHKPN harus dilakukan dalam jangka waktu tidak lebih dari 2 (dua) bulan setelah Wajib LHKPN mengirimkan LHKPN kepada KPK. Jika Wajib LHKPN tidak menyampaikan LHKPN atau tidak memenuhi kewajibannya, sanksi administratif dapat dikenakan kepada Wajib LHKPN yang bersangkutan seperti berikut:

The LHKPN must be submitted within a period of no more than 2 (two) months after the Mandatory LHKPN reporters send the LHKPN to KPK. If the Mandatory LHKPN reporters do not submit the LHKPN or do not fulfill its obligations, administrative sanctions can be imposed on the Mandatory LHKPN concerned as follows:

Tabel Daftar Wajib LHKPN dan Sanksi Tidak Melaporkan 2023-2024
List of Mandatory LHKPN Reporters and Sanctions for Failure to Report 2023-2024

Jabatan Position	Sanksi Administratif Administrative Sanction
Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Members of the Board of Commissioners and Board of Directors	Penundaan Pembayaran Tantiem/Insentif Kinerja Atau Penundaan Pembayaran Santunan Purna Jabatan Postponement of Tantiem/Performance Incentive Payments or Postponement of Retirement Compensation Payments
Kepala Divisi/ <i>General Manager</i> dan Jabatan Fungsional Setingkatnya Head of Division/ <i>General Manager</i> and Functional Positions at the same level	Penundaan Pembayaran Apresiasi/Insentif Kinerja Tahun Berjalan Dan Penundaan Promosi Pangkat/Golongan Postponement of Payment of Performance Appreciation/Incentives for the Current Year and Postponement of Rank/Group Promotions
Dewan Komisaris & Anggota Direksi Entitas Anak Board of Commissioners & Members of The Board of Directors of Subsidiaries	• Penundaan Pemberian Tantiem/Insentif Kinerja • Penundaan Pengangkatan Kembali Sebagai Dewan Komisaris/Anggota Direksi Kembali • Postponement of Providing Tantiem/Performance Incentives • Postponement of Reappointment as a member of the Board of Commissioners/Member of the Board of Directors

PENGELOLA LHKPN

Pengelola dan administrator LHKPN di Lingkungan PT PPA ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi No. SK-31/PPA/0719 tentang Penetapan Pejabat Wajib Lapo, Koordinator Pengelolaan dan Administrator Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. Adapun pengelola dan administrator LHKPN yang ditunjuk adalah Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum.

LHKPN MANAGER

The LHKPN manager and administrator within PT PPA are determined through Board of Directors' Decree No. SK-31/PPA/0719 concerning Determination of Mandatory Reporting Officials, Management Coordinators and Administrators of State Officials' Wealth Reports. The appointed LHKPN manager and administrator is the Human Capital and General Affairs Division.

TRANSPARANSI LHKPN PEJABAT PERSEROAN TAHUN 2024

LHKPN TRANSPARENCY FOR COMPANY OFFICIALS IN 2024

Tabel Pengungkapan Penyampaian LHKPN Pejabat Perseroan 2024
LHKPN Submission Disclosures by Company Officials 2024

Pejabat Wajib LHKPN Mandatory LHKPN Reporters	Jumlah Wajib Lapo Total Mandatory Reporters	Telah Melaporkan Already Reported	
		Jumlah Total	Persentase Percentage
Dewan Komisaris Board of Commissioners	1	1	100%
Direksi Board of Directors	3	3	100%
Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak Commissioners and Directors of Subsidiaries	5	5	100%
Kepala Divisi (BOD-1) Head of Division (BOD-1)	13	13	100%
Jumlah Total	22	22	100%

Kebijakan Anti Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi

Anti-Corruption and Gratification Control Policy

Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh karyawan selalu memegang teguh prinsip persaingan yang adil, nilai sportivitas, dan profesionalisme, serta menerapkan prinsip-prinsip Tata kelola Perusahaan (GCG) dalam menjalankan aktivitas bisnis. Perseroan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, menghindari tindakan, perilaku, atau kegiatan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta selalu memprioritaskan kepentingan Perseroan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau golongan. Perseroan juga secara konsisten mematuhi kebijakan anti korupsi yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

PEDOMAN PERSEROAN TERKAIT KETERLIBATAN DALAM AKTIVITAS POLITIK

Perseroan menegaskan kebijakannya untuk tidak memberikan kontribusi dari dana, barang-barang, dan fasilitas milik Perseroan kepada partai politik atau kandidat politik apa pun, kecuali sesuai dengan ketentuan yang diizinkan oleh hukum dan peraturan yang berlaku.

Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menjaga independensi Perseroan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjunjung tinggi integritas dalam pengelolaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Larangan memberikan dana juga bertujuan untuk mencegah potensi konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan dan mewujudkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran sesuai peruntukannya.

Meskipun demikian, Perseroan tidak menghalangi karyawan untuk terlibat dalam kegiatan politik, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Namun, Perseroan secara tegas melarang karyawan yang terlibat dalam politik untuk menggunakan atribut Perseroan.

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Dalam menjalankan operasional bisnisnya, perseroan menegaskan komitmennya untuk menghindari timbulnya konflik kepentingan, dengan tujuan mempertahankan hubungan yang baik dengan semua pemangku kepentingan. Komitmen tersebut tercermin dalam kebijakan pengendalian gratifikasi yang telah resmi disahkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi dengan nomor SK-05/KEP.KOM/PPA/VII/2022; SK-62/PPA/0722 yang mengatur tentang Kebijakan Pengendalian Gratifikasi di PPA.

Latar Belakang

Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, Perseroan menyadari bahwa interaksi antarpihak, baik yang bersifat internal maupun eksternal, merupakan bagian integral dari operasionalnya. Kerja sama yang harmonis, serasi, dan berkesinambungan dengan memperhatikan etika dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) menjadi

The Board of Commissioners, Board of Directors and all employees must always uphold the principles of fair competition, the values of sportsmanship and professionalism, and apply the principles of Corporate Governance (GCG) when carrying out business activities. The Company is committed to creating a healthy business environment, avoiding actions, behavior or activities that could give rise to conflicts of interest, corruption, collusion and nepotism (KKN), and to always prioritize the Company's interests above personal, familial, group or group interests. The Company also consistently complies with anti-corruption policies regulated in Law No. 20 of 2001 as an Amendment to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes.

CORPORATE GUIDELINES RELATED TO ENGAGEMENT IN POLITICAL ACTIVITIES

The Company emphasizes its policy not to make contributions from the Company's funds, goods and facilities to any political party or political candidate, except in accordance with the provisions permitted by applicable laws and regulations.

The main objective of this policy is to maintain the Company's independence as a State-Owned Enterprise (SOE) that upholds integrity in its management in accordance with applicable regulations. The prohibition on providing funds also aims to prevent potential conflicts of interest in decision making and to realize transparency and accountability in managing the budget according to its allocation.

However, the Company does not prohibit its employees from engaging in political activities, which is part of their human rights. However, the Company strictly prohibits employees involved in politics from using Company attributes.

GRATIFICATION CONTROL

When carrying out its business operations, the Company emphasizes its commitment to avoiding conflicts of interest, with the aim of maintaining good relations with all stakeholders. This commitment is included in the gratification control policy that was officially ratified through a Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors No. SK-05/KEP.KOM/PPA/VII/2022; SK-62/PPA/0722 that regulates the Gratification Control Policy at PPA.

Background

In carrying out its business activities, the Company understands that interactions between parties, both internal and external, are an integral part of its operations, with whom it establishes, harmonious, aligned and sustainable cooperation by paying attention to ethics and the principles of Good Corporate Governance (GCG) as the main

landasan utama. Dalam konteks interaksi tersebut, risiko munculnya gratifikasi dari satu pihak ke pihak lain menjadi potensi yang signifikan. Oleh karena itu, Perseroan merasa perlunya mengatur aspek-aspek terkait gratifikasi serta menetapkan mekanisme pelaporan yang transparan di lingkungan internalnya.

Perseroan menjunjung tinggi integritas dalam menjaga hubungan bisnisnya dengan para pemangku kepentingan. Kesadaran akan pentingnya penerapan sikap tegas terhadap pengendalian gratifikasi, terutama yang melibatkan Insan Perseroan, menjadi perhatian utama. Hal ini disebabkan karena gratifikasi, dalam kondisi tertentu, dapat melanggar Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sebagai respons terhadap hal tersebut, Perseroan telah merumuskan Pedoman Pengendalian Gratifikasi, yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sejalan dengan Pedoman Tata kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*), Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), serta nilai-nilai yang dianut Perseroan.

Kebijakan ini dirancang untuk mengatur penanganan gratifikasi yang terjadi antara Insan Perseroan dan pihak-pihak terkait dengan kegiatan usaha Perseroan. Pentingnya penanganan gratifikasi tidak hanya terletak pada aspek hukum, tetapi juga dapat berdampak pada citra Perseroan. Oleh karena itu, kebijakan ini bertujuan untuk mencegah tindak pidana suap dan menghindari dampak hukum serta pencitraan negatif yang dapat merugikan Perseroan.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4297);
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 4756);
3. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
4. Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3874), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 No. 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4150);
5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
6. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi No. B.1341/01-13/0312017 tanggal 15 Maret 2017 Tentang Pedoman dan Batasan Gratifikasi.

Maksud, Tujuan, dan Manfaat

1. Sebagai Pedoman bagi Insan Perseroan untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Gratifikasi di Perseroan;
2. Sebagai Pedoman bagi Insan Perseroan dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Gratifikasi di Perseroan untuk mewujudkan pengelolaan Perseroan yang baik;
3. Mewujudkan pengelolaan Perseroan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

basis. This interaction can give rise to a significant potential risk of gratification from one party to another. Therefore, the Company feels the need to regulate gratification aspects and establish a transparent reporting mechanism within the Company.

The Company upholds integrity in its business relationships with stakeholders, and awareness of the importance of implementing a firm attitude towards controlling gratification, especially those involving Company Personnel, is a major concern. This is because gratification, under certain conditions, can violate the Corruption Eradication Law. To deal with this, the Company has prepared Gratification Control Guidelines that refer to applicable laws and regulations and are in line with the Code of Conduct, as well as the values that apply in the Company.

This policy is designed to regulate the handling of gratification that may occur between Company Personnel and parties related to the Company's business activities. The importance of handling gratification does not only lie in the legal aspect, but can also have an impact on the Company's image. Therefore, this policy aims to prevent criminal acts of bribery and avoid legal impacts and negative images that could harm the Company.

Legal Basis

1. Law No. 19 of 2003 concerning State Owned Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 70, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4297);
2. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2007 Number 106, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4756);
3. Law No. 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission.
4. Law No. 31 of 1999 concerning The Eradication of Corruption (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 140 of 1999, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 3874), as amended by Law No. 20 of 2001 on Amendment to Law No. 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2001 Number 134, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4150).
5. . Minister of SOEs Regulation No. PER-/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs;
6. Corruption Eradication Commission Letter No. B.1341/01-13/0312017 dated March 15, 2017 concerning Gratification Guidelines and Limitations.

Purpose, Objectives and Benefits

1. As a Guideline for Company People to understand, prevent, and overcome Gratification in the Company;
2. As a Guideline for Company People to take a firm attitude towards Gratification in the Company to realize good corporate management;
3. To realize the management of a company that is free from all forms of corruption, collusion and nepotism (KKN).

Prinsip Dasar Gratifikasi

1. Perseroan mewajibkan semua Insan Perseroan untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan tentang penerimaan Gratifikasi. Oleh karena itu, semua Insan Perseroan dilarang baik secara langsung atau tidak langsung menerima Gratifikasi dari pihak manapun untuk:
 - a. Mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan;
 - b. Mempengaruhi pelayanan terkait dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya;
 - c. Mempengaruhi proses penerimaan/promosi/mutasi pejabat/karyawan.
 - d. Mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/ jabatannya.
2. Apabila Insan Perseroan ditawarkan untuk menerima Gratifikasi, kecuali yang diperkenankan dalam kebijakan ini sesuai dengan ketentuan ini, wajib melakukan penolakan secara santun dengan memberikan penjelasan tentang berlakunya kebijakan ini di Perseroan.
3. Dalam hal Insan Perseroan tidak dapat menolak pemberian Gratifikasi karena kondisi tertentu seperti:
 - a. Gratifikasi tidak diterima secara langsung;
 - b. Tidak diketahuinya pemberi Gratifikasi;
 - c. Penerima ragu dengan kualifikasi Gratifikasi; dan
 - d. Adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, misalnya dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan diri sendiri/karier penerima/ada ancaman lain maka untuk menghindari ancaman pidana, yang bersangkutan harus segera melaporkan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan gratifikasi tersebut, atau melalui Tim Pengendali Gratifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja yang kemudian diteruskan ke KPK.
4. Terhadap barang Gratifikasi yang direkomendasikan untuk dikelola oleh Perseroan, maka dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Ditempatkan sebagai barang display Perseroan.
 - b. Digunakan untuk kegiatan operasional Perseroan.
 - c. Disalurkan kepada pihak yang membutuhkan.
 - d. Diserahkan kepada karyawan yang menerima gratifikasi untuk dimanfaatkan sebagai penunjang kinerja.

Kategori Gratifikasi

Gratifikasi yang diterima dikategorikan sebagai berikut:

1. Gratifikasi terkait jabatan.
2. Gratifikasi dalam kedinasan.
3. Gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan.

Pemantauan Gratifikasi

Pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan pengendalian gratifikasi dilakukan oleh Divisi Satuan Pengawasan Intern, yang memberikan laporan secara berkala setiap tahunnya kepada Direktur Utama.

Mekanisme Pelaporan

Mekanisme pelaporan gratifikasi diuraikan sebagai berikut:

Basic Principles of Gratification

1. The Company requires all Company People to comply with the prevailing laws and regulations, including the provisions on acceptance of Gratification. Therefore, all Company People are prohibited from either directly or indirectly receiving Gratification from any party to:
 - a. Influence policies/decisions/treatment of stakeholders;
 - b. Influence services related to their duties, authorities and responsibilities;
 - c. Influence the process of recruitment/promotion/transfer of executives/employees.
 - d. Obtain information, or something that is not justified by the prevailing laws and regulations, or to influence the intended party to do and/or not to do something related to their position.
2. If Company People are offered Gratification, except as permitted in this policy in accordance with these provisions, they must refuse politely by providing an explanation regarding the application of this policy in the Company.
3. In the event that Company People cannot refuse the Gratification due to certain conditions such as:
 - a. Gratification is not received directly;
 - b. The Gratification giver is unknown;
 - c. The recipient doubts the Gratification qualification; and
 - d. There are certain conditions that are impossible to refuse, for example, can cause damage to the good relationship of the institution, self-harm/career of the recipient/another threat, so to avoid criminal threats, the person concerned must immediately report to KPK no later than 30 (thirty) days from the date of Gratification receipt, or through the Gratification Control Team no later than 7 (seven) working days so that it can then forwarded to KPK.
4. For the Gratification items that are recommended to be managed by the Company, the following things can be carried out:
 - a. Placed as the Company's display items;
 - b. Used for the Company's operational activities;
 - c. Distributed to parties in need; or
 - d. Submitted to employees who can receive Gratification to be used as performance support.

Gratification Category

Gratifications received can be categorized as follows:

1. Gratification related to position;
2. Gratification for official service;
3. Gratification that does not need to be reported.

Gratification Monitoring

The Internal Audit Unit Division monitors the implementation of the gratification control policy, and provides regular reports every year to the President Director.

Reporting Mechanism

The gratification reporting mechanism can be described as follows:

1. Apabila terdapat penerimaan Gratifikasi yang harus dilaporkan, maka Insan Perseroan wajib melaporkan hal tersebut dan menyerahkan uang atau barang yang diterima kepada Tim Pengendali Gratifikasi untuk dilanjutkan kepada KPK apabila diperlukan sesuai yang diatur dalam Kebijakan ini;
 2. Pelaporan penerimaan Gratifikasi dilakukan oleh Insan Perseroan melalui Tim Pengendali Gratifikasi dengan diketahui oleh alasannya minimal setingkat Kepala Grup selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerimaan, dengan menyampaikan form penerimaan Gratifikasi sesuai contoh Format sebagaimana diatur dalam Lampiran Kebijakan Pengendalian Gratifikasi ini;
 3. Untuk penerimaan berupa barang yang mudah rusak/busuk atau kadaluarsa (misal: makanan dan minuman), maka penerimaan tersebut diserahkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan dengan menggunakan Lampiran 1 Kebijakan ini. Tim Pengendali Gratifikasi akan memutuskan penyaluran dari penerimaan Gratifikasi tersebut;
 4. Untuk penerimaan berupa barang yang sudah kadaluarsa, maka penerimaan tersebut diserahkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja setelah penerimaan dengan menggunakan Lampiran 1 kebijakan ini. Tim Pengendali Gratifikasi akan memusnahkan barang Gratifikasi tersebut dengan disaksikan oleh Divisi Satuan Pengawasan Intern;
 5. Untuk penerimaan Gratifikasi dalam Kedinasan, penerima melaporkan kepada Tim Pengendali Gratifikasi sesuai contoh format sebagaimana diatur dalam Lampiran 2 Kebijakan Pengendalian Gratifikasi ini;
 6. Pelaporan Gratifikasi selain berupa barang yang mudah rusak/busuk atau kadaluarsa dan Gratifikasi Dalam Kedinasan dilakukan dengan menggunakan format yang diterbitkan oleh KPK.
1. If there is a receipt of Gratification that must be reported, the Company People must report the matter and submit the money or goods received to the Gratification Control Team to be forwarded to KPK if necessary according the stipulation in this Policy;
 2. Reporting receipt of Gratification is carried out by Company People through the Gratification Control Team with the reasons being identified at least at the level of the Group Head no later than 5 (five) working days from the date of receipt, by submitting a Gratification receipt form according to the sample format as set out in the Attachment to this Gratification Control Policy ;
 3. For receipt of perishable/rotten or expired goods (for example: food and beverages), the receipts are submitted to the Gratification Control Team no later than 1 (one) working day after receipt by using Attachment 1 of this Policy. The Gratification Control Team will decide on the distribution of the Gratification receipt;
 4. For receipt of expired goods, the receipts are submitted to the Gratification Control Team no later than 1 (one) working day after the receipt by using Attachment 1 of this policy. The Gratification Control Team will destroy the items witnessed by the Internal Audit Unit Division;
 5. For receiving the Gratification for Official Service, the recipient reports to the Gratification Control Team according to the sample format as set out in Attachment 2 of this Gratification Control Policy;
 6. Gratification reporting other than in the form of perishable/ rotten or expired goods and Gratification for official service shall be carried out using the format issued by KPK.

Laporan Gratifikasi dan Tindak Lanjut Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat laporan penerimaan dan pemberian gratifikasi yang melibatkan Insan Perseroan.

Gratification Report and Follow Up in 2024

During 2024, there were no reports of gratification being accepted or given that involved the Company People.

Informasi Pemberian Dana untuk Kegiatan Politik

Information on Funding for Political Activities

PT Perusahaan Pengelola Aset memiliki kebijakan tidak akan ada kontribusi yang berasal dari dana Perusahaan, barang-barang dan fasilitas milik Perusahaan, yang ditujukan untuk mendukung partai politik atau kandidat politik mana pun, kecuali sebatas yang dibenarkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan independensi Perseroan sebagai BUMN yang memiliki integritas dalam pengelolaan sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketentuan pelarangan pemberian dana juga berguna untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan serta mewujudkan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel sesuai peruntukan yang ditetapkan. Di samping itu, Perseroan tidak melarang seluruh karyawan untuk terlibat dalam politik yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Namun, Perseroan melarang karyawan yang terlibat dalam politik menggunakan atribut Perseroan.

PT Perusahaan Pengelola Aset has a policy that no contributions originating from Company funds, goods, and facilities that belong to the Company, can be used to support any political party or candidate, except to the extent that is justified according to applicable laws and regulations.

This aims to demonstrate the Company's independence as an SOE that has the integrity in management in accordance with applicable regulations. Provisions on the prohibition of funding are also useful to avoid conflicts of interest in decision making and to realize the transparent and accountable budget management in accordance with its intended designation. In addition, The Company does not prohibit its employees from engaging in politics. However, the Company prohibits employees that are involved in politics from using the Company's attributes.

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa

Goods and Services Procurement Policy

KEBIJAKAN SERTA PEDOMAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

Kebijakan di bidang pengadaan barang dan jasa Perseroan bertujuan untuk menciptakan kegiatan pengadaan yang dilakukan dengan efisiensi, efektivitas, keterbukaan, persaingan yang sehat, transparansi, dan akuntabilitas. Kebijakan ini juga diarahkan untuk memenuhi prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik untuk mencapai tujuan tersebut, Perseroan telah menyusun Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, melalui Keputusan Direksi No. SK-125/PPA/1222 tanggal 20 Desember 2022.

Untuk selanjutnya, Kebijakan tersebut menjadi panduan operasional bagi Perseroan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Tujuan penyusunan kebijakan adalah:

1. Sebagai pedoman bagi seluruh satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa;
2. Sebagai dasar penyusunan ketentuan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang lebih rinci dalam bentuk *Standard Operating Procedure* (SOP) yang disusun oleh satuan kerja yang menangani kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Ruang lingkup kebijakan ini meliputi:

1. Prinsip, etika dan pakta integritas dalam pengadaan barang/jasa;
2. Jenis pengadaan, pengguna, pelaksana pengadaan, tim evaluasi, serta penyedia barang/jasa;
3. Metode pengadaan barang/jasa, harga perkiraan sendiri, dan metode evaluasi penetapan pemenang;
4. Sanggahan dan pengadaan gagal;
5. Kontrak, serah terima dan pembayaran barang/jasa;
6. Administrasi dan pelaporan.

Kebijakan pengadaan barang dan jasa yang telah disusun tidak berlaku dalam konteks pengadaan atau penunjukan jasa Kantor Akuntan Publik yang akan melaksanakan audit laporan keuangan Perseroan. Pengecualian ini disebabkan oleh fakta bahwa pengadaan atau penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan bersifat khusus dan tidak mencakup aspek pengadaan atau penunjukan jasa Kantor Akuntan Publik untuk keperluan audit laporan keuangan, yang diatur secara spesifik oleh Anggaran Dasar Perseroan.

GOODS AND SERVICES PROCUREMENT POLICIES AND GUIDELINES

The Company's goods and services procurement policy aims to create efficient, effective, transparent, healthy competition, transparent and accountable procurement activities. This policy is also directed at fulfilling the Good Corporate Governance principles. To achieve this goal, the Company has instigated a Goods and Services Procurement Policy, through Board of Directors' Decree No. SK-125/PPA/1222 dated December 20, 2022.

This Policy has become the operational guidance for the Company in carrying out goods and services procurement activities.

The objectives of the policy are to:

1. Act as a guideline for all work units in carrying out the procurement of goods and services.
2. Form the basis for preparing the provisions for procurement of goods and services in more detail through Standard Operating Procedures (SOP) compiled by work units that handle the procurement of goods and services.

The scope of this Policy includes:

1. Principles, ethics, and integrity pact in the procurement of goods/services;
2. Types of procurement, users, executors of procurement, evaluation teams, and providers of goods/services;
3. Method of procurement of goods/services, self estimated prices, and evaluation methods for determining the winner;
4. Disclaimer and failed procurements;
5. Contracts, handover, and payment of goods/services;
6. Administration and reporting.

The Whistleblowing System (WBS) plays a crucial role in improving the implementation of Good Corporate Governance and is an integral component in the efforts to maintain a culture and awareness of preventing fraud at all levels of the Company's organization. The Company has established a Whistleblowing System (WBS) policy as an essential part that forms behavioral guidelines and work culture within the Company. This WBS Policy is continuously updated to ensure the effectiveness of its implementation increases over time.

Whistleblowing System

Whistleblowing System (WBS) memiliki peran krusial dalam meningkatkan implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan merupakan komponen integral dari upaya memelihara budaya serta kesadaran terhadap pencegahan tindakan penipuan di semua tingkatan organisasi Perseroan. Perseroan menetapkan kebijakan *Whistleblowing System* (WBS) sebagai bagian yang esensial yang membentuk pedoman perilaku dan budaya kerja di lingkungan Perseroan. Kebijakan WBS ini secara terus-menerus diperbarui untuk memastikan peningkatan efektivitas penerapannya seiring berjalannya waktu.

DASAR KEBIJAKAN WBS

Perseroan telah menyusun pedoman pelaporan pelanggaran dan penanganannya, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi nomor SK-08/KEP/KOM/PPA/XI/2024; SK-136/PPA/1124 tanggal 28 November 2024 tentang Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*-WBS). Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi WBS, PT PPA bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) melalui Perjanjian Kerja Sama Penanganan Pengaduan Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 74 Tahun 2021, dengan ruang lingkup sebagai berikut:

1. Penyusunan dan/atau penguatan aturan internal PT PPA terkait penanganan pengaduan;
2. Komitmen pengelolaan penanganan pengaduan;
3. Penanganan pengaduan melalui aplikasi;
4. Koordinasi dan kegiatan bersama penanganan pengaduan; dan
5. Pertukaran data dan/atau informasi.

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku lima tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua pihak.

Tujuan

Pemberlakuan *Whistleblowing System* (WBS) bertujuan sebagai panduan dalam menerapkan dan mengelola pelaporan terkait dugaan pelanggaran yang mungkin terjadi di Perseroan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kondisi di mana terdapat:

1. Terciptanya iklim yang kondusif dan mendorong pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun non-finansial, termasuk hal-hal yang dapat merusak citra Perseroan.
2. Tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) atas kemungkinan terjadinya masalah akibat suatu pelanggaran.
3. Tersedianya kesempatan untuk menangani masalah dugaan pelanggaran secara internal terlebih dahulu, sebelum meluas menjadi masalah pelanggaran yang bersifat publik.
4. Mengurangi biaya dalam menangani akibat dan terjadinya pelanggaran.
5. Meningkatkan reputasi Perseroan.

The Whistleblowing System (WBS) plays a crucial role in improving the implementation of Good Corporate Governance and is an integral component in the efforts to maintain a culture and awareness of preventing fraud at all levels of the Company's organization. The Company has established a Whistleblowing System (WBS) policy as an essential part that forms behavioral guidelines and work culture within the Company. This WBS Policy is continuously updated to ensure the effectiveness of its implementation increases over time.

BASIS FOR WBS POLICY

The Company has prepared the guidelines for reporting and handling violations, as determined in the Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors No. SK-08/KEP/KOM/PPA/XI/2024 and SK-136/PPA/1124 dated November 28, 2024 concerning the Whistleblowing System (WBS). To improve the effectiveness and efficiency of WBS, PT PPA works with the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia (KPK-RI) through the Complaint Handling Cooperation Agreement for Eradicating Corruption Crimes No. 74 of 2021, with the following scope:

1. Formulation and/or strengthening of PT PPA internal regulations for complaint handling;
2. Commitment for complaint handling;
3. Handling complaints through applications;
4. Coordination and joint activities for complaint handling; and
5. Exchange of data and/or information.

This Cooperation Agreement is valid for five years and can be extended upon agreement of both parties.

Objectives

The WBS aims to serve as a guide for implementing and managing reports regarding suspected violations that may occur in the Company, so as to create the following conditions:

1. Establishment of a conducive climate that encourages reporting issues with potential financial and non-financial loss, including issues that may harm the Company's reputation;
2. Availability of the early warning system on any possibility of issues due to a particular violation or fraud;
3. Availability of opportunities to handle any fraud indication through an internal mechanism first before becoming a public fraud issue;
4. Reduces the cost of dealing with fraud impact and cases;
5. Improves the corporate reputation.

Lingkup Pelaporan Pelanggaran

Jenis dugaan pelanggaran yang dapat dilaporkan antara lain:

1. Korupsi;
2. Kecurangan;
3. Gratifikasi;
4. Penyuapan;
5. Benturan kepentingan;
6. Pelanggaran hukum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan bisnis Perseroan;
7. Pelanggaran peraturan/kebijakan/prosedur internal yang dapat merugikan Perseroan; dan
8. Ketidapatutan dalam etika bisnis dan etika kerja yang berlaku secara umum.

Pengelola Laporan

Untuk mengelola pelaporan pelanggaran, Perseroan telah membentuk Tim Pengelola Pelaporan Pelanggaran yang beroperasi secara independen dari kegiatan operasional Perseroan sehari-hari. Tim ini memiliki tanggung jawab langsung kepada Direksi dan struktur keanggotaannya adalah sebagai berikut:

1. Pengawas: Komisaris Utama dan/atau Direktur Utama
2. Ketua: Kepala Divisi SPI
3. Anggota:
 - a. Kepala Divisi Hukum
 - b. Kepala Divisi SDM dan Umum
 - c. Kepala Divisi Manajemen Risiko
 - d. Anggota Komite Audit sebagai Organ Dewan Komisaris (jika dibutuhkan)
 - e. Sekretaris: Personil dari SPI yang ditunjuk oleh Kepala Divisi SPI untuk melaksanakan tugas-tugas administratif.

Saluran Pelaporan Pelanggaran

Pihak yang berhak melakukan pelaporan adalah setiap pihak yang terkait dengan Perseroan atau pihak ketiga di luar Perseroan yang merasa dirugikan atau hanya ingin melaporkan terjadinya dugaan pelanggaran. Laporan dugaan pelanggaran dapat dilakukan oleh pelapor melalui:

1. Aplikasi/sistem: wbs@ptppa.com, atau
2. Website Perseroan: www.ptppa.co.id

MEKANISME PENYAMPAIAN DAN ALUR PELAPORAN PELANGGARAN

Alur Mekanisme penyampaian dan alur pelaporan melalui WBS adalah sebagai berikut:

Scope of Violation Report

Type of violation that can to be reported includes:

1. Corruption;
2. Fraud;
3. Gratification;
4. Bribery
5. Conflicts of Interest;
6. Actions against the law or other regulation that is relevant to the Company's business;
7. Violations of internal regulations/policies/procedures with a potential loss to the Company;
8. Inappropriateness in generally applied business and work ethics.

Report Manager

To manage violation reporting, the Company has established a Violation Reporting Management Team that operates independently from the Company's daily operational activities. This team is directly responsibility to the Board of Directors and its membership structure is as follows:

1. Supervisor: President Commissioner and/or President Director
2. Chair: Head of SPI Division
3. Members:
 - a. Head of Legal Division
 - b. Head of HC and General Affairs Division
 - c. Head of Risk Management Division
 - d. Member of the Audit Committee as an Organ of the Board of Commissioners (if deemed necessary)
 - e. Secretary: Personnel from SPI appointed by the SPI Division Head to carry out administrative tasks

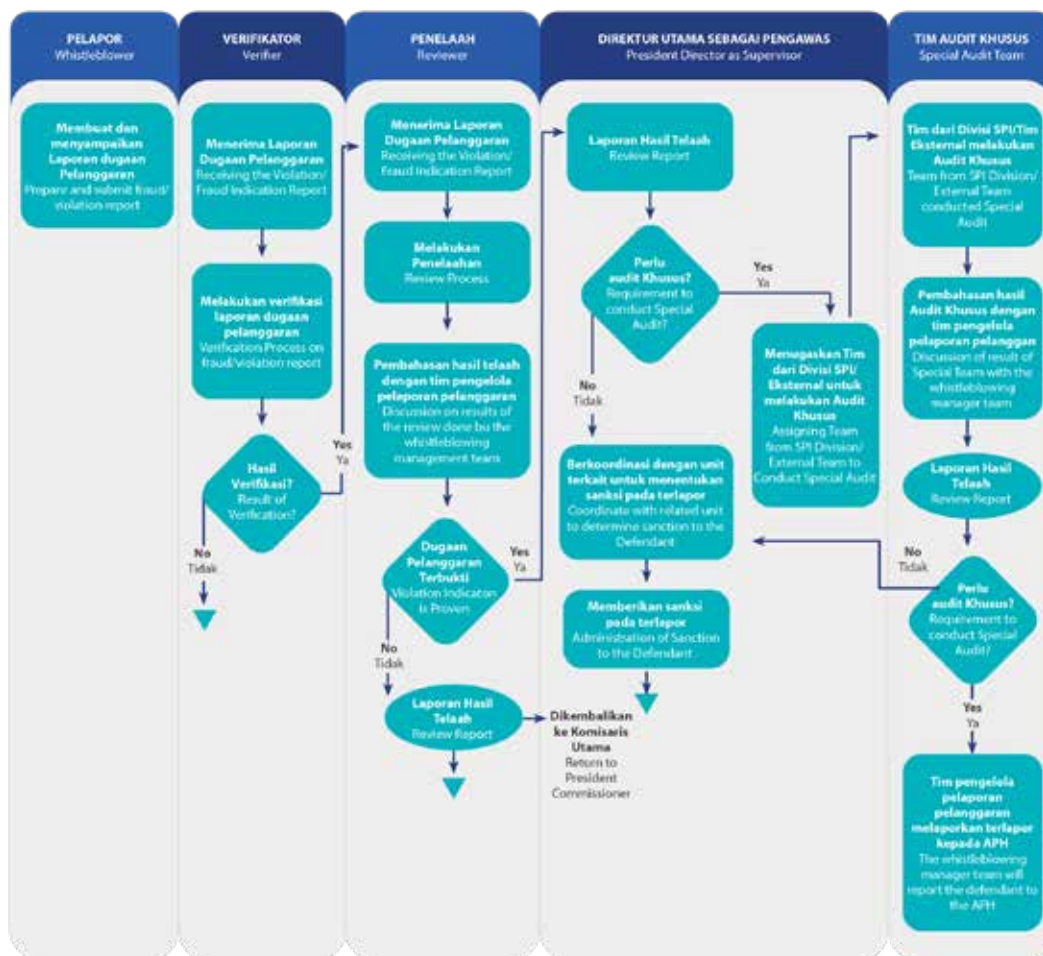
Whistleblowing Channels

The parties eligible to submit reports are all parties related to the Company or third parties outside the Company who recognize any loss or have the intention to report indications of fraud. The violation indication report may be submitted by the whistleblower through:

1. App./system: wbs@ptppa.com, or
2. Website: www.ptppa.co.id

SUBMISSION MECHANISM AND REPORTING FLOW FOR VIOLATIONS

The submission and reporting flow through the WBS is as follows:



PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR

Atas laporan yang terbukti kebenarannya, Perseroan akan memberikan perlindungan terhadap pelapor. Perlindungan tersebut mencakup:

- Perseroan memberikan perlindungan kepada Pelapor dan pihak-pihak terkait (pihak yang ditunjuk membantu proses Audit Khusus serta pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan pelaporan dugaan Pelanggaran).
- Perseroan menjamin perlindungan terhadap Pelapor pada batas-batas kemampuan Perseroan, antara lain:
 - Jaminan kerahasiaan identitas Pelapor.
 - Perseroan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun.
 - Perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan yang terjadi di Perseroan sebagai akibat dari adanya laporan dugaan Pelanggaran oleh Insan Perseroan, antara lain perlindungan atas:
 - Pemecatan yang tidak adil,
 - Penundaan kenaikan atau penurunan jabatan/pangkat,
 - Tuntutan pidana dan/atau perdata, kecuali oleh Aparat Penegak Hukum,
 - Pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk, kekerasan fisik,
 - Catatan yang merugikan dalam *personal file record*.

PROTECTION FOR WHISTLEBLOWERS

For reports that are proven to be true, the Company will provide protection for the complainant. Protection for reporters includes:

- The company provides protection to Whistleblowers and related parties (parties appointed to assist the Special Audit process and parties providing information related to reporting of alleged violations).
- The Company guarantees the protection of Whistleblowers within the limits of the Company's capabilities, including:
 - Guaranteeing the confidentiality of the Whistleblower's identity.
 - The Company guarantees the protection of Whistleblowers from all forms of threats, intimidation or unpleasant actions from any party.
 - Protection against adverse treatment that occurs in the Company as a result of reports of alleged violations by Company personnel, including protection for:
 - unfair dismissal,
 - postponement of promotion or demotion of position/ rank,
 - criminal and/or civil lawsuits, except by Law Enforcement Officials,
 - harassment or discrimination of any kind, physical abuse,
 - adverse records in personal file records.

- d. Apabila diperlukan, Pengelola WBS wajib memberikan bantuan kepada Pelapor untuk meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai dengan UU No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
 - e. Jaminan bagi *stakeholders* bahwa Perseroan tetap akan memberikan hak dan kesempatan yang sama dalam berhubungan atau melakukan transaksi bisnis dengan Perseroan.
3. Perlindungan juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan tersebut. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti terlapor melakukan pelanggaran, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PENANGANAN PENGADUAN

1. Setiap laporan WBS yang masuk akan dievaluasi berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh, dan selanjutnya dibuat rekomendasi apakah akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk melakukan pendalaman.
2. Jika laporan dugaan pelanggaran tidak memenuhi syarat minimal pelaporan dalam sistem WBS Perseroan, Tim WBS dapat menyatakan tidak akan melanjutkannya ke tahap pemeriksaan dan menutup masalah yang dilaporkan tersebut.
3. Jika laporan dugaan pelanggaran tersebut ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, maka Tim WBS menyampaikan perkembangannya kepada Pengawas.
4. Setelah selesai pemeriksaan, apabila terbukti, maka Pengawas akan memberikan sanksi. Jika terkait dengan adanya tindak pidana, maka Pengawas dapat menyerahkan kepada instansi yang berwenang.

Jumlah Pelaporan Pelanggaran dan Tindak Lanjut

Sepanjang tahun 2024, tidak ada pengaduan yang masuk melalui saluran WBS Perseroan.

MONITORING DAN EVALUASI

Untuk memastikan efektivitas penerapan WBS, diperlukan kegiatan *monitoring* dan evaluasi. Langkah ini bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan sejak awal penerapan sistem WBS dan untuk memverifikasi bahwa pencapaian tersebut sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. *Monitoring* dan evaluasi dapat dilaksanakan oleh Direksi melalui Divisi Satuan Pengawasan Internal atau dengan melibatkan pihak luar yang bersifat independen.

Proses *monitoring* dan evaluasi tersebut diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan terhadap Sistem WBS dan juga untuk melakukan pemantauan terhadap rekomendasi asesmen penerapan GCG. Hasil dari kegiatan *monitoring* dan evaluasi ini kemudian disusun dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada Direksi. Tujuannya adalah agar Perseroan dapat terus meningkatkan dan mengoptimalkan penerapan WBS, serta memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dan regulasi yang berlaku.

- d. If necessary, the WBS Manager is obliged to provide assistance to the Whistleblowers by asking for protection from the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) in accordance with Law No. 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims.
 - e. Assurance for stakeholders that the Company will continue to provide equal rights and opportunities in dealing or conducting business transactions with the Company.
3. Protection also applies to the parties carrying out the examination of the complaint. If based on the results of the examination it is proven that the reported party committed a violation, sanctions will be given in accordance with the applicable regulations.

COMPLAINT HANDLING

1. Each incoming WBS report will be evaluated based on the evidence obtained and then a recommendation will be made whether further examination will be carried out to conduct in-depth analysis.
2. If a report of an alleged violation does not meet the minimum requirements for reporting in the Company's WBS system, the WBS Team can declare it will not proceed to the inspection stage, and close the reported problem.
3. If the report of alleged violations is followed up with an examination, the WBS Team will submit the progress to the Supervisor.
4. After the inspection is completed, if it is proven, the Supervisor will give sanctions. If it is related to a criminal act, the Supervisor can submit it to the competent authority.

Number of Violation Reports and Follow Up

During 2024, there were no complaints submitted via the Company's WBS channels.

MONITORING AND EVALUATION

To ensure the effectiveness of WBS implementation, monitoring and evaluation activities are needed. These will be conducted to meet the objectives stipulated at the beginning of the WBS system initiation and to ensure that the achievement conforms to the Company's business demand and the prevailing Laws and regulations. Monitoring and evaluation can be carried out by the Board of Directors through the SPI Division, or by involving independent external parties.

The monitoring and evaluation process is directed at producing recommendations for improvements to the WBS System and also for monitoring recommendations for assessing GCG implementation. The monitoring and evaluation activities results are then compiled in a report that is submitted to the Board of Directors, so that the Company can continue to improve and optimize the WBS, as well as ensure its compliance with the principles of Corporate Governance and applicable regulations.

Transparansi Praktik Bad Governance

Transparency of Bad Governance Practices

LAPORAN ATAS AKTIVITAS PERSEROAN YANG MENCEMARI LINGKUNGAN

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat laporan dari pihak lain atas aktivitas Perseroan yang mencemari lingkungan.

PENGUNGKAPAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Selama tahun 2024, Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakan. Adapun kontribusi pajak dari Perseroan, yaitu sebagai berikut:

REPORT ON COMPANY ACTIVITIES POLLUTING THE ENVIRONMENT

In 2024, there were no reports from other parties regarding the Company's activities that pollute the environment.

DISCLOSURE OF FULFILLMENT OF TAX OBLIGATIONS

In 2024 the Company fulfilled all tax obligations. The tax contributions from the Company were as follows:

Deskripsi Description	Jumlah Total
PPh Pasal 21 - Karyawan Income Tax Article 21 - Employees	30.617.576.565
PPh Pasal 21 - Pihak Luar Income Tax Article 21 - External Parties	327.448.981
Pph Pasal 22 Income Tax Article 22	29.863.426
PPh Pasal 23 Income Tax Article 23	1.242.833.697
PPh Pasal 25 Income Tax Article 25	-
PPh 26 Income Tax 26	176.598.555
PPh Pasal 4 (2) Income Tax Article 4 (2)	7.041.848.496
PPN LN Foreign VAT	157.214.543
Pajak Pemungut Tax Collector	8.325.787.074
Jumlah Pajak yang Dibayarkan Total Tax Paid	47.919.171.337

KETIDAKSESUAIAN PENYAJIAN LAPORAN TAHUNAN DAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN PERATURAN YANG BERLAKU SERTA STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK)

Seluruh penyajian informasi dalam Laporan Tahunan ini, khususnya terkait kinerja keuangan dan hal-hal lainnya, mengacu pada Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia). Penyajian dan pengungkapan laporan keuangan konsolidasian Perseroan disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kasus terkait dengan Buruh dan Karyawan

Sepanjang tahun 2024, tidak terdapat kasus terkait dengan buruh dan karyawan.

Pengungkapan Segmen Operasi pada Laporan Keuangan

Laporan Keuangan PPA untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 telah menerapkan PSAK 5 tentang Segmen Operasi.

Kesesuaian Buku Laporan Tahunan dan Laporan Tahunan Digital

Laporan Tahunan Perseroan dalam bentuk digital, baik yang disampaikan kepada pemegang saham, pemangku kepentingan, maupun yang telah diunggah pada situs web resmi Perseroan, sudah sesuai dengan buku Laporan Tahunan yang dicetak dan diterbitkan oleh Perseroan.

NON-COMPLIANCE IN THE PRESENTATION OF THE ANNUAL REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS WITH APPLICABLE REGULATIONS AND FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (SAK)

All information presented in this Annual Report, particularly related to financial performance and other matters, refers to the Financial Statements for the years ending December 31, 2024, and December 31, 2023, which have been audited by the Public Accounting Firm Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (RSM Indonesia). The presentation and disclosure of the Company's consolidated financial statements are prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia, namely the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) issued by the Indonesian Institute of Accountants (IAI), as well as applicable laws and regulations.

Cases Related to Workers and Employees

During 2024, there were no cases related to workers and employees.

Disclosure of Operating Segments in the Financial Statements

PPA Financial Statements for the years ending December 31, 2024, and December 31, 2023, have applied PSAK 5 on Operating Segments.

Conformity of Annual Report Book and Digital Annual Report

The Company's Annual Report in digital form, whether submitted to shareholders, stakeholders, or uploaded on the Company's official website, is in accordance with the Annual Report book printed and published by the Company.

PENERAPAN ATAS PEDOMAN UMUM GOVERNANSI PT PPA SESUAI PEDOMAN UMUM GOVERNANSI KORPORAT INDONESIA TAHUN 2021

Implementation of PT PPA'S General Guidelines for Governance in Accordance with The General Guidelines for Indonesian Corporate Governance in 2021

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description	
		Terapkan Apply	Jelaskan Explain
1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Roles and Responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners		
1.1	Peran dan Tanggung Jawab Direksi Roles and Responsibilities of the Board of Directors		
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
1.1.1	Untuk mencapai penciptaan nilai yang berkelanjutan, Direksi menjalankan peran kepemimpinannya dan berupaya mencapai hasil governansi sebagai berikut: a. berdaya saing dan berfokus ke kinerja jangka panjang; b. beretika dan bertanggung jawab dalam menjalankan bisnis; c. berkontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan; serta d. berkemampuan dalam bertahan dan bertumbuh (<i>corporate resilience</i>) To achieve sustainable value creation, the Board of Directors carries out its leadership role and strives to achieve the following governance results: a. competitive and focused on long-term performance; b. ethical and responsible for running the business; c. contribute positively to society and the environment; as well as d. ability to survive and grow (<i>corporate resilience</i>)	Dengan penuh komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik, Direksi mengesahkan Kode Etik melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. SK-04/KEP.KOM/PPA/VIII/2021; SK-45/PPA/0821 tanggal 24 Agustus 2021. Langkah ini mencerminkan komitmen Direksi untuk menjunjung tinggi standar integritas dan profesionalisme tertinggi dalam setiap aspek operasional. Penerapan Kode Etik ini menguatkan tata kelola perusahaan yang baik, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan membangun budaya kerja yang etis dan bertanggung jawab di seluruh jajaran perusahaan. With full commitment to good corporate governance, the Board of Directors approved the Code of Ethics through the Board of Commissioners and Directors Board of Joint Decree No. SK-04/KEP.KOM/PPA/VIII/2021; SK-45/PPA/0821 dated August 24, 2021. This step reflects the Board of Directors' commitment to upholding the highest standards of integrity and professionalism in all operational aspects. Application of this Code of Ethics strengthens good corporate governance, ensures compliance with regulations, and builds an ethical and responsible work culture at all levels of the Company.	Telah diterapkan Already Applied
Rekomendasi 2 Recommendation 2			
1.1.2	Direksi harus memastikan bahwa misi, visi, tujuan, sasaran, strategi, dan rencana tahunan dan jangka menengah korporasi konsisten dengan tujuan jangka panjang, dengan memanfaatkan inovasi dan teknologi secara efektif. The Board of Directors must ensure that the corporation's mission, vision, goals, objectives, strategies and annual and medium-term plans are consistent with long-term goals, by effectively utilizing innovation and technology.	Direksi bertanggung jawab untuk memahami visi jangka panjang Perseroan, mengidentifikasi peluang dan tantangan, serta mengevaluasi risiko terkait strategi yang diusulkan. RKAP 2024 yang ditetapkan oleh Direksi dan didukung oleh Dewan Komisaris, mencakup strategi, kebijakan, dan program kerja untuk mencapai tujuan Perseroan. Tata kelola sumber daya manusia yang baik di tahun 2024, melalui rekrutmen selektif, pelatihan terarah, dan evaluasi kinerja teratur, menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan produktif. Selain itu, Perseroan mengembangkan teknologi informasi sesuai <i>Master Plan</i> 2020–2024 untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan keunggulan kompetitif. The Board of Directors is responsible for understanding the Company's long-term vision, identifying opportunities and challenges, and evaluating risks related to proposed strategies. The 2024 RKAP, which was determined by the Board of Directors and supported by the Board of Commissioners, includes the strategies, policies and work programs to achieve the Company's goals. Good human capital governance in 2024, through selective recruitment, targeted training and regular performance evaluations, creates an inclusive and productive work environment. In addition, the Company is developing information technology according to the 2020–2024 Master Plan to support the Company's business growth and competitive advantage.	Telah diterapkan Already Applied

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description	Terapkan Apply	Jelaskan Explain
Rekomendasi 3 & 4 Recommendation 3 & 4				
1.1.3	Direksi memastikan bahwa korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. The Board of Directors ensures that the corporation implements appropriate and effective risk management and internal control systems that are in line with the corporate vision, mission, goals, objectives and strategies and comply with applicable laws and regulations and standards.	Direksi telah menegaskan komitmen perusahaan terhadap penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang optimal dan efektif, yang diselaraskan dengan visi, misi, tujuan, sasaran, serta strategi perusahaan, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan standar yang berlaku. Dengan mengesahkan kebijakan manajemen risiko melalui Surat Keputusan Direksi No. SK-122/PPA/1124 pada tanggal 28 November 2024, dan kebijakan sistem pengendalian internal melalui Keputusan Direksi No. SK-137/PPA/1223 pada tanggal 13 Desember 2023, Direksi telah menunjukkan langkah proaktif dalam memperkuat kerangka tata kelola perusahaan yang kokoh, guna mencapai kinerja yang berkelanjutan dan meminimalisir potensi risiko yang dapat mengganggu stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. The Board of Directors has confirmed the Company's commitment to implementing optimal and effective risk management and internal control systems, which are aligned with the Company's vision, mission, goals, objectives and strategies, while ensuring compliance with applicable laws and regulations and standards. By ratifying the risk management policy through Board of Directors' Decree No. SK-122/PPA/1124 dated November 28, 2024, and the internal control system policy through Board of Directors' Decree No. SK-137/PPA/1223 dated December 13, 2023, the Board of Directors has demonstrated proactive steps to strengthening a strong corporate governance framework, in order to achieve a sustainable performance and minimize potential risks that could disrupt the Company's stability and growth.	Telah diterapkan Already Applied	
1.1.4	Direksi memastikan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporasi dan pengungkapan yang tepat waktu dan akurat atas semua informasi material mengenai korporasi. The Board of Directors ensures the integrity of the corporation's accounting and financial reporting systems and the timely and accurate disclosure of all material information regarding the corporation.	Direksi Perusahaan memastikan bahwa setiap aspek penting tentang perusahaan tercermin dengan jelas dalam laporan. Berkomitmen pada integritas dan transparansi, yang tidak hanya membangun kepercayaan yang kuat di antara pemangku kepentingan, tetapi juga memperkuat fondasi keberlanjutan perusahaan. Selain itu, laporan keuangan Perusahaan senantiasa diaudit oleh Akuntan Publik sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia, menegaskan kualitas dan ketepatan waktu dalam pengungkapan informasi keuangan. Dengan demikian, praktik pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan profesional telah menjadi pilar utama dalam menjaga kredibilitas dan pertumbuhan berkelanjutan perusahaan. The Company's Board of Directors ensures that every important Company aspects are clearly reflected in the reports. The commitment to integrity and transparency, not only builds strong trust among stakeholders, but also strengthens the Company's sustainability foundation. In addition, the Company's financial reports are always audited by Public Accountants in accordance with generally accepted Indonesian Financial Accounting Standards, confirming the quality and timeliness in disclosing financial information. Thus, responsible and professional financial management practices have become a key pillar in maintaining the Company's credibility and sustainable growth.	Telah diterapkan Already Applied	
Rekomendasi 5 Recommendation 5				
1.1.5	Direksi memastikan pelaporan keberlanjutan telah disusun sebagaimana mestinya. The Board of Directors ensures that sustainability reporting has been prepared appropriately.	Direksi telah memastikan pelaporan keberlanjutan disusun sebagaimana mestinya yang ditunjukkan dengan penyusunan Laporan Keberlanjutan Tahun 2024 yang disusun berdasarkan SEOJK No. 16 Tahun 2021/POJK No. 51 Tahun 2017 serta GRI Standards. The Board of Directors has ensured that sustainability reporting is prepared as it should be, as demonstrated by the preparation of the 2024 Sustainability Report prepared based on SEOJK No. 16 of 2021/POJK No. 51 of 2017 and GRI Standards.	Telah diterapkan Already Applied	

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description Terapkan Apply	Jelaskan Explain
Rekomendasi 6 Recommendation 6			
1.1.6	Direksi membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnis korporasi. The Board of Directors builds a framework for corporate information technology (IT) governance that is aligned with corporate business needs and priorities.	Perusahaan membangun kerangka kerja untuk governansi teknologi informasi (TI) korporasi yang selaras dengan kebutuhan dan prioritas bisnisnya, mendorong peluang dan kinerja bisnis, serta memperkuat manajemen risiko, sembari mendukung tujuan dan strategi Perusahaan. Hal ini diwujudkan dengan menerapkan teknologi informasi (TI) untuk mendukung pertumbuhan bisnis, dengan mengacu pada <i>Master Plan TI 2020-2024</i> dan kebijakan tata kelola TI. Pengelolaan Fungsi <i>Information Technology</i> ("IT") dilakukan secara <i>Shared Service</i> oleh Divisi IT - PT Danareksa (Persero). Saat ini fungsi IT di PPA secara struktural berada di bawah Divisi Dukungan Kerja. <i>Shared Service</i> yang dilakukan adalah untuk PT PPA maupun untuk anak perusahaan PPA. Layanan yang diberikan berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, komprehensif, dan tepat guna untuk menjamin seluruh kegiatan bisnis dan operasional perusahaan serta pemantauan, koordinasi berjalan dengan baik. The Company is building a framework for corporate information technology (IT) governance that is aligned with its business needs and priorities, driving business opportunities and performance, and strengthening risk management, while supporting the Company's goals and strategies. This has been realized by implementing information technology (IT) to support business growth, while referring to the 2020-2024 IT Master Plan and IT governance policies. The management of Information Technology ("IT") Function is carried out as Shared Service by the IT Division - PT Danareksa (Persero). Currently, the IT function at PPA is structurally under the Work Support Division. The Shared Service carried out is for PT PPA and for PPA subsidiaries. The services provided are based on integrated, comprehensive, and appropriate information technology to ensure that all business and operational activities of the Company as well as monitoring and coordination run smoothly.	Telah diterapkan Already Applied
Rekomendasi 7, 8 & 9 Recommendation 7, 8 & 9			
1.1.7	Bagi korporasi yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, Direksi perlu memastikan kewenangan dan ketersediaan perangkat pendukung yang memadai agar Dewan Pengawas Syariah dapat menjalankan perannya dengan efektif. For corporations that carry out business activities based on Sharia principles, the Board of Directors needs to ensure the authority and availability of adequate supporting equipment so that the Sharia Supervisory Board can carry out its role effectively.	<i>Not Applicable</i> (N/A) Hal ini dikarenakan Perusahaan tidak menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah. This is because the Company does not carry out business activities based on Sharia principles.	-
1.1.8	Piagam Direksi secara periodik ditinjau. Piagam mencakup antara lain pembagian peran Direktur secara individual dapat diatur di Piagam Direksi atau dengan surat keputusan Direksi. The Board of Directors' Charter is periodically reviewed. The Charter includes, among other things, the division of roles of individual Directors which can be regulated in the Directors' Charter or by a Board of Directors' Decree.	Direksi secara berkala meninjau Piagam Direksi untuk memastikan kesesuaiannya dengan dinamika bisnis dan kebutuhan perusahaan. Piagam ini telah ditetapkan dalam keputusan Direksi No. SK-89/PPA/1022; SK-06/KEP.KOM/PPA/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022. The Board of Directors regularly reviews the Board of Directors Charter to ensure its suitability to business dynamics and Company needs. This charter was established through the Board of Directors' Decree No. SK-89/PPA/1022; SK-06/KEP.KOM/PPA/X/2022 dated October 26, 2022.	Telah diterapkan Already Applied
1.1.9	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Directors has a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if they are involved in financial crimes and are proven to have made a mistake.	Direksi memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. Piagam ini telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. SK-89/PPA/1022; SK-06/KEP.KOM/PPA/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022. The Board of Directors has a policy regarding the resignation of members of the Board of Directors if involved in financial crimes and proven to have committed mistakes. This charter was established through the Joint Decision of the Board of Commissioners and Board of Directors' Decree No. SK-89/PPA/1022; SK-06/KEP.KOM/PPA/X/2022 dated October 26, 2022.	Telah diterapkan Already Applied

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description	
		Terapkan Apply	Jelaskan Explain
1.2 Penilaian Kinerja – Direksi dan Anggotanya Performance Assessment – Board of Directors and Members			
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
1.2.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara objektif dan independen untuk menentukan efektivitas Direksi dan setiap individu direktur. The Board of Commissioners conducts annual formal evaluations objectively and independently to determine the effectiveness of the Board of Directors and each individual director.	Dewan Komisaris memiliki kebijakan terkait evaluasi setiap individu Direksi sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. SK-89/PPA/1022; SK-06/KEP. KOM/PPA/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022. The Board of Commissioners has policies related to the evaluation of each individual Board of Directors as stipulated in the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors No. SK-89/PPA/1022; SK-06/KEP. KOM/PPA/X/2022 dated October 26, 2022.	Telah diterapkan Already Applied
Rekomendasi 2 Recommendation 2			
1.2.2	Dewan Komisaris dengan pertimbangan Komite Nominasi dan Remunerasi, bertanggung jawab menentukan kriteria evaluasi kinerja dan menilai kinerja Direktur Utama dan anggota Direksi lainnya. The Board of Commissioners, with consideration from the Nominations and Remuneration Committee, is responsible for determining performance evaluation criteria and assessing the performance of the President Director and other members of the Board of Directors.	Dewan Komisaris memiliki kebijakan terkait kriteria evaluasi setiap individu Direksi sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. SK-89/PPA/1022; SK-06/KEP. KOM/PPA/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022. The Board of Commissioners has policies related to the evaluation criteria of each individual Board of Directors as stipulated in the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors No. SK-89/PPA/1022; SK-06/KEP. KOM/PPA/X/2022 dated October 26, 2022.	Telah diterapkan Already Applied
1.3 Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Roles and Responsibilities of the Board of Commissioners			
Rekomendasi 1, 2, 3, 4, 5 & 6 Recommendations 1, 2, 3, 4, 5 & 6			
1.3.1	Dewan Komisaris mereviu strategi korporasi paling tidak setiap tahun dan menyetujui misi, visi dan strategi korporasi yang dirumuskan oleh Direksi. Dewan Komisaris juga mereviu, memberikan saran dan menyetujui rencana bisnis dan rencana keuangan jangka panjang dan rencana keuangan jangka pendek korporasi. Dewan Komisaris memberikan advis dan melakukan pemantauan kepada Direksi atas pengelolaan implementasinya. Direksi dan Dewan Komisaris terlibat dalam keputusan yang sangat penting bagi korporasi, diatur dalam anggaran dasar korporasi. The Board of Commissioners reviews the corporate strategy at least annually and approves the mission, vision and corporate strategy formulated by the Board of Directors. The Board of Commissioners also reviews, provides advice and approves business plans and long-term financial plans and short-term financial plans of the corporation. The Board of Commissioners provides advice and monitors the Board of Directors regarding implementation management. The Board of Directors and Board of Commissioners are involved in very important decisions for the corporation, regulated in the corporation's articles of association.	Setiap tahun, Dewan Komisaris secara rutin mengawasi dan mengevaluasi strategi korporasi yang ditetapkan, memastikan agar misi, visi, dan strategi yang dirancang oleh Direksi sejalan dengan tujuan jangka panjang Perusahaan. Dewan Komisaris juga memberikan masukan, saran, dan persetujuan terhadap rencana bisnis dan keuangan baik jangka panjang maupun jangka pendek. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Komisaris berkolaborasi dengan Direksi, melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan implementasi strategi yang efektif, serta memberikan pandangan dan saran melalui berbagai rapat dan bentuk komunikasi lainnya. Selain itu, Dewan Komisaris memastikan bahwa perusahaan mematuhi Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023, yang menggariskan kewajiban pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen. Every year, the Board of Commissioners monitors and evaluates the established corporate strategy, ensuring that the mission, vision and strategy designed by the Board of Directors are in line with the Company's long-term goals. The Board of Commissioners also provides input, directives and approval for long and short term business and financial plans. When carrying out its duties, the Board of Commissioners collaborates with the Board of Directors, carries out regular monitoring to ensure effective strategy implementation, and provides views and directives through meetings and other forms of communication. The Board of Commissioners also ensures that the Company complies with Minister of SOEs Regulation No. PER-2/MBU/03/2023, which outlines the obligation to supervise the implementation of management policies and strategies.	Telah diterapkan Already Applied
1.3.2	Jenis keputusan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris harus diungkapkan dalam laporan tahunan. The types of decisions that require approval from the Board of Commissioners must be disclosed in the annual report	Jenis keputusan Direksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris belum termuat dalam Laporan Tahunan 2024. The types of Board of Directors' decisions that require approval from the Board of Commissioners are not yet disclosed in the 2024 Annual Report.	Telah diterapkan Already Applied

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description	
		Terapkan Apply	Jelaskan Explain
1.3.3	Dengan memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan kepada, dan untuk diputuskan oleh, RUPS pengangkatan dan/atau pemberhentian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Dalam mengusulkan hal di atas, Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman, unsur nondiskriminatif dan memberikan kesempatan yang sama tanpa membedakan suku, agama, ras antar golongan dan gender. Dewan Komisaris memastikan proses pencalonan dan pemilihan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah formal dan transparan. By considering the recommendations of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of Commissioners proposes to, and is decided by, the GMS the appointment and/or dismissal of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. In proposing the matters above, the Board of Commissioners pays attention to diversity, non-discriminatory elements and provides equal opportunities without distinction between ethnicity, religion, race, class and gender. The Board of Commissioners ensures that the nomination and election process for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners is formal and transparent.	<i>Not Applicable (N/A)</i> Hal ini dikarenakan Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi sepenuhnya menjadi ranah Pemegang Saham/RUPS <i>Not Applicable (N/A)</i> This is because the appointment and dismissal of the Board of Directors is entirely within the purview of the Shareholders/GMS	-
1.3.4	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi nominasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi. Setiap tahun Dewan Komisaris meninjau pelaporan pelaksanaan rencana pengembangan dan suksesi yang disampaikan Direktur Utama. The Board of Commissioners or the Committee that carries out the nomination function prepares a succession policy in the nomination process for members of the Board of Directors. Every year the Board of Commissioners reviews reports on the implementation of development and succession plans submitted by the President Director.	Komite yang bertanggung jawab atas fungsi nominasi, termasuk Dewan Komisaris, telah menetapkan kebijakan suksesi untuk proses nominasi anggota Direksi. Kebijakan ini diatur dalam Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi, yang diresmikan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PPA No. 06/KEP.KOM/PPA/IV/2020 pada tanggal 20 April 2020. Setiap tahunnya, Dewan Komisaris juga melakukan peninjauan terhadap laporan terkait. The committee responsible for the nomination function, including the Board of Commissioners, has established a succession policy for the nomination process for members of the Board of Directors. This policy is regulated in the Nomination and Remuneration Committee Charter, which was formalized through PT PPA Board of Commissioners Decree No. 06/KEP.KOM/PPA/IV/2020 on April 20, 2020. Every year, the Board of Commissioners also reviews related reports.	Telah diterapkan Already Applied
1.3.5	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menjalankan fungsi remunerasi, besaran remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang selaras dengan pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan kepentingan jangka panjang korporasi dan pemegang saham; secara berkala mereview sistem remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. The Board of Commissioners proposes to the GMS, which may be preceded by a proposal from the Committee carrying out the remuneration function, the amount of remuneration for members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners that is in line with sustainable corporate development and the long-term interests of the corporation and shareholders; periodically review the remuneration system for the Board of Directors and Board of Commissioners.	Dewan Komisaris - Mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite yang menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: Struktur Remunerasi, Kebijakan atas Remunerasi dan Besaran Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; - Secara berkala, tinjauan atas sistem remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dilakukan. Proses ini diuraikan dalam Laporan Tahunan Tahun 2024, pada Bab Tata Kelola Perusahaan yang Baik, khususnya di sub-bab Nominasi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris. Board of Commissioners - Submitted to the GMS, which may be preceded by a proposal from the Committee that prepares and provides recommendations to the Board of Commissioners regarding: Remuneration Structure, on Remuneration Policy, and Amount of Remuneration for members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; - Periodically, a review of the remuneration system for the Board of Commissioners and Directors is carried out. This process is outlined in the 2024 Annual Report, in the Good Corporate Governance Chapter, in the Nomination and Remuneration for Directors and Commissioners sub-chapter.	Telah diterapkan Already Applied

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description	
		Terapkan Apply	Jelaskan Explain
1.3.6	Dewan Komisaris mengawasi efektivitas kebijakan governansi korporat dan implementasinya serta mengusulkan perubahan jika diperlukan. The Board of Commissioners monitors the effectiveness of corporate governance policies and their implementation and proposes changes if necessary.	Dewan Komisaris berperan dalam memastikan bahwa kebijakan tata kelola perusahaan berjalan efektif dan sesuai dengan tujuannya. Dewan Komisaris juga bertugas untuk mengusulkan perbaikan jika ditemukan ketidaksesuaian atau kebutuhan perubahan. Hal ini dibahas secara mendetail dalam Rapat Dewan Komisaris dan Direksi, serta melalui evaluasi rutin Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan tata kelola perusahaan di Perusahaan. The Board of Commissioners plays a role in ensuring that corporate governance policies are effective and in line with their objectives. The Board of Commissioners is also tasked with proposing improvements if there are discrepancies or changes are needed. These matters are discussed in detail at the Board of Commissioners and Board of Directors Meetings, as well as through the Board of Commissioners' routine evaluation of corporate governance implementation in the Company.	Telah diterapkan Already Applied
Rekomendasi 7 Recommendation 7			
1.3.7	Dewan Komisaris memantau dan mengarahkan agar korporasi menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang tepat dan efektif yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan strategi korporasi serta mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku dan standar yang berlaku. The Board of Commissioners monitors and directs the corporation to implement appropriate and effective risk management and internal control systems that are in line with corporate goals, objectives and strategies and comply with applicable laws and regulations, codes of conduct and standards.	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Perusahaan menjalankan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal yang sesuai dengan tujuan, sasaran, dan strategi Perusahaan. Hal ini dilakukan dengan memonitor dan memberikan arahan yang diperlukan agar Perusahaan mematuhi peraturan perundang-undangan, kode perilaku, dan standar yang berlaku. Direksi juga terus berupaya untuk meningkatkan tata kelola perusahaan dengan memperkuat pengendalian internal dan manajemen risiko secara berkala dan berkesinambungan, sesuai dengan prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG), sehingga dapat memastikan bahwa target perusahaan tercapai dengan efektif. The Board of Commissioners has ensured that the Company applies risk management and internal control systems that are in line with the Company's goals, objectives and strategies. This is achieved by monitoring and providing the necessary directives so that the Company complies with applicable laws and regulations, and the codes of conduct and standards. The Board of Directors also strives to improve corporate governance by periodically and continuously strengthening internal control and risk management, in accordance with the principles of Good Corporate Governance (GCG), so as to ensure that the Company's targets are effectively achieved.	Telah diterapkan Already Applied
Rekomendasi 8 Recommendation 8			
1.3.8	Dewan Komisaris mengawasi dan mengarahkan agar tercapai integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat, serta independensi fungsi audit internal dan eksternal. The Board of Commissioners supervises and directs the achievement of the integrity of the corporate accounting and financial reporting system, as well as the independence of the internal and external audit functions.	Dewan Komisaris telah mengimplementasikan kebijakan yang bertujuan untuk menegakkan integritas akuntansi dan sistem pelaporan keuangan korporat di perusahaan. Melalui pengawasan yang ketat dan arahan yang terukur, Dewan Komisaris memastikan bahwa proses akuntansi berjalan sesuai dengan standar tinggi, sehingga risiko atau penyimpangan informasi keuangan diminimalkan. Selain itu, upaya Dewan Komisaris juga difokuskan pada penegakan independensi fungsi audit internal dan eksternal, guna memastikan bahwa audit dilakukan secara objektif dan transparan, yang mendukung keberlanjutan Perusahaan dan memperkuat kepercayaan dari para pemangku kepentingan. The Board of Commissioners has instigated policies aimed at upholding the integrity of the accounting and corporate financial reporting systems in the Company. Through strict supervision and measurable directives, the Board of Commissioners ensures that the accounting process runs according to the highest standards, so that risks or deviations in financial information are minimized. The Board of Commissioners also focuses on upholding the independence of the internal and external audit function, to ensure that audits are carried out objectively and transparently, and support the Company's sustainability and strengthens the trust of stakeholders.	Telah diterapkan Already Applied

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description	
		Terapkan Apply	Jelaskan Explain
Rekomendasi 9,10,11 & 12 Recommendations 9,10,11 & 12			
1.3.9	Dewan Komisaris memantau, mereview dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Korporasi serta memastikan integritasnya, serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi. The Board of Commissioners monitors, reviews and approves the Corporation's annual reports and sustainability reports and ensures their integrity, as well as oversees the corporate disclosure and communication process.	Dewan Komisaris Perusahaan telah melaksanakan tugasnya dengan cermat dan bertanggung jawab pada tahun 2024 dengan memantau, mereview, dan menyetujui laporan tahunan dan laporan keberlanjutan Perusahaan. Dewan Komisaris memastikan integritas laporan tersebut serta mengawasi proses pengungkapan dan pengkomunikasian korporasi. Tindakan Dewan Komisaris menjadi lebih konkret dengan penandatanganan Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan 2024 dan Laporan Keberlanjutan 2024, menegaskan komitmen Dewan Komisaris terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pengawasan mereka terhadap Perusahaan. The Company's Board of Commissioners carried out its duties carefully and responsibly in 2024 by monitoring, reviewing and approving the Company's annual report and sustainability report. The Board of Commissioners ensures the integrity of the reports, and supervises the corporate disclosure and communication process. The Board of Commissioners' actions became more concrete with the signing of the Board of Commissioners' Responsibility for the 2024 Annual Report and 2024 Sustainability Report, confirming the Board of Commissioners' commitment to transparency and accountability in carrying out their supervisory duties in the Company.	Telah diterapkan Already Applied
1.3.10	Piagam Dewan Komisaris secara periodik ditinjau. The Board of Commissioners Charter is periodically reviewed.	Piagam Dewan Komisaris telah secara periodik ditinjau sebagaimana terakhir dimutakhirkan melalui Surat Keputusan Nomor: SK-89/PPA/1022; SK-06/KEP. KOM/PPA/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022. The Board of Commissioners Charter has been regularly reviewed, with the most recent update through Decree No. SK-89/PPA/1022; SK-06/KEP. KOM/PPA/X/2022 dated October 26, 2022.	Telah diterapkan Already Applied
1.3.11	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if they are involved in financial crimes and are proven to have made a mistake.	Dewan Komisaris memiliki kebijakan terkait pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan dan terbukti melakukan kesalahan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. SK-89/PPA/1022; SK-06/KEP. KOM/PPA/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022. The Board of Commissioners has a policy regarding the resignation of members of the Board of Commissioners if involved in financial crimes and proven to have committed mistakes. This charter was established through the Joint Decision of the Board of Commissioners and Board of Directors' Decree No. SK-89/PPA/1022; SK-06/KEP. KOM/PPA/X/2022 dated October 26, 2022.	Telah diterapkan Already Applied
1.3.12	Komisaris independen sangat diharapkan untuk dapat berkontribusi dalam diskusi yang jujur, objektif, aktif dan konstruktif pada rapat Dewan Komisaris. Independent commissioners are highly expected to be able to contribute to honest, objective, active and constructive discussions at Board of Commissioners meetings.	Hingga 31 Desember 2024, Pemegang Saham Perseroan belum melakukan pengangkatan Komisaris Independen. Until December 31, 2024, the Company's Shareholders has not yet appointed any Independent Commissioners.	Telah diterapkan Already Applied

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description	Terapkan Apply	Jelaskan Explain
Rekomendasi 13 Recommendation 13				
1.3.13	Komisaris Utama berperan sebagai koordinator Dewan Komisaris dan memastikan efektivitasnya. Komisaris Utama mendorong budaya keterbukaan dan dialog konstruktif yang memungkinkan berbagai pandangan diungkapkan, termasuk mengkoordinasi penetapan agenda rapat dewan yang tepat dan memastikan waktu yang cukup tersedia untuk mendiskusikan semua agenda. Selain itu, juga harus ada kesempatan bagi Dewan Komisaris untuk bertemu dengan jajaran Direksi dan manajemen senior. The President Commissioner acts as coordinator of the Board of Commissioners and ensures its effectiveness. The President Commissioner encourages a culture of openness and constructive dialogue that allows a variety of views to be expressed, including coordinating the setting of appropriate board meeting agendas and ensuring sufficient time is available to discuss all agenda items. Apart from that, there must also be an opportunity for the Board of Commissioners to meet with the Board of Directors and senior management.	Dewan Komisaris telah menerapkan langkah-langkah signifikan untuk meningkatkan efektivitas dan dinamika internal perusahaan. Komisaris Utama memainkan peran sentral sebagai koordinator Dewan Komisaris, memastikan bahwa setiap anggota memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka melalui budaya keterbukaan dan dialog konstruktif. Dalam menjalankan tugasnya, Komisaris Utama dengan cermat mengatur penetapan agenda rapat dewan, memastikan bahwa setiap topik mendapat perhatian yang cukup dan waktu yang memadai untuk didiskusikan. Dewan Komisaris juga mengatur pertemuan rutin dengan jajaran Direksi dan manajemen senior, menciptakan forum yang ideal untuk berbagi informasi strategis dan operasional, yang pada akhirnya mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik dan terkoordinasi. The Board of Commissioners has taken significant steps to improve the Company's effectiveness and internal dynamics. The President Commissioner plays a central role as coordinator of the Board of Commissioners, ensuring that through a culture of openness and constructive dialogue each member has the opportunity to express their views. When carrying out their duties, the President Commissioner carefully organizes the agenda for board meetings, ensuring that all topics receive sufficient attention and sufficient time for discussion. The Board of Commissioners also organizes regular meetings with the Board of Directors and senior management, creating an ideal forum for sharing strategic and operational information, which ultimately drives better and more coordinated decision making.	Telah diterapkan Already Applied	
1.4 Pembentukan Komite Committee Formation				
Rekomendasi 1 Recommendation 1				
1.4.1	Korporasi memiliki komite-komite di bawah Dewan Komisaris sekurang-kurangnya terdiri dari: Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Komite Pemantau Manajemen Risiko. The Corporation has committees under the Board of Commissioners consisting of at least: Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Risk Management Monitoring Committee.	Perusahaan telah memiliki Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan GCG, serta Komite Nominasi dan Remunerasi melalui keputusan sebagai berikut: 1. SK Pembentukan Komite Audit PPA No. 03/KEP.KOM/PPA/VII/2021 2. SK Pembentukan Komite Pemantau Risiko dan GCG PPA No. 10/KEP.KOM/PPA/XI/2022 3. SK Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi PPA No. 11/KEP.KOM/PPA/XI/2022 The Company has established an Audit Committee, Risk and GCG Monitoring Committee, as well as a Nomination and Remuneration Committee through the following decrees: 1. Decree concerning the Establishment of the PPA Audit Committee No. 03/KEP.KOM/PPA/VII/2021 2. Decree concerning the Establishment of the PPA Risk Monitoring and GCG Committee No. 10/KEP.KOM/PPA/XI/2022 3. Decree concerning the Establishment of the PPA Nomination and Remuneration Committee No. 11/KEP.KOM/PPA/XI/2022	Telah diterapkan Already Applied	

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description	Terapkan Apply	Jelaskan Explain
Rekomendasi 2 Recommendation 2				
1.4.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Komite Audit seluruhnya independen dan komite lain yang dibentuk Dewan Komisaris adalah mayoritas dari pihak independen, serta semua anggota komite memiliki kompetensi, berkomitmen, serta memiliki wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen. The Board of Commissioners ensures that all members of the Audit Committee are independent and that the majority of other committees formed by the Board of Commissioners are independent, and that all committee members are competent, committed and have sufficient authority to carry out their roles effectively and independently.	Dewan Komisaris Perusahaan telah menerapkan kebijakan yang memastikan bahwa anggota Komite Audit sepenuhnya independen dan memiliki kompetensi, komitmen dan wewenang yang memadai untuk menjalankan perannya secara efektif dan independen sebagaimana diatur dalam: 1. Peraturan Dewan Komisaris Nomor : PER-01/KOM/PPA/III/2022 tanggal 1 Maret 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Komisaris Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset Nomor : PER-03/KOM/PPA/XI/2014 tentang Piagam (Charter) Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dan GCG Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset. 2. Pernyataan Independensi anggota Komite Audit dalam Laporan Tahunan 2024 halaman 287-288. The Company's Board of Commissioners has instigated a policy to ensures that members of the Audit Committee are fully independent and have sufficient competence, commitment and authority to carry out their roles effectively and independently as regulated in: 1. Board of Commissioners Regulation No. PER-01/KOM/PPA/III/2022 dated March 1, 2022 concerning Amendment to the PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Board of Commissioners Regulation No. PER-03/KOM/PPA/XI/2014 concerning the PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) Audit Committee and Risk Monitoring and GCG Committee Charter. 2. Statement of Independence by the Audit Committee members in the 2024 Annual Report page 287-288.	Telah diterapkan Already Applied	
Rekomendasi 3 Recommendation 3				
1.4.3	Untuk memastikan pemantauan atas pelaksanaan tugas Komite Audit berjalan objektif dan independen, Komisaris Utama tidak boleh menjadi ketua Komite Audit, kecuali dalam keadaan luarbiasa yang harus dijelaskan dalam laporan tahunan. To ensure that monitoring of the implementation of the Audit Committee's duties is objective and independent, the President Commissioner may not be chairman of the Audit Committee, except in extraordinary circumstances which must be explained in the annual report.	Agar pelaksanaan tugas Komite Audit dapat diawasi dengan objektif dan independen, aturan menyatakan bahwa Komisaris Utama tidak boleh menjabat sebagai ketua Komite Audit. Pengecualian terhadap aturan ini hanya berlaku dalam keadaan luar biasa, yang harus dijelaskan secara rinci dalam laporan tahunan. Hal ini termuat dalam Laporan Tahunan PPA pada halaman 286 pada bagian Komposisi Komite Audit yang memaparkan bahwa Ketua Komite Audit dijabat oleh anggota Dewan Komisaris. So that the implementation of the Audit Committee's duties can be supervised objectively and independently, the regulations state that the President Commissioner may not serve as chair of the Audit Committee. Exceptions to this rule only apply in exceptional circumstances, which must be described in detail in the annual report. This can be found in the PPA Annual Report on page 286 in the Audit Committee Composition section that explains that the Audit Committee Chair is held by a member of the Board of Commissioners.	Telah diterapkan Already Applied	
1.5 Penilaian Kinerja - Dewan Komisaris dan Anggotanya Performance Assessment - Board of Commissioners and Members				
Rekomendasi 1 Recommendation 1				
1.5.1	Dewan Komisaris melakukan evaluasi formal tahunan secara objektif untuk menentukan efektivitas Dewan, komitenya, dan setiap individu komisaris. Board of Commissioners conduct annual formal evaluations objectively to determine effectiveness The Board, its committees, and each individual commissioner.	Dewan Komisaris menilai bahwa Komite di bawah Dewan Komisaris telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan cukup efektif. Dewan Komisaris menerima laporan berkala dan efektivitas setiap rapat berjalan dengan baik dan telah menghasilkan sejumlah masukan penting bagi Dewan Komisaris untuk mengambil keputusan terkait permasalahan penting dalam Perseroan. The Board of Commissioners considers that the Committee under the Board of Commissioners has carried out its duties and responsibilities properly and quite effectively. The Board of Commissioners receives periodic reports and the effectiveness of each meeting runs well and has produced a number of important inputs for the Board of Commissioners to make decisions regarding important issues in the Company.	Telah diterapkan Already Applied	

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description	Jelaskan Explain
1.6 Benturan Kepentingan Conflict of Interest			
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
1.6.1	Anggota Direksi yang mempunyai rangkap jabatan di luar korporasi, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Seorang Komisaris memberi tahu Dewan Komisaris dan ketua komite yang menjalankan fungsi nominasi, sebelum menerima penunjukan baru sebagai direktur atau komisaris dari korporasi terbuka, jabatan direktur lainnya atau posisi lain dengan komitmen waktu yang signifikan. Members of the Board of Directors who hold concurrent positions outside the corporation must obtain approval from the Board of Commissioners. A Commissioner notifies the Board of Commissioners and the chair of the committee performing the nominating function, before accepting a new appointment as director or commissioner of a publicly traded corporation, other directorship or other position with a significant time commitment.	Direksi telah memiliki ketentuan mengenai Rangkap Jabatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. SK-89/PPA/1022; SK-06/KEP. KOM/PPA/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022. The Board of Directors has provisions regarding Concurrent Positions as stipulated in the Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors No. SK-89/PPA/1022; SK-06/KEP. KOM/PPA/X/2022 dated October 26, 2022.	Telah diterapkan Already Applied
Rekomendasi 2 Recommendation 2			
1.6.2	Dewan Komisaris memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi dan penyalahgunaan dalam transaksi pihak berelasi. Komisaris yang memiliki benturan kepentingan tidak turut serta dalam pemantauan dan pengambilan keputusan atas potensi benturan kepentingan yang melibatkan Komisaris atau afiliasi Komisaris yang bersangkutan. The Board of Commissioners monitors and managing potential conflicts of interest of management, members of the Board of Directors, Board of Commissioners and shareholders, including misuse of corporate assets and misuse in related party transactions. Commissioners who have a conflict of interest do not participate in monitoring and making decisions regarding potential conflicts of interest involving the Commissioner or affiliates of the Commissioner concerned.	Dewan Komisaris di Perusahaan telah dengan tegas menerapkan langkah-langkah untuk memantau dan mengelola potensi benturan kepentingan yang melibatkan manajemen, anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang saham, termasuk penyalahgunaan aset korporasi serta penyalahgunaan dalam transaksi dengan pihak berelasi sebagaimana diatur dalam: 1. Board Manual Bab Dewan Komisaris sub G. Etika Jabatan Dewan Komisaris poin 2. Etika Berkaitan dengan Benturan Kepentingan halaman 46; 2. Board Manual Bab Direksi sub L. Benturan Kepentingan halaman 37. The Company's Board of Commissioners has strictly implemented steps to monitor and manage potential conflicts of interest involving management, members of the Board of Directors, Board of Commissioners and shareholders, including misuse of corporate assets and misuse in transactions with related parties, which are regulated in: 1. Board of Commissioners Board Manual sub Chapter G. Ethics of the Office of the Board of Commissioners point 2. Ethics Relating to Conflicts of Interest page 46; 2. Board of Directors Board Manual sub Chapter L. Conflicts of Interest page 37.	Telah diterapkan Already Applied
1.7 Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Increasing the Competency of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners			
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
1.7.1	Dewan Komisaris memastikan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik dan operasi korporasi, peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan serta kewajiban lain yang berlaku. Direksi melalui sekretaris korporasi mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui dan menyegarkan keterampilan dan pengetahuan mereka yang diperlukan untuk menjalankan peran mereka di Dewan. The Board of Commissioners ensures that members of the Board of Directors and Board of Commissioners understand their roles and responsibilities, corporate characteristics and operations, relevant laws and regulations and standards as well as other applicable obligations. The Board of Directors through the corporate secretary supports all members of the Board of Directors and Board of Commissioners in updating and refreshing their skills and knowledge necessary to carry out their roles on the Board.	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris memahami sepenuhnya peran dan tanggung jawab mereka, karakteristik serta operasi korporasi, serta peraturan perundang-undangan dan standar yang relevan, termasuk kewajiban lain yang berlaku. Untuk mendukung ini, Direksi melalui sekretaris korporasi secara proaktif mendukung semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris dalam memperbarui serta memperbaharui keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Inisiatif ini menjamin bahwa setiap anggota tetap kompeten dan siap menghadapi tantangan serta dinamika yang terus berkembang dalam perusahaan, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan pengelolaan yang lebih efektif. The Board of Commissioners has ensured that each member of the Board of Directors and Board of Commissioners fully understands their roles and responsibilities, the characteristics and operations of the Company, as well as relevant laws and regulations and standards, including other applicable obligations. To support this, the Board of Directors through the corporate secretary proactively supports all members of the Board of Directors and Board of Commissioners in updating and renewing the necessary skills and knowledge. This initiative ensures that each member remains competent and ready to face the challenges and dynamics that continue to develop within the Company, thereby enabling better decision making and more effective management.	Telah diterapkan Already Applied

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description	
		Terapkan Apply	Jelaskan Explain
2	Komposisi dan Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Composition and Remuneration of the Board of Directors and Board of Commissioners		
2.1	Komposisi Direksi Composition of the Board of Directors		
Rekomendasi 1 & 2 Recommendations 1 & 2			
2.1.1	Dalam menentukan kandidat calon direktur, Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi tidak hanya mengandalkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, manajemen atau pemegang saham mayoritas. Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. In determining prospective director candidates, the Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee does not only rely on recommendations from the Board of Commissioners, management or majority shareholders. The Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee can use independent sources to determine candidates who meet the requirements.	<i>Not Applicable (N/A)</i> Hal ini dikarenakan Dewan Komisaris di Perusahaan tidak memiliki kewenangan untuk menentukan kandidat calon Direktur. Kewenangan untuk menentukan kandidat calon Direktur berada pada Induk Perusahaan yaitu PT Danareksa (Persero). <i>Not Applicable (N/A)</i> This is because the Company's Board of Commissioners does not have the authority to determine prospective Director candidates. The authority to determine prospective Director candidates rests with the Parent Company, namely PT Danareksa (Persero).	-
2.1.2	Dewan Komisaris memastikan bahwa kriteria dalam menyeleksi anggota Direksi mencakup paling tidak pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Direksi serta memperhatikan terpenuhinya keberagaman Direksi. The Board of Commissioners ensures that the criteria for selecting members of the Board of Directors include at least the knowledge, abilities and skills required to appropriately fulfill the role of the Board of Directors and pay attention to the fulfillment of the diversity of the Board of Directors.	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa proses seleksi anggota Direksi di Perusahaan dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria yang mencakup pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk menjalankan peran Direksi secara efektif. Selain itu, Dewan Komisaris juga memperhatikan terpenuhinya keberagaman dalam susunan Direksi. Ketentuan ini telah diresmikan melalui Surat Keputusan Nomor: SK-89/PPA/1022 dan SK-06/KEP.KOM/PPA/X/2022 tertanggal 26 Oktober 2022. The Board of Commissioners has ensured that the Company's Board of Directors members selection process is carried out by considering criteria including the knowledge, abilities and expertise required to carry out the role of a Directors effectively. The Board of Commissioners also pays attention to diversity in the Board of Directors' composition. This provision was formalized through Decree No. SK-89/PPA/1022 and SK-06/KEP.KOM/PPA/X/2022 dated October 26, 2022.	Telah diterapkan Already Applied
2.1.3	Kebijakan korporasi tentang keberagaman pada, Direksi dan Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan. Corporate policies regarding diversity among the Board of Directors and Board of Commissioners are disclosed in the Annual Report.	Kebijakan perusahaan mengenai keberagaman dalam Direksi dan Dewan Komisaris telah dijalankan oleh Dewan Komisaris dan diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perusahaan pada Bab Tata Kelola Perusahaan dalam pembahasan Kebijakan Keberagaman Dewan Komisaris dan Direksi halaman 269-271. The Company's policy concerning diversity in the Board of Directors and Board of Commissioners has been approved by the Board of Commissioners and is disclosed in the Company's Annual Report in the Corporate Governance Chapter in the Board of Commissioners and Board of Directors Diversity Policy discussion on page 269-271.	Telah diterapkan Already Applied
Rekomendasi 4 Recommendation 4			
2.1.4.	Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan dan prosedur untuk seleksi dan nominasi Komisaris adalah jelas dan transparan sehingga dapat menghasilkan komposisi Dewan yang diinginkan. Dewan Komisaris menggunakan sumber independen untuk menentukan kandidat yang memenuhi syarat. The Board of Commissioners ensures that the policies and procedures for the selection and nomination of Commissioners are clear and transparent so as to produce the desired Board composition. The Board of Commissioners uses independent sources to determine qualified candidates.	<i>Not Applicable (N/A)</i> Hal ini dikarenakan kewenangan penuh terkait kebijakan dan prosedur untuk seleksi Dewan Komisaris sepenuhnya berada pada Induk Perusahaan yaitu PT Danareksa (Persero). <i>Not Applicable (N/A)</i> This is because full authority concerning policies and procedures for selecting the Board of Commissioners rests entirely with the Parent Company, PT Danareksa (Persero).	-

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description		Terapkan Apply	Jelaskan Explain
Rekomendasi 5 & 6 Recommendation 5 & 6					
2.1.5.	Dewan Komisaris/Komite yang menjalankan fungsi nominasi menetapkan prosedur dan kriteria nominasi yang konsisten dengan matriks keahlian Dewan Komisaris yang telah disetujui Dewan Komisaris dan memastikan bahwa profil kandidat memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam matriks keahlian dan kriteria nominasi. The Board of Commissioners/Committee which carries out the nomination function determines nomination procedures and criteria that are consistent with the Board of Commissioners' skills matrix which has been approved by the Board of Commissioners and ensures that the candidate profile meets the requirements set out in the skills matrix and nomination criteria.	Not Applicable (N/A) Hal ini dikarenakan kewenangan terkait prosedur dan kriteria nominasi sepenuhnya berada pada Induk Perusahaan yaitu PT Danareksa (Persero). Not Applicable (N/A) This is because the authority regarding nomination procedures and criteria lies entirely with the Parent Company, namely PT Danareksa (Persero).	-		
2.1.6.	Komposisi Dewan Komisaris harus dibentuk sedemikian rupa sehingga anggota-anggotanya secara kelompok mencerminkan keberagaman dalam hal kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, latar belakang budaya, dan gender yang dibutuhkan untuk memenuhi secara tepat peran Dewan Komisaris. The composition of the Board of Commissioners must be formed in such a way that its members as a group reflect the diversity in terms of abilities, skills, knowledge, experience, age, cultural background and gender required to appropriately fulfill the role of the Board of Commissioners.	Komposisi Dewan Komisaris disusun dengan memperhatikan keberagaman dalam berbagai aspek seperti kemampuan, keahlian, pengetahuan, pengalaman, usia, dan latar belakang budaya yang termuat dalam Bab Profil Perusahaan pada pembahasan Profil Dewan Komisaris halaman 89. The Board of Commissioners' composition is prepared based on diversity in various aspects such as ability, expertise, knowledge, experience, age and cultural background, which are contained in the Company Profile Chapter in the discussion on the Board of Commissioners Profile on page 89.		Telah diterapkan Already Applied	
Rekomendasi 7 Recommendation 7					
2.1.7.	Untuk memampukan Dewan Komisaris dalam memberikan advis dan supervisi secara independen kepada Direksi dan untuk peran- peran yang terdapat potensi benturan kepentingan, Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris Independen yang cukup jumlahnya, dengan masa jabatan yang dibatasi dan terdapat pengungkapan Jangka waktu keanggotaan Dewan Komisaris serta independensi mereka dari sudut pandang korporasi. To enable the Board of Commissioners to provide independent advice and supervision to the Board of Directors and for roles where there is a potential conflict of interest, the Board of Commissioners consists of a sufficient number of Independent Commissioners, with limited terms of office and disclosure of the term of membership of the Board of Commissioners and their independence from a corporate perspective.	Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau dengan perusahaan yang mungkin menghalangi atau menghambat posisinya untuk bertindak independen sesuai dengan prinsip-prinsip GCG. Keberadaan Komisaris Independen bertujuan menciptakan iklim kerja yang lebih objektif dan independen, serta mampu menjaga prinsip "fairness." Hal ini bermakna memberikan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham minoritas, termasuk pemegang saham publik dan pemangku kepentingan lainnya. Per tanggal 24 November 2022 Pemegang Saham Perusahaan telah memberhentikan dengan hormat Krisna Wijaya sebagai Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen. Hingga akhir tahun 2024 belum terdapat pengangkatan Komisaris Independen yang baru. Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who does not have financial, management, share ownership, and/or family relationships with members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and/or controlling shareholders or with companies that may obstruct or impede their position to act independently in accordance with GCG principles. The existence of an Independent Commissioner is intended to create a more objective and independent climate as well as to maintain fairness. Independent Commissioner is expected to be able to balance the interests of majority shareholders and protect the interests of minority shareholders, including public shareholders and other stakeholders. As of November 24, 2022, the Company's Shareholders has honorably dismissed Krisna Wijaya as the President Commissioner and Independent Commissioner. As end of 2024, new Independent Commissioner has not been appointed yet.		Telah diterapkan Already Applied	

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description Terapkan Apply	Jelaskan Explain
Rekomendasi 8 Recommendation 8			
2.1.8.	Untuk memfasilitasi fungsi Direksi dan Dewan Komisaris yang efektif dan guna meningkatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat proses yang formal, ketat dan transparan untuk penunjukan dan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To facilitate the effective functioning of the Board of Directors and Board of Commissioners and to increase investor and stakeholder confidence, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there is a formal, strict and transparent process for the appointment and appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	Penunjukan dan Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sepenuhnya menjadi kewenangan Pemegang Saham. The appointment and designation of members of the Board of Directors and Board of Commissioners is entirely under the authority of the Shareholders.	Telah diterapkan Already Applied
2.2 Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris Remuneration of Board of Directors and Board of Commissioners			
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
2.2.1.	Kebijakan remunerasi anggota Direksi terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi harus diusulkan, dapat dengan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, oleh Dewan Komisaris untuk diputuskan oleh RUPS. Jumlah remunerasi yang diusulkan kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Direksi dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. The remuneration policy for members of the Board of Directors consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. Board of Directors' remuneration must be proposed, possibly through the Nomination and Remuneration Committee, by the Board of Commissioners to be decided by the GMS. The amount of remuneration proposed to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Directors and the economic situation and corporate performance.	Perusahaan telah menerapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi yang berfokus pada pengembangan korporasi berkelanjutan dan pencapaian tujuan jangka panjang. Remunerasi Direksi diusulkan oleh Dewan Komisaris melalui Komite Nominasi dan Remunerasi, lalu diputuskan oleh RUPS dengan mempertimbangkan peran Direksi, situasi ekonomi, dan kinerja korporasi. Struktur remunerasi ini didasarkan pada kebijakan, skema, dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Perusahaan, dengan besaran yang ditentukan berdasarkan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. The Company has instigated a remuneration policy for members of the Board of Directors that focuses on sustainable corporate development and achieving long-term goals. The Directors' remuneration is proposed by the Board of Commissioners through the Nomination and Remuneration Committee, and then approved by the GMS after considering the role of the Board of Directors, economic situation and corporate performance. The remuneration structure is based on policies, schemes and procedures established by the Company, with amounts determined based on the prudential principle and in accordance with applicable regulations.	Telah diterapkan Already Applied
Rekomendasi 2 Recommendation 2			
2.2.2.	Kebijakan remunerasi anggota Dewan Komisaris terdiri atas struktur remunerasi yang berorientasi pada pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan mendorong pencapaian tujuan jangka panjang. Jumlah remunerasi yang diusulkan Dewan Komisaris kepada RUPS tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan peran setiap anggota Dewan Komisaris dan situasi ekonomi serta kinerja korporasi. Di samping itu juga harus dipertimbangkan posisinya sebagai Komisaris Utama dan ketua serta keanggotaannya dalam komite-komite. The remuneration policy for members of the Board of Commissioners consists of a remuneration structure that is oriented towards sustainable corporate development and encourages the achievement of long-term goals. The amount of remuneration proposed by the Board of Commissioners to the GMS is determined by considering the role of each member of the Board of Commissioners and the economic situation and corporate performance. Apart from that, consideration must also be given to his position as President Commissioner and chairman as well as his membership in committees.	Perusahaan telah mengimplementasikan kebijakan remunerasi yang bertumpu pada aspek pengembangan korporasi yang berkelanjutan dan dorongan terhadap pencapaian tujuan jangka panjang. Penetapan jumlah remunerasi yang diajukan oleh Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan mempertimbangkan peran masing-masing anggota Dewan Komisaris, kondisi ekonomi, serta kinerja perusahaan. Selain itu, aspek-aspek seperti peran sebagai Komisaris Utama, posisi sebagai ketua, dan partisipasi dalam berbagai komite juga diperhitungkan. Hal ini termuat dalam Surat PT Danareksa (Persero) No. S-16/DR/DIR/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 Hal: Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Perusahaan Pengelola Aset yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan 2024 halaman 274. The Company has instigated a remuneration policy that concentrates on the aspects of sustainable corporate development and encouragement of achieving long-term goals. Determination of the remuneration proposed by the Board of Commissioners to the General Meeting of Shareholders is carried out by considering the role of each member of the Board of Commissioners, the economic conditions and the Company's performance. In addition, aspects such as the role of President Commissioner, position as chair, and participation in committees are also taken into account. This is contained in PT Danareksa (Persero) Letter S-16/DR/DIR/10/2024 dated October 21, 2024 Subject: Determination the remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Perusahaan Pengelola Aset as disclosed in the 2024 Annual Report page 274.	Telah diterapkan Already Applied

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description	Terapkan Apply	Jelaskan Explain
Rekomendasi 3 Recommendation 3				
2.2.3.	Untuk memastikan bahwa paket remunerasi ditentukan berdasarkan prestasi, kualifikasi dan kompetensi direktur dan komisaris dengan memperhatikan kinerja operasi korporasi, kinerja individu dan kondisi pasar, Komite Nominasi dan Remunerasi memastikan bahwa terdapat prosedur yang adil dan transparan untuk menetapkan kebijakan remunerasi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. To ensure that remuneration packages are determined based on the achievements, qualifications and competencies of directors and commissioners by taking into account corporate operational performance, individual performance and market conditions, the Nomination and Remuneration Committee ensures that there are fair and transparent procedures for determining remuneration policies for members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	Perusahaan memastikan remunerasi didasarkan pada prestasi, kualifikasi, dan kompetensi para direktur dan komisaris dengan mempertimbangkan skala usaha, tingkat kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perusahaan, pertumbuhan dan pencapaian kinerja Perseroan, besarnya target yang ditetapkan serta tingkat penghasilan yang berlaku umum dalam industri sejenis. Hal ini termuat dalam Surat PT Danareksa (Persero) No. S-16/DR/DIR/10/2024 tanggal 21 Oktober 2024 Hal: Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Perusahaan Pengelola Aset, serta telah disampaikan dalam Laporan Tahunan Perusahaan halaman 274. The Company ensures that remuneration is based on the achievements, qualifications and competencies of Directors and Commissioners after taking into account the business scale, level of business complexity, rate of inflation, financial condition and capabilities of the Company, growth and achievement of the Company's performance, the size of the targets set and the generally accepted remuneration in similar industry. This is stated in the PT Danareksa (Persero) Letter No. S-16/DR/DIR/10/2024 dated October 21, 2024 Subject: Determination of Remuneration for the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Perusahaan Pengelola Aset, as disclosed in the Annual Report page 274.	Telah diterapkan Already Applied	
3.	Hubungan Kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris Working Relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners			
3.1	Sifat Hubungan Kerja Nature of Employment Relationships			
Rekomendasi 1, 2 & 3 Recommendations 1, 2 & 3				
3.1.1	Terdapat diskusi yang terbuka antara Direksi dengan Dewan Komisaris serta di antara para anggota Direksi dan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris. Namun, tetap penting menjaga kerahasiaan informasi agar tidak terjadi kebocoran informasi rahasia. There are open discussions between the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as between members of the Board of Directors and members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners. However, it is still important to maintain the confidentiality of information to prevent leaks of confidential information.	Perusahaan telah menerapkan diskusi terbuka antara Direksi dan Dewan Komisaris untuk mendorong transparansi dan kolaborasi dengan menjaga kerahasiaan untuk mencegah kebocoran yang merugikan. The Company allows open discussions between the Board of Directors and the Board of Commissioners to encourage transparency and collaboration by maintaining confidentiality to prevent detrimental leaks.	Telah diterapkan Already Applied	
3.1.2	Sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing, Direksi bekerja sama dengan Dewan Komisaris dalam merumuskan misi, visi dan strategi korporasi dan secara reguler membahas pengimplementasiannya. In accordance with their respective duties and roles, the Board of Directors collaborates with the Board of Commissioners in formulating the corporate mission, vision and strategy and regularly discusses their implementation.	Perusahaan telah menerapkan kolaborasi strategis antara Direksi dan Dewan Komisaris, di mana keduanya bekerja sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Dalam upaya ini, Direksi secara aktif berkoordinasi dengan Dewan Komisaris untuk merumuskan misi, visi, dan strategi korporasi yang efektif yang termuat dalam RKAP dan RJPP Perusahaan. Kolaborasi ini juga mencakup diskusi reguler mengenai implementasi strategi yang telah disepakati, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan tujuan jangka panjang perusahaan dan mendukung pertumbuhan serta keberlanjutan operasional. The Company applies strategic collaboration between the Board of Directors and the Board of Commissioners, where both work according to their respective duties and roles. To do so, the Board of Directors actively coordinates with the Board of Commissioners to formulate an effective corporate mission, vision and strategy that are contained in the Company's RKAP and RJPP. This collaboration also includes regular discussions on the application of agreed strategies, to ensure each step taken is aligned with the Company's long-term goals, and to supports operational growth and sustainability.	Telah diterapkan Already Applied	

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description	
		Terapkan Apply	Jelaskan Explain
3.1.3	<i>Corporate Secretary</i> memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas hubungan kerja antara Direksi dengan Dewan Komisaris, mendorong implementasi praktik governansi korporat yang baik, termasuk komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. The <i>Corporate Secretary</i> has an important role in supporting the effectiveness of the working relationship between the Board of Directors and the Board of Commissioners, encouraging the implementation of good corporate governance practices, including effective communication with shareholders and other stakeholders.	Perusahaan telah mengimplementasikan peran yang signifikan bagi Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan tidak hanya menjadi penghubung antara kedua entitas tersebut, tetapi juga menjadi motor penggerak untuk menerapkan praktik governansi korporat yang baik. Melalui komunikasi yang efektif dengan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, <i>Corporate Secretary</i> memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa kepentingan semua pihak terwakili dengan baik dan transparan dalam pengambilan keputusan perusahaan. The Company's <i>Corporate Secretary</i> plays a significant role not only as a liaison between the two entities, but also as a driving force for applying good corporate governance practices. Through effective communication with shareholders and other stakeholders, the <i>Corporate Secretary</i> plays a key role in ensuring that the interests of all parties are well represented and are transparent in the Company's decision making.	Telah diterapkan Already Applied
3.2 Akses informasi Dewan Komisaris Access information on the Board of Commissioners			
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
3.2.1	Direksi bertanggung jawab untuk memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu. Dewan Komisaris sendiri memastikan bahwa ia memperoleh informasi yang memadai. Direksi menyediakan informasi kepada Dewan Komisaris secara teratur, tanpa penundaan dan secara komprehensif tentang semua masalah yang relevan dengan korporasi. Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat meminta Direksi untuk memberikan informasi tambahan. The Board of Directors is responsible for ensuring that the Board of Commissioners has access to accurate, relevant and timely information. The Board of Commissioners itself ensures that it obtains adequate information. The Board of Directors provides information to the Board of Commissioners regularly, without delay and comprehensively on all issues relevant to the corporation. The Board of Commissioners may at any time ask the Board of Directors to provide additional information.	Direksi Perusahaan telah menerapkan praktik yang memastikan Dewan Komisaris mendapatkan akses yang tepat waktu dan akurat terhadap informasi yang relevan. Dalam hal ini, Direksi secara rutin mengadakan pertemuan bulanan di mana Direksi menyampaikan laporan komprehensif tentang kinerja Perusahaan, termasuk analisis keuangan, perkembangan proyek strategis, dan isu-isu penting lainnya. The Company's Board of Directors has implemented practices that ensure the Board of Commissioners has timely and accurate access to relevant information. In this regard, the Board of Directors regularly holds monthly meetings where the Board of Directors submits comprehensive reports on the Company's performance, including financial analysis, strategic project developments, and other important issues.	Telah diterapkan Already Applied
3.3 Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Dampak Struktur Kepemilikan terhadap Korporasi Responsibility of the Board of Directors and Board of Commissioners for the Impact of Ownership Structure on the Corporation			
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
3.3.1	Dampak struktur kepemilikan terhadap korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris mempertimbangkan tanggung jawabnya dalam konteks struktur kepemilikan saham dan hubungan antar-pemegang saham korporasi yang mungkin berdampak terhadap pengelolaan dan operasi korporasi. The impact of ownership structure on corporations. The Board of Directors and Board of Commissioners consider their responsibilities in the context of the share ownership structure and relationships between corporate shareholders that may have an impact on the management and operations of the corporation.	<i>Not Applicable</i> (N/A) Hal ini dikarenakan tidak terdapat kepemilikan saham oleh Dewan Komisaris maupun Direksi. <i>Not Applicable</i> (N/A) This is because there is no share ownership by the Board of Commissioners or Board of Directors.	-

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description	
		Terapkan Apply	Jelaskan Explain
4.	Perilaku Etis dan Bertanggung Jawab Ethical and Responsible Behavior		
Rekomendasi 1 & 2 Recommendations 1 & 2			
4.1.1	Pernyataan ini dituangkan dalam Pedoman Perilaku dan Etika Usaha yang harus secara jelas mengungkapkan harapan korporasi bahwa setiap anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta karyawan akan: - Bertindak untuk kepentingan terbaik korporasi; - Bertindak dengan jujur dan dengan integritas berstandar tinggi; - Bersikap independen dan bertindak berdasarkan informasi yang lengkap, dengan itikad baik, dengan uji tuntas dan kehati-hatian. Mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi korporasi dan operasinya; - Menghindari tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan atau tindakan yang tidak etis berdasarkan pedoman etika korporasi; - Tidak terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan apapun yang akan menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan terbaik korporasi atau yang akan berdampak negatif terhadap reputasi korporasi; - Tidak mengambil manfaat atas properti atau informasi yang dimiliki korporasi, kepemilikan aset lainnya atau pelanggannya untuk kepentingan pribadi atau yang menyebabkan kerugian bagi korporasi dan pelanggannya. - Tidak memanfaatkan jabatannya atau peluang yang dihasilkan oleh jabatannya untuk kepentingan pribadi. - Menghindari perbuatan meminta atau menerima dari pihak ketiga pembayaran, gratifikasi atau keuntungan lain untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang menimbulkan benturan kepentingan/memberikan keuntungan kepada pihak ketiga secara melanggar peraturan perundang-undangan. - Menghormati perbedaan pendapat dan hak-hak setiap anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan. - Memastikan pengungkapan yang lengkap, adil, akurat, tepat waktu, dan dapat dipahami dalam laporan dan dokumen yang disampaikan korporasi kepada regulator dan dalam komunikasi publik lainnya.	Perusahaan telah menegaskan komitmennya terhadap integritas dan kepatuhan melalui penerapan Pedoman Etika dan Perilaku yang komprehensif. Dalam pedoman tersebut, terdapat pernyataan tentang komitmen Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Karyawan untuk mematuhi nilai-nilai etika yang ditetapkan. Sebagai bagian dari proses ini, setiap tahunnya, anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan semua Karyawan Perusahaan dengan sungguh-sungguh menandatangani pernyataan komitmen tersebut, memastikan bahwa prinsip-prinsip etika dan kepatuhan menjadi landasan yang kokoh bagi seluruh operasi dan interaksi bisnis Perusahaan. The Company has confirmed its commitment to integrity and compliance through the application of a comprehensive Code of Ethics and Conduct. In the guidelines, there is a statement concerning the commitment of the Board of Commissioners, Board of Directors and all employees to comply with the established ethical values. As part of this process, every year, members of the Board of Commissioners, Board of Directors and all Employees solemnly sign a statement of commitment, ensuring that ethical and compliance principles become a solid foundation for all of the Company's business operations and interactions.	Telah diterapkan Already Applied
This statement is outlined in the Code of Business Conduct and Ethics which must clearly express the corporation's expectations that each member of the Board of Directors and Board of Commissioners as well as employees will: - Act in the best interests of the corporation; - Act honestly and with a high standard of integrity; - Be independent and act on complete information, in good faith, with due diligence and care. Comply with the laws and regulations that apply to the corporation and its operations; - Avoid actions that violate laws and regulations or unethical actions based on corporate ethical guidelines; - Not be involved or participate in any activities that will create a conflict of interest with the best interests of the corporation or that will have a negative impact on the corporation's reputation; - Do not take advantage of property or information owned by the corporation, ownership of other assets or its customers for personal gain or which causes losses to the corporation and its customers. - Not taking advantage of his position or the opportunities resulting from his position for personal gain. - Avoid acts of requesting or receiving from third parties payments, gratuities or other benefits for themselves or for other people which creates a conflict of interest/providing benefits to third parties in violation of statutory regulations. - Respect differences of opinion and the rights of every member of the Board of Directors, Board of Commissioners and employees. - Ensure complete, fair, accurate, timely and understandable disclosure in reports and documents submitted by the corporation to regulators and in other public communications.			

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description	
		Terapkan Apply	Jelaskan Explain
4.1.2	Direksi menetapkan kebijakan dan praktik anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, anti suap, anti korupsi, anti kecurangan (anti fraud), keterlibatan dalam politik dengan mengacu pada standar nasional atau internasional mengenai anti pencucian uang, anti suap, anti korupsi, anti kecurangan atau standar terkait lainnya. The Board of Directors determines policies and practices for anti-money laundering and terrorism financing, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud, involvement in politics by referring to national or international standards regarding anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption, anti-fraud or other standards, other related.	Direksi telah menetapkan kebijakan dan mengacu pada standar nasional dan internasional terkait anti pencucian uang, anti suap, anti korupsi, serta anti kecurangan, termasuk juga kebijakan terkait keterlibatan dalam politik. Kebijakan-kebijakan tersebut dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Direksi yang wajib dipatuhi oleh seluruh insan PPA. The Board of Directors has instigated policies, and refers to national and international standards related to anti-money laundering, anti-bribery, anti-corruption and anti-fraud, including policies concerning involvement in politics. These policies are outlined in a Board of Directors' Decree that must be obeyed by all PPA personnel.	Telah diterapkan Already Applied
4.2 Nilai-Nilai dan Budaya Values and Culture			
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
4.2.1	Korporasi mengartikulasikan, menumbuhkan dan mengungkapkan budaya dan nilai-nilai korporasi Corporations articulate, cultivate and express corporate culture and values	Perusahaan telah menerapkan budaya dan nilai-nilai korporasi yang kuat dan transparan sesuai dengan Kebijakan di Kode Etik. PPA menekankan Budaya Perusahaan sebagai panduan kerja untuk mencapai tujuan perusahaan, memastikan budaya kerja relevan dengan perubahan zaman dan teknologi. Budaya AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) menjadi fondasi budaya perusahaan, di mana pemahaman bersama antara manajemen dan karyawan diharapkan menciptakan lingkungan kerja kondusif dan inovatif, serta meningkatkan kinerja perusahaan. The Company has instigated a strong and transparent corporate culture and values in accordance with the Code of Ethics Policies. PPA emphasizes a Corporate Culture as a work guide to achieve Company goals, ensuring a work culture is relevant to changing times and technology. The AKHLAK (Trustworthy, Competent, Harmonious, Loyal, Adaptive, Collaborative) culture forms the foundation of the corporate culture, where mutual understanding between management and employees is expected to create a conducive and innovative work environment, as well as improves the Company performance.	Telah diterapkan Already Applied
4.3 Komunikasi dan Penegakan Pedoman Etika, Nilai-nilai dan Budaya Communication and Enforcement of Ethics, Values and Culture Guidelines			
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
4.3.1	Pedoman perilaku dan kode etik korporasi dikomunikasikan secara efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, serta seluruh karyawan, diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi termasuk sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi, serta ditegakkan. The corporate code of conduct and ethics are communicated effectively to the Board of Directors, Board of Commissioners and all employees, integrated into corporate strategy and operations including the risk management system and remuneration structure, and enforced.	Perusahaan menerapkan pedoman perilaku dan kode etik korporasi secara menyeluruh, memastikan komunikasi yang efektif kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan seluruh karyawan. Hal ini tidak hanya disampaikan secara rutin melalui pelatihan dan seminar, tetapi juga diintegrasikan ke dalam strategi dan operasi korporasi, termasuk dalam sistem manajemen risiko dan struktur remunerasi. Upaya penegakan Kode Etik dilakukan melalui sosialisasi yang disampaikan melalui berbagai saluran komunikasi Perusahaan, serta penerapan sistem pelaporan pelanggaran yang melindungi pelapor (whistleblower) untuk menjaga integritas dan transparansi dalam setiap aspek operasi perusahaan. The Company has established a comprehensive code of conduct and corporate code of ethics, ensuring effective communication between the Board of Directors, Board of Commissioners and all employees. This is not only conveyed regularly through training and seminars, but is also integrated into the corporate strategy and operations, including the risk management system and remuneration structure. Efforts to enforce the Code of Ethics are carried out through socialization delivered through Company communication channels, as well as through a whistleblowing system that protects whistleblowers to maintain integrity and transparency in all aspects of Company operations.	Telah diterapkan Already Applied

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description	
		Terapkan Apply	Jelaskan Explain
5.	Manajemen Risiko, Pengendalian Internal dan Kepatuhan Risk Management, Internal Control and Compliance		
5.1	Pengendalian Internal dan Kepatuhan Internal Control and Compliance		
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
5.1.1	Direksi melakukan review secara berkala atas ketepatan desain dan efektivitas operasional sistem governansi, pengelolaan risiko, pengendalian internal dan kepatuhan korporasi dan melaporkan pelaksanaan dan hasil review kepada para pemegang saham melalui laporan tahunan Korporasi. The Board of Directors carries out regular reviews of the accuracy of the design and operational effectiveness of the governance system, risk management, internal control and corporate compliance and reports the implementation and results of the review to shareholders through the Corporation's annual report.	Perusahaan telah menerapkan manajemen risiko, pengendalian internal, dan kepatuhan secara menyeluruh. Direksi secara berkala mereview dan memastikan kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal. The Company applies comprehensive risk management, internal control and compliance. The Board of Directors regularly reviews and ensures the adequacy and effectiveness of the governance, risk management and internal control processes.	Telah diterapkan Already Applied
5.2	Manajemen Risiko Risk management		
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
5.2.1.	Strategi dan risiko merupakan satu kesatuan, diungkapkan secara transparan, masuk ke dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam diskusi di rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Strategy and risk are one unit, disclosed transparently, included in the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners, as well as in discussions at meetings of the Board of Commissioners and Board of Directors.	Perusahaan telah menerapkan strategi dan manajemen risiko secara terintegrasi dan transparan, yang menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris. Hal ini tercermin dalam berbagai kegiatan, seperti pembahasan mendalam mengenai identifikasi dan mitigasi risiko dalam rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Selain itu, laporan risiko juga disusun secara berkala dan dibahas dalam forum internal untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan dapat mengelola risiko yang dihadapi perusahaan dengan efektif. The Company has applied an integrated and transparent strategy and risk management, as an important part of the Board of Directors and Board of Commissioners duties and responsibilities. This is reflected in their activities, such as in-depth discussions concerning risk identification and mitigation in the Board of Commissioners and Board of Directors meetings. Risk reports are also prepared regularly and discussed in internal forums to ensure that all parties understand and effectively manage the risks faced by the Company.	Telah diterapkan Already Applied
Rekomendasi 2 Recommendation 2			
5.2.2.	Komite Pemantau Manajemen Risiko membantu pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan menciptakan mekanisme yang transparan, fokus, dan independen dalam pengawasan manajemen risiko korporasi. The Risk Management Monitoring Committee assists in carrying out the duties of the Board of Commissioners by creating a transparent, focused and independent mechanism for supervising corporate risk management.	Perusahaan telah menerapkan mekanisme pengawasan manajemen risiko yang transparan, fokus, dan independen melalui pembentukan Komite Investasi dan Manajemen Risiko, yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan No. SK-94/PPA/1022 tanggal 31 Oktober 2022. The Company has applied a transparent, focused and independent risk management supervision mechanism by establishing an Investment and Risk Management Committee, which is tasked with assisting the Board of Commissioners in carrying out its supervisory duties as regulated in Decree No. SK-94/PPA/1022 dated October 31, 2022.	Telah diterapkan Already Applied

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description	Terapkan Apply	Jelaskan Explain
5.3. Integrasi Governansi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan Integration of Governance, Risk Management and Compliance				
Rekomendasi 1 Recommendation 1				
5.3.1	Direksi membangun sistem governansi, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi, dengan menangani berbagai ketidakpastian secara terpadu dan dengan integritas yang tinggi, untuk meyakinkan bahwa korporasi dapat mencapai tujuannya. The Board of Directors has built an integrated governance, risk management and compliance (GRC) system, by handling various uncertainties in an integrated manner and with high integrity, to ensure that the corporation can achieve its goals.	Direksi telah membangun sistem tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan (GRC) yang terintegrasi dengan pendekatan terpadu dan berintegritas tinggi untuk memastikan pencapaian tujuan korporasi. Sistem manajemen risiko yang dikembangkan sesuai dengan standar umum dan prinsip eGRC Holding Danareksa. Modul Risk Management dan Legal & Compliance mulai beroperasi pada Desember 2022, disusul modul Internal Audit pada 2023. Pada trivulan I 2024, modul Internal Audit akan diimplementasikan penuh di Holding Danareksa, memperkuat tata kelola perusahaan. The Board of Directors has developed an integrated governance, risk management and compliance (GRC) system using an integrated approach with high integrity to ensure the corporate goals are achieved. The risk management system is in accordance with the general standards and principles of Danareksa Holding eGRC. The Risk Management and Legal & Compliance modules started operating in December 2022, followed by the Internal Audit module in 2023. In QI 2024, the Internal Audit module will be fully functional at Danareksa Holding, thus strengthening corporate governance.	Telah diterapkan Already Applied	
Rekomendasi 2 Recommendation 2				
5.3.2	Direksi memastikan bahwa bagian yang membawahi fungsi kepatuhan tidak merangkap melaksanakan fungsi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. The Board of Directors ensures that the department in charge of the compliance function does not concurrently carry out functions that have the potential to cause a conflict of interest.	Direksi telah memastikan bahwa fungsi kepatuhan di perusahaan tidak merangkap tugas lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, guna menjaga integritas dan independensi serta meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik. The Board of Directors has ensured that the compliance function in the Company does not overlap with other duties that could give rise to conflicts of interest, so at to maintain integrity and independence and improve good corporate governance.	Telah diterapkan Already Applied	
5.4. Audit Internal Internal Audit				
Rekomendasi 1 Recommendation 1				
5.4.1	Dewan Komisaris melalui Komite Audit memantau dan memastikan bahwa fungsi audit internal membantu korporasi untuk mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang objektif dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal, dan governansi korporat. The Board of Commissioners, through the Audit Committee, monitors and ensures that the internal audit function helps the corporation to achieve its goals by bringing an objective and disciplined approach to evaluating and improving the effectiveness of risk management, internal control and corporate governance.	Perusahaan telah menerapkan pengawasan dan pemantauan yang ketat melalui Dewan Komisaris dan Komite Audit untuk memastikan fungsi audit internal berjalan dengan optimal. Langkah ini mencerminkan komitmen perusahaan terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan operasionalnya. Peran, tanggung jawab, dan komposisi anggota Komite Audit dapat dilihat dalam Bab Tata Kelola Perusahaan, khususnya pada pembahasan Komite Audit. Perusahaan dalam memastikan bahwa setiap proses audit dilaksanakan dengan standar tertinggi dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. The Company has instigated strict supervision and monitoring through the Board of Commissioners and Audit Committee to ensure the internal audit function runs optimally. This reflects the Company's commitment to transparency and accountability in carrying out its operations. The Audit Committee members' roles, responsibilities and composition can be found in the Corporate Governance Chapter, in the discussion on the Audit Committee. The Company ensures that all audit processes are carried out to the highest standards and in accordance with applicable regulations.	Telah diterapkan Already Applied	

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description	
		Terapkan Apply	Jelaskan Explain
6.	Pengungkapan dan Transparansi Disclosure and Transparency		
6.1	Kebijakan Pengungkapan Disclosure Policy		
Rekomendasi 1 & 2 Recommendations 1 & 2			
6.1.1	Korporasi memiliki kebijakan dan prosedur pengungkapan dan transparansi yang memastikan pengungkapan informasi material dan menjaga informasi sensitif serta rahasia korporasi. The corporation has disclosure and transparency policies and procedures that ensure disclosure of material information and safeguard sensitive information and corporate secrets.	Perusahaan telah mempraktikkan kebijakan dan prosedur pengungkapan serta transparansi dengan konsistensi. Perusahaan memastikan informasi material tersedia secara jelas dan tepat waktu, dan juga menjaga kerahasiaan informasi sensitif dan rahasia korporat. Kebijakan tersebut telah dituangkan dalam Pedoman GCG Perusahaan. The Company has instigated disclosure and transparency policies and procedures with consistency. The Company ensures that material information is available clearly and on time, and also maintains the confidentiality of sensitive information and corporate secrets. This policy has been outlined in the Company's GCG Guidelines.	Telah diterapkan Already Applied
6.1.2	Hak pemegang saham untuk memperoleh secara teratur dan tepat waktu informasi material yang relevan tentang korporasi harus dipenuhi. Shareholders' rights to obtain regularly and in a timely manner relevant material information about the corporation must be complied.	Perusahaan telah secara konsisten memenuhi hak pemegang saham untuk memperoleh informasi material yang relevan tentang korporasi secara teratur dan tepat waktu. Melalui berbagai saluran komunikasi yang transparan dan efisien, perusahaan memastikan bahwa setiap pemegang saham mendapatkan akses ke informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang berdasarkan fakta terkini dan akurat. The Company has consistently fulfilled the shareholders' rights to obtain relevant material information about the corporation on a regular and timely basis. Through transparent and efficient communication channels, the Company ensures that all shareholders have access to the information needed to make decisions based on current and accurate facts.	Telah diterapkan Already Applied
6.2	Laporan Keuangan dan Keberlanjutan Financial and Sustainability Reports		
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
6.2.1	Korporasi mengungkapkan sistem dan prosedur untuk memastikan bahwa laporan keuangan interim yang tidak diaudit atau direview oleh auditor eksternal secara material adalah akurat, lengkap, dan memberikan investor informasi yang tepat untuk membuat keputusan investasi yang tepat. The Corporation discloses systems and procedures to ensure that interim financial reports that have not been audited or reviewed by an external auditor are materially accurate, complete, and provide investors with appropriate information to make informed investment decisions.	Perusahaan telah menerapkan berbagai sistem dan prosedur untuk menjamin keakuratan, kelengkapan, dan keandalan laporan keuangan interim yang belum diaudit atau direview oleh auditor eksternal. Langkah-langkah ini meliputi pengawasan internal, peninjauan berkala oleh tim keuangan, serta penerapan standar akuntansi yang sesuai. The Company has implemented systems and procedures to ensure the accuracy, completeness and reliability of interim financial reports that have not been audited or reviewed by external auditors. These steps include internal monitoring, regular reviews by the finance team, as well as by applying the appropriate accounting standards.	Telah diterapkan Already Applied
Rekomendasi 2 Recommendation 2			
6.2.2	Komite Audit memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Kegiatan ini termasuk merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali dan, jika perlu, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal. The Audit Committee ensures the quality of financial report audits carried out by external auditors. These activities include recommending the appointment, reappointment and, if necessary, dismissal and remuneration of external auditors.	Perusahaan telah menerapkan langkah-langkah penting terkait laporan keuangan dan keberlanjutan dengan melibatkan Komite Audit yang bertugas memastikan kualitas audit laporan keuangan yang dilaksanakan oleh auditor eksternal. Dalam rangka menjaga integritas dan transparansi, Komite Audit bertanggung jawab merekomendasikan penunjukan, penunjukan kembali, serta jika diperlukan, pemberhentian dan remunerasi auditor eksternal. Langkah ini tidak hanya menjamin bahwa audit dilakukan dengan standar tertinggi, tetapi juga mencerminkan komitmen perusahaan terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan dan beretika. The Company has implemented important steps related to financial reporting and sustainability by involving the Audit Committee to ensure the quality of financial report audits carried out by external auditors. To maintain integrity and transparency, the Audit Committee is responsible for recommending the appointment, reappointment, and if necessary, dismissal and remuneration of external auditors. This not only ensures that audits are conducted to the highest standards, but also reflects the Company's commitment to sustainable and ethical business practices.	Telah diterapkan Already Applied

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description	Terapkan Apply	Jelaskan Explain
Rekomendasi 3 Recommendation 3				
6.2.3	Laporan keberlanjutan harus disiapkan dan diungkapkan dengan akurat dan disusun sesuai kerangka pelaporan keberlanjutan nasional atau internasional. Sustainability reports must be prepared and disclosed accurately and compiled in accordance with national or international sustainability reporting frameworks.	Perusahaan telah menerapkan kebijakan penyusunan dan pengungkapan laporan keberlanjutan yang akurat sesuai dengan kerangka pelaporan nasional dan internasional. Langkah ini memastikan transparansi, kepercayaan, dan kepatuhan terhadap praktik terbaik global, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan reputasi Perusahaan di mata pemangku kepentingan. The Company applies a policy of preparing and disclosing accurate sustainability reports in accordance with national and international reporting frameworks. This ensures transparency, trust and compliance with global best practices, thereby increasing the Company's accountability and reputation in the eyes of stakeholders.		
Rekomendasi 4 Recommendation 4				
6.2.4	Perusahaan telah menerbitkan Laporan Keberlanjutan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Laporan Tahunan. Laporan Keberlanjutan Perseroan telah memaparkan tentang kinerja keberlanjutan Perseroan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, lingkungan dan tata kelola, yang disajikan dalam perbandingan selama 3 tahun, sehingga diharapkan membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuannya dalam menciptakan nilai yang berkelanjutan. The Company has published a Sustainability Report which is an integral part of the Annual Report. The Company's Sustainability Report has explained the Company's sustainability performance covering economic, social, environmental and governance aspects, which is presented in comparison for 3 years, so that it is hoped to help shareholders and stakeholders understand the corporation's strategic objectives and its progress in creating sustainable value.	Perusahaan telah menerbitkan Laporan Keberlanjutan sebagai bagian dari Laporan Tahunan, yang mencakup kinerja ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola selama tiga tahun. Laporan ini diharapkan membantu pemegang saham dan pemangku kepentingan memahami tujuan strategis korporasi dan kemajuan dalam menciptakan nilai berkelanjutan. The Company has published a Sustainability Report as part of the Annual Report, which covers economic, social, environmental and governance performance for three years. This report will help shareholders and stakeholders understand the corporation's strategic objectives and its progress in creating sustainable value.		Telah diterapkan Already Applied
6.3 Diseminasi Informasi Information Dissemination				
Rekomendasi 1 Recommendation 1				
6.3.1	Saluran penyebaran informasi harus menyediakan akses yang setara, tepat waktu, dan relatif murah untuk informasi yang relevan bagi pengguna. Information dissemination channels should provide equal, timely and relatively inexpensive access to relevant information for users.	Perusahaan telah menerapkan saluran penyebaran informasi yang memastikan akses setara, tepat waktu, dan murah bagi semua pengguna, yaitu melalui website dan sosial media Perusahaan. The Company uses information dissemination channels through the Company's website and social media to ensure equal, timely and inexpensive access for all users.		Telah diterapkan Already Applied
Rekomendasi 2 & 3 Recommendations 2 & 3				
6.3.2	Korporasi memastikan bahwa pernyataan tahunan terhadap penerapan Pedoman Umum Governansi Korporat Indonesia, termasuk penjelasan atas penerapan atas masing-masing Rekomendasi dan Panduan tersedia di situs web selama jangka waktu minimal lima tahun. The Corporation ensures that an annual statement regarding the implementation of the General Guidelines for Indonesian Corporate Governance, including an explanation of the implementation of each Recommendation and Guide is available on the website for a minimum period of five years.	Tahun 2024 merupakan tahun pertama PPA menerapkan PUGKI dan PPA akan memastikan hasil penerapannya tersedia di situs web PPA. 2024 was the first year that PPA implemented PUGKI and PPA will ensure that the results of its implementation are available on the PPA website.		Telah diterapkan Apply
6.3.3	Untuk korporasi yang terdaftar di pasar modal di yurisdiksi selain yurisdiksi asal, peraturan perundang-undangan atas governansi korporat yang berlaku harus diungkapkan dengan jelas. Dalam hal cross listing, kriteria dan prosedur cross listing, kriteria dan prosedur untuk mengakui persyaratan listing untuk listing utama harus transparan dan didokumentasikan. For corporations registered on the capital market in jurisdictions other than the home jurisdiction, the applicable corporate governance laws and regulations must be clearly disclosed. In the case of cross listing, cross listing criteria and procedures, criteria and procedures for recognizing listing requirements for the main listing must be transparent and documented.	PPA merupakan emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. PPA is an issuer listed on the Indonesia Stock Exchange.		Telah diterapkan Apply

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description	Terapkan Apply	Jelaskan Explain
7. Perlindungan terhadap Hak-Hak Pemegang Saham Protection of Shareholder Rights				
Rekomendasi 1 Recommendation 1				
7.1.1	Korporasi memiliki suatu kebijakan komunikasi yang memfasilitasi dan mendorong partisipasi pemegang saham atau investor The corporation has a communications policy that facilitates and encourages shareholder or investor participation	Partisipasi aktif investor dalam proses pengambilan keputusan perusahaan merupakan fokus utama kebijakan komunikasi yang disokong oleh Anggaran Dasar dan Panduan Direksi Perusahaan. Pelaksanaan kebijakan ini ditunjukkan melalui penyelenggaraan RUPS sebagai wadah utama bagi interaksi antara manajemen dan pemegang saham. Investors' active participation in the Company's decision-making process is a key focus of the communication policies supported by the Company's Articles of Association and Board of Directors' Guidelines. This is demonstrated through the holding of a GMS as the main forum for interaction between management and shareholders.	Telah diterapkan Already Applied	
Rekomendasi 2 Recommendation 2				
7.1.2	Korporasi yang merupakan entitas induk memastikan bahwa kebijakan governansi korporatnya berlaku bagi entitas anak dan entitas sependengali yang di dalamnya investasi korporasi adalah signifikan. The corporation, which is the parent entity, ensures that its corporate governance policies apply to subsidiaries and entities under common control in which the corporation's investment is significant.	Not Applicable (N/A) PPA memastikan bahwa kebijakan tata kelola perusahaannya diterapkan secara konsisten pada entitas anak dan entitas sependengali. Saat ini, PPA memiliki dua entitas anak, yaitu PPA Kapital dan PPA Finance. PPA ensures that its corporate governance policies are consistently applied to its subsidiaries and entities under its common control. Currently, PPA has two subsidiaries, PPA Kapital and PPA Finance.	-	
Rekomendasi 3 Recommendation 3				
7.1.3	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang mengatur akuisisi, pengambilalihan, dan transaksi luar biasa seperti merger dan penjualan aset korporasi yang substansial untuk memastikan transaksi terjadi secara transparan dan dalam kondisi yang wajar dan melindungi hak- hak semua pemegang saham sesuai dengan kelasnya. Corporations have rules and procedures governing acquisitions, takeovers and extraordinary transactions such as mergers and sales of substantial corporate assets to ensure transactions occur transparently and under fair conditions and protect the rights of all shareholders according to their class.	Perusahaan telah menegakkan prinsip perlindungan terhadap hak- hak pemegang saham dengan penerapan kebijakan governansi korporat yang merata di seluruh entitas anak. Hal ini memastikan bahwa standar keberlanjutan dan keadilan dalam investasi korporasi diterapkan secara konsisten, memastikan bahwa kepentingan pemegang saham dipertimbangkan dengan serius dalam semua keputusan strategis yang diambil oleh korporasi dan entitas yang terkait. The Company has upheld the principle of protecting shareholder rights by implementing corporate governance policies evenly across all subsidiaries. This ensures that the sustainability and fairness standards in corporate investments are applied consistently, and shareholder interests are seriously considered in all strategic decisions taken by the corporation and related entities.	Telah diterapkan Already Applied	
7.2 Perlakuan Adil Terhadap Pemegang Saham Equal Treatment of Shareholders				
Rekomendasi 1 Recommendation 1				
7.2.1	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan: a. Semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan setara, b. Pengungkapan aturan dan prosedur tersebut serta pengungkapan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya. Corporations have rules and procedures that ensure a. All shareholders of the same series in one class of shares must be treated equally, b. Disclosure of these rules and procedures as well as disclosure of capital structures and arrangements that allow certain shareholders to obtain influence or control that is disproportionate to their share ownership.	Perusahaan telah menerapkan langkah-langkah yang konkret dalam memastikan perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham. Hal ini tercermin dalam kebijakan perusahaan yang menegaskan bahwa semua pemegang saham dari seri yang sama dalam satu kelas saham harus diperlakukan secara setara. Selain itu, perusahaan juga melakukan pengungkapan menyeluruh terkait aturan dan prosedur ini, serta mengungkapkan secara transparan struktur modal dan pengaturan yang memungkinkan pemegang saham tertentu memperoleh pengaruh atau kendali yang tidak proporsional dengan kepemilikan sahamnya. The Company has taken concrete steps to ensure shareholder rights are protected. This is reflected in the Company's policy that emphasizes that all shareholders of the same series in one share class must be treated equally. In addition, the Company also makes comprehensive disclosures concerning these rules and procedures, and transparently discloses the capital structure and arrangements that allow certain shareholders to gain influence or control that is disproportionate to their share ownership.	Telah diterapkan Already Applied	

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description	Terapkan Apply	Jelaskan Explain
Rekomendasi 2 Recommendation 2				
7.2.2	Korporasi memiliki aturan dan prosedur yang memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham. Corporations have rules and procedures that ensure related party transactions are approved and implemented in a manner that ensures that conflicts of interest are managed appropriately, and protects the interests of the corporation and shareholders.	Perusahaan telah memiliki Kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan Kebijakan Akuntansi Keuangan guna memastikan transaksi pihak berelasi disetujui dan dilaksanakan sedemikian rupa yang dapat meyakinkan bahwa benturan kepentingan telah dikelola dengan tepat, dan melindungi kepentingan korporasi dan pemegang saham. The Company has a Good Corporate Governance Policy and Financial Accounting Policy to ensure that related party transactions are approved and implemented in a manner that ensures that conflicts of interest are managed appropriately, and protect the interests of the corporation and shareholders.	-	
Rekomendasi 3 Recommendation 3				
7.2.3	Korporasi memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/ belum tersedia di pasar. Corporations have and disclose policies to prevent insider trading. Corporations have clear rules regarding any trading in corporate shares carried out by directors, commissioners and insiders to ensure that anyone cannot profit directly or indirectly from information that is not/not yet available on the market.	Perusahaan memiliki dan mengungkapkan kebijakan untuk mencegah terjadinya insider trading. Korporasi memiliki aturan yang jelas mengenai perdagangan apa pun dalam saham korporasi yang dilakukan oleh direktur, komisaris dan orang dalam untuk memastikan bahwa siapapun tidak boleh mendapatkan keuntungan secara langsung atau tidak langsung dari informasi yang tidak/ belum tersedia di pasar. The Company has and discloses policies to prevent insider trading. The Corporation has clear rules regarding any trading in the corporation's shares by Directors, Commissioners and insiders to ensure that no one can directly or indirectly benefit from information that is not/not yet available in the market.	Telah diterapkan Apply	
7.3 Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders				
Rekomendasi 1 Recommendation 1				
7.3.1	Korporasi melakukan panggilan RUPS dengan agenda dan materi RUPS selengkap dan sedini mungkin (paling lambat 28 hari sebelum RUPS) untuk memberikan waktu dan materi yang cukup bagi pemegang saham untuk mempelajari dengan baik agenda rapat. Undangan rapat dan seluruh informasi RUPS diungkapkan melalui sarana elektronik seperti melalui situs web korporasi. The corporation invites for a GMS with the GMS agenda and materials as complete and as early as possible (no later than 28 days before the GMS) to provide sufficient time and materials for shareholders to properly study the meeting agenda. Meeting invitations and all GMS information are disclosed via electronic means such as through the corporate website.	Perusahaan melakukan Pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. The Company sends an Invitation to the GMS no later than 14 (fourteen) days before the date of the GMS, without taking into account the date of the invitation and the date of the GMS.	Telah diterapkan Already Applied	
Rekomendasi 2 Recommendation 2				
7.3.2	Korporasi memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS. The corporation has and discloses rules and procedures that facilitate shareholders in participating and voting effectively at the GMS.	Perusahaan memiliki dan mengungkapkan aturan dan prosedur yang memfasilitasi pemegang saham dalam berpartisipasi dan memberikan suara secara efektif di RUPS sebagaimana termuat dalam Anggaran Dasar Perusahaan. The Company has and discloses rules and procedures that facilitate shareholders in participating and voting effectively at the GMS in the Company's Articles of Association.	Telah diterapkan Already Applied	
Rekomendasi 3 Recommendation 3				
7.3.3	Pemegang saham berpartisipasi efektif dalam menetapkan penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Shareholders participate effectively in determining the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	Pemegang saham turut serta berpartisipasi pada pemungutan suara dalam mata acara penunjukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Shareholders also participate in voting on the agenda item for appointing members of the Board of Directors and Board of Commissioners.	Telah diterapkan Already Applied	
Rekomendasi 4 Recommendation 4				
7.3.4	Korporasi memastikan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal di RUPS. The corporation ensures transparency and accountability of external auditors at the GMS	Perusahaan memastikan perlakuan adil terhadap pemegang saham dengan menerapkan transparansi dan akuntabilitas auditor eksternal dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pemegang saham. The Company ensures fair treatment of shareholders by applying transparency and accountability of external auditors at General Shareholder Meetings (GMS), thus increasing shareholder trust and satisfaction.	Telah diterapkan Already Applied	

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description	
		Terapkan Apply	Jelaskan Explain
Rekomendasi 5 Recommendation 5			
7.3.5	Penyampaian hasil pemungutan suara dan ringkasan risalah RUPS secara lengkap diumumkan ke publik pada hari kerja berikutnya. Submission of voting results and a complete summary of the minutes of the GMS will be announced to the public on the following working day.	Belum diterapkan Not Applied yet	-
8. Pemangku Kepentingan Lainnya Other Stakeholders			
8.1 Keterlibatan Pemangku Kepentingan Kunci (Stakeholder Engagement) Key Stakeholder Engagement			
Rekomendasi 1 Recommendation 1			
8.1.1	Korporasi melalui <i>Corporate Secretary</i> melaksanakan komunikasi yang reguler, transparan dan efektif dengan pemangku kepentingan kunci serta melibatkan mereka untuk memahami harapan dan keluhan mereka serta dampak korporasi terhadap mereka. The corporation, through the Corporate Secretary, carries out regular, transparent and effective communication with key stakeholders and involves them to understand their hopes and complaints as well as the impact of the corporation on them.	Perusahaan telah memperkuat prinsip perlakuan adil terhadap pemegang saham dengan menerapkan kebijakan komunikasi yang reguler, transparan, dan efektif melalui Sekretaris Perusahaan. Perusahaan secara terbuka dan melibatkan pemangku kepentingan, tidak hanya memahami harapan dan keluhan, tetapi juga menyadari dampak aktivitas Perusahaan secara langsung. Hal ini tidak hanya menciptakan kepercayaan dan keterbukaan, tetapi juga memastikan bahwa kepentingan pemegang saham diakui dan diprioritaskan dalam setiap keputusan dan tindakan perusahaan. Sarana informasi bagi para pemangku kepentingan dapat dilihat dalam Bab Akses Informasi dan Data Perusahaan pada Laporan Tahunan ini. The Company has strengthened the principle of fair treatment of shareholders by instigating a regular, transparent and effective communication policy through the Corporate Secretary. The Company openly involves stakeholders, not only by understanding their expectations and complaints, but also by understanding the direct impact of the Company's activities. This not only creates trust and transparency, but also ensures that shareholder interests are recognized and prioritized in all Company decisions and actions. Information facilities for stakeholders can be seen in the Access to Information and Company Data chapter in this Annual Report.	Telah diterapkan Already Applied
8.2 Komitmen Keberlanjutan dalam Model Bisnis Sustainability Commitment in Business Models			
Rekomendasi 2 Recommendation 2			
8.2.1	Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel dan transparan atas governansi keberlanjutan, termasuk menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan korporasi. Direksi dan Dewan Komisaris memasukkan pertimbangan keberlanjutan ketika menjalankan perannya, termasuk antara lain dalam pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama dan manajemen risiko. The Board of Commissioners together with the Board of Directors are responsible, accountable and transparent for sustainability governance, including determining corporate sustainability strategies, priorities and targets. The Board of Directors and Board of Commissioners include sustainability considerations when carrying out their roles, including, among others, in the development and implementation of corporate strategy, business plans, main action plans and risk management.	Perusahaan telah menegakkan komitmen keberlanjutan dalam model bisnisnya dengan mengamanatkan bahwa Dewan Komisaris bersama-sama dengan Direksi bertanggung jawab, akuntabel, dan transparan atas governansi keberlanjutan. Perusahaan tidak hanya menetapkan strategi, prioritas, dan target keberlanjutan Perusahaan, tetapi juga memasukkan pertimbangan keberlanjutan dalam menjalankan peran Perusahaan. Hal ini mencakup pengembangan dan implementasi strategi korporasi, rencana bisnis, rencana aksi utama, dan manajemen risiko, memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan ke dalam inti operasional perusahaan. The Company has upheld its sustainability commitment in its business model by mandating that the Board of Commissioners together with the Board of Directors be responsible, accountable and transparent for sustainability governance. The Company not only sets the Company's sustainability strategies, priorities and targets, but also includes sustainability considerations when carrying out the Company's role. This includes the development and implementation of corporate strategies, business plans, and main action plans and risk management, ensuring that the steps taken integrate sustainability values into the Company's core operations.	Telah diterapkan Already Applied

No.	Uraian Description	Keterangan Penerapan Application Description	
		Terapkan Apply	Jelaskan Explain
8.3 Perlindungan terhadap Pemangku Kepentingan Protection of Stakeholders			
Rekomendasi 3 Recommendation 3			
8.3.1	Direksi memastikan dan mengungkapkan bahwa operasi korporasi mencerminkan penerapan standar etika, tanggung jawab sosial dan lingkungan yang tinggi di seluruh korporasi dan memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang tepat diterapkan untuk menghormati serta mematuhi hak-hak pemangku kepentingan. The Board of Directors ensures and discloses that corporate operations reflect the application of high standards of ethics, social and environmental responsibility throughout the corporation and ensure that appropriate policies and procedures are implemented to respect and comply with stakeholder rights.	Perusahaan telah menegakkan praktik ini dengan tekad, memastikan bahwa Direksi secara tegas menjamin bahwa setiap aspek operasi korporasi mencerminkan standar etika, tanggung jawab sosial, dan lingkungan yang tinggi di seluruh entitas perusahaan. Perusahaan dengan tegas memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang sesuai telah diterapkan dengan cermat untuk menghormati dan mematuhi hak-hak pemangku kepentingan, menjadikan perlindungan Perusahaan sebagai prioritas utama dalam setiap keputusan dan tindakan yang diambil. The Company has enforced this practice with determination, ensuring that the Board of Directors unequivocally guarantees that all aspects of corporate operations reflects high ethical, social responsibility and environmental standards across all corporate entities. The Company firmly ensures that appropriate policies and procedures have been carefully implemented to respect and comply with stakeholders' rights, making the Company's protection a top priority in every decision and action taken.	Telah diterapkan Already Applied
Rekomendasi 2 Recommendation 2			
8.3.2	Direksi mendorong karyawan bekerja untuk kepentingan jangka panjang korporasi dan mengedepankan keberlanjutan. The Board of Directors encourages employees to work for the long-term interests of the corporation and prioritizes sustainability.	Perusahaan telah mengadopsi strategi yang dipimpin oleh Direksi untuk mendorong karyawan dalam menjalankan tugas Perusahaan dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang korporasi serta mengutamakan prinsip-prinsip keberlanjutan. The Company has adopted a strategy led by the Board of Directors to encourage employees to carry out the Company's duties by considering the long-term interests of the corporation, and by prioritizing sustainability principles.	Telah diterapkan Already Applied





TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

CORPORATE SOCIAL
AND ENVIRONMENTAL
RESPONSIBILITY

PPA berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan menerapkan pendekatan 5P, yakni people, planet, prosperity, partnership, dan peace. PPA tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi aspek sosial dan lingkungan guna mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

PPA is committed to achieving the Sustainable Development Goals by using the 5P approach, namely people, planet, prosperity, partnership, and peace. PPA not only focuses on business growth, but also to provide a positive impact on social and environmental aspects to achieve sustainable economic development.

KOMITMEN KEBERLANJUTAN

Sustainability Commitment

Sebagai entitas yang bertanggung jawab secara korporat, PPA berkomitmen kuat terhadap keberlanjutan dengan terus mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan melalui berbagai inisiatif perubahan positif yang berdampak baik bagi lingkungan sekitar. Secara menyeluruh, PPA berupaya memperkuat aspek *Environmental*, *Social*, dan *Governance* (ESG) dalam setiap aktivitas bisnis dan operasionalnya. Perseroan terus meningkatkan penerapan prinsip ESG guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan. Dengan konsistensi dalam menerapkan prinsip keberlanjutan, PPA bertekad untuk mencapai target yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Perseroan berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan menerapkan pendekatan 5P, yakni *people*, *planet*, *prosperity*, *partnership*, dan *peace*. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara manusia, lingkungan, dan kesejahteraan melalui kolaborasi yang erat dalam mewujudkan perdamaian. Dengan demikian, Perseroan tidak hanya berfokus pada manfaat bagi pemegang saham, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan, baik di lingkungan internal maupun eksternal.

Sebagai entitas usaha yang berperan dalam memperkuat korporasi di Indonesia, khususnya BUMN, PPA ditargetkan menjadi perusahaan perusahaan investasi terkemuka dan mitra terpercaya dalam restrukturisasi korporasi di Indonesia. Perseroan berfokus pada pelaksanaan strategi *turnaround* dan peningkatan kinerja dengan mengutamakan solusi terhadap NPL, restrukturisasi, transformasi perusahaan, serta pengelolaan aset dan saham minoritas.

Dalam rangka mencapai hal tersebut, PPA telah menetapkan langkah strategis sebagai berikut:

1. Penanganan BUMN Titip Kelola melalui pemberian pinjaman/dana talangan kepada BUMN Titip Kelola, Mezzanine Equity Investment pada BUMN Titip Kelola, Restrukturisasi dengan melakukan antara lain penggabungan usaha dan penutupan BUMN.
2. Pengembangan pengelolaan BUMN melalui SKK non mandate.
3. Memperkuat posisi PPA sebagai Asset Management Company (AMC) melalui NPL Management untuk memberikan nilai bagi pemangku kepentingan.
4. Melakukan kerjasama melalui Special Purpose Vehicle ("SPV")/Fund.
5. Mencapai pengelolaan aset yang optimal melalui, namun tidak terbatas pada, program special situation fund (SSF).
6. Menciptakan sinergi dengan mitra strategis pada sektor keuangan.
7. Menciptakan nilai ekonomi yang optimal dan bertumbuh.
8. Mengoptimalkan kapasitas pendanaan dan struktur modal.
9. Mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, serta mencerminkan budaya akhlak.
10. Pemberian jasa konsultasi yang meliputi namun tidak terbatas pada konsultasi bisnis & keuangan (Business & Financial Advisory).
11. Kerjasama trading baja dan scrap dengan BUMN Titip Kelola.

As a responsible corporate entity, PPA is strongly committed to sustainability by continuing to integrate sustainability values through positive change initiatives that provide a positive impact on the surrounding environment. Overall, PPA seeks to strengthen the Environmental, Social, and Governance (ESG) aspects in all its business and operational activities. The Company continues to improve the application of ESG principles to ensure future sustainable growth. By consistently applying the sustainability principles, PPA is determined to achieve targets in line with the Sustainable Development Goals (SDGs).

The Company is committed to achieving the Sustainable Development Goals by using the 5P approach, namely people, planet, prosperity, partnership, and peace. This approach is expected to create a balance between the people, the environment, and prosperity, which through close collaboration will create peace. Therefore, the Company not only focuses on benefits for shareholders, but also provides added value for all internal and external stakeholders.

As a business entity that plays a role in strengthening corporations in Indonesia, especially BUMN, PPA is expected to become a leading investment company and a trusted partner in corporate restructuring in Indonesia. The Company focuses on turnaround strategies and improving performance by prioritizing solutions to NPLs, restructuring, corporate transformation, and management of assets and minority shareholders.

To achieve this, PPA has instigated the following strategic steps:

1. Handling BUMN Titip Kelola by providing loans/bridging funds to BUMN Titip Kelola, Mezzanine Equity Investment in BUMN Titip Kelola, Restructuring by carrying out business mergers and closing BUMN.
2. Developing BUMN management through non-mandate SKK.
3. Strengthening PPA's position as an Asset Management Company (AMC) through NPL Management to provide value to stakeholders.
4. Cooperating through a Special Purpose Vehicle ("SPV")/Fund.
5. Achieving optimal asset management through, but not limited to, special situation fund (SSF) programs.
6. Creating synergies with strategic partners in the financial sector.
7. Creating optimal and growing economic value.
8. Optimizing funding capacity and capital structure.
9. Developing quality, productive human capital that reflects the akhlak culture.
10. Providing consulting services including but not limited to business & financial consulting (Business & Financial Advisory).
11. Cooperating in Steel and scrap trading with BUMN Titip Kelola.

Perseroan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi aspek sosial dan lingkungan guna mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Secara konsisten, Perseroan menyeimbangkan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan sebagai bagian dari komitmennya terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan serta memastikan keberlanjutan usaha jangka panjang. Untuk mendukung hal tersebut, Perseroan terus membangun hubungan harmonis dengan para pemangku kepentingan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

PPA meyakini bahwa program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) merupakan bentuk komitmen Perseroan terhadap para pemangku kepentingan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. TJSL memiliki hubungan yang erat dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga Perseroan selalu mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari operasional bisnisnya, tidak hanya aspek ekonomi. Komitmen ini menjadikan Perseroan sebagai organisasi yang secara konsisten menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan baik. Bagi Perseroan, TJSL adalah bagian integral dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) serta berkontribusi dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Perseroan melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-1/MBU/03/2023 Tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 24 Maret 2023. Untuk itu, implementasi pelaksanaan TJSL Perseroan senantiasa mengedepankan prinsip yang terintegrasi, terarah, terukur, dapat dicapai, bertanggung jawab. TJSL Perseroan juga berperan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil/koperasi menjadi tangguh dan mandiri dan memberdayakan kondisi sosial masyarakat.

Selain itu, pelaksanaan kegiatan TJSL dilaksanakan sesuai landasan peraturan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan berkelanjutan bagi lembaga Jasa Keuangan, Emiten dan Perusahaan Publik (POJK 51). Dengan mengadopsi seluruh ketentuan dalam POJK 51/2017, Perseroan berkomitmen untuk mendorong tercapainya dukungan menyeluruh untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di setiap kegiatan usaha dan operasional Perseroan.

Komitmen ini selaras dengan visi dan misi PPA dalam menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Visi tersebut mencerminkan peran PPA sebagai unit khusus yang mendukung Perseroan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat serta mewujudkan kemandirian yang berkelanjutan.

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dijalankan sejalan dengan komitmen PPA dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan penerapan keuangan berkelanjutan. Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, informasi terkait tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya penerapan prinsip environment, social, and governance (ESG), disajikan dalam Laporan Keberlanjutan yang terpisah dari Laporan Tahunan ini.

The Company not only focuses on business growth, but also seeks to provide a positive impact on the social and environmental aspects to achieve sustainable economic development. Consistently, the Company balances the economic, social and environmental performance as part of its commitment to the Sustainable Development Goals, and ensures long-term business sustainability. To support this, the Company continues to build harmonious relationships with stakeholders through the Social and Environmental Responsibility (SER) program.

PPA believes that the Social and Environmental Responsibility (SER) program reflects the Company's commitment to stakeholders for the economic, social, and environmental aspects. SER has a close relationship with the principles of sustainable development, so the Company considers the social and environmental impacts of its business operations, as well as the economic aspects. This commitment has made the Company an organization that consistently carries out social and environmental responsibilities properly. For the Company, SER is an integral part of applying good corporate governance, and contributes to realizing the Sustainable Development Goals.

The Company's Social and Environmental Responsibility program is regulated in the Republic of Indonesia Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. Per-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs for State-Owned Enterprises dated March 24, 2023. Therefore, the Company's SER prioritizes the integrated, targeted, measurable, achievable, and responsible principles. The Company's SER also includes improving the ability of small businesses/cooperatives to become resilient and independent, and empowers the social conditions of the communities.

Also, the SER activities are carried out in accordance with regulations, including the Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Application of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers and Public Companies (POJK 51). By adopting the POJK 51/2017 provisions, the Company is committed to encouraging comprehensive support to create sustainable economic growth in of its business activities and operations.

This commitment is in line with PPA's vision and mission to carrying out the Social and Environmental Responsibility program. The vision reflects PPA's role as a special unit that supports the Company in improving the social welfare of the communities and realizing sustainable independence.

The Social and Environmental Responsibility Program is carried out in line with PPA's commitment to support the Sustainable Development Goals (SDGs), and implement sustainable finance. In accordance with the Financial Services Authority Circular No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies, information on corporate social responsibility, especially the application of environmental, social, and governance (ESG) principles, is presented in a Sustainability Report separately from this Annual Report.

Adapun informasi yang diungkapkan dalam Laporan Keberlanjutan PPA Tahun Buku 2023, disajikan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, yang mencakup poin-poin sebagai berikut:

1. Penjelasan Strategi Keberlanjutan;
2. Ikhtisar Aspek Keberlanjutan (Ekonomi, Sosial dan Lingkungan Hidup);
3. Profil Singkat Emiten atau Perusahaan Publik;
4. Penjelasan Direksi;
5. Tata Kelola Keberlanjutan;
6. Kinerja Keberlanjutan;
7. Verifikasi Tertulis dari Pihak Independen;
8. Lembar Umpan Balik (feedback) untuk Pembaca; dan
9. Tanggapan Emiten atau Perusahaan Publik terhadap Umpan Balik Laporan Tahun Sebelumnya.

The information disclosed in PPA's Fiscal Year 2024 Sustainability Report is regulated in the Financial Services Authority Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Services Institutions, Issuers, and Public Companies, and includes the following points:

1. Explanation of Sustainability Strategy;
2. Overview of Sustainability Aspects (Economic, Social and Environmental);
3. Brief Profile of Issuer or Public Company;
4. Explanation from the Board of Directors;
5. Sustainability Governance;
6. Sustainability Performance;
7. Written Verification from an Independent Party;
8. Feedback Sheet for Readers; and
9. Issuer or Public Company Response to Previous Year's Report Feedback.

PELAKSANAAN PROGRAM TJSL 2024

Adapun program TJSL yang telah dilakukan PPA di sepanjang tahun 2024, adalah sebagaimana terlampir berikut ini.

IMPLEMENTATION OF SER PROGRAM IN 2024

The PPA SER programs carried out in 2024 are explained below.

Pelaksanaan Program TJSL PPA Tahun 2024 Implementation of PPA SER Program in 2024

No	Waktu pelaksanaan Implementation date	Nama Program Program Name	Foto Photo
1	11 Januari 2024 January 11, 2024	PPA Mendukung Pelatihan Pengembangan UMKM Insan Berkebutuhan Khusus PPA Supported MSME Development Training for People with Special Needs	
2	27 Februari 2024 February 27, 2024	Penghargaan Panitrana Award 2024 Panitrana Awards 2024	
3	5 Maret 2024 March 5, 2024	PPA Dukung Primissima di INACRAFT 2024 PPA Supported Primissima at INACRAFT 2024	

Pelaksanaan Program TJSL PPA Tahun 2024 Implementation of PPA SER Program in 2024

No	Waktu pelaksanaan Implementation date	Nama Program Program Name	Foto Photo
4	19 Maret 2024 March 19, 2024	PPA Santuni 200 Anak Yatim dan Insan Berkebutuhan Khusus Pra Sejahtera PPA Provided Assistance to 200 Orphans and Pre-Prosperous People with Special Needs	
5	5 April 2024 April 5, 2024	Mudik Gratis bersama BUMN Free Mudik with BUMN	
6	20 Mei 2024 May 20, 2024	PPA dan PT JIEP Dukung Pengembangan Desa Pertanian dan Wisata Terintegrasi di Desa Sriharjo, Bantul, Yogyakarta PPA and PT JIEP Supported Development of Integrated Agricultural and Tourism Village in Sriharjo Village, Bantul, Yogyakarta	
7	19 Juni 2024 June 19, 2024	Dalam Rangka Merayakan Hari Raya Idul Adha 1445H, PPA Bersama BUMN Anggota Holding Danareksa Menyalurkan Sebanyak 212 Hewan Kurban To Celebrate Eid al-Adha 1445H, PPA Together with BUMN Members of Danareksa Holding Distributed 212 Qurban (Sacrificial) Animals	
8	8 Juli 2024 July 8, 2024	PPA bagikan 250 Al Quran ke pelosok Lampung dan Jakarta PPA distributed 250 Qurans to remote areas in Lampung and Jakarta	

Pelaksanaan Program TJSL PPA Tahun 2024
Implementation of PPA SER Program in 2024

No	Waktu pelaksanaan Implementation date	Nama Program Program Name	Foto Photo
9	26 Juli 2024 July 26, 2024	UMK Binaan PPA, Aruna Creative dan Taruna Tani Sriharjo Bangkitkan Kemandirian Melalui Kreatifitas dan Inovasi Anak Muda Yang Berkelanjutan dalam Karya Nyata Volume 8 di Yogyakarta UMK Binaan PPA, Aruna Creative and Taruna Tani Sriharjo Awakened Independence Through Sustainable Youth Creativity and Innovation in Real Work Volume 8 in Yogyakarta	
10	20 Agustus 2024 August 20, 2024	Program TJSL PPA & PT JIEP Tingkatkan Geliat Ekonomi Desa Binaan Holding BUMN Danareksa, di Yogyakarta. PPA & PT JIEP SER Program Increased Economic Growth of BUMN Holding Danareksa Fostered Villages, in Yogyakarta.	
11	7 Oktober 2024 October 7, 2024	PPA Dukung UMK Binaan Unggulan dalam Event Jatim Fest dan Inacraft 2024 PPA Supported Leading MSEs at the Jatim Fest and Inacraft 2024	
12	8 Oktober 2024 October 8, 2024	Rayakan Kesetaraan Disabilitas, PPA Dukung Event IBK's Day - Future Of Empowerment To Celebrate Disability Equality, PPA Supports IBK's Day Event - Future Of Empowerment	
13	28 Oktober 2024 October 28, 2024	Dukung Regenerasi Ekosistem Musik, Holding BUMN Danareksa Reaktivasi Lokananta Records melalui "Bintang Muda Lokananta" Support for Music Ecosystem Regeneration, BUMN Holding Company Danareksa Reactivated Lokananta Records through "Bintang Muda Lokananta"	

Pelaksanaan Program TJSL PPA Tahun 2024

Implementation of PPA SER Program in 2024

No	Waktu pelaksanaan Implementation date	Nama Program Program Name	Foto Photo
14	1 Desember 2024 December 1, 2024	Turut Hijaukan Bumi, PPA Libatkan Karyawan dalam Program Bagi Bibit Pohon untuk Masyarakat. Contributed to Greening the Earth, PPA Involved Employees in a Program to Distribute Tree Seedlings in the Communities.	
15	9 Desember 2024 December 9, 2024	Jajaki Pertemuan Business Matching, UMK Binaan PPA raih kesepakatan bisnis dengan Pengusaha Negeri Jiran. Business Matching Meeting, PPA-assisted MSEs in business agreements with Neighboring Country Entrepreneurs.	

Referensi Silang SEOJK No. 16 /SEOJK.04/2021: Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik

Cross-Reference No. 16/SEOJK.04/2021: Format and Completing
the Annual Report of Issuers or Public Companies

Keterangan Description	HALAMAN PAGE
Ketentuan Umum General Terms	
Dalam surat edaran otoritas jasa keuangan ini yang dimaksud dengan: In this financial services authority circular letter what is meant by:	
a. Laporan tahunan adalah laporan pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengurusan dan pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu 1 (satu) tahun buku kepada rapat umum pemegang saham yang disusun berdasarkan ketentuan dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. The annual report is a report on the Board of Directors and Board of Commissioners accountability in managing and supervising issuers or public companies within a period of 1 (one) fiscal year to the general meeting of shareholders prepared based on the provisions of the financial services authority regulation concerning the annual report of issuers or public companies.	
b. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran umum. Issuers are parties who make public offerings.	
c. Perusahaan publik adalah perseroan yang sahamnya telah dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Public company is a company whose shares are owned by at least 300 (three hundred) shareholders and has a paid-up capital of at least Rp3,000,000,000.00 (Three billion rupiah) or a number of shareholders and paid-up capital as determined by the financial services authority.	
d. Perusahaan terbuka adalah emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik A public company is an issuer that has made a public offering of equity securities or a publically-listed company	
e. Laporan keberlanjutan (sustainability report) adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang memuat kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup suatu lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik dalam menjalankan bisnis berkelanjutan. A sustainability report is a report published to the public that contains the economic, financial, social, and environmental performance of a financial service institution, issuer, and public company in running a sustainable business.	
f. Direksi: Board of Directors: • Bagi emiten atau perusahaan publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris emiten atau perusahaan publik; dan For an issuer or a public company in the form of a limited liability company, it is the Board of Directors as referred to in the financial services authority regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an issuer or public company; and • Bagi emiten atau perusahaan publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melaksanakan pengurusan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundangundangan mengenai badan hukum tersebut. For an issuer or a public company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that carries out the management of the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.	
g. Dewan Komisaris: Board of Commissioners: • Bagi emiten atau perusahaan publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai Direksi dan Dewan Komisaris emiten atau perusahaan publik; dan For an issuer or a public company in the form of a limited liability company, the Board of Commissioners as referred to in the financial services authority regulation concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of an issuer or public company; and • Bagi emiten atau perusahaan publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang melakukan pengawasan badan hukum tersebut sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai badan hukum tersebut. 2) For the issuer or public company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that supervises the legal entity as referred to in the laws and regulations concerning the legal entity.	
h. Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disingkat RUPS: General meeting of shareholders hereinafter abbreviated as GMS: • Bagi emiten atau perusahaan publik berbentuk badan hukum perseroan terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka; dan For an issuer or a public company in the form of a limited liability company, it is the GMS as referred to in the financial services authority regulation concerning the planning and organizing of the general meeting of shareholders of a public company; and • Bagi emiten atau perusahaan publik berbentuk badan hukum selain perseroan terbatas adalah organ yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada organ yang melaksanakan fungsi pengurusan dan fungsi pengawasan, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar yang mengatur badan hukum tersebut. 2) For an issuer or public company in the form of a legal entity other than a limited liability company, it is the body that has authority that is not given to any other body that carries out management and supervisory functions, within the limits specified in the legislation and/or articles of association governing the legal entity. .	

Keterangan
DescriptionHALAMAN
PAGE

Laporan tahunan emiten atau perusahaan publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap emiten atau perusahaan publik.

The annual report of issuers or public companies is an important source of information for investors or shareholders as one of the basic considerations in making investment decisions and a means of supervision of issuers or public companies.

Seiring dengan perkembangan pasar modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk menyajikan informasi yang berkualitas, akurat, dan akuntabel melalui laporan tahunan emiten atau perusahaan publik.

Along with the development of the capital market and the increasing need for information disclosure by investors or shareholders, the Board of Directors and the Board of Commissioners are required to present quality, accurate, and accountable information through the annual reports of issuers or public companies.

Laporan tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dan pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Annual reports that are prepared regularly and informatively can provide convenience for investors or shareholders and stakeholders in obtaining the required information.

Surat edaran otoritas jasa keuangan ini merupakan pedoman bagi emiten atau perusahaan publik yang wajib diterapkan dalam menyusun laporan tahunan dan laporan keberlanjutan.

This financial services authority circular is a guideline for issuers or public companies that must be applied in preparing annual reports and sustainability reports.

Bentuk laporan

Report format

Laporan tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan dokumen elektronik.

The annual report is presented in the form of printed and electronic documents.

Laporan tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran a4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik.

The annual report is presented in the form of a printed document, printed on light colored paper, of good quality, a4 size, bound, and can be reproduced with good quality.

Laporan tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami.

The annual report may present information in the form of pictures, graphs, tables, and/or diagrams by including clear titles and/or descriptions, so that they are easy to read and understand.

Laporan tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen elektronik merupakan laporan tahunan yang dikonversi dalam portable document format (pdf).

The annual report presented in the form of an electronic document is the annual report converted into a portable document format (pdf).

Isi laporan tahunan

Annual report contents

Laporan tahunan paling sedikit memuat:

The annual report shall at least contain:

a. Ikhtisar data keuangan penting; Overview of important financial data;	18-26
b. Informasi saham (jika ada); Stock information (if any);	27
c. Laporan Direksi; Report of the Board of Directors;	48-60
d. Laporan Dewan Komisaris; Report of the Board of Commissioners;	40-47
e. Profil emiten atau perusahaan publik; Profile of the issuer or public company;	65-126
f. Analisis dan pembahasan manajemen; Management analysis and discussion;	129-187
g. Tata kelola emiten atau perusahaan publik; Governance of issuers or public companies;	189-405
h. Tanggung jawab sosial dan lingkungan emiten atau perusahaan publik; Social and environmental responsibility of the issuer or public company;	405-413
i. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan Audited annual financial report; and	435-584
j. Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas laporan tahunan. Statement letter of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding their responsibility for the annual report.	62

Uraian isi laporan tahunan

Description of annual report contents

a. Ikhtisar data keuangan penting Ikhtisar data keuangan penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika emiten atau perusahaan publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat: Summary of important financial data Summary of important financial data containing financial information that is presented in the form of a comparison for 3 (three) fiscal years or since starting its business if the issuer or public company has carried out its business activities for less than 3 (three) years, at least containing:	18-26

Keterangan Description	HALAMAN PAGE
• Pendapatan/penjualan; Income/sales;	18
• Laba bruto; Gross profit;	19
• Laba (rugi); Profit (loss);	19
• Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; The amount of profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;	19
• Total laba (rugi) komprehensif; Total comprehensive profit (loss);	19
• Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali; Total comprehensive profit (loss) attributable to owners of the parent entity and non-controlling interests;	19
• Laba (rugi) per saham; Earning (loss) per share;	19
• Jumlah aset; Total assets;	21
• Jumlah liabilitas; Total liabilities;	22
• Jumlah ekuitas; Total equity;	22
• Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset; Ratio of profit (loss) to total assets;	23
• Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas; Ratio of profit (loss) to equity;	23
• Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/penjualan; Ratio of profit (loss) to revenue/sales;	23
• Rasio lancar; Current ratio;	23
• Rasio liabilitas terhadap ekuitas; Ratio of liabilities to equity;	23
• Rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan Ratio of liabilities to total assets; and	23
• Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan emiten atau perusahaan publik dan jenis industrinya. Other information and financial ratios relevant to the issuer or public company and the type of industry.	23
b. Informasi saham Informasi saham bagi perusahaan terbuka paling sedikit memuat: Stock information Stock information for a public company shall at least contain:	27-28
• Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: Shares that have been issued for each quarterly period presented in the form of a comparison for the last 2 (two) fiscal years, at least containing:	27-28
a. Jumlah saham yang beredar; Number of shares outstanding;	27-28
b. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; Market capitalization based on the price on the stock exchange where the shares are listed;	27-28
c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada bursa efek tempat saham dicatatkan; dan The highest, lowest, and closing share prices based on prices on the stock exchange where the shares are listed; and	27-28
d. Volume perdagangan pada bursa efek tempat saham dicatatkan. Trading volume on the stock exchange where the shares are listed.	27-28
Informasi dalam huruf b), huruf c) dan huruf d) hanya diungkapkan jika sahamnya tercatat di bursa efek; Information in letter b), letter c) and letter d) is only disclosed if the shares are listed on a stock exchange;	27-28
Dalam hal terjadi aksi korporasi yang menyebabkan terjadinya perubahan pada saham, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, perubahan nilai nominal saham, penerbitan efek konversi, serta penambahan dan pengurangan modal, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai: In the event of a corporate actions that causes changes in shares, such as stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, changes in the nominal value of shares, issuance of conversion securities, as well as capital additions and deductions, stock information as referred to in number 1) shall be added with at least an explanation regarding:	27-28

Keterangan Description	HALAMAN PAGE
a. Tanggal pelaksanaan aksi korporasi; The date of implementation of the corporate action;	
b. Rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, jumlah efek konversi yang diterbitkan, dan perubahan nilai nominal saham; The ratio of stock splits, reverse stock, stock dividends, bonus shares, the number of convertible securities issued, and changes in the nominal value of shares;	27-28
c. Jumlah saham beredar sebelum dan sesudah aksi korporasi; The number of outstanding shares before and after the corporate action;	
d. Jumlah efek konversi yang dilaksanakan (jika ada); dan The number of convertible securities exercised (if any); and	
e. Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi; The share price before and after the corporate action;	
Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, dijelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut; dan In the event of a temporary suspension of share trading (suspension) and/or delisting of shares in the fiscal year, the reasons for the suspension and/or delisting of shares shall be explained; and	27-28
Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (suspension) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan/atau proses pembatalan pencatatan saham (delisting) masih berlangsung hingga akhir periode laporan tahunan, dijelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau pembatalan pencatatan saham (delisting) tersebut. In the event that the temporary suspension of share trading as referred to in number 3) and/or the delisting process is still ongoing until the end of the annual report period, it explains the actions taken to resolve the temporary suspension of share trading and/or cancellation of the share listing (delisting).	27-28
c. Laporan Direksi Board of Directors' report	48-60
Laporan Direksi paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Directors' report shall at least contain a brief description of:	
a. Kinerja emiten atau perusahaan publik, paling sedikit memuat: Performance of the issuer or public company, at least containing:	
• Strategi dan kebijakan strategis emiten atau perusahaan publik; Strategy and strategic policies of the issuer or public company;	51-52
• Peranan Direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis emiten atau perusahaan publik; Role of the Board of Directors in formulating strategies and strategic policies of issuers or public companies;	52
• Proses yang dilakukan Direksi untuk memastikan implementasi strategi emiten atau perusahaan publik; Process carried out by the Board of Directors to ensure the implementation of the issuer's or public company's strategy;	52-53
• Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan emiten atau perusahaan publik; dan Comparison between the results achieved and those targeted by the issuer or public company; and	55
• Kendala yang dihadapi emiten atau perusahaan publik; Obstacles faced by issuers or public companies;	56
b. Gambaran tentang prospek usaha emiten atau perusahaan publik; dan Description of the business prospects of the issuer or public company; and	56-57
c. Penerapan tata kelola emiten atau perusahaan publik. Implementation of the governance of issuers or public companies.	57-58
d. Laporan Dewan Komisaris Board of Commissioners' report	40-49
Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The Board of Commissioners' report shall at least contain a brief description of:	
a. Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan emiten atau perusahaan publik, termasuk pengawasan Dewan Komisaris dalam perumusan dan implementasi strategi emiten atau perusahaan publik yang dilakukan oleh Direksi; Evaluation of the performance of the Board of Directors regarding the management of issuers or public companies, including the supervision of the Board of Commissioners in the formulation and implementation of strategies for issuers or public companies carried out by the Board of Directors;	43-44
b. Pandangan atas prospek usaha emiten atau perusahaan publik yang disusun oleh Direksi; dan Views on the business prospects of the issuer or public company prepared by the Board of Directors; and	44
c. Pandangan atas penerapan tata kelola emiten atau perusahaan publik. Views on the implementation of governance of the issuer or public company.	45
Profil emiten atau perusahaan publik paling sedikit memuat informasi: The profile of the issuer or public company contains at least the following information:	65-126
a. Nama emiten atau perusahaan publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku; Name of the issuer or public company, including if there is a change in name, the reason for the change, and the effective date of the name change in the fiscal year;	66
b. Akses terhadap emiten atau perusahaan publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai emiten atau perusahaan publik, meliputi: Access to issuers or public companies including branch offices or representative offices that enable the public to obtain information about issuers or public companies, including:	67

	Keterangan Description	HALAMAN PAGE
	• Alamat; Address;	67
	• Nomor telepon; Telephone number;	67
	• Alamat surat elektronik; dan E-mail address; and	67
	• Alamat situs web; Website address;	67
c.	Riwayat singkat emiten atau perusahaan publik; Brief history of the issuer or public company;	68-69
d.	Visi dan misi emiten atau perusahaan publik serta budaya perusahaan (<i>corporate culture</i>) atau nilai-nilai perusahaan; Vision and mission of the issuer or public company as well as the corporate culture or corporate values;	75-76
e.	Kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan; Business activities according to the latest articles of association, business activities carried out in the fiscal year, as well as types of goods and/or services produced;	77-80
f.	Wilayah operasional emiten atau perusahaan publik; wilayah operasional merupakan wilayah atau daerah pelaksanaan kegiatan operasional atau jangkauan dari kegiatan operasional perusahaan. Operational area of the issuer or public company; operational area is the area or area for the implementation of operational activities or the range of the company's operational activities.	82-83
g.	Struktur organisasi emiten atau perusahaan publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi termasuk komite di bawah Direksi (jika ada) dan komite di bawah Dewan Komisaris, disertai dengan nama dan jabatan; Organizational structure of the issuer or public company in the form of a chart, at least up to the structure of 1 (one) level below the Board of Directors including committees under the Board of Directors (if any) and committees under the Board of Commissioners, accompanied by names and positions;	86-87
h.	Daftar keanggotaan asosiasi industri baik dalam skala nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penerapan keuangan berkelanjutan; List of industry association memberships both on a national and international scale related to the implementation of sustainable finance;	84
i.	Profil Direksi, paling sedikit memuat: Directors' profile, at least containing:	94-99
	• Nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab; Name and position in accordance with the duties and responsibilities;	95, 97, 99
	• Foto terbaru; Recent photograph;	95, 96, 99
	• Usia; Age;	94, 96, 98
	• Kewarganegaraan; Nationality;	95, 97, 99
	• Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; Education history and/or certification;	95, 97, 99
	• Riwayat jabatan, meliputi informasi: Position history, including information on:	95, 97, 99
j.	Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Direksi pada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan; The legal basis for appointment as a member of the Board of Directors of the issuer or public company concerned;	95, 97, 99
k.	Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan Concurrent positions, either as a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the issuer or public company. In the event that a member of the Board of Directors does not have concurrent positions, then this is disclosed; and	95, 97, 99
l.	Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik; Work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company;	95, 97, 99
	• Hubungan afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi. Dalam hal anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, maka emiten atau perusahaan publik mengungkapkan hal tersebut; dan Affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, majority and controlling shareholders, either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties. In the event that a member of the Board of Directors has no affiliation, the issuer or public company shall disclose this matter; and	95, 97, 99
	• Perubahan komposisi anggota Direksi dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; Changes in the composition of the members of the Board of Directors and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Directors, this matter shall be disclosed;	93
a.	Profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: Profile of the Board of Commissioners, at least containing:	90-91
	• Nama dan jabatan; Name and position;	91
	• Foto terbaru; Recent photograph;	91

Keterangan Description	HALAMAN PAGE
• Usia; Age;	91
• Kewarganegaraan; Nationality;	91
• Riwayat pendidikan dan/atau sertifikasi; Education history and/or certification;	91
• Riwayat jabatan, meliputi informasi: Position history, including information on:	91
a. Dasar hukum pengangkatan sebagai anggota Dewan Komisaris; Legal basis for appointment as member of the Board of Commissioners;	91
b. Dasar hukum pengangkatan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan komisaris independen pada emiten atau perusahaan publik yang bersangkutan; Legal basis for the first appointment as a member of the Board of Commissioners who is an independent commissioner of the issuer or public company concerned;	91
c. Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member as well as other positions both inside and outside the issuer or public company. In the event that a member of the Board of Commissioners does not have concurrent positions, then this is disclosed; and	91
d. Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik; Work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company;	91
• Hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham utama, dan pengendali baik langsung maupun tidak langsung sampai kepada pemilik individu, meliputi nama pihak yang terafiliasi; dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan afiliasi, maka emiten atau perusahaan publik mengungkapkan hal tersebut; Affiliation with other members of the Board of Commissioners, major shareholders, and controllers either directly or indirectly to individual owners, including names of affiliated parties; in the event that a member of the Board of Commissioners has no affiliation, the issuer or public company shall disclose this matter;	91
• Pernyataan independensi komisaris independen dalam hal komisaris independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode; dan Statement of independence of the independent commissioner in the event that the independent commissioner has served more than 2 (two) terms; and	91
• Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya. Dalam hal tidak terdapat perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; Changes in the composition of the members of the Board of Commissioners and the reasons for the changes. In the event that there is no change in the composition of the members of the Board of Commissioners, this matter shall be disclosed;	89
Dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan, susunan yang dicantumkan dalam laporan tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya; In the event that there is a change in the composition of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners that occurs after the fiscal year ends up to the deadline for submitting the annual report, the composition included in the annual report is the last and previous composition of the members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners;	93
Jumlah karyawan menurut jenis kelamin, jabatan, usia, tingkat pendidikan, dan status ketenagakerjaan (tetap/kontrak) dalam tahun buku; pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Number of employees by gender, position, age, education level, and employment status (permanent/contracted) in the fiscal year; disclosure of information can be presented in tabular form.	102-108
Nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada awal dan akhir tahun buku, yang terdiri dari informasi mengenai: Names of shareholders and percentage of ownership at the beginning and end of the fiscal year, which consists of information regarding:	111-112
a. Pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham emiten atau perusahaan publik; Shareholders who own 5% (five percent) or more shares of the issuer or public company;	112
b. Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham emiten atau perusahaan publik. Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; dan Members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners who own shares of the issuer or public company. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not own shares, then this matter is disclosed; and	113
c. Kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham emiten atau perusahaan publik; Community shareholder group, namely the group of shareholders who each own less than 5% (five percent) of the shares of the issuer or public company;	112
Informasi di atas dapat disajikan dalam bentuk tabel. The above information can be presented in tabular form.	
Persentase kepemilikan tidak langsung atas saham emiten atau perusahaan publik oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris pada awal dan akhir tahun buku, termasuk informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan kepemilikan tidak langsung anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; The percentage of indirect ownership of the shares of the issuer or public company by members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners at the beginning and end of the fiscal year, including information on shareholders registered in the shareholder register for the benefit of indirect ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners;	113

Keterangan Description	HALAMAN PAGE
Dalam hal seluruh anggota Direksi dan/atau seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan tidak langsung atas saham emiten atau perusahaan publik, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that all members of the Board of Directors and/or all members of the Board of Commissioners do not have indirect ownership of the shares of the issuer or public company, this matter shall be disclosed.	
Jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi: Number of shareholders and percentage of ownership at the end of the fiscal year based on classification:	112
a. Kepemilikan institusi lokal; Ownership in local institutions;	114
b. Kepemilikan institusi asing; Ownership in foreign institutions;	114
c. Kepemilikan individu lokal; dan Local individual ownership; and	114
d. Kepemilikan individu asing; Foreign individual ownership;	114
Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali emiten atau perusahaan publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan; Information regarding the majority and controlling shareholders of the issuer or public company, either directly or indirectly, up to the individual owner, which is presented in the form of a schematic or chart;	119
Nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana emiten atau perusahaan publik memiliki pengendalian bersama entitas (jika ada), beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama; Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut. The name of the subsidiary, associate, joint venture company where the issuer or public company has joint control of the entity (if any), along with the percentage of share ownership, line of business, total assets, and operating status of the subsidiary, associated company, joint venture company; For a subsidiary, information about the address of the subsidiary is added.	115
Kronologis pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama bursa efek dimana saham emiten atau perusahaan publik dicatatkan, termasuk pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, pelaksanaan efek konversi, pelaksanaan penambahan dan pengurangan modal (jika ada); Chronology of share listing, number of shares, nominal value, and offering price from the beginning of listing to the end of the fiscal year as well as the name of the stock exchange where the shares of the issuer or public company are listed, including stock splits, reverse stock, dividends shares, bonus shares, and changes in the nominal value of shares, implementation of conversion effects, implementation of capital additions and subtractions (if any);	120
Informasi pencatatan efek lainnya selain efek sebagaimana dimaksud pada angka 18), yang belum jatuh tempo pada tahun buku paling sedikit memuat nama efek, tahun penerbitan, tingkat suku bunga/imbal hasil, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat efek (jika ada); Other securities listing information other than the securities as referred to in number 18), which have not yet matured in the fiscal year, at least contain the name of the securities, year of issue, interest rate/yield, maturity date, offering value, and securities rating (if any);	121
Informasi penggunaan jasa akuntan publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP) beserta jaringan/asosiasi/aliansinya meliputi: 20) Information on the use of a public accountant (Ap) and a public accounting firm (KAP) services and their networks/associations/alliances include:	122
a. Nama dan alamat; Name and address;	122
b. Periode penugasan; Assignment period;	122
c. Informasi jasa audit dan/atau non audit yang diberikan; Information on audit and/or non-audit services provided;	122
d. Biaya jasa (fee) audit dan/atau non audit untuk masing-masing penugasan yang diberikan selama tahun buku; dan Audit and/or non-audit fees for each assignment given during the fiscal year; and	122
e. Dalam hal AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya, yang ditunjuk tidak memberikan jasa non audit, maka diungkapkan mengenai informasi tersebut; dan In the event that AP and KAP and their network/association/alliance, which are appointed do not provide non-audit services, then the information is disclosed; and	122
Pengungkapan informasi penggunaan jasa AP dan KAP beserta jaringan/asosiasi/aliansinya dapat disajikan dalam bentuk tabel. Disclosure of information on the use of AP and KAP services and their networks/associations/alliances can be presented in tabular form.	
Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal selain AP dan KAP Name and address of capital market supporting institutions and/or professionals other than AP and KAP	123
f. Analisis dan pembahasan manajemen Management analysis and discussion	129-187
Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat: Management analysis and discussion contains analysis and discussion of financial statements and other important information with an emphasis on material changes that occurred in the fiscal year, which at least contains:	
Tinjauan operasi per segmen usaha sesuai dengan jenis industri emiten atau perusahaan publik, paling sedikit mengenai: A review of operations per business segment according to the type of industry of the issuer or public company, at least regarding:	135-138
a. Produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya; Production, which includes the process, capacity, and development;	135-138

Keterangan Description	HALAMAN PAGE
b. Pendapatan/penjualan; dan B) income/sales; and	135-138
c. Profitabilitas; Profitability;	135-138
Kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai: Comprehensive financial performance which includes a comparison of financial performance in the last 2 (two) fiscal years, an explanation of the causes of the changes and the impact of these changes, at least regarding:	139-157
a. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset; Current assets, non-current assets, and total assets;	139, 140-145
b. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas; Current liabilities, long term liabilities, and total liabilities;	145-148
c. Ekuitas; Equity;	148-149
d. Pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan Income/sales, expenses, profit (loss), other comprehensive income, and total comprehensive profit (loss); and	150-153
e. Arus kas; Cash flows;	154-157
Kemampuan membayar utang atau kewajiban dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; Ability to pay debts or obligations by presenting the relevant ratio calculations;	159-160
Tingkat kolektibilitas piutang emiten atau perusahaan publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan; Collectibility level of the issuer's or public company's receivables by presenting the relevant ratio calculations;	160-161
Struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud; Capital structure and management policies on the capital structure with the basis for determining the said policy;	162-163
Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit memuat: Discussion of material ties for capital goods investment with an explanation that at least contains:	164
a. Tujuan dari ikatan tersebut; The purpose of the bond;	164
b. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut; The expected source of funds to fulfill the commitment;	164
c. Mata uang yang menjadi denominasi; dan The currency in which it is denominated; and	164
d. Langkah yang direncanakan emiten atau perusahaan publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait; Steps that are planned by the issuer or public company to protect the risk from the related foreign currency position;	164
Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit memuat: Discussion of capital goods investments realized in the last fiscal year, at least contains:	165
a. Jenis investasi barang modal; Type of capital goods investment;	165
b. Tujuan investasi barang modal; dan The purpose of capital goods investment; and	165
c. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan; The total of capital goods investments;	165
Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada); Information and material facts occurring after the date of the accountant's report (if any);	166
Prospek usaha dari emiten atau perusahaan publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya; The business prospects of the issuer or public company are related to the conditions of the industry, the general economy and the international market accompanied by quantitative supporting data from reliable data sources;	184
Perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai: Comparison between the target/projection at the beginning of the fiscal year with the results achieved (realization), regarding:	168
a. Pendapatan/penjualan; Income/sales;	168
b. Laba (rugi); Profit (loss);	168
c. Struktur modal (capital structure); atau Capital structure; or	168
d. Hal lainnya yang dianggap penting bagi emiten atau perusahaan publik; Other matters deemed important to the issuer or public company;	168
Target/proyeksi yang ingin dicapai emiten atau perusahaan publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai: 11) Targets/projections to be achieved by the issuer or public company for the next 1 (one) year, regarding:	169
a. Pendapatan/penjualan; Income/sales;	169
b. Laba (rugi); Profit (loss);	169
c. Struktur modal (capital structure); Capital structure;	169

Keterangan Description	HALAMAN PAGE
d. Kebijakan dividen; atau Dividend policy; or	169
e. Hal lainnya yang dianggap penting bagi emiten atau perusahaan publik; Other matters deemed important to the issuer or public company;	169
Aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa emiten atau perusahaan publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar; Marketing aspects of the goods and/or services of the issuer or public company, at least regarding the marketing strategy and market share;	185
Uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit: Description of dividends for the last 2 (two) fiscal years, at least:	170
a. Kebijakan dividen, antara lain memuat informasi persentase jumlah dividen yang dibagikan terhadap laba bersih; Dividend policy, which includes information on the percentage of dividends distributed to net income;	170
b. Tanggal pembayaran dividen kas dan/atau tanggal distribusi dividen non kas; Date of payment of cash dividends and/or date of distribution of non-cash dividends;	170
c. Jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan The amount of dividends per share (cash and/or non-cash); and	170
d. Jumlah dividen per tahun yang dibayar; The amount of dividends paid annually;	170
Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. Dalam hal emiten atau perusahaan publik tidak membagikan dividen dalam 2 (dua) tahun terakhir, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. Disclosure of information can be presented in tabular form. In the event that the issuer or public company does not distribute dividends in the last 2 (two) years, this matter shall be disclosed.	
Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, dengan ketentuan: 14) Realization of the use of proceeds from the public offering, provided that:	171-172
a. Dalam hal selama tahun buku, emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan A) in the event that during the fiscal year, the issuer has an obligation to submit a report on the realization of the use of funds, then the realization of the cumulative use of the proceeds from the public offering shall be disclosed until the end of the fiscal year; and	171-172
b. Dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, maka emiten menjelaskan perubahan tersebut; In the event that there is a change in the use of funds as regulated in the financial services authority regulation regarding the report on the realization of the use of the proceeds from the public offering, the issuer shall explain the change;	171-172
Informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/modal, transaksi material, transaksi afiliasi, dan transaksi benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, paling sedikit memuat: Material information (if any), regarding investment, expansion, divestment, business merger/consolidation, acquisition, debt/capital restructuring, material transactions, affiliated transactions, and conflict of interest transactions, which occurred during the fiscal year, at least containing :	173-183
a. Tanggal, nilai, dan objek transaksi; Date, value, and object of the transaction;	173-183
b. Nama pihak yang melakukan transaksi; Name of the party conducting the transaction;	173-183
c. Sifat hubungan afiliasi (jika ada); Nature of the affiliation relationship (if any);	173-183
d. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi; Explanation of the fairness of the transaction;	173-183
e. Pemenuhan ketentuan terkait; dan Compliance with related provisions; and	173-183
f. Dalam hal terdapat hubungan afiliasi, selain mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a) sampai dengan huruf e), emiten atau perusahaan publik juga mengungkapkan informasi: In the event that there is an affiliation relationship, apart from disclosing the information as referred to in letter a) to letter e), the issuer or public company also discloses information:	174-175
Pernyataan Direksi bahwa transaksi afiliasi telah melalui prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle); dan (1) A statement from the Board of Directors that the affiliate transaction has gone through adequate procedures to ensure that the affiliate transaction is carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle; and	175
Peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum antara lain dilakukan dengan memenuhi prinsip transaksi yang wajar (armslength principle); (2) The role of the Board of Commissioners and the audit committee in carrying out adequate procedures to ensure that affiliated transactions are carried out in accordance with generally accepted business practices, by complying with the arms-length principle;	175
Untuk transaksi afiliasi atau transaksi material yang merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan, ditambahkan penjelasan bahwa transaksi afiliasi atau transaksi material tersebut merupakan kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan; G) for affiliated transactions or material transactions which are business activities carried out to generate business income and are carried out regularly, repeatedly, and/or continuously, an explanation is added that the affiliated transactions or material transactions are business activities carried out to generate operating income. And run regularly, repeatedly, and/or continuously;	175-176

Keterangan
Description
HALAMAN
PAGE

Dalam hal transaksi afiliasi atau transaksi material dimaksud telah diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan, ditambahkan informasi mengenai rujukan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan tersebut. In the event that the affiliated transactions or material transactions referred to have been disclosed in the annual financial statements, additional information regarding the disclosure reference in the annual financial statements is added.	
Untuk pengungkapan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang merupakan hasil pelaksanaan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan yang telah disetujui pemegang saham independen, ditambahkan informasi mengenai tanggal pelaksanaan RUPS yang menyetujui transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan tersebut; H) for disclosure of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions resulting from the implementation of affiliated transactions and/or conflict of interest transactions that have been approved by independent shareholders, additional information regarding the date of the GMS which approved the affiliated transactions and/or conflict of interest transactions is added;	176
Dalam hal tidak terdapat transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; In the event that there is no affiliated transaction and/or conflict of interest transaction, then this shall be disclosed;	
Perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap emiten atau perusahaan publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan Changes in the provisions of laws and regulations that have a significant effect on issuers or public companies and their impact on financial statements (if any); and	186
Perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada). Changes in accounting policies, reasons and impact on financial statements (if any).	186
Tata kelola emiten atau perusahaan publik Issuer or public company governance	190-405
Tata kelola emiten atau perusahaan publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai: The governance of the issuer or public company shall at least contain a brief description of:	
a. RUPS, paling sedikit memuat: GMS, at least contains:	205-221
• Informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku meliputi: Information regarding the resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year prior to the fiscal year include:	208-221
Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang direalisasikan pada tahun buku; dan Resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year realized in the fiscal year; and	208-213
Keputusan RUPS pada tahun buku dan 1 (satu) tahun sebelum tahun buku yang belum direalisasikan beserta alasan belum direalisasikan; Resolutions of the GMS in the fiscal year and 1 (one) year before the fiscal year that have not been realized and the reasons for not realizing them;	213-221
b. Dalam hal emiten atau perusahaan publik menggunakan pihak independen dalam pelaksanaan RUPS untuk melakukan perhitungan suara, maka diungkapkan mengenai hal tersebut; In the event that the issuer or public company uses an independent party in the conduct of the GMS to calculate the votes, then this matter shall be disclosed;	209, 213
Direksi, paling sedikit memuat: The Board of Directors, at least contains:	239-250
Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi; Duties and responsibilities of each member of the Board of Directors;	241-242
a. Informasi mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi diuraikan dan dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information regarding the duties and responsibilities of each member of the Board of Directors is described and can be presented in tabular form.	242-245
b. Pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Direksi; Statement that the Board of Directors has guidelines or charter for the Board of Directors;	239-240
c. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Directors, meetings of the Board of Directors with the Board of Commissioners, and the level of attendance of members of the Board of Directors in the meeting including attendance at the GMS;	261-268, 255-261
d. Informasi tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat Direksi, rapat Direksi bersama Dewan Komisaris, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information on the level of attendance of members of the Board of Directors in Board of Directors meetings, Board of Directors meetings with the Board of Commissioners, or GMS can be presented in the form of a table.	
e. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi: Training and/or competency development of members of the Board of Directors:	246
• Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Direksi, termasuk program orientasi bagi anggota Direksi yang baru diangkat (jika ada); dan Policies for training and/or improving the competence of members of the Board of Directors, including an orientation program for newly appointed members of the Board of Directors (if any); and	246
• Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Direksi dalam tahun buku (jika ada); Training and/or competency improvement attended by members of the Board of Directors in the fiscal year (if any);	246
f. Penilaian Direksi terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi pada tahun buku paling sedikit memuat: The Board of Directors' assessment of the performance of the committees that support the implementation of the Board of Directors' duties for the fiscal year shall at least contain:	249, 250
• Prosedur penilaian kinerja; dan Performance appraisal procedures; and	249, 250
• Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan The criteria used are performance achievements during the fiscal year, are competence and attendance at meetings; and	249, 250

Keterangan Description	HALAMAN PAGE
g. Dalam hal emiten atau perusahaan publik tidak memiliki komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi, maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that the issuer or public company does not have a committee that supports the implementation of the duties of the Board of Directors, this matter shall be disclosed.	
Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: The Board of Commissioners, at least contains:	222-237
a. Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris; Duties and responsibilities of the Board of Commissioners;	226-228
b. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (<i>charter</i>) Dewan Komisaris; A statement that the Board of Commissioners has guidelines or charter for the Board of Commissioners;	222-223
c. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut termasuk kehadiran dalam RUPS; Policies and implementation of the frequency of meetings of the Board of Commissioners, meetings of the Board of Commissioners with the Board of Directors and the level of attendance of members of the Board of Commissioners in these meetings including attendance at the GMS;	251-261
Informasi tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris bersama Direksi, atau RUPS dapat disajikan dalam bentuk tabel. Information on the level of attendance of members of the Board of Commissioners at the meeting of the Board of Commissioners, the meeting of the Board of Commissioners with the Board of Directors, or the GMS can be presented in tabular form.	
d. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris: Training and/or competency improvement of members of the Board of Commissioners:	230-231
• Kebijakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi anggota Dewan Komisaris, termasuk program orientasi bagi anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat (jika ada); dan Policy on competency training and/or development of members of the Board of Commissioners, including orientation programs for newly appointed members of the Board of Commissioners (if any); and	230
• Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti anggota Dewan Komisaris dalam tahun buku (jika ada); Competency training and/or development attended by members of the Board of Commissioners in the fiscal year (if any);	231
e. Penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris serta masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: Performance appraisal of the Board of Directors and the Board of Commissioners as well as each member of the Board of Directors and the Board of Commissioners, at least containing:	276-279
• Prosedur pelaksanaan penilaian kinerja; Procedures for implementing performance appraisals;	276
• Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; dan Criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings; and	277
• Pihak yang melakukan penilaian; dan Party conducting the assessment; and	277
f. Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris pada tahun buku meliputi: Board of Commissioners' assessment of the performance of the committees that support the implementation of the duties of the Board of Commissioners in the fiscal year includes:	236-237
• Prosedur penilaian kinerja; dan Performance appraisal procedures; and	236
• Kriteria yang digunakan seperti capaian kinerja selama tahun buku, kompetensi dan kehadiran dalam rapat; The criteria used are performance achievements during the fiscal year, competency and attendance at meetings;	236-237
Nominasi dan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: The nomination and remuneration of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall at least contain:	
a. Prosedur nominasi, meliputi uraian singkat mengenai kebijakan dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Nomination procedure, including a brief description of the policies and process for nomination of members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners; and	272-273
b. Prosedur dan pelaksanaan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris, antara lain: Procedures and implementation of remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners, among others:	
• Prosedur penetapan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris; Procedures for determining remuneration for the Board of Directors and the Board of Commissioners;	273-274
• Struktur remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris seperti, gaji, tunjangan, tantiem/bonus dan lainnya; dan The remuneration structure of the Board of Directors and the Board of Commissioners such as salary, allowances, tantiem/bonus and others; and	274
• Besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel. The amount of remuneration for each member of the Board of Directors and member of the Board of Commissioners; disclosure of information can be presented in tabular form.	275

Keterangan
Description
HALAMAN
PAGE

Dewan pengawas syariah, bagi emiten atau perusahaan publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat: The sharia supervisory board, for issuers or public companies that carry out business activities based on sharia principles as stated in the articles of association, shall at least contain:		
a. Nama; Name;		N/A
b. Dasar hukum pengangkatan dewan pengawas syariah; Legal basis for the appointment of the sharia supervisory board;		
c. Periode penugasan dewan pengawas syariah; Period of assignment of the sharia supervisory board;		
d. Tugas dan tanggung jawab dewan pengawas syariah; dan Duties and responsibilities of the sharia supervisory board; and		
e. Frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal terhadap emiten atau perusahaan publik; Frequency and method of providing advice and suggestions as well as supervising the fulfillment of sharia principles in the capital market to issuers or public companies;		
Komite audit, paling sedikit memuat: The audit committee, at least contains:		284-297
a. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; Name and position in committee membership;		91, 287
b. Usia; Age;		91, 287
c. Kewarganegaraan; Nationality;		91, 287
d. Riwayat pendidikan; Educational history;		91, 287
e. Riwayat jabatan, meliputi informasi: Position history, including information on:		91, 287
• Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; Legal basis for appointment as committee member;		91, 287
• Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of the committee as well as other positions (if any); and		91, 287
• Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik; Work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company;		91, 287
f. Periode dan masa jabatan anggota komite audit; Period and term of office of the audit committee members;		91, 287
g. Pernyataan independensi komite audit; Statement of independence of the audit committee;		287-288
h. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); Training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any);		289
i. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite audit dan tingkat kehadiran anggota komite audit dalam rapat tersebut; dan Policies and implementation of the frequency of audit committee meetings and the level of attendance of audit committee members in those meetings; and		290-292
j. Pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) komite audit; The implementation of the audit committee's activities for the fiscal year in accordance with the guidelines or charter of the audit committee;		292-297
Komite atau fungsi nominasi dan remunerasi emiten atau perusahaan publik, paling sedikit memuat: The nomination and remuneration committee or function of the issuer or public company, at least containing:		310-323
a. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; Name and position in committee membership;		91, 311-312
b. Usia; Age;		91, 311-312
c. Kewarganegaraan; Nationality;		91, 311-312
d. Riwayat pendidikan; Educational history;		91, 311-312
e. Riwayat jabatan, meliputi informasi: Position history, including information on:		91, 311-312
• Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; Legal basis for appointment as committee member;		91, 311-312
• Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and		91, 311-312
• Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik; Work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company;		91, 311-312
f. Periode dan masa jabatan anggota komite; Period and term of office of the committee members;		91, 311-312

Keterangan Description	HALAMAN PAGE
g. Pernyataan independensi komite; Statement of committee independence;	312
h. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); Training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any);	313-314
i. Uraian tugas dan tanggung jawab; Description of duties and responsibilities;	313
j. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter); A statement that it has a guideline or charter;	310
k. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota dalam rapat tersebut; Policies and implementation of the frequency of meetings and the level of attendance of members at the meeting;	314-315
l. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan pada tahun buku; dan Brief description of the implementation of activities in the fiscal year; and	318-319
m. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, emiten atau perusahaan publik cukup mengungkapkan informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf i) sampai dengan huruf l) dan mengungkapkan: In the event that no nomination and remuneration committee is formed, the issuer or public company is sufficient to disclose the information as referred to in letter i) to letter l) and disclose:	
- Alasan tidak dibentuknya komite; dan Reasons for not forming the committee; and - Pihak yang melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi; The party carrying out the nomination and remuneration function;	
Komite lain yang dimiliki emiten atau perusahaan publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi (jika ada) dan/atau komite yang mendukung fungsi dan tugas Dewan Komisaris, paling sedikit memuat: Other committees owned by issuers or public companies in order to support the functions and duties of the Board of Directors (if any) and/or committees that support the functions and duties of the Board of Commissioners, at least containing:	298-309, 319-323
a. Nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite; Name and position in committee membership;	91, 300
b. Usia; Age;	91, 300
c. Riwayat pendidikan; Educational history;	91, 300
d. Riwayat jabatan, meliputi informasi: Position history, including information on:	91, 300
Dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite; Legal basis for appointment as committee member;	91, 300
Rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan Concurrent positions, either as a member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or committee member and other positions (if any); and	91, 300
Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik; Work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company;	91, 300
e. Periode dan masa jabatan anggota komite; Period and term of office of the committee members;	91, 300
f. Pernyataan independensi komite; Statement of committee independence;	301
g. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan Training and/or competency improvement that have been followed in the fiscal year (if any); and	302-303
h. Uraian tugas dan tanggung jawab; Description of duties and responsibilities;	301-302, 321-323
i. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite; A statement that the committee has had guidelines or charters;	298
j. Kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut; dan Policies and implementation of the frequency of committee meetings and the level of attendance of committee members at the meeting; and	303-305
k. Uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku; A brief description of the committee's activities for the fiscal year;	305-309, 323
Sekretaris perusahaan, paling sedikit memuat: Corporate secretary, at least contains:	324-327
a. Nama; Name;	325
b. Domisili; Domicile;	325
c. Riwayat jabatan, meliputi: Position history, including:	325
Dasar hukum penunjukan sebagai sekretaris perusahaan; dan Legal basis for appointment as company secretary; and	325
Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik; Work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company;	325
d. Riwayat pendidikan; Educational history;	325

Keterangan Description	HALAMAN PAGE
e. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; dan Training and/or competency improvement followed during the fiscal year; and	326
f. Uraian singkat pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku; A brief description of the implementation of the duties of the corporate secretary for the fiscal year;	326-327
Unit audit internal, paling sedikit memuat: Internal audit unit, at least contains:	328-332
a. Nama kepala unit audit internal; Name of the head of the internal audit unit;	328-329
b. Riwayat jabatan, meliputi: Position history, including:	328-329
• Dasar hukum penunjukan sebagai kepala unit audit internal; dan Legal basis for the appointment as head of the internal audit unit; and	328-329
• Pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar emiten atau perusahaan publik; Work experience and period of time both inside and outside the issuer or public company;	328-329
c. Kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada); Qualification or certification as an internal audit profession (if any);	329
d. Pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diikuti dalam tahun buku; Training and/or competency improvement to be followed during the fiscal year;	329-330
e. Struktur dan kedudukan unit audit internal; Structure and position of the internal audit unit;	330-331
f. Uraian tugas dan tanggung jawab; Description of duties and responsibilities;	331
g. Pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) unit audit internal; dan A statement that the internal audit unit has had guidelines or charters; and	331-332
h. Uraian singkat pelaksanaan tugas unit audit internal pada tahun buku termasuk kebijakan dan pelaksanaan frekuensi rapat dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit; A brief description of the implementation of the internal audit unit's duties for the fiscal year including the policy and implementation of the frequency of meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners, and/or audit committee;	332
Uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh emiten atau perusahaan publik, paling sedikit memuat: A description of the internal control system implemented by the issuer or public company, at least containing:	336-338
a. Pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; Financial and operational control, as well as compliance with other laws and regulations;	336-337
b. Tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal; dan Review of the effectiveness of the internal control system; and	338
c. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas kecukupan sistem pengendalian internal; Statement of the Board of Directors and/or Board of Commissioners on the adequacy of the internal control system;	338
Sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh emiten atau perusahaan publik, paling sedikit memuat: The risk management system implemented by the issuer or public company, at least contains:	339-348
a. Gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko emiten atau perusahaan publik; General description of the risk management system of the issuer or public company;	339
b. Jenis risiko dan cara pengelolaannya; Types of risks and how to manage them;	347-348
c. Tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko emiten atau perusahaan publik; dan Review of the effectiveness of the issuer's or public company's risk management system; and	346-347
d. Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris atau komite audit atas kecukupan sistem manajemen risiko; Statement of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners or the audit committee on the adequacy of the risk management system;	347
Perkara hukum yang berdampak material yang dihadapi oleh emiten atau perusahaan publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), paling sedikit memuat: Legal cases that have a material impact faced by issuers or public companies, subsidiaries, members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners (if any), at least contain:	349-351
a. Pokok perkara/gugatan; Subject matter/claim;	349-351
b. Status penyelesaian perkara/gugatan; dan Status of settlement of cases/claims; and	349-351
c. Pengaruhnya terhadap kondisi emiten atau perusahaan publik; Effect on the condition of the issuer or public company;	349-351
Informasi tentang sanksi administratif/sanksi yang dikenakan kepada emiten atau perusahaan publik, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, oleh otoritas jasa keuangan dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada); 14) Information on administrative sanctions/sanctions imposed on issuers or public companies, members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors, by the financial services authority and other authorities for the fiscal year (if any);	352
Informasi mengenai kode etik emiten atau perusahaan publik meliputi: Information regarding the code of ethics of the issuer or public company includes:	358-361
a. Pokok-pokok kode etik; Main points of the code of ethics;	358-359

Keterangan Description	HALAMAN PAGE
b. Bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan Form of socialization of the code of ethics and its enforcement efforts; and	360-361
c. Pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan emiten atau perusahaan publik; A statement that the code of ethics applies to members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and employees of issuers or public companies;	360
Uraian singkat mengenai kebijakan pemberian kompensasi jangka panjang berbasis kinerja kepada manajemen dan/atau karyawan yang dimiliki oleh emiten atau perusahaan publik (jika ada), antara lain berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/msop) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/esop); A brief description of the policy of providing long-term performance-based compensation to management and/or employees owned by the issuer or public company (if any), including the management stock ownership program (msop) and/or program employee stock ownership (esop);	363
Dalam hal pemberian kompensasi berupa program kepemilikan saham oleh manajemen (management stock ownership program/msop) dan/atau program kepemilikan saham oleh karyawan (employee stock ownership program/esop), informasi yang diungkapkan paling sedikit memuat: In terms of providing compensation in the form of a management stock ownership program (msop) and/or an employee stock ownership program (esop), the information disclosed must at least contain:	363
a. Jumlah saham dan/atau opsi; Number of shares and/or options;	363
b. Jangka waktu pelaksanaan; Implementation period;	363
c. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan Requirements for eligible employees and/or management; and	363
d. Harga pelaksanaan atau penentuan harga pelaksanaan; Exercise price or determination of exercise price;	363
Uraian singkat mengenai kebijakan pengungkapan informasi mengenai: A brief description of the information disclosure policy regarding:	363
a. Kepemilikan saham anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan atas saham perusahaan terbuka; dan A) share ownership of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners no later than 3 (three) working days after the occurrence of ownership or any change in ownership of shares of a public company; and	363
b. Pelaksanaan atas kebijakan dimaksud; Implementation of the policy;	363
Uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>) di emiten atau perusahaan publik, paling sedikit memuat: A description of the whistleblowing system at the issuer or public company, at least containing:	373-376
a. Cara penyampaian laporan pelanggaran; Method of submitting a violation report;	374-375
b. Perlindungan bagi pelapor; Protection for whistleblowers;	375-376
c. Penanganan pengaduan; Complaint handling;	376
d. Pihak yang mengelola pengaduan; dan Party managing the complaint; and	374
e. Hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit: Result of complaint handling, at least:	376
• Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan Number of complaints received and processed in the fiscal year; and	376
• Tindak lanjut pengaduan; Follow-up on complaints;	376
Dalam hal emiten atau perusahaan publik tidak memiliki sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing system</i>), maka diungkapkan mengenai hal tersebut. In the event that the issuer or public company does not have a whistleblowing system, this matter is disclosed.	
Uraian mengenai kebijakan anti koRUPSi emiten atau perusahaan publik, paling sedikit memuat: A description of the anti-corruption policy of the issuer or public company, at least containing:	367-370
a. Program dan prosedur yang dilakukan dalam mengatasi praktik koRUPSi, balas jasa (kickbacks), fraud, suap dan/atau gratifikasi dalam emiten atau perusahaan publik; dan Programs and procedures implemented in overcoming corrupt practices, kickbacks, fraud, bribery and/or gratification in issuers or public companies; and	367-370
b. Pelatihan/sosialisasi anti koRUPSi kepada karyawan emiten atau perusahaan publik; Anti-corruption training/socialization to employees of issuers or public companies;	367-370
Dalam hal emiten atau perusahaan publik tidak memiliki kebijakan anti koRUPSi, maka dijelaskan alasan tidak dimilikinya kebijakan dimaksud. In the event that the issuer or public company does not have an anti-corruption policy, the reasons for not having the said policy are explained.	

Keterangan
Description
HALAMAN
PAGE

Penerapan atas pedoman tata kelola perusahaan terbuka bagi emiten yang menerbitkan efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik, meliputi:

Implementation of the public company governance guidelines for issuers issuing equity securities or public companies, including:

- Pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau
A statement regarding the recommendations that have been implemented; and/or
- Penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada).
Explanation of recommendations that have not been implemented, along with reasons and alternative implementations (if any).

Pengungkapan informasi dapat disajikan dalam bentuk tabel.

Disclosure of information can be presented in tabular form.

Tanggung jawab sosial dan lingkungan emiten atau perusahaan publik
Social and environmental responsibility of issuers or public companies

406-411

Informasi yang diungkapkan dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan laporan keberlanjutan (sustainability report) sebagaimana dimaksud dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 51/pojk.03/2017 Tentang penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik, paling sedikit memuat:

The information disclosed in the social and environmental responsibility section is a sustainability report as referred to in the financial services authority regulation number 51/pojk.03/2017 Concerning the implementation of sustainable finance for financial services institutions, issuers, and public companies, at least includes:

- Penjelasan strategi keberlanjutan;
Explanation of the sustainability strategy;
- Ikhtisar aspek keberlanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup);
Overview of sustainability aspects (economic, social, and environmental);
- Profil singkat emiten atau perusahaan publik;
Brief profile of the issuer or public company;
- Penjelasan Direksi;
Explanation of the Board of Directors;
- Tata kelola keberlanjutan;
Sustainability governance;
- Kinerja keberlanjutan;
Sustainability performance;
- Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada;
Written verification from an independent party, if any;
- Lembar umpan balik (feedback) untuk pembaca, jika ada; dan
Feedback sheet for readers, if any; and

Tanggapan emiten atau perusahaan publik terhadap umpan balik laporan tahun sebelumnya;
The response of the issuer or public company to the previous year's report feedback;

Laporan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada angka 1), harus disusun sesuai pedoman teknis penyusunan laporan keberlanjutan (sustainability report) bagi emiten dan perusahaan publik sebagaimana tercantum dalam lampiran ii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran otoritas jasa keuangan ini;

The sustainability report as referred to in number 1) must be prepared in accordance with the technical guidelines for the preparation of a sustainability report for issuers and public companies as contained in appendix ii which is an integral part of this financial services authority circular letter;

Informasi laporan keberlanjutan (sustainability report) pada angka 1) dapat:

Information on the sustainability report in number 1) can:

- Diungkapkan pada bagian lain yang relevan di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan, seperti penjelasan Direksi terkait laporan keberlanjutan diungkapkan dalam bagian terkait laporan Direksi; dan/atau
Disclosed in other relevant sections outside the social and environmental responsibility section, such as the directors' explanation regarding the sustainability report disclosed in the section related to the directors' report; and/or
- Merujuk pada bagian lain di luar bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan tetap mengacu pada pedoman teknis penyusunan laporan keberlanjutan (sustainability report) bagi emiten dan perusahaan publik sebagaimana tercantum dalam lampiran ii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran otoritas jasa keuangan ini, seperti profil emiten atau perusahaan publik;
Refers to other sections outside the social and environmental responsibility section by still referring to the technical guidelines for the preparation of sustainability reports for issuers and public companies as listed in appendix ii which is an integral part of this financial services authority circular letter, such as the profile of the issuer or public company;

Laporan keberlanjutan (sustainability report) sebagaimana dimaksud pada angka 1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan namun dapat disajikan secara terpisah dengan laporan tahunan;

The sustainability report as referred to in number 1) is an inseparable part of the annual report but can be presented separately from the annual report;

Dalam hal laporan keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan laporan tahunan, informasi yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan dimaksud harus:

In the event that the sustainability report is presented separately from the annual report, the information disclosed in the sustainability report must:

- Memuat seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1); dan
Contains all the information as referred to in number 1); and
- Disusun sesuai pedoman teknis penyusunan laporan keberlanjutan (sustainability report) bagi emiten dan perusahaan publik sebagaimana tercantum dalam lampiran ii yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran otoritas jasa keuangan ini;
Prepared in accordance with the technical guidelines for the preparation of a sustainability report for issuers and public companies as listed in appendix ii which is an integral part of this financial services authority circular letter;

Keterangan Description	HALAMAN PAGE
Dalam hal laporan keberlanjutan disajikan secara terpisah dengan laporan tahunan, maka dalam bagian tanggung jawab sosial dan lingkungan memuat informasi bahwa informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diungkapkan dalam laporan keberlanjutan yang disajikan secara terpisah dari laporan tahunan; dan In the event that the sustainability report is presented separately from the annual report, then the social and environmental responsibility section contains information that information on social and environmental responsibility has been disclosed in the sustainability report which is presented separately from the annual report; and	
Penyampaian laporan keberlanjutan (sustainability report) yang disajikan secara terpisah dengan laporan tahunan harus disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan. Submission of the sustainability report which is presented separately from the annual report must be submitted together with the annual report.	
Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit Audited annual financial report	430-582
Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam laporan tahunan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di otoritas jasa keuangan. Laporan keuangan tahunan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai laporan berkala perusahaan efek dalam hal emiten merupakan perusahaan efek. The annual financial reports contained in the annual report are prepared in accordance with financial accounting standards in Indonesia and have been audited by a public accountant registered with the financial services authority. The said annual financial report contains a statement regarding the accountability for financial statements as regulated in the financial services authority regulation regarding the Board of Directors' responsibility for financial reports or the laws and regulations in the capital market sector which regulates the periodic reports of securities companies in the event that the issuer is a securities company.	
Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas laporan tahunan surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas laporan tahunan disusun sesuai dengan format surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas laporan tahunan sebagaimana tercantum dalam lampiran i yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat edaran otoritas jasa keuangan ini. Statement letters of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding responsibilities for the annual report statements of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding the responsibilities of the annual report are prepared in accordance with the format of statement letters of members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners regarding responsibilities for the annual report as contained in the appendix i which is an integral part of this financial services authority circular letter.	62

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK**

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

***PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES***

***Consolidated Financial Statements
For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023***

Daftar Isi	Halaman/ <u>Page</u>	Table of Contents
Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Keuangan Konsolidasian Untuk Tahun-tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023		<i>Consolidated Financial Statements For the Years Ended As of December 31, 2024 and 2023</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1	<i>Consolidated Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	3	<i>Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian	4	<i>Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	5	<i>Consolidated Statement of Cash Flows</i>
Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian	6	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>
Laporan Keuangan Tersendiri – Induk Saja		<i>Separate Financial Statements – Parent Only</i>
Laporan Posisi Keuangan (Entitas Induk)	I	<i>Statement of Financial Position (Parent Entity)</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (Entitas Induk)	II	<i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income (Parent Entity)</i>
Laporan Perubahan Ekuitas (Entitas Induk)	III	<i>Statement of Changes in Equity (Parent Entity)</i>
Laporan Arus Kas (Entitas Induk)	IV	<i>Statement of Cash Flows (Parent Entity)</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
DAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
No. SPn-14/PPA/0325**

**DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2024 AND 2023
PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
No. SPn-14/PPA/0325**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

We, the undersigned :

1. Nama / Name :
Alamat Kantor / Office Address :

Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain /
Domicile as stated in ID Card :
Nomor Telepon / Phone Number :
Jabatan / Position :
2. Nama / Name :
Alamat Kantor / Office Address :

Alamat domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain /
Domicile as stated in ID Card :
Nomor Telepon / Phone Number :
Jabatan / Position :

- : Muh. Teguh Wirahadikusumah
: Menara Danareksa Lantai 17,
: Jl. Medan Merdeka Selatan No.14, Jakarta 10110
: Jl. Guru Alip, Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran,
: Jakarta Selatan
: 021-57982222
: Direktur Utama / President Director
- : T Asih Putra Sianturi
: Menara Danareksa Lantai 17,
: Jl. Medan Merdeka Selatan No.14, Jakarta 10110
: Jl. Gondangdia Kecil, Kel. Cikini, Kec. Menteng,
: Jakarta Pusat
: 021-57982222
: Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko /
: Director of Finance and Risk Management

Menyatakan bahwa:

State that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian;
2. Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia;
3. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian telah dimuat secara lengkap dan benar;
4. Laporan keuangan konsolidasian tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
5. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Perusahaan dan Entitas Anak.

1. *We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements;*
2. *The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
3. *All information contained in the consolidated financial statements is complete and correct;*
4. *The consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts; and*
5. *We are responsible for internal control system within the Company and its Subsidiaries.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter has been made truthfully.

Jakarta, 24 Maret 2025 / Jakarta, March 24, 2025

Direktur Utama/
President Director

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/
Director of Finance and Risk Management



(Muh. Teguh Wirahadikusumah)



(T Asih Putra Sianturi)

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Registered Public Accountants

Nomor/Number : 00314/2.1030/AU.1/10/1680-3/1/III/2025

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340

F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Shareholders, Board of Commissioners and Directors

PT Perusahaan Pengelola Aset

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Perusahaan Pengelola Aset ("Perusahaan") dan entitas anaknya (secara kolektif disebut "Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT Perusahaan Pengelola Aset ("the Company") and its subsidiaries (collectively referred to as "the Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2024, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including a material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2024, and their consolidated financial performance and their cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, Registered Public Accountants is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No.477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia Financial Services Authority (OJK)



Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami dijabarkan di bawah ini.

1. Estimasi penurunan nilai pinjaman investasi, piutang usaha, pinjaman yang diberikan dana talangan, pinjaman yang diberikan-restrukturisasi dan/atau revitalisasi, dan cessie piutang

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup mencatat pinjaman investasi, piutang usaha, pinjaman yang diberikan dana talangan, pinjaman yang diberikan restrukturisasi dan/atau revitalisasi, dan cessie piutang masing-masing sebesar Rp2.796.403 juta, Rp1.090.718 juta, Rp1.084.012 juta, Rp868.971 dan Rp683.542 juta dimana jumlah tersebut masing-masing mencakup 16,01%, 6,24%, 6,21%, 4,97%, dan 3,91% dari total aset Grup. Grup juga mencatat cadangan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan tersebut sebesar Rp2.048.194 juta pada tanggal 31 Desember 2024.

Perhitungan yang dilakukan manajemen atas estimasi penurunan nilai aset keuangan melibatkan estimasi dan pertimbangan yang signifikan. Grup mengukur kerugian kredit ekspektasian atas aset keuangan menggunakan pendekatan umum secara individu dengan mempertimbangkan semua informasi yang wajar dan terdukung. Grup melakukan peninjauan atas estimasi penurunan nilai aset keuangan berdasarkan estimasi probabilitas gagal bayar selama jangka waktu tertentu, yang perhitungannya mencakup data historis, asumsi dan ekspektasi dari kondisi masa depan dari masing-masing aset keuangan yang dimiliki Grup. Perubahan nilai penurunan nilai aset keuangan dapat berdampak material terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Pengungkapan Grup mengenai pinjaman investasi, piutang usaha, pinjaman yang diberikan dana talangan, dan pinjaman yang diberikan-restrukturisasi dan/atau revitalisasi

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgement, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The key audit matters identified in our audit are outlined below.

1. Estimation on impairment losses of investment loan, trade receivables, loans receivable-bailout, and loans receivable-restructuring and/or revitalization and cessie receivables

On December 31, 2024, the Group recorded investment loans, trade receivables, loans receivable-bailout, and loans receivable-restructuring and/or revitalization and cessie receivables amounting to Rp2,796,403 million, Rp1,090,718 million, Rp1,084,012 million, Rp868,971 million, and Rp683,542 million, respectively, representing 16.01%, 6.24%, 6.21%, 4.97%, and 3.91%, respectively, of the Group's total assets. The Group also recorded an allowance for impairment losses on these financial assets amounting to Rp2,048,194 million as at December 31, 2024.

Management's calculations of the impairment of financial assets involve significant estimates and judgments. The Group measures the expected credit losses on financial assets using a generalized approach on an individual basis, considering all credible and supported information. The Group reviews the estimated impairment of financial assets based on the estimated probability of default over a certain period, the calculation of which includes historical data, assumptions, and expectations of the future conditions of each Group's financial assets. Changes in the impairment value of financial assets may have a material impact on the Group's consolidated financial statements.

The Group's disclosures on investment loans, trade receivables, loans receivable-bailout, and loans receivable-restructuring and/or revitalization and cessie receivables are set out



dan cessie piutang dijelaskan dalam Catatan 2.h, 4, 5, 6, 12, 15 dan 19 atas laporan keuangan konsolidasian.

Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespon hal audit utama ini:

- Memahami dan mengevaluasi desain dan implementasi dari pengendalian internal Grup yang relevan sehubungan dengan estimasi penurunan nilai atas aset keuangan.
- Mengevaluasi keakuratan dan kelengkapan data yang digunakan dalam model kerugian penurunan nilai dan memeriksa keakuratan matematis dari perhitungan tersebut.
- Mengevaluasi kewajaran dari asumsi utama (yaitu definisi gagal bayar, pengelompokan debitur, karakteristik risiko kredit, dan informasi masa depan) yang digunakan manajemen untuk mengestimasi cadangan kerugian penurunan nilai.
- Mengembangkan perkiraan atau rentang poin auditor untuk mengevaluasi estimasi manajemen dan mengungkapkan terkait ketidakpastian estimasi mungkin merupakan pendekatan yang tepat.

2. Penilaian Investasi Level 2 dan 3 yang dicatat pada Nilai Wajar

Pada tanggal 31 Desember 2024, aktivitas investasi Grup menghasilkan berbagai investasi Level 2 dan 3 atas Aset Keuangan yang diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi, Aset Keuangan yang diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain, dan Investasi pada Efek Ekuitas masing-masing sebesar Rp1.153.646 juta, Rp456.825 juta, dan Rp123.413 juta dimana jumlah tersebut masing-masing mencakup 6,60%, 2,62% dan 0,71% dari total aset Grup. Baik investasi Level 2 dan 3 dicatat pada nilai wajarnya secara berkala sesuai dengan PSAK 113, Pengukuran Nilai Wajar, dengan menggunakan berbagai pendekatan termasuk pendekatan pasar, pendekatan arus kas terdiskonto dan pendekatan nilai aset bersih.

Tidak seperti investasi pada saham yang diperdagangkan di publik dimana harganya dapat diamati dengan segera dan karenanya lebih mudah dipastikan secara independen, penilaian investasi Level 2 dan 3 secara inheren bersifat subyektif, seringkali menggunakan input yang tidak dapat diamati, dan melibatkan tingkat subyektivitas karena pertimbangan yang

in Notes 2.h, 4, 5, 6, 12, 15, and 19 to the consolidated financial statements.

We have performed the following audit procedures to address this key audit matter:

- Understand and evaluated the design and implementation of the Group's relevant internal controls in respect of the allowance for impairment losses of such financial asset.
- Evaluated accuracy and completeness of data used in the expected credit loss model and checked mathematical accuracy of the calculation.
- Evaluated the reasonableness of key assumptions (i.e. definition of default, grouping of various debtor segments, credit risk characteristics, and forward looking information) used by management to estimate the allowance for impairment losses.
- Developing an auditor's point estimate or range to evaluate management's point estimate and and relate disclosures about estimation uncertainty may be an appropriate approach.

2. Valuation of Level 2 and 3 Investments Carried at Fair Value

On December 31, 2024, the Group's investing activities result in various Level 2 and 3 recorded Financial Assets Measured at Fair Value Through Profit or Loss, Financial Assets Measured at Fair value Through Other Comprehensive Income, and Investment in Equity Securities of Rp1,153,646 million, Rp456,825 million, and Rp123,413 million, respectively, which represents 6.60%, 2.62%, and 0.71%, respectively. Both Level 2 and 3 investments are accounted for at fair value on a recurring basis in accordance with PSAK 113, Fair Value Measurement, by using various approaches that included market approach, discounted cash flows approach, and net asset value (NAV).

Unlike investments in publicly traded equities whose prices are readily observable and therefore more easily independently corroborated, the valuation of these Level 2 and 3 investments is inherently subjective, often involves the use of inputs that are unobservable, and thus includes a level of subjectivity due to judgment used in



digunakan yang digunakan dalam menentukan asumsi dasar dan model penilaian yang tepat.

Dampak dari hal-hal ini adalah, sebagai bagian dari kajian risiko kami, penilaian investasi Level 2 dan 3 adalah estimasi yang memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi dengan upaya audit yang setara dan membutuhkan keahlian dan pengetahuan khusus, serta melibatkan pertimbangan auditor yang subyektif dan kompleks.

Pengungkapan Grup mengenai Aset Keuangan yang diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi, Aset Keuangan yang diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain, dan Investasi pada Efek Ekuitas dijelaskan dalam Catatan 2.h, 10, 11, dan 17 atas laporan keuangan konsolidasian.

Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespon hal audit utama ini:

- Memilih sampel dengan mempertimbangkan nilai tercatat investasi terkait, lini Bisnis, fase, kompleksitas yang diperkirakan dan secara historis diketahui, serta kemudahan akses ke data dan informasi yang relevan. Mungkin terdapat faktor pertimbangan lain tergantung dari sifat dan jenis investasinya.
- Menelaah apakah metode penilaian yang digunakan untuk investasi tersebut telah tepat sesuai dengan model Bisnis investee terkait, serta fakta dan keadaan yang sudah ada.
- Mengevaluasi apakah metode penilaian yang dipilih telah diterapkan secara konsisten pada investasi lain yang serupa dan mengevaluasi apakah perubahan metode telah tepat, jika ada.
- Melakukan tanya jawab dengan manajemen dalam rangka memahami asumsi dan pertimbangan yang digunakan dalam menyusun perhitungannya dan jika memungkinkan, memastikan informasi yang penting dengan sumber independen.
- Melibatkan pakar ahli mengkaji apakah penilaian kami untuk model dan input yang digunakan telah tepat dengan membandingkan input yang dapat diamati dengan sumber independen dan data pasar yang tersedia di eksternal dan secara independen melakukan kembali penilaiannya.

determining the underlying assumptions and appropriate valuation models.

The effect of these matters is that, as part of our risk assessment, the valuation of Level 2 and 3 investments has a high degree of estimation uncertainties with an equally high degree of audit effort requiring specialized skills and knowledge, and involving subjective and complex auditor judgment.

The Group's disclosures on Financial Assets Measured at Fair Value Through Profit or Loss, Financial Assets Measured at Fair value Through Other Comprehensive Income, and Investment in Equity Securities in Notes 2h, 10, 11, and 17 to the consolidated financial statements.

We have performed the following audit procedures to address this key audit matter:

- *Selecting samples by considering the investments' carrying amounts, Business lines, stages, any presumed and historically known complexities, as well as the ease of access to the relevant data and information. There may be other considerations depending on the nature of investment.*
- *Assessing whether the valuation method used for the investment is appropriate in accordance with the underlying investee's business model, as well as other available facts and circumstances.*
- *Evaluating whether the selected valuations methods had been consistently applied in other similar type of investments and evaluating the appropriateness of changes in such methods, if any.*
- *Interviewing management to understand the assumptions and judgment used in preparing the underlying calculations and if possible, corroborating key information to independent sources.*
- *Involving our own valuation specialists to assess the appropriateness of the models and inputs by comparing the observable inputs against independent sources and externally available market data and re-performed independent valuations.*



- Menilai kecukupan dalam catatan atas pengungkapan laporan terkait keuangan konsolidasian terlampir.

3. Penyelesaian Pembatalan Perjanjian Jual Beli Aset Tagihan Bersyarat ("PJB AT") dan Perjanjian Jual beli Sukuk Bersyarat ("PJB Sukuk")

Sebagaimana diungkapkan pada Catatan 27 atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, pada tanggal 29 Desember 2022, Perusahaan melalui entitas anaknya, yaitu PT PPA Kapital ("PPAK") menandatangani Perjanjian Jual Beli Aset Tagihan Bersyarat ("PJB AT") dengan PT Berdikari Jaya Ultima ("BJU"). Penjualan Aset Tidak Produktif ("ATP") oleh PPAK kepada BJU dilakukan pada harga sebesar Rp275.826 juta. PPAK sebelumnya telah membentuk Cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp235.790 juta, sehingga nilai tercatat neto adalah Rp40.036 juta. Transaksi pengalihan ATP ini melibatkan pihak-pihak yang terafiliasi oleh Perusahaan yaitu Tiger Sukuk Indonesia Pte. Ltd ("TSI"), BJU yang secara tidak langsung dimiliki oleh VCC Namco Property Indonesia Fund ("PIF"), di mana Grup merupakan investor tunggal atas PIF.

Pada tanggal yang sama juga yaitu 29 Desember 2022, PPAK menandatangani Perjanjian Jual beli Sukuk Bersyarat ("PJB Sukuk") dengan Namco Indonesia Fund VCC ("Namco") sebagai pihak yang bertindak untuk tujuan PIF (pihak penjual) dengan harga pembelian sebesar Rp426.430 juta. Pada tanggal penandatanganan PJB Sukuk tersebut, PPAK telah melakukan pembayaran pertama senilai Rp265.830 juta sesuai dengan PJB Sukuk.

Dana tersebut ditransaksikan oleh PIF untuk melakukan investasi ke BJU melalui TSI melalui pembelian ATP sebesar Rp275.826 juta kepada PPAK. Pada tanggal 26 Oktober 2023, dilakukan amendemen terhadap PJB Sukuk yang menyepakati harga pembelian menjadi Rp499.100 juta. Pada tanggal penandatanganan amendemen PJB Sukuk tersebut, PPAK melakukan pembayaran kedua sebesar Rp233.270 juta.

- *Evaluating the adequacy of the related disclosures in the accompanying consolidated financial statements.*

3. Settlement of the Annulment of Conditional Receivable Asset Sale and Purchase Agreement ("PJB AT") and Conditional Sukuk Sale and Purchase Agreement ("PJB Sukuk")

As disclosed in Note 27 to the accompanying consolidated financial statements, on December 29, 2022, the Company through its subsidiary, i.e. PT PPA Kapital ("PPAK") signed a Conditional Receivable Asset Sale and Purchase Agreement ("PJB AT") with PT Berdikari Jaya Ultima ("BJU"). The sale of Non-Performing Asset ("ATP") by PPAK to BJU was made at the price of Rp275,826 million. PPAK had previously formed a provision for impairment losses amounting to Rp235,790 million, resulting in a net carrying amount of Rp40,036 million. This ATP transfer transaction involved affiliated parties of the Company, namely Tiger Sukuk Indonesia Pte. Ltd ("TSI"), BJU whom indirectly owned by VCC Namco Property Indonesia Fund ("PIF"), where the Group is the only investor in PIF.

On the same date, December 29, 2022, PPAK signed a Conditional Sukuk Sale and Purchase Agreement ("PJB Sukuk") with Namco Indonesia Fund VCC ("Namco") as the party acting for the purpose of PIF (the seller) with a purchase price of Rp426,430 million. On the date of signing the PJB Sukuk, PPAK made the first payment of Rp265,830 million in accordance with the PJB Sukuk.

The transaction fund was done by PIF to invest in BJU through TSI by purchasing ATP amounting to Rp275,826 million to PPAK. On October 26, 2023, an amendment was made for PJB Sukuk to agree the purchase price of Rp499,100 million. Upon the signing date of PJB Sukuk amendment, PPAK made the second payment of Rp233,270 million.



Sukuk yang diperjualbelikan adalah Sukuk Ijarah jangka panjang tanpa penawaran umum yang diterbitkan oleh PT Adhi Commuter Properti Tbk dengan harga pembelian kembali sukuk sebesar Rp499.100 juta dan harga beli objek ijarah sebesar Rp233.270 juta.

Pada tanggal 21 Mei 2024, PPAK, PIF dan BJU telah menandatangani perjanjian pembatalan transaksi PJB AT dan PJB Sukuk. Berdasarkan perjanjian tersebut transaksi PJB AT dan PJB Sukuk, menjadi batal dan tidak berlaku bagi para pihak sehingga para pihak sepakat bahwa transaksi sebagaimana diatur di dalam PJB AT dan PJB Sukuk akan menjadi batal dan dianggap tidak pernah terjadi.

Pada tanggal 22 Mei 2024, telah dilakukan pengembalian dana atas pembatalan PJB AT sebesar Rp275.826 juta dari PPAK kepada BJU. Berdasarkan perjanjian pembatalan tersebut, Namco harus mengembalikan dana yang diterima dari PPAK sebesar Rp499.100 juta selambat-lambatnya dalam 20 hari kerja kepada PPAK. Pada tanggal tersebut, telah dilakukan pengembalian sebagian dana dari jumlah Rp499.100 juta, yaitu sebesar Rp275.826 juta, kepada PPAK oleh Namco.

Sampai dengan tanggal 31 Mei 2024, proses pembatalan belum sepenuhnya terjadi dikarenakan terdapat dana yang belum dikembalikan sebesar Rp223.274 juta dan proses administrasi pemindahan kepemilikan atas sukuk yang belum selesai.

Pada tanggal 31 Mei 2024, Laporan Keuangan Konsolidasian Grup per 31 Desember 2023 memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian ("WDP") yang disebabkan proses pembatalan masih belum sepenuhnya terjadi, sehingga menyebabkan belum terdapat dokumen pendukung yang cukup untuk menyimpulkan perlakuan akuntansi yang tepat atas transaksi sukuk tersebut.

Pada tanggal 20 Juni 2024, PPAK menerima proposal penyelesaian transaksi terkait Perjanjian Pembatalan dari Namco, sehubungan dengan Namco tidak dapat memenuhi sisa pengembalian dana sebesar Rp223.274 juta. Namco menawarkan penyelesaian dengan pengalihan kepemilikan Namco atas seluruh Sukuk ADCP.

The traded sukuk was a long-term Sukuk Ijarah without public offering issued by PT Adhi Commuter Properti Tbk with sukuk repurchase price amounting to Rp499,100 million and object ijarah purchase price amounting to Rp233,270 million.

On May 21, 2024, PPAK, PIF and BJU signed an agreement to cancel the PJB AT and PJB Sukuk transactions. Based on the agreement, the PJB AT and PJB Sukuk transactions are void and do not apply to the parties so that the parties agree that the transactions as stipulated in the PJB AT and PJB Sukuk will be void and deemed to have never occurred.

On May 22, 2024, refund of PJB AT cancellation amounting to Rp275,826 million from PPAK to BJU has been made. Under the cancellation agreement, Namco must return the funds received from PPAK amounting to Rp499,100 million no later than 20 working days to PPAK. On the same date, the refund has been done partially from Rp499,100 million amounting to Rp275,826 million to PPAK from Namco.

As of May 31, 2024, the cancellation process has not yet been done completely due to outstanding funds that have not been received by PPAK amounting to Rp223.274 million and and the administrative process for transferring sukuk ownership remains incomplete.

As of May 31, 2024, The Group Consolidated Financial Statements as of December 31, 2024, obtained a Qualified Opinion ("WDP") which is due to the cancellation process remains incomplete, resulting insufficient supporting documents to conclude the accounting treatment for the ADCP Sukuk Investment.

On June 20, 2024, PPAK received a settlement proposal for the Cancellation Agreement from Namco, as Namco was not able to fulfill the remaining refund amount of Rp223,274 million. Namco proposed a settlement by retaining full ownership of all ADCP Sukuk.



Sesuai dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") PPA yang diadakan pada tanggal 12 Agustus 2024, berdasarkan arahan pemegang saham, Perusahaan agar memastikan untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan atas investasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tanggal 30 Desember 2024, PPAK, BJU dan Namco menandatangani addendum perjanjian pembatalan PJB AT dan PJB Sukuk tersebut.

Dalam perjanjian tersebut, disepakati bahwa penyelesaian kewajiban Namco kepada PPAK sebesar Rp223.274 juta diselesaikan melalui penyerahan Sukuk ADCP dari Namco kepada PPAK.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup mencatat investasi pada sukuk sebesar Rp272.494 juta, yang dicatat sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan.

Perusahaan telah menerima surat konfirmasi dari Pemegang Saham Seri B Perusahaan yaitu PT Danareksa (Persero) tanggal 7 Maret 2025, yang mengonfirmasi bahwa Perusahaan telah menunaikan arahan Pemegang Saham dalam RUPST PPA 2023 terkait penyelesaian opini WDP untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Transaksi ini menjadi bagian dari hal audit utama yang perlu kami sampaikan karena menjadi basis opini wajar dengan pengecualian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebagai akibat dari belum terdapatnya bukti audit yang dapat diandalkan untuk menyimpulkan perlakuan akuntansi yang tepat atas transaksi sukuk tersebut.

Dengan mempertimbangkan hal-hal terkait, sebagai bagian dari kajian risiko kami, penyelesaian pembatalan transaksi PJB AT dan PJB Sukuk, serta investasi pada sukuk adalah transaksi yang material dan kompleks di mana membutuhkan keahlian dan pengetahuan khusus, serta melibatkan pertimbangan auditor yang subyektif.

In accordance with the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders ("RUPST") PPA held on August 12, 2024, based on the shareholders' directives, the Company is instructed to ensure the completion of the required documents for the ADCP Sukuk Investment in accordance with applicable regulations.

On December 30, 2024, PPAK, BJU and Namco signed an addendum to the annulment agreement of PJB AT and PJB Sukuk.

In the agreement, it was agreed that the settlement of Namco's obligations to PPAK amounting to Rp223,274 million would be settled through the transfer of ADCP Sukuk from Namco to PPAK.

As at December 31, 2024, the Group recorded an investment in sukuk of Rp272,494 million, which is recorded as a financial asset measured at cost.

The Company received a confirmation letter from the Series B Shareholder of the Company dated March 7, 2025, confirmed that the Company has fulfilled the shareholders' directives in the RUPST PPA 2023 regarding the resolution of the qualified opinion for the year ended December 31, 2023.

This transaction is part of the key audit matters that we need to report because it formed the basis for the qualified opinion for the year ended December 31, 2023 due to the insufficient audit evidence to conclude the appropriate accounting treatment for the sukuk transaction.

Taking into account the related matters, as part of our risk assessment, the completion of the cancellation of PJB AT and PJB Sukuk transactions, and the investment in sukuk are material and complex transactions which require specialized expertise and knowledge, and involve subjective auditor judgment.



Kami melakukan prosedur-prosedur audit berikut untuk merespon hal audit utama ini:

- Mengevaluasi desain dan implementasi atas pengendalian terkait pelaksanaan penyelesaian pembatalan transaksi PJB AT dan PJB Sukuk;
- Melakukan verifikasi secara mendalam terkait dengan kelengkapan dokumen legal dan dokumen pendukung lainnya yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang mendasari penyelesaian pembatalan transaksi tersebut;
- Mengirimkan konfirmasi kepada pemegang saham atas tindak lanjut Perusahaan sesuai dengan arahan pemegang saham;
- Memeriksa secara rinci dokumen pendukung untuk memastikan bahwa investasi pada sukuk merupakan bagian dari aktivitas bisnis yang sesuai dengan model bisnis Perusahaan;
- Mengevaluasi asersi manajemen dalam hal klasifikasi, pengakuan, dan pengukuran investasi pada sukuk per 31 Desember 2024 sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dideskripsikan pada Catatan 2.s atas laporan keuangan konsolidasian terlampir; serta
- Menilai apakah pengungkapan terkait telah disajikan dengan memadai dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

Hal Lain

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024, serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir, dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Informasi keuangan PT Perusahaan Pengelola Aset (Entitas Induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas Induk"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi Keuangan Entitas Induk merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan

We have performed the following audit procedures to address this key audit matter:

- *Evaluate the design and implementation of controls related to the cancellation settlement of PJB AT and PJB Sukuk transactions;*
- *Conduct in-depth verification related to the completeness of legal documents and other supporting documents required in accordance with applicable regulations, which underlie the completion of the cancellation of the transactions;*
- *Send confirmation to shareholders of the Company's follow-up in accordance with shareholder direction;*
- *Examine supporting documents in detail to ensure that investment in sukuk is part of a business activity that is in accordance with the Company's business model;*
- *Evaluate management's assertion on the classification, recognition, and measurement of investment in sukuk as at December 31, 2024 in accordance with the accounting policies described in Note 2.s to the accompanying consolidated financial statements; and*
- *Assess whether related disclosures have been adequately presented in the notes to the financial statements.*

Other Matter

Our audit of the accompanying consolidated financial statements of the Group as at December 31, 2024, and for the year then ended, were performed for the purpose of forming an opinion on such consolidated financial statements taken as a whole. The accompanying financial information of PT Perusahaan Pengelola Aset (Parent Entity), which comprises the statement of financial position as at December 31, 2024, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity, and statement of cash flows for the year then ended, (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards. The Parent Entity Financial Information is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and



catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan Entitas Induk telah menjadi objek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan Entitas Induk disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, berkaitan dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain yang teridentifikasi di atas, jika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. The Parent Entity Financial Information has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statements in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. In our opinion, the Parent Entity Financial Information is fairly stated, in all material respects, in relation to the accompanying consolidated financial statements taken as a whole.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information contained in the annual report, but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations or Standards of Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.



Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standard on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.



Sebagai bagian dan suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*



- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

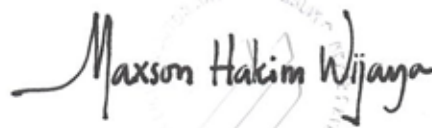
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Maxson Hakim Wijaya
Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1680/
Public Accountant License Number: AP.1680

Jakarta, 24 Maret 2025/March 24, 2025



**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION**

As of December 31, 2024 and 2023
(In Million of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024 Rp	2023 Rp	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	3	1,151,197	1,056,936	Cash and Cash Equivalents
Pinjaman Investasi Jangka Pendek				Short-Term Investment Loans
- Pihak Berelasi	4, 40	294,766	330,994	Related Parties -
- Pihak Ketiga	4	279,700	344,120	Third Parties -
Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi		--	4,840	Financial Assets Measured at Amortised Cost
Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi	10	1,153,646	1,098,394	Financial Assets Measured at Fair Value Through Profit or Loss
Piutang Usaha				Accounts Receivable
- Pihak Berelasi	5, 40	172,091	137,976	Related Parties -
- Pihak Ketiga	5	679,501	787,330	Third Parties -
Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan				Loans Receivable - Bailout
- Pihak Berelasi	6, 40	920,037	625,144	Related Parties -
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka	7	6,437	7,567	Advances and Prepaid Expenses
Pajak Dibayar di Muka	8.a	98,929	100,910	Prepaid Taxes
Cessie Piutang Jangka Pendek	19	78,128	53,475	Short-Term Cessie Receivable
Aset Lancar Lainnya	9	650,757	26,232	Other Current Assets
Jumlah Aset Lancar		5,485,189	4,573,918	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain	11	8,317,327	7,879,550	Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income
Investasi pada Sukuk	27.a	272,494	499,100	Investment in Sukuk
Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi - Pihak Berelasi	12, 40	530,595	535,080	Loans Receivable - Restructuring and/or Revitalization - Related Parties
Properti Investasi	13	466,214	455,677	Investment Properties
Aset Pajak Tangguhan	8.e	62,813	68,198	Deferred Tax Assets
Investasi pada Ventura Bersama dan Entitas Asosiasi	14	75,274	81,992	Investments in Joint Ventures and Associates
Pinjaman Investasi Jangka Panjang				Long-Term Investment Loans
- Pihak Berelasi	15, 40	1,162,006	1,499,816	Related Parties -
- Pihak Ketiga	15	56,879	55,420	Third Parties -
Investasi Jangka Panjang Lainnya	16	524,691	515,503	Other Long-Term Investment
Investasi pada Efek Ekuitas	17	123,413	156,221	Investment in Equity Securities
Aset Tetap	18	2,707	2,783	Fixed Assets
Cessie Piutang Jangka Panjang				Long-Term Cessie Receivable
- Pihak Berelasi	19, 40	39,344	39,344	Related Parties -
- Pihak Ketiga	19	262,405	258,160	Third Parties -
Aset Hak-Guna	20.a	69,576	38,357	Right-of-Use Assets
Aset Tidak Lancar Lainnya	9	16,157	714,799	Other Non-Current Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		11,981,895	12,800,000	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		17,467,084	17,373,918	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes from an integral part of these consolidated financial statements

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION**

As of December 31, 2024 and 2023
(In Million of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024 Rp	2023 Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang Usaha				Accounts Payable
- Pihak Ketiga	21	11,292	10,010	Third Parties -
Pinjaman Bank Jangka Pendek				Short-Term Bank Loan
- Pihak Berelasi	22, 40	812,557	844,284	Related Parties -
- Pihak Ketiga	22	566,838	902,711	Third Parties -
Utang Surat Berharga Komersial	23	199,408	--	Commercial Paper
Bagian Jangka Pendek dari Pinjaman Bank				Current Maturities of Long-Term
Jangka Panjang - Pihak Berelasi	22, 40	--	4,000	Bank Loans - Related Parties
Utang Obligasi yang Akan Jatuh Tempo				Bonds Payable due
Dalam Satu Tahun	26	1,235,063	--	Within One Year
Utang Pajak	8.b	6,326	10,321	Taxes Payable
Bagian Jangka Pendek dari Liabilitas Sewa	20.b	19,771	12,518	Current Portion of Lease Liabilities
Beban Akrua dan Utang Lain-lain	24, 40	443,947	765,629	Accruals and Other Payables
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		3,295,202	2,549,473	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas Imbalan Kerja	25	22,157	24,151	Employee Benefit Liabilities
Pinjaman Bank Jangka Panjang				Long-Term Bank Loans
- Pihak Berelasi	22, 40	349,598	345,598	Related Parties -
Utang Obligasi	26	987,378	2,220,911	Bonds Payable
Liabilitas Sewa	20.b	34,535	20,358	Lease Liabilities
Utang Sukuk-Neto	27.b	1,512,758	1,555,103	Sukuk Payables-Net
Liabilitas Jangka Panjang Lainnya		32,343	--	Other Long-Term Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		2,938,769	4,166,121	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		6,233,971	6,715,594	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk				Equity Attributable to Owner of the Parent Entity
Modal Saham - Nilai Nominal Seri A Dwiwarna				Share Capital Dwiwarna Serie A -
Rp1.000.000 per saham (nilai penuh),				Rp1,000,000 par value per share (full amount),
Nilai Nominal Seri B - Rp916.004 per saham				Serie B - Rp916.004 par value per share
(nilai penuh) per 31 Desember 2024 dan 2023				(full amount) as of December 31, 2024 and 2023
Modal Dasar - 1 Saham Seri A Dwiwarna				Authorized Capital - 1 share of Dwiwarna Serie A
dan 22.000.000 saham Seri B				and 22,000,000 shares of Serie B,
per 31 Desember 2024 dan 2023				as of December 31, 2024 and 2023
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh -				Subscribed and Fully Paid Capital -
1 Saham Seri A Dwiwarna				1 share of Dwiwarna Serie A
dan 6.188.834 saham Seri B				and 6,188,834 seri B Share
per 31 Desember 2024 dan 2023	28.a	5,668,998	5,668,998	as of December 31, 2024 and 2023
Tambahan Modal Disetor	28.b	(1,386,916)	(1,386,916)	Additional Paid in Capital
Saldo Laba				Retained Earnings
- Telah Ditentukan Penggunaannya		819,199	543,546	Appropriated -
- Belum Ditentukan Penggunaannya	28.d	529,329	649,612	Unappropriated -
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas				Difference in Value of Restructuring Transaction
Sepengendali		305,768	305,768	Between Entities under Common Control
Labas Belum Direalisasi dari Aset Keuangan				Unrealized Gain on Financial Assets Measured
yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui				at Fair Value Through
Penghasilan Komprehensif Lain	11	5,281,655	4,862,946	Other Comprehensive Income
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Atas				Actuarial Gain (Loss) on
Kewajiban Imbalan Pascakerja - Bersih		15,090	14,380	Post Employment Benefit Liability - Net
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		11,233,123	10,658,334	Total Equity Attributable to Owner of the Parent Entity
Kepentingan Nonpengendali	28.e	(10)	(10)	Non-Controlling Interest
JUMLAH EKUITAS		11,233,113	10,658,324	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		17,467,084	17,373,918	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes from an integral part of these consolidated financial statements

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT
OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Million of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024 Rp	2023 Rp	
PENDAPATAN USAHA	29, 40	1,662,604	1,673,140	REVENUES
BEBAN USAHA	30	(1,486,782)	(1,380,488)	OPERATING EXPENSE
LABA USAHA		175,822	292,652	OPERATING INCOME
Pendapatan Bunga		38,230	52,562	Interest Income
Beban Bunga dan Keuangan	31	(8,516)	(10,682)	Interest Expense and Financial Charge
Kenaikan Nilai Wajar Properti Investasi	13	10,537	716	Increase in Fair Value of Investment Property
Bagian Rugi Bersih atas Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	14, 32	(2,718)	(1,854)	Share of Net Loss of Associates and Joint Ventures
Penghasilan (Beban) Lain-lain	33	(2,800)	(5,283)	Other Income (Expenses)
LABA SEBELUM PAJAK		210,555	328,111	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	8.c	(5,185)	(2,470)	INCOME TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN		205,370	325,641	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will not be reclassified to profit or loss
Perubahan Nilai Wajar Aset Keuangan yang Diukur Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain	11	418,709	2,474,520	Changes in The Fair Value of Financial Assets at Fair Value Through Other Comprehensive Income
Pengukuran Kembali Imbalan Pascakerja		910	2,256	Remeasurements of Post Employment Benefit
Pajak Penghasilan Terkait		(200)	(498)	Related Income Tax
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain		419,419	2,476,278	Total Other Comprehensive Income
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		624,789	2,801,919	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
- Pemilik Entitas Induk		205,370	325,653	Owners of The Parent Entity -
- Kepentingan Nonpengendali		--	(12)	Non-Controlling Interest -
JUMLAH		205,370	325,641	TOTAL
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ATTRIBUTABLE TO:
- Pemilik Entitas Induk		624,789	2,801,931	Owners of The Parent Entity -
- Kepentingan Nonpengendali		--	(12)	Non-Controlling Interest -
JUMLAH		624,789	2,801,919	TOTAL
LABA PER SAHAM (nilai penuh)	34	33,184	53,295	EARNINGS PER SHARE (full amount)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes from an integral part of these consolidated financial statements

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Million of Rupiah, unless otherwise stated)

Distribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/Attributable to Owner of the Parent									
	Aset Keuangan yang diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain/ Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income			Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Liabilitas Imbalan Bersih/ Pensions - Actuarial Gain (Loss) Employee Benefit - Net		Saldo Laba/Retained Earnings Telah Ditetapkan Penggunaan/ Appropriated		Kepentingan Nonpengendali/ Non-Controlling Interest	
	Rp			Rp		Rp		Rp	
Modal Saham/ Capital Stock	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital	Agio Saham/ Paid in Capital Excess of Par	SNTRES ¹⁾				Jumlah/ Total		Jumlah Ekuitas/ Total Equity
Saldo Per 31 Desember 2022	5.452.627	(1.386.916)	305.768	2.388.426	12.622	413.817	7.691.033	2	7.691.035
Penambahan/ Penyelesaian Modal Pemegang Saham	216.370	--	--	--	--	--	216.370	--	216.370
Kapitalisasi Saldo Laba	1	--	--	--	--	(1)	--	--	--
Cadangan Umum	--	--	--	--	--	129.730	--	--	--
Dividen	--	--	--	--	--	--	(51.000)	--	(51.000)
Lab a Tahun Berjalan	--	--	--	--	--	--	325.653	(12)	325.641
Penghasilan Komprehensif Lain	--	--	--	2.474.520	1.758	--	2.476.278	--	2.476.278
Saldo Per 31 Desember 2023	5.668.998	(1.386.916)	305.768	4.882.346	14.380	543.546	10.658.334	(10)	10.658.324
Lab a Tahun Berjalan	--	--	--	--	--	--	205.370	--	205.370
Dividen	--	--	--	--	--	--	(50.000)	--	(50.000)
Cadangan Umum	--	--	--	418.709	710	275.653	--	--	--
Penghasilan Komprehensif Lain	--	--	--	5.281.655	15.090	--	419.419	--	419.419
Saldo Per 31 Desember 2024	5.668.998	(1.386.916)	305.768	5.281.655	15.090	819.199	11.233.123	(10)	11.233.113

¹⁾ Selisih Nilai Transaksi dengan Entitas Sepengendali/Difference in Value Restructuring Transactions between Entities under Common Control

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes from an integral part of these consolidated financial statements

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK**
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES**
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASHFLOWS
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Million of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2024 Rp	2023 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Kas dari Pelanggan		617,062	685,663	Cash Receipts from Customers
Penyaluran Pembiayaan Konsumen		(151,222)	(7,657)	Disbursement for Consumer Financing
Penerimaan Restitusi Pajak	8a	31,920	31,985	Cash Receipts from Tax Refund
Pembayaran Kepada Pemasok dan Pihak Ketiga		(265,825)	(366,083)	Cash Paid to Suppliers and Third Parties
Pembayaran Beban Bunga		(421,792)	(429,884)	Payment of Interest Expense
Pembayaran Pajak		(68,273)	(80,023)	Tax Paid
Penerimaan Dividen		395,468	285,552	Dividend Receipts
Penerimaan Lainnya		108,548	87,039	Other Receipts
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi		245,886	206,592	Net Cash Flow Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan Investasi		791,717	1,877,217	Proceeds from Investment
Pengeluaran Investasi		(780,645)	(1,940,435)	Disbursement for Investment
Penerimaan Pinjaman yang Diberikan		434,934	837,164	Proceeds from Investment Loans
Pengeluaran Pinjaman yang Diberikan		(293,272)	(1,007,235)	Disbursement for Investment Loans
Pengurangan Investasi pada Ventura Bersama		4,000	--	Reduction of Investment in Joint Venture
Perolehan Aset Tetap	18	(390)	(260)	Acquisition of Fixed Asset
Perolehan Properti Investasi		--	(2,736)	Acquisition of Investment Properties
Arus Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi		156,344	(236,285)	Net Cash Flow Provided by (Used in) Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan Pinjaman Bank	22, 39	1,113,062	1,425,313	Proceeds from Bank Borrowings
Pembayaran Pinjaman Bank	22, 39	(1,496,121)	(1,183,472)	Repayments of Bank Borrowings
Penerimaan Penerbitan Surat Utang	23	185,604	--	Proceeds from Issuance of Debt Securities
Pembayaran Penerbitan Surat Utang		--	(540,000)	Repayments of Debt Securities
Pembayaran Liabilitas Sewa	20.b	(29,125)	(20,242)	Repayment of Lease Liabilities
Penerimaan Pinjaman Lainnya	24, 40	--	30,925	Receipts from Other Loan
Pembayaran Pinjaman Lainnya	24, 40	(30,925)	--	Payment of Other Loan
Penerimaan Setoran Modal	28.a	--	216,371	Proceeds from Capital Injection
Pembayaran Dividen	28.d	(50,000)	(51,000)	Dividend Payment
Pembayaran Utang Repo		--	(268,228)	Repo Debt Payment
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan		(307,505)	(390,333)	Net Cash Flow Used in Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS		94,725	(420,026)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		1,056,936	1,476,962	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		1,151,661	1,056,936	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF YEAR
Rekonsiliasi Jumlah Kas dan Setara Kas				Reconciliation of Total Cash and Cash Equivalents
Jumlah Yang Dilaporkan Pada Laporan Arus Kas		1,151,661	1,056,936	Amount As Reported in Statement of Cash Flows
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai		(464)	--	Allowance for Impairment Losses
Jumlah Yang Dilaporkan Pada Laporan Posisi Keuangan	3	1,151,197	1,056,936	Amount As Reported in Statement of Financial Position
Informasi tambahan atas aktivitas yang tidak memengaruhi arus kas dan rekonsiliasi aktivitas pendanaan disajikan pada Catatan 41 dan 39.				Additional information on non-cash-flow activities and the reconciliation of financing activities is presented in Notes 41 and 39

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan keuangan konsolidasian

The accompanying notes from an integral part of these consolidated financial statements

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1. Umum

1.a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Perusahaan Pengelola Aset ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 7 tanggal 27 Februari 2004 dari Lenny Janis Ishak, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-05780 HT.01.01.TH.2004 tanggal 9 Maret 2004 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 14 Mei 2004, Tambahan No. 4541. Akta pendirian Perusahaan tersebut dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 10 Tahun 2004 tanggal 27 Februari 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset. Beberapa ketentuan dalam PP No. 10 Tahun 2004 telah diubah dengan diterbitkannya PP No. 61 Tahun 2008 tanggal 4 September 2008 tentang Perubahan atas PP No. 10 Tahun 2004 yang menetapkan, antara lain perluasan maksud dan tujuan Perusahaan dan ruang lingkup kegiatan Perusahaan.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2004. Perusahaan berdomisili di Indonesia dan berkedudukan di Menara Danareksa Lantai 17, Jalan Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta Pusat, 10110.

Perusahaan dikendalikan oleh PT Danareksa (Persero), Badan Usaha Milik Negara. Entitas induk utama Perusahaan adalah Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Akta Notaris No. 22 tanggal 10 Juni 2021 dari Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah berusaha dalam bidang pengelolaan aset Negara yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional ("BPPN") untuk dan atas nama Menteri Keuangan, restrukturisasi dan revitalisasi Badan Usaha Milik Negara ("BUMN"), investasi, pengelolaan aset BUMN sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

1. General

1.a. Establishment and General Information

PT Perusahaan Pengelola Aset ("The Company") was established by virtue of the Deed of Notary No. 7 dated February 27, 2004 from Lenny Janis Ishak, S.H., Notary Public in Jakarta. This deed of establishment has been ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by the Decree No. C-05780 HT.01.01.TH.2004 dated March 9, 2004 and published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 39 dated May 14, 2004, Supplement No. 4541. The Company's deed of establishment was drawn up based on the Government Regulation (PP) of the Republic of Indonesia No. 10 year 2004 dated February 27, 2004, regarding Establishment of Limited Liability Company (Persero) in Asset Management Sector. Several provisions in PP No. 10 year 2004 has been amended by the issue of PP No. 61 year 2008 dated September 4, 2008, regarding Amendment to PP No. 10 year 2004 stipulating, inter alia expansion of the Company's aims and objectives and the scope of the Company's activities.

The Company started commercial operations in 2004. The Company is domiciled in Indonesia and located at Menara Danareksa, 17th Floor, Medan Merdeka Selatan Street No. 14, Central Jakarta, 10110.

The Company is controlled by PT Danareksa (Persero), a State-Owned Enterprise. The ultimate parent entity of the Company is the Republic of Indonesia.

Based on Notarial Deed No. 22 dated June 10, 2021 from Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Notary Public in Jakarta, Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company's objectives are to engage in the management of State assets originating from the Indonesia Bank Restructuring Agency ("IBRA") for and on behalf of the Minister of Finance, restructuring and revitalizing State-Owned Enterprise ("SOEs"), investing, managing SOE assets in accordance with applicable laws and regulations, and supporting business activities that support the main business activities as long as they do not conflict with the laws and regulations.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan melakukan kegiatan usaha meliputi:

- a. Kegiatan usaha utama:
 1. Pengelolaan Aset Negara yang berasal dari BPPN;
 2. Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi BUMN;
 3. Kegiatan Investasi;
 4. Kegiatan pengelolaan aset BUMN.
- b. Kegiatan usaha penunjang:
 1. Jasa konsultasi;
 2. Pengelolaan aset milik Negara selain Aset Negara yang berasal dari BPPN, Pemerintah Daerah, badan hukum yang dimiliki dan/atau didirikan oleh Negara selain BUMN, BUMD dan Swasta, termasuk anak perusahaan BUMN dan perusahaan patungan.
- c. Kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya perusahaan:
 1. Jasa konsultasi, meliputi:
 - i. Bisnis dan Manajemen;
 - ii. Penjualan dan/atau Pengembangan Aset.
 2. Pengelolaan aset milik Negara selain aset Negara, meliputi:
 - i. Penjualan aset;
 - ii. Penyewaan aset;
 - iii. Restrukturisasi piutang;
 - iv. Restrukturisasi perusahaan;
 - v. Pengembangan dan pendayagunaan aset.

Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa perubahan dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 54 tanggal 10 Maret 2023 oleh Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta Utara. Dalam akta tersebut, para pemegang saham memutuskan:

1. Menyetujui penempatan saham Seri B oleh PT Danareksa (Persero) sebanyak 236.212 lembar saham senilai Rp216.371.
2. Penempatan saham tersebut berasal dari setoran tunai sebesar Rp216.370 dan kapitalisasi cadangan sebesar Rp1.
3. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perusahaan sehubungan dengan penempatan saham yang masih dalam simpanan (*portepel*) dan penambahan modal disetor, sehingga Modal yang ditempatkan dan diambil bagian oleh Para Pemegang Saham sebanyak 6.188.835 lembar saham atau seluruhnya sebesar Rp5.668.998.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

To achieve objectives above, the Company runs business activities covering:

- a. Main business activities:
 1. Management of State Assets originating from the IBRA;
 2. Restructuring and/or Revitalizing SOEs;
 3. Investment Activities;
 4. SOEs asset management activities.
- b. Supporting business activities:
 1. Consulting services;
 2. Management of State-owned assets other than State Assets originating from IBRA, Regional Governments, legal entities owned and/or established by the State other than SOEs, ROEs and the private sector, including SOEs subsidiaries and joint ventures.
- c. Business activities in the context of optimizing the utilization of Company resources:
 1. Consulting services, including:
 - i. Business and Management;
 - ii. Sale and/or Asset Development.
 2. Management of State-owned assets other than State assets, including:
 - i. Asset sale;
 - ii. Asset rental;
 - iii. Receivable restructuring;
 - iv. Company restructuring;
 - v. Asset development and utilization.

The company's articles of association have undergone several amendments, with the latest amendment based on Notarial Deed No. 54 dated March 10, 2023, by Desman, S.H., M.Hum., a Notary in North Jakarta. In the deed, the shareholders decided:

1. Approved addition of Series B shares by PT Danareksa (Persero) totalling 236,212 shares, amount of Rp216,371.
2. Addition of shares origin from cash deposit amount of Rp216,370 and reverse capitalization amount of Rp1.
3. Approved the amendments to Article 4, paragraphs (2) and (3) of the Company's Articles of Association in relation to the placement of treasury shares (*portfolio*) and the increase in paid-up capital, resulting in the total Issued and Subscribed Capital by the Shareholders amounting to 6,188,835 shares or a total of Rp5,668,998.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

1b. Struktur Entitas Anak

Perusahaan memiliki pengendalian atas entitas-entitas anak pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Aktivitas Bisnis Utama/ Core Business Activity	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operation	Jumlah Aset 31 Desember 2024/ Total Assets December 31, 2024 Rp	Jumlah Pendapatan Tahun 2024/ Total Revenues For 2024 Rp
PT PPA Finance ("PT PPAF")	Jakarta	Pembiayaan/Financing	99.999	2009	365,612	15,511
PT PPA Kapital ("PT PPAK")	Jakarta	Investasi/Investment	99.999	2012	1,756,850	70,819

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Aktivitas Bisnis Utama/ Core Business Activity	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operation	Jumlah Aset 31 Desember 2023/ Total Assets December 31, 2023 Rp	Jumlah Pendapatan Tahun 2023/ Total Revenues For 2023 Rp
PT PPA Finance ("PT PPAF")	Jakarta	Pembiayaan/Financing	99.999	2009	260,388	21,992
PT PPA Kapital ("PT PPAK")	Jakarta	Investasi/Investment	99.999	2012	2,025,668	23,357

Sejak tahun 2020, PT PPAK telah memenuhi persyaratan sebagai entitas investasi, sehingga PT PPAK tidak mengkonsolidasi seluruh entitas yang dikategorikan sebagai entitas anak (sesuai dengan PSAK 110).

Perusahaan dan Entitas Anak selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "Grup".

• **PT PPAF**

Berdasarkan surat persetujuan Menteri Negara BUMN No. S-360/MBU/2009 tanggal 27 Mei 2009, Perusahaan membentuk PT PPAF dengan kepemilikan saham sebesar 99,999%.

• **PT PPAK**

Berdasarkan persetujuan Menteri Negara BUMN melalui surat No. S-372/MBU/2011 tanggal 22 Juni 2011, dan memo M-10/PPA/ID/0317, kepemilikan saham Perusahaan pada PT PPAK sebesar 99,999%.

1b. Subsidiaries Structure

The Company has control over the subsidiaries as of December 31, 2024 and 2023 as follows:

Since 2020, PT PPAK has met the requirements as an investment entity, and therefore PT PPAK does not consolidate all entities that are categorized as subsidiaries (in accordance with PSAK 110).

The Company and its Subsidiaries hereinafter jointly referred to as "Group".

• **PT PPAF**

Based on the approval of the State Minister-Owned Enterprises No. S-360/MBU/2009 dated May 27, 2009, the Company established PT PPAF with the shares ownership of 99.999%.

• **PT PPAK**

Based on the approval of the State Minister-Owned Enterprises through the letter No. S-372/MBU/2011 dated June 22, 2011, and memo M-10/PPA/ID/0317, of the Company's shares in PT PPAK amounting to 99.999%.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Anggaran dasar PT PPAK telah mengalami perubahan berdasarkan pada Akta No. 6 tanggal 6 Mei 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta Utara. Akta perubahan ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0035499.AH.01.02 Tahun 2020. Dengan adanya perubahan tersebut, PT PPAK menjadi entitas investasi sehingga per 1 Januari 2020, PT PPAK tidak lagi mengkonsolidasi seluruh laporan keuangan entitas anaknya.

Mulai 2020, PT PPAK bersama-sama dengan Perusahaan memenuhi persyaratan sebagai entitas investasi kualifikasi sebagaimana diatur dalam PSAK 110 Laporan Keuangan Konsolidasian, oleh karena itu investasi di entitas yang dikendalikan-serta investasi dalam entitas asosiasi dan ventura bersama diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL) sesuai PSAK 109 dengan pengecualian untuk entitas anak yang dianggap perpanjangan tangan dari aktivitas investasi PT PPAK (yaitu entitas anak yang bukan merupakan entitas investasi (sesuai dengan PSAK 110) yang hanya memberikan jasa manajemen investasi ke PT PPAK).

Sesuai dengan perubahan yang terjadi atas kegiatan yang dilakukan PT PPAK, maka PT PPAK telah memenuhi persyaratan sebagai entitas investasi (sesuai dengan PSAK 110) berdasarkan fakta bahwa PT PPAK:

- a. Memperoleh dana dari satu atau lebih investor dengan tujuan menyediakan jasa pengelolaan investasi kepada investor;
- b. Menyatakan komitmen kepada investor bahwa tujuan bisnisnya adalah untuk menginvestasikan dana yang semata-mata untuk memperoleh imbal hasil dari kenaikan nilai modal, penghasilan investasi, atau keduanya; dan
- c. Mulai mengukur dan mengevaluasi kinerja dari seluruh investasinya (yaitu investasi properti, investasi pada entitas anak, asosiasi, ventura bersama) secara substansial berdasarkan nilai wajar.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

The Articles of Association of PT PPAK have been amended based on Deed No. 6 dated May 6, 2020, drawn up before Notary Desman, S.H., M.Hum., a Notary in North Jakarta. This amendment deed has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0035499.AH.01.02 Year 2020. Following this amendment, PT PPAK has become an investment entity; therefore, as of January 1, 2020, PT PPAK no longer consolidates the financial statements of its subsidiaries.

As of 2020, PT PPAK together with the Company fulfilled the requirements as the qualifying investment entities as stipulated in PSAK 110 Consolidated Financial Statement, therefore investment in the controlled entity as well as the investment in the associated and joint venture entities are measured at the fair value through profit or loss (FVTPL) in accordance with PSAK 109 with the exception for the subsidiary considered as extension of the investment activities of PT PPAK (i.e. subsidiaries that are not investment entities (in accordance with PSAK 110) that only provides the investment management service to PT PPAK).

In accordance with the changes occurring in the activities carried out by PT PPAK, PT PPAK has fulfilled the requirements as the investment entity (in accordance with PSAK 110) based on the fact that PT PPAK:

- a. Obtains the funds from one or more investors with the objective of providing the investment management services to investors;*
- b. Represents the commitment to the investors that its business objective shall be to invest the funds solely to obtain the profit sharing from the increase in the capital value, investment income, or both; and*
- c. Starts to measure and evaluate the performance of all of its investments (i.e. property investment, investment in subsidiaries, associates, joint ventures) substantially based on the fair value.*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Selanjutnya, PT PPAK memenuhi karakteristik khusus beserta pedoman penerapan sesuai PSAK 110 yang harus dipertimbangkan dalam mengevaluasi apakah PT PPAK merupakan entitas investasi atau bukan, yaitu:

- Memiliki lebih dari satu investasi;
- Memiliki lebih dari satu investor;
- Memiliki investor yang bukan merupakan pihak-pihak berelasi dari entitas; dan
- Memiliki bagian kepemilikan saham dalam bentuk ekuitas dan kepentingan serupa.

1.c. Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN dan Keputusan Direktur Utama PT Danareksa (Persero) selaku Pemegang Saham:

- SK-326/MBU/10/2020, 9 Oktober 2020;
- SK-309/MBU/09/2021, 14 September 2021;
- SK-367/MBU/12/2023; KPPS-47/037/DNRK, 15 Desember 2023;

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024
Dewan Komisaris:	
Komisaris	Marwanto Harjowiryo
Sekretaris Dewan Komisaris	Diah Triana
Direksi:	
Direktur Utama	Muhammad Teguh Wirahadikusumah*
Direktur Investasi	Ridha Farid Lesmana*
Direktur Special Asset Management	Muhammad Teguh Wirahadikusumah***
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Tree Asih Putra Sianturi*

*) Efektif sejak tanggal 15 Desember 2023

**) Mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 19 Januari 2024

***) Merupakan Pelaksana Tugas

Manajemen kunci meliputi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

Susunan Komite Audit per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	2024
Komite Audit	
Ketua	Marwanto Harjowiryo*
Anggota	Royza Fauzi**
Anggota	--

*) Merupakan Komisaris

**) Efektif sejak tanggal 2 Januari 2024

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Subsequently, PT PPAK fulfills the special characteristics together with the guideline on application in accordance with PSAK 110 that shall be considered in evaluating whether PT PPAK is an investment entity or not, i.e.:

- Have more than one investments;
- Have more than one investors;
- Have investors that are not related parties of the entity; and
- Have the portion of shares ownership in form of equity and similar interests.

1.c. The Board of Commissioners, Directors and Employees

Based on the Decree of the State Minister for SOE's and President Director PT Danareksa (Persero) as Shareholders:

- SK-326/MBU/10/2020, October 9, 2020;
- SK-309/MBU/09/2021, September 14, 2021;
- SK-367/MBU/12/2023; KPPS-47/037/DNRK, December 15, 2023;

The composition of the Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023
Board of Commissioners		
Commissioner	Marwanto Harjowiryo	Marwanto Harjowiryo
Secretary of the Board of Commissioner	Diah Triana	Diah Triana
Directors:		
President Director	Muhammad Teguh Wirahadikusumah*	Muhammad Teguh Wirahadikusumah*
Director of Investment	Ridha Farid Lesmana*	Ridha Farid Lesmana*
Director of Special Asset Management	J.F. Hasudungan**	J.F. Hasudungan**
Director of Finance and Risk Management	Tree Asih Putra Sianturi*	Tree Asih Putra Sianturi*

Effective from December 15, 2023 (*)

Resignation is effective starting January 19, 2024 (**)

Acts as the Acting Official (***)

Key management includes members of the Company's Board of Commissioners and Directors.

The composition of Audit Committee as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024	2023
Audit Committee		
Head	Marwanto Harjowiryo*	Marwanto Harjowiryo*
Member	Ahmad Malkan Lubis	Ahmad Malkan Lubis
Member	Awal Susmanto	Awal Susmanto

*) Represent Commissioner

**) Effective from January 2, 2024

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Susunan Satuan Pengendalian Internal per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The composition of the Internal Control Unit as of December 31, 2024 and 2023 is as follows:

2024		2023	
Satuan Pengendalian Internal			Internal Control Unit
Kepala Satuan Pengendalian Internal	Muhammad Reza Maulana	Muhammad Reza Maulana	Head of Internal Control Unit
Kepala Spesialis	Rudiawan Noor Aliamsyah	Erwin Adiyatno	Lead Specialist
Anggota Spesialis	Alexander Jascha Parningotan Napitupulu	Dady Atma Priyagi	Member of Specialist
Anggota Spesialis	Elsa Andriani	Fajar Setianto	Member of Specialist
Junior Spesialis	--	Elsa Andriani	Junior Specialist

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Grup memiliki 144 dan 193 karyawan tetap (tidak diaudit).

As of December 31, 2024 and 2023, the Group had 144 and 193 permanent employees (unaudited).

1.d. Penawaran Umum Obligasi Perusahaan

Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020 ("Obligasi I")

Perusahaan telah menerbitkan Obligasi I senilai Rp642.100 yang efektif pada 1 September 2020. Pencatatan dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 September 2020 sesuai Surat Pengumuman Bursa No. Peng-P-00217/BEI.PP3/09-2020.

Pada tahun 2023, PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") memberikan peringkat idAA (Double A) atas Obligasi I Seri A, B dan C yang berlaku sampai dengan 1 Oktober 2024.

Pada tahun 2024, Pefindo memberikan peringkat idAA (Double A) atas Obligasi I Seri B dan C yang berlaku sampai dengan 1 Oktober 2025.

Obligasi II Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2022 ("Obligasi II")

Perusahaan telah menerbitkan Obligasi II senilai Rp1.682.200 yang efektif pada 8 Juli 2022. Pencatatan dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Juli 2022 sesuai Surat Pengumuman Bursa No. Peng-P-00274/BEI.PP3/07-2022.

Pada tahun 2023, PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch Ratings") memberikan peringkat AA(idn) atas Obligasi II Seri A dan B, sesuai Surat No. 114/DIR/RATLTR/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023.

Pada tahun 2024, Fitch Ratings memberikan peringkat AA-(idn) atas Obligasi II Seri A dan B, sesuai Surat No. 125/DIR/RATLTR/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024.

1.d. Public Offering of Company's Bonds

Bonds I Perusahaan Pengelola Aset Year 2020 ("Bonds I")

The Company issued Bonds I of Rp642,100, which became effective on September 1, 2020. The bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on September 2, 2020, in accordance with Exchange Announcement Letter No. Peng-P-00217/BEI.PP3/09-2020.

In 2023, PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") assigned a rating of idAA (Double A) for Bonds I Series A, B, and C, which is valid until October 1, 2024.

In 2024, Pefindo assigned a rating of idAA (Double A) for Bonds I Series B and C, which is valid until October 1, 2025.

Bonds II Perusahaan Pengelola Aset Year 2022 ("Bonds II")

The Company issued Bonds II in 2022 of Rp1,682,200, which became effective on July 8, 2022. The bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on July 11, 2022, in accordance with Exchange Announcement Letter No. Peng-P-00274/BEI.PP3/07-2022.

In 2023, PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch Ratings") assigned a rating of AA(idn) for Bonds II Series A and B, as stated in Letter No. 114/DIR/RATLTR/VII/2023 dated July 7, 2023.

In 2024, Fitch Ratings assigned a rating to bonds II serie A and B, with a rating of AA(idn) according to the of AA-(idn) Letter No. 125/DIR/RATLTR/VII/2024 dated July 4, 2024.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tahun 2024, Pefindo memberikan peringkat idAA (*Double A*) atas Obligasi II Seri A dan B, dengan yang berlaku sampai dengan 8 Juli 2025.

In 2024, Pefindo has assigned the idAA (Double A) rating to Bonds II Serie A and B, which is valid until July 8, 2025.

No.	Obligasi/ Bonds	Jumlah/Amount (Rp. Juta/Million)	Tingkat Bunga/ Interest Rate	Lembaga Pemeringkat/ Rating Agency	Peringkat/ Rating	Tenor/Tenor (Tahun/Years)	Tanggal Penerbitan/ Issued Date	Tanggal Jatuh Tempo/ Due Date	Status/ Status
Obligasi I PPA Tahun 2020/ Bonds I PPA Year 2020									
1	Seri/Serie A	100,000	9.95%	Pefindo	idAA	3	1 September 2020/ September 1, 2020	1 September 2023/ September 1, 2023	Lunas/ Paid
2	Seri/Serie B	345,000	10.55%	Pefindo	idAA	5	1 September 2020/ September 1, 2020	1 September 2025/ September 1, 2025	Belum Lunas/ Outstanding
3	Seri/Serie C	197,100	11.00%	Pefindo	idAA	7	1 September 2020/ September 1, 2020	1 September 2027/ September 1, 2027	Belum Lunas/ Outstanding
Obligasi II PPA Tahun 2022/ Bonds II PPA Year 2022									
1	Seri/Serie A	890,600	7.00%	Pefindo	idAA	3	8 Juli 2022/ July 8, 2022	8 Juli 2025/ July 8, 2025	Belum Lunas/ Outstanding
2	Seri/Serie B	791,600	7.80%	Pefindo	idAA	5	8 Juli 2022/ July 8, 2022	8 Juli 2027/ July 8, 2027	Belum Lunas/ Outstanding

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

Berikut ini adalah kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Grup yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh periode yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

2.a. Kepatuhan Terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah-Ikatan Akuntan Indonesia (DSAS-IAI), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII. G. 7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik.

2. Material Accounting Policies Information

The following are the significant accounting policies applied in the preparation of the Group's financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards. These policies have been applied consistently to all periods presented, unless otherwise stated.

2.a. Compliance with Financial Accounting Standards (SAK)

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia, which include the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and the Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK-IAI) and the Sharia Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAS-IAI), as well as applicable Capital Market regulations, including the Financial Services Authority/Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (OJK/Bapepam-LK) Regulation No. VIII.G.7 on guidelines for financial statement presentation and the decision of the Head of Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 on the presentation and disclosure of financial statements by issuers or public companies.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2.b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasian yaitu berdasarkan biaya historis, biaya perolehan kini, nilai realisasi neto, Nilai Wajar atau jumlah yang dapat dipulihkan berdasarkan SAK yang berlaku.

Laporan arus kas konsolidasian disajikan dengan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup.

Setiap entitas di dalam Grup menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan dari setiap entitas diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

2.c. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Mulai dari 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK telah diubah sesuai dengan penerbitan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI").

Berikut amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 116: Sewa tentang Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-Balik;
- Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang;
- Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan;
- Amendemen PSAK 207: Laporan Arus Kas dan amendemen PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok; dan

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2.b. The Basis of Measurement and Preparation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements are prepared and presented on the going concern assumption and on an accrual basis, except for the consolidated cash flow statement.

The basis for measuring consolidated financial statements is in accordance with historical cost, current acquisition cost, net realizable value, fair value, or recoverable amount as stipulated by the applicable Indonesian Financial Accounting Standards (SAK).

The consolidated cash flow statement is presented using the direct method, classifying cash flows into operating, investing, and financing activities.

The presentation currency used in preparing these consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah, which is the functional currency of the Group.

Each entity within the Group determines its own functional currency, and elements in the financial statements of each entity are measured based on that functional currency.

2.c. Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") Effective in the Current Year

Starting January 1, 2024, references to each PSAKs and ISAKs has been changed in accordance with the issuance by the Financial Accounting Standards Board of Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI").

The following amendments to standards which are effective for annual reporting beginning on or after January 1, 2024, with early adoption permitted:

- *Amendments PSAK 116: Lease regarding Lease Liability in a Sale and Leaseback;*
- *Amendments PSAK 201: Presentation of Financial Statements regarding Classification of Liabilities as Current or Noncurrent;*
- *Amendments PSAK 201: Presentation of Financial Statements related to Non- Current Liabilities with Covenants;*
- *Amendments PSAK 207: Statement of Cash Flows and PSAK 107: Financial Instrument: Disclosure regarding Supplier Finance Arrangements; and*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Revisi PSAK 409: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dan Revisi PSAK 401: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Implementasi amendemen standar tersebut tidak memiliki dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

2.d. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Grup seperti disebutkan pada Catatan 1.b.

Entitas anak adalah entitas yang dikendalikan oleh Grup, yakni Grup terekspos, atau memiliki hak, atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbal hasil tersebut melalui kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari entitas (kekuasaan atas *investee*).

Keberadaan dan dampak dari hak suara potensial dimana Grup memiliki kemampuan praktis untuk melaksanakan (yakni hak substantif) dipertimbangkan saat menilai apakah Grup mengendalikan entitas lain.

Laporan keuangan konsolidasian Grup mencakup hasil usaha, arus kas, aset dan liabilitas dari Perusahaan dan seluruh entitas anak dikendalikan oleh Perusahaan. Entitas anak dikonsolidasikan sejak tanggal efektif akuisisi, yaitu tanggal dimana Grup secara efektif memperoleh pengendalian atas bisnis yang diakuisisi, sampai tanggal pengendalian berakhir.

Grup menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi dan peristiwa lain dalam keadaan yang serupa. Seluruh transaksi, saldo, laba, beban, dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam Grup dieliminasi secara penuh untuk mencerminkan posisi keuangan sebagai satu kesatuan usaha.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- Revision PSAK 409: Accounting for Zakat, Infaq, dan Sadaqah and Revision PSAK 401: Presentation of Sharia Financial Statements.

The implementation of these standard amendment had no material impact on the amounts reported for the current period or prior financial year.

2.d. Consolidation Principles

The consolidated financial statements include the Group's financial statements as mentioned in Note 1.b.

A subsidiary is an entity controlled by the Group, where the Group is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its current power to direct the relevant activities of the entity (control over the *investee*).

The existence and impact of potential voting rights that the Group has the practical ability to exercise (i.e., substantive rights) are considered when assessing whether the Group controls another entity.

The consolidated financial statements of the Group include the results of operations, cash flows, assets, and liabilities of the Company and all subsidiaries controlled by the Company. Subsidiaries are consolidated from the effective acquisition date, which is the date when the Group effectively obtains control over the acquired business, until the date control ceases.

The Group prepares the consolidated financial statements using the same accounting policies for transactions and other events under similar circumstances. All intra-group transactions, balances, profits, expenses, and cash flows related to transactions between entities within the Group are fully eliminated to reflect the financial position as a single economic entity.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Grup mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non-pengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan non-pengendali memiliki saldo defisit. Grup menyajikan kepentingan non-pengendali di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik entitas induk.

Jika Grup kehilangan pengendalian, maka Grup:

- a. Menghentikan pengakuan aset (termasuk *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada jumlah tercatatnya ketika pengendalian hilang;
- b. Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan non-pengendali pada entitas anak terdahulu ketika pengendalian hilang (termasuk setiap komponen penghasilan komprehensif lain yang diatribusikan pada kepentingan non-pengendali);
- c. Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima (jika ada) dari transaksi, peristiwa, atau keadaan yang mengakibatkan hilangnya pengendalian;
- d. Mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian;
- e. Mereklasifikasi ke laba rugi, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba jika disyaratkan oleh PSAK lain, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam kaitan dengan entitas anak; dan
- f. Mengakui perbedaan apa pun yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laba rugi yang diatribusikan kepada entitas induk.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh kepentingan non-pengendali berubah, Grup menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan non-pengendali untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak.

Selisih antara jumlah di mana kepentingan non-pengendali disesuaikan dan nilai wajar dari jumlah yang diterima atau dibayarkan diakui langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik dari entitas induk.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

The Group attributes profit or loss and each component of other comprehensive income to the owners of the parent entity and non-controlling interests, even if this results in non-controlling interests having a deficit balance. The Group presents non-controlling interests in equity in the consolidated statement of financial position, separate from the equity of the parent entity's owners.

If the Group loses control, it will:

- a. *Derecognize the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary at their carrying amounts when control is lost;*
- b. *Derecognize the carrying amount of any non-controlling interest in the former subsidiary when control is lost (including any component of other comprehensive income attributed to non-controlling interests);*
- c. *Recognize the fair value of any consideration received (if any) from transactions, events, or circumstances that result in the loss of control;*
- d. *Recognize any remaining investment in the former subsidiary at its fair value at the date control is lost;*
- e. *Reclassify to profit or loss, or transfer directly to retained earnings if required by other PSAKs, the amounts recognized in other comprehensive income in relation to subsidiaries; and*
- f. *Recognize any resulting difference as a gain or loss in profit or loss attributable to the parent entity.*

Changes in the parent entity's ownership interest in a subsidiary that do not result in the loss of control are equity transactions (i.e., transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of equity held by non-controlling interests changes, the Group adjusts the carrying amounts of controlling and non-controlling interests to reflect the relative changes in ownership in the subsidiary.

The difference between the amount by which the non-controlling interest is adjusted and the fair value of the amount received or paid is recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent entity.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2.e. Kombinasi bisnis entitas sepengendali

Transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada dalam suatu Grup yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut tidak dapat menimbulkan keuntungan atau kerugian bagi Grup secara keseluruhan ataupun bagi entitas individual dalam Grup tersebut. Berhubung transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas bisnis yang dipertukarkan, maka transaksi tersebut diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan.

Entitas yang menerima bisnis mengakui selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali di ekuitas dan menyajikannya dalam akun "Tambahan Modal Disetor".

Dalam penerapan metode penyatuan kepemilikan, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung, untuk periode terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali dan untuk periode komparatif sajian, disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian. Jumlah tercatat dari unsur-unsur laporan keuangan tersebut merupakan jumlah tercatat dari entitas yang bergabung dalam kombinasi bisnis entitas sepengendali.

Grup menyajikan aset neto entitas yang bergabung yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebelum tanggal efektif kombinasi bisnis sebagai "Proforma ekuitas yang timbul dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali."

Entitas yang melepas bisnis mengakui selisih antara jumlah imbalan yang diterima dan jumlah tercatat bisnis yang dilepas di ekuitas dan menyajikannya dalam akun "Tambahan Modal Disetor."

2.e. Business Combinations of Entities Under Common Control

Transactions involving business combinations of entities under common control, such as the transfer of businesses conducted as part of a reorganization of entities within the same Group, do not constitute a change in economic substance ownership. As such, these transactions cannot result in gains or losses for the Group as a whole or for individual entities within the Group. Since transactions involving business combinations of entities under common control do not result in a change in the economic substance of the ownership of the exchanged businesses, these transactions are recognized at carrying amounts based on the pooling of interests method.

The entity receiving the business recognizes the difference between the transferred consideration and the carrying amount of each transaction involving business combinations of entities under common control in equity and presents it in the "Additional Paid-in Capital" account.

In applying the method of pooling of interests, the financial statement elements of the combining entities for the period of the business combination of entities under common control and for the comparative presentation period are presented as if the combination had occurred from the beginning of the period in which the combining entities were under common control. The carrying amount of these financial statement elements is the carrying amount of the combining entities in the business combination under common control.

The Group presents the net assets of the combining entities attributable to the parent company's Shareholders before the effective date of the business combination as "Proforma equity arising from transactions involving entities under common control."

Entities disposing of a business recognize the difference between the amount of consideration received and the carrying amount of the disposed business in equity and present it in the "Additional Paid-in Capital" account.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2.f. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Dalam menyiapkan laporan keuangan, setiap entitas di dalam Grup mencatat dengan menggunakan mata uang dari lingkungan ekonomi utama di mana entitas beroperasi ("mata uang fungsional"). Mata uang fungsional Perusahaan dan seluruh entitas anak adalah Rupiah.

Transaksi-transaksi selama periode berjalan dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan kurs spot antara Rupiah dan valuta asing pada tanggal transaksi.

Pada akhir periode pelaporan, pos moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah menggunakan kurs penutup, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

	2024	2023
1 Dolar Amerika Serikat	16,162	15,416

Selisih kurs yang timbul dari penyelesaian pos moneter dan dari penjabaran pos moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

2.g. Transaksi dan Saldo dengan Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalam catatan ini dirujuk sebagai "entitas pelapor"):

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya);

2.f. Transaction and Balance in Foreign Currency

In preparing financial statements, each of the entities within the Group record by using the currency of the primary economic environment in which the entity operates ("the functional currency"). The functional currency of the Company and all subsidiaries is Rupiah.

Transactions during the reporting period in foreign currencies are recorded in Rupiah at the spot rate between the Rupiah and the foreign currency on the transaction date.

At the end of the reporting period, monetary items in foreign currencies are translated into Rupiah using the closing rate, which is the middle rate of Bank Indonesia as of December 31, 2024 and 2023 as follows:

Exchange rate differences arising from the settlement of monetary items and from the translation of monetary items in foreign currencies are recognized in profit or loss.

2.g. Transaction and Balance with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the reporting entity that is preparing its financial statements (in this note referred to as the "reporting entity"):

- a) *A person or a close family member of that person has a relationship with the reporting entity if that person:*
 - i. *Has control or joint control over the reporting entity;*
 - ii. *Has significant influence over the reporting entity; or*
 - iii. *Is a key management personnel of the reporting entity or of the parent entity of the reporting entity.*
- b) *An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:*
 - i. *The entity and the reporting entity are members of the same group (meaning that the parent entity, subsidiaries, and further subsidiaries are related to each other);*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, di mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
- iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas);
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok di mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada Pemerintah, instansi pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of an entity that is a member of the same group as the other entity);
- iii. Both entities are joint ventures of the same third party;
- iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associated entity of a third entity;
- v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of one of the reporting entities or of an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is the sponsoring entity of the plan, then the sponsor entity is also related to the reporting entity;
- vi. The entity is controlled or collectively controlled by a person identified in (a);
- vii. An individual identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a key management personnel of the entity (or the parent entity of the entity);
- viii. The entity, or members of a group of which the entity is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent entity of the reporting entity.

An entity related to the government is an entity that is controlled, jointly controlled, or influenced by the Government. The Government refers to Government bodies and similar agencies, whether local, national, or international.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant notes.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2.h. Instrumen Keuangan

Pengukuran Awal Aset Keuangan

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pada saat pengakuan awal aset keuangan atau liabilitas keuangan, Grup mengukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah atau dikurang dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut. Biaya transaksi yang dikeluarkan sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan penerbitan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan pada nilai wajar melalui laba rugi dibebankan segera.

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut: aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

i. Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi ketika kedua kondisi berikut terpenuhi:

1. Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual saja; dan
2. Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*Solely Payments of Principal and Interest-SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

2.h. Financial Instrument

Initial Measurement of Financial Assets

The Group recognizes a financial asset or financial liability in the statement of financial position only if and when the Group becomes a party to the contractual provisions of the instrument. Upon initial recognition of a financial asset or financial liability, the Group measures it at fair value. If the financial asset or financial liability is not measured at fair value through profit or loss, the fair value is adjusted for transaction costs directly attributable to the acquisition or issuance of the financial asset or financial liability. Transaction costs incurred in connection with the acquisition of financial assets and issuance of financial liabilities classified as at fair value through profit or loss are immediately expensed.

Subsequent Measurement of Financial Assets

The Group's financial assets are classified as follows: financial assets measured at amortized acquisition cost, financial assets measured at fair value through other comprehensive income, and financial assets measured at fair value through profit or loss.

i. Financial Assets Measured at Amortized Acquisition Cost

Financial assets are measured at amortized cost when both of the following conditions are met:

1. *The financial asset is held within a business model whose objective is to hold financial assets in order to collect contractual cash flows; and*
2. *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.*

These financial assets are measured at the amount recognized on initial recognition, less principal repayments, and then adjusted for cumulative amortization of the difference between the initial recognition amount and the amount at maturity, and for impairment losses.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan keuangan dihitung dengan metode menggunakan suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi.

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak material jumlahnya atau tidak sering.

ii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain ("FVTOCI")

Aset keuangan diukur pada FVTOCI jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

1. Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang tujuannya akan terpenuhi dengan mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
2. Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga (*Solely Payments of Principal and Interest-SPPI*) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan tersebut diukur sebesar nilai wajar, dimana keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan atau kerugian akibat perubahan kurs, diakui pada laba rugi. Ketika aset keuangan tersebut dihentikan pengakuannya atau direklasifikasi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

iii. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi ("FVTPL")

Aset keuangan yang diukur pada FVTPL adalah aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau untuk diukur FVTOCI.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Financial income is calculated using the effective interest rate method and recognized in profit or loss. Changes in fair value are recognized in profit or loss when the asset is derecognized or reclassified.

Financial assets classified as financial assets measured at amortized cost can be sold when there is an increase in credit risk. Derecognition for other reasons is permitted, but the amount of such sales must be immaterial or infrequent.

ii. Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income ("FVTOCI")

The financial assets are measured at FVTOCI if these conditions are met:

1. *The financial asset is managed within a business model whose objective is achieved by collecting contractual cash flows and selling financial assets; and*
2. *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest (SPPI) on the principal amount outstanding.*

These financial assets are measured at fair value, with gains or losses recognized in other comprehensive income, except for impairment losses and gains or losses arising from foreign currency fluctuations, which are recognized in profit or loss. When the financial asset is derecognized or reclassified, any cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment.

iii. Financial Assets Measured at Fair Value Through Profit or Loss ("FVTPL")

Financial assets measured at FVTPL are financial assets that do not meet the criteria to be measured at amortized cost or FVTOCI.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Setelah pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada FVTPL diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan diakui dalam laba rugi.

Aset keuangan berupa derivatif dan investasi pada instrumen ekuitas tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau kriteria untuk diukur pada FVTOCI, sehingga diukur pada FVTPL. Namun demikian, Perusahaan dapat menetapkan pilihan yang tidak dapat dibatalkan saat pengakuan awal atas investasi pada instrumen ekuitas yang bukan untuk diperjualbelikan dalam waktu dekat (*held for trading*) untuk diukur pada FVTOCI. Penetapan ini menyebabkan semua keuntungan atau kerugian disajikan di penghasilan komprehensif lain, kecuali pendapatan dividen tetap diakui di laba rugi. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain direklasifikasi ke saldo laba tidak melalui laba rugi.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Grup mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi, kecuali:

- a. Liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi. Liabilitas yang dimaksud, termasuk derivatif yang merupakan liabilitas, selanjutnya akan diukur pada nilai wajar;
- b. Liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan yang tidak memenuhi kualifikasi penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan;
- c. Kontrak jaminan keuangan dan komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar. Setelah pengakuan awal, penerbit kontrak dan penerbit komitmen selanjutnya mengukur kontrak tersebut sebesar jumlah yang lebih tinggi antara:
 - (i) Jumlah penyisihan kerugian; dan
 - (ii) Jumlah yang pertama kali diakui dikurangi dengan, jika sesuai, jumlah kumulatif dari penghasilan yang diakui sesuai dengan prinsip PSAK 115.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Subsequent to initial recognition, financial assets measured at FVTPL are measured at fair value. Gains or losses arising from changes in the fair value of these financial assets are recognized in profit or loss.

Financial assets such as derivatives and investments in equity instruments do not meet the criteria to be measured at amortized cost or the criteria to be measured at FVTOCI, and therefore are measured at FVTPL. However, the Company can make an irrevocable election at initial recognition for investments in equity instruments that are not held for trading to be measured at FVTOCI. This election results in all gains or losses being presented in other comprehensive income, except that dividend income remains recognized in profit or loss. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified to retained earnings without affecting profit or loss.

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

The Group classifies all financial liabilities such that after initial recognition, financial liabilities are measured at amortized cost, except for:

- a. *Financial liabilities at fair value through profit or loss. Such liabilities, including derivatives that are liabilities, shall be subsequently measured at fair value;*
- b. *Financial liabilities arising when the transfer of financial assets does not meet the criteria for derecognition or when the approach of continuing involvement is applied;*
- c. *Financial guarantee contracts and commitments to provide loans at below-market interest rates. After initial recognition, the issuer of the contract and the issuer of the commitment subsequently measure the contract at the higher of:*
 - (i) The amount of expected credit losses; and*
 - (ii) The amount initially recognized less, if appropriate, the cumulative amount of income recognized in accordance with PSAK 115.*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- d. Imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis ketika PSAK 103 diterapkan. Imbalan kontinjensi selanjutnya diukur pada nilai wajar dan selisihnya dalam laba rugi.

Saat pengakuan awal, Grup dapat membuat penetapan yang tak terbatal untuk mengukur liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, jika diizinkan oleh standar atau jika penetapan akan menghasilkan informasi yang lebih relevan, karena:

- a. Mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai "accounting mismatch") yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda; atau
- b. Sekelompok liabilitas keuangan atau aset keuangan dan liabilitas keuangan dikelola dan kinerjanya dievaluasi berdasarkan nilai wajar, sesuai manajemen risiko atau strategi investasi yang terdokumentasi, dan informasi dengan dasar nilai wajar dimaksud atas kelompok tersebut disediakan secara internal untuk personil manajemen kunci Grup.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Grup secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- d. *Contingent consideration recognized by the acquirer in a business combination when PSAK 103 is applied. Subsequent to initial recognition, contingent consideration is measured at fair value, with any changes recognized in profit or loss.*

At initial recognition, the Group may make an irrevocable election to measure financial liabilities at fair value through profit or loss if permitted by the standards or if the election will result in more relevant information, because:

- a. *It eliminates or significantly reduces inconsistencies in measurement or recognition (sometimes referred to as "accounting mismatch") that may arise from measuring assets or liabilities or recognizing gains and losses on assets or liabilities on different bases; or*
- b. *A group of financial liabilities or financial assets and financial liabilities are managed and performance is evaluated based on fair value, according to documented risk management or investment strategies, and information based on fair value for the group is internally provided to key management personnel of the Group.*

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

The Group derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or the Group transfers the contractual rights to receive the cash flows from the financial asset, or retains the contractual rights to receive the cash flows but also assumes a contractual obligation to pay the cash flows received to one or more recipients under a pass-through arrangement. If the Group substantially transfers all the risks and rewards of ownership of a financial asset, the Group derecognizes the financial asset and recognizes separately as an asset or liability any rights and obligations created or retained in the transfer.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jika Grup secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Grup mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut. Jika Grup secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Grup dan tetap mengakui aset keuangan tersebut.

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup mengakui kerugian kredit ekspektasian untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan yang diukur pada FVTOCI.

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengukur penyisihan kerugian instrumen keuangan sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Namun, jika risiko kredit instrumen keuangan tersebut tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, maka mengakui sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.

Grup menerapkan metode yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian tersebut terhadap piutang usaha dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan yang signifikan.

Grup menganggap aset keuangan gagal bayar ketika pihak ketiga tidak mampu membayar kewajiban kreditnya kepada Grup secara penuh. Periode maksimum yang dipertimbangkan ketika memperkirakan kerugian kredit ekspektasian adalah periode maksimum kontrak dimana Grup terekspos terhadap risiko kredit.

Penyisihan kerugian diakui sebagai pengurang jumlah tercatat aset keuangan kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada FVTOCI yang penyisihan kerugiannya diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Sedangkan jumlah kerugian kredit ekspektasian (atau pemulihan kerugian kredit) diakui dalam laba rugi, sebagai keuntungan atau kerugian penurunan nilai.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

If the Group has not substantially transferred and does not retain all risks and rewards of ownership of the financial asset and still retains control, the Group recognizes the financial asset to the extent of its continuing involvement with the financial asset. If the Group substantially retains all risks and rewards of ownership of the financial asset, the Group continues to recognize the financial asset.

The Group derecognizes a financial liability, only when the financial liability is extinguished, i.e., when the obligation specified in the contract is discharged, canceled, or expires.

Impairment of Financial Assets

The Group recognizes expected credit losses for financial assets measured at amortized cost and financial assets measured at FVTOCI.

At each reporting date, the Group measures the provision for financial instrument losses as the expected credit losses over the lifetime of the asset if the credit risk on the financial instrument has increased significantly since initial recognition. However, if the credit risk on the financial instrument has not increased significantly since initial recognition, the Group recognizes a provision for expected credit losses of 12 months.

The Group applied a simplified approach to measure such expected credit loss for accounts receivable and contract assets without a significant financing component.

The Group considers a financial asset to be in default when a third party is unable to fully meet its credit obligations to the Group. The maximum period considered when estimating expected credit losses is the maximum contractual period over which the Group is exposed to credit risk.

The provision for losses is recognized as a reduction in the carrying amount of financial assets, except for financial assets measured at FVTOCI, where the provision for losses is recognized in other comprehensive income. Expected credit losses (or recoveries of credit losses) are recognized in profit or loss, as impairment gains or losses.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dilakukan dengan suatu cara yang mencerminkan:

- i. Jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi;
- ii. Nilai waktu uang; dan
- iii. Informasi yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan.

Aset keuangan dapat dianggap tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal jika aset keuangan memiliki risiko kredit yang rendah pada tanggal pelaporan.

Risiko kredit pada instrumen keuangan dianggap rendah ketika aset keuangan tersebut memiliki risiko gagal bayar yang rendah, peminjam memiliki kapasitas yang kuat untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya dalam jangka waktu dekat dan memburuknya kondisi ekonomi dan bisnis dalam jangka waktu sepanjang mungkin, namun tidak selalu, menurunkan kemampuan peminjam untuk memenuhi kewajiban arus kas kontraktualnya.

Untuk menentukan apakah aset keuangan memiliki risiko kredit rendah, Grup dapat menggunakan peringkat risiko kredit internal atau penilaian eksternal. Misal, aset keuangan dengan peringkat "investment grade" berdasarkan penilaian eksternal merupakan instrumen yang memiliki risiko kredit yang rendah, sehingga tidak mengalami peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

The measurement of expected credit losses on financial instruments is conducted in a manner that reflects:

- i. An unbiased amount and a probability-weighted average determined by evaluating a range of possible outcomes;*
- ii. Time value of money; and*
- iii. Information that is reasonable and supportable, available without undue cost or effort at the reporting date, regarding past events, current conditions, and forecasts of future economic conditions.*

A financial asset may be considered to not have experienced a significant increase in credit risk since initial recognition if the financial asset has low credit risk at the reporting date.

Credit risk on a financial instrument is considered low when the financial asset has a low risk of default, the borrower has a strong capacity to meet its contractual cash flow obligations in the near term, and deteriorating economic and business conditions over time, though not always, reduce the borrower's ability to meet its contractual cash flow obligations.

To determine whether a financial asset has low credit risk, the Group may use internal credit risk ratings or external assessments. For example, financial assets with an "investment grade" rating based on external assessments are considered to have low credit risk and therefore have not experienced a significant increase in credit risk since initial recognition.

Effective Interest Rate Method

The effective interest rate method is used to calculate the amortized cost of a financial asset or liability (or a group of financial assets or liabilities) and to allocate interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts over the expected life of the financial instrument, or, if more appropriate, a shorter period to obtain the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan.

Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

Reklasifikasi

Grup mereklasifikasi aset keuangan ketika Grup mengubah tujuan model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan sehingga penilaian sebelumnya menjadi tidak dapat diterapkan.

Jika Grup mereklasifikasi aset keuangan, maka diperlukan untuk menerapkan reklasifikasi secara prospektif sejak tanggal reklasifikasi. Keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai) atau bunga yang sebelumnya diakui tidak disajikan kembali.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan dari biaya perolehan diamortisasi menjadi FVTPL, maka nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perbedaan antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajarnya diakui dalam laporan laba rugi. Sebaliknya, jika Grup mereklasifikasi aset keuangannya dari FVTPL menjadi biaya perolehan diamortisasi, maka nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi menjadi nilai tercatat bruto baru.

Ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan dari biaya perolehan diamortisasi menjadi FVTOCI, nilai wajarnya diukur pada tanggal reklasifikasi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari selisih antara biaya perolehan diamortisasi sebelumnya dan nilai wajar diakui pada penghasilan komprehensif lain. Tingkat suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit yang diharapkan tidak disesuaikan sebagai hasil dari reklasifikasi.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

When calculating the effective interest rate, the Company estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, such as prepayment options, call options, and similar options, but does not consider future credit losses.

This calculation includes all commissions and other forms of compensation paid or received by parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Reclassification

The Group reclassifies financial assets when it changes its business model for managing financial assets, so that the previous classification is no longer applicable.

If the Group reclassifies a financial asset, the reclassification must be applied prospectively from the reclassification date. Gains, losses (including impairment gain/losses), or interest previously recognized are not restated.

When the Group reclassifies financial assets from amortized cost to FVTPL, their fair value is measured at the date of reclassification. Any gain or loss arising from the difference between the previous amortized cost and the fair value is recognized in the income statement. Conversely, if the Group reclassifies its financial assets from FVTPL to amortized cost, the fair value at the date of reclassification becomes the new gross carrying amount.

When the Group reclassifies financial assets from amortized cost to FVTOCI, their fair value is measured at the date of reclassification. Any gain or loss arising from the difference between the previous amortized cost and the fair value is recognized in other comprehensive income. The effective interest rate and the measurement of expected credit losses are not adjusted as a result of the reclassification.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sebaliknya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangannya dari FVTOCI menjadi biaya perolehan diamortisasi, aset keuangan tersebut direklasifikasi ke nilai wajarnya pada tanggal reklasifikasi. Namun, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dihilangkan dari ekuitas dan disesuaikan dengan nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

Akibatnya, pada tanggal reklasifikasi, aset keuangan diukur dengan cara yang sama seperti biaya perolehan diamortisasi.

Penyesuaian ini memengaruhi penghasilan komprehensif lain tetapi tidak memengaruhi laba rugi, dan karenanya bukan merupakan penyesuaian reklasifikasi. Suku bunga efektif dan pengukuran kerugian kredit ekspektasian tidak disesuaikan sebagai akibat dari reklasifikasi.

Pada saat Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori pengukuran FVTPL menjadi kategori pengukuran FVTOCI, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Sama halnya, ketika Grup mereklasifikasi aset keuangan keluar dari kategori FVTOCI menjadi kategori pengukuran FVTPL, aset keuangan tetap diukur pada nilai wajarnya. Keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui di penghasilan komprehensif lain direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi pada tanggal reklasifikasi.

Klasifikasi Sebagai Liabilitas dan Ekuitas

Liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas yang diterbitkan Grup diklasifikasikan sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Grup setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan Grup terutama terdiri dari pinjaman bank jangka pendek, utang usaha, beban akrual, utang lain-lain, liabilitas sewa, utang obligasi, surat berharga komersial dan pinjaman bank jangka panjang.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Conversely, when the Group reclassifies its financial assets from FVTOCI to amortized cost, the financial assets are reclassified at their fair value at the date of reclassification. However, cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are removed from equity and adjusted against the fair value of the financial assets at the date of reclassification.

As a result, at the date of reclassification, financial assets are measured in the same way as amortized cost.

These adjustments affect other comprehensive income but do not affect profit or loss, and therefore are not considered reclassification adjustments. The effective interest rate and the measurement of expected credit losses are not adjusted as a result of the reclassification.

When the Group reclassifies financial assets out of the FVTPL measurement category to the FVTOCI measurement category, the financial assets continue to be measured at their fair value. Similarly, when the Group reclassifies financial assets out of the FVTOCI measurement category to the FVTPL measurement category, the financial assets continue to be measured at their fair value. Cumulative gains or losses previously recognized in other comprehensive income are reclassified from equity to profit or loss as a reclassification adjustment at the date of reclassification.

Classification As Liabilities or Equity

Financial liabilities and equity instruments issued by the Group are classified according to the substance of the contractual arrangement and the definitions of financial liabilities and equity instruments.

Equity Instrument

Equity instruments are contracts that give residual rights over the Group's assets after deducting all of its liabilities. Equity instruments are recorded at the net proceeds received, less any direct issuance costs.

Financial Liabilities

The Group's financial liabilities primarily consist of short-term bank loans, trade payables, accrued expenses, other payables, lease liabilities, bond payables, commercial papers, and long-term bank loans.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pinjaman jangka pendek, utang usaha, beban akrual, utang lain-lain dan pinjaman bank jangka panjang pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Selisih antara hasil emisi (setelah dikurangi biaya transaksi) dan penyelesaian atau pelunasan pinjaman diakui selama jangka waktu pinjaman menggunakan metode suku bunga efektif.

Setelah pengakuan awal, jika jumlah tercatat berbeda dengan nilai nominal disebabkan penyesuaian premium atau diskonto, maka perbedaan tersebut diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk ijarah.

Saling Hapus Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan, jika dan hanya jika, Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut; dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengukuran dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam level yang berbeda dalam suatu hierarki nilai wajar berdasarkan pada apakah input suatu pengukuran dapat diobservasi dan signifikansi input terhadap keseluruhan pengukuran nilai wajar:

1. Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran (Level 1);

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Short-term loans, trade payables, accrued expenses, other payables, and long-term bank loans are initially measured at fair value, net of transaction costs, and are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

The difference between the issue proceeds (net of transaction costs) and the settlement or repayment of the loan is recognized over the term of the loan using the effective interest method.

After initial recognition, if the carrying amount differs from the nominal value due to premium or discount adjustments, the difference is amortized on a straight-line basis over the term of the sukuk ijarah.

Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities

Financial assets and financial liabilities are offset when, and only when, the Group currently has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Fair value of financial assets and liabilities is estimated for recognition and measurement purposes or for disclosure purposes.

Fair value is categorized into different levels within a fair value hierarchy based on the observability of the inputs used in the measurement and the significance of the inputs to the overall fair value measurement:

1. Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities that can be accessed at the measurement date (Level 1);

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam Level 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung maupun tidak langsung (Level 2); dan
3. Input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas (Level 3).

Dalam mengukur nilai wajar aset atau liabilitas, Grup sebisa mungkin menggunakan data pasar yang dapat diobservasi. Apabila nilai wajar aset atau liabilitas tidak dapat diobservasi secara langsung, Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaannya dan memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Perpindahan antara level hierarki wajar diakui oleh Grup pada akhir periode pelaporan dimana perpindahan terjadi.

2.i. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas termasuk kas, kas di bank (rekening giro), dan deposito berjangka yang jatuh tempo dalam jangka waktu tiga bulan atau kurang pada saat penempatan yang tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

2.j. Piutang Pembiayaan Konsumen

Piutang pembiayaan konsumen diklasifikasikan dalam kelompok aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan piutang pembiayaan konsumen mengacu pada Catatan 2.h.

Piutang pembiayaan konsumen merupakan jumlah piutang ditambah (dikurangi) biaya (pendapatan) transaksi yang belum diamortisasi dan dikurangi dengan pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui dan penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pembiayaan konsumen.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

*For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

2. *Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly (Level 2); and*
3. *Inputs that are not observable for the asset or liability (Level 3).*

In measuring the fair value of an asset or liability, the Group uses observable market data to the extent possible. If the fair value of an asset or liability cannot be directly observed, the Group uses valuation techniques that are appropriate under the circumstances and maximizes the use of relevant observable inputs and minimizes the use of unobservable inputs.

Transfers between levels of the fair value hierarchy are recognized by the Group at the end of the reporting period in which the transfer occurs.

2.i. Cash and Cash Equivalents

Cash and cash equivalents include cash, bank deposits (checking accounts), and time deposits with maturities of three months or less at the time of placement, provided they are not pledged as collateral or otherwise restricted.

2.j. Consumer Financing Receivables

Consumer financing receivables are classified within the category of financial assets measured at amortized cost.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value determination, impairment, and derecognition of consumer financing receivables refer to Note 2.h.

Consumer financing receivables represent the amount of receivables plus (less) unamortized transaction costs (income) and less unrecognized consumer financing income and allowance for impairment losses on consumer financing receivables.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari konsumen dan jumlah pokok pembiayaan, ditambah (dikurangi) biaya (pendapatan) transaksi yang belum diamortisasi, yang akan diakui sebagai pendapatan selama jangka waktu kontrak dengan menggunakan metode suku bunga efektif dari piutang pembiayaan konsumen.

Biaya (pendapatan) transaksi yang belum diamortisasi, adalah pendapatan administrasi proses pembiayaan dan biaya transaksi yang timbul pertama kali yang terkait langsung dengan pembiayaan konsumen tersebut.

Penyelesaian kontrak sebelum masa pembiayaan konsumen berakhir diberlakukan sebagai pembatalan kontrak pembiayaan konsumen dan keuntungan yang timbul diakui sebagai laba atau rugi periode berjalan.

2.k. Anjak Piutang

Anjak piutang diakui sebagai tagihan anjak piutang sebesar nilai piutang yang diperoleh dan dinyatakan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, setelah dikurangi pendapatan anjak piutang ditanggihkan. Selisih antara tagihan anjak piutang dengan jumlah pembayaran kepada klien diakui sebagai pendapatan anjak piutang ditanggihkan dan diamortisasi selama periode kontrak menggunakan suku bunga efektif.

Dalam anjak piutang, debitur mempunyai kewajiban membayar seluruh dana yang diperoleh dari piutang alihan, atau membeli kembali piutang alihan, dalam hal nasabah tidak membayar piutang alihan tersebut kepada faktor pada saat jatuh tempo.

2.l. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dimiliki untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Unrecognized consumer financing income represents the difference between the total installment payments to be received from consumers and the principal amount, plus (less) unamortized transaction costs (income), which will be recognized as income over the term of the contract using the effective interest rate of consumer financing method.

Unamortized transaction costs (revenues) are administrative income for the first-time financing process and transaction costs that are directly related to consumer financing.

The settlement of the contract before the end of the consumer financing period is treated as a cancellation of the consumer financing contract and the resulting gain is recognized as profit or loss for the period.

2.k. Factoring

Factoring with recourse is recognized as the amount of receivables acquired and is stated at net realizable value, net of deferred income factoring. The difference between the factoring receivables and the amount of payments made to the client is recognized as deferred factoring income and will be amortized over the period of respective factoring agreements using the effective interest rate.

In factoring with recourse, the debtor has the obligation to pay all (full recourse) of the funds obtained from the transferred receivables, or to buy back the transferred receivables, if the customer does not pay the transferred receivables to the factor at maturity.

2.l. Investment Property

Investment property are properties (land or a building or part of a building or both) owned to earn rentals or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes; or sale in the daily business activities.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Properti investasi diakui sebagai aset jika, dan hanya jika, besar kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan properti investasi akan mengalir ke entitas; dan biaya perolehan properti investasi dapat diukur dengan andal.

Properti investasi pada awalnya diukur sebesar biaya perolehan, meliputi harga pembelian dan setiap pengeluaran yang dapat diatribusikan secara langsung (biaya jasa hukum, pajak pengalihan properti, dan biaya transaksi lain). Biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut.

Setelah pengakuan awal, Grup memilih menggunakan model nilai wajar dan mengukur seluruh properti investasi berdasarkan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

Penentuan nilai wajar properti investasi didasarkan pada penilaian oleh penilai independen yang mempunyai kualifikasi profesional yang telah diakui dan relevan serta memiliki pengalaman terkini di lokasi dan kategori properti investasi yang dinilai.

Grup mengalihkan properti ke, atau dari, properti investasi jika, dan hanya jika, ketika properti memenuhi, atau berhenti memenuhi, definisi properti investasi dan terdapat bukti atas perubahan penggunaan, mencakup:

- Dimulainya penggunaan oleh pemilik, atau pengembangan untuk pemilik, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi properti yang digunakan sendiri;
- Dimulainya pengembangan untuk dijual, untuk pengalihan dari properti investasi menjadi persediaan;
- Berakhirnya pemakaian oleh pemilik, untuk pengalihan dari properti yang digunakan sendiri menjadi properti investasi; dan
- Insepsi sewa operasi kepada pihak lain, untuk pengalihan dari persediaan menjadi properti investasi.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Investment property is recognized as an asset when, and only when it is probable that the future economic benefits that are associated with the investment property will flow to the entity; and the cost of the investment property can be measured reliably.

An investment property shall be measured initially at its cost, comprises its purchase price and any directly attributable expenditure (professional fees for legal services, property transfer taxes and other transaction costs). Transaction costs are included in the initial measurement.

After initial recognition, the Group decides to use fair value model and measure all its investment property at fair value. A gain or loss arising from a change in the fair value of investment property is recognized in profit or loss for the period in which it arises.

The fair value of investment property is based on a valuation by an independent appraiser who holds a recognized and relevant professional qualification and has recent experience in the location and category of the investment property being valued.

The Group shall transfer a property, to, or from investment property when, and only when, there the property meets, or ceases to meet, the definition of investment property and there is evidence of the change in use, include:

- a. Commencement of owner-occupation, or of development with a view to owner-occupation, for a transfer from investment property to owner-occupied property;*
- b. Commencement of development with a view to sale, for a transfer from investment property to inventories;*
- c. End of owner-occupation, for a transfer from owner-occupied property to investment property; and*
- d. Inception of an operating lease to another party, for a transfer from inventories to investment property.*

An investment property is derecognized on disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

2.m. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi harga perolehannya dan setiap biaya yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diperlukan agar aset siap digunakan sesuai intensi Manajemen.

Apabila relevan, biaya perolehan juga dapat mencakup estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap, kewajiban tersebut timbul ketika aset tetap diperoleh atau sebagai konsekuensi penggunaan aset tetap selama periode tertentu untuk tujuan selain untuk memproduksi persediaan selama periode tersebut.

Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah, dinyatakan sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset sebagai berikut:

Kelompok	Tahun/Years	Persentase Depresiasi/ Depreciation Percentage	Group
Bangunan	20	5,00%	Building
Peralatan Kantor	3-4	25,00-33,34%	Office Equipment

Tanah diakui sebesar harga perolehannya dan tidak disusutkan.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Gains or losses arising from the retirement or disposal are determined as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and are recognized in profit or loss in the period of the retirement or disposal.

2.m. Fixed Assets

Fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any cost directly attributable in bringing the assets to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by Management.

When relevant, the cost may also comprise the initial estimate of the costs of dismantling and removing the item and restoring the site on which it is located, the obligation for which an entity incurs either when the item is acquired or because of having used the item during a particular period for purposes other than to produce inventories during that period.

After initial recognition, fixed assets except land, are carried at its cost less any accumulated depreciation, and any accumulated impairment losses.

Depreciation of fixed assets starts when it is available for use, and it is computed by using straight-line method based on the estimated useful life of assets as follows:

Lands are recognized at its cost and are not depreciated.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai "Aset dalam Penyelesaian" dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya, termasuk biaya pinjaman, yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi. Biaya perolehan aset tetap dalam konstruksi tidak termasuk setiap laba internal, jumlah tidak normal dari biaya pemborosan yang terjadi dalam pemakaian bahan baku, tenaga kerja atau sumber daya lain.

Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap yang sesuai pada saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

Nilai tercatat dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (yang ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto, jika ada, dan jumlah tercatatnya) dimasukkan dalam laba rugi pada saat penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Pada akhir periode pelaporan, Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasar kondisi teknis.

2.n. Sewa

Grup sebagai Penyewa

Pada tanggal inisiasi kontrak, Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu, Grup menilai apakah selama periode penggunaan, Grup memiliki dua hal berikut:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Self-constructed fixed assets are presented as part of the fixed assets under "Asset in Progress" and are stated at its cost. All costs, including borrowing costs, incurred in relation with the construction of these assets are capitalized as part of the cost of assets in construction. Cost of assets in construction shall exclude any internal profits, cost of abnormal amounts of wasted material, labour or other resources incurred.

The accumulated costs will be transferred to the respective fixed assets items at the time the asset is completed or ready for use and are depreciated since the operation started.

The carrying amount of an item of fixed assets is derecognized on disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition (that determined as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item) is included in profit or loss when the item is derecognized.

At the end of each reporting period, the Group made regular review of the useful lives, residual values, depreciation method and residual life based on the technical conditions.

2.n. Leases

The Group as Lessee

At inception of a contract, the Group shall assess whether the contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time, the Group shall assess whether, throughout the period of use, the Group has both of the following:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- a. Hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomik dari penggunaan aset identifikasi; dan
- b. Hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi, yaitu hanya jika:
 - (i) Grup memiliki hak untuk mengarahkan bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan selama periode penggunaan; atau
 - (ii) Keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
 - Grup memiliki hak mengoperasikan aset (atau mengarahkan pihak lain untuk mengoperasikan aset dengan cara yang telah ditentukan) selama periode penggunaan, tanpa pemasok memiliki hak untuk mengubah instruksi operasi tersebut; atau
 - Grup mendesain aset (aspek tertentu dari aset) dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal permulaan, Grup mengukur aset hak-guna pada biaya perolehan, yang meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi dengan insentif yang diterima, biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh Grup, dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan oleh Grup dalam membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, kecuali biaya-biaya tersebut dikeluarkan untuk menghasilkan persediaan.

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur aset hak-guna dengan menerapkan model biaya, yaitu biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai, serta disesuaikan dengan pengukuran kembali liabilitas sewa. Aset hak-guna disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- a. The right to obtain substantially all economic benefits from the use of the identified asset; and
- b. The right to direct the use of the identified asset, only if either:
 - (i) The Group has right to direct how and for what purposes the assets are used throughout the period of use; or
 - (ii) The relevant judgment about how for what objective the assets are used are predetermined and:
 - The Group has the right to operate the asset (or to direct others to operate the asset in a manner that it determines) throughout the period of use, without the supplier having the right to change those operating instructions; or
 - The Group designed the asset (specific aspects of the asset) in a way that predetermines how and for what purpose the asset will be used throughout the period of use.

At the commencement date, the Group measures the right-of-use asset at cost, which includes the initial measurement amount of the lease liability, lease payments made at or before the commencement date less any incentives received, initial direct costs incurred by the Group, and an estimate of the costs to be incurred by the Group to dismantle and remove the underlying asset or to restore the underlying asset to the condition required by the terms and conditions of the lease, except for those costs incurred to produce inventories.

After the commencement date, the Group measures the right-of-use asset by applying a cost model, which is cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses and adjusted for remeasurement of lease liabilities. Right-of-use asset depreciated using straight line method.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan penyewa akan mengeksekusi opsi beli, maka penyewa menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar, yang mengacu pada ketentuan masa manfaat aset tetap. Jika tidak, maka aset hak-guna disusutkan dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

Pada tanggal permulaan, Grup mengukur liabilitas sewa pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal tersebut. Pembayaran sewa didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa, jika suku bunga tersebut dapat ditentukan. Jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Grup.

Setelah tanggal permulaan, Grup mengukur liabilitas sewa dengan:

- Meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa;
- Mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar; dan
- Mengukur kembali jumlah tercatat untuk merefleksikan penilaian kembali atau modifikasi sewa atau untuk merefleksikan pembayaran sewa tetap secara substansi revisian.

Liabilitas sewa diukur kembali ketika terdapat perubahan pembayaran sewa masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga, jika ada perubahan estimasi Grup atas jumlah yang diperkirakan akan dibayar dalam jaminan nilai residual, atau jika Grup mengubah penilaiannya apakah akan mengeksekusi opsi beli, perpanjangan atau penghentian.

Ketika liabilitas sewa diukur kembali dengan cara ini, penyesuaian terkait dilakukan terhadap jumlah tercatat aset hak-guna, atau dicatat dalam laba rugi jika jumlah tercatat aset hak-guna telah berkurang menjadi nihil.

Grup sebagai Pesewa

Sewa di mana Grup sebagai pesewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Ketika persyaratan sewa secara substansial tidak mengalihkan seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan ke penyewa, kontrak tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

If the lease transfers ownership of the underlying asset to the lessee by the end of the lease term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the lessee will exercise a purchase option, the lessee shall depreciate the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset, which refers to the terms of the useful life of the fixed asset. Otherwise, the lessee shall depreciate the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the lease term.

At the commencement date, the Group shall measure the lease liability at the present value of the lease payments that are not paid at that date. The lease payments shall be discounted using the interest rate implicit in the lease, if that rate can be readily determined. If that rate cannot be readily determined, the Group shall use the Group's incremental borrowing rate.

After the commencement date, the Group shall measure the lease liability by:

- Increasing the carrying amount to reflect interest on the lease liability;*
- Reducing the carrying amount to reflect the lease payments made; and*
- Remeasuring the carrying amount to reflect any reassessment or lease modifications, or to reflect revised in-substance fixed lease payments.*

Lease liability is remeasured when there is a change in future lease payments arising from a change in an index or rate, if there is a change in the Group estimate of the amount expected to be payable under a residual value collateral, or if the Group changes its assessment of whether it will exercise a purchase, extension, or termination option.

When the lease liability is remeasured in this way, a corresponding adjustment is made to the carrying amount of the right-of-use assets or is recorded in profit or loss if the carrying amount of the right-of-use asset has been reduced to nil.

The Group as Lessor

Leases for which the Group is a lessor are classified as operating leases. Whenever the terms of the lease did not transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee, the contract is classified as an operating lease.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penghasilan sewa dari sewa operasi diakui secara garis lurus selama masa sewa yang relevan. Biaya langsung awal yang terjadi dalam menegosiasikan dan mengatur sewa operasi ditambahkan sebagai jumlah tercatat aset sewa dan diakui secara garis lurus selama masa sewa.

2.o. Pengaturan Bersama

Ventura bersama merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut sebagai venturer bersama.

Ventura bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas.

2.p. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Grup menerapkan PSAK 115 "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan". Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan diakui pada saat pengendalian atas barang atau jasa diakui dialihkan kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diperkirakan menjadi hak Grup dalam pertukaran dengan barang dan jasa tersebut. Grup telah menetapkan secara umum bahwa Grup merupakan prinsipal dalam kontrak pendapatannya karena Perusahaan biasanya mengendalikan barang atau jasa sebelum mengalihkan kepada pelanggan.

Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal Grup berupa penjualan barang, penjualan jasa, bunga, royalti dan dividen selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Pendapatan dari yang dijanjikan kepada pelanggan (kontrak dengan pelanggan) memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak (secara tertulis, lisan atau sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya) dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing;
- b. Entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Rental income from operating leases is recognized on a straight-line basis over the terms of the relevant lease. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased assets and recognized on a straight-line method over the lease term.

2.o. Joint Arrangement

Joint venture represents joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. Those parties are called joint venturers.

A joint venturer recognizes its interest in a joint venture as an investment and account for that investment using the equity method.

2.p. Revenues and Expenses Recognition

The Group adopted PSAK 115 "Revenue from Contracts with Customers". Revenue from contracts with customers is recognized when control over the goods or services is recognized is transferred to the customer in an amount that reflects the consideration that the Group is expected to be entitled to in exchange for the goods and services. The Group has generally determined that the Group is the principal in its revenue contracts because the Group usually controls the goods or services before transferring them to customers.

Revenue is the gross inflow of economic benefits arising from the Group's domestic activities in the form of sales of goods, sales of services, interest, royalties and dividends during a period if the inflows result in an increase in equity that does not originate from investment contributions. Revenue from promised to customers (contracts with customers) meets the following criteria:

- a. *The parties to the contract have agreed to the contract (in writing, oral or in accordance with general business practices) and are committed to carrying out their respective obligations;*
- b. *An entity can identify each party's rights regarding the goods or services to be transferred;*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- c. Entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan;
- d. Kontrak memiliki substansi komersial (yaitu risiko, waktu, atau jumlah arus kas masa depan entitas diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak); dan
- e. Kemungkinan besar entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. Dalam mengevaluasi apakah kolektibilitas dari jumlah imbalan kemungkinan besar terjadi, entitas hanya mempertimbangkan kemampuan dan intensi pelanggan untuk membayar jumlah imbalan ketika jatuh tempo. Jumlah imbalan yang akan menjadi hak entitas mungkin lebih kecil dari harga yang tercatat dalam kontrak jika imbalan bersifat variabel karena entitas dapat menawarkan suatu konsesi harga kepada pelanggan.

Grup mengakui pendapatan ketika (atau selama) entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika (atau selama) pelanggan memperoleh pengendalian atas aset. Pada awal kontrak Grup akan menentukan apakah penyelesaian kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu atau suatu waktu tertentu.

Pendapatan Pengelolaan Aset

Pendapatan Pengelolaan Aset diakui pada periode terjadinya yang terdiri dari:

- Pendapatan Pengelolaan Aset eks BPPN berupa imbalan pengelolaan aset, imbalan kinerja dan pendapatan yang berkaitan dengan biaya pengelolaan aset yang dapat diperoleh kembali;
- Pendapatan Pengelolaan Aset eks BPPN telah berakhir sejak 31 Desember 2017 karena mulai tahun 2018 tidak terdapat lagi Perjanjian Pengelolaan Aset dengan Kementerian Keuangan (Perjanjian Pengelolaan Aset telah berakhir sejak tahun 2018); dan
- Pendapatan Pengelolaan Aset BUMN berupa jasa pengelolaan rutin dan jasa keberhasilan.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- c. An entity can identify the period of payment for the goods or services to be transferred;
- d. The contract has commercial substance (i.e., the risk, time, or amount of the entity's future cash flows expected to change as a result of the contract); and
- e. It is probable that the entity will collect the rewards that will be its right in the exchange of goods or services that will be transferred to the customer. In evaluating whether the collectibility of the amount of benefit is likely to occur, the entity only considers the ability and intention of customers to pay the amount of compensation when due. The amount of the benefit that the entity will be entitled to may be less than the price recorded in the contract if the reward is variable because the entity can offer a price concession to the customer.

The Group recognizes revenue when (or as long as) the entity fulfills its performance obligations by transferring promised goods or services (i.e., assets) to customers. Assets are transferred when (or during) the customer gains control of the asset. At the beginning of the contract the Group will determine whether the completion of the performance obligations at over time or a point in time.

Revenue from Asset Management

Revenue of Asset Management is recognized in the period when it is occurred consist of:

- Revenue from Asset Management ex-IBRA assets which is made up of asset management fees, success fees and revenues related with reimbursable costs;
- Revenue from Asset Management ex-IBRA assets has ended since December 31, 2017 when starting in 2018 there are no more Asset Management Agreements with the Ministry of Finance (Asset Management Agreements have expired since 2018); and
- Revenue from Asset Management SOEs' assets which are routine management fees and success fees.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi

Pendapatan kegiatan restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN berupa pendapatan bunga pinjaman dan pendapatan jasa restrukturisasi dan/atau revitalisasi diakui pada saat terjadinya dengan dasar akrual.

Pendapatan Sewa

Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa. Biaya langsung awal yang terjadi dalam proses negosiasi dan pengaturan sewa ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Uang muka sewa yang diterima dari penyewa dicatat ke dalam akun pendapatan diterima di muka dan akan diakui sebagai pendapatan secara berkala sesuai dengan kontrak sewa yang berlaku.

Pendapatan Dividen

Pendapatan dividen dari investasi diakui ketika hak Pemegang Saham untuk menerima pembayaran ditetapkan.

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga diakui berdasarkan periode waktu terjadinya dengan tingkat bunga yang sesuai atau suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari transaksi sewa pembiayaan diakui apabila kemungkinan besar Entitas Anak akan memperoleh manfaat ekonomis sehubungan dengan transaksi tersebut dan jumlah pendapatan dapat diukur secara andal.

Penjualan Barang

Penjualan barang diakui pada saat terjadinya perpindahan kepemilikan atas barang kepada pelanggan, yaitu pada saat penyerahan barang, atau dalam hal barang disimpan di gudang Grup atas permintaan pelanggan, pada saat diterbitkan faktur.

Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (dengan dasar akrual).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Revenue from Restructuring and/or Revitalization

The Revenues of SOEs' restructuring and/or revitalization which comprise loan interest income and income from restructuring and/or revitalization are recognized as incurred on an accrual basis.

Rental Revenue

Rental revenue from operating leases are recognized as revenue on a straight line basis over the lease term. Initial direct costs incurred in negotiating and rental arrangements are added to the carrying amount of the leased asset and recognized on a straight-line basis over the lease term.

Advances received from rental are recorded in unearned revenue account and will be recognized as revenue on a regular basis over the rental periods.

Dividend Revenue

Dividend revenue from investments is recognized when the Shareholders' rights to receive payment has been established.

Interest Income

Interest income is recognized based on timely basis, with an appropriate interest rate or the effective interest rate.

Interest income from finance leases is recognized when it is probable the Subsidiaries will obtain economic benefits related with these transactions and the revenues could be measured reliably.

Sale of Goods

Sales of goods are recognized upon the transfer of ownership of the goods to the customer, either upon delivery of the goods, or in the case of goods stored in the Group's warehouse at the request of the customer, when issued invoices.

Expenses

Expenses are recognized as incurred (on an accrual basis).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2.q. Pajak Penghasilan dan Pajak Final

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak kini dan pajak tangguhan diakui dalam laba rugi, kecuali pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau secara langsung di ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam penghasilan komprehensif lain atau ekuitas.

Jumlah pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas. Jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihanannya diakui sebagai aset. Liabilitas (aset) pajak kini untuk periode berjalan dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diperkirakan akan dibayar kepada (direstitusi dari) otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan undang-undang pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir tahun.

Manfaat terkait dengan rugi pajak yang dapat ditarik untuk memulihkan pajak kini dari periode sebelumnya diakui sebagai aset. Aset pajak tangguhan diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan.

Seluruh perbedaan temporer kena pajak diakui sebagai liabilitas pajak tangguhan, kecuali perbedaan temporer kena pajak yang berasal dari:

- a) Pengakuan awal *goodwill*; atau
- b) Pengakuan awal aset atau liabilitas dari transaksi yang:
 - i. Bukan kombinasi bisnis;
 - ii. Pada saat transaksi tidak memengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak);
 - iii. Pada saat transaksi tidak menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2.q. Income Taxes and Final Tax

Tax expense is the aggregate amount included in the determination of profit or loss for the period in respect of current tax and deferred tax. Current tax and deferred tax are recognized in profit or loss, except for income tax arising from transactions or events that are recognized in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is recognized in other comprehensive income or equity, respectively.

Current tax for current and prior periods shall, to the extent unpaid, be recognized as a liability. If the amount already paid in respect of current and prior periods exceeds the amount due for those periods, the excess shall be recognized as an asset. Current tax liabilities (assets) for the current and prior periods shall be measured at the amount expected to be paid to (recovered from) the taxation authorities, using the tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the year.

Tax benefits relating to tax loss that can be carried back to recover current tax of a previous periods is recognized as an asset. Deferred tax asset is recognized for the carryforward of unused tax losses and unused tax credit to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the unused tax losses and unused tax credits can be utilized.

All taxable temporary differences shall be recognized as a deferred tax liability, except to the extent that the deferred tax liability arises from:

- a) *Initial recognition of goodwill; or*
- b) *The initial recognition of an asset or liability in a transaction which is:*
 - i. *Not a business combination;*
 - ii. *At the time of the transaction, affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss);*
 - iii. *At the time of the transaction do not give rise to taxable temporary differences and temporary differences can be offset in the same amount.*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba dimaksud, kecuali jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis dan pada saat transaksi tidak memengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (rugi pajak) dan pada saat transaksi tidak menimbulkan perbedaan temporer kena pajak dan perbedaan temporer dapat dikurangkan dalam jumlah yang sama.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku ketika aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Grup memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan. Grup mengurangi jumlah tercatat aset pajak tangguhan jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut. Setiap pengurangan tersebut dilakukan pembalikan atas aset pajak tangguhan hingga kemungkinan besar laba kena pajak yang tersedia jumlahnya memadai.

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika:

- a) Grup memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini; dan
- b) Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

A deferred tax asset shall be recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized, unless the deferred tax asset arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and at the time of the transaction affects neither accounting profit nor taxable profit (tax loss) and at the time of the transaction, does not give rise to equal taxable and deductible temporary differences.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax liabilities and deferred tax assets shall reflect the tax consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of its assets and liabilities.

The carrying amount of a deferred tax asset reviewed at the end of each reporting period. The Group shall reduce the carrying amount of a deferred tax asset to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilised. Any such reduction shall be reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable profit will be available.

The Group offset deferred tax assets and deferred tax liabilities if, and only if:

- a) *The Group has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities; and*
- b) *The deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to the income tax imposed upon by the same taxation authority on:*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- i. Entitas kena pajak yang sama; atau
- ii. Entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diperkirakan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Grup melakukan saling hapus atas aset pajak kini dan liabilitas pajak kini jika dan hanya jika, Grup:

- a) Memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui; dan
- b) Bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Pajak Final

Beban pajak final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui selama periode berjalan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang dibayar dengan jumlah yang dibebankan pada penghitungan laba atau rugi periode berjalan, diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak. Jika penghasilan telah dikenakan pajak penghasilan final, perbedaan antara nilai tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40 Tahun 2009 mengenai perubahan atas PP No. 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dari usaha jasa Konstruksi yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Agustus 2008 dimana perlakuan pengenaan pajak final dikenakan atas kontrak sebesar 3% yang diperoleh mulai tanggal 1 Agustus 2008.

Pajak final disajikan diluar beban pajak penghasilan pada laba rugi.

2.r. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek diakui ketika pekerja telah memberikan jasanya dalam suatu periode akuntansi, sebesar jumlah tidak terdiskonto dari imbalan kerja jangka pendek yang diharapkan akan dibayar sebagai imbalan atas jasa tersebut.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- i. The same taxable entity; or
- ii. Different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

The Group offset current tax assets and current tax liabilities if, and only if, the Group:

- a) Has legally enforceable right to set off the recognized amounts; and
- b) Intends either to settle on a net basis, or to realize the assets and settle liabilities simultaneously.

Final Tax

Final tax expense is recognized proportionately with the accounting income recognized during the period. The difference between the final income tax paid and the final tax expense in the profit or loss for the period is recognized as prepaid tax or tax payable. If the income is already subject to final income tax, the differences between the carrying value of existing assets and liabilities and their tax bases are not recognized as deferred tax assets or liabilities.

Income tax from construction is computed based on the Government Regulation No. 40 year 2009 concerning amendments of Government Regulation No. 51 year 2008 concerning income tax from the construction business which effective starting August 1, 2008, final tax at 3% is applied for contract signed starting August 1, 2008.

Final tax is presented outside income tax expense in profit or loss.

2.r. Employee Benefit

Short-term Employee Benefits

Short-term employee benefits are recognized when an employee has rendered service during accounting period, at the undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for that service.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Imbalan kerja jangka pendek mencakup antara lain upah, gaji, bonus dan insentif.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 yang mengalami beberapa perubahan, dan perubahan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 lalu kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021.

Grup mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

Grup mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak batas atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Grup mengakui jumlah beban dan liabilitas atas iuran terutang kepada program iuran pasti, ketika pekerja telah memberikan jasa kepada entitas selama suatu periode.

Pesangon

Grup mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

- Ketika Grup tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
- Ketika Grup mengakui biaya untuk restrukturisasi yang berada dalam ruang lingkup PSAK 237 dan melibatkan pembayaran pesangon.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Short-term employee benefits include such as wages, salaries, bonus and incentive.

Post-employment Benefit

Post-employment benefits such as pensions, severance pay, and long-service awards are calculated based on Manpower Law No. 13 year 2003, which has undergone several amendments, with the latest amendment being made by Law No. 11 year 2020, subsequently amended by Law No. 6 year 2023 concerning Job Creation and Government Regulation No. 35 year 2021.

The Group recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less the fair value of plan assets which calculated by independent actuaries using the Projected Unit Credit method. Present value benefit obligation determines by discounting the benefit.

The Group account not only for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interests on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit or loss.

The remeasurement of the net defined benefit liability (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets, and any change in effect of the asset limit are recognized in other comprehensive income.

The Group recognizes an expense and a liability for contribution payable to a defined contribution plan, when an employee has rendered service to the entity during a period.

Termination Benefits

The Group recognizes a liability and expense for termination benefits at the earlier of the following dates:

- When the Group can no longer withdraw the offer of those benefits; and
- When the Group recognizes costs for a restructuring that is within the scope of PSAK 237 and involves payment of termination benefits.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Grup mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

2.s. Investasi Pada Sukuk

Sukuk dapat diklasifikasikan berdasarkan model usaha pada saat perolehan sebagai berikut:

- i. Diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual; dan persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk diukur pada biaya perolehan termasuk biaya transaksi dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi.

- ii. Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika investasi tersebut dimiliki dalam suatu model usaha yang bertujuan utama untuk memperoleh arus kas kontraktual dan melakukan penjualan sukuk; dan persyaratan kontraktual menentukan tanggal tertentu pembayaran pokok dan/atau hasilnya.

Pada saat pengakuan awal, investasi pada sukuk diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain termasuk biaya transaksi dan selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk dan diakui dalam laba rugi. Keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain setelah memperhitungkan saldo selisih biaya perolehan dan nilai nominal yang belum diamortisasi dan saldo akumulasi keuntungan atau kerugian nilai wajar yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

The Group measures termination benefits on initial recognition, and measures and recognizes subsequent changes, in accordance with the nature of the employee benefits.

2.s. Investment In Sukuk

Sukuk can be classified based on business model at acquisition as follow:

- i. Measured at amortized cost if the investments are held within a business model whose primary purpose is to obtain contractual cash flows; and contractual requirements specify a specific date of payment of principals and/or the revenue.*

At the initial recognition, investments in sukuk are measured at cost, including the transaction costs and the difference between the acquisition cost and the nominal value is amortized using straight-line method during sukuk period and recognized in profit or loss.

- ii. Measured at fair value through other comprehensive income if the investments are held within a business model whose primary purpose is to obtain contractual cash flows and selling the sukuk; and contractual requirements specify a specific date of payment of principals and/or the revenue.*

At the initial recognition, investments in sukuk are measured at fair value through other comprehensive income, including transaction costs and the difference between the acquisition cost and the nominal value is amortized using straight-line method during sukuk period and recognized in profit or loss. Gains or losses from changes in fair value are recognized in other comprehensive income after taking into account the balance of the difference between the acquisition cost and the nominal value and the unamortized balance of the cumulative gain or loss in fair value previously recognized in other comprehensive income.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- iii. Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi jika investasi pada sukuk tidak diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan dan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Pada saat pengakuan awal, investasi diukur pada nilai wajar sebesar biaya perolehan tidak termasuk biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada nilai wajar. Selisih antara nilai wajar dan jumlah tercatat diakui dalam laba rugi.

Untuk investasi pada sukuk yang diukur pada biaya perolehan dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, jika terdapat indikasi penurunan nilai, maka Grup mengukur jumlah terpulihkannya. Jika jumlah terpulihkan lebih kecil daripada jumlah tercatat, maka Grup mengakui rugi penurunan nilai. Untuk investasi sukuk pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, rugi penurunan nilai yang diakui pada laba rugi adalah jumlah setelah memperhitungkan saldo dalam penghasilan komprehensif lain. Jumlah terpulihkan merupakan jumlah yang akan diperoleh dari pengembalian pokok tanpa memperhitungkan nilai kininya.

Reklasifikasi sukuk

Model usaha yang bertujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual didasarkan pada tujuan investasi yang ditentukan oleh Grup. Arus kas kontraktual yang dimaksud adalah arus kas bagi hasil dan pokok dari sukuk. Setelah pengakuan awal, jika aktual berbeda dengan tujuan investasi yang telah ditetapkan, maka Grup menelaah kembali konsistensi tujuan investasinya.

Grup tidak dapat mengubah klasifikasi investasi kecuali terjadi perubahan tujuan model usaha.

2.t. Sukuk yang diterbitkan

Sukuk Mudharabah

Grup pada awalnya mengakui sukuk mudharabah pada saat sukuk mudharabah diterbitkan sebesar nominalnya.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- iii. *Measured at fair value through profit or loss if the investments in sukuk are not classified as measured at cost and measured at fair value through other comprehensive income. At the initial recognition, investments are measured at fair value at acquisition cost exclude transaction costs and subsequently, this investment is measured at fair value. The difference between the fair value and the carrying amount is recognized in profit or loss.*

For investments in sukuk measured at cost and at fair value through other comprehensive income, if there is indication of impairment, the Group measures the recoverable amount. If the recoverable amount is less than the carrying amount, the Group recognized an impairment loss. For investments in sukuk at fair value through other comprehensive income, an impairment loss recognized in profit or loss is the amount after considering the balance recorded in other comprehensive income. Recoverable amount is the amount that would be received from the principal repayment regardless its present value.

Sukuk reclassification

A business model whose objective to collect contractual cash flows is based on the investment objectives determined by the entity. The contractual cash flows referred to cash flows from sukuk's profit sharing and principal. After initial recognition, if the actual investment is different from the specified investment objectives, the Group reviews the consistency of its investment objectives.

The Group could not change the investment classification unless there is a change in the purpose of the business model.

2.t. Issued Sukuk

Mudharabah Sukuk

The Group initially recognizes Mudharabah Sukuk at its nominal value when the Mudharabah Sukuk is issued.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Biaya transaksi sehubungan dengan penerbitan sukuk mudharabah diakui secara terpisah dari sukuk mudharabah. Biaya transaksi di amortisasi menggunakan metode garis lurus selama jangka waktu sukuk mudharabah dan dicatat sebagai bagian dari beban keuangan.

Sukuk mudharabah disajikan sebagai bagian dari liabilitas dan biaya transaksi sehubungan penerbitan sukuk mudharabah disajikan dalam aset sebagai beban dibayar di muka.

Sukuk Ijarah

Sukuk Ijarah diakui sebesar nilai nominal, disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi terkait. Perbedaan antara nilai tercatat dan nilai nominal diakui pada laporan laba rugi konsolidasian sebagai beban transaksi sukuk menggunakan metode garis lurus selama jangka waktu Sukuk Ijarah.

Imbal hasil terkait dibebankan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai biaya keuangan.

Sukuk Ijarah, setelah disesuaikan dengan premium atau diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi, disajikan sebagai bagian dari liabilitas.

2.u. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi yang Penting

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi, dan asumsi, yang memengaruhi jumlah yang dilaporkan dari aset dan liabilitas, dan pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan keuangan konsolidasian serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada akhir periode pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya, diungkapkan di bawah ini.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Transaction costs related to the issuance of Mudharabah Sukuk are recognized separately from the Mudharabah Sukuk. The transaction costs are amortized using the straight-line method over the term of the Mudharabah Sukuk and recorded as part of finance expenses.

Mudharabah sukuk is presented as part of liabilities, and transaction costs related to the issuance of mudharabah sukuk are presented as assets under prepaid expenses.

Ijarah Sukuk

Ijarah Sukuk is recognized at its nominal value, adjusted for premiums, discounts, and related transaction costs. The difference between the carrying amount and the nominal value is recognized in the consolidated statement of profit or loss as sukuk transaction expenses using the straight-line method over the term of the Ijarah Sukuk.

The related yield is charged in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as finance costs.

Sukuk Ijarah, after being adjusted for premiums or discounts and unamortized transaction costs, is presented as part of liabilities.

2.u. Sources of Estimation Uncertainty and Important Accounting Consideration

The preparation of consolidated financial statements requires management to make judgement, estimates, and assumptions, that affect the reported amounts of assets and liabilities, disclosures of contingent assets and liabilities at the date of the consolidated financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting period.

Uncertainty about these assumptions and estimates could result in a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next reporting period.

The main assumption of the future and the other major source of estimation uncertainty at the end of the reporting period that have a significant risk of material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities for the period, disclosed below.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan, mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Perusahaan. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Estimasi dan Asumsi Akuntansi yang signifikan

Estimasi Umur Manfaat

Grup melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat aset tetap dan aset tak berwujud berdasarkan faktor-faktor seperti perubahan teknologi dan potensi keuntungan yang diperoleh dari penggunaan peralatan tersebut. Kondisi ini dapat menyebabkan Grup melakukan penurunan maupun penghapusan aset tetap apabila peralatan tersebut sudah usang seiring dengan perkembangan teknologi.

Imbalan Pascakerja

Imbalan pascakerja seperti pensiun, uang pisah dan uang penghargaan masa kerja dihitung berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 yang mengalami beberapa perubahan, dan perubahan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 lalu kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021.

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian.

Manajemen berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktuarial dan perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan dapat memengaruhi secara material liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan kerja bersih. Nilai tercatat liabilitas imbalan pascakerja disajikan di Catatan 25.

Nilai Wajar Properti Investasi

Nilai wajar properti investasi bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh penilai independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

The Group bases its estimates on assumptions and parameters that are available at the time the consolidated financial statements are prepared. Assumptions about the future development and situation, may change due to market changes or circumstances beyond the control of the Group. The changes are reflected in the related assumptions at the time of the occurrence.

Significant Accounting Estimates and Assumptions

Estimated Useful Life

The Group performs periodic review over the useful life of the fixed assets and intangible assets based on factors such as changes in technology and the potential benefits arising from the use of such equipment. This condition can cause a decrease or elimination of the Group property, plant and equipment if the equipment is obsolete due to technological developments.

Post-Employment Benefits

Post-employment benefits such as retirement, severance pay, and length of service awards are calculated based on the Manpower Law No. 13 year 2003, which has undergone several amendments, with the latest amendment being made by Law No. 11 year 2020, subsequently amended by Law No. 6 year 2023 concerning Job Creation and Government Regulation No. 35 year 2021.

The determination of Group's employment benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, discount rates, annual salary increase rate, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate.

Management believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its employee benefits liabilities and net employee benefits expense. The carrying amount of post-employment benefit liabilities are disclosed in Note 25.

Fair Value of Investment Property

The fair value of investment properties depend on the selection of assumption used by the independent appraisers in calculating these amounts.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Asumsi tersebut termasuk antara lain: tingkat diskonto, tingkat inflasi dan tingkat kenaikan pendapatan dan biaya Grup. Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat memengaruhi secara material nilai wajar dari properti investasi. Nilai tercatat properti investasi disajikan di Catatan 13.

Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Penyisihan kerugian penurunan nilai untuk aset keuangan telah diukur sejumlah sepanjang umur kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya jika risiko kredit meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan diestimasi berdasarkan matriks provisi dengan mengacu pada pengalaman gagal bayar pelanggan di masa lalu dan analisis posisi keuangan pelanggan saat ini, disesuaikan dengan faktor-faktor yang spesifik dari pelanggan, kondisi ekonomi umum industri di mana pelanggan beroperasi. Grup telah mengakui penyisihan kerugian sebesar 100% atas seluruh piutang yang telah tertunggak lebih dari 36 bulan karena pengalaman historis mengindikasikan bahwa instrumen keuangan tersebut umumnya tidak dapat dipulihkan.

Aset keuangan dihapuskan ketika terdapat informasi yang mengindikasikan bahwa pelanggan dalam kesulitan keuangan yang buruk dan tidak ada prospek pemulihan yang realistis.

Pertimbangan dalam Penentuan Kebijakan Akuntansi

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan PSAK 109 untuk perlakuan akuntansi sejak 1 Januari 2020. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2.h.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

These assumptions include, inter alia: the discount rate, inflation rate and increment rate of the Group's income and expenses. The Group believes that these assumptions are reasonable and appropriate, the significant differences in the Group's assumptions may materially affect the fair value of investment properties. The carrying amount of investment property are disclosed in Notes 13.

Allowance for Impairment Losses on Financial Assets

Allowance for impairment losses for financial assets has been measured at an amount equal to lifetime expected credit loss if the credit risk of the financial instrument has increased significantly since its initial recognition. The Expected Credit Loss on financial instruments are estimated using a provision matrix refer to past default history of the customers and an analysis of the customers current financial position, and adjusted for specific factors to the customers, general economic conditions of the industry in which the customers operate. The Group has recognized a loss allowance of 100% against all receivables over 36 months past due because historical experience has indicated that financial instruments aren't generally recoverable.

Financial assets are written off when there is information indicating that the customers is in severe financial difficulty and there is no realistic prospect of recovery.

Judgement in Applying the Accounting Policies

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements.

Classification of Financial Assets and Liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 109 for accounting treatment since January 1, 2020. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group accounting policies disclosed in Note 2.h.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2.v. Laba Per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada Pemegang Saham biasa entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam suatu periode.

Untuk tujuan penghitungan laba per saham dilusian, Grup menyesuaikan laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada Pemegang Saham biasa entitas induk dan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari seluruh instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar sebesar 6.188.835 lembar per 31 Desember 2024 dan 6.110.098 lembar per 31 Desember 2023.

2.w. Segmen Operasi

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara regular direviu oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- a. yang terlibat dalam aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- b. yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- c. dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

2.v. Earnings Per Share

Basic earnings per share is calculated by dividing the profit or loss attributable to ordinary Shareholders of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.

For the purpose of calculating diluted earnings per share, the Group shall adjust profit or loss attributable to ordinary Shareholders of the parent entity, and the weighted average number of shares outstanding, for the effect of all dilutive potential ordinary shares. The weighted average number of shares outstanding were 6,188,835 shares as of December 31, 2024 and 6,110,098 shares as of December 31, 2023.

2.w. Operating Segment

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the operating decision maker in order to allocate resources to the operating segments and to assess their performances.

An operating segment is a component of an entity:

- a. that engages in business activities from which it may earn revenues and incurred expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);
- b. whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
- c. for which discrete financial information is available.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of performance is more specifically focused on the category of each product.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

3. Kas dan Setara Kas

3. Cash and Cash Equivalents

	2024 Rp	2023 Rp	
Kas	8	39	Cash
Bank			Bank
Pihak Berelasi (Catatan 40)			Related Parties (Note 40)
Rupiah			Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	14,379	14,411	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	7,110	1,016,891	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3,292	1,808	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	24	7	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Dolar Amerika Serikat			US Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2,467	4,228	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)	--	19	Other (each below Rp1,000)
Jumlah Pihak Berelasi	27,272	1,037,364	Total Related Parties
Pihak Ketiga			Third Parties
Rupiah			Rupiah
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)	363	1,076	Other (each below Rp1,000)
Dolar Amerika Serikat			US Dollar
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)	--	37	Other (each below Rp1,000)
Jumlah Pihak Ketiga	363	1,113	Total Third Parties
Jumlah Bank	27,635	1,038,477	Total Bank
Deposito Berjangka			Time Deposits
Pihak Berelasi (Catatan 40)			Related Parties (Note 40)
Rupiah			Rupiah
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	688,992	--	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	257,477	--	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	15,000	15,000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jumlah Pihak Berelasi	961,469	15,000	Total Related Parties
Pihak Ketiga			Third Parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank Mega Tbk	89,000	--	PT Bank Mega Tbk
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	35,448	--	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Bank KB Bukopin Tbk	34,680	--	PT Bank KB Bukopin Tbk
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	3,420	3,420	PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
Jumlah Pihak Ketiga	162,548	3,420	Total Third Parties
Jumlah Deposito Berjangka	1,124,017	18,420	Total Time Deposits
Dikurangi : Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(463)	--	Less: Allowance for Impairment Losses
Jumlah Kas dan Setara Kas	1,151,197	1,056,936	Total Cash and Cash Equivalents
Tingkat Suku Bunga Deposito per Tahun	2.25%-7.50%	2.25%-6.80%	Interest Rate on Time Deposit per Annum
Jangka Waktu	1-3 bulan/months	1-3 bulan/months	Maturity Period

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai kas dan setara kas adalah sebagai berikut:

The movement of allowance for impairment losses on cash and cash equivalents is as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo Awal	--	--	Beginning Balance
Penambahan Tahun Berjalan (Catatan 30)	(463)	--	Addition in The Current Year (Note 30)
Saldo Akhir	(463)	--	Ending Balance

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya di kemudian hari.

Management believes that the allowance for impairment losses is sufficient to cover the potential of uncollectibility in the future.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

4. Pinjaman Investasi Jangka Pendek

4. Short-term Investment Loans

	2024 Rp	2023 Rp	
Pihak Berelasi (Catatan 40)			Related Parties (Note 40)
Pokok dan Bunga			Principal and Interest
Perum Perumnas	187,020	191,058	Perum Perumnas
PT Magnesium Gosari Internasional	44,361	39,742	PT Magnesium Gosari Internasional
PT Artha Bangun Pratama	38,532	38,532	PT Artha Bangun Pratama
PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	24,877	24,877	PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)
PT Pratama Persada Airborne	19,713	5,341	PT Pratama Persada Airborne
Lain-lain	25,265	74,731	Others
Subjumlah	339,768	374,281	Subtotal
Provisi	1,233	221	Provisions
Dikurangi : Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(46,235)	(43,508)	Less: Allowance for Impairment Losses
Jumlah Pihak Berelasi	294,766	330,994	Total Related Parties
Pihak Ketiga			Third Parties
Pokok dan Bunga			Principal and Interest
PT Varia Intra Finance	169,217	154,355	PT Varia Intra Finance
PT Polowijo Gosari	158,375	158,551	PT Polowijo Gosari
PT Widodo Makmur Perkasa Tbk	101,822	107,550	PT Widodo Makmur Perkasa Tbk
PT Carpediem Mandiri	67,536	67,686	PT Carpediem Mandiri
PT Duta Cipta Pakarperkasa	29,591	29,591	PT Duta Cipta Pakarperkasa
Lain-lain	106,671	156,033	Others
Subjumlah	633,212	673,766	Subtotal
Provisi	809	750	Provisions
Dikurangi : Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(354,321)	(330,396)	Less: Allowance for Impairment Losses
Jumlah Pihak Ketiga	279,700	344,120	Total Third Parties
Jumlah Pinjaman Investasi Jangka Pendek	574,466	675,114	Total Short-Term Investment Loans

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai pinjaman investasi jangka pendek adalah sebagai berikut:

The movement of allowance for impairment losses on short-term investment loans is as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo Awal	(373,904)	(445,943)	Beginning Balance
Penambahan Tahun Berjalan (Catatan 30)	(31,025)	(29,970)	Addition in The Current Year (Note 30)
Pemulihan Tahun Berjalan (Catatan 30)	4,373	63,161	Recovery in The Current Year (Note 30)
Penghapusbukan	--	38,848	Write-off
Saldo Akhir	(400,556)	(373,904)	Ending Balance

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya di kemudian hari.

Management believes that the allowance for impairment losses is sufficient to cover the possibility of uncollectibility in the future.

Mutasi pemberian dan penerimaan pelunasan pokok dan bunga pinjaman untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The movement of loan principal and interest disbursements and repayments for the years ended December 31, 2024 and 2023 is as follows:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Debitur/Debtors	1 Januari 2024/ January 1, 2024	Penambahan/ Addition	Pembayaran/ Payment	Lain-lain/ Others	31 Desember 2024/ December 31, 2024
Pihak Berelasi (Catatan 40)/Related Parties (Note 40)					
Perum Perumnas	191,058	24,799	28,837	--	187,020
PT Magnesium Gosari Internasional	39,742	5,040	421	--	44,361
PT Artha Bangun Pratama	38,532	--	--	--	38,532
PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	24,877	--	--	--	24,877
PT Pratama Persada Airborne	5,341	15,542	1,170	--	19,713
Lain-lain/Others	74,731	4,818	54,284	--	25,265
	374,281	50,199	84,712	--	339,768
Pihak Ketiga/Third Parties					
PT Varia Intra Finance	154,355	25,387	10,525	--	169,217
PT Polowijo Gosari	158,551	--	176	--	158,375
PT Widodo Makmur Perkasa Tbk	107,550	--	5,728	--	101,822
PT Carpediem Mandiri	67,686	--	150	--	67,536
PT Duta Cipta Pakarperkasa	29,591	--	--	--	29,591
Lain-lain/Others	156,033	2,504	51,866	--	106,671
	673,766	27,891	68,445	--	633,212
Debitur/Debtors	1 Januari 2023/ January 1, 2023	Penambahan/ Addition	Pembayaran/ Payment	Lain-lain/ Others	31 Desember 2023/ December 31, 2023
Pihak Berelasi (Catatan 40)/Related Parties (Note 40)					
Perum Perumnas	194,048	13,197	16,187	--	191,058
PT Magnesium Gosari Internasional	24,030	15,712	--	--	39,742
PT Artha Bangun Pratama	38,464	68	--	--	38,532
PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	24,877	--	--	--	24,877
PT Pratama Persada Airborne	57,770	30,350	1,744	(81,035)	5,341
Lain-lain/Others	15,751	69,081	10,101	--	74,731
	354,940	128,408	28,032	(81,035)	374,281
Pihak Ketiga/Third Parties					
PT Varia Intra Finance	181,771	27,276	54,692	--	154,355
PT Polowijo Gosari	158,551	--	--	--	158,551
PT Widodo Makmur Perkasa Tbk	148,269	7,127	--	(47,846)	107,550
PT Carpediem Mandiri	66,869	1,317	500	--	67,686
PT Duta Cipta Pakarperkasa	29,591	--	--	--	29,591
Lain-lain/Others	180,728	8,629	8,254	(25,070)	156,033
	765,779	44,349	63,446	(72,916)	673,766

a. Perum Perumnas ("Perumnas")

Fasilitas Modal Kerja I

Pada tanggal 6 Juli 2020, Perusahaan dan Perumnas menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman No. 06, sebagaimana diperbarui dengan Addendum III No. 21 tanggal 26 Juni 2024. Nilai fasilitas pinjaman yang diberikan Perusahaan maksimum sebesar Rp140.000, dan jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2025.

Fasilitas Modal Kerja II

Pada tanggal 25 Agustus 2022, Perusahaan dan Perumnas menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman II No. 25, sebagaimana diperbarui dengan Addendum II No. 22 tanggal 26 Juni 2024. Nilai fasilitas pinjaman yang diberikan Perusahaan maksimum sebesar Rp100.000, dan jatuh tempo pada tanggal 20 Mei 2025.

a. Perum Perumnas ("Perumnas")

Working Capital I Facility

On July 6, 2020, the Company and Perumnas signed Loan Facility Agreement No. 06, as amended by Addendum III No. 21 dated June 26, 2024. The maximum loan facility provided by the Company is Rp140,000, and matures on May 20, 2025.

Working Capital II Facility

On August 25, 2022, the Company and Perumnas signed Loan Facility Agreement II No. 25, as amended by Addendum II No. 22 dated June 26, 2024. The maximum loan facility provided by the Company is Rp100,000, and matures on May 20, 2025.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**b. PT Magnesium Gosari Internasional
("PT MGI")**

Investasi dan Modal Kerja

Pada tanggal 21 April 2022, Perusahaan dan PT MGI menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman No. PP-13/PPA/0422, sebagaimana diperbarui dengan *Addendum I* No. PP-28/PPA/1123 tanggal 13 November 2023. Nilai fasilitas pinjaman yang diberikan Perusahaan maksimum sebesar Rp226.520, dan telah jatuh tempo pada tanggal 20 April 2024.

Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian ini, perpanjangan perjanjian masih dalam proses penyelesaian.

c. PT Artha Bangun Pratama ("PT ABP")

Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek

Pada tanggal 15 Desember 2024, Perusahaan dan PT ABP menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman No. PP-06/PPA/1214, sebagaimana diperbarui dengan *Addendum XI* No. PP-37/PPA/1022 tanggal 25 Oktober 2022. Nilai fasilitas pinjaman yang diberikan Perusahaan maksimum sebesar Rp38.260, dan telah jatuh tempo pada tanggal 14 Desember 2023.

Konsultan JLL

Pada tanggal 3 November 2016, Perusahaan dan PT ABP menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman No. PP-19/PPA/1116, sebagaimana diperbarui dengan *Addendum IV* No. PP-25/PPA/1220 tanggal 10 Desember 2020. Nilai fasilitas pinjaman yang diberikan Perusahaan maksimum sebesar Rp586, dan telah jatuh tempo pada tanggal 2 November 2021.

**d. PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)
("PT VTP")**

Fasilitas Modal Kerja

Pada tanggal 2 Desember 2019, Perusahaan dan PT VTP menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman No. 14, sebagaimana diperbarui dengan *Addendum III* No. 47 tanggal 15 Desember 2020. Nilai fasilitas pinjaman yang diberikan Perusahaan maksimum sebesar Rp30.000, dan telah jatuh tempo pada tanggal 1 Desember 2021.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**b. PT Magnesium Gosari Internasional
("PT MGI")**

Investment & Working Capital

On April 21, 2022, the Company and PT MGI signed Loan Facility Agreement No. PP-13/PPA/0422, as amended by *Addendum I* No. PP-28/PPA/1123 dated November 13, 2023. The maximum loan facility provided by the Company is Rp226,520, and has matured on April 20, 2024.

As of the date of authorization of these consolidated financial statements, the extension of the agreement is still in the process of being finalization.

c. PT Artha Bangun Pratama ("PT ABP")

Short-Term Loan Facility

On December 15, 2024, the Company and PT ABP signed Loan Facility Agreement No. PP-06/PPA/1214, as amended by *Addendum XI* No. PP-37/PPA/1022 dated October 25, 2022. The maximum loan facility provided by the Company is Rp38,260, and has matured on December 14, 2023.

JLL Consultant

On November 3, 2016, the Company and PT ABP signed Loan Facility Agreement No. PP-19/PPA/1116, as amended by *Addendum IV* No. PP-25/PPA/1220 dated December 10, 2020. The maximum loan facility provided by the Company is Rp586, and has matured on November 2, 2021.

**d. PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)
("PT VTP")**

Working Capital Facility

On December 2, 2019, the Company and PT VTP signed Loan Facility Agreement No. 14, as amended by *Addendum III* No. 47 dated December 15, 2020. The maximum loan facility provided by the Company is Rp30,000, and has matured on December 1, 2021.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**e. PT Pratama Persada Airborne
("PT Airborne")**

Standby Loan

Pada tanggal 12 Desember 2017, Perusahaan dan PT Airborne menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman No. 50, sebagaimana diperbarui dengan Perjanjian No. PP-20/PPA/0923 tanggal 27 September 2023.

Fasilitas Modal Kerja

Pada tanggal 22 Juni 2017, Perusahaan dan PT Airborne menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman No. 130, sebagaimana diperbarui dengan Perjanjian Novasi Kredit tanggal 29 Maret 2023, yang menyatakan bahwa Utang PT Airborne kepada Perusahaan, dialihkan kepada PT Karvak Nusa Geomatika. Nilai pinjaman yang dialihkan adalah Rp36.279.

Fasilitas Operasional dan Modal Kerja

Pada tanggal 27 September 2023, Perusahaan dan PT Airborne menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman No. PP-22/PPA/0923, sebagaimana diperbarui dengan Addendum I No. PP-5/PPA/0324 tanggal 25 Maret 2024. Nilai fasilitas pinjaman yang diberikan Perusahaan maksimum sebesar Rp19.041, dan jatuh tempo pada tanggal 30 April 2025.

Proyek Sebatik

Pada tanggal 9 November 2023, Perusahaan dan PT Airborne menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman No. PP-27/PPA/1123. Nilai fasilitas pinjaman yang diberikan Perusahaan maksimum sebesar Rp2.000, dan telah jatuh tempo pada tanggal 7 Februari 2024.

Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian ini, perpanjangan perjanjian masih dalam proses penyelesaian.

f. PT Varia Intra Finance ("PT VIF")

Fasilitas Pembiayaan

Pada tanggal 29 November 2019, Perusahaan dan PT VIF menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman No. 86, sebagaimana diperbarui dengan Addendum II No. 03 tanggal 6 Januari 2023. Nilai fasilitas pinjaman yang diberikan Perusahaan maksimum sebesar Rp160.000, dan telah jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2023.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**e. PT Pratama Persada Airborne
("PT Airborne")**

Standby Loan

On December 12, 2017, the Company and PT Airborne signed Loan Facility Agreement No. 50, as amended by Agreement No. PP-20/PPA/0923 dated September 27, 2023.

Working Capital Facility

On June 22, 2017, the Company and PT Airborne signed Loan Facility Agreement No. 130, as amended by the Credit Novation Agreement dated March 29, 2023, which states that PT Airborne's debt to the Company was transferred to PT Karvak Nusa Geomatika. The transferred loan amount was Rp36,279.

Operational Facility and Working Capital

On September 27, 2023, the Company and PT Airborne signed Loan Facility Agreement No. PP-22/PPA/0923, as amended by Addendum I No. PP-5/PPA/0324 dated March 25, 2024. The maximum loan facility provided by the Company is Rp19,041, and matures on April 30, 2025.

Sebatik Project

On November 9, 2023, the Company and PT Airborne signed Loan Facility Agreement No. PP-27/PPA/1123. The maximum loan facility provided by the Company is Rp2,000, and has matured on February 7, 2024.

As of the date of authorization of these consolidated financial statements, the extension of the agreement is still in the process of being finalization.

f. PT Varia Intra Finance ("PT VIF")

Financing Facility

On November 29, 2019, the Company and PT VIF signed Loan Facility Agreement No. 86, as amended by Addendum II No. 03 dated January 6, 2023. The maximum loan facility provided by the Company is Rp160,000, and has matured on December 28, 2023.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian ini, perpanjangan perjanjian masih dalam proses penyelesaian.

g. PT Polowijo Gosari ("PT PG")

Fasilitas Modal Kerja

Pada tanggal 29 Mei 2017, Perusahaan dan PT PG menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman No. PP-9/PPA/0517, sebagaimana diperbarui dengan Perjanjian Penyelesaian Utang No. 36 tanggal 29 Desember 2022. Nilai fasilitas pinjaman yang diberikan Perusahaan maksimum sebesar Rp150.000, dan jatuh tempo pada tanggal 20 Oktober 2025.

h. PT Widodo Makmur Perkasa Tbk ("PT WMP")

Fasilitas Pendanaan I

Pada tanggal 11 Mei 2021, Perusahaan dan PT WMP menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman No. 26. Nilai fasilitas pinjaman yang diberikan Perusahaan maksimum sebesar Rp51.308, dan telah jatuh tempo pada tanggal 25 November 2022.

Fasilitas Pendanaan II

Pada tanggal 19 Oktober 2021, Perusahaan dan PT WMP menandatangani Perjanjian Kerjasama Investasi No. 75. Nilai fasilitas pinjaman yang diberikan Perusahaan maksimum sebesar Rp23.692, dan telah jatuh tempo pada tanggal 26 April 2023.

Fasilitas Modal Kerja

Pada tanggal 23 Desember 2021, Perusahaan dan PT WMP menandatangani Perjanjian Kerjasama Investasi No. 45. Nilai fasilitas pinjaman yang diberikan Perusahaan maksimum sebesar Rp280.000, dan telah jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2023.

Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian ini, perpanjangan perjanjian masih dalam proses penyelesaian.

i. PT Carpediem Mandiri ("PT CM")

Fasilitas Modal Kerja

Pada tanggal 22 September 2017, Perusahaan dan PT CM menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman No. 145, sebagaimana diperbarui dengan Perjanjian No. 24 tanggal 5 November 2021. Nilai fasilitas pinjaman yang diberikan Perusahaan maksimum sebesar Rp61.302, dan telah jatuh tempo pada tanggal 2 November 2023.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

As of the date of authorization of these consolidated financial statements, the extension of the agreement is still in the process of being finalization.

g. PT Polowijo Gosari ("PT PG")

Working Capital Facility

On May 29, 2017, the Company and PT PG signed Loan Facility Agreement No. PP-9/PPA/0517, as amended by the Debt Settlement Agreement No. 36 dated December 29, 2022. The maximum loan facility provided by the Company is Rp150,000, and matures on October 20, 2025.

h. PT Widodo Makmur Perkasa Tbk ("PT WMP")

Funding Facility I

On May 11, 2021, the Company and PT WMP signed Loan Facility Agreement No. 26. The maximum loan facility provided by the Company is Rp51,308, and has matured on November 25, 2022.

Funding Facility II

On October 19, 2021, the Company and PT WMP signed Investment Cooperation Agreement No. 75. The maximum loan facility provided by the Company is Rp23,692, and has matured on April 26, 2023.

Working Capital Facility

On December 23, 2021, the Company and PT WMP signed Investment Cooperation Agreement No. 45. The maximum loan facility provided by the Company is Rp280,000, and has matured on June 30, 2023.

As of the date of authorization of these consolidated financial statements, the extension of the agreement is still in the process of being finalization.

i. PT Carpediem Mandiri ("PT CM")

Working Capital Facility

On September 22, 2017, the Company and PT CM signed Loan Facility Agreement No. 145, as amended by the Agreement No. 24 dated November 5, 2021. The maximum loan facility provided by the Company is Rp61,302, and has matured on November 2, 2023.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian ini, proses penagihan masih dilakukan.

j. PT Dutacipta Pakarperkasa ("PT DCP")

Fasilitas Modal Kerja

Pada tanggal 10 November 2017, Perusahaan dan PT DCP menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman No. 73. Nilai fasilitas pinjaman yang diberikan Perusahaan maksimum sebesar Rp81.000, dan telah jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2018.

PT DCP telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya No. 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby, tanggal 28 Februari 2020. Dengan adanya putusan ini, PT DCP tidak lagi memiliki kemampuan untuk melanjutkan operasionalnya sebagai entitas yang berkelanjutan (*going concern*). Seluruh aset dan kewajiban PT DCP akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam proses kepailitan.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

As of the authorization date of these consolidated financial statements, the collection process is still on going.

j. PT Dutacipta Pakarperkasa ("PT DCP")

Working Capital Facility

On November 10, 2017, the Company and PT DCP signed Loan Facility Agreement No. 73. The maximum loan facility provided by the Company is Rp81,000, and has matured on December 31, 2018.

PT DCP has been declared bankrupt based on the Decision of the Commercial Court at the Surabaya District Court No. 41/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN.Niaga.Sby, dated February 28, 2020. As a result of this decision, PT DCP is no longer able to continue its operations as a going concern. All of PT DCP's assets and liabilities will be settled in accordance with the applicable bankruptcy laws and regulations.

5. Piutang Usaha

5. Accounts Receivable

	2024 Rp	2023 Rp	
Pihak Berelasi (Catatan 40)			Related Parties (Note 40)
Piutang Bunga dan <i>Monitoring</i>	87,295	72,183	Monitoring and Interest Receivables
Piutang Sewa Pembiayaan - Bersih	76,125	81,715	Financial Lease Receivables - Net
Piutang Lainnya	45,041	58,627	Other Receivable
Piutang <i>Advisory</i>	27,248	18,247	Advisory Receivable
Tagihan Anjak Piutang - Bersih	21,298	6,245	Factoring Receivables - Net
Talangan Biaya Pengelolaan Aset Beban Debitur	3,027	214	Asset Management Fee Bailouts
Bunga Deposito Berjangka	2,233	--	Interest on Time Deposits
Piutang Klaim	--	32,346	Claim Receivable
Subjumlah	262,267	269,577	Subtotal
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(90,176)	(131,601)	Less: Allowance for Impairment Losses
Jumlah Pihak Berelasi	172,091	137,976	Total Related Parties
Pihak Ketiga			Third Parties
Piutang Sewa Pembiayaan - Bersih	693,348	702,327	Financial Lease Receivables - Net
Tagihan Anjak Piutang - Bersih	65,002	65,502	Factoring Receivables - Net
Piutang Pembiayaan Konsumen - Bersih	32,065	34,320	Consumer Finance Receivables - Net
Piutang Lainnya	18,584	14,372	Other Receivable
Piutang Bunga dan <i>Monitoring</i>	9,033	12,071	Monitoring and Interest Receivables
Piutang <i>Advisory</i>	5,628	5,628	Advisory Receivable
Piutang Hasil Investasi Surat Berharga	3,691	3,652	Receivables from Investment in Securities
Talangan Biaya Pengelolaan Aset Beban Debitur	623	--	Bridging Funds for Asset Management Costs of the Debtor
Bunga Deposito Berjangka	477	94	Interest on Time Deposits
Piutang Dividen	--	24,164	Consumer Finance Receivables - Net
Subjumlah	828,451	862,130	Subtotal
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(148,950)	(74,800)	Less: Allowance for Impairment Losses
Jumlah Pihak Ketiga	679,501	787,330	Total Third Parties
Jumlah Piutang Usaha	851,592	925,306	Total Trade Receivables

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, seluruh nilai tercatat atas piutang usaha Grup berdenominasi dalam Rupiah.

As of December 31, 2024 and 2023, all of the carrying amount of Group's accounts receivable were denominated in Rupiah.

Transaksi dengan pihak berelasi dan pihak ketiga dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar.

Transactions with related parties and third parties are carried out with the conditions that are applicable in the arms' length transactions.

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

The movements in allowance for impairment losses of account receivables are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo Awal	(206,401)	(229,404)	Beginning Balance
Penambahan Tahun Berjalan (Catatan 30)	(32,725)	(25,994)	Addition in the Current Year (Note 30)
Pemulihan Tahun Berjalan (Catatan 30)	--	48,997	Recovery in The Current Year (Note 30)
Saldo Akhir	(239,126)	(206,401)	Ending Balance

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya di kemudian hari.

Management believes that the allowance for impairment losses is sufficient to cover the possibility of uncollectibility in the future.

Rincian saldo piutang usaha berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

The details of accounts receivable to the customers are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Pihak Berelasi (Catatan 40)			Related Parties (Note 40)
PT Rejeki Intilogam Jaya	65,626	55,060	PT Rejeki Intilogam Jaya
PT Perikanan Indonesia	27,005	21,832	PT Perikanan Indonesia
PT Barata Indonesia (Persero)	24,250	31,222	PT Barata Indonesia (Persero)
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	16,737	18,524	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)
PT Matoa Kidung Samudera	13,824	13,908	PT Matoa Kidung Samudera
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10.000)	114,825	129,031	Others (each below Rp 10,000)
Subjumlah	262,267	269,577	Subtotal
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(90,176)	(131,601)	Less: Allowance for Impairment Losses
Jumlah Pihak Berelasi	172,091	137,976	Total Related Parties
Pihak Ketiga			Third Parties
PT Perintis Embee	42,710	42,710	PT Perintis Embee
PT Indostar Aviation	39,060	39,060	PT Indostar Aviation
PT Synergi Tharada	38,659	40,659	PT Synergi Tharada
PT Pelayaran Glora Kaltim	36,242	36,242	PT Pelayaran Glora Kaltim
PT Bara Surya Perkasa	34,605	34,605	PT Bara Surya Perkasa
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 10.000)	637,175	668,854	Others (each below Rp 10,000)
Subjumlah	828,451	862,130	Subtotal
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(148,950)	(74,800)	Less: Allowance for Impairment Losses
Jumlah Pihak Ketiga	679,501	787,330	Total Third Parties
Jumlah Piutang Usaha	851,592	925,306	Total Trade Receivables

Rincian saldo piutang usaha berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

The details of the account receivables balance by aging are as follows:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024 Rp	2023 Rp	
Umur Piutang Usaha yang Belum Diturunkan Nilainya			Aging of Accounts Receivable Not Impaired
Belum Jatuh Tempo	204,630	627,994	Not yet due
Lewat Jatuh tempo:			Past due:
1 - 90 hari	9,648	307,905	1 - 90 days
91 - 120 hari	928	--	91 - 120 days
121 - 180 hari	956	5,805	121 - 180 days
> 180 hari	874,556	190,003	> 180 days
Jumlah	1,090,718	1,131,707	Total
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(239,126)	(206,401)	Less: Allowance for Impairment Losses
Jumlah - Bersih	851,592	925,306	Total - Net

6. Pinjaman yang Diberikan-Dana Talangan-Pihak Berelasi

6. Loans Receivable-Bailout-Related Parties

	2024 Rp	2023 Rp	
Pokok dan bunga			Principal and Interest
PT Barata Indonesia (Persero)	345,238	344,651	PT Barata Indonesia (Persero)
PT PDI Pulau Batam (Persero)	316,747	55,662	PT PDI Pulau Batam (Persero)
PT Boma Bisma Indra (Persero)	162,192	161,344	PT Boma Bisma Indra (Persero)
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	96,097	94,449	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	74,192	67,710	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia
Lain-lain	88,692	49,383	Others
Subjumlah	1,083,158	773,199	Subtotal
Provisi	854	167	Provisions
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(163,975)	(148,222)	Less: Allowance for Impairment Losses
Jumlah Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan	920,037	625,144	Total Loans Receivable - Bailout

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai pinjaman adalah sebagai berikut:

The movements in allowance for impairment losses of loans are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo Awal	(148,222)	(403,894)	Beginning Balance
Penambahan Tahun Berjalan (Catatan 30)	(15,753)	(62,568)	Addition in the Current Year (Note 30)
Penghapusbukuan	--	318,084	Write-off
Pemulihan Tahun Berjalan (Catatan 30)	--	156	Recovery in The Current Year (Note 30)
Saldo Akhir	(163,975)	(148,222)	Ending Balance

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya di kemudian hari.

Management believes that the allowance for impairment losses is sufficient to cover the possibility of uncollectibility in the future.

Mutasi pemberian dan penerimaan pelunasan pokok dan bunga pinjaman untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The movement of loan principal and interest disbursements and repayments for the years ended December 31, 2024 and 2023 is as follows:

	1 Januari 2024/ January 1, 2024	Penambahan/ Addition	Pembayaran/ Payment	Lain-lain/ Others	31 Desember 2024/ December 31, 2024
Pihak Berelasi (Catatan 40)/Related Parties (Note 40)					
PT Barata Indonesia (Persero)	344,651	48,084	47,497	--	345,238
PT PDI Pulau Batam (Persero)	55,662	261,896	811	--	316,747
PT Boma Bisma Indra (Persero)	161,344	848	--	--	162,192
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	94,449	1,648	--	--	96,097
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	67,710	8,662	2,180	--	74,192
Lain-lain	49,383	50,812	11,503	--	88,692
	773,199	371,950	61,991	--	1,083,158

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Debitur/Debtors	1 Januari 2023/ January 1, 2023	Penambahan/ Addition	Pembayaran/ Payment	Lain-lain/ Others	31 Desember 2023/ December 31, 2023
Pihak Berelasi (Catatan 40)/Related Parties (Note 40)					
PT Barata Indonesia (Persero)	242,841	131,187	29,377	--	344,651
PT Boma Bisma Indra (Persero)	107,262	58,082	4,000	--	161,344
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	80,756	15,960	2,267	--	94,449
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	20,416	51,461	4,167	--	67,710
PT PDI Pulau Batam (Persero)	1,480	57,364	3,182	--	55,662
Lain-lain	372,708	46,375	9,695	(360,005)	49,383
	825,463	360,429	52,688	(360,005)	773,199

Rincian tingkat suku bunga pinjaman pada
31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai
berikut:

*Details of loan interest rates as of December 31,
2024 and 2023 are as follows:*

Nomor/ Number	Debitur/ Debtor	Suku Bunga Pinjaman/Loan Interest Rate	
		31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023
1	PT Barata Indonesia (Persero)	10.94%	12.50%
2	PT PDI Pulau Batam (Persero)	12.00%	12.00%
3	PT Boma Bisma Indra (Persero)	10.50%	10.50%
4	PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	12.50%	10.50% - 15.50%
5	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	12.00%	12.00%
6	Lain-lain / Other's	11.98%	7.00% - 14.00%

7. Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka

7. Advances and Prepaid Expenses

	2024 Rp	2023 Rp	
Biaya Dibayar di Muka	6.426	7.459	Prepaid Expenses
Uang Muka Pihak Ketiga	11	108	Advance to Third Parties
Jumlah	6.437	7.567	Total

Uang muka pihak ketiga merupakan uang muka
kepada pemasok untuk keperluan operasional
kantor. Biaya dibayar di muka merupakan biaya
untuk sewa gedung, asuransi dan lain-lain.

*Advance to the third parties represent the
advance payment to the suppliers for. The
prepaid expenses represent the costs for
building rental, insurance and etc.*

8. Perpajakan

8. Taxation

a. Pajak Dibayar di Muka

a. Prepaid Taxes

	2024 Rp	2023 Rp	
<u>Perusahaan</u>			<u>Company</u>
Pajak Pertambahan Nilai	12,307	15,340	Value Added Tax
Pajak Penghasilan Pasal 22	86	123	Income Tax Article 22
Pajak Penghasilan Pasal 23	84,737	83,345	Income Tax Article 23
<u>Entitas Anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
Pajak Pertambahan Nilai	1,134	868	Value Added Tax
Pajak Penghasilan Pasal 23	665	1,234	Income Tax Article 23
Jumlah	98,929	100,910	Total

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perusahaan

Pemeriksaan Tahun Pajak 2021

Pada tahun 2022, Perusahaan mengajukan restitusi atas Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Tahun 2021 sebesar Rp32.650. Berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar ("SKPLB") tanggal 24 Maret 2023 No. 00005/406/20/093/23, restitusi yang diterima sebesar Rp30.745.

Pada bulan April 2023, Perusahaan menerima pengembalian uang SKPLB sebesar Rp30.720, setelah memperhitungkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ("SKPKB") atas koreksi pemeriksaan sebesar Rp25. Atas selisih restitusi yang diajukan dengan yang diterima sebesar Rp1.930, sejumlah Rp1.254 dibebankan ke laba rugi dan sejumlah Rp676 diajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") melalui surat No. S-1772/PPA/DKMR/0523.

Perusahaan telah menerima keputusan dari DJP yang mengabulkan seluruh keberatan yang diajukan dan menerima pengembalian uang sebesar Rp676 pada 9 Agustus 2023.

Pemeriksaan Tahun Pajak 2022

Pada tahun 2023, Perusahaan mengajukan restitusi atas Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Tahun 2022 sebesar Rp32.028. Berdasarkan SKPLB No. 00029/406/22/093/24 tanggal 27 Mei 2024, restitusi yang diterima sebesar Rp31.920. Atas selisih restitusi yang diajukan dengan yang diterima sebesar Rp108 dibebankan ke laba rugi.

PT PPAF

Pemeriksaan Tahun Pajak 2021

Pada tahun 2022, PT PPAF mengajukan restitusi atas Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Badan Tahun 2021. Berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dari DJP No. S-00160/RIKSIS/KPP:1904/2023 tanggal 21 Maret 2023, restitusi yang diterima sebesar Rp589.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

The Company

Tax Year 2021 Examination

In 2022, the Company applied for a refund of the Excess Corporate Income Tax Payment ("SKPLB") for the year 2021 amounting to Rp32,650. Based on SKPLB dated March 24, 2023 No. 00005/406/20/093/23, the refund received is Rp30,745.

In April 2023, the Company received a tax refund (SKPLB) amounting to Rp30,720, after offsetting a Tax Underpayment Assessment Letter ("SKPKB") due to an audit adjustment of Rp25. The difference between the requested and received refund amounted to Rp1,930, of which Rp1,254 was charged to profit or loss, while Rp676 was disputed with the Directorate General of Taxes ("DJP") through letter No. S-1772/PPA/DKMR/0523.

The Company has received a decision from the DJP granting all the objections filed and received a refund of Rp676 on August 9, 2023.

Tax Year 2022 Examination

In 2023, the Company applied for a refund of the Excess Corporate Income Tax Payment for the year 2022 amounting to Rp32,028. Based on SKPLB No. 00029/406/20/093/24 dated May 27, 2024, the refund received is Rp31,920. The difference between the requested and received tax refund amounting to Rp108 was charged to profit or loss.

PT PPAF

Tax Year 2021 Examination

In 2022, PT PPAF applied for a refund of the Excess Corporate Income Tax Payment for the year 2021. Based on the Letter of Notification of Examination Results from DJP No. S-00160/RIKSIS/KPP:1904/2023 dated March 21, 2023, the restitution received amounting to Rp589.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

b. Utang Pajak

	2024 Rp	2023 Rp
<u>Perusahaan</u>		
Pajak Penghasilan Pasal 21	4,938	6,765
Pajak Penghasilan Pasal 22	16	11
Pajak Penghasilan Pasal 23	397	2,604
Pajak Penghasilan Pasal 26	66	--
Pajak Penghasilan 4 Ayat 2	618	558
<u>Entitas Anak</u>		
Pajak Penghasilan Pasal 21	288	321
Pajak Penghasilan Pasal 23	3	41
Pajak Penghasilan 4 Ayat 2	--	21
Jumlah	6,326	10,321

b. Taxes Payable

<u>Company</u>
Income Tax Article 21
Income Tax Article 22
Income Tax Article 23
Income Tax Article 26
Income Tax Article 4 Par 2
<u>Subsidiaries</u>
Income Tax Article 21
Income Tax Article 23
Income Tax Article 4 Par 2
Total

c. Beban Pajak Penghasilan

	2024 Rp	2023 Rp
Beban Pajak Penghasilan		
Perusahaan	(6,850)	5,470
Entitas Anak	1,665	(7,940)
Jumlah	(5,185)	(2,470)

c. Income Taxes Expense

Income Tax Expenses
The Company
Subsidiaries
Total

d. Pajak Penghasilan Badan

	2024 Rp	2023 Rp
Laba Sebelum Pajak Menurut Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	210,555	328,111
Dikurangi:		
Rugi Sebelum Pajak - Entitas Anak	14,015	113,888
Laba Sebelum Pajak - Perusahaan	224,570	441,999
Beda Waktu:		
Provisi Pinjaman yang Diberikan	--	--
Akrual Apresiasi Karyawan	(8,242)	7,311
Beban Imbalan Pascakerja - Bersih	(1,459)	6,122
Akrual Tantiem	(10,875)	18,385
Penyusutan Aset Tetap	(436)	(204)
Aset Hak-Guna dan Liabilitas Sewa	(9,786)	5,478
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(336)	373
Lain-lain	--	--
Beda Tetap:		
Penyisihan Penurunan Nilai	(163,105)	(553,072)
Dividen	(371,304)	(309,716)
Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan	777,281	764,299
Kenaikan Nilai Wajar Properti Investasi	(10,537)	(716)
Jumlah Koreksi Fiskal	201,201	(61,740)
Bagian Laba yang Telah Diperhitungkan		
Pajak Penghasilan Final dan Bukan Objek Pajak	(882,992)	(919,842)
Rugi Fiskal Sebelum Kompensasi Rugi Fiskal	(457,221)	(539,583)
Kompensasi Rugi Fiskal:		
Tahun 2022	(245,258)	(521,845)
Tahun 2023	(535,702)	--
Laba Fiskal (Akumulasi Rugi Fiskal)	(1,238,181)	(1,061,428)
Pajak Penghasilan Badan		
Tahun Berjalan (22%)	--	--

Profit Before Tax Based on Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income
Less:
Loss Before Tax - Subsidiaries
Profit Before Tax - Company
Timing Differences:
Provision for Loans Receivable
Accrued Employees' Appreciation
Employee Benefits Expense - Net
Accrued Tantiems
Fixed Assets Depreciation
Right-of-Use Assets and Lease Liabilities
Intangible Assets Amortization
Others
Permanent Differences:
Allowance for Impairment Loss
Dividend
Non Deductible Expenses
Increase in Fair Value of Investment Property
Total Tax Correction
Calculated Profit Share
Final Income Tax and Non-Tax Object
Taxable Loss Before Tax Losses Compensation
Fiscal Tax Losses Compensation:
Year 2022
Year 2023
Taxable Income (Accumulated Tax Losses)
Corporate Income Tax Expense on Current Year (22%)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Rekonsiliasi antara laba akuntansi sebelum pajak penghasilan dengan tarif pajak yang berlaku dan beban pajak penghasilan sebagai berikut:

The reconciliation between the accounting income before income tax with the current tax rate and income tax expense are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	224,570	441,999	Corporate Income Before Tax
Beban Pajak atas Laba			Revenue Tax Expense
dengan Tarif Pajak yang Berlaku	(49,405)	97,240	with Effective Tax Rate
Pengaruh Pajak atas Benda Tetap	(51,114)	(21,825)	Tax Effect on the Permanent Differences
Penghasilan yang Dikenakan Pajak Final dan Bukan Objek Pajak	194,258	(202,365)	Income Subject to Final Tax and non Tax Object
Pajak Tangguhan atas Rugi Fiskal yang Tidak Diakui	(100,589)	132,420	Unrecognized Deferred Tax from Fiscal Loss
Beban pajak penghasilan	(6,850)	5,470	

e. Aset Pajak Tangguhan

e. Deferred Tax Assets

	31 Des. 2023/ Dec. 31, 2023 Rp	Dibebankan ke Laporan Laba Rugi/ Charged to Profit or Loss Rp	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif/ Charged to Comprehensive Income Rp	31 Des. 2024/ Dec. 31, 2024 Rp	
Perusahaan					Company
Aset Pajak Tangguhan					Deferred Tax Assets
Liabilitas Sewa	7,233	4,715	--	11,948	Right of Use of Assets
Akrua Apresiasi Karyawan	10,304	(2,393)	--	7,911	Accrued Employees Appreciation
Akrua Tantiem	9,338	(1,813)	--	7,525	Accrued Tantiem
Liabilitas Imbalan Kerja	4,894	(321)	(162)	4,411	Employee Benefit Liabilities
Aset Takberwujud	126	(74)	--	52	Intangible Assets
Aset Tetap	105	(96)	--	9	Fixed Asset
Subjumlah	32,000	18	(162)	31,856	Subtotal
Liabilitas Pajak Tangguhan					Deferred Tax Liabilities
Aset Hak Guna	(8,438)	(6,868)	--	(15,306)	Lease Liabilities
Subjumlah	(8,438)	(6,868)	--	(15,306)	Subtotal
Disajikan sebagai Aset Pajak Tangguhan	23,562	(6,850)	(162)	16,550	Presented as Deferred Tax Assets
PT PPA Finance					PT PPA Finance
Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian	5,438	741	--	6,179	Expected Credit Losses
Akrua Apresiasi Karyawan	--	96	--	96	Accrued Employees Appreciation
Liabilitas Imbalan Kerja	421	82	(38)	465	Employee Benefit Liabilities
Subjumlah	5,859	919	(38)	6,740	Subtotal
PT PPA Kapital					PT PPA Kapital
Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian	37,936	1,540	--	39,476	Expected Credit Losses
Akrua Apresiasi Karyawan	841	(794)	--	47	Accrued Employees Appreciation
Subjumlah	38,777	746	--	39,523	Subtotal
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	68,198	(5,185)	(200)	62,813	Total Deferred Tax Assets

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	1 Jan. 2023/ Jan. 1, 2023 Rp	Dibebankan ke Laporan Laba Rugi/ Charged to Profit or Loss Rp	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif/ Charged to Comprehensive Income Rp	31 Des. 2023/ Dec. 31, 2023 Rp	
Perusahaan					Company
Aset Pajak Tangguhan					Deferred Tax Assets
Liabilitas Sewa	--	7,233	--	7,233	Right of Use of Assets
Akrua Apresiasi Karyawan	8,696	1,608	--	10,304	Accrued Employees Appreciation
Akrua Tantiem	5,293	4,045	--	9,338	Accrued Tantiem
Liabilitas Imbalan Kerja	3,994	1,347	(447)	4,894	Employee Benefit Liabilities
Aset Takberwujud	45	81	--	126	Intangible Assets
Aset Tetap	146	(41)	--	105	Fixed Asset
Subjumlah	18,540	13,907	(447)	32,000	Subtotal
Liabilitas Pajak Tangguhan					Deferred Tax Liabilities
Aset Hak Guna	--	(8,438)	--	(8,438)	Lease Liabilities
Subjumlah	--	(8,438)	--	(8,438)	Subtotal
Disajikan sebagai Aset Pajak Tangguhan	18,540	5,469	(447)	23,562	Presented as Deferred Tax Assets
PT PPA Finance					PT PPA Finance
Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian	14,337	(8,899)	--	5,438	Expected Credit Losses
Liabilitas Imbalan Kerja	414	89	(82)	421	Employee Benefit Liabilities
Subjumlah	14,751	(8,810)	(82)	5,859	Subtotal
PT PPA Kapital					PT PPA Kapital
Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian	37,407	529	--	37,936	Expected Credit Losses
Akrua Apresiasi Karyawan	369	472	--	841	Accrued Employees Appreciation
Liabilitas Imbalan Kerja	99	(130)	31	--	Employee Benefit Liabilities
Subjumlah	37,875	871	31	38,777	Subtotal
Jumlah Aset Pajak Tangguhan	71,166	(2,470)	(498)	68,198	Total Deferred Tax Assets

9. Aset Lainnya

9. Other Assets

	2024 Rp	2023 Rp	
Aset Lancar Lainnya			Other Current Assets
Deposito Berjangka yang Dijaminkan	329,269	--	Time Deposits Pledged as Collateral
Obligasi yang Dijaminkan	297,468	--	Bonds Pledged as Collateral
Piutang Bagi Hasil Sukuk	24,169	24,169	Sukuk Profit Sharing Receivables
Piutang Talangan Biaya BUMN	3,927	3,927	SOEs' Bailout Loans Receivable
Piutang Denda	29	1,035	Penalty Receivable
Piutang Pegawai	--	1,105	Employee Receivable
Subjumlah	654,862	30,236	Subtotal
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(4,105)	(4,004)	Less: Allowance for Impairment Losses
Jumlah	650,757	26,232	Total
Aset Tidak Lancar Lainnya			Other Non-Current Assets
Aset Takberwujud	8,578	8,424	Intangible Assets
Uang Jaminan Sewa	6,620	3,860	Rent Deposit Guarantee
Deposito Berjangka yang Dijaminkan	--	390,000	Time Deposits Pledged as Collateral
Obligasi yang Dijaminkan	--	312,515	Bonds Pledged as Collateral
Lain-lain	959	--	Others
Subjumlah	16,157	714,799	Subtotal
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	--	--	Less: Allowance for Impairment Losses
Jumlah	16,157	714,799	Total

Piutang Bagi Hasil Sukuk

Piutang bagi hasil sukuk merupakan piutang atas imbal hasil tunai indikatif setara dengan 1% per tahun dari nilai nominal aset keuangan Perusahaan berupa Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk berdasarkan Akta Akad Penerbitan Sukuk Mudharabah No. 20 tanggal 15 November 2021 (Catatan 27).

Sukuk Profit Sharing Receivables

Sukuk profit-sharing receivables are receivables for indicative cash returns equivalent to 1% per annum of the nominal value of the Company's financial assets in the form of Sukuk Mudharabah, issued by PT Bank Muamalat Indonesia Tbk based on the Sukuk Mudharabah Issuance Deed No. 20 dated November 15, 2021 (Note 27).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Piutang Talangan Biaya BUMN

Piutang talangan biaya BUMN merupakan piutang atas restrukturisasi/revitalisasi BUMN.

Deposito Berjangka yang Dijaminkan

Perusahaan menerima fasilitas kredit dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank BTN") sesuai dengan Perjanjian Kredit Swadana No. 01/PK/CBD/IV/2024 tanggal 23 April 2024 sebagaimana diperbarui dengan Addendum II No. 05/PK/CBD/XII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 (Catatan 22).

Sebagai jaminan atas pembayaran kembali atas pinjaman tersebut, Perusahaan memberikan jaminan kepada Bank BTN berupa Deposito Berjangka milik Perusahaan yang ditempatkan pada Bank BTN senilai Rp329.269 per tanggal 31 Desember 2024 dan Rp390.000 per 31 Desember 2023. Deposito dijaminkan sampai dengan 30 Agustus 2025.

Mutasi deposito berjangka yang dijaminkan adalah sebagai berikut:

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo Awal	390,000	390,060	Beginning Balance
Pengurangan Tahun Berjalan	(60,731)	(60)	Deduction in The Current Year
Saldo Akhir	329,269	390,000	Ending Balance

Obligasi yang Dijaminkan

Perusahaan menerima fasilitas kredit dari PT China Construction Bank Indonesia Tbk ("Bank CCBI") sesuai dengan Perjanjian Kredit No. 23 tanggal 28 September 2017 dan sebagaimana diubah dengan Perubahan Ketujuh atas Perjanjian Kredit No. 377/APK/XII/2023 tanggal 27 Desember 2023 (Catatan 22).

Berdasarkan surat dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") No. TIB.IBF/CMS.4398/2023 tanggal 22 Desember 2023, Bank Mandiri sebagai Bank Kustodian telah melakukan blokir atas Obligasi FR0091 dengan nilai nominal Rp270.000 dan Obligasi USD INDOIS 4.4 27 dengan nilai nominal USD2.929.000 (nilai penuh) sebagai jaminan atas Fasilitas Kredit pada Bank CCBI (Catatan 22).

SOE's Bailout Loans Receivable

SOE's Bailout loans refers to receivables related to the restructuring/revitalization of SOE.

Time Deposits Pledged as Collateral

The Company received a credit facility from PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank BTN") in accordance with the Swadana Credit Agreement No. 01/PK/CBD/IV/2024 dated April 23, 2024, which was amended by Addendum II No. 05/PK/CBD/XII/2024 dated August 30, 2024 (Note 22).

To secure repayment of the loan, the Company provides collateral to Bank BTN in the form of the Company's Time Deposits held at Bank BTN, valued at Rp329,269 as of December 31, 2024, and Rp390,000 as of December 31, 2023. The deposit is pledged until August 30, 2025.

The movements in time deposits pledged as collateral are as follows:

Secure Bonds

The Company received a credit facility from PT China Construction Bank Indonesia Tbk ("Bank CCBI") under Loan Agreement No. 23 dated September 28, 2017, and as amended by Seventh Amendment to Credit Agreement No. 377/APK/XII/2023 dated December 27, 2023 (Note 22).

Based on a letter from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") No. TIB.IBF/CMS.4398/2023 dated December 22, 2023, that Bank Mandiri as Bank Custody has blocked Bonds FR0091 with a nominal value of Rp270,000 and USD INDOIS Bonds 4.4 27 with a nominal value of USD2,929,000 (full amount) as collateral for the Bank CCBI (Note 22).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai aset lainnya adalah sebagai berikut:

The movements in allowance for impairment losses of other assets are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Aset Lancar Lainnya			Other Current Assets
Saldo Awal	(4,004)	(4,168)	Beginning Balance
Penghapusbukuan	--	164	Write-off
Penambahan Tahun Berjalan (Catatan 30)	(101)	--	Addition in The Current Year (Note 30)
Sub jumlah	(4,105)	(4,004)	Subtotal
Aset Tidak Lancar Lainnya			Other Non-Current Assets
Saldo Awal	--	(185)	Beginning Balance
Pemulihan Tahun Berjalan (Catatan 30)	--	185	Recovery in The Current Year (Note 30)
Sub jumlah	--	--	Subtotal
Saldo Akhir	(4,105)	(4,004)	Ending Balance

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya di kemudian hari.

Management believes that the allowance for impairment losses is sufficient to cover the possibility of uncollectibility in the future.

10. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Laba Rugi

10. Financial Asset Measured at Fair Value Through Profit or Loss

	2024		2023		
	Jumlah Saham/ Total Share	Nilai Pasar/ Market Value	Jumlah Saham/ Total Share	Nilai Pasar/ Market Value	
PT Arta Integrasi Teknologi	821,750,010	1,015,491	821,750,010	911,434	PT Arta Integrasi Teknologi
Property Indonesia Fund VCC	33,657	58,717	33,657	82,566	Property Indonesia Fund VCC
SOE Wijayakusuma Fund VCC	67,178	79,438	67,178	104,394	SOE Wijayakusuma Fund VCC
Jumlah	821,850,845	1,153,646	821,850,845	1,098,394	Total

PT Arta Integrasi Teknologi ("Arint")

Perusahaan memiliki investasi penyertaan saham pada Arint dengan jumlah saham 821.750.010 saham setara dengan kepemilikan 38%. Selama tahun 2024 dan 2023, Perusahaan mengakui peningkatan nilai wajar bersih sebesar Rp104.057 dan Rp81.311 pada laba rugi, sesuai dengan penilaian oleh KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan, penilai independen terdaftar di OJK. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, nilai tercatat investasi pada Arint senilai Rp1.015.491 dan Rp911.434.

PT Arta Integrasi Teknologi ("Arint")

The Company has an equity investment in Arint with 821,750,010 shares equivalent to a 38% ownership stake. During 2024 and 2023, the Company recognized a net fair value increase of Rp104,057 and Rp81,311 respectively in profit or loss, based on the valuation conducted by KJPP Nirboyo Adiputro, Dewi Apriyanti & Rekan, an independent appraiser registered with OJK. As of December 31, 2024 and 2023, the carrying value of the investment in Arint amounting to Rp1,015,491 and Rp911,434, respectively.

Property Indonesia Fund VCC ("PIF")

Pada tahun 2022, Perusahaan melakukan investasi pada PIF yang berkedudukan di Singapura. Selama tahun 2024 dan 2023, Perusahaan mengakui (penurunan) kenaikan nilai wajar sebesar (Rp23.849) dan Rp56.901 pada laba rugi. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, nilai tercatat investasi pada PIF senilai Rp58.717 dan Rp82.566.

Property Indonesia Fund VCC ("PIF")

In 2022, the Company invested in PIF based in Singapore. During 2024 and 2023, the Company recognized an (decrease) increase in fair value of (Rp23,849) and Rp56,901 respectively, on the profit or loss. As of December 31, 2024 and 2023, the carrying value of the investment value in PIF was Rp58,717 and Rp82,566, respectively.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

SOE Wijayakusuma Fund VCC ("SWF")

Pada tahun 2023, Perusahaan melakukan investasi pada SWF yang berkedudukan di Singapura. Selama tahun 2024 dan 2023 Perusahaan mengakui (penurunan) kenaikan nilai wajar sebesar (Rp24.956) dan Rp37.216. Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, nilai tercatat investasi pada SWF senilai Rp79.438 dan Rp104.394.

SOE Wijayakusuma Fund VCC ("SWF")

In 2023, the Company invested in SWF based in Singapore. During 2024 and 2023, the Company recognized an (decrease) increase in fair value of (Rp24,956) and Rp37,216 respectively, on the profit or loss statement. As of December 31, 2024 and 2023, the carrying value of the investment in SWF was Rp79,438 and Rp104,394, respectively.

11. Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain

	2024 Rp	2023 Rp
<u>Bagian Jangka Panjang</u>		
Saham		
PT Indosat Tbk	7,704,120	7,280,859
PT Socfin Indonesia	305,349	264,682
PT Prasadha Pamunah Limbah Industri	132,859	130,231
PT Bank KB Bukopin Tbk	56,104	83,117
PT Pratama Persada Airborne	16,422	16,145
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	4,256	4,256
PT Kawasan Industri Lampung	2,195	5,537
Subjumlah	8,221,305	7,784,827
Surat Utang		
Obligasi USD - Pemerintah Republik Indonesia	38,830	37,531
Perpetual Loan - PT Pratama Persada Airborne	37,593	37,593
Perpetual Loan - PT Nindya Beton	19,599	19,599
Subjumlah	96,022	94,723
Jumlah - Jangka Panjang	8,317,327	7,879,550

Berikut adalah informasi jumlah lembar saham dan nilai wajar untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain:

	2024 Rp	2023 Rp
Saham - PT Indosat Tbk		
Jumlah Saham *	3,106,499,996	776,624,999
Nilai Wajar (dalam Rupiah penuh)	2,480	9,375
Saham - PT Socfin Indonesia		
Jumlah Saham	5,000	5,000
Nilai Wajar (dalam Rupiah penuh)	61,069,800	52,936,400
Saham - PT Prasadha Pamunah Limbah Industri		
Jumlah Saham	50	50
Nilai Wajar (dalam Rupiah penuh)	2,657,180,000	2,604,620,000
Saham - PT Bank KB Bukopin Tbk		
Jumlah Saham	1,038,968,631	1,038,968,631
Nilai Wajar (dalam Rupiah penuh)	54	80
Saham - PT Pratama Persada Airborne		
Jumlah Saham	9,009	9,009
Nilai Wajar (dalam Rupiah penuh)	1,822,844	1,792,097
Saham - PT Kawasan Industri Lampung		
Jumlah Saham	1,762,087	1,762,087
Nilai Wajar (dalam Rupiah penuh)	1,246	3,142
Saham - PT Waskita Karya (Persero) Tbk		
Jumlah Saham	21,061,708	21,061,708
Nilai Wajar (dalam Rupiah penuh)	202	202

*) Sesuai Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indosat Tbk pada tanggal 20 September 2024, pemegang saham menyetujui Pemecahan Saham 1:4, sehingga jumlah saham yang dimiliki Perusahaan menjadi 3.106.499.996 lembar saham efektif per tanggal 14 Oktober 2024.

Mutasi penghasilan komprehensif lain atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

11. Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income

<u>Long-Term Portion</u>	
Shares	
PT Indosat Tbk	
PT Socfin Indonesia	
PT Prasadha Pamunah Limbah Industri	
PT Bank KB Bukopin Tbk	
PT Pratama Persada Airborne	
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	
PT Kawasan Industri Lampung	
Subtotal	
Debt	
USD Bonds - Indonesian Government	
Perpetual Loan - PT Pratama Persada Airborne	
Perpetual Loan - PT Nindya Beton	
Subtotal	
Total - Long Term Portion	

The following is information on the number of shares and fair value for financial assets measured at fair value through other comprehensive income:

Saham - PT Indosat Tbk	
Number of Share	
Fair Value (in full Rupiah)	
Saham - PT Socfin Indonesia	
Number of Share	
Fair Value (in full Rupiah)	
Saham - PT Prasadha Pamunah Limbah Industri	
Number of Share	
Fair Value (in full Rupiah)	
Saham - PT Bank KB Bukopin Tbk	
Number of Share	
Fair Value (in full Rupiah)	
Saham - PT Pratama Persada Airborne	
Number of Share	
Fair Value (in full Rupiah)	
Saham - PT Kawasan Industri Lampung	
Number of Share	
Fair Value (in full Rupiah)	
Saham - PT Waskita Karya (Persero) Tbk	
Number of Share	
Fair Value (in full Rupiah)	

Movement of other comprehensive income related to financial assets measured at fair value through other comprehensive income is as follows:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo Awal	4,862,946	2,388,426	Beginning Balance
Kenaikan (Penurunan) Nilai yang Belum Direalisasi dari Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain	418,709	2,474,520	Unrealized Gain (Loss) Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income
Saldo Akhir	5,281,655	4,862,946	Ending Balance

12. Pinjaman yang Diberikan-Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi – Pihak Berelasi

12. Loans Receivable-Restructuring and/or Revitalization – Related Parties

	2024 Rp	2023 Rp	
Pokok dan Bunga			Principal and Interest
PT Dirgantara Indonesia	628,484	628,484	PT Dirgantara Indonesia
PT PAL Indonesia	202,260	218,172	PT PAL Indonesia
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	38,127	36,213	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
Sub Jumlah	868,871	882,869	Sub Total
Provisi	100	100	Provisions
Dikurangi : Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(338,376)	(347,889)	Less: Allowance for Impairment Losses
Jumlah Pinjaman Restrukturisasi/Revitalisasi	530,595	535,080	Total Restructuring/Revitalization Loans Receivable

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan-restrukturisasi dan/atau revitalisasi adalah sebagai berikut:

The movements in allowance for impairment losses of loans receivable-restructuring and/or revitalization are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo Awal	(347,889)	(1,284,098)	Beginning Balance
Penambahan Tahun Berjalan (Catatan 30)	(282)	--	Addition in the Current Year (Note 30)
Pemulihan Tahun Berjalan (Catatan 30)	9,795	119,766	Recovery in The Current Year (Note 30)
Penghapusbukuan	--	816,443	Write-off
Saldo Akhir	(338,376)	(347,889)	Ending Balance

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya di kemudian hari.

Management believes that the allowance for impairment losses is sufficient to cover the possibility of uncollectibility in the future.

Mutasi pemberian dan penerimaan pelunasan pokok dan bunga pinjaman untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The movement of loan principal and interest disbursements and repayments for the years ended December 31, 2024 and 2023 is as follows:

Debitur/Debtors	1 Januari 2024/ January 1, 2024	Penambahan/ Addition	Pembayaran/ Payment	Lain-lain/ Others	31 Desember 2024/ December 31, 2024
Pihak Berelasi (Catatan 40)/Related Parties (Note 40)					
PT Dirgantara Indonesia	628,484	--	--	--	628,484
PT PAL Indonesia	218,172	--	15,912	--	202,260
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	36,213	1,914	--	--	38,127
	882,869	1,914	15,912	--	868,871
Debitur/Debtors	1 Januari 2023/ January 1, 2023	Penambahan/ Addition	Pembayaran/ Payment	Lain-lain/ Others	31 Desember 2023/ December 31, 2023
Pihak Berelasi (Catatan 40)/Related Parties (Note 40)					
PT Dirgantara Indonesia	628,484	--	--	--	628,484
PT PAL Indonesia	215,937	2,235	--	--	218,172
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	35,215	1,908	910	--	36,213
Lain-lain	816,343	--	--	(816,343)	--
	1,695,979	4,143	910	(816,343)	882,869

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Rincian tingkat suku bunga pinjaman pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Details of loan interest rates as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

Nomor Number	Debitur/ Debtor	Suku Bunga Pinjaman/Loan Interest Rate	
		31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023
1	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	2.18%	2.18%
2	PT PAL Indonesia (Persero)	1,00% - 4,05%	1.00% - 8.00%
3	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	1,18% - 7,65%	1.00% - 6.50%

13. Properti Investasi

13. Investment Properties

2024				
	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deductions Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp
Biaya Perolehan				Acquisition Cost
Tanah dan Bangunan	276,627	--	--	276,627 Lands and Buildings
Akumulasi Perubahan Nilai Wajar				Accumulated Changes Fair Value
Tanah dan Bangunan	179,050	10,537	--	189,587 Lands and Buildings
Nilai Tercatat	455,677			466,214 Carrying Value
2023				
	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deductions Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp
Biaya Perolehan				Acquisition Cost
Tanah dan Bangunan	268,913	7,714	--	276,627 Lands and Buildings
Akumulasi Perubahan Nilai Wajar				Accumulated Changes Fair Value
Tanah dan Bangunan	178,334	716	--	179,050 Lands and Buildings
Nilai Tercatat	447,247			455,677 Carrying Value

Aset Wolter

Perusahaan memiliki tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.

Nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2024 didasarkan pada laporan penilai KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan, penilai independen terdaftar di OJK, sebagaimana dalam laporannya tertanggal 30 Januari 2025 senilai Rp153.990.

Nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2023 didasarkan pada laporan penilai KJPP Iskandar & Rekan, penilai independen terdaftar di OJK, sebagaimana dalam laporannya tertanggal 23 Januari 2024 senilai Rp146.290.

Pendapatan sewa yang diterima dan biaya terkait properti investasi sebagai berikut:

Wolter Asset

The Company owns land and building is located in Melawai Village, Kebayoran Baru District, South Jakarta City.

The fair value as of December 31, 2024 is based on the appraisal report by KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan, an independent appraisal registered with the OJK, as stated in its reports dated January 30, 2025 of Rp153,990.

The fair value as of December 31, 2023 is based on the appraisal report by KJPP Iskandar & Rekan, an independent appraisal registered with the OJK, as stated in its reports dated January 23, 2024 of Rp146,290.

The rental income received and costs related to the investment properties are as follows:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024 Rp	2023 Rp	
Pendapatan Sewa	2,091	289	Rental Income
Beban Langsung yang Timbul dari Properti Investasi yang menghasilkan Penghasilan Sewa	254	--	Direct Operating Cost Incurred from Investment Properties that Generate Rental Income

Aset Syamsudin Noor

Aset Syamsudin Noor berupa tanah dan bangunan yang terletak di KO Bandara Syamsudin Noor, Kelurahan Syamsudin Noor, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan.

Nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2024 didasarkan pada laporan penilai KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan, penilai independen terdaftar di OJK, sebagaimana dalam laporannya tertanggal 30 Januari 2025 senilai Rp4.308.

Nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2023 didasarkan pada laporan penilai KJPP Iskandar & Rekan, penilai independen terdaftar di OJK, sebagaimana dalam laporannya tertanggal 23 Januari 2024 senilai Rp4.689.

Aset Tompo Balang

Aset Tompo Balang berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Bontala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2024 didasarkan pada laporan penilai KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan, penilai independen terdaftar di OJK, sebagaimana dalam laporannya tertanggal 30 Januari 2025 senilai Rp11.060.

Nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2023 didasarkan pada laporan penilai KJPP Iskandar & Rekan, penilai independen terdaftar di OJK, sebagaimana dalam laporannya tertanggal 23 Januari 2024 senilai Rp10.921.

Pendapatan sewa yang diterima dan biaya terkait properti investasi sebagai berikut:

	2024 Rp	2023 Rp	
Pendapatan Sewa	--	--	Rental Income
Beban Langsung yang Timbul dari Properti Investasi yang menghasilkan Penghasilan Sewa	32	31	Direct Operating Cost Incurred from Investment Properties that Do Not Generate Rental Income

Syamsudin Noor Assets

Syamsudin Noor assets consist of land and buildings located in the Syamsudin Noor Airport Operational Area, Syamsudin Noor Village, Landasan Ulin District, Banjar Baru City, South Kalimantan.

The fair value as of December 31, 2024 is based on the appraisal report by KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan, an independent appraisal registered with the OJK, as stated in its reports dated January 30, 2025 of Rp4,308.

The fair value as of December 31, 2023 is based on the appraisal report by KJPP Iskandar & Rekan, an independent appraisal registered with the OJK, as stated in its reports dated January 23, 2024 of Rp4,689.

Tompo Balang Assets

Tompo Balang assets consist of land and buildings located in Tompobalang Village, Bontala Subdistrict, Makassar City, South Sulawesi.

The fair value as of December 31, 2024 is based on the appraisal report by KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan, an independent appraisal registered with the OJK, as stated in its reports dated January 30, 2025 of Rp11,060.

The fair value as of December 31, 2023 is based on the appraisal report by KJPP Iskandar & Rekan, an independent appraisal registered with the OJK, as stated in its reports dated January 23, 2024 of Rp10,921.

The rental income received and costs related to the investment properties are as follows:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Aset Maros

Aset Maros berupa tanah terletak di Kelurahan Ma'rumpa, Dusun Bulutanae, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, berupa tanah dan bangunan.

Nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2024 didasarkan pada laporan penilai KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan, penilai independen terdaftar di OJK, sebagaimana dalam laporannya tertanggal 30 Januari 2025 senilai Rp73.646.

Nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2023 didasarkan pada laporan penilai KJPP Iskandar & Rekan, penilai independen terdaftar di OJK, sebagaimana dalam laporannya tertanggal 23 Januari 2024 senilai Rp76.490.

Pendapatan sewa yang diterima dan biaya terkait properti investasi sebagai berikut:

	2024 Rp	2023 Rp
Pendapatan Sewa	--	--
Beban Langsung yang Timbul dari Properti Investasi yang menghasilkan Penghasilan Sewa	84	85

Aset Cimanuk

Aset Cimanuk berupa tanah dan bangunan rumah tinggal disertai sarana pelengkap yang terletak di Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2024 didasarkan pada laporan penilai KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan, penilai independen terdaftar di OJK, sebagaimana dalam laporannya tertanggal 30 Januari 2025 senilai Rp38.069.

Nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2023 didasarkan pada laporan penilai KJPP Iskandar & Rekan, penilai independen terdaftar di OJK, sebagaimana dalam laporannya tertanggal 23 Januari 2024 senilai Rp36.364.

Pendapatan sewa yang diterima dan Biaya terkait properti investasi sebagai berikut:

	2024 Rp	2023 Rp
Pendapatan Sewa	363	--
Beban Langsung yang Timbul dari Properti Investasi yang menghasilkan Penghasilan Sewa	56	68

Maros Assets

Maros assets consist of land are located on Ma'rumpa Village, Bulutanae Hamlet, Maros Baru Subdistrict, Maros Regency, South Sulawesi, in the form of land and buildings.

The fair value as of December 31, 2024 is based on the appraisal report by KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan, an independent appraisal registered with the OJK, as stated in its reports dated January 30, 2025 of Rp73,646.

The fair value as of December 31, 2023 is based on the appraisal report by KJPP Iskandar & Rekan, an independent appraisal registered with the OJK, as stated in its reports dated January 23, 2024 of Rp76,490.

The rental income received and costs related to the investment properties are as follows:

Rental Income
Direct Operating Cost Incurred from Investment Properties that Do Not Generate Rental Income

Cimanuk Asset

Cimanuk assets consist of land and residential buildings accompanied by complementary facilities located at Darmo Village, Wonokromo Subdistrict, Surabaya City, East Java Province.

The fair value as of December 31, 2024 is based on the appraisal report by KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan, an independent appraisal registered with the OJK, as stated in its reports dated January 30, 2025 of Rp38,069.

The fair value as of December 31, 2023 was based on the appraisal report by KJPP Iskandar & Rekan, an independent appraisal registered with the OJK, as stated in its reports dated January 23, 2024 of Rp36,364.

The rental income received and costs related to the investment properties are as follows:

Rental Income
Direct Operating Cost Incurred from Investment Properties that Generate Rental Income

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Aset Radio

Aset Radio berupa tanah dan bangunan serta sarana pelengkap lainnya yang terletak di Kelurahan Kramat Pela, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan.

Nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2024 didasarkan pada laporan penilai KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan, penilai independen terdaftar di OJK, sebagaimana dalam laporannya tertanggal 30 Januari 2025 senilai Rp23.162.

Nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2023 didasarkan pada laporan penilai KJPP Iskandar & Rekan, penilai independen terdaftar di OJK, sebagaimana dalam laporannya tertanggal 23 Januari 2024 senilai Rp22.071.

Pendapatan sewa yang diterima dan biaya terkait properti investasi sebagai berikut:

	2024 Rp	2023 Rp
Pendapatan Sewa	419	--
Beban Langsung yang Timbul dari Properti Investasi yang menghasilkan Penghasilan Sewa	24	28

Aset Tegal

Aset Tegal berupa tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Dampyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.

Nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2024 didasarkan pada laporan penilai KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan, penilai independen terdaftar di OJK, sebagaimana dalam laporannya tertanggal 30 Januari 2025 senilai Rp97.674.

Nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2023 didasarkan pada laporan penilai KJPP Iskandar & Rekan, penilai independen terdaftar di OJK, sebagaimana dalam laporannya tertanggal 23 Januari 2024 senilai Rp94.577.

Pendapatan sewa yang diterima dan Biaya terkait properti investasi Aset Tegal sebagai berikut:

	2024 Rp	2023 Rp
Pendapatan Sewa	375	411
Beban Langsung yang Timbul dari Properti Investasi yang menghasilkan Penghasilan Sewa	286	208

Aset Gresik

Perusahaan memiliki aset tanah dan bangunan yang terletak di Gresik.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Radio Asset

Radio asset consist of land, buildings, and other supporting facilities located in Kramat Pela Urban Village, Kebayoran Baru District, South Jakarta City.

The fair value as of December 31, 2024 is based on the appraisal report by KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan, an independent appraisal registered with the OJK, as stated in its reports dated January 30, 2025 of Rp23,162.

The fair value as of December 31, 2023 is based on the appraisal report by KJPP Iskandar & Rekan, an independent appraisal registered with the OJK, as stated in its reports dated January 23, 2024 of Rp22,071.

The rental income received and costs related to the investment properties are as follows:

	Rental Income
	Direct Operating Cost Incurred from Investment Properties that Generate Rental Income

Tegal Asset

Tegal asset consist of land and building assets located in Dampyak Urban Village, Kramat District, Tegal Regency, Central Java.

The fair value as of December 31, 2024 is based on the appraisal report by KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan, an independent appraisal registered with the OJK, as stated in its reports dated January 30, 2025 of Rp97,674.

The fair value as of December 31, 2023 is based on the appraisal report by KJPP Iskandar & Rekan, an independent appraisal registered with the OJK, as stated in its reports dated January 23, 2024 of Rp94,577.

The rental income received and costs related to the investment properties Asset Tegal are as follows:

	Rental Income
	Direct Operating Cost Incurred from Investment Properties that Generate Rental Income

Asset Gresik

The company owns land and building assets located in Gresik.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2024 didasarkan pada laporan penilai KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan, penilai independen terdaftar di OJK, sebagaimana dalam laporannya tertanggal 30 Januari 2025 senilai Rp64.305.

The fair value as of December 31, 2024 is based on the valuation report by KJPP Jimmy Prasetyo & Rekan, an independent appraiser registered with the OJK, as stated in their reports dated January 30, 2025 of Rp64,305.

Nilai wajar pada tanggal 31 Desember 2023 didasarkan pada laporan penilai KJPP Iskandar & Rekan, penilai independen terdaftar di OJK, sebagaimana dalam laporannya tertanggal 23 Januari 2024 senilai Rp64.275.

The fair value as of December 31, 2023 was based on the appraisal report by KJPP Iskandar & Rekan, an independent appraisal registered with the OJK, as stated in its reports dated January 23, 2024 of Rp64,275.

Pendapatan sewa yang diterima dan Biaya terkait properti investasi Aset Tegal sebagai berikut:

The rental income received and costs related to the investment properties Asset Tegal are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Pendapatan Sewa	--	--	Rental Income
Beban Langsung yang Timbul dari Properti Investasi yang tidak menghasilkan Penghasilan Sewa	24	33	Direct Operating Cost Incurred from Investment Properties that Do Not Generate Rental Income

Metode penilaian yang digunakan adalah pendekatan nilai pasar dan biaya. Pendekatan dengan nilai pasar menggunakan data harga penawaran atau transaksi dari properti pembanding yang sejenis dan sebanding dengan obyek penilaian yang tersedia. Pendekatan dengan nilai biaya yang mencerminkan biaya pelaku pasar untuk membangun aset yang penggunaannya dan umurnya dapat dibandingkan.

Appraisal method was based on the market and cost approach. An approach with market value uses offer or transaction price data from comparable properties of a kind and is comparable to the available valuation objects. The cost value approach reflects the cost of market players to build assets whose use and age can be compared.

14. Investasi pada Ventura Bersama dan Entitas Asosiasi

14. Investments in Joint Ventures and Associates

Nama Ventura Bersama dan Asosiasi/ Name of Joint Venture and Associates	Proyek/ Project	Kepemilikan/ Ownership %	2024 Rp	2023 Rp
Ventura Bersama - KSO PPA-Nindya	Proyek Pembangunan Perumahan Green Teksin	90%	47,757	50,836
Ventura Bersama - ISN - LBD - PPA	Proyek Pembangunan Perumahan Bekasi	33%	27,517	31,156
PT Nindya Beton*)	Pre-cast PT Nindya Beton	49%	--	--
			<u>75,274</u>	<u>81,992</u>

*) Nilai tercatat kurang dari Rp1.000/Carrying value under Rp1,000.

Perusahaan memiliki investasi pada entitas asosiasi, yaitu PT Nindya Beton ("PT NB") dengan kepemilikan saham sebesar 49%. Nilai investasi Perusahaan pada PT NB per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar Nihil karena nilai ekuitas PT NB pada tanggal tersebut masing-masing negatif.

The Company has an investment in associates, namely PT Nindya Beton ("PT NB") with a 49% share ownership. The Company investment value in PT NB as of December 31, 2024 and 2023 is Nil due to the equity value of PT NB on those dates was negative.

Mutasi investasi pada ventura bersama dan entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

Changes in investment in joint ventures and associate are as follows:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo Awal	81,992	83,846	Beginning Balance
Pengurangan Penyertaan Modal Ventura Bersama	(4,000)	--	Capital Reduction in Joint Ventures
Bagian Rugi Ventura Bersama dan Entitas Asosiasi	(2,718)	(1,854)	Share of the Loss in Joint Venture and Associates
Saldo Akhir	75,274	81,992	Ending Balance

Berdasarkan keputusan Dewan Pengawas KSO PPA-Nindya, telah disetujui pengembalian penyertaan modal ventura sebesar Rp4.000 dan telah diterima Perusahaan pada tanggal 30 April 2024 dan 1 Juni 2024.

Based on the decision of the KSO PPA-Nindya Supervisory Board, the return of venture capital participation amounting to Rp4,000 has been approved and was received by the Company on April 30, 2024 and June 1, 2024.

Ringkasan informasi keuangan di bawah ini merupakan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan ventura bersama dan entitas asosiasi dengan rincian berikut ini:

The summary of financial information below represents amount shown in joint venture and associates financial statements with the details belows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Aset Lancar	433,702	371,187	Current Asset
Aset Tidak Lancar	66,978	59,904	Non-Current Asset
Liabilitas Jangka Pendek	319,550	245,583	Current Liabilities
Liabilitas Jangka Panjang	5,416	6,254	Non-Current Liabilities
	2024 Rp	2023 Rp	
Pendapatan Usaha	287,502	327,418	Revenue
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	11,406	(7,411)	Net Income (Loss) for the Year
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	--	111	Other Comprehensive Income of The Year
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	11,406	(7,299)	Comprehensive Income (Loss) of The Year

15. Pinjaman Investasi Jangka Panjang

15. Long-Term Investment Loans

	2024 Rp	2023 Rp	
Pihak Berelasi (Catatan 40)			Related Parties (Note 40)
Pokok dan Bunga			Principal and Interest
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	421,929	582,690	PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Magnesium Gosari Internasional	275,537	250,459	PT Magnesium Gosari Internasional
PT Rejeki Intilogam Jaya	262,163	256,380	PT Rejeki Intilogam Jaya
PT Citilink Indonesia	250,000	350,000	PT Citilink Indonesia
PT National Utility Helicopters	197,996	197,996	PT National Utility Helicopters
Lain-lain	322,344	338,542	Others
Sub Jumlah	1,729,969	1,976,067	Sub Total
Provisi	430	1,386	Provision
Dikurangi : Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(568,393)	(477,637)	Less: Allowance for Impairment Losses
Jumlah Pihak Berelasi	1,162,006	1,499,816	Total Related Parties
Pihak Ketiga			Third Parties
Pokok dan Bunga			Principal and Interest
PT Wisarada Sarana Aviassi	31,659	31,659	PT Wisarada Sarana Aviassi
PT Bina Patria Transmitta	22,919	22,959	PT Bina Patria Transmitta
PT Indah Prakasa Sentosa Tbk	17,671	17,996	PT Indah Prakasa Sentosa Tbk
PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk	11,975	11,829	PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk
PT Tropisindo Sumber Energi	6,758	8,209	PT Tropisindo Sumber Energi
Sub Jumlah	90,982	92,652	Sub Total
Dikurangi : Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(34,103)	(37,232)	Total Allowance for Impairment Losses
Jumlah Pihak Ketiga	56,879	55,420	Total Third Parties
Jumlah Pinjaman Investasi Jangka Panjang	1,218,885	1,555,236	Total Long-Term Investment Loans

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai investasi pada pinjaman investasi jangka panjang adalah sebagai berikut:

Movement allowance for impairment losses of investment in long-term investment loan are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo Awal	(514,869)	(447,578)	Beginning Balance
Penambahan Tahun Berjalan (Catatan 30)	(98,110)	(95,477)	Addition in the Current Year (Note 30)
Pengurangan Tahun Berjalan (Catatan 30)	10,483	--	Deduction in The Current Year (Note 30)
Reklasifikasi	--	28,186	Reclassification
Saldo Akhir	(602,496)	(514,869)	Ending Balance

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya di kemudian hari.

Management believes that the allowance for impairment losses is sufficient to cover the possibility of uncollectibility in the future.

Mutasi pemberian dan penerimaan pelunasan pokok dan bunga pinjaman selama tahun 2024 adalah sebagai berikut:

The movement of loan principal and interest disbursements and repayments during 2024 is as follows:

Debitur/Debtors	1 Januari 2024/ January 1, 2024	Penambahan/ Addition	Pembayaran/ Payment	Lain-lain/ Others	31 Desember 2024/ December 31, 2024
Pihak Berelasi (Catatan 40)/Related Parties (Note 40)					
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	582,690	67,283	228,044	--	421,929
PT Magnesium Gosari Internasional	250,459	25,078	--	--	275,537
PT Rejeki Intilogam Jaya	256,380	13,941	8,158	--	262,163
PT Citilink Indonesia	350,000	54,114	154,114	--	250,000
PT National Utility Helicopters	197,996	--	--	--	197,996
Lain-lain/Others	338,542	13,035	29,233	--	322,344
	1,976,067	173,451	419,549	--	1,729,969

Pihak Ketiga/Third Parties					
PT Wisarada Sarana Aviati	31,659	--	--	--	31,659
PT Bina Patria Transmitra	22,959	--	40	--	22,919
PT Indah Prakasa Sentosa Tbk	17,996	--	325	--	17,671
PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk	11,829	1,677	1,531	--	11,975
PT Tropisindo Sumber Energi	8,209	--	1,451	--	6,758
	92,652	1,677	3,347	--	90,982

Debitur/Debtors	1 Januari 2023/ January 1, 2023	Penambahan/ Addition	Pembayaran/ Payment	Lain-lain/ Others	31 Desember 2023/ December 31, 2023
Pihak Berelasi (Catatan 40)/Related Parties (Note 40)					
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	727,346	56,334	200,990	--	582,690
PT Magnesium Gosari Internasional	225,411	25,909	861	--	250,459
PT Rejeki Intilogam Jaya	209,126	211,882	164,628	--	256,380
PT Citilink Indonesia	--	395,773	45,773	--	350,000
PT National Utility Helicopters	195,932	3,564	1,500	--	197,996
Lain-lain/Others	349,126	15,484	26,068	--	338,542
	1,706,941	708,946	439,820	--	1,976,067

Pihak Ketiga/Third Parties					
PT Wisarada Sarana Aviati	29,940	1,919	200	--	31,659
PT Bina Patria Transmitra	21,703	1,301	45	--	22,959
PT Indah Prakasa Sentosa Tbk	--	1,243	139	16,892	17,996
PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk	9,832	3,590	1,593	--	11,829
PT Tropisindo Sumber Energi	9,524	--	1,315	--	8,209
Lain-lain/Others	336,687	45,150	361,620	(20,217)	--
	407,686	53,203	364,912	(3,325)	92,652

a. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ("PT Garuda")

Fasilitas Pembiayaan Restorasi Armada

Pada tanggal 16 September 2022, Perusahaan dan PT Garuda telah menandatangani perjanjian fasilitas Pembiayaan Restorasi Armada No. PP-35/PPA/0922. Nilai fasilitas maksimum sebesar Rp725.000 dan jatuh tempo pada 15 September 2027.

a. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk ("PT Garuda")

Fleet Restoration Financing Facility

On September 16, 2022, the Company and PT Garuda signed the Fleet Restoration Financing Facility Agreement No. PP-35/PPA/0922. The maximum value of the facility is Rp725,000, and matures on September 15, 2027.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**b. PT Magnesium Gosari Internasional
("PT MGI")**

Fasilitas Modal Kerja

Pada tanggal 17 Januari 2019, Perusahaan dan PT MGI menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman No. PP-04/PPA/0119, sebagaimana diperbarui dengan Perjanjian No. PP-41/PPA/1122 tanggal 29 November 2022. Nilai fasilitas pinjaman yang diberikan Perusahaan maksimum sebesar Rp66.000, dan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2032.

Fasilitas Investasi dan Modal Kerja

Pada tanggal 17 Januari 2019, Perusahaan dan PT MGI telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman No. PP-04/PPA/0119 sebagaimana diperbarui dengan Perjanjian No. PP-41/PPA/1122 tanggal 29 November 2022. Nilai fasilitas pinjaman yang diberikan perusahaan maksimum sebesar Rp255.643, dan jatuh tempo pada 31 Desember 2032.

c. PT Rejeki Intilogam Jaya ("PT RILJ")

Fasilitas Modal Kerja dan Investasi

Pada tanggal 26 Februari 2019, Perusahaan dan PT RILJ menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman No. 22, sebagaimana diperbarui dengan Addendum VI No. PP-33/PPA/0722 tanggal 29 Juli 2022. Nilai fasilitas pinjaman yang diberikan Perusahaan maksimum sebesar Rp144.000, dan jatuh tempo pada tanggal 29 Juli 2028.

Fasilitas Modal Kerja dan Investasi

Pada tanggal 23 Maret 2021, Perusahaan dan PT RILJ telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman No. 10, sebagaimana diperbarui dengan Addendum II No. PP-32/PPA/0722 tanggal 29 Juli 2022. Nilai fasilitas maksimum sebesar Rp92.539, dan jatuh tempo pada 29 Juli 2026.

Fasilitas Dana Talangan

Pada tanggal 19 Juni 2023, Perusahaan dan PT RILJ telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman No. PP-10/PPA/0623. Nilai fasilitas maksimum sebesar Rp1.750, dan telah jatuh tempo pada 18 Juni 2024.

Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian ini, perpanjangan perjanjian masih dalam proses penyelesaian.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**b. PT Magnesium Gosari Internasional
("PT MGI")**

Working Capital Facility

On January 17, 2019, the Company and PT MGI signed Loan Facility Agreement No. PP-04/PPA/0119, as amended by the Agreement No. PP-41/PPA/1122 dated November 29, 2022. The maximum loan facility provided by the Company is Rp66,000, and matures on December 31, 2032.

Investment and Working Capital Facility

On January 17, 2019, the Company and PT MGI signed a Loan Facility Agreement No. PP-04/PPA/0119, which was later updated with Agreement No. PP-41/PPA/1122 dated November 29, 2022. The maximum loan facility provided by the Company is Rp255,643, and matures on December 31, 2032.

c. PT Rejeki Intilogam Jaya ("PT RILJ")

Investment and Working Capital Facility

On February 26, 2019, the Company and PT RILJ signed Loan Facility Agreement No. 22, as amended by Addendum VI No. PP-33/PPA/0722 dated July 29, 2022. The maximum loan facility provided by the Company is Rp144,000, and matures on July 29, 2028.

Investment and Working Capital Facility

On March 23, 2021, the Company and PT RILJ signed Loan Facility Agreement No. 10, as amended by Addendum II No. PP-32/PPA/0722 dated July 29, 2022. The maximum value of the facility is Rp92,539, and matures on July 29, 2026.

Bailout Facility

On June 19, 2023, the Company and PT RILJ signed Loan Facility Agreement No. PP-10/PPA/0623. The maximum value of the facility is Rp1,750, and has matured on June 18, 2024.

As of the authorization date of these consolidated financial statements, the extension of the agreement is still in the finalization process.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

d. PT Citilink Indonesia (“PT Citilink”)

Fasilitas Pembiayaan Restorasi dan Reaktivasi Armada

Pada tanggal 31 Mei 2023, Perusahaan dan PT Citilink telah menandatangani perjanjian fasilitas Pembiayaan Restorasi dan Reaktivasi Armada No. PP-8/PPA/0523. Nilai fasilitas maksimum sebesar Rp375.000 dan jatuh tempo pada 6 Juli 2027.

e. PT National Utility Helicopters (“PT NUH”)

Pinjaman Dana Talangan

Pada tanggal 21 November 2017, Perusahaan dan PT NUH menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman No. 103, sebagaimana diperbarui dengan Perjanjian No. 84 tanggal 22 Oktober 2021. Nilai fasilitas pinjaman yang diberikan Perusahaan maksimum sebesar Rp174.293, dan telah jatuh tempo pada tanggal 21 Oktober 2024.

Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian ini, perpanjangan perjanjian masih dalam proses penyelesaian.

f. PT Wisarada Sarana Aviiasi (“PT WSA”)

Fasilitas Pinjaman Investasi

Pada tanggal 7 Agustus 2018, Perusahaan dan PT WSA menandatangani Perjanjian Kerjasama Investasi No. 28, sebagaimana diperbarui dengan Perjanjian No. 37 tanggal 8 Oktober 2021. Nilai fasilitas pinjaman yang diberikan Perusahaan maksimum sebesar Rp27.958, dan telah jatuh tempo pada tanggal 7 Oktober 2024.

Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian ini, perpanjangan perjanjian masih dalam proses penyelesaian.

g. PT Bina Patria Transmित्रa (“PT BPT”)

Fasilitas Pinjaman Investasi

Pada tanggal 16 Oktober 2018, Perusahaan dan PT BPT menandatangani Perjanjian Kerjasama Pinjaman Investasi No. 07, sebagaimana diperbarui dengan Perjanjian restrukturisasi No. 7 tanggal 25 Oktober 2021. Nilai fasilitas pinjaman yang diberikan Perusahaan maksimum sebesar Rp24.500, dan telah jatuh tempo pada tanggal 21 Oktober 2024.

Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian ini, perpanjangan perjanjian masih dalam proses penyelesaian.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

d. PT Citilink Indonesia (“PT Citilink”)

Fleet Restoration and Reactivation Financing Facility

On May 31, 2023, the Company and PT Citilink signed the Fleet Restoration and Reactivation Financing Facility Agreement No. PP-8/PPA/0523. The maximum value of the facility is Rp375,000, and matures on July 6, 2027.

e. PT National Utility Helicopters (“PT NUH”)

Bridging Loan

On November 21, 2017, the Company and PT NUH signed Loan Facility Agreement No. 103, as amended by the Agreement No. 84 dated October 22, 2021. The maximum loan facility provided by the Company is Rp174,293, and has matured on October 21, 2024.

As of the date of authorization of these consolidated financial statements, the extension of the agreement is still in the process of being finalization.

f. Wisarada Sarana Aviiasi (“PT WSA”)

Investment Loan Facility

On August 7, 2018, the Company and PT WSA signed Investment Cooperation Agreement No. 28, as amended by Agreement No. 37 dated October 8, 2021. The maximum loan facility provided by the Company is Rp27,958, and has matured on October 7, 2024.

As of the date of authorization of these consolidated financial statements, the extension of the agreement is still in the process of being finalization.

g. PT Bina Patria Transmित्रa (“PT BPT”)

Investment Loan Facility

On October 16, 2018, the Company and PT BPT signed Investment Loan Cooperation Agreement No. 07, as amended by Restructuring Agreement No. 7 dated October 25, 2021. The maximum loan facility provided by the Company is Rp24,500, and has matured on October 21, 2024.

As of the date of authorization of these consolidated financial statements, the extension of the agreement is still in the process of being finalization.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

h. PT Indah Prakasa Sentosa ("PT IPS")
Fasilitas Pembiayaan Proyek Distribusi Bahan Bakar Minyak

Pada tanggal 11 Januari 2019, Perusahaan dan PT IPS menandatangani Perjanjian Kerjasama Investasi No. 13, sebagaimana diperbarui dengan *Addendum I* No. 1 tanggal 1 Juli 2022. Nilai fasilitas pinjaman yang diberikan Perusahaan maksimum sebesar Rp25.000, dan jatuh tempo pada tanggal 28 Mei 2025.

i. PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk ("PT PAI")
Fasilitas Dana Talangan

Pada tanggal 20 Desember 2019, Perusahaan dan PT PAI menandatangani Perjanjian Kerjasama Investasi No. 43, sebagaimana diperbarui dengan *Addendum V* No. PP-15/PPA/0422 tanggal 21 April 2022. Nilai fasilitas pinjaman yang diberikan Perusahaan maksimum sebesar Rp11.800, dan telah jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2024.

Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian ini, perpanjangan perjanjian masih dalam proses penyelesaian.

j. PT Tropisindo Sumber Energi ("PT TSE")
Surat Utang

Pada tanggal 22 Desember 2016, Perusahaan dan PT TSE menandatangani Akta Perjanjian Jual Beli Surat Utang Konversi ("SUK") No. SU-10/PPA/1216, sebagaimana diperbarui dengan *Addendum III* No. 22 tanggal 31 Oktober 2022. dengan nilai setinggi-tingginya sebesar Rp12.000, dan jatuh tempo tanggal 31 Maret 2029.

h. PT Indah Prakasa Sentosa ("PT IPS")
Fuel Distribution Project Financing

On January 11, 2019, the Company and PT IPS signed *Investment Cooperation Agreement* No. 13, as amended by *Addendum I* No. 1 dated July 1, 2022. The maximum loan facility provided by the Company is Rp25,000, and matures on May 28, 2025.

i. PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk ("PT PAI")
Bailout Facility

On December 20, 2019, the Company and PT PAI signed *Investment Cooperation Agreement* No. 43, as amended by *Addendum V* No. PP-15/PPA/0422 dated April 21, 2022. The maximum loan facility provided by the Company is Rp11,800, and has matured on December 19, 2024.

As of the date of authorization of these consolidated financial statements, the extension of the agreement is still in the process of being finalization.

j. PT Tropisindo Sumber Energi ("PT TSE")
Promissory Note

On December 22, 2016, the Company and PT TSE signed the *Deed of Convertible Bond Purchase Agreement* ("SUK") No. SU-10/PPA/1216, as amended by *Addendum III* No.22 dated October 31, 2022. The maximum value of the agreement is Rp12,000, and matures on March 31, 2029.

16. Investasi Jangka Panjang Lainnya

	2024 Rp	2023 Rp
Surat Berharga - Surat Utang		
PT Rejeki Intilogam Jaya	357,461	357,461
PT Duta Mentari Raya	115,600	115,600
PT SIPPA Kemasan Internasional	95,901	95,901
PT KNE Global Persada	49,477	49,477
PT Asia Kaolinraya	15,000	15,000
PT Ciptaindah Permata	10,000	10,000
Sub Jumlah	643,439	643,439
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(118,748)	(127,936)
Jumlah Investasi Jangka Panjang Lainnya	524,691	515,503

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai investasi adalah sebagai berikut:

16. Other Long-Term Investment

	2024 Rp	2023 Rp
Securities - Notes		
PT Rejeki Intilogam Jaya	357,461	357,461
PT Duta Mentari Raya	115,600	115,600
PT SIPPA Kemasan Internasional	95,901	95,901
PT KNE Global Persada	49,477	49,477
PT Asia Kaolinraya	15,000	15,000
PT Ciptaindah Permata	10,000	10,000
Sub Total	643,439	643,439
Less: Allowance for Impairment Losses	(118,748)	(127,936)
Total Other Long-Term Investment	524,691	515,503

Movement allowance for impairment losses of investment are as follows:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo Awal	(127,936)	(129,985)	Beginning Balance
Penambahan Tahun Berjalan (Catatan 30)	(1,023)	--	Addition in the Current Year (Note 30)
Pengurangan Tahun Berjalan (Catatan 30)	10,211	2,049	Deduction in The Current Year (Note 30)
Saldo Akhir	(118,748)	(127,936)	Ending Balance

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya di kemudian hari.

Management believes that the allowance for impairment losses is sufficient to cover the possibility of uncollectibility in the future.

a. PT Rejeki Intilogam Jaya ("PT RILJ")

Pada tanggal 27 Maret 2019, PT PPAK dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk telah menandatangani Perjanjian Novasi Kredit No. 39, yang mengalihkan kewajiban PT RILJ kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menjadi kepada PT PPAK. Nilai pinjaman yang dialihkan adalah Rp357.586.

a. PT Rejeki Intilogam Jaya ("PT RILJ")

On March 27, 2019, PT PPAK and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk signed a Credit Novation Agreement No. 39, which transferred the obligations of PT RILJ from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk to PT PPAK. The value of the transferred loan is Rp357,586.

Perjanjian Pinjaman telah mengalami beberapa perubahan. Pada tanggal 30 Desember 2021, dilakukan *Addendum II* No. PJ-05/PPAK/1221 yang mengubah fasilitas pinjaman menjadi Rp357.461 terbagi atas 3 (tiga) fasilitas dengan rincian sebagai berikut:

- Fasilitas Pinjaman (*Tranche*) A sejumlah Rp112.000 dengan tingkat suku bunga dari 5,88% menjadi 3,6% per (*gross*).
- Fasilitas Pinjaman (*Tranche*) B sejumlah Rp237.598 dengan tingkat suku bunga dari 5,88% menjadi 3,6% per (*gross*).
- Fasilitas Pinjaman (*Tranche*) C sejumlah Rp7.863 dengan tingkat suku bunga 13,80% (*gross*).

The Loan Agreement has undergone several changes. On December 30, 2021, based on *Addendum II* No. PJ-05/PPAK/1221 which changes the loan facility to Rp357,461 into 3 (three) facilities with the following details:

- Loan Facility (*Tranche*) A amounted of Rp112,000 with an interest rate of 5.88% to 3.6% per (*gross*).
- Loan Facility (*Tranche*) B amounted of Rp237,598 with an interest rate of 5.88% to 3.6% (*gross*).
- Loan Facility (*Tranche*) C amounted of Rp7,863 with an interest rate of 13.80% (*gross*).

Fasilitas pinjaman bersifat *revolving*, jatuh tempo pada tanggal 15 November 2028.

The loan facility is revolving and due on November 15, 2028.

b. PT Duta Mentari Raya ("PT DMR")

PT PPAK memiliki Surat Utang PT DMR sesuai perjanjian sebagai berikut:

1. Perjanjian No. SU-02/PPAK/0216 tanggal 23 Februari 2016 sebesar Rp15.000 dengan jangka waktu sejak tanggal efektif sampai dengan 23 Februari 2020 yang memiliki tingkat suku bunga 13,2% per tahun (tidak termasuk pajak).
2. Perjanjian No. SU-01/PPAK-DMR/0517 tanggal 24 Mei 2017 sebesar Rp15.400 dengan jangka waktu sejak tanggal efektif sampai dengan 23 Mei 2023 yang memiliki tingkat suku bunga 13,2% per tahun (tidak termasuk pajak).

b. PT Duta Mentari Raya ("PT DMR")

PT PPAK has PT DMR's Debt Securities according to the following agreement:

1. Agreement No. SU-02/PPAK/0216 dated February 23, 2016 amounting to Rp15,000 with term as of the effective date until February 23, 2020 bearing interest rate of 13.2% per annum (excluding tax).
2. Agreement No. SU-01/PPAK-DMR/0517 dated May 24, 2017 amounting to Rp15,400 with term as of the effective date until May 23, 2023 bearing interest rate of 13.2% per annum (excluding tax).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Perjanjian No. SU-02/PPAK-DMR/1017 tanggal 24 Oktober 2017 sebesar Rp7.217 dengan jangka waktu sejak tanggal efektif sampai dengan 31 Desember 2019 yang memiliki tingkat suku bunga 13,2% per tahun (tidak termasuk pajak).
4. Perjanjian No. SU-03/PPAK-DMR/1217 tanggal 27 Desember 2017 sebesar Rp745 dengan jangka waktu sejak tanggal efektif sampai dengan 31 Desember 2019 yang memiliki tingkat suku bunga 13,2% per tahun (tidak termasuk pajak).
5. Perjanjian No. SU-01/PPAK-DMR/0218 tanggal 22 Februari 2018 sebesar Rp2.534 dengan jangka waktu sejak tanggal efektif sampai dengan 28 Februari 2019 yang memiliki tingkat suku bunga 13,2% per tahun (tidak termasuk pajak).
6. Perjanjian No. SU-02/PPAK-DMR/0918 tanggal 26 September 2018 sebesar Rp1.604 dengan jangka waktu sejak tanggal efektif sampai dengan 25 September 2019 yang memiliki tingkat suku bunga 13,2% per tahun (tidak termasuk pajak).
7. Perjanjian No. SU-03/PPAK-DMR/1218 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp69.847 dengan jangka waktu sejak tanggal efektif sampai dengan 27 Desember 2019 yang memiliki tingkat suku bunga 13,2% per tahun (tidak termasuk pajak).
8. Perjanjian No. SU-02/PPAK-DMR/0119 tanggal 28 Januari 2019 sebesar Rp1.253 dengan jangka waktu sejak tanggal efektif sampai dengan 27 Januari 2024 yang memiliki tingkat suku bunga 13,2% per tahun (tidak termasuk pajak).
9. Perjanjian No. SU-03/PPAK-DMR/0219 tanggal 7 Februari 2019 sebesar Rp2.000 dengan jangka waktu sejak tanggal efektif sampai dengan 6 Februari 2020 yang memiliki tingkat suku bunga 13,2% per tahun (tidak termasuk pajak).

Restrukturisasi kewajiban PT DMR kepada PT PPAK masih dalam proses.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

*For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)*

3. *Agreement No. SU-02/PPAK-DMR/1017 dated October 24, 2017 amounting to Rp7,217 with term as of the effective date until December 31, 2019 bearing interest rate of 13.2% per annum (excluding tax).*
4. *Agreement No. SU-03/PPAK-DMR/1217 dated December 27, 2017 amounting to Rp745 with term as of the effective date until December 31, 2019 bearing interest rate of 13.2% per annum (excluding tax).*
5. *Agreement No. SU-01/PPAK-DMR/0218 dated February 22, 2018 amounting to Rp2,534 with term as of the effective date until February 28, 2019 bearing interest rate of 13.2% per annum (excluding tax).*
6. *Agreement No. SU-02/PPAK-DMR/0918 dated September 26, 2018 amounting to Rp1,604 with term as of the effective date until September 25, 2019 bearing interest rate of 13.2% per annum (excluding tax).*
7. *Agreement No. SU-03/PPAK-DMR/1218 dated December 28, 2018 amounting to Rp69,847 with term as of the effective date until December 27, 2019 bearing interest rate of 13.2% per annum (excluding tax).*
8. *Agreement No. SU-02/PPAK-DMR/0119 dated January 28, 2019 amounting to Rp1,253 with term as of the effective date until January 27, 2024 bearing interest rate of 13.2% per annum (excluding tax).*
9. *Agreement No. SU-03/PPAK-DMR/0219 dated February 7, 2019 amounting to Rp2,000 with term as of the effective date until February 6, 2020 bearing interest rate of 13.2% per annum (excluding tax).*

The restructuring of PT DMR obligations to PT PPAK is still in process.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

c. PT SIPPA Kemasan Internasional ("PT SKI")
Pada tanggal 26 September 2018, PT SKI dan PT PPAK menandatangani perjanjian jual beli Surat Utang No. SU-01/SKI/0918. PT SKI akan menerbitkan dan menjual Surat Utang kepada PT PPAK dengan nilai dan tanggal penerbitan Surat Utang yang disesuaikan dengan kebutuhan dana oleh PT SKI, setinggi-tingginya sebesar Rp206.750. Jangka waktu surat utang adalah 8 tahun dengan tingkat kupon sebesar 16% per tahun (*net*).

d. PT KNE Global Persada ("PT KNE")
PT PPAK memiliki Surat Utang Konversi dengan PT KNE sesuai dengan Akta Perjanjian No. 86 tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp15.000 dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, tingkat suku bunga 16% per tahun (termasuk pajak).

PT PPAK memiliki Surat Utang yang berasal dari pengalihan cession piutang sesuai Perjanjian No. PJ-08/PPAK/1218 tanggal 28 Desember 2018 sebesar Rp21.826 dengan jangka waktu perjanjian terhitung sejak tanggal penerbitan Surat Utang sampai dengan tanggal 28 Desember 2024 dan tingkat suku bunga 11% per tahun (termasuk pajak).

PT PPAK memiliki tambahan Surat Utang dengan PT KNE sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Surat Utang No. 01 tanggal 4 Januari 2019 sebesar Rp102, dengan jangka waktu perjanjian satu tahun sejak tanggal efektif dan tingkat suku bunga 11% per tahun (termasuk pajak).

e. PT Asia Kaolin Raya ("PT AKR")
PT PPAK memiliki Surat Utang Konversi dengan PT AKR sesuai dengan Akta Perjanjian No. 56 tanggal 18 Januari 2016 sebesar Rp15.000 dengan jangka waktu sejak tanggal efektif sampai dengan 30 Desember 2022. Tingkat suku bunga 20% per tahun (tidak termasuk pajak).

f. PT Cipta Indah Permata ("PT CIP")
PT PPAK memiliki Surat Utang Konversi dengan PT CIP sesuai dengan Akta Perjanjian No. 90 tanggal 29 Maret 2016 sebesar Rp10.000 dengan jangka waktu 33 bulan. Tingkat suku bunga 16% per tahun (termasuk pajak).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

c. PT SIPPA Kemasan Internasional ("PT SKI")
On September 26, 2018, PT SKI and PT PPAK signed a Bond Purchase Agreement No. SU-01/SKI/0918. PT SKI will issue and sell Bonds to PT PPAK with the value and issuance date of the Bonds adjusted to the funding needs of PT SKI, up to a maximum of Rp206,750. The term of the bond is 8 years with a coupon rate of 16% per annum (*net*).

d. PT KNE Global Persada ("PT KNE")
PT PPAK has a Convertible Bond with PT KNE in accordance with Deed No. 86 dated August 30, 2016 for Rp15,000 with a term until December 31, 2025, an interest rate of 16% per annum (including tax).

PT PPAK has a Bond that originated from the transfer of assignment of receivables in accordance with Agreement No. PJ-08/PPAK/1218 dated December 28, 2018 for Rp21,826 with a term of agreement starting from the date of issuance of the Bond until December 28, 2024 with an interest rate of 11% per annum (including tax).

PT PPAK has an additional Bond with PT KNE in accordance with the Bond Purchase Agreement No. 01 dated January 4, 2019 for Rp102, with a term of one year from the effective date with an interest rate of 11% per annum net (including tax).

e. PT Asia Kaolin Raya ("PT AKR")
PT PPAK has Convertible Notes with PT AKR in accordance with the Deed of Agreement No. 56 dated January 18, 2016 amounting to Rp15,000 with term as of the effective date until December 30, 2022. The interest rate of 20% per annum (excluding tax).

f. PT Cipta Indah Permata ("PT CIP")
PT PPAK has Convertible Bonds with PT CIP in accordance with the Deed of Agreement No. 90 dated March 29, 2016 amounting to Rp10,000 with a term of 33 months. The interest rate of 16% per annum (including tax).

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

17. Investasi pada Efek Ekuitas

PT PPAK

Sebagaimana dijelaskan pada catatan 1.b., sejak tahun 2020, PT PPAK memenuhi persyaratan sebagai entitas investasi kualifikasian. Oleh karena itu, PT PPAK tidak lagi mengkonsolidasi dan diharuskan untuk mencatat investasi pada entitas anak dengan nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL).

Rincian saldo Investasi pada Efek Ekuitas adalah sebagai berikut:

	2024 Rp	2023 Rp
Investasi pada Efek Ekuitas		
Investasi pada Entitas Anak yang Tidak Dikonsolidasi	74,802	106,502
Investasi pada Ventura Bersama	48,611	49,719
Jumlah	123,413	156,221

17. Investment in Equity Securities

PT PPAK

As explained in note 1.b., starting from 2020, PT PPAK has met the requirements as a qualifying investment entity. Therefore, PT PPAK is no longer consolidated and required to record its investment in subsidiaries at fair value through the profit or loss (FVTPL).

Details of Investment in Equity Securities balances are as follows:

Investment in Equity Securities	
Investment in Unconsolidated Subsidiaries	
Investment in Joint Ventures	
Total	

a. Investasi pada Entitas Anak yang Tidak Dikonsolidasi

Rincian saldo Investasi pada Entitas Anak yang Tidak Dikonsolidasikan adalah sebagai berikut:

	Nilai Wajar/ Fair Value 2023 Rp	Nilai Wajar/ Fair Value 2024 Rp	Selisih Nilai Wajar/ Fair Value Differences Rp
Entitas Anak			
PT Bondi Syad Mulia	72,500	74,800	2,300
PT Magnesium Gosari Internasional*	34,000	--	(34,000)
PT Matoa Kidung Bahtera*	--	--	--
PT Matoa Kidung Samudera*	--	--	--
PT Rejeki Intilogam Jaya	2	2	--
PT Duta Mentari Raya*	--	--	--
PT SIPPA Kemasan Internasional*	--	--	--
Jumlah	106,502	74,802	(31,700)

a. Investments in Unconsolidated Subsidiaries

Details balances of Investment in Unconsolidated Subsidiaries are as follows:

Subsidiaries	
PT Bondi Syad Mulia	
PT Magnesium Gosari Internasional*	
PT Matoa Kidung Bahtera*	
PT Matoa Kidung Samudera*	
PT Rejeki Intilogam Jaya*	
PT Duta Mentari Raya*	
PT SIPPA Kemasan Internasional*	
Total	

	Nilai Wajar/ Fair Value 2022 Rp	Nilai Wajar/ Fair Value 2023 Rp	Selisih Nilai Wajar/ Fair Value Differences Rp
Entitas Anak			
PT Bondi Syad Mulia	68,900	72,500	3,600
PT Magnesium Gosari Internasional	40,200	34,000	(6,200)
PT Matoa Kidung Bahtera	15,600	--	(15,600)
PT Matoa Kidung Samudera	6,300	--	(6,300)
PT Rejeki Intilogam Jaya*	2	2	--
PT Duta Mentari Raya*	--	--	--
PT SIPPA Kemasan Internasional*	--	--	--
Total	131,002	106,502	(24,500)

*) Nilai tercatat kurang dari Rp1/Carrying value under Rp1.

Kenaikan nilai wajar investasi pada efek ekuitas dicatat pada Pendapatan Usaha. Penurunan nilai wajar investasi pada efek ekuitas dicatat pada Beban Usaha.

The increase in the fair value of investments in equity securities is recorded under Operating Revenue. The decrease in the fair value of investments in equity securities is recorded under Operating Expenses.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

b. Investasi pada Ventura Bersama

Rincian saldo Investasi pada Ventura Bersama adalah sebagai berikut:

	Nilai Wajar Fair Value 2023 Rp	Nilai Wajar Fair Value 2024 Rp	Selisih Nilai Wajar/ Fair Value Differences Rp
Ventura Bersama			
Ventura Bersama PPAK Rumah Cerdas	3,944	3,694	(250)
PT National Utility Helicopters	45,775	44,917	(858)
Jumlah	49,719	48,611	(1,108)

	Nilai Wajar Fair Value 2022 Rp	Nilai Wajar Fair Value 2023 Rp	Selisih Nilai Wajar/ Fair Value Differences Rp
Ventura Bersama			
Ventura Bersama PPAK Rumah Cerdas	4,605	3,944	(661)
PT National Utility Helicopters	45,691	45,775	84
Jumlah	50,296	49,719	(577)

Kenaikan nilai wajar investasi pada efek ekuitas dicatat pada Pendapatan Usaha. Penurunan nilai wajar investasi pada efek ekuitas dicatat pada Beban Usaha.

**Ventura Bersama PPAK Rumah Cerdas
("PPAK RC")**

Berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama antara PT PPAK dengan PT Rumah Cerdas No. 52 tanggal 19 Februari 2016 dari Notaris Mala Mukti, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta, didirikan Ventura Bersama antara PT PPAK dengan PT Rumah Cerdas, dimana ventura bersama ini melaksanakan pembangunan dan penyelesaian Proyek Mutiara Java Regency yaitu berupa bangunan hunian dan/atau komersial beserta dengan sarana dan prasarannya. Kepemilikan PT PPAK pada Ventura Bersama PPAK RC sebesar 94,17%.

PT National Utility Helicopter ("PT NUH")

Berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Saham antara PT PPAK dengan PT Dinamika Danatama Dirgantara ("PT DDD") No. 6 tanggal 24 Januari 2020, Notaris Rismalena Kasri, PT PPAK membeli sebanyak 31.551 lembar saham atau 18,43% saham kepemilikan PT NUH milik PT DDD dengan nilai Rp31.551 pada tanggal 24 Januari 2020.

b. Investments in Joint Ventures

Details balances of Investment in Joint Ventures are as follows:

Joint Ventures
Joint Venture - PPAK Rumah Cerdas
PT National Utility Helicopters
Total

The increase in the fair value of investments in equity securities is recorded under Operating Revenue. The decrease in the fair value of investments in equity securities is recorded under Operating Expenses.

**Joint Venture PPAK Rumah Cerdas
("PPAK RC")**

Based on the Deed of Cooperation Agreement between PT PPAK and PT Rumah Cerdas No. 52 dated February 19, 2016 from Notary Public Mala Mukti, S.H., LL.M, Notary Public in Jakarta, the Joint Venture was established between PT PPAK and PT Rumah Cerdas, where this joint venture carried out the construction and completion of Mutiara Java Regency Project in form of residential and/or commercial buildings together with facilities and infrastructure. PT PPAK's ownership in Joint Venture PPAK RC is 94.17%.

PT National Utility Helicopter ("PT NUH")

Based on the Deed of Share Sale and Purchase Agreement between PT PPAK and PT Dinamika Danatama Dirgantara ("PT DDD") No. 6 dated January 24, 2020, Notary Rismalena Kasri, the PT PPAK purchased 31,551 shares or 18.43% of PT NUH shares owned by PT DDD with a value of Rp31,551 on January 24, 2020.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Saham antara Perusahaan dengan PT DDD No. 9 tanggal 30 Juli 2020, Notaris Rismalena Kasri, PT PPAK membeli sebanyak 11.260 lembar saham kepemilikan PT NUH milik PT DDD dengan nilai Rp11.260 pada tanggal 30 Juli 2020. Sehingga kepemilikan saham PT PPAK pada PT NUH menjadi sebanyak 42.811 lembar saham atau 25,01% dengan nilai Rp42.811.

Based on the Deed of Share Sale and Purchase Agreement between the Company and PT DDD No. 9 dated July 30, 2020, Notary Rismalena Kasri, PT PPAK purchased 11,260 shares of PT NUH ownership owned by PT DDD with a value of Rp11,260 on July 30, 2020. So that the PT PPAK's share ownership in PT NUH became 42,811 shares or 25.01% with a value of Rp42,811.

c. Pengukuran Nilai Wajar (Level 3)

Perhitungan metode nilai wajar menggunakan beberapa metode pendekatan sebagai berikut:

Pendekatan nilai aset bersih

PT PPAK menggunakan nilai tercatat aset bersih pada perusahaan investasi dalam menentukan nilai investasi mereka. Investasi yang dinilai dengan menggunakan pendekatan ini, umumnya hanya berlaku untuk entitas (entitas dimana Grup melakukan investasi) yang memiliki pos-pos dalam laporan keuangan dimana nilai tercatatnya mendekati nilai wajarnya.

Pendekatan pasar dan pendekatan pendapatan

PT PPAK menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan pendapatan (analisa arus kas terdiskonto (DCF)) dan pendekatan pasar (berdasarkan pada beberapa pasar dari Perusahaan sejenis) untuk mengestimasi nilai wajar dari investasi tersebut. Pendekatan pasar digunakan untuk memeriksa kembali nilai estimasi berdasarkan analisa DCF.

c. Fair Value Measurement (Level 3)

The calculation of the fair value method uses several approaches as follows:

Net asset to value approach

PT PPAK uses the recorded value of net assets in the investment company in determining the value of their investments. The investments valued by using this approach generally only apply to the entities (entities in which the Group invests) having the entries in the financial statement where the recorded value approximates its fair value.

Market approach and income approach

PT PPAK uses two approaches, i.e. the income approach (Discounted Cash Flow analysis (DCF)) and the market approach (based on several markets from the similar companies) to estimate the fair value of the investment. The market approach is used to re-examine the estimated value based on DCF analysis.

18. Aset Tetap

18. Fixed Assets

2024					
	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deductions Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost:
Kepemilikan Langsung					Direct Ownership
Bangunan	4,373	--	--	4,373	Buildings
Peralatan Kantor	7,745	390	24	8,111	Office Equipments
Jumlah	12,118	390	24	12,484	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Kepemilikan Langsung					Direct Ownership
Bangunan	1,895	219	--	2,114	Buildings
Peralatan Kantor	7,440	247	24	7,663	Office Equipments
Jumlah	9,335	466	24	9,777	Total
Nilai Tercatat	2,783			2,707	Carrying Value

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2023				
	Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan/ Additions Rp	Pengurangan/ Deductions Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost:
Kepemilikan Langsung					Direct Ownership
Bangunan	4,373	--	--	4,373	Buildings
Peralatan Kantor	7,926	260	441	7,745	Office Equipments
Jumlah	12,299	260	441	12,118	Total
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Kepemilikan Langsung					Direct Ownership
Bangunan	1,676	219	--	1,895	Buildings
Peralatan Kantor	7,761	120	441	7,440	Office Equipments
Jumlah	9,437	339	441	9,335	Total
Nilai Tercatat	2,862			2,783	Carrying Value

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, aset tetap berupa bangunan telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dengan jumlah pertanggungan sebesar Rp2.377. Manajemen berpendapat bahwa aset tetap telah diasuransikan secara memadai.

Seluruh beban penyusutan dialokasikan ke beban usaha (Catatan 30).

Manajemen telah mengkaji ulang atas estimasi umur ekonomis, metode penyusutan, dan nilai residu pada setiap akhir periode pelaporan.

Berdasarkan penelaahan Manajemen, tidak terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan penurunan nilai aset tetap, sehingga Manajemen tidak membentuk cadangan penurunan nilai aset tetap pada 31 Desember 2024 dan 2023.

As of December 31, 2024 and 2023, buildings classified as fixed assets have been insured against fire risk with a total coverage of Rp2,377. Management believes that the fixed assets are adequately insured.

Depreciation expenses allocated to operating expenses (Note 30).

Management has reviewed the estimated useful lives, methods and residues at the end of reporting period.

Based on Management's review, there are no events or changes in the condition indicating the impairment of the fixed assets, thereby the Management does not record allowance for impairment of fixed assets as of December 31, 2024 and 2023 respectively.

19. Cessie Piutang

	2024 Rp	2023 Rp
Cessie Piutang Jangka Pendek		
Pihak Ketiga		
Cessie Piutang PT Batam Islands Marina ex PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	243,000	243,000
Cessie Piutang KPR ex PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	33,239	33,737
Cessie Piutang PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk. ex PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	27,377	--
Subjumlah	303,616	276,737
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(225,488)	(223,262)
Jumlah	78,128	53,475

19. Cessie Receivable

	2024 Rp	2023 Rp
Short-Term Cessie Receivable		
Third Parties		
Cessie of PT Batam Islands Marina ex PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	243,000	243,000
Cessie of KPR (Mortgage) ex PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	33,239	33,737
Cessie of PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk ex PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	27,377	--
Subtotal	303,616	276,737
Less: Allowance for Impairment Losses	(225,488)	(223,262)
Total	78,128	53,475

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024 Rp	2023 Rp
Cessie Piutang Jangka Panjang		
Pihak Berelasi (Catatan 40)		
Cessie Piutang PT Barata Indonesia (Persero)		
ex PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	27,599	27,599
Cessie Piutang PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)		
ex PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	11,745	11,745
Subjumlah	39,344	39,344
Pihak Ketiga		
Cessie Piutang PT Ade Textile Industries		
ex PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	340,582	312,894
Cessie Piutang PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk.		
ex PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	25,725
Subjumlah	340,582	338,619
Dikurangi: Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(78,177)	(80,459)
Subjumlah	262,405	258,160
Jumlah	301,749	297,504

Long-Term Cessie Receivable Related Parties (Note 40)
Cessie of PT Barata Indonesia (Persero)
ex PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Cessie of PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)
ex PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
Subtotal
Third Parties
Cessie of PT Ade Textile Industries
ex PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cessie of PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk
ex PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Subtotal
Less: Allowance for Impairment Losses
Total

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai
cessie piutang adalah sebagai berikut:

The movements in allowance for impairment
losses of cessie receivable are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp
Saldo Awal	(303,721)	(305,887)
Penambahan Tahun Berjalan (Catatan 30)	(667)	(1,013)
Pemulihan Tahun Berjalan (Catatan 30)	723	3,179
Saldo Akhir	(303,665)	(303,721)

Beginning Balance
Addition in the Current Year (Note 30)
Recovery in The Current Year (Note 30)
Ending Balance

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan
kerugian penurunan nilai cukup untuk menutup
kemungkinan tidak tertagihnya di kemudian hari.

Management believes that the allowance for
impairment losses is sufficient to cover the
possibility of uncollectibility in the future.

**a. Cessie Piutang KPR Eks Debitur PT Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk**

Berdasarkan Akta Jual Beli Piutang
No. 72 tanggal 21 Desember 2018 dan No. 104
tanggal 28 Desember 2018, Perusahaan telah
melakukan pembelian atas Piutang Nasabah
Kredit Pemilikan Rumah ("KPR") dari PT Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank BTN").

**a. Cessie Receivable KPR Ex Debtor PT Bank
Tabungan Negara (Persero) Tbk**

Based on the Deed of Sale and Purchase of
Receivables No. 72 dated December 21, 2018
and No. 104 dated December 28, 2018, the
Company has purchased Receivables of Home
Ownership Credit ("KPR") Customers from
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
("Bank BTN").

**b. Cessie Piutang PT Batam Island Marina
("PT BIM") Eks Debitur PT Bank Tabungan
Negara (Persero) Tbk**

Berdasarkan Akta Jual Beli Piutang No. 115 dan
Perjanjian Pengalihan Piutang No. 116 tanggal
31 Desember 2018, Perusahaan telah
melakukan pembelian atas Piutang Bank BTN
kepada PT BIM.

**b. Cessie Receivables PT Batam Island Marina
("PT BIM") Ex Debtor PT Bank Tabungan
Negara (Persero) Tbk**

Based on Deed of Sale and Purchase of
Receivables No. 115 and Receivables Transfer
Agreement No. 116 dated December 31, 2018,
the Company has purchased Receivables of
Bank BTN from PT BIM.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

c. Cessie Piutang PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) ("PT DPS") dan PT Barata Indonesia (Persero) ("PT BI") Eks Debitur PT Bank Muamalat Indonesia

Berdasarkan Akta Jual Beli Piutang No. 4 dan Perjanjian Pengalihan Piutang No. 5 tanggal 3 Januari 2023, PT PPAK telah melakukan pembelian atas Piutang PT AMC Indonesia Sukses kepada PT DPS dan PT BI yang merupakan eks Debitur PT Bank Muamalat Indonesia.

Grup mencatat hak tagih kepada PT DPS dan PT BI tersebut sebagai Aset Keuangan Memburuk pada saat Pengakuan Awal pada kelompok Cessie Piutang.

d. Cessie Piutang PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk eks PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Jual Beli Piutang No. 39 dan Perjanjian Pengalihan Piutang No. 40 tanggal 20 Desember 2019, Perusahaan melakukan pembelian atas Piutang PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") kepada PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk ("PT PAI").

Pada tanggal 20 Desember 2019, Perusahaan dan PT PAI telah menandatangani Perjanjian Restrukturisasi Hutang No. 43 dengan tujuan penambahan fasilitas menjadi USD3.000.000 (nilai penuh). Fasilitas tersebut telah jatuh tempo pada 19 Desember 2024.

Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian ini, perpanjangan perjanjian masih dalam proses penyelesaian.

e. Cessie Piutang PT Ade Textile Industries Eks PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Jual Beli Piutang No. 37 dan Perjanjian Pengalihan Piutang No. 38 tanggal 20 Desember 2019, Perusahaan melakukan pembelian atas Piutang Bank Mandiri kepada PT Ade Textile Industries ("PT Adetex").

Pada tanggal 20 Desember 2019, Perusahaan dan PT Adetex telah menandatangani Perjanjian Restrukturisasi Hutang No. 44 dengan tujuan penambahan fasilitas menjadi USD22.426.367 (nilai penuh). Fasilitas tersebut akan jatuh tempo pada 19 Desember 2029.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

c. Cessie Piutang PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) ("PT DPS") and PT Barata Indonesia (Persero) ("PT BI") Eks Debitur PT Bank Muamalat Indonesia

Based on Deed of Sale and Purchase of Receivables No. 4 and Receivables Transfer Agreement No. 5 dated January 3, 2023, PT PPAK has purchased Receivables of PT AMC Indonesia Sukses from PT DPS and PT BI which are former Debtors of PT Bank Muamalat Indonesia.

The Group records the right to claim against PT DPS and PT BI as Financial Assets in Default at Initial Recognition in the Cessie Receivables Assignment group.

d. Cessie Receivable PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk ex PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Based on Deed of Sale and Purchase of Receivables No. 39 and Receivables Transfer Agreement No. 40 dated December 20, 2019, the Company has purchased receivables of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") from PT Primarindo Asia Infrastructure Tbk ("PT PAI").

On December 20, 2019, the Company and PT PAI signed a Debt Restructuring Agreement No. 43 with the aim of increasing the facility to USD3,000,000 (full amount). The facility has matured on December 19, 2024.

As of the authorization date of these consolidated financial statements, the extension of the agreement is still in the finalization process.

e. Cessie Receivable PT Ade Textile Industries Ex PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Based on Deed of Sale and Purchase of Receivables No. 37 and Receivables Transfer Agreement No. 38 dated December 20, 2019, the Company has purchased receivables of Bank Mandiri from PT Ade Textile Industries ("PT Adetex").

On December 20, 2019, the Company and PT Adetex signed a Debt Restructuring Agreement No. 44 with the purpose of increasing the facility to USD22,426,367 (full amount). The facility will mature on December 19, 2029.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

20. Aset Hak-Guna dan Liabilitas Sewa

20. Right-of-Use-Assets and Lease Liabilities

a. Aset Hak-Guna

a. Right-of-Use Assets

2024				
Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan / Additions Rp	Pengurangan / Deductions Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp	
Aset Hak Guna				Right of Use Assets
Bangunan	61,722	50,028	71,482	Buildings
Kendaraan Bermotor	18,560	14,930	19,057	Vehicles
Peralatan Kantor	1,343	--	1,343	Office Equipments
Jumlah	81,625	55,198	91,882	Total
Akumulasi Penyusutan				Accumulated Depreciation
Bangunan	32,707	14,839	15,271	Buildings
Kendaraan Bermotor	9,218	7,233	5,692	Vehicles
Peralatan Kantor	1,343	--	1,343	Office Equipments
Jumlah	43,268	39,508	22,306	Total
Nilai Tercatat	38,357		69,576	Carrying Value

2023				
Saldo Awal/ Beginning Balance Rp	Penambahan / Additions Rp	Pengurangan / Deductions Rp	Saldo Akhir/ Ending Balance Rp	
Aset Hak Guna				Right of Use Assets
Bangunan	42,499	--	61,722	Buildings
Kendaraan Bermotor	16,208	3,949	18,560	Vehicles
Peralatan Kantor	1,394	51	1,343	Office Equipments
Jumlah	60,101	4,000	81,625	Total
Akumulasi Penyusutan				Accumulated Depreciation
Bangunan	19,430	--	32,707	Buildings
Kendaraan Bermotor	7,098	2,060	9,218	Vehicles
Peralatan Kantor	1,022	50	1,343	Office Equipments
Jumlah	27,550	2,110	43,268	Total
Nilai Tercatat	32,551		38,357	Carrying Value

b. Liabilitas Sewa

Saldo liabilitas sewa pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

b. Lease Liabilities

The balance of lease liabilities as of December 31, 2024 and 2023 is as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Liabilitas Sewa			Lease Liabilities
Jangka Pendek	19,771	12,518	Current Portion
Jangka Panjang	34,535	20,358	Non Current Portion
Jumlah	54,306	32,876	Total

Berikut ini ringkasan komponen perubahan liabilitas yang timbul dari sewa:

The following is summary of components of change in liabilities arising from the lease:

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo Awal	32,876	27,022	Beginning Balance
Penambahan	65,455	25,524	Addition
Pembayaran	(29,125)	(20,242)	Payment
Penghentian Sewa	(16,818)	(2,059)	Termination of Lease
Beban Bunga	1,918	2,631	Interest Expense
Saldo Akhir	54,306	32,876	Ending Balance

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Terdapat pengecualian untuk pengakuan sewa jangka pendek dan sewa atas aset yang bernilai rendah, yaitu sebesar Rp5.706 dan Rp8.825 yang dicatat sebagai Beban Sewa untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023.

There are exceptions for the recognition of the short-term leases and leases of low-valued assets, amounting to Rp5,706 and Rp8,825 which has recorded as Rent Expense for the year ended on December 31, 2024 and 2023.

21. Utang Usaha

21. Accounts Payable

	2024 Rp	2023 Rp	
Pihak Ketiga	11,292	10,010	Third Parties
Jumlah	11,292	10,010	Total

Jumlah utang usaha berdasarkan umur sebagai berikut:

Total accounts payable based on aging are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
< 3 bulan	11,292	10,010	< 3 months
Jumlah	11,292	10,010	Total

Utang usaha yang lewat jatuh tempo adalah utang usaha yang memiliki umur lebih dari 6 bulan sesuai dengan rincian utang usaha berdasarkan umur yang dirincikan pada tabel di atas.

Overdue accounts payable are accounts payable that have maturity more than 6 months in accordance with the aging detailed above.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, seluruh nilai tercatat atas utang usaha Grup berdenominasi dalam Rupiah.

As of December 31, 2024 and 2023, all of the carrying amount of Group accounts payable were denominated in Rupiah.

22. Pinjaman Bank

22. Bank Loan

	2024 Rp	2023 Rp	
Pinjaman Bank Jangka Pendek			Short-Term Bank Loan
Pihak Berelasi (Catatan 40)			Related Parties (Note 40)
<u>Perusahaan</u>			<u>The Company</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	546,136	530,677	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	266,421	313,607	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
Jumlah Pihak Berelasi	812,557	844,284	Total Related Parties
Pihak Ketiga			Third Parties
<u>Perusahaan</u>			<u>The Company</u>
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	506,852	599,898	PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	48,022	146,763	PT Bank JTrust Indonesia Tbk
PT Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	11,964	110,000	PT Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
PT Bank Mega Tbk	--	46,050	PT Bank Mega Tbk
Jumlah Pihak Ketiga	566,838	902,711	Total Third Parties
Jumlah Pinjaman Bank Jangka Pendek	1,379,395	1,746,995	Total Short-Term Bank Loan

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024 Rp	2023 Rp	
Pinjaman Bank Jangka Panjang			Long-Terms Bank Loan
Pihak Berelasi (Catatan 40)			Related Parties (Note 40)
<u>Entitas Anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	349,598	349,598	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jumlah Pinjaman Bank Jangka Panjang	349,598	349,598	Total Long-Term Bank Loan
Dikurangi:			Less:
Bagian Jangka Pendek dari			Current Maturities of
Pinjaman Bank Jangka Panjang	--	4,000	Long-Term Bank Loan
Bagian Jangka Panjang	349,598	345,598	Long-Term Portion

Mutasi penambahan dan pembayaran pokok pinjaman selama tahun 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The movements of addition and repayment for principal loan during year 2024 and 2023 are as follows:

Kreditur/Creditors	1 Januari 2024/ January 1, 2024	Penambahan/ Addition	Pembayaran/ Payment	Selisih Kurs/ Exchange Differences	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember 2024/ December 31, 2024
Pinjaman Bank Jangka Pendek/Short-Term Bank Loan						
Pihak Berelasi (Catatan 40)/Related Parties (Note 40)						
<u>Perusahaan/The Company</u>						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	530,677	--	--	15,459	--	546,136
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	313,607	--	47,186	--	--	266,421
Subjumlah/Subtotal	844,284	--	47,186	15,459	--	812,557
Pihak Ketiga/Third Parties						
<u>Perusahaan/The Company</u>						
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	599,898	693,840	786,886	--	--	506,852
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	146,763	150,000	248,741	--	--	48,022
PT Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	110,000	269,222	367,258	--	--	11,964
PT Bank Mega Tbk	46,050	--	46,050	--	--	--
Subjumlah/Subtotal	902,711	1,113,062	1,448,935	--	--	566,838
Jumlah/Total	1,746,995	1,113,062	1,496,121	15,459	--	1,379,395
Bagian Jangka Pendek dari Pinjaman Bank Jangka Panjang/ Current Maturities of Long Term Bank Loan						
Pihak Berelasi (Catatan 40)/Related Parties (Note 40)						
<u>Entitas Anak/Subsidiaries</u>						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	4,000	--	--	--	(4,000)	--
Jumlah/Total	4,000	--	--	--	(4,000)	--
Pinjaman Bank Jangka Panjang/Long-Terms Bank Loan						
Pihak Berelasi (Catatan 40)/Related Parties (Note 40)						
<u>Entitas Anak/Subsidiaries</u>						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	345,598	--	--	--	4,000	349,598
Jumlah/Total	345,598	--	--	--	4,000	349,598
Kreditur/Creditors	1 Januari 2023/ January 1, 2023	Penambahan/ Addition	Pembayaran/ Payment	Selisih Kurs/ Exchange Differences	Reklasifikasi/ Reclassification	31 Desember 2023/ December 31, 2023
Pinjaman Bank Jangka Pendek/Short-Term Bank Loan						
Pihak Berelasi (Catatan 40)/Related Parties (Note 40)						
<u>Perusahaan/The Company</u>						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	509,122	195,935	167,464	(6,916)	--	530,677
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	293,014	100,000	79,407	--	--	313,607
Subjumlah/Subtotal	802,136	295,935	246,871	(6,916)	--	844,284
Pihak Ketiga/Third Parties						
<u>Perusahaan/The Company</u>						
PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk	599,934	669,378	669,414	--	--	599,898
PT Bank JTrust Indonesia Tbk	--	150,000	3,237	--	--	146,763
PT Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	110,000	110,000	110,000	--	--	110,000
PT Bank Mega Tbk	--	200,000	153,950	--	--	46,050
Subjumlah/Subtotal	709,934	1,129,378	936,601	--	--	902,711
Jumlah/Total	1,512,070	1,425,313	1,183,472	(6,916)	--	1,746,995
Bagian Jangka Pendek dari Pinjaman Bank Jangka Panjang/ Current Maturities of Long Term Bank Loan						
Pihak Berelasi (Catatan 40)/Related Parties (Note 40)						
<u>Entitas Anak/Subsidiaries</u>						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	--	--	--	--	4,000	4,000
Jumlah/Total	--	--	--	--	4,000	4,000
Pinjaman Bank Jangka Panjang/Long-Terms Bank Loan						
Pihak Berelasi (Catatan 40)/Related Parties (Note 40)						
<u>Entitas Anak/Subsidiaries</u>						
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	349,598	--	--	--	(4,000)	345,598
Jumlah/Total	349,598	--	--	--	(4,000)	345,598

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”)
Perusahaan**

Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja Transaksional

Pada tanggal 16 Desember 2019, Perusahaan menerima Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional dari Bank Mandiri sesuai Perjanjian Kredit No. CRO.KP/547/KMK/2019 sebagaimana diperbarui dengan *Addendum VI* tanggal 13 Desember 2024. Nilai pinjaman maksimum sebesar Rp250.000 dengan tingkat suku bunga 6,15%. Fasilitas pinjaman jatuh tempo pada 13 Desember 2025.

Fasilitas ini dijamin dengan Fidusia atas Piutang Pembiayaan yang dibiayai dari Fasilitas.

Perusahaan wajib menjaga *financial covenant* selama jangka waktu Kredit yang tercermin pada laporan keuangan sebagai berikut:

- a. *Non Performing Financing* (Piutang diluar pembiayaan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi dan/atau Dana Talangan pihak berelasi yang menggunakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN)) maksimal 5%) dengan Perhitungan sebagai berikut:
Total *Outstanding* Piutang (di luar pembiayaan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi dan/atau Dana Talangan pihak berelasi yang menggunakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN)) dengan tunggakan pokok dan/atau bunga lebih dari 90 hari kalender setelah memperhitungkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dibagi dengan Total *Outstanding* Piutang (di luar pembiayaan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi dan/atau Dana Talangan pihak berelasi yang menggunakan dana PMN sama dengan maksimal 5%);
- b. *Gearing Ratio* maksimal 5 kali;
- c. *Current Ratio* minimal sebesar 100%; dan
- d. EBITDA (Laba Usaha) positif.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan memenuhi rasio dan pembatasan keuangan yang disyaratkan.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**a. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”)
The Company**

Transactional Working Capital Credit Facility

On December 16, 2019, the Company received a Transactional Working Capital Credit Facility from Bank Mandiri in accordance with Credit Agreement No. CRO.KP/547/KMK/2019, as amended by *Addendum VI* on December 13, 2024. The maximum loan amount is Rp250,000 with an interest rate of 6.15%. The loan facility due on December 13, 2025.

This facility is secured by a fiduciary assignment over the financing receivables financed by this facility.

The Company shall maintain the financial covenant during the Credit term reflected in the financial statement as follows:

- a. *Non-Performing Financing* (Receivables outside Restructuring and/or Revitalization financing and/or related party Bailouts using State Capital Participation (PMN) funds) is a maximum of 5% with the following calculations :
Total *Outstanding* Receivables (excluding Restructuring and/or Revitalization financing and/or Bailout Funds from related parties using State Capital Statement (PMN)) funds with principal and/or interest arrears of more than 90 calendar days after taking into account the Provision for Impairment Loss (CKPN) divided by Total *Outstanding* Receivables (excluding Restructuring financing and/or Revitalization and/or Bailout Funds for related parties using PMN funds equal to a maximum of 5%);
- b. *Gearing Ratio* maximum 5 times;
- c. *Current Ratio* minimum 100%; and
- d. EBITDA (Operating Profit) positive.

As of December 31, 2024 and 2023, the Company has complied with the required financial ratios and restriction.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Fasilitas Pinjaman Kredit Modal Kerja
Transaksional USD

Pada tanggal 16 Desember 2019, Perusahaan menerima Fasilitas Kredit Modal Kerja Transaksional dari Bank Mandiri sesuai Perjanjian Kredit No. CRO.KP/548/KMK/2019, sebagaimana diperbarui dengan *Addendum VI* tanggal 13 Desember 2024. Nilai fasilitas pinjaman sebesar USD30.000.000 (nilai penuh) dan tingkat suku bunga 3,85%-4,50% *per annum*. Fasilitas pinjaman jatuh tempo pada 13 Desember 2025.

Fasilitas ini dijamin dengan Fidusia atas Piutang Pembiayaan yang dibiayai dari Fasilitas.

Perusahaan wajib menjaga *financial covenant* selama jangka waktu Kredit yang tercermin pada laporan keuangan sebagai berikut:

- a. *Non Performing Financing* (Piutang di luar pembiayaan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi dan/atau Dana Talangan pihak berelasi yang menggunakan dana Pernyataan Modal Negara (PMN)) maksimal 5%, dengan perhitungan sebagai berikut:
Total Piutang *Outstanding* (di luar pembiayaan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi dan/atau Dana Talangan pihak berelasi yang menggunakan dana Pernyataan Modal Negara (PMN)) dengan tunggakan pokok dan/atau bunga lebih dari 90 hari kalender setelah memperhitungkan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) dibagi dengan Total Piutang *Outstanding* (di luar pembiayaan Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi dan/atau Dana Talangan pihak berelasi yang menggunakan dana PMN sama dengan maksimal 5%);
- b. *Gearing Ratio* maksimal 5 kali;
- c. *Current Ratio* minimal sebesar 100%; dan
- d. EBITDA (Laba Usaha) positif.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan memenuhi rasio dan pembatasan keuangan yang disyaratkan.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Transactional Working Capital Credit Facility
USD

On December 16, 2019, the Company received a Transactional Working Capital Credit Facility from Bank Mandiri in accordance with Agreement No. CRO.KP/548/KMK/2019, as amended by *Addendum VI* on December 13, 2024. The loan facility amounted of USD30,000,000 (full amount), with an interest rate of 3.85-4.50% *per annum*. The loan facility due on December 13, 2025.

This facility is secured by a fiduciary assignment over the financing receivables financed by this facility.

The Company shall maintain the financial covenant during the Credit term reflected in the financial statement as follows:

- a. *Non-Performing Financing* (Receivables beyond the financing of Restructuring and/or Revitalization and/or Bailout Fund of the related party using the State Capital Statement (PMN)) funds maximum 5% with the following calculations:
Total Outstanding Receivables (excluding Restructuring and/or Revitalization financing and/or Bailout Funds from related parties using State Capital Statement (PMN)) funds with principal and/or interest arrears of more than 90 calendar days after taking into account the Provision for Impairment Loss (CKPN) divided by Total Outstanding Receivables (excluding Restructuring financing and/or Revitalization and/or Bailout Funds for related parties using PMN funds equal to a maximum of 5%);
- b. *Gearing Ratio* maximum 5 times;
- c. *Current Ratio* at least 100%; and
- d. EBITDA (Operating Profit) positive.

As of December 31, 2024 and 2023, the Company did meet with the ratios and financial covenants as required.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PPAK

Fasilitas Kredit Tranche A

Pada tanggal 27 Maret 2019, PT PPAK menerima Fasilitas Kredit *Non Revolving* dari Bank Mandiri sesuai Perjanjian Kredit No. CRO.KP/084/KMK/2019 sebagaimana diperbarui dengan *Addendum IV* tanggal 27 Desember 2024. Nilai fasilitas pinjaman sebesar Rp112.000 dengan tingkat suku bunga 3% per tahun. Fasilitas pinjaman jatuh tempo pada 23 November 2028.

Fasilitas Kredit Tranche B

Pada tanggal 27 Maret 2019, PT PPAK menerima Fasilitas Kredit *Non Revolving* dari Bank Mandiri sesuai Perjanjian Kredit No. CRO.KP/085/KMK/2019 sebagaimana diperbarui dengan *Addendum IV* tanggal 27 Desember 2024. Nilai fasilitas pinjaman sebesar Rp237.598 dengan tingkat suku bunga 3% per tahun. Fasilitas pinjaman jatuh tempo pada 23 November 2028.

PT PPAK harus menjaga rasio *covenant DSCR (Debt Service Coverage Ratio)* minimal 100%, *Current Ratio* minimal 100%, dan *Equity* selalu positif mulai tahun 2023 dan seterusnya.

Pada tanggal 31 Desember 2024, PT PPAK telah memenuhi rasio dan pembatasan yang disyaratkan.

b. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank BTN")

Perusahaan

Fasilitas Modal Kerja

Pada tanggal 28 Agustus 2020, Perusahaan menerima Fasilitas Kredit Swadana dari Bank BTN sesuai Perjanjian Kredit No. 001/PK/CSTD/CLS/VIII/2020 sebagaimana diperbarui dengan *Addendum II* No. 05/PK/CBD/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024. Nilai fasilitas pinjaman sebesar Rp270.000 bersifat *revolving*, dengan tingkat suku bunga 3,30% per tahun. Fasilitas pinjaman jatuh tempo pada 30 Agustus 2025.

Fasilitas ini dijamin dengan Deposito Berjangka Perusahaan yang ditempatkan di Bank BTN senilai Rp329.269 (Catatan 9).

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah memenuhi pembatasan yang disyaratkan.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

PT PPAK

Credit Facility Tranche A

On March 27, 2019, PT PPAK received a *Non-Revolving Credit Facility* from Bank Mandiri in accordance with Credit Agreement No. CRO.KP/084/KMK/2019, as amended by *Addendum IV* on December 27, 2024. The loan facility amount is Rp112,000 with an interest rate of 3% per annum. The loan facility due on November 23, 2028.

Credit Facility Tranche B

On March 27, 2019, PT PPAK received a *Non-Revolving Credit Facility* from Bank Mandiri in accordance with Credit Agreement No. CRO.KP/085/KMK/2019, as amended by *Addendum IV* on December 27, 2024. The loan facility amount is Rp237,598 with interest rate of 3% per annum. The loan facility due on November 23, 2028.

PT PPAK shall maintain the covenant ratio of *DSCR (Debt Service Coverage Ratio)* minimum 100%, *Current Ratio* of minimum 100%, and *Equity* are always positive starting from 2023 and so forth.

As of December 31, 2024, PT PPAK has complied with the required ratios and restrictions.

b. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank BTN")

The Company

Working Capital Facility

On August 28, 2020, the Company received a *Swadana Credit Facility* from Bank BTN in accordance with Credit Agreement No. 001/PK/CSTD/CLS/VIII/2020, as amended by *Addendum II* No. 05/PK/CBD/XII/2024 on December 11, 2024. The loan facility amount is Rp270,000 and is *revolving*, with an interest rate of 3.30% per annum. The loan facility matures on August 30, 2025.

This facility is secured by a *Company Time Deposit* placed at Bank BTN worth Rp329,269 (Note 9).

As of December 31, 2024 and 2023, the Company has complied with the covenants as required.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

c. PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk ("Bank CCBI")

Perusahaan

Fasilitas General Corporate Purpose Loan – Demand Loan (DL1) - Revolving Committed I

Pada tanggal 28 September 2017, Perusahaan menerima Fasilitas Kredit dari Bank CCBI sesuai Perjanjian Kredit No. 23 sebagaimana diperbarui dengan *Addendum VIII* No. 308/APK/XI/2024 tanggal 26 November 2024. Nilai fasilitas pinjaman sebesar Rp400.000 dan tingkat suku bunga 6,6%-7,1% per tahun. Fasilitas pinjaman jatuh tempo pada 28 September 2025.

Fasilitas ini dijamin dengan Surat Utang/Obligasi Negara Pemerintah Indonesia yang dimiliki Perusahaan dengan minimal 50% dari nilai fasilitas (Catatan 9).

Fasilitas General Corporate Purpose Loan – Demand Loan (DL2) - Revolving Committed II

Pada tanggal 22 Desember 2022, Perusahaan menerima Fasilitas Kredit dari Bank CCBI sesuai Perjanjian Kredit No. 29, sebagaimana diperbarui dengan *Addendum II* Perjanjian Kredit No. 309/APK/XI/2024 tanggal 26 November 2024. Nilai fasilitas pinjaman sebesar Rp200.000. Tingkat suku bunga 6,6-7,1% per tahun. Fasilitas pinjaman jatuh tempo pada 28 September 2025.

Fasilitas ini dijamin dengan Surat Utang/Obligasi Negara Pemerintah Indonesia yang dimiliki Perusahaan dengan minimal 50% dari nilai fasilitas (Catatan 9).

Perusahaan harus menjaga *financial covenant* selama jangka waktu kredit yaitu:

- Current ratio* > 1,0 kali; dan
- Total Piutang (*interest bearing*) lebih besar dari Jumlah Pinjaman Bank.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah memenuhi rasio dan pembatasan yang disyaratkan.

d. PT Bank Woori Saudara 1906 Tbk ("Bank Woori")

Perusahaan

Pada tanggal 28 Februari 2019, Perusahaan menerima Fasilitas Kredit dari Bank Woori sesuai Perjanjian Kredit No. 109 sebagaimana diperbarui dengan *Addendum V* tanggal 23 Februari 2024. Nilai fasilitas pinjaman sebesar Rp110.000 dengan tingkat suku bunga 7,75% per tahun. Fasilitas pinjaman jatuh tempo pada 21 Februari 2025.

c. PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk ("Bank CCBI")

The Company

General Corporate Purpose Loan – Demand Loan (DL1) - Revolving Committed Facility I

On September 28, 2017, the Company received a loan facility from Bank CCBI in accordance with Loan Agreement No. 23 as amended by *Addendum VIII* No. 308/APK/XI/2024 dated November 26, 2024. The loan facility amounted of Rp400,000, with an interest rate of 6.6%-7.1% per annum. The loan facility matures on September 28, 2025.

This facility is guaranteed by Indonesian Government Bonds/Notes owned by the Company with a minimum of 50% of the loan facility (Note 9).

General Corporate Purpose Loan – Demand Loan (DL2) - Revolving Committed Facility II

On December 22, 2022, the Company received a Credit Facility from Bank CCBI in accordance with Credit Agreement No. 29, as amended by *Addendum II* to the Credit Agreement No. 309/APK/XI/2024 on November 26, 2024. The loan facility amount is Rp200,000, with an interest rate of 6.6-7.1% per annum. The loan facility matures on September 28, 2025.

This facility is guaranteed by Indonesian Government Bonds/Notes owned by the Company with a minimum of 50% of the loan facility (Note 9).

The Company must maintain financial covenants during the term of the loan, namely:

- Current ratio* > 1.0 times; and
- Total Receivables (*interest bearing*) exceeds the total amount of bank loans.

As of December 31, 2024 and 2023, the Company has complied with the ratios and covenants as required.

d. PT Bank Woori Saudara 1906 Tbk ("Bank Woori")

The Company

On February 28, 2019, the Company received a loan facility from Bank Woori in accordance with Loan Agreement No. 109 as amended by *Addendum V* dated February 23, 2024. The loan facility amounted of Rp110,000 with an interest rate of 7.75% per annum. The loan facility due on February 21, 2025.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah memenuhi rasio dan pembatasan yang disyaratkan.

**e. PT Bank Mega Tbk (“Bank Mega”)
Perusahaan**

Pada tanggal 24 Agustus 2023, Perusahaan menerima Fasilitas *Demand Loan* dari Bank Mega sesuai Perjanjian Kredit No. 70 sebagaimana diperbarui dengan *Addendum I* atas Perjanjian Kredit No. 058/ADD-PK/LCCL/23 tanggal 13 September 2023. Nilai pinjaman maksimum sebesar Rp1.000.000 dengan tingkat suku bunga JIBOR 3 bulan +2,25% per tahun dengan minimum *floor rate* 8,75% per tahun. Fasilitas pinjaman jatuh tempo pada 24 Agustus 2024 dan terdapat perpanjangan sementara hingga 24 Desember 2024.

Perusahaan harus menjaga *financial covenant* selama jangka waktu kredit yaitu:

- a. *Current ratio* minimal sebesar 1,1 kali; dan
- b. *Leverage* maksimal 2 kali.

Fasilitas tersebut dijamin dengan Fidusia Tagihan/Piutang Usaha Perusahaan senilai Rp1.200.000.

Pada tanggal 24 Desember 2024, Perusahaan telah melunasi seluruh kewajiban atas Fasilitas Kredit *Demand Loan* (DL) kepada Bank Mega.

**f. PT Bank JTrust Indonesia Tbk (“Bank JTrust”)
Perusahaan**

Pada tanggal 29 November 2023, Perusahaan menerima Fasilitas Kredit dari Bank JTrust sesuai Perjanjian Kredit No. 40 sebagaimana diperbarui dengan Perjanjian Kredit No. 343/JTRUST-AGR/LBS/XI/2024 tanggal 28 November 2024. Nilai fasilitas kredit sebesar Rp150.000 dengan tingkat suku bunga 7,75%-8,5% per tahun. Fasilitas pinjaman jatuh tempo pada 29 November 2025.

Fasilitas ini dijamin dengan Fidusia Piutang Usaha atas pembiayaan yang disalurkan Perusahaan kepada Debitur yang telah ada dan/atau yang akan ada di kemudian hari yang dimiliki oleh Perusahaan dengan nilai objek saat ini sebesar Rp150.000 dan dengan nilai penjaminan yaitu sebesar Rp150.000. Dengan kondisi agunan sebagai berikut:

- Piutang yang diagunkan harus dalam kondisi lancar;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

As of December 31, 2024 and 2023, the Company has complied with the ratios and covenants as required.

**e. PT Bank Mega Tbk (“Bank Mega”)
The Company**

On August 24, 2023, the Company received a *Demand Loan Facility* from Bank Mega in accordance with Loan Agreement No. 70 as amended by *Addendum I* to Credit Agreement No. 058/ADD-PK/LCCL/23 dated September 13, 2023. The maximum loan value amounted of Rp1,000,000 with an interest rate of JIBOR 3 months +2.25% per annum with minimum *floor rate* of 8.75% per annum. The loan facility due on August 24, 2024, then, there was a temporary extension until December 24, 2024.

The Company must maintain *financial covenants* during the term of the loan, namely:

- a. *Current ratio* of at least 1.1 times; and
- b. *Maximum leverage* of 2 times.

The facility is guaranteed by the Company's *Fiduciary Accounts Receivable/Accounts Receivable* worth Rp1,200,000.

On December 24, 2024, the Company fully settled all obligations under the *Demand Loan* (DL) Credit Facility to Bank Mega.

**f. PT Bank JTrust Indonesia Tbk (“Bank JTrust”)
The Company**

On November 29, 2023, the Company received a *Loan Facility* from Bank JTrust in accordance with Loan Agreement No. 40 as amended by Credit Agreement No. 343/JTRUST-AGR/LBS/XI/2024 dated November 28, 2024. The loan facility amounted of Rp150,000 with an interest rate of 7.75%-8.5% per annum. The loan facility due on November 29, 2025.

This facility is secured by a *Fiduciary Receivables Assignment* over the Company's existing and future financing to Debtors, with a current object value of Rp150,000 and a collateral value of Rp150,000. The following conditions apply to the collateral:

- The secured receivable must be in current position;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Piutang yang dijaminkan tidak sedang dijaminkan di Bank lain; dan
- *Update* piutang agunan setiap 3 bulan.

Perusahaan harus menjaga *financial covenant* selama jangka waktu kredit yaitu :

- Current ratio* minimal sebesar 1 kali; dan
- Debt to Equity Ratio* maksimal 3,5 kali.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, Perusahaan telah memenuhi rasio dan pembatasan yang disyaratkan.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- *The secured receivable is not being pledged as collateral at another Bank; and*
- *The secured receivable which use as collateral must be updated every 3 months.*

The Company must maintain financial covenants during the term of the loan, namely:

- Current ratio of at least 1 times; and*
- Maximum Debt to Equity Ratio of 3.5 times.*

As of December 31, 2024 and 2023, the Company has complied with the ratios and covenants as required.

23. Utang Surat Berharga Komersial

23. Commercial Paper

	2024 Rp	2023 Rp	
Surat Berharga Komersial			Commercial Paper
SBK I Berkelanjutan Tahun 2023	200,000	--	Sustainable Commercial Paper I 2023
Diskonto yang belum Diamortisasi	(592)	--	Unamortised Discount
Jumlah	199,408	--	Total

SBK I Berkelanjutan PT PPA Tahun 2023

Pada tanggal 16 Januari 2024, Perusahaan menerbitkan SBK I Berkelanjutan PT PPA Tahap I 2023 ("SBK") dengan nilai Rp200.000. SBK tersebut diterbitkan dengan diskonto sebesar 7,65% per tahun, dan jatuh tempo pada 15 Januari 2025. Nilai yang diterima dari penerbitan SBK sebesar Rp185.604.

Perusahaan menunjuk PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai Penatalaksana Penerbitan. SBK tersebut memperoleh peringkat idA1+ (*Single A One Plus*) dari Pefindo.

Sustainable Commercial Paper I Year 2023

On January 16, 2024, the Company issued PT PPA Sustainable Commercial Paper I Year 2023 ("SBK") with a value of Rp200,000. The SBK was issued with a discount of 7.65% per annum and due on January 15, 2025. The proceeds from the issuance of SBK amounting to Rp185,604.

The Company appointed PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas and PT Mandiri Sekuritas as the Arranger for the issuance. The SBK received an idA1+ (*Single A One Plus*) rating from Pefindo.

24. Beban Akrua dan Utang Lain-lain

24. Accruals and Other Payables

	2024 Rp	2023 Rp	
Utang Bagi Hasil Sukuk	223,673	160,671	Sukuk Profit Sharing Payable
Utang Lain-lain	72,338	366,254	Other Payables
Akrual Beban Kantor dan Umum	42,764	41,533	Accrued Office and General Expenses
Akrual Biaya Apresiasi Karyawan	38,595	50,659	Accrued Employee Appreciation Expense
Akrual Bunga Surat Utang	33,052	33,039	Accrued Debt Interest
Akrual Biaya Tantiem	31,575	42,450	Accrued Tantiem Expense
Akrual Bunga Bank	1,950	40,098	Accrued Bank Loan
Pinjaman Lainnya - Pihak Berelasi (Catatan 40)	--	30,925	Other Loan - Related Parties (Note 40)
Jumlah	443,947	765,629	Total

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Akrual Biaya Tantiem dan Akrual Biaya
Apresiasi Karyawan

Akrual biaya tantiem dan biaya apresiasi karyawan adalah pencatatan biaya secara akrual berdasarkan anggaran yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pinjaman Lainnya - Pihak Berelasi

Pada tanggal 2 Maret 2023, Perusahaan dan PT Aviati Pariwisata Indonesia (Persero) telah menandatangani Surat Pengakuan Utang dengan nilai Rp30.925. Pinjaman tersebut jatuh tempo pada 2 Oktober 2024. Perusahaan telah melunasi seluruh kewajiban pada tanggal 21 Oktober 2024.

Accrued Tantiem Expense and Accrued
Employee Appreciation Expense

The accrual of tantiem fees and costs for employees appreciation is the recording of costs on accrual basis based on the budget already approved by the General Meeting of Shareholders (RUPS).

Other Loan – Related Parties

On March 2, 2023, the Company and PT Aviati Pariwisata Indonesia (Persero) signed a Debt Acknowledgment Letter with a value of Rp30,925. The loan mature on October 2, 2024. The Company has fully settled all obligations on October 21, 2024.

25. Liabilitas Imbalan Kerja

25. Employee Benefit Liabilities

	2024 Rp	2023 Rp	
Liabilitas Imbalan Kerja Karyawan			Employee Benefit Liabilities
PT PPA	20,046	22,237	PT PPA
PT PPAF	2,111	1,914	PT PPAF
PT PPAK	--	--	PT PPAK
Jumlah	22,157	24,151	Total

Grup memberikan imbalan pascakerja minimum kepada karyawan yang berhak berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003 yang mengalami beberapa perubahan, dan perubahan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No. 11 tahun 2020 lalu kemudian diubah kembali dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 2021.

Grup menyelenggarakan program iuran pasti untuk imbalan pascakerja karyawan bekerjasama dengan Dana Pensiun Lembaga Keuangan ("DPLK") BRI, sesuai Perjanjian Kerjasama antara Grup dengan DPLK BRI No. PPJ-39/PPA/1111 dan Perjanjian Kerjasama No. B.51-DPLK/11/2011 yang tanggal 21 November 2011.

Penilaian aktuaris atas estimasi manfaat karyawan pascakerja Grup per 31 Desember 2024 dan 2023 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Nandi, Utama dan Rekan, berdasarkan *Projected Unit Credit Method (PUC Method)*.

The Group provides minimum post-employment benefits to eligible employees in accordance with Manpower Law No. 13 year 2003, which has undergone several amendments, with the latest amendment being made by Law No. 11 year 2020, subsequently amended again by Law No. 6 year 2023 regarding Job Creation and Government Regulation No. 35 year 2021.

The Group has organized the defined contribution program for post-employment benefits of employees working with Pension Fund ("DPLK") Financial Institution BRI, according to the Cooperation Agreement between the Group and DPLK BRI No. PPJ-39/PPA/1111 and Cooperation Agreement No. B.51-DPLK/11/2011 on November 21, 2011.

Actuarial valuation post employment benefits of the Group as of December 31, 2024 and 2023 were conducted by the Actuarial Consulting Firm Nandi, Utama and Partners, based on the *Projected Unit Credit Method (PUC Method)*.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	2023	
Asumsi Aktuarial			Basic Calculation
Tingkat Diskonto	6,69% - 7,12%	6,25% - 6,82%	Disconto Rate
Tingkat Kenaikan Upah	8,00%	8,00%	Salary Increase Rate
Tingkat Mortalita	TMI IV 2019	TMI IV 2019	Mortality Rate
Tingkat Cacat	5,00% of TMI IV 2019	5,00% of TMI IV 2019	Disability Rate
Tingkat Pengunduran Diri	5,00% of TMI IV 2019	5,00% of TMI IV 2019	Resignation Rate
Usia Pensiun Normal	56 tahun/ year (Semua Pegawai)	56 tahun/ year (Semua Pegawai)	Normal Retirement age
	Diasumsikan pensiun pada Usia pensiun Normal & Tanggal Akhir Kontrak)/(All Employees Assumed to retire at Normal Retirement Age & Contract End Date)	Diasumsikan pensiun pada Usia pensiun Normal & Tanggal Akhir Kontrak)/(All Employees Assumed to retire at Normal Retirement Age & Contract End Date)	
Metode Penilaian Aktuarial	Projected Unit Credit		Actuarial Valuation Method
Metode	Penghasilan Komprehensif Lain/Other Comprehensive Income		Method

Perusahaan

Rincian beban imbalan kerja Perusahaan adalah sebagai berikut:

The Company

The details of the Company's employee benefit expenses are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Biaya Jasa Kini	4,624	5,866	Current Service Cost
Biaya Jasa Lalu	97	521	Prior Service Cost
Kerugian Kuartilmen	(7,899)	(1,931)	Loss on Quartilmen
Beban Bunga	1,512	1,289	Interest Cost
Mutasi Pegawai	210	--	Employee Transfer
Iuran Dana Pensiun	1,832	2,016	Dues Pension Fund
Jumlah Beban Imbalan Kerja	376	7,761	Total Employee Benefits Expense

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

The details of the Company's employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	20,046	22,237	Present Value of Defined Benefit Obligation
Liabilitas Imbalan Kerja	20,046	22,237	Employee Benefits Liabilities

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Movement in the Company's employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo Awal	22,237	18,150	Beginning Balance
Beban Imbalan Kerja	376	7,761	Employment Benefit Expense
Penghasilan Komprehensif Lain	(735)	(2,026)	Other Comprehensive Income
Iuran Dana Pensiun	(1,832)	(2,016)	Dues Pension Fund
Aset (Kewajiban) yang Belum Diakui pada Laporan Posisi Keuangan	--	368	Unrecognised Asset (Liability) on Statement of Financial Position
Saldo Akhir	20,046	22,237	Ending Balance

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Tingkat sensitivitas pada tingkat bunga dan gaji
adalah sebagai berikut:

*The sensitivity level to interest rates and salaries
is as follows:*

	2024 Rp	2023 Rp	
Sensitivitas (-1%) terhadap tingkat bunga			Sensitivity (-1%) to Interest rate
Nilai Kini Kewajiban	22,245	24,963	Present Value of Liabilities
Biaya Jasa Kini			Current Service Cost
Biaya Bunga			Interest Cost
Sensitivitas (+1%) terhadap tingkat bunga			Sensitivity (+1%) to Interest rate
Nilai Kini Kewajiban	18,164	19,939	Present Value of Liabilities
Biaya Jasa Kini			Current Service Cost
Biaya Bunga			Interest Cost
Sensitivitas (-1%) terhadap tingkat upah			Sensitivity (-1%) to wage rate
Nilai Kini Kewajiban	16,969	18,321	Present Value of Liabilities
Biaya Jasa Kini			Current Service Cost
Biaya Bunga			Interest Cost
Sensitivitas (+1%) terhadap tingkat upah			Sensitivity (+1%) to interest rate
Nilai Kini Kewajiban	23,539	26,737	Present Value of Liabilities
Biaya Jasa Kini			Current Service Cost
Biaya Bunga			Interest Cost

PT PPAF

Rincian beban imbalan kerja PT PPAF adalah
sebagai berikut:

PT PPAF

*The details of the PT PPAF's employee benefit
expenses are as follows:*

	2024 Rp	2023 Rp	
Biaya Jasa Kini	239	300	Current Service Cost
Keuntungan Kuartilmen	--	(29)	Gain on Quartilmen
Beban Bunga	133	132	Interest Cost
Iuran Dana Pensiun	197	133	Dues Pension Fund
Jumlah Beban Imbalan Kerja	569	536	Total Employee Benefit Expense

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui
dalam laporan posisi keuangan PT PPAF adalah
sebagai berikut:

*The details of PT PPAF's employee benefit
liabilities recognized in the statement of financial
position are as follows:*

	2024 Rp	2023 Rp	
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	2,111	1,914	Present Value of Defined Benefit Obligation
Liabilitas Imbalan Kerja	2,111	1,914	Employee Benefits Liabilities

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam
laporan posisi keuangan PT PPAF adalah
sebagai berikut:

*Movement in PT PPAF's employee benefit
liabilities recognized in the statement of financial
position are as follows:*

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo Awal	1,914	1,881	Beginning Balance
Beban Imbalan Kerja	569	536	Employee Benefit Expense
Penghasilan Komprehensif Lain	(175)	(370)	Other Comprehensive Income
Iuran Dana Pensiun	(197)	(133)	Dues Pension Fund
Saldo Akhir	2,111	1,914	Ending Balance

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

PT PPAK

Rincian beban imbalan kerja PT PPAK adalah sebagai berikut:

	2024 Rp	2023 Rp	
Biaya Jasa Kini	--	--	Current Service Cost
Biaya Jasa Lalu	--	(590)	Prior Service Cost
Beban Bunga	--	--	Interest Cost
Jumlah Beban Imbalan Kerja	--	(590)	Total Employee Benefit Expense

Rincian liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT PPAK adalah sebagai berikut:

	2024 Rp	2023 Rp	
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	--	--	Present Value of Defined Benefit Obligation
Jumlah Liabilitas Imbalan Kerja	--	--	Employee Benefits Liabilities

Mutasi liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan PT PPAK adalah sebagai berikut:

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo Awal	--	450	Beginning Balance
Beban Imbalan Kerja	--	(590)	Employee Benefit Expense
Beban (Penghasilan) Komprehensif Lain	--	140	Other Comprehensive Loss (Income)
Saldo Akhir	--	--	Ending Balance

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Grup terhadap risiko aktuarial seperti risiko investasi, tingkat suku bunga dan risiko gaji.

Risiko Investasi

Nilai kini kewajiban imbalan pasti pensiun kesehatan dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi; jika pengembalian aset program di bawah tingkat tersebut, hal itu akan mengakibatkan defisit program. Saat ini program tersebut memiliki investasi yang relatif seimbang pada efek reksadana dan saham, instrumen utang dan lainnya. Karena sifat jangka panjang dari liabilitas program, dewan dana pensiun perlu menetapkan bahwa bagian wajar dari aset program harus diinvestasikan pada efek reksadana dan saham dan obligasi untuk meningkatkan imbal hasil yang dihasilkan oleh dana.

PT PPAK

The details of the PT PPAK's employee benefit expenses are as follows:

The details of PT PPAK's employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position are as follows:

Movement in PT PPAK's employee benefit liabilities recognized in the statement of financial position are as follows:

The defined benefit pension plan typically provides exposure for the Group to actuarial risks such as investment risk, interest rate risk and salary risk.

Investment Risk

The present value of the defined benefit health care plan liability is calculated using a discount rate determined by reference to high quality corporate bond yields; if the return on plan asset is below this rate, it will create a plan deficit. Currently, the plan has relatively balanced investment in mutual fund and equity securities, and debt instruments and others. Due to the long-term nature of the plan liabilities, the board of the pension fund considers it appropriate that a reasonable portion of the plan assets should be invested in mutual fund, shares and debt instruments to leverage the return generated by the fund.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program, namun sebagian akan di *offset* (saling hapus) oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan liabilitas imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Analisis sensitivitas ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi yang lain konstan.

Interest Risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability, however this will be partially offset by an increase in the return on the plan's debt investments.

Salary Risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined liabilities are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analysis have been determined based on reasonable possible changes of the respective assumptions occurring at the end of reporting period, while holding all other assumptions constant.

26. Utang Obligasi

26. Bonds Payable

	2024 Rp	2023 Rp	
Utang Obligasi yang Akan Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun			Bonds Payable Due Within One Year
Utang Obligasi - Pokok			Bonds Payable - Principal
Obligasi I - Seri B	345,000	--	Bonds I - Series B
Obligasi II - Seri A	890,600	--	Bonds II - Series A
Biaya yang dapat diatribusikan	(537)	--	Attributable Cost
Jumlah Utang Obligasi yang Akan Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	1,235,063	--	Total Bonds Payable Due Within One Year
Utang Obligasi Jangka Panjang			Non Current Bonds Payable
Utang Obligasi I - Pokok			Bonds Payable I - Principal
Obligasi I - Seri C	197,100	197,100	Bonds I - Series C
Obligasi I - Seri B	--	345,000	Bonds I - Series B
Biaya yang dapat diatribusikan	(218)	(634)	Attributable Cost
Jumlah	196,882	541,466	Total
Utang Obligasi II - Pokok			Bonds Payable II - Principal
Obligasi II - Seri A	--	890,600	Bonds II - Series A
Obligasi II - Seri B	791,600	791,600	Bonds II - Series B
Biaya yang dapat diatribusikan	(1,104)	(2,755)	Attributable Cost
Jumlah	790,496	1,679,445	Total
Jumlah Utang Obligasi Jangka Panjang	987,378	2,220,911	Total Non Current Bonds Payable

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun
2020 ("Obligasi I")**

Perusahaan telah menerbitkan Obligasi I dengan nilai nominal Rp642.100 yang efektif pada 1 September 2020. Pencatatan dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 2 September 2020 dengan Surat Pengumuman Bursa No. Peng-P-00217/BEI.PP3/09-2020. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (pihak berelasi) ditunjuk sebagai Wali Amanat yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi ini.

Penerbitan Obligasi I ditujukan untuk mendanai pelunasan Surat Berharga Komersial dan modal kerja investasi. Obligasi I tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri sebagai berikut:

Seri A	Jumlah pokok sebesar Rp100.000 tingkat bunga tetap sebesar 9,95% per tahun dan jatuh tempo 3 tahun sejak tanggal emisi yaitu pada 1 September 2023. Perusahaan telah melunasi Obligasi I seri A pada 1 September 2023.
Seri B	Jumlah pokok sebesar Rp345.000 dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,55% per tahun, jatuh tempo 5 tahun sejak tanggal emisi, yaitu 1 September 2025.
Seri C	Jumlah pokok sebesar Rp197.100 dengan tingkat bunga tetap sebesar 11% per tahun, jatuh tempo 7 tahun sejak tanggal emisi, yaitu 1 September 2027.

Obligasi I ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi. Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing seri obligasi. Pembayaran bunga obligasi pertama dilakukan pada tanggal 1 Desember 2020.

Pada tahun 2023, PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") memberikan peringkat idAA (Double A) atas Obligasi I Seri A, B dan C yang berlaku sampai dengan 1 Oktober 2024.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**Bonds I Perusahaan Pengelola Aset Year
2020 ("Bond I")**

The Company has issued Bonds I with a nominal value of Rp642,100, effective September 1, 2020. The listing was conducted on the Indonesia Stock Exchange on September 2, 2020, with Exchange Announcement Letter No. Peng-P-00217/BEI.PP3/09-2020. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (a related party) has been appointed as the Trustee representing the interests of the Bondholders.

The issuance of Bonds I is intended to fund the repayment of the Commercial Paper and the investment working capital. Bond I is not secured by specific collateral but is guaranteed by the Company's entire assets. This bond is issued without physical certificates, except for a Jumbo Bond Certificate issued in the name of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

This bond consists of 3 (three) series as follows:

Series A	The principal amount of Rp100,000 with a fixed interest rate of 9.95% per annum and maturing 3 years from the date of issuance, which on September 1, 2023. The Company fully settled Bond I Series A on September 1, 2023.
Series B	The principal amount of Rp345,000 with a fixed interest rate of 10.55% per annum, maturing 5 years from the date of issuance, which on September 1, 2025.
Series C	The principal amount of Rp197,100 with fixed interest rate at 11% per annum, maturing 7 years from the date of issuance, which on September 1, 2027.

Bonds I are offered at value of 100% of the principal amounting to the bonds. Bond interest is paid quarterly, according to the payment date of each bond series. The first bond interest payment was made on December 1, 2020.

In 2023, PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") assigned a rating of idAA (Double A) for Bonds I Series A, B, and C, which is valid until October 1, 2024.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pada tahun 2024, Pefindo memberikan peringkat idAA (*Double A*) atas Obligasi I Seri B dan C yang berlaku sampai dengan 1 Oktober 2025.

Obligasi II Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2022 ("Obligasi II")

Perusahaan telah menerbitkan Obligasi II dengan nilai nominal Rp1.682.200 yang efektif pada tanggal 8 Juli 2022. Pencatatan dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 11 Juli 2022 dengan Surat Pengumuman Bursa No. Peng-P-00274/BEI.PP3/07-2022. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (pihak berelasi) ditunjuk sebagai Wali Amanat yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi ini.

Penerbitan Obligasi II ditujukan untuk mendanai modal kerja pada kegiatan investasi. Obligasi II tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri sebagai berikut:

- Seri A Jumlah pokok sebesar Rp890.600 tingkat bunga tetap sebesar 7% per tahun dan jatuh tempo 3 tahun sejak tanggal emisi, yaitu pada 8 Juli 2025.
- Seri B Jumlah pokok sebesar Rp791.600 dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,8% per tahun, jatuh tempo 5 tahun sejak tanggal emisi, yaitu 8 Juli 2027.

Obligasi II ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi. bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing seri obligasi. Pembayaran bunga Obligasi pertama dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2022.

Pada tahun 2023, PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch Ratings") memberikan peringkat AA(idn) atas Obligasi II Seri A dan B, sesuai Surat No. 114/DIR/RATLTR/VII/2023 tanggal 7 Juli 2023.

Pada tahun 2024, Fitch Ratings memberikan peringkat AA-(idn) atas Obligasi II Seri A dan B, sesuai Surat No. 125/DIR/RATLTR/VII/2024 tanggal 4 Juli 2024.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

In 2024, Pefindo assigned a rating of idAA (*Double A*) for Bonds I Series B and C, which is valid until October 1, 2025.

Bonds II Perusahaan Pengelola Aset Year 2022 ("Bond II")

The Company has issued Bonds II with a nominal value of Rp1,682,200, effective July 8, 2022. The listing was conducted by the Indonesia Stock Exchange on July 11, 2022, with Exchange Announcement Letter No. Peng-P-00274/BEI.PP3/07-2022. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (a related party) has been appointed as the Trustee representing the interests of the Bondholders.

The issuance of Bonds II is intended to funding working capital on investment activities. Bonds II is not secured by specific collateral but is guaranteed by all the Company's assets. This bond is issued without physical certificates, except for the Jumbo Bond Certificate issued in the name of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

This bond consists of 2 (two) series as follows:

- Series A The principal amount of Rp890,600 with a fixed interest rate of 7% per annum and maturing 3 years from the date of issuance, which on July 8, 2025.
- Series B The principal amount of Rp791,600 with a fixed interest rate of 7.8% per annum, maturing 5 years from the date of issuance, which on July 8, 2027.

Bonds II are offered at value of 100% of the principal amounting of the bonds. Bond interest is paid quarterly, according to the payment date of each bond series. The first Bond interest payment was made on October 8, 2022.

In 2023, PT Fitch Ratings Indonesia ("Fitch Ratings") assigned a rating of AA(idn) for Bonds II Series A and B, as stated in Letter No. 114/DIR/RATLTR/VII/2023 dated July 7, 2023.

In 2024, Fitch Ratings assigned a rating of AA-(idn) for Bonds II Series A and B, as stated in Letter No. 125/DIR/RATLTR/VII/2024 dated July 4, 2024.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pada tahun 2024, Pefindo memberikan peringkat idAA (*Double A*) atas Obligasi II Seri A dan B, dengan yang berlaku sampai dengan 8 Juli 2025.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

In 2024, Pefindo has assigned the idAA (*Double A*) rating to Bonds II Serie A and B, which is valid until July 8, 2025.

27. Investasi pada Sukuk dan Utang Sukuk-Neto

a. Investasi pada Sukuk

	2024 Rp	2023 Rp
Investasi pada Sukuk		
Sukuk Ijarah - PT Adhi Commuter Properti Tbk	272,494	499,100
Jumlah Investasi pada Sukuk	<u>272,494</u>	<u>499,100</u>

Investasi Pada Sukuk ADCP

Pada tanggal 29 Desember 2022, PT PPAK telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Sukuk Bersyarat ("PJB Sukuk") dengan Namco Indonesia Fund VCC ("Namco"), sebagaimana diubah dengan Amendemen PJB Sukuk pada tanggal 26 Oktober 2023. PT PPAK membeli Sukuk Ijarah Jangka Panjang Tanpa Penawaran Umum yang diterbitkan oleh PT Adhi Commuter Properti Tbk ("Sukuk ADCP") dari Namco dengan harga pembelian yang disepakati senilai Rp499.100. PT PPAK melakukan pembayaran tahap-1 atas transaksi jual beli Sukuk pada tanggal 29 Desember 2022, senilai Rp265.830 dan tahap-2 pada tanggal 26 Oktober 2023 senilai Rp233.270.

Transaksi Pembelian Sukuk ADCP tersebut berkaitan dengan transaksi penjualan aset tagihan sesuai dengan Perjanjian Jual Beli Aset Tagihan Bersyarat ("PJB AT") antara PT PPAK dan PT Berdikari Jaya Ultima ("BJU") yang dilakukan pada tanggal 29 Desember 2022. Nilai transaksi jual beli aset tagihan adalah sebesar Rp275.826. Pada tanggal 31 Desember 2022, PT PPAK masih mencatat aset tagihan yang dialihkan, dan mencatat uang yang diterima dari PT BJU atas penjualan aset tagihan sebagai Uang Titipan, sehubungan dengan belum selesainya transaksi sesuai dengan yang disyaratkan dalam PJB AT.

27. Investment in Sukuk and Sukuk Payables-Net

a. Investment in Sukuk

	<i>Investment in Sukuk</i>
Sukuk Ijarah - PT Adhi Commuter Properti Tbk	
Total Investment in Sukuk	

Investment in Sukuk ADCP

On December 29, 2022, PT PPAK signed a Conditional Sukuk Sale and Purchase Agreement ("PJB Sukuk") with Namco Indonesia Fund VCC ("Namco"), as amended by the PJB Sukuk Amendment on October 26, 2023. PT PPAK purchased the Long-Term Ijarah Sukuk Without Public Offering issued by PT Adhi Commuter Properti Tbk ("Sukuk ADCP") from Namco at an agreed purchase price of Rp499,100. PT PPAK made the first payment for the Sukuk sale and purchase transaction on December 29, 2022, amounting to Rp265,830, and the second payment on October 26, 2023, amounting to Rp233,270.

The purchase of Sukuk ADCP is related to the sale of receivables assets under the Conditional Receivables Asset Sale and Purchase Agreement ("PJB AT") between PT PPAK and PT Berdikari Jaya Ultima ("BJU") conducted on December 29, 2022. The transaction value of the receivables asset sale was Rp275,826. As of December 31, 2022, PT PPAK still recorded the transferred receivables asset and recognized the funds received from PT BJU for the sale of the receivables asset as a deposit, due to the transaction not yet being completed in accordance with the requirements stipulated in the PJB AT.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pada tanggal 21 Mei 2024, PT PPAK, BJU, dan Namco menandatangani Perjanjian Pembatalan Transaksi PJB AT dan PJB Sukuk ("Perjanjian Pembatalan"). Pada tanggal 22 Mei 2024, PT PPAK mengembalikan dana penjualan aset tagihan kepada BJU sebesar Rp275.826 dan PT PPAK menerima sebagian pengembalian dana pembelian Sukuk ADCP sebesar Rp275.826 dari Namco. Namco berkewajiban menyelesaikan pembayaran sisa pengembalian dana sebesar Rp223.274 paling lambat 20 hari kerja setelah tanggal Perjanjian Pembatalan.

Sampai dengan tanggal otorisasi Laporan Keuangan Konsolidasian Grup tahun 2023 yaitu tanggal 31 Mei 2024, proses pembatalan masih belum sepenuhnya terjadi, dikarenakan masih terdapat dana yang belum diterima PT PPAK dari Namco dan proses administrasi pemindahan kepemilikan atas sukuk yang belum selesai.

Pada tanggal 20 Juni 2024, PT PPAK menerima proposal penyelesaian transaksi terkait Perjanjian Pembatalan dari Namco, sehubungan dengan Namco tidak dapat memenuhi sisa pengembalian dana sebesar Rp223.274. Namco menawarkan penyelesaian dengan kepemilikan Namco atas seluruh Sukuk ADCP.

Pada tanggal 12 Agustus 2024, PT PPAK menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST 2024"). Dalam RUPST 2024 tersebut, terdapat arahan dari Pemegang Saham untuk melengkapi dokumen-dokumen atas Investasi Sukuk, sehubungan dengan Opini Wajar Dengan Pengecualian ("WDP") atas Laporan Keuangan Konsolidasian Grup per 31 Desember 2023.

Pada tanggal 30 Desember 2024, dilakukan *Addendum* atas Perjanjian Pembatalan antara PT PPAK, BJU dan Namco. Dalam perjanjian tersebut, disepakati bahwa penyelesaian kewajiban Namco kepada PT PPAK sebesar Rp223.274 diselesaikan melalui penyerahan Sukuk ADCP dari Namco kepada PT PPAK. Seluruh hak atas Sukuk ADCP tersebut menjadi milik PT PPAK terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2023. Nilai perolehan dari Sukuk ADCP sebesar Rp223.274. PT PPAK mencatat Investasi Sukuk ADCP pada nilai wajarnya sebesar Rp233.270 dan mengakui selisih pengakuan awal sebesar Rp9.996 pada laba rugi.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

On May 21, 2024, PT PPAK, BJU, and Namco signed an Agreement for the Cancellation of the PJB AT and PJB Sukuk Transactions ("Cancellation Agreement"). On May 22, 2024, PT PPAK refunded the receivables asset sale proceeds to BJU amounting to Rp275,826 and PT PPAK received a partial refund for the Sukuk ADCP purchase amounting to Rp275,826 from Namco. Namco is obligated to complete the remaining refund payment of Rp223,274 no later than 20 working days after the date of the Cancellation Agreement.

As of the authorization date of the Group Consolidated Financial Statements year 2023, which is May 31, 2024, the cancellation process has not been fully completed due to outstanding funds that have not yet been received by PT PPAK from Namco and the unfinished administrative process for the transfer of sukuk ownership.

On June 20, 2024, PT PPAK received a settlement proposal related to the Cancellation Agreement from Namco, due to Namco inability to fulfill the remaining refund amounting to Rp223,274. Namco proposed a settlement by transferring its ownership of all ADCP Sukuk.

On August 12, 2024, PT PPA held its Annual General Meeting of Shareholders ("RUPST 2024"). During the RUPST 2024, the Shareholders provided directives to complete the documentation related to the Sukuk Investment, in connection with the the Qualified Opinion ("WDP") on the Group Consolidated Financial Statements as of December 31, 2023.

On December 30, 2024, an Addendum to the Cancellation Agreement was executed between PT PPAK, BJU, and Namco. Under this agreement, it was agreed that Namco's obligation to PT PPAK amounting to Rp223,274 would be settled through the transfer of ADCP Sukuk from Namco to PT PPAK. All rights of the ADCP Sukuk were transferred to PT PPAK effective from October 26, 2023. The acquisition cost of ADCP Sukuk was Rp223,274. PT PPAK recognized the ADCP Sukuk Investment at its fair value of Rp233,270, and recognizes an initial recognition difference of Rp9,996 in profit or loss.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Grup telah melengkapi seluruh prosedur dan dokumentasi yang diperlukan terkait transaksi ini.

Perusahaan telah menerima surat konfirmasi dari Pemegang Saham Seri B Perusahaan yaitu PT Danareksa (Persero) tanggal 7 Maret 2025, yang mengonfirmasi bahwa Perusahaan telah menunaikan arahan Pemegang Saham dalam RUPST 2023 terkait penyelesaian opini WDP.

Nilai tercatat Investasi Sukuk pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp272.494. Amortisasi selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp39.224.

Sukuk ADCP ini memiliki jangka waktu 8 (delapan) tahun dan akan jatuh tempo pada 26 Oktober 2031. Investasi pada Sukuk ADCP dicatat sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan, di mana Grup memiliki tujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual baik berupa imbal hasil maupun pokok dari sukuk ini.

Total imbalan (sewa/ujrah) ijarah adalah sebesar Rp28.296 yang akan dibayarkan secara cicilan dengan skema cicilan Imbalan Ijarah atau ekuivalen sebesar 0,722% per tahun dari Harga Pembelian Kembali yang Disesuaikan. Penerbit memberikan Hibah Bersyarat sebesar Rp500 per tahun apabila EBITDA Penerbit per tahun buku mencapai dan/atau melampaui Rp500.000 berdasarkan laporan keuangan tahunan diaudit.

Sukuk ADCP tersebut dijamin dengan jaminan aset berupa tanah yang dimiliki oleh PT Adhi Commuter Properti Tbk yang diikat dengan hak tanggungan peringkat pertama, dengan nilai minimal 100% dari harga pembelian kembali.

b. Utang Sukuk-Neto

Nilai tercatat Utang Sukuk pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai Rp5.948.653 dan Rp5.360.985. Amortisasi selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 senilai Rp587.668 dan Rp587.668 telah dicatat sebagai beban pada laba rugi.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

The Group has fulfilled all required procedures and documentation related to this transaction.

The Company has received a confirmation letter from the Series B Shareholder, PT Danareksa (Persero), dated March 7, 2025, confirming that the Company has fulfilled the Shareholder's directives from the PPA General Meeting of Shareholders (RUPST) regarding the remediation of the WDP opinion.

The carrying value of Sukuk Investment as of December 31, 2024 is Rp272,494. Amortization of the difference between acquisition cost and nominal value up to December 31, 2024 is Rp39,224.

The ADCP Sukuk has a tenure of 8 (eight) years and will mature on October 26, 2031. The investment in the ADCP Sukuk is recorded as a financial asset measured at acquisition cost, as the Group intends to receive contractual cash flows in the form of both returns and principal from this Sukuk.

The total ijarah compensation (rent/ujrah) amounts to Rp28,296, which will be paid in installments under the Ijarah Compensation installment scheme, equivalent to 0.722% per annum of the Adjusted Buyback Price. The Issuer provides a Conditional Grant of Rp500 per annum if the Issuer's EBITDA for the financial year reaches and/or exceeds Rp500,000 based on the audited annual financial statements.

The ADCP Sukuk is secured by asset collateral in the form of land owned by PT Adhi Commuter Properti Tbk, which is pledged with a first-ranking mortgage, with a minimum value of 100% of the buyback price.

b. Sukuk Payables-Net

The carrying amount of Sukuk Payables as of December 31, 2024 and 2023, amounting to Rp5,948,653 and Rp5,360,985. Amortization of the difference between the acquisition cost and nominal value as of December 31, 2024 and 2023, amounted to Rp587,668 and Rp587,668 has been recorded as expense in profit or loss.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024 Rp	2023 Rp	
Utang Sukuk - BMI			Sukuk Liabilities - BMI
(Investasi) dan Utang Sukuk yang Diselesaikan			Net Settled (Investment) and Payable
Secara Neto			in Sukuk
Utang Sukuk			Sukuk Payable
Sukuk Wakalah PPA - PT Bank Muamalat Indonesia	13,051,069	13,051,069	Sukuk Wakalah PPA - PT Bank Muamalat Indonesia
Dikurangi: Diskonto yang belum Diamortisasi	(8,416,667)	(8,916,667)	Less: Unamortized Discount
Subjumlah Utang Sukuk	4,634,402	4,134,402	Subtotal Sukuk Payable
Investasi pada Sukuk			Investment in Sukuk
Sukuk Mudharabah - Diukur pada			Sukuk Mudharabah PT BMI - Measured at
Biaya Perolehan yang Diamortisasi	(4,435,895)	(3,805,882)	Amortized Acquisition Cost
Subjumlah Investasi pada Sukuk	(4,435,895)	(3,805,882)	Subtotal Investment in Sukuk
(Investasi) dan Utang Sukuk yang Diselesaikan			Net Settled (Investment) and Payable
secara Neto - Disajikan sebagai Utang Sukuk	198,507	328,520	in Sukuk - Presented as Sukuk Payable
Utang Sukuk - Bukopin			Sukuk Payable - Bukopin
Sukuk Wakalah PPA - PT Bank KB Bukopin Tbk	2,432,000	2,432,000	Sukuk Wakalah PPA - PT Bank KB Bukopin Tbk
Dikurangi: Diskonto yang belum Diamortisasi	(1,117,749)	(1,205,417)	Less: Unamortized Discount
Jumlah Utang Sukuk	1,314,251	1,226,583	Total Sukuk Payable
Jumlah Utang Sukuk - Neto	1,512,758	1,555,103	Total Sukuk Payable - Net

Sukuk Wakalah Bukopin 2022

Berdasarkan Akta Akad Penerbitan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Nomor 140 tanggal 23 September 2022, Perusahaan telah menerbitkan dan menawarkan sukuk wakalah berjangka waktu panjang tanpa melalui penawaran umum dengan tunduk pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 30/POJK.40/2019.

Akad yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Perusahaan berbentuk Akad Wakalah Bi Al-Istitsmar. Mengacu pada akad Wakalah Bi Al-Istitsmar, Perusahaan selaku penerbit sukuk (Wakil) menerima kuasa dari pemodal sukuk (Muwakkil) untuk melakukan kegiatan investasi dan pengembangan dana pemodal. Penerbitan Sukuk Wakalah Bukopin dilakukan dengan cara Penawaran Terbatas (*Private Placement*).

Dana modal investasi yang diterima Perusahaan dari Pemegang Sukuk Wakalah Bukopin adalah Rp1.117.000. Nilai *redemption* Sukuk Wakalah Bukopin adalah Rp2.432.000, yang merupakan dana modal investasi dan akumulasi imbal hasil ditahan. Jangka waktu sukuk adalah 15 tahun setelah penerbitan, yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 September 2037.

Perusahaan menunjuk PT Mandiri Sekuritas (Pihak Berelasi) sebagai Penatalaksana dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Pihak Berelasi) sebagai Agen Pemantau.

Sukuk Wakalah Bukopin 2022

Based on the Issuance Deed (Akad) of Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Akad number 140 dated September 23, 2022, the Company has Issued and offered a long-term wakalah sukuk without going through a public offering subject based on the financial services authority (OJK) regulation number 30/POJK.40/2019.

The deed used in the issuance of the Company's Sukuk is in the form of a Wakalah Bi Al-Istitsmar contract. Referring to the Wakalah Bi Al-Istitsmar contract, the Company, as the sukuk issuer (Wakil), is authorized by the sukuk investors (Muwakkil) to carry out investment activities and manage the investors' funds. The issuance of Bukopin Wakalah Sukuk is conducted through a Limited Offering (*Private Placement*).

The investment capital received by the Company from the holders of Bukopin Wakalah Sukuk is Rp1,117,000. The redemption value of Bukopin Wakalah Sukuk is Rp2,432,000, which represents the investment capital and accumulated withheld returns. The term of the sukuk is 15 years from the issuance date, maturing on September 28, 2037.

The Company has appointed PT Mandiri Sekuritas (a related party) as the Arranger and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (Related Party) as the Monitoring Agent.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perusahaan akan mengelola dana yang diperoleh dari hasil penerbitan sukuk ini untuk melakukan kegiatan investasi berupa kegiatan investasi bisnis Perusahaan, dengan memperhatikan pembangunan ekonomi. Investasi bisnis yaitu pelaksanaan investasi dalam infrastruktur yang diperlukan dalam rangka manajemen badan usaha milik negara yang dikuasakan kepada Perusahaan oleh Pemerintah Republik Indonesia, maupun modal kerja yang salah satunya melalui pembayaran seluruh sisa kewajiban Perusahaan selaku debitur dan juga pelaksanaan rencana investasi syariah Perusahaan ke perusahaan pembayaran elektronik.

Imbal hasil kinerja yang dibayarkan oleh Perusahaan sebagai penerbit kepada Pemegang Sukuk Wakalah Bukopin adalah sebagai berikut:

- a. Imbal hasil periodik, sebesar 0,75% per tahun dari nilai penebusan; dan
- b. Imbal hasil berdasarkan kinerja jika pendapatan Perusahaan (induk saja):
 - kurang dari Rp5.000.000, bagi hasil sebesar Rp1.500 per tahun; atau
 - mencapai dan lebih dari Rp5.000.000, bagi hasil sebesar Rp2.000 per tahun.

Imbal hasil tersebut dibayarkan setiap kuartal, pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 27 Desember 2022.

Sukuk Wakalah Bukopin ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perusahaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

Pada tahun 2023, Pefindo melakukan pemeringkatan atas Sukuk Wakalah Bukopin, dengan peringkat *idAA_{sy}* (*Double A*) yang berlaku sampai dengan 1 Oktober 2024.

Pada tahun 2024, Pefindo melakukan pemeringkatan atas Sukuk Wakalah Bukopin, dengan peringkat *idAA_{sy}* (*Double A*) yang berlaku sampai dengan 1 Oktober 2025.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

In this deed, the Company as the Issuer will manage the funds obtained from the issuance of this sukuk to carry out several business activities, such as in the form of the issuer's business investment activities, considering economic development. Among other things, for the implementation of investments in infrastructure required for the management of state-owned enterprises authorized to issuers by the Government of the Republic of Indonesia as well as capital through payment of all remaining obligations of Company as the debtor in the Company Working Capital financing agreement and implementing the issuer's sharia investment plan to an electronic payment Company.

The yield paid by the Company as the issuer to the Sukuk Wakalah Bukopin holders is as follows:

- a. *Periodic yield of 0.75% per annum of the redemption value; and*
- b. *Performance-based yield if the Company's (parent only) revenue:*
 - *is less than Rp5,000,000, the profit sharing is Rp1,500 per year; or*
 - *reaches or exceeds Rp5,000,000, the profit sharing is Rp2,000 per year.*

The returns are paid quarterly, with the first payment made on December 27, 2022.

The Bukopin Wakalah Sukuk is not secured by specific collateral but is guaranteed by all the Company's assets, both movable and immovable.

*In 2023, Pefindo has assigned the *idAA_{sy}* (*Double A*) rating to Sukuk Wakalah Bukopin, which is valid until October 1, 2024.*

*In 2024, Pefindo has assigned the *idAA_{sy}* (*Double A*) rating to Sukuk Wakalah Bukopin, which is valid until October 1, 2025.*

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sukuk Wakalah Bank Muamalat

Berdasarkan Akta Akad Penerbitan Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Nomor 19 tanggal 15 November 2021, Perusahaan telah menerbitkan sukuk wakalah dengan nilai penerbitan sukuk Rp3.051.069 dan dengan nilai nominal Rp13.051.069. Jangka waktu sukuk selama 20 tahun dan jatuh tempo sukuk adalah 15 November 2041. Sukuk wakalah ini memiliki imbal hasil indikatif setara 1% (satu persen) per tahun dari akumulasi keuntungan dan nilai penerbitan sukuk sampai dengan tanggal jatuh tempo ("Imbal Hasil") yang akan dibayarkan setiap tahun oleh Perusahaan sebagai penerbit.

Akad yang digunakan dalam penerbitan Sukuk Perusahaan berbentuk akad Wakalah Bi Al-Istitsmar. Mengacu pada akad tersebut Perusahaan selaku Penerbit Sukuk (Wakil) menerima kuasa dari Pemodal Sukuk (Muwakkil) untuk melakukan kegiatan investasi dan pengembangan harta Pemodal. Dalam akad ini, Perusahaan selaku penerbit akan mengelola dana yang diperoleh dari hasil penerbitan Sukuk ini untuk melakukan beberapa kegiatan usaha antara lain berupa pembiayaan kepada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan kegiatan investasi pada perusahaan kendaraan elektrik.

Investasi pada Sukuk BMI

Berdasarkan Akta Akad Penerbitan Sukuk Mudharabah No. 20 tanggal 15 November 2021, Perusahaan telah membeli Sukuk Mudharabah yang diterbitkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (PT BMI) dengan nilai penerbitan sukuk sebesar Rp2.440.856 dan dengan nilai nominal Rp15.041.101.

Investasi pada Sukuk Mudharabah tersebut dicatat sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan dimana Perusahaan memiliki tujuan untuk memperoleh arus kas kontraktual baik berupa imbal hasil maupun pokok dari sukuk ini. Sukuk Mudharabah ini memiliki jangka waktu selama 20 Tahun dan akan dilunasi pada saat jatuh tempo pada tanggal 15 November 2041 sebesar nilai nominal sukuk. Sukuk Mudharabah ini memiliki nisbah bagi hasil untuk pemegang sukuk sebesar 50,72% dari usaha pembiayaan yang menjadi porsi penerbit dalam mata uang Rupiah, setara imbal hasil tunai indikatif 1% per tahun dari nilai nominal sukuk.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Sukuk Wakalah Bank Muamalat

Based on the Issuance Deed (Akad) of Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar Akad number 19 dated November 15, 2021, The Company has issued wakalah sukuk with the issuance value amounted to Rp3,051,069 and a nominal value of Rp13,051,069. The term of the sukuk is 20 years and the maturity date of the sukuk is November 15, 2041. This wakalah sukuk has an indicative yield at 1% (one percent) per annum from the accumulated profit and the value of the sukuk issuance up to the maturity date ("Yield"), will be paid annually by the Company as Issuer.

The deed used in the issuance of the Sukuk of the Company is in the form of Wakalah Bi Al-Istitsmar Akad. Based on this deed, the Company as Issuer (Wakil) has been granted by the sukuk Investor (Muwakkil) to carry out investment activities and the development of Investors' assets. In this deed, the Company as the issuer will manage the funds obtained from the issuance of this Sukuk to carry out several business activities, such as financing provision to PT Bank Muamalat Indonesia Tbk and investment activities in electric vehicle companies.

Investment in Sukuk BMI

Based on the Issuance Deed of Sukuk Mudharabah Akad No. 20 dated November 15, 2021, The Company has purchased sukuk Mudharabah issued by PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (PT BMI) with the issuance value amounted to Rp2,440,856 and nominal value amounted to Rp15,041,101.

Investment in Mudharabah Sukuk is recorded as a financial asset measured at cost, as the Company aims to obtain contractual cash flows, both in the form of returns and the principal from this sukuk. This Mudharabah Sukuk has a maturity period of 20 years and will be redeemed at maturity on November 15, 2041, at the nominal value of the sukuk. This Mudharabah Sukuk has a profit-sharing ratio for sukuk holders of 50.72% from the financing business, which is the issuer's portion, in Indonesian Rupiah, equivalent to an indicative cash yield of 1% per annum of the nominal value of the sukuk.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Nilai tercatat Investasi Sukuk per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai Rp4.435.895 dan Rp3.805.882. Amortisasi selisih antara biaya perolehan dan nilai nominal per 31 Desember 2024 dan 2023 senilai Rp627.013 dan Rp627.013 telah dicatat sebagai pendapatan pada laba rugi. Selanjutnya investasi pada sukuk ini disebut sebagai sukuk BMI.

Berdasarkan Akta Notaris Ashoya Ratam No. 30 tanggal 9 September 2021 terkait Perjanjian Restrukturisasi Induk antara Perusahaan, BMI, dan Badan Pengelola Keuangan Haji ("BPKH"), para pihak telah sepakat atas proyeksi nilai nominal akrual Sukuk PPA dan Sukuk BMI sampai pada tahun ke 20 sejak tanggal penerbitan disajikan sebagai berikut:

Ilustrasi Indikatif Sukuk PPA/ Indicative Illustration of Sukuk PPA				
Tahun/ Year	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nisbah/ Nisba	Jumlah/ Total	Imbal Hasil Tunai Indikatif/ Indicative Cash
1	3,051,069	100,000	3,151,069	130,511
2	3,151,069	100,000	3,251,069	130,511
3	3,251,069	100,000	3,351,069	130,511
4	3,351,069	100,000	3,451,069	130,511
5	3,451,069	100,000	3,551,069	130,511
6	3,551,069	100,000	3,651,069	130,511
7	3,651,069	100,000	3,751,069	130,511
8	3,751,069	300,000	4,051,069	130,511
9	4,051,069	300,000	4,351,069	130,511
10	4,351,069	300,000	4,651,069	130,511
11	4,651,069	300,000	4,951,069	130,511
12	4,951,069	300,000	5,251,069	130,511
13	5,251,069	300,000	5,551,069	130,511
14	5,551,069	300,000	5,851,069	130,511
15	5,851,069	1,200,000	7,051,069	130,511
16	7,051,069	1,200,000	8,251,069	130,511
17	8,251,069	1,200,000	9,451,069	130,511
18	9,451,069	1,200,000	10,651,069	130,511
19	10,651,069	1,200,000	11,851,069	130,511
20	11,851,069	1,200,000	13,051,069	130,511

Perusahaan mencatat selisih antara nilai transaksi dan nilai nominal atas utang sukuk dan investasi pada sukuk tersebut mengacu pada PSAK 410: Sukuk, dimana sukuk akan diakui sebesar nilai nominal, disesuaikan dengan premium atau diskonto, dan biaya transaksi terkait. Setelah pengakuan awal, jika jumlah nominal terdapat diskonto, maka perbedaan tersebut diamortisasi secara garis lurus selama jangka waktu sukuk.

Saling Hapus

Berdasarkan Perjanjian Retensi Sukuk PPA pada tanggal 15 November 2021 BMI selaku pembeli Sukuk PPA dan Perusahaan selaku pembeli sukuk BMI, para pihak telah sepakat atas ketentuan sebagai berikut:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

The carrying amount of Sukuk Investment as of December 31, 2024 and 2023 amounting to Rp4,435,895 and Rp3,805,882. Amortization from the difference between the acquisition cost and nominal value as of December 31, 2024 and 2023 amounting to Rp627,013 and Rp627,013 has been recorded as income in profit or loss. Furthermore, this investment in sukuk is referred as sukuk BMI.

Based on the Notarial Deed of Ashoya Ratam No. 30 dated September 9, 2021, regarding the Master Restructuring Agreement between the Company, BMI, and the Hajj Financial Management Agency ("BPKH"), the parties have agreed with the projected nominal accrual value of Sukuk PPA and Sukuk BMI which due on the 20 years from the date of issuance is as follows:

Ilustrasi Indikatif Sukuk PPA/ Indicative Illustration of Sukuk PPA				
Tahun/ Year	Nilai Nominal/ Nominal Value	Nisbah/ Nisba	Jumlah/ Total	Imbal Hasil Tunai Indikatif/ Indicative Cash
1	2,440,856	50,000	2,490,856	153,542
2	2,440,856	100,000	2,590,856	153,542
3	2,440,856	309,668	2,900,524	153,542
4	2,440,856	315,298	3,215,822	153,542
5	2,440,856	337,820	3,553,642	153,542
6	2,440,856	349,080	3,902,722	153,542
7	2,440,856	352,269	4,254,990	153,542
8	2,440,856	393,386	4,648,377	153,542
9	2,440,856	439,303	5,087,680	153,542
10	2,440,856	490,580	5,578,259	153,542
11	2,440,856	547,841	6,126,100	153,542
12	2,440,856	611,786	6,737,887	153,542
13	2,440,856	683,195	7,421,082	153,542
14	2,440,856	762,939	8,184,021	153,542
15	2,440,856	851,991	9,036,012	153,542
16	2,440,856	951,437	9,987,449	153,542
17	2,440,856	1,062,491	11,049,940	153,542
18	2,440,856	1,186,507	12,236,447	153,542
19	2,440,856	1,324,999	13,561,446	153,542
20	2,440,856	1,479,655	15,041,101	153,542

The Company records the difference between the transaction value and the nominal value of the sukuk payables and investment in sukuk in accordance with PSAK 410: Sukuk, sukuk will be recognized at the nominal value, adjusted for premium or discount, and related transaction costs. After the initial recognition, if the nominal amount is discounted, the difference is amortized on a straight-line basis over the term of the Sukuk.

Offsetting

Based on the PPA Sukuk Retention Agreement dated November 15, 2021, BMI as the buyer of sukuk PPA and the Company as the buyer of Sukuk BMI, both parties have agreed on the following terms:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- a. Perusahaan dapat mengaplikasikan perjumpaan utang atas hak tagihnya kepada PT BMI (PT BMI sebagai penerbit diwajibkan untuk memegang Sukuk PPA sampai dengan tanggal jatuh tempo sukuk) berdasarkan Sukuk BMI dengan kewajiban pembayarannya berdasarkan Sukuk PPA pada tanggal bagi hasil, tanggal jatuh tempo sukuk dan/atau tanggal pengakhiran awal;
- b. PT BMI dapat mengaplikasikan perjumpaan utang atas hak tagihnya kepada Perusahaan (Perusahaan sebagai penerbit diwajibkan untuk memegang Sukuk BMI sampai dengan tanggal jatuh tempo sukuk) berdasarkan Sukuk PPA dengan kewajiban pembayarannya berdasarkan Sukuk BMI pada tanggal bagi hasil, tanggal jatuh tempo sukuk dan/atau tanggal pengakhiran awal; dan
- c. Dengan adanya hak hukum yang dapat dipaksakan untuk saling hapus antara aset keuangan dan liabilitas keuangan maka Perusahaan menyajikan investasi pada sukuk dan utang sukuk yang dimiliki oleh Perusahaan secara neto.

- a. The Company may apply to offset its rights to PT BMI (PT BMI as the issuer is required to hold the Sukuk PPA until the Sukuk maturity date) based on the Sukuk BMI with its payment obligations under the Sukuk PPA on the profit-sharing date, the maturity date of the Sukuk and/or the early termination date;
- b. PT BMI may apply to offset its rights to the Company (the Company is required to hold the Sukuk PPA until the Sukuk maturity date) based on the Sukuk PPA with its payment obligations under the Sukuk BMI on the profit-sharing date, the maturity date of the Sukuk and/or the early termination date; and
- c. With the legal rights that is enforceable for the financial assets and financial liabilities to be offset, the Company presents the investment in sukuk and sukuk payables owned by the Company on a net basis.

28. Ekuitas

a. Modal Saham

Perusahaan dimiliki oleh PT Danareksa (Persero) dan Negara Republik Indonesia. Modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp5.668.998 yang mewakili 6.188.835 lembar saham (Catatan 1).

31 Desember 2024 dan 2023	Jumlah Lembar Saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares of ownership issued and fully paid	Jumlah/ Amount (Rp)	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Shareholders
Saham Seri A Dwiwarna				December 31, 2024 and 2023
Negara Republik Indonesia	1	1	0.00%	Dwiwarna Series A - Share Republic of Indonesia
Saham Seri B				Series B - Share
PT Danareksa (Persero)	6,188,834	5,668,997	100.00%	PT Danareksa (Persero)
Jumlah	6,188,835	5,668,998	100.00%	Total

Jumlah lembar saham yang ditempatkan dan telah disetor penuh, terdiri dari:

28. Equity

a. Share Capital

The Company is owned by PT Danareksa (Persero) and the Republic of Indonesia. The issued and fully paid-in capital amounting to Rp5,668,998 representing 6,188,835 shares (Note 1).

The number of shares issued and fully paid, consisting of:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024	2023	
	Lembar Saham/Shares		
Modal awal berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2004 juncto Keputusan Menteri Keuangan No. 82/KMK.02/2004 tanggal 27 Feb. 2004 dan telah dituangkan dalam akta No. 7 tanggal 27 Februari 2004 yang dibuat di hadapan Notaris Lenny Janis Ishak S.H., yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No. C-05780 HT.01.01.TH.2004 tanggal 9 Maret 2004.	300,000	300,000	<i>Initial capital contribution by Government Regulation No. 10 Year 2004 juncto Decree of the Minister of Finance No. 82/KMK.02/2004 dated February 27, 2004 and has stasted under deed No. 7 dated February 27, 2004 in the presence of Notary Lenny Janis Ishak S.H., have been approved by the Minister of Justice and Human Rights No. C-05780 HT.01.01.TH.2004 on March 9, 2004.</i>
Setoran Modal Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan No. 82/KMK.02/2004 tanggal 27 Februari 2004 dalam bentuk aset tetap dan aset takberwujud eks BPPN yang telah ditetapkan nilainya berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 32/KMK.06/2007 tanggal 31 Juli 2007 masing-masing sebesar Rp1.205 dan Rp153.	1,358	1,358	<i>Capital Injection from the Government of the Republic of Indonesia in accordance with Article 2 of the Decree of the Minister of Finance No. 82/KMK.02/2004 dated February 27, 2004 in the form of fixed assets and intangible assets of the former BPPN which have been valued based on the Decree of the Minister of Finance No. 32/KMK.06/2007 dated July 31, 2007, each amounting to Rp1,205 and Rp153, respectively.</i>
Setoran Modal Pemerintah Republik Indonesia yang dialokasikan dari Laba Bersih Tahun 2007 sesuai dengan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham PT PPA tentang Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2007 tanggal 8 Mei 2008.	1	1	<i>Capital Injection from the Government of the Republic of Indonesia were allocated from Net Income Year 2007 in accordance with the General Meeting of Shareholders of PT PPA concerning the Approval of Annual Report for Year 2007 dated May 8, 2008.</i>
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2008.	1,500,000	1,500,000	<i>Additional Capital Injection from the Government of the Republic of Indonesia derived from the State Budget for the Fiscal Year 2008 based on Government Regulation No. 78 of 2008.</i>
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 2009.	1,000,000	1,000,000	<i>Additional Capital Injection from the Government of the Republic of Indonesia derived from the State Budget for the Fiscal Year 2009 based on Government Regulation No. 77 of 2009.</i>
Setoran modal Pemerintah Republik Indonesia yang dialokasikan dari cadangan umum Perusahaan sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN selaku RUPS PT PPA No. SK-366/MOU/2012 tanggal 9 Oktober 2012.	1	1	<i>Capital injection from the Government of the Republic of Indonesia allocated from the Company's general reserves in accordance with the Decree of the Minister of SOEs as the RUPS of PT PPA No. SK-366/MOU/2012 dated October 9, 2012.</i>
Pengurangan penyertaan modal Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 86 Tahun 2012 Tanggal 20 Oktober 2012 terkait dengan pengalihan saham PT PPA pada PT Waskita Karya (99%) kepada Pemerintah Republik Indonesia.	(804,672)	(804,672)	<i>Capital Reduction from the Government of the Republic of Indonesia based on Government Regulation No. 86 of 2012 dated October 20, 2012 related to the transfer of shares of PT PPA to PT Waskita Karya (99%) to the Government of the Republic of Indonesia.</i>
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015.	1,000,000	1,000,000	<i>Additional Capital Injection from the Government of the Republic of Indonesia derived from the State Budget for the Fiscal Year 2015.</i>
Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia yang berasal dari pengalihan seluruh saham milik Negara RI pada 5 Perusahaan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 135/KMK.06/2021 tanggal 1 April 2021.	2,955,935	2,955,935	<i>Additional Capital Injection from the Government of the Republic of Indonesia derived from the transfer of all shares owned by the State of the Republic of Indonesia in 5 Companies in accordance with the Decree of the Minister of Finance No. 135/KMK.06/2021 dated April 1, 2021.</i>
Negara Republik Indonesia melakukan pengurangan Penyertaan Modal Negara pada PT PPA sebesar Rp499.997 yang merupakan modal disetor PT PPA pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Nindya Karya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT PPA.	--	--	<i>The Republic of Indonesia reduced its capital injection in PT PPA by Rp499,997, which is the capital paid by PT PPA to the State-Owned Enterprise (Persero) PT Nindya Karya based on Government Regulation No. 6 of 2022 concerning the Reduction of Capital Injection of the Republic of Indonesia in the State-Owned Enterprise (Persero) PT PPA.</i>
Penambahan Penyertaan Modal yang berasal dari Kapitalisasi Cadangan Perusahaan.	1	1	<i>The addition of Equity Participation originating from the Reserve Capitalization of The Company.</i>
Penambahan Penyertaan Modal PT Danareksa (Persero)	236,211	236,211	<i>Capital Injection from PT Danareksa (Persero).</i>
Jumlah Lembar Saham	6,188,835	6,188,835	Total Number of Shares

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Berdasarkan Akta No. 54 dari Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta pada tanggal 10 Maret 2023, Pemegang Saham memutuskan:

1. Menyetujui penempatan saham seri B oleh PT Danareksa (Persero) sebanyak 236.212 lembar saham senilai Rp216.371.
2. Penempatan saham tersebut berasal dari setoran tunai sebesar Rp216.370 dan kapitalisasi cadangan sebesar Rp1.
3. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perusahaan sehubungan dengan penempatan saham.

b. Tambahan Modal Disetor

Dalam rangka restrukturisasi PT Nindya Karya ("PT NK") yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1972 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara Nindya Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada PT Nindya Karya (Persero) tanggal 13 Agustus 2012, dilakukan penambahan modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT NK sebesar Rp499.997 melalui penerbitan saham baru seri B dengan nominal per saham sebesar Rp84.882 (nilai penuh).

Saham baru diambil bagian oleh Perusahaan untuk melaksanakan program restrukturisasi PT NK. Pengambilan bagian saham oleh Perusahaan mengakibatkan kepemilikan saham Negara Republik Indonesia secara langsung pada PT NK menjadi 1% dan kepemilikan saham Perusahaan pada PT NK menjadi 99%.

Perusahaan yang menerima bisnis tersebut, dalam PSAK 338 : Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali mengakui selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari setiap transaksi bisnis entitas sepengendali di ekuitas dan menyajikannya dalam pos tambahan modal disetor.

Pada tahun 2018, Perusahaan melalui anak usahanya PPAK melepas bisnis dalam pelepasan bisnis entitas sepengendali yaitu PT Pratama Persada Airborne ke PT Survai Udara Panas (Persero) dan sesuai PSAK 338 mengakui selisih antara imbalan yang diterima dan jumlah tercatat bisnis yang dilepas di ekuitas dan menyajikannya dalam pos tambahan modal disetor.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Based on Deed No. 54 of Desman, S.H., M.Hum., Notary in Jakarta on March 10, 2023, the Shareholders decide:

1. Approved addition of Series B by PT Danareksa (Persero) totalling 236,212 shares, amount of Rp216,371.
2. Addition of shares origin from cash deposit amount of Rp216,370 and reverse capitalization amount of Rp1.
3. Approve changes to Article 4 paragraph (2) and (3) Company's Articles of Association regarding the addition of shares.

b. Additional Paid in Capital

For restructuring PT Nindya Karya ("PT NK") that was established by Government Regulation Number 11 of 1972 regarding the Transfer of the State Building Company Nindya Karya into a Limited Liability Company (Persero) as stated in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 69 year 2012 regarding Changes in the State Share Ownership Structure through the Issue of New Shares at PT Nindya Karya (Persero) on August 13, 2012, the Company (Persero) PT NK added capital amounted to Rp499,997 through the issue of new series B shares with par per share amounted to Rp84,882 (full amount).

The new shares were acquired by the Company to carry out PT NK's restructuring program. The acquisition of shares by the Company resulted in the Republik of Indonesia direct share ownership in PT NK being 1% and the Company's share ownership in PT NK being 99%.

The Company that receives the business, in PSAK 338 : Business Combination of Entities Under Common Control recognize the difference between the amounting to the consideration transferred and the recorded value of each business transaction of entities under common control in equity and presents it as additional paid-in capital.

In 2018, the Company through its subsidiary PPAK divested its business in the disposal of the business of entities under common control, i.e. PT Pratama Persada Airborne to PT Survai Udara Panas (Persero) and in accordance with PSAK 338 recognize the difference between the benefits received and the recorded value of the business disposed of in equity and presents the equity of its additional paid-in capital entry.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sejak Maret 2022, Perusahaan tidak lagi mengkonsolidasi PT NK sesuai PP Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan dimana Negara Republik Indonesia melakukan pengurangan penyertaan modal pada Perusahaan sebesar Rp499.997.

Jumlah yang masuk ke dalam pos tambahan modal disetor dari penerimaan bisnis PT NK sebesar Rp305.768, pelepasan bisnis PT NK sebesar Rp1.078.857 dan pelepasan bisnis PT Pratama Persada Airborne sebesar Rp2.291 sehingga saldo tambahan modal disetor menjadi sebesar Rp1.386.916.

c. Dividen dan Cadangan Umum

UU Perseroan Terbatas Republik Indonesia No. 1/1995 yang diterbitkan di bulan Maret 1995 dan telah diubah dengan Undang-Undang No. 40/2007 yang diterbitkan bulan Agustus 2007, mengharuskan pembentukan cadangan umum dari laba bersih sejumlah minimal 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut.

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan No. KPPS-47/032/DNRK yang merujuk pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan tanggal 26 Juni 2023 dan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-622/MBU/12/2023 tanggal 12 Desember 2023 tentang Persetujuan Penggunaan Laba Anak Perusahaan PT Danareksa (Persero), ditetapkan penggunaan Laba Bersih Perusahaan tahun 2022 untuk Dividen Kas sebesar Rp51.000 dan untuk Cadangan Wajib sebesar Rp129.730. Dividen telah dibayarkan pada tanggal 29 Desember 2023.

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan No. KPPS-10/DR/L&C/11/2024, yang merujuk pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan tanggal 12 Agustus 2024 dan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-594/MBU/11/2024 tanggal 18 November 2024 tentang Persetujuan Penggunaan Laba Anak Perusahaan PT Danareksa (Persero), ditetapkan penggunaan Laba Bersih Perusahaan tahun 2023 untuk Dividen Tunai sebesar Rp50.000 dan untuk Cadangan Wajib sebesar Rp275.653. Dividen telah dibayarkan pada tanggal 23 Desember 2024.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Since March 2022, the Company will no longer be able to consolidate PT NK according to PP Number 6 year 2022 concerning Reduction of the Republic of Indonesia's State Equity Participation in Companies in which the Republic of Indonesia reduces the capital participation of the Company in the amount of Rp499,997.

The amount included in the additional paid-in capital account from PT NK's business receipts amounted to Rp305,768, business disposal of PT NK amounted to Rp1,078,857 and business disposal of PT Pratama Persada Airborne amounted to Rp2,291, the total additional paid-in capital amounted to Rp1,386,916.

c. Dividend and General Reserves

Law on Limited Liability Company of the Republic of Indonesia No. 1/1995 issued in March 1995 and has been amended by the Law No. 40/2007 issued in August 2007, requires the establishment of a general reserve of net income of at least 20% of total issued and paid-in capital. There is no time limit for forming the reserve.

Based on the Company's Shareholders' Resolution No. KPPS-47/032/DNRK, which refers to the Company's Annual General Meeting of Shareholders on June 26, 2023, and the Letter from the Minister of State-Owned Enterprises No. S-622/MBU/12/2023 dated December 12, 2023, regarding the Approval for the Allocation of Net Profit of PT Danareksa (Persero)'s Subsidiaries, the allocation of the Company's 2022 Net Profit for a Cash Dividends amounting to Rp51,000 and Mandatory Reserves amounting to Rp129,730. The dividend was paid on December 29, 2023.

Based on the Company Shareholders' Resolution No. KPPS-10/DR/L&C/11/2024, referring to the Company's Annual General Meeting of Shareholders held on August 12, 2024, and the Letter from the Minister of State-Owned Enterprises No. S-594/MBU/11/2024 dated November 18, 2024, regarding the Approval for the Allocation of the Net Profit of PT Danareksa (Persero)'s Subsidiaries, the allocation of the Company's 2023 Net Profit for a Cash Dividend amounting to Rp50,000 and a Statutory Reserve amounting to Rp275,653. The dividend was paid on December 23, 2024.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

d. Saldo Laba yang Belum Ditetapkan Penggunaannya

	2024 Rp	2023 Rp
Saldo Awal	649,612	504,689
Laba Bersih	205,370	325,653
Cadangan Umum	(275,653)	(129,730)
Dividen	(50,000)	(51,000)
Saldo Akhir	529,329	649,612

d. Unappropriated Retained Earnings

Beginning Balance
Net Income
General Reserve
Dividend
Ending Balance

e. Kepentingan Non Pengendali

	2024 Rp	2023 Rp
Saldo Awal	(10)	2
Atribusi Laba Tahun Berjalan	--	(12)
Saldo Akhir	(10)	(10)

e. Non-Controlling Interest

Beginning Balance
Attribution of Income for the Period
Ending Balance

29. Pendapatan Usaha

29. Revenues

	2024 Rp	2023 Rp	
Pendapatan Usaha			Revenues
Pendapatan Hasil Investasi	772,450	710,440	Revenue from Investment
Pengelolaan NPL	664,555	659,257	NPL Management
Keuntungan atas Investasi pada Efek Ekuitas	106,357	175,429	Gain on Investment in Equity Securities
Pinjaman yang Diberikan	95,072	70,495	Investment Loans
Pendapatan Imbalan Jasa Konsultasi	16,952	24,965	Revenue from Consultation Fee
Pendapatan Penggantian Biaya	4,523	3,844	Revenue from Reimbursable Costs
Pendapatan Lain-Lain	2,695	14,884	Other's Income
Pendapatan Trading	--	13,826	Revenue from Trading
Jumlah	1,662,604	1,673,140	Total

30. Beban Usaha

30. Operating Expenses

	2024 Rp	2023 Rp	
Beban Usaha			Operating Expense
Non Performing Loan Perbankan (Sukuk)	684,909	687,162	(Sukuk) Bank Non Performing Loan
Beban Bunga	300,208	301,503	Interest Expenses
Pegawai	151,961	227,475	Employee
(Pemulihan) Penyisihan Penurunan Nilai	144,564	(50,657)	(Recovery) Allowance for Impairment
Penurunan Nilai Wajar Investasi pada Efek Ekuitas			Impairment of Fair Value of Investment Entities
(Catatan 10 dan 17)	83,912	25,077	(Note 10 and 17)
Jasa Konsultan	39,183	52,408	Consultant Fees
Keperluan Kantor	21,988	26,510	Office Supplies
Penyusutan Aset Hak Guna (Catatan 20.a)	18,546	17,828	Depreciation of Right-of-Use Assets (Note 20.a)
Sewa dan Asuransi	13,865	15,040	Rent and Insurance
Investasi	9,335	4,038	Investment
Perjalanan Dinas	5,798	7,090	Business Travelling
Imbalan Pasca Kerja - Bersih	945	7,707	Employees Benefit - Net
Amortisasi	473	857	Amortization
Penyusutan Aset Tetap (Catatan 18)	466	339	Depreciation of Fixed Asset (Note 18)
Harga Pokok Penjualan	--	13,094	Cost of Good Sold
Lain-lain (Masing-masing di bawah Rp1.000)	10,629	45,017	Others (Each Below Rp1,000)
Jumlah	1,486,782	1,380,488	Total

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

31. Beban Bunga dan Keuangan

31. Interest Expense and Financial Charge

	2024 Rp	2023 Rp	
Beban Pajak Bunga Deposito	6,321	2,493	Tax Expense on Deposit Interest
Beban Keuangan Lainnya	1,244	--	Other Interest Expenses
Beban Pajak Jasa Giro	912	8,118	Tax Expense on Current Account
Beban Administrasi	29	57	Administration Expense
Beban Transfer	10	14	Transfer Fee Expense
Jumlah	8,516	10,682	Total

32. Rugi atas Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

32. Loss of Associate and Joint Venture

	2024 Rp	2023 Rp	
Ventura Bersama			Joint Ventures
KSO PPA-Nindya (Proyek Perumahan Green Teksin)	921	1,449	KSO PPA-Nindya (Green Teksin Housing Project)
ISN - LBD - PPA	(3,639)	(3,303)	ISN - LBD - PPA
Jumlah	(2,718)	(1,854)	Total

33. Penghasilan (Beban) Lain-lain

33. Other Income (Expenses)

	2024 Rp	2023 Rp	
Pendapatan Lain-lain			Other Incomes
Selisih Kurs	5,162	--	Different Exchange Rate
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)	9,838	14,518	Others (each below Rp1.000)
Sub Jumlah	15,000	14,518	Sub Total
Beban Lain-lain			Others Expense
Selisih Kurs	--	(3,232)	Different Exchange Rate
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp1.000)	(17,800)	(16,569)	Others (each below Rp1.000)
Sub Jumlah	(17,800)	(19,801)	Sub Total
Jumlah Bersih	(2,800)	(5,283)	Net Total

34. Laba per saham

34. Earnings per Share

Laba per saham 31 Desember 2024 dan 2023 dihitung dari laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebagai berikut:

Earning per share December 31, 2024 and 2023, is calculated from income for the year attributable to owners of the parent is as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Laba dalam Rupiah penuh	205,369,981,525	325,641,922,934	Income In full of Rupiah
Jumlah Lembar Saham	6,188,835	6,110,098	Number of Shares
Laba Per Saham Dasar (Rupiah penuh)	33,184	53,295	Basic Earning per Share (In full of Rupiah)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

35. Segmen Operasi

35. Operating Segment

Berikut ini adalah informasi berdasarkan segmen operasi:

Segment information based on operating segments:

2024				
	Investasi/ <i>Investment</i>	Pembiayaan/ <i>Financing</i>	Eliminasi/ <i>Elimination</i>	Konsolidasi/ <i>Consolidation</i>
Pendapatan usaha	1,659,948	15,511	(12,855)	1,662,604
Beban Usaha	(1,474,497)	(26,086)	13,801	(1,486,782)
Laba Usaha	185,451	(10,575)	946	175,822
				<i>Revenues</i>
				<i>Operating Expenses</i>
				<i>Operating Income</i>
Pendapatan Bunga	38,156	74	--	38,230
Beban Bunga dan Keuangan	(8,516)	--	--	(8,516)
Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi	10,537	--	--	10,537
Bagian Rugi Bersih atas Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	(2,718)	--	--	(2,718)
Penghasilan (Beban) Lain-lain	(2,905)	1,051	(946)	(2,800)
Laba Sebelum Pajak	220,005	(9,450)	--	210,555
Beban Pajak Penghasilan	(6,105)	920	--	(5,185)
Laba Tahun Berjalan	213,900	(8,530)	--	205,370
				<i>Interest Income</i>
				<i>Interest Expenses and Financial Charges</i>
				<i>Increase in Fair Value of Investment Properties</i>
				<i>Share of Net Loss of Associates and Joint Ventures</i>
				<i>Other Income (Expenses)</i>
				<i>Profit Before Tax</i>
				<i>Income Tax Expense</i>
				<i>Profit for The Year</i>
Laba yang Dapat Diatribusikan Kepada				<i>Income For The Year Attributable To</i>
- Pemilik Entitas Induk	213,901	(8,531)	--	205,370
- Kepentingan Nonpengendali	--	--	--	--
Total	213,901	(8,531)	--	205,370
				<i>Owners of The Parent Entity- Non-Controlling Interests-</i>
				TOTAL
Total Aset	19,739,597	365,612	(2,638,125)	17,467,084
				<i>Total Asset</i>
Total Liabilitas	6,758,067	136,425	(660,521)	6,233,971
Total Ekuitas	12,981,530	229,187	(1,977,604)	11,233,113
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	19,739,597	365,612	(2,638,125)	17,467,084
				<i>Total Liabilities</i>
				<i>Total Equity</i>
				<i>Total Liabilities and Equity</i>
2023				
	Investasi/ <i>Investment</i>	Pembiayaan/ <i>Financing</i>	Eliminasi/ <i>Elimination</i>	Konsolidasi/ <i>Consolidation</i>
Pendapatan usaha	1,692,948	21,992	(41,800)	1,673,140
Beban Usaha	(1,408,003)	(62,394)	89,909	(1,380,488)
Laba Usaha	284,945	(40,402)	48,109	292,652
				<i>Revenues</i>
				<i>Operating Expenses</i>
				<i>Operating Income</i>
Pendapatan Bunga	52,422	140	--	52,562
Beban Bunga dan Keuangan	(10,682)	--	--	(10,682)
Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi	716	--	--	716
Bagian Rugi Bersih atas Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	(1,854)	--	--	(1,854)
Penghasilan (Beban) Lain-lain	(6,255)	49,081	(48,109)	(5,283)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	319,292	8,819	--	328,111
Beban Pajak Penghasilan	6,339	(8,809)	--	(2,470)
Laba Tahun Berjalan	325,631	10	--	325,641
				<i>Interest Income</i>
				<i>Interest and Financial Charges</i>
				<i>Increase in Fair Value of Investment Properties</i>
				<i>Share of Net Loss of Associates and Joint Ventures</i>
				<i>Other Income (Expenses)</i>
				<i>Profit Before Tax</i>
				<i>Income Tax Expense</i>
				<i>Profit for The Year</i>
Laba yang Dapat Diatribusikan Kepada				<i>Income For The Year Attributable To</i>
- Pemilik Entitas Induk	325,643	10	--	325,653
- Kepentingan Nonpengendali	(12)	--	--	(12)
Total	325,631	10	--	325,641
				<i>Owners of The Parent Entity- Non-Controlling Interests-</i>
				TOTAL
Total Aset	19,532,533	260,388	(2,419,003)	17,373,918
				<i>Total Asset</i>
Total Liabilitas	7,134,185	22,808	(441,399)	6,715,594
Total Ekuitas	12,398,348	237,580	(1,977,604)	10,658,324
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	19,532,533	260,388	(2,419,003)	17,373,918
				<i>Total Liabilities</i>
				<i>Total Equity</i>
				<i>Total Liabilities and Equity</i>

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. Perikatan dan Perjanjian

**a. PT Barata Indonesia (Persero) ("PT Barata")
Fasilitas Pembiayaan**

Pada tanggal 12 Agustus 2021, Perusahaan dan PT Barata telah menandatangani Fasilitas Pembiayaan No. PP-61/PPA/0821, sebagaimana diperbarui dengan perjanjian No. PP-18/PPA/1124 tanggal 1 November 2024. Nilai fasilitas pinjaman yang diberikan Perusahaan maksimum sebesar Rp370.310, dan jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 2029.

**b. PT PDI Pulau Batam ("Persero Batam")
Fasilitas Modal Kerja**

Pada tanggal 8 Desember 2023, Perusahaan dan Persero Batam telah menandatangani Fasilitas Pinjaman Modal Kerja No. 26, sebagaimana diperbarui dengan *Addendum III* No. 56 tanggal 26 April 2024. Nilai fasilitas pinjaman yang diberikan Perusahaan maksimum sebesar Rp9.311, dan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2025.

Fasilitas Pinjaman Talangan

Pada tanggal 3 Januari 2024, Perusahaan dan Persero Batam telah menandatangani Fasilitas Pinjaman Modal Kerja No. 4, sebagaimana diperbarui dengan *Addendum II* No. 55 tanggal 26 April 2024. Nilai fasilitas pinjaman yang diberikan Perusahaan maksimum sebesar Rp256.612 dan USD3.120.000 (nilai penuh), dan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2025.

**c. PT Boma Bisma Indra (Persero) ("PT BBI")
Secured Promissory Notes**

Pada tanggal 23 Juli 2012, Perusahaan dan PT BBI telah menandatangani Perjanjian Penerbitan *Secured Promissory Notes* ("SPN") No. 71, sebagaimana diperbarui dengan Perjanjian No. 84 tanggal 21 Desember 2018. Nilai fasilitas pinjaman yang diberikan Perusahaan maksimum sebesar Rp37.770, dan jatuh tempo pada tanggal 20 Desember 2028.

Fasilitas Modal Kerja

Pada tanggal 21 September 2021, Perusahaan dan PT BBI telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Modal Kerja No. PP-23/PPA/0921, sebagaimana diperbarui dengan *Addendum III* No. PP-42/PPA/1222 tanggal 2 Desember 2022. Nilai fasilitas pinjaman yang diberikan Perusahaan maksimum sebesar Rp44.840, dan telah jatuh tempo pada tanggal 29 Desember 2023.

36. Commitment and Agreements

**a. PT Barata Indonesia (Persero) ("PT Barata")
Financing Facility**

On August 12, 2021, the Company and PT Barata signed *Financing Facility* No. PP-61/PPA/0821, which was later renewed with Agreement No. PP-18/PPA/1124 dated November 1, 2024. The maximum loan facility provided by the Company is Rp370,310, and matures on August 11, 2029.

**b. PT PDI Pulau Batam ("Persero Batam")
Working Capital Facility**

On December 8, 2023, the Company and Persero Batam signed the *Working Capital Loan Facility* No. 26, as amended by *Addendum III* No. 56 dated April 26, 2024. The maximum loan facility provided by the Company is Rp9,311, and matures on March 31, 2025.

Bridging Loan Facility

On January 3, 2024, the Company and Persero Batam signed *Working Capital Loan Facility* No. 4, which was later amended by *Addendum II* No. 55 dated April 26, 2024. The maximum loan facility provided by the Company is Rp256,612 and USD3,120,000 (full amount), and matures on March 31, 2025.

**PT Boma Bisma Indra (Persero) ("PT BBI")
Secured Promissory Notes**

On July 23, 2012, the Company and PT BBI signed the *Secured Promissory Notes* ("SPN") Issuance Agreement No. 71, which was later renewed by Agreement No. 84 dated December 21, 2018. The maximum loan facility provided by the Company is Rp37,770, and matures on December 20, 2028.

Working Capital Facility

On September 21, 2021, the Company and PT BBI signed the *Working Capital Loan Facility* Agreement No. PP-23/PPA/0921, which was later amended by *Addendum III* No. PP-42/PPA/1222 dated December 2, 2022. The maximum loan facility provided by the Company is Rp44,840, and has matured on December 29, 2023.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian ini, perpanjangan perjanjian masih dalam proses penyelesaian.

Fasilitas Dana Talangan

Pada tanggal 13 April 2023, Perusahaan dan PT BBI telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman Dana Talangan No. PP-4/PPA/0423, sebagaimana diperbarui dengan *Addendum I* No. PP-13/PPA/0724 tanggal 11 Juli 2024. Nilai fasilitas pinjaman yang diberikan Perusahaan maksimum sebesar Rp55.000, dan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2025.

d. PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) ("PT DPS")

Fasilitas Dana Talangan

Pada tanggal 13 April 2023, Perusahaan dan PT DPS telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pembiayaan Dana Talangan No. 32/PPA/1219, sebagaimana diperbarui dengan *Addendum III* No. PP-15/PPA/0721 tanggal 15 Juli 2021. Nilai fasilitas pinjaman yang diberikan Perusahaan maksimum sebesar Rp20.800, dan telah jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2021.

Fasilitas Investasi dan Modal Kerja

Pada tanggal 11 Mei 2021, Perusahaan dan PT DPS telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Dana Talangan Investasi dan Modal Kerja No. 24, sebagaimana diperbarui dengan *Addendum V* No. PP-15/PPA/0823 tanggal 9 Agustus 2023, terdiri dari:

- *Tranche A* sebesar Rp58.445 jatuh tempo menjadi tanggal 9 Desember 2026;
- *Tranche B* sebesar Rp9.278 telah jatuh tempo pada 9 Desember 2024; dan
- *Tranche C* sebesar Rp730, jatuh tempo pada 9 Mei 2024.

Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian ini, perpanjangan perjanjian masih dalam proses penyelesaian.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

As of the authorization date of these consolidated financial statements, the extension of the agreement is still in the finalization process.

Bridging Loan Facility

On April 13, 2023, the Company and PT BBI signed the Bridging Loan Facility Agreement No. PP-4/PPA/0423, which was later amended by *Addendum I* No. PP-13/PPA/0724 dated July 11, 2024. The maximum loan facility provided by the Company is Rp55,000, and matures on January 31, 2025.

c. PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) ("PT DPS")

Bridging Loan Facility

On April 13, 2023, the Company and PT DPS signed the Bridging Loan Financing Facility Agreement No. 32/PPA/1219, which was later amended by *Addendum III* No. PP-15/PPA/0721 dated July 15, 2021. The maximum loan facility provided by the Company is Rp20,800, and has matured on December 31, 2021.

Investment and Working Capital Facilities

On May 11, 2021, the Company and PT DPS signed the Investment and Working Capital Bridging Facility Agreement No. 24, as amended by *Addendum V* No. PP-15/PPA/0823 dated August 9, 2023, consisting of:

- *Tranche A* of Rp58,445 due on December 9, 2026;
- *Tranche B* of Rp9,278 has matured on December 9, 2024; and
- *Tranche C* of Rp730 due on May 9, 2024.

As of the authorization date of these consolidated financial statements, the extension of the agreement is still in the finalization process.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

e. Perum Percetakan Negara Republik Indonesia ("Perum PNRI")

Dana Talangan I

Pada tanggal 11 Oktober 2022, Perusahaan dan Perum PNRI telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman No. 04, sebagaimana diperbarui dengan *Addendum III No. 101* tanggal 24 Desember 2024. Nilai fasilitas pinjaman yang diberikan Perusahaan maksimum sebesar Rp57.802, dan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2025.

Dana Talangan II

Pada tanggal 23 Juni 2023, Perusahaan dan Perum PNRI telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman II No. 08, sebagaimana diperbarui dengan *Addendum I No. 102* tanggal 24 Desember 2024. Nilai fasilitas pinjaman yang diberikan Perusahaan maksimum sebesar Rp11.517, dan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2025.

f. PT Dirgantara Indonesia (Persero) ("PT DI")
Fasilitas Pembiayaan Korporasi

Pada tanggal 18 Agustus 2011, Perusahaan dan PT DI telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Korporasi No. 55, sebagaimana diperbarui dengan *Addendum XIII No. PP-2/PPA/0224* tanggal 19 Februari 2024, dengan total nilai fasilitas menjadi Rp675.000 dan telah jatuh tempo pada 29 Desember 2024.

Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian ini, perpanjangan perjanjian masih dalam proses penyelesaian.

g. PT PAL Indonesia ("PT PAL")
Fasilitas Pinjaman Dana Talangan

Pada tanggal 16 Desember 2009, Perusahaan dan PT PAL telah menandatangani Perjanjian Pemberian Pinjaman Korporasi No. 12, sebagaimana diperbarui dengan Perjanjian No. 47 tanggal 30 Desember 2015, dengan total maksimum menjadi Rp245.048 dan jatuh tempo pada 31 Desember 2030.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

d. Perum Percetakan Negara Republik Indonesia ("Perum PNRI")

Bridging Loan I

On October 11, 2022, the Company and Perum PNRI signed the Loan Facility Agreement No. 04, as amended by *Addendum III No. 101* dated December 24, 2024. The maximum loan facility provided by the Company is Rp57,802, and matures on December 23, 2025.

Bridging Loan II

On June 23, 2023, the Company and Perum PNRI signed the Loan Facility Agreement II No. 08, as amended by *Addendum I No. 102* dated December 24, 2024. The maximum loan facility provided by the Company is Rp11,517, and matures on December 23, 2025.

e. PT Dirgantara Indonesia (Persero) ("PT DI")
Corporate Finance Facility

On August 18, 2011, the Company and PT DI signed the Corporate Financing Agreement No. 55, as amended by *Addendum XIII No. PP-2/PPA/0224* dated February 19, 2024, with a total facility value of Rp675,000 and has matured on December 29, 2024.

As of the authorization date of these consolidated financial statements, the extension of the agreement is still in the finalization process.

f. PT PAL Indonesia ("PT PAL")
Bridging Loan Facility

On December 16, 2009, the Company and PT PAL signed the Corporate Loan Agreement No. 12, as amended by *Agreement No. 47* dated December 30, 2015, with a maximum total of Rp245,048 and matures on December 31, 2030.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**h. PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
("PT IKI")**

Pinjaman Restrukturisasi dan Revitalisasi

Pada tanggal 7 Agustus 2012, Perusahaan dan PT IKI telah menandatangani Perjanjian Pemberian Pinjaman No. 12, sebagaimana diperbarui dengan Perjanjian No. PP-13/PPA/0723 tanggal 25 Juli 2023, dengan total maksimum fasilitas pinjaman Rp37.561 dan jatuh tempo pada 31 Desember 2028.

**i. PT Amartha Karya (Persero)
("PT AMKA")**

Pada tanggal 3 Desember 2024, Perusahaan dan PT AMKA telah menandatangani Perjanjian Pinjaman Pinjaman No. 15, dengan total maksimum fasilitas pinjaman Rp5.114 dan jatuh tempo pada 2 Desember 2025.

j. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan Badan Pengelola Keuangan Haji ("BPKH")

Berdasarkan Akta Perjanjian Induk Restrukturisasi/*Master Restructuring Agreement* No. 30 tanggal 9 September 2021 ("MRA"), Perusahaan, PT BMI, dan BPKH ("Para Pihak") sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka pengelolaan aset tagihan milik PT BMI ("Tagihan BMI") dengan melaksanakan serangkaian transaksi dan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perusahaan akan menerbitkan Sukuk PPA yang akan dialihkan kepada BMI. Sukuk PPA dialihkan dengan nilai nominal Rp13.051.069, jangka waktu 20 tahun dan jatuh tempo tanggal 15 November 2041 (Catatan 27);
- b. PT BMI melakukan transaksi jual beli dan pengalihan Tagihan BMI senilai Rp10.000.000 kepada pembeli tagihan yang disepakati oleh Para Pihak;
- c. Para Pihak sepakat dalam rangka mengelola Tagihan BMI akan ada suatu perjanjian kerja sama pengelolaan aset;
- d. PT BMI akan menerbitkan Sukuk BMI yang akan dialihkan kepada Perusahaan. Sukuk BMI dialihkan dengan nilai nominal Rp15.041.101, jangka waktu 20 tahun dan jatuh tempo tanggal 15 November 2041 (Catatan 27);
- e. Sebagai penerbit Sukuk, maka Perusahaan dan PT BMI dapat mengaplikasikan perjumpaan utang atas hak tagih pada tanggal jatuh tempo sukuk dan/atau tanggal pengakhiran awal dari perjanjian kerja sama pengelolaan aset.

**g. PT Industri Kapal Indonesia (Persero)
("PT IKI")**

Restructuring and Revitalizing Loan

On August 7, 2012, the Company and PT IKI signed the Loan Agreement No. 12, as amended by Agreement No. PP-13/PPA/0723 dated July 25, 2023, with a maximum total loan facility of Rp37,561 and matures on December 31, 2028.

**h. PT Amartha Karya (Persero)
("PT AMKA")**

On December 3, 2024, the Company and PT AMKA signed the Loan Facility Agreement No. 15, with a maximum total loan facility of Rp5,114 and matures on December 2, 2025.

i. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan Badan Pengelola Keuangan Haji ("BPKH")

According to Master Restructuring Agreement Deed No. 30 dated September 9, 2021 ("MRA"), The Company, PT BMI, and BPKH ("Parties") have agreed to cooperate in the management of PT BMI claimed asset ("BMI Claims") by carrying out a series of transactions and terms as follow:

- a. The Company will issue Sukuk PPA which will be transferred to PT BMI. The Sukuk PPA will have a nominal value of Rp13,051,069, term of 20 years, and maturity date on November 15, 2041 (Note 27).
- b. PT BMI will carry out a sales and purchase transactions and transfer of PT BMI amounted to Rp10,000,000 to the agreed Claim Buyer;
- c. The Parties agreed that to manage the BMI Claim there will be an asset management cooperation agreement;
- d. PT BMI will issue Sukuk BMI which will be transferred to The Company. The Sukuk BMI will have a nominal value of Rp15,041,101, term of 20 years, and maturity date on November 15, 2041 (Note 27);
- e. As the issuer of the Sukuk, the Company and PT BMI may apply the meeting of debt and claiming rights at the date of maturity or the early termination date of the asset management cooperation agreement.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

k. PT AMC Indonesia Sukses ("PT AMC")

Dalam rangka melaksanakan arahan MRA, Perusahaan, BMI, dan PT AMC telah menandatangani Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Aset No 25 tanggal 15 November 2021 ("PKPA") dalam rangka optimalisasi pengelolaan Tagihan BMI yang dialihkan kepada PT AMC.

Pada tanggal 16 Desember 2022, dilakukan *Addendum* PKPA, dengan perubahan ketentuan sebagai berikut:

- i. Jangka waktu PKPA adalah 6 (enam) tahun sejak tanggal PKPA dan dapat diperpanjang PT AMC atas diskresinya sendiri;
- ii. PT AMC akan melakukan peninjauan atas kinerja Perusahaan berdasarkan Laporan Triwulan *Asset Manager*;
- iii. Perusahaan dapat merekomendasikan perwakilannya dalam Komite Pengelola untuk disetujui oleh PT AMC; dan
- iv. Keputusan Komite Pengelola dan pelaksanaannya perlu mendapatkan persetujuan dari PT AMC.

l. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank BTN")

Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Piutang
Berdasarkan Akta Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Piutang No. 105 tanggal 28 Desember 2018 dari Notaris Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., Perusahaan dan Bank BTN melakukan kerjasama pengelolaan piutang eks KPR Bank BTN. Dalam penyelesaian transaksi aset yang dialihkan tersebut, mekanisme yang dilakukan yaitu:

- Melakukan eksekusi aset yang merupakan jaminan atas piutang sesuai dengan Perjanjian Kredit;
- Menjual aset yang dijaminan tersebut kepada pihak ketiga; dan
- Menerima pelunasan dari Debitur.

Berdasarkan *Addendum* V No. 30 tanggal 27 September 2023, dilakukan perpanjangan atas Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Piutang menjadi sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Berdasarkan Akta No. 06 tanggal 13 Januari 2025, dilakukan Perubahan Menyeluruh dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Piutang, dengan jangka waktu perjanjian sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

j. PT AMC Indonesia Sukses ("PT AMC")

In relation to carry out the directives of MRA, The Company, BMI, and PT AMC have agreed to sign the Deed of Asset Management Cooperation Agreement No. 25 dated November 15, 2021 ("PKPA") in order to optimally manage the BMI Claims transferred to PT AMC.

On December 16, 2022, an Addendum to the PKPA was made, with the following amended provisions:

- i. The terms of the PKPA is 6 (six) years since the date of the PKPA and can be extended by the discretion of PT AMC;*
- ii. PT AMC will monitor the performance of the Company based on the Asset Manager Three Months Reports;*
- iii. The Company may recommend their representative in the Management Committee to be approved by PT AMC; and*
- iv. The decision of the Management Committee and the implementation require the approval of PT AMC.*

k. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk ("Bank BTN")

Receivables Management Agreement
Based on the Cooperation Agreement for Receivables Management Deed No. 105 dated December 28, 2018 from Notary Ashoya Ratam, S.H., M.Kn., the Company and Bank BTN entered into a cooperation agreement for the management of receivables from Bank BTN's former KPR. In the settlement of the transferred asset transaction, the following mechanisms are used:

- *Execute the assets constituting the collateral for receivables in accordance with the Credit Agreement;*
- *Sell the collateral assets to the third parties; and*
- *Receive the settlement from the Debtor.*

Based on Addendum V No. 30 date September 27, 2023, the Receivables Management Cooperation Agreement was extended until December 31, 2023.

Based on Deed No. 06 dated January 13, 2025, a Comprehensive Amendment and Restatement of the Receivables Management Cooperation Agreement was made, with the agreement period lasting until December 31, 2025.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

37. Manajemen Risiko Keuangan

a. Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan

Dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan, Grup menghadapi risiko finansial yang utamanya terkait risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko pasar. Risiko-risiko tersebut didefinisikan sebagai berikut:

- Risiko kredit: risiko yang timbul karena ketidakmampuan debitur atau pihak lawan untuk membayar kewajiban jatuh tempo, sehingga Grup akan mengalami kerugian.
- Risiko pasar: risiko kerugian yang terjadi karena adanya fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar, terutama suku bunga dan nilai tukar.

Pedoman utama dari kebijakan ini adalah sebagai berikut:

- Menetapkan rasio jaminan terhadap pinjaman debitur 130%;
- Menetapkan diversifikasi sektor industri;
- Menetapkan daftar negatif investasi; dan
- Menetapkan maksimal penempatan dana pada satu pihak.

Tersedia kebijakan, prosedur, pedoman serta tata kerja yang memadai dan menyeluruh untuk menjaga kelangsungan operasi Grup.

Risiko Kredit

Risiko kredit timbul akibat kegagalan pihak lawan untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian keuangan kepada Grup. Risiko kredit Grup terutama melekat pada kas dan setara kas, piutang yang timbul dari kegiatan investasi dan restrukturisasi dan/atau revitalisasi BUMN, dan instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar. Tabel berikut menyajikan jumlah eksposur maksimum risiko kredit atas aset keuangan:

37. Financial Risk Management

a. Financial Risk Management Policies

In its operating, investing and financing activities, the Group is exposed to financial risks which mainly related to credit risk, liquidity risk and market risk. Those risks are defined as follows:

- *Credit risk: the risk that occurs due to debtor or counterparty's failure to pay its maturing obligations, hence the Group will incur loss.*
- *Market risk: the risk of losses that occurs due to fluctuation in the value of financial instrument as a result of changes in market price, mainly due to movements in interest rates and exchange rates.*

The major guidelines of this policy are the following:

- *Determine the collateral ratio for debtor's loans of 130%;*
- *Determine the diversification of the industrial sector;*
- *Establish a negative list of investments; and*
- *Determine the maximum placement of funds on one party.*

Adequate and comprehensive policies, procedures, guidelines and work procedures are in place to maintain the continuity of the Group's operations.

Credit Risks

Credit risk arises due to counterparties's failure to fulfill their contractual obligations that result in financial losses to the Group. The Group's credit risk is primarily inherent in cash and cash equivalents, receivables arising from investing activities and restructuring and/or revitalization of SOEs, and financial assets measured at fair value. The following table presents the maximum amount of exposure to credit risk on financial assets:

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2024					
	Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ <i>Unimpaired in Value</i>	Mengalami Penurunan Nilai/ <i>Impair in Value</i>	Jumlah/ <i>Total</i>		
Aset Keuangan				Financial Asset	
Kas dan Setara Kas	1,151,197	--	1,151,197	Cash and Cash Equivalents	
Pinjaman Investasi Jangka Pendek	574,466	400,556	975,022	Short-Term Investment Loans	
Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar				Financial Assets Measured at Fair Value	
melalui Laba Rugi	1,153,646	--	1,153,646	Through Profit or Loss	
Piutang Usaha	851,592	239,126	1,090,718	Accounts Receivable	
Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan	920,037	163,975	1,084,012	Loans Receivable - Bailout	
Cessie Piutang Jangka Pendek	78,128	225,488	303,616	Short-Term Cessie Receivable	
Aset Lancar Lainnya	650,757	4,105	654,862	Other Current Assets	
Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar				Financial Assets Measured at Fair Value	
melalui Penghasilan Komprehensif Lain				Through Other Comprehensive Income	
Jangka Panjang	8,317,327	--	8,317,327	Long-term Portion	
Investasi pada Sukuk	272,494	--	272,494	Investment in Sukuk	
Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi				Loans Receivable - Restructuring	
dan/atau Revitalisasi - Pihak Berelasi	530,595	338,376	868,971	and/or Revitalization - Related Parties	
Pinjaman Investasi Jangka Panjang	1,218,885	602,496	1,821,381	Long-Term Investment Loans	
Cessie Piutang Jangka Panjang	301,749	78,177	379,926	Long-Term Cessie Receivable	
Jumlah	16,020,873	2,052,299	18,073,172	Total	

2023					
	Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ <i>Unimpaired in Value</i>	Mengalami Penurunan Nilai/ <i>Impair in Value</i>	Jumlah/ <i>Total</i>		
Aset Keuangan				Financial Asset	
Kas dan Setara Kas	1,056,936	--	1,056,936	Cash and Cash Equivalents	
Pinjaman Investasi Jangka Pendek	675,114	373,904	1,049,018	Short-Term Investment Loans	
Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan				Financial Assets Measured at	
Diamortisasi	4,840	--	4,840	Amortised Cost	
Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar				Financial Assets Measured at Fair Value	
melalui Laba Rugi	1,098,394	--	1,098,394	Through Profit or Loss	
Piutang Usaha	925,306	206,401	1,131,707	Accounts Receivable	
Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan	625,144	148,222	773,366	Loans Receivable - Bailout	
Cessie Piutang Jangka Pendek	53,475	223,262	276,737	Short-Term Cessie Receivable	
Aset Lancar Lainnya	26,232	4,004	30,236	Other Current Assets	
Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar				Financial Assets Measured at Fair Value	
melalui Penghasilan Komprehensif Lain	7,879,550	--	7,879,550	Through Other Comprehensive Income	
Investasi pada Sukuk	499,100	--	499,100	Investment in Sukuk	
Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi				Loans Receivable - Restructuring	
dan/atau Revitalisasi - Pihak Berelasi	535,080	347,889	882,969	and/or Revitalization - Related Parties	
Pinjaman Investasi Jangka Panjang	1,555,236	514,869	2,070,105	Long-Term Investment Loans	
Cessie Piutang Jangka Panjang	297,504	80,459	377,963	Long-Term Cessie Receivable	
Aset Tidak Lancar Lainnya	702,515	--	702,515	Other Non-Current Assets	
Jumlah	15,934,426	1,899,010	17,833,436	Total	

Kualitas Aset Keuangan

Grup mengelola risiko kredit terkait dengan penempatan dana pada bank-bank bereputasi baik dengan peringkat layak investasi untuk mengurangi kemungkinan kerugian akibat kebangkrutan bank.

Terkait kegiatan investasi seperti pembiayaan dan pembelian surat utang, pengelolaan risiko kredit dilakukan dengan cara, antara lain namun tidak terbatas pada:

- Melakukan *due diligence* dan kajian mengenai kelayakan suatu pembiayaan/investasi (antara lain aspek komersial, keuangan, hukum) sebelum membuat keputusan investasi;

Quality Of Financial Assets

The Group manages credit risk associated with placement of funds in reputable banks with investment grade ratings to reduce the possibility of losses due to bank bankruptcy.

Regarding investment activities such as loans and debt purchase, the credit risk management is carried out by, including but not limited to:

- Conducting *due diligence* and feasibility study of a loan/investment (e.g. aspects of commercial, financial, and legal) before making an investment decision;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- Memantau dan mengevaluasi kinerja debitur/proyek/penerbit surat utang untuk memastikan pemenuhan persyaratan/kondisi yang diatur dalam perjanjian;
- Memperkuat proteksi struktural dalam setiap skema pembiayaan, seperti: *cash waterfall*, kewenangan untuk mengontrol, jaminan dan penjaminan;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kinerja setiap investasi secara aktif sehingga dapat dilakukan tindakan antisipasi secara dini apabila terjadi penurunan kinerja investasi; dan
- Melakukan upaya penagihan secara intensif agar pembayaran kewajiban sesuai perjanjian yang telah disepakati.

Kualitas kredit dari aset keuangan baik yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dapat dinilai dengan mengacu pada peringkat kredit eksternal (jika tersedia) atau mengacu pada informasi historis mengenai tingkat gagal bayar debitur. Peringkat menggunakan lembaga kredit eksternal yaitu PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) dan PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch).

- *Monitoring and evaluating the performance of debtor/project/debt issuer to ensure compliance against terms/ condition stipulated in the agreement;*
- *Strengthening structural protection in each financing scheme, such as: cash waterfall, control of authority, collateral and collateral;*
- *Actively monitoring and evaluating the performance of each investment thus early anticipatory action can be taken in the event of any potential decline in the investment performance; and*
- *Conducting intensive collection efforts hence repayment of obligations aligns with the agreed agreement.*

The credit quality of financial assets that are neither past due nor impaired can be assessed by reference to external credit ratings (if available) or to historical information about counterparty default rates. Credit ratings are obtained from external credit rating agencies, namely PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) and PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch).

	2024 Rp	2023 Rp	
Kas dan Bank			Cash and Banks
Kas			Cash
Tanpa Peringkat	8	39	Without Rating
Bank			Bank
Pihak Berelasi			Related Parties
Dengan Pihak yang Memiliki Peringkat Kredit Eksternal			Counterparty With External Credit Rating
AAA	27,272	1,037,364	AAA
Subjumlah	27,272	1,037,364	Subtotal
Pihak Ketiga			Third Parties
Dengan Pihak yang Memiliki Peringkat Kredit Eksternal			Counterparty With External Credit Rating
AAA	176	854	AAA
AA-	6	49	AA-
A	129	37	A
AA	49	4	AA
BBB+	3	39	BBB+
A+	--	130	A+
Subjumlah	363	1,113	Subtotal
Deposito Berjangka			Time Deposit
Pihak Berelasi			Bank Related Parties
Dengan Pihak yang Memiliki Peringkat Kredit Eksternal			Counterparty With External Credit Rating
AAA	961,469	15,000	AAA
Subjumlah	961,469	15,000	Subtotal
Pihak Ketiga			Bank Third Parties
Dengan Pihak yang Memiliki Peringkat Kredit Eksternal			Counterparty With External Credit Rating
AAA	38,100	3,420	AAA
BBB+	35,448	--	BBB+
AA-	89,000	--	AA-
Subjumlah	162,548	3,420	Subtotal
Dikurangi Kerugian Kredit Ekspektasian	(463)	--	Less : Expected Credit Loss
Total Kas dan Setara Kas	1,151,197	1,056,936	Total Cash and Cash Equivalents

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Risiko Likuiditas

Tabel berikut menganalisis liabilitas keuangan berdasarkan sisa umur jatuh temponya dari tanggal laporan posisi keuangan:

	2024					
	Kurang dari 3 Bulan/ Less than 3 Months	3-12 Bulan/ Months	1 - 5 Tahun/ Years	Lebih dari 5 Tahun/ More than 5 Years	Jumlah/ Total	
Liabilitas Keuangan						Financial Liabilities
<u>Diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>						<u>Measured at amortised cost</u>
Pinjaman Bank	11.964	1.367.431	349.598	--	1.728.993	Bank Loans
Utang Sukuk	--	--	--	5.948.653	5.948.653	Sukuk Liabilities
Surat Berharga Komersial	199.408	--	--	--	199.408	Commercial Paper
Utang Obligasi	--	1.235.063	987.378	--	2.222.441	Bonds Payable
Jumlah	211.372	2.602.494	1.336.976	5.948.653	10.099.495	Total

	2023					
	Kurang dari 3 Bulan/ Less than 3 Months	3-12 Bulan/ Months	1 - 5 Tahun/ Years	Lebih dari 5 Tahun/ More than 5 Years	Jumlah/ Total	
Liabilitas Keuangan						Financial Liabilities
<u>Diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>						<u>Measured at amortised cost</u>
Pinjaman Bank	110.000	1.636.995	349.598	--	2.096.593	Bank Loans
Utang Sukuk	--	--	--	5.360.985	5.360.985	Sukuk Liabilities
Surat Berharga Komersial	--	--	--	--	--	Commercial Paper
Utang Obligasi	--	--	2.224.300	--	2.224.300	Bonds Payable
Jumlah	110.000	1.636.995	2.573.898	5.360.985	9.681.878	Total

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar mata uang asing terjadi apabila Grup memiliki posisi mata uang asing yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dengan debitur. Mitigasi risiko atas posisi mata uang asing ini antara lain dengan menerapkan lindung nilai secara alami, dimana pemberian pembiayaan dalam mata uang asing menggunakan sumber dana dalam mata uang asing yang sama. Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap perubahan yang mungkin terjadi dalam nilai tukar mata uang Dolar Amerika Serikat pada denominasi aset dan liabilitas Grup, dengan semua variabel lainnya dianggap tetap:

	Kenaikan (Penurunan) Dalam Mata Uang Asing Dalam Basis Poin/ Increase (Decrease) In Currency in Basis Points	Dampak Terhadap Laba Sebelum Pajak/ Effect on Income Before Tax	
31 Desember 2024	+ 100 - 100	734 (734)	December 31, 2024
31 Desember 2023	+ 100 - 100	688 (688)	December 31, 2023

Foreign Exchange Risk

Foreign exchange rate risk occurs if the Group has a foreign currency position arising from transactions in foreign currencies with debtors. The mitigation of risk on foreign currency positions, is through the establishment of a natural hedging policy, namely the provision of financing in foreign currency using sources of funds in foreign currencies as well. The following table shows the sensitivity to possible changes in the United States Dollar exchange rate of the Group denominated assets and liabilities, with all other variables held constant:

Tabel berikut menunjukkan instrumen keuangan Grup dalam mata uang asing:

The following table shows the financial instruments of the Group in foreign currency:

	2024		2023		
	Nilai Penuh/ Full Amount (USD)	Setara Rupiah/ Rupiah Equivalent	Nilai Penuh/ Full Amount (USD)	Setara Rupiah/ Rupiah Equivalent	
Aset Keuangan					Financial Asset
Kas dan Setara Kas	152,621	2,466,655,591	277,881	4,283,810,104	Cash and Cash Equivalents
Cessie Piutang Jangka Pendek	1,693,908	27,376,938,897	--	--	Short-Term Cessie Receivable
Cessie Piutang Jangka Panjang	21,073,032	340,582,343,690	21,965,393	338,618,499,766	Long-Term Cessie Receivable
Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain	2,402,557	38,830,130,784	2,434,525	37,530,633,546	Financial Assets Measured at Fair Value Other Comprehensive Income
Aset Lancar Lainnya	2,889,792	46,704,817,051	2,920,945	45,029,291,974	Other Current Asset
Total	28,211,910	455,960,886,013	27,598,744	425,462,235,390	Total
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Pinjaman Bank Jangka Pendek	20,722,315	334,914,056,485	20,722,315	319,455,208,040	Short-Term Bank Loans
Total	20,722,315	334,914,056,485	20,722,315	319,455,208,040	Total

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Risiko Suku Bunga Pasar

Risiko suku bunga arus kas adalah risiko arus kas di masa datang atas instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Nilai wajar risiko suku bunga adalah risiko nilai wajar instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Secara umum risiko suku bunga yang dihadapi Grup relatif kecil karena sebagian besar suku bunga sumber dana Grup dalam bentuk suku bunga tetap.

Aset atau liabilitas keuangan yang terpengaruh risiko suku bunga pasar adalah penerimaan pinjaman oleh Grup.

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, manajemen memperkirakan bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan jangka pendek dan yang jatuh temponya tidak ditentukan telah mencerminkan nilai wajarnya.

Investasi saham pada PT Indosat Tbk, PT Bank KB Bukopin Tbk dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk merupakan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (Catatan 11) dengan menggunakan informasi yang diperoleh dari harga di pasar aktif (Tingkat 1).

Investasi saham pada PT Arta Integrasi Teknologi, PT Socfin Indonesia, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri, dan PT Kawasan Industri Lampung, PT Bondi Syad Mulia, dan PT National Utility Helicopters merupakan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (Catatan 10, 11, 14 dan 16) (Tingkat 2).

Investasi saham pada Property Indonesia Fund VCC, SOE Wijayakusuma Fund VCC, PT Pratama Persada Airborne, PT Magnesium Gosari Internasional, PT Matoa Kidung Bahtera, PT Matoa Kidung Samudera, PT Rejeki Intilogam Jaya, PT Duta Mentari Raya, PT SIPPA Kemasan Internasional, Ventura Bersama PPAK Rumah Cerdas merupakan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan penghasilan komprehensif lain (Catatan 10, 11, 14 dan 16) (Tingkat 3).

Pendekatan nilai aset bersih

Grup menggunakan nilai tercatat aset bersih pada perusahaan investasi dalam menentukan nilai investasi mereka. Investasi yang dinilai dengan menggunakan pendekatan ini, umumnya hanya berlaku untuk entitas (entitas dimana Grup melakukan investasi) yang memiliki pos-pos dalam laporan keuangan dimana nilai tercatatnya mendekati nilai wajar.

Interest Rate Risk

Cash flow interest rate risk is the risk that future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The fair value of interest rate risk is the risk that the fair value of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. In general, the interest rate risk faced by the Group is relatively small because most of its funding sources are in the form of fixed-rate interest.

Financial assets or liabilities that are subject to market interest rate risk are the receipt of loans by the Group.

b. Fair Value of Financial Instrument

As of December 31, 2024 and 2023, management estimates that the carrying value of short-term financial assets and liabilities and those which undetermined maturities have reflected their fair value.

Investment in shares in PT Indosat Tbk, PT Bank KB Bukopin Tbk and PT Waskita Karya (Persero) Tbk represent financial assets measured at the fair value through other comprehensive income (Note 11) based on price in an active market (Level 1).

Investment in shares of PT Arta Integrasi Teknologi, PT Socfin Indonesia, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri, PT Kawasan Industri Lampung, PT Bondi Syad Mulia, and PT National Utility Helicopters are financial assets measured at fair value through profit or loss and other comprehensive income (Notes 10, 11, 14, and 16) (Level 2).

Investment in shares of Property Indonesia Fund VCC, SOE Wijayakusuma Fund VCC, PT Pratama Persada Airborne, PT Magnesium Gosari Internasional, PT Matoa Kidung Bahtera, PT Matoa Kidung Samudera, PT Rejeki Intilogam Jaya, PT Duta Mentari Raya, PT SIPPA Kemasan Internasional, and Ventura Bersama PPAK Rumah Cerdas are financial assets measured at fair value through profit or loss and other comprehensive income (Notes 10, 11, 14, and 16) (Level 3).

Net assets approach

The value of the Group's investments determined by using net assets investment of the investment entities. Investments that are calculated using this approach, only applied to entities (entities in which the Group invests) that have items in the financial statements where the carrying amount approximates fair value.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

38. Manajemen Permodalan

Tujuan Grup dalam mengelola permodalan adalah untuk menjaga kelangsungan usaha Grup untuk dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada *stakeholder* lainnya, dan memelihara optimalisasi struktur permodalan.

Dalam rangka memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, imbal hasil modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru untuk mengurangi pinjaman.

38. Capital Management

The objectives of the Group when managing capital are to ensure the Group's ability to continue as a going concern in order to provide returns to Shareholders and benefits for other stakeholders, and to maintain an optimal capital structure.

In order to maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the amount of dividends paid to Shareholders, return capital to Shareholders or issue new shares to reduce debt.

	2024 Rp	2023 Rp	
Manajemen Permodalan			Capital Management
Total Liabilitas	6,233,971	6,715,594	Total Liability
Dikurangi : Kas dan Setara Kas	1,151,197	1,056,936	Less: Cash and Cash Equivalent
Utang Neto	5,082,774	5,658,658	Net Debt
Total Ekuitas	11,233,113	10,658,324	Total Equity
Rasio Utang terhadap Modal	0.45	0.53	Debt to Equity Ratio

39. Rekonsiliasi Liabilitas dari Aktivitas Pendanaan

Tabel di bawah ini menunjukkan rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, sebagai berikut:

39. Reconciliation of Liability arising from Financing Activities

The table below sets out a reconciliation of liabilities arising from financing activities for the period ended December 31, 2024 and 2023, as follows:

	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Financing Cash Flows			Transaksi Non Kas/ Non Cash Transactions			31 Des. 2024/ Dec. 31, 2024 Rp	
	1 Jan. 2024/ Jan. 1, 2024 Rp	Penambahan/ Additional	Pembayaran/ Payment	Amortisasi/ Amortization	Penambahan/ Additional	Selisih Kurs/ Foreign Exchange	Lain-Lain/ Others	
Pinjaman Bank	2,096,593	1,113,062	(1,496,121)	--	--	15,459	--	1,728,993
Pinjaman Lainnya - Pihak Berelasi	30,925	--	(30,925)	--	--	--	--	--
Utang Sukuk	5,360,985	--	--	587,666	--	--	--	5,948,653
Surat Berharga Komersial	--	185,604	--	13,804	--	--	--	199,408
Utang Obligasi	2,220,911	--	--	1,530	--	--	--	2,222,441
Liabilitas Sewa	32,876	--	(29,125)	--	65,455	--	(14,900)	54,306
	9,742,290	1,298,666	(1,556,171)	603,002	65,455	15,459	(14,900)	10,153,801

	Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan/ Financing Cash Flows			Transaksi Non Kas/ Non Cash Transactions			31 Des. 2023/ Dec. 31, 2023 Rp	
	1 Jan. 2023/ Jan. 1, 2023 Rp	Penambahan/ Additional	Pembayaran/ Payment	Amortisasi/ Amortization	Penambahan/ Additional	Selisih Kurs/ Foreign Exchange	Lain-Lain/ Others	
Pinjaman Bank	1,861,668	1,425,313	(1,183,472)	--	--	(6,916)	--	2,096,593
Pinjaman Lainnya - Pihak Berelasi	--	30,925	--	--	--	--	--	30,925
Utang Sukuk	4,773,319	--	--	587,666	--	--	--	5,360,985
Surat Berharga Komersial	224,422	--	(240,000)	15,578	--	--	--	--
Utang Obligasi	2,319,311	--	(100,000)	1,600	--	--	--	2,220,911
Utang Promissory Notes	200,000	--	(200,000)	--	--	--	--	--
Utang Repo	256,096	--	(268,228)	12,132	--	--	--	--
Liabilitas Sewa	27,022	--	(20,242)	--	25,524	--	572	32,876
	9,661,838	1,466,238	(2,011,942)	616,976	25,524	(6,916)	572	9,742,290

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

40. Saldo dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

40. Related Parties Balance and Transactions

Pengungkapan saldo dan transaksi signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Disclosure of significant balance and transactions with related parties are as follows:

Pihak-pihak Berelasi/ Related Parties	Hubungan/ Relationship	Jenis Transaksi/ Type of Transactions
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Kas dan Setara Kas/Cash and Cash Equivalents
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Kas dan Setara Kas, Piutang Usaha, Pendapatan Usaha/Cash and Cash Equivalents, Account Receivable, Revenues
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Kas dan Setara Kas, Piutang Usaha, Bagian Jangka Pendek dari Pinjaman Bank Jangka Panjang, Pinjaman Bank Jangka Pendek, Pinjaman Bank Jangka Panjang, Pendapatan Usaha/Cash and Cash Equivalents, Account Receivable, Current Maturities of Long Term Bank Loans, Short-Term Bank Loans, Long-Term Bank Loans
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Kas dan Setara Kas, Piutang Usaha, Pinjaman Bank Jangka Pendek, Pendapatan Usaha/Cash and Cash Equivalents, Account Receivable,
Perum Jasa Tirta I	Dikendalikan oleh Pemegang Saham/Controlled by the Shareholders	Pendapatan Usaha/Revenues
Perum Jasa Tirta II	Dikendalikan oleh Pemegang Saham/Controlled by the Shareholders	Pendapatan Usaha/Revenues
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pendapatan Usaha/Revenues
PT Danareksa Capital	Dikendalikan oleh Pemegang Saham/Controlled by the Shareholders	Pendapatan Usaha/Revenues
PT Jalin Pembayaran Nusantara	Dikendalikan oleh Pemegang Saham/Controlled by the Shareholders	Pendapatan Usaha/Revenues
PT Jasa Marga (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pendapatan Usaha/Revenues
PT Kawasan Berikat Nusantara	Dikendalikan oleh Pemegang Saham/Controlled by the Shareholders	Pendapatan Usaha/Revenues
PT Kawasan Industri Makassar	Dikendalikan oleh Pemegang Saham/Controlled by the Shareholders	Pendapatan Usaha/Revenues
PT Kawasan Industri Medan	Dikendalikan oleh Pemegang Saham/Controlled by the Shareholders	Pendapatan Usaha/Revenues
PT Kawasan Industri Wijayakusuma	Dikendalikan oleh Pemegang Saham/Controlled by the Shareholders	Pendapatan Usaha/Revenues
PT Kliring Berjangka Indonesia	Dikendalikan oleh Pemegang Saham/Controlled by the Shareholders	Pendapatan Usaha/Revenues
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pendapatan Usaha/Revenues
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pendapatan Usaha/Revenues
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pendapatan Usaha/Revenues
PT Pupuk Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pendapatan Usaha/Revenues
PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	Dikendalikan oleh Pemegang Saham/Controlled by the Shareholders	Pendapatan Usaha/Revenues
PT Taspen (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/Controlled by the Government of the Republic of Indonesia	Pendapatan Usaha/Revenues

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pihak-pihak Berelasi/ <i>Related Parties</i>	Hubungan/ <i>Relationship</i>	Jenis Transaksi/ <i>Type of Transactions</i>
PT Telekomunikasi Selular	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Government of Indonesia Related Entity</i>	Pendapatan Usaha/ <i>Revenues</i>
PT Wijaya Karya Realty	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Government of Indonesia Related Entity</i>	Pendapatan Usaha/ <i>Revenues</i>
PT Yodya Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pendapatan Usaha/ <i>Revenues</i>
PT Bondi Syad Mulia	Entitas Anak yang Tidak Dikonsolidasi/ <i>Unconsolidated Subsidiary</i>	Pinjaman Investasi Jangka Panjang, Pendapatan Usaha/ <i>Long-Term Investment Loans, Revenues</i>
PT Citilink Indonesia	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Government of Indonesia Related Entity</i>	Pinjaman Investasi Jangka Panjang, Pendapatan Usaha/ <i>Long-Term Investment Loans, Revenues</i>
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman Investasi Jangka Panjang, Pendapatan Usaha/ <i>Long-Term Investment Loans, Revenues</i>
PT Artha Bangun Pratama	Ventura Bersama/ <i>Joint Ventures</i>	Pinjaman Investasi Jangka Pendek/ <i>Short-Term Investment Loans</i>
PT Varuna Tirta Prakasya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman Investasi Jangka Pendek/ <i>Short-Term Investment Loans</i>
Perum Perumnas	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman Investasi Jangka Pendek, Pendapatan Usaha/ <i>Short-Term Investment Loans, Revenues</i>
PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman Investasi Jangka Pendek, Pendapatan Usaha/ <i>Short-Term Investment Loans, Revenues</i>
PT Industri Kereta Api (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan, Pendapatan Usaha/ <i>Loans Receivable - Bailout, Revenues</i>
PT Indah Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan, Pendapatan Usaha/ <i>Loans Receivable - Bailout, Revenues</i>
PT PDI Pulau Batam (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan, Pendapatan Usaha/ <i>Loans Receivable - Bailout, Revenues</i>
PT Primmisima (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan, Pendapatan Usaha/ <i>Loans Receivable - Bailout, Revenues</i>
PT Dirgantara Indonesia	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Government of Indonesia Related Entity</i>	Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi/ <i>Loans Receivable - Restructuring and/or Revitalization</i>
PT PAL Indonesia	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Government of Indonesia Related Entity</i>	Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi, Pendapatan Usaha/ <i>Loans Receivable - Restructuring and/or Revitalization, Revenues</i>
Kementerian Keuangan	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Government of Indonesia Related Entity</i>	Piutang Usaha/ <i>Account Receivables</i>
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Government of Indonesia Related Entity</i>	Piutang Usaha/ <i>Account Receivables</i>
Perum DAMRI	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha dan Pendapatan Usaha/ <i>Account Receivables, Revenues</i>
PT Asuransi Jasa Indonesia	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Government of Indonesia Related Entity</i>	Piutang Usaha/ <i>Account Receivables</i>
PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha/ <i>Account Receivables</i>
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha/ <i>Account Receivables</i>
PT Perkebunan Mitra Ogan	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Government of Indonesia Related Entity</i>	Piutang Usaha/ <i>Account Receivables</i>
PT Sang Hyang Seri	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Government of Indonesia Related Entity</i>	Piutang Usaha/ <i>Account Receivables</i>
PT Semen Kupang (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha/ <i>Account Receivables</i>

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pihak-pihak Berelasi/ <i>Related Parties</i>	Hubungan/ <i>Relationship</i>	Jenis Transaksi/ <i>Type of Transactions</i>
PT Waskita Karya (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha/ <i>Account Receivables</i>
Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha, Pendapatan Usaha/ <i>Account Receivables, Revenues</i>
PT BRI Danareksa Sekuritas	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Government of Indonesia Related Entity</i>	Piutang Usaha, Pendapatan Usaha/ <i>Account Receivables, Revenues</i>
PT Danareksa (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha, Pendapatan Usaha/ <i>Account Receivables, Revenues</i>
PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	Dikendalikan oleh Pemegang Saham/ <i>Controlled by the Shareholders</i>	Piutang Usaha, Pendapatan Usaha/ <i>Account Receivables, Revenues</i>
PT Krakatau Sarana Infrastruktur	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Government of Indonesia Related Entity</i>	Piutang Usaha, Pendapatan Usaha/ <i>Account Receivables, Revenues</i>
PT Merpati Maintenance Facility	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Government of Indonesia Related Entity</i>	Piutang Usaha, Pendapatan Usaha/ <i>Account Receivables, Revenues</i>
PT Nindya Beton	Entitas Asosiasi/ <i>Associate</i>	Piutang Usaha, Pendapatan Usaha/ <i>Account Receivables, Revenues</i>
PT Nindya Karya	Dikendalikan oleh Pemegang Saham/ <i>Controlled by the Shareholders</i>	Piutang Usaha, Pendapatan Usaha/ <i>Account Receivables, Revenues</i>
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha, Pendapatan Usaha/ <i>Account Receivables, Revenues</i>
PT Perikanan Indonesia	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Government of Indonesia Related Entity</i>	Piutang Usaha, Pendapatan Usaha/ <i>Account Receivables, Revenues</i>
PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha, Pendapatan Usaha/ <i>Account Receivables, Revenues</i>
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha, Pendapatan Usaha/ <i>Account Receivables, Revenues</i>
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha, Pendapatan Usaha/ <i>Account Receivables, Revenues</i>
PT Matoa Kidung Bahtera	Entitas Anak yang Tidak Dikonsolidasi/ <i>Unconsolidated Subsidiary</i>	Piutang Usaha, Pinjaman Investasi Jangka Panjang, Pendapatan Usaha/ <i>Account Receivables, Long-Term Investment Loans, Revenues</i>
PT Matoa Kidung Samudera	Entitas Anak yang Tidak Dikonsolidasi/ <i>Unconsolidated Subsidiary</i>	Piutang Usaha, Pinjaman Investasi Jangka Panjang, Pendapatan Usaha/ <i>Account Receivables, Long-Term Investment Loans, Revenues</i>
PT National Utility Helicopters	Entitas Asosiasi/ <i>Associate</i>	Piutang Usaha, Pinjaman Investasi Jangka Panjang, Pendapatan Usaha/ <i>Account Receivables, Long-Term Investment Loans, Revenues</i>
PT Rejeki Intilogam Jaya	Entitas Anak yang Tidak Dikonsolidasi/ <i>Unconsolidated Subsidiary</i>	Piutang Usaha, Pinjaman Investasi Jangka Panjang, Pendapatan Usaha/ <i>Account Receivables, Long-Term Investment Loans, Revenues</i>
PT Sippa Kemasan Internasional	Entitas Anak yang Tidak Dikonsolidasi/ <i>Unconsolidated Subsidiary</i>	Piutang Usaha, Pinjaman Investasi Jangka Panjang, Pendapatan Usaha/ <i>Account Receivables, Long-Term Investment Loans, Revenues</i>
PT Duta Mentari Raya	Entitas Anak yang Tidak Dikonsolidasi/ <i>Unconsolidated Subsidiary</i>	Piutang Usaha, Pinjaman Investasi Jangka Panjang, Pendapatan Usaha/ <i>Account Receivables, Long-Term Investment Loans, Revenues</i>
PT Energy Management Indonesia	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Government of Indonesia Related Entity</i>	Piutang Usaha, Pinjaman Investasi Jangka Panjang, Pendapatan Usaha/ <i>Account Receivables, Long-Term Investment Loans, Revenues</i>
PT Pratama Persada Airborne	Entitas Anak yang Tidak Dikonsolidasi/ <i>Unconsolidated Subsidiary</i>	Piutang Usaha, Pinjaman Investasi Jangka Panjang, Pendapatan Usaha/ <i>Account Receivables, Long-Term Investment Loans, Revenues</i>
PT Magnesium Gosari Internasional	Entitas Anak yang Tidak Dikonsolidasi/ <i>Unconsolidated Subsidiary</i>	Piutang Usaha, Pinjaman Investasi Jangka Pendek, Pinjaman Investasi Jangka Panjang, Pendapatan Usaha/ <i>Account Receivables, Short-Term Investment Loans, Long-Term Investment Loans, Revenues</i>
PT Barata Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha, Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan, Cessie Piutang Jangka Panjang, Pendapatan Usaha/ <i>Account Receivables, Loans Receivable - Bailout, Long-Term Cessie Receivables, Revenues</i>
PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha, Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan, Cessie Piutang Jangka Panjang, Pendapatan Usaha/ <i>Account Receivables, Loans Receivable - Bailout, Long-Term Cessie Receivables, Revenues</i>
Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha, Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan, Pendapatan Usaha/ <i>Account Receivables, Loans Receivable - Bailout, Revenues</i>
PT Borna Bisma Indra (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha, Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan, Pendapatan Usaha/ <i>Account Receivables, Loans Receivable - Bailout, Revenues</i>

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Pihak-pihak Berelasi/ <i>Related Parties</i>	Hubungan/ <i>Relationship</i>	Jenis Transaksi/ <i>Type of Transactions</i>
PT Djakarta Lloyd (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha, Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan, Pendapatan Usaha/ <i>Account Receivables, Loans Receivable - Bailout, Revenues</i>
PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha, Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan, Pendapatan Usaha/ <i>Account Receivables, Loans Receivable - Bailout, Revenues</i>
PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha, Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan, Pinjaman Investasi Jangka Pendek, Pinjaman Investasi Jangka Panjang, Pendapatan Usaha/ <i>Account Receivables, Loans Receivables - Bailouts, Short-Term Investment Loans, Long-Term Investment Loans, Revenues</i>
PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha, Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi, Pinjaman Investasi Jangka Pendek, Pinjaman Investasi Jangka Panjang, Pendapatan Usaha/ <i>Account Receivables, Loan Receivables - Restructuring and/or Revitalization, Short-Term Investment Loan, Long-Term Investment Loans, Revenues</i>
PT Aviast Pariwisata Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha, Utang Lain-Lain, Pendapatan Usaha/ <i>Account Receivables, Other Receivables, Revenues</i>
PT Pos Indonesia (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Piutang Usaha, Pendapatan Usaha/ <i>Account Receivables, Revenues</i>
PT Amarta Karya (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan, Pendapatan Usaha/ <i>Loans Receivables - Bailouts, Revenues</i>
PT Indofarma (Persero)	Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ <i>Controlled by the Government of the Republic of Indonesia</i>	Pendapatan Usaha/ <i>Revenues</i>
PT AMC Korea Jaya	Entitas Asosiasi/ <i>Associate</i>	Pendapatan Usaha/ <i>Revenues</i>
PT Telekomunikasi Indonesia	Entitas Asosiasi/ <i>Associate</i>	Pendapatan Usaha/ <i>Revenues</i>

	Catatan/ <i>Notes</i>	2024 <i>Rp</i>	2023 <i>Rp</i>	2024 <i>%</i>	2023 <i>%</i>	
Aset						Asset
Kas dan Setara Kas	3	988,741	1,052,364	5.66%	6.06%	Cash and Cash Equivalents
Pinjaman Investasi Jangka Pendek	4	294,766	330,994	1.69%	1.91%	Short-Term Investment Loans
Piutang Usaha	5	172,091	137,976	0.99%	0.79%	Accounts Receivable
Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan	6	920,037	625,144	5.27%	3.60%	Loans Receivable - Bailout
Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi dan/atau Revitalisasi	12	530,595	535,080	3.04%	3.08%	Loans Receivable - Restructuring
Pinjaman Investasi Jangka Panjang	15	1,162,006	1,499,816	6.65%	8.63%	Restructuring and/or Revitalization
Cessie Piutang Jangka Panjang	19	39,344	39,344	0.23%	0.23%	Long-Term Investment Loans
						Long-Term Cessie Receivable
Liabilitas						Liabilities
Pinjaman Bank Jangka Pendek	22	812,557	844,284	13.03%	12.57%	Short-Term Bank Loan
Bagian Jangka Pendek dari Pinjaman Bank Jangka Panjang	22	--	4,000	0.00%	0.06%	Current Maturities of Long-Term Bank Loans
Beban Akruai dan Utang Lain-lain	24	--	30,925	0.00%	0.46%	Accruals and Other Payables
Pinjaman Bank Jangka Panjang	22	349,598	345,598	5.61%	5.15%	Long-Term Bank Loans
Pendapatan Usaha						Revenues
Pendapatan Usaha		386,280	337,245	23.23%	20.16%	Revenues

Persentase di atas merupakan perbandingan dengan jumlah aset, jumlah liabilitas, dan jumlah pendapatan.

Transaksi-transaksi pihak berelasi dilakukan dengan ketentuan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi yang wajar.

The percentage above is a comparison with total assets, total liabilities and total revenue.

Related party transactions are carried out on terms equivalent to those applicable in a normal transaction.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

41. Transaksi Non Kas

Sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023,
Grup memiliki transaksi non kas sebagai berikut:

	2024 Rp	2023 Rp
Aktivitas Investasi yang tidak mempengaruhi arus kas:		
Penambahan nilai aset melalui hasil revaluasi dan kenaikan nilai wajar properti investasi (Catatan 13)	10,537	716
Perolehan properti investasi melalui utang usaha dan utang lain-lain	--	4,978
Penambahan Aset Hak-Guna melalui Liabilitas Sewa (Catatan 20)	65,455	25,524

41. Non Cash Transaction

Up until December 31, 2024 and 2023, the
Group had non-cash transactions is as follows:

	2024 Rp	2023 Rp
Non Cash investing activities:		
Addition of value of assets through revaluation and increase in fair value of investment properties (Note 13)	10,537	716
Addition of investment property through accounts payable and other payable	--	4,978
Addition of Right-of-Use Assets through Lease Liabilities (Note 20)	65,455	25,524

42. Standar Akuntansi dan Interpretasi Standar yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing tentang kekurangan ketertukaran.
- PSAK 117: Kontrak Asuransi; dan
- Amendemen PSAK 117: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 – Informasi Komparatif.

Beberapa PSAK juga diamendemen yang merupakan amendemen konsekuensial karena berlakunya PSAK 117: Kontrak Asuransi, yaitu:

- PSAK 103: Kombinasi Bisnis;
- PSAK 105: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan;
- PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan;
- PSAK 109: Instrumen Keuangan;
- PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK 207: Laporan Arus Kas;
- PSAK 216: Aset Tetap;
- PSAK 219: Imbalan Kerja;
- PSAK 228: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 232: Instrumen Keuangan Penyajian;
- PSAK 236: Penurunan Nilai Aset;
- PSAK 237: Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi;

42. New Accounting Standards and Interpretation of Standards which Has Issued but Not Yet Effective

New standard and amendment to standard which effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption is permitted, are as follows:

- Amendments PSAK 221: Foreign Exchange Rate regarding lack of exchangeability.
- PSAK 117: Insurance Contract; and
- Amendments PSAK 117: Insurance Contract regarding Initial Application of PSAK 117 and PSAK 109 – Comparative Information.

Several PSAKs were also amended which were consequential amendments due to the enactment of PSAK 117: Insurance Contracts, as follows:

- PSAK 103: Business Combinations;
- PSAK 105: Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations;
- PSAK 107: Financial Instruments: Disclosures;
- PSAK 109: Financial Instruments;
- PSAK 115: Income from Contracts with Customers;
- PSAK 201: Presentation of Financial Statements;
- PSAK 207: Statement of Cash Flows;
- PSAK 216: Fixed Assets;
- PSAK 219: Employee Benefits;
- PSAK 228: Investment in Associated Entities and Joint Ventures;
- PSAK 232: Financial Instruments: Presentation;
- PSAK 236: Impairment of Asset;
- PSAK 237: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets;

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- PSAK 238: Aset Takberwujud; dan
- PSAK 240: Properti Investasi.

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, Perusahaan masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru dan amendemen atas standar tersebut.

43. Tanggung Jawab Manajemen atas Laporan Keuangan

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian yang diotorisasi Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2025.

44. Informasi Keuangan Tambahan

Informasi keuangan Perusahaan (entitas induk) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut (secara kolektif yang disebut sebagai "Informasi Keuangan Entitas"), yang disajikan sebagai informasi tambahan terhadap laporan keuangan konsolidasian terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

**PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

For the Years Ended
As of December 31, 2024 and 2023
(In Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

- PSAK 238: Intangible Assets; and
- PSAK 240: Investment Property.

Until the date of the financial statements is authorized, the Group is still evaluating the potential impact of the implementation of those new standard and amendments to standards.

43. Management Responsibility on the Financial Statements

The Management of the Company is responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements which are authorized by Directors for issuance on March 24, 2025.

44. Supplementary Financial Information

The accompanying financial information of the Company (parent entity), which comprises the statement of financial position as of December 31, 2024 and the statement of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the period then ended (collectively referred to as the "Parent Entity Financial Information"), which is presented as a supplementary information to the accompanying consolidated financial statements, is presented for the purposes of additional analysis and is not a required part of the accompanying consolidated financial statements under Indonesian Financial Accounting Standards.

LAMPIRAN I

APPENDIX I

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
LAPORAN POSISI KEUANGAN
INDUK PERUSAHAAN

Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
PARENT COMPANY

As of December 31, 2024 and 2023
(In Million of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024 Rp	2023 Rp	
ASET			ASSETS
ASET LANCAR			CURRENT ASSETS
Kas dan Setara Kas	1,131,676	1,042,230	Cash and Cash Equivalents
Pinjaman Investasi Jangka Pendek			Short-Term Investment Loans
- Pihak Berelasi	403,841	553,467	Related Parties -
- Pihak Ketiga	274,434	338,834	Third Parties -
Aset Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan			Financial Assets Measured at
Diamortisasi	--	4,840	Amortised Cost
Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar			Financial Assets Measured at Fair Value
melalui Laba Rugi	1,153,646	1,098,394	Through Profit or Loss
Piutang Usaha			Accounts Receivable
- Pihak Berelasi	55,321	82,173	Related Parties -
- Pihak Ketiga	18,730	40,730	Third Parties -
Piutang Anak Perusahaan	9,636	9,124	Subsidiaries Receivable
Pinjaman yang Diberikan - Dana Talangan			Loans Receivable - Bailout
- Pihak Berelasi	920,037	625,144	Related Parties -
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka	6,437	7,470	Advances and Prepaid Expenses
Pajak Dibayar di Muka	97,130	98,807	Prepaid Taxes
Cessie Piutang Jangka Pendek	78,128	53,475	Short-Term Cessie Receivable
Aset Lancar Lainnya	650,828	24,092	Other Current Assets
Jumlah Aset Lancar	4,799,844	3,978,780	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR			NON-CURRENT ASSETS
Aset Keuangan yang Diukur pada Nilai Wajar			Financial Assets Measured at Fair Value
melalui Penghasilan Komprehensif Lain	10,040,504	9,602,727	Through Other Comprehensive Income
Pinjaman yang Diberikan - Restrukturisasi			Loans Receivable - Restructuring
dan/atau Revitalisasi - Pihak Berelasi	530,595	535,080	and/or Revitalization - Related Parties
Properti Investasi	466,214	455,677	Investment Properties
Aset Pajak Tangguhan	16,550	23,561	Deferred Tax Assets
Investasi pada Ventura Bersama dan Entitas Asosiasi	75,274	81,992	Investments in Joint Ventures and Associates
Investasi Jangka Panjang - Entitas Anak	249,998	249,998	Long Term Investments-Subsidiary
Pinjaman Investasi Jangka Panjang	1,442,372	1,551,667	Long-Term Investment Loans
Piutang Lain-lain	12,156	13,452	Other Receivables
Aset Tetap	2,599	2,683	Fixed Assets
Cessie Piutang Jangka Panjang	262,405	258,160	Long-Term Cessie Receivable
Aset Hak-Guna	69,576	38,357	Right-of-Use Assets
Aset Tidak Lancar Lainnya	14,660	714,732	Other Non-Current Assets
Jumlah Aset Tidak Lancar	13,182,903	13,528,086	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET	17,982,747	17,506,866	TOTAL ASSETS

LAMPIRAN I

APPENDIX I

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
LAPORAN POSISI KEUANGAN
INDUK PERUSAHAAN

Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
PARENT COMPANY

As of December 31, 2024 and 2023
(In Million of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024 Rp	2023 Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS			LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK			CURRENT LIABILITIES
Utang Usaha			Accounts Payable
- Pihak Ketiga	11,280	9,994	Third Parties -
Pinjaman Bank Jangka Pendek			Short-Term Bank Loan
- Pihak Berelasi	812,557	844,284	Related Parties -
- Pihak Ketiga	566,838	902,711	Third Parties -
Utang Surat Berharga Komersial	199,408	--	Commercial Paper
Utang Obligasi yang Akan Jatuh Tempo			Bonds Payable due
Dalam Satu Tahun	1,235,063	--	Within One Year
Utang Pembiayaan	99,075	--	Lease Payable
Utang Pajak	6,035	9,938	Taxes Payable
Bagian Jangka Pendek dari Liabilitas Sewa	19,771	12,518	Current Portion of Lease Liabilities
Beban Akrua dan Utang Lain-lain	427,854	445,665	Accruals and Other Payables
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	3,377,881	2,225,110	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG			NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas Imbalan Kerja	20,046	22,237	Employee Benefit Liabilities
Utang Obligasi	987,378	2,220,911	Bonds Payable
Liabilitas Sewa	34,535	20,358	Lease Liabilities
Utang Sukuk-Neto	1,512,758	1,555,103	Sukuk Payables-Net
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	2,554,717	3,818,609	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS	5,932,598	6,043,719	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS			EQUITY
Modal Saham - Nilai Nominal Seri A Dwiwarna			Share Capital Dwiwarna Serie A -
Rp1.000.000 per saham (nilai penuh),			Rp1,000,000 par value per share (full amount),
Nilai Nominal Seri B - Rp916.004 per saham			Serie B - Rp916.004 par value per share
(nilai penuh) per 31 Desember 2024 dan 2023			(full amount) as of December 31, 2024 and 2023
Modal Dasar - 1 Saham Seri A Dwiwarna			Authorized Capital - 1 share of Dwiwarna Serie A
dan 22.000.000 saham Seri B			and 22,000,000 shares of Serie B,
per 31 Desember 2024 dan 2023			as of December 31, 2024 and 2023
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh -			Subscribed and Fully Paid Capital -
1 Saham Seri A Dwiwarna			1 share of Dwiwarna Serie A
dan 6.188.834 saham Seri B			and 6,188,834 seri B Share
per 31 Desember 2024 dan 2023	5,668,998	5,668,998	as of December 31, 2024 and 2023
Saldo Laba			Retained Earnings
- Telah Ditentukan Penggunaannya	819,199	543,546	Appropriated -
- Belum Ditentukan Penggunaannya	263,383	371,316	Unappropriated -
Laba Belum Direalisasi dari Aset Keuangan			Unrealized Gain on Financial Assets Measured
yang Diukur pada Nilai Wajar Melalui			at Fair Value Through
Penghasilan Komprehensif Lain	5,281,655	4,862,946	Other Comprehensive Income
Keuntungan (Kerugian) Aktuarial Atas			Actuarial Gain (Loss) on
Kewajiban Imbalan Pascakerja - Bersih	16,914	16,341	Post Employment Benefit Liability - Net
JUMLAH EKUITAS	12,050,149	11,463,147	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	17,982,747	17,506,866	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

LAMPIRAN II

APPENDIX II

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
LAPORAN LABA RUGI DAN
DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
INDUK PERUSAHAAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
PARENT COMPANY

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Million of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024 Rp	2023 Rp	
PENDAPATAN USAHA	1,589,129	1,669,591	REVENUES
BEBAN USAHA	(1,395,128)	(1,259,480)	OPERATING EXPENSE
LABA USAHA	194,001	410,111	OPERATING INCOME
Pendapatan Bunga	38,066	52,275	Interest Income
Beban Bunga dan Keuangan	(8,517)	(10,682)	Interest Expense and Financial Charge
Kenaikan Nilai Wajar atas Properti Investasi	10,537	716	Increase in Fair Value of Investment Property
Bagian Rugi Bersih atas Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama	(2,718)	(1,854)	Share of Net Loss of Associates and Joint Ventures
Penghasilan (Beban) Lain-lain	(8,799)	(8,567)	Other Income (Expenses)
LABA SEBELUM PAJAK	224,570	441,999	PROFIT BEFORE TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(6,850)	5,470	INCOME TAX EXPENSE
LABA TAHUN BERJALAN	217,720	447,469	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN			OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			Item that will not be reclassified to profit or loss
Perubahan Nilai Wajar Aset Keuangan yang Diukur Nilai Wajar Melalui Penghasilan Komprehensif Lain	418,709	2,474,520	Changes in The Fair Value of Financial Assets at Fair Value Through Other Comprehensive Income
Pengukuran Kembali Imbalan Pascakerja	735	2,026	Remeasurements of Post Employment Benefit
Pajak Penghasilan Terkait	(162)	(447)	Related Income Tax
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain	419,282	2,476,099	Total Other Comprehensive Income
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	637,002	2,923,568	COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR

LAMPIRAN III

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
INDUK PERUSAHAAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

APPENDIX III

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
PARENT COMPANY

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Million of Rupiah, unless otherwise stated)

	Modal Saham/ Capital Stock	Aset Keuangan yang diukur pada Nilai Wajar melalui Penghasilan Komprehensif Lain/ Financial Assets Measured at Fair Value Through Other Comprehensive Income	Keuntungan (Kerugian) Aktuarial atas Liabilitas Imbalan Pascakerja - Bersih/ Actuarial Gain (Loss) Employee Benefit - Net	Saldo Laba/Retained Earnings		Jumlah Ekuitas/ Total Equity
				Telah Ditetapkan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditetapkan Penggunaannya/ Unappropriated	
				Rp	Rp	Rp
Saldo Per 31 Desember 2022	5,452,627	2,388,426	14,762	413,817	104,577	8,374,209
Penambahan Penyertaan Modal Pemegang Saham	216,370	--	--	--	--	216,370
Kapitalisasi Saldo Laba	1	--	--	(1)	--	--
Cadangan Umum	--	--	--	129,730	(129,730)	--
Dividen	--	--	--	--	(51,000)	(51,000)
Laba Tahun Berjalan	--	--	--	--	447,469	447,469
Penghasilan Komprehensif Lain	--	2,474,520	1,579	--	--	2,476,099
Saldo Per 31 Desember 2023	5,668,998	4,862,946	16,341	543,546	371,316	11,463,147
Laba Tahun Berjalan	--	--	--	--	217,720	217,720
Dividen	--	--	--	--	(50,000)	(50,000)
Cadangan Umum	--	--	--	275,653	(275,653)	--
Penghasilan Komprehensif Lain	--	418,709	573	--	--	419,282
Saldo Per 31 Desember 2024	5,668,998	5,281,655	16,914	819,199	263,383	12,050,149

Balance as of December 31, 2022

Addition from Shareholder Capital Injection

Capitalization of Retained Earnings

General Reserve

Dividend

Profit for The Year

Other Comprehensive Income

Balance as of December 31, 2023

Profit for The Year

Dividend

General Reserve

Other Comprehensive Income

Balance as of December 31, 2024

LAMPIRAN IV

APPENDIX IV

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
LAPORAN ARUS KAS
INDUK PERUSAHAAN

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
STATEMENTS OF CASHFLOWS
PARENT COMPANY

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In Million of Rupiah, unless otherwise stated)

	2024 Rp	2023 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Kas dari Pelanggan	452,156	613,347	Cash Receipts from Customers
Penerimaan Restitusi Pajak	31,920	31,395	Cash Receipts from Tax Refund
Pembayaran Kepada Pemasok dan Pihak Ketiga	(238,227)	(299,776)	Cash Paid to Suppliers and Third Parties
Pembayaran Beban Bunga	(418,238)	(425,456)	Payment of Interest Expense
Pembayaran Pajak	(67,002)	(78,778)	Tax Paid
Penerimaan Dividen	395,468	285,552	Dividend Receipts
Penerimaan Lainnya	102,556	87,685	Other Receipts
Arus Kas Bersih Diperoleh dari			Net Cash Flow Provided by
Aktivitas Operasi	258,633	213,969	Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan Investasi	788,407	417,117	Proceeds from Investment
Pengeluaran Investasi	(782,271)	(207,821)	Disbursement for Investment
Penerimaan Pinjaman yang Diberikan	832,477	1,300,126	Proceeds from Investment Loans
Pengeluaran Pinjaman yang Diberikan	(800,764)	(1,746,035)	Disbursement for Investment Loans
Pengurangan Investasi pada Ventura Bersama	4,000	--	Reduction of Investment in Joint Venture
Perolehan Aset Tetap	(332)	(178)	Acquisition of Fixed Asset
Perolehan Properti Investasi	--	(2,736)	Acquisition of Investment Properties
Arus Kas Bersih Diperoleh dari			Net Cash Flow Provided by
(Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	41,517	(239,527)	(Used in) Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan Pinjaman Bank	1,113,062	1,425,313	Proceeds from Bank Borrowings
Pembayaran Pinjaman Bank	(1,496,121)	(1,183,472)	Repayments of Bank Borrowings
Penerimaan Penerbitan Surat Utang	185,604	--	Proceeds from Issuance of Debt Securities
Pembayaran Penerbitan Surat Utang	--	(540,000)	Repayments of Debt Securities
Pembayaran Liabilitas Sewa	(29,125)	(20,242)	Repayment of Lease Liabilities
Pembayaran Dividen	(50,000)	(51,000)	Dividend Payment
Penerimaan Utang Pembiayaan	97,265	--	Payment for related
Penerimaan Setoran Modal	--	216,371	Proceeds from Capital Injection
Pembayaran Utang Repo	--	(268,228)	Repo Debt Payment
Penerimaan Pinjaman Lainnya	--	30,925	Receipts from Other Loan
Pembayaran Pinjaman Lainnya	(30,925)	--	Payment of Other Loan
Arus Kas Bersih Digunakan untuk			Net Cash Flow Used in
Aktivitas Pendanaan	(210,240)	(390,333)	Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH			NET INCREASE (DECREASE) IN
KAS DAN SETARA KAS	89,910	(415,891)	CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS			CASH AND CASH EQUIVALENTS
AWAL TAHUN	1,042,230	1,458,121	AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS			CASH AND CASH EQUIVALENTS
AKHIR TAHUN	1,132,140	1,042,230	AT END OF YEAR
Rekonsiliasi Jumlah Kas dan Setara Kas			Reconciliation of Total Cash and Cash Equivalents
Jumlah Yang Dilaporkan Pada Laporan Arus Kas	1,132,140	1,042,230	Amount As Reported in Statement of Cash Flows
Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai	(464)	--	Allowance for Impairment Losses
Jumlah Yang Dilaporkan Pada			Amount As Reported in
Laporan Posisi Keuangan	1,131,676	1,042,230	Statement of Financial Position

REVIVING ASSETS, MAXIMIZING POTENTIAL

REVITALISASI ASET, MEMAKSIMALKAN POTENSI



www.ptppa.com



Menara Danareksa Lantai 17
Jl. Medan Merdeka Selatan No.14
Jakarta 10110, Indonesia

Telp. (+62-21) 5798 - 2222
Fax. (+62-21) 5798 - 2233